

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 251 /KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 juni 2025

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 188.45/251 /KUM/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

1. Dinas Pendidikan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025–2029 umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Rencana Kerja tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada Renja periode 2025 juga direncanakan program kegiatan berkesinambungan sesuai dengan yang dirumuskan pada Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 disusun sebagai dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun

anggaran 2025 serta digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 sekaligus perwujudan program Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dokumen ini berkedudukan sebagai perencanaan induk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya yang mengatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah dan dokumen Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dikarenakan dokumen perubahan RKPD merupakan himpunan dari seluruh dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan RENJA K/L serta perubahan RENJA Provinsi/ Kabupaten/ Kota menandakan bahwa adanya perubahan arah kebijakan yang menjadi dasar analisis dalam melakukan reviu 3 RENSTRA Perangkat Daerah demi menjaga keterkaitan kebijakan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah dengan instansi vertikal di atasnya. Menanggapi hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menyusun Perubahan RAPBD sebagai bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa

perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan). Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak pada penyesuaian anggaran serta target yang telah tersusun sebelumnya. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan pada realisasi kinerja serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Perubahan dilakukan pada Penyesuaian perubahan anggaran beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Penyesuaian perubahan Renja Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Penyesuaian ini pun dilakukan untuk menyikapi adanya hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan tujuan perubahan guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

Dengan adanya beberapa kebijakan di atas, maka disusunlah dokumen Perubahan RENJA tahun 2025 ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Kemendagri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran, Klafisikasi, kodefikasi dn nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar (Nomor 4 Tahun 2021) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar;
22. Peraturan Bupati banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;-
24. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan Penyesuaian perubahan anggaran beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan seluruh komponen Dinas Pendidikan yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang PAUD Nonformal/Kesetaraan, Bidang Sarana Prasarana, serta Sekretariat yang sesuai dengan evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan tujuan perubahan guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Menjabarkan secara operasional tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja , proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja-SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025.

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.5 Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD;
- 2.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

3.1 Perubahan Indikator Kinerja;

- 3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan;
- 3.3 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- 3.4 Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan tidak sesuai dengan kebutuhan;
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pendidikan pada tahun 2025 memiliki anggaran untuk menjalankan/melaksanakan empat (4) Program, Tiga Belas (13) Kegiatan dan seratus tigapuluh delapan(138) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 673.595.600.942.-. Realisasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 128.272.899.456.- atau dengan capaian 19,04 % .

Adapun Hasil Capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I ;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sampai Triwulan I telah mencapai 66,67 % dari target 67,67 %;
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 17 %;
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;

- d. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- e. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- f. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I telah mencapai 12,5 % dari target 13,87 %;
- g. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sampai Triwulan I telah mencapai 20 % dari target 24,99 %;
- h. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Penuntasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 22 % dari target 26,16 %;
- i. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 20 % dari target 25,1 %;
- j. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 23 % dari target 24,2 %;
- k. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sampai Triwulan I telah mencapai 30 % dari target 42 %;

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 23 %;
- m. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 23 %;
- n. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sampai Triwulan I telah mencapai 20 % dari target 32 %;
2. Realisasi **Program Pendidikan** yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I ;
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 13 %;
 - b. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15,2 %;
 - c. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 15,2 % dari target 15 %;
 - d. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan I telah mencapai 10,5 % dari target 17,5 %;
 - e. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 8 % dari target 13 %;

- f. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 3,5 % dari target 15 %;
- g. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 1 % dari target 3,5 %;
- h. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 35 % dari target 39 %;
- i. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- j. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- k. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- l. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- m. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- n. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan

Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 5 %;

- o. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan II telah mencapai 6 % dari target 7 %;
- p. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 13 %;
- q. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 12 %;
- r. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- s. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0% dari target 0 %;
- t. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- u. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- v. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;

- w. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- x. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- y. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- z. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 8,5 % dari target 15,5 %;
- aa. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- bb. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 14,87 % dari target 42,56 %;
- cc. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 51,5 % dari target 52,5 %;
- dd. Program Pendidikan Anak Usia Dini Sub Kegiatan Pengembangan Kionten digital untuk Pendidikan Sampai Triwulan 1 telah mencapai 97 % dari target 100 %.
- ee. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;

- ff. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- gg. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7,5 %;
- hh. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0,5 %;
- ii. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
- jj. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 100 %;
- kk. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 55 %;
- ll. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 10 %;
- mm. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 95,71 % dari target 100 %;
- nn. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang

Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;

- oo. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 16,5 % dari target 5 %;
- pp. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sampai Triwulan I telah mencapai 0% dari target 0%;
- qq. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0,5 %;
- rr. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0,5 %;
- ss. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 0,15 % dari target 7 %;
- tt. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0,5 %;
- uu. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0,5 %;
- vv. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 43,84 %;

3. Realisasi **Program Pengembangan Kurikulum** yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I ;
 - a. Program Pengembangan Kurikulum Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 0 %;
4. Realisasi **Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan** yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I ;
 - a. Program Pendidikan dan Tena Kependidikan Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 80 % dari target 92 %;
 - b. Program Pendidikan dan Tena Kependidikan Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 80 % dari target 90 %;

2.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 100 % dari target 100 %;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sampai Triwulan I telah mencapai 21 % dari target 21 %;

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sampai Triwulan I telah mencapai 26 % dari target 26 %;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sampai Triwulan I telah mencapai 26 % dari target 26 %;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sampai Triwulan I telah mencapai 32 % dari target 32 %;
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sampai Triwulan I telah mencapai 36 % dari target 36 %;
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sampai Triwulan I telah mencapai 38 % dari target 38 %;
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sampai Triwulan I telah mencapai 26 % dari target 26 %;
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sampai Triwulan I telah mencapai 26 % dari target 26 %;

- j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sampai Triwulan I telah mencapai 37 % dari target 37 %;
- k. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pendidikan Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 52,5 % dari target 52,5 %;
- l. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 6 % dari target 6 %;
- m. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 10 %;
- n. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 10 %;
- o. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 5 %;
- p. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 35 % dari target 35 %;
- q. Program Pendidikan SD Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 30 % dari target 30 %;
- r. Program Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 10 %;

- s. Program Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- t. Program Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- u. Program Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir Sampai Triwulan I telah mencapai 8 % dari target 8 %;
- v. Program Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7 %;
- w. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 8 % dari target 8 %;
- x. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- y. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 12 % dari target 12 %;
- z. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 12 % dari target 12 %;
- aa. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7 %;

- bb. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7 %;
- cc. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 5 %;
- dd. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan I telah mencapai 23 % dari target 23 %;
- ee. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 26 % dari target 26 %;
- ff. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- gg. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sampai Triwulan I telah mencapai 100 % dari target 100 %;
- hh. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- ii. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Sub Penyelenggaraan {roses Belajar bagi Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 19,9 % dari target 19,9 %;
- jj. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Sub Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan I telah mencapai 8 % dari target 8 %;

- kk. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- ll. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7 %;
- mm. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 15 %;
- nn. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 7 % dari target 7 %;
- oo. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 6 % dari target 6 %;
- vv. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 17 % dari target 17 %;
- ww. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 11,75 % dari target 11,75 %;
- xx. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 25 % dari target 25 %;
- zz. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 45 % dari target 45 %;

2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sampai Triwulan I telah mencapai 30 % dari target 23 %;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sampai Triwulan I telah mencapai 52 % dari target 23 %;
- c. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 6,8 % dari target 3,5 %;
- d. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0 %;
- e. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0 %;
- f. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- g. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sampai Triwulan I telah mencapai 48 % dari target 46 %;
- h. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sampai Triwulan I telah mencapai 52,5 % dari target 52,5 %;

- i. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan I telah mencapai 11,6 % dari target 3,5 %;
- j. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- k. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 8,5 %;
- l. Program Pengelolaan Pendidikan SD Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 0,5 % dari target 3 %;
- m. Program Pengelolaan Pendidikan SMP Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kretivitas Siswa Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 11,7 %;
- n. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- o. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 0 % dari target 2 %;
- p. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 15 % dari target 13,38 %;
- q. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 20 % dari target 0 %;

- r. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- s. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- t. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- u. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- v. Program Pengelolaan Pendidikan PAUD Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 2 % dari target 0,5 %;
- w. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sampai Triwulan I telah mencapai 3 % dari target 0,5 %;
- x. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 0,5 %;
- y. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sampai Triwulan I telah mencapai 10 % dari target 3,5 %;
- z. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sampai Triwulan I telah mencapai 5 % dari target 0,5 %;

2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan Dikarenakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang berada pada ditriwulan I masih dalam tahapan proses Perencanaan dan Pelaksanaan. Pencapaian hasil dari pekerjaan bisa dilihat pada triwulan berikutnya atau dapat dilihat dalam pencapaian di akhir tahun atau triwulan 4, selain itu ada beberapa Program, Kegiatan ataupun sub kegiatan yang masih dalam tahap pembahasan dan menunggu anggaran perubahan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan masih dalam proses monitoring, dalam proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang belum sampai pada tahap pelaporan, ataupun dalam tahapan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
- b. Faktor Penyebab terpenuhinya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah berjalan dari triwulan I merupakan pekerjaan rutin disetiap tahunnya, dan ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah selesai pekerjaan ataupun pelaksanaannya pada triwulan I. Selain itu dukungan serta koordinasi yang dilakukan sehingga tercapainya target kegiatan.
- c. Faktor penyebab melebihi target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan : Pencapaian yang didorong oleh para pendidik dan tenaga kependidikan dalam keterlibatan dari segala kegiatan yang telah direncanakan, dukungan yang diberikan untuk pemenuhan dan telah terfasilitasinya para pendidik dan tenaga kependidikan dalam pekerjaannya. Kesadaran bagi warga belajar, masyarakat dari pentingnya Pendidikan formal dan membuka wawasan kemampuan kompetensi disetiap murid, pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu dapat melihat ketersediaan ataupun perbandingan antar guru siswa perjenjangnya Koordinasi serta evaluasi yang dijalankan untuk dapat menemukan solusi dan Tindakan agar pemenuhan kebutuhan terpenuhi dan tersedia. Serta komitmen yang mendasari tercapainya realisasi yang melebihi target yang di tentukan.

- d. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu penyesuaian target pada tahun 2025 yang mengacu pada tingkat capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target periodik yang ditetapkan karena belum merupakan jadwal untuk pelaksanaan dan adanya penyesuaian serta perubahan sebelum pelaksanaan.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian terhadap perubahan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan berserta perubahan anggaran yang akan mendukung tercapainya target , melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pemantauan anggaran agar sesuai alokasi, meningkatkan koordinasi antar bidang terkait pelaksanaan program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam rangka tindak lanjuti Langkah selanjutnya.

2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul dengan tidak terealisasinya beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan di tahun 2025 tentunya berdampak terhadap capaian akhir Renstra periode tahun 2025-2029, hal ini menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan Renja Perubahan 2025 dan Renstra periode 2025-

2029 sehingga faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya kinerja tersebut bisa di selesaikan dan tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yaitu pertriwulan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terealisasinya target program, selain itu Dinas Pendidikan akan menggali dan mengembangkan inovasi-inovasi terutama pada program yang belum terealisasi sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pencapaian target program.

2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

- a. Penyesuaian target program/kegiatan terhadap kemampuan maksimal yang akan dicapai dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, keuangan serta kondisi lingkungan yang ada saat ini.
- b. Memprioritaskan anggaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target Renstra dan menyusun skala prioritas untuk Renstra 2025-2029.
- c. Menyusun kegiatan inovatif atau merevisi/intervensi kegiatan yang sudah ada selama ini sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator program dimaksud .
- d. Melakukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan berbasis data tervalidasi yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target Renstra, RPJMD maupun SPM Bidang Pendidikan sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.

Capaian Dinas Pendidikan pada tahun 2025 diprediksi akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun perkiraan realisasi capaian tahun 2025 dan prediksi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025
SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan																
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	80 Nilai	2.146.477.541. 346	100	863.035.813.58 7	88, 72	515.229.223.80 8	22,45	115.665.103.55 0	22,45	115.665.103.55 0	122,45	978.700.917.13 7,00	122,45	113,40
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD tersusun dengan	100	351.618.200	100	112.826.500	35, 16	50.225.600	30,3	15.219.200	30,3	15.219.200	130,3	128.045.700,00	130,3	113,49

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
		baik														
1.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	102.168.600	97,05	30.613.100	6	14.530.700	1	8.641.200	1	8.641.200	13	39.254.300,00	108,33	128,23
1.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	36.686.000	100	14.062.000	17	5.621.000	0	0,00	0	0,00	3	14.062.000,00	100	100,00
1.01.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	33.500.000	100	13.000.000	0	5.200.000	0	0,00	0	0,00	3	13.000.000,00	100	100,00
1.01.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	7	33.734.000	100	13.078.000	1	6.578.000	1	6.578.000	1	6.578.000	4	19.656.000,00	133,33	150,30

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
1.01.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	33.500.000	100	13.000.000	1	6.350.000	0	0,00	0	0,00	100	13.000.000,00	100	100,00
1.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	75.920.300	100	25.446.800	3	9.824.800	0	0,00	0	0,00	6	25.446.800,00	100	100,00
1.01.01.2.01.00	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	126	36.109.300	100	3.626.600	26	2.121.000	2	0,00	2	0,00	52	3.626.600,00	104	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
07	Daerah	Perangkat Daerah														
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.090.655.796.147	100	845.443.981.128	24,99	501.787.274.708	22,86	114.729.366.547	22,86	114.729.366.547	122,86	960.173.347.675,00	122,86	113,57
1.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21275	2.079.084.968.147	78,325	844.700.376.028	4367	501.199.149.708	4322	114.599.536.547	4322	114.599.536.547	12384	959.299.912.575,00	153,61	113,57
1.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1948	1.400.723.500	91,75	382.021.500	12	553.851.000	3	126.470.000	3	126.470.000	1315	508.491.500,00	100,23	133,11
1.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	115.926.000	58,89	27.492.000	1	15.570.000	0	1.400.000	0	1.400.000	2	28.892.000,00	100	105,09

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	92	81.972.000	85,04	17.184.600	18	18.704.000	4	1.960.000	4	1.960.000	40	19.144.600,00	111,11	111,41
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100	1.136.294.500		344.412.000	25,57	289.105.000	6,2	17.920.000	6,2	17.920.000	106,2	362.332.000,00	106,2	105,20
1.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	636.294.500	69,75	193.728.000	6	39.105.000	2	17.920.000	2	17.920.000	6	211.648.000,00	150	109,25
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	50	500.000.000	74,985	150.684.000	25	250.000.000	0	0,00	0	0,00	20	150.684.000,00	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
		undangan														
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	7.338.590.160		3.032.515.114	28,82	1.845.374.100	8,21	151.471.626	8,21	151.471.626	108,21	3.183.986.740,00	108,21	104,99
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6	238.981.000	99,28	86.660.000	1	10.702.000	0	0,00	0	0,00	2	86.660.000,00	100	100,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	59.417.000	82,17	105.177.500	1	14.648.000	0	0,00	0	0,00	2	105.177.500,00	100	100,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	486.147.360	84,5	142.240.180	1	85.275.000	0	0,00	0	0,00	2	142.240.180,00	100	100,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	16	427.365.500	99,25	141.735.240	1	88.573.600	1	10.550.800	1	10.550.800	3	152.286.040,00	150	107,44

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	132	694.235.300	79,875	503.240.000	30	694.652.500	6	13.024.000	6	13.024.000	61	516.264.000,00	110,91	102,59
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292	5.432.444.000	93,63	2.053.462.194	100	951.523.000	25	127.896.826	25	127.896.826	100	2.181.359.020,00	133,33	106,23
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.546.329.000		2.375.779.400	23	155.958.000	0	0,00	0	0,00	100	2.375.779.400,00	100	100,00
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31	2.546.329.000	99,815	2.375.779.400	23	155.958.000	0	0,00	0	0,00	6	2.375.779.400,00	100	100,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	39.931.246.939		9.491.289.967	37,92	10.135.469.000	7,05	714.153.032	7,05	714.153.032	107,05	10.205.442.999,00	107,05	107,52

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Daerah															
1.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	156	1.622.595.439	78,93 5	492.742.471	36	391.617.000	9	72.453.615	9	72.453.615	57	565.196.086,00	118,75	114,70
1.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	38.308.651.500	59,26 5	8.998.547.496	12	9.743.852.000	3	641.699.417	3	641.699.417	27	9.640.246.913,00	112,5	107,13
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.517.666.400		2.235.009.478	29,21	965.817.400	3,83	36.973.145	3,83	36.973.145	103,83	2.271.982.623,00	103,83	101,65

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	198.710.000	99,98	77.963.876	1	42.750.000	1	4.500.000	1	4.500.000	3	82.463.876,00	150	105,77
1.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	49	949.251.000	85,16 5	229.582.804	26	459.884.000	6	23.258.145	6	23.258.145	20	252.840.949,00	142,86	110,13
1.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	352	270.345.000	90,42	96.596.898	84	64.550.000	25	9.215.000	25	9.215.000	115	105.811.898,00	127,78	109,54
1.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	16	3.099.360.400	92,81 5	1.830.865.900	2	64.550.000	0	0,00	0	0,00	7	1.830.865.900,00	100	100,00

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
		Indeks Iklim Keamanan SD	79,54													
		Indeks Inklusivitas SD	65,5													
1.01.02.2.01.00 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	6	6.635.000.000	8	2.820.938.775	3	1.925.000.000	0	0,00	0	0,00	8	1.539.241.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11	2.776.079.880	21	4.605.223.475	4	976.580.000	0	0,00	0	0,00	9	2.150.640.700,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	41	11.144.929.998	29	2.452.684.018	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	2.144.256.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	43	5.101.424.999	20	4.677.827.000	4	1.002.006.667	0	0,00	0	0,00	15	3.605.814.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46	10.592.165.247	46	6.824.720.450	11	1.650.000.000	0	0,00	0	0,00	37	5.484.537.000,00	100	100,00

[illegible]

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				6	3.123.397.000										
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				372	1.493.233.100										
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4955	3.146.020.800	3016	1.354.338.400	525	848.286.000	508	43.134.000	508	43.134.000	2079	1.123.750.500,00	132,34	103,99
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	865	1.935.655.800	60	7.378.500	596	1295800000,00	0	0,00	0	0,00	60	7.378.500,00	100	100,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	2150	6.064.618.000	1676	3.644.891.600	250	673.020.000	150	302.739.500	150	302.739.500	1366	3.165.552.900,00	112,34	110,57

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi														
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1576	2.512.153.000	1104	1.560.716.500	124	201.799.400	0	0,00	0	0,00	732	1.335.602.800,00	100	100,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	732	85.096.354.134	1116	116.903.327.486	372	41.685.270.000	372	1.597.004.906	372	1.597.004.906	1116	81.220.289.238,00	150	102,01
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3783	6.655.497.900	1790	2.373.030.000	805	213.958.000	0	0,00	0	0,00	1474	1.710.630.000,00	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.01.00 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	95	22.921.441.757	36	8.045.882.657	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	5.652.258.057,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1119	450.000.000	373	149.880.000	373	42.275.000	372	0,00	372	0,00	745	149.880.000,00	199,73	100,00
1.01.02.2.01.00 36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6	300.000.000	2	99.630.000	2	17.880.000	2	0,00	2	0,00	4	99.630.000,00	200	100,00
1.01.02.2.01.00 37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	822	1.040.443.500	372	39.580.000	160	176.749.500	60	134.252.300	60	134.252.300	432	173.832.300,00	116,13	439,19
1.01.02.2.01.00	Koordinasi, Perencanaan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	6	30.000.000	2	9.880.000	2	7.556.000	2	0,00	2	0,00	4	9.880.000,00	200	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
38	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
1.01.02.2.01.00 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	6	284.000.000	2	99.700.000	2	27.270.000	2	0,00	2	0,00	4	99.700.000,00	200	100,00
1.01.02.2.01.00 41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	746	480.549.500	0	0	0	61.684.500	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.01.00 43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,ke	4	715.614.000	0	0	3	181.993.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	intoleransi	kerasan dn intoleransi														
1.01.02.2.01.00 47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	35	6.913.944.999	10	2.103.562.000	7	1.720.130.000	0	0,00	0	0,00	10	2.103.562.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29	3.081.427.999	12	1.127.523.000	4	396.355.000	0	0,00	0	0,00	12	1.127.523.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	993	1.274.369.500	56	212.980.000	87 8	237.444.000	0	0,00	0	0,00	56	212.980.000,00	100	100,00
1.01.02.2.01.00 50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1080	2.751.702.400	360	741.188.050	36 0	812.420.400	360	0,00	360	0,00	720	741.188.050,00	200	100,00

[illegible]

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,31													
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dengan kualifikasi minimal D.IV/S1	100													
1.01.02.2.02.00 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	80.000.000	5	6.417.384.903	1	13.210.800	0	0,00	0	0,00	3	5.904.213.903	100	100,00
1.01.02.2.02.00 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	3.601.730.500	8	2.565.360.000	2	600.346.000	0	0,00	0	0,00	6	1.500.224.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	1.038.321.950	6	961.159.000	1	200.012.000	0	0,00	0	0,00	4	615.851.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	1.087.407.200	0	0	1	430.085.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8	3.677.911.000	11	4.491.673.539	1	326.659.000	0	0,00	0	0,00	7	2.510.945.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	415.878.250	2	412.943.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	232.008.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	25	3.564.625.525	17	2.220.278.448	4	665.886.667	0	0,00	0	0,00	13	1.748.376.448	100	100,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	3.981.550.460	19	2.275.948.116	2	481.040.000	0	0,00	0	0,00	15	1.888.161.116	100	100,00
1.01.02.2.02.00	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah	31	5.280.232.667	47	7.478.861.000	2	4.156.621.667	0	0,00	0	0,00	37	5.541.738.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
14	Ruang Kelas Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat														
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				5	1.379.048.000										
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	64.720.000	3	140.224.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	95.875.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19	4.088.436.950	12	2.820.734.000	2	356.550.000	0	0,00	0	0,00	7	1.523.313.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	3.435.316.250	12	3.509.370.000	1	258.582.500	0	0,00	0	0,00	6	1.648.530.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja	11	1.009.044.272	6	462.389.000	1	133.378.333	0	0,00	0	0,00	3	340.200.000	100	100,00

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1725	1.050.000.000	75	225.000.000	125	375.000.000	0	0,00	0	0,00	75	225.000.000	100	100,00
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik				4080	387.960.000										
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	361.980.000	1	358.500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	358.500.000	100	100,00
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	5.083.672.500	10	3.149.051.250	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.156.782.750	100	100,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				21516	1.075.269.450										
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo	5559	3.260.046.130	3573	1.743.585.300	1018	734.284.100	38	35.889.500	38	35.889.500	1964	1.249.492.900	101,97	102,96

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Kreativitas Siswa	mbaAkademik dan Non Akademik														
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	115	210.174.500	25	5.000.000	106	194.913.400	0	3.629.900	0	3.629.900	25	8.629.900	100	172,60
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2670	2.672.610.200	2342	1.981.103.200	402	496.288.000	0	0,00	0	0,00	1485	1.496.387.200	100	100,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan	375	1.493.215.200	223	726.843.200	76	281.349.000	76	155.137.000	76	155.137.000	226	644.480.200	150,67	131,70

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Sekolah	Pembinaan														
1.01.02.2.02.00 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	148	31.920.406.680	223	47.561.718.202	75	15.078.360.000	0	0,00	0	0,00	149	32.082.317.502	100	100,00
1.01.02.2.02.00 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2451	1.217.425.500	626	620.280.000	75	89.925.500	75	89.475.500	75	89.475.500	541	572.505.500	116,09	118,52
1.01.02.2.02.00 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	1.157.200.000	5	1.387.032.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	318.545.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	96.500.000	2	102.171.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	102.171.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.02.00 48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	228	135.000.000	81	120.562.000	76	37.548.000	0	0,00	0	0,00	76	34.625.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah Dikembangkan	3	377.000.000	1	73.350.000	1	34.277.200	0	0,00	0	0,00	1	73.350.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi	228	130.000.000	76	29.655.000	76	23.412.600	0	0,00	0	0,00	76	29.655.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	145.000.000	1	24.670.000	1	28.009.500	0	0,00	0	0,00	1	24.670.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.02.00 52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8	475.000.000	1	59.655.000	5	36.599.000	0	0,00	0	0,00	1	59.655.000	100	100,00
1.01.02.2.02.00 54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitas komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	4	291.720.000	0	0	2	34.505.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.00 55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan dan intoleransi	2	231.974.000	0	0	1	30.820.500	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.00 58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	4402	2.297.040.400	76	577.881.500	19 9	459.279.000	2585	118.737.000	2585	118.737.000	2661	696.618.500	3501,32	120,55

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Didik	Belajar														
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	13	3.764.526.250	0	0	8	606.006.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	271	412.000.000	0	0	76	45.499.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5189	752.312.000	0	0	1601	576.930.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2	703.510.000	0	0	1	349.605.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	10	1.432.418.000	0	0	2	294.350.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-

[illegible]

[illegible]

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**		22	2.463.132.200												
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	145	10.346.786.315	39	5.155.580.000	13	1.638.042.520	0	0,00	0	0,00	28	3.851.230.000	100	100,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	51	7.120.553.750	7	1.085.005.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	982.005.000	100	100,00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	42	6.300.000.000	1	295.899.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	295.899.000	100	100,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD	120	8.402.884.000	23	402.416.000	4	252.411.000	0	0,00	0	0,00	13	301.116.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.03.009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	8880	499.999.800	302	349.741.800	4	546.915.000	0	0,00	0	0,00	302	349.741.800	100	100,00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				8870	349.143.000										
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	760	1.440.000.000	200	240.000.000	160	480.000.000	0	0,00	0	0,00	200	240.000.000	100	100,00
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	174	5.378.835.883	43	1.686.542.399	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	1.234.342.399	100	100,00
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	36.779	2.269.196.000	43223	1.677.653.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28,923	1.245.378.000	100	100,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	1263	7.279.603.000	15	5.000.000	1123	6.594.603.000	0	0,00	0	0,00	15	5.000.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	bagi Satuan PAUD	tersedia pada PAUD														
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3637	3.731.298.800	1390	887.999.200	2442	437.383.200	0	12.894.000	0	12.894.000	1190	752.312.200	100	101,74
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2204	1.971.600.500	941	1.353.405.500	300	213.193.000	15	31.708.000	15	31.708.000	906	1.335.732.500	101,68	102,43
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	890	19.008.750.000	1284	26.609.348.400	425	8.836.680.000	0	4.295.655.000	0	4.295.655.000	858	22.351.223.400	100	123,79
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	2376	831.622.000	1393	357.364.000	433	106.537.000	0	0,00	0	0,00	913	221.574.000	100	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Dana BOP PAUD	BOP PAUD														
1.01.02.2.03.00 23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3	163.048.000	1	34.550.000	1	35.640.000	1	34.570.000	1	34.570.000	2	69.120.000	200	200,06
1.01.02.2.03.00 24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dilaksanakan	210	123.125.000	100	32.549.000	40	11.153.000	40	0,00	40	0,00	140	32.549.000	140	100,00
1.01.02.2.03.00 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	495.000.000	2	59.910.000	1	72.550.000	0	0,00	0	0,00	2	59.910.000	100	100,00
1.01.02.2.03.00 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	24	1.884.739.000	7	317.825.000	13	551.729.500	0	72.635.000	0	72.635.000	7	390.460.000	100	122,85

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembanguna Runag Guru Kepala sekolah dan TU	40	8.000.000.000	2	420.761.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	420.761.000	100	100,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	49	9.549.884.628	10	2.448.068.000	5	1.043.530.400	0	0,00	0	0,00	10	2.448.068.000	100	100,00
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	40	4.400.000.000	0	0	1	403.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1024	2.186.516.000	224	762.715.800	400	344.048.000	0	19.285.600	0	19.285.600	224	782.001.400	100	102,53
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)	5	6.999.998.181	0	0	0,5	1.494.950.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.03.00	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	303	261.755.000	0	0	1	107.780.000	0	0,00	0	0,00	0		0	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
41	Peserta Didik	Tersedia												-		
1.01.02.2.03.00 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	3	527.792.116	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.03.00 46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0	0	0	0	8	3.731.903.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.03.00 47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	0	0	0	44 7	2.100.627.000	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.03.00 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	0	0	3	578.823.900	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan,	68	131.665.157.780		22.948.715.900	26,68	20.526.265.264	27,54	5.652.183.500	27,54	5.652.183.500	53,24	54.759.025.800	207,16	111,51

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
		keaksaraan dan Kecakapan hidup														
		Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	98													
		Persentase Peningkatan Jumlah Warga Belajar	50													
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				5	992.101.000										
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	6	1.227.730.000	5	1.169.195.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.169.195.000	100,00	100,00
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2508	940.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Nonformal/Kesetaraan	an yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik														
1.01.02.2.04.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan**				2	573.746.000										
1.01.02.2.04.0007	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1	75.000.000										
1.01.02.2.04.0009	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1	89.105.000										
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	8	376.955.000	4	397.792.900	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	499.677.900	100,00	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.04.00 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10	9.000.000	0	0	5	3.600.000	5	0,00	5	0,00	5	-	-	-
1.01.02.2.04.00 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	981	39.476.863.000	37	3.381.042.000	27	37.637.000	0	2.000.000	0	2.000.000	57	15.160.509.000	100,00	100,01
1.01.02.2.04.00 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	75	14.357.470.000	1643 2	19.060.722.100	28	11.195.280.000	28	5.512.590.000	28	5.512.590.000	104	24.423.460.000	136,84	129,15
1.01.02.2.04.00 24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	120	56.750.500	0	0	60	26.750.500	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
1.01.02.2.04.00 26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180	191.315.000	0	0	60	29.140.000	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.02.2.04.00 27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	28	104.000.000	78	20.821.219.000	1	21.900.000	1	20.960.000	1	20960000,00	27	35.925.000	103,85	240,06
1.01.02.2.04.00 28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	848.000.000	0	0	1	217.505.000	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10	400.000.000	0	0	5	84.119.500	1	22.209.500	1	22.209.500	1	22.209.500	-	-
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	123.050.000	0	0	1	42.750.000	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Terlaksananya Pengadaan Penyediaan infrastruktur TIK	26	2.600.000.000	76	14.439.919.500	5	277.275.000	0	0,00	0	0,00	1	135.469.500	100,00	100,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4.051	693.248.000	0	0	1	97.980.000	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	26	5.200.000.000	0	0	2	463.710.600	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36	10.200.000.000	0	0	4	829.221.146	0	87.427.500	0	87.427.500	0	87.427.500	-	-
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26	5.300.000.000	0	0	5	581.988.468	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	19299	23.909.664.000	8971	6.109.892.500	9782	4.940.600.000	14	6.996.500	14	6.996.500	8985	6.116.889.000	100,16	100,11
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah	27	3.200.000.000	11	597.660.000	2	801.475.000	0	0,00	0	0,00	11	597.660.000	100,00	100,00
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana	1	200.000.000	3	199.654.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	199.654.000	100,00	100,00

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
	Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah														
1.01.02.2.04.00 50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2	200.000.000	2	467.384.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	467.384.000	100,00	100,00
1.01.02.2.04.00 55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	25	2.500.000.000	0	0	4	404.070.000	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.02.2.04.00 61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	64	9.600.000.000	0	0	4	471.263.050	0	0,00	0	0,00	0	-	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru - Siswa Jenjang SD	12,79	324.979.354		500.183.600	91,02	66.440.000	13,35	8.865.500	13,35	8.865.500	106,35	117.583.300	114,35	108,15

Sasaran/Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2022+2023+2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) %		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
1.01.04.2.01.00 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35	707.994.400	19	432.244.300	5	33.860.000	1	5.011.000	1	5.011.000	13	67.199.400	108,33	108,06
1.01.04.2.01.00 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27	164.683.400	25	67.939.300	3	32.580.000	0	3.854.500	0	3.854.500	16	50.383.900	100,00	108,28
 1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGA	Persentase Implementasi Penyelenggaraan	100	424.646.400		178.720.000	0	36.296.000	0	0,00	0	0,00	82,74	178.720.000	100,00	100,00

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran lama dari Renja Murni 2025 menyesuaikan perubahan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Rancangan Akhir Renstra SKPD Tahun 2025-2029, dapat dilihat tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan		Indeks Pendidikan	61,74
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	8.14
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.23
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan SD	100
		Angka Kelulusan SMP	100

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan Rancangan Akhir Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata lama Sekolah (RLS)	8.14
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.23
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	91,8
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)5-6	86,5
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,45
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18	58,74
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	65,40
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	92,84
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,8
	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran	Indek Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	81,26
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Startegis Tahun 2021- 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memuat rincian indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 berdasarkan Renja adalah **4 program, 13 kegiatan dan, 138 sub-kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.700.172.937.069,-**.

3.3. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 berdasarkan Renja adalah **4 program, 13 kegiatan dan, 135 sub-kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp.700.172.937.069,-** pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dari Anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp, 467.411.262.721.-** dengan tambahan sebesar **Rp.232.761.310.348.-** yang sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2025.

Tabel 3.3

Sumber Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025

No.	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	APBD	241.351.072.721	474.112.383.069	232.761.310.348
2	DAK	226.060.554.000	226.060.554.000	0
TOTAL		467.411.626.721	700.172.937.069	232.761.310.348

3.4. Alasan Dilakukan Perubahan

Perubahan dilakukan untuk Penyesuaian perubahan anggaran di beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, beserta Penambahan Indikator pada kegiatan yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya, yang memiliki arah tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu juga dapat memberikan hasil realisasi yang teralokasi dengan baik dan tepat sasaran, guna mendukung tercapainya kinerja dan kerja pada Dinas Pendidikan ditahun 2025, serta menjadi gambaran Langkah keputusan ditahun depan.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan SKPD Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Tujuan 1.1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan								
Sasaran 1.1.2 : • Meningkatnya Aksesibilitas Pendidik • Meningkatnya Kualitas Pembelajaran • Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
DINAS PENDIDIKAN					467.411.626.721,00	700.172.937.069,00	232.761.310.348,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					467.411.626.721,00	700.172.937.069,00	232.761.310.348,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					467.411.626.721,00	700.172.937.069,00	232.761.310.348,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	78 Persen	89,43 Nilai	398.207.843.987,00	515.938.152.308,00	-11.772.942.622,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Dokumen Perencanaan,	Persentase Dokumen Perencanaan,	100	100	66.740.000,00	50.225.600,00	-16.514.400,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Daerah	Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun dengan baik	Penganggaran dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun dengan baik	Persen	Persen				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	24.709.700,00	14.530.700,00	-10.179.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.062.000,00	5.621.000,00	-1.441.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	5.200.000,00	1.300.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.578.000,00	6.578.000,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.100,00	6.350.100,00	-150.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	12.736.800,00	9.824.800,00	-2.912.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Laporan	26 Laporan	2.653.400,00	2.121.000,00	-532.400,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	384.161.883.287,00	501.877.394.708,00	117.715.511.421,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5146 Orang /bulan	5146 Orang /bulan	383.557.214.287,00	501.199.149.708,00	117.641.935.421,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	558.679.000,00	643.971.000,00	85.292.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.330.000,00	15.570.000,00	-4.760.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	25.660.000,00	18.704.000,00	-6.956.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD Yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD Yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	165.000.000,00	289.105.000,00	124.105.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	39.105.000,00	-25.895.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	10 Orang	25 Orang	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Undangan	Undangan						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.528.864.300,00	2.127.171.600,00	-401.692.700,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.702.000,00	69.561.000,00	58.859.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.648.000,00	14.648.000,00	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	105.779.000,00	91.939.500,00	-13.839.500,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.620.000,00	88.573.600,00	-12.046.400,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	514.595.300,00	694.652.500,00	180.057.200,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	100 Laporan	1.782.520.000,00	1.167.797.000,00	-614.723.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	SKPD	SKPD						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	155.958.000,00	334.219.000,00	178.261.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	25 Unit	155.958.000,00	334.219.000,00	178.261.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	10.144.361.000,00	10.294.219.000,00	149.858.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	391.617.000,00	391.617.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.752.744.000,00	9.902.602.000,00	149.858.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	985.037.400,00	965.817.400,00	-19.220.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	459.884.000,00	459.884.000,00	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	84 Unit	64.550.000,00	64.550.000,00	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	417.853.400,00	398.633.400,00	-19.220.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana berkondisi lengkap SD	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana berkondisi lengkap SD	10,53	10,53	69.087.782.734,00	184.132.048.761,00	52.608.528.100,00	
	Persentase Peserta Didik Yang Berprestasi(Sekolah Dasar)	Persentase Peserta Didik Yang Berprestasi(Sekolah Dasar)	27,27	27,27				
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dengan kondisi baik SD	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dengan kondisi baik SD	39,48	39,48				
	Skor Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar	56,93	56,93				
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana berkondisi baik SD	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana berkondisi baik SD	62,79	62,79				
	Skor Kemampuan Literasi Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi Sekolah Dasar	64,18	64,18				
	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	72,4	72,4				
	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	77,79	77,79				
	Sekolah Dasar Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B(Sekolah Dasar)	Sekolah Dasar Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B(Sekolah Dasar)	78,28	78,28				
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap SD	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap SD	81,25	81,25				
			9 Persen	9 Persen				
			Persen	Persen				
			Nilai	Nilai				
			Persen	Persen				
			Nilai	Nilai				
			Nilai	Nilai				
			Persen	Persen				
			Persen	Persen				
			Persen	Persen				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) (Sekolah Dasar)	memiliki sarana dengan kondisi lengkap SD Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) (Sekolah Dasar)						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar tidak mampu yang bersekolah</i> <i>Persentase Prasarana Pendidikan Baru Sekolah Dasar</i> <i>Persentase Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diperbaiki</i> <i>Persentase Sarana Pendidikan Baru Sekolah Dasar</i> <i>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berizin</i> <i>Persentase Satuan Pendidikan Baru Sekolah Dasar Berizin</i>	<i>Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar tidak mampu yang bersekolah</i> <i>Persentase Prasarana Pendidikan Baru Sekolah Dasar</i> <i>Persentase Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diperbaiki</i> <i>Persentase Sarana Pendidikan Baru Sekolah Dasar</i> <i>Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Berizin</i> <i>Persentase Satuan Pendidikan Baru Sekolah Dasar Berizin</i>	100 persen 100 Persen 13.10 Persen 47.81 Nilai 60.95 Nilai 62 Persen 64.70 Nilai 70 Persen 79.34 Nilai	100 Persen 1,61 Persen 18,82 Persen 43,7 Persen 59,65 Persen 59,92 Persen 64,85 Persen 68,33 Persen 70,25 Persen	28.750.275.967,00	93.886.869.034,00	65.136.593.067,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Pendidikan Sekolah Dasar yang kemampuan Literasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang kemampuan Numerasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan program Sekolah Sehat Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang kemampuan Literasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang kemampuan Numerasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan program Sekolah Sehat Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional		Persen				
Pembangunan Unit Sekolah	Jumlah Sekolah Baru yang	Jumlah Sekolah Baru	3 Unit	4 Unit	1.925.000.000,00	2.206.200.000,00	281.200.000,00	Pengadaan Tanah untuk

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Baru (USB)	Telah Dibangun	yang Telah Dibangun						Pengembangan SD Negeri Mataraman 1 Kec. Mataraman, Jasa Tenaga Ahli Penilai Harga Tanah (Appraisal) SDN Mataraman 1 Kec. Mataraman
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1.030.830.000,00	951.560.000,00	-79.270.000,00	Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	16 Ruang	5 Ruang	1.008.066.667,00	1.276.471.667,00	268.405.000,00	Jasa Konsultansi perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (ABT) dan Pembangunan Perpustakaan SDN Tajau Landung 1 Kec. Sungai Tabuk

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								(ABT)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	14 Unit	1.466.640.000,00	2.114.044.900,00	647.404.900,00	Jasa Konsultansi Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (ABT) dan Pembangunan Jamban/Toilet SDN Garis Hanyar Kec. Cintapuri Darussalam, SDN Keraton 3 Kec. Martapura dan SDN Pulau Nyiur 2 Kec. Karang Intan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	421.770.000,00	414.530.000,00	-7.240.000,00	Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	3 Ruang	513.465.000,00	471.550.000,00	-41.915.000,00	Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
		Sedang/Berat						Honorarium Barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	2 Ruang	333.106.500,00	305.980.000,00	-27.126.500,00	Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1 Unit	167.295.000,00	161.925.000,00	-5.370.000,00	Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	3 Paket	420.215.000,00	417.735.000,00	-2.480.000,00	- Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	9 Paket	751.473.125,00	14.941.753.125,00	14.190.280.000,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	585 Peserta	585 Peserta	848.286.000,00	952.536.000,00	104.250.000,00	Tambahan Kegiatan Turnamen Sepak

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Akademik dan Non Akademik	Akademik dan Non Akademik	Didik	Didik				Bola Piala Bupati (U12)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	550 Orang	596 Orang	1.295.800.000,00	1.295.800.000,00	0,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	267 Orang	740 Orang	848.920.000,00	1.432.498.000,00	583.578.000,00	1. menambah anggaran makan minum untuk kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Pendamping Khusus yang sebelumnya terkena efisiensi anggaran 2. Menambah anggaran kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar 3. Menambah anggaran kegiatan Diklat Pengembangan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Kompetensi Berkelanjutan bagi Guru SD melalui Hari Belajar Guru
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	124 Satuan Pendidikan	124 Satuan Pendidikan	210.822.000,00	101.809.400,00	-109.012.600,00	Pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PPK APBD dan DAK) serta Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Pejabat Penghadaan dan Pejabat pengelola Teknis/Pengawas Lapangan)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	372 Satuan Pendidikan	0,00	40.887.024.867,00	40.887.024.867,00	1. Memindah anggaran bos kinerja SMP yang awalnya tergabung semua di SD agar terpisah sesuai jenjangnya 2. Menambah

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Pr ogram/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								anggaran silpa bos reguler
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	805 Orang	805 Orang	515.540.000,00	213.958.000,00	-301.582.000,00	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	373 Orang	373 Orang	150.000.000,00	42.275.000,00	-107.725.000,00	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	100.000.000,00	17.880.000,00	-82.120.000,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	260 Orang	351.649.500,00	169.758.300,00	-181.891.200,00	Menyesuaikan anggaran Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Kepsek SD dari dihilangkannya anggaran fullboard agar bisa menganggarkan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								makan minum kegiatan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	7.556.000,00	-2.444.000,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	84.000.000,00	27.270.000,00	-56.730.000,00	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			373 Komunitas	185 Komunitas	230.549.500,00	61.684.500,00	-168.865.000,00	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi			3 Kegiatan	3 Kegiatan	428.500.000,00	181.993.000,00	-246.507.000,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	1.789.220.000,00	1.822.830.000,00	33.610.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Prototipe Pembangunan Gedung Baru SD

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								(ABT)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	7 Unit	402.415.000,00	678.775.000,00	276.360.000,00	Jasa Konsultansi Perencanaan dan pengawas Rehabilitasi Jamban/Toilet SDN (ABT) serta Rehabilitasi Toilet/Jamban SDN Baliangin Kec. Sambung Makmur, SDN Gunung Ulin Kec. Mataraman , SDN Handil Purai 2 Kec. Beruntung Baru
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	878 Orang	405 Orang	863.600.000,00	233.444.000,00	-630.156.000,00	1. Mengurangi honor pembuat butir soal untuk kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi bagi Pengawas SD
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	360 Satuan Pendidika	360 Satuan Pendidika	983.900.800,00	812.420.400,00	-171.480.400,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Proses Belajar	Proses Belajar	n	n				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	41 Ruang	72 Ruang	7.600.211.875,00	16.799.256.875,00	9.199.045.000,00	Jasa Konsultansi perencanaan dan pengawas Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (ABT),serta Rehabilitasi Ruang kelas SDN Padang Panjang Kec. Karang Intan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Limamar Kec. Astambul, SDN Pakutik Kec. Sungai Pinang SDN Sumber Harapan 2 Kec. Sungai Pinang (ABT), SDN Tanjung Rema Darat Kec. Martapura (ABT) dan SDN Tatah Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar (ABT)

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD			16000 Peserta Didik	1333 Peserta Didik	3.999.000.000,00	3.999.000.000,00	0,00	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			-	2 Paket	0,00	887.350.000,00	887.350.000,00	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan untuk SD (ABT) Lokasi : SD NEGERI AKAR BAGANTUNG, SD NEGERI BINCAU 1, SD NEGERI BINCAU 2, SD NEGERI BINCAU MUARA, SD NEGERI DALAM PAGAR, SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 1, SD NEGERI DALAM PAGAR ULU 2, SD NEGERI KELILING BENTENG TENGAH, SD NEGERI KELILING BENTENG ULU 1, SD NEGERI KELILING BENTENG ULU 2,

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								SD NEGERI KERAMAT, SD NEGERI MEKAR, SD NEGERI MELAYU, SD NEGERI SUNGAI BATANG ILIR 1, SD NEGERI SUNGAI BATANG ILIR 2, SD NEGERI SUNGAI RANGAS, SD NEGERI SUNGAI RANGAS HAMBUKU, SD NEGERI SUNGAI RANGAS ULU, SD NEGERI TELUK SELONG, SD NEGERI SUNGAI BATANG 1, SD NEGERI SUNGAI BATANG 2, SD NEGERI MUNGGU RAYA
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang meraih prestasi Akademis dan Non Akademis Persentase	"Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang meraih prestasi Akademis dan Non Akademis	100 Persen 13.10	"100 Persen 171	12.067.890.267,00	36.095.516.577,00	24.027.626.310,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama tidak mampu yang bersekolah Persentase Prasarana Pendidikan Baru Sekolah Menengah Pertama Persentase Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diperbaiki Persentase Sarana Pendidikan Baru Sekolah Menengah Pertama Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berizin Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang kemampuan Literasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama tidak mampu yang bersekolah Persentase Prasarana Pendidikan Baru Sekolah Menengah Pertama Persentase Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diperbaiki Persentase Sarana Pendidikan Baru Sekolah Menengah Pertama Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berizin Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang kemampuan Literasinya	Persen 65.02 Nilai 65 Persen 69.74 Nilai 77.61 Nilai 78.76 Nilai 78.79 Nilai 80 Persen	Peserta Didik 20,74 Persen 35,10 Persen 38,90 Persen 49,90 Persen 51,53 Persen 60,38 Persen 67,92 Persen 72,37 Persen"				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Menengah Pertama yang kemampuan Numerasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Aman Bencana Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Anti Bullying"	Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang kemampuan Numerasinya Berkategori Baik Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Adiwiyata Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Aman Bencana Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan program Sekolah Anti Bullying"						
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	13.210.800,00	-1.789.200,00	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	635.466.000,00	599.286.000,00	-36.180.000,00	- Pengurangan honorarium pengadaan

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								barang dan jasa
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	213.042.000,00	198.122.000,00	-14.920.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Pembangunan Perpustakaan sekolah			1 Ruang	1 Ruang	433.115.000,00	428.875.000,00	- 4.240.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	344.077.000,00	325.449.000,00	-18.628.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	4 Unit	5 Unit	671.926.667,00	896.386.667,00	224.460.000,00	Penambahan kegiatan : - Jasa Konsultan perencana dan pengawas Pembangunan Fasilitas Parkir (Urug/Pagar/Paving) SMPn 4 Aluh-Aluh dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Urug/Pagar/Pavi

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								ng) SMPN 4 Aluh-Aluh
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	3 Unit	500.000.000,00	711.260.000,00	211.260.000,00	Penambahan kegiatan : - Pembangunan Lapangan Olahraga/Halaman Upacara SMPN 2 Martapura Barat dan Jasa Konsultan perencanaan dan pengawas Pembangunan Fasilitas Parkir (Urug/Pagar/Paving) SMPN 4 Aluh-Aluh
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	17 Ruang	961.671.667,00	4.702.483.667,00	3.740.812.000,00	Pembayaran sisa pekerjaan yang diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan Denda dan Untuk Menuntaskan Bangunan Sekolah seperti

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								plafon/keramik/Instalasi Listrik/Sanitasi (Lokasi : SMPN 2 Martapura Barat, SMPN 3 Karang Intan, SMPN 4 Aranio dan SMPN 7 K.Intan) beserta Jasa Konsultan perencana dan pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (ABT)
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	2 Ruang	360.590.000,00	336.350.000,00	-24.240.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	261.612.500,00	239.825.500,00	-21.787.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1 Unit	3 Unit	136.408.333,00	539.488.333,00	403.080.000,00	Penambahan kegiatan : - Rehab Rumah Dinas di SMPN 1

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Sambung Makmur dan Konsultan Perencanaan dan Rehabilitasi Rumdin Kepsek/Guru/Pengajar Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	6 Unit	230.345.000,00	729.205.000,00	498.860.000,00	Penambahan kegiatan : - Rehab WC di SMPN 1 S.Pinang, SMPN 2 Pengaron, SMPN 4 K.Intan dan SMPN 4 Mataraman dan Jasa Konsultan perencanaan dan pengawas Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah (Rehab Toilet/WC beserta Sanitarinya)

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	518.135.000,00	516.245.000,00	-1.890.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	151.749.000,00	149.859.000,00	-1.890.000,00	'- Pengurangan honorarium pengadaan barang dan jasa
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 Peserta Didik	125 Peserta Didik	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1018 Peserta Didik	1018 Peserta Didik	782.393.100,00	774.056.100,00	-8.337.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	63 Orang	197.174.500,00	147.113.400,00	-50.061.100,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	608 Orang	886 Orang	626.400.000,00	761.488.000,00	135.088.000,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	392.285.000,00	281.276.000,00	-111.009.000,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	75 Satuan Pendidikan	0,00	15.879.798.810,00	15.879.798.810,00	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	137 Orang	75 Orang	156.425.500,00	89.925.500,00	-66.500.000,00	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	76 Orang	76 Orang	45.000.000,00	37.548.000,00	-7.452.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	89.000.000,00	34.277.200,00	-54.722.800,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	76 Orang	76 Orang	42.000.000,00	23.412.600,00	-18.587.400,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	77.617.500,00	24.617.500,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	36.599.000,00	-23.401.000,00	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		2 Komunitas	2 Komunitas	145.860.000,00	34.505.000,00	-111.355.000,00	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,		1 Kegiatan	1 Kegiatan	115.987.000,00	30.820.500,00	-85.166.500,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
intoleransi	kekerasan, dan intoleransi							
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	684.532.000,00	459.279.000,00	-225.253.000,00	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	649.886.000,00	604.946.000,00	-44.940.000,00	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	76 Orang	76 Orang	143.000.000,00	45.499.000,00	-97.501.000,00	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	809 Buku	7316 Buku	225.040.000,00	977.475.000,00	752.435.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	1 Paket	350.815.000,00	348.925.000,00	-1.890.000,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	298.390.000,00	273.000.000,00	-25.390.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		2	5	1.419.164.000,00	4.416.909.000,00	2.997.745.000,00	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang diperbaiki Persentase Prasarana Pendidikan Baru Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Sarana Pendidikan Baru Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berizin Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan program Sekolah Sehat	Persentase Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang diperbaiki Persentase Prasarana Pendidikan Baru Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Sarana Pendidikan Baru Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berizin Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan program Sekolah Sehat	100 Persen 45 Persen 69,73 Persen 70 Persen 72,25 Persen	0,89 Persen 100 Persen 10,83 Persen 15,56 Persen 57,22 Persen 79,35 Persen	18.708.006.836,00	33.473.351.736,00	14.765.344.900,00	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	15 Unit	1.655.212.520,00	2.051.857.520,00	396.645.000,00	Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan, pengawasan, Pemb

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								angunan Halaman/Area Bermain TK Negeri Pembina Martapura, Pembangunan Toilet/WC TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec. Martapura Barat dan Pengurangan/Penambahan Honor Tim Pelaksana Kegiatan,
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket	6 Paket	255.441.000,00	325.371.000,00	69.930.000,00	Mebeuler Guru dan Kelas TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec. Martapura Barat, berupa meja dan kursi guru dan siswa, loker siswa dan loker guru, Speaker wireless, alat penyimpanan dokumen dan lain lain perlengkapan sekolah

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	304 Paket	5 Paket	350.000.000,00	594.195.000,00	244.195.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk USB TK Negeri Pembina Tatah Makmur, berupa meja dan kursi guru dan siswa, loker siswa dan loker guru, Speaker wireless, alat penyimpanan dokumen dan lain lain perlengkapan sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1920 Peserta Didik	160 Peserta Didik	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	27 Orang	1123 Orang	6.609.603.000,00	6.594.603.000,00	-15.000.000,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	2442 Orang	631 Orang	2.423.497.000,00	437.383.200,00	-1.986.113.800,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	300 Satuan Pendidika n	300 Satuan Pendidika n	218.598.000,00	227.353.000,00	8.755.000,00	Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan berupa Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	425 Satuan Pendidika n	0,00	8.836.680.000,00	8.836.680.000,00	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	433 Orang	433 Orang	115.274.000,00	106.573.000,00	-8.701.000,00	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	55.000.000,00	35.640.000,00	-19.360.000,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	40 Orang	40 Orang	25.000.000,00	11.153.000,00	-13.847.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	dilaksanakan	dilaksanakan						
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	72.550.000,00	-37.450.000,00	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7 Dokumen	12 Dokumen	580.979.500,00	763.418.500,00	182.439.000,00	Penguatan Bunda PAUD
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		5 Ruang	8 Ruang	1.106.720.000,00	2.095.942.900,00	989.222.900,00	Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan, pengawasan, Perencanaan Prototipe Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang UKS dan Ruang Jamban/Toilet, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Harapan Ibu Desa Banyu Hirang Kec. Gambut,

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Negeri Tanjung Rema Darat Kec. Martapura dan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec. Martapura Barat Pengurangan/Penambahan Honor Tim Pelaksana Kegiatan,
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		1 Paket	2 Paket	404.010.000,00	1.403.000.000,00	998.990.000,00	Pengadaan TIK (Smartboard) Untuk TK Negeri Untuk menunjang pembelajaran TIK dan mendukung program digitalisasi pendidikan oleh Pemerintah pusat atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Presiden RI (Lokasi 1. TK Negeri Pembina Martapura, 2. TK Negeri Pembina Martapura Timur, 3. TK Negeri Pembina Mataraman, 4. TK Negeri Pembina Simpang Empat, 5. TK Negeri Pembina Aranio, 6. TK Negeri Pembina Aluh Aluh 6. TK Negeri Pembina Beruntung Baru, 7. TK Negeri Pembina Kertak Hanyar, 8. TK Negerri Pembina Pengaron, 9. TK Negeri Pembina Sungai Pinang, 10. TK Negeri Pembina Telaga Bauntung

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	400 Orang	624.148.000,00	344.048.000,00	-280.100.000,00	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.492.405.000,00	-7.595.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina Sungai Tabuk untuk program bagi Kecamatan yang belum mempunyai TK Negeri
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	2 Paket	109.800.000,00	107.775.000,00	-2.025.000,00	- Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	532.842.116,00	524.392.116,00	-8.450.000,00	- Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Sedang/Berat	Sedang/Berat						Honorarium Barang dan jasa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	8 Paket	599.933.000,00	3.832.568.000,00	3.232.635.000,00	Pengadaan APE Dalam TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec.Martapura Barat dan TK Negeri Pembina Martapura dan Pengadaan APE Luar TK Negeri SATP (PAUD-SD SATAP) Kec.Martapura Barat dan TK Negeri Pembina Martapura
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	447 Satuan Pendidikan	440.000.000,00	2.100.627.000,00	1.660.627.000,00	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Ruang	18 Ruang	511.948.700,00	1.035.816.500,00	523.867.800,00	Jasa Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan dan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
								Pembina Aluh Aluh, dan TK Negeri Pembina Martapura
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara yang belum menyelesaikan dikdasmen yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan tidak mampu yang bersekolah Persentase Sarana Pendidikan Baru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional</i>	<i>Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara yang belum menyelesaikan dikdasmen yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan tidak mampu yang bersekolah Persentase Sarana Pendidikan Baru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional</i>	100 persen 40 Persen 65 Persen 80 Persen 95 Persen	100 Persen 10,611 Rasio 27,86 Persen 7 Satuan Pendidikan 8,99 Persen	9.561.609.664,00	20.676.311.414,00	11.114.701.750,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia		5 Orang	5 Orang	4.500.000,00	3.600.000,00	-900.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	437 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	45.200.000,00	49.997.000,00	4.797.000,00	Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan berupa Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>	-	28 Satuan Pendidikan	0,00	11.195.280.000,00	11.195.280.000,00	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		60 Orang	60 Orang	26.750.500,00	26.750.500,00	0,00	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		60 Orang	60 Orang	61.315.000,00	29.140.000,00	-32.175.000,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi		1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	21.900.000,00	-1.100.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Layanan di Bidang Pendidikan							
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	4 Dokumen	224.685.000,00	485.951.400,00	261.266.400,00	Sosialisasi dan launching PATS
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		5 Komunitas	5 Komunitas	170.449.500,00	84.119.500,00	-86.330.000,00	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.050.000,00	42.750.000,00	-15.300.000,00	
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	15 Paket	2 Paket	279.295.000,00	277.271.250,00	-2.023.750,00	Penambahan dan pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan(
Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	97.300.000,00	-2.700.000,00	Penambahan Honorarium Tim

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Peserta Didik	Peserta Didik yang Tersedia							Teknis Pendukung dan pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		2 Ruang	2 Ruang	467.750.600,00	460.840.600,00	-6.910.000,00	Penambahan Honorarium Tim Teknis Pendukung dan pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		4 Ruang	5 Ruang	834.271.146,00	937.776.146,00	103.505.000,00	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PKBM Nur Huda Kec. Martapura

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
"Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7 Unit	5 Unit	589.058.468,00	577.528.468,00	-11.530.000,00	Penambahan Honorarium Tim Teknis Pendukung dan pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		9782 Peserta Didik	9782 Peserta Didik	4.941.000.000,00	4.872.661.000,00	-68.339.000,00	- Pengurangan BOSDA dikarenakan Persiapan dan koordinasi yang blm matang utk penganggaran BOSDA (Perbup blm selesai dan koordinasi dengan kemendikdasmen mengenai aplikasi ARKAS yg akan digunakan utk tata kelola Dana BOSP

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		2 Paket	2 Paket	803.495.000,00	800.800.000,00	-2.695.000,00	- Adanya Pengurangan dan penambahan anggaran Honorarium Barang dan jasa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		4 Paket	4 Paket	408.110.000,00	401.350.000,00	-6.760.000,00	Pengadaan Peralatn Keterampilan berupa Tata Boga, Tata Bisana dan Tata Rias Kefcantikan untuk PKBM Al Muhajirin Kec. Martapura, PKBM Al Hidayah Kec. Gambut, PKBM Batu Sawar Kec. Astambul dan PKBM Pelangi Kec. Sambung Malkmur Penambahan Honorarium Tim Teknis Pendukung

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	2 Ruang	524.679.450,00	311.295.550,00	-213.383.900,00	Penghapusan lokasi kegiatan karena sudah dilaksanakan dari Dana Revits PKBM (PKBM Abnaul Amin Kec. Beruntung Baru dan PKBM Al Muhajirin Kec. Martapiura serta penambahan volume lokasi kegiatan (PKBM Hj. Muflihah Kec. Pengaron)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal (Pendidikan Anak Usia Dini)	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal (Pendidikan Anak Usia Dini)	100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	36.296.000,00	-45.000.000,00	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang sesuai dengan kebutuhan Persentase Satuan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang sesuai dengan kebutuhan	4 Kegiatan	100 Persen 2 Dokumen	45.000.000,00	36.296.000,00	-8.704.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Pendidikan Sekolah Dasar yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama yang Tenaga Pendidiknya Menerapkan Kurikulum Nasional						
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	36.296.000,00	-8.704.000,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	"Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Menengah Pertama) Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Dasar) Indeks Pemerataan Guru (TK Negeri)	"Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Menengah Pertama) Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Dasar) Indeks Pemerataan Guru (TK Negeri)	10,25 Persen 12,81 Persen 17.90 Persen	0,3505 Nilai 0,7381 Nilai 0,9736 Nilai 1 : 1,03	71.000.000,00	66.440.000,00	-36.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)	Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)		Rasio 1 : 1,05 Rasio 1:1,09 Rasio				
	Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)	Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)		1 :11,30 Rasio				
	Rasio Pendidik (Kelas) terhadap Peserta Didik (Sekolah Dasar)	Rasio Pendidik (Kelas) terhadap Peserta Didik (Sekolah Dasar)		1:11,30 Rasio 1:16,20 Rasio				
	Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)	Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)		1 : 5,71 Rasio				
	Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)	Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar)		1 : 7,6 Rasio				
	Rasio Pendidik terhadap Peserta Didik (Pendidikan Anak Usia Dini)	Rasio Pendidik terhadap Peserta Didik (Pendidikan Anak Usia Dini)		1:7,6 Rasio				
	Rasio Tenaga Pendamping	Rasio Tenaga Pendamping		39,09				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Pendidikan Anak Usia Dini) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Menengah Pertama) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Menengah Pertama)	Dini) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Rasio Tenaga Pendamping Sekolah terhadap Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Pendidikan Anak Usia Dini) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Menengah Pertama) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Menengah Pertama)		Persen 62,08 Persen 62,15 Persen				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
	Dasar)"	Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Menengah Pertama) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi(Sekolah Dasar)"						
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	"Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terdistribusi sesuai kebutuhan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terdistribusi sesuai kebutuhan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terdistribusi sesuai kebutuhan"	"Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terdistribusi sesuai kebutuhan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terdistribusi sesuai kebutuhan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terdistribusi sesuai"	2 Dokumen 43.10 Nilai 57.43 Nilai 58.81 Nilai 70.60 Nilai"	100 Persen	71.000.000,00	66.440.000,00	-4.560.000,00	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/s ub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/su b kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
		kebutuhan"						
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	33.860.000,00	-1.140.000,00	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Laporan	3 Laporan	36.000.000,00	32.580.000,00	-3.420.000,00	

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan bertujuan Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perubahan dilakukan untuk penyesuaian perubahan anggaran

beberapa sub kegiatan, perubahan target sub kegiatan, Penambahan sub kegiatan, beserta penambahan indikator pada kegiatan yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan. Selain itu, Penyesuaian Perubahan Renja Dinas Pendidikan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APBN;
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);

5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dibandingkan dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025 awal.

Hal lain yang membuat perubahan rencana kerja tidak dapat berjalan secara maksimal dan penganggaran yang belum sesuai yaitu, perubahan anggaran yang merubah target dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan dalam mencari barang yang sesuai rencana dan perbedaan harga beberapa barang, membuat pelaksanaan realisasi kegiatan terhambat. Pemindahan beberapa komponen rincian belanja juga dilakukan guna melakukan penyesuaian penganggaran. Selain itu, melakukan perubahan pada anggaran kegiatan yang dianggap masih 84 dapat dimaksimalkan juga dilakukan guna meningkatkan efisiensi anggaran. Perubahan Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil karyawan-karyawati Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta peran aktif stake-holder yang bersangkutan.

2. Dinas Kesehatan

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan dokumen yang mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan perubahan RKPD tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja memuat penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

Perumusan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 memperhatikan hal-hal sesuai dengan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, diantaranya efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah, fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2025 dan project strategis RPJMD, menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa serta serapan belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan terkait urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kedua dokumen ini disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda. Renstra PD dan Renja PD harus saling terkait. Renja PD merupakan penjabaran dari perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra PD. Pada Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, sedangkan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam menyusun Renja PD harus berpedoman pada Renstra PD dengan mempertimbangkan arahan di dalam dokumen RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan, melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD dan mencatat kegiatan dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik tahun 2025 yang belum ada di RKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memperhatikan efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah, fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2025 dan Project strategis RPJMD, memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025, menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran/Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 sekaligus perwujudan program Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dokumen ini berkedudukan sebagai perencanaan induk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11

Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan terukur.

Sesuai informasi bahwa kebijakan pendapatan daerah pada APBD 2025 cukup variatif jika dibandingkan dengan APBD 2023, disebabkan adanya sejumlah komponen pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan target. Ketidaksesuaian perkembangan keadaan ini mempengaruhi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025. Penyusunan perubahan Renja Dinas Kesehatan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025.

1.2 **LANDASAN HUKUM**

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 Kabupaten Banjar meliputi;

- a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2/021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan. Dan Keuangan Daerah;
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 15) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 16) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 05);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 18) Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Indikator Kesehatan Daerah;
 - 19) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 20) Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
 - 21) Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara sasaran, penganggaran, indikator dan target kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum Rencana Strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I.

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini adalah untuk menjabarkan secara operasional tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat

Daerah serta penyebab dari adanya Perubahan Renja.

- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

- 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan

yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada sub bab ini memuat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.1.5 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, pada sub bab ini memuat faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,
- 2.1.6 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah, pada bab ini memuat implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- 2.1.7 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut, pada bab

ini memuat kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja, memuat perubahan indikator kinerja yang ada pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan
- 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, memuat jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan, berisikan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- 3.4 Alasan Dilakukan Perubahan, memuat penjelasan alasan mengapa dilakukan Perubahan Renja Dinas Kesehatan

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan yang ada dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan dengan memuat kaidah-kaidah dalam penulisan serta poin-poin permasalahan yang ada beserta cara mengatasinya.

- 4.1 Catatan Penting dalam Penulisan Rencana Kerja Perubahan 2025, berisi hal-hal yang penting yang mempengaruhi penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan

- 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, berisi kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan.
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut, berisi fokus dari Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah yang masih ada dalam menjalankan program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyajikan pengukuran terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 sampai triwulan I.

Dinas Kesehatan perlu mengkaji terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025 sampai triwulan I dengan pokok-pokok kajian:

2.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan dimana target 37,2 Indeks hanya terealisasi 27,83 Indeks.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70% dimana target 23,94% hanya terealisasi 15,2%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar dimana target 84,34% hanya terealisasi 11,14%.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan dimana target 90% hanya terealisasi 75%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dimana target 38,49% tidak terealisasi.
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik dimana target 90,1% hanya terealisasi 78,54%.
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dimana target 35,01% hanya terealisasi 24,8%.
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 100% tidak terealisasi.
9. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70% dimana target 37,69% hanya terealisasi 21,12%.
10. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase capaian SPM Puskesmas dimana target 14,28% hanya terealisasi 11,08%.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi dimana target 98% hanya terealisasi 20%.

12. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun dimana target 16,56% hanya terealisasi 14,84%.
13. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik dimana target 66% hanya terealisasi 15%.
14. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tidak memenuhi target adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya dimana target 85% hanya terealisasi 11%.
15. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Apotek dan toko obat yang berizin dimana target 90% hanya terealisasi 75%.
16. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi dimana target 38% tidak terealisasi.
17. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Posyandu aktif dimana target 33% hanya terealisasi 0%.
18. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Posyandu aktif dimana target 45% hanya terealisasi 0%.

19. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana target 9 Dokumen hanya terealisasi 4 Dokumen.
20. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dimana target 3 Dokumen hanya terealisasi 1 Dokumen.
21. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana target 19 Dokumen hanya terealisasi 6 Dokumen.
22. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dimana target 48 Unit tidak terealisasi.
23. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dimana target 30 unit hanya terealisasi 7 unit.
24. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 11657 orang hanya terealisasi 1406 orang.
25. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, indikator yang tidak memenuhi target adalah

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 11127 orang hanya terealisasi 1787 orang.

26. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 10597 orang hanya terealisasi 1740 orang.
27. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar dimana target 38542 orang hanya terealisasi 6833 orang.
28. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 79774 orang hanya terealisasi 11114 orang.
29. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 62403 orang hanya terealisasi 15525 orang.
30. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dimana target 5 Dokumen hanya terealisasi 1 Dokumen.
31. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dimana target 20 Dokumen tidak terealisasi.

32. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dimana target 4 Dokumen hanya terealisasi 1 Dokumen.
33. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dimana target 8 Dokumen hanya terealisasi 2 Dokumen.
34. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dimana target 12 Dokumen hanya terealisasi 3 Dokumen.
35. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dimana target 4 Dokumen tidak terealisasi.
36. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dimana target 9 Dokumen hanya terealisasi 3 Dokumen.
37. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan dimana target 43 Unit hanya terealisasi 35 Unit.
38. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dimana target 11 Dokumen tidak terealisasi.

39. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya dimana target 543 orang tidak terealisasi.
40. Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan dimana target 6 Paket tidak terealisasi.
41. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dimana target 6 Dokumen tidak terealisasi.
42. Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dimana target 6 Dokumen tidak terealisasi.
43. Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), indikator yang tidak tercapai adalah Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dimana target 8 Dokumen tidak terealisasi.

2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi dimana target 43,91% terealisasi.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dimana target 27,36% terealisasi.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 100% terealisasi.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana target 94,35% terealisasi.
5. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dimana target 1 Dokumen terealisasi.
6. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dimana target 0 laporan terealisasi.
7. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana target 1 berita acara terealisasi.

8. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dimana target 1500 orang terealisasi.
9. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dimana target 3 Dokumen terealisasi.
10. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dimana target 3 Dokumen terealisasi.
11. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dimana target 3 Dokumen terealisasi.
12. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dimana target 2 Dokumen terealisasi.
13. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikator yang

memenuhi target adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dimana target 20 Orang terealisasi.

14. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang disediakan dimana target 4 paket terealisasi.
15. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dimana target 3 paket terealisasi.
16. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dimana target 1 paket terealisasi.
17. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dimana target 2 Laporan terealisasi.
18. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dimana target 1 Laporan terealisasi.
19. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dimana target 3 Laporan terealisasi.
20. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dimana target 3 Laporan terealisasi.

21. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dimana target 1 Unit terealisasi.
22. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dimana target 2 Unit terealisasi.
23. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dimana target 1 Unit terealisasi.
24. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dimana target 26 Unit terealisasi.
25. Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dimana target 1 Unit terealisasi.
26. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun dimana target 1 unit terealisasi.

27. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar dimana target 3 unit terealisasi.
28. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar dimana target 2 unit terealisasi.
29. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya dimana target 11 unit terealisasi.
30. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar dimana target 27 unit terealisasi.
31. Sub kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine), indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dimana target 0 layanan terealisasi.
32. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 13340 Orang terealisasi.

33. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 13867 Orang terealisasi.
34. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dimana target 3276 Orang terealisasi.
35. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar dimana target 917 Orang terealisasi.
36. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dimana target 2002 Orang terealisasi.
37. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dimana target 4770 Orang terealisasi.
38. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Peduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB), indikator yang tidak memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar dimana target 1 Dokumen terealisasi.
39. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Gizi Masyarakat dimana target 25 dokumen terealisasi.

40. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dimana target 1 dokumen terealisasi.
41. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan dimana target 1 dokumen terealisasi.
42. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dimana target 6 Orang terealisasi.
43. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dimana target 0 Dokumen terealisasi.
44. Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota dimana target 25 unit terealisasi.
45. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dimana 261 Orang terealisasi.
46. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), indikator yang memenuhi target adalah Jumlah orang dengan HIV ODHIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dimana target 22 orang terealisasi.

47. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria dimana target 50 orang terealisasi.
48. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dimana target 4 Dokumen terealisasi.
49. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), indikator yang memenuhi target adalah Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun dimana target 1 Dokumen terealisasi.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada triwulan I tidak ada sub kegiatan, kegiatan maupun program yang realisasinya melebihi target.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan adanya beberapa kendala baik dalam koordinasi bidang maupun pada aplikasi yang digunakan.

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat tidak terealisasi dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan efek dari efisiensi dan e-katalog yang baru serta pencairan yang memerlukan proses.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman tidak terealisasi dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan masih belum semua apotek maupun toko obat dilakukan pengawasan karena tutup.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan beberapa kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan efek dari efisiensi dan e-katalog yang baru.
- 5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak terealisasi dikarenakan beberapa sub kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan masih ada indikator yang perlu dipahami, masih seringnya pergantian/perubahan indikator oleh bidang terkait dan menimbulkan perbedaan pada data cascading maupun pokin.
- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak terealisasi dikarenakan beberapa sub kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan adanya gangguan pada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keuangan.
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terealisasi

dikarenakan beberapa sub kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan BBM ada yg manual dan ada yg print jadi tidak bisa disamaratakan tergantung kodisional SPBU, masih dalam proses pemilihan penyedia, dan untuk Penyedia tidak ada rekanan yg sudah di tunjung langsung, sesuai dengan kerusakan mobil yg di perbaiki kecuali pengantian oli.

- 8) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan beberapa sub kegiatan belum tercapai di triwulan 1 dikarenakan kegiatan yang masih belum sepenuhnya berjalan sebab ada beberapa kegiatan yang memerlukan dana DAK sedangkan dana DAK masih perlu waktu dalam proses pencairan.
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan ada sub kegiatan yang masih belum tercapai targetnya di triwulan I dan masih adanya beberapa kegiatan yang belum tercapai maupun belum jalan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi, masih menunggu SK pejabat, adanya aplikasi e-catalog yang terbaru maupun buku-buku yang masih proses cetak.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi tidak terealisasi dikarenakan Masih ada tabel yang belum terisi dan dideadline untuk segera diisi tanggl 12 Maret 2025 dan Adanya data yang belum sinkron dan dikonfirmasi ulang dengan bidang terkait.
- 11) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Terbatasnya anggaran perjalanan dinas dalam

daerah/tidak tersedia anggaran khusus untuk verifikasi dokumen perizinan dan pengawasan perizinan sektor kesehatan, Tenaga medis/tenaga kesehatan masih banyak yang tidak memiliki kode registrasi fasyankes dan adanya kegiatan terlewat bulan maka akan dilaksanakan di bulan selanjutnya.

- 12) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk rapat evaluasi PIDI hanya akan dilaksanakan di TW 3.
- 13) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk periode I belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.
- 14) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak terealisasi dikarenakan Apotek dan toko obat yang tutup pada saat dilakukan pengawasan dan tidak adanya informasi bahwa apotek dan toko obat tidak beroperasi.
- 15) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Kurangnya koordinasi lintas program seperti promosi kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana alkes sesuai standar, Kurangnya Koordinasi Lintas program dan Lintas sektor terkait PHBS dan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat tentang PHBS)

- 16) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Komitmen pemerintahan desa/kelurahan dalam kegiatan STBM dan GERMAS/PHBS banyak yang masih belum mendukung, Tidak adanya Regulasi/Kebijakan PHBS terkait PHBS dan Kurangnya Koordinasi Lintas program dan Lintas sektor terkait PHBS.
- 17) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga berdampak pada tertundanya kegiatan yang seharusnya dilakukan.
- 18) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak terealisasi dikarenakan masih ada indikator yang berbeda antara Pokin dan di cashscading.
- 19) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tidak terealisasi dikarenakan masih ada seksi yang belum memberikan prioritas atas usulan dari musrembang.
- 20) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak terealisasi dikarenakan masih ada indikator yang yang kami pahami.
- 21) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terealisasi dikarenakan untuk pengadaan mengunakan e-katalog versi 6 aplikasi belum mendukung karena belum berizingnya di bank kalsel terhadap pembayaran.
- 22) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan adanya proses

pengadaan e-katalog yang beubah dari versi 5 ke versi 6.

- 23) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tidak terealisasi dikarenakan pengadaan menunggu SK Pejabat pengadaan dan buku KIA yang akan dicetak masih terdapat revisi dari Kemenkes.
- 24) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tidak terealisasi dikarenakan pengadaan menunggu SK Pejabat pengadaan.
- 25) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tidak terealisasi dikarenakan menunggu SK Pejabat Pengadaan.
- 26) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tidak terealisasi dikarenakan menunggu SK Pejabat Pengadaan.
- 27) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tidak terealisasi dikarenakan menunggu SK Pejabat Pengadaan.
- 28) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tidak terealisasi dikarenakan menunggu SK Pejabat Pengadaan.
- 29) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tidak terealisasi dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Efisiensi jadi kegiatan ditunda.
- 30) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan adanya efiseiensi anggaran.
- 31) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya tidak terealisasi dikarenakan adanya penyesuaian anggaran belanja, tidak tersedianya anggaran untuk pembuatan ruang terbuka hijau berupa TOGA di Puskesmas, dan tidak tersedianya anggaran operasional Griya Sehat.

- 32) Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan masih dalam proses pencairan.
- 33) Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan adanya aplikasi e-catalog versi terbaru.
- 34) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak terealisasi dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan jadi Kegiatan ditunda.
- 35) Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan tidak terealisasi dikarenakan masih ada tabel yang belum terisi dan dideadline untuk segera diisi tanggal 12 Maret 2025 dan adanya data yang belum sinkron dan dikonfirmasi ulang dengan bidang terkait.
- 36) Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan tenaga medis/tenaga kesehatan masih banyak yang tidak memiliki kode registrasi Fasyankes dan terbatasnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah/tidak tersedia anggaran khusus untuk verifikasi dokumen perizinan dan pengawasan perizinan sektor kesehatan.
- 37) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga untuk rapat evaluasi PIDH hanya akan dilaksanakan di TW 3.
- 38) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dikarenakan Pelaksanaan uji kompetensi untuk

periode I belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

- 39) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan tidak terealisasi dikarenakan proses peralihan e-katalog versi 5 ke versi 6, ED obat yang dekat dan proses pengiriman yang memerlukan waktu 4-5 minggu ke Kalimantan Selatan.
 - 40) Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak terealisasi dikarenakan kegiatan sudah dilakukan di bulan Februari.
 - 41) Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat tidak terealisasi dikarenakan kegiatan sudah dilakukan di bulan Februari.
 - 42) Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:
- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan terlaksananya semua sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibantu dengan adanya koordinasi yang baik di dalam internal sub bagian terkait, antar bidang Dinas Kesehatan maupun pada SKPD lain yang terkait.
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan dikarenakan terlaksananya semua sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibantu dengan adanya

koordinasi yang baik di dalam internal sub bagian terkait, antar bidang Dinas Kesehatan maupun pada SKPD lain yang terkait.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi dikarenakan dikarenakan terlaksananya semua sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibantu dengan adanya koordinasi yang baik di dalam internal sub bagian terkait, antar bidang Dinas Kesehatan maupun pada SKPD lain yang terkait.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi dikarenakan dikarenakan terlaksananya semua sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibantu dengan adanya koordinasi yang baik di dalam internal sub bagian terkait, antar bidang Dinas Kesehatan maupun pada SKPD lain yang terkait.
- 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terealisasi dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bidang.
- 6) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bidang.
- 7) Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bidang.
- 8) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara BPKPAD, Dinkes, UPTD, dan Bank untuk

kerjasama guna keselarasan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan.

- 9) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar staf keuangan.
- 10) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar staf keuangan.
- 11) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar staf keuangan.
- 12) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi dikarenakan terlaksananya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian.
- 13) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi dikarenakan terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- 14) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor terealisasi dikarenakan terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik.
- 15) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi dikarenakan tersedianya penyediaan bahan logistik kantor.
- 16) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi dikarenakan terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.
- 17) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi dikarenakan

tersedianaya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- 18) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi dikarenakan tersedianya penyediaan jasa surat menyurat.
- 19) Sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi dikarenakan tersedianaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 20) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi dikarenakan tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 21) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi dikarenakan tersedianaya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- 22) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terealisasi dikarenakan tersedianaya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- 23) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terealisasi dikarenakan terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 24) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi dikarenakan terlaksanya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

- 25) Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia bulan Maret 2025.
- 26) Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia bulan Maret 2025 dan konsultan perencana yang kompeten di bidangnya.
- 27) Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia pada bulan Maret 2025 dan penyedia IPAL sudah terdaftar di LKPP.
- 28) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia pada bulan Maret 2025 dan Konsultan penyedia yang kompeten di bidangnya.
- 29) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya terealisasi dikarenakan anggaran kas tersedia pada bulan Maret 2025, Konsultan penyedia yang kompeten di bidangnya dan penyedia IPAL sudah terdaftar di LKPP.
- 30) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya anggaran kas dan bantuan dana DAK non fisik serta penambahan untuk kesehatan gratis.
- 31) Sub kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) akan mulai dilaksanakan di tw 3.
- 32) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi dikarenakan adanya

koordinasi yang baik antar tim dan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan.

- 33) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama tim yang baik untuk pelaksanaan kegiatan dan adanya kerjasama yang baik antar lintas program.
- 34) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama tim yang baik untuk pelaksanaan kegiatan dan adanya kerjasama yang baik antar lintas program.
- 35) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama tim yang baik untuk pelaksanaan kegiatan dan adanya kerjasama yang baik antar lintas program.
- 36) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari atasan, lintas program dan lintas sektor.
- 37) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari atasan.
- 38) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Peduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor.
- 39) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi dikarenakan tersedianya anggaran.
- 40) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga terealisasi dikarenakan adanya anggaran skrining kebugaran calon jamaah haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

- 41) Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan terealisasi dikarenakan adanya dukungan lintas program dan lintas sektor.
- 42) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA terealisasi dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara tim dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang baik antar lintas program.
- 43) Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terealisasi dikarenakan adanya kebijakan anggaran, koordinasi dengan BPJS Kesehatan menjaga kondisi keaktifan tetap diatas 80%, dan dukungan pimpinan Puskesmas dan keaktifan pengelola dan admin P-care, bimtek intensif, evaluasi KBK.
- 44) Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota akan dilaksanakan di tw 2.
- 45) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari atasan, lintas program dan lintas sektor.
- 46) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari atasan, lintas program dan lintas sektor.
- 47) Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria terealisasi dikarenakan adanya dukungan dari atasan, lintas program dan lintas sektor.
- 48) Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan akan dilaksanakan kegiatan di bulan yang akan datang.
- 49) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro

Obat Tradisional (UMOT) terealisasi dikarenakan adanya anggaran kas dan adanya bantuan dana BOK BPOM.

2.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul dengan tidak terealisasinya beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan di tahun 2025 tentunya berdampak terhadap capaian akhir Renstra periode tahun 2026-2030, hal ini menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan Renja Perubahan 2025 dan Renstra periode 2026-2030 sehingga faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya kinerja tersebut bisa di selesaikan dan tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Oleh karena itu Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yaitu pertriwulan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terealisasinya target program, selain itu Dinas Kesehatan akan menggali dan mengembangkan inovasi-inovasi terutama pada program yang belum terealisasi sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pencapaian target program.

2.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

- a. Penyesuaian target program/kegiatan terhadap kemampuan maksimal yang akan dicapai dengan memperhatikan kemampuan sumber daya, keuangan serta kondisi lingkungan yang ada saat ini.
- b. Memprioritaskan anggaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target Renstra dan menyusun skala prioritas untuk Renstra 2026-2030.

- c. Menyusun kegiatan inovatif atau merevisi/intervensi kegiatan yang sudah ada selama ini sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator program dimaksud .
- d. Melakukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran dengan berbasis data tervalidasi yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target Renstra, RPJMD maupun SPM bidang kesehatan sehingga skala prioritas dalam penganggaran kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.
- e. Meningkatkan koordinasi di segala jenjang/tingkat pada stakeholder, mitra kesehatan, lintas sektor lainnya serta antar Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang lebih intensif dalam rangka menyusun strategi peningkatan pencapaian target kinerja Renstra.
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan di Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dan refreasing pengetahuan.

Capaian Dinas Kesehatan pada tahun 2025 diprediksi akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun perkiraan realisasi capaian tahun 2025 dan prediksi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kesehatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DINAS KESEHATAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks	95	787.365.443. 800,00	93, 36	391.137.827 .028,75	97,5	185.202.373. 000,00	27, 83	38.825.007.20 3,00	0, 29	0, 21	93, 36	429.962.834.2 31,75	98, 27	54,6 1

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	602.321.600,00	100	504.082.600,00	100	356.933.000,00	78,54	-	0,79	0	78,54	504.082.600,00	78,54	83,69
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	34	195.528.700,00	20	257.072.400,00	9	52.065.000,00	4	-	0,44	0	24	257.072.400,00	70,59	131,48
Tersedianya Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	25	151.378.500,00	18	75.465.000,00	3	45.118.000,00	1	-	0,33	0	19	75.465.000,00	76	49,85
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	110	255.414.400,00	47	171.545.200,00	19	69.300.000,00	1	-	0,05	0	48	171.545.200,00	43,64	67,16
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	9	38.100.000,00	0	-	3	18.100.000,00	0	-	0	0	0	-	0	0

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Dokumen DPA-SKPD																
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	48.800.000,00	0	-	8	159.800.000,00	6	-	0,75	0	6	-	37,5	0
	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Berita Acara	5	37.550.000,00	0	-	1	12.550.000,00	1	-	1	0	1	-	20	0
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	763.519.270.000,00	100	367.483.602.467,00	100	166.385.730.000,00	24,8	37.376.257.203,00	0,25	0,22	100	404.859.859.670,00	100	53,03

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
perangkat daerah berkualitas																
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1575	705.000.000.000,00	1445	356.757.745.851,00	1500	165.039.900.000,00	1500	37.376.257.203,00	10,23	1500	394.134.003.054,00	95,24	55,91	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	58.350.000.000,00	12	8.822.003.616,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	8.822.003.616,00	50	15,12
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Dokumen	48	3.871.893.870,00	24	1.727.583.000,00	12	1.271.700.000,00	3	-	0,25	0	27	1.727.583.000,00	56,25	44,62
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	60	169.270.000,00	24	49.200.000,00	12	24.700.000,00	3	-	0,25	0	27	49.200.000,00	45	29,07

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangk at Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran skpd	Lapora n	48	278.443.750,00	24	127.070.000,00	12	49.430.000,00	3	-	0,25	0	27	127.070.000,00	56,25	45,64
Pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dareah	Persen	100	2.600.000.000,00	100	302.239.487,00	100	128.000.000,00	43,91	-	0,44	0	100	302.239.487,00	100	11,62
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	6	157.621.260,00	2	31.316.500,00	2	28.000.000,00	0	-	0	0	2	31.316.500,00	33,33	19,87
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	111	2.600.000.000,00	42	270.922.987,00	20	100.000.000,00	5	-	0,25	0	47	270.922.987,00	42,34	10,42

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%		
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.670.000.000,00	100	778.743.500,00	100	328.200.000,00	0	-	0	0	100	778.743.500,00	100	46,63
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	368	1.670.000.000,00	204	778.743.500,00	48	328.200.000,00	0	-	0	0	204	778.743.500,00	55,43	46,63
						-										
Pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.825.125.000,00	100	13.938.074.085,00	100	9.473.900.000,00	34,40	1.448.750.000,00	0,34	0,15	100	15.386.824.085,00	100	544,64
Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	160.200.000,00	36	25.800.000,00	12	11.800.000,00	1	-	0,08	0	37	25.800.000,00	61,67	16,1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	60	2.664.925.000,00	36	738.363.536,00	12	565.000.000,00	3	-	0,25	0	39	738.363.536,00	65	27,71

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	48	34.918.800.000,00	24	13.173.910.549,00	12	8.897.100.000,00	3	1.448.750.000,00	0,25	0,16	27	14.622.660.549,00	56,25	41,88
						-										
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.172.370.000,00	100	4.122.189.609,75	100	6.557.110.000,00	94,35	-	0,94	0	100	4.122.189.609,75	100	98,80
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	270.990.000,00	1	90.628.526,00	1	42.750.000,00	1	-	1	0	1	90.628.526,00	100	33,44

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen	88	12.093.047.500,00	100	505.939.363.516,00	63,46	231.833.009.549,00	15,20	25.434.422.800,00	0,24	0,11	100	531.373.786.316,00	113,64	4394,04
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	70	11.534.236.921.350,00	65	225.740.447.541,00	69	80.153.052.654,00	21,12	62.250.000,00	0,31	0	65	225.802.697.541,00	92,86	1,96
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	1	60.000.000.000,00	0	-	1	10.000.000.000,00	1	-	1	0	1	-	100	0
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	25	12.233.254.550,00	21	11.482.633.998,00	3	1.880.000.000,00	3	-	1	0	24	11.482.633.998,00	96	93,86

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangk at Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Unit	26	14.000.000.00 0,00	23	23.957.929.9 76,00	1	32.770.647.3 30,00	1	-	1	0	24	23.957.929.976 ,00	92,3 1	171, 13
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	21	45.350.000.00 0,00	21	5.780.412.94 7,00	N/A	N/A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	21	5.780.412.947, 00	100	12,7 5
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	6	2.276.795.336, 00	19	262.355.888, 00	2	4.734.083.54 8,00	2	-	1	0	19	262.355.888,00	317	11,5 2
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	31	21.250.000.00 0,00	15	6.391.737.41 9,00	111	13.937.156.9 70,00	11	-	0, 1	0	26	6.391.737.419, 00	83,8 7	30,0 8
Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	4	288.792.600,0 0	27	105.945.000, 00	N/A	N/A	N/ A	N/A	N/ A	N/ A	27	105.945.000,00	675	36,6 9

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%		
Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	8	955.000.000,00	10	8.766.445.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	8.766.445.500,00	125	917,95
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	136	2.846.875.000,00	18	37.446.016.243,00	59	3.457.825.264,00	7	-	0,12	0	25	37.446.016.243,00	18,38	1315,34
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Unit	54	150.000.000,00	27	40.872.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27	40.872.000,00	50	27,25
Tersedianya Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	6	5.001.000.000,00	6	8.718.811.552,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	8.718.811.552,00	100	174,34
Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	27	85.910.000,00	27	15.521.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27	15.521.500,00	100	18,07

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	54	634.500.000,00	54	191.675.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54	191.675.000,00	100	30,21
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	7	422.899.110,00	1	367.683.325,00	27	485.564.000,00	27	67.500.000,00	1	0,14	27	435.183.325,00	386	102,9
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	17	6.822.680.428,00	5	5.806.260.076,00	6	12.865.687.042,00	0	62.250.000,00	0	0	5	5.868.510.076,00	29,41	86,01

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Layanan	1002	19.814.912,00	1000	17.620.000,00	1	22.088.500,00	0	-	0	0	1000	17.620.000,00	99,80	88,92
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	172.175.934.515,00	100	217.140.956.722,00	95	151.356.422.495,00	11,08	25.372.172.800,00	0,12	0,17	111,08	242.513.129.522,00	111,08	140,85
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	11093	345.435.100,00	7056	1.597.704.450,00	11093	643.776.000,00	1406	-	0,13	0	8462	1.597.704.450,00	76,28	462,52

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggara n Renja Perangk at Daerah yang dievalua si (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	11019	267.093.400,00	7486	303.131.000,00	11019	61.410.000,00	1787	-	0,16	0	9273	303.131.000,00	84,15	113,49
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	10363	125.051.700,00	7763	227.334.800,00	10363	325.868.000,00	1740	-	0,17	0	9503	227.334.800,00	91,70	181,79
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41568	175.531.100,00	30364	449.821.700,00	41568	159.949.100,00	6833	-	0,16	0	37197	449.821.700,00	89,48	256,26
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	11692	127.634.400,00	88502	272.273.000,00	11692	249.457.000,00	11114	-	0,95	0	11114	272.273.000,00	95,06	213,32
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	404268	421.365.800,00	269168	766.390.850,00	395045	114.457.000,00	13340	-	0,03	0	282508	766.390.850,00	69,88	181,88
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	61037	372.955.400,00	47482	120.400.900,00	40864	77.152.000,00	15525	-	0,38	0	47482	120.400.900,00	77,79	32,28

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangk at Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Lanjut Sesuai Standar																
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	41682	265.000.000,00	37074	44.890.500,00	40864	44.600.000,00	13867	-	0,34	0	37074	44.890.500,00	88,94	16,94
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	5511	742.581.836,00	6800	1.428.510.420,00	5403	78.357.000,00	3276	-	0,61	0	3276	1.428.510.420,00	59,44	192,37
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	873	832.023.112,00	1119	188.719.700,00	853	95.204.000,00	917	-	1,08	0	917	188.719.700,00	105,04	22,68
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	7462	421.168.500,00	9236	529.471.300,00	8614	86.867.000,00	2002	-	0,23	0	9236	529.471.300,00	123,77	125,71

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	14388	1.658.017.767,00	17835	1.666.572.850,00	14378	737.752.000,00	4770	-	0,33	0	17835	1.666.572.850,00	123,96	100,52
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Peduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen	15	576.562.500,00	11	286.302.800,00	3	70.394.000,00	1	-	0,33	0	12	286.302.800,00	80	49,66
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	101	4.375.000.000,00	75	7.123.195.750,00	13	36.990.627.000,00	25	-	1,92	0	100	7.123.195.750,00	99,01	162,82
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	27	1.494.980.600,00	9	140.438.000,00	7	277.508.000,00	1	-	0,14	0	10	140.438.000,00	37,04	9,39
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	25	3.607.000.000,00	17	1.849.888.532,00	5	1.127.339.995,00	1	-	0,2	0	18	1.849.888.532,00	72	51,29

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	51	781.000.000,00	9	1.328.371.000,00	20	519.826.000,00	0	-	0	0	9	1.328.371.000,00	17,65	170,09
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen	40	340.000.000,00	31	108.208.400,00	4	84.000.000,00	1	-	0,25	0	32	108.208.400,00	80	31,83
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	31	2.588.000.000,00	14	706.205.850,00	7	332.394.000,00	1	-	0,14	0	15	706.205.850,00	48,39	27,29
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	650.000.000,00	1	756.080.790,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	756.080.790,00	100	116,32

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Orang	13	200.000.000,00	13	68.455.000,00	13	60.000.000,00	6	-	0,46	0	13	68.455.000,00	100	34,23
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	33	8.083.500.000,00	18	3.174.298.707,00	8	1.494.202.000,00	2	29.275.000,00	0,25	0,02	20	3.203.573.707,00	60,61	39,63
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Keluarga	1000	18.320.000,00	0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	0
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	60	7.345.113.300,00	36	3.177.494.301,00	12	1.590.248.900,00	3	-	0,25	0	39	3.177.494.301,00	65	43,26
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20	135.050.000.000,00	5	153.131.711.325,00	7	105.473.734.000,00	0	25.340.047.800,00	0	0,24	5	178.471.759.125,00	25	132,15

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Paket	1	0	1	740.300,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	740.300,00	100	0
Terlaksananya Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	9	389.480.000,00	4	38.288.000,00	4	78.559.000,00	0	-	0	0	4	38.288.000,00	44,44	9,83
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	25	224.000.000,00	25	1.120.510.047,00	25	115.000.000,00	25	2.850.000,00	1,00	0,02	25	1.123.360.047,00	100	501,5
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	0	12	4.500.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	4.500.000,00	100	0

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Orang	153 5	324.480.000,0 0	128 3	204.699.000,00	1772	268.349.500,00	261	-	0,15	0	128 3	204.699.000,00	83,5 8	63,0 9
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	100	218.560.000,0 0	72	62.917.500,0 0	100	78.305.000,0 0	22	-	0,22	0	94	62.917.500,00	94	28,7 9
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Orang	50	156.080.000,0 0	63	344.586.860,00	50	121.086.000,00	14	-	0,28	0	63	344.586.860,00	126	220,78
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	943.000.000,00	100	426.586.300,00	100	121.086.000,00	20	-	0,2	0	100	426.586.300,00	100	45,24
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	25	-	25	31.564.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	31.564.500,00	100	0

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	30	619.506.492,00	10	227.673.800,00	9	204.335.400,00	3	-	0,33	0	13	227.673.800,00	43,33	36,75
Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Unit	18	250.000.000,00	12	167.348.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	167.348.000,00	66,67	66,94
Terselenggaranya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	242.500.000,00	100	97.935.500,00	100	119.199.000,00	14,84	-	0,15	0	100	97.935.500,00	100	40,39
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Unit	55	-	0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	0

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
	Kesehatan Lainnya															
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Unit	43	309.660.000,00	55	211.172.760,00	43	41.000.000,00	35	-	0,81	0	55	211.172.760,00	127,9	68,2
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	14	242.500.000,00	6	74.972.500,00	4	78.199.000,00	0	-	0	0	6	74.972.500,00	42,86	30,92
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persen	100	7.245.801.600,00	100	5.383.633.356,00	96	1.913.800.000,00	11,24	-	0,12	0	100	5.383.633.356,00	100	74,30

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggara n Renja Perangk at Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.145.801.60 0,00	100	872.690.300 ,00	95	66.000.000,0 0	15	-	0, 16	0	100	872.690.300,0 0	100	40,6 7
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokum en	70	2.145.801.600, 00	42	872.690.300, 00	11	66.000.000,0 0	0	-	0	0	42	872.690.300,00	60	40,6 7
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	5.100.000.00 0,00	100	4.510.943.0 56,00	80	1.847.800.00 0,00	11	-	0, 14	0	100	4.510.943.056 ,00	100	88,4 5

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1046	5.100.000.000,00	692	4.510.943.056,00	80	1.847.800.000,00	0	-	0	0	692	4.510.943.056,00	66,16	88,45
Terpenuhinya standar pelayanan kefarmasian	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persen	95,93	4.456.696.800,00	94	918.357.604,00	210	10.476.000,00	75	-	0,36	0	94	918.357.604,00	97,99	20,61
Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persen	90	381.446.800,00	94	335.273.600,00	85	10.476.000,00	75	-	0,88	0	94	335.273.600,00	104,44	87,9

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisas i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangk at Daerah yang dievalua si (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dokum en	17	325.000.000,00	13	329.707.000,00	2	10.476.000,00	1	-	0,5	0	14	329.707.000,00	82,35	101,45
Terpenuhinya Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Unit	120	13.696.800,00	80	5.566.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	5.566.600,00	66,67	40,64

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persen	75	864.843.750,00	100	583.084.004,00	-	-	0	-	0	0	100	583.084.004,00	133,33	67,42

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen	52	864.843.750,00	36	583.084.004,00	-	-	0	-	0	0	36	583.084.004,00	69,23	67,42
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persen	100	165.404.600.000,00	100	1.328.797.600,00	99,66	578.625.000,00	0	-	0	0	100	1.328.797.600,00	100	0,8

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.291.000.000,00	100	216.921.000,00	100	193.069.000,00	0	-	0	0	100	216.921.000,00	100	16,8
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	22	1.291.000.000,00	9	216.921.000,00	6	193.069.000,00	0	-	0	0	9	216.921.000,00	40,91	16,8
Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	164.113.600.000,00	90,05	179.487.000,00	78	201.409.000,00	0	-	0	0	90,05	179.487.000,00	112,56	0,11

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi i Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokum en	21	1.208.000.000,00	9	179.487.000,00	6	201.409.000,00	0	-	0	0	9	179.487.000,00	42,86	14,86
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kot a	Persen	100	576.562.500,00	100	187.112.000,00	100	184.147.000,00	0	-	0	0	100	187.112.000,00	100	32,45
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Dokum en	22	576.562.500,00	6	187.112.000,00	8	184.147.000,00	0	-	0	0	6	187.112.000,00	27,27	32,45

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya AKI, AKN, AKB dan Stunting	Indeks Kesehatan	74,55
		Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	153,52
		Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1000 KH	12.25
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	13.85
		Prevalensi stunting pada balita	21,6
	Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Kasus Penyakit Menular (PM) Yang Tertangani	100
		Persentase Penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) Yang Tertangani	100
	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes Yang Terakreditasi	97,36
		Persentase SDM kesehatan dengan sertifikat kompetensi sesuai standart	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan Rancangan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat sesuai Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	180 per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	14 Per 1000 KH
		Prevalensi Penyakit Menular (PM)	9%
		Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)	1%
	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi paripurna	63,46%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A

3.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sesuai dengan Renja Perubahan Tahun 2025 melaksanakan 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan dan 70 sub kegiatan sehingga total pagu perubahan anggaran Rp.438.590.404.862,-. Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Program	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.424.742.006.528,-. Pada APBD Perubahan 2025 ini Pemerintah Daerah menambahkan Pagu anggaran guna memenuhi kebutuhan antara lain:

- Penambahan pagu untuk pemusnahan obat, rehabilitasi, pergantian intalasi listrik, dan pergantian fasilitas di Instalasi farmasi di karenakan adanya kerusakan akibat kebakaran.
- Rehabilitasi Kanopi, paving, dan pagar samping Gedung Berintan.
- Penambahan pagu untuk rehabilitasi RS tipe D Danau Salak beserta pengadaan alat kesehatan RS untuk rawat inap.
- Pengadaaan tanah Puskesmas Martapura 3 yang berlokasi di Cindai Alus.
- Pengadaan mobil ambulans untuk Puskesmas Pengaron, Astambul, dan Beruntung Baru.
- Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Sambung Makmur beserta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelayanan rawat inap.
- Sewa Ruko untuk Puskesmas Martapura 2.

- Pembelian alat kesehatan untuk di beberapa Puskesmas, seperti ichroma II, Cold Chain (Vaksin refrigerator), dan TCM.
- Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP kelas 3 untuk mempertahankan UHC prioritas di Kabupaten Banjar dengan cakupan kepesertaan 100% dan kepesertaan aktif minimal 80%.
- Biaya perjalanan untuk dalam pedampingan pasien tidak mampu yang di rujuk ke rumah sakit luar daerah.
- Honorarium Narasumber dalam pedampingan kegiatan TPCB di Puskesmas.
- Gas Medik Puskesmas Kertak hanyar agar sesuai dengan standar puskesmas yaitu harus memiliki gas medik.

Tabel 3.4

Sumber Pendanaan Dinas Kesehatan dan UPTD

No.	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	APBD	Rp 313.240.565.043	Rp 424.742.006.528	Rp 111.501.441.485
UPTD				
1.	APBD	Rp 38.826.901.161	Rp 50.913.596.487	Rp 39.128.709.352
2.	BLUD/JKN	Rp 38.826.901.161	Rp 50.497.799.296	Rp 11.784.887.135

3.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasari oleh adanya Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025, adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 serta menyesuaikan efisiensi pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang mana ada beberapa sub kegiatan yang menambah maupun mengurangi pagu anggaran. Penambahan pagu anggaran juga dimaksudkan penambahan pagu untuk

pemusnahan obat, rehabilitasi, pergantian instalasi listrik, dan pergantian fasilitas di Instalasi farmasi di karenakan adanya kerusakan akibat kebakaran, rehabilitasi kanopi, paving, dan pagar samping Gedung Berintan, penambahan pagu untuk rehabilitasi RS tipe D Danau Salak beserta pengadaan alat kesehatan RS untuk rawat inap, pengadaaan tanah Puskesmas Martapura 3 yang berlokasi di Cindai Alus, pengadaan mobil ambulans untuk Puskesmas Pengaron, Astambul, dan Beruntung Baru, pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Sambung Makmur beserta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelayanan rawat inap, sewa Ruko untuk Puskesmas Martapura 2, pembelian alat kesehatan untuk di beberapa Puskesmas, seperti ichroma II, Cold Chain (Vaksin refrigerator), dan TCM, belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPB dan BP kelas 3 untuk mempertahankan UHC prioritas di Kabupaten Banjar dengan cakupan kepesertaan 100% dan kepesertaan aktif minimal 80%, biaya perjalanan untuk dalam pedampingan pasien tidak mampu yang di rujuk ke rumah sakit luar daerah, honorarium narasumber dalam pedampingan kegiatan TPCB di Puskesmas dan Gas Medik Puskesmas Kertak hanyar agar sesuai dengan standar puskesmas yaitu harus memiliki gas medik.

Tabel 3.5

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Dinas Kesehatan					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	88,34 indeks	88,34 indeks	166.610.678.781 ,00	184.966.638.220 ,00	18.355.959.439, 00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100%	100%	220.933.000,00	284.182.720,00	63.249.720,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9 Dokumen	52.065.000,00	38.034.000,00	-14.031.000,00	Penambahan Aktivitas untuk kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	45.118.000,00	32.736.720,00	-12.381.280,00	Penambahan Aktivitas untuk Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA- SKPD)

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	18.100.000,00	13.694.000,00	-4.406.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8 Laporan	23.800.000,00	155.126.000,00	131.326.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	19 Laporan	69.300.000,00	39.042.000,00	-30.258.000,00	Penambahan Aktivitas untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Staf

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara	1 Berita Acara	12.550.000,00	5.550.000,00	-7.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	149.721.285.781 ,00	166.403.483.700 ,00	16.682.197.919, 00	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1304 Orang/bulan	1550 Orang/bulan	148.373.585.781,00	165.072.924.000,00	16.699.338.219,00	Penambahan Pagu di rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, dan Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan. dan Alasan Penambahan ini dilakukan sesuai dengan SK Bupati No.188.45 / 184 / KUM/2022 tentang Penetapan Pencapaian per Triwulan bagi Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah penerima dan besaran pembayaran insentif serta SK Bupati No. 7 tahun 2024 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bahwa dalam rangka penggalan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar lebih optimal perlu dilakukan pemanfaatan insentif pemungutan pajak yang merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
-----------------------------------	---	---	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.271.700.000,00	1.271.255.700,00	-444.300,00	Menambahkan Rekening Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dengan mengurangi anggaran pada Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Bidang - Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Nilai Pagu Dana 10M sd 25M)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	24.700.000,00	19.760.000,00	-4.940.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51.300.000,00	39.544.000,00	-11.756.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100%	100%	128.000.000,00	123.600.000,00	-4.400.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Dokumen	28.000.000,00	23.600.000,00	-4.400.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.381.250.000,0 0	1.491.937.400,0 0	-889.312.600,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	38.000.000,00	38.000.000,00	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	9 Paket	245.000.000,00	222.337.400,00	-22.662.600,00	memenuhi kebutuhan kekurangan pembayaran iuran sampah sampai di akhir tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	59.500.000,00	47.600.000,00	-11.900.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.038.750.000,00	1.184.000.000,00	-854.750.000,00	penambahan anggaran karena agar memenuhi kebutuhan anggaran untuk anggaran perjalanin terutama perjalanin luar daerah -Beban Perjalanan Dinas Biasa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	328.200.000,00	450.850.400,00	122.650.400,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	83 Unit	48 Unit	328.200.000,00	450.850.400,00	122.650.400,00	kondisi saat ini banyaknya perangkat dan peralatan yang rusak, dan banyaknya permintaan untuk penambahan sarana dan prasarana.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	9.473.900.000,0 0	9.473.824.000,0 0	-76.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.800.000,00	11.800.000,00	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	565.000.000,00	565.000.000,00	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.897.100.000,00	8.897.024.000,00	-76.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	4.357.110.000,0 0	6.738.760.000,0 0	2.381.650.000,0 0	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	12 Unit	472.360.000,00	472.360.000,00	0	
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.767.000.000,00	6.137.000.000,00	2.370.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	128 Unit	75.000.000,00	86.650.000,00	11.650.000,00	Dana yang tersedia saat ini tidak mencukupi kebutuhan pemeliharaan AC, Printer dan karena banyaknya permintaan perbaikan.
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar	100%	54,75%	144.047.561.262 ,00	235.810.682.708 ,00		Perubahan pada indikator program mnyesuaikan dengan Pohon kinerja dan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan		100,00%				
		Persentase cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).		36,00%				
		Prevalensi Wasting		9%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Ibu Hamil Resiko KEK		13%				
		Persentase Ibu Hamil yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase ibu bersalin yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Balita yang terlayani sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase lansia yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemicu STBM		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		92%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja		80%				
		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		50%				
		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB)		90%				
		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian		8%				
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		2,5%				
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun		8,5%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		80%				
		Persentase Kasus kejadian luar biasa (KLB) yang tertangani kurang dari 24 jam		100%				
		Persentase Pelayanan kesehatan pada Penderita diabetes melitus (DM) sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita HIV Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		100%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar		83%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar		75%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar		71%				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi		56%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar		50%				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	69%	60%	34.125.308.654,00	117.253.675.233,00	83.128.366.579,00	
		Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar		60%				
		Persentase puskesmas yang capaian ASPAK minimal 60%		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase UPTD Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana dan prasarana) sesuai standar		80%				
		Persentase puskesmas yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar.		80%				
		Persentase puskesmas dengan sarana prasarana kefarmasian sesuai standar.		92%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi.		90%				
		Persentase UPTD yang dilakukan Validasi ASPAK (Alkes) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Ketersediaan obat esensial diPuskesmas		80%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	10.000.000.000,0 0	10.748.981.000,0 0	748.981.000,00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, Pembayaran Nilai Appraisal Pengambil Alihan Aset Rumah Sakit Danau Salak, Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Perawatan Rumah Sakit Danau Salak, Rehabilitasi Sedang Berat Kantor Rumah Sakit Danau Salak, Rehabilitasi Sedang Berat Dapur Rumah Sakit Danau Salak, Rehabilitasi Sedang Berat Halaman Rumah Sakit Danau Salak belum ada di anggarkan sebelumnya

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	36.199.078.330,0 0	36.199.078.330,0 0	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Pembangunan/Relokasi UPTD. Puskesmas Martapura Barat, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Pembangunan/Relokasi UPTD. Puskesmas Karang Intan 2, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Relokasi UPTD. Puskesmas Pengaron, Jasa Konsultansi Pengawasan Untuk Kegiatan Kontraktual Relokasi UPTD. Puskesmas Pengaron, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan UPTD. Puskesmas Martapura 3, belum ada di anggarkan sebelumnya

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	23 Unit	3 Unit	0	7.155.080.000,00	7.155.080.000,00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK FISIK), Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat) / Ambulance Untuk Puskesmas, Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat) / Ambulance Untuk UPTD. Public Safety Center (PSC) 119 Intan Banjar, Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Sumber Dana : DAU, Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas, Pengadaan Solar Cell Puskesmas belum ada dianggarkan sebelumnya untuk memaksimalkan sarana prasarana yang ada di UPTD Dinas Kesehatan Kab. Banjar

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	27 Unit	2 Unit	1.677.624.548,00	4.915.039.196,00	3.237.414.648,00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Rehabilitasi UPTD. PKM. Aluh-Aluh, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Untuk Kegiatan Renovasi dan Penambahan Ruang UPTD. Puskesmas Karang Intan 1, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Untuk Kegiatan Renovasi dan Penambahan Ruang UPTD. Puskesmas Telaga Bauntung, Jasa Konsultasi Untuk Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual Renovasi Dan Penambahan Ruang UPTD. Puskesmas Telaga Bauntung, Jasa konsultasi Pengawasan Untuk Kegiatan Kontraktual Renovasi Dan Penambahan Ruang UPTD. Puskesmas Telaga Bauntung, Jasa konsultasi Pengawasan Untuk Kegiatan Kontraktual Renovasi Dan Penambahan Ruang UPTD. Puskesmas Karang Intan 1
---	---	---	---------	--------	------------------	------------------	------------------	--

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Unit	11 Unit	5.651.753.000,00	18.084.024.970,0 0	12.432.271.970,0 0	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Renovasi Dan Penambahan Ruang Labkesmas Kab Banjar, Honorarium TIM PPS Kejaksaan Negeri Kab. Banjar Untuk Renovasi PUSTU Podok, Jasa konsultasi Pengawasan Untuk Kegiatan Kontraktual Renovasi dan Rehab Sedang Berat 9 Puskesmas Pembantu (PUSTU) : Renovasi PUSTU Keliling Benteng Ilir, Renovasi PUSTU Podok, Renovasi PUSTU Awang Bangkal Barat, Rehab Sedang Berat PUSTU Sungai Tuan, Rehab Sedang Berat PUSTU Desa 4, Rehab Sedang Berat PUSTU Batu Tanam, Rehab Sedang Berat PUSTU Haur Kuning, Rehab Sedang Berat PUSTU Sungai Asam, Rehab Sedang Berat PUSTU Pematang Danau belum ada dianggarkan sebelumnya
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	59 Unit	3.151.711.564,00	15.205.840.264,0 0	12.054.128.700,0 0	surat edaran dari kemenkes terkait pemeriksaan kesehatan gratis sehingga perlu memenuhi alat kesehatan puskesmas

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit	3 Unit	485.564.000,00	631.207.148,00	145.643.148,00	Tersedianya dana DAK
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	6 Paket	12.865.687.042,00	24.155.913.525,00	11.290.226.483,00	Tersedianya dana DAK

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	umlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1058 Layanan	1 Layanan	22.088.500,00	22.670.800,00	582.300,00	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	1 Paket	0	135.840.000,00	135.840.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase peserta aktif BPJS Kesehatan	95%	80%	109.598.718.208 ,00	118.239.993.755 ,00	8.641.275.547,0 0	
		Persentase peserta JKN terdaftar di Puskesmas yang melaksanakan layanan skrining Kesehatan		25%				
		Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja (KBK) 100% di Puskesmas.		75%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 80%		80%				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 60%		60%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional minimal 70% dari kriteria		70%				
		Persentase Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar minimal 50%		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Faskes yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan tier 2		19,23%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas		60%				
		Cakupan gizi buruk ditangani sesuai tata laksana		90%				
		Cakupan gizi kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)		90%				
		Cakupan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet / Multiple Micronutrient Suplement (MMS)		100%				
		Cakupan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				
		Persentase Kunjungan Ibu Hamil		100%				
		Persentase Kunjungan Balita		85%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan Usia Pendidikan Dasar		70%				
		Persentase Kunjungan Lansia		70%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan air limbah		100%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Desa/Kelurahan dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		95%				
		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase puskesmas melaksanakan fasilitasi Aktifitas Fisik (Olahraga)		90%				
		Persentase Puskesmas yg menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran		60%				
		Persentase laporan Surveilans terpadu penyakit sesuai standar		>90%				
		Persentase Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pemeriksaan Kesehatan Haji		100%				
		Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).		100%				
		Persentase cakupan imunisasi tetanus pada Wanita Usia Subur (WUS)		3,5%				
		Persentase Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas		20%				
		Persentase merokok usia 10 - 21 Tahun		3,5%				
		Persentase Kunjungan Penderita Hipertensi		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan penderita orang dengan gangguan jiwa berat		100%				
		Persentase Kunjungan Penderita Diabetes Melitus (DM)		100%				
		Persentase deteksi dini terduga Tuberkulosis		100%				
		Persentase deteksi dini orang yang berisiko HIV		100%				
		Persentase deteksi dini penyakit Malaria		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Prevalensi penyakit malaria dengan API 0,104 per 1.000 penduduk		104%				
		Persentase cakupan pelayanan penyakit menular lainnya		100%				
		Persentase kunjungan penderita Tuberkulosis		100%				
		Persentase kunjungan orang terduga HIV		100%				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11657 Orang	9098 Orang	643.776.000,00	637.546.800,00	-6.229.200,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11127 Orang	8682 Orang	61.410.000,00	231.688.400,00	170.278.400,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10597 Orang	8266 Orang	325.868.000,00	221.917.800,00	-103.950.200,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38542 Orang	46110 Orang	159.949.100,00	158.739.280,00	-1.209.820,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79774 Orang	93215 Orang	249.457.000,00	319.885.600,00	70.428.600,00	Besaran anggaran belanja cetak buku rapor kesehatanku untuk anak usia pendidikan dasar yang ditetapkan pada awal tahun belum memenuhi untuk sasaran anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Banjar

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392961 Orang	382575 Orang	114.457.000,00	100.430.500,00	-14.026.500,00	Pagu Tetap Pergeseran kode rekening dari rekening belanja alat tulis kantor (pengadaan goodie bag) ke rekening belanja cetak (formulir skrining IVA)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62403 Orang	62581 Orang	77.152.000,00	91.721.600,00	14.569.600,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40497 Orang	40261 Orang	44.600.000,00	38.014.500,00	-6.585.500,00	Pagu Tetap Pergeseran kode rekening dari rekening belanja sewa gedung ke rekening belanja cetak (Media KIE program hipertensi)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5355 Orang	5324 Orang	78.357.000,00	63.148.000,00	-15.209.000,00	Pagu Tetap Pergeseran kode rekening dari rekening belanja sewa gedung ke rekening belanja cetak (Media KIE program diabetes melitus)

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	970 Orang	828Orang	95.204.000,00	68.451.000,00	-26.753.000,00	Pagu Tetap Pergeseran kode rekening dari rekening belanja sewa gedung ke rekening belanja cetak (Media KIE program ODGJ Berat)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10020 Orang	9983 Orang	86.867.000,00	70.918.000,00	-15.949.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14378 Orang	14778 Orang	737.752.000,00	688.454.000,00	-49.298.000,00	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	3 Dokumen	75.394.000,00	54.673.000,00	-20.721.000,00	1. Pembelajaran upaya-upaya penurunan AKI/AKB dan evaluasi AMP SR Latar Belakang :AKI dan AKB mengalami peningkatan di tahun 2024. Pada tri wulan 2 jumlah kasusnya sudah melebihi total kasus di tahun 2023. Kegiatan evaluasi AMP SR di Kabupaten Banjar belum berjalan karena kurangnya pengetahuan terkait cara pelaksanaan evaluasi yang tepat dan benar. Hasil dari konsultasi ke Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes RI, Kabupaten Banjar perlu melakukan pembelajaran terkait upaya-upaya dalam penurunan AKI/AKB ke Ke Kabupaten yang sudah sudah secara signifikan dapat menurunkan AKI/AKB dan pelaksanaan evaluasi AMP SR sudah berjalan dengan baik yaitu di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dengan mengikutsertakan pemangku kebijakan dan lintas sektor terkait Seksi yang menangani AKI/AKB. Peserta yang akan ikut pembelajaran ada 15 orang yaitu : Kadinkes, Sekretaris Dinkes, Kabid Kesmas, Kabid SDK, Kabid Yankes, Kabid P2, Kabid PPM (Bappeda), Kasi Kesga Gizi, Kasi PPM
--	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--

								(Bappeda), Kasubbbag Perencanaan dan Tim Kesga Gizi (5 orang) 2. Pengadaan F75, F100 RUTF dan/atau PKM. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan zoom meeting Identifikasi Kebutuhan dan Ketersediaan Produk Terafi Gizi (F75, F100 dan RUTF) untuk Tata Laksana Gizi Buruk dari kemenkes bahwa standar tatalaksana gizi buruk menggunakan standar global (WHO), F75 , F100, RUTF dan/atau PKMK yang masih di fasilitasi oleh kemenkes untuk impor dalam tahun ini 3. Desk Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi data hasil capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan peserta Kepala Puskesmas, Pengelola Ibu, Pengelola Anak, Pengelola Lansia, Pengelola Keluarga Berencana, Pengelola Usia Pendidikan Dasar
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	7 Dokumen	283.000.000,00	241.324.000,00	-41.676.000,00	Kegiatan Skrining Kebugaran Calon Jamaah Haji yang awalnya 2 kali kegiatan menjadi 1 kali kegiatan karena sebagian puskesmas sudah menganggarkan dan ditambahkan kegiatan untuk kebugaran pengemudi dan workshop peningkatan kapasitas petugas untuk pemeriksaan kebugaran karena kegiatan tersebut mendukung capaian kinerja kesehatan kerja dan olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	5 Dokumen	1.134.954.995,00	1.230.624.775,00	95.669.780,00	1. Harga Reagen Sanitarian KIT yang ada di anggaran APBD berbeda dengan Harga yang ada di anggaran DAK NF sehingga disamakan harganya dengan yang ada di DAK 2. Penambahan Honor untuk PPK pengelolaan sampah Medis

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen	634.576.000,00	698.200.200,00	63.624.200,00	Ada penambahan pagu pada kode rekening Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan alasannya untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada Puskesmas Berpestasi dalam rangkaian Peringatan HKN sebanyak Rp. 16.200.000,- dan ada Pergeseran didalam sub kegiatan untuk penunjang kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	4 Dokumen	101.000.000,00	263.123.800,00	162.123.800,00	Anggaran untuk operasional griya sehat tidak tersedia tahun 2025, maka diusulkan di perubahan tahun 2025. Griya sehat mau membuka pelayanan tahun 2025
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	467.080.000,00	383.699.500,00	-83.380.500,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7663 Orang	13 Orang	60.000.000,00	50.519.800,00	-9.480.200,00	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen	8 Dokumen	1.554.202.000,00	1.344.306.500,00	-209.895.500,00	Tidak menambah anggaran karena kegiatan yang ada pada sub kegiatan tersebut tetapi ada pergeseran dan peralihan anggaran menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	1.681.848.900,00	1.349.550.000,00	-332.298.900,00	Ada penambahan pagu pada kode rekening Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan alasannya untuk memberikan penghargaan kepada Desa yang paham dan sadar tentang pentingnya imunisasi (DESA SADARI) sebanyak Rp.14.500.000

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen	96.974.177.200,0 0	106.451.612.600, 00	9.477.435.400,00	Penambahan proyeksi peserta JKN baik baru maupun aktifasi peserta lama
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	1 Paket	0	15.280.000,00	15.280.000,00	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	4 Dokumen	86.174.000,00	54.862.200,00	-31.311.800,00	1. Kegiatan Pertemuan Tatanan Kabupaten kota sehat dan Rapat koordinasi Tatanan kabupaten/kota sehat tidak dilaksanakan karena sudah dianggarkan dan dilaksanakan oleh Bappeda dan diganti dengan kegiatan Deklarasi Desa/Kecamatan/Kabup aten SBS Kabupaten Banjar

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0	148.931.000,00	148.931.000,00	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	25 Unit	115.000.000,00	100.246.000,00	-14.754.000,00	survei akreditasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sehingga perlu kegiatan TPCB untuk membina mutu pelayanan di 25 Puskesmas dan membutuhkan penambahan anggaran
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2168 Orang	1.772 Orang	290.849.500,00	272.210.500,00	-18.639.000,00	Untuk menunjang peningkatan capaian penemuan kasus TB dengan penambahan nutrisi bagi petugas TBC Puskesmas agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	863 Orang	100 Orang	78.305.000,00	68.772.000,00	-9.533.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	50 Orang	152.586.000,00	97.575.500,00	-55.010.500,00	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	N/A	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A	1 Dokumen	0	629.678.000,00	629.678.000,00	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melaporkan melalui sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase RME Fasyankes yang mengirimkan data ke satu sehat	100%	60%	204.335.400,00	198.496.320,00	-5.839.080,00	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	9 Dokumen	204.335.400,00	198.496.320,00	-5.839.080,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	Persentase Puskesmas dan Klinik, Tempat Praktek Mandiri Dokter(TPMD), Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (TPMDG), praktik perawat mandiri dan praktik bidan mandiri telah menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	100%	75%	119.199.000,00	118.517.400,00	-681.600,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase RS yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang berkualitas		66,67%				
		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang mampu dan diampu dalam melaksanakan telemedicine.		22,58%				
		Presentase rumah sakit dibina, melaksanakan dan melaporkan audit medis pada 9 layanan prioritas		66,67%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Presentase faskes lanjutan dengan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indikator Keselamatan Pasien (IKP) 100%		66,67%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 90%		90%				
		Persentase puskesmas yang mendapat pembinaan Terpadu		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Faskes tingkat pertama yang mendapatkan pembinaan mutu pelayanan		63,31%				
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	34 Unit	43 Unit	41.000.000,00	28.239.600,00	-12.760.400,00	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 Dokumen	12 Dokumen	78.199.000,00	90.277.800,00	12.078.800,00	Perubahan Hashtag Kegiatan sehubungan dengan perubahan PK 2025, amak ada penambahan ATK kegiatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas	96,00%	90%	1.985.200.000,0 0	2.867.440.000,0 0	882.240.000,00	
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	Persentase jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	95%	80%	66.000.000,00	174.186.000,00	108.186.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16 Dokumen	11 Dokumen	66.000.000,00	174.186.000,00	108.186.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui ABK SDMK	Persentase sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	80%	100%	1.919.200.000,00	2.693.254.000,00	774.054.000,00	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	346 Orang	1.919.200.000,00	2.693.254.000,00	774.054.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persentase apotek dan toko obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar	210%	50%	18.500.000,00	388.353.000,00	369.853.000,00	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan toko obat yang berizin	Persentase apotik dan toko obat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan.	85%	50%	18.500.000,00	10.476.000,00	-8.024.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	2 Dokumen	18.500.000,00	67.255.000,00	48.755.000,00	Tersedianya dana BOK BPOM

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	1 Dokumen	0	321.098.000,00	321.098.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1 Dokumen	0	321.098.000,00	321.098.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	99,66%	100%	578.625.000,00	708.892.600,00	130.267.600,00	
		Persentase PHBS di 5 Tatanan Masyarakat		68%				
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan advokasi	Persentase Posyandu Aktif	100%	97%	193.069.000,00	151.260.000,00	-41.809.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	12 Dokumen	193.069.000,00	151.260.000,00	-41.809.000,00	Pergeseran didalam sub kegiatan untuk penunjang kegiatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	78%	60%	201.409.000,00	152.085.000,00	-49.324.000,00	
		Persentase sekolah yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		60%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase sarana kesehatan yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		100%				
		Persentase tempat umum yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		60%				
		Persentase tempat kerja yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		60%				
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	12 Dokumen	201.409.000,00	152.085.000,00	-49.324.000,00	Pergeseran didalam sub kegiatan untuk penunjang kegiatan

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Aktif	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	100%	60%	184.147.000,00	405.547.600,00	221.400.600,00	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12 Dokumen	184.147.000,00	405.547.600,00	221.400.600,00	Pergeseran didalam sub kegiatan untuk penunjang kegiatan
Instalasi Farmasi Kabupaten					0	587.337.000,00	587.337.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0	587.337.000,00	587.337.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	587.337.000,00	587.337.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar	100%	54,75%	0	587.337.000	587.337.000,00	
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan		100,00%				
		Persentase cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).		36,00%				
		Prevalensi Wasting		9%				
		Persentase Ibu Hamil Resiko KEK		13%				
		Persentase Ibu Hamil yang terlayani sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase ibu bersalin yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Balita yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase lansia yang terlayani sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemicu STBM		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		92%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja		80%				
		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		50%				
		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB)		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian		8%				
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		2,5%				
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun		8,5%				
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		80%				
		Persentase Kasus kejadian luar biasa (KLB) yang tertangani kurang dari 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan kesehatan pada Penderita diabetes melitus (DM) sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita HIV Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar		83%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar		75%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar		71%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi		56%				
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	69%	60%	0	185.596.000	185.596.000,00	
		Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar		60%				
		Persentase puskesmas yang capaian ASPAK minimal 60%		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase UPTD Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana dan prasarana) sesuai standar		80%				
		Persentase puskesmas yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar.		80%				
		Persentase puskesmas dengan sarana prasarana kefarmasian sesuai standar.		92%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi.		90%				
		Persentase UPTD yang dilakukan Validasi ASPAK (Alkes) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Ketersediaan obat esensial diPuskesmas		80%				
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	147 Unit	147 Unit	0	185.596.000,00	185.596.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase peserta aktif BPJS Kesehatan	95%	80%	0	401.741.000,00	401.741.000,00	
		Persentase peserta JKN terdaftar di Puskesmas yang melaksanakan layanan skrining Kesehatan		25%				
		Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja (KBK) 100% di Puskesmas.		75%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 80%		80%				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 60%		60%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional minimal 70% dari kriteria		70%				
		Persentase Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar minimal 50%		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Faskes yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan tier 2		19,23%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas		60%				
		Cakupan gizi buruk ditangani sesuai tata laksana		90%				
		Cakupan gizi kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)		90%				
		Cakupan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet / Multiple Micronutrient Suplement (MMS)		100%				
		Cakupan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				
		Persentase Kunjungan Ibu Hamil		100%				
		Persentase Kunjungan Balita		85%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan Usia Pendidikan Dasar		70%				
		Persentase Kunjungan Lansia		70%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan air limbah		100%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Desa/Kelurahan dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		95%				
		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase puskesmas melaksanakan fasilitasi Aktifitas Fisik (Olahraga)		90%				
		Persentase Puskesmas yg menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran		60%				
		Persentase laporan Surveilans terpadu penyakit sesuai standar		>90%				
		Persentase Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pemeriksaan Kesehatan Haji		100%				
		Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).		100%				
		Persentase cakupan imunisasi tetanus pada Wanita Usia Subur (WUS)		3,5%				
		Persentase Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas		20%				
		Persentase merokok usia 10 - 21 Tahun		3,5%				
		Persentase Kunjungan Penderita Hipertensi		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan penderita orang dengan gangguan jiwa berat		100%				
		Persentase Kunjungan Penderita Diabetes Melitus (DM)		100%				
		Persentase deteksi dini terduga Tuberkulosis		100%				
		Persentase deteksi dini orang yang berisiko HIV		100%				
		Persentase deteksi dini penyakit Malaria		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Prevalensi penyakit malaria dengan API 0,104 per 1.000 penduduk		104%				
		Persentase cakupan pelayanan penyakit menular lainnya		100%				
		Persentase kunjungan penderita Tuberkulosis		100%				
		Persentase kunjungan orang terduga HIV		100%				
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	0	401.741.000,00	401.741.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Laboratorium Kesehatan Daerah					0	928.361.513,00	928.361.513,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0	928.361.513,00	928.361.513,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	928.361.513,00	928.361.513,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar	100%	54,75%	0	928.361.513,00	928.361.513,00	
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan		100,00%				
		Persentase cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).		36,00%				
		Prevalensi Wasting		9%				
		Persentase Ibu Hamil Resiko KEK		13%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Ibu Hamil yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase ibu bersalin yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Balita yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase lansia yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemicu STEM		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		92%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja		80%				
		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB)		90%				
		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian		8%				
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		2,5%				
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun		8,5%				
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		80%				
		Persentase Kasus kejadian luar biasa (KLB) yang tertangani kurang dari 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan kesehatan pada Penderita diabetes melitus (DM) sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita HIV Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar		83%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar		75%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar		71%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi		56%				
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ASPAK puskesmas minimal 70%	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	69%	60%	0	68.444.000,00	68.444.000,00	
		Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar		60%				
		Persentase puskesmas yang capaian ASPAK minimal 60%		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase UPTD Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana dan prasarana) sesuai standar		80%				
		Persentase puskesmas yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar.		80%				
		Persentase puskesmas dengan sarana prasarana kefarmasian sesuai standar.		92%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi.		90%				
		Persentase UPTD yang dilakukan Validasi ASPAK (Alkes) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Ketersediaan obat esensial diPuskesmas		80%				
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	36 Unit	36 Unit	0	68.444.000,00	68.444.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase peserta aktif BPJS Kesehatan	95%	80%	0	859.917.513,00	859.917.513,00	
		Persentase peserta JKN terdaftar di Puskesmas yang melaksanakan layanan skrining Kesehatan		25%				
		Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja (KBK) 100% di Puskesmas.		75%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 80%		80%				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 60%		60%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional minimal 70% dari kriteria		70%				
		Persentase Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar minimal 50%		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Faskes yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan tier 2		19,23%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas		60%				
		Cakupan gizi buruk ditangani sesuai tata laksana		90%				
		Cakupan gizi kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)		90%				
		Cakupan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet / Multiple Micronutrient Suplement (MMS)		100%				
		Cakupan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				
		Persentase Kunjungan Ibu Hamil		100%				
		Persentase Kunjungan Balita		85%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan Usia Pendidikan Dasar		70%				
		Persentase Kunjungan Lansia		70%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan air limbah		100%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Desa/Kelurahan dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		95%				
		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase puskesmas melaksanakan fasilitasi Aktifitas Fisik (Olahraga)		90%				
		Persentase Puskesmas yg menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran		60%				
		Persentase laporan Surveilans terpadu penyakit sesuai standar		>90%				
		Persentase Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pemeriksaan Kesehatan Haji		100%				
		Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).		100%				
		Persentase cakupan imunisasi tetanus pada Wanita Usia Subur (WUS)		3,5%				
		Persentase Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas		20%				
		Persentase merokok usia 10 - 21 Tahun		3,5%				
		Persentase Kunjungan Penderita Hipertensi		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan penderita orang dengan gangguan jiwa berat		100%				
		Persentase Kunjungan Penderita Diabetes Melitus (DM)		100%				
		Persentase deteksi dini terduga Tuberkulosis		100%				
		Persentase deteksi dini orang yang berisiko HIV		100%				
		Persentase deteksi dini penyakit Malaria		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Prevalensi penyakit malaria dengan API 0,104 per 1.000 penduduk		104%				
		Persentase cakupan pelayanan penyakit menular lainnya		100%				
		Persentase kunjungan penderita Tuberkulosis		100%				
		Persentase kunjungan orang terduga HIV		100%				
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	0	859.917.513,00	859.917.513,00	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
UPTD Public Safety Center 119 Banjar					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					313.240.565.043 ,00	424.742.006.528 ,00	111.501.441.485 ,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar	100%	54,75%	144.047.561.262 ,00	235.810.682.708 ,00	91.763.121.446, 00	
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan		100,00%				
		Persentase cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).		36,00%				
		Prevalensi Wasting		9%				
		Persentase Ibu Hamil Resiko KEK		13%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Ibu Hamil yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase ibu bersalin yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Balita yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase lansia yang terlayani sesuai standar		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemicu STEM		100%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		92%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja		80%				
		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		50%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB)		90%				
		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian		8%				
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		2,5%				
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun		8,5%				
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		80%				
		Persentase Kasus kejadian luar biasa (KLB) yang tertangani kurang dari 24 jam		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan kesehatan pada Penderita diabetes melitus (DM) sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita HIV Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar		100%				
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar		83%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar		75%				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar		71%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi		56%				
		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar		50%				
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase capaian SPM Puskesmas	Persentase peserta aktif BPJS Kesehatan	95%	80%	109.598.718.208 ,00	118.239.993.755 ,00	8.641.275.547,0 0	

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peserta JKN terdaftar di Puskesmas yang melaksanakan layanan skrining Kesehatan		25%				
		Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja (KBK) 100% di Puskesmas.		75%				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 80%		80%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 60%		60%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional minimal 70% dari kriteria		70%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar minimal 50%		50%				
		Persentase Faskes yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan tier 2		19,23%				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas		60%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan gizi buruk ditangani sesuai tata laksana		90%				
		Cakupan gizi kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				
		Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)		90%				
		Cakupan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet / Multiple Micronutrient Suplement (MMS)		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Cakupan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		90%				
		Persentase Kunjungan Ibu Hamil		100%				
		Persentase Kunjungan Balita		85%				
		Persentase Kunjungan Usia Pendidikan Dasar		70%				
		Persentase Kunjungan Lansia		70%				
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan air limbah		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)		100%				
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		70%				
		Persentase Desa/Kelurahan dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		95%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		80%				
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		70%				
		Persentase puskesmas melaksanakan fasilitasi Aktifitas Fisik (Olahraga)		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Puskesmas yg menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran		60%				
		Persentase laporan Surveilans terpadu penyakit sesuai standar		>90%				
		Persentase Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam		100%				
		Persentase Pemeriksaan Kesehatan Haji		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).		100%				
		Persentase cakupan imunisasi tetanus pada Wanita Usia Subur (WUS)		3,5%				
		Persentase Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas		20%				
		Persentase merokok usia 10 - 21 Tahun		3,5%				
		Persentase Kunjungan Penderita Hipertensi		90%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Persentase Kunjungan penderita orang dengan gangguan jiwa berat		100%				
		Persentase Kunjungan Penderita Diabetes Melitus (DM)		100%				
		Persentase deteksi dini terduga Tuberkulosis		100%				
		Persentase deteksi dini orang yang berisiko HIV		100%				
		Persentase deteksi dini penyakit Malaria		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
		Prevalensi penyakit malaria dengan API 0,104 per 1.000 penduduk		104%				
		Persentase cakupan pelayanan penyakit menular lainnya		100%				
		Persentase kunjungan penderita Tuberkulosis		100%				
		Persentase kunjungan orang terduga HIV		100%				

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	488.986.000,00	488.949.900,00	-36.100,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan penyusunan regulasi tentang administrasi Kesehatan. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- b. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.
- c. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APBN.
- d. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Dinas Kesehatan).
- e. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Tranparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat

berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan;
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan OPD terkait penyelenggaraan pelayanan;

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Martapura, 16 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar

The image shows a circular official stamp of the Health Department of Banjar Regency. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR" and the inner circle contains "DINAS KESEHATAN". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

drg. Yasna Khairina, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650611 199301 2 002

3. RSUD Ratu Zalecha Tahun

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Ridho-Nya, serta berlandaskan semangat untuk menjadi pelayan kesehatan masyarakat yang profesional, Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025 ini telah disusun.

Dokumen ini disiapkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan peran dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dengan memadukan prinsip teknokratis (strategis), demokratis, partisipatif, serta pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara visi-misi Kepala Daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1), yang memperbolehkan revisi RKPD dan Renja Perangkat Daerah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi pada tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, Renja Perubahan ini memuat rincian program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas pembangunan. Penyusunannya didasarkan pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga dapat menjadi panduan yang efektif untuk pelaksanaan misi perangkat daerah di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan dapat mewujudkan target yang telah direncanakan demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan responsif. Sebagai institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Banjar, RSUD Ratu Zalecha memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, RSUD Ratu Zalecha menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan penyesuaian strategi dan prioritas program. Oleh karena itu, melalui identifikasi isu-isu strategis, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) sebagai kerangka acuan dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Pelaksanaan Renstra kemudian dijabarkan dalam Renja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025 - 2029 sekaligus perwujudan program Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dokumen ini berkedudukan sebagai perencanaan induk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan terukur.

Fokus utamanya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) serta layanan kesehatan publik yang berkualitas. Penyusunannya didasarkan pada analisis potensi, permasalahan, dan kebutuhan

riil masyarakat, dengan target capaian yang terukur selama kurun waktu satu tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 RSUD Ratu Zalecha dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11;

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;
22. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 RSUD Ratu Zalecha ini disusun sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit selama tahun anggaran 2025. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk:

1. Mewujudkan kondisi ideal pelayanan kesehatan di tahun 2025 yang selaras dengan visi dan misi RSUD Ratu Zalecha
2. Menjabarkan secara operasional tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029
3. Menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas rumah sakit
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui target yang terukur dan pencapaian yang jelas

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya

perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja-SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN Renja PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menyajikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga triwulan I, dengan mengacu pada APBD Tahun 2025. Adapun pokok-pokok materi yang dibahas dalam bab ini meliputi :

- 2.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

dan menambahkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- 1) Perubahan Indikator Kinerja;
- 2) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan;
- 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- 4) Alasan dilakukan Perubahan.

Melampirkan tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada SIPD

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI Renja SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) RSUD Ratu Zalecha merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan tidak optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan ini terus dimonitor dan dievaluasi untuk mengukur progres pencapaiannya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan serta review evaluasi Renja hingga Triwulan I (mengacu pada APBD Tahun 2025) dari total nilai pagu sebesar Rp. 197.104.761.621 dan realisasi sebesar Rp. 43.581.700.709 yang diampu oleh dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Terdapat sejumlah program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, sementara sebagian lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.

2.1 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN.

Pada Tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) subkegiatan. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, adapun rincian program/kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target serta melebihi target kinerja sebagai berikut:

2.1.1 Program yang tidak memenuhi target kinerja :

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha, 2 (dua) program yang belum memenuhi target kinerja, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit dengan target kinerja 78 Indeks, sampai dengan triwulan I belum ada realisasi, karena capaian realisasi kinerja didapat pada triwulan IV.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
 - 1) Persentase Bangunan Gedung Rumah Sakit yang sesuai standar, dengan target 80% dengan realisasi kinerja pada Triwulan I : 0% karena realisasi kinerja didapat pada triwulan IV
 - 2) Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit dengan target 84% dengan realisasi

kinerja pada Triwulan I: 0% karena realisasi kinerja didapat pada triwulan IV

2.1.2 Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

Dari 9 (sembilan) kegiatan yang telah dilaksanakan pada RSUD Ratu Zalecha terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Rumah Sakit dengan target 25% dengan realisasi sebesar 12.5%
2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu:
 - 1) Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar dengan target tahunan 80% dengan realisasi kinerja 0% pada triwulan I;
 - 2) Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/ Kedokteran Sesuai Kebutuhan dengan target tahunan 84% dan target pada triwulan I adalah 10% dengan realisasi 0% di triwulan I.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) indikator kinerja, 2 (dua) indikator tidak mencapai target pada triwulan I, Yaitu:
 - 1) Presentase capaian SPM Keperawatan dengan target kinerja 95,2% di triwulan I Tahun 2025. Capaian realisasi kinerja 90,5%.
 - 2) Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik dengan target kinerja 88% di triwulan I Tahun 2025. Capaian realisasi kinerja 84%.

2.1.3 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

Dari 19 (sembilan belas) subkegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha terdapat 6 (Enam) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja triwulan I 650 Orang/bulan dengan realisasi 510 Orang/bulan, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 78.46%;
2. Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan, Target triwulan I sebesar 0 paket,dengan Realisasi Triwulan I sebesar 0 paket karena realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan II.

3. Sub-Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan indikator kinerja Jumlah Sarana/Prasarana yang Direhabilitasi/ Dipelihara, target kinerja 1 unit, realisasi 0 unit. Dikarenakan realisasi kinerja didapat pada triwulan IV.
4. Sub-Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan yang Disediakan. target triwulan I TA 2025 yaitu 50 unit dengan realisasi kinerja masih 0 unit. Beberapa proses pengadaan masih dalam tahap perencanaan dan pemilihan, dengan beberapa kendala sebagai berikut :
 - Hambatan Jadwal Libur Panjang Menjelang Lebaran Proses pengadaan melalui *e-katalog* harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Namun, adanya libur panjang menyebabkan beberapa proses tertunda dan terancam batal secara otomatis oleh sistem.
 - Peralihan Versi E-Katalog dari V5 ke V6.
Migrasi data dari *e-katalog* versi 5 ke versi 6 belum sepenuhnya selesai, sehingga banyak produk alat kesehatan yang belum tersedia dalam sistem. Hal ini menyulitkan proses pemilihan dan pengadaan barang.
 - Kebijakan Penundaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan untuk menunda sementara seluruh penggunaan dana bersumber TKD (*Transfer Ke Daerah*) hingga ada instruksi lebih lanjut. Kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran, sehingga beberapa rencana pengadaan terpaksa ditunda.
5. Sub-Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit, Target 2 unit, realisasi Triwulan I sebesar 0 unit Dikarenakan realisasi kinerja didapat pada triwulan IV.
6. Sub-Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator kinerja Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit, Target 1 laporan, Realisasi Triwulan I sebesar 0 laporan Dikarenakan realisasi kinerja didapat pada triwulan IV.

2.2 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

2.2.1 Program yang memenuhi target kinerja sebagai berikut :

Tidak ada

2.2.2 Kegiatan yang memenuhi target

Dari 9 Kegiatan, ada 5 (lima) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja target kinerja 25 % sedangkan capaian realisasi kinerja 25% di triwulan I Tahun 2025, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dengan target kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dengan Target Kinerja 100% pada triwulan I Tahun 2025 dan capaian realisasi kinerja juga mencapai 100%, berhasil memenuhi target kinerja di triwulan I Tahun 2025;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit target kinerja 25 % di Triwulan I Tahun 2025 dan capaian realisasi kinerja juga mencapai 25%, berhasil memenuhi target kinerja di triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah dengan Target Kinerja 100% pada triwulan I Tahun 2025 dan capaian realisasi kinerja juga mencapai 100%, berhasil memenuhi target kinerja di triwulan I Tahun 2025;
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD indikator kinerja Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit Pelayanan Penunjang Medik dengan target kinerja 25 % dan capaian realisasi kinerja juga mencapai 25%, berhasil memenuhi target kinerja di triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%

2.2.3 Sub Kegiatan yang memenuhi target :

Dari 19 (sembilan belas) subkegiatan yang dilaksanakan RSUD Ratu Zalecha terdapat 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target pada triwulan I sebanyak 5 dokumen dengan realisasi 5 dokumen, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 2 laporan realisasi 2 laporan, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja pada triwulan I sebesar 4 Laporan dengan realisasi 4 Laporan, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target kinerja 6 Dokumen dan Realisasi 6 Dokumen, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD target target kinerja pada triwulan I sebesar 6 Laporan realisasi 6 Laporan, secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
6. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja pada triwulan I sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target kinerja triwulan I sebanyak 3 Laporan realisasi 3 Laporan, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
8. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator kinerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan

Penunjang Pelayanan target kinerja pada triwulan I sebanyak 6 unit kerja realisasi 6 unit kerja, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;

9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%;
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Unit, realisasi 1 Unit. dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

2.3 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MELEBIHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

2.3.1 Program yang melebihi target :

Tidak Ada

2.3.2 Kegiatan yang melebihi target :

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian pada triwulan I TA 2025 dengan target kinerja 92.3% sedangkan capaian realisasi kinerja 94.33% di triwulan I Tahun 2025, dan secara keseluruhan di triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 102.2%.

2.3.3 Sub kegiatan yang melebihi target :

Tidak Ada

2.4 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan dapat terpenuhi berkat kolaborasi yang solid antara pemangku kegiatan dan pelaksana. Sinergi yang harmonis serta komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan penuh dari pimpinan, koordinasi yang efektif antar tim, serta semangat gotong royong dalam menyelesaikan tantangan operasional turut memperlancar pencapaian sasaran program/kegiatan.

Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Adanya perubahan regulasi/kebijakan pemerintah pusat/daerah
- b. Perubahan proses pengadaan barang jasa dan Migrasi katalog elektronik LKPP dari versi 5 ke versi 6
- c. Penundaan alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD)
- d. Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada prioritas kegiatan

Selain itu, ketepatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan memastikan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik sejak awal menjadi kunci utama dalam pencapaian hasil yang optimal.

2.5 IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM Renstra SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025, menunjukkan capaian kinerja RSUD Ratu Zalecha sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, Adapun Pelaksanaan kegiatan yang tertunda sehingga membuat presentase capaian kegiatan dan sub kegiatan tidak maksimal/ tidak tercapai karena adanya perubahan regulasi dalam pengadaan Barang Jasa dan Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada prioritas kegiatan. Untuk itu evaluasi terkait perencanaan, penetapan target dan anggaran harus dilaksanakan dengan tepat.

2.6 KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA, TERPENUHINYA ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025, RSUD Ratu Zalecha mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan
 - o Meningkatkan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran.
 - o Memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang memiliki risiko keterlambatan agar target penyerapan anggaran tercapai.
2. Penyesuaian Kegiatan dan Anggaran
 - o Penganggaran disesuaikan kembali untuk memastikan alokasi dana dialihkan ke program/kegiatan yang prioritas
3. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

- Memastikan realokasi anggaran tetap sejalan dengan target Renstra dan kebutuhan operasional rumah sakit.
- Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk meminimalisir dampak perubahan terhadap capaian kinerja.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA SKPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
TERLAKSAN ANYA PEMENUHA N UPAYA KESEHATA N PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bangunan Gedung RS yang Sesuai dengan Standar	Persen	92	53,829,718, 220	91	31,372,357, 965	80	13,904,095, 621	NA	34,400,000	NA	0.247	91	31,406, 757,965	99	58.34
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Ke dokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	Persen	85		100		84		NA		NA		100		118	
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kot a</i>	<i>Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar</i>	<i>Persen</i>	95	50,344,380, 220	80	30,527,673, 522	80	13,386,038, 121	NA	0	NA	0	95	30,527, 673,522	100. 00	60.64
		<i>Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Ke dokteran Sesuai Kebutuhan</i>	<i>Persen</i>	100		100		84		NA		NA		100		100. 00	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	2	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	9	17,276,461,0 00	6	6,824,578,65 3	1	2,376,000,00 0	0	0	0	0	6	6,824,57 8,653	66.7	39.50
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	421	21,243,076,0 20	82	23,639,251,8 69	103	6,072,744,92 1	0	0	0	0	82	23,639,2 51,869	19.5	111.3
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit	11	11,024,843,2 00	2	63,843,000	2	4,937,293,20 0	0	0	0	0	2	63,843,0 00	18.2	0.58

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Berfokus Pada Pelayanan	persen	80	2,708,352,200	94.9	553,769,934	80	391,651,500	80	Rp23,400,000	100	5.975	94.9	577,169,934	118.6	21.31
		Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Manajemen	Persen	80		80		80		80		100		80		100.00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Doku men	20	724,370,700	12	180,388,000	4	120,500,000	1	9,600,000	25	7.967	13	189,988,000	65.00	26.23
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	Doku men	4	293,203,500	2	3,055,000	1	93,376,500	0	0	0	0	2	3,055,000	50.00	1.04
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Ko ta	Unit	1	1,599,204,000	1	370,326,934	1	177,775,000	0	13,800,000	0	7.76	1	384,126,934	100.00	100.00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian SPM Keperawatan	persen	95.2	776,985,800	90.5	290,914,500	95.2	126,406,000	90.5	11,000,000	95.06	8.7	90.50	301,914,500	95.06	95.1
		Persentase Capaian SPM Pelayanan Medik	Persen	92		84		88		84		95.45		84.00		91.3	

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian</i>	<i>persen</i>	92.3		96.15		92.3		94.33		102.2 0		96.15		104. 2	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	1	776,985,800	1	290,914,500	1	126,406,000	1	11,000,000	100	8.7	2	301,914, 500	200	38.9
Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Rumah Sakit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	indeks	80	847,688,97 8,122	86.54	468,312,39 1,355	78	183,200,66 6,000		43,547,300, 709	0	23.77	86.54	511,859 ,692,06 4	108. 18	60.4
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja</i>	<i>persen</i>	100	327,816,00 0	100	144,818,30 0	100	74,625,100	25	5,600,000	25	7.50	100	150,418 ,300	100. 00	45.9
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	79	132,276,000	46	64,565,000	17	27,285,000	5	1,400,000	29.41	5.13	51	65,965,0 00	64.5 6	49.9

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	25	51,860,000	15	21,535,000	5	11,500,000	2	1,400,000	40	12.17	17	22,935,000	68.00	44.2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	80	143,680,000	49	58,627,300	16	35,840,100	4	2,800,000	25	7.81	53	61,427,300	66.25	42.8
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>341,436,125,461</i>	<i>100</i>	<i>170,136,698,132</i>	<i>100</i>	<i>71,567,320,000</i>	<i>100</i>	<i>16,322,515,064</i>	<i>100</i>	<i>22.81</i>	<i>100</i>	<i>186,459,213,196</i>	<i>100.00</i>	<i>54.61</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	740	340,067,417,460	512	169,813,594,432	650	71,284,900,000	510	16,295,155,064	78.46	22.86	1022	186,108,749,496	138.1	54.7
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	96	1,322,858,000	48	307,373,900	24	273,680,000	6	27,360,000	25	10.00	54	334,733,900	56.3	25.3

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaporan keuangan Rumah Sakit sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	lapora n	120	37,110,000	72	15,729,800	24	Rp 8,740,000	6	0	25	0	78	15,729,800	65.00	42.39
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	persen	100	9,729,871,000	100	2,793,494,090	100	2,966,239,900	25	338,296,265	25	11.40	100	3,131,790,355	100.00	32.19
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Doku men	30	226,049,900	18	34,884,000	6	33,049,900.00	1	5,280,000	16.67	15.98	19	40,164,000	63.33	17.77
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1112	9,503,821,100	359	2,758,610,090	390	2,933,190,000	45	333,016,265	11.54	11.35	404	3,091,626,355	36.3	32.5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum RS	Persen	100	8,433,757,750	100	3,882,177,885	100	3,702,409,000	25	171,968,618	25	4.64	100	4,054,146,503	100.00	48.07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	6,959,484,750	13	3,854,226,354	5	Rp 2,578,511,000	0	0	0	0	13	3,854,226,354	65.0	55.4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapora n	12	2,974,273,000	4	27,951,531	4	1,123,898,000	1	171,968,618	25	15.30	5.00	199,920,149	41.7	6.7

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	persen	100	32,907,376, 712	100	11,179,036, 084	100	7,390,072,0 00	100	1,152,766,3 96	100	15.60	100	12,331, 802,480	100. 00	37.5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	32,907,376,7 12	36	11,179,036,0 84	12	7,390,072,00 0	3	1,152,766,39 6	25	15.60	39	12,331,8 02,480	65.0	37.5
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit Pelayanan Keperawatan	persen	100	551,500,00 0,000	100	280,176,16 6,864	100	97,500,000, 000	25	25,556,154, 366	25	26.21	100.0 0	305,732 ,321,23 0	100. 0	55.44
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	551,500,000, 000	6	280,176,166, 864	6	97,500,000,0 00	6	25,556,154,3 66	100	26.21	6	305,732, 321,230	100. 0	55.4

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

TABEL 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2025 (SEBELUM PERUBAHAN)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks
	Meningkatnya Mutu Pelayanan RSUD Ratu Zalecha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	87 Indeks
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
		SPM Rumah Sakit	91,5 %

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan Rancangan Akhir Rencana Startegis (Renstra) RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN 2025

TUJUAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	TARGET KINERJA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	73.89
		Prevalensi Stunting	20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS	87.5
	Meningkatnya Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Indikator Nasional Mutu (INM)	69 Indeks
		Bed Occupancy Rate (BOR)	54%
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Predikat Sakip Perangkat Daerah	BB

3.2 JUMLAH PROGRAM DAN JUMLAH KEGIATAN

Pada Tahun 2025 RSUD Ratu Zalecha melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjar dan 1 kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD, adapun program/kegiatan tersebut adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
 - b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - c) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3.3 TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF YANG DIRINCI MENURUT SUMBER PENDANAANNYA

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Pelaksanaannya ditujukan untuk mencapai tujuan SKPD. RSUD Ratu Zalecha melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan dengan pagu anggaran murni sebesar Rp 200.667.497.117,-.

Selanjutnya, setelah disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2025, total pagu anggaran dalam Perubahan Renja RSUD Ratu Zalecha mengalami penyesuaian menjadi Rp208.137.290.281,-. Rincian pendanaan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3. 3 SUMBER PENDANAAN TA 2025

N o	Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	APBD	103.167.497.117	98.137.290.821	- 5.030.206.296
2.	BLUD	97.500.000.000	110.000.000.000	12.500.000.000
Total		200.667.497.117	208.137.290.821	17.530.206.296

Total Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan RSUD Ratu Zalecha Martapura berasal dari :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rekapitulasi kebutuhan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3. 4 REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN PERUBAHAN DAN SUMBER PENDANAAN TAHUN 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	200.667.497.117	208.137.290.821	APBD/BLUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.263.401.496	194.522.591.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.625.000	59.947.200	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.285.000	21.881.700	APBD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.500.000	9.580.000	APBD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.840.100	28.485.500	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.375.055.496	71.565.540.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.092.635.496	71.284.900.000	APBD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.680.000	273.680.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.740.000	6.960.000	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.966.239.900	2.368.241.800	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.049.900	25.799.800	APBD
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.933.190.000	2.342.442.000	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.957.409.000	3.138.790.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.578.511.000	2.555.591.000	APBD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.378.898.000	583.199.000	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.390.072.000	7.390.072.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.390.072.000	7.390.072.000	APBD
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	97.500.000.000	110.000.000.000	
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	97.500.000.000	110.000.000.000	BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.404.095.621	13.614.699.821	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.886.038.121	13.213.907.321	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.376.000.000	2.376.000.000	APBD
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.572.744.921	6.052.825.921	APBD
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	4.937.293.200	4.785.052.400	APBD
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	391.651.500	303.386.700	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120.500.000	107.564.000	APBD
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	93.376.500	73.035.700	APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	177.775.000	122.787.000	APBD
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	126.406.000	97.405.800	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	126.406.000	97.405.800	APBD

3.4 ALASAN DILAKUKAN PERUBAHAN

Perubahan dilakukan pada anggaran beberapa sub kegiatan, yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya. Kebutuhan yang dimaksud berupa belanja barang, jasa, dan belanja modal yang sebelumnya tidak teranggarkan. Penyesuaian terhadap target pun mesti dilakukan untuk menyikapi adanya perubahan anggaran tersebut guna menjaga keserasian antara target dan anggaran Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD Ratu Zalecha merupakan penjabaran tahunan dari dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra).

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, RSUD Ratu Zalecha telah memuat secara terperinci indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyesuaian target indikator kinerja utama pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit karena berdasarkan hasil penilaian IKM RS tahun 2024 sudah mencapai 87,3 Indeks. Serta berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan RI dimana RSUD Ratu Zalecha yang semula di tunjuk sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas KJSU-KIA dan Diabetes Melitus (Kanker, jantung, Stroke dan Urologi-Kesehatan Ibu dan Anak, dan Diabetes Melitus) menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan 10 (sepuluh) Layanan Prioritas yaitu ; Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal, Hepar, Layanan KIA, Respiratori dan Tuberkulosis, Penyakit Infeksi Emerging, Layanan Kesehatan Jiwa, Diabetes Mellitus dimana diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan layanan dan peningkatan SDM serta sarana prasarana.

Beberapa penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja. Berikut daftar indikator kinerja yang dilakukan perubahan. Berikut rincian perubahan anggaran beserta alasan penyesuaian pada RSUD Ratu Zalecha pada Tahun Anggaran 2025 :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD perubahan dilakukan penambahan anggaran, perubahan BLUD berasal dari peningkatan Pendapatan BLUD untuk keperluan perubahan dari belanja barang jasa dan belanja modal karena peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada peningkatan belanja operasional.
2. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan

UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan perubahan dilakukan karena adanya Efisiensi anggaran dan adanya duplikasi belanja modal alat kedokteran Patologi Anatomi pada anggaran DAK, sehingga dialihkan ke belanja modal alat kedokteran rehab medik dan alat kedokteran Patologi Anatomi yang belum terakomodir pada anggaran DAK

3. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit perubahan dilakukan karena adanya Efisiensi anggaran dan adanya Perubahan Rincian dari anggaran bangunan OK (Kamar Operasi) yang sebelumnya dibuat untuk membackup rencana hibah alat cathlab dari kementrian Kesehatan, namun karena ketidakpastian penyediaan SDM dan regulasi pembayaran dari BPJS untuk giat operasional nya sehingga anggaran dialihkan ke Pengembangan ruang poli Paru dan ruang inap paru, Poli rehab medik, pembuatan ruang tunggu keluarga pasien perinatalogi

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Perubahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dibawah ini :

TABEL 3. 5 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		IKM RS	IKM RS	87	87.5				Target IKM RSUD Ratu Zalecha menyesuaikan capaian IKM RSUD Ratu Zalecha tahun 2024
		BOR	BOR	100%	100%				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit		Predikat Sakip Perangkat Daerah	Sakip Predikat Perangkat Daerah	BB	BB				
TOTAL ANGGARAN						200,667,497,117	208,137,290,821		

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	92%	75%	11,404,095,621	13,614,699,821	2,210,604,200	
Meningkatnya Pelayanan berorientasi Pasien		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan /Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit	84%	80%				
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan			Persentase sarana prasarana sesuai dengan standar Pelayanan		65%				
Meningkatnya sarana prasarana Rumah Sakit	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	Persentase prasarana Rumah Sakit sesuai standar	95	70%	10,886,038,121	13,213,907,321	2,327,869,200	
			Persentase sarana Rumah sakit sesuai standar		90%				
Pemenuhan alat kesehatan RS sesuai dengan kebutuhan		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan / Kedokteran sesuai kebutuhan	Persentase alat kesehatan yang terpenuhi	95	90%				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
			sesuai kebutuhan						
Tersedianya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0 Unit	0	0	-	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Sub Kegiatan Rehab ilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	2,376,000,000	2,376,000,000	-	
Tersedianya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sub Kegiatan Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat t Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	112 Unit	112 Unit	3,572,744,921	6,052,854,921		Perubahan karena Adanya duplikasi belanja modal alat kedokteran
									Patologi

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
									Anatomi pada anggaran DAK sehingga dialihkan ke belanja modal alat kedokteran rehab medik dan alat kedokteran Patologi Anatomi yang belum terakomodir pada anggaran DAK
Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	2 Unit	2 Unit	4,937,293,200	4,785,052,400	152,240,800	Perubahan Rincian dari anggaran bangunan OK yang sebelumnya dibuat untuk membackup rencana hibah alat cathlab dari kementerian Kesehatan, namun karena ketidakpastian penyediaan SDM dan regulasi

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
			Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						pembayaran dari BPJS untuk giat operasional nya sehingga anggaran dialihkan ke Pengembangan ruang poli Paru dan ruang inap paru, Poli rehab medik, pembuatan ruang tunggu keluarga pasien perinatalogi
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Sakit	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Berfokus Pada Pelayanan	Persentase peningkatan kunjungan pengguna layanan rumah sakit	80%	26.7%	391,651,500	303,386,700	88,264,800	
Tercapainya Indikator Mutu Unit Layanan Rumah Sakit			Persentase mutu Unit yang tercapai dalam 1 tahun		75%				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Publikasi Rumah Sakit		Persentase Capaian Akreditasi Kelompok Manajemen	Persentase pelayanan yang dipublikasika n	80%	100%				
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	120,500,000	107,564,000	12,936,000	Efisiensi Anggaran
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	93,376,500	73,035,700	20,340,800	Efisiensi Anggaran
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Ko ta	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Ko ta	1 Unit	1 Unit	177,775,000	122,787,000	54,988,000	Efisiensi Anggaran
Meningkatnya Pengelolaan Risiko RS	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Persentase Capaian SPM Keperawatan Persentase Capaian SPM	Presentasi Laporan Insiden yang di tindaklanjuti	95.2%	90%	126,406,000	97,405,800	29,000,200	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Budaya Keselamatan Pasien	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Pelayanan Medik Persentase Capaian SPM Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian	Predikat Kematangan Budaya Keselamatan Pasien	88%	Reaktif				
Meningkatnya Perbaikan sistem Pelayanan berorientasi Pasien			Presentasi Kepatuhan Penggunaan e -Rekam Medis (e- RM)	92.30%	80%				
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	126,406,000	97,405,800	29,000,200	Efisiensi Anggaran
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	78 Indeks	78 Indeks	189,263,401,496	194,522,591,000	- 5,259,189,504	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit			Persentase tingkat kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		50%				
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia rumah sakit			Persentase Sumber Daya Manusia rumah sakit yang kompeten		20%				
Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan Rumah Sakit	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Rumah Sakit yang sesuai ketentuan	100%	100%	74,625,100	59,947,200	14,677,900	
Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian kinerja perangkat daerah			Persentase Laporan Capaian kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan		100%				
Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Pengendalian Internal			Persentase Dokumen Pengendalian Internal		100%				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
			sesuai ketentuan						
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	17	27,285,000	21,881,700	5,403,300	Efisiensi Anggaran
	Daerah								
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	11,500,000	9,580,000	1,920,000	Efisiensi Anggaran
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	35,840,100	28,485,500	7,354,600	Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	77,375,055,496	71,565,540,000	5,809,515,496	Efisiensi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah			Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset yang sesuai ketentuan		100%				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan	650 Orang/bulan	77,092,635,496	71,284,900,000	5,807,735,496	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	273,680,000	273,680,000	-	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	8,740,000	6,960,000	1,780,000	Efisiensi Anggaran
Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai kebutuhan pelayanan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan administrasi Kepegawaian RS	Persentase SDM yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	80%	2,966,239,900	2,368,241,800	597,998,100	
Meningkatnya kompetensi SDM Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan			Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang bersertifikat sesuai kompetensi		23%				

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
			Persentase SDM Non Tenaga Kesehatan yang bersertifikat sesuai kompetensi		21%				
dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Jumlah Pegawai	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Jumlah Pegawai	6 Dokumen	6 Dokumen	33,049,900	25,799,800	7,250,100	Efisiensi Anggaran
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	390 Orang	2,933,190,000	2,342,442,000	590,748,000	
Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi Umum	Administrasi Umum yang berkualitas	100%	100%	3,957,409,000	3,138,790,000	818,619,000	Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2,578,511,000	2,555,591,000	22,920,000	Efisiensi Anggaran
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1,378,898,000	583,199,000	795,699,000	Efisiensi Anggaran
Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100%	100%	7,390,072,000	7,390,072,000	-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,390,072,000	7,390,072,000	-	

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1		2	3	4	5	6	8	9 (6-8)	
Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit	KegiatanPeningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Perbaikan persentase pendapatan rumah sakit (SGR)	100%	1%	97,500,000,000	110,000,000,000	- 12,500,000,000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sub KegiatanPelaya nan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	97,500,000,000	110,000,000,000	12,500,000,000	Adanya perubahan rincian belanja dikarenakan peningkatan jumlah pasien yang berimbas pada peningkatan belanja Operasional. Penambahan anggaran perubahan BLUD berasal dari peningkatan Pendapatan BLUD

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja RSUD Ratu Zalecha, seluruh pejabat di lingkungan RSUD Ratu Zalecha wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan acuan bagi RSUD Ratu Zalecha dalam rangka tercapainya sinergi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 RSUD Ratu Zalecha dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika aktual yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah. Sejumlah catatan penting yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan dokumen ini antara lain:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Proses perubahan Renja ini berangkat dari hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Ditemukan adanya beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target karena kendala teknis dan administratif, sehingga diperlukan langkah perbaikan melalui penyesuaian perencanaan dan penganggaran.

2. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah

Seiring dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta Surat Edaran Bupati Banjar tentang penyusunan perubahan Renja, maka RSUD Ratu Zalecha perlu mengakomodasi perubahan regulasi tersebut dalam dokumen perencanaannya.

3. Efisiensi Anggaran dan Realokasi Belanja

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut berdampak terhadap alokasi belanja di rumah sakit. Oleh karena itu, dilakukan realokasi anggaran terhadap program dan kegiatan prioritas, termasuk penyesuaian belanja modal dan operasional guna menjaga kesinambungan pelayanan.

4. Penguatan Peran Rumah Sakit sebagai Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas

Berdasarkan penetapan Kementerian Kesehatan RI, RSUD Ratu Zalecha menjadi rumah sakit jejaring pengampuan untuk 10 layanan prioritas

nasional. Hal ini menuntut penguatan pada aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen rumah sakit.

5. Peningkatan Kualitas Perencanaan yang Terukur dan Akuntabel

Proses perubahan Renja diarahkan untuk meningkatkan keselarasan antara rencana, target kinerja, dan kapasitas anggaran. Perubahan indikator kinerja dilakukan secara selektif berdasarkan hasil evaluasi dan relevansi dengan misi rumah sakit, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terukur dan akuntabel.

6. Partisipasi dan Koordinasi Antarunit Kerja

Penyusunan dokumen perubahan ini melibatkan partisipasi aktif seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Ratu Zalecha melalui proses koordinasi yang intensif. Hal ini penting guna memastikan bahwa perubahan rencana kerja dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Program/Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja RSUD Ratu Zalecha bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, yaitu meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

Dengan demikian, RSUD Ratu Zalecha dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Proses penyusunan perubahan Renja berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Bupati Banjar terkait perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk memastikan legalitas dan kesesuaian dokumen dengan kerangka peraturan perundang-undangan.

2. Berbasis Evaluasi Kinerja

Perubahan Renja disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi ini menjadi dasar utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan serta mengidentifikasi kegiatan yang perlu disesuaikan atau diprioritaskan ulang.

3. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
Kaidah penyusunan mengacu pada keterpaduan dan kesinambungan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama Rancangan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025–2029 serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan menjaga kesinambungan arah kebijakan dan pembangunan sektor kesehatan.
4. Fleksibilitas terhadap Perubahan dan Dinamika Lapangan
Kaidah pelaksanaan menyadari bahwa perubahan lingkungan strategis, baik dari sisi regulasi, fiskal, maupun kebutuhan layanan masyarakat, menuntut adanya fleksibilitas dalam penyesuaian perencanaan. Oleh karena itu, perubahan Renja dilakukan secara adaptif namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.
5. Pengutamaan Program dan Kegiatan Prioritas
Dalam menyusun perubahan Renja, difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target indikator utama rumah sakit, termasuk indikator pelayanan prioritas nasional dan indikator kinerja daerah. Setiap penyesuaian diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan strategis.
6. Akuntabilitas dan Transparansi
Seluruh proses penyusunan perubahan Renja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan unit-unit terkait dalam pengambilan keputusan. Dokumentasi perubahan dan justifikasinya dicatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, Perubahan Renja RSUD Ratu Zalecha Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyesuaian penganggaran dan implementasi kebijakan strategis rumah sakit. Untuk itu, diperlukan rencana tindak lanjut agar dokumen ini dapat dijalankan secara efektif dan berkesinambungan dan untuk memastikan implementasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 RSUD Ratu Zalecha berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Perubahan Renja kepada Seluruh Unit Kerja, dengan tujuan agar setiap unit memahami peran, target, dan alokasi

anggaran yang telah disesuaikan, sehingga pelaksanaan program berjalan selaras dengan dokumen perencanaan.

2. Penyelarasan Dokumen Penganggaran untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan alokasi anggaran yang tersedia.
3. Melakukan Pengendalian dan Monitoring pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pencapaian kinerja tepat sasaran, serta memberikan ruang untuk perbaikan secara berkelanjutan;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPD) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan kegiatan rumah sakit;
5. Menyusun laporan evaluasi kinerja setiap triwulan dan akhir tahun dan pemberian rekomendasi perbaikan, dan menyusun pelaporan kinerja dan akuntabilitas sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya;
6. Koordinasi Berkelanjutan dengan Stakeholder Terkait (Bappedalitbang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)), guna menjamin sinergi antar pihak dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2025 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Perubahan Renja tahun 2025 ini agar dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Martapura, 09 Juni 2025
Direktur RSUD Ratu Zalecha

Arief Rachman, S.Si.Apt.M.MKes.
Pembina TK I
NIP.198105012005011012

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Perubahan Renja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPRP Kabupaten Banjar untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar Tahun 2025 harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang/ bagian di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

BAB I

PENDAHULUAN

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diatur Kabupaten Banjar diatur berdasarkan 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang terdiri dari 6 bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Pertanahan, bidang Bina Jasa Konstruksi, bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain itu juga terdapat 1 Bagian yakni Bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Sebagaimana diketahui kebijakan dan program Pembangunan Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 yang dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Selanjutnya disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Sehubungan dengan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2030 yang terlebih dahulu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 bahwa perubahan RKPD dan Renja SKPD dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksud, dapat menyesuaikan target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan

triwulan I tahun 2025. Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah tahun 2025 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2025, demikian pula dengan kinerja SKPD terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2025-2030. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar tahun 2025, yang meliputi: penyesuaian kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program dan kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran daerah.

Keadaan yang melatarbelakangi perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 meliputi :

1. Pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan dan penambahan pekerjaan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Penurunan Target Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2025;
3. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan;
4. Penambahan pengadaan tiang box iklan bahan besi dalam rangka mendukung capaian target Pendapatan Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 175);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4); dan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan pedoman kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja sampai triwulan I.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, keterkaitan antara perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dengan perubahan Renja K/ L dan perubahan Renja provinsi/ kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- a. Perubahan Indikator Kinerja;
- b. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; dan
- d. Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025 dari total nilai pagu sebesar Rp. 342.249.942.908,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.038.686.021,- atau 1,18%.

Adapun dibawah ini beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kesiapan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Aplikasi Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6.
2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Adanya perubahan target dan sasaran sehingga dilaksanakan setelah disahkannya APBD Perubahan/ Pergeseran.
4. Waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk penyelesaian paket pekerjaan.
5. Adanya perubahan lokasi paket pekerjaan dan efisiensi anggaran.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUPRP dan Pencapaian Renstra DPUPRP s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Banjar

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Fisik	Persentase Jalan Kondisi Mantap	52,17%	52,17%	100,00%	Rp 75.529.101.611,00	Rp 257.891.800,00	0,34%
		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Layak	78,40%	78,40%	100,00%	Rp 15.770.283.200,00	Rp 109.275.889,00	0,69%
		Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Termanfaatkan	98,50%	98,50%	100,00%	Rp 240.611.200,00	Rp 52.020.000,00	21,62%
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Berfungsi Dengan Baik	Persentase Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	69,82%	69,82%	100,00%	Rp 1.651.856.500,00	Rp 104.450.000,00	6,32%
		Persentase Luasan Rawan Banjir	41,10%	41,10%	100,00%			
3	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman	18,80%	18,80%	100,00%	Rp 4.796.800.000,00	Rp 94.500.000,00	1,97%
		Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	10,22%	10,22%	100,00%	Rp 4.528.280.545,00	Rp 64.200.000,00	1,42%
4	Meningkatnya	Persentase Kesesuaian	90,24%	90,24%	100,00%	Rp	Rp	0,11%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang				2.158.082.800,00	2.445.000,00	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	0,00%	0,00%	#DIV/0!	Rp 6.049.929.361,24	Rp 3.353.903.332,00	55,44%
8	Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar	52,17%	52,17%	100,00%	Rp 74.401.004.263,00	Rp -	0,00%
9	Meningkatnya Penanganan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang ditangani	0,00%	0,00%	-	Rp 74.401.004.263,00	Rp -	0,00%
		Persentase Panjang Jembatan yang ditangani	0,00%	0,00%	-			
10	Meningkatnya Pembangunan Jalan Baru	Panjang Jalan Baru	0,00%	0,00%	-			
11	Meningkatnya Kualitas Pra Sarana Penunjang Jalan	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik	0,00%	2,09%	#DIV/0!	Rp 1.128.097.348,00	Rp 257.891.800,00	22,86%
12	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	88,34%	88,34%	100,00%	Rp 1.651.856.500,00	Rp 104.450.000,00	6,32%
13	Terkendalinya	Persentase Sungai yang	0,00%	0,00%	-			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daya Rusak Air pada Sungai Kabupaten	Dinormalisasi						
14	Meningkatnya Penanganan Sistem Drainase	Persentase Penanganan Drainase	12,28%	13,59%	110,71%	Rp 1.128.097.348,00	Rp 257.891.800,00	22,86%
15	Meningkatnya Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Drainase Baru	0,00%	0,00%	-			
16	Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Optimal	Persentase Panjang Sungai yang Dikelola	0,037%	0,037%	100,00%	Rp 918.097.000,00	Rp -	0,00%
17	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan DI/ DIR Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	69,82%	69,82%	100,00%	Rp 733.759.500,00	Rp 104.450.000,00	14,23%
18	Terjaganya Debit Air	Persentase Pintu Air Dalam Kondisi Baik	48,98%	48,98%	100,00%			
19	Meningkatnya Sambungan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	0,00%	0,00%	#DIV/0!	Rp 4.796.800.000,00	Rp 94.500.000,00	1,97%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
20	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	20,00%	20,00%	100,00%	Rp 4.528.280.545,00	Rp 64.200.000,00	1,42%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Konstruksi Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	89,63%	89,63%	100,00%	Rp 15.423.052.350,00	Rp 93.105.889,00	0,60%
		Persentase Lingkungan yang Tertata Bangunan dan Lingkungan	86,47%	86,47%	100,00%			
22	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten	0,00%	0,00%	-	Rp 4.796.800.000,00	Rp 94.500.000,00	1,97%
23	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	20,00%	20,00%	100,00%	Rp 4.528.280.545,00	Rp 64.200.000,00	1,42%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
24	Meningkatnya Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	51,43%	51,43%	100,00%	Rp 15.423.052.350,00	Rp 93.105.889,00	0,60%
25	Meningkatnya Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	0,00%	0,00%	-	-	-	-
26	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	5,00%	0,00%	0,00%	Rp 347.230.850,00	Rp 16.170.000,00	4,66%
27	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Persentase Operator Teknis/ Analis dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dilatih	5,00%	3,02%	60,40%	Rp 306.940.850,00	Rp 16.170.000,00	5,27%
28	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	40,00%	40,00%	100,00%	Rp -	Rp -	#DIV/0!

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
29	Meningkatnya Jasa Konstruksi yang Terdaftar	Persentase Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten yang Diawasi dan Dievaluasi	0,00%	0,00%	-	Rp 40.290.000,00	Rp -	0,00%
30	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkotaan	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkotaan	91,02%	91,02%	100,00%	Rp 1.955.932.800,00	Rp 1.050.000,00	0,05%
31	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 202.150.000,00	Rp 1.395.000,00	0,69%
32	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase RUTR dan RRTR yang ditetapkan	17,00%	17,00%	100,00%	Rp 1.896.902.800,00	Rp -	0,00%
33	Meningkatnya Kesesuaian	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 39.293.800,00	Rp 1.050.000,00	2,67%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penataan Ruang Terhadap Dinamika Pembangunan	RUTR						
34	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22,50%	25,80%	114,67%	Rp 19.736.200,00	Rp -	0,00%
35	Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Bangunan Ber-IMB	8,30%	8,30%	100,00%	Rp 202.150.000,00	Rp 1.395.000,00	0,69%
36	Meningkatnya Fasilitasi Tanah Pemkab	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 67.762.200,00	Rp 3.600.000,00	5,31%
37	Meningkatnya Fasilitasi Tanah Pemkab	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	25,00%	50,00%	200,00%	Rp 1.425.000,00	Rp -	0,00%
38	Meningkatnya	Persentase Fasilitasi Bidang	25,00%	25,00%	100,00%	Rp	Rp	29,11%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Fasilitasi Tanah Pembab	Aset Tanah Pembab yang Bersertifikat dan yang Didaftarkan				141.600.000,00	41.220.000,00	
39	Meningkatnya Fasilitasi Tanah Pembab	Persentase Aset Tanah Pembab yang Terinventarisir dan Dipatenkan	25,00%	6,00%	24,00%	Rp 29.824.000,00	Rp 7.200.000,00	24,14%
40	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase Inventaris Potensi Permasalahan Pertanahan	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 67.762.200,00	Rp 3.600.000,00	5,31%
		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	25,00%	25,00%	100,00%			
41	Terselenggaranya Fasilitasi Aset Tanah Kabupaten	Persentase telaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	25,00%	50,00%	200,00%	Rp 1.425.000,00	Rp -	0,00%
42	Terselenggaranya Fasilitasi Aset Tanah Kabupaten	Persentase Jumlah Permohonan Bidang Tanah Pembab yang Sudah Terdaftar	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 141.600.000,00	Rp 41.220.000,00	29,11%
43	Terselenggaranya Fasilitasi Aset Tanah Kabupaten	Persentase Fasilitasi Bidang Aset Tanah Pembab yang Bersertifikat dan yang Didaftarkan	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 29.824.000,00	Rp 7.200.000,00	24,14%
44	Terselenggaranya Urusan Penyusunan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	0,00%	0,00%	-	Rp 6.049.929.361,24	Rp 3.353.903.332,00	55,44%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Program Perencanaan, Keuangan dan Aset Umum dan Kepegawaian	Pertanahan						
45	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	50,00%	50,00%	100,00%	Rp 72.025.000,00	Rp 13.110.000,00	18,20%
46	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	26,67%	26,67%	100,00%	Rp 3.043.918.854,24	Rp 2.355.541.884,00	77,39%
47	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 15.015.000,00	Rp 1.125.000,00	7,49%
48	Lancarnya Administrasi Kepegawaian	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	16,67%	16,67%	100,00%	Rp 100.000.000,00	Rp 15.524.500,00	15,52%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah							
49	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 1.429.035.125,00	Rp 73.277.934,00	5,13%
50	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 908.593.550,00	Rp 774.329.282,00	85,22%
51	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,00%	25,00%	100,00%	Rp 481.341.832,00	Rp 120.994.732,00	25,14%
52	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jembatan : 0 dok. Jalan Desa : 0 dok, Jalan Kabupaten: 0 dok	Jembatan : 0 Dok. Jalan Desa : 0 dok. Jalan Kabupaten: 0 dok	-	Rp 3.767.988.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Jembatan							
53	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembata n	0 Jembata n	-	Rp 2.813.190.000,00	Rp -	0,00%
54	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 km	0 km	-	Rp 3.079.550.000,00	Rp -	0,00%
55	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0 km	0 km	-	Rp 33.217.528.594,00	Rp -	0,00%
56	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 km	0 km	-	Rp 2.344.057.417,00	Rp -	0,00%
57	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembata n	2 Jembata n	-	Rp 1.407.585.000,00	Rp -	0,00%
58	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembata n	0 Jembata n	-	Rp 4.315.988.337,00	Rp -	0,00%
59	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembata n	0 Jembata n	-	Rp 2.725.807.866,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
60	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan / Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jembatan : 0 km, Jalan Desa : 0 km, Jalan Kabupaten: 781,39 km	0 Km	-	Rp 365.320.000,00	Rp -	0,00%
61	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 km	0 km	-	Rp 16.568.547.200,00	Rp -	0,00%
62	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0 km	30 Km	-	Rp 3.795.441.849,00	Rp -	0,00%
63	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	-	Rp 81.213.000,00	Rp -	0,00%
64	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	0 Kawasan Genangan	0 Kawasan Genangan	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!
65	Terehabilitasinya Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0 Sistem Drainase	0 Sistem Drainase	-	Rp 36.220.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perkotaan		Perkotaa n	Perkotaa n				
66	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaa n	0 Sistem Drainase Perkotaa n	-	Rp 548.387.500,00	Rp 10.879.800,00	1,98%
67	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokume n	0 Dokume n	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!
68	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaa n	3 Sistem Drainase Perkotaa n	300,00%	Rp 462.276.848,00	Rp 247.012.000,00	53,43%
69	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 Km	0.514 Km	102,80%	Rp 374.400.000,00	Rp -	0,00%
70	Terlaksananya Normalisasi/Restor asi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 Km	0 Km	-	Rp 195.400.000,00	Rp -	0,00%
71	Terbangunnya Bangunan	Panjang Bangunan PerkuatanTebing yang Dibangun	0 Km	0 Km	-	Rp 336.657.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perkuatan Tebing							
72	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 2.850.000,00	Rp -	0,00%
73	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 6.890.000,00	Rp -	0,00%
74	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 1.900.000,00	Rp -	0,00%
75	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	0 Bendung	-	Rp 220.846.400,00	Rp -	0,00%
76	Terehabilitasinya	Panjang Jaringan Irigasi Rawa	0 Km	0 Km	-	Rp	Rp	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Jaringan Irigasi Rawa	yang Direhabilitasi				241.624.600,00	-	
77	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km	0,05 Km	-	Rp 162.848.500,00	Rp 44.650.000,00	27,42%
78	Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0 Lembaga	0 Lembaga	-	Rp 108.440.000,00	Rp 59.800.000,00	55,15%
79	Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!
80	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	-	Rp 2.129.850.000,00	Rp -	0,00%
81	Terlaksananya Fasilitasi Kerja	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	0 Unit	0 Unit	-	Rp 96.050.000,00	Rp 78.000.000,00	81,21%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sama Penyelenggaran SPAM Daerah Kabupaten	Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama						
82	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0 Unit	-	Rp 900.000,00	Rp -	0,00%
83	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	0 SR	-	Rp 2.570.000.000,00	Rp 16.500.000,00	0,64%
84	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	Rp 139.725.000,00	Rp -	0,00%
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			-			#DIV/0!

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Domestik (SPALD)							
85	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0 Rumah Tangga	0 Rumah tangga	-	Rp 3.977.284.445,00	Rp 5.700.000,00	0,14%
86	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Orang	0 Orang	-	Rp 411.271.100,00	Rp 58.500.000,00	14,22%
87	Terbangunnya dan Terpeliharanya Lingkungan dan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0 Kawasan	0 Kawasan	-	Rp 15.202.445.250,00	Rp 93.105.889,00	0,61%
88	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 220.607.100,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Bangunan Pemerintah							
89	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga KerjaKonstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atauAnalis yang Difasilitasi Sertifikasi	0 Orang	0 Orang	-	Rp 232.062.250,00	Rp -	0,00%
90	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	65 Lembaga	65 Lembaga	100,00%	Rp 49.565.000,00	Rp 16.170.000,00	32,62%
91	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,Teknisi atau Analis yang Dilatih	0 Orang	0 Orang	-	Rp 25.313.600,00	Rp -	0,00%
92	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	0 Dokume n	0 Dokume n	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Disediakan						
93	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	-	Rp 3.720.000,00	Rp -	0,00%
94	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	0 Lembaga	0 Lembaga	-	Rp 36.570.000,00	Rp -	0,00%
95	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 660.832.800,00	Rp -	0,00%
96	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 1.213.800.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
97	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	0 Laporan	0 Laporan	-	Rp 22.270.000,00	Rp -	0,00%
98	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokume n	1 Dokume n	100,00%	Rp 39.293.800,00	Rp 1.050.000,00	2,67%
99	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	75 Dokume n	86 Dokume n	114,67%	Rp 19.736.200,00	Rp -	0,00%
100	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokume n	0 Dokume n	-	Rp 1.740.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
101	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	33 Dok	110,00%	Rp 200.410.000,00	Rp 1.395.000,00	0,70%
101	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0 Berita Acara	-	Rp 37.931.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
102	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%	Rp 29.831.200,00	Rp 3.600.000,00	12,07%
103	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	0 Dokumen	0 Dokumen	-!	Rp 1.425.000,00	Rp -	0,00%
104	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	25 Dokumen	20 Dokumen	80,00%	Rp 141.600.000,00	Rp 41.220.000,00	29,11%
105	Terlaksananya	Jumlah Laporan Koordinasi dan	0	0	-	Rp	Rp	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan		3.494.000,00	-	
106	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Rp 26.330.000,00	Rp 7.200.000,00	27,35%
107	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Rp 45.475.000,00	Rp 13.110.000,00	28,83%
108	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Rp 5.800.000,00	Rp -	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	SKPD							
109	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	Rp 3.828.000,00	Rp -	0,00%
110	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokume n	1 Dokume n	100,00%	Rp 6.922.000,00	Rp -	0,00%
111	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	#DIV/0!	Rp 10.000.000,00	Rp -	0,00%
112	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang /Bulan	72 Orang/	100,00%	Rp 2.789.699.354,24	Rp 2.305.065.884,00	82,63%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	ASN			Bulan				
113	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Rp 237.375.000,00	Rp 49.040.000,00	20,66%
114	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Rp 9.538.500,00	Rp 720.000,00	7,55%
115	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	Rp 3.608.000,00	Rp 716.000,00	19,84%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	SKPD							
116	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokume n	0 Dokume n	-	Rp 3.698.000,00	Rp -	0,00%
117	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Rp 15.015.000,00	Rp 1.125.000,00	7,49%
118	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	100,00%	Rp 100.000.000,00	Rp 15.524.500,00	15,52%
119	Tersedianya	Jumlah Paket Komponen	3 Paket	3 Paket	100,00%	Rp	Rp	0,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5.335.500,00	-	
120	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	Rp 337.709.000,00	Rp -	0,00%
121	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	Rp 57.708.650,00	Rp 2.000.000,00	3,47%
122	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	Rp 11.361.975,00	Rp 1.188.171,00	10,46%
123	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Rp 20.100.000,00	Rp 1.000.000,00	4,98%
124	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Rp 11.100.000,00	Rp -	0,00%
125	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Rp 985.720.000,00	Rp 69.089.763,00	7,01%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Konsultasi SKPD							
126	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Rp 6.470.500,00	Rp -	0,00%
127	Tersedianya asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Rp 148.283.050,00	Rp 56.857.602,00	38,34%
128	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	Rp 753.840.000,00	Rp 717.471.680,00	95,18%
129	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00%	Rp 23.992.576,00	Rp 5.052.376,00	21,06%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisasi i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
130	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22 Unit	220,00%	Rp 51.000.576,00	Rp 90.773.856,00	177,99%
131	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100,00%	Rp 100.000.000,00	Rp 10.031.500,00	10,03%
132	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2 Unit	40,00%	Rp 47.487.500,00	Rp 594.000,00	1,25%
133	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00%	Rp 258.861.180,00	Rp 14.543.000,00	5,62%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 1	Realisas i Tw. 1	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Bangunan Lainnya							

Dari sisi kinerja, seluruh indikator yang memiliki target telah tercapai 100% pada Triwulan I, menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif. Namun dari sisi anggaran, rata-rata realisasi masih sangat rendah, kecuali pada indikator akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran di triwulan berikutnya agar sesuai dengan progres capaian kinerja.

Secara umum, keberhasilan kinerja dicapai karena kualitas perencanaan dan kesiapan pelaksana teknis yang baik, sedangkan kegagalan dalam penyerapan anggaran disebabkan oleh faktor-faktor administratif dan proses pengadaan yang belum optimal pada triwulan pertama. Diperlukan upaya percepatan pelaksanaan fisik dan pencairan anggaran untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Secara umum, kendala terbesar dalam pelaksanaan kinerja berasal dari hambatan administratif, koordinasi lintas sektor, dan kendala teknis seperti cuaca dan status lahan. Namun demikian, dukungan regulasi, kolaborasi antar lembaga, dan ketersediaan SDM dan anggaran menjadi faktor pendorong yang dapat dioptimalkan pada triwulan berikutnya untuk meningkatkan capaian indikator strategis daerah. Laporan Kinerja triwulan I Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan triwulan yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

BAB III.**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN****a. Perubahan Indikator Kinerja**

Sesuai dengan 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa indikator sub kegiatan yang perlu disesuaikan. Selain itu, berdasarkan Pohon Kinerja baru, terdapat indikator program dan kegiatan yang harus disesuaikan.

b. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Terdapat 14 program, 25 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar, diantaranya ada yang mengalami pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran.

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut program/ kegiatannya adalah Rp 355.244.886.032,- yang dirinci seperti halnya pada Tabel 3.1., Sumber dana kegiatan tersebut ada yang berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil (DBH), DBH Sawit, Sisa Belanja Lainnya, Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, DAK FISIK-Bidang Air Minum-Pen Ugasan, DAK FISIK-Bidang Sanitasi-Penugasan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Opsen PKB, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Alasan dilakukan perubahan.

Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator, target kinerja dan jumlah kebutuhan anggaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Penyesuaian indikator dan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sesuai rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2030.
2. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025.
3. Penyesuaian pagu indikatif karena perubahan belanja dan paket

strategis daerah.

Berikut adalah tabel rincian keterangan perubahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun 2025 :

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp337.709.000	Rp372.744.000	Rp35.035.000	- Penambahan Unit Power Supply (UPS) sebanyak 5 unit - Penambahan Apar 6 kg sebanyak 4 buah - Penambahan Intercom untuk Kantor DPUPRP - Penambahan printer 1 unit
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp67.000.000	Rp0	-Rp67.000.000	Penyesuaian sub kegiatan untuk belanja Publikasi Media Cetak/ Digital
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp639.252.000	Rp1.143.140.000	Rp503.888.000	Penambahan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta makan minum rapat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.623.255.000	Rp2.639.460.000	Rp16.205.000	- Penyesuaian upah tenaga kontrak dari jenjang pendidikan SLTA ke S1 - Penyesuaian BPJS Kesehatan Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) - Penyesuaian belanja Publikasi Media Cetak/ Digital yang sebelumnya di sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.029.660.000	Rp967.970.000	-Rp61.690.000	- Penyesuaian Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas operasional sesuai unit yang ada
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp84.830.000	Rp88.830.000	Rp4.000.000	- Penyesuaian Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split - Penyesuaian Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/ Notebook - Penyesuaian Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp1.728.104.400	Rp1.828.104.400	-Rp100.000.000	- Pengurangan belanja makan minum rapat - Penyesuaian Perencanaan Normalisasi/Restorasi Sungai Jalan Belahan Kec. Martapura - Penyesuaian Perencanaan Normalisasi/Restorasi Embung Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat - Penyesuaian Perencanaan Normalisasi/Restorasi Sungai Desa Mali-Mali Kec. Karang Intan - Penyesuaian Perencanaan Normalisasi/Restorasi Sungai Desa Pematang Hambawang RT.003 Kec. Astambul - Penambahan Perencanaan Normalisasi/Restorasi Sungai Kawasan II - Penyesuaian kode rekening Pengawasan Normalisasi/Restorasi Sungai Sepanjang jalan Belahan Kec. Martapura - Penyesuaian Pengawasan Normalisasi/Restorasi Embung Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat - Penambahan Pengawasan Normalisasi/Restorasi Sungai Desa Mali-Mali Kec. Karang Intan - Penyesuaian Pengawasan Normalisasi/Restorasi Sungai Desa Pematang Hambawang RT.003 Kec. Astambul
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp1.712.126.000	Rp1.812.126.000	-Rp100.000.000	- Pengurangan belanja makan minum rapat - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kawasan II - Penyesuaian Jasa Konsultansi Individual Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing - Penyesuaian kode rekening Pengawasan Bangunan Perkuatan Tebing Gg. Damai Kec. Martapura
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Rp85.040.000	Rp185.040.000	-Rp100.000.000	- Pengurangan belanja makan minum rapat - Penambahan Perencanaan Pembuatan Sumber Air Baku Kawasan III - Penyesuaian Penyusunan Dokumen Database Air Baku yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Rp1.997.209.600	Rp2.297.209.600	-Rp300.000.000	- Pengurangan belanja fotocopy - Penguranagn belanja makan minum rapat - Penyesuaian Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Paket 3 - Penambahan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Wilayah II - Penambahan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Wilayah I Paket 1 - Penambahan Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Wilayah I Paket 2 - Penyesuaian kode rekening Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Wilayah 2 - Penyesuaian kode rekening Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Wilayah 3
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp7.188.355.700	Rp7.485.205.700	-Rp296.850.000	- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dokumen Identifikasi Perluasan dan Peningkatan SPAM Kawasan Tengah - Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Updating Pendataan Keberlanjutan Pamsimas Tahap 2 - Penambahan Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kec. Paramasan
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp9.598.954.100	Rp9.235.154.100	Rp363.800.000	- Penghapusan paket Pemeliharaan Air Santri - Penghapusan Paket Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Beruntung Baru - Penghapusan Perencanaan teknis Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Beruntung Baru - Penghapusan Pengawasan teknis Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Beruntung Baru - Penambahan Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Kawasan Atas (Fisik 2026) - Penambahan Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Kawasan Tengah (Fisik 2026) - Penambahan Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Kawasan Bawah (Fisik 2026) - Penambahan Perencanaan teknis Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Sungai Tabuk, Kec. Gambut dan Kec. Kertak Hanyar - Penambahan Pengawasan teknis Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Sungai Tabuk, Kec. Gambut dan Kec. Kertak Hanyar - Penambahan paket Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Kec. Sungai Tabuk, Kec. Gambut dan Kec. Kertak Hanyar - Penambahan Paket Pengembangan Jaringan SPAM Desa Murung

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
				Kenanga dan Desa Murung Keraton Kec. Martapura
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp11.039.341.640	Rp11.171.304.089	-Rp131.962.449	- Penyesuaian honor Pokja - Penghapusan paket Pembangunan WC Murung Batu Laba Kecamatan Aranio - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan WC Sungai Luar Kecamatan Aranio - Penambahan Pengawasan Pembangunan WC Sungai Luar Kecamatan Aranio - Penambahan Paket Pembangunan WC Sungai Luar Kecamatan Aranio - Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan IPLT Cahaya Budi Kencana
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp729.990.600	Rp679.990.600	Rp50.000.000	- Pengurangan Belanja Sosialisasi Pembongkaran Jamban Terapung
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Rp970.351.000	Rp1.473.311.000	-Rp502.960.000	- Penghapusan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Saluran Drainase Jalan Melati Desa Tunggul Irang Kec. Martapura - Penyesuaian Honor Petugas Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan - Penambahan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase Jalan Sisi Selatan Stadion Demang Lehman Kecamatan Martapura - Penambahan Paket Peningkatan Saluran Drainase Gg. Hikmawan Jl. Inspeksi Irigasi (Sambungan Outlet Binamarga) - Penambahan Paket Peningkatan Saluran Drainase RT. 08 Desa Cindai Alus Kec. Martapura - Penambahan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Saluran Outlet

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
				Drainase Jalan P. Abdurrahman Kec. Martapura - Penambahan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Saluran Drainase Gg. Hikmawan Jl. Inspeksi Irigasi (Sambungan Outlet Binamarga) - Penambahan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Saluran Drainase RT. 08 Desa Cindai Alus Kec. Martapura - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase RT. 08 Desa Cindai Alus Kec. Martapura
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp6.049.992.000	Rp6.749.992.000	-Rp700.000.000	- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah II Paket 1 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah III Paket 1 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah II Paket 2 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah II Paket 3 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah III Paket 2 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah III Paket 3 - Penambahan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Saluran Drainase Wilayah III Paket 4
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp1.837.198.999	Rp2.037.198.999	-Rp200.000.000	- Penyesuaian Belanja Swakelola Operasional dan Pemeliharaan Saluran Drainase
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp467.443.200	Rp607.443.200	-Rp140.000.000	- Pengadaan Tiang Box Iklan Bahan Besi - Penghapusan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non ASN dan/ASN di luar Kab.Banjar (SK Bupati) Anggota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp61.369.837.000	Rp64.169.014.200	- Rp2.799.177.200	- Penyesuaian Honor Pokja - Penambahan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Perjuangan Tembus Jalan Damai RT. 08 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura (KPPN) - Penghapusan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Gang Al-Munawarah Kertak Hanyar - Penghapusan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis jalan Gang Norjana Kertak Hanyar - Penghapusan Paket Perbaikan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Martapura Lama Gang Bersama - Penghapusan Perbaikan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gang Mufakat Ujung Sungai Tabuk - Penghapusan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Perjuangan Tembus Jalan Damai Desa Sungai Sipai Kec. Martapura (KPPN) - Penyesuaian Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gang Rt.19 Rw.07 Kel. Keraton Kec. Martapura - Penambahan Paket Perbaikan Kantor Kodim 1006/Banjar - Penambahan Pengawasan Teknis Perbaikan Kantor Kodim 1006/Banjar - Penambahan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Gang Al-Munawarah dan Gg. Norjana Kertak Hanyar - Penambahan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jalan Samping Hotel Eva Kertak Hanyar - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gg. Buntu Kel. Keraton Kec. Martapura - Penambahan Paket Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. Sekolahan RT.03 dan RT.02 Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk - Penambahan Perencanaan Teknis Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura dan Sungai Tabuk - Penambahan Perencanaan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Tengah Kab. Banjar TA. 2026 - Penambahan Perencanaan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Bawah Kab. Banjar TA. 2026 - Penambahan Perencanaan Teknis

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
				Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kawasan Startagis Martapura dan Martapura Timur TA. 2026 - Penambahan Pengawasan Teknis Perbaikan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura dan Sungai Tabuk - Penambahan Paket Penataan Halaman Kantor Kecamatan Aluh-aluh - Penambahan Perencanaan Teknis Penataan Halaman Kantor Kecamatan Aluh-aluh - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan Aula Kecamatan Simpang Empat - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kelurahan Gambut Kec. Gambut - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru - Penambahan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Desa Tiwingan Baru Kec. Aranio - Penambahan Pengawasan Teknis Penataan Halaman Kantor Kecamatan Aluh-aluh - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gang Rt.21 Rw.07 Kel. Keraton Kec. Martapura - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. Kalimaya 2 RT.10 RW.04 Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis RT. 006 RW.002 Desa Pesayangan Utara Kec. Martapura - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Jl. Batuah Gg. Batuah I Kel. Keraton Kec. Martapura - Penambahan Paket Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Gg. Ratu Wangi RT.03 RW.01 Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar - Penambahan Perencanaan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura APBD-P - Penambahan Paket Pembuatan Pagar Polres Banjar - Penambahan Perencanaan Teknis Pembuatan Pagar Polres Banjar - Penambahan Pengawasan Teknis Pembuatan Pagar Polres Banjar - Pengawasan Teknis Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Martapura APBD-P

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp8.685.950.400	Rp12.860.950.400	- Rp4.175.000.000	-Penyesuaian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Kabupaten - Penyesuaian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jembatan pada Jalan Kabupaten - Penyesuaian Perencanaan Teknis Jembatan pada Jalan Desa - Penyesuaian Perencanaan Teknis Jalan Desa - Penyesuaian Belanja Penyelidikan Tanah Kabupaten - Penyesuaian Penyelidikan Tanah Jembatan Pada Jalan Kabupaten
Penggantian Jembatan	Rp7.869.665.500	Rp7.876.250.000	-Rp6.584.500	- Penyesuaian honor Pokja - Penyesuaian belanja Jilid Softcover Ketebalan 0-1 cm
Pembangunan Jalan	Rp7.604.791.000	Rp7.611.661.000	-Rp6.870.000	- Penyesuaian honor Pokja
Rekonstruksi Jalan	Rp91.098.842.594	Rp86.823.983.494	Rp4.274.859.100	- Penyesuaian honor Pokja - Penghapusan Paket Rekonstruksi Jalan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura - Penghapusan Paket Rekonstruksi Jalan Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk - Penyesuaian honor Petugas Tim Teknis/ Tim Pendukung - Penghapusan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Desa Manarap Baru Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar - Penyesuaian Belanja Fotocopy
Rehabilitasi Jembatan	Rp13.648.976.337	Rp13.652.036.337	-Rp3.060.000	- Penyesuaian honor Pokja
Rehabilitasi Jalan	Rp46.825.386.000	Rp55.354.266.000	- Rp8.528.880.000	- Penyesuaian honor Petugas Tim Teknis/ Tim Pendukung - Penghapusan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Belayung Baru RT.06 RW.01 Kecamatan Kertak Hanyar - Penghapusan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Alang Kecamatan Karang Intan - Penyesuaian honor Pokja - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Babar Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Matang Tiwadak Desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Belangian Kecamatan Aranio - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Lok Tamu Kecamatan Matarama - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Bawahen Seberang Kecamatan Mataraman - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Gunung Pandan Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Lama Tembus Pasar Minggu Desa Bawahen Pasar Kecamatan Mataraman

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih	Keterangan
				- Penambahan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Selan - Jabuk Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman - Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur - Pengurangan belanja fotocopy - Penyesuaian Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Rp412.591.000	Rp422.591.000	-Rp10.000.000	- Penambahan Upah Saksi Batas Tanah

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan DPUPRP Kabupaten Banjar Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN						Rp279.818.770.996	Rp342.249.942.908	Rp355.244.886.032			Rp273.625.492.154					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Rp278.845.030.996	Rp341.340.522.908	Rp354.619.888.032		Rp272.554.407.854			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						Rp278.845.030.996	Rp341.340.522.908	Rp354.619.888.032		Rp272.554.407.854			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					85,05 %	85,05%	Rp17.853.659.834	Rp17.216.555.012	Rp16.738.571.812			Rp18.134.131.030
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dok Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu					100%	100%	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Rp71.995.200			Rp91.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dok	7 Dok	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp39.996.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp51.000.000	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dok DPA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD				2 Dok	2 Dok	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp10.200.000	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Lap	10 Lap	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.000.200	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp10.200.000	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dok	1 Dok	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.021.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp10.200.000	
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp7.977.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp10.200.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sum ber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dok Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu				100%	100%	Rp11.105.183.9 34	Rp10.608.252. 012	Rp10.359.618.4 12			Rp11.327.287.6 12	
1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	72 Orang/B ulan	Rp10.671.519.43 4	Rp9.652.107.51 2	Rp9.652.107.512	Dana Alokasi Umum (DAU); Penda patan Asli Daerah (PAD)		Rp10.884.949.82 2	
1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD				12 Dok	12 Dok	Rp416.820.000	Rp939.300.000	Rp694.020.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp425.156.400	
1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap	1 Lap	Rp9.538.500	Rp9.538.500	Rp7.646.100	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp9.729.270	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				16 Lap	16 Lap	Rp3.608.000	Rp3.608.000	Rp2.886.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp3.680.160
1 03 01 2.02 0008	Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dok	1 Dok	Rp3.698.000	Rp3.698.000	Rp2.958.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp3.771.960
1 03 01 2.03 0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dok Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu				100%	100%	Rp17.200.000	Rp17.200.000	Rp14.160.000			Rp17.544.000
1 03 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Lap	4 Lap	Rp17.200.000	Rp17.200.000	Rp14.160.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp17.544.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dok Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu				100%	100%	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp78.500.000			Rp102.000.000
1 03 01 2.05 001.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	12 Orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp78.500.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp102.000.000
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu				100%	100%	Rp1.847.164.00 0	Rp1.868.815.0 00	Rp1.728.180.20 0			Rp1.810.667.28 0
1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp16.132.000	Rp21.342.000	Rp21.342.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp16.454.640
1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp300.429.000	Rp337.709.000	Rp372.744.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp306.437.580

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp176.542.500	Rp176.542.500	Rp151.602.500	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp180.073.350	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp47.820.500	Rp31.981.500	Rp27.504.700	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp48.776.910	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				72 Dok	72 Dok	Rp72.000.000	Rp67.000.000	Rp0	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp0	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Lap	12 Lap	Rp14.800.000	Rp14.800.000	Rp11.847.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp15.096.000	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lap	12 Lap	Rp1.219.440.000	Rp1.219.440.000	Rp1.143.140.000	Dana Bagi Hasil (DBH); DBH Sawit		Rp1.243.828.800	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	Rp3.082.254.800	Rp2.974.184.800	Rp2.985.204.800			Rp3.140.737.896	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lap	12 Lap	Rp21.675.000	Rp21.675.000	Rp17.990.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp22.108.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap	12 Lap	Rp400.644.800	Rp327.754.800	Rp327.754.800	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp408.657.696
1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap	12 Lap	Rp2.659.935.000	Rp2.624.755.000	Rp2.639.460.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp2.709.971.700
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	Rp1.611.857.100	Rp1.558.103.200	Rp1.500.913.200			Rp1.644.094.242
1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	Rp42.750.000	Rp42.750.000	Rp42.750.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp43.605.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	56 Unit	Rp1.029.660.000	Rp1.029.660.000	Rp967.970.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.050.253.200
1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp102.000.000
1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				159 Unit	121 Unit	Rp99.120.000	Rp84.330.000	Rp88.830.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp101.102.400
1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp340.327.100	Rp301.363.200	Rp301.363.200	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp347.133.642

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	• Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik • Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten • Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten				• 84,51 % • 44,49 % • 66,75 %	• 88,75 % • 44,49 % • 66,75 %	Rp10.049.243.525	Rp10.779.123.525	Rp12.119.380.325			Rp10.250.228.395

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sum ber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 02 2.01	Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Sungai yang dikelola				1,75%	0,73%	Rp4.242.449.025	Rp5.217.059.025	Rp6.374.287.425			Rp4.327.298.005
1 03 02 2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Km	7 Km	Rp1.377.704.025	Rp1.382.440.025	Rp2.378.840.025	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.049.050.620
1 03 02 2.01	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dire storasi				0,1 Km	0,1 Km	Rp991.628.000	Rp1.792.618.000	Rp1.828.104.400	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp1.023.739.320
1 03 02 2.01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,5 Km	0,5 Km	Rp1.445.462.000	Rp1.725.366.000	Rp1.812.126.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.713.602.065
1 03 02 2.01	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dok	1 Dok	Rp210.710.000	Rp109.510.000	Rp87.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp230.275.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 02 2.01 0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dok	1 Dok	Rp101.395.000	Rp100.945.000	Rp82.377.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp186.945.600
1 03 02 2.01 0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dok	1 Dok	Rp115.550.000	Rp106.180.000	Rp185.040.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp123.685.200
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				#####	76,083 %	Rp5.806.794.500	Rp5.562.064.500	Rp5.745.092.900			Rp5.922.930.390
1 03 02 2.02 0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				3 Bendung	3 Bendung	Rp920.071.000	Rp878.931.000	Rp874.756.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp955.588.020

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				14 Km	14 Km	Rp2.132.855.000	Rp2.024.629.000	Rp2.297.209.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp2.587.268.250	
1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				14 Km	14 Km	Rp2.233.653.500	Rp2.074.093.500	Rp2.005.313.300	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.790.575.320	
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				2 Lembaga	2 Lembaga	Rp379.995.000	Rp386.511.000	Rp369.914.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp430.868.400	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dok Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dok	3 Dok	Rp140.220.000	Rp197.900.000	Rp197.900.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp158.630.400	
1.03.03.2.01.0000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	• Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak • Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman				• 100 % • 18,35 %	• 100 %	Rp15.297.934.525	Rp19.407.099.800	Rp19.139.786.200			Rp15.696.199.925	
1.03.03.2.01.0000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten				1,66%	1,66%	Rp15.297.934.525	Rp19.407.099.800	Rp19.139.786.200			Rp15.696.199.925	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				7,5 Liter/d etik	7,5 Liter/det ik	Rp9.635.667.925	Rp7.377.105.700	Rp7.485.205.700	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp9.855.146.491	
1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				8 Unit	8 Unit	Rp444.360.000	Rp427.440.000	Rp415.826.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp467.666.302	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				8 Unit	8 Unit	Rp2.026.520.000	Rp2.003.600.000	Rp2.003.600.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp2.090.428.800	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				500 SR	500 SR	Rp3.191.386.600	Rp9.598.954.100	Rp9.235.154.100	Dak Fisik - Bidang Air Minum - Penug asan; Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp3.282.958.332	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	• Persentase Akses Sanitasi Aman • Persentase Akses Sanitasi Layak				• 10,10 % • 100 %	• 100 %	Rp12.596.052.550	Rp12.506.576.390	Rp12.258.244.689			Rp12.847.973.601	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sum ber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 06 2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Sanitasi Layak • Persentase Akses Sanitasi Aman				• 10,10 % • 100 %	• 100 %	Rp12.596.052.550	Rp12.506.576.390	Rp12.258.244.689			Rp12.847.973.601
1 03 06 2,01 0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp356.450.000	Rp406.950.000	Rp406.950.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp363.579.000
1 03 06 2,01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp341.782.300	Rp0	Rp0	Dak Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan; Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp348.617.946
1 03 06 2,01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				500 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	Rp11.140.202.250	Rp11.310.843.590	Rp11.171.304.089	Dak Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan; Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp11.363.006.295

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 06 2,01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				500 Orang	450 Orang	Rp757.618.000	Rp788.782.800	Rp679.990.600	Dak Fisik - Bidang Sanitasi- Penugasan; Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp772.770.360
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase				51,62 %	8,08%	Rp9.182.802.569	Rp9.108.921.968	Rp10.753.295.999			Rp9.366.458.620
1 03 06 2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan Genangan				70,50 %	47,35%	Rp9.182.802.569	Rp9.108.921.968	Rp10.753.295.999	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp9.366.458.620
1 03 06 2,01 0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	Rp440.520.000	Rp700.351.000	Rp1.473.311.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp438.170.580

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				25 Kawasan Genangan	25 Kawasan Genangan	Rp108.640.000	Rp100.480.000	Rp80.384.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp108.273.000	
1.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	Rp319.680.000	Rp311.450.000	Rp311.450.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp323.350.198	
1.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	Rp6.861.631.000	Rp6.055.292.000	Rp6.749.992.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp6.999.794.442	
1.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dok	2 Dok	Rp180.040.000	Rp100.960.000	Rp100.960.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp182.172.000	
1.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	Rp1.272.291.569	Rp1.840.388.968	Rp2.037.198.999	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.314.698.400	
1.06.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang				100%	100%	Rp452.207.000	Rp524.037.000	Rp660.235.200			Rp461.251.140	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 03 08 2,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB				8,36%	8,36%	Rp452.207.000	Rp524.037.000	Rp660.235.200			Rp461.251.140	
1 03 08 2,01 0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dok Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dok	5720000 0	Rp40.000.000	Rp53.490.000	Rp52.792.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp40.800.000	
1 03 08 2,01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150 Dok	150 Dok	Rp412.207.000	Rp470.547.000	Rp607.443.200	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp420.451.140	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	• Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan • Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai				• 89,64 % • 86,52 %	• 89,64 % • 86,52 %	Rp48.239.457.494	Rp61.622.484.100	Rp64.767.326.680			Rp40.326.616.693
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik • Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik				• 47,14 % • 100 %	• 47,14 % • 100 %	Rp48.239.457.494	Rp61.622.484.100	Rp64.767.326.680			Rp40.326.616.693
1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	3 Kawasan	Rp47.332.629.394	Rp60.739.056.000	Rp64.169.014.200	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditent ukan Penggu naann ya Bidang		Rp39.401.652.031

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pekerjaan Umum		
1 03 09 2,01 0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dok	5 Dok	Rp906.828.100	Rp883.428.100	Rp598.312.480	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp924.964.662
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	• Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap • Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap				• 77,81 % • 81,03 %	• 54,16 %	Rp162.351.242.649	Rp206.570.504.263	Rp214.804.290.077			Rp162.593.668.626

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 10 2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap • Persentase Jemb dalam Kondisi Baik				•1,86 % • 93,22 %	• 2,09 % • 3,31 % • 7,00 %	Rp162.351.242. 649	Rp206.570.504 .263	Rp214.804.290. 077			Rp162.593.668. 626
1 03 10 2,01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jemb	Jumlah Dok Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jemb yang Disusun				78 Dok	78 Dok	Rp5.876.108.000	Rp8.691.988.00 0	Rp12.860.950.40 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp5.839.867.200
1 03 10 2,01 0031	Penggantian Jemb	Jumlah Jemb yang Diganti				5 Jemb	5 Jemb	Rp7.887.880.000	Rp7.873.190.00 0	Rp7.876.250.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp8.045.637.600
1 03 10 2,01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				3,5 Km	3,5 Km	Rp6.348.010.000	Rp7.612.550.00 0	Rp7.611.661.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp6.882.970.200
1 03 10 2,01 0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 Km	1 Km	Rp64.539.638.00 0	Rp93.453.528.5 94	Rp86.823.983.49 4	DAK Fisik Bidang Jalan Penug asan Jalan; Dana Bagi Hasil (DBH);		Rp65.830.430.76 0

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											DBH Sawit		
1 03 10 2,01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 Km	2 Km	Rp1.815.250.000	Rp7.390.057.41 7	Rp7.379.984.417	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditent ukan Penggu naann ya Bidang Pekerj aan Umum		Rp1.996.775.000
1 03 10 2,01 0038	Pemeliharaan Rutin Jemb	Jumlah Jemb yang Dipelihara Secara Rutin				12 Jemb	12 Jemb	Rp5.622.965.000	Rp4.677.085.00 0	Rp5.673.105.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp5.735.424.300
1 03 10 2,01 0039	Rehabilitasi Jemb	Jumlah Jemb yang Direhabilitasi				7 Jemb	7 Jemb	Rp10.376.373.60 0	Rp13.651.488.3 37	Rp13.652.036.33 7	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp8.051.363.756

PERUBAHAN RENJA 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 10 2,01 0040	Pembangunan Jemb	Jumlah Jemb yang Dibangun				3 Jemb	3 Jemb	Rp11.042.620.00 0	Rp6.231.807.86 6	Rp6.213.301.466	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp11.263.472.40 0
1 03 10 2,01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jemb	Panjang Jalan/Jemb yang Disurvey Kondisinya				1898 Km	1898 Km	Rp847.760.000	Rp822.320.000	Rp820.465.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp864.715.200
1 03 10 2,01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				22 Km	22 Km	Rp35.790.202.20 0	Rp46.844.547.2 00	Rp55.354.266.00 0	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentan kan Penggu naann ya Bidang Pekerj aan Umum		Rp35.634.487.64 4
1 03 10 2,01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Km	10 Km	Rp12.204.435.84 9	Rp9.321.941.84 9	Rp10.538.286.96 3	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp12.448.524.56 6

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.11.0010	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi				88,50 %	20,00%	Rp529.456.850	Rp678.776.850	Rp472.833.450			Rp539.046.242
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi				80,00 %	20,00%	Rp425.135.850	Rp574.455.850	Rp388.407.050			Rp433.638.822
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				90 Orang	90 Orang	Rp232.742.250	Rp232.062.250	Rp201.399.650	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp237.397.350
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				350 Lembaga	350 Lembaga	Rp167.080.000	Rp317.080.000	Rp166.406.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp25.819.872
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 orang	30 orang	Rp25.313.600	Rp25.313.600	Rp20.601.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp170.421.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi				90%	90%	Rp23.760.000	Rp23.760.000	Rp19.200.000			Rp24.235.200
1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				5 Dok	5 Dok	Rp23.760.000	Rp23.760.000	Rp19.200.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp24.235.200
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi				80%	80%	Rp80.561.000	Rp80.561.000	Rp65.226.400			Rp81.172.220
1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				100 Paket Pekerja an	100 Paket Pekerjaa n	Rp16.203.000	Rp16.203.000	Rp13.164.400	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp16.527.060

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 03 11 2,04 0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				40 Lemba ga	40 Lembaga	Rp64.358.000	Rp64.358.000	Rp52.062.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp64.645.160	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang				92,19 %	90,88%	Rp2.292.974.00 0	Rp2.926.444.0 00	Rp2.905.923.60 0			Rp2.338.833.58 2	
1 03 12 2,01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan				100%	22%	Rp2.197.002.80 0	Rp2.717.342.8 00	Rp2.709.150.40 0			Rp2.240.942.85 6	
1 03 12 2,01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dok Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dok	3 Dok	Rp725.282.800	Rp674.602.800	Rp670.020.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp739.788.456	
1 03 12 2,01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dok administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				3 Dok	3 Dok	Rp1.436.720.000	Rp2.013.800.00 0	Rp2.013.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp1.465.454.400	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Lap sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.								
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR								
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dok koordinasi penyelenggaraan penataan ruang								
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten								
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dok tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
								Rp973.740.000	Rp909.420.000	Rp624.998.000				Rp1.071.084.300

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	10							Rp973.740.000	Rp909.420.000	Rp624.998.000			Rp1.071.084.300	
2	10	04				100%	100%	Rp205.255.000	Rp272.265.000	Rp152.009.200			Rp225.780.500	
2	10	04	2,01			100%	100%	Rp205.255.000	Rp272.265.000	Rp152.009.200			Rp225.780.500	
2	10	04	2,01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Berita Acara	Rp69.450.000	Rp171.460.000	Rp84.659.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp76.395.000	
2	10	04	2,01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45 Dok	45 Dok	Rp135.805.000	Rp100.805.000	Rp67.349.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp149.385.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	06					100%	100%	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.219.600			Rp11.000.000
2	06	2,01				100%	100%	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.219.600			Rp11.000.000
2	06	2,01	0003			1 Dok	1 Dok	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.219.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp11.000.000
2	09					78,66 %	60,94%	Rp638.485.000	Rp527.155.000	Rp422.591.000			Rp702.303.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumbe r Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi				81,79 %	100,00 %	Rp638.485.000	Rp527.155.000	Rp422.591.000			Rp702.303.800
2 10 09 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dok Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				200 Dok	200 Dok	Rp638.485.000	Rp527.155.000	Rp422.591.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp702.303.800
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase aset tanah Pemkab yang terinventarisir dan dipatenkan				100%	100%	Rp120.000.000	Rp100.000.000	Rp42.178.200			Rp132.000.000
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase inventarisasi aset tanah Pemkab dalam satu tahun				100%	100%	Rp120.000.000	Rp100.000.000	Rp42.178.200			Rp132.000.000
2 10 10 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Lap Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Lap	1 Lap	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp8.669.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp11.000.000

PERUBAHAN RENJA 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	Rp110.000.000	Rp90.000.000	Rp33.508.600	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp121.000.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan pedoman kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja 2025, pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi.

Diharapkan semua bidang/ bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) dinas, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai.

Selanjutnya dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mungkin dapat mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Martapura, Juli 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan
Kabupaten Banjar,

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST. MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741024 199803 2 006

5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun. Rencana kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 memuat kebijakan, program dan prioritas kegiatan pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun alokasi anggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Renja dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun secara partisipatif di bawah koordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program yang diprioritaskan dapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan sesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Banjar.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini

mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD
15. Permendagri Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Surat Edaran Bupati No. 900.1.1.4/02-03/BPKPAD Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
24. Surat Edaran Bupati No. 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025,
25. Surat Bupati No. 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang Perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Berisikan penjelasan mengenai uraian garisbesar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan antara lain meliputi : perubahan indikator kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dan/pagu indikatif yang

dirinci menurut sumber pendanaannya serta alasan dilakukan perubahan.

BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Pasal 3 Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Lima (5) bidang yaitu Bidang Penyediaan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Penyediaan Perumahan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil
2. Penyediaan Perumahan Swadaya
3. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman
2. Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
3. Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Kajian Dampak Lingkungan
2. Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengelolaan Sampah
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Kemitraan Pengelolaan Sampah

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 seksi yaitu:

1. Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

2.11 EVALUASI CAPAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 103.741.600,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 1.847.000 dan realisasi fisik belum tercapai dikarenakan belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM

2. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar 106.385.500,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 3.271.500,- dan realisasi fisik belum tercapai dikarenakan belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 421.616.700,- dengan target 16 unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat direalisasikan dan akan di laksanakan di triwulan berikutnya. Faktor penghambat

terrealisasinya kegiatan ini adalah belum ada SK penetapan bencana dari Bupati terkait status tanggap darurat bencana sebagai dasar pelaksanaan SPM.

KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 122.119.000,- dengan target 50 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan I capaian realisasi fisik sebanyak 19 dokumen (38%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.033.000,- (11%). Tercapainya target sub kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan SOP serta adanya kerjasama yang baik dalam tim. Sedangkan serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 128.703.500,- dengan target 1 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Sampai dengan triwulan I laporan belum dapat terealisasi Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.543.500,- (8%). Tahapan pekerjaan pada triwulan I adalah Inventarisasi data perumahan yang akan dilakukan pemantauan, menyusun metodologi pekerjaan yang akan dilakukan serta menyusun jadwal kerja, dan Verifikasi lapangan terkait pembangunan perumahan Serapan dana yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya tersebut dikarenakan ada beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses pengerjaan.

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

**KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 726.325.600,- dan target 24 unit rumah. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum terealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.161.000,-. Faktor penghambat kegiatan ini adalah SK penerima bantuan masih dikoreksi di bagian hukum.

2. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 183.745.000,- dengan target 100 Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkemabangnya Permukiman Kumuh. Sampai dengan triwulan I 40 orang telah Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkemabangnya Permukiman Kumuh dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.238.000,- (7%). Tahapn pekerjaan pada tiwulan ini berupa Melaksanakan kegiatan melaksanakan Sosialisasi di Murung Kenanga.

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

**KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA**

1. Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 156.227.000,- dengan target fisik 2 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 3.057.500,- (2%), sedangkan realisasi fisik belum terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggran sehingga berkas yang sebelumnya disiapkan untuk proses seleksi menjadi berubah dan mengulang.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Pada sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 726.801.000,- dengan target 2 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai, Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 590.000,- (0,1%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggran sehingga menunggu sampai disahkannya dokumen anggran.

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 303.000.000,- dan target 6 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum dapat tercapai, sedangkan realisasi angaran sebesar Rp. 1.215.000,- (0,4%). Aktivitas kegiatan telah Melaksanakan koordinasi persiapan awal dengan pihak konsultan, SKPD terkait dan Desa untuk mengikuti pengusulan program DAK TEMATIK.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.482.969.799,- dan target 2 Ha Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar. Sampai dengan triwulan I luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dan realisasi anggaran belum terealisasi. Hal ini dikarenakan cuaca tidak menentu, seringkali hujan menjadi faktor terkendalanya pekerjaan fisik.

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

1. Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 11.271.254.000,- dan target 29 Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. Sampai dengan triwulan I sub kegiatan ini sedang dalam tahap Menyelenggarakan ekspose perencanaan perbaikan PSU dengan pihak konsultan. Sedangkan realisasi keuangan sampai triwulan I sebesar Rp. 8.936.336,- (0,1%). Faktor penghambat kegiatan dikarenakan Lokasi rencana yang dilaksanakan terkendala perbedaan konstruksi yang tercantum di DPA dengan hasil perencanaan sesuai penanganan di lapangan.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan I target belum terealisasi sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 570.000,- (4%). Faktor penghambat realisasi kinerja dikarenakan belum ada DIPA Satker Perumahan sehingga belum terlaksananya kegiatan.

3. Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 304.505.000,- dan target 20 laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.311.000,- (0,4%). Faktor penghambat tercapainya realisasi kegiatan dikarenakan kurangnya permohonan serah terima oleh pengembang yang telah selesai melaksanakan pembangunan perumahan.

4. Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 21.648.620.100,- dan target 17 dokumen. Pada triwulan I telah tercapai 1 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.426.531.524,- (16%). Aktivitas

kegiatan adalah melakukan pasang baru PJU/PJL serta perbaikan pju/pjl sesuai laporan yang masuk dari masyarakat dan ada yang Masih dalam Perencanaan tahap konsolidasi (yang masuk kategori konsolidasi).

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 195.999.700,- dan target 1 Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I realiasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.578.700,- (1%). Faktor penghambat kegiatan ini adalah Ketersediaan Data yang belum optimal dan Menunggu surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembuatan laporan IKPLH.

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 203.710.000,- dan target 40 kegiatan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah mencapai 16 kegiatan. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 9.495.000,- (5%). Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja adalah Laporan

RKL RPL, Database Apatar untuk pelaporan, Surat pengajuan permohonan Pertek Air Limbah.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 333.161.000,- dan target 2 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum dapat tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.020.000,- (1%). Aktivitas kegiatan menyiapkan Spectrum di lokasi desa yang mengikuti komunitas untuk iklim (Proklam).

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 122.454.000,- dan target 19 lokasi Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut). Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah mencapai 18 lokasi. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 3.876.500,- (3%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya Raport Hasil IKLH 2024, Rapat Teknis IKLH oleh Pusat, hasil BA bersama DLH Provinsi KalSel.

4. Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 328.311.000,- dan target 1 Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah tercapai, sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 298.161.000,- (91%). Factor pendorong keberhasilan kegiatan adalah kondisi alat baik dan hasil kalibrasi bagus. Aktivitas kegiatan berupa Maintenance dan kalibrasi rutin untuk alat onlino serta visit I oleh Teknisi Vendor alat.

5. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 409.999.300,- dan target 40 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan. Sampai dengan triwulan I target fisik telah tercapai 10 dokumen sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.751.000 (3%). Tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan berupa pengujian & sampling parameter lingkungan. Faktor yang mendorong keberhasilan capaian kegiatan adalah tersedianya peralatan, bahan kimia, SDM, dan fasilitas pendukung lainnya.

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.659.000,- dan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan I target fisik 1 laporan belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.710.000,- (1%). Aktivitas kegiatan yang sedang dijalankan berupa menyiapkan bahan untuk sosialisasi lanjutan.

KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 85.254.000,- dan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I target fisik belum dapat terlaksana sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.200.000,- (10%). Tahapan pekerjaan yang telah dilakukan adalah menyiapkan alat untuk kegiatan giat bersih.

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa 1 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 299.994.215,- . Sampai dengan triwulan I 1 Unit kawasan hutan telah dikelola dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.154.000,-. Tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Rapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pestisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan pupuk organik dan NPK untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembelian bahan obat-obatan insectisida untuk pemeliharaan Taman Kehati, Memproses pembayaran listrik untuk rumah penjaga Taman Kehati dan Gudang, Memproses pembelian Gazebo / Ruang Pertemuan Terbuka, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

2. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Sub kegiatan ini memiliki target 15,79 Ha Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota dan memiliki anggaran sebesar Rp. 15.267.789.600,-. Realisasi luas RTH yang dikelola mencapai tercapai 15,79 Ha dengan realisasi anggaran Rp. 1.158.296.908,- (8%). Tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan RTH, Rapat pelaksanaan kegiatan RTH, Memproses pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, Memproses pembelian bahan pupuk organik, sekam bakar, dan NPK, Memproses pembelian tanah humus, Memproses pengadaan peralatan sarana/prasarana petugas kebersihan, Memproses pembelian ATK untuk kegiatan RTH, Memproses pembayaran jaminan kesehatan petugas kebersihan, Memproses pembayaran jaminan kecelakaan petugas kebersihan, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan Mendokumentasikan kegiatan

3. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 246.118.000,- dengan target 1 Unit Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik tercapai 100% realisasi anggaran sebesar Rp. 5.798.000,- (2%). Tahap pekerjaan di triwulan I berupa : Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Rapat pelaksanaan kegiatan Taman Kehati lainnya, Melakukan pemeliharaan hutan kota, Melakukan penanaman bersama manis, Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan Mendokumentasikan kegiatan. Factor pendorong tercapainya realisasi kegiatan karena adanya usulan/permintaan penanaman oleh masyarakat.

4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja 30 Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman dengan anggaran sebesar Rp. 46.814.000,-. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000,- (1%). Faktor penghambat kegiatan dikarenakan sedang proses pengusulan calon kalpataru.

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 128.660.000,- dan target 1 dokumen Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

4.812.000,- (4%). Aktivitas kegiatan berupa Menyiapkan data pelaku usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan pembinaan.

2. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 70.620.000,- dan target 1 Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin

Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.084.000,- (19%). Aktivitas kegiatan berupa Melaksanakan verifikasi lapangan rincian teknis TPS limbah B3 PT. Anugerah Wattiendo, UPTD Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kab. Banjar, UPTD TPA Cahaya Kencana, PT. Wahana Delta Prima Banjarmasin, PT. Intraco Penta, Tbk., PT. Lintas Garda Mitra Gemilang, dan CV. Hijrah Bukit Bintang.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.944.500,- dan target 15 dokumen Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Sampai dengan triwulan I target fisik belum terealisasi dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.158.500,- (1%). Tahapan pekerjaan pada triwulan I antara lain : Uji Administrasi Andal RKL-RPL PT. Gunung Manja Wisata, Uji Administrasi Addendum Andal RKL-RPL PT. Anugerah Watiendo, Uji Administrasi Andal RKL-RPL PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), Uji Administrasi PT. Pulau Baru Makmur,

Peninjauan Lapangan PT. Solusi Indo Borneo, Peninjauan Lapangan PT. Gunung Manja Wisata, Peninjauan Lapangan PT. Anugerah Watiendo, Peninjauan Lapangan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

2. Sub Kegiatan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan target 6 PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum tercapai. Factor yang menghambat realisasi kegiatan adalah Jadwal pelatihan yang tersedia tidak banyak, sehingga tidak dapat menyesuaikan jadwal dengan agenda pekerjaan.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan target 6 orang PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat di realisasikan dan akan di realisasikan di triwulan berikutnya.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 137.139.000,- dan target 30 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Sampai dengan triwulan I Rp. 21.293.000,- (16%). Faktor yang mendorong realisasi kegiatan adalah Meningkatkan ketaatan pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Sedangkan Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Tahapan

pekerjaan kegiatan ini berupa Melaksanakan Pengawasan : 1. PT. Pohon Sukses Makmur 2. PT Sincana Putera Abadi

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

KEGIATAN PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 162.245.400,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II kegiatan fisik dan anggaran belum tercapai. Faktor penghambat kegiatan adalah kurangnya sinergitas dalam hal koordinasi dan komunikasi oleh setiap lini baik dari Dinas PRKPLH yang dinaungi oleh Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Dinas/ Lembaga terkait yang berhubungan dengan konsentrasi terhadap pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Jasa Konsultan dan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA

KEMASYARAKAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 281.534.400,- dengan target 1 dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi anggaran

sebesar Rp. 8.550.000,- (3%). Factor penghambat tercapainya realisasi kegiatan adalah bila tidak tercapainya kinerja dan upaya mengatasi permasalahan, Tidak semua sekolah dapat dilakukannya pendampingan maupun sosialisasi karena jarak tempuh sekolah yang jauh, kondisi lingkungan yang kurang memadai dan keterbatasan SDM di tiap sekolah, selain itu perlu adanya motivasi yang lebih di setiap sekolah dan warga sekolah untuk terus berpartisipasi pada gerakan peduli dan berbudaya lingkungan sekolah.

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 115.419.300,- dengan target 10 pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik tercapai sebanyak 2 dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 8.998.500,- (8%). Faktor penghambat kegiatan berupa Faktor cuaca yg ekstrim serta medan untuk menuju lokasi sangat berat dan sulit.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 28.240.000,- dengan target 5 sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan I 1 perkara telah dapat ditangani dengan belum adanya realisasi anggaran. Faktor cuaca yg ekstrim serta medan untuk menuju lokasi sangat berat dan sulit menjadi factor penghambat keberhasilan kinerja.

3. Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.935.000,- dengan target 5 penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat tercapai. Faktor penghambat kegiatan berupa faktor cuaca dan lambatnya proses pengumpulan data dari pengadu.

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan target 1 dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan masih dalam proses Menyelesaikan dokumen kepuasan masyarakat, Merancang perubahan UU perda dan Merancang perubahan Jakstrada

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 18.328.453.036,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I 14523 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.062.295.208,- (17%). Aktivitas kegiatan berupa Pemeliharaan berkala untuk armada pengangkut sampah dan Evaluasi kinerja petugas dilapangan.

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 836.000.000,- dan memiliki target 4 kelompok Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Sampai dengan triwulan I kegiatan fisik telah tercapai 1 kelompok masyarakat dengan realisasi anggaran Rp. 62.370.000,- (7%). Faktor pendorong kegiatan dikarenakan Besarnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dengan mengikuti sosialisasi. Pada triwulan I tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain, Melaksanakan sosialisasi perda pengelolaan sampah di desa Sumber Baru, Kec. Sungai Pinang Melaksanakan sosialisasi perda pengelolaan sampah di Kec. Gambut Melaksanakan pembentukan KSM dan Bank sampah di kelurahan Gambut, Kec. Gambut serta Melaksanakan pembentukan KSM dan Bank sampah di kelurahan Murung, Kec. Gambut

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.204.694.900,- dan target 15 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 724.614.693,- (12%). Faktor penghambat kegiatan adalah Pada pek. revitalisasi TPA masih belum optimal sesuai TS dikarenakan faktor cuaca.

UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH BLUD INTAN HIJAU **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** **KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

1. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan target 1 dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST

Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik dan anggaran belum tercapai. Kegiatan berupa Penanganan sampah di perusahaan-perusahaan yang berkerjasama dengan BLUD Intan Hijau.

2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.973.246.500,- dan target 65700 ton Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan I 27375 ton Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 756.443.975,- (19%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi alat berat sering mengalami kerusakan sehingga menghambat waktu penanganan/penataan sampah.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.213.190.000,- dan target 7 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampai dengan triwulan I realisasi fisik telah tercapai 1 unit sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 199.661.000,- (16%). Faktor penghambat kegiatan adalah Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah.

Berdasarkan uraian evaluasi capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan diatas belum menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hal itu dikarenakan hasil evaluasi renja yang dihasilkan hanya sampai dengan triwulan I dimana kegiatan-kegiatan masih dalam proses pengerjaan hingga triwulan IV. Sedangkan untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi, telah memenuhi atau melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan adalah menyesuaikan dengan rencana aksi yang dibuat oleh bidang pengampu program kegiatan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan I tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
PROGRAM PENDUKUNG														
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	21.948.600.626	4.186.198.757	25%	19%	25%	125%	125%
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	21.948.600.626	4.186.198.757	25%	19%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	94.999.200	6.612.000	25%	7%	25%	125%	125%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	27	2	5.000.000	0	0	0%	0%	27	245%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	4	1	5.000.000	0	0	0%	0%	4	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	4	1	5.000.000	0	0	0%	0%	4	80%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	4	1	5.000.000	2.166.000	1	43%	100%	5	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	5.000.000	0	0	0%	0%	1	20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	10	3	5.000.000	0	3	0%	100%	13	87%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	64	16	34.999.900	0	4	0%	25%	68	85%
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik			1	10.000.000	0	0	0%	0%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Sektoral Daerah										
			Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			20	9.999.800	0	0	0%			
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	9.999.500	4.446.000	1	44%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	100%	15.957.119.000	2.584.660.886	25%	16%	25%	125%	125%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	88	93	15.379.100.000	2.577.450.886	93	17%	100%	181	195%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	13					0%	13	100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD			12	552.440.000	0	3				

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	7.230.000	7.210.000	1	100%	100%	2	200%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	2	8.366.200	0	0	0%	0%	16	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	13	2	9.982.800	0	0	0%	0%	13	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu			100%	3.499.700	3.499.700	25%		25%	25%	25%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8	3.499.700	3.499.700	0		25%	0	0%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	100%	149.999.600	0	25%	0%	25%	125%	125%
			Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi			5	20.000.000	0	0			0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Kepegawaian										
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40	29.999.600	0	0			0	0%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18	12	10	100.000.000	0	0	0%	0%	12	67%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.137.867.300	664.519.062	25%	58%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	10	1	31.993.500	0	0	0%	0%	1	3%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	9	1					0%	1	5%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	7	1	6.993.500	135.000	0	2%	0%	1	25%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	19	1	20.392.500	123.000	0	1%	0%	1	25%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	8	1	9.000.000	0	0	0%	0%	1	5%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	4	2	17.994.000	700.000	0	4%	0%	2	13%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	10	5	6.494.000	3.247.000	0	50%	0%	5	13%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	1070	500	1.044.999.800	163.703.933	0	16%	0%	1070	238%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	827.968.000	90.799.946	25%	11%	25%	125%	125%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			103	375.140.000	90.799.946	1	0%	1%	1	1%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			87	452.828.000	0	0	0%	0%	0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1			0		0%	1	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	100%	3.039.418.526	754.296.804	25%	25%	25%	125%	125%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	36	12	2.190.000	0	3	0%	25%	39	65%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18	12	309.998.526	40.030.704	3	13%	25%	21	175%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	24	12	2.727.230.000	714.266.100	3	26%	25%	27	180%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%	741.229.000	85.310.059	25%	12%	25%	125%	125%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	42.750.000	11.006.459	1	26%	100%	2	200%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	33	34	536.560.000	70.424.675	0	13%	0%	33	122%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	90	80	66.920.000	3.878.925	0	6%	0%	90	129%
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	94.999.000	0	0	0%	0%	1	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	Meningkatnya Perumahan yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni			97,45%	98.43%	97.38 %	1.792.636.900	50.094.000	0	3%	0%	0%	0%
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	100%	100%	100%	882.566.300	28.695.000	25%	3%	25%	125%	125%
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100%	100%	100%	210.127.100	5.118.500	25%	0%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3	1	1	103.74 1.600	1.847.000	0	2%	0%	0	0%
			SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	5	2	1	106.38 5.500	3.271.500	0	3%	0%	0	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100%	421.616.700	0	25%	0%	25%	125%	125%
			SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	49	49	16	421.616.700	0	0	0%	0%	49	100%
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	100%	100%	100%	250.822.500	23.576.500	25%	9%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	250	259	50	122.119.000	13.033.000	19	11%	38%	278	111%
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6	4	1	128.703.500	10.543.500	0	8%	0%	4	67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,89%	22.78%	22.83 %	910.07 0.600	21.399.000	0,00	2%	25%	0%	0%
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100	910.07 0.600	21.399.000	25	2%	25%	125%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	74	92	24	726.325.600	8.161.000	0	1%	0%	92	124%
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			100	183.745.000	13.238.000	40	7%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
		Persentase PSU yang memadai			100%	100%	100%	33.239.379.100	3.437.348.860	25%	10%	25%	125%	125%
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	21,71%	24,00%	25%	33.239.379.100	3.437.348.860	0	10%	0%	0%	0%
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100%	100%	100%	33.239.379.100	3.437.348.860	25%	10%	25%	125%	125%
			SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	34	62	29	11.271.254.000	8.936.336	0	0,1%	0%	62	182%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	3	1	15.000.000	570.000	0	4%	0%	3	60%
			SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	120	60	20	304.505.000	1.311.000	0	0,4%	0%	60	50%
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	110	45	17	21.648.620.100	3.426.531.524	1	16%	6%	46	42%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
2	Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase Kawasan Kumuh			89,20%	84,74%	82,76%	4.668.997.799	4.862.500	0	0%	25%	84,74%	95%
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	30,23%	20,23%	25,23	4.668.997.799	4.862.500	0	0%	25%	20,23%	67%
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	23	13	5	883.028.000	3.647.500	0	0%	0%	13	57%
			SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9	6	2	156.227.000	3.057.500	0	2%	0%	6	67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5	4	2	726.801.000	590.000	0	0,1%	0%	4	80%
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	37,2	33,38	2,4	3.785.969.799	1.215.000	0	0%	25%	33,38	90%
			SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	25	12	6	303.000.000	1.215.000	0	0,4%	0%	12	48%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	10	6,41	2	3.482.969.799	0	0	0%	0%	6,41	64%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)			50,6	64,15	50.5	1.683.548.300	378.863.500	0	23%	0%	64,15	127%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			77,23	94,62	77.1			0		0%	94,62	123%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			58,78	55,5	56.78			0		0%	55,5	94%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Tingkat Pencemaran Air	5,1	0,74	5,1	1.683.548.300	378.863.500	0	23%	0%	0,74	15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			HIDUP											
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	50,6	64,15	50.5	1.397.635.300	325.303.500	0	23%	0%	64,15	127%
				Indeks Kualitas Udara	77,23	94,62	77.1			0		0%	94,62	123%
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	175	102	40	203.710.000	9.495.000	16	5%	40%	118	67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5	3	2	333.16 1.000	2.020.000	0	1%	0%	3	60%
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air		23	19	122.45 4.000	3.876.500	18	3%	95%	41	41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Laut)										
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan		1	1	328.311.000	298.161.000	1	91%	100%	2	2%
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	175	85	40	409.999.300	11.751.000	10	3%	25%	95	54%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungan nya	100%	100%	100%	200.659.000	38.175.000	25%	19%	25%	125%	125%
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	12	4	1	200.659.000	38.175.000	0	19%	0%	4	33%
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100%	85.254.000	15.385.000	25%	18%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	1	1	85.254.000	15.385.000	0	18%	0%	1	100%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	100%	15.860.715.815	1.210.548.908	25%	8%	25%	125%	125%
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	100%	100%	100%	15.860.715.815	1.210.548.908	25%	8%	25%	125%	125%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,7	3,7	1	299.994.215	46.154.000	1	15%	100%	3,7	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15,79	15,79	15,79	15.267.789.600	1.158.296.908	15.79	8%	100%	15,79	100%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,5	2,5	1	246.118.000	5.798.000	1	2%	100%	2,5	100%
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50	30	30	46.814.000	300.000	0	1%	0%	30	60%
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	100%	100%	195.999.700	2.578.700	25%	1%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	195.999.700	2.578.700	25%	1%	25%	125%	125%
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5	3	1	195.999.700	2.578.700	0	1%	0%	3	60%
4	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Pemanfaatan Terhadap Dokumen Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH			100%	100%	100%	1.100.435.100	107.156.500	25%	10%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	503.083.500	12.250.500	25%	2%	25%	125%	125%
			Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	503.083.500	23.451.500	25%	5%	25%	125%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	75	72	15	150.944.500	2.158.500	0	1%	0%	72	96%
			Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		2	6	150.000.000	0	0	0%	0%	2	0%
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	5	6	65.000.000	0	0	0%	0%	5	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150	90	30	137.139.000	21.293.000	0	16%	0%	90	60%
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa	100%	100%	100%	153.571.800	26.363.000	25%	17%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Lingkungan Yang Terselesaikan										
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	153.571.800	26.363.000	25%	17%	25%	125%	156%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	23	10	115.419.300	18.233.000	0	16%	0%	23	46%
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		5	5	28.982.700	6.615.000	0	23%	0%	5	5%
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung		5	5	9.169.800	1.515.000	0	17%	0%	5	5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota										
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	100%	75%	100%	162.24 5.400	5.374.0 00	25%	3%	25,0%	125%	125%
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	100%	75%	75%	162.24 5.400	5.374.0 00	25%	3%	25,0%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5	3	1	162.245.400	5.374.000	0	3%	0%	3	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	45%	35%	100%	281.534.400	63.169.000	25%	22%	0%	60%	133%
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	90%	65%	75%	281.534.400	63.169.000	0%	22%	0%	65%	72%
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang	5	3	1	281.534.400	63.169.000	0	22%	0%	3	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
				Dilaksanakan										
5	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani			70%	72,65%	71%	31.405.584.436	9.917.737.998	0%	32%	36%	0	0%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30%	26,55%	24,40%	25.469.147.936	7.269.011.647	6,36%	29%	26,07%	26,55%	88,50%
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	26,55%	24,40%	25.469.147.936	7.218.802.647	6,36%	28%	26,07%	26,55%	108%
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	73,45%	61,75%			11,59%		18,77%	73,45%	118%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	65.700	65700	65.700	18.328.453.036	7.323.471.101	14.523	40%	22%	119269	182%
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		1	1	100.000.000	0	0	0%	0%	1	1%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20	20	15	6.204.694.900	516.390.330	0	8%	0%	20	100%
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	64	20	4	836.000.000	342.962.000	1	41%	25%	21	33%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau											
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30%	26,55%	24.40 %	5.936.436.500	2.648.726.351		45%		26,55%	88,50%
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	24,50%	26,55%	24.40	5.936.436.500	2.648.726.351		45%		26,55%	108%
				Persentase Sampah Yang Ditangani	62,00%	73,45%	61.75						73,45%	118%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	27	15	7	1.213.190.000	219.600.000	0	18%	0%	15	56%
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	131400	72900	65700	3.973.246.500	1.921.090.148	0	48%	0%	72900	55%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3	1	1	750.000.000	508.036.203	0	68%	0%	1	33%
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100%	100%	100%	199.280.000	31.314.950	25%	16%	25%	125%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	58%	60%	62%	199.280.000	31.314.950	0%	16%	0%	60%	103%
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan /Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	3	1	128.660.000	14.303.000	0	11%	0%	3	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pagu Tahunan 2025	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Keuangan TW	Realisasi Kinerja TW	%Keuangan	%Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+11	15= 14/6
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan /Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	3	1	70.620.000	17.011.950	0	24%	0%	3	60%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-2026, misi ke 3 yaitu **“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 terdiri dari :

Program utama yang dilaksanakan tahun 2025 meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring dari kegiatan penyediaan perumahan baik perumahan umum maupun perumahan swadaya. Pada program ini diarahkan untuk melakukan koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu juga menyusun dan mensosialisasikan beberapa kebijakan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman kepada stakeholder dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memfasilitasi penyediaan perumahan untuk menempati rumah layak huni serta meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan. Serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan terhadap usulan peningkatan kualitas perumahan pada masyarakat, memfasilitasi proses permohonan persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan siteplan untuk mendukung proses perizinan pembangunan perumahan yang cepat, efektif dan efisien.

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini terdiri dari 1 kegiatan untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota berupa perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mengampu 1 kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan meliputi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan dan melaksanakan verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang serta melakukan kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan.

4. Program Kawasan Permukiman

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman yang kumuh, menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh serta penyadaran publik terkait dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. kegiatan lain yang dilakukan terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki 3 kegiatan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut. Selain itu juga melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Kegiatan lain untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan pada masyarakat serta pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi.

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pengelolaan taman diluar kawasan hutan, pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman lainnya serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten dan menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis meliputi pembuatan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini mengampu 1 kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan mendampingi gerakan peduli lingkungan hidup.

9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini memiliki 1 kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak mha yang terkait dengan PPLH dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini terdiri 1 kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan serta pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pplh kabupaten/kota.

11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melakukan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengembangan kapasitas pejabat pengawas, dan melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

12. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota, pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di

TPA/TPST/SPA kabupaten/kota, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota. serta penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota yang dilaksanakan di UPT Persampahan.

13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyimpanan sementara limbah b3 dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

Sedangkan Program rutin/penunjang lainnya yang dilaksanakan tahun 2025 ini antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10 Kegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 kegiatan
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 Kegiatan
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Kegiatan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Kegiatan
6. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 kegiatan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	78	81	21.952.100.326	196.689.000	189.020.600
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	94.999.200	0	13.460.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	5.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5.000.000		128.900

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5.000.000		884.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.000.000		654.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	5.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	34.999.900		6.090.600
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	10.000.000		2.444.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan DPeriksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan DPeriksa Lingkup Perangkat Daerah	20	20	9.999.800		1.526.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	9.999.500		1.732.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	15.957.119.000	0	157.882.700
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	105	15.379.100.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12	12	552.440.000		152.740.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	7.230.000		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	8.366.200		3.092.700
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	1	9.982.800		2.050.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	Tersusunnya DOKumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100%	100%	3.499.700		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	3.499.700		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	100%	149.999.600	0	9.625.800
Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	20.000.000		3.717.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	29.999.600		5.908.800
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	10	100.000.000		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.137.867.300	136.689.000	5.641.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	31.993.500		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	6.993.500		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	20.392.500		2.867.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9.000.000		1.475.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	17.994.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	5	6.494.000		1.298.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	750	1.044.999.800	136.689.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	827.968.000	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103	103	375.140.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87	88	452.828.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100%	100%	3.039.418.526	60.000.000	2.410.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.190.000		180.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	309.998.526	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.727.230.000		2.230.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	741.229.000	0	0

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42.750.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	34	536.560.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	80	66.920.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	94.999.000		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	Persentase Rumah Layak Huni	100%	76,82%	882.566.300	0	536.853.800
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100%	100%	210.127.100	0	21.661.100
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	103.741.600		10.563.100
SubKegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	106.385.500		11.098.000
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100%	100%	421.616.700	0	421.616.700
SubKegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16	0	421.616.700		421.616.700

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang	Persentase Perumahan Yang DIBangun Sesuai Dengan Siteplan	100%	25%	250.822.500	0	93.576.000
SubKegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50	50	122.119.000		41.866.000
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	128.703.500		51.710.000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,83%	76,82%	909.800.600	2.382.005.400	10.985.300
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	100	20,86%	909.800.600	2.382.005.400	10.985.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
SubKegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24	100	726.325.600	2.382.005.400	
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		4		200.000.000	
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Menikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100	100	183.475.000		10.985.300
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase PSU Dalam Kondisi Baik	25%	25%	33.239.379.100	7.971.968.712	82.951.000
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	Persentase PSU Yang Ditangani	100	25%	33.239.379.100	7.971.968.712	82.951.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
SubKegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	29	39	11.271.254.000	3.344.336.500	
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	15.000.000		2.797.000
SubKegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	20	20	304.505.000		80.154.000
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	17	20	21.648.620.100	4.627.632.212	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	25,23	3%	4.668.997.799	2.859.298.198	297.253.215
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	5	4	883.028.000	0	190.027.215

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	2	156.227.000		8.361.000
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2	2	726.801.000		181.666.215
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Persentase Permukiman Kumuh Kategori Ringan Yang Ditangani	2,4	0,581	3.785.969.799	2.859.298.198	107.226.000
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6	6	303.000.000		107.226.000
SubKegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2	2	3.482.969.799	2.859.298.198	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	Persentase Parameter Air Yang Memenuhi Baku Mutu	5,1	55%	1.683.548.300	0	135.742.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
		Persentase Sumber Air Yang Terjaga		100%			
		Persentase Parameter Udara Yang Memenuhi Baku Mutu		80%			
		Persentase Desa Di Lahan Kritis Yang Terbina		20%			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara	50,5	100%	1.397.635.300	0	117.049.000
	Indeks Kualitas Udara	Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Udara	77,1	1			
		Persentase Desa/Kelurahan yang mengikuti komonitas untuk iklim (Proklam)		23,45%			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	40	40	203.710.000		46.130.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	1	333.161.000		70.919.000
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19	19	122.454.000		
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1	1	328.311.000		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40	40	409.999.300		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	Persentase Sumber Air Yang Dikonservasi	100%	100%	200.659.000	0	12.964.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	1	200.659.000		12.964.400
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkugan	Jumlah Desa di Lahan Kritis Yang Terbina	100%	5	85.254.000	0	5.729.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	85.254.000		5.729.000
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	Luas Tutupan Lahan Di Luar Kawasan Hutan	100%	24,91	15.860.715.815	1.546.229.000	
		Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau		17,09			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100%	100%	15.860.715.815	1.546.229.000	63.930.800

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
		Jumlah Ruang Terbuka Hijau Dan Pohon Tepi Jalan Yang Terdata		4			
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	299.994.215		32.980.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15.79	17.09	15.267.789.600	1.546.229.000	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	246.118.000		10.590.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	1	46.814.000		20.360.800
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	100%	195.999.700		63.071.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100%	100%	195.999.700		63.071.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	195.999.700		63.071.000
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Perundangan	100%	100%	503.083.500	0	145.423.000
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	503.083.500	0	145.423.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	15	150.944.500		59.266.000
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	6	2	150.000.000		73.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6	3	65.000.000		
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	30	137.139.000		13.157.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	Persentase Pelanggaran Pelaku Usaha Yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	153.571.800	0	26.787.100
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan	100%	100%	153.571.800		26.787.100
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	10	115.419.300		18.679.800
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	5	28.982.700		5.781.800

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	5	9.169.800		2.325.500
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Adat yang Di Akui	100%	100%	162.245.400		42.231.800
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Memiliki Hukum Adat	75%	100%	162.245.400		42.231.800
		Persentase Masyarakat Adat yang Meningkatkan Kapasitasnya		100%			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	162.245.400		42.231.800
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup	100%	100%	281.534.400	0	57.591.680
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Yang Terbina	75%	100%	281.534.400	0	57.591.680
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	281.534.400		57.591.680

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA	24,40%	71,44%	25.469.147.936	4.582.705.500	175.551.200
		Persentase Sampah Terkurangi		28,56%			
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Desa Yang Memiliki Bank Sampah	24,40%	41,72%	25.469.147.936	4.582.705.500	175.551.200
	Persentase Sampah Yang Ditangani		61,75%				
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	65.700	65.700	18.328.453.036	471.405.500	
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	100.000.000		5.400.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15	16	6.204.694.900	4.111.300.000	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	4	836.000.000		170.151.200
UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau							
Prpgram Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA	24,40%	71,44%	5.936.436.500	5.883.464.980	7.640.000
		Persentase Sampah Terkurangi		28,56%			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Terolah di TPA	24,40%	5,00%	5.936.436.500	5.883.464.980	7.640.000
	Persentase Sampah Yang Ditangani		61,75%				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7	5	1.213.190.000	5.633.464.980	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700	65700	3.973.246.500		7.640.000
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	1	750.000.000	250.000.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA TAHUN 2025		SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH	BERKURANG
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100%	62,86%	199.280.000	6.205.800	72.540.800
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Menghasilkan Limbah B3 Yang Terbina	62%	37,86%	199.280.000	6.205.800	72.540.800
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1	128.660.000		72.540.800
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	70.620.000	6.205.800	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2025 kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 112.098.407.476,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 139.019.858.371,- anggaran ini sudah termasuk anggaran untuk UPT Persampahan BLUD Intan Hijau. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 900.1.1.4/02-03/BPKPAD Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Bupati Banjar No. 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang Perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025 diantaranya:

Pengurangan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 94.999.200,- mengalami perubahan menjadi Rp. 81.538.400,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 15.957.119.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 15.799.236.300,- yang berkurang sebesar Rp. 157.882.700,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi pengurangan honorarium PPKOMIT, belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. . Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 149.999.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 140.373.800,-. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.
4. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 210.127.100,- mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 188.466.000,-. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan efisiensi jasa konsultan dan honorarium narasumber.
5. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal

sebesar Rp. 421.616.700,- menjadi Rp.0 dikarenakan tidak adanya SK Bupati tentang tanggap darurat bencana yg dikeluarkan oleh BPBD.

6. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 250.822.500,- mengalami perubahan menjadi Rp. 157.246.500,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas.
7. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki pagu awal sebesar Rp. 883.028.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 693.000.785,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.683.548.300,- mengalami perubahan menjadi Rp. 1.547.805.900,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi belanja jasa konsultasi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki pagu awal sebesar Rp. 195.999.700,- mengalami perubahan menjadi Rp. 132.928.700,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultan & honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat, dan perjalanan dinas.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 503.083.500,- mengalami perubahan menjadi Rp. 357.660.500,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultan & honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat, dan perjalanan dinas serta pengurangan belanja bimbingan teknis.
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki pagu awal sebesar Rp. 153.571.800,- mengalami perubahan menjadi Rp. 126.784.700,-. Pengurangan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat.

12. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 162.245.400,- mengalami perubahan menjadi Rp. 120.130.600,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat dan penyelenggaraan acara serta perjalanan dinas.
13. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 281.534.400,- mengalami perubahan menjadi Rp. 223.942.720,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan minum rapat dan penyelenggaraan acara serta perjalanan dinas.
14. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 199.280.000,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 66.335.000,- menjadi Rp. 132.945.000,-. Pengurangan ini dikarenakan adanya efisiensi jasa konsultansi, honorarium narasumber, belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

Penambahan :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 909.800.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 3.480.820.270,-. Tambahan anggaran ini digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit.
2. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan. Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 21.648.620.100,- mengalami perubahan menjadi Rp. 26.276.252.312,-. Tambahan anggaran digunakan untuk beban tagihan listrik, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan arsitektur, pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya dan pemasangan PJU/PJL di Desa Alimukim, Desa Pingran, Kec. Paramasan, Kec. Tatah Makmur, dan Desa Cintapuri.
3. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk

Menunjang Fungsi Hunian. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 11.271.254.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 14.615.590.500,-. Tambahan anggaran digunakan untuk tambahan lokasi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 39 lokasi.

4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha memiliki pagu awal sebesar Rp. 3.785.969.799,- mengalami perubahan menjadi Rp. 6.342.267.997,-. Tambahan anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh digunakan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan teknis, Pembuatan/peningkatan Drainase di Gg. Wiryo Kelurahan Keraton, perbaikan jl lingkungan di kawasan kumuh jl Mentri Empat Gg Warga Kelurahan Keraton, dan perbaikan jl lingkungan Gg Al Fattah Kel. Keraton.
5. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 15.267.789.600,- mengalami perubahan menjadi Rp. 16.814.018.600,-. Tambahan anggaran digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau seluas 17.09 Ha.
6. Program Pengelolaan Persampahan. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 25.469.147.936,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 32.534.760.236,-. Tambahan anggaran ini digunakan untuk belanja jasa tenaga kebersihan, pemeliharaan alat angkutan dan jasa konsultasi perencanaan teknis (rehab TPS3R dan rehab pool armada kebersihan), pemeliharaan bangunan gedung, pembelian mesin pemilah sampah.
7. BLUD – Intan Hijau Program Pengelolaan Persampahan. Program ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 5.936.436.500,- mendapatkan tambahan sebesar Rp. 5.875.824.980,- menjadi Rp. 11.812.261.480,-. Tambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk memperbaiki dan menambah sarana prasaran TPA seperti belanja modal gedung bangunan, pembuatan tugu titik kontrol, pembuatan pagar TPA Cahaya Kencana dan biaya jasa konsultasi lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13396 Tahun 2024 tentang Penerapan Sanksi

Administratif berupa Paksaan Pemerintah Tanpa disertai Denda Adminsitratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Tempat Pemrosesan Akhir Cahaya Kencana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Perubahan Renja tahun 2025 diharapkan dapat diakomodir perubahan target kinerja serta usulan perubahan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Banjar. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara umum, meskipun kendala atau hambatan dan tantangan yang cukup berat, namun demikian kami tetap berusaha untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjutnya perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
2. Perlu menambah atau memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang ada secara rutin.
3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Martapura, 30 Mei 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar,



6. Satuan Polisi Pamong Praja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2025 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain:

1. Menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
2. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/410/PPE/Bappedalitbang tanggal 7 Mei 2025 perihal Penetapan pagu indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025
3. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
4. Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memperhatikan hal berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanjadaerah;
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dan Project strategis RPJMD;
3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025;
4. Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa;

5. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar tahun 2024 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026;
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pendukung dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Banjar dengan Bupati Banjar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini,
Antara lain:

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi:

- 4.1 Perubahan Indikator Kinerja.
- 4.2 Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 4.3 Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 4.4 Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan I, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar memiliki kewajiban untuk melaksanakan 2 program yaitu 1 program prioritas dan 1 program penunjang, dengan 10 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 kegiatan dengan 25 sub kegiatan. Pagu anggaran Rp. Rp 21.935.537.832 dengan realisasi sampai Triwulan I Rp. 2.931.074.142 atau 13.3 %, adapun pencapaian terhadap indikator kinerjanya yaitu Indek Kepatuhan dan

Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan I sebesar – (0) karena target untuk indikator ini akan dihitung pada triwulan IV dari target tahunan 78.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Pagu anggaran Rp. 3.925.116.100 dengan realisasi sampai Triwulan I Rp. 477.530.000 atau 12.1 %, adapun pencapaian terhadap indikator kinerjanya yaitu persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas sampai dengan triwulan I sebesar 25 % dari target 25 % atau capaiannya sebesar 100%.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

						n atas Pelanggara n Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati									
1	0	0	2.01		Penangan n Gangguan Ketentera man dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Gangguan Trantibum/ K3 (Ketertiban , Ketentrama n, keindahan) yang dapat diselesaika n	100%	3.239.24 3.600	25%	1.525.546. 700	25%	389.140 .000	100%	Tercapai	
1	0	02	2.01	000 4	Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketenteram an dan Ketertiban Umum	5 Dok	1.086.977.80 0,00	1	600.022.500	1	35.760.00	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Adanya dukungan dari atasan

1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	81 Org	364.437.800,00	21	69.214.000	21	6.080.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Adanya dukungan dari atasan
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Lap	694.734.000,00	3	318.848.000	3	220.500.000	100%	Tercapai	

1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Lap	759.380.000,00	3	204.448.200	3	126.800.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Koordinasi yang baik dengan Pihak ke-3 (TNI, Polri, dan SKPD terkait) 02. Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tergolong kooperatif dan tidak anarkis Kerjasama yang baik antar anggota Satpol PP Kabupaten Banjar
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Lap	10.000.000,00	1	9.400.000	1	-	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Apabila suatu saat dalam melaksanakan penertiban Perda dan Perkada terjadi dampak didalamnya, Satpol PP siap memberikan Uang kompensasi
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	323.614.000,00	-	323.614.000	-	-	-	Target ada di TW 2&3	

1	0	0	2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WAL I KOTA	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terdapat unsur sanksi yang ditegakkan	68,9 Persen		25%	264.765.500	25%	88.390.000	100%	Tercapai	
1	0	0	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Lap	205.392.000,00	1	86.009.500	1	42.060.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : Dukungan dari Kepala Desa dan Camat dalam penyediaan tempat sosialisasi
1	0	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Lap	225.540.500,00	1	140.394.000	1	31.930.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : Pelaksanaan penanganan Perda disertai brosur peringatan mengenai larangan waktu buka warung atau rombong
1	0	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Pengawasa n yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	4 Lap	55.040.000,00	1	38.362.000	1	14.400.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari bidang lain dalam hal pengawasan pelanggaran perda atau perkara

						Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
1	052	02	2.03		PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%	200.000.000,00	-	-	-	-	-	Target ada di TW 4	
1	052	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Lap	200.000.000	-	-	-	-	-	Target ada di TW 4	

1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Kinerja Internal (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	78 Indeks	21.935.537.832	-	3.852.682.562	-	2.931.074.142		Target ada di TW4	
1	05	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100%	46.983.000	29%	13.855.650	32.67%	-	112.6%	Tercapai	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	8.240.000	4	1.875.300	4	-	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Dukungan dari pimpinan unit kerja dan Kerja sama tim
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	10.260.000,00	-	480.000	-	-	-	Target ada di TW 2 dan 3	Faktor Pendukung : Sudah dibuatkan KAK
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	4.140.000,00	1	2.334.100	1	-	-	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait Pejabat Pembuat Komitmen Penyesuaian terhadap regulasi tentang aturan pengadaan barang jasa melalui E- Katalog v6

1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Lap	17.746.000,00	5	7.517.000	5	-	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : Adanya komitmen dari Pimpinan
1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	3.597.000,00	-	899.250	-	-	-	Target ada di TW 4	
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.000.000,00	-	750.000	-	-	-	Target ada di TW 4	
1	05	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100%	15.058.586.000	22%	1.421.657.229	19.21%	1.416.057.229	87.31 %	Tidak Tercapai	

1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Org/Bulan	14.870.800.000	200	1.375.727.229	200	1.375.727.229	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	183.720.000	3	45.930.000	3	40.330.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 01. Adanya komitmen bersama Tersedianya anggaran
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	4.066.000	-	-	-	-		Target ada di TW 4	
1	05	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	529.970.000	-	80.000.000	-	-	-	Target ada di TW 4	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	287.470.000	-	-	-	-	-	Target ada di TW 4	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	11 org	162.500.000	-	-	-	-	-	Target ada di TW 4	

					Fungsi dan Pelatihan										
1	05	01	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-	Target ada di TW 4
1	05	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100%	1.237.721.900	48%	483.659.309	38.4.%	294.160.109	80%	Tidak Tercapai	
1	05	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.600.000	1	5.052.500	-	-	-	Tidak Tercapai	Faktor Penghambat: 1. Harga beberapa komponen listrik yang mengalami kenaikan di awal tahun, sementara untuk dana yang tersedia masih sama dengan tahun sebelumnya
1	05	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	480.586.000	4	253.912.000	1	108.014.500	25%	Tidak Tercapai	Faktor Penghambat: 1. Tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan
1	05	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	8 Paket	129.315.000	4	40.093.000	2	19.290.000	50%	Tidak Tercapai	Faktor Penghambat: 1. Harga barang banyak yang tidak sesuai dengan DPA Terkendala terkait peraturan

1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.660.900	3	14.778.600	3	4.977.400	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Ketersediaan anggaran pembelian barang cetak dan penggandaan
1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lap	20.400.000	3	3.720.000	3	-	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Adanya konfirmasi waktu kedatangan, jumlah peserta dan materi yang ingin dikonsultasikan 2. Adanya anggaran untuk fasilitas tamu Adanya pra sarana kunjungan tamu
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	552.160.000	3	166.103.209	3	161.878.209	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Komitmen pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.788.117.084	25	1.109.679.274	25	1.064.925.804	100%	Tercapai	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	147.037.084	3	36.759.274	3	27.006.327	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Mudahnya pembayaran langsung serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	3.641.080.000	3	1.072.920.000	3	1.037.919.477	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Kinerja pelayanan dari setiap individu sangat maksimal Tersedianya anggaran sampai dengan bulan berjalan

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.274.159.848	50%	743.831.100	29.51%	155.931.000	59%	Tidak Tercapai	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.990.000	-	14.621.250	-	2.000.000	-	Target ada di TW 4	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	646.859.998.000	17	178.110.000	14	148.241.000	82..3%	Tidak Tercapai	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	51.500.000	9	25.750.000	9	5.690.000	100%	Tercapai	Faktor Pendukung : 1. Adanya informasi terkait peralatan dan mesin lainnya yang perlu untuk dilakukan pemeliharaan 2.3. Adanya ketersediaan anggaran
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	536.809.850	-	525.349.850	-	-	-	Target ada di TW 4	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

2.1 Realisasi program, kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** target di TW.I tahun 2025 sebesar 22 % dengan realisasi 19.21% maka capaian menjadi 87.31 %.
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** target di TW.I tahun 2025 sebesar 48 % dengan realisasi 38.4 % maka capaian menjadi 80 %.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** target di TW.I tahun 2025 sebesar 50 % dengan realisasi 29.51 % maka capaian menjadi 59 %.

2.2 Realisasi program, kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

- **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** target di TW.I tahun 2025 sebesar 25 % dengan realisasi 25% maka capaian menjadi 100 %.
- **Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** target di TW.I tahun 2025 sebesar 25 % dengan realisasi 25 % maka capaian menjadi 100 %

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** target di TW.I tahun 2025 sebesar 25 % dengan realisasi 25 % maka capaian menjadi 100 %

2.3 Realisasi program, kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** target di TW.I tahun 2025 sebesar 29 % dengan realisasi 32.67 % maka capaian menjadi 112.6 %.

2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi anggaran, tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang antara lain disebabkan pada gangguan aplikasi saat penginputan, Harga beberapa komponen listrik yang mengalami kenaikan di awal tahun, sementara untuk dana yang tersedia masih sama dengan tahun sebelumnya, Harga barang banyak yang tidak sesuai dengan DPA, Banyak kebutuhan pemeliharaan dikarenakan banyak unit yang kurang baik kondisinya.
2. Program, kegiatan yang terpenuhinya target kinerja dikarenakan dilakukannya evaluasi per bulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.
3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan melebihi target kinerja dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran padakhususnya dan terhadap Pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan

2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan Reprioritisasi Kegiatan yaitu dengan Fokus pada program yang bersifat wajib, mendesak, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, Optimalisasi Anggaran yang Ada dengan Melakukan penyesuaian output kegiatan agar tetap sejalan dengan tujuan meskipun dengan anggaran terbatas, Evaluasi Rencana Kegiatan dengan Revisi rencana kegiatan agar realistis terhadap pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penyesuaian Rencana Aksi dengan melakukan Revisi rencana aksi agar lebih adaptif terhadap kondisi faktual di lapangan, Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan koordinasi antar bidang dan pihak pelaksana untuk menyinkronkan waktu

pelaksanaan.

- c. Koordinasi dengan Tim IT/Support Teknis dengan melakukan pelaporan segera untuk penyelesaian kendala teknis aplikasi.
- d. Evaluasi Ulang Proses Perencanaan Harga dengan menggunakan data harga yang lebih akurat dan terkini saat penyusunan DPA.
- e. Pemetaan Kebutuhan Pemeliharaan dengan membuat daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan risiko.
- f. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Setelah evaluasi bulanan, disusun RTL yang konkret untuk memperbaiki kekurangan capaian agar target tahunan tetap dapat dicapai.
- g. Penerapan Sistem Reward Internal dengan memberikan penghargaan atau insentif non-finansial (pengakuan, penilaian kinerja baik, promosi, dll.) kepada unit/pegawai yang berkontribusi besar terhadap pencapaian kinerja yang melebihi target.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencanakerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan akhir periode.

3.1. Perubahan Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini, Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat		Rasio Pelanggaran Perda dan Trantibum	1.67
	Meningkatnya ketentraman,ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025 (Sesudah Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Terwujudnya Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif		Indeks Trantibumlinmas	NA
	Meningkatnya ketentraman,ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum (IPKKU)	50,00
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	56,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Untuk target indikator kinerja tidak terdapat perubahan target indikator kinerja yang disebabkan beberapa hal seperti efisiensi anggaran, penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 serta analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan 1 tahun 2025 berdasarkan target triwulan 1 dan tahunan 2025.

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah semuanya tetap sama. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar melaksanakan 2 program, 9 kegiatan, dan 34 sub kegiatan.

3.3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebesar **Rp 27.206.547.155,99 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Sembilan Rupiah)** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Banjar. Sebelumnya dana / pagu yang dikurangi efisiensi sebesar **24.974.417.532 (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus**

Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) dengan dana / pagusebesar 25.860.653.932 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua).

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini antara lain :

1. Menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
2. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/471/PPE/Bappedalitbang tanggal 24 Mei 2025 perihal Tambahan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025
3. Adanya pemenuhan keperluan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk keterangan lebih jelas terkait uraian diatas dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN/PROG RAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN/PROG RAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			KET
	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.860.653 932	27.738.914 156	1.878.260.224	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Kepatuhan Kinerja Internal (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepatuhan Kinerja Internal (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja	78	78	21.935.537 832,00	23.119.924 055,99	1.184.386.223,99	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan , anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaa n, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	46.983.000 00	46.983.000 00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah	6	6	8.240.000,0 0	7.216.800,0 0	-1.023.200,00	Efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	10.260.000, 00	9.323.200,0 0	-936.800,00	Efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	4	4	4.140.000,0 0	3.645.600,0 0	-494.400,00	Efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	23	23	17.746.000, 00	15.864.400, 00	-1.881.600,00	Efisiensi belanja pemerintah

Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	3.597.000,00	3.597.000,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100	100	15.058.586.000,00	15.058.586.000,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700	700	14.870.800.000,00	14.870.800.000,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	183.720.000,00	183.720.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	4.066.000,00	3.354.000,00	-712.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100	100	529.970.000,00	529.970.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	287.470.000,00	287.470.000,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	11	11	162.500.000,00	74.000.000,00	-88.500.000,00	Efisiensi belanja pemerintah

	Pendidikan dan Pelatihan	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	80.000.000,00	80.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah	100	100	1.237.721.900,00	1.237.721.900,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	12.600.000,00	12.600.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	480.586.000,00	560.684.000,00	80.098.000,00	Penambahan anggaran pada sub kegiatan <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> diperlukan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional satuan kerja. Seiring dengan bertambahnya beban kerja dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks, diperlukan pembaruan serta penambahan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak layak pakai, mengalami kerusakan, atau tidak lagi memenuhi standar kebutuhan kerja saat ini.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	129.315.000,00	119.508.000,00	-9.807.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12	12	42.660.900,00	33.838.300,00	-8.822.600,00	Efisiensi belanja pemerintah

	Disediakan	Disediakan						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	20.400.000,00	13.980.000,00	-6.420.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	552.160.000,00	540.857.999,99	-11.302.000,01	Efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan	100	100	3.788.117.084,00	3.788.117.084,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	147.037.084,00	147.037.084,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	12	12	3.641.080.000,00	3.641.080.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.274.159.848,00	1.274.159.848,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	38.990.000,00	38.990.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	65	646.859.998,00	1.779.597.822,00	1.132.737.824,00	Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan operasional kendaraan dinas yang menjadi sarana

								utama dalam pelaksanaa n tugas lapangan. Seiring dengan meningkat nya intensitas kegiatan operasional di lapangan, frekuensi penggunaan kendaraan dinas juga meningkat secara signifikan, sehingga berdampak pada kebutuhan pemeliharaan rutin dan perbaikan yang lebih sering guna menjaga kondisi kendaraan tetap layak jalan dan aman digunakan dan dalam sub kegiatan ini dialokasikan untuk penambahan sarana (mobil) operaional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	83	51.500.000,00	51.500.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	536.809.850,00	621.349.850,00	84.540.000,00	Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diperlukan untuk menjaga fungsi dan kelayakan infrastruktur kantordalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Selain itu, terdapat kebutuhan penyesuaian ruangkerja dan fasilitas pendukung akibat penambahan personel, perubahan struktur

								organisasi, atau adaptasi terhadap standar pelayanan minimal (SPM).
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian penanganan terhadap tramtibum, Perda/Perkada dan Linmas Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap tramtibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Penegakkan Pelanggaran Perda	Persentase penanganan gangguan tramtibum, yang diselesaikan Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara Persentase SDA satpol pp dan satlinmas yang memiliki kualifikasi	100	100 4.3% 100	3.925.116.100,00	4.086.623.100,00	161.507.000,00	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap tramtibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas Persentase wilayah patroli / operasi pencegahan gangguan Tramtibum Rasio jumlah Satlimnas aktif	Persentase tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran terhadap tramtibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas Persentase wilayah patroli / operasi pencegahan gangguan Tramtibum Rasio jumlah Satlimnas aktif	100	100	3.239.143.600,00	3.239.143.600,00		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	5	5	1.086.977.800,00	1.283.535.300	196.557.500	

	rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum						
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	JumlahSDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	81	81	364.437.800,00	292.437.800,00	-72.000.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	12	694.734.000,00	591.926.000,00	-102.808.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	12	759.380.000,00	618.154.000,00	-141.226.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani melalui Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani melalui Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	4	10.000.000,00	9.400.000,00	-600.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang						Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pengadaan

	Tersedia	Tersedia	5	5	323.614.000,00	980.711.000,00	657.097.000,00	dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pengendalian, dan penegakan peraturan daerah di lapangan. Seiring meningkatnya dinamika sosial dan aktivitas masyarakat, serta kompleksitas potensi gangguan ketertiban umum, diperlukan dukungan sarana dan prasarana operasional yang lebih memadai, seperti alat komunikasi, perlengkapan pengamanan, kendaraan patroli, serta fasilitas pendukung lainnya
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terdapat unsur-sangsi yang ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terdapat unsur sangsi yang ditegakkan	68.9	68.9	485.972.500,00	485.972.500,00		
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	4	205.392.000,00	195.164.000,00	-10.228.000,00	Efisiensi belanja pemerintah

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4	4	225.540.500,00	181.593.000,00	-43.947.500,00	Efisiensi belanja pemerintah
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	4	55.040.000,00	32.912.000,00	-22.128.000,00	Efisiensi belanja pemerintah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persentase peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100	100	200.000.000,00	200.000.000,00		
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang Harus Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Bajar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staff Satpol PP Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Banjar dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berguna bagi pembangunan di Kabupaten Banjar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2025 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:
 - a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025.
2. Saat Perubahan Renja ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlu nya. dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk

menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian program

3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan.

4.3 Rencana TindakLanjut

Rencana tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025, yaitu sebagai berikut.

1. Satpol PP Kabupaten Banjar akan segera menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada seluruh bidang agar melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan secara tepat waktu dan terukur, guna memastikan pencapaian target yang telah ditentukan secara optimal."
2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staff Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Banjar tahun 2025 ini Sebagai bagian dari manajemen risiko dalam perencanaan, perubahan Renja ini juga memuat dan menyesuaikan register risiko dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

Demikian dokumen perubahan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun, selanjutnya kami

menyadari akan banyak kekurangan dalam penyusunan perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Tahun 2025, maka dengan segala kerendahan hati agar ada koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Martapura, 20 Juni 2025

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong
PrajaKabupaten Banjar

H. YUDI ANDREA, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002

**KEPUTUSAN PLT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR NOMOR 027.a TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR**

Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
- Kesatu** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

PLT.KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN

BANJAR



H. YUDI ANDREA, S.STP, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19791231 199810 1 002

Lampiran I :Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
Nomor :027.a Tahun 2025 Tanggal : 05 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Anggota	1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		3. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		4. Kabid Sumber Daya Aparatur & Linmas
		5. Kabid Penegakkan Produk Hukum Daerah
		6. Kasi Operasional dan Penindakan
		7. Kasi Kerja Sama
		8. Kasi Bina Potensi dan Satlinmas
		9. Kasi Bina Teknis Fungsional dan Latihan Dasar
		10. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
		11. Kasi Penyidikan dan Penyelidikan
		12. Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

PLT.KEPALA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN

BANJAR



H. YUDI ANDREA, S.STP, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19791231 199810 1 002

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATPOL PP
KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah,

Tanggal : 20 Juni 2025

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia

Bidang Pembangunan manusia Dan Pemerintahan
Dan Pemerintahan

FARA HAYANI, SP
NIP. 19720225 199903 2 008

RUSDIAN NOOR, SE
NIP. 198404042011011009

Mengetahui, KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.hut, M.Si
NIP. 19740923 200003 1 004

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun anggaran 2025 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain:

Menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/91/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memperhatikan hal berikut :

Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;

Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dan Project strategis RPJMD;

Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025;

Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa;

Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini terdapat beberapa dinamika yang menuntut adanya penyesuaian pada indikator dan target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak adanya perubahan kebutuhan belanja dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan seperti :

- a. Saat ini belum tersedia alokasi anggaran untuk honorarium Pejabat Pengadaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati sebelumnya

- b. Sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, diperlukan penambahan serta pemeliharaan instalasi kelistrikan guna mendukung kelancaran operasional
- c. Dalam rangka meningkatkan kunjungan tamu dari luar provinsi maupun luar daerah, diperlukan ketersediaan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi tamu
- d. Keterbatasan alokasi anggaran mengakibatkan belum optimalnya partisipasi dalam kegiatan berskala nasional, seperti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), rapat koordinasi khusus, kegiatan konsultasi, serta koordinasi terkait pelaksanaan program strategis
- e. Saat ini belum dialokasikan anggaran untuk kegiatan studi wawasan kebangsaan bagi Paskibraka tahun 2025. Selain itu, berdasarkan arahan Bupati Banjar diperlukan penganggaran untuk pengadaan kelengkapan pakaian bagi petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
- f. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Banjar akan segera dilantik, karena telah diterbitkan penetapan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- g. Sehubungan dengan adanya kajian akademik mengenai Indikator Demokrasi Indonesia dan kajian akademik terkait bantuan keuangan partai politik, maka diperlukan hasil kajian dari lembaga yang kompeten
- h. Dalam rangka memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan, diperlukan pelaksanaan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional
- i. Diperlukan fasilitasi dan upaya harmonisasi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang baru di Kabupaten Banjar guna menjaga sinergi dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pendukung dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Banjar dengan Bupati Banjar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi:

- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja.
- 3.2 Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- 3.3 Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanannya.
- 3.4 Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya perbaikan perencanaan yang bersifat reguler dan rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta merealisasikan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD. Review ini didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, dengan mengacu pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari sisi capaian kinerja maupun serapan anggaran, sebagai bahan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Renja.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Triwulan I memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan capaian target tahunan, sekaligus menjadi dasar identifikasi kendala dan potensi percepatan kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya. Kajian ini juga mengaitkan capaian tersebut dengan target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga dapat dilihat kontribusi realisasi program dan kegiatan Triwulan I terhadap pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan.

2.1. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 0 persen sehingga capaiannya adalah 0 persen.
- 2) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 20 persen adapun realisasinya 14.28 persen sehingga capaiannya adalah 71 persen.
- 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 orang adapun realisasinya 0 orang sehingga capaiannya adalah 0 persen.
- 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 140 orang adapun realisasinya 70 orang sehingga capaiannya adalah 50 persen.
- 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 600 orang adapun realisasinya 540 orang sehingga capaiannya adalah 90 persen.

2.2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase elemen masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 20 persen adapun realisasinya 20 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 31 persen adapun realisasinya 31 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 3) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase potensi konflik agama, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dicegah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 20 persen adapun realisasinya 20 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase potensi konflik sosial yang dapat diselesaikandengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 30 persen adapun realisasinya 30 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi umum yang berkualitas dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 100 persen adapun realisasinya 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 10) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase ormas yang memiliki izin (legalitas) dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 45 persen adapun realisasinya 45 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 11) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja pada kegiatan ini ada dua yaitu :

- Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 25 persen adapun realisasinya 25 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 12) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target triwulan I pada tahun

2025 yaitu 4 dokumen adapun realisasinya 4 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

14) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 2 dokumen adapun realisasinya 2 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

15) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

16) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen adapun realisasinya 1 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

17) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 4 dokumen adapun realisasinya 4 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

18) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 3 dokumen adapun realisasinya 3 dokumen sehingga capaiannya adalah 100 persen.

19) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 20) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 21) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 paket adapun realisasinya 1 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 22) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 paket adapun realisasinya 1 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 23) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 paket adapun realisasinya 1 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 24) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 3 paket adapun realisasinya 3 paket sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 25) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1

laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 26) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 3 laporan adapun realisasinya 3 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 27) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 32 buah adapun realisasinya 32 buah sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 28) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 3 laporan adapun realisasinya 3 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 unit adapun realisasinya 1 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 30) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 5 unit adapun realisasinya 5 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.
- 31) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 unit adapun realisasinya 1 unit sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 32) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 8 buah adapun realisasinya 8 buah sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 33) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 34) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 35) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 60 orang adapun realisasinya 60 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 36) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 4420 orang adapun realisasinya 4420 orang sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 37) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan Konflik di Daerah.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 1 laporan adapun realisasinya 1 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

- 38) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/ kota dengan target triwulan I pada tahun 2025 yaitu 2 laporan adapun realisasinya 2 laporan sehingga capaiannya adalah 100 persen.

2.3. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun pelaksanaan ini, tidak terdapat program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Banjar. Seluruh capaian kinerja berada pada tingkat yang sesuai atau di bawah target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program tetap menjadi perhatian, agar pada periode berikutnya dimungkinkan tercapainya hasil yang melampaui target secara terukur dan berkelanjutan.

2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan :

1. Pada beberapa sub kegiatan yang aktivitas utamanya adalah pelaksanaan sosialisasi/pembinaan dengan objek masyarakat, pelaksana atau pengampu kegiatannya masih belum mampu secara optimal mengejar target kegiatan sosialisasinya, karena dengan kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas dibidang mereka selain harus mengejar target kegiatan yang sudah terjadual sesuai dokumen rencana aksi, ternyata harus ditambah dengan pemenuhan aktivitas kegiatan lainnya yang belum terjadual secara resmi namun wajib dilaksanakan.
2. Faktor kendala teknis dan faktor internal lainnya.
Pada beberapa kondisi bidang pelaksana program dan kegiatan terpaksa menunda pelaksanaan sub kegiatannya karena alasan teknis, seperti karena adanya kebijakan internal bidang, karena ketersediaan anggaran kas yang kurang akibat terserap pada kegiatan lain, dll.

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelaksana kegiatan sudah memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja sehingga target indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Makin meningkatnya pemahaman para pejabat struktural sebagai pengampu program dan kegiatan untuk mempelajari konsep kinerja dan target capaian pada program dan kegiatan yang ditanganinya.

2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdampak positif terhadap peningkatan stabilitas politik, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan strategis, menurunnya efektivitas pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perubahan target dalam perubahan rencana kerja dilakukan sebagai upaya percepatan atau akselerasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program rencana strategis. Langkah ini diambil guna menyesuaikan arah kebijakan dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan selaras dengan dinamika kebutuhan serta perkembangan yang terjadi, sehingga target yang telah direncanakan dalam dokumen strategis dapat tercapai secara optimal.

2.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

- 1) Terkait masih adanya target Renstra yang terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah akibat kesalahan perhitungan dalam penetapan maka opsi tindakan yang bisa diambil adalah dengan melakukan perbaikan target dan dokumen pada tahapan review Renstra, ataupun kalau memungkinkan bisa dirubah pada tahapan revisi/perubahan Renstra SKPD. Kemudian diharapkan agar setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran kedalam kegiatan (penyusunan rincian belanja)
- 2) Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang

ada diatasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target indikator capaian kinerja.

- 3) Terkait adanya keluhan pada salah satu bidang yang merasa mereka berada dalam kondisi yang tidak ideal, dimana mereka terpaksa harus konsentrasi, memberikan energi dan perhatian penuh pada salah satu kegiatan yang dianggap prestisius, sedangkan kondisi mereka lagi kekurangan sumber daya manusia, sehingga hal ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan lainnya dan akhirnya capaian kinerja tidak terpenuhi. Untuk mengatasi masalah ini tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengajukan usulan penambahan bidang, mengingat struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar masih bisa ditambah menjadi empat bidang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Tahun 2025	Perubahan Renja 2025	Target Kinerja (TK) dan Anggaran Triwulan		Relisasi Kinerja (RK) dan Anggaran Triwulan		Capaian (%)	Predikat
										I		I			
										TK	Rp	RK	Rp		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			15,968,095,400							
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			15,968,095,400							
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	80 Indeks	5,691,151,100		80	1,509,735,371	0	1,219,167,205	100	Tercapai
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	40,420,400		30	4,321,000	30	1,836,000	100	Tercapai
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	6,600,000		4	1,388,000	4	1,836,000	100	Tercapai
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	4,099,000		0	-	0	-	100	Tercapai
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2,027,800		1	191,000	1	-	100	Tercapai
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1,799,800		0	-	0	-	0	Tercapai
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	3,500,000		2	-	2	-	100	Tercapai
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Lap	7,243,800		2	1,830,000	2	-	100	Tercapai
8	1	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	4,350,000		1	912,000	1		100	Tercapai

8	1	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	10,800,000		0	-	0		0	Target Triwulan berikutnya
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,317,969,200		25	1,072,856,496	25	621,054,641	100	Tercapai
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	27 dok	4,129,000,000		4	1,029,131,496	4	586,314,641	100	Tercapai
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	183,960,000		3	43,725,000	3	34,740,000	100	Tercapai
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4,500,000		1	-	1	-	100	Tercapai
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Lap	509,200		1	-	1	-	100	Tercapai
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100 Persen	60,000,000		25	220,000	0	12,618,762	0	Tidak Tercapai
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	6 Orang	60,000,000		1	220,000	0	12,618,762	0	Tidak Tercapai
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang berkualitas	100 Persen	471,480,500		25	155,535,968	25	218,838,157	100	Tercapai
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,997,000		1	1,130,000	1	1,410,500	100	Tercapai
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19,501,000		1	2,343,500	1	3,299,500	100	Tercapai
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,991,500		1	5,702,500	1	5,474,000	100	Tercapai
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14,446,000		3	1,700,000	3	3,522,800	100	Tercapai
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4,970,000		1	-	1	365,000	100	Tercapai

8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	402,575,000		3	144,659,968	3	204,766,357	100	Tercapai
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100 Persen	99,980,000		100	98,358,000	100	171,004,500	100	Tercapai
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	99,980,000		32	98,358,000	32	171,004,500	100	Tercapai
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100 Persen	404,597,000		25	107,160,000	25	102,843,360	100	Tercapai
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	404,597,000		3	107,160,000	3	102,843,360	100	Tercapai
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100 Persen	296,704,000		25	71,283,907	25	90,971,785	100	Tercapai
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,750,000		1	13,350,000	1	8,400,000	100	Tercapai
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	203,960,000		5	25,273,907	5	48,021,285	100	Tercapai
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,184,000		1	29,920,000	1	29,974,500	100	Tercapai
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	24 Unit	19,810,000		8	2,740,000	8	4,576,000	100	Tercapai
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan	100 persen	1,560,746,500		20	92,605,705	20	179,969,500	100	Tercapai
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti	100 Persen	1,560,746,500		20	92,605,705	14.28	179,969,500	71	Tidak Tercapai

					Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan									
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420 Orang	270,161,500		140	-	70	21,613,000	50	Tidak Tercapai
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Lap	4,902,000		1	-	1	-	100	Tercapai
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	184,756,000		0	45,514,000	0	105,204,000	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33 Orang	969,826,000		0	47,091,705	0	53,152,500	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	2	2.01	9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	40,360,000		0	-	0	-	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	2	2.01	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	41,265,000		0	-	0	-	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Orang	49,476,000		0	-	0	-	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 persen	5,147,935,400		0	5,072,500	0	32,048,400	100	Target Triwulan berikutnya

8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang memiliki rencana kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	100 Persen	5,147,935,400		0	5,072,500	0	32,048,400	100	Target Triwulan berikutnya
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2450 Orang	5,033,829,500		0	-	0	-	0	Target Triwulan berikutnya
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	360 Orang	43,192,900		0	-	0	32,048,400	0	Target Triwulan berikutnya
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	70,913,000		1	5,072,500	1	-	100	Tercapai

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	40 Persen	550,502,900		31	62,025,308	31	-	100	Tercapai
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki izin (legalitas)	50 Persen	550,502,900		45	62,025,308	45	-	100	Tercapai
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	525,502,900		60	60,242,308	60	-	100	Tercapai
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Lap	25,000,000		0	1,783,000	0		100	Target Triwulan berikutnya
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik agama, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dicegah	100 Persen	1,037,998,500		20	187,993,698	20	55,760,000	100	Tercapai
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	90 Persen	1,037,998,500		22.5	187,993,698	22.5	55,760,000	100	Tercapai
						Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80 persen	1,037,998,500		20	187,993,698	20	55,760,000	100	Tercapai
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	2450 Orang	1,037,998,500		600	187,993,698	540	55,760,000	90	Tidak Tercapai

8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan	100 Persen	1,979,761,000		25	1,046,106,939	25	197,704,611	100	Tercapai
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 Persen	1,979,761,000		25	1,046,106,939	25	197,704,611	100	Tercapai
						Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100 persen	1,979,761,000		25	1,046,106,939	25	197,704,611	100	Tercapai
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5785 Orang	1,600,088,000		4420	988,082,000	4420	163,704,611	100	Tercapai
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Lap	39,743,000		1	3,078,000	1	2,500,000	100	Tercapai
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dok	339,930,000		2	54,946,939	2	31,500,000	100	Tercapai

Sumber : simondalev

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan SKPD yang dilakukan akhir periode. Pada tahun 2025 BAKESBANGPOL akan melaksanakan **6 program 11 kegiatan serta 41 Sub kegiatan** . Dengan total pagu dana sebesar **Rp. 13.055.639.700,-**

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (sebelum perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya toleransi antar dan inter umat beragama		Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	0
	Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai	Angka kasus konflik sosial	0
		Persentase kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti .	100
	Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	1,77

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi		Indeks Harmoni Indonesia	6
		Indeks Kewaspadaan Nasional	85,33
	Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	80.15
	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	72
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari adanya masa transisi antara dua periode perencanaan strategis yang berbeda, yaitu dari Rencana Strategis BAKESBANGPOL Tahun 2022–2026 menuju Rencana Strategis yang baru untuk periode Tahun 2025–2029.

Periode transisi ini menuntut adanya penyesuaian kembali terhadap sasaran, program, dan indikator kinerja yang digunakan, agar tetap relevan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkini. Selain itu, perubahan indikator kinerja juga mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan organisasi serta

perkembangan regulasi yang mengatur tata kelola manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.

Dengan demikian, perubahan terhadap indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja BAKESBANGPOL Tahun Anggaran 2025 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh target dan capaian kinerja yang direncanakan selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang baru, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap tantangan ke depan.

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah semuanya tetap sama.

3.3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebesar **Rp 13.383.639.700,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET		PAGU			ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					15,968,095,400.00	13,383,639,700.00	-2,584,455,700	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15,968,095,400.00	13,383,639,700.00	-2,584,455,700	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesbangpol	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78	84.86	5,691,151,100.00	5,807,269,500.00	116,118,400	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	40,420,400.00	33,086,900.00	-7,333,500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	6,600,000.00	5,421,800	-1,178,200	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	4,099,000.00	3,539,200	-559,800	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2,027,800.00	1,616,800	-411,000	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	1,799,800.00	1,523,800	-276,000	efisiensi belanja pemerintah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	3,500,000.00	2,846,600	- 653,400	efisiensi belanja pemerintah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	19	7,243,800.00	6,064,800	- 1,179,000	efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	4,350,000.00	3,468,800	- 881,200	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	10,800,000.00	8,605,100	- 2,194,900	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang terpenuhi	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	4,317,969,200.00	4,325,174,800.00	7,205,600	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27	12	4,129,000,000.00	4,129,000,000	-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	183,960,000.00	192,120,000	8,160,000	anggaran untuk honorarium Pejabat Pengadaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4,500,000.00	3,647,600	- 852,400	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2	18	509,200.00	407,200	- 102,000	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	100	60,000,000.00	48,000,000.00	- 12,000,000	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	6	60,000,000.00	48,000,000	- 12,000,000	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	100	471,480,500.00	410,663,800.00	- 60,816,700	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	3,997,000.00	7,994,000	3,997,000	pemeliharaan instalasi kelistrikan guna mendukung kelancaran operasional
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	19,501,000.00	19,501,000	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	25,991,500.00	22,091,000	- 3,900,500	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	14,446,000.00	11,556,800	- 2,889,200	efisiensi belanja pemerintah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4,970,000.00	8,116,000	3,146,000	ketersediaan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi tamu.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	402,575,000.00	341,405,000	- 61,170,000	efisiensi belanja pemerintah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	100	99,980,000.00	286,502,000.00	186,522,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32	46	99,980,000.00	286,502,000	186,522,000	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan penambahan PPPK SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100	100	404,597,000.00	404,538,000.00	- 59,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	404,597,000.00	404,538,000	- 59,000	efisiensi belanja pemerintah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100	100	296,704,000.00	299,304,000.00	2,600,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42,750,000.00	42,750,000	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	203,960,000.00	203,960,000	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30,184,000.00	30,184,000	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	46	19,810,000.00	22,410,000	2,600,000	penambahan pengadaan untuk pemeliharaan aset yang masih digunakan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang memahami Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	1,560,746,500.00	1,716,975,000.00	156,228,500	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	85	80	1,560,746,500.00	1,716,975,000.00	156,228,500	

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420	675	270,161,500.00	227,832,000	42,329,500 ⁻	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	3	4,902,000.00	4,902,000	-	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1	184,756,000.00	115,368,000	69,388,000 ⁻	efisiensi belanja pemerintah
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33	33	969,826,000.00	1,200,326,000	230,500,000	anggaran untuk kegiatan studi wawasan kebangsaan bagi Paskibraka tahun 2025 dan pengadaan kelengkapan pakaian bagi petugas upacara hari kemerdekaan
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	40,360,000.00	15,411,000	24,949,000 ⁻	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	41,265,000.00	37,560,000	3,705,000 ⁻	efisiensi belanja pemerintah
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27	33	49,476,000.00	115,576,000	66,100,000	DPPI Kabupaten Banjar akan segera dilantik, karena telah

								diterbitkan penetapan resmi dari BPIP
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100	100	5,147,935,400.00	2,438,511,900.00	- 2,709,423,500	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang memiliki rencana kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan dan pendidikan politik yang terlaksana	100	100	5,147,935,400.00	2,438,511,900.00	- 2,709,423,500	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2450	755	5,033,829,500.00	2,372,358,500	- 2,661,471,000	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	360	140	43,192,900.00	15,393,400	- 27,799,500	efisiensi belanja pemerintah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	70,913,000.00	50,760,000	- 20,153,000	efisiensi belanja pemerintah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif melaporkan keberadaannya	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	31	40	550,502,900.00	480,590,000.00	- 69,912,900	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	82	90.7	550,502,900.00	480,590,000.00	- 69,912,900	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400	455	525,502,900.00	467,874,200	- 57,628,700	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	25,000,000.00	12,715,800	- 12,284,200	efisiensi belanja pemerintah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik agama, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dicegah	Persentase kebijakan dibidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	100	100	1,037,998,500.00	819,526,500.00	218,472,000	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80	80	1,037,998,500.00	819,526,500.00	218,472,000	- efisiensi belanja pemerintah
	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	Persentase Rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	90	100				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2450	2381	1,037,998,500.00	819,526,500	218,472,000	- efisiensi belanja pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	1,979,761,000.00	2,120,766,800.00	141,005,800	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	90	100	1,979,761,000.00	2,120,766,800.00	141,005,800.00	
		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen		100				

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1635	5642	1,600,088,000.00	1,600,205,800	117,800	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	39,743,000.00	31,793,000	7,950,000 ⁻	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6	4	339,930,000.00	488,768,000	148,838,000	fasilitasi dan upaya harmonisasi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Dari tabel 3.1 dapat dilihat beberapa sub kegiatan mengalami perubahan baik secara target kinerja maupun anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 183.960.000 dengan kenaikan anggaran sebesar Rp. 8.160.000 sehingga menjadi Rp. 192.120.000 dikarenakan Saat ini belum tersedia alokasi anggaran untuk honorarium Pejabat Pengadaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati sebelumnya
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.997.000 dengan kenaikan anggaran sebesar Rp. 3.997.000 sehingga menjadi Rp. 7.994.000 dikarenakan Sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, diperlukan penambahan serta pemeliharaan instalasi kelistrikan guna mendukung kelancaran operasional.
- 3) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 4.970.000 dengan kenaikan anggaran sebesar Rp. 3.146.000 sehingga menjadi Rp. 8.116.000 dikarenakan Dalam rangka meningkatkan kunjungan tamu dari luar provinsi maupun luar daerah, diperlukan ketersediaan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi tamu.
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 99.980.000 dengan kenaikan anggaran Rp 188.262.000 sehingga menjadi Rp 286.502.000 dikarenakan melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan penambahan PPPK SKPD.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 19.810.000 dengan kenaikan anggaran Rp 2.600.000 sehingga menjadi Rp 22.410.000 dikarenakan penambahan pengadaan untuk pemeliharaan aset yang masih digunakan.
- 6) Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 969.826.000 dengan kenaikan anggaran Rp 230.500.000 sehingga menjadi Rp 1.200.326.000 dikarenakan Saat ini

belum dialokasikan anggaran untuk kegiatan studi wawasan kebangsaan bagi Paskibraka tahun 2025. Selain itu, berdasarkan arahan Bupati Banjar diperlukan penganggaran untuk pengadaan kelengkapan pakaian bagi petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

- 7) Sub kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 49.476.000 dengan kenaikan anggaran Rp. 66.100.000 sehingga menjadi RP. 115.576.000 dikarenakan saat ini Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Banjar akan segera dilantik, karena telah diterbitkan penetapan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sehingga memerlukan tambahan anggaran.
- 8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp 339.930.000 dengan kenaikan anggaran Rp 148.838.000 sehingga menjadi Rp 488.768.000 dikarenakan Diperlukan fasilitasi dan upaya harmonisasi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang baru di Kabupaten Banjar guna menjaga sinergi dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 memiliki 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan serta 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis.

Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah mengalami berbagai dinamika yang berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar capaian kinerja berada dalam kategori “tercapai”, namun terdapat pula beberapa kegiatan yang belum memenuhi target akibat keterbatasan sumber daya, kendala teknis, serta beban kerja yang tidak seimbang antar unit pelaksana.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, analisis risiko telah disusun dalam bentuk register risiko sebagai alat manajemen risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Register risiko ini mencakup identifikasi risiko strategis dan operasional, pengukuran tingkat dampak dan kemungkinan, serta rencana pengendalian dan mitigasi yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Beberapa risiko utama yang teridentifikasi antara lain:

- Risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat kekurangan sumber daya manusia.
- Risiko teknis terkait ketersediaan anggaran kas atau sarana prasarana yang belum memadai.

- Risiko kesalahan dalam penetapan indikator dan target kinerja yang terlalu tinggi atau tidak relevan.

Melalui penerapan register risiko ini, Badan Kesbangpol diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra dengan pendekatan berbasis risiko.

4.1 Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bajar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berguna bagi pembangunan di Kabupaten Banjar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2025 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya antara lain :

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai :
 - a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA perubahan tahun 2025

2. Saat perubahan renja ini dijabarkan ke dalam RKA perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan, penjabaran RKA perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.
3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya baik di lingkungan Pemerintah maupun di luar pemerintahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025 ini antara lain :

1. Merencanakan ulang Rencana Kerja dan RAK (Rencana Anggaran Kas) disesuaikan dengan kondisi waktu pelaksanaan pada perubahan Renja 2025.
2. Memprioritaskan semua pengadaan barang/ jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja fisik maupun keuangan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dibuat agar kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Martapura, 20 Juni 2025

Plt. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar



H. Makmur, M.Pd
Pembina

NIP. 19730610 199802 1 003

8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dengan ***bismillaahirrohmaanirrohiim*** dan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dicatat sebagai ibadah dan tidak terputus serta rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar untuk periode triwulan akhir tahun yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/ kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Kegiatan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan salah satu rangkaian tahap perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, Usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025.

Renja SKPD mempunyai peranan penting dalam sistem perencanaan daerah dan sebagai sarana pendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)SKPD. Selain tersebut

di atas Renja SKPD juga merupakan :

1. Dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun ke depan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD-P (RAPBDP) Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun dengan menyesuaikan nomenklatur sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih tahun 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Banjar 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan”

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2025-2029, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya;
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Mencermati empat misi pembangunan daerah tersebut, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dominan pada misi ke-4 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam rancangan awal Renstra Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar 2025-2029 dimana Sasaran Pada RPJMD menjadi Tujuan Renstra SKPD, seperti tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar

Misi Ke- Tiga: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan	
Tujuan RPJMD:	Sasaran RPJMD:
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Menurunnya risiko bencana
Tujuan Renstra SKPD	Sasaran SKPD
Menurunnya risiko bencana	1. Responsivitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan 2. Penurunan Kejadian Kebakaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
10. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor NOMOR : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan renangan awal Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan maksud sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2025 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi capaian tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025 dari total nilai pagu sebesar Rp. **19.049.694.829** ,- yang diampu oleh dua program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pencegahan penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 14.244.464.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.674.698.552,- atau 17,05%.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah :

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Adanya aplikasi aplikasi baru yang masih memerlukan penyesuaian seperti inaproc e-katalog v6 dan coretax.

2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Pihak penyedia barang yang diminta belum terdaftar di katalog v6, sehingga memerlukan waktu untuk proses registrasi ulang.

Untuk Program Pencegahan penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengelola anggaran sebesar Rp 5.912.697.729,- dan realisasi sebesar Rp 198.187.600,- atau sebesar (3.35%).

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program ini adalah :

1. Adanya aplikasi aplikasi baru yang masih memerlukan penyesuaian seperti inaproc e-katalog v6 dan coretax.
2. Pihak penyedia barang yang diminta belum terdaftar di katalog v6, sehingga memerlukan waktu untuk proses registrasi ulang.
3. Anggaran yang berubah terkait dengan adanya efisiensi anggaran
4. Penyusunan anggaran dpa perubahan (abt) yang dipercepat sehingga ada beberapa anggaran belanja modal yang perlu ditambah atau dikurangi sehingga belum bisa direalisasikan sampai dpa resmi terbit

Dari kinerja yang telah dilaksanakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar telah melaksanakan 2 Program 11 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.1.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 282.110.000,- dengan target 365 laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 1.125.000,- (0.40%) dengan realisasi fisik 91 laporan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senantiasa berusaha hadir memberikan respon cepat terhadap informasi kejadian yang diterima *call center*, sehingga selama kurun waktu 3 (tiga) bulan seluruh kejadian peristiwa kebakaran ditanggapi dan dibuatkan laporannya.

2. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 787.393.000,- dengan target 365 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp.1.650.000,- (0.21%) dengan realisasi fisik 91 Dokumen yang sudah tersedia. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senantiasa berusaha hadir memberikan respon cepat terhadap informasi kejadian yang diterima *call center*, sehingga selama kurun waktu 3 (tiga) bulan seluruh kejadian peristiwa darurat ditanggapi dan didokumentasikan.

3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 319.927.000,- dengan target 6 orang. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 120.612.050,- (37,70%) dengan realisasi fisik 0. Realisasi anggaran terserap di Tri Wulan 1 untuk mengikuti kegiatan Lomba National Firefighter Skill Competition (NSFC) yang merupakan event rutin diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran (Damkar) ke 106 di tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 2.952.238.800,- dengan target 42 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%) dengan realisasi fisik 0.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 24.981.000,- dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 3.988.000,- (15,96%) dengan realisasi fisik 0.

6. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 204.156.000,- dengan target 500 Keluarga. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 2.370.000,- (1,16%) dengan realisasi fisik 40 Keluarga.

1.1.2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 68.345.000,- dengan target 4 dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran Rp. 5.424.000 (7.94%), dengan realisasi fisik 0.

2. Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 38.535.000,- dengan target 4 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 3.988.000,- (10.35%), dengan realisasi fisik 0.

1.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 299.013.000,- dengan target 500 orang. Sampai dengan triwulan I realisasi

anggaran sebesar Rp. 35.053.550,- (11.72%), dengan realisasi fisik sebanyak 825 orang masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran.

2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 158.270.000,- dengan target 20 desa/kelurahan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 22.585.000,- (14.27%), dengan realisasi fisik sebanyak 4 desa/kelurahan yang sudah ada pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

3. Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 26.820.000,- dengan target 4 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 1.392.000,- (5,19%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen.

1.1.4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 750.908.929,- dengan target 103 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0 (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 unit.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 14.499.000,- dengan target 7 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 1.327.000,- (9,15%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen yang sudah tersusun.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 2 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 1.781.000,- (22,13%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen yang sudah tersusun.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 2 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 2 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 2.620.000,- (56.77%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 2 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen

6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 6.439.500,- dengan target 17 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen.

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 4 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen.

8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 4.615.000,- dengan target 50 Data. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 0,- (0%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Data.

1.1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 8.905.900.000,- dengan target 94 Orang/Bulan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 2.086.893.427,- (23,43%).

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 202.595.000,- dengan target 50 Dokumen. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 37.965.000,- (18.74%), dengan realisasi fisik sebanyak 0 Dokumen.

1.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan target 30 orang. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan realisasi fisik 0%.

1.1.4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 1.597.000,- dengan target 1 Laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 186.000,- (11.65%), dengan realisasi fisik 0.

1.1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 26.118.000,- dengan target 4 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 3.826.000,- (14.65%), dengan realisasi fisik sebanyak 0.

2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 16.710.000,- dengan target 1 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar (0%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 38.109.000,- dengan target 1 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 4.643.000,- (12,18%), dengan realisasi fisik 0.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 136.855.500,- dengan target 12 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 17.008.500,- (12.43%), dengan realisasi fisik 0.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 37.808.000,- dengan target 12 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi

anggaran sebesar Rp 6.586.000,- (17,42%), dengan realisasi fisik sebanyak 0.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 3.926.500,- dengan target 1 Paket. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar 0%.

7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 20.460.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar 0%.

8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 340.000.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 59.906.762,- (17.62%), dengan realisasi fisik sebesar 0%.

1.1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 77.246.000,- dengan target 16 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar (0%).

2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 573.893.000,- dengan target 55 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar (0%).

3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 240.611.000,- dengan target 1 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan fisik sebesar

1.1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 121.277.500,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 30.042.324,- (24.77%), dengan realisasi fisik sebanyak 3 Laporan tersusun.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 1.783.060.000,- dengan target 12 Laporan. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 312.997.619,- (17.55%), dengan realisasi fisik sebanyak 3 Laporan tersusun.

1.1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 42.750.000,- dengan target 1 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 7.224.538,- (16.90%), dengan realisasi fisik sebanyak 1 (satu) unit dipelihara.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 161.120.000,- dengan target 6 unit. Sampai dengan triwulan I

realisasi anggaran sebesar Rp 30.872.058,- (19.16%), dengan realisasi fisik sebanyak 6 unit terpelihara.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 647.286.000,- dengan target 14 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 68.989.324,- (10.66%), dengan realisasi fisik sebanyak 14 unit terpelihara.

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 33.370.000,- dengan target 49 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp 1.830.000,- (5.48%), dengan realisasi fisik 0.

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 527.700.000,- dengan target 1 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan realisasi fisik sebesar 0%.

6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 47.443.000,- dengan target 2 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan realisasi fisik sebesar 0%.

7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp 150.000.000,- dengan target 2 unit. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran dan realisasi fisik sebesar 0%.

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Implementasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra:

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta Pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
	1.05	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.157.161.729	41,55	18,57		9.541.209.216	47,33	2.872.886.152	14,25		
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.244.464.000	28,64	21,54	7,1	4.644.466.187	32,61	2.674.698.552	18,78	13,83	
1.1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.628.500	56,88	8,94	47,94	23.895.500	49,14	5.728.000	11,78	37,36	
1.1.1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.499.000	100	30	70	7.881.000	54,36	1.327.000	9,15	45,21	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.2	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.615.000	0	0	0	3.285.000	71,18	1.781.000	38,59	32,59	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.3	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.615.000	100	0	100	0	0	0	0	0	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.4	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.615.000	97	0	97	4.615.000	100	2.620.000	56,77	43,23	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.5	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.615.000	15	0	15	0	0	0	0	0	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.6	1.05.01.2.01.0007		6.439.500	18,03	0	18,03	2.718.500	42,22	0	0	42,22	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.7	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.615.000	24	0	24	2.761.000	59,83	0	0	59,83	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.1.8	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	4.615.000	24	0	24	2.635.000	57,1	0	0	57,1	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.108.495.000	25,22	24,41	0,81	2.383.393.137	26,17	2.124.858.427	23,33	2,84	
1.2.1	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.905.900.000	24,97	24,97	0	2.331.378.637	26,18	2.086.893.427	23,43	2,75	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.2.2	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.595.000	36,22	0	36,22	52.014.500	25,67	37.965.000	18,74	6,93	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
1.3	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.597.000	100	0	100	1.597.000	100	186.000	11,65	88,35	
1.3.1	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.597.000	100	0	100	1.597.000	100	186.000	11,65	88,35	
1.4	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	20	0	20	15.000.000	25	0	0	25	
1.4.1	1.05.01.2.05.0011		60.000.000	20	0	20	15.000.000	25	0	0	25	Sekretaris - Sub Bagian Umum

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										dan Kepegawaian
1.5	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.987.000	34,41	24,17	10,24	324.206.000	52,29	91.970.262	14,83	37,46	
1.5.1	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.118.000	57	25	32	13.833.000	52,96	3.826.000	14,65	38,31	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.2	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.710.000	15	0	15	16.710.000	100	0	0	100	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.3	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.109.000	100	25	75	23.175.500	60,81	4.643.000	12,18	48,63	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.4	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.855.500	36,25	25	11,25	47.432.000	34,66	17.008.500	12,43	22,23	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.5	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.808.000	36,5	25	11,5	11.423.000	30,21	6.586.000	17,42	12,79	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.6	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.926.500	100	0	100	3.107.500	79,14	0	0	79,14	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.7	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.460.000	31	25	6	8.525.000	41,67	0	0	41,67	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.8	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	24,75	25	-0,25	200.000.000	58,82	59.906.762	17,62	41,2	Sekretaris - Kepala Sub Bagian

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
												Perencanaan , Keuangan & Aset
1.6	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.750.000	69,99	0	69,99	600.036.000	67,29	0	0	67,29	
1.6.1	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	77.246.000	100	0	100	77.246.000	100	0	0	100	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6.2	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	573.893.000	89	0	89	522.790.000	91,1	0	0	91,1	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6.3	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.611.000	15	0	15	0	0	0	0	0	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.7	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.904.337.500	24,96	25	-0,04	571.159.050	29,99	343.039.943	18,01	11,98	
1.7.1	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.277.500	24,96	25	-0,04	35.119.050	28,96	30.042.324	24,77	4,19	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.7.2	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.783.060.000	24,96	25	-0,04	536.040.000	30,06	312.997.619	17,55	12,51	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.669.000	26,66	13,34	13,32	725.179.500	45,05	108.915.920	6,77	38,28	
1.8.1	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	42.750.000	24,96	25	-0,04	21.375.000	50	7.224.538	16,9	33,1	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
1.8.2	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.120.000	24,96	25	-0,04	40.280.000	25	30.872.058	19,16	5,84	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.3	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	647.286.000	24,95	24,99	-0,04	183.399.000	28,33	68.989.324	10,66	17,67	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.4	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.370.000	100	6	94	11.342.500	33,99	1.830.000	5,48	28,51	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.5	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	527.700.000	10	0	10	292.500.000	55,43	0	0	55,43	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.6	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.443.000	95	0	95	47.443.000	100	0	0	100	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.8.7	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	57	0	57	128.840.000	85,89	0	0	85,89	Sekretaris - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	5.912.697.729	72,65	11,41	61,24	4.896.743.029	82,82	198.187.600	3,35	79,47	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
2.1	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.570.805.800	72,03	12,08	59,95	3.828.915.000	83,77	129.745.050	2,84	80,93	
2.1.1	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.110.000	27,26	24,65	2,61	173.326.000	61,44	1.125.000	0,4	61,04	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Dan Sarana Prasarana - Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi
2.1.2	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	787.393.000	25,31	24,65	0,66	403.623.000	51,26	1.650.000	0,21	51,05	Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan & Aset
2.1.3	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	319.927.000	0	50	-50	196.697.000	61,48	120.612.050	37,7	23,78	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.1.4	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,	2.952.238.800	98	2,77	95,23	2.950.070.000	99,93	0	0	99,93	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										Dan Sarana Prasarana - Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolahan Data
2.1.5	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24.981.000	100	23	77	14.643.000	58,62	3.988.000	15,96	42,66	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.1.6	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	204.156.000	48	20	28	90.556.000	44,36	2.370.000	1,16	43,2	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.2	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	106.880.000	24,36	19,24	5,12	51.750.000	48,42	9.412.000	8,81	39,61	
2.2.1	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	68.345.000	24	16	8	31.895.000	46,67	5.424.000	7,94	38,73	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Dan Sarana Prasarana - Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolahan Data
2.2.2	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	38.535.000	25	25	0	19.855.000	51,52	3.988.000	10,35	41,17	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Dan Sarana Prasarana - Kepala Seksi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
												Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolahan Data
2.3	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	484.103.000	46,73	16,76	29,97	274.053.000	56,61	59.030.550	12,19	44,42	
2.3.1	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	299.013.000	48	13	35	144.478.000	48,32	35.053.550	11,72	36,6	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.3.2	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	158.270.000	48	25	23	116.880.000	73,85	22.585.000	14,27	59,58	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.3.3	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	26.820.000	25	10	15	12.695.000	47,33	1.392.000	5,19	42,14	Kepala Bidang Pencegahan - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha
2.4	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	750.908.929	100	2,77	97,23	742.025.029	98,82	0	0	98,82	
2.4.1	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	750.908.929	100	2,77	97,23	742.025.029	98,82	0	0	98,82	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Dan Sarana Prasarana - Kepala Seksi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
												Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolahan Data

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

a. Perubahan Indikator Kinerja

Perubahan indikator kinerja terdapat pada indikator program kegiatan karena menyesuaikan dengan cascading dan pokin terbaru yang didapat dari hasil evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Desk Lanjutan Pembahasan Pokon Kinerja Perangkat Daerah hari Kamis 16 Januari 2025 di Jakarta.

b. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Terdapat 2 program, 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, diantaranya ada yang mengalami penambahan dan pergeseran anggaran.

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut program/kegiatannya adalah Rp **9.009.769.692,-** yang dirinci seperti halnya pada tabel 3.1. Sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Alasan dilakukan perubahan.

Secara umum alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator kinerja, dan jumlah kegiatan maupun perubahan dana/ pagu indikatif dikarenakan :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak efisiensi belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025.
2. Perubahan Indikator program kegiatan menyesuaikan cascading dan pokin terbaru yang telah ditetapkan dengan reviu Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

Berikut rumusan rencana program dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2025

KODE	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.049.694.829	25.859.860.602	6.810.165.773	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

KODE			Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penilaian mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) DPKP	Persen	78	78	13.706.736.100	13.783.836.600	77.100.500	
1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	100	100	48.533.500	48.533.500	0	
1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	14.499.000	14.499.000	0	
1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD sesuai ketentuan	Dokumen	2	1	4.615.000	4.615.000		

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
1	201	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	4.615.000	4.615.000		
1	201	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	2	1	4.615.000	4.615.000		
1	201	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	1	4.615.000	4.615.000		
1	201	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	30	6.344.500	6.344.500		
1	201	8		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	Dokumen	4	4	4.615.000	4.615.000		
1	201	9		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Data	50	50	4.615.000	4.615.000		

KODE			Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	9.073.430.000	9.073.430.000	0	
1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	94	103	8.905.900.000	8.905.900.000		
1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	50	50	167.530.000	167.530.000		
1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	100%	1.544.000	1.544.000	0	
1	203	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	6	1.544.000	1.544.000	0	
1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya n Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	30.000.000	30.000.000	0	

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
1	205	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	0		-	
1	205	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30		30.000.000	30.000.000	-	
1	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran		100%	100%	478.472.100	551.762.100	73.290.000	
1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		26.118.000	26.118.000	0	
1	206	4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	1		16.710.000	-	-16.710.000	Menghapus anggaran pembelian dan dialokasikan sub kegiatan lain

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	38.109.000	38.109.000	0	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		127.395.000	127.395.000	0	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12		25.753.600	25.753.600	0	
1	206	5		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1		3.926.500	3.926.500	0	
1	206	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12		20.460.000	20.460.000	0	

KODE			Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		220.000.000	310.000.000	90.000.000	Pindahan d dari sub kegiatan Ja pelayanan umum - Be perjalanan
1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	891.750.000	1.267.164.000	375.414.000	
1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						0	
1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	16		77.246.000	132.334.000	55.088.000	Dana diges dari sub kegiatan penyediaan penunjang pelayanan umum, seb Rp. 55.088 dikarenaka beberapa k dan meja d DPKP suda tidak layak pakai dan diperlukan pembelian

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	
	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55		573.893.000	666.116.500	92.223.500	sebesar 86.622.000 diambil dari kegiatan penyediaan penunjang pelayanan umum .siswa merupakan belanja bag pemadama yang diletak di sub kegi Umpeg Pembelian berupa ac , printer dan lain.
	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahUnitGedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	JumlahUnitGedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		240.611.000	240.611.000	0	
	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	1.573.337.500	1.358.337.500	-215.000.000	
	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		121.277.500	121.277.500	0	

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		1.452.060.000	1.237.060.000	-215.000.000	Pengurangan belanja perjalanan untuk seba dialihkan k kegiatan penyelengg koordinasi, sisanya un belanja me dan peralat mesin
	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	1.609.669.000	1.681.168.000	71.499.000	
	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		42.750.000	42.750.000	0	
	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6		161.120.000	161.120.000	0	
	1	209	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	14	17	647.286.000	718.785.000	71.499.000	penambah dana bidan pemadama diletakan d kegiatan un untuk

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
													menyesuaikan sub kegiatan anggaran belanja. Penambahan anggaran u pemelihara perahu, ka belum teranggark sebelumny
1	209	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	49		33.370.000	33.370.000	0	
1	209	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		527.700.000	527.700.000	0	
1	209	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		47.443.000	47.443.000	0	
1	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2		150.000.000	150.000.000	0	

KODE			Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran	Persentase edukasi proteksi kebakaran	Persen	86,85	100	5.342.958.729	12.076.024.002	6.733.065.273	
				2. Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan	Persen	100	100				
				3. Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Persen	100	100				
				4. Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran		Persen	27,59					
				5. Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran		Persen	100					

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4	201			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	4.149.635.400	9.664.107.720	5.514.472.320	
4	201	2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	365		221.493.200	372.703.200	151.210.000	Penambahan Rp151.210.000 untuk Menganggarkan Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran sebagai kegi- tahuan
4	201	3		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	365		538.641.400	538.641.400	0	

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4	201	7		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persen	100		227.427.000	227.427.000	0	
4	201	17		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	42	264	2.951.886.800	8.319.399.120	5.367.512.320	Rencana Pembelian Truck 4000 2 unit, Truck Water Supp 4000 Liter unit Kelengkapan APD dan pendukung lainnya (Sarung Tar Pemadama Tahan Panas
4	201	9		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1		17.481.000	13.231.000	-4.250.000	Pengurangan Anggaran Belanja M Minum

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4	201	19		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangg	Orang	500		192.706.000	192.706.000	0	Penambahan biaya untuk sewa panggung dan sewa m
4	202			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	100	100	63.379.200	63.379.200	0	
4	202	1		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	4		34.844.200	34.844.200	0	
4	202	2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4		28.535.000	28.535.000	0	
4	204			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	100	100	380.804.000	385.054.000	4.250.000	

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4	204	1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	500		278.639.000	282.889.000	4.250.000	Penambahan Biaya Maksimal Minum Rap untuk keperluan sampai akhir tahun, dan digeser dari kegiatan lain
4	204	2		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/kel	20		87.645.000	92.091.000	4.446.000	Penambahan Biaya Maksimal Minum Rap, dana digeser dari sub kegiatan lain
4	204	3		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	4	1	14.520.000	10.074.000	-4.446.000	Mengurangi anggaran Anggaran A dan Perjalan Dinas, dialokasikan untuk sub kegiatan lain
4	205			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100	100	749.140.129	1.963.483.082	1.214.342.953	

KODE				Urusan Bidang/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Satuan	APBD Murni	Perubahan Renja 2025	APBD Efisiensi (Pergeseran) (Rp)	Renja Perubahan 2025 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	
4	205	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	103	824	749.140.129	1.963.483.082	1.214.342.953	Penambahan Anggaran pengadaaan SAR untuk memenuhi kebutuhan DPKP yang sesuai stan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2025 tambahan kebutuhan anggaran yang disetujui sebesar Rp. 6.810.165.773, sehingga pagu total menjadi Rp. 25.859.860.602 . Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa sub kegiatan diantaranya:

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 282.110.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 221.493.200,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 151.210.000,- menjadi Rp. 372.703.200,- Penambahan anggaran tersebut dikarenakan untuk Menganggarkan Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran BPK Swasta sebagai kegiatan tahunan.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 2.952.238.800,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 2.951.886.800,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini menambah anggaran sebesar Rp. 5.367.512.320,- menjadi Rp. 8.319.399.120,- . Penambahan anggaran tersebut dikarenakan Rencana Pembelian Fire Truck 4000 Liter 2 unit, Truck Water Supply 4000 Liter 1 unit, Kelengkapan APD dan pendukung lainnya (Sarung Tangan Pemadaman Tahan Panas).
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 24.981.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 17.481.000 pada anggaran perubahan ini ingin mengurangi anggaran sebesar Rp. 4.250.000,- menjadi Rp. 13.231.000,- . Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan Pengurangan pada Anggaran Belanja Makan Minum untuk dialihkan ke sub kegiatan lain.
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 299.013.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 278.639.000,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini ingin menambah sebesar Rp. 4.250.000,-. menjadi Rp. 282.889.000,- . Penambahan anggaran tersebut dikarenakan Rencana Penambahan Biaya Makan Minum Rapat untuk keperluan sampai akhir tahun. Penambahan anggaran melalui pergeseran dana dari sub kegiatan lain.

5. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 158.270.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 87.645.000,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini bertambah sebesar Rp. 4.446.000,-. menjadi Rp. 92.091.000,- . Penambahan anggaran tersebut diambilkan dari pergeseran anggaran sub kegiatan lain. Bertambahnya anggaran di sub kegiatan ini diperuntukkan untuk belanja Makan Minum.
6. Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana. Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 26.820.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 14.520.000. pada anggaran perubahan ini mengurangi anggaran sebesar Rp. 4.446.000,-. menjadi Rp. 10.074.000,- . Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan Mengurangi anggaran ATK dan Perjalanan Dinas, dialokasikan untuk sub kegiatan lain.
7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 750.908.929,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 749.140.129,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini mendapat tambahan dana sebesar Rp. 1.214.342.953,-. menjadi Rp. 1.963.483.082,-. . Penambahan anggaran tersebut dikarenakan Penambahan Anggaran pengadaan Alat SAR untuk memenuhi kebutuhan DPKP yang sesuai standar.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 16.710.000,- pada anggaran perubahan ini ingin mengurangi anggaran sebesar Rp. 16.710.000,-. menjadi Rp. 0,- . Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan anggaran pembelian APAR dihapus dan dialokasikan ke sub kegiatan lain.

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 340.000.000,- dan mengalami efisiensi anggaran/pergeseran menjadi Rp. 220.000.000,-. Kemudian untuk anggaran di perubahan ini ingin menambah sebesar Rp. 90.000.000,-. menjadi Rp. 310.000.000,- . Penambahan anggaran tersebut dikarenakan Pindahan dana dari sub kegiatan Jasa pelayanan umum - Belanja perjalanan dinas.

10. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 77.246.000,- Kemudian untuk anggaran di perubahan ini ada penambahan sebesar Rp. 55.088.000,-. menjadi Rp. 132.334.000. hal tersebut dikarenakan dana digeser dari sub kegiatan penyediaan jasa penunjang pelayanan umum, sebesar Rp. 55.088.000 dikarenakan beberapa kursi dan meja di DPKP sudah tidak layak pakai dan diperlukan pembelian baru.

11. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 573.893.000,- Kemudian untuk anggaran di perubahan ini bertambah sebesar Rp. 92.223.200,- . menjadi Rp. 666.116.500 hal tersebut dikarenakan dana sebesar 86.622.000 diambil dari sub kegiatan penyediaan jasa penunjang pelayanan umum .sisanya Senilai Rp. 5.601.200 , merupakan tambahan dana yang didapat bagian pemadaman dimana untuk penyesuaian rekening belanja, anggaran diletakkan di sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola Umum Kepegawaian.

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.783.060.000,- pada anggaran perubahan ini ingin mengurangi anggaran sebesar Rp.

215.000.000,-. menjadi Rp. 1.237.060.000,- . Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan belanja perjalanan dinas untuk sebagian dialihkan ke sub kegiatan penyelenggaraan koordinasi, dan sisanya untuk belanja mebel dan peralatan mesin.

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 647.286.000,- pada anggaran perubahan ini ingin menambah anggaran sebesar Rp. 71.499.000 menjadi Rp. 718.785.000,-. Tambahan anggaran digunakan penambahan dana bidang pemadaman, diletakan di sub kegiatan umpeg untuk menyesuaikan sub kegiatan anggaran belanja. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan perahu, karena belum teranggarkan sebelumnya

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang berjalan ini telah menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dibandingkan dengan Rencana kerja DPKP Kabupaten Banjar Tahun 2025 awal. Perubahan Rencana kerja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang, dan masukan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terkait realisasi program kegiatan yang telah diimplementasikan yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DPKP berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPKP, seluruh aparatur DPKP secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2025.
4. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Renja Perubahan Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

2 BAB I PENDAHULUAN

1. 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi strategis yang terjadi setelah penetapan Rencana Kerja awal tahun 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Beberapa faktor utama yang mendorong perlunya penyusunan Renja Perubahan BPBD Tahun 2025 antara lain: adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah, termasuk kebijakan fiskal dan arahan pembangunan terbaru; perubahan asumsi dasar dan prioritas pembangunan; serta kebutuhan untuk merespon kondisi kebencanaan yang bersifat dinamis, seperti peningkatan potensi bencana hidrometeorologi yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan lingkungan.

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester pertama tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyempurnaan target kinerja, penyesuaian lokasi dan sasaran kegiatan, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan upaya BPBD Kabupaten Banjar dalam mewujudkan pelayanan kebencanaan yang cepat, tepat, dan tanggap melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi, terukur, dan berbasis data.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan bagian dari komitmen BPBD Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, yaitu:

***“Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana”***

Renja Perubahan BPBD Kabupaten Banjar Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang responsif dan relevan, sekaligus

menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dalam mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana.

2. 1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

3. 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji RKPD Kabupaten Banjar berdasarkan evaluasi kinerja BPBD sampai dengan Triwulan I tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra BPBD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.
- b) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2025 ini adalah untuk :

- a) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- b) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

- c) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- d) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam penanggulangan bencana.
- e) Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKJIP, LPPD, dan LKPJ.

4. 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja , proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja

Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja-SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Tambahkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Perubahan Indikator Kinerja
- b) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- d) Alasan dilakukan perubahan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c) Rencana tindak lanjut.

3 BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 2 program, 1 program utama yaitu Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan, dan 1 program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 28 sub kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
MENURUNNYA RISIKO DAN DAMPAK BENCANA ALAM	INDEKS KAPASITAS DAERAH (IKD)	BPBD KABUPATEN BANJAR				Rp14.286.272.718	Rp1.912.191.046		13%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	Indeks	86	Rp8.071.699.868	Rp1.451.840.046	-	18%	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	100	Rp65.752.500	Rp10.332.500	37	16%	37%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp7.223.000	Rp-	0	0%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp3.487.000	Rp-	0	0%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp1.865.000	Rp-	0	0%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp5.745.000	Rp120.000	1	2%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	Rp4.055.000	Rp-	0	0%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	Rp5.166.500	Rp3.818.250	3	74%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	Rp12.500.000	Rp789.250	3	6%	20%
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	Rp9.596.000	Rp-	0	0%	0%
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	Rp16.115.000	Rp5.605.000	1	35%	50%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	100	Rp4.688.659.700	Rp977.297.705	22	21%	22%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	Rp4.493.400.000	Rp949.367.205	29	21%	97%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Rp181.560.000	Rp23.660.000	3	13%	25%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp4.500.000	Rp2.333.500	1	52%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp9.199.700	Rp1.937.000	3	21%	25%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	Rp7.000.200	Rp-		0%	0%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Rp2.500.200	Rp-	0	0%	0%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Rp2.000.000	Rp-	0	0%	0%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	Rp2.500.000	Rp-	3	0%	25%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persen	100	Rp100.000.000		15	0%	15%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	Rp100.000.000	Rp-	0	0%	0%
		Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	Rp860.937.700	Rp83.921.326	23	10%	23%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Paket	10	Rp234.563.000	Rp-	0	0%	0%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp74.787.500	Rp14.943.500	1	20%	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp21.487.200	Rp2.302.950	1	11%	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp10.100.000	Rp300.000	3	3%	25%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	Rp520.000.000	Rp66.374.876	113	13%	75%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	100	Rp1.304.025.768	Rp293.407.444	29	23%	29%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp119.805.768	Rp23.753.457	3	20%	25%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp1.184.220.000	Rp269.653.987	3	23%	25%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	Rp1.045.324.000	Rp86.881.071	21	8%	21%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang diperbaharui	Unit	1	Rp42.750.000	Rp1.620.419	1	4%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan Pajak kendaraan dinas yang diperbaharui	Unit	29	Rp746.970.000	Rp80.155.652	31	11%	107%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	82	Rp125.660.000	Rp5.105.000	15	4%	18%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Unit	6	Rp129.944.000	Rp-	0	0%	0%
		PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Indeks	0,40 0,69 0,82	Rp6.214.572.850	Rp460.351.000	-	7%	0%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,40	Rp674.431.000	Rp57.200.000	30	8%	7500%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal	Orang	256676	Rp674.431.000	Rp57.200.000	7377	8%	3%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,40 0,69	Rp2.412.707.350	Rp-	-	0%	0%
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	367	Rp1.558.482.850	Rp-	0	0%	0%
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	300	Rp129.364.000	Rp-	0	0%	0%
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Orang	100	Rp85.295.000	Rp-	0	0%	0%
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	Rp399.883.000	Rp-	0	0%	0%
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	Rp158.350.000	Rp-	0	0%	0%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	1	Rp81.332.500	Rp-	0	0%	0%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0,69	Rp2.818.218.500	Rp399.210.000	-	14%	0%
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	Rp119.980.000	Rp-	1	0%	50%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	6000	Rp52.015.000	Rp-	107494	0%	1792%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	20	Rp70.000.000	Rp-	0	0%	0%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1100	Rp650.246.000	Rp284.510.000	34142	44%	3104%
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	Rp1.925.977.500	Rp114.700.000	1	6%	50%
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Indeks	0,82	Rp309.216.000	Rp3.941.000	-	1%	0%
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4	Rp137.088.000	Rp-	0	0%	0%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	20	Rp51.564.000	Rp-	0	0%	0%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	1	Rp42.214.000	Rp-	0	0%	0%
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	Rp78.350.000	Rp3.941.000	0	5%	0%

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN I			Keterangan Kriteria
			TARGET SD TW I	REALISASI SD TW I	% CAPAIAN SD TW I	
BPBD KABUPATEN BANJAR						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	Indeks	0	0	100%	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	3	75%	BELUM MEMENUHI TARGET
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100%	MEMENUHI TARGET

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN I			Keterangan Kriteria
			TARGET SD TW I	REALISASI SD TW I	% CAPAIAN SD TW I	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	29	97%	BELUM MEMENUHI TARGET
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	0	0%	BELUM MEMENUHI TARGET
Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terasilinasnya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%	MEMENUHI TARGET

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN I			Keterangan Kriteria
			TARGET SD TW I	REALISASI SD TW I	% CAPAIAN SD TW I	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	113	283%	MELEBIHI TARGET
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100%	MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	25	25	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang diperbaharui	Unit	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan Pajak kendaraan dinas yang diperbaharui	Unit	31	31	100%	MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	15	30%	BELUM MEMENUHI TARGET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Unit	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	Indeks	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal	Orang	63969	7877	12%	BELUM MEMENUHI TARGET

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN I			Keterangan Kriteria
			TARGET SD TW I	REALISASI SD TW I	% CAPAIAN SD TW I	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Orang	200	0	0%	BELUM MEMENUHI TARGET
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Indeks	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1500	107494	7166%	MELEBIHI TARGET

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	TARGET/REALISASI/CAPAIAN SD TRIWULAN I			Keterangan Kriteria
			TARGET SD TW I	REALISASI SD TW I	% CAPAIAN SD TW I	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyediaan Logistik Penyelemataan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	275	34142	12415%	MELEBIHI TARGET
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	100%	MEMENUHI TARGET
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	Indeks	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	0	0	100%	MEMENUHI TARGET
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	100%	MEMENUHI TARGET

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 6 Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditargetkan pada triwulan I sebanyak 4 Laporan dengan realisasi 3 Laporan, capaian sebesar 75%. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan belum ada arahan pembuatan laporan dari organisasi.

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 ditargetkan pada triwulan I sebanyak 30 Orang/bulan dengan realisasi 29 orang/bulan dan capaian 97%. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan belum adanya Kepala Pelaksana Definitif BPBD.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 pada triwulan I ditargetkan sebanyak 5 orang dengan realisasi 0 orang. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan tidak ada penawaran Bimtek sampai dengan Maret 2025.

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025 pada triwulan I ditargetkan sebanyak 50 unit dengan realisasi 15 unit dan capaian sebesar 30%. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan peralatan dan mesin lainnya yang belum dilakukan pemeliharaan masih dalam kondisi baik sehingga masih belum dilakukan perbaikan.

5. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada triwulan I ditargetkan sebanyak 63969 orang dengan realisasi sebanyak 7877 orang dan

capaian 12%. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan Kejadian bencana alam banjir, serta pelaksanaan kegiatan bertepatan pada hari keagamaan (bulan ramadhan 1446H).

6. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam pada tahun 2025 triwulan I ditargetkan sebanyak 200 keluarga dengan realisasi 0 Keluarga. Adapun penyebab belum memenuhi target kinerja dikarenakan stakeholder terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan masih ada aktifitas lain sehingga kegiatan pelatihan pada kegiatan KATANA di tunda sampai tersedianya waktu yang tepat.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dari total keseluruhan sub kegiatan yang direncanakan, tercatat sebanyak 35 sub kegiatan telah berhasil memenuhi target kinerja, dengan capaian realisasi sebesar 100 persen terhadap target yang telah ditetapkan. Sub kegiatan yang memenuhi target tersebut mencakup baik program penunjang urusan pemerintahan daerah maupun program penanggulangan bencana.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 3 Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu :

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 ditargetkan pada triwulan I sebanyak 40 Laporan dengan realisasi 133 Laporan, capaian sebesar 283%. Adapun penyebab melebihi target kinerja dikarenakan banyaknya kejadian bencana sehingga diperlukan monitoring dan ke tempat kejadian bencana dan banyaknya undangan rapat, sosialisasi, koordinasi pada triwulan I yang harus dipenuhi.

2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditargetkan pada triwulan I sebanyak 1500 orang dengan realisasi 107.494 orang, capaian sebesar 7166%. Adapun penyebab melebihi target kinerja dikarenakan banyaknya kejadian bencana terutama banjir sehingga dilakukan pertolongan dan evakuasi korban bencana.

3. Penyediaan Logistik Penyelemataan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyediaan Logistik Penyelemataan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025 ditargetkan pada triwulan I sebanyak 275 orang dengan realisasi 34.142 orang, capaian sebesar 12415%. Adapun penyebab melebihi target kinerja dikarenakan banyaknya kejadian bencana terutama banjir sehingga dilakukan pemberian logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, ketidaktercapaian target kinerja pada beberapa sub kegiatan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterlambatan arahan organisasi, kekosongan jabatan struktural, serta keterbatasan penawaran kegiatan dari pihak eksternal. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kejadian bencana alam banjir dan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan Ramadan turut mempengaruhi rendahnya capaian pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja menunjukkan bahwa perencanaan telah dilakukan secara realistis dan pelaksanaan kegiatan berjalan konsisten tanpa hambatan teknis yang berarti. Sementara itu, capaian kinerja yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan layanan akibat frekuensi kejadian bencana yang tinggi, sehingga berdampak pada lonjakan aktivitas evakuasi korban, distribusi

logistik, serta intensitas koordinasi lintas instansi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

Ketidaktercapaian beberapa sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 berpotensi menghambat pencapaian target tahunan dan akumulasi target lima tahunan sebagaimana direncanakan dalam Renstra SKPD. Jika tidak segera dilakukan percepatan atau penyesuaian, maka terdapat risiko ketidaktercapaian indikator kinerja utama, khususnya pada program yang berhubungan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Sebaliknya, sub kegiatan yang melebihi target, khususnya pada penanganan darurat bencana, menunjukkan adanya kebutuhan untuk merevisi asumsi perencanaan ke depan, termasuk peningkatan alokasi sumber daya dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan darurat. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian strategi agar capaian program dalam Renstra tetap terjaga dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian dan ketidaksesuaian realisasi kinerja, perlu dilakukan penguatan koordinasi internal, percepatan pemberian arahan teknis, serta percepatan pengisian jabatan Kepala Pelaksana definitif agar proses pengelolaan program tidak terhambat. Selain itu, perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan fleksibilitas waktu dan adaptasi terhadap kondisi lapangan dan kesiapan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi penganggaran, diperlukan penyusunan anggaran berbasis risiko, khususnya untuk kegiatan tanggap darurat, dengan menyediakan alokasi cadangan atau skema revisi cepat apabila terjadi lonjakan kebutuhan

akibat bencana. Monitoring dan evaluasi kinerja juga perlu diperkuat secara lebih rutin agar hambatan dapat terdeteksi lebih awal dan segera diambil tindakan korektif. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan target program Renstra tetap dapat tercapai secara optimal meskipun menghadapi dinamika yang tidak terduga.

4 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dinamika lingkungan strategis, serta sinkronisasi dengan perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, BPBD Kabupaten Banjar melakukan beberapa penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen Renja 2025 sebelumnya. Adapun yang dilakukan perubahan diantaranya, Sasaran dan Tujuan SKPD, indikator dan targetnya beserta Indikator Kinerja Utama BPBD. Perubahan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	148,6	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,3
Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,61	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,7

Tabel 3.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator Kinerja Utama	Target	Indikator Kinerja Utama	Target
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,61	IK1: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,7
		IK2: Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Selain itu perubahan juga dilakukan pada indikator dan target program, indikator dan target kegiatan, target sub kegiatan dan penyesuaian anggaran. Perubahan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banjar Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern BPBD (IKKI)	86%	86%	86%	Rp8.071.699.868	Rp7.656.453.468	Rp7.948.335.468	Rp291.882.000
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	100%	Rp65.752.500	Rp56.183.500	Rp55.215.500	Rp(968.000)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp7.223.000	Rp7.223.000	Rp8.223.000	Rp1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp3.487.000	Rp2.826.000	Rp2.826.000	Rp-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp1.865.000	Rp1.065.000	Rp1.065.000	Rp-
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp5.745.000	Rp5.073.000	Rp5.073.000	Rp-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp4.055.000	Rp3.391.000	Rp4.891.000	Rp1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp5.166.500	Rp5.166.500	Rp5.166.500	Rp-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp9.596.000	Rp3.239.000	Rp3.239.000	Rp-
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Rp16.115.000	Rp15.700.000	Rp12.232.000	Rp(3.468.000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100%	100%	100%	Rp4.688.659.700	Rp4.660.324.000	Rp4.660.324.000	Rp-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	Rp4.493.400.000	Rp4.493.400.000	Rp4.493.400.000	Rp-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp181.560.000	Rp155.040.000	Rp155.040.000	Rp-
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp4.500.000	Rp3.360.000	Rp3.360.000	Rp-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp9.199.700	Rp8.524.000	Rp8.524.000	Rp-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp7.000.200	Rp7.000.200	Rp7.000.200	Rp-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp2.500.200	Rp2.500.200	Rp2.500.200	Rp-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Rp100.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	8 Orang	Rp100.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Rp860.937.700	Rp586.796.000	Rp885.026.000	Rp298.230.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	10 Paket	Rp234.563.000	Rp234.563.000	Rp234.563.000	Rp-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp74.787.500	Rp72.903.500	Rp72.903.500	Rp-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	1Paket	1Paket	Rp21.487.200	Rp16.592.000	Rp16.592.000	Rp-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp10.100.000	Rp4.550.000	Rp3.780.000	Rp(770.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	Rp520.000.000	Rp258.187.500	Rp557.187.500	Rp299.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Rp1.304.025.768	Rp1.220.825.768	Rp1.215.445.768	Rp(5.380.000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp119.805.768	Rp119.805.768	Rp120.405.768	Rp600.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp1.184.220.000	Rp1.101.020.000	Rp1.095.040.000	Rp(5.980.000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%	Rp1.045.324.000	Rp1.045.324.000	Rp1.045.324.000	Rp-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang diperbaharui	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang diperbaharui	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp42.750.000	Rp42.750.000	Rp42.750.000	Rp-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan Pajak kendaraan dinas yang diperbaharui	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan Pajak kendaraan dinas yang diperbaharui	29 Unit	29 Unit	29 Unit	Rp746.970.000	Rp746.970.000	Rp746.970.000	Rp-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	82 Unit	82 Unit	126 Unit	Rp125.660.000	Rp125.660.000	Rp125.660.000	Rp-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp129.944.000	Rp129.944.000	Rp129.944.000	Rp-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Indeks kekuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana 3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	IK1 : Persentase Desa Tangguh Bencana IK2 : Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dalam Waktu 24 Jam IK3 : Persentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan bencana	0,40 0,69 0,82	0,40 0,69 0,82	100% 100% 100%	Rp6.214.572.850	Rp5.782.057.850	Rp5.736.688.350	Rp45.369.500
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Bencana	0,4	0,4	100%	Rp674.431.000	Rp603.311.000	Rp556.975.000	Rp(46.336.000)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal	256676 Orang	256676 Orang	256236 Orang	Rp674.431.000	Rp603.311.000	Rp556.975.000	Rp(46.336.000)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Indeks Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	IK1: Jumlah desa/kelurahan yang memiliki rencana kontingensi bencana IK2: Persentase SDM Kebencanaan yang Meningkatkan Kapasitasnya / Tersertifikasi IK3: Persentase desa/kelurahan yang memiliki Sarana dan Prasarana Kebencanaan sesuai standar	0,40 0,69	0,40 0,69	100% 100% 100%	Rp2.412.707.350	Rp2.264.217.350	Rp2.195.905.350	Rp(68.312.000)
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	367 Unit	367 Unit	367 Unit	Rp1.558.482.850	Rp1.558.482.850	Rp1.558.482.850	Rp-
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang	150 Orang	150 Orang	Rp129.364.000	Rp72.314.000	Rp72.314.000	Rp-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp85.295.000	Rp76.305.000	Rp49.111.000	Rp(27.194.000)
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	Rp399.883.000	Rp350.733.000	Rp324.513.000	Rp(26.220.000)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp158.350.000	Rp126.680.000	Rp126.680.000	Rp-
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	Rp81.332.500	Rp79.702.500	Rp64.804.500	Rp(14.898.000)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Darurat Bencana	IK1: Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana IK2: Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Upaya Penyelamatan IK3: Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Logistik	0,69	0,69	2 Dokumen 100% 100%	Rp2.818.218.500	Rp2.698.141.500	Rp2.768.498.000	Rp70.356.500
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp119.980.000	Rp119.980.000	Rp119.980.000	Rp-
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	Rp52.015.000	Rp52.015.000	Rp52.015.000	Rp-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp70.000.000	Rp65.200.000	Rp65.200.000	Rp-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang	Rp650.246.000	Rp650.246.000	Rp825.012.500	Rp174.766.500
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp1.925.977.500	Rp1.810.700.500	Rp1.706.290.500	Rp(104.410.000)
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	IK1: Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana IK2: Jumlah Mekanisme Pemulihan yang Telah Secara Formal disepakati oleh Seluruh Pemangku Kepentingan IK3: Persentase Hasil Koordinasi Penanganan Pasca Bencana yang ditindaklanjuti	0,82	0,82	3 Kegiatan 2 Dokumen 100%	Rp309.216.000	Rp216.388.000	Rp215.310.000	Rp1.078.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp137.088.000	Rp76.950.000	Rp75.872.000	Rp1.078.000
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp51.564.000	Rp40.406.000	Rp40.406.000	Rp-

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp42.214.000	Rp33.712.000	Rp33.712.000	
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp78.350.000	Rp65.320.000	Rp65.320.000	Rp-
Total Pagu Anggaran (APBD Perubahan)						Rp14.286.272.718	Rp13.438.511.318	Rp13.685.023.818	Rp246.512.500

Berdasarkan tabel di atas Beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan pada indikator dan target indikator kinerja, diantaranya :

1. **Program Penanggulangan Bencana** sebelum perubahan memiliki 3 Indikator yaitu Indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dengan target 0,40, Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana dengan target 0,69, Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana dengan target 0,82 berubah menjadi Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 100%, Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dalam Waktu 24 Jam dengan target 100%, Persentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan bencana dengan target 100%. Perubahan dilakukan karena penyesuaian dengan Indikator dan target indikator pada Pohon Kinerja dan cascading yang baru.
2. **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** sebelum perubahan memiliki indikator Indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dengan target 0,40 berubah menjadi Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Bencana dengan target 100%. Perubahan dilakukan karena penyesuaian dengan Indikator dan target indikator pada Pohon Kinerja dan cascading Renstra BPBD 2025-2029.
3. **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** sebelum perubahan memiliki 2 indikator yaitu Indeks peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dengan target 0,40, Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana dengan target 0,69 berubah menjadi memiliki 3 indikator, Indikator pertama yaitu Jumlah desa/kelurahan yang memiliki rencana kontingensi bencana dengan target 2 Desa, indikator kedua yaitu Persentase SDM Kebencanaan yang Meningkatkan Kapasitasnya / Tersertifikasi dengan target 100%, indikator ketiga yaitu Persentase desa/kelurahan yang memiliki Sarana dan Prasarana Kebencanaan sesuai standar dengan target 100%. Perubahan dilakukan karena

penyesuaian dengan Indikator dan target indikator pada Renstra BPBD 2025-2029.

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sebelum perubahan memiliki indikator Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana dengan target 0,69 berubah menjadi memiliki 3 indikator, Indikator pertama yaitu Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dengan target 2 Dokumen, indikator kedua yaitu Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Upaya Penyelamatan dengan target 100%, indikator ketiga yaitu Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Logistik dengan target 100%. Perubahan dilakukan karena penyesuaian dengan Indikator dan target indikator pada Renstra BPBD 2025-2029.

5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sebelum perubahan memiliki indikator Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana dengan target 0,82 berubah menjadi memiliki 3 indikator, Indikator pertama yaitu Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana dengan target 3 Kegiatan, indikator kedua yaitu Jumlah Mekanisme Pemulihan yang Telah Secara Formal disepakati oleh Seluruh Pemangku Kepentingan dengan target 2 Dokumen, indikator ketiga yaitu Persentase Hasil Koordinasi Penanganan Pasca Bencana yang ditindaklanjuti dengan target 100%. Perubahan dilakukan karena penyesuaian dengan Indikator dan target indikator pada Renstra BPBD 2025-2029.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebelum perubahan adalah 30 Orang / Bulan, setelah perubahan menjadi 36 Orang / Bulan. Perubahan dilakukan dikarenakan penyesuaian dengan jumlah ASN yang keluar dan ASN yang baru.

7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target sebelum perubahan adalah 10 Orang, setelah perubahan

menjadi 8 Orang. Perubahan dilakukan dikarenakan penyesuaian target kinerja dengan efisiensi anggaran.

8. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan indikator Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sebelum perubahan adalah 82 unit, setelah perubahan menjadi 126 Unit. Perubahan dilakukan dikarenakan kesalahan dalam penentuan target kinerja awal.
9. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi dengan target sebelum perubahan adalah 6 unit, setelah perubahan menjadi 1 Unit. Perubahan dilakukan dikarenakan kesalahan dalam penentuan target kinerja awal.
10. **Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)** dengan indikator Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal dengan target sebelum perubahan adalah 256676 Orang, setelah perubahan menjadi 256236 Orang. Perubahan dilakukan dikarenakan kesalahan dalam penentuan target kinerja awal dan penyesuaian target kinerja terhadap efisiensi anggaran.
11. **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota** dengan indikator Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan target sebelum perubahan adalah 1 Kawasan, setelah perubahan menjadi 2 Kawasan. Perubahan dilakukan dikarenakan kesalahan dalam penentuan target kinerja awal.
12. **Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota** dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam

Penanggulangan Bencana dengan target sebelum perubahan adalah 4 Dokumen setelah perubahan menjadi 3 Dokumen. Perubahan dilakukan dikarenakan penyesuaian target kinerja dengan efisiensi anggaran.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat pada tahun 2025 kebutuhan anggaran awal sebesar Rp. 14.286.272.718,- setelah efisiensi anggaran berubah menjadi Rp13.438.511.318 ,- setelah perubahan menjadi Rp13.685.023.818,-. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa sub kegiatan diantaranya:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** memiliki pagu sebesar Rp. 7.223.000,- bertambah Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 8.223.000,-. Penambahan anggaran untuk pengadaan dokumen perencanaan.
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD** memiliki pagu sebesar Rp.3.391.000,- bertambah Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 4.891.000,-. Penambahan anggaran dikarenakan setelah efisiensi banyak sub kegiatan yang berubah sehingga memerlukan penambahan anggaran fotocopy dari pergeseran sub kegiatan lain.
- 3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** memiliki pagu sebesar Rp. 15.700.000,- berkurang Rp. 3.468.000,- menjadi Rp.12.232.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan pergeseran menjadi perjalanan dinas untuk konsultasi perencanaan.
- 4. Fasilitas Kunjungan Tamu** memiliki pagu sebesar Rp. 4.550.000,- berkurang Rp.770.000,- menjadi Rp. 3.780.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan Pergeseran pagu Anggaran pada kode rekening 5.1.02.01.01.0053 belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 770.000,- ke sub kegiatan lain yaitu pembayaran kekurangan telepon pusdalops.
- 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** memiliki

pagu sebesar Rp. 258.187.500,- bertambah Rp. 299.000.000,- menjadi Rp. 557.187.500,-. Penambahan anggaran dikarenakan Penambahan pagu Anggaran pada kode rekening 5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas biasa luar kab.banjar untuk Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 10.000.000- dari Pergeseran kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, Usulan Penambahan Anggaran perjalanan dinas perencanaan untuk penugasan kegiatan/undangan dari bappedalitbang, BPKPAD, Tapem perihal SPM, dan Koordinasi dan konsultasi ke BNPB perihal perhitungan perencanaan dan penganggaran pengadaan peralatan penanggulangan bencana sebesar Rp. 50.000.000,- pergeseran anggaran untuk perjadiin umpeg luar wilayah kab.banjar Rp. 6.300.000,- dan pergeseran anggaran untuk perjalan dalam wilayah kab.banjar bidang rehab rekons dalam rangka pendataan dan verifikasi kerusakan akibat bencana sebesar Rp.5.000.000,- dan Pergeseran untuk perjadiin luar wilayah kab.Banjar bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebesar Rp20.000.000,-.

6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki pagu sebesar Rp. 119.805.768,- bertambah Rp. 600.000,- menjadi Rp. 120.405.768,-. Penambahan anggaran untuk tagihan telepon pusdalops BPBD dari Pergeseran anggaran makan minum tamu.

7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki pagu sebesar Rp.1.101.020.000,- berkurang Rp. 5.980.000,- menjadi Rp1.095.040.000,-. Pengurangan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan dari Pergeseran kegiatan Belanja Pakaian Sasirangan.

8. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) memiliki pagu sebesar Rp. 603.311.000,- berkurang Rp. 46.336.000,- menjadi Rp. 556.975.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan Pergeseran pagu Anggaran sebesar Rp. 11.266.000 pada kode rekening 1.05.03.2.01.0007 pada Sub Kegiatan KIE dipindahkan ke Perjalanan dinas Destana Berupa Survei Pendampingan Pemasangan Plang

Destana di beberapa desa di Kabupaten Banjar. Alasan Melakukan Perubahan dikarenakan perlunya pendampingan dari tim teknis BPBD, berupa pendampingan penentuan titik pemasangan, kemudian survei dan koordinasi dalam melakukan pemetaan. Perjadi Destana, dengan Kode Rekening Dalam Daerah 5.1.02.04.01.0003 sebesar Rp 10.000.000 dengan asumsi satu tim 3 orang yang terdiri 2 tim, sebanyak 10 hari dengan target 10 Desa dalam 2 Kecamatan Destana. Sesuai dengan RKA Peralatan. Dengan Koefisien: 6 Orang x 10 Hari x Satuan harian perjalanan dinas dalam daerah (8 jam Perjalanan). Hasil output berupa file Shapefile Pemetaan Jalur Evakuasi, untuk mendukung Satu Data Kabupaten Banjar dan Database Jalur Evakuasi di BPBD Banjar. (Pendukung SPM dan IKD). Kemudian sisanya berupa Rp.1.266.000 dipindahkan untuk mencukupi Fotokopi HVS di Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga.

9. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan pagu anggaran Rp.76.305.000,- berkurang Rp. 27.194.000,- menjadi Rp. 49.111.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan Pergeseran pagu Anggaran sebesar Rp. 17.194.000 pada kode rekening pada Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Kode Rekening 5.1..02.04.01.0001 Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Pendampingan/Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi (RENKON) Kekeringan. sebesar Rp 30.000.000, dengan asumsi 6 orang dari BPBD Kabupaten Banjar, pimpinan, sekretaris, kepala bidang yang membidangi, 2 orang tim teknis, dan Kasubbag Perencanaan. Tim teknis berupa tim teknis persiapan kebutuhan administrasi dokumen, beserta tim teknis pemetaan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban dari BNPB mengenai asistensi Penyusunan Dokumen Kebencanaan.

10. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan pagu anggaran Rp.350.733.000 ,-

berkurang Rp. 26.220.000,- menjadi Rp.324.513.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan Penyesuain Rincian Belanja kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.

11. **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp. 79.702.500,- berkurang Rp. 14.898.000,- menjadi Rp. 64.804.500,-. Pengurangan anggaran dikarenakan pengurangan jumlah peserta kegiatan untuk mencapai efektivitas kegiatan dan meningkatkan pemahaman peserta, kemudian untuk menambah dampak ke masyarakat, kegiatan diadakan menjadi 2 kali kegiatan, dibandingkan sebelumnya yang hanya 1 kali kegiatan.
12. **Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota** dengan pagu anggaran Rp. 650.246.000,- bertambah Rp. 174.766.500,- menjadi Rp. 825.012.500,-. Penambahan anggaran dikarenakan alasan melakukan perubahan dikarenakan anggaran murni dan anggaran pergeseran digunakan untuk logistik bahan pangan pada saat banjir awal tahun, sedangkan logistik sandang papan dan lainnya belum ada.
13. **Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** dengan pagu anggaran Rp.1.810.700.500 ,- berkurang Rp. 104.410.000,- menjadi Rp. 1.706.290.500,-. Pengurangan anggaran dikarenakan Pergeseran pagu Anggaran pada kode rekening 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ke Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minuman Rapat, 5.1.02.04.01.0001 Perjalanan Dinas Luar Daerah, 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Alasan melakukan perubahan dikarenakan untuk optimalisasi anggaran dalam rangka kegiatan aktivasi pos komando penanganan darurat bencana beserta dukungan logistik dan pengerahan sumberdayanya.
14. **Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp.76.950.000,- berkurang Rp.1.078.000,- menjadi Rp. 75.872.000,- . Pengurangan anggaran dikarenakan Pergeseran Pagu Anggaran dari

Sub Kegiatan ini digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengumpulan Data Indeks Ketahanan Daerah IKD dengan 7 instansi pengisi nilai di indikator IKD, yang berada di luar daerah Kabupaten Banjar, Juga koordinasi ke BPBD Provinsi mengenai Teknis dan Koordinasi Penyusunan IKD dan rekonsiliasi IKD Provinsi dan Kabupaten Banjar. Kemudian, Perjalanan Dinas dalam daerah yang digunakan untuk pengumpulan data ke 17 Instansi terkait sesuai dengan indeks ketahanan daerah. Penambahan di Sub Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

5 BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan strategis dalam penanggulangan bencana, serta merespons perkembangan situasi aktual yang memerlukan perencanaan ulang terhadap target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan efektif.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Prioritisasi Kegiatan

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, BPBD Kabupaten Banjar perlu menerapkan skala prioritas terhadap program dan kegiatan. Kegiatan yang bersifat mendesak, berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa, serta berkaitan dengan penanganan darurat dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi fokus utama. Program yang bersifat penunjang atau belum berdampak langsung dapat dijadwalkan ulang atau disesuaikan.

2. Penguatan Kolaborasi dan Sumber Daya Alternatif

Keterbatasan anggaran dapat diatasi sebagian dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain, termasuk organisasi masyarakat, dunia usaha (CSR). BPBD juga dapat mengoptimalkan sumber daya non-anggaran seperti relawan, jejaring masyarakat siaga bencana, serta dukungan logistik dari instansi teknis lain.

3. Efisiensi Pelaksanaan

Perlu dilakukan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, integrasi kegiatan antarbidang, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, khususnya dalam

sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi.

4. Responsif terhadap Kondisi Darurat

Karena sifat bencana yang tidak dapat diprediksi, kegiatan yang direncanakan harus tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan. Penyesuaian terhadap kegiatan darurat harus dipersiapkan, termasuk dari sisi anggaran, logistik, maupun sumber daya manusia, dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

5. Pemantauan dan Penyesuaian Berkala

Pelaksanaan program dan kegiatan perlu disertai dengan pemantauan secara periodik untuk memastikan capaian output dan outcome sesuai rencana. Dalam hal terdapat kendala realisasi anggaran atau pelaksanaan, BPBD melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana kerja secara tepat waktu dan terukur.

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang terencana, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, BPBD Kabupaten Banjar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan berikut:

1. Koordinasi Antarbidang yang Konsisten

Setiap bidang di lingkungan BPBD wajib menjaga komunikasi dan koordinasi yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, guna memastikan sinergi, efisiensi sumber daya, serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

2. Disiplin Administrasi dan Dokumentasi

Seluruh kegiatan harus disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dokumentasi kegiatan yang rapi dan sistematis menjadi dasar pertanggungjawaban internal maupun eksternal.

3. Pemantauan Berkala

Kepala pelaksana dan pejabat struktural wajib melakukan pemantauan rutin terhadap progres kegiatan di unit masing-masing. Masalah yang muncul di lapangan harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan secara

berjenjang.

4. Penerapan Skala Prioritas Internal

Dalam kondisi keterbatasan waktu atau sumber daya, setiap bidang harus mampu memilah kegiatan mana yang paling krusial dan berdampak luas terhadap masyarakat, untuk didahulukan pelaksanaannya.

5. Kedisiplinan Waktu dan Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretariat dan disetujui oleh Kepala Pelaksana.

6. Peningkatan Kapasitas SDM

Setiap pelaksanaan kegiatan harus menjadi bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas pegawai. Penguatan kompetensi teknis dan manajerial dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan, dan studi lapangan yang relevan.

Untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 tidak hanya menjadi acuan administratif, BPBD Kabupaten Banjar akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Internalisasi Dokumen Renja

- Melaksanakan sosialisasi hasil perubahan rencana kerja kepada seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Banjar.
- Menyusun penjabaran teknis kegiatan hingga ke level pelaksana operasional agar seluruh pegawai memahami tujuan, target, dan indikator yang harus dicapai.

2. Penyusunan Rencana Operasional Bidang

- Masing-masing bidang diwajibkan menyusun rencana kerja teknis

dan jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule), termasuk kebutuhan sumber daya dan dukungan logistik.

- Penetapan penanggung jawab kegiatan secara rinci untuk menjamin pelaksanaan tepat waktu dan sasaran.

3. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

- Mengaktifkan sistem monitoring internal berbasis data dan pelaporan rutin antarbidang.
- Melaksanakan evaluasi triwulanan untuk menilai capaian kegiatan, efektivitas pelaksanaan, serta menyusun langkah korektif jika diperlukan.

4. Koordinasi Penganggaran dan Penyesuaian DPA

- Menyusun perubahan DPA-SKPD sesuai hasil Renja Perubahan, serta melakukan koordinasi teknis dengan BPKAD dan Bappeda terkait penyesuaian alokasi anggaran.
- Menyiapkan justifikasi kebutuhan anggaran lanjutan jika terdapat kekurangan dukungan terhadap kegiatan prioritas.

5. Penguatan Mitigasi Risiko Pelaksanaan

- Mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti faktor cuaca, keterlambatan logistik, atau kurangnya partisipasi masyarakat.
- Menyusun rencana kontinjensi atau alternatif pelaksanaan untuk mengantisipasi keterlambatan atau kegagalan kegiatan.

6. Penyelarasan dengan Kebijakan Strategis Daerah

- Memastikan bahwa kegiatan dalam Renja Perubahan tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar 2025–2029 dan Renstra BPBD Kabupaten Banjar 2025-2029, terutama dalam sasaran an tujuan yang akan dicapai.

10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini atas dasar penyesuaian kembali kebutuhan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor : 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Tahun 2025 dalam penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyesuaian indikator mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat mengenai perubahan indikator setiap sub kegiatan.

Diharapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Kabupaten Banjar dapat digunakan

sebagai informasi dan acuan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang bersifat lebih operasional dan berfungsi sebagai terjemahan atas perencanaan Renstra SKPD. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas SosialP3AP2KB Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas SosialP3AP2KB Tahun 2025 - 2029 sekaligus perwujudan program Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dokumen ini berkedudukan sebagai perencanaan induk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan terukur.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan). Dokumen ini sekaligus sebagai dasar penyesuaian Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA).

Dokumen Perubahan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar dilakukan karena adanya Penyesuaian terhadap pagu, target dan indikator sub kegiatan.

Adanya kebijakan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidaksesuaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi sampai triwulan I atas pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. UUD 1945 Pasal 34 Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ; 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara sasaran, penganggaran, indikator dan target kinerja perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 -2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuannya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- 2) Sebagai dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Banjar Anggaran Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai triwulan I tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja
- Jumlah Program dan jumlah kegiatan

- Total Kebutuhan dana/Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- alasan dilakukan perubahan

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana pada Belanja Langsung melaksanakan 14 Program dan 30 Kegiatan, serta 78 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 36.069.542.707,- Realisasi Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.243.112.430 atau mencapai 6,22 Persen terhadap seluruh anggaran Rencana Kerja.

- (1) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DinsosP3AP2KB baik yang memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terealisasi sebesar 22,48 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23,65 Persen. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 1.422.166.330,- lebih

rendah dibandingkan target sebesar Rp. 3.466.351.575,- atau 10,46 Persen.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas terealisasi sebesar 51,34 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 4.220.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 16.930.736,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan target fisik 55 persen dan realisasi sudah mencapai 55 persen. Capaian tersebut Sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.420.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 5.555.000,-.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Target 1 Dokumen dan sudah terealisasi 100 persen. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini hanya sebesar Rp.800.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 5.128.500,-.
- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA Perubahan -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Belum ada realisasi pada triwulan ke-I, kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen dan sudah terealisasi 100 persen. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini hanya sebesar Rp.0,-. Faktor penghambat sehingga tidak ada realisasi keuangan karena proses

verifikasi/penandatanganan tim anggaran dan Proses Penandatanganan Pejabat Dokumen DPA cukup memakan waktu.

- e. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Belum ada realisasi pada triwulan ke-I, kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV.
- f. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan Target 6 Laporan dan realisasi fisik sudah 100 persen, Namun ada beberapa laporan yaitu LPPD urusan KB dan Dalduk serta Urusan Sosial yang mengalami revisi. Realisasi keuangan pada triwulan I sebesar Rp.0,- dari target Rp.2.850.000,-.
- g. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target pada triwulan I yaitu 3 Laporan yang sudah terealisasi 100 persen, Sedangkan realisasi keuangan masih belum ada karena ditargetkan anggarannya di Triwulan II.
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun terealisasi sebesar 24,94 Persen pada triwulan I, dengan target indikator kinerja triwulan I sebesar 24,98. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.076.724.614,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 1.802.403.839,-.

Dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Capaian sampai triwulan I yaitu 44 Orang/bulan atau 100 persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.023.064.614,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 1.750.244.839,-.
- b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD. Capaian sampai triwulan I yaitu 35 Dokumen atau 26,92 persen dengan target 130 Dokumen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 53.660.000,- lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp. 50.670.000,-. Dikarenakan adanya penyesuaian honorarium dari Peraturan Bupati Banjar Nomor : 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.

- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Capaian Kegiatan sudah 100 persen, realisasi keuangan Rp.0,-.
 - d. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran /Triwulanan /Semesteran SKPD** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD sudah sesuai dengan target pada triwulan I yaitu 3 Laporan. Realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini dengan target sebesar Rp.3.632.500,- masih belum ada.
- 3) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia. Belum ada capaian triwulan I baik fisik maupun keuangan pada sub kegiatan ini.
 - 4) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia sebesar 7,24 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dari target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,64 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 72.970.458, dari total anggaran sebesar Rp. 1.712.247.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor. Belum ada realisasi sub kegiatan ini dari fisik dan keuangan.

- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Belum ada realisasi sub kegiatan ini dari fisik dan keuangan , Dari target 18 Paket kegiatan.
 - c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terealisasi sebesar 2 Paket pada triwulan I. Capaian tersebut telah masih jauh dari target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan yaitu 12 Paket. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 107.685.500,-.
 - d. **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sebesar 2 Laporan pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Namun realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.640.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 4.125.000.
 - e. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Untuk capaian sub kegiatan ini pada triwulan I yaitu 1 paket dari target 12 paket pada triwulan I Sedangkan untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.510.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 14.252.000.
 - f. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar 3 Laporan pada triwulan I. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Namun Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.320.458,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 163.182.000,-.
- 5) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia terealisasi sebesar 28,01 Persen

pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 233.497.650, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.594.351.900,-

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 3 Laporan pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.609.002, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 70.850.000,-.
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terealisasi sebesar 4 Laporan pada triwulan I Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 196.888.648,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 904.492.000,-.
- 6) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 13,44 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 24,50 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 34.753.608,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 187.537.500,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terealisasi sebesar 1 unit pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target kinerja. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.900.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 10.687.500,-.

- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya terealisasi sebesar 51 Unit pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.693.608,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 143.600.000,-.
- c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan indikator kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terealisasi sebesar 4 Unit pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.160.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 33.250.000,-.
- d. **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi terealisasi sebesar 1 Unit pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini masih dalam tahap pengSPJan.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial terealisasi sebesar 7,8 Persen pada triwulan I dan Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial masih belum ada realisasi. Target indikator telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 84.600.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 147.618.800,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)** dengan indikator kinerja Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Meningkatkan Kapasitasnya Belum ada realisasi sub kegiatan ini

dari fisik dan keuangan pada triwulan I .Target Kegiatan ini sebesar 70 Persen sedangkan target keuangan sebesar Rp. 86.000.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi, dengan target 172 Keluarga dan Target Keuangan sebesar Rp. 86.000.000,-.
- 2) **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebesar 7,83 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 84.600.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 84.600.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 35 Orang dari target 447 Orang . Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.200.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 120.564.000,-.
- b. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan target 20 Orang belum terealisasi pada Triwulan I. Untuk Realisasi Keuangan sebesar 24.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran honor TKSK.
- c. **Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0 Lembaga pada triwulan I. Kegiatan belum dilaksanakan, dan akan dilaksanakan di Triwulan III Realisasi keuangan sub

kegiatan ini sebesar Rp. 2.400.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 3.054.800,-.

3. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar dari 491 Orang yang mendapat rehabilitasi berbanding dengan PPKS Kab.Banjar yaitu sebanyak 26.091 Orang sehingga realisasi sebesar 1,88 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 465.724.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 722.647.101,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dari jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sosial berbanding jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis seluruhnya diluar panti sosial yaitu 447 Orang berbanding 2.734 yaitu terealisasi sebesar 16,34 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 452.200.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 638.206.101,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 396 Orang pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan II yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 447.100.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 614.492.188,-.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi sampai pada triwulan I. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III. Tidak ada Realisasi keuangan pada sub kegiatan dengan target sebesar Rp. 144.454.000,-.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota belum ada realisasi pada triwulan I. Kegiatan direncanakan pada Triwulan ke II. Tidak ada Realisasi keuangan pada sub kegiatan dengan target sebesar Rp. 201.800.000,-.
- d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 51 Orang dari Target 80 Orang atau 63,75 % untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.100.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 8.000.000.
- e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota belum ada realisasi pada triwulan I. Belum ada Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini.
- f. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota belum ada realisasi pada triwulan I. Target dari sub kegiatan ini yaitu 60 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini juga belum ada atau sebesar Rp.0.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak** dengan indikator Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta

Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 36 Orang.

- h. **Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar** dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 60 Orang.
 - i. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan** dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 400 Orang.
 - j. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi belum terealisasi dari target 135 Orang.
 - k. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota belum terealisasi dari target 40 Orang.
- 2) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** dengan indikator kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yaitu jumlah PMKS bukan korban HIV AIDS dan NAFZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti sosial berbanding jumlah PMKS bukan korban HIV AIDS dan NAFZA seluruhnya diluar panti sosial yang terealisasi sebesar 44 orang berbanding 326 orang atau sebesar 13,49 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 18,82 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 13.524.000, lebih rendah dibandingkan target triwulan I sebesar Rp. 84.441.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 19 Orang pada triwulan I. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.800.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 62.298.000.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 16 Orang pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 50 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.724.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 12.645.000.
- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi pada triwulan I.
- d. **Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial** dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi, kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.
- e. **Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 9 Orang pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini pada triwulan I belum terealisasi dikarenakan Uang saku untuk peserta diberikan setelah peserta menyelesaikan pelatihan selama 6 bulan.
- f. **Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Kabupaten/ Kota, dengan target 1 Dokumen namun kegiatannya dilakukan pada triwulan IV.

- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan tiga indikator kinerja Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial sebesar 0 Persen , Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi sebesar 0 Persen , Persentase data PPKS yang valid sebesar 0 Persen pada triwulan I. Belum ada Realisasi keuangan untuk program ini.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata masih belum terealisasi.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata dengan target sebesar 222.206 Orang. Target keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 526.967.400. Pendataan akan dilakukan pada Triwulan II.
- b. **Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota dengan target 67.074 Keluarga. Target keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.936.500.
- c. **Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum terealisasi.
- d. **Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat** dengan indikator kinerja Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan I.

- 5. Program Penanganan Bencana** dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana terealisasi sebesar 100 Persen dan Persentase masyarakat di

Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya belum ada realisasi karena direncanakan kegiatan pada bulan Juli. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 235.342.500, dengan target sebesar Rp. 367.450.750.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani terealisasi sebesar 100 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 235.342.500, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 367.450.750,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Makanan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 2.591 Orang pada triwulan I. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.000 Orang. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 235.342.500, lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp. 132.995.000 sehingga dilakukan pergeseran Rencana Anggaran Kas (RAK).
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Sandang** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan I.
- c. **Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan I.
- d. **Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial** dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota, pada triwulan I masih belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke II.

2) **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana masih belum ada realisasi dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

a. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana** dengan indikator kinerja Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota. masih belum ada realisasi pada triwulan I.

b. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota masih belum ada realisasi pada triwulan I.

6. **Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan target sebesar 13 Persen. Capaian belum bisa dihitung , karena penghitungan ARG pada akhir tahun. Belum ada realisasi keuangan program ini.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

1) **Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Pemerintah yang menerapkan PUG.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. **Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PUG** dengan indikator kinerja Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG masih belum terealisasi. Target sub kegiatan ini yaitu 47 Orang.

2) **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen. Sub kegiatan ini belum terealisasi.

- 3) **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase lembaga yang terlibat aktif dalam jejaring atau kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Target kegiatan ini yaitu 100 Persen. Untuk kegiatan ini masih belum dilaksanakan.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, dengan Target 650 Orang.

- 7. **Program Perlindungan Perempuan** dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif terealisasi sebesar 1 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp.1.275.000.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki mekanisme pencegahan kekerasan terhadap Perempuan, Kegiatan ini belum terlaksana.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan target sebesar 1 Dokumen.

- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terealisasi sebesar 2 Persen pada triwulan I. Capaian tersebut masih belum sesuai target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.275.000, dengan target sebesar Rp. 60.480.500.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 3 Layanan pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Target untuk sub kegiatan ini adalah 300 layanan dalam satu tahun. Untuk sub kegiatan ini Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.275.000.
- 3) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase lembaga yang aktif menyediakan layanan perlindungan secara terintegrasi (hukum, psikologis, medis dan rehabilitasi) dengan Target kinerja 100 Persen. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan ke II.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Dengan Target sebesar 100 Orang.

8. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** dengan indikator kinerja Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

yang Berperspektif Gender dan Hak Anak. Program ini masih belum ada realisasi.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah keluarga yang dibina. Untuk kegiatan ini belum terealisasi baik fisik maupun keuangan.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia. Target sub kegiatan ini 10 Dokumen.
- 2) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan kapasitas masih 0 Persen pada triwulan I. Realisasi keuangan kegiatan ini juga masih belum ada.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas belum ada realisasi pada triwulan I.

9. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan, dengan target sebesar 18 Persen. Program ini masih belum ada realisasi.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase SKPD yang

Memiliki Data Terpilah masih 0 Persen pada triwulan I. Realisasi keuangan kegiatan ini juga masih belum ada.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia. Target sub kegiatan ini sebesar 1 Dokumen.

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator kinerja IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak). Indeks ini dapat dihitung pada akhir tahun atau triwulan IV. Untuk realisasi keuangan program ini sebesar Rp.4.488.000.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak dengan target sebesar 64 Persen. Pada kegiatan ini realisasinya sebesar 22,34 Persen

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia terealisasi sebesar 5 Organisasi pada triwulan I. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sebesar Rp.4.488.000 dari target Rp.25.451.600.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target sebesar 3 Dokumen

pada triwulan I. Untuk Capaian masih belum terealisasi baik fisik maupun keuangan.

2) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

dengan indikator kinerja Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target sebesar 62 Persen. Pada kegiatan ini masih belum ada realisasi.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja umlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target sebesar 5 Dokumen. Untuk sub kegiatan ini masih belum ada realisasi.

11. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak). Indikator ini masih belum bisa dihitung terkecuali pada akhir tahun. Untuk program ini dengan target 62,80. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 12.133.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 169.326.750,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terealisasi sebesar 9 Persen. Capaian tersebut akan dihitung pada akhir tahun. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 6.308.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 98.853.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA** dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu terealisasi sebesar 1 Kegiatan dari target 11 Kegiatan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.308.000, target sebesar Rp. 88.618.000.
- b. **Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan**

KTA dengan indikator kinerja umlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA. Untuk sub kegiatan ini masih belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan.

- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Persentase Layanan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang dampingi dengan target sebesar 100 Persen. Dari semua kasus anak sudah terlayani sebanyak 12 layanan yang diberikan pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 5.825.000,- lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 70.473.750,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK** dengan indikator kinerja Jumlah AMPK yang mendapat pelayanan terealisasi sebesar 12 Layanan pada triwulan I. Capaian tersebut sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.825.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 70.473.750,-.
- 3) **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan. Kegiatan ini anggaran dari DAK.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK. Target SDM yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 10 Orang.

12. **Program Pengendalian Penduduk** dengan indikator kinerja Median usia kawin pertama (MUKP) Wanita dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 dengan target masing

masing 20 Tahun dan 28,60. Realisasi Program ini dihitung pada triwulan ke IV.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan data keluarga dengan target 100 Persen dan Capaian ini dapat dihitung pada Triwulan IV. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 13.077.600,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 152.400.600,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain** dengan indikator kinerja Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk terealisasi sebesar 290 Unit Kampung KB dari target 290 unit . Namun untuk pembinaan Kampung KB agar tetap aktif masih belum dilaksanakan menunggu Anggaran Perubahan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini masih belum ada
- b. **Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga terealisasi sebesar 2 Laporan pada triwulan I. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 13.077.600,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 30.361.400,-.
- 2) **Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** dengan indikator kinerja Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target sebesar 100 Persen. Untuk kegiatan ini masih belum terlaksana, Target kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.
 - a. **Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan**

SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal dengan indikator kinerja Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal dengan target sebesar 15 Satuan Pendidikan.

- b. **Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)** dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dengan target 12 Dokumen.

13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator kinerja (1) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) terealisasi sebesar 8,6 Persen dan (2) Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) terealisasi sebesar 69,50. Capaian dapat dihitung pada triwulan akhir / Triwulan IV. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 1.982.000, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 1.816.018.000,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** dengan indikator kinerja Penurunan ASFR dengan target kinerja sebesar 25 Persen yang dapat dihitung pada akhir triwulan IV. Untuk kegiatan ini masih belum ada realisasi keuangan. Dengan realisasi fisik 8,25 persen.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana** dengan indikator kinerja Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dengan target 200 unit.
- b. **Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal terealisasi sebesar 0 Dokumen pada triwulan I.

- c. **Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang** dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang terealisasi sebesar 0 Dokumen pada triwulan I.
- 2) **Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** dengan indikator Persentase Kecamatan Yang memiliki Tenaga Penyuluh Aktif. Target kegiatan 100 Persen. Dengan kinerja sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan indikator umlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia, dengan target 9 Unit. Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.
 - 3) **Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator Persentase Faskes yang alat kontrasepsinya terpenuhi terealisasi sebesar 9,61 Persen pada triwulan I. Dari Target yang ditetapkan sebesar 10,61 Persen. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.982.000 , lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 12.668.000.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya** dengan indikator kinerja Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. terealisasi sebesar 2 Laporan dari Target 12 Laporan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.982.000,-.
- b. **Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang

Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) belum ada realisasi pada triwulan I.

- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP terealisasi sebesar 0 Laporan pada triwulan I. Sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada kasus kegagalan penggunaan MKJP. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.0, dengan target sebesar Rp.4.500.000.

- 14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan indikator kinerja Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga) dengan target 80 Persen. Capaian pada triwulan I untuk fisik sebesar 24,11 Persen dan sudah sesuai dengan target. Realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 2.324.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 738.826.000,-.

Dengan kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan target 80 Persen Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 2.324.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 688.626.000,-.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) terealisasi sebesar 1 Laporan pada triwulan I dari target 34 Laporan. Capaian tersebut belum sesuai dengan target indikator kinerja triwulan I yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.324.000,-, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp. 688.626.000,-.
- 2) **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam**

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kinerja Persentase Keluarga sasaran ketahanan keluarga yang aktifersentase Organisasi masyarakat yang aktif melaksanakan program pembangunan keluarga. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.

Dan dengan kinerja Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)** dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 1 Laporan.
- b. **Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja** dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Dengan target 5 Laporan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kinerja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22,499,357,126								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8,914,374,600								
Meningkatnya indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80 Indeks	62,172,033,656	84.81 Indeks	28,930,278,506	78	13,584,982,526	N/A	1,517,027,872	N/A	11.17	84.81	30,447,306,378	106.01	48.50
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	258,833,800	100	104,920,000	100	Persen 64,061,500	51.34	4,220,000	51.34	6.59	75.67	109,140,000	75.67	42.17
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	92,795,100	19	41,602,100	8	Dokumen 22,359,000	55	3,420,000	62.50	15.30	24	45,022,100	80	48.52
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	5	39,414,900	4	19,118,900	1	Dokumen 10,038,500	1	800,000	100	7.97	5	19,918,900	100	50.54
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	2,808,000	1	936,000	1	Dokumen 936,000	0	0	0	0	1	936,000	33.33	33.33
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	5	31,636,400	4	14,584,500	1	Dokumen 7,397,500	1	0	100	0	5	14,584,500	100	46.10
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	2,808,000	1	830,000	1	Dokumen 936,000	0	0	0	0	1	830,000	33.33	29.56

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62	54,817,400	21	18,493,800	6	Laporan	10,876,500	6	0	100	0	27	18,493,800	43.55	33.74
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	34,554,000	16	9,354,700	16	Laporan	11,518,000	3	0	18.75	0	19	9,354,700	39.58	27.07
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	100	33,152,477,807	100	16,593,295,780	100	Persen	6,331,509,169	24,94	1,076,724,614	24.94	17.01	62.47	17,670,020,394	62.47	52.34
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1339	33,090,497,307	131	16,316,312,230	44	Orang/bula n	6,152,399,669	44	1,023,064,614	100	16.63	175	17,339,376,844	13.07	52.40
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	284	606.660.000	36	264,248,750	12	Dokumen	161,400,000	35	53,660,000	26.92	33.25	71	317,908,750	25	52.40
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15,158,500	3	4,616,900	1	Laporan	3,457,000	1	0	100	0	4	4,616,900	80	30.46
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan/Bulanan/Tr iwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/BulananT riwulanan/ Semesteran SKPD	42	46,822,000	5	8,117,900	2	Laporan	14,252,500	0	0	0	0	5	8,117,900	11.90	17.34
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	100	240,000,000	100	59,200,000	100	Persen	100,000,000	0	0	0	0	50	59,200,000	50	25
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48	240,000,000	9	59,200,000	20	Orang	100,000,000	0	0	0	0	9	59,200,000	18.75	24.67

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Meningkatnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminstrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	100	9,551,579,996	100	4,434,079,617	100	Persen	2,287,978,500	7.24	167,832,000	7.24	7.34	53.62	4,601,911,617	53.62	48.18
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283	302,686,690	277	122,743,700	3	Paket	60,667,000	0	0	0	0	277	122,743,700	97.88	40.55
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	231	3,530,450,500	161	1,879,872,500	18	Paket	910,511,000	0	0	0	0	161	1,879,872,500	69.70	53.25
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2384	1,129,765,015	2360	369,083,355	12	Paket	356,371,500	2	2,500,000	16.67	0.70	2362	371,583,355	99.08	32.89
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	134,252,800	124	38,004,150	12	Paket	40,200,000	1	510,000	8.33	1.27	125	38,514,150	208.33	28.69
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	74,250,000	36	15,690,500	12	Laporan	16,500,000	2	1,640,000	16.67	9.94	38	17,330,500	63.33	23.34
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	4,380,174,991	36	2,008,685,412	12	Laporan	903,729,000	3	163,182,000	25	18.06	39	2,171,867,412	65	49.58
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100	602,000,000	100	217,000,000	0	Persen	0	0	0	0	0	100	217,000,000	100	36
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	602,000,000	16	217,000,000	0	buah	0	0	0	0	0	16	217,000,000	177.78	36.05
Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	13,355,824,514	100	5,093,583,676	100	Persen	3,606,352,000	28.01	233,497,650	28.01	6.47	64.005	5,327,081,326	64.01	39.89
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	1,050,020,514	36	299,322,442	12	Laporan	282,800,000	3	36,609,002	25	12.95	39	335,931,444	65.00	31.99
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62	12,305,804,000	36	4,794,261,234	13	Laporan	3,323,552,000	4	196,888,648	30.77	5.92	40	4,991,149,882	64.52	40.56
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5,011,317,539	100	2,428,199,433	100	Persen	1,195,081,357	13.44	34,753,608	13.44	2.91	56.72	2,462,953,041	56.72	49.15
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biava	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5	244,460,000	3	148,978,600	1	Unit	42,750,000	1	900,000	100	2.11	4	149,878,600	80	61.31

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%		
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	302	2,083,794,000	44	602,684,958	129	Unit	602,120,000	51	32,693,608	39.53	5.43	95	635,378,566	31.46	30.49	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	602	355,595,000	70	34,689,000	266	Unit	145,680,000	4	1,160,000	1.50	0.80	74	35,849,000	12.29	10.08	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2,145,344,159	4	1,549,966,375	1	Unit	359,522,837	1	0	100	0	5	1,549,966,375	83.33	72.25	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	182,124,380	3	91,880,500	1	Unit	45,008,520	0	0	0	0	3	91,880,500	60	50.45	
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Diberdayakan	100	5,887,006,300	100	3,805,526,200	100	Persen	836,930,300	7.8		7.80	0	53.9	3,805,526,200	53.90	64.64	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terfasilitasi dan meningkat kapasitasnya	100	172,000,000	100	34,994,000	100	Persen	86,000,000	0	0	0	0	50	34,994,000	50	20.35	
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	344	172,000,000	3	34,994,000	1	Keluarga	86,000,000	0	0	0	0	3	34,994,000	0.87	20.35	
Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	5,715,006,300	100	3,770,532,200	100	Persen	750,930,300	7.83	84,600,000	7.83	11.27	53.915	3,855,132,200	53.92	67.46	
Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	1.373	4,686,701,900	497	3,046,171,600	443	Orang	534,275,000	35	58,200,000	7.90	10.89	532	3,104,371,600	38.75	66.24	

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90	673,193,000	50	591,393,000	20	Orang	122,410,500	0	24,000,000	0	19.61	50	615,393,000	55.56	91.41
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	355,111,400	2	132,967,600	1	Lembaga	94,244,800	0	2,400,000	0	2.55	2	135,367,600	50.00	38.12
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	18,64	10,652,759,676	18.63	4,130,968,605	18	Persen	3,405,806,000	1.88		10.44	13.67	10.255	4,596,692,605	55.02	42.83
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	90	9,470,914,276	91.19	3,846,393,300	85	Persen	3,064,872,500	16.34	452,200,000	19.22	14.75	53.765	4,298,593,300	59.74	45.01
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5380	7,429,247,200	3574	2,603,432,200	863	Orang	2,473,410,000	396	447,100,000	45.89	18.08	3970	3,050,532,200	73.79	41.06
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	745	415,539,000	293	300,050,000	200	Orang	144,454,000	0	0	0	0	293	300,050,000	39.33	72.21
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	146	671,012,000	122	595,870,000	20	Orang	202,000,000	0	0	0	0	122	595,870,000	83.56	88.80

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10= 9/4 *100%	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	304	178,245,000	166	83,095,000	65	Orang	39,800,000	51	5,100,000	78.46	12.81	217	88,195,000	71.38	49.48
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	289	336,880,800	123	91,337,400	83	Orang	91,312,000	0	0	0	0	123	91,337,400	42.56	27.11
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240	49,813,000	120	24,359,000	60	Orang	12,697,000	0	0	0	0	120	24,359,000	50	48.90
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	66	12,000,000	12	0	20	Orang	3,500,000	0	0	0	0	12	0	18.18	0
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80	70,000,000	0	0	200	Orang	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	440	18,999,500	685	4,000,000	20	Orang	6,999,500	0	0	0	0	685	4,000,000	155.68	21.05
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	598	215,730,500	279	93,289,500	135	Orang	42,700,000	0	0	0	0	279	93,289,500	46.66	43.24

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	8,500,000	0	0	20	Orang	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.104	143,447,276	1072	50,960,200	40	Orang	41,000,000	0	0	0	0	1072	50,960,200	97.10 35.53	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90	1,181,845,400	75	284,575,305	85	Persen	340,933,500	13.49	13,524,000	15.87	3.97	44.245	298,099,305	49.16 25.22	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	285	474,310,500	190	94,968,500	60	Orang	162,998,000	19	7,800,000	31.67	4.79	209	102,768,500	73.33 21.67	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170	191,840,000	73	37,635,000	50	Orang	74,770,000	16	5,724,000	32	7.66	89	43,359,000	52.35 22.60	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	130	31,152,700	30	12,150,700	50	Orang	9,498,000	0	0	0	0	30	12,150,700	23.08 39.00	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	155	343,536,700	75	72,241,200	30	Orang	72,371,000	0	0	0	0	75	72,241,200	48.39 21.03	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44	64,248,000	25	34,580,000	10	Orang	9,284,000	0	9	0	0	25	34,580,009	56.82 53.82	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	4	76,757,500	2	32,999,905	1	Dokumen	12,012,500	0	0	0	0	2	32,999,905	50 42.99	

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
		Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial	75	17,608,009,600	49.95	11,235,612,700	70	Persen	3,150,950,300	0	0	0	0	24.975	11,235,612,700	33.30	63.81
Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata dan Terfasilitasi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata	85	17,608,009,600	85.36	11,235,612,700	80	Persen	3,150,950,300	0	0	0	0	42.68	11,235,612,700	50.21	63.81
		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	85		85.36		80	Persen		0	0						
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	847.566	1,547,483,300	52885	472,029,819	222206	Orang	539,907,300	0	0	0	0	52885	472,029,819	6.24	30.50
Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	300461	1,198,983,200	190647	685,096,781	67074	Keluarga	185,925,000	0	0	0	0	190647	685,096,781	63.45	57.14
Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.444	13,814,271,900	1097	9,502,175,900	106	Keluarga	2,206,990,000	0	0	0	0	1241	9,502,175,900	85.94	68.79
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420	1,047,271,200	245	576,310,200	100	Orang	218,128,000	0	0	0	0	245	576,310,200	58.33	55.03
Meningkatnya Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	100	5,317,065,750	100	1,793,790,000	100	Persen	1,520,688,000	50	235,342,500	50	15.48	75	2,029,132,500	75.00	38.16
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100	4,995,810,450	100	1,793,790,000	100	Persen	1,416,485,000	100	235,342,500	100	16.61	100	2,029,132,500	100.00	40.62

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	1,831,009,000	3109	616,982,000	1000	Orang	525,995,000	2591	235,342,500	259.10	44.74	5700	852,324,500	142.50	46.55
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1900	1,301,092,000	70	289,009,000	700	Orang	448,656,000	0	0	0	0	70	289,009,000	3.68	22.21
Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	3380	1,825,266,950	904	882,060,000	960	Orang	428,283,500	0	0	0	0	904	882,060,000	26.75	48.32
Terperuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	405	38,442,500	119	5,739,000	135	Orang	13,550,500	0	0	0	0	119	5,739,000	29.38	14.93
Menngkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	100	321,255,300	100	83,899,000	100	Persen	104,203,000	0	0	0	0	50	83,899,000	50	26.12
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4	97,341,800	3	43,789,500	1	Kampung	25,722,500	0	0	0	0	3	43,789,500	75.00	44.99
Terperuhnya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	660	223,913,500	210	40,109,500	225	Orang	78,480,500	0	0	0	0	210	40,109,500	31.82	17.91

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5,249,781,150								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3,587,340,750								
Meningkatnya Pengarustamaan Gender	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER	Indeks PUG	0,5025	5,838,400,900	0.627	2,697,134,650	0.6375	Indeks	1,343,748,000	N/A	0	N/A	0	0.627	2,697,134,650	12.450	46.20
Meningkatnya Pelaksanaan PUG	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Permintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD	100	61,968,000	100	50,743,200	100	Persen	30,984,000	0	0	0	0	50	50,743,200	50	81.89
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	94	61,968,000	81	50,743,200	47	Perangkat Daerah	30,984,000	0	0	0	0	81	50,743,200	86.17	81.89
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100	62,907,000	100	33,403,000	100	Persen	13,924,000	0	0	0	0	50	33,403,000	50	53.10
Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	62,907,000	3	33,403,000	1	Dokumen	13,924,000	0	0	0	0	3	33,403,000	60	53.10
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100	5,713,525,900	100	2,612,988,450	100	Persen	1,298,840,000	0	0	0	0	50	2,612,988,450	50	45.73

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3030	5,713,525,900	1300	2,612,988,450	650	Orang	1,298,840,000	0	0	0	0	1300	2,612,988,450	42.90	45.73
Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100,000 Penduduk Perempuan)	20	513,841,900	20	86,537,900	20	Persen	183,435,000	N/A	1,275,000	0	0.70	10	87,812,900	50	17.09
Pendampingan Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi	100	191,247,900	100	83,037,900	100	Persen	52,238,000	0	0	0	0	50	83,037,900	50	43.42
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	191,247,900	7	83,037,900	2	Dokumen	52,238,000	0	0	0	0	7	83,037,900	63.64	43.42
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	322,594,000	37.5	3,500,000	100	Persen	131,197,000	2	1,275,000	2	0.97	19.75	4,775,000	19.75	1.48
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	280	322,594,000	40	3,500,000	105	Layanan	131,197,000	3	1,275,000	2.86	0.97	43	4,775,000	15.36	1.48
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	4,07	2,140,203,800	10	257,224,300	3.25	Persen	930,586,000	0	0	0	0	5	257,224,300	122.85	12.02
Meningkatnya Pembinaan Keluarga yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Persentase Desa/ Kelurahan yang Terbina	100	437,416,800	100	163,575,300	100	Persen	129,642,000	0	0	0	0	50	163,575,300	50	37.40

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	53	437,416,800	33	163,575,300	10	Dokumen	129,642,000	0	0	0	0	33	163,575,300	62.26	37.40
Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Dalam Mendukung Kesejahteraan Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	100	1,702,787,000	100	93,649,000	100	Persen	800,944,000	0	0	0	0	50	93,649,000	50	5.50
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3.613	1,702,787,000	14	93,649,000	18000	Orang	800,944,000	0	0	0	0	14	93,649,000	0.39	5.50
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Elemen Data Terpilah	100	62,735,100	100	25,194,100	100	Persen	16,829,000	0	0	0	0	50	25,194,100	50	40.16
Meningkatnya SKPD yang Memiliki Data Terpilah Gender	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	100	62,735,100	100	25,194,100	100	Persen	16,829,000	0	0	0	0	50	25,194,100	50	40.16
Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	62,735,100	4	25,194,100	1	Dokumen	16,829,000	0	0	0	0	4	25,194,100	66.67	40.16
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPHA (Indeks Pemenuhan Hak Anak)	67.00	1,292,857,500	56.8	219,945,100	63.6		525,562,000	N/A	4,488,000	N/A	0.85	56.8	224,433,100	56.80	17.36

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%		
Meningkatnya Kelembagaan, Sinkronisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	67,00	1,292,857,500	55	219,945,100	64	Persen	525,562,000	22.34	4,488,000	34.91	0.85	38.67	224,433,100	57.72	17.36
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	255	861,739,600	125	61,917,600	65	Organisasi	393,182,000	5	4,488,000	7.69	1.14	130	66,405,600	50.98	7.71
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16	431,117,900	11	158,027,500	2	Dokumen	132,380,000	0	0	0	0	11	158,027,500	68.75	36.66
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KIE	100	42,022,000	0	0	100	Persen	40.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	42,022,000	0	0	5	Dokumen	40.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	63,20	1,366,549,750	74.8	156,510,400	62.8	Persen	587,180,750	N/A	12,133,000	N/A	2.07	74.8	168,643,400	74.80	12.34
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Didampingi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Di Dampingi	100	734,519,000	100	134,460,400	100	Persen	290,640,000	9	6,308,000	9	2.17	54.5	140,768,400	54.50	19.16

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	29	734,519,000	13	134,460,400	11	Kegiatan	290,640,000	1	6,308,000	9.09	2.17	14	140,768,400	48.28	19.16
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	100	632,030,750	100	22,050,000	100	Persen	296,540,750	100	5,825,000	100	1.96	100	27,875,000	100	4.41
Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	365	632,030,750	63	22,050,000	165	layanan	296,540,750	12	5,825,000	7.27	1.96	75	27,875,000	20.55	4.41
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								1,662,440,400								
Pendewasaan Usia Perempuan Perkawinan Pertama	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Perempuan Kawin Pertama	-	-	22.63	686,532,100										-	-
Peningkatan Pengendalian Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Perkawinan Pertama Perempuan Batas Usia 19	8,5	1,820,169,600	-	-	10	Persen	664,201,000	N/A	13,077,600	N/A	1.97	0	699,609,700	0	38.44
Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	402,895,200	100	359,634,700	100	Persen	95,741,000	0	0	0	0	50	359,634,700	50	89.26

Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	33	402,895,200	16	359,634,700	15	Satuan Pendidikan	40,731,000	0	0	0	0	16	359,634,700	48.48	89.26
Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24	110,820,000	0	0	20	Dokumen	55,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan ketersediaan data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data keluarga	100	1,417,274,400	100	326,897,400	100	Persen	568,460,000	0	13,077,600	0	2.30	100	339,975,000	100	23.99
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60	1,065,941,000	23	139,682,400	12	Laporan	119,550,000	2	13,077,600	2	2.91	25	152,760,000	41.67	43.48
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	600	351,333,400	330	187,215,000	100	Unit	448,910,000	0	0	0	0	330	187,215,000	55	17.56
Pendewasaan Usia Perempuan Melahirkan Pertama	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,5	5,168,725,400	5.45	4,361,320,787	7.2	Persen	479,170,600	N/A	1,982,000	N/A	0.41	5.45	4,363,302,787	N/A	83.50
		Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	81		76.29		80,8			N/A	0	N/A		76.29			

Sasaran	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	I
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penurunan ASFR	100	3,559,858,600	39	3,384,389,387	39	Persen	146,888,600	N/A	0	0	0	39	3,384,389,387	39	93.58
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	400	56,899,800	0	0	200	Dokumen	28,449,800	-0	0-	0	0	0	0	0	0.00
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	1,588,333,100	4	1,417,831,525	1	Dokumen	98,564,800	0	0	0	0	2	1,417,831,525	66.67	89.27
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3	1,971,525,500	2	1,966,557,862	1	Dokumen	19,874,000	0	0	0	0	4	1,966,557,862	133.33	99.75
Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Alat Kontrasepsi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang alat kontrasepsinya terpenuhi	100	1,608,866,800	70.333 3	976,931,400	100	Persen	332,282,000	9.61	1,982,000	9.61	0.60	39.97166 667	978,913,400	39.97	60.84
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	588	392,344,800	250	193,868,800	147	Laporan	88,454,000	2	1,982,000	1.36	2.24	252	195,850,800	42.86	49.92

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
	Jaringan dan Jejaringnya																
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8.048	1,194,022,000	2149	783,062,600	2000	Orang	239,328,000	0	0	0	0	2149	783,062,600	26.70	65.58
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10	22,500,000	4	0	2	Laporan	4,500,000	0	0	0	0	4	0	40	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64.55	5,008,156,200	60.84	4,019,183,600	64.55	Indeks	519,068,800	N/A	2,324,000	N/A	0.45	60.84	4,021,507,600	94.25	80.30
Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif	259	4,269,259,800	253	3,739,074,800	256	Kelompok	287,350,000	0	2,324,000	0	0.81	253	3,741,398,800	97.68	87.64
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	102	4,269,259,800	34	3,739,074,800	34	Laporan	287,350,000	1	2,324,000	2.94	0.81	35	3,741,398,800	34.31	87.64
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Sasaran Ketahanan Keluarga yang aktif	79	738,896,400	77	280,108,800	78	Persen	231,718,800	0	0	0	0	38.5	280,108,800	48.73	37.91

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s/d dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD sampai Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5+7		10=(9/4)*100%	
Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	220,268,400	5	100,022,800	1	Laporan	80,522,800	0	0	0	5	100,022,800	71.43	45.41
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	21	518,628,000	11	180,086,000	5	Laporan	151,196,000	0	0	0	11	180,086,000	52.38	34.72

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, yaitu :

- 1) Tidak tersedianya data PMKS/PPKS yang update berdasarkan hasil pengolahan data (pendataan, verifikasi dan validasi) yang dilaksanakan secara regular/berkala, minimal setiap tahun
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
- 3) Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) sesuai standard bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS/PPKS
- 4) Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 5) Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT
- 6) Rendahnya kesertaan ber KB dengan MKJP.
- 7) Tingginya angka kawin Usia muda 15 - 19.
- 8) Masih kurang peran serta institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam melaksanakan program KB, dan Ketahanan Keluarga (Kader, Pos Pembina KB Desa/PPKBD dan Sub Pos PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja).
- 9) Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- 10) Kurang terintegrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
- 11) Kurangnya maksimalnya tugas dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 12) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah.
- 13) Manajemen yang kurang optimal baik dalam perencanaan pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan
- 2) Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas
- 3) Rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
- 4) Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
- 5) Rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjol) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng)

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan
- 3) Menyediakan tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) yang sesuai dengan standard bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS/PPKS
- 4) Menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3):
- 5) Mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT.
- 6) Meningkatkan kesertaan ber KB dengan MKJP.
- 7) Mengurangi angka kawin Usia muda 15 - 19 dengan advokasi, sosialisasi dan lain-lain
- 8) Mensosialisasikan peran serta institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam melaksanakan program KB, dan Ketahanan Keluarga (Kader, Pos Pembina KB Desa/PPKBD dan Sub Pos PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIK Remaja).
- 9) Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

- 10) Mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
- 11) Memaksimalkan tugas dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan fungsi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 12) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan, pengembangan, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta pembangunan system pengawasan yang kuat.
- 13) Memperkenalkan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan terstruktur kepada seluruh Sumber Daya Manusia, dengan membuat evaluasi kinerja.

BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Pembedayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,06
		Persentase Perlindungan Hak Perempuan	100 Persen
	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,462
Meningkatnya Sistem Perlindungan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri	25 Persen
	Menurunnya Angka PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri	32 Persen
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Total Fertility Rate (TFR)	2,12
		Indeks Pembangunan Keluarga	64,55
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,12
		Indeks Pembangunan Keluarga	64,55

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	50
	Meningkatnya Keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mandiri	32 Persen
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,00
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,462
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,6375
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	59,20
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,28
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Ketentraman	56,50
		Indeks Kebahagiaan	72,22
		Indeks Kemandirian	54,10

Tabel 3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaannya

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dana Alokasi Umum	28.623.376.407,-	27.408.005.171,-	1.215.371.236,-
2.	Dana Alokasi Khusus	9.089.826.000,-	9.089.826.000,-	0,-
Total		37.713.202.407,-	36.497.831.171,-	1.215.371.236,-

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 *(7-6)	9
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					Rp 37.713.202.407	Rp36.497.831.171	Rp8.708.670.895	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Rp22.499.357.126	Rp22.683.146.021	Rp183.788.895	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78	78	Rp13.584.982.526	Rp13.989.409.521	Rp10.310.500	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	Rp64.061.500	Rp59.976.364	-Rp4.085.136	Perubahan Rincian Belanja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Rp22.359.000	Rp20.935.200	-Rp1.423.800	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.038.500	Rp6.972.500	-Rp3.066.000	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp936.000	Rp928.164	-Rp7.836	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp7.397.500	Rp9.760.100	Rp2.362.600	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp936.000	Rp807.600	-Rp128.400	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8 Laporan	Rp10.876.500	Rp9.428.900	-Rp1.447.600	Perubahan Rincian Belanja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	Rp11.518.000	Rp11.143.900	-Rp374.100	Perubahan Rincian Belanja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia dan Tersusun	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Rp 6.331.509.169	Rp 7.058.005.000	Rp 726.495.831	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	53 Orang/bulan	Rp 6.152.399.669	Rp 6.784.600.000	Rp 6.784.600.000	Perubahan Rincian Belanja
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130 Dokumen	Rp161.400.000	Rp258.120.000	Rp96.720.000	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp3.457.000	Rp2.903.000	-Rp554.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	18 Laporan	Rp14.252.500	Rp12.382.000	-Rp1.870.500	Perubahan Rincian Belanja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	Persentase Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Rp100.000.000	Rp80.000.000	-Rp20.000.000	Perubahan Rincian Belanja
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	10 Orang	Rp100.000.000	Rp80.000.000	-Rp20.000.000	Perubahan Rincian Belanja
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Bermutu dan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Rp 2.287.978.500	Rp2.010.424.900	-Rp277.553.600	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	Rp60.667.000	Rp50.667.000	-Rp10.000.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	Rp 910.511.000	Rp831.747.400	-Rp78.763.600	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp356.371.500	Rp331.409.000	-Rp24.962.500	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp40.200.000	Rp39.174.000	-Rp1.026.000	Perubahan Rincian Belanja
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp16.500.000	Rp14.625.000,	-Rp1.875.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp.903.729.000	Rp742.802.500	-Rp160.926.500	Perubahan Rincian Belanja
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	Rp0	Rp0	Rp0	Tidak melakukan pengadaan kendaraan operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Rp0	Rp0	Rp0	Tidak melakukan pengadaan kendaraan operasional
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	Rp3.606.352.000	Rp3.589.351.900	-Rp17.000.100	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Rp0	Rp0	Rp0	Tidak ada lagi sub kegiatan ini
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp282.800.000	Rp282.800.000	Rp0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Rp3.323.552.000	Rp3.306.551.900	-Rp17.000.100	Perubahan Rincian Belanja
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	Rp1.195.081.357	Rp1.191.651.357	-Rp3.430.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	Rp42.750.000	Rp42.750.000	Rp0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 Unit	129 Unit	Rp602.120.000	Rp602.120.000	Rp0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	266 Unit	266 Unit	Rp145.680.000	Rp145.680.000	Rp0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	Rp359.522.837	Rp356.092.837	-Rp3.430.000	Perubahan Rincian Belanja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	Rp45.008.520	Rp45.008.520	Rp0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 Persen	65 Persen	Rp836.930.300	Rp771.446.800	Rp155.677.200	Perubahan Target Indikator
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		70 Persen				
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang meningkat Kapasitasnya	Persentase KAT yang meningkat Kapasitasnya	100 Persen	75 Persen	Rp86.000.000	Rp78.260.000	-Rp7.740.000	Perubahan Rincian Belanja
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	172 Keluarga	Rp86.000.000	Rp78.260.000	-Rp57.743.500	Perubahan Rincian Belanja
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya Persentase PPKS yang mendapatkan akses layanan sosial dasar	100 Persen 0	100 Persen 100 Persen	Rp750.930.300	Rp693.186.800	Rp13.956.500	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	443 Orang	447 Orang	Rp534.275.000	Rp483.975.600	-Rp50.299.400	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Rp122.410.500	Rp115.421.400	-Rp6.989.100	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp94.244.800	Rp93.789.800	-Rp455.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar	Persentase PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar	18 Persen	15,85 Persen	Rp3.405.806.000	Rp3.354.446.700	Rp37.236.500	Perubahan Target Indikator
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan assesment	85 Persen	85 Persen	Rp3.064.872.500	Rp3.041.859.200	-Rp23.013.300,	Perubahan Indikator dan Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	863 Orang	1785 Orang	Rp2.473.410.000	Rp2.479.263.450	Rp5.853.450	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	Rp144.454.000	Rp144.454.000	Rp0	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Rp202.000.0000	Rp201.800.000	-Rp200.000	Perubahan Rincian Belanja
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	80 Orang	Rp39.800.000	Rp31.900.000	-Rp7.900.000	Perubahan Rincian Belanja
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	112 Orang	Rp91.312.000	Rp83.521.500,	Rp7.790.500	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	Rp12.697.000	Rp11.742.500	-Rp954.500	Perubahan Rincian Belanja
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36 Orang	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp0	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	60 Orang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 0	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	200 Orang	Rp 6.999.500	Rp 6.999.500	Rp 0	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	135 Orang	Rp 42.700.000	Rp38.563.250	-Rp4.136.750	Perubahan Rincian Belanja
Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100 Orang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 0	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 Orang	Rp41.000.000	Rp33.115.000	-Rp7.885.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan assisment	85 Persen	85 Persen	Rp340.933.500	Rp312.587.500	-Rp28.346.000	Perubahan Indikator dan Perubahan Rincian Belanja
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	110 Orang	Rp 162.998.000	Rp 138.278.000	-Rp 24.720.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Rp 74.770.000	Rp 66.307.000	-Rp 8.463.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20 Orang	Rp 9.498.000	Rp 9.498.000,	Rp 0	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 Orang	Rp 0	Rp 7.700.000	Rp 7.700.000	Penambahan Sub Kegiatan yang mendukung SPM
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	Rp 72.371.000	Rp 69.468.500	-Rp 2.902.500	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14 Orang	Rp 9.284.000	Rp 11.366.000,	Rp 2.082.000	Perubahan Rincian Belanja
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 12.012.500	Rp 9.970.000	-Rp 2.042.500	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial Persentase data PPKS yang valid	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang mendapatkan Jaminan dan Perlindungan Sosial Persentase data PPKS yang valid	70 Persen	50 Persen 50 Persen 80 Persen	Rp 3.150.950.300	Rp 3.066.730.000	Rp 31.606.200,	Perubahan Rincian Belanja
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terdata	80 Persen	80 Persen	Rp 3.150.950.300	Rp2.787.915.800	-Rp 84.220.300	Perubahan Rincian Belanja
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	222206 Orang	239502 Orang	Rp 539.907.300	Rp 635.205.700	Rp 95.298.400	Perubahan Rincian Belanja
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	67074 Keluarga	67074 Keluarga	Rp 185.925.000	Rp43.617.500	-Rp 142.307.500	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	106 Keluarga	106 Keluarga	Rp 2.206.990.000	Rp 2.172.793.800	-Rp 34.196.200	Perubahan Rincian Belanja
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Rp 218.128.000	Rp 215.113.000	-Rp 3.015.000	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100 Persen	100 Persen 75 Persen	Rp 1.520.688.000	Rp 1.501.113.000	Rp 427.250	Penambahan Indikator kegiatan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan	100 Persen	100 Persen	Rp 1.416.485.000	Rp 1.410.370.000	-Rp 6.115.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	Rp500.995.000	Rp 525.995.000	Rp 0	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	Rp 448.656.000	Rp 448.656.000	Rp 0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	960 Orang	960 Orang	Rp 428.283.500	Rp 423.993.500	-Rp 4.290.000	Perubahan Rincian Belanja
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	135 Orang	Rp 13.550.500	Rp 11.725.500	-Rp 1.825.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	Rp 104.203.000	Rp 90.743.000	-Rp 13.460.000	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	Rp 25.722.500	Rp 22.942.500	-Rp 2.780.000	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225 Orang	Rp 78.480.500	Rp 67.800.500	-Rp 10.680.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 5.289.803.150	Rp 13.814.685.150	Rp 8.524.882.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Rp 4.018.022.750	Rp 3.460.025.050	-Rp 167.337.700	
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks PUG Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	0,6375 Indeks	15 Persen	Rp 1.343.748.000	Rp 1.247.019.800,	-Rp 86.728.200	Indikator Indeks PUG dijadikan indikator sasaran
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah yang menerapkan PUG	Persentase Lembaga Pemerintah yang menerapkan PUG	100 Persen	100 Persen	Rp 30.984.000	Rp 25.700.000	-Rp 5.284.000	Perubahan Rincian Belanja
0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	47 Orang	47 Orang	Rp 30.984.000	Rp 25.700.000	-Rp 5.284.000	Perubahan Rincian Belanja
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100 Persen	100 Persen	Rp 13.924.000	Rp 11.482.200	-Rp 2.441.800	Perubahan Rincian Belanja
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 13.924.000	Rp 11.482.200	-Rp 2.441.800	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlibat aktif dalam jejaring atau kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Persentase lembaga yang terlibat aktif dalam jejaring atau kemitraan dengan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Rp 1.288.840.000	Rp 1.209.837.600	-Rp 89.002.400	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Sub Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	650 Orang	650 Orang	Rp 1.288.840.000	Rp 1.209.837.600	-Rp 89.002.400	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	20 Persen	100 Persen	Rp 183.435.000	Rp 372.486.400	-Rp 21.687.600	Perubahan Rincian Belanja
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki mekanisme pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki mekanisme pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	100 Persen	Rp 52.238.000	Rp 95.495.400	Rp 43.257.400	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 52.238.000	Rp 95.495.400	Rp 43.257.400	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang di Dampingi	100 Persen	100 Persen	Rp 131.197.000	Rp 230.971.000	Rp 99.774.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Layanan	300 Layanan	Rp 131.197.000	Rp 230.971.000	Rp 99.774.000	Adanya penambahan pada target
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif menyediakan layanan perlindungan secara terintegrasi (hukum, psikologis, medis dan rehabilitasi)	Persentase lembaga yang aktif menyediakan layanan perlindungan secara terintegrasi (hukum, psikologis, medis dan rehabilitasi)	-	100 Persen	Rp 0	Rp 46.020.000	Rp 46.020.000	Penambahan Sub kegiatan (DAK)
002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	100 Orang	Rp 0	Rp 46.020.000	Rp 46.020.000	Penambahan Sub kegiatan (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak	Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak	3,25 Persen	20 Persen	Rp 930.586.000	Rp 740.069.400	Rp 1.555.000	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang dibina	Jumlah keluarga yang dibina	100 Persen	700 Orang	Rp 129.642.000	Rp 98.681.200	-Rp 30.960.800	Perubahan Rincian Belanja
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 129.642.000	Rp 98.681.200	-Rp 30.960.800	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan kapasitas	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan kapasitas	100 Persen	100 Persen	Rp 800.944.000	Rp 641.388.200	-Rp 159.555.800	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000 Orang	6.470 Orang	Rp 800.944.000	Rp 641.388.200	-Rp 159.555.800	Perubahan Target
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	18 Persen	Rp 16.829.000	Rp 14.073.500	-Rp 2.755.500	Perubahan Rincian Belanja
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	100 Persen	100 Persen	Rp 16.829.000	Rp 14.073.500	-Rp 2.755.500	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 16.829.000	Rp 14.073.500	-Rp 2.755.500	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63.60 Indeks	63.60 Indeks	Rp 565.584.000	Rp 478.931.200	-Rp 86.652.800	Perubahan Rincian Belanja
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	Persentase Dokumen Pendukung Pemenuhan Hak Anak	64 Persen	64 Persen	Rp 525.562.000	Rp 442.509.600	-Rp 83.052.400	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha	65 Organisasi	65 Organisasi	Rp 393.182.000	Rp 324.755.600	-Rp 68.426.400	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 132.380.000	Rp 117.754.000	-Rp 14.626.000	Perubahan Rincian Belanja
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 Persen	62 Persen	Rp 40.022.000	Rp 36.421.600	-Rp 3.600.400	Perubahan Rincian Belanja
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 40.022.000	Rp 36.421.600	-Rp 3.600.400	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	62,80 Indeks	100 Persen 62,80 Indeks	Rp 587.180.750	Rp 607.444.750	Rp 74.504.250	Perubahan Rincian Belanja
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan	100 Persen	100 Persen	Rp 290.640.000	Rp 291.207.000	Rp 567.000	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Rp 290.640.000	Rp 291.207.000	Rp 567.000	penghapusan dokumen penyusunan KLA digantikan dengan pengadaan sosialisasi KHA.
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	840 Orang	Rp 0	Rp 51.405.000	Rp 51.405.000	Penambahan Sub kegiatan (DAK)
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	3 Dokumen	Rp 0	Rp 0	Rp 0	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang dampingi	Persentase Layanan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang dampingi	100 Persen	100 Persen	Rp 296.540.750	Rp293.237.750	-Rp 3.303.000	Perubahan Rincian Belanja
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	165 Orang	308 Orang	Rp 296.540.750	Rp293.237.750	-Rp 3.303.000	Perubahan Rincian Belanja
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	100 Persen	Rp 0	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000	Penambahan Sub kegiatan (DAK)
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	10 Orang	Rp 0	Rp 23.000.000	Rp 23.000.000	Penambahan Sub kegiatan (DAK)

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					Rp 1.662.440.400,	Rp 10.354.660.100	Rp 8.692.219.700	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama (MUKP) wanita Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Median usia kawin pertama (MUKP) wanita Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10 Persen	20 Tahun 28,60 Angka	Rp 664.201.000	Rp 582.797.100	-Rp 81.403.900	Perubahan Rincian Belanja
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 Persen	100 Persen	Rp 95.741.000	Rp 81.860.300	-Rp 13.880.700	Perubahan Rincian Belanja
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	Rp 40.731.000	Rp 35.451.300	-Rp 5.279.700	Adanya penambahan pada target
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Dokumen	12 Dokumen	Rp 55.010.000	Rp 46.409.000	-Rp 8.601.000	Perubahan Rincian Belanja
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data keluarga	Persentase ketersediaan data keluarga	100 Persen	100 Persen	Rp 568.460.000	Rp 500.936.800	-Rp 67.523.200	Perubahan Rincian Belanja

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	Rp 119.550.000	Rp 103.987.200	-Rp 15.562.800	Perubahan Rincian Belanja
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	100 Unit	290 Unit	Rp 448.910.000	Rp 396.949.600	-Rp 51.960.400	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks ketentraman Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Indeks ketentraman Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	7,2 Persen	56,50 Indeks 69,50 Persen 8.6 Persen	Rp 479.170.600	Rp 5.714.268.200	Rp 110.815.800	Perubahan Rincian Belanja
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penurunan ASFR	Penurunan ASFR	39 Persen	25 Persen	Rp 146.888.600	Rp 3.280.933.400	Rp 3.134.044.800	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Unit	200 Unit	Rp 28.449.800	Rp26.000.600	-Rp 2.449.200	Perubahan Rincian Belanja
4.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 98.564.800	Rp 1.417.000.800	Rp 1.318.436.000	Perubahan Rincian Belanja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.874.000	Rp 1.837.932.000	Rp 1.818.058.000	Penambahan dana DAK BOKB

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kecamatan Yang memiliki Tenaga Penyuluh Aktif	Persentase Kecamatan Yang memiliki Tenaga Penyuluh Aktif	100 Persen	100 Persen	Rp 0	Rp 1.707.223.000	Rp 1.707.223.000	Penambahan dana DAK BOKB
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	9 Unit	Rp 0	Rp 1.707.223.000	Rp 1.707.223.000	Penambahan dana DAK BOKB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang alat kontrasepsinya terpenuhi	Persentase Faskes yang alat kontrasepsinya terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Rp 332.282.000	Rp 726.111.800	Rp 393.829.800	Perubahan Rincian Belanja
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	147 Laporan	12 Laporan	Rp 88.454.000	Rp 47.638.800	-Rp 40.815.200	Perubahan Rincian Belanja
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 Orang	2000 Orang	Rp 239.328.000	Rp 674.373.000	-Rp 33.940.000	Perubahan Rincian Belanja
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	Rp 4.500.000	Rp 4.100.000	-Rp 400.000	Perubahan Rincian Belanja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Kemandirian Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Indeks Kemandirian Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	64,55 Indeks	54,10 Indeks 80 Persen	Rp 519.068.800	Rp 4.057.594.800	Rp 5.000	Perubahan Rincian Belanja
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	256 Kelompok	80 Persen	Rp 287.350.000	Rp 3.869.295.000	Rp 3.581.945.000	Penambahan dana DAK BOKB

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sesudah perubahan	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	34 Laporan	34 Laporan	Rp 287.350.000	Rp 3.869.295.000	-Rp 46.055.000	Perubahan Rincian Belanja
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi masyarakat yang aktif melaksanakan program pembangunan keluarga	Persentase Organisasi masyarakat yang aktif melaksanakan program pembangunan keluarga	78 Persen	100 Persen	Rp 231.718.800	Rp 188.299.800	-Rp 43.419.000	Perubahan Rincian Belanja
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	Rp 80.522.800	Rp 72.275.000	-Rp 8.247.800	Perubahan Rincian Belanja
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5 Laporan	5 Laporan	Rp 151.196.000	Rp 116.024.800	-Rp 35.171.200	Perubahan Rincian Belanja

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak, Berkembangnya Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB) Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APBN;
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen

perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);

5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinSosP3AP2KB) Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota

maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;

3. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan;
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan OPD terkait penyelenggaraan pelayanan;

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Martapura, 20 Juni 2025
Plh.Kepala Dinas Sosial, Pembedayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,

Ir.H.Aswadi,MM
NIP. 19780312 199612 2 001

11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja Perubahan ini hingga selesai.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Renstra Disnakertrans 2025-2029 menyesuaikan Pokin terbaru sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2024 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsive. Selain itu, Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besari rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara laian meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja;
- Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
- Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaaanya;
- Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 memiliki 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Utama

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;

- Job Fair/Bursa Kerja
- 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- f. Kegiatan Perencanaan dan Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Dari 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan pendukung, target kinerja hasil/keluaran yang dicapai sampai dengan Triwulan I mencapai untuk Realisasi Keuangan sebesar 14,56% dan Realisasi Fisik mencapai 16,56%. Uraian lebih lengkap mengenai capaian target kinerja program/kegiatan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat catatan penting antara lain:

1. **Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD .

Hambatan tidak tercapainya pada sub kegiatan ini karena pelaksanaannya pada triwulan III, namun pada triwulan II yaitu pada bulan Juni penyusunan pada tahap perencanaan RKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hambatan pada sub kegiatan ini karena laporan keuangan terlaksana pada bulan Desember, sebagai bahan untuk pelaporan yaitu dengan adanya pelaporan tiap bulan dan rekonsialisasi dengan akuntansi dan asset.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n.

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, target 528 orang, realisasi masih 32 orang 2 kegiatan pelatihan yang terlaksana;

Faktor Penghambat:

- Pada Bulan Januari dokumen DPA 2025 belum terbit atau belum ditandatangani, sehingga dalam pengerjaan SPJ kegiatan masih terkendala
- Untuk administrasi kelengkapan SPJ belum lengkap dikarenakan menunggu peserta pelatihan mengumpulkan data diri untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan di bulan Maret.
- Pelatihan akan gencar dilaksanakan di triwulan II.

Rencana Tindak Lanjut:

- Jadwal pelatihan dilaksanakan di triwulan II.
- Pelaksanaan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan pelatihan.
- Pelaksanaan koordinasi ke desa.
- Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan berjalan dengan lancar - Peserta antusias dalam mengikuti pelatihan.
- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
kegiatan ini karena perencanaan kegiatan (arus kas) pada triwulan IV (Bulan Oktober).

C. Program Perencanaan Tenaga Kerja**a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**

Indikator kegiatan: Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Beberapa perusahaan masih dalam proses menyusun Dokumen RTK Mikro.

Faktor Penghambat

- Tidak adanya kewenangan/intervensi dalam pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak membuat RTK mikro.

Rencana Tindak Lanjut:

- kegiatan akan dilaksanakan di TW III / IV, namun proses penyusunan RTK sejak triwulan I sudah berjalan;
- Laksanakan Sesuai dengan jadwal dan monitoring progress dari perusahaan.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Tidak adanya tenaga kerja disabilitas yang dilayani di ULD.

Faktor Penghambat

- Penyandang Disabilitas yang dilayani melalui Unit Layanan Disabilitas masih minim dikarenakan keberadaan layanan ini belum banyak diketahui.

Rencana Tindak Lanjut:

- Berkolaborasi dengan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung ULD.

b. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Indikator kegiatan: Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Faktor Penghambat

- Dokumen persyaratan yang diserahkan terkadang belum lengkap dan perlu dilengkapi kembali.

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Faktor Penghambat
 - Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV (Bulan Oktober);

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

E. Program Hubungan Industrial

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan : Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, Target sampai dengan Triwulan I sebanyak 8 Perusahaan realisasi masih 4 Perusahaan, belum mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Terbatasnya mobilisasi,
- Masih Kurangnya kesadaran perusahaan untuk membuat PP
- kurangnya/lemahnya perhatian akan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja

2.2. **Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitas Kunjungan Tamu.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Pelayanan Antar Kerja

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar

- Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;

- Job Fair/Bursa Kerja

D. Program Hubungan Industrial

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman.

2.3. Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase Adminitrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

A.PROGRAM TENAGA KERJA

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online

4. Program/Kegiatan Yang Tercapai Disebabkan Oleh :

- Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Dana tersedia dengan anggaran kas kegiatan
- Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
- Perencanaan yang matang dan tim yang terampil dan kolaboratif

Program/Kegiatan Yang Tidak Tercapai Disebabkan Oleh :

Pada program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga kerja dalam perhitungan pencapaian target masih merujuk pada data BPS tahun 2022 sehingga belum bisa dihitung secara real. Pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi peserta pelatihan baru terlaksana sebanyak 32 orang, sedangkan target pada triwulan I yaitu 160 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, selain itu Masih dibawah Koordinasi dengan PKK Kab Banjar, yang akan melaksanakan pelatihan di triwulan II.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian program renstra dinas tenaga kerja dan transmigrasi bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan,

dan pengembangan daerah. Dampak positifnya dapat mencakup Tingkat Kesempatan Kerja, pemulihan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat, namun implikasi negative juga bisa muncul, kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari program tersebut secara berkelanjutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan I, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2025 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan I, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra Disnakertrans untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
 - Menyampaikan informasi melalui media sosial atau website mengenai rekrutmen peserta pelatihan

- Mengadakan pelatihan dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan keperluan pasar kerja dan memaksimalkan durasi pelatihan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Banjar

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tri II Tahun 2024 (%)	
										Triwulan I									
1	2	3	4	5		6		7		8		10		11		12=10+6		13 = (12 / 5) * 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks	85	28,569,833,034	91,65	7.360.101.569	86	6.804.553.758	-	1.241.969.054	0	1.241.969.054	-	18,25	91,65	8.602.070.623	107,82	30,10892858
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	Persen	100	425,412,900	100	52.608.700	100	93.319.200	25	10.080.000	25	10.080.000	25,00	10,80	125	62.688.700	125,00	15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	43	35,071,500	9	13.139.900	9	21.733.000	5	5.040.000	5	5.040.000	55,56	23,19	14	18.179.900	32,56	51,8366765

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	97,738,500	1	3.807.500	1	5.438.700	-	1.680.000	0	1.680.000	-	30,89	1	5.487.500	20,00	5,614471268
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	59,197,500	1	3.306.300	1	5.399.700	-	-	0	-	-	0,00	1	3.306.300	20,00	5,585202078
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	76,126,500	1	5.499.800	1	5.760.000	-	-	0	-	-	0,00	1	5.499.800	20,00	7,224553868
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	63,307,900	1	4.499.800	1	5.330.000	-	-	0	-	-	0,00	1	4.499.800	20,00	7,107801712

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	51,899,500	3	11.466.800	3	20.703.000	3	1.680.000	3	1.680.000	100,00	8,11	6	13.146.800	40,00	25,33126523
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	95	42,071,500	19	10.888.600	19	11.071.800	4	-	4	-	21,05	0,00	23	10.888.600	24,21	25,88117847
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1	7.915.500		-		-	-	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50	9.967.500		1.680.000		1.680.000	-	16,85	0	1.680.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	1	23,385,995,734	100	4.099.144.450	100	4.949.557.500	25	992.334.681	25	992.334.681	25,00	20,05	125	5.091.479.131	12500,00	21,77148747
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	19,921,391,734	29	3.943.000.350	35	4.734.500.000	26	976.434.681	26	976.434.681	74,29	20,62	55	4.919.435.031	211,54	24,6942337
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60		12	128.040.000	12	184.850.000	1	15.900.000	1	15.900.000	8,33	8,60	13	143.940.000	21,67	#DIV/0!

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	105	-	-	-			-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	76,649,500	1	9.314.800	1	7.822.000	3	-	3	-	300,00	0,00	4	9.314.800	80,00	12,15246022
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	-	25	18.789.300	16	22.385.500	-	-	0	-	-	0,00	25	18.789.300	41,67	#VALUE!
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Disediakan	Persen	100	-		-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	377,957,768	100	69.102.747	100	80.000.000	25	-	25	-	25,00	0,00	125	69.102.747	125,00	18,28319269
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	370,000,000	7	69.102.747	5	80.000.000	-	-	0	-	-	0,00	7	69.102.747	20,00	18,67641811
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	Persen	1	2,587,091,332	100	1.399.782.415	100	478.835.220	25	75.438.342	25	75.438.342	25,00	15,75	125	1.475.20.757	125,00,00	57,02236866
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20		5	6.935.000	5	14.567.500	1	2.302.000	1	2.302.000	20,00	15,80	6	9.237.000	30,00	#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	94,035,700	3	901.762.650	3	127.595.720	-	-	0	-	-	0,00	3	901.762.650	16,67	958,9577682
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	157,365,000	12	53.174.300	12	44.368.000	1	5.150.000	1	5.150.000	8,33	11,61	13	58.324.300	108,33	37,06306993
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	102,475,000	12	14.976.000	12	22.532.000	4	4.981.000	4	4.981.000	33,33	22,11	16	19.957.000	133,33	19,4749939

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	6,300,000	12	1.080.000	12	1.498.000	3	180.000	3	180.000	25,00	12,02	15	1.260.000	25,00	20
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	12		12	11.006.700	12	29.999.000	-	-	0	-	-	0,00	12	11.006.700	100,00	#DIV/0!
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2,225,715,632	12	410.847.765	12	238.275.000	3	62.825.342	3	62.825.342	25,00	26,37	15	473.673.107	25,00	21,28183404
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	850,350,300	100	622.205.196	100	757.673.838	25	147.692.731	25	147.692.731	25,00	19,49	125	769.897.927	125,00	90,53891402
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	647,050,300	12	71.258.883	12	155.557.638	3	14.662.731	3	14.662.731	25,00	9,43	15	85.921.614	31,25	13,27896981
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	159,800,000	12	17.495.000	12	43.160.000	1	5.530.000	1	5.530.000	8,33	12,81	13	23.025.000	27,08	14,40863579
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	43,500,000	12	533.451.313	12	558.956.200	4	127.500.000	4	127.500.000	33,33	22,81	16	660.951.313	33,33	1519,428306

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	943,025,000	100	1.117.258.061	100	445.168.000	25	16.423.300	25	16.423.300	25,00	3,69	125	1.133.681.361	125,00	120,2175299
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	136,000,000	1	23.280.000	1	42.750.000	0.25	6.103.300	0.25	6.103.300	#VALUE!	14,28	#VALUE!	29.383.300	#VALUE!	21,60536765
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	504,300,000	3	72.573.061	3	164.360.000	0.75	10.320.000	0.75	10.320.000	#VALUE!	6,28	#VALUE!	82.893.061	#VALUE!	16,43725183
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	302,725,000	2	1.021.405.000	2	238.058.000	0.5	-	0.5	-	#VALUE!	0,00	#VALUE!	1.021.405.000	#VALUE!	337,4035841
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persen	100	293,920,000	42,1	35.347.542	42.1	30.200.000	-		0		#VALUE!	0,00	42,1	35.347.542	42,10	12,02624592

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro yang Disusun	Dokumen	19	293,920,000	4	35.347.542	4	30.200.000	-		0		-	0,00	4	35.347.542	21,05	12,02624592
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	33	193,920,000	8	35.347.542	8	30.200.000	-		0		-	0,00	8	35.347.542	24,24	18,22789913
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Rupiah / Jam	23100	598,476,707	23.303	1.029.051.550	22.884	1.772.652.000	23,303	114.452.000	23,303	114.452.000	0,10	6,46	23326	1.143.503.550	100,98	191,0690152
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persen	9.4	475,384,571	13.28	1.004.991.300	9,2	1.749.424.000	13,65	111.139.000	13,65	111.139.000	148,37	6,35	#VALUE!	1.116.130.300	#VALUE!	234,7847129
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	240	470,384,571	368	1.004.991.300	528	1.749.424.000	32	111.139.000	32	111.139.000	6,06	6,35	400	1.116.130.300	166,67	237,2803805
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persen	6.42	13,446,944	5.35	24.060.250	3,85	23.228.000	-	3.313.000	0	3.313.000	-	14,26	#VALUE!	27.373.250	#VALUE!	203,5648397

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktifitas	Perusahaan	25	13,446,944	25	24.060.250	20	23.228.000	-	3.313.000	0	3.313.000	-	14,26	25	27.373.250	100,00	203,5648397
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	54	1,978,552,696	37,9	239.474.000	34	467.328.100	19,20	2.890.000	19,2	2.890.000	56,47	0,62	#VA LUE!	242.364.000	#VA LUE!	12,24956002
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Lowongan	900	656,676,039	389	37.094.000	200	51.050.000	30	-	30	-	15,00	0,00	419	37.094.000	46,56	5,648751865
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	300	57,000,000	389	7.800.000	80	14.300.000	30		30		37,50	0,00	419	7.800.000	139,67	13,68421053
	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	120	339,370,000	36	29.294.000	30	36.750.000	1		1		3,33	0,00	37	29.294.000	30,83	8,631876713
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar	Orang	4500	1,041,928,480	1026	148.216.500	900	207.482.000	156	2.890.000	156	2.890.000	17,33	1,39	1182	151.106.500	26,27	14,50257891
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	16	294,000,000	4	24.470.500	4	12.537.000	-	2.890.000	0	2.890.000	-	23,05	4	27.360.500	25,00	9,306292517

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	430 0	267,928 ,480	1026	17.380. 000	1200	51.085. 000	156		156		13,00	0,00	118 2	17.380. 000	27,4 9	6,48680 5733
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	400	480,000 ,000	132	106.366 .000	100	143.860 .000	-		0		-	0,00	132	106.366 .000	33,0 0	22,1595 8333
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan	Persen	100	279,948 ,177	100	54.163. 500	100	208.796 .100	100	-	100	-	100,0 0	0,00	200	54.163. 500	200, 00	19,3476 8805
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	570	39,954, 777	120	38.375. 500	120	181.918 .600	2		2		1,67	0,00	122	38.375. 500	21,4 0	96,0473 3872
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	230	239,993 ,400	60	15.788. 000	60	26.877. 500	-		0		-	0,00	60	15.788. 000	26,0 9	6,57851 4242

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	55	936,501,992	36.18	1.143.692.100	35	2.287.901.500	4,80	431.106.600	4,8	431.106.600	13,71	18,84	#VA LUE!	1.574.798.700	#VA LUE!	168,1575387
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan	Persen	60	398,475,000	39.84	46.614.500	40	76.887.000	1,06	2.345.000	1,06	2.345.000	2,65	3,05	#VA LUE!	48.959.500	#VA LUE!	12,28671811
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	115	197,475,000	20	43.775.000	30	35.408.000	4	1.118.000	4	1.118.000	13,33	3,16	24	44.893.000	20,87	22,73351057

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Lapora n	16	85,000, 000	4	2.839.5 00	4	41.479. 000	-	1.227.0 00	0	1.227.000	-	2,96	4	4.066.5 00	25,0 0	4,78411 7647
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Persen	100	554,266 ,992	100	1.097.0 77.600	100	2.211.0 14.500	100	428.761 .600	100	428.761.600	100,0 0	19,39	200	1.525.8 39.200	200, 00	275,289 5666
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkar a	112	92,000, 000	50	84.387. 500	30	63.857. 500	1		1		3,33	0,00	51	84.387. 500	45,5 4	91,7255 4348
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	Perkar a	112	119,760 ,000	11	42.181. 900	30	29.805. 300	-	21.175. 000	0	21.175.000	-	71,04	11	63.356. 900	9,82	52,9032 2311

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	460	189,266,992	8303	970.508.200	10000	2.117.351.700	10.000	407.586.600	10000	407.586.600	100,00	19,25	18303	1.378.094.800	3978,91	728,1221017
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	Persen	31.5	278,732,164	31.58	202.015.000	31,58	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	#VALUE!	205.714.500	#VALUE!	73,80364614
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Kawasan Wilayah	20	454,375,102	6	202.015.000	4	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	6	205.714.500	30,00	45,27415765
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Dibina	Kepala Keluarga	160	173,732,164	112	202.015.000	112	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	112	205.714.500	70,00	118,4089896
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman Yang Dikembangkan Dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	9	280,642,938			0	-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	0,00	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025.

- Perubahan target pada beberapa Sub kegiatan
- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan rencana kerja yaitu 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan pendukung.
- Total kebutuhan dana setelah hasil Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.624.381.858 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan sumber dana berasal dari DAU.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian.
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan unit disabilitas ketenagakerjaan.
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja.
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Pelindungandan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

f. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ;

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Alasan dilakukannya Perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran pada renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029 sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan yang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dituangkan di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029.
- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilakukan perubahan renja dengan melakukan:
 - Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
 - Pergeseran pada rekening belanja antar program
 - Perubahan indikator anggaran pada rekening belanja antar kegiatan
 - Pergeseran anggaror program/kegiatan /sub kegiatan

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diliat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banjar Tahun 2025

N o	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
1	2		3	4	5	6	7	Rp 8	Rp 9	10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Predikat	85	86	7.056.468.288	6.804.553.758	
ke g	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	107.338.200	93.319.200	
	2.07.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	9	23.449.500	21.733.000	
	2.07.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	5.438.700	5.438.700	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI Rp	Pagu EFISIENSI Rp	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	5.805.700	5.399.700	
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	5.760.000	5.760.000	
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	5.330.000	5.330.000	
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	20.703.000	20.703.000	
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	19	16	11.071.800	11.071.800	
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggara n Walidata	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen Hasil	dokumen	1	1	10.000.000	7.915.500	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI Rp	Pagu EFISIENSI Rp	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telak Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	50	50	19.779.500	9.967.500	
ke g	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	4.970.821.500	4.949.557.500	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	30	35	4.734.500.000	4.734.500.000	
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	202.560.000	184.850.000	
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	7.822.000	7.822.000	
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester	laporan	25	18	25.939.500	22.385.500	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				Rp	Rp	
ke g	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminirtrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawian Yang Berkualitas	Persen	100	100	100.000.000	80.000.000	
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5	100.000.000	80.000.000	
ke g	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Berkualitas	Persen	100	100	653.644.450	478.835.220	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	14.567.500	14.567.500	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	133.239.650	127.595.720	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	48.945.500	44.368.000	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	25.394.800	22.532.000	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	1.498.000	1.498.000	
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	29.999.000	29.999.000	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	400.000.000	238.275.000	
ke g	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	Persen	100	100	770.176.638	757.673.838	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	155.557.638	155.557.638	
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	laporan	12	12	43.160.000	43.160.000	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI Rp	Pagu EFISIENSI Rp	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
				Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	571.459.000	558.956.200	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Yang Berkualitas	Persen	100	100	454.487.500	445.168.000	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	42.750.000	42.750.000	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	164.360.000	164.360.000	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	247.377.500	238.058.000	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	yang Dipelihara/Direhabilitasi				Rp	Rp	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persen	68,42	68,42	50.000.000	30.200.000	
ke g	2.07.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikroyang Disusun	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro Yang Disusun	dokumen	5	34% 5 dokumen	50.000.000	30.200.000	
	2.07.02.2.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	10	3	50.000.000	30.200.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tingkat Kemampuan Tenaga Kerja dan Peserta Pelatihan Kerja menghasilkan produk barang/jasa	Rp /Jam Persen	Rp23.096	12,50%	1.883.735.000	1.772.652.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
ke g	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan ang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peserta Pelatihan Yang	Persen	9,2	52,8	1.858.558.000	1.749.424.000	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
				Memiliki Kompetensi/Keterampilan				Rp	Rp	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	560	528	1.858.558.000	1.749.424.000	
ke g	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	4,14	2,5	25.177.000	23.228.000	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20	20	25.177.000	23.228.000	
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	34	97	604.026.100	467.328.100	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
ke g	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	lowongan	200	175	70.000.000	51.050.000	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	80	90	25.000.000	14.300.000	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	30	30	45.000.000	36.750.000	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	orang	950	950	248.915.000	207.482.000	
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	4	4	30.200.000	12.537.000	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	orang	1200	1400	68.715.000	51.085.000	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Informasi Pasar Kerja Online	Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				Rp	Rp	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	100	100	150.000.000	143.860.000	
ke g	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia Purna Yang Diberikan Fasilitasi Perlindungan	Persen	100	100	285.111.100	208.796.100	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	120	120	223.838.600	181.918.600	
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	orang	60	60	61.272.500	26.877.500	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	35	40	2.434.916.300	2.287.901.500	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
ke g	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan.	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan minimal 3 (tiga) unsur (PP, PKWT & BPJS Ketenagakerjaan) tata kelola perusahaan yang baik	Persen	40	4,33	152.905.000	76.887.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	Perusahaan	30	30	36.386.000	35.408.000	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
			Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				Rp	Rp	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	1	1	116.519.000	41.479.000	
ke g	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persen	100	100	2.282.011.300	2.211.014.500	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	30	122.110.500	63.857.500	

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Rp	Rp	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	30	30	34.170.300	29.805.300	
	tidak dilaksanakan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi Serikat Pekerja	11	11	0	0	tidak dilaksanakan
	tidak dilaksanakan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	0	0	tidak dilaksanakan

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Daerah Kabupaten/Kota						Rp	Rp	
	2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10000	10000	2.125.730.500	2.117.351.700	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase pengembangan kawasan ex. transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Mandiri	Persen	26,31	18,75	289.661.500	261.746.500	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
ke g	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah Transmigran Yang mendapatkan informasi Pelatihan Kerja Jumlah Transmigran Yang Menghasilkan Produk Barang/Jasa	Kawasan Wilayah orang	5 KawasanW ilayah	160 Orang24 orang	289.661.500	261.746.500	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	128	128	289.661.500	261.746.500	
	tidak dilaksanakan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Pemukim an	3	3	0	0	tidak dilaksanakan
		Total Pagu						12.318.807.188	11.624.381.858	

3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnakertrans Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Sosial		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,04
		Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)	%	34
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial	%	24,06
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A

Tabel 3.2
Renja Perubahan 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi							12.053.888.223,00	12.318.807.188,00	11.624.381.858,00			13.458.176.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.764.226.723,00	12.029.145.688,00	11.362.635.358,00			13.008.176.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							11.764.226.723,00	12.029.145.688,00	11.362.635.358,00			13.008.176.100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				85	86 Nilai	6.882.549.323,00	7.056.468.288,00	6.804.553.758,00			7.543.176.100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	100 % A Predika t	107.338.200,00	107.338.200,00	107.338.200,00			107.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokume n	9 Dokum en	23.449.500,00	23.449.500,00	21.733.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.438.700,00	5.438.700,00	5.438.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.805.700,00	5.805.700,00	5.399.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.330.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.703.000,00	20.703.000,00	20.703.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		13.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan Laporan	16 Laporan	11.071.800,00	11.071.800,00	11.071.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.915.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				50 Data	50 Data	19.779.500,00	19.779.500,00	9.967.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	-			100 Persen	100 % A Predikat	4.636.902.535,00	4.970.821.500,00	4.970.821.500,00			5.169.176.100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.400.581.035,00	4.734.500.000,00	4.754.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	202.560.000,00	202.560.000,00	184.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		125.193.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.822.000,00	7.822.000,00	7.822.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		11.421.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	18 Laporan	25.939.500,00	25.939.500,00	22.385.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		32.562.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawian Yang Berkualitas	-			100 Persen 5 Orang	100 % A Predikat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			150.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Berkualitas	-			100 Persen	100 % A Predikat	813.644.450,00	653.644.450,00	653.644.450,00			717.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.567.500,00	14.567.500,00	14.567.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	193.239.650,00	133.239.650,00	156.027.720,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.945.500,00	48.945.500,00	44.368.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.394.800,00	25.394.800,00	22.532.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.999.000,00	29.999.000,00	29.999.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	400.000.000,00	263.275.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		600.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	-			-	100 % A Predikat	770.176.638,00	770.176.638,00	770.176.638,00			855.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.557.638,00	155.557.638,00	155.557.638,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.160.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	571.459.000,00	571.459.000,00	558.956.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		600.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Yang Berkualitas	-			100 Persen	100 % A Predika t	454.487.500,00	454.487.500,00	454.487.500,00			545.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	164.360.000,00	164.360.000,00	164.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	247.377.500,00	247.377.500,00	164.626.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun				68,42 %	68,42 %	55.000.000,00	50.000.000,00	30.200.000,00			60.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro Yang Disusun	-			5 Dokumen	34 % 3 Dokumen	55.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			60.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	3 Orang	55.000.000,00	50.000.000,00	30.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Kemampuan Tenaga Kerja dan Peserta Pelatihan Kerja menghasilkan produk barang/jasa				23.096 Rp	12.5 %	1.883.735.000,00	1.883.735.000,00	1.772.652.000,00			2.030.000.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Kompetensi/Keterampilan	-			9.20 Persen	34 % 52.8 %	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00			2.000.000.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				560 Orang	528 Orang	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00	1.749.424.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	-			4,14 Persen	2.5 % 34 %	25.177.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00			30.000.000,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	25.177.000,00	25.177.000,00	23.228.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja				34 %	97 %	493.026.100,00	604.026.100,00	467.328.100,00			625.000.000,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	-			200 Lowongan	175 Lowongan 34 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			80.000.000,00
Pelayanan antar Kerja													
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				80 Orang	90 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	14.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	36.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	-			950 Orang	1000 Orang 34 %	253.915.000,00	248.915.000,00	248.915.000,00			315.000.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				4 Dokumen	4 Dokumen	35.200.000,00	30.200.000,00	12.537.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1200 Orang	1400 Orang	68.715.000,00	68.715.000,00	51.085.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja													
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	143.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia Purna Yang Diberikan Fasilitas Perlindungan	-			100 Persen	100 % 34 %	169.111.100,00	285.111.100,00	285.111.100,00			230.000.000,00
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				120 Orang	120 Orang	97.838.600,00	223.838.600,00	181.918.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	60 Orang	71.272.500,00	61.272.500,00	26.877.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		80.000.000,00
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				35 %	40 %	2.449.916.300,00	2.434.916.300,00	2.287.901.500,00			2.750.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan minimal 3 (tiga) unsur (PP, PKWT & BPJS Ketenagakerjaan) tata kelola perusahaan yang baik	-			40 Persen	24.06 % 45 %	162.905.000,00	152.905.000,00	152.905.000,00			185.000.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	36.386.000,00	36.386.000,00	35.408.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	126.519.000,00	116.519.000,00	41.479.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	-			100 Persen	100 % 24.06 %	2.287.011.300,00	2.282.011.300,00	2.282.011.300,00			2.565.000.000,00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30 Perkara	30 Perkara	127.110.500,00	122.110.500,00	63.857.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				30 Perkara	30 Perkara	34.170.300,00	34.170.300,00	29.805.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		65.000.000,00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				11 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10000 Orang	10000 Orang	2.125.730.500,00	2.125.730.500,00	2.117.351.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.200.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Mandiri				26,31 %	18.75 %	289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Transmigran Yang mendapatkan informasi Pelatihan Kerja Jumlah Transmigran Yang Menghasilkan Produk Barang/Jasa	-			5 Kawasan Wilayah	160 Orang 24 Orang 34 %	289.661.500,00	289.661.500,00	289.661.500,00			450.000.000,00
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman												
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				128 Kepala Keluarga	128 Kepala Keluarga	289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman												
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				3 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	J U M L A H							12.053.888.223,00	12.318.807.188,00	11.624.381.858,00			13.458.176.100,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banjar 2025-2029.

Sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu Restra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Disnakertran Kabupaten Banjar Tahun 2025 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 Disnakertran Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh rencana kerja perubahan tersebut.

2. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk mengarahkan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan.
3. Penentuan Prioritas: Menentukan prioritas perubahan yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Perencanaan Taktis: Rinci langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan
5. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan perubahan yang akurat dan efektif.
6. lokasi Sumber Daya: Menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disnakertran Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Evaluasi situasi saat ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, identifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi.
2. Tujuan dan Sasaran: menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta sasaran yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan waktu-batas (SMART) untuk perubahan yang diinginkan.
3. Strategi Perubahan: Merencanakan strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang akan melibatkan perubahan struktural, program pelatihan, peningkatan layanan, atau langkah-langkah lainnya.
4. Kegiatan dan Rencana Aksi: Membuat rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi: menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan keberhasilan

rencana kerja. Serta mengatur sistem untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara berkala.

6. Anggaran: Menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan kegiatan yang real dilaksanakan berkesesuaian dengan pencapaian target Ranwal RPJMD. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja Disnakertran Tahun 2025 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Martapura, Mei 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banjar,



Hj. ST. MAHMUDAH, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19751108 199903 2 005

12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan RENJA Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA Perubahan ini. Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Semoga penyusunan RENJA Perubahan ini bermanfaat bagi perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan yang dibuat berdasarkan dokumen RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025.

BAB I

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan akan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan-APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 terlebih dahulu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berkenaan hal tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahap, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan dibidang ketahanan pangan dan perikanan merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2025.

Tahapan penyusunan rencana kerja Perubahan SKPD dimulai dari Penyusunan Perubahan Renja menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi dapat diakses melalui <https://banjarkab.sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada menu perencanaan (RKPD) 2025.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 Dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar termasuk dalam Indikator Kinerja dan Program Prioritas Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu Misi 2 “Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan” dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pola Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola

Pangan harapan (PPH) Konsumsi dan Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan untuk mencapai target selama 5 tahun kedepan dengan tahapan awal tahun 2025 , maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025.

Untuk Mendukung visi dan misi dan mencapai Sasaran dan Indikator serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar melaksanakan 9 (sembilan) Program Kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (sasaran program) yaitu :

1. Rasio Ketersediaan Pangan;
2. Angka Kecukupan Energi (AKE);
3. Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan;
4. Persentase Keamanan Pangan.
5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
6. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
7. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan di Bidang Perikanan
8. Jumlah Produksi Olahan
9. Indeks Kepatuhan Kinerja Intern

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 ini mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
- f. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2023 adalah terkait perubahan SOTK sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 TAHUN 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan sebagai acuan kerja dalam pembuatan RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025, sebagai acuan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025, serta mengakomodasi perencanaan masyarakat di bidang pangan dan perikanan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar yang di dalamnya tertuang tujuan, input, output, outcome dan manfaat yang akan dicapai pada tahun 2025 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lebih lanjut tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagaimana dalam amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, disebutkan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih
- b. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- c. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2025 bagi jajaran birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar;
- c. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan ketahanan pangan secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar;
- d. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
- e. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar 2025-2029. Dalam penyusunan perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi;

Daftar Tabel;

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

II. EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar tahun 2025 telah melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi dengan capaian kinerja Fisik sebesar 23,6 % dan Keuangan sebesar 13,4 %, Capaian ini masih rendah dari target dikarenakan proses penetapan DPA dan bertepatan dengan bulan ramadhan dan cuti bersama Idul Fitri .Uraian realisasi program dan kegiatan yang mendukung target kinerja yang direncanakan seperti tabel capaian berikut :

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Targ et	Realisa si	Deviasi	Target (RP)	Targe t (%)	Realisasi (RP)	Realisa si (%)	Deviasi				
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.413.034.983	23,6	23,6	0	3.722.056.823	35,74	2.027.428.312	19,47	16,27				
1.1	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.733.600	31,69	31,69	0	26.538.000	41	0	0	41				
1.1.1	2.09.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.504.600	32	32	0	18.212.000	36,06	0	0	36,06	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Perencanaan	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 15 Laporan dari 35 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja (LKPJ) Tahun 2024 2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja (LKJIP) Tahun 2024

															(LKjIP) Tahun 2024
															9. Penyusunan Dokumen Pelaporan (LPPD) Tahun 2024 10. Penandatan ganan , pencetakkan , dan penyerahan dokumen pelaporan kepada pihak terkait. 11. Rapat rutin persiapan Laporan Triwulan Faktor Penghamba t: keterlambat an dalam pengumpula n data ataupun laporan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik sehingga pengumpula n data dapat dilakukan
1.1.2	2.09.01.2.01.008	Penyelenggaraa n Walidata Pendukung	7.545.000	32	32	0	4.163.000	55,18	0	0	55,18	Kabupat en Banjar	PLT.Sekretari s - Kasubag Perencanaan	1. Jumlah Dokumen Hasil	Tahapan pekerjaan (fisik) yang

		Statistik Sektoral Daerah												Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen	sudah dilakukan: 1. Pengumpula n data Tahun 2024 2. Desk dengan Bappedalitb ang terkait pengisian e- walidata 3.Mengisi Metode pengumpula n data, jadwal rilis dan jadwal pemutakhir an Faktor Penghamba t: keterlambat an pengumpula n data dan laporan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dari pimpinan sehingga data dan laporan bisa dikumpulka n
1.1.3	2.09.01.2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6.684.000	29	29	0	4.163.000	62,28	0	0	62,28	Kabupat en Banjar	PLT.Sekretari s - Kasubag Perencanaan	1. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

														Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah : Data dari 144 Data	1. Meminta data pada bidang-bidang di DKPP untuk mengisi sesuai format satu data 2. Koordinasi terkait hasil isian data bidang di aplikasi satu data 3. mengisi data pada aplikasi satu data kabupaten Banjar Faktor Penghambat: ada gangguan pada aplikasi Faktor Pendukung: maintenance pada aplikasi dilakukan dengan baik
1.2	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.823.372.600	23,85	23,85	0	1.911.165.912	28,01	1.842.178.312	27	1,01				
1.2.1	2.09.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.567.800.000	23,75	23,75	0	1.842.178.312	28,05	1.842.178.312	28,05	0	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Keuangan dan Aset	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

														ASN : 45 Orang/Bulan dari 45 Orang/Bulan	Persiapan pelaksanaan atas pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN (Pembuatan Template dan daftar gaji) Faktor Penghambat: 1. Adanya perubahan mekanisme pembayaran dari kemendagri 2. Aplikasi yang gangguan dan kendala jaringan Faktor Pendukung: 1. Dokumen yang lengkap 2. Dana Tersedia
1.2.2	2.09.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif	236.940.000	25	25	0	59.235.000	25	0	0	25	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Keuangan dan Aset	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		ifikasi Keuangan SKPD												rifikasi Keuangan SKPD : 2 Dokumen dari 12 Dokumen	Persiapan pelaksanaan atas Honorarium Penanggungj awaban Pengelola Keuangan (Pembuatan Daftar Honorarium Penanggungj awaban Pengelola Keuangan) Faktor Penghamba t: 1. Maintenance aplikasi 2. Kendala jaringan Faktor Pendukung: 1. Dokumen yang lengkap 2. Dana Tersedia
1.2.3	2.09.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.082.700	100	100	0	6.082.700	100	0	0	100	Kabupat en Banjar	PLT.Sekretari s - Kasubag Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi internal, pembagian tugas dan penyusunan jadwal pelaksanaan atas sub kegiatan

														laporan keuangan
														2. Pembuatan LRA 3. Pembuatan LO 4. Pembuatan LPE 5. Pembuatan Neraca 6. Pembuatan CaLK Faktor Penghambat: 1. Menunggu perhitungan penyusutan nilai aset dari BPKPAD Faktor Pendukung: 1. Dokumen yang Lengkap
1.2.4	2.09.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.549.900	20	20	0	3.669.900	29,24	0	0	29,24	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan bahan untuk rekon laporan triwulanan

													Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD : Laporan dari 18 Laporan	dan semesteran SKPD Faktor Penghambat: 1. Penyampaian SPJ yang terlambat dan kurang lengkap 2. Aplikasi yang mengalami gangguan dan kendala jaringan Faktor Pendukung: 1. Dokumen yang lengkap 2. Dana Tersedia
1.3	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.961.800	17	17	0	4.411.800	63,37	0	0	63,37			
1.3.1	2.09.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.961.800	17	17	0	4.411.800	63,37	0	0	63,37	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Keuangan dan Aset	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 4 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan bahan untuk rekon laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

															Faktor Penghambat: 1. Penyampaian SPJ yang terlambat dan kurang lengkap 2. Aplikasi yang mengalami gangguan dan kendala jaringan Faktor Pendukung: 1. Dokumen yang lengkap 2. Dana Tersedia
1.4	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	15	15	0	0	0	0	0	0				
1.4.1	2.09.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	15	15	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 0 Orang dari 5 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Konsultasi dengan pejabat pelaksana 2. Pencarian informasi bimtek Faktor Penghambat: 1. Mencari bimtek yang sesuai

														2. Belum ada kepastian dari penyelenggara bimtek mengenai jadwal Faktor Pendukung: 1. Anggaran yang tersedia mencukupi
1.5	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.019.938.500	15	15	0	781.649.620	76,64	0	0	76,64			
1.5.1	2.09.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.876.000	15	15	0	522.876.000	100	0	0	100	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 14 Paket dari 14 Paket Faktor Penghambat: 1. Setiap pemesanan barang harus menggunakan ecatalog, sedangkan ecatalog saat ini belum bisa digunakan Faktor Pendukung:

														1. Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga 2. Tersedianya anggaran yang mencukupi
1.5.2	2.09.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.727.000	15	15	0	16.285.000	68,63	0	0	68,63	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 5 Paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Merencanakan pembelian bahan logistik Faktor Penghambat: 1. Setiap pemesanan barang harus menggunakan ecatalog, sedangkan ecatalog saat ini belum bisa digunakan Faktor Pendukung: 1.Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga 2. Tersedianya anggaran yang mencukupi

1.5.3	2.09.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.333.500	15	15	0	15.694.220	61,95	0	0	61,95	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Merencanakan pemesanan barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: 1. Tidak ada hambatan pada kegiatan ini Faktor Pendukung: 1. Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga 2. Tersedianya anggaran yang mencukupi
1.5.4	2.09.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.002.000	15	15	0	226.794.400	50,62	0	0	50,62	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menyusun rencana rapat rutin bulanan atau triwulanan 2. Pelaksanaan

																		Rapat bulanan
																		3.Telaahan staf Nota Dinas untuk Rapat dan Perjalanan Dinas dalam Daerah
																		4.Telaahan staf Nota Dinas untuk Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
																		5.Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
																		6.Pembuatan Surat Tugas dan Undangan
																		7.Pelaksanaan Kegiatan
																		8.Laporan Kegiatan
																		Faktor Penghambat:
																		1. Undangan rapat koordinasi yang terkadang bersifat dadakan yang tidak terencana
																		2 Jadwal rapat yang bentrok dengan jadwal

															kegiatan bidang
															Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan dari pimpinan untuk pelaksanaan rapat koordinasi 2..Baiknya koordinasi pimpinan dan kabin dalam merencanakan rapat
1.6	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.566.483	25,79	25,79	0	349.079.991	28,48	185.250.000	15,12	13,36				
1.6.1	2.09.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	100	100	0	5.700.000	100	0	0	100	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan pembelian materai 2. Pencarian Informasi Harga 3. Pembelian Materai Faktor Penghambat: Belum adanya kendala

															Faktor Pendukung: 1. Terdapat hubungan baik dengan pihak ketiga 2. Tersedianya anggaran yang mencukupi
1.6.2	2.09.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.464.483	23	23	0	42.639.991	27,43	0	0	27,43	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menerima dan mengumpulkan surat tagihan dari BUMN terkait Faktor Penghambat: 1. Tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan ini Faktor Pendukung: 1. Anggaran yang tersedia mencukupi
1.6.3	2.09.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.064.402.000	25,8	25,8	0	300.740.000	28,25	185.250.000	17,4	10,85	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan Telaahan Staf

														dari 1 Laporan	2. Terbayarnya jasa tenaga (PTT) khusus pembenihan untuk bulan februari 3. Terbayarnya jasa tenaga (PTT) khusus tenaga adminstrasi untuk bulan februari 4. Terbayarnya jasa tenaga (PTT) khusus tenaga kebersihan untuk bulan februari 5. Terbayarnya jasa tenaga (PTT) khusus tenaga keamanan untuk bulan februari 6. Terbayarnya jasa tenaga (PTT) khusus tenaga sopir untuk bulan februari 7. Terbayarnya iuran jaminana
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---

														kesehatan bagi non ASN untuk february 8. Terbayarnya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Faktor Penghambat: 1. Proses administrasi yang memakan waktu Faktor Pendukung: 1. Anggaran yang tersedia mencukupi
1.7	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.462.000	27,45	27,45	0	649.211.500	54,44	0	0	54,44			
1.7.1	2.09.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.750.000	35	35	0	10.687.500	25	0	0	25	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 0 Unit dari 1 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Membuat telaahan staf untuk kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan

															Dinas atau kendaraan dinas jabatan
															2. Membuat Nota permintaan dana 3. Pembelian bahan bakar mobil jabatan Faktor Penghambat: 1. Dalam pemeliharaan terkait dengan sparpert lumayan mahal Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi 2. Informasi terkait dengan pemeliharaan kendaraan yang menangani cukup baik
1.7.2	2.09.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	686.340.000	23,25	23,25	0	209.088.000	30,46	0	0	30,46	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 19 Unit dari 73 Unit	1.menerima dan memeriksa Blanko Permohonan servis, suku cadang, dan BBM 2.Pendataan masa berlaku surat menyurat kendaraan dinas 3.Konsultasi pihak terkait mengenai hal yang berkaitan dengan surat menyurat kendaraan dinas 4.Pelengkap an berkas syarat perpanjangan Surat Menyurat kendaraan dinas 5.Melayani Permintaan BBM 6.Memasukan kendaraan dinas operasional ke bengkel yang berkerjasama untuk di service
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

[illegible]

														2. Kendaraan dinas yang pelihara sudah agak tua, banyak usia kendaraan yang diatas 5 tahun 3. Proses administrasi terlalu lama Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi 2. Jadwal pemeliharaa n yang rutin
1.7.3	2.09.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.660.000	13	13	0	6.532.000	20	0	0	20	Kabupat en Banjar	PLT.Sekretari s - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 12 Unit dari 46 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Perencaanaa n pemeliharaa n peralatan dan mesin lainnya 2. Membuat Telaahan staf semua peralatan dan mesin yang akan dipelihara 3. Peninjauan dan pengecekan

														kondisi peralatan dan mesin lainnya 4. Melakukan perbaikan/pemeliharaan peralatan yang rusak Faktor Penghambat: 1. Sparepart peralatan yang sudah tidak rilis dikarenakan usia peralatan yang sudah tua Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi
1.7.4	2.09.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.760.000	13	13	0	1.952.000	20	0	0	20	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : 4 Unit dari 16 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Memeriksa alat kantor dan mesin kantor 2. Persiapan pemeliharaan aset tetap lainnya 3. Pelaksanaan pemeliharaan

														aset tetap lainnya
														4. Pelaporan pemeliharaan aset tetap lainnya Faktor Penghambat: 1. Tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan ini Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi
1.7.5	2.09.01.2.09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.952.000	35	35	0	420.952.000	100	0	0	100	Kabupaten Banjar	PLT.Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi : 0 Unit dari 14 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pendataan dan Pemeriksaan Gedung yang akan direhabilitasi Faktor Penghambat: 1. Gedung dan bangunan sudah agak tua Faktor Pendukung:

															1. Tersedianya anggaran yang mencukupi
2	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	761.982.084	75,62	20	55,62	543.776.484	71,36	0	0	71,36				
2.1	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	761.982.084	75,62	20	55,62	543.776.484	71,36	0	0	71,36				
2.1.1	2.09.02.2.01.003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	712.299.984	79,5	20	59,5	532.885.484	74,81	0	0	74,81	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan KAK Kegiatan 2. Pembuatan SK Tim Pelaksana 3. Menyusun Jadwal Pembangunan dan Monitoring LPM

[illegible]

2.1.2	2.09.02.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.682.100	20	20	0	10.891.000	21,92	0	0	21,92	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan KAK Kegiatan 2. Pembuatan SK Tim Pelaksana 3. Menyusun Jadwal Kegiatan dan Monitoring LPM 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dokumen LPM 5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan 6. Melaksanakan Monitoring Lumbung dan Kelompok Lumbung
-------	------------------	---	------------	----	----	---	------------	-------	---	---	-------	------------------	---	---	--

[illegible]

															menambah pengetahuan terkait pengelolaan stok lumbung pangan yang baik
3	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.955.129.700	24,6	24,25	0,35	170.848.100	8,74	0	0	8,74				
3.1	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	322.033.300	57,5	55,63	1,87	134.010.100	41,61	0	0	41,61				
3.1.1	2.09.03.2.01.002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.248.800	14	14	0	2.454.000	13,45	0	0	13,45	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

															2. Membuat SK Kegiatan/TI M Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Membuat Persiapan SPJ Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Faktor Penghambat: Rencana pelaksanaan di TW.2 Faktor Pendukung: â€¢ Sudah siap SDM melaksanakan kegiatan
3.1.2	2.09.03.2.01.008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	257.972.900	62,5	62,5	0	113.958.900	44,17	0	0	44,17	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Membuat SK Kegiatan/TI

													M Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3. Membuat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 5. Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Faktor Penghambat: Pelaksanaan dilakukan selama 1 tahun anggaran dan pada keadaan tertentu Faktor Pendukung: Sudah siap SDM melaksanakan kegiatan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.3	2.09.03.2.01.010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kot a	26.063.200	60	40	20	9.062.700	34,77	0	0	34,77	Kabupat en Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan : Unit dari 19 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaa n dan Jaringan Distribusi Pangan 2. Membuat SK Kegiatan/TI M Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaa n dan Jaringan Distribusi Pangan 3. Menyusun Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaa n dan Jaringan Distribusi Pangan 4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembang
-------	------------------	--	------------	----	----	----	-----------	-------	---	---	-------	-------------------	--	---	---

															an Kelembagaa n dan Jaringan Distribusi Pangan 5. Mulai Melaksanak an Kegiatan Pengembang an Kelembagaa n dan Jaringan Distribusi Pangan Faktor Penghamba t: Pengurus LDPM kadang tidak berada ditempat saat mau melakukan kegiatan Faktor Pendukung: Sudah siap SDM Melaksanak an Kegiatan
3.1.4	2.09.03.2.01.0 012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kot a	6.322.500	27	25	2	3.938.500	62,29	0	0	62,29	Kabupat en Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/K ota : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Informasi Harga Pangan

														2. Membuat SK Kegiatan/TI M Kegiatan Informasi Harga Pangan 3. Menyusun jadwal Kegiatan Informasi Harga Pangan Faktor Penghambat: Laporan dikumpulkan selama 1 tahun Faktor Pendukung: Sudah siap SDM melaksanakan kegiatan
3.1.5	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.425.900	30	25	5	4.596.000	34,23	0	0	34,23	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan KAK Kegiatan 2. Pembuatan SK Tim Pelaksana 3. Pesiapan form data dan aplikasi 4. Koordinasi dan

															Sinkroniasi data 5. Melaksanakan Penyampaian form data 6. Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi data Faktor Penghambat: - Form data manual masih tidak sesuai dengan form data online Faktor Pendukung: - Tersedianya data dukung sementara untuk beberapa komoditas pangan sebagai data dukung ketersediaan
3.2	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	587.748.700	10	10	0	0	0	0	0	0				
3.2.1	2.09.03.2.02.003	Pengadaan Cadangan Pangan	587.748.700	10	10	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan	1. Jumlah Cadangan Pangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang

		Pemerintah Kabupaten/Kota									Distribusi Pangan - Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Pemerintah Kabupaten/Kota : Ton dari 35 Ton	sudah dilakukan: 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Cadangan Pangan 2. Membuat SK Kegiatan/TIM Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Cadangan Pangan 3. Menyusun jadwal Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Cadangan Pangan Faktor Penghambat: â€¢ Rencana Pelaksanaan dilakukan di TW.II Faktor Pendukung: â€¢ SDM sudah siap melaksanakan dan
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

															masih terus berkoordinasi
3.3	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.045.347.700	22,68	22,6	0,08	36.838.000	3,52	0	0	3,52				
3.3.1	2.09.03.2.04.002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	984.887.700	23	23	0	33.894.000	3,44	0	0	3,44	Kabupaten Banjar	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : Laporan dari 6 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tahap Persiapan : a. Menyusun KAK, SK, SOP, dan Administrasi Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penumbuhan, Pembinaan, Penyuluhan

													n Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Pangan Lokal;
													2. Tahap Pelaksanaan : - Melaksanakan kegiatan Penumbuhan,Pembinaan, Penyuluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Pangan Lokal; - Melaksanakan aktivitas Obor Pangan Lestari (OPAL); Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - Adanya arahan, koordinasi dan kerjasama tim internal

															DKPP yang baik; 2. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak Aparat Desa yang baik;
3.3.2	2.09.03.2.04.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	60.460.000	17,5	16	1,5	2.944.000	4,87	0	0	4,87	Kabupaten Banjar	Kabid Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Pengankaragaman Konsumsi Pangan	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tahap Persiapan : a. Menyusun KAK,SK,SOP ,dan Administrasi Kegiatan Koordinasi danSinkronisasiPemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun; b. Menyusun daftar lokasi pelaksanaan kegiatan; Faktor Penghambat: Penyesuaian sistem yang baru Faktor Pendukung:

															1. Adanya arahan, koordinasi dan kerjasama tim internal DKPP yang baik; 2. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak Aparat Desa yang baik;
4	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	128.062.700	14,1	13,41	0,69	17.695.000	13,82	0	0	13,82				
4.1	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	26.336.200	28	15	13	7.543.000	28,64	0	0	28,64				
4.1.1	2.09.04.2.01.001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	26.336.200	28	15	13	7.543.000	28,64	0	0	28,64	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan KAK Kegiatan 2. Pembuatan SK Tim Pelaksana 3. Persiapan form data dan penyusunan jadwal kegiatan

														4. Penyaluran Form data dukung 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Data Faktor Penghambat: - Data dari dinas terkait belum update (memakai data lama) Faktor Pendukung: - Adanya penggunaan aplikasi baru yang memudahkan operator dalam pengolahan data dan penyusunan laporan
4.2	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.726.500	10,5	13	-2,5	10.152.000	9,98	0	0	9,98			
4.2.1	2.09.04.2.02.002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	101.726.500	10,5	13	-2,5	10.152.000	9,98	0	0	9,98	Kabupaten Banjar	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kasi Ketersediaan dan	1. Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan KAK Kegiatan

		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									Kerawanan Pangan	Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	2. Pembuatan SK Kegiatan 3. Menyusun Jadwal CPCL dan Sasaran Kegiatan 4. Melaksanak an CPCL 5. Melaksanak an Koordinasi Faktor Penghambat: - Lokasi desa rawan pangan cukup sulit untuk dijangkau, bahkan terkadang kendaraan roda 4 tidak dapat masuk ke lokasi Faktor Pendukung: - Adanya peta FSVA sebagai acuan dalam pemberian bantuan terhadap desa-desa yang rawan pangan
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

5	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	104.405.00 0	32,5	32,5	0	26.314.50 0	25,2	0	0	25,2				
5.1	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Ko ta	104.405.00 0	32,5	32,5	0	26.314.50 0	25,2	0	0	25,2				
5.1.1	2.09.05.2.01.0 004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot a	104.405.000	32,5	32,5	0	26.314.500	25,2	0	0	25,2	Kabupat en Banjar	Kabid Penganekara gaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Keamanan Pangan	1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/K ota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menyusun SK Sub Kegiatan dan Tim OKKPD 2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja 3. Menyusun SOP Kegiatan 4. Menyusun Lokus Pelaksanaan Sub Kegiatan 5. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan

[illegible]

															1. Kerjasama dan koordinasi yang baik pada tim pelaksana Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. 2. Kerjasama dan koordinasi yang dengan mitra kerja untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
6	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	431.674.200	14,15	14,15	0	45.402.000	10,52	0	0	10,52				
6.1	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	127.279.400	6,61	6,61	0	2.928.000	2,3	0	0	2,3				

6.1.1	3.25.03.2.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	35.384.000	5,6	5,6	0	2.000.000	5,65	0	0	5,65	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Tangkap - Kasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Identifikasi jenis dan informasi data sumberdaya ikan yang akan disajikan 2. Persiapan dokumen alat pengumpulan data berupa form Faktor Penghambat: 1. Ketepatan waktu untuk melakukan kegiatan pengumpulan data 2. Pelaku usaha tidak berada ditempat pada waktu pendataan Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan dari masyarakat dan instansi terkait dalam pendataan.
-------	------------------	--	------------	-----	-----	---	-----------	------	---	---	------	------------------	--	--	---

															2. Masyarakat mulai mengerti pentingnys tujuan dan manfaat dari pendataan
6.1.2	3.25.03.2.01.002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	91.895.400	7	7	0	928.000	1,01	0	0	1,01	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Tangkap - Kasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia : 0 Unit dari 36 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan Data. 2.. Koordinasi dengan pihak terkait. Faktor Penghambat: 1. Nelayan memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap. 2. Nelayan memiliki keterbatasan alat tangkap yang digunakan. Faktor Pendukung: 1. Masih banyak pelaku usaha yang

															aktif sebagai nelayan.
															2. Melimpahnya sumber daya ikan pada musim-musim tertentu.
6.2	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	228.135.300	19,74	19,74	0	39.474.000	17,3	0	0	17,3				
6.2.1	3.25.03.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	67.054.000	27,06	27,06	0	19.474.000	29,04	0	0	29,04	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Tangkap - Kasi Kenelayanan dan Perizinan	1. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya : 0 Orang dari 100 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Berkordinasi dengan pihak terkait 2. Mempersiapkan calon kelompok nelayan yang akan di beri pembinaan berupa pelatihan 3. Menyusun jadwal identifikasi, sosialisasi peningkatan kapasitas nelayan kecil

															Faktor Penghambat: 1. Masih kurangnya pemahaman nelayan tentang kelembagaan serta pola pikirnya karena tingkat pendidikan yang rendah dalam memanfaatkan potensi perikanan tangkap yang lestari Faktor Pendukung: 1. Dana APBD 2. Keinginan dan kesadaran masyarakat nelayan untuk berkelompok agar bisa meningkatkan kapasitasnya dalam kelompoknya
6.2.2	3.25.03.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	104.260.800	16,34	16,34	0	18.000.000	17,26	0	0	17,26	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Tangkap - Kasi Kenelayanan	1. Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		Kelembagaan Nelayan Kecil										dan Perizinan	Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan ny : 0 Kelompok dari 15 Kelompok	1. Identifikasi kelompok nelayan kecil yang di fasilitasi pembentuka n dan pengembang an kelembagaa nnya. 2. Idenfikasi potensi dan sosialisasi dengan masyarakat 3. Penyiapan Berkas Dokumen Syarat Pembentuka n Kelompok 4. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembentuka n dan Pengembang an Kelompok Faktor Penghamba t: 1. Lokasi jangkauan menuju desa nelayan sangat jauh dan menggunak an transportasi air dalam
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															1. Keterlambatan dari pihak peminjam untuk melunasi tunggakan 2. Belum adanya permohonan yang masuk Faktor Pendukung: 1. Adanya program kurma manis yang dapat disalurkan kepada masyarakat nelayan perikanan tangkap 2. Adanya program SEHAT Nelayan dari Provinsi Kalimantan Selatan
6.3	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	76.259.500	10	10	0	3.000.000	3,93	0	0	3,93				

		Kabupaten/Kota												
6.3.1	3.25.03.2.06.003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	76.259.500	10	10	0	3.000.000	3,93	0	0	3,93	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Tangkap - Kasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan : 0 Rekomendasi dari 30 Rekomendasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan dan memperbanyak blangko permohonan 2. Pemeriksaan berkas permohonan pas kecil yang telah masuk. 3. Input permohonan pas kecil yang bersangkutan pada aplikasi pas kecil dan menunggu verifikasi dari KSOP Banjarmasin Faktor Penghambat: 1. Tidak lengkapnya berkas pemohon.

															2. Aplikasi Pas kecil yang sering error. Faktor Pendukung: 1. Banyaknya permohonan dalam pembuatan pas kecil.
7	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	847.937.500	54,06	25,45	28,61	326.279.000	38,48	0	0	38,48				
7.1	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	142.398.500	23,41	23,41	0	35.213.000	24,73	0	0	24,73				
7.1.1	3.25.04.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	68.561.000	26	26	0	21.068.500	30,73	0	0	30,73	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pemberdayaan dan Perizinan	1. Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan : 0 Kelompok dari 10 Kelompok 2. Penyiapan berkas dokumen syarat pembentukan 3. koordinasi persiapan pelaksanaan pembentuka	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan calon kelompok pembudidaya ikan yang akan dibentuk dan dikembangkan 2. Penyiapan berkas dokumen syarat pembentukan 3. koordinasi persiapan pelaksanaan pembentuka

														Pembudidaya ikan dibantu oleh penyuluh perikanan wilayah setempat untuk membentuk Kelompok Perikanan Budidaya dengan membantu melengkapi syarat-syarat pembentukan kelompok perikanan budidaya
7.1.2	3.25.04.2.02.004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	73.837.500	21	21	0	14.144.500	19,16	0	0	19,16	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pemberdayaan dan Perizinan	1. Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan : 1 Kelompok dari 10 Kelompok Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan calon kelompok pembudidaya ikan yang akan diberi pendampingan berupa pelatihan budidaya ikan 2. Persiapan materi pelatihan, narasumber dan bahan praktek untuk pelatihan budidaya ikan

[illegible]

															Perlu adanya koordinasi dengan pembudiya ikan untuk persiapan jadwal kegiatan pelatihan budidaya ikan. Pembudidaya ikan ingin mengadakan pelatihan setelah bulan puasa berakhir. Faktor Pendukung: Beberapa usulan permintaan pelatihan budidaya ikan yang berasal dari pembudidaya ikan ataupun pihak Desa telah masuk ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.2	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.643.000	20	20	0	11.261.500	22,69	0	0	22,69				

7.2.1	3.25.04.2.03.002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	49.643.000	20	20	0	11.261.500	22,69	0	0	22,69	Kabupat en Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pemberdayaa n dan Perizinan	1. Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/K ota : 20 Rekomendasi dari 100 Rekomendasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan SOP berupa alur rekomendasi TDPIK 2. Persiapan calon pembudiday a ikan yang akan diajukan TDPIK 3. Persiapan formulir pengajuan TDPIK dan syarat-syarat yang harus dipenuhi Faktor Penghambatan: Menunggu Pembudiday a ikan untuk melengkapi berkas syarat pengajuan TDPIK dan perlu adanya verifikasi dan identifikasi persyaratan pengajuan TDPIK Faktor Pendukung:
-------	------------------	--	------------	----	----	---	------------	-------	---	---	-------	-------------------	---	---	---

														Telah dilakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan untuk membantu dan memberikan informasi kepada pembudidaya ikan mengenai alur pengusulan rekomendasi TDPIK dan membantu para pembudidaya ikan untuk melengkapi syarat pengajuan pengajuan TDPIK	
7.3	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	655.896.000	63,29	26,3	36,99	279.804.500	42,66	0	0	42,66				
7.3.1	3.25.04.2.04.001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.921.500	90	25	65	107.921.500	100	0	0	100	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pengelolaan Pembudidayaan	1. Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SK, KAK, dan Telaahan Staf Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi

													Pembudidaya Ikan
													2.Koordinasi kegiatan ke lembaga penyedia data dan Informasi Pembudidayaan Ikan 3.Menindaklanjuti Surat Permohonan Untuk Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Faktor Penghambat: minimnya partisipasi pembudidaya dalam memberikan informasi / melaporkan data mereka Faktor Pendukung: 1. Data Pembudidayaan Ikan 2. Tersedianya Dana APBD 3. KOordinasi yang efektif dengan

														instansi terkait
7.3.2	3.25.04.2.04.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.395.000	96,25	25	71,25	15.995.000	8,4	0	0	8,4	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pengelolaan Pembudidayaan	1. Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : Unit dari 50 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SK, KAK, dan Telaahan Staf Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 2. Koordinasi dengan penyuluh perikanan dan pembudidaya ikan 3. Menindaklanjuti Surat Permohonan Untuk Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Faktor Penghambat: belum adanya penyedia/pihak ketiga Faktor Pendukung:

														1. Data Pembudidaya Ikan 2. Dana APBD 3. Kerjasama dengan pihak terkait
7.3.3	3.25.04.2.04.004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.660.000	90,75	30	60,75	82.245.000	81,71	0	0	81,71	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pengelolaan Pembudidayaan	1. Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SK, KAK, Telaahan Staf dan Surat Pesanan 2. Koordinasi dengan pengawas perikanan, penyuluh perikanan dan pembudidaya ikan 3. Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan 4. Pemeriksaan kualitas air dan ikan Faktor Penghambat:

[illegible]

														1. Data Pembudidayaan Ikan 2. Dana APBD 3. Kerjasama dengan unit terkait
7.3.4	3.25.04.2.04.009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.461.000	6	20	-14	42.417.000	22,15	0	0	22,15	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pengelolaan Pembudidayaan	1. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : 12 Unit dari 53 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan Induk Ikan (Pemberian pakan, pemeliharaan kualitas air, seleksi induk ikan) 2. Perkawinan dan pemijahan induk ikan 3. Pemeliharaan Larva ikan 4. Pendederan benih ikan 5. Panen Benih Ikan 6. Distribusi Benih Ikan Faktor Penghambat: 1. Perubahan cuaca yang ekstrem

															(panas hujan tidak menentu) 2. Perubahan Kualitas Air sumber irigasi (diduga aktifitas di daerah hulu) 3. Umur induk sudah mendekati Expired (Tahun ke-4) 4. Tenaga Teknis terbatas 5. Tenaga Ahli Perikanan terbatas Faktor Pendukung: 1. Anggaran Belanja Barang Tersedia 2. Sarana prasarana budidaya perikanan tersedia 3. kolaborasi multipihak terjalin dengan baik
7.3.5	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	65.458.500	48,75	45	3,75	31.226.000	47,7	0	0	47,7	Kabupaten Banjar	Kabid Perikanan Budidaya - Kasi Pengelolaan	1. Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

												Pembudidaya an	dan Pemantauan Pembudidaya an Ikan di Darat : 20 Unit dari 100 Unit	1. Penyusunan SK, KAK,dan Telaahan Staf Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat 2.Koordinasi dengan pengawas perikanan, penyuluh perikanan dan pembudiday a ikan 3.Menindakl anjuti Surat Permohonan Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat 4.Persiapan dokumen pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat 5.Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---	---

[illegible]

															1. Data Pembudidayaan Ikan 2. Dana APBD 3. Kerjasama dengan unit terkait
8	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	153.339.000	25,4	24,87	0,53	2.298.500	1,5	0	0	1,5				
8.1	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	153.339.000	25,4	24,87	0,53	2.298.500	1,5	0	0	1,5				
8.1.1	3.25.05.2.01.004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	54.900.000	44,31	44,31	0	578.500	1,05	0	0	1,05	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota : 30 Pelaku Usaha dari 120 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan 2. Penyusunan Telaahan Staf 3. Penyusunan SK Tim

															Pelaksana Kegiatan
															4. Penyusunan Jadwal Identifikasi dan Pelaksanaan Kegiatan Faktor Penghambat: 1. Penyesuaian dengan sitem surat menyurat yang baru 2. Penyesuaian dengan penerapan sistem aplikasi baru 3. DPA Belum Terbit Sebagai Dasar Pengajuan Dana Kegiatan 4. Penentuan lokasi kegiatan sosialisasi 5. Masih dalam proses koordinasi dengan pihak sasaran

															Faktor Pendukung: 1. Adanya Pengawas Bidang Pembudidayaan Ikan
8.1.2	3.25.05.2.01.006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kot a	14.941.000	0,37	0,37	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota : Pelaku Usaha dari 60 Pelaku Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan Tersusunnya Telaahan Staf Tersusunnya bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan Teridentifikasi rencana lokasi/titik kegiatan Faktor Penghambat: 1. Kurangnya SDM 2. DPA Belum Terbit Sebagai Dasar Pengajuan Dana Kegiatan Faktor Pendukung:

8.1.3	3.25.05.2.01.007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	60.243.000	22,84	22,84	0	720.000	1,2	0	0	1,2	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota : Pelaku Usaha dari 50 Pelaku Usaha	1. Data yang tersedia Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan 2. Tersusunnya Telaahan Staf 3. Tersusunnya bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan 4. Teridentifikasi rencana lokasi/titik kegiatan Faktor Penghambat: 1. Penyesuaian dengan penerapan sistem aplikasi baru 2. DPA Belum Terbit Sebagai Dasar Pengajuan
-------	------------------	---	------------	-------	-------	---	---------	-----	---	---	-----	------------------	--	---	--

															Dana Kegiatan
															3. Penentuan lokasi kegiatan sosialisasi Faktor Pendukung: 1. Adanya Database KUSUKA 2. Beberapa tempat sudah terbentuk POKMASWA S
8.1.4	3.25.05.2.01.009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	23.255.000	3,48	0	3,48	1.000.000	4,3	0	0	4,3	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk : Orang dari 50 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan Faktor Penghambat: 1. Kurangnya SDM 2. DPA Belum Terbit Sebagai Dasar Pengajuan Dana Kegiatan Faktor Pendukung:

															1. Data yang tersedia
9	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	334.044.800	25,23	25,23	0	15.591.000	4,67	0	0	4,67				
9.1	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.765.900	5	5	0	0	0	0	0	0				
9.1.1	3.25.06.2.01.005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	10.765.900	5	5	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pembinaan, Usaha dan Investasi	1. Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan KAK Pembuatan Telaahan Rapat Dan koordinasi Faktor Penghambat: - Aplikasi yang kurang lancar (tidak stabil) Faktor Pendukung: - Tersedianya data - koordinasi dan kerjasama yang baik dengan

															pihak terkait
9.2	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	115.160.900	17,5	17,5	0	9.967.000	8,65	0	0	8,65				
9.2.1	3.25.06.2.02.002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	115.160.900	17,5	17,5	0	9.967.000	8,65	0	0	8,65	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Pembinaan, Usaha dan Investasi	1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko : 35 Unit Usaha dari 200 Unit Usaha 1. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko : 35 Unit Usaha dari 200 Unit Usaha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan Telaahan Staf 2. Rapat Koordinasi 3. Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Fasilitasi berupa Sosialisasi Akses Modal dan Asuransi Bagi Pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Pembuatan Laporan

															Faktor Penghambat: - Aplikasi kurang lancar - literatur narasumber kurang banyak - Kebijakan efisiensi anggaran Faktor Pendukung: - Tersedianya acuan dalam penyusunan kegiatan - SDM yang memadai dan sapras yang tersedia - Koordinasi yang baik dengan pihak terkait - Data Kusuka
9.3	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	208.118.000	30,55	30,55	0	5.624.000	2,7	0	0	2,7				
9.3.1	3.25.06.2.03.001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk	193.244.000	29,8	29,8	0	1.124.000	0,58	0	0	0,58	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan	1. Jumlah Peningkatan Ikan Untuk	Tahapan pekerjaan (fisik) yang

		Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										Pengawasan Perikanan - Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : Ton dari 42.2 Ton	sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK Gemarikan dan LMSI 2. Teridentifikasinya rencana lokasi/titik kegiatan Faktor Penghambat: 1. Sistem aplikasi yang tidak stabil Faktor Pendukung: 1. Adanya sarana dan prasarana yang memadai 2. Adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait	
9.3.2	3.25.06.2.03.002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.874.000	40,35	40,35	0	4.500.000	30,25	0	0	30,25	Kabupaten Banjar	PLH.Kabid Pengembangan dan Pengawasan Perikanan - Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Teridentifikasinya lokasi/titik kegiatan

[illegible]

																1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara unsur/institusi terkait. 2. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai 3. Antusias dan respon yang baik dari masyarakat setempat
Jumlah			15.129.609.967	27,82	23,36		4.870.261.407	32,19	2.027.428.312	13,4						

BAB III

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahunan daerah yang berlandaskan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, disebutkan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan menyelaraskan antar RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran dan target tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan anggaran sebesar: Rp. 15.553.406.467,- yang terdiri dari 9 program , 23 kegiatan , dan 56 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 761.982.084,-
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 1.414.629.500,-
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 127.962.700,-
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 195.478.000,-
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 501.674.200,-
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 847.937.500,-
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 135.112.000,-
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 405.385.800,-
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.163.244.683,-

Berikut Hasil laporan Renja Perubahan Pada SIPD

Tabel 2. Hasil laporan Renja Perubahan Pada SIPD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			
								RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah		
						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		15.553.406.467,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.663.296.967,00					
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		13.663.296.967,00					
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.163.244.683,00					
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.443.400,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.389.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.544.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6.683.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	6.862.779.600,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.567.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236.940.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.082.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.549.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah	6.961.800,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.961.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	1.391.376.100,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	832.598.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23.727.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.333.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.002.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	1.228.744.483,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	164.656.883,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.098.164.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.199.722.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	665.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32.660.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	9.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	724.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Ketersediaan Pangan	761.982.084,00				
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	735.893.065,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	712.299.984,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						

							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.682.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1.414.629.500,00				
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Distribusi Pangan	258.654.500,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	17.248.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						

							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	258.972.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	26.063.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	6.322.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						

							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13.425.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah/Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten	458.443.500,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	587.748.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Teredukasi	1.092.278.200,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	444.387.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	60.460.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	127.962.700,00				
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	30.216.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						

						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	21.336.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang di intervensi	110.907.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.626.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
5	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan	195.478.000,00				

	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan dan Jumlah Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Tepat Waktu	112.125.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	195.478.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1.890.109.500,00				
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.890.109.500,00				
6	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	501.674.200,00				
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan yang Memiliki Sarana Prasarana yang Ramah Lingkungan	132.765.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	35.384.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	161.895.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	67.054.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						

						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	104.260.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	56.820.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT					

							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang terdaftar dan memiliki Pas kecil/e BKP	89.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						
							Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	76.259.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
7	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	847.937.500,00				

	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Terampil	168.558.500,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	68.561.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	73.837.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Terampil	59.354.500,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.643.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih Ikan Berkualitas	556.454.500,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.921.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.395.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	100.660.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.461.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	65.458.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perikanan	135.112.000,00			

	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Budidaya Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	196.471.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	46.221.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	12.563.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	54.423.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	21.905.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
9	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan	405.385.800,00				
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	29.149.900,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	10.765.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran yang Difasilitasi	133.999.900,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	122.384.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran yang Difasilitasi	245.549.800,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	188.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	83.715.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H						15.553.406.467,00				

BAB IV**IV. PENUTUP**

Sebagai penutup dari dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah direncanakan, sebagai berikut:

A. Kaidah Pelaksanaan

1. Perlu dilakukan penyesuaian prioritas kegiatan secara selektif dengan tetap mengacu pada tujuan strategis perangkat daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Diperlukan koordinasi intensif antar-unit kerja dan dengan instansi terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan akuntabel.
3. Pelaksanaan kegiatan harus menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas, dengan memaksimalkan hasil yang dicapai dari sumber daya yang tersedia
4. Seluruh pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan teknis lainnya.

B. Rencana Tindak Lanjut**1. Sosialisasi Internal:**

Setelah penetapan rencana kerja perubahan ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang seragam atas perubahan program dan kegiatan.

2. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO):

Setiap bidang/unit kerja wajib menyusun RKO berdasarkan rencana kerja perubahan ini, sebagai panduan teknis pelaksanaan kegiatan harian.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev):

SKPD akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk identifikasi hambatan dan penyusunan langkah perbaikan.

4. Pelaporan Berkala:

Penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara rutin kepada pimpinan dan instansi terkait, sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian internal.

Demikian uraian penutup ini disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Perubahan SKPD. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD secara terarah, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan

Martapura, 03 Juni 2025

Kepala Dinas,

S.Pi,M.Si

004

SIPLIANSYAH HARTANI,

PEMBINA Tk. I / IV b
NIP.19680928 199603 1

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas berkat Rahmat, dan Hidayah -Nya, Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini adalah untuk menyesuaikan target dan kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 1 (satu) periode tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Renja Perubahan ini menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Banjar, sehingga Pembangunan Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, rencana kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dan yang dibutuhkan. Rencana Kerja ini diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga ada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMD Tahun 2025, mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas PMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun yang menjadi alasan yang mendasari adanya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target kinerja pada sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
- 2) Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini Selaras dengan issue strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini yaitu Meningkatnya Perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini memuat perubahan target dan indikator yang akan dicapai pada kegiatan bersifat teknis maupun penunjang kegiatan serta penyesuaian terhadap penyesuaian anggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025 mendasarkan kepada :

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6322);
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6).
- o. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
- p. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
- q. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29)
- r. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar ini adalah sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum yang akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah serta penyebab dari adanya Perubahan Renja.
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan I.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, total anggaran keseluruhan, perubahan indikator dan target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta alasannya, serta berisi tabel rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

BAB IV PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa:

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). RENJA memuat penjabaran dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang mengakibatkan pencapaian dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal. Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut terus di monitoring dan di evaluasi agar dapat diukur progresnya. Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan angka capaian pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baik. Besaran pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sebesar Rp.198.650.596.495 dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan mengalami perubahan jumlah pagu keseluruhan menjadi Rp.216.880.730.651 atau bertambah sebesar Rp.18.230.134.156.

Berdasarkan Rencana Kerja pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar mempunyai program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Utama

1. Program Penataan Desa dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

➤ Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

1. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

Tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerjanya pada triwulan I.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 89% dan realisasi kinerja sebesar 0%;

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 40 Orang dan realisasi sebesar 35 Orang;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 0 Paket;
- c. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 12 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- d. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 9 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- e. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- f. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 31 Unit dan realisasi sebesar 27 Unit;
- g. Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat dengan indikator “Jumlah Lokus

Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 9 Lokus dan realisasi sebesar 6 Lokus;

- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 153.911 berkas dan realisasi sebesar 153.564 berkas;
- i. Sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 42 Arsip dan realisasi sebesar 0 Arsip;

2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 19,37% dan realisasi sebesar 19,37%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 27,06% dan realisasi sebesar 27,06%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;

- f. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 6 Kegiatan dan realisasi sebesar 6 Kegiatan;
- g. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- h. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- i. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%.

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I

- sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan bersihan Kantor” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan;
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit;
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 12 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit;
 - l. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Layanan dan realisasi sebesar 2 Layanan;

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja “Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4,12% dan realisasi sebesar 10,2%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja “Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 43% dan realisasi sebesar 10.310 Orang;

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Orang dan realisasi sebesar 4 Orang;
- b. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 15.500 arsip dan realisasi sebesar 17.569 arsip;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 6 pengguna dan realisasi sebesar 31 pengguna;
- d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 7 laporan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan :

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :

1. Adanya efisiensi anggaran yang mana sangat berpengaruh pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispersip;
 2. Adanya update pada sistem pengadaan barang menjadi versi 6 sehingga berdampak pada pengadaan belanja modal melalui e-katalog;
 3. Adanya mutasi beberapa pegawai yang membuat beberapa jabatan kosong;
 4. kurang SDM yang dimiliki sehingga menghambat pembuatan SPJ pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sedikit terhambat;
 5. Lambatnya perbaikan yang dilakukan oleh penyedia yang ditunjuk dalam melakukan pemeliharaan AC dikarenakan banyaknya antrian;
 6. kurangnya partisipasi pemustaka dalam memberikan saran dan masukan terkait bahan pustaka;
 7. Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dengan benar, sehingga daftar arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di Perangkat Daerah belum maksimal.
 8. SK Pembentukan Tim Pengelolaan Kearsipan Daerah belum final/ttd Bupati sehingga kegiatan pemeliharaan masih belum bisa dilakukan secara maksimal;
 9. arsip vital daerah tidak tersimpan dengan baik sehingga kesulitan dalam pencarian arsip dan tidak adanya tanggapan dari pencipta arsip terkait arsip kegiatan pimpinan daerah;
- b. Faktor penyebab terpenuhinya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
1. Merupakan program/kegiatan/sub kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun;
 2. Adanya arahan dari pimpinan, komitmen dan kerjasama tim yang baik
 3. Adanya dukungan anggaran;
 4. Adanya strategi pelaksanaan yang sesuai.
- c. Faktor penyebab melebihi target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
1. Adanya bantuan instansi lain terkait data capaian kinerja;
 2. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki;
 3. Adanya komitmen yang kuat dari internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- a. Proses pengadaan barang tertunda membuat beberapa capaian kegiatan dan sub kegiatan tidak maksimal;
 - b. Pemeliharaan barang, kendaraan, maupun Gedung tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang seharusnya;
 - c. Target dari pembayaran realisasi gaji/tunjangan ASN tidak tercapai;

- d. Evaluasi terkait penetapan target dan anggaran sub kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Melakukan koordinasi secara lebih intens terkait proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog;
 - b. Menyusun jadwal pemeliharaan baik berupa pemeliharaan kendaraan, barang, maupun Gedung kantor;
 - c. Melakukan penyesuaian target dan anggaran sesuai dengan kondisi riil yang terjadi, serta berdasarkan pemetaan terkait dampak yang dihasilkan terhadap capaian sub.

TABEL
2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PEELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN I TAHUN
2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggara nya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81%	Rp35.876.878.445	86.64%	Rp 19.364.864.353	80%	Rp7.501.896.5 16	0%	Rp986.304.56. 72%088	0	13.14%	86.64 %	20.351.168.441	106. 96%	56.72%
Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Rp393.745.500	100%	Rp 168.411.200	100%	Rp100.038.500	25%	Rp-	25%	0	100%	168.411.200	100 %	42.77%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	Rp128.245.500	22 Dok	Rp 62.676.000	7 Dok	Rp35.038.500	1 Dok	Rp-	14.28 %	0	23 dok	Rp 62.676.000	115 %	48.87%
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14 Dok	Rp35.000.000	10 Dok	Rp 19.858.800	4 Dok	Rp10.000.000	2 Dok	Rp-	50%	0	12 dok	Rp 19.858.800	85.7 1%	56.74

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14 Dok	Rp41.000.000	10 Dok	Rp 20.884.500	4 Dok	R15.000.000	1 Dok	Rp-	25%	0	11 dok	Rp 20.884.500	78.57%	50.93%
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Lap	Rp80.500.000	9 Lap	Rp35.498.900	3 Lap	Rp15.000.000	3 Lap	Rp-	100%	0	12	Rp35.498.900	80%	44.09%
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Lap	Rp79.000.000	48 Lap	Rp 28.993.000	16 Lap	Rp25.000.000	3 lap	Rp-	18.75 %	Rp 0	51 lap	Rp 28.993.000	63.75	36.7%
Pelaksanaan penatausahaa n keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	Rp23.242.769.412	100%	Rp 12.393.308.383	100%	Rp4.769.857.920	56,45%	Rp579.507.965	56,45 %	12.15%	100%	12.972.816.348	100 %	55.81%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/Bl n	Rp2.152.379.372	25 Org	Rp 11.224.306.613	34 Org	Rp4.473.757.920	25 Org	Rp540.732.965	73.53 %	12.09%	25	11.765.039.578	86.20%	546.60%
Terlaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dok	Rp792.160.000	37 Dok	Rp 312.100.000	12 Dok	Rp276.100.000	3 Dok	Rp38.775.000	25%	14.04%	40	350.875.000	76.92%	44.29%
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33 Lap	Rp65.939.000	6 Lap	Rp27.314.400	2 Lap	Rp10.000.000	0 Lap	Rp-	0 Lap	Rp-	6	Rp27.314.400	18.18%	41.42%
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	98 Lap	Rp79.266.700	20 Lap	Rp38.327.000	18 Lap	Rp10.000.000	4 Lap	Rp-	22.22	Rp-	24	Rp38.327.000	24.49	48.35
Lancarnya Administrasi Kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	Rp195.000.000	100%	Rp 89.622.600	100%	Rp50.000.000	25%	Rp-	25%	0	100%	Rp 89.622.600	100 %	45.96%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dan tepat waktu														
1Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	32 Orang	Rp195.000.000	9 Orang	Rp 89.622.600	8 Orang	Rp50.000.000	0 Org	Rp-	0	0	9 org	Rp 89.622.600	28.12%	45.96%
Terselenggara nya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	Rp4.272.213.816	100%	Rp 2.642.251.100	100%	Rp1.047.610.400	25%	Rp183.850.320	25%	17.55%	100%	2.826.101.420	100%	66.15%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Rp59.134.500	12 Paket	Rp 22.750.000	4 Paket	Rp10.498.000	0 Paket	Rp-	0	0	12	Rp 22.750.000	85.71%	38.47%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	Rp64.171.586	12 Paket	Rp 24.997.500	4 Paket	Rp10.799.000	0	Rp-	0	0	12	Rp 24.997.500	85.71	38.95%
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Rp112.933.600	12 Paket	Rp 46.806.000	4 paket	Rp24.996.000	1 paket	Rp3.046.500	25%	12.18%	13	52.899.000	54.16%	46.84%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	Rp132.496.100	12 Paket	Rp 60.774.535	4 Paket	Rp25.727.400	1 Paket	Rp1.953.415	25%	7.59%	13	62.727.950	92.86%	47.34%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Lap	Rp3.903.478.030	36 Laporan	Rp 2.486.923.065	12 Laporan	Rp975.590.000	3 Lap	Rp178.850.405	25%	18.33%	15 lap	2.665.773.470	39.47%	68.29%
Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	Rp1.828.844.000	100%	Rp 1.516.442.987	100%	Rp167.196.000	10%	Rp-	10%	0	100%	Rp 1.516.442.987	100%	82.92%
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	215 Unit	Rp1.828.844.000	64 Unit	Rp 1.238.732.810	65 Unit	Rp167.196.000	0	Rp-	0	0	65 unit	Rp 1.238.732.810	30.23%	67.73%
Terselenggara nya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	Rp4.032.155.285	100%	Rp 1.833.631.153	100%	Rp970.609.196	25%	Rp188.556.423	25%	19.43%	100%	2.022.187.576	100%	50.15%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	Rp1.208.035.685	36 Lap	Rp397.264.258	12 Lap	Rp274.871.196	3 Lap	Rp19.486.378	25%	7.09%	15 lap	416.750.636	25%	34.49%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	Rp2.785.018.000	36 Lap	Rp 1.405.203.995	12 Lap	Rp695.738.000	3 Lap	Rp169.070.045	25%	24.30%	39 lap	1.574.274.040	65%	56.52%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	Rp1.912.150.432	100%	Rp972.284.417	100%	Rp396.584.500	10%	Rp34.389.380	10%	8.68%	100%	1.007.173.797	100%	52.67%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp871.178.432	1 Unit	Rp250.126.634	1 Unit	Rp38.902.500	1 Unit	Rp11.197.190	100%	28.78%	1 unit	261.323.824	100%	29.99%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	Rp930.175.332	24 Unit	Rp424.288.783	27 Unit	Rp235.876.000	10 Unit	Rp18.807.190	37.03 %	7.97	24 unit	443.095.973	33.33%	47.63%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 Unit	Rp210.730.000	36 Unit	Rp76.265.100	36 Unit	Rp53.430.000	10 Unit	Rp4.385.000	27.77 %	8.21%	36 unit	80.650.100	23.37%	38.27%
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	Rp390.438.000	1 Unit	Rp390.438.000	1 Unit	Rp68.376.000	0 Unit	Rp-	0	0	1 unit	Rp390.438.000	12.5 %	100%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan administrasi batas wilayah desa	15,55%	Rp770.371.482	11,91%	Rp440.312.000	13.74%	Rp299.346.000	10,57%	Rp-	76.92 %	0	11.91 %	Rp440.312.000	76.59%	57.15%
Meningkatnya fasilitasi tata batas wilayah desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan tata batas wilayah desa	80%	Rp770.371.482	40%	Rp417.598.000	60%	Rp258.346.000	10,57%	Rp-	76.92 %	0	50.57 %	Rp417.598.000	63.21	54.20%
Terlaksananya a Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	Rp770.371.482	5 desa	Rp440.312.000	5 desa	Rp258.346.000	0 desa	Rp-	0 desa	0	5 desa	Rp440.312.000	25%	57.15%
Meningkatnya persentase kerjasama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	7,22	Rp 1.418.120.210	4,33%	Rp 558.763.200	5.78%	Rp 546.228.000	3,25%	Rp 206.407.500	56.22 %	36.94%	4.33%	765.170.700	59.97%	53.96%
Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa, Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan, Meningkatkan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	100%	Rp 1.418.120.210	60%	Rp 265.929.000	90%	Rp 546.228.000	45%	Rp 206.407.500	50%	37.78	60%	472.336.500	60%	33.30%
		Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	67,30	Rp1.418.120.210	44,88%	Rp265.335.200	53.84%	0	0	0	0	0	44,88 %	Rp265.335.200	66.68%	18.71%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase kawasan desa yang dikembangka n	14%	Rp 260.000.000	8,42%	264.738.000	11.2%	0	6,30%	0	7%	0	8,42%	264.738.000	60.1 4%	101.82%
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	5 Dok	Rp 526.364.583	3 Dok	Rp 241.987.500	1 Dok	Rp 243.346.000	0 Dok	Rp -	0 Dok	0	3 Dok	Rp 241.987.500	60%	45.97%
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Ko ta	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Ko ta	5 Dok	Rp 317.492.627	3 Dok	Rp 159.330.200	1 Dok	Rp 116.663.000	0 Dok	Rp 98.443.000	0	84.38%	3 Dok	257.773.200	60%	81.19%
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dok	Rp 574.263.000	3 Dok	Rp 344.170.000	1 Dok	Rp 116.663.000	0 Dok	Rp 107.964.500	0	92.54	3 Dok	452.134.500	60%	78.73%
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTA HAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	100%	Rp 806.735.500.501	62.09%	Rp 462.004.816.08 9	80.87%	Rp 172.447.221.7 00	25,00%	Rp 38.398.851.8 27	30.91	22.26%	62.09 %	500.403.667.916	62.0 9%	62.02%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset Desa sesuai dengan ketentuan	100%	Rp 806.735.500.501	100%	Rp 281.887.093.926	100%	Rp 172.447.221.700	40.5%	Rp 38.398.851.827	40.5%	22.26%	100%	320.285.945.753	100%	39.70%
		Persentase aparaturn pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	100%	Rp806.735.500.501	60%	Rp155.603.129.765	80%		45%		56,25%		60%	Rp155.603.129.765		60%
		Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara an administrasi pemerintahan desa	100%		60%		80%		45%		56.25%	0	60%			19.29%
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa	3167 Dok	Rp 1.945.810.275	3159 Dok	Rp 1.136.910.950	4 Dok	Rp 551.000.000	265 Dok	Rp -	66.25%	0	3424	Rp 1.136.910.950	10.11%	58.43%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	277 Dok	Rp 173.450.000	277 Dok	Rp 30.540.000	277 Dok	Rp 38.450.000	0 Dok	Rp -	0	0	277 Dok	Rp 30.540.000	100%	17.60%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dok	Rp 793.758.140.556	3 Dok	Rp 454.490.410.68 0	1 Dok	Rp 169.856.515.2 00	0 Dok	Rp 38.168.836.15 2	0 Dok	22.47	3 Dok	492.659.246.832	60%	62.06%
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2216 Org	Rp 2.106.413.300	1921 Org	Rp 1.363.269.454	443 Org	Rp 420.364.100	166 Org	Rp 92.639.000	37.47 %	22.03%	2087 org	1.455.908.454	94.1 7%	69.11%
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dok	Rp 1.174.469.295	1 Dok	Rp 454.961.775	1 Dok	Rp 366.353.400	0 Dok	Rp 20.762.675	0	5.66%	1 Dok	475.724.450	20%	40.50%
Terselenggarak annya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4 Lap	Rp 2.797.192.600	3 Lap	Rp 2.567.446.795	1 Lap	Rp 24.000.000	0 Lap	Rp -	0	0	1 lap	Rp 2.567.446.795	25%	91.78%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	9 Dok	Rp 877.984.175	6 Dok	Rp 291.914.175	2 Dok	Rp 179.120.000	0 Dok	Rp 40.857.000	0	22.80%	2 Dok	332.771.175	22.2 2%	37.90%
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5 Dok	Rp 1.063.105.700	3 Dok	Rp 349.814.800	1 Dok	Rp 434.012.500	0 Dok	Rp -	0	0	3 Dok	Rp 349.814.800	60%	32.90%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1235 Org	Rp 816.103.800	1120 Org	Rp 369.948.300	280 Org	Rp 138.284.000	0 Org	Rp -	0	0	1120 Org	Rp 369.948.300	90.6 8%	45.33%
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	80 Desa	Rp 886.044.800	40 Desa	Rp 293.275.800	20 Desa	Rp 201.000.000	5 Desa	Rp -	25%	0	40 Desa	Rp 293.275.800	50%	33.09%
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1385 Lap	Rp 325.618.500	277 Lap	Rp 83.755.100	277 Lap	Rp 32.150.000	0 Lap	Rp -	0	0	277 Lap	Rp 83.755.100	20%	25.72%
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dok	Rp 845.647.600	6 Dok	Rp 572.568.260	2 Dok	Rp 205.972.500	0 Dok	Rp 75.757.000	0	36.78	6 Dok	648.325.260	60%	76.66%
Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	Rp 11.132.638.192	87,36%	Rp 5.735.495.194	93.68%	Rp 3.596.013.900	82,78%	Rp 38.846.500	88.36 %	1.08%	87,36 %	5.774.341.694	87.3 6%	51.86%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	T HUKUM ADAT															
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pemberdayaa n dan Pendayagunaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Kelembagaan Adat yang aktif	100%	Rp 11.132.638.192	30,32%	Rp 6.222.649.565	40%	Rp 3.596.013.900	22,50%	Rp 38.846.500	56.25 %	1.08%	52,82 %	6.261.496.065	52.8 2%	56.24%
		Persentase PKK Aktif	100%	Rp 11.132.638.192	100%	Rp3.169.649.0 52	100%		25%	0	25%	0	100%	Rp3.169.649.052	100 %	28.47%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi	50%	Rp 11.132.638.192	100%	Rp2.350.009.9 67	100%		25%	0	25%	0	100%	Rp2.350.009.967	100 %	21.11%
		Persentase Posyandu Aktif	100%	Rp11.132.638.192	100%	Rp2.435.112.4 67	100%		25%	0	25%	0	100%	Rp2.435.112.467	100 %	21.87%
		Persentase desa berprestasi	100%	Rp11.132.638.192	100%	Rp2.433.137.64 2	100%		25%	0	25%	0	100%	Rp2.433.137.642	100 %	21.87%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Pamsimas Aktif	87%	Rp11.132.638.192	85%	Rp2.339.751.967	86%		0%	0	84,59%	0	85%	Rp2.339.751.967	97.70%	21.01%
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80 Dok	Rp 11.020.998.461	48 Dokumen	Rp 6.586.503.250	16 Dokuemn	Rp 2.974.278.900	0 Dok	Rp 38.846.500	0	1.30%	48 Dok	6.625.349.750	60%	60.11%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dok	Rp 409.016.300	3 Dok	Rp 194.062.300	1 Dok	Rp 168.835.000	0 Dok	Rp -	0	Rp 0	3 Dok	Rp 194.062.300	60%	47.44%
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Lap	Rp 646.559.800	3 Lap	Rp 331.237.700	1 Lap	Rp 272.900.000	0 Lap	Rp -	0	0	3 Lap	Rp 331.237.700	60%	51.23%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9 = 5 + 7		10 = (5/9*4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 Lap	Rp 394.252.575	4 Lap	Rp 174.052.575	1 Lap	Rp 180.000.000	0 Lap	Rp -	0	0 -	4 Lap	Rp 174.052.575	66.6 6%	44.14%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah memuat secara merinci indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sejumlah 5 program dengan 11 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Perubahan dilakukan pada anggaran dan indikator program, kegiatan serta target yang dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian. Kegiatan- kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Total anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang semula sebesar Rp198.650.596.495 berubah menjadi Rp216.880.730.651 dengan tambahan sebesar Rp18.230.134.156 yang sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 terdapat banyak penyesuaian belanja yang dilakukan, hal ini terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Salah satu alasan terbesar pelaksanaan penyesuaian anggaran yaitu telah terpenuhinya kebutuhan dari belanja yang teranggarkan, serta guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran baik dalam hal realisasi maupun mengenai hasil dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar telah menerapkan pelaksanaan kegiatan berorientasi hasil yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar dalam memutuskan adanya penyesuaian anggaran. Adapun penjelasan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 dibawah ini :

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Menurunnya Kesenjangan dan kemiskinan melalui Pembangunan perdesaan	Meningkatnya Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	34.46
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan Rancangan Akhir Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pemberdayaaan Masyarakt dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	0.7548
		Persentase Desa Mandiri	38.26
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	BB

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Mandiri (IDM)	Indeks Desa (ID)	0.7021	0.7548	184.349.706.116	216.880.730.651	32.531.024.535	Adanya perubahan Indikator dari Indeks desa mandiri ke indeks desa berdasarkan permendes no 9 Tahun 2024
SASARAN : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	34.46	38.26	184.349.706.116	216.880.730.651	32.531.024.535	Adanya perubahan Indikator dari Indeks desa mandiri ke indeks desa berdasarkan permendes no 9 Tahun 2024
BIDANG URUSAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	7.501.896.516	7.672.510.022	263.218.339,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	80	80	7.501.896.516	7.672.510.022	263.218.339,00	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Jumlah dokumen perencanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100.038.500	83.893.500	-16.145.000,00	Terjadi penurunan karena adanya penyesuaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	35.038.500,00	35.038.500	-	Melakukan Penyelarasan target pada DPA dengan target pada pohon kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	7.481.000	-2.519.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	2.440.000	-12.560.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	13.934.000	-1.066.000,00	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	25.000.000	25.000.000	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	4.769.857.920,00	4.856.326.800,00	86.468.880,00	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin dan Melakukan Penyelarasan target pada DPA dengan target pada pohon kinerja
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	4.473.757.920,00	4.560.700.000,00	86.942.080,00	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	276.100.000,00	278.599.800,00	2.499.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	8.191.000,00	-1.809.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	8.836.000,00	-1.164.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	50.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	8 Orang	50.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100%	1.047.610.400,00	811.414.400,00	- 236.196.000,00	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin dan penambahan anggaran perjalanan dinas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.498.000,00	10.498.000,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.799.000,00	10.799.000,00	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	24.996.000,00	24.996.000,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.727.400,00	32.150.400,00	6.423.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	975.590.000,00	732.971.000,00	-242.619.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan		100%	100%	167.196.000	632.958.000		Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin serta adanya penambahan belanja modal yang mana dirasa perlu dalam menunjang kegiatan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	21 Unit	167.196.000	632.958.000		1. Penambahan pengadaan DVR untuk keperluan pengawasan dan keamanan gedung perpustakaan. 2. UPS 1400VA tidak ada di pasaran sehingga dirubah menjadi UPS 1200VA dan adanya penambahan UPS dan stabilizer untuk keamanan server dan peralatan komputer dikarenakan stabilizer dan UPS di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah tidak dapat digunakan. 3. Penambahan micropohone wireless untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan lomba lomba yang diadakan di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Adanya penambahan pembelian PC All in one dikarenakan adanya penambahan pegawai (CPNS dan PPPK) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum memiliki PC.

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100% 100%	100% 100%	970.609.196	820.020.470		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	274.871.196	167.220.470		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	695.738.000	652.800.000		1. Sudah adanya tenaga arsip ASN pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Perubahan anggaran dikarenakan adanya Pegawai Tidak Tetap yang lulus menjadi PPPK serta adanya perubahan pada jenjang Pendidikan pada salah satu pegawai Tidak Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semula jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Strata Satu (S1) yang mana anggaran untuk pembayarannya ini diambil dari pembayaran jasa pegawai tidak tetap yang telah lulus menjadi PPPK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100%	100%	396.584.500	427.896.852		Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.902.500	38.902.500		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	235.876.000	267.188.352		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	27 Unit	53.430.000	53.430.000		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	68.376.000	68.376.000		
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Administrasi Batas Wilayah Desa	Persentase penataan admininstrasi batas wilyah desa Persentase desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	100%	60%	258.346.000	127.770.000		Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan serta target kegiatan dengan indikator dan target pokin serta terdapat beberapa penyesuaian anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Telah Menyelesaikan Tata Batas Wilayah Desa	Persentase desa yang telah menyelesaikan tata wilayah desa	100%	60%	258.346.000	127.770.000		Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan serta target kegiatan dengan indikator dan target pokin serta terdapat beberapa penyesuaian pada anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa	5 Desa	258.346.000	127.770.000		1. Kegiatan survey IPLM dan TGM dilaksanakan secara nasional oleh Perpustakaan Nasional sehingga tidak memerlukan lagi penganggaran untuk Survey IPLM dan TGM di Tingkat Kabupaten 2. Apresiasi terhadap pengunjung perpustakaan dan peminjam buku terbanyak
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama antar desa	Persentase desa yang memiliki produk unggulan Persentase desa yang memiliki PADEs	11,2 53.84 80	1.08 1.57 74.25	546.228.000	329.748.500		
			84			329.748.500		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase lembaga ekonomi desa dengan kinerja baik	Persentase BUMDES yang berkategori maju				147.710.000		
	Persentase kawasan desa yang dikembangkan	Persentase jumlah Kawasan perdesaan yang berkembang				61.055.000		
	persentase desa yang melakukan kerjasama	Persentase jumlah pos pelayanan teknologi 9 Posyantek) yang produktif				120.983.000		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	243.346.000	147.710.500		
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	116.663.000	61.055.000		
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dok	1 dok	186.219.000	120.983.000		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	Persentase desa yang melaksanakan tata Kelola keuangan dan asset desa sesuai standar	80.87%	100% 19.85%	172.447.221.700	203.110.378.399		Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan menggunakan sumber dana DAK Non Fisik, dan satu kegiatan tidak bisa menggunakan 2 sumber dana namun kegiatan harus tetap berjalan sehingga nama kegiatan dirubah

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan ketentuan	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya		19.85%		203.110.378.399		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi		100%		203.110.378.399		
	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memahami manajemen pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Kompeten		19.85		203.110.378.399		
	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset Desa sesuai dengan ketentuan	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Desa sesuai Standar		20%		203.110.378.399		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
		Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Aset Desa sesuai Standar		92.42%		203.110.378.399		
		Persentase Desa yang Memiliki Indeks Desa (ID) yang sesuai standar				203.110.378.399		
		Persentase Penginputan Profil Desa yang sesuai standar				203.110.378.399		
		Persentase Bumdes yang Berkategori Maju				203.110.378.399		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1053 dok	4 dok	551.000.000	423.585.000		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	277 dok	1 dok	38.450.000	31.280.000		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dok	1dok	169.856.515.200	201.002.247.399		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	443 org	443 org	420.364.100	410.364.100		
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dok	1 dok	366.353.400	272.251.500		
Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 lap	1 lap	24.000.000	19.440.000		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 dok	2 dok	179.120.000	216.200.000		
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dok	1 dok	434.012.500	234.364.000		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280 org	280org	138.284.000	138.180.000		
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dan Penetapan Batas Desa	0 desa	20 desa	201.000.000	26.210.000		
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	277 lap	277 lap	32.150.000	205.972.500		
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dok	2 dok	205.972.500	205.972.500		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyaratannya Diberdayakan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat desa	93.68%	100%		3.596.013.900		1. penambahan anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan 2. penambahan anggaran pada pengawasan kearsipan yang mana sebelumnya 2 Orang x 5 Perangkat Daerah menjadi 1 Orang x 10 Perangkat Daerah. 3. adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Arsip Terjaga dan kegiatan Penyuluhan Arsip Statis 4. Pengurangan jumlah volume yang semula 15 orang x 4 kali menjadi 12 orang x 4 kali 5. Penambahan untuk kegiatan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta 5. Penambahan untuk kegiatan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Meeting dan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Persentase Posyandu Aktif Persentase Kelembagaan Adat yang aktif Persentase kelembagaan Desa yang terkoordinasi Persentase Pamsimas Aktif Persentase PKK Aktif Persentase desa berprestasi	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Desa	100%	20% 100%	3.596.013.900			1. terdapat penambahan anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan yang mana sebelumnya terdampak efisiensi anggaran sehingga dirasa perlu untuk menambahkan kembali anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan tersebut 2. adanya penambahan anggaran pada pengawasan kearsipan yang mana sebelumnya 2 Orang x 5 Perangkat

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang Produktif		1.08%				Daerah menjadi 1 Orang x 10 Perangkat Daerah.
Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 dok	16 dok	2.974.278.900	5.264.241.830		Penambahan Jumlah Peserta untuk kegiatan paket meeting kearsipan yang mana sebelumnya terdampak efisiensi anggaran sehingga di perubahan ini kami mengajukan kembali usulan untuk kegiatan paket meeting kearsipan dengan peserta SKPD sebanyak 27, Kecamatan sebanyak 20 dan Kelurahan sebanyak 13 dengan total peserta 60 peserta dikali dengan 2 kali kegitan sehingga berjumla 120 orang/peserta dengan biaya Paket Meeting (Halfday) @ Rp. 175.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dok	1 dok	168.835.000	85.617.000		

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	272.900.000	149.703.500		Berdasarkan Rapat PKPKT Tahun 2025 oleh ANRI Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh seluruh SKPD. Mengingat SDM Kearsipan yang terbatas. Sehingga hanya mampu melakukan pengawasan sebanyak 10 SKPD ditahun ini. Pergeseran: 2 Orang x 5 Perangkat Daerah. Usul Perubahan: 1 Orang x 10 Perangkat Daerah.
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 lap	1 lap	180.000.000	140.761.400		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun berdasarkan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk Meningkatkan Tingkat Literasi dan Kegemaran membaca Masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan arsip. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APB Kabupaten,
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Agar mencapai kondisi tersebut, maka perlunya rencana tindak lanjut pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka melaksanakan pelayanan. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, webinar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.
3. Mengoptimalkan dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat serta melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengelolaan kearsipan perangkat daerah serta pengawasan kearsipan perangkat daerah yang lebih intensif dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran tentang perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat pada Perubahan Rencana Kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang

professional dan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Martapura, April 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banjar

dr.H. TOFIK NORMAN HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200501 1 010

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dapat terselesaikan.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan selama setahun untuk secara bersama-sama dan bersinergi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disampaikan, semoga bermanfaat dalam menyukseskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2025 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025.
3. Mendukung percepatan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yang penyusunannya disusun simultan.
4. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025
5. Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa.
6. Menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

7. Menyesuaikan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periodik dan Rencana Aksi Per Triwulan yang telah dilaksanakan bahwa ada capaian beberapa bidang yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.
8. Menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
9. Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Selanjutnya diharapkan Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 42) tanggal 28 November 2024;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Perubahan tahun ini adalah untuk memantapkan kinerja Disdukcapil Kabupaten Banjar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya setelah dilakukannya penyesuaian sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/bidang sesuai tupoksi Bidang;
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;
- c. Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Menggemukan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan R APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Masukkan tabel Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d triwulan I tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- perubahan indikator kinerja
- jumlah program dan jumlah kegiatan
- total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- alasan dilakukan perubahan

Lampirkan tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada aplikasi SIPD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan

Lampiran

BAB II

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan rencana strategis untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPA IAN	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10,469,489,401	2,949,826,278	2,226,172,177		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Disdukcapi	92	-	-	-	9,786,830,201	2,747,197,178	2,063,761,871	75	Faktor Penghambat: 1. Penilaian IKKI belum dilaksanakan pada Triwulan I

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	66,935,000	22,644,000	5,075,000	22	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Perencanaan berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu 2. wacana efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan lebih berhati hati dalam merealisasikan anggaran. Faktor Pendukung: 1. Komitmen pimpinan dan pegawai, 2. koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal yang baik

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	6	7	117	42,865,000	14,784,000	1,882,000	13	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Perencanaan berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu 2. wacana efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan lebih berhati hati dalam merealisasikan anggaran. Faktor Pendukung: 1. Komitmen pimpinan dan pegawai, 2. koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal yang baik

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	7	7	100	17,309,000	4,706,000	800,000	17	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Perencanaan berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu 2. wacana efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan lebih berhati hati dalam merealisasikan anggaran. Faktor Pendukung: 1. Komitmen pimpinan dan pegawai, 2. koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal yang baik

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	-	1	-	3,597,000	2,204,000	1,755,000	80	Faktor Penghambat: 1. Permintaan data realisasi e-Walidata dari bidang terlambat tidak sesuai batas waktu, Berkurangnya personil pada Subbag Perencanaan berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu, wacana efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan lebih berhati hati dalam merealisasikan anggaran. Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan komunikasi internal serta eksternal yang baik, komitmen pimpinan dan pegawai 2. Kegiatan dilaksanakan lebih cepat menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah
--	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	----	---

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	8	-	20	-	3,164,000	950,000	638,000	67	Faktor Penghambat: 1. Review dari Bagian Organisasi Kab. Banjar harus menyesuaikan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan komunikasi internal serta eksternal yang baik, komitmen pimpinan dan pegawai2. Kegiatan dilaksanakan lebih cepat menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	25	26.23	104.9 2	4,745,619,800	1,374,563,228	987,181,173	72	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	25	25	100	4,504,900,000	1,316,371,428	935,196,613	71	Faktor Penghambat: 1. Penginputan SPP dan SPM Gaji serta TPP dilaksanakan melalui 2 aplikasi (SIPD Langkar dan SIPD RI) sehingga memakan waktu dan tenaga 2. Berkurangnya personil pelaksana pada Subbag Keuangan sehingga beban pekerjaan terbagi semakin banyak ke sdm pelaksana yang tersisa Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik, komitmen pegawai untuk kelancaran administrasi perkantoran 2. Penggunaan aplikasi utama yang reliable untuk penatausahaan keuangan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45	12	13	108	231,059,800	53,510,000	50,990,000	95	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Keuangan dan Aset berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu 2. Penginputan SPP dan SPM Gaji dan TPP menggunakan 2 aplikasi (SIPD Langkar dan SIPD-RI) sehingga cukup memakan waktu Faktor Pendukung: 1. Penggunaan aplikasi utama yang reliable untuk penatausahaan keuangan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	2	200	4,200,000	3,338,400	994,560	30	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Keuangan dan Aset berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu 2. Banyaknya data pendukung yang harus dipenuhi 3. Draft Laporan Keuangan baru dalam tahap selesai review oleh Inspektorat dan belum ada arahan selanjutnya Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik, komitmen pegawai untuk kencaran administrasi perkantoran 2. Penjurnalan Aset pada aplikasi dibantu oleh BPKPAD sehingga penyelesaian laporan lebih cepat

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	16	3	3	100	5,460,000	1,343,400	0	0	Faktor Penghambat: 1. Berkurangnya personil pada Subbag Keuangan dan Aset berdampak pada bertambahnya beban pekerjaan individu2. Penginputan SPP dan SPM Gaji dan TPP menggunakan 2 aplikasi (SIPD Langkar dan SIPD-RI) sehingga cukup memakan waktu Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik, komitmen pegawai untuk kelancaran administrasi perkantoran

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	100	100	100	100,000,000	0	300,000	-	Penghambat: 1. Daftar jaga ASN untuk pelayanan administrasi kepegawaian dari tahun ke tahun untuk format sering berubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi Pendorong: 1. Tersedianya SDM dan anggaran yang mencukupi 2. Komitmen seluruh unsur dalam kelancaran administrasi kepegawaian

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	1	1	100	100,000,000	0	300,000	-	Faktor Penghambat: 1. Keikutsertaan dalam Bimtek dan kegiatan sejenis sangat bergantung dari undangan kegiatan bintek yang diterima Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran untuk keikutsertaan pada Bimtek/Diklat dari awal tahun, tersusunnya rencana Diklat/Bintek yang akan diikuti pada tahun 2025.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	100	100	100	2,039,853,300	429,615,500	231,887,879	54	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	3	3	100	7,403,000	1,860,000	1,833,000	99	Faktor Penghambat: 1. Terjadi kenaikan harga komponen listrik dan wacana efisiensi yang membuat pelaksana kegiatan berhati hati dalam merealisasikan anggaran Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor dari awal tahun

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46	4	6	150	1,065,773,000	69,059,200	22,795,000	33	Faktor Penghambat: 1. Update e katalog ke versi 6 yang lambat sehingga proses pengadaan melalui e purchasing masih belum dapat dilaksanakan Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan pengadaan barang yang telah disusun

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86	23	23	100	70,895,800	21,531,300	18,704,604	87	Faktor Penghambat: 1. Kelengkapan SPJ kuitansi ke bagian keuangan kurang lengkap, sehingga tertahan untuk proses pembayarannya sampai kelengkapan berkas tersedia. Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran pada awal tahun, komitmen pegawai untuk kalnacaran administrasi perkantoran

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	100	33,792,500	21,665,000	307,500	1	Faktor Penghambat: 1. Update e katalog ke versi 6 yang lambat sehingga menghambat pengadaan barang cetakan dan penggandaan, wacana efisiensi yang membuat pelaksana kegiatan lebih berhati hati dalam merealisasikan anggaran Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk barang cetakan dan penggandaan dari awal tahun

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3	3	100	6,287,000	1,026,000	880,000	86	Faktor Penghambat: 1. Tidak ditemukan faktor penghambat untuk sub kegiatan ini, hanya saja realisasi anggaran sangat bergantung dari ada atau tidaknya tamu yang berkunjung ke Disdukcapil Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi dari awal tahun untuk memfasilitasi kunjungan tamu yang datang ke Disdukcapil

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	3	100	855,702,000	314,474,000	187,367,775	60	Faktor Penghambat: 1. Efisiensi anggaran yang mengakibatkan harus rencana pelayanan Adminduk langsung ke masyarakat (Jempol Pelanduk) harus disusun ulang dengan frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi sehingga kegiatan koordinasi baik dalam maupun luar daerah dapat terlaksanakan dengan lancar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	2,291,820,101	789,899,950	744,787,103	94	

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	3	3	100	5,650,000	2,745,000	220,250	8	Faktor Penghambat: 1. Biaya pengiriman berdasarkan jarak, jadi tidak dapat dipastikan setiap pengantaran dokumen sama persis biayanya Faktor Pendorong: 1. Komitmen pegawai dalam melaksanakan administrasi perkantoran, Koordinasi yang baik

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	3	100	254,840,101	61,084,950	39,921,741	65	Faktor Penghambat: 1. Pemberitahuan tagihan tergantung dari masing-masing penyedia seperti Telkom, PDAM, dan lainnya dan sering kali terlambat sehingga pembayaran diatas tanggal batas yang telah ditentukan Faktor Pendorong: 1. Komitmen pegawai dalam melaksanakan administrasi perkantoran, Koordinasi yang baik

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3	100	2,031,330,000	726,070,000	704,645,112	97	Faktor Penghambat: 1. Tidak ada faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini Faktor Pendorong: 1. Koordinasi yang baik di seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Banjar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100	100	100	100	542,602,000	130,474,500	94,530,716	72	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	100	42,750,000	10,687,500	5,788,650	54	Faktor Penghambat: 1. Tidak ditemukan faktor penghambat pada sub kegiatan ini Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang mencukupi dari awal tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	21	21	100	368,320,000	91,500,000	65,497,066	72	Faktor Penghambat: 1. Tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan ini, hanya saja diharapkan semua pemegang kendaraan dinas operasional dapat menjaga kondisi kendaraan dinas operasional yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung pekerjaan sehari hari Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pemeliharaan kendaraan bermotor operasional atau lapangan baik roda 2 maupun roda 4 dari awal tahun 2. - Tingginya kesadaran pemegang barang sehingga pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas atau operasional dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tepat waktu
---	--	----	----	----	-----	-------------	------------	------------	----	--

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	100	55,062,000	9,177,000	12,480,000	136	Faktor Penghambat: 1. Tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam pencapaian kinerja ini, hanya saja diharapkan Subbag Umpeg, Kepala UPTD Gambut dan Kepala UPTD Mataraman dapat terus menjaga kondisi bangunan gedung kantor dan terus melakukan pemeliharaan sehingga jika terjadi kondisi yang memerlukan perbaikan dapat diselesaikan dengan segera Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pemeliharaan Kantor Induk, Gedung UPTD Gambut dan UPTD Mataraman sesuai kebutuhan dari awal tahun

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141	19	19	100	76,470,000	19,110,000	10,765,000	56	Faktor Penghambat: 1. Kenaikan harga serta kekosongan stok barang yang terjadi di awal tahun 2025 sehingga harus mencari ke beberapa penyedia untuk mendapatkan barang yang sesuai Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dari awal tahun

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99.81	99.21	99.99	101	79,421,500	22,528,100	22,186,100	98	Faktor Penghambat: 1. Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memiliki database kependudukan mandiri sejak diberlakukannya SIAK Terpusat, sehingga untuk penyusunan laporan hasil pelayanan harus menunggu data kependudukan dari pusat (PDAK) sehingga proses penyusunan laporan akan lebih lambat. 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, seperti perlunya peremajaan alat rekam KTP dan peremajaan alat cetak KTP dan KIA. 3.
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56.5	58.58	59.88	102					

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	n/a	2.57	2.76	107					Kurangnya SDM pelayanan Faktor Pendorong: 1. Kesadaran Penduduk akan kepemilikan dokumen kependudukan yang semakin meningkat 2. Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran yang tinggi dalam memberikan pelayanan adminduk terbaik bagi masyarakat
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dari permohonan penerbitan dokumen yang memenuhi persyaratan	100	100	100	100	79,421,500	22,528,100	22,186,100	98	Faktor Penghambat: 1. Persyaratan harus menyesuaikan setiap pengajuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Faktor Pendorong 1. Kemudahan prosedur persyaratan sesuai dengan kondisi pengajuan oleh masyarakat

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36	9	9	100	67,921,500	19,071,600	18,780,600	98	Faktor Penghambat: 1. Terbatasnya SDM pelayanan 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan harus ditingkatkan 3. Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memiliki database kependudukan mandiri sejak diberlakukannya SIAK Terpusat, sehingga untuk penyusunan laporan hasil pelayanan harus menunggu data kependudukan dari pusat (PDAK) sehingga proses penyusunan laporan akan lebih lambat. Faktor Pendorong: 1. Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran yang tinggi dalam memberikan pelayanan adminduk terbaik bagi masyarakat 2. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yang semakin meningkat
--	---	----	---	---	-----	------------	------------	------------	----	--

Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24	6	6	100	11,500,000	3,456,500	3,405,500	99	Faktor Penghambat: 1. Terbatasnya SDM pelayanan2. Sarana dan Prasarana Pelayanan harus ditingkatkan3. Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memiliki database kependudukan mandiri sejak diberlakukannya SIAK Terpusat, sehingga untuk penyusunan laporan hasil pelayanan harus menunggu data kependudukan dari pusat (PDAK) sehingga proses penyusunan laporan akan lebih lambat. Faktor Pendorong:1. Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran yang tinggi dalam memberikan pelayanan adminduk terbaik bagi masyarakat2. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan yang semakin meningkat
--	---	----	---	---	-----	------------	-----------	-----------	----	---

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	96	96.12	96.51	100	263,500,000	115,454,500	76,298,000	66	Faktor Penghambat: Pelayanan keliling adminduk belum dilaksanakan secara rutin Faktor Pendorong: 1. Pelayanan online melalui Star Banjar sudah semakin maksimal untuk meningkatkan capaian akta kelahiran 2. Pelayanan akta kelahiran kolektif, serta penginputan BAKAK akta kelahiran yang lebih maksimal 3. Kerja sama pelayanan dan koordinasi yang baik antar bidang 4. Pelayanan keliling adminduk sudah dilaksanakan ke beberapa desa/kelurahan
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	n/a	100	100	100					
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	n/a	100	100	100					
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Non Muslim	n/a	100	100	100					

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dari permohonan penerbitan dokumen yang memenuhi persyaratan	100	100	100	100	263,500,000	115,454,500	76,298,000	66	Faktor Penghambat: Persyaratan harus menyesuaikan setiap pengajuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Faktor Pendorong; Kemudahan prosedur persyaratan sesuai dengan kondisi pengajuan oleh masyarakat
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	758	189	329	174	85,000,000	23,852,500	13,968,500	59	Faktor Penghambat: Sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk non muslim dan pemuka agama belum dilaksanakan Faktor Pendorong: Pelayanan dilaksanakan dengan lebih cepat dan optimal

Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	35000	4500	5497	122	178,500,000	91,602,000	62,329,500	68	Faktor Penghambat: 1. Pelayanan keliling adminduk belum dilaksanakan secara rutin 2. Pelaporan kematian oleh aparat desa belum dilaksanakan secara rutin oleh seluruh desa Faktor Pendorong: 1. Pelayanan online melalui Star Banjar sudah semakin maksimal untuk meningkatkan capaian akta kelahiran dan akta kematian 2. Pelayanan akta kelahiran dan akta kematian kolektif, serta penginputan BAKAK akta kelahiran yang lebih maksimal 3. Kerja sama pelayanan dan koordinasi yang baik antar bidang 4. Pelayanan keliling adminduk sudah dilaksanakan ke beberapa desa/kelurahan
--	---	-------	------	------	-----	-------------	------------	------------	----	---

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang Sesuai Aturan	100	100	100	100	339,737,700	64,646,500	63,926,206	99	Faktor Penghambat: 1. Data yang bersumber dari aplikasi PDAK Kemendagri sebagian besar datanya harus diolah lagi dalam bentuk sederhana agar mudah dibaca dan dipahami, sehingga memakan waktu cukup lama karena sebagian besar data yang diminta berupa kelompok umur, kelompok pekerjaan dan jenis pendidikan, serta adanya permintaan data kepemilikan dokumen kependudukan 2. adapun data kepemilikan akta kelahiran dan perekaman KTP elektronik yang sudah direlease Pusat ke Kabupaten/Kota
	persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	100	100	100	100					
	Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK yang Dikelola dengan Baik di Seluruh Titik Layanan	100	100	100	100					

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan	100	100	100	100					pada DKB Semester II Tahun 2024 masih tersusun secara horizontal (menyamping ke kanan) tidak dalam bentuk vertikal (rol ke bawah), sehingga saat disajikan tampilan datanya panjang ke kanan atau melebar ke samping. Jika data tersebut diolah dalam bentuk vertikal, maka harus dilakukan secara manual lagi dan tidak bisa menggunakan Pivot Table. 3. Kurangnya SDM dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan baik 2. koordinasi yang baik terkait data-data permintaan
	Persentase peningkatan titik layanan Administrasi Kependudukan	20	100	100	100					
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	88	100	100	100					

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	100	100	100	78,362,700	5,778,500	15,127,800	262	Faktor Penghambat: 1. Data yang bersumber dari aplikasi PDAK Kemendagri sebagian besar datanya harus diolah lagi dalam bentuk sederhana agar mudah dibaca dan dipahami, sehingga memakan waktu cukup lama karena sebagian besar data yang diminta berupa kelompok umur, kelompok pekerjaan dan jenis pendidikan, serta adanya permintaan data kepemilikan dokumen kependudukan 2. adapun data kepemilikan akta kelahiran dan perekaman KTP elektronik yang sudah direlease Pusat ke Kabupaten/Kota pada DKB Semester II Tahun 2024

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										masih tersusun secara horizontal (menyamping ke kanan) tidak dalam bentuk vertikal (rol ke bawah), sehingga saat disajikan tampilan datanya panjang ke kanan atau melebar ke samping. Jika data tersebut diolah dalam bentuk vertikal, maka harus dilakukan secara manual lagi dan tidak bisa menggunakan Pivot Table. 3. Kurangnya SDM dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan baik, 2. koordinasi yang baik terkait data-data permintaan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	125	43	40	93	78,362,700	5,778,500	15,127,800	262	Faktor Penghambat: 1. Data yang bersumber dari aplikasi PDAK Kemendagri sebagian besar datanya harus diolah lagi dalam bentuk sederhana agar mudah dibaca dan dipahami, sehingga memakan waktu cukup lama karena sebagian besar data yang diminta berupa kelompok umur, kelompok pekerjaan dan jenis pendidikan, serta adanya permintaan data kepemilikan dokumen kependudukan 2. Adapun data kepemilikan akta kelahiran dan perekaman KTP elektronik yang sudah direlease Pusat ke Kabupaten/Kota

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										pada DKB Semester II Tahun 2024 masih tersusun secara horizontal (menyamping ke kanan) tidak dalam bentuk vertikal (rol ke bawah), sehingga saat disajikan tampilan datanya panjang ke kanan atau melebar ke samping. Jika data tersebut diolah dalam bentuk vertikal, maka harus dilakukan secara manual lagi dan tidak bisa menggunakan Pivot Table. 3. Kurangnya SDM dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan Faktor Pendorong: 1. Tersedianya anggaran yang mencukupi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan baik, 2. Koordinasi yang baik terkait data-data permintaan

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK	100	100	100	100	177,375,000	48,073,000	38,129,135	79	Faktor Penghambat: 1. Terdapat beberapa desa yang mengikuti Program Desaku Pelanduk Manis yang terkendala spesifikasi laptop operator Desa yang kurang baik sehingga aplikasi SIAK Terpusat yang sudah terinstall tidak dapat berjalan dengan baik pada saat melakukan pelayanan aktivasi IKD oleh Operator Desa di desa tersebut 2. Perlunya pendampingan lanjutan kepada peserta seleksi penerimaan Taruna/i Akpol, Bintara dan Tamtama Polri yang terdapat ketidaksesuaian data kependudukannya ke instansi terkait 3. Masih ada beberapa aparat Desa yang mengikuti Program

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										Desaku Pelanduk Manis yang belum bisa melakukan update SIAK Terpusat secara mandiri Faktor Pendorong: 1. Tersedianya PC/Laptop yang spesifikasinya cukup mampu dalam menjalankan aplikasi SIAK Terpusat dan telah dilaksanakan monitoring secara berkala, khususnya bagi desa desa yang belum mampu melakukan update SIAP Terpusat secara mandiri 2. Koordinasi yang baik di internal maupun eksternal Disdukcapil

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43	10	9	90	177,375,000	48,073,000	38,129,135	79	Faktor Penghambat: 1. Terdapat beberapa desa yang mengikuti Program Desaku Pelanduk Manis yang terkendala spesifikasi laptop operator Desa yang kurang baik sehingga aplikasi SIAK Terpusat yang sudah terinstall tidak dapat berjalan dengan baik pada saat melakukan pelayanan aktivasi IKD oleh Operator Desa di desa tersebut 2. Perlunya pendampingan lanjutan kepada peserta seleksi penerimaan Taruna/i Akpol, Bintara dan Tamtama Polri yang terdapat ketidaksesuaian data

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										kependudukannya ke instansi terkait 3. Masih ada beberapa aparat Desa yang mengikuti Program Desaku Pelanduk Manis yang belum bisa melakukan update SIAK Terpusat secara mandiri Faktor Pendorong: 1. Tersedianya PC/Laptop yang spesifikasinya cukup mampu dalam menjalankan aplikasi SIAK Terpusat dan telah dilaksanakan monitoring secara berkala, khususnya bagi desa desa yang belum mampu melakukan update SIAP Terpusat secara mandiri 2. Koordinasi yang baik di internal maupun eksternal Disdukcapil

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kerja Sama Inovasi Pelayanan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	84,000,000	10,795,000	10,669,271	99	Faktor Penghambat: 1. Perlunya penambahan SDM dan sarana prasarana peralatan, hal ini karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. hal ini dapat dilihat antara lain dengan semakin banyaknya warga yang mengajukan permohonan untuk pembuatan dokumen dan rata- rata mereka menginginkan untuk dilayani segera atau dengan cepat. mengingat jumlah SDM yang ada

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
	Persentase data balikan yang dilaporkan oleh Lembaga Pengguna	100	100	100	100					sekarang ini dirasakan masih kurang karena masing-masing petugas sudah memiliki job desk yang harus dilaksanakan. Faktor Pendorong: 1. Lancarnya koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Disdukcapil Kabupaten Banjar dengan Instansi terkait 2. Adanya pola pikir yang sama untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat selaku pengguna layanan 3. Adanya dukungan dari Pihak Ketiga yang bersedia bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36	10	12	120	65,000,000	7,523,500	7,904,744	105	Faktor Penghambat: Perlunya penambahan SDM dan sarana prasarana peralatan, hal ini karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. hal ini dapat dilihat antara lain dengan semakin banyaknya warga yang mengajukan permohonan untuk pembuatan dokumen dan rata- rata mereka menginginkan untuk dilayani segera atau dengan cepat. mengingat jumlah SDM yang

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										ada sekarang ini dirasakan masih kurang karena masing-masing petugas sudah memiliki job desk yang harus dilaksanakan. Faktor Penghambat: 1. Lancarnya koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Disdukcapil Kabupaten Banjar dengan Instansi terkait 2. Adanya pola pikir yang sama untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat selaku pengguna layanan 3. Adanya dukungan dari Pihak Ketiga yang bersedia bekerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25	12	12	100	19,000,000	3,271,500	2,764,527	85	Faktor Penghambat: 1. Adanya peraturan baru tentang pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, sehingga untuk tahun 2025 alur proses permohonan baik itu izin baru ataupun perpanjangan pemanfaatan data kependudukan maupun izin hak akses pemanfaatan data kependudukan masih harus melalui proses yang cukup panjang. Hal ini terjadi karena perlu adanya verifikasi dari Setjen dan Itjen sebagai Tim Verifikator kemudian yang memberikan izin

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	TARGET SD TRIWULAN I TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN 2025	ANGGARAN SD TRIWULAN I TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN		TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	11
										pemanfaatan data kependudukan adalah Menteri Dalam Negeri Faktor Pendorong: 1. Lancarnya koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI 2. Lancarnya koordinasi yang baik antara Disdukcapil dengan SKPD sebagai Lembaga Pengguna yang melaksanakan dan menggunakan web portal pemanfaatan data kependudukan

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Banjar diarahkan untuk peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan tertib administrasi kependudukan sebagai sasaran utama dan untuk masa yang akan datang diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan yang ada pada database kependudukan sehingga benar-benar tersedia data yang akurat dan valid.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, belum memenuhi target kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
- b. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan indikator jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan, belum memenuhi target kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator jumlah dokumen tata cara perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun,

belum memenuhi target kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

2.1.2 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan indikator jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- c. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- f. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang

administrasi perkantoran. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.

- h. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- k. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- l. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- o. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.

- p. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- q. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- r. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- s. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- t. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- u. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- v. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dari permohonan penerbitan dokumen yang memenuhi persyaratan.

Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.

- w. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indikator jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- x. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan indikator jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- y. Program Pencatatan Sipil dengan indikator
 - Persentase Kepemilikan Akta Kematian
 - Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim
 - Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Non Muslim
 Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- z. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dari permohonan penerbitan dokumen yang memenuhi persyaratan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- aa. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator
 - Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan yang Sesuai Aturan
 - Persentase Permintaan Data Kependudukan yang Dipenuhi
 - Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK yang Dikelola dengan Baik di Seluruh Titik Layanan
 - Persentase Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan yang Sesuai Aturan
 - Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna
 - Persentase Peningkatan Titik Layanan

Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.

- bb. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan indikator persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- cc. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator
 - Persentase Kerjasama Inovasi Pelayanan yang Ditindaklanjuti
 - Persentase Data Balikan yang Dilaporkan oleh Lembaga Pengguna
 Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.
- dd. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Tingkat capaian realisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target kinerja.

2.1.3 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan indikator jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan indikator jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah.

Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

- d. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah sesuai ketentuan. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- f. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator
 - Persentase Perekaman KTP Elektronik
 - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- g. Program Pencatatan Sipil dengan indikator persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- h. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan indikator jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- i. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Tingkat capaian realisasi telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan disebabkan oleh
 - Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
 - Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
 - Mundurnya/terbenturnya jadwal kegiatan antar bidang satu dengan yang lainnya.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan
 - Adanya komitmen bersama antara semua pegawai Disdukcapil untuk berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang direncanakan.
 - Koordinasi dan komunikasi yang baik di internal maupun eksternal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan atau sub kegiatan sehingga bisa mencapai hasil yang diinginkan sesuai target.
- c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan akan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Banjar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Banjar berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
- e. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam hal urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian target capaian pada tahun anggaran berikutnya jika dirasa diperlukan.
- b. Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
- c. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- d. Melakukan peremajaan alat perekaman dan pencetakan KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang mendukung pencapaian kinerja.
- e. Terus mengupayakan terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur baik kuantitas dan kualitasnya.

- f. Terus bersinergi dengan berbagai pihak baik pemerintah atau swasta untuk memastikan berjalannya pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh titik layanan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan baik pelayanan langsung maupun pelayanan online, termasuk di dalamnya inovasi pelayanan yang telah dijalankan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan dan secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

3.1.1 Perubahan Target Indikator Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 serta juga merupakan tahun pertama dalam Periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini telah mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi baik pada Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan serta pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 jika dibandingkan dengan RPJMD dan Renstra periode sebelumnya.

Perubahan terhadap tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan kegiatan dilakukan sebagai respons terhadap dinamika dan perkembangan terbaru yang terjadi baik secara internal maupun eksternal, serta hasil evaluasi terhadap capaian

kinerja sebelumnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perubahan tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Perubahan pada Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan serta pada indikator-indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan serta Indikator

SEBELUM			SESUDAH		
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TUJUAN					
Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disdukcapil	Indeks Pelayanan Publik	4.54
SASARAN STRATEGIS					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.70
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	79%		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Lengkap	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Lengkap	81%
PROGRAM/KEGIATAN					

SEBELUM			SESUDAH		
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Dukcapil	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.74
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99.81 %	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99.99 %

SEBELUM			SESUDAH		
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56.50 %		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	62%
	persentase penyelesaian permohonan layanan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan	100%		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	3.20 %
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pengguna layanan pendaftaran penduduk yang dapat memenuhi persyaratan	100%	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dari permohonan penerbitan dokumen yang dilayani	100%
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96%	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	97.50 %
	persentase penyelesaian permohonan layanan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan	100%		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%
				Persentase Kepemilikan Akta Perkawina	100%

SEBELUM			SESUDAH		
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				n Non Muslim	
				Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Non Muslim	100%
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pengguna layanan pencatatan sipil yang dapat memenuhi persyaratan	100%	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dari permohonan penerbitan dokumen yang dilayani	100%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang Sesuai Aturan	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang Sesuai Aturan	100%
	persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	100%		persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	100%
	persentase jaringan SIAK yang dikelola dengan baik	100%		Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK yang Dikelola dengan Baik di Seluruh	100%

SEBELUM			SESUDAH		
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Titik Layanan	
	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan	100%		Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan	100%
	persentase peningkatan titik layanan	20%		Persentase peningkatan titik layanan	100%
	persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	88%		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kerja Sama Inovasi Pelayanan yang Ditindaklanjuti	100%
	persentase data balikan yang dilaporkan oleh SKPD	100%		Persentase data balikan yang dilaporkan oleh Lembaga Pengguna	100%

3.1.2 Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini, tidak ada perubahan terhadap jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan 4 program, 11 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Nama PD : Disdukcapil Kabupaten Banjar

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10,469,489,401	10,955,224,425	485,735,024	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.7	94.70	9,786,830,201	10,225,987,025	439,156,824	
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	n/a	A	66,935,000	52,011,100	(14,923,900)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Dukcapil	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Disdukcapil	92	92.74	9,786,830,201	10,225,987,025	439,156,824	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	66,935,000	52,011,100	(14,923,900)	efisiensi belanja pemerintah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13	13	42,865,000	34,072,100	(8,792,900)	efisiensi belanja pemerintah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	22	17,309,000	14,432,000	(2,877,000)	efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	3,597,000	2,315,000	(1,282,000)	efisiensi belanja pemerintah

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	8	20	3,164,000	1,192,000	(1,972,000)	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	4,745,619,800	4,724,403,600	(21,216,200)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30	30	4,504,900,000	4,504,900,000	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	45	45	231,059,800	211,815,000	(19,244,800)	efisiensi belanja pemerintah

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	2	4,200,000	3,338,400	(861,600)	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16	16	5,460,000	4,350,200	(1,109,800)	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	100	100,000,000	45,000,000	(55,000,000)	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	10	100,000,000	45,000,000	(55,000,000)	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	100	2,039,853,300	2,570,750,224	530,896,924	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	9	7,403,000	7,403,000	0	Penyesuaian target sesuai jumlah paket yang akan diadakan

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46	46	1,065,773,000	1,532,587,724	466,814,724	Penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan untuk implementasi ISO 27001, printer KIA, Printer KTP, adaptor laptop, wireless, Ribbon KTP, Ribbon KIA, PC dan software serta peralatan untuk pengelolaan Medsos Disdukcapil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	77	77	70,895,800	78,587,000	7,691,200	Penambahan anggaran untuk pengadaan tisu, ATK, Kertas dan alat kebersihan

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	6	33,792,500	143,455,500	109,663,000	Penambahan volume pengadaan Blanko KIA dan jilid map
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	6,287,000	6,280,000	(7,000)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	855,702,000	802,437,000	(53,265,000)	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	2,291,820,101	2,291,220,101	(600,000)	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	5,650,000	5,650,000	0	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	254,840,101	254,840,101	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	2,031,330,000	2,030,730,000	(600,000)	efisiensi belanja pemerintah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100	100	542,602,000	542,602,000	0	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	42,750,000	42,750,000	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	21	368,320,000	368,320,000	0	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	3	55,062,000	55,062,000	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	141	141	76,470,000	76,470,000	0	
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	73.5	81	682,659,200	729,237,400	46,578,200	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99.81	99.99	79,421,500	153,685,100	74,263,600	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	56.5	62				
	persentase penyelesaian permohonan layanan pendaftaran penduduk yang memenuhi persyaratan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	n/a	3.20				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pengguna layanan pendaftaran penduduk yang dapat memenuhi persyaratan	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dari permohonan penerbitan dokumen yang dilayani	100	100	79,421,500	153,685,100	74,263,600	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36	36	67,921,500	144,084,500	76,163,000	Penambahan Kegiatan Sosialisasi Peraturan undangan adminduk sebanyak 5 kegiatan (Rekomendasi Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjar)
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24	24	11,500,000	9,600,600	(1,899,400)	efisiensi belanja pemerintah
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	96	97.50	263,500,000	302,426,600	38,926,600	
	persentase penyelesaian permohonan layanan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	n/a	100				

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUB AHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	n/a	100				
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Non Muslim	n/a	100				
Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pengguna layanan pencatatan sipil yang dapat memenuhi persyaratan	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dari permohonan penerbitan dokumen yang dilayani	100	100	263,500,000	302,426,600	38,926,600	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	758	1200	85,000,000	69,392,000	(15,608,000)	efisiensi belanja pemerintah

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	35000	20000	178,500,000	233,034,600	54,534,600	Penyesuaian target sub kegiatan, Penambahan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan adminduk sebanyak 5 kegiatan (Rekomendasi Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjar)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang Sesuai Aturan	Persentase Pengelolaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang Sesuai Aturan	100	100	339,737,700	273,125,700	(66,612,000)	

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
	persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi	100	100				
	persentase jaringan SIAK yang dikelola dengan baik	Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK yang Dikelola dengan Baik di Seluruh Titik Layanan	100	100				
	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan	100	100				
	Persentase peningkatan titik layanan	Persentase peningkatan titik layanan	20	100				

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
	persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	88	100				
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	persentase penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	100	78,362,700	63,435,200	(14,927,500)	efisiensi belanja pemerintah
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	125	125	78,362,700	63,435,200	(14,927,500)	efisiensi belanja pemerintah
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK	Persentase titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan SIAK	100	100	177,375,000	152,496,500	(24,878,500)	efisiensi belanja pemerintah

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUB AHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	43	43	177,375,000	152,496,500	(24,878,500)	efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti	Persentase Kerja Sama Inovasi Pelayanan yang Ditindaklanjuti	100	100	84,000,000	57,194,000	(26,806,000)	
	persentase data balikan yang dilaporkan oleh SKPD	Persentase data balikan yang dilaporkan oleh Lembaga Pengguna	100	100				

TUJUAN/SASARAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAN/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN/KE TERANGAN
			RENJA 2025	PERUB AHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36	36	65,000,000	41,899,200	(23,100,800)	efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	25	25	19,000,000	15,294,800	(3,705,200)	efisiensi belanja pemerintah

Sumber data: Aplikasi SIPD RI (<http://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)

3.1.3 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Pada tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Banjar memiliki pagu APBD sebesar **Rp. 10.469.489.401,-** (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) sedangkan pagu indikatif Perubahan tahun 2025 yang diberikan kepada Disdukcapil Kabupaten Banjar adalah untuk program bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. **10.955.224.425,-** (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. **485.735.024,-** (Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).

Pada tabel di bawah ini, akan dijelaskan sumber rincian pendanaan dari dana APBD. Rincian tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.3
Sumber Rincian Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
Tahun 2025

No	Sumber Pendanaan	Pagu 2025	Pagu Perubahan 2025	(+/-)
1	APBD	10.469.489.401	10.955.224.425	485.735.024

3.1.4 Alasan Dilakukan Perubahan

Alasan dilakukan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025 disebabkan oleh hal sebagai berikut.

1. Menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

2. Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Bidang Melebihi dari Target yang telah ditetapkan.
3. Surat dari Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 700.1.2/89/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
5. Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.
6. Penyesuaian rincian belanja untuk memenuhi kebutuhan sub kegiatan.
7. Penambahan paket pengadaan sesuai kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk dimana peralatan dan perlengkapan kantor tersebut akan mendukung langsung pelayanan Adminduk di seluruh titik pelayanan.
8. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan ATK untuk penerbitan dokumen kependudukan serta bahan kebersihan/peralatan kebersihan untuk Kantor Induk Disdukcapil Kabupaten Banjar dan UPTD Gambut serta UPTD Mataraman;
9. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan makmin rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah khususnya kegiatan Jempol Pelanduk yang diperkirakan akan habis pada bulan September 2025 serta untuk mengakomodir koordinasi ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI dalam rangka pengambilan Blanko KTP Elektronik dan koordinasi pemanfaatan data kependudukan dan koordinasi terkait inovasi pelayanan di Kabupaten Banjar.

10. Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan biaya langganan internet Starlink yang digunakan untuk pelayanan adminduk di lapangan;
11. Penambahan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan adminduk sebanyak 10 kegiatan (Rekomendasi Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjar).
12. Penambahan anggaran untuk pengadaan ATK, Kertas dan cover, makmin rapat, serta untuk promosi program dan pelayanan adminduk.
13. Penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan untuk implementasi ISO 27001, printer KIA, Printer KTP, adaptor laptop, wireless, Ribbon KTP, Ribbon KIA, PC dan software serta peralatan untuk pengelolaan Medsos Disdukcapil
14. Pengadaan Blanko KIA (Kartu Identitas Anak) untuk memenuhi kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Harus Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa dalam melakukan Renja Perubahan maka Disdukcapil Kabupaten Banjar telah memperhatikan prioritas sub kegiatan mana saja yang dilakukan perubahan.
2. Dalam pelaksanaan Renja Perubahan ini Disdukcapil Kabupaten Banjar secara umum ada pengurangan anggaran secara signifikan, yang mana perubahan anggaran tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya pada Renja 2025.
3. Renja Perubahan disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang bersandar pada Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.
4. Jika nanti pada pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini terdapat kekurangan anggaran maka Pengguna Anggaran dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya kebutuhan anggaran tersebut dan kemungkinan untuk dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya (tahun 2026).
5. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Renja Perubahan ini disusun sebagai:

- a. Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rancangan Renstra Disdukcapil Kabupaten Banjar dan Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.
 - b. Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Banjar tahun 2025
 - c. Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025.
2. Saat Renja Perubahan ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.
 3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disdukcapil Kabupaten Banjar terhadap Renja Perubahan Tahun 2025, yaitu sebagai berikut.

1. Agar segenap bidang segera melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat tidak ada pengurangan anggaran pada bidang teknis.

2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memastikan kegiatan Jemput Bola Pelayanan Langsung (Jempol Pelanduk) yang selama ini telah berjalan dapat terus dilaksanakan dengan efektif.
4. Memastikan terjaganya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Disdukcapil Kabupaten Banjar dengan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
5. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan.

Sebagai bagian dari upaya menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025, telah dilakukan identifikasi terhadap berbagai risiko strategis yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu, mitigasi risiko menjadi langkah penting yang harus ditempuh secara sistematis. Beberapa strategi mitigasi terhadap risiko strategis tersebut telah disiapkan melalui berbagai upaya yang akan dilaksanakan dengan cermat dan terintegrasi guna memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diminimalisasi dan tidak mengganggu pencapaian target pembangunan kependudukan secara menyeluruh.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja Perubahan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Renja Perubahan Disdukcapil Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Martapura, 20 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar,

Hayatun Nupus, S.STP., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19810906 200003 2 001

15. Dinas Perhubungan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Banjar disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi strategis yang terjadi setelah penetapan Rencana Kerja awal tahun 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Beberapa faktor utama yang mendorong perlunya penyusunan Renja Perubahan **Akhir** DISHUB Tahun 2025 antara lain: adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah, termasuk kebijakan fiskal dan arahan pembangunan terbaru; perubahan asumsi dasar dan prioritas pembangunan.

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester pertama tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyempurnaan target kinerja, penyesuaian lokasi dan sasaran kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan **Akhir** ini juga merupakan bagian dari komitmen Dishub Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) **2021-2026**, yaitu:

" TERWUJUDNYA KINERJA PERHUBUNGAN BERKUALITAS "

Renja Perubahan **Akhir** Dishub Kabupaten Banjar Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang responsif dan relevan, sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dalam mewujudkan Kinerja Perhubungan yang berkualitas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Banjar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Tanggal 31 Desember 2018;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya **Perubahan Dinas Perhubungan** Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji RKPD Kabupaten Banjar berdasarkan evaluasi kinerja Dishub sampai dengan Triwulan I tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra Dishub, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishub.
- b) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2025 ini adalah untuk :

- a) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang Perhubungan
- b) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang Perhubungan.
- d) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana.
- e) Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKJIP, LPPD, dan LKPJ

1.4. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Akhir Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan 3 program, 2 program utama yaitu 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) dan 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN serta terdiri dari 1 Program Penunjang yaitu 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA yang terdiri dari 20 Kegiatan dan 56 sub kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas	DINAS PERHUBUNGAN		Rasio	92.5	20,846,675,187.00	2,487,642,550.00	0	11.93	0.0
	Angka kecelakaan			Persen	85			0		0.0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Indeks	78	10,491,240,301.00	2,001,674,608.00	0	19.1	0.0
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	57,239,700.00	2,280,000.00	25	4.0	25.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	8,000,000.00	2280000	0	28.5	0.0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	11,430,000.00	0	2	0.0	50.0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	8,049,700.00	0	2	0.0	66.7
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	8,760,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	1	10,500,000.00	0	0.5	0.0	50.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	10,500,000.00	0	0	0.0	0.0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	6,253,287,800.00	1,364,732,171.00	25	21.8	25.0
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	6,030,700,000.00	1356112171	37	22.5	100.0
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	500	213,720,000.00	8620000	42	4.0	8.4

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8,867,800.00	0	0	0.0	0.0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100	7,997,000.00	0.00	25	0.0	25.0
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	7,997,000.00	0	3	0.0	25.0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	137,622,300.00	35,200,000.00	25	25.6	25.0
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	77,622,300.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	60,000,000.00	35200000	5	58.7	71.4
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	100	258,276,800.00	50,786,020.00	25	19.7	25.0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11,810,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	71,936,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	24,102,000.00	566000	0	2.3	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10,138,800.00	1692000	0	16.7	0.0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	11,050,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	129,240,000.00	48528020	3	37.5	25.0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	1,413,262,000.00	0.00	0	0.0	0.0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1,184,787,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	34	58,557,000.00	0	0	0.0	0.0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	18	169,918,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	1,796,944,701.00	431,245,847.00	25	24.0	25.0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	79,949,701.00	15432247	3	19.3	25.0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1,716,995,000.00	415813600	3	24.2	25.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	566,610,000.00	117,430,570.00	25	20.7	25.0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	42,750,000.00	8500000	0	19.9	0.0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	435,910,000.00	61830570	4	14.2	16.0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	58	42,870,000.00	2300000	8	5.4	13.8

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	45,080,000.00	44800000	1	99.4	100.0
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Persen	70.19	5,350,114,200.00	303,374,692.00	70	5.7	99.7
	1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persen	100	1,182,731,140.00	62,874,692.00	25	5.3	25.0
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	624,151,040.00	28300000	0	4.5	0.0
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	6050	350,832,200.00	34574692	1365	9.9	22.6

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	6000	112,500,000.00	0	0	0.0	0.0
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	22,334,500.00	0	0	0.0	0.0
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	1	72,913,400.00	0	0	0.0	0.0
		1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	62.5	4,072,383,060.00	240,500,000.00	0	5.9	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	260,641,600.00	3000000	0.2	1.2	20.0
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	unit	12	3,811,741,460.00	237500000	0	6.2	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
			Terintegrasi Secara Elektronik							
		1 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen	100	95,000,000.00	0.00	0	0.0	0.0
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	95,000,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Persen	80	1,605,042,976.00	1,306,250.00	17.81	0.1	22.3
		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persen	85	1,342,046,826.00	900,000.00	0	0.1	0.0
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota	unit	3	397,995,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota	unit	115	817,120,326.00	900000	0	0.1	0.0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan yang terhabilitai dan terpelihara	unit	2	46,617,500.00	0	0	0.0	0.0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	71	80,314,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
	2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Persen	68.75	262,996,150.00	406,250.00	0	0.2	0.0
		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	219,008,650.00	406250	0	0.2	0.0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	43,987,500.00	0	0	0.0	0.0
	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0.37	2,202,812,610.00	148,494,000.00	0	6.7	0.0
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen	100	112,262,500.00	0.00	25	0.0	25.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	112,262,500.00	0	0	0.0	0.0
		3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0.37	2,067,603,110.00	148,494,000.00	0	7.2	0.0
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	955,790,110.00	148494000	0	15.5	0.0
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	2	180,610,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota							
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	2	19,240,000.00	0	0	0.0	0.0
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	4	705,871,000.00	0	0	0.0	0.0
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Laporan	5	206,092,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		3 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	80	8,607,000.00	0.00	0	0.0	0.0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	3,305,000.00	0	0	0.0	0.0
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	5,302,000.00	0	0	0.0	0.0
		3 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	86.67	14,340,000.00	0.00	0	0.0	0.0
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	14,340,000.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		4PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Persen	70	459,082,200.00	4,720,000.00	0	1.0	0.0
		4Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	80	364,082,200.00	4,720,000.00	20	1.3	25.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	31,370,200.00	0	0	0.0	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	332,712,000.00	4720000	0	1.4	0.0
		4 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100	95,000,000.00	0.00	20	0.0	20.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	95,000,000.00	0	0	0.0	0.0
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persen	74	738,382,900.00	28,073,000.00	0	3.8	0.0
		5 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	74	738,382,900.00	28,073,000.00	0	3.8	0.0
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	unit	5	442,613,000.00	27473000	0	6.2	0.0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pagu Tahunan	Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja	
							Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Kinerja TW I	%Keuangan	%Kinerja
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	8	295,769,900.00	600000	1	0.2	12.5

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan I 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Indeks	0	0.00	100.00	MEMENUHI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	25	25	100	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100.0	MEMENUHI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	66.7	TIDAK MEMENUHI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0.5	100.0	MEMENUHI
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	100.0	MEMENUHI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	25	25	100	MEMENUHI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	37	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	125	139	100	MEMENUHI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	25	25	100	MEMENUHI
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100.0	MEMENUHI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	25	25	100	MEMENUHI
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	100.0	MEMENUHI
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	5	250.0	MEMENUHI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persen	25	25	100	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0.25	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.25	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.5	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.25	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	3	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3	100.0	MEMENUHI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	25	0	0	TIDAK MEMENUHI
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	25	25	100	MEMENUHI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	100.0	MEMENUHI
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	100.0	MEMENUHI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	25	25	100	MEMENUHI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	0	0.0	TIDAK MEMENUHI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	4	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	8	53.3	TIDAK MEMENUHI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100.0	MEMENUHI
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	Persen	0	70.00	100.00	MEMENUHI
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persen	100	100	100	MEMENUHI
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1365	1365	100.0	MEMENUHI
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0.2	100.0	MEMENUHI
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit	3	3	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Umum	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Persen	0	17.81	100.00	MEMENUHI
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitai dan terpelihara	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	0	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal tipe c sesuai standar	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0	100.0	MEMENUHI
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0	0.00	100.00	MEMENUHI
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persen	0	25	100	MEMENUHI
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	100.0	MEMENUHI
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Indeks	0	0	100	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persen	0	0	100	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan serta kelaikan kapal	Persen	0	0.00	100.00	MEMENUHI
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persen	0	20	100	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	100.0	MEMENUHI

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target / Realisasi s/d Triwulan I			Keterangan Kinerja
			Target s/d TW I	Realisasi s/d TW I	% Capaian Kinerja TW I	
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	0	20	100	MEMENUHI
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	100.0	MEMENUHI
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya prasarana transportasi sungai dan danau yang layak	Persen	0	0.00	100.00	MEMENUHI
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Persen	0	0	100	MEMENUHI
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	unit	0	0	100.0	MEMENUHI
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	0	1	100.0	MEMENUHI

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;

Terdapat 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu,
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- j. dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dari total keseluruhan sub kegiatan yang direncanakan, tercatat sebanyak 47 sub kegiatan dan 19 Kegiatan telah berhasil memenuhi target kinerja Triwulan I, dengan capaian realisasi sebesar 100 persen terhadap target yang telah ditetapkan. Sub kegiatan yang memenuhi target tersebut

2.1.3 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 1 Kegiatan yang melebihi target pada Triwulan 1 yaitu sebesar 250% pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Terdapat 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ditargetkan pada Triwulan 1 25% dengan capaian 0% dikarenakan belum ada realisasi pada Kegiatan tersebut belum ada melakukan Pencairan atau pun Pengerjaan disebabkan Aplikasi Pengadaan terbaru yang versi 6 belum siap.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target Triwulan 1 3 Laporan Realisasi 2 Laporan dikarenakan Penghimpunan Dokumen yang sangat banyak sehingga belum selesainya laporan pada triwulan tersebut tetapi di selesaikan di bulan berikutnya
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target triwulan I 1 Laporan Realisasi 0 Laporan disebabkan Laporan dibuat setelah Triwulan tersebut selesai untuk memastikan data dukung yang akurat.
- d. Dan 7 Sub Kegiatan Berikutnya yaitu, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak tercapainya kinerja dikarenakan Aplikasi Pengadaan terbaru yang versi 6 belum siap.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Ketidaktercapaian;

beberapa sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 berpotensi menghambat pencapaian target tahunan dan akumulasi target lima tahunan sebagaimana direncanakan dalam Renstra SKPD. Jika tidak segera dilakukan percepatan atau penyesuaian, maka terdapat risiko ketidaktercapaian indikator kinerja utama, khususnya pada program yang berhubungan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Sebaliknya, sub kegiatan yang melebihi target, khususnya pada kegiatan Terkait Perhubungan, menunjukkan adanya kebutuhan untuk merevisi asumsi perencanaan ke depan, termasuk peningkatan alokasi sumber daya dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan darurat. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian strategi agar capaian program dalam Renstra tetap terjaga dan adaptif terhadap dinamika di lapangan

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian dan ketidaksesuaian realisasi kinerja, perlu dilakukan penguatan koordinasi internal, percepatan pemberian arahan teknis, serta percepatan pengisian jabatan definitif agar proses pengelolaan program tidak terhambat. Selain itu, perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan fleksibilitas waktu dan adaptasi terhadap kondisi lapangan dan kesiapan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran **transportasi** baik darat dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan **Tahun 2024** yang disusun secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran

Untuk rumusan rencana kerja dan pendanaan SKPD tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar Tahun 2025

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar Tahun 2025								
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)
PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan / Setelah Pergeseran	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubah an	Setelah Perubah an	Sesudah Perubaha n			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	78 indeks	78 Persen	89,43 Nilai	10,628,855,3 01.00	10,898,505,301. 00	269,650,000.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	65,219,700.0 0	57,239,700.00	-7,980,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokumen	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokumen	12,000,000.0 0	11,430,000.00	-570,000.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8,619,700.00	8,049,700.00	-570,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9,900,000.00	8,760,000.00	-1,140,000.00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,350,000.00	10,500,000.00	-2,850,000.00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	1 Data	13,350,000.00	10,500,000.00	-2,850,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Terpenuhiya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6,280,947,800.00	6,255,837,800.00	-25,110,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	240,240,000.00	216,270,000.00	-23,970,000.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	558,679,000.00	643,971,000.00	85,292,000.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,007,800.00	8,867,800.00	-1,140,000.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	% Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9,120,000.00	7,997,000.00	-1,123,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9,120,000.00	7,997,000.00	(1.123.000,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Administrasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	152,622,300.00	137,622,300.00	-15,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	108 Paket	108 Paket	77,622,300.00	77,622,300.00	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	7 Orang	75,000,000.00	60,000,000.00	-15,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	336,878,800.00	362,598,800.00	25,720,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11,810,000.00	11,810,000.00	0.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	71,936,000.00	89,603,000.00	17,667,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	25,767,000.00	24,602,000.00	-1,165,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,675,800.00	13,638,800.00	963,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14,990,000.00	11,050,000.00	-3,940,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	199,700,000.00	211,895,000.00	12,195,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,413,262,000.00	1,533,655,000.00	120,393,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit	35 Unit	35 Unit	1,184,787,000.00	1,296,834,000.00	112,047,000.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	4 Unit	58,557,000.00	66,903,000.00	8,346,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	169,918,000.00	169,918,000.00	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,804,194,701.00	1,796,944,701.00	-7,250,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79,949,701.00	79,949,701.00	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,724,245,000.00	1,716,995,000.00	-7,250,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	566,610,000.00	746,610,000.00	180,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42,750,000.00	42,750,000.00	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	25 Unit	25 Unit	435,910,000.00	615,910,000.00	180,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	58 Unit	58 Unit	42,870,000.00	42,870,000.00	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45,080,000.00	45,080,000.00	0.00

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,271,984,640.00	1,500,312,322.00	228,327,682.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	5 Unit	5 Unit	649,791,040.00	954,988,040.00	305,197,000.00
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	6050 Unit	6050 Unit	6050 Unit	371,552,200.00	359,910,882.00	-11,641,318.00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	4500 Dokumen	4500 Dokumen	150,000,000.00	112,500,000.00	-37,500,000.00
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	27,728,000.00	0.00	-27,728,000.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	1 Unit	1 Unit	72,913,400.00	72,913,400.00	0.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan feeder	Persentase angkutan feeder	62,50 Persen	63,33 Persen	63,33 Persen	4,097,613,660.00	4,344,199,860.00	246,586,200.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	282,953,000.00	315,383,400.00	32,430,400.00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Unit	12 Unit	12 Unit	3,814,660,660.00	4,028,816,460.00	214,155,800.00
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000.00	95,000,000.00	-5,000,000.00
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	95,000,000.00	-5,000,000.00

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	85 Persen	60 Persen	60 Persen	1,442,798,82 6.00	1,669,072,126.0 0	226,273,300.00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota	3 Unit	3 Unit	3 Unit	487,174,000. 00	399,116,000.00	-88,058,000.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota	jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota	115 Unit	183 Unit	183 Unit	825,052,326. 00	1,085,794,726.0 0	260,742,400.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan yang terehabilitai dan terpelihara	jumlah prasarana jalan yang terehabilitai dan terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	47,198,500.0 0	46,617,500.00	-581,000.00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarpras terminal yang sesuai standar	Persentase sarpras terminal yang sesuai standar	68,75 Persen	68,75 Persen	68,75 Persen	268,274,950. 00	268,009,550.00	-265,400.00
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	224,287,450. 00	224,022,050.00	-265,400.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	43,987,500.0 0	43,987,500.00	0.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	Persentase Titik Parkir berizin yang Dikelola	100 Persen	100 Persen	100 Persen	117,227,500. 00	168,162,500.00	50,935,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	117,227,500.00	168,162,500.00	50,935,000.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,37 indeks	100 Persen	100 Persen	2,219,549,710.00	3,382,407,010.00	1,162,857,300.00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,026,512,110.00	1,216,209,810.00	189,697,700.00
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	196,000,000.00	180,610,000.00	-15,390,000.00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	34,040,000.00	19,240,000.00	-14,800,000.00
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	707,791,800.00	1,760,255,200.00	1,052,463,400.00

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	255,205,800.00	206,092,000.00	-49,113,800.00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	80 Persen	72,5 Persen	72,5 Persen	18,314,000.00	8,607,000.00	-9,707,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,876,000.00	3,305,000.00	-1,571,000.00
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13,438,000.00	5,302,000.00	-8,136,000.00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	86,67 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen	31,158,000.00	14,340,000.00	-16,818,000.00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	31,158,000.00	14,340,000.00	-16,818,000.00
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase layanan angkutan sungai dan danau	Persentase layanan angkutan sungai dan danau	80 Persen	1 Persen	1 Persen	417,951,400.00	364,082,200.00	-53,869,200.00

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33,128,400.00	31,370,200.00	-1,758,200.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	384,823,000.00	332,712,000.00	-52,111,000.00

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan PenetapanTarif Angkutan Sungai dan Danau	80 Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase sarpras Dermaga yang sesuai standar	Persentase sarpras Dermaga yang sesuai standar	74 Persen	74 Persen	74 Persen	754,461,800.00	1,389,112,900.00	634,651,100.00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	5 Unit	4 Unit	4 Unit	454,383,000.00	893,343,000.00	438,960,000.00

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	8 Unit	8 Unit	300,078,800.00	295,769,900.00	-4,308,900.00
Total Pagu Anggaran (APBD Perubahan)						21,468,189,787.00	24,291,810,769.00	2,823,620,982.00

BAB IV

RENCANA KERJA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, perubahan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 2 Alasan Perubahan Anggaran Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya atau perlunya bahan laporan yang harus disiapkan, sehingga perlunya bahan pendukung yang harus tersedia
2.	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya atau perlunya bahan laporan yang harus disiapkan, sehingga perlunya bahan pendukung yang harus tersedia
3.	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kondisi dilapangan banyaknya lampu penerangan pada halaman kantor yang usang atau rusak termakan oleh waktu
4.	2.15.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.
5.	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Banyaknya Kunjungan Tamu Pada Dinas Perhubungan serta Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.
6.	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbatasnya anggaran murni mengakibatkan kegiatan tidak terakomodir sehingga perlu penambahan anggaran.
7.	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perlunya Penambahan kendaraan mobil derek untuk mengakomodir kegiatan pada Dishub

8.	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Penambahan kursi tunggu tamu karena tidak tersedia kursi tunggu tamu dikarenakan rusak berat
9.	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belum tersedianya alat penunjang survey serta pendukungnya yang mumpuni dalam penghimpunan data
10.	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingginya tingkat penggunaan kendaraan operasional lapangan untuk kebutuhan survei dan pengawalan sementara umur kendaraan yang sudah tua memerlukan pemeliharaan yang lebih. Anggaran pemeliharaan untuk mobil operasional lapangan yang ada tidak mencukupi maka dari itu terjadi penyesuaian kebutuhan anggaran guna menunjang kelancaran urusan.
11.	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dalam rangka menunjang kegiatan pengujian kendaraan bermotor maka Alat yang digunakan juga harus direhabilitasi secara berkala.
12.	2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam rangka penunjang terselenggaranya angkutan pengumpan untuk pemenuhan fasilitas penyelenggaraan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan diselenggarakan masuk ke kota Martapura
13.	2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam rangka penunjang pemenuhan persyaratan usulan pengajuan pembangunan fasilitas dermaga pada sungai martapura

14.	2.15.02.2.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Perubahan anggaran pada sub kegiatan ini ialah untuk mengakomodasi kegiatan yang belum dianggarkan pada rencana kerja murni yaitu kajian potensi retribusi parkir di Kabupaten Banjar yang memiliki tujuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah kabupaten dalam hal penerimaan retribusi parkir dan potensi retribusi parkir dapat menjadi acuan untuk menetapkan proyeksi PAD dari sektor retribusi parkir di tahun yang Akan datang.
15.	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kurang memadainya alat komunikasi pada setiap anggota yang ada dilapangan sehingga menghambat kinerja dalam rangka kegiatan pengamanan dan lainnya
16.	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan untuk ruas jalan kabupaten terutama marka jalan. 2. belum sepenuhnya terpelihara/ pengecatan median dan trotoar pada wilayah Kota Martapura sehingga membuat penampilan kota Martapura Kurang bagus 3. Kurangnya atau terbatasnya alat pengamanan acara seperti Traffic Cone dan Water Barrier
17.	2.15.02.2.06.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Perlunya penambahan kegiatan untuk menunjang kegiatan pengamanan pada kegiatan hari Natal dan Tahun Baru serta Posko Pengamanan Haul
18.	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemenuhan usulan musrembang untuk menunjang kegiatan sekolah (fasilitas Pendukung angkutan umum)
19.	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan Kabupaten sehingga perlunya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dalam

		rangka menunjang penurunan angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Banjar dalam Hal Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan seperti Rambu Jalan, RPPJ dan Cermin Tikung.
--	--	---

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan **Akhir** DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan strategis dalam penanggulangan bencana, serta merespons perkembangan situasi aktual yang memerlukan perencanaan ulang terhadap target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN yang lebih adaptif dan efektif.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan **Akhir** Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Prioritisasi Kegiatan

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar perlu menerapkan skala prioritas terhadap program dan kegiatan. Kegiatan yang bersifat mendesak, berdampak langsung terhadap Masyarakat, serta berkaitan dengan penunjang atau belum berdampak langsung dapat dijadwalkan ulang atau disesuaikan.

2. Penguatan Kolaborasi dan Sumber Daya Alternatif

Keterbatasan anggaran dapat diatasi sebagian dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain, termasuk organisasi masyarakat.

3. Efisiensi Pelaksanaan

Perlu dilakukan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, integrasi kegiatan **antarbidang**, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, khususnya dalam sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi.

4. Pemantauan dan Penyesuaian Berkala

Pelaksanaan program dan kegiatan perlu disertai dengan pemantauan secara periodik untuk memastikan capaian output dan outcome sesuai rencana. Dalam hal terdapat kendala realisasi anggaran atau pelaksanaan, DINAS PERHUBUNGAN melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana kerja secara t
epat waktu dan terukur.

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang terencana, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan berikut:

1. Koordinasi Antarbidang yang Konsisten

Setiap bidang di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN wajib menjaga komunikasi dan koordinasi yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, guna memastikan sinergi, efisiensi sumber daya, serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

2. Disiplin Administrasi dan Dokumentasi

Seluruh kegiatan harus disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dokumentasi kegiatan yang rapi dan sistematis menjadi dasar pertanggungjawaban internal maupun eksternal.

3. Pemantauan Berkala

Kepala pelaksana dan pejabat struktural wajib melakukan pemantauan rutin terhadap progres kegiatan di unit masing-masing. Masalah yang muncul di lapangan harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berjenjang.

4. Penerapan Skala Prioritas Internal

Dalam kondisi keterbatasan waktu atau sumber daya, setiap bidang harus mampu memilah kegiatan mana yang paling krusial dan berdampak luas terhadap masyarakat, untuk didahulukan pelaksanaannya.

5. Kedisiplinan Waktu dan Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD. Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretariat dan disetujui oleh Kepala Pelaksana.

6. Peningkatan Kapasitas SDM

Setiap pelaksanaan kegiatan harus menjadi bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas pegawai. Penguatan kompetensi teknis dan manajerial dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan, dan studi lapangan yang relevan.

Untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Kerja Perubahan **Akhir Tahun 2026** tidak hanya menjadi acuan administratif, DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Internalisasi Dokumen Renja

- Melaksanakan sosialisasi hasil perubahan rencana kerja kepada seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar.
- Menyusun penjabaran teknis kegiatan hingga ke level pelaksana operasional agar seluruh pegawai memahami tujuan, target, dan indikator yang harus dicapai.

2. Penyusunan Rencana Operasional Bidang

- Masing-masing bidang diwajibkan menyusun rencana kerja teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan (**time schedule**), termasuk kebutuhan sumber daya dan dukungan logistik.
- Penetapan penanggung jawab kegiatan secara rinci untuk menjamin pelaksanaan tepat waktu dan sasaran.

3. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

- Mengaktifkan sistem monitoring internal berbasis data dan pelaporan rutin **antarbidang**.
- Melaksanakan evaluasi triwulanan untuk menilai capaian kegiatan, efektivitas pelaksanaan, serta menyusun langkah korektif jika diperlukan.

4. Koordinasi Penganggaran dan Penyesuaian DPA

- Menyusun perubahan DPA-SKPD sesuai hasil Renja Perubahan **Akhir**, serta melakukan koordinasi teknis dengan BPKAD dan **Bappeda** terkait penyesuaian alokasi anggaran.
 - Menyiapkan justifikasi kebutuhan anggaran lanjutan jika terdapat kekurangan dukungan terhadap kegiatan prioritas
-

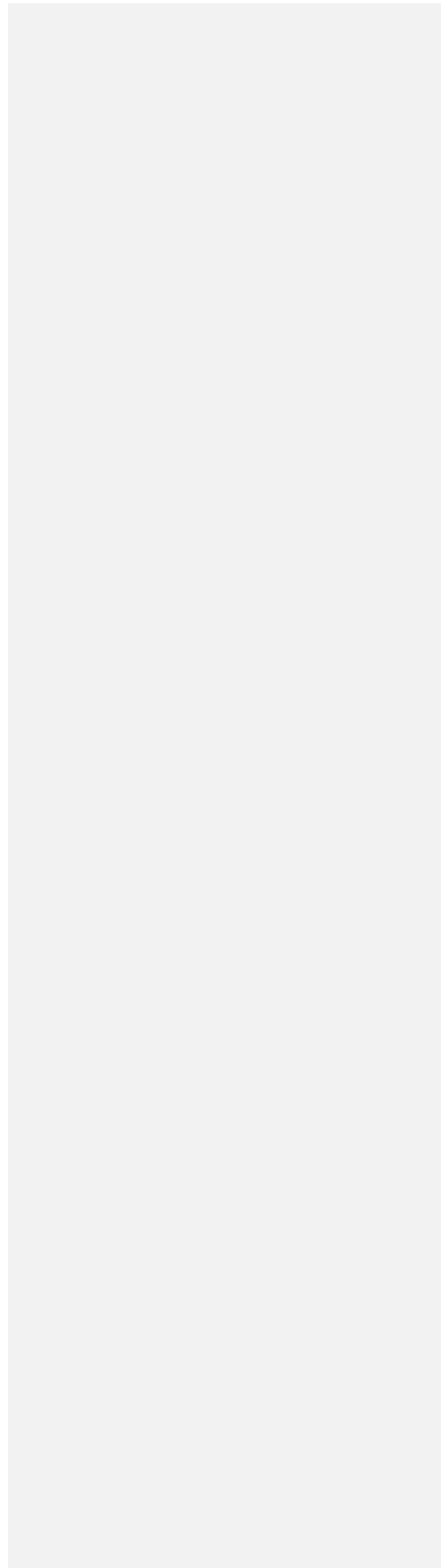
5. Penyelarasan dengan Kebijakan Strategis Daerah

- Memastikan bahwa kegiatan dalam Renja Perubahan Akhir tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 dan Renstra DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Banjar 2025-2029, terutama dalam sasaran an tujuan yang akan dicapai.

Commented [1]: Beda ukuran huruf

Martapura, Juli 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR,

Dr. I.GUSTI NYOMAN YUDIANA,
M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199010 1 001



16. Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridlonya, dengan berlandaskan semangat untuk menjadipelayan masyarakat yang baik, maka telah disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

Program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan, dalam rangka untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mencapai apa yang telah direncanakan, sesuai dengan program yang di harapkan, Amin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah merupakan penjabar dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banjar untuk lima Tahun ke depan.

perencanaan yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2025 dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika, yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421)
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor *61 Tahun 2019* tentang Rancana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor *65 Tahun 2010* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor *12 Tahun 2017* tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.;
- p. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

- v. Peraturan Bupati Banjar nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar;
- w. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi KerjaDinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.pada tahun 2025. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di Tahun 2025 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati / Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Banjar.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan PersandianTahun 2025 ini sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Sampai Dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025 dari total nilai pagu sebesar **Rp.21.211.467.090,-** dan realisasi sebesar **RP.11.407.108.138,-** (53,78%) yang diampu oleh lima program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Adanya aplikasi aplikasi baru yang masih memerlukan penyesuaian seperti inaproc e-katalog v6 dan coretax.
2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Pihak penyedia barang yang diminta belum terdaftar di katalog v6, sehingga memerlukan waktu untuk proses registrasi ulang.

Dari lima program ada dua program yang masih rendah ralisasi

yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pagu anggaran Rp.187.144.700.- dengan realisasi keuangan Rp.21.766.375,- (11,63%) dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan pagu sebesar Rp.180.787.400,- dan realisasi keuangan Rp. 19.910.600 (11,01%). Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program ini adalah :

1. Adanya aplikasi aplikasi baru yang masih memerlukan penyesuaian seperti inaproc e-katalog v6 dan coretax.
2. Pihak penyedia barang yang diminta belum terdaftar di katalog v6, sehingga memerlukan waktu untuk proses registrasi ulang.
3. Anggaran yang berubah terkait dengan adanya efisiensi anggaran
4. Penyusunan anggaran dpa perubahan (ABT) yang dipercepat sehingga ada beberapa anggaran belanja modal yang perlu ditambah atau dikurangi sehingga belum bisa direalisasikan sampai dpa resmi terbit.

Dari kinerja yang telah dilaksanakan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar telah merealisasikan 5 Program 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada triwulan II Tahun 2025 program ini realisasi fisik sebesar 49,87% dan realisasi keuangan sebesar 44,70%. Dalam program ini ada 8 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri atas 10 Sub Kegiatan yakni:
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi fisik sebesar 86%, realisasi keuangan 60,43% dan capaian kinerja 66,67%. Faktor pendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini

tersedianya aplikasi pendukung kerja, Komitmen tinggi petugas untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik;

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, realisasi fisik sebesar 85%, realisasi keuangan 19,76% dan capaian kinerja 0.0 %. Capaian masih 0 % karena Dokumen RKA akan disusun pada triwulan III;
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 51.02% dan capaian kinerja 100% .capaian 100% karena Dokumen Pergeseran RKA hasil rasionalisasi anggaran telah disusun pada triwulan I.
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, realisasi fisik sebesar 35%, realisasi keuangan 33.62% dan capaian kinerja 100%. Lancarnya koordinasi penyusunan Dokumen DPA karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD, realisasi fisik sebesar 55%, realisasi keuangan 0.0% dan capaian kinerja 0.0 %. Capaian masih 0 % karena Dokumen Perubahan DPA akan disusun pada triwulan III;
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi fisik sebesar 52%, realisasi keuangan 42,80% dan capaian kinerja 50%, terpenuhinya penyusunan laporan Capaian Kinerja yang tepat waktu karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi fisik sebesar 37%, realisasi keuangan 22,73% dan capaian

kinerja sebesar 25%. Sub kegiatan ini masih 25% karena laporan evaluasi kinerja triwulan II akan disusun pada triwulan III;

1.1.8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, realisasi fisik sebesar 48%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Sub kegiatan ini masih 0% karena Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah akan disusun pada triwulan IV;

1.1.9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, realisasi fisik sebesar 48%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 78,95%. Sub kegiatan ini realisasi keuangan masih 0% karena data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa akan selesai disusun pada triwulan IV dan realisasi keuangan berupa makam minum rapat;

1.1.10. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 92,95% dan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan ini teralisasi karena adanya Komitmen tinggi para ASN untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas 4 sub kegiatan yakni :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi fisik sebesar 45%, realisasi keuangan 46,63% dan capaian kinerja sebesar 100%. Lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan karena Komitmen tinggi petugas untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik serta adan Aplikasi pendukung dan Petugas Operator yang teliti, cepat

dan tepat waktu;

- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi fisik sebesar 43%, realisasi keuangan 46,98% dan capaian kinerja sebesar 0,00%. Sub kegiatan ini masih 0% karena dalam hal pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD masih ditemukan SPJ yang masih kurang kelengkapan berkasnya, terdapat kesalahan pada penulisan sub kegiatan dsb sehingga memperlambat proses verifikasi, selain itu pada beberapa kegiatan, ditemukan SPJ yang anggarannya tidak tersedia sehingga tidak dapat diproses;
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi fisik sebesar 85%, realisasi keuangan 29,51% dan capaian kinerja sebesar 0,00%. Yang menjadi penghambat adalah proses Rekon BMD memakan waktu yang lama sehingga proses pembuatan CaLK, Neraca dan Penyusutan BMD menunggu hasil Rekon (Berita Acara Rekon), menunggu Hasil Audit Tim Auditor BPK;
- 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, realisasi fisik sebesar 43%, realisasi keuangan 6,13% dan capaian kinerja sebesar 16,67%. Untuk penginputan realisasi belanja operasional, penginputan pajak seringkali SIPD RI mengalami gangguan, masih menyesuaikan dengan aplikasi baru pajak (coretax), terjadi bug pada aplikasi SIPD Langkar yang menyebabkan pembukuan tidak sesuai dengan pencatatan transaksi SPJ dan pajak yang seharusnya.
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah, yang terdiri atas 1 Sub kegiatan yakni :

- 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, realisasi fisik sebesar 43%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 28,57%. Untuk realisasi keuangan belum terserap karena masih persiapan untuk pengadaan atau belanja barang dengan e-purchasing dan pembuatan spj, sehingga akan direalisasikan di bulan berikutnya, Menunggu Perhitungan Akumulasi Aset dari Bidang Aset dan untuk Laporan BMD sebagai Laporan Keuangan Akhir Tahun TA. 2024 masih dilakukan audit oleh tim BPK RI.
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas 1 Sub kegiatan yakni :
 - 1.4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 97.10% dan capaian kinerja sebesar 100%. Bimbingan teknis terlaksana dengan baik karena adanya Kompetensi memadai serta komitmen yang tinggi dari para ASN.
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas 6 Sub Kegiatan
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, realisasi fisik sebesar 15%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Sub kegiatan ini terhambat karena masalah ketersediaan material, jika material atau komponen listrik yang diperlukan tidak tersedia di pasar atau terhambat oleh distribusi, pekerjaan bisa tertunda.
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik sebesar 27%, realisasi keuangan 6,43% dan capaian kinerja sebesar 20%. Rendahnya realisasi pada sub kegiatan ini karena belum tersedianya

perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia sesuai dengan yang diperlukan dan adanya pergeseran anggaran;

- 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 71,38% % dan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan ini terlaksana dengan baik karena pemilihan penyedia yang Tepat, menjalin kerja sama dengan vendor atau penyedia barang yang memiliki reputasi baik dan pengalaman dalam pengadaan peralatan kantor bisa mempercepat proses serta memastikan kualitas barang yang sesuai.
- 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi fisik sebesar 53%, realisasi keuangan 37,01% dan capaian kinerja sebesar 20%. Sub kegiatan ini tertunda pelaksanaan karena terdapat perubahan kebutuhan sehingga ditunda atau akan direalisasikan pada bulan berikutnya;
- 1.5.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu, realisasi fisik sebesar 55%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 50%. Sub kegiatan ini tidak terserap anggaran karena jadwal kunjungan tidak pasti atau sering berubah, pengajuan atau realisasi anggaran tidak lancar, waktu kunjungan tidak sesuai dengan ketersediaan pihak yang akan dikunjungi atau yang akan menerima kunjungan;
- 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi fisik sebesar 58%, realisasi keuangan 38,49% dan capaian kinerja sebesar 50%. karena Prosentase capaian output yang melampaui target dalam perhitungan target kinerja output karena anggaran untuk satu kali perjalanan dinas yang

digunakan untuk keberangkatan 2 (dua) orang, memungkinkan untuk dihadiri oleh 1 (satu) orang saja dan dipergunakan untuk perjalanan dinas dengan intensitas lebih banyak, Termasuk penggunaan sarana transportasi yang lebih murah sehingga memungkinkan jumlah output yang lebih banyak;

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 1 Sub Kegiatan yakni :

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 81,50% dan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan ini terlaksana dengan baik karena perencanaan kebutuhan yang matang, ketersediaan anggaran yang memadai, kebijakan pengadaan yang mendukung efisiensi dan efektivitas, pemanfaatan e-katalog secara optimal, koordinasi yang baik antar unit kerja terkait, SDM pengelola pengadaan yang kompeten dan profesional, dukungan dari pimpinan dan stakeholders, adanya standar spesifikasi teknis yang jelas dan sesuai kebutuhan, penyedia barang yang kredibel dan berpengalaman

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 Sub Kegiatan yakni :

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan ini terlaksana dengan baik karena tersedianya anggaran yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang lancar antara penyedia dan SKPD;

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik sebesar 55%, realisasi keuangan 34,53% dan capaian kinerja sebesar 50%. Sub

kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana karena kebutuhan teridentifikasi dengan baik dimana jumlah perangkat, volume penggunaan air/listrik, dan jaringan komunikasi yang diperlukan, fasilitas pendukung tersedia, pemilihan penyedia jasa (vendor/provider) yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik, memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan. dan tepat waktu.

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi fisik sebesar 50%, realisasi keuangan 48,84% dan capaian kinerja sebesar 50%. Sub kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas, ketersediaan anggaran, ketersediaan Infrastruktur yang memadai, kontrak kerja yang mencantumkan hak dan kewajiban secara jelas, dan koordinasi yang baik;

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , terdiri atas 4 Sub Kegiatan yakni :

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik sebesar 53%, realisasi keuangan 53,81% dan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini dikarenakan kerja sama dengan pihak ketiga yang handal: Penyedia jasa pemeliharaan yang memiliki reputasi baik dan sudah berpengalaman dalam menangani kendaraan dinas akan mendukung kualitas pemeliharaan yang optimal;

1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik sebesar 52%,

realisasi keuangan 33,81% dan capaian kinerja sebesar 46,43%. Hal ini karena karena perkiraan biaya pemeliharaan rutin dan berkala sesuai usia kendaraan, anggaran pajak dan perpanjangan STNK/BPKB dianggarkan tepat waktu, adanya alokasi untuk perbaikan darurat, adanya jadwal servis berkala, Pembayaran pajak kendaraan dilakukan tepat waktu (PKB, SWDKLLJ).

1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik sebesar 50%, realisasi keuangan 21,64% dan capaian kinerja sebesar 43,94%. Capaian sub kegiatan ini karena tersusunnya jadwal pemeliharaan rutin dan berkala, identifikasi awal terhadap peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan, beserta spesifikasi dan umurnya, penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil (preventif dan korektif) dan ketersediaan suku cadang dan alat bantu;

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi fisik sebesar 15%, realisasi keuangan 0.0% dan capaian kinerja sebesar 0,00%. Sub kegiatan ini belum terlaksana karena administrasi pengadaan barang/jasa memakan waktu lama, lokasi pekerjaan beririsan dengan aktivitas kantor, menyebabkan pekerjaan terganggu atau dibatasi, rencana kerja tidak berdasarkan hasil survei kondisi bangunan secara aktual, dan kurangnya tenaga teknis.

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Masih kurangnya komitmen pejabat pengelola informasi
- Keterbatasan kuantitas pranata humas
- Anggota KIM kebanyakan kurang memahami IT

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan Informasi kepada masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan

❖ Tindak Lanjut

- Meningkatkan komitmen SKPD terhadap pengelola PPID yang lebih baik
- Meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan
- Melakukan kemitraan dengan media informasi
- Membina dan melanjutkan kerjasama dengan masyarakat (kelompok informasi masyarakat dan kelompok budaya)
- Fasilitasi edukasi pengelola informasi komunikasi publik Kabupaten/Kota dan PPID pembantu

Dalam program ini ada 1 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan terdapat 6 Sub Kegiatan didalamnya yakni :

- 2.1.1. Relasi Media, realisasi fisik sebesar 65%, realisasi keuangan 0.0% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Belum terlaksananya sub kegiatan ini karena tidak ada strategi komunikasi atau peta media yang jelas, target media atau audiens tidak terdefinisi dengan tepat, tidak disusun kalender kegiatan/media plan tahunan;
- 2.1.2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, realisasi fisik sebesar 21%, realisasi keuangan 21,09% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Kondisi ini dikarenakan kegiatan belum berjalan dan akan dilaksanakan pada triwulan III;
- 2.1.3. Pelayanan Informasi Publik, realisasi fisik sebesar 55%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja

sebesar 0.00%. Sub kegiatan ini belum terlaksana karena belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kembali, badan Publik belum didukung database yang lengkap sehingga belum optimal, terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik, masih ada beberapa badan publik yang belum optimal dalam mengklasifikasikan jenis informasi publik yang dimiliki, minimnya advokasi tentang pelayanan informasi publik;

2.1.4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, realisasi fisik sebesar 20%, realisasi keuangan 0.0% dan capaian kinerja sebesar 52,08%. Sub kegiatan ini belum terelaisasi anggaran karena belum terlaksananya kegiatan sosialisasi;

2.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, realisasi fisik sebesar 60%, realisasi keuangan 32,98% dan capaian kinerja sebesar 53,57%. Faktor penghambat pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak adanya strategi komunikasi yang terpadu.

2.1.6. Penyusunan Konten, realisasi fisik sebesar 70%, realisasi keuangan 27,12% dan capaian kinerja sebesar 25% Faktor penghambat sub kegiatan ini adalah minimnya kemampuan teknis dan kreativitas, minimnya akses terhadap sarana pendukung.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kebijakan pusat agar kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan SPBE
- Belum tersedianya seluruh dokumen arsitektur SPBE

- Terbatasnya SDM yang menguasai SPBE

❖ Tindak Lanjut

- Mengajukan kegiatan pengadaan infrastruktur TIK
- Penataan penganggaran infrastruktur TIK antar SKPD
- Upgrade atau meningkatkan maintenance infrastruktur TIK yang ada
- Kerjasama antar SKPD terkait untuk penyediaan fasilitas sistem aplikasi
- Mengoptimalkan kerja tim SPBE
- Meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan

Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam kegiatan ini ada 1 Sub Kegiatan yakni :

3.1.1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 99.94% dan capaian kinerja sebesar 100%. Subkegiatan ini terlaksana dengan baik karena pengadaan barang/jasa dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

3.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 5 sub Kegiatan :

3.2.1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, realisasi fisik sebesar 49%, realisasi keuangan 55,20% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Kondisi ini dikarenakan keterbatasan dari

persyaratan pelatihan dengan peserta ASN (batasan umur dan ijazah), kesulitan peserta dalam proses pendaftaran, perlunya tambahan uang saku atau biaya transportasi peserta pelatihan dari masyarakat, kurangnya literasi SPBE di SKPD;

- 3.2.2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, realisasi fisik sebesar 40%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM Programmer;
- 3.2.3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, realisasi fisik sebesar 33%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Hal ini dikarenakan kurangnya data berbagi pakai antar aplikasi;
- 3.2.4. Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten atau Kota Cerdas, realisasi fisik sebesar 60%, realisasi keuangan 59.74% dan capaian kinerja sebesar 37,33%. Faktor penghambat sub kegiatan ini adalah kurangnya literasi program smart city, kurangnya literasi masyarakat tentang penggunaan layanan 112;
- 3.2.5. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE, realisasi fisik sebesar 95.72%, realisasi keuangan 99.66% dan capaian kinerja sebesar 97,87%. Sub kegiatan ini terlaksana karena adanya identifikasi lokasi dan jumlah perangkat daerah yang memerlukan akses internet, penyesuaian kapasitas bandwidth dengan kebutuhan real-time, mapping area blank spot atau lokasi yang belum terjangkau

layanan.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- SKPD tidak tepat waktu dalam mengumpulkan Data dan Informasi Statistik Sektoral
- Pengelolaan Data Statistik Sektoral SKPD belum memenuhi Standar - SKPD belum secara optimal mendapatkan informasi tentang pengelolaan data statistik
- Jenis data SKPD setiap tahunnya ada yang berubah/ adanya kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta format

❖ Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan Keterampilan/wawasan bagi pengelola data melalui sosialisasi/webinar/workshop terhadap SKPD
- Penerbitan peraturan kepala daerah tentang satu data Kabupaten Banjar
- Sosialisasi prinsip satu data Kabupaten Banjar

Dalam program ini ada 1 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, realisasi fisik sebesar 50%, realisasi keuangan 38,06% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Subkegiatan ini dapat berjalan karena adanya Penerbitan peraturan kepala daerah tentang satu data kabupaten Banjar, akan tetapi untuk capaian kinerja masih dalam proses persiapan pelaksanaan;

4.1.2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, realisasi fisik sebesar 42.00%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 30.00%. subkegiatan ini terkendala karena Jenis data SKPD

setiap tahunnya ada yang berubah/ adanya kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia serta format;

4.1.3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, realisasi fisik sebesar 25.00 %, realisasi keuangan 18,24% dan capaian kinerja sebesar 100%.

4.1.4. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, realisasi fisik sebesar 50.00%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%. Sub kegiatan ini belum terlaksana karena banyak perangkat daerah atau OPD yang belum memahami siklus statistik: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi, tidak memahami standar metadata, metodologi, dan kodefikasi sesuai pedoman Satu Data Indonesia (SDI), tidak ada atau minim SDM dengan latar belakang statistik/data science di OPD.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

- ❖ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja dalam program ini
 - Sumber daya manusia masih terbatas (kuantitas maupun kualitas)
 - Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara sementara masih kurang
 - Sumber daya manusia bersertifikat standar Badan Siber dan Sandi Negara masih belum ada di Kalimantan Selatan (minimal seharusnya 2 orang/ Kabupaten)
 - Kabupaten masih belum fokus menangani Keamanan Informasi
- ❖ Rencana Tindak Lanjut
 - Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk

meningkatkan pembinaan Keamanan Informasi di kabupaten Banjar

- Mengupayakan sertifikasi bagi petugas/auditor
- Meningkatkan jumlah sandiman Kabupaten Banjar
- Meningkatkan sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi
- Sarana Keamanan Informasi akan dipenuhi/ditingkatkan

Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 4 Sub Kegiatan

5.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 40%, realisasi keuangan 29,40% dan capaian kinerja sebesar 100%;

5.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 90.00%, realisasi keuangan 85,54% dan capaian kinerja sebesar 100%;

5.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, realisasi fisik sebesar 15%, realisasi keuangan 0.00% dan capaian kinerja sebesar 0.00%;

5.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik sebesar 69.00%, realisasi keuangan 2,15% dan capaian kinerja sebesar 100%;

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi fisik
sebesar 10%, realisasi keuangan 0.00% dan
capaian kinerja sebesar 25.00%;

Secara keseluruhan realisasi fisik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebesar 62,58% dan realisasi keuangan sebesar 54,15%. Capaian keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ini, masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, anggaran yang kurang optimal tersebut dikarenakan oleh adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Standar Satuan Harga, sehingga banyak rasionalisasi dan aturan-aturan yang menyebabkan pencairan dana kegiatan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana tatakala kegiatan yang telah dirancang.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra masih di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar TA.2025.

Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasinya adalah mempercepat Proses kegiatan dan pengadaan sehingga bisa lebih cepat menyerap anggaran. Apabila ada pekerjaan resiko yang tidak dapat dilaksanakan dan anggaran tidak dapat diserap, maka diusulkan untuk dilakukan perubahan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dengan penyesuaian penganggaran.

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja pada Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II (Januari s/d Juni) TA. 2025

Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2025		REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Murni		PENANGGUNG JAWAB
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
Meningkatkan Layanan Pemerintah Berbasis Digital	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB		-		-		-		Kepala Dinas
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.211.467.090		11.387.197.538		11.387.197.538		54,15	
		2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
		2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi informatika, Statistik dan Persandian	Indeks	82	10.213.552.650	0	4.565.376.410	0	4.565.376.410	0	44,70	Sekretaris

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	per se n	100	71.774.0 00	25	34.845 .800	25	34.845 .800	2 5	48,55	KabubBag Perencanaa n
		2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	8.340.00 0	2	5.040.0 00	2	5.040.0 00	66 ,6 7	60,43	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Doku men	1	6.801.20 0	0	1.344.0 00	0	1.344.0 00	0	19,76	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Doku men	1	5.959.00 0	1	3.040.0 00	1	3.040.0 00	10 0	51,02	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Doku men	1	6.094.80 0	1	2.048.8 00	1	2.048.8 00	10 0	33,62	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Doku men	1	6.560.00 0	0	0	0	0	0	0	KabubBag Perencanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

				SKPD	SKPD										
		2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	6.281.00 0	2	2.688.0 00	2	2.688.0 00	50	42,80	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5.914.00 0	1	1.344.0 00	1	1.344.0 00	25	22,73	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	2.736.00 0	0	0	0	0	0	0	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	114	2.280.00 0	90	0	90	0	78 ,9 5	0	KabubBag Perencanaan
		2 16 01 2.01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Berita Acara	2	20.808.0 00	2	19.341. 000	2	19.341. 000	10 0	92,95	KabubBag Perencanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

				Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		2 16 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	perse n	100	5.308.853.500	25	2.472.378.526	25	2.472.378.526	25	46,57	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	39	5.093.900.000	39	2.375.072.126	39	2.375.072.126	100	46,63	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	200.826.000	0	94.350.000	0	94.350.000	0	46,98	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.941.900	0	2.638.400	0	2.638.400	0	29,51	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Laporan	12	5.185.600	2	318.000	2	318.000	16,67	6,13	Kasubbag Keuangan dan Aset

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase tersusunnya dokumen dan laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	perse n	100	4.247.000	25	0	0	0	0	0	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	7	4.247.000	2	0	2	0	28,57	0	Kasubbag Keuangan dan Aset
		2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	perse n	100	75.000.000	25	72.826.500	25	72.826.500	25	97,10	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	75.000.000	7	72.826.500	7	72.826.500	100	97,10	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya penyelenggaraa n penunjang administrasi umum perangkat daerah	perse n	100	1.148.896.200	25	221.558.348	25	221.558.348	25	19,28	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	9.992.000	0	0	0	0	0	0	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	692.384.000	1	44.500.000	1	44.500.000	20	6,43	kasubbag umpeg

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	26.672.000	4	19.038.000	4	19.038.000	100	71,38	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	14.265.200	1	5.280.000	1	5.280.000	20	37,01	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.778.000	6	0	6	0	50	0	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	396.805.000	6	152.740.348	6	152.740.348	50	38,49	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	persen	100	562.687.000	25	458.600.000	25	458.600.000	25	81,50	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	562.687.000	5	458.600.000	5	458.600.000	100	81,50	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	persen	100	2.439.894.450	25	1.148.712.308	25	1.148.712.308	25	47,08	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100	100	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	310.967.450	6	107.364.188	6	107.364.188	50	34,53	kasubbag umpeg

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	12	2.125.92 7.000	6	1.038.3 48.120	6	1.038.3 48.120	50	48,84	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	perse n	100	602.200. 500	25	156.45 4.928	25	156.45 4.928	2 5	25,98	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	42.750.0 00	1	23.002. 100	1	23.002. 100	10 0	53,81	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	28	368.320. 000	13	124.54 2.828	13	124.54 2.828	46 ,4 3	33,81	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	66	41.178.5 00	29	8.910.0 00	29	8.910.0 00	43 ,9 4	21,64	kasubbag umpeg
		2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	149.952. 000	0	0	0	0	0	0	kasubbag umpeg
	Meningkatn ya Kematangan Domain				Indeks Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indek s	2,1 6		0,0 0		0,0 0		0		Kepala Dinas

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

	Tata Kelola SPBE	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
		2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0,00	4.887.399.500	0,00	1.538.186.040	0,00	1.538.186.040	0	31,47	Kabid IKP
				Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	77,50								Kabid IKP
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang termasuk Kategori Informatif	Persentase	48,94	4.887.399.500	0	1.538.186.040	0	1.538.186.040	0	31,47	Kabid IKP
				Menurunnya Berita Negatif atau Hoaks Terkait Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan berita negatif atau hoaks yang beredar tentang pemerintah daerah di media sosial atau media massa	Persentase	7		0		0		0		Kabid IKP
				Meningkatnya Konsistensi Penyampaian Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan informasi sesuai standar dan panduan yang sama	Persentase	100		0		0		0		Kabid IKP
				Meningkatnya Responsivitas Pemerintah terhadap Isu Publik	Persentase Isu publik yang ditindaklanjuti dalam waktu tertentu	Persentase	100		0		0		0		Kabid IKP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 02 2.01 0014	Relasi media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Lapor an	4	11.880.0 00	0	0	0	0	0	0	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik
		2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komu nitas	30	156.124. 000	0	32.925. 000	0	32.925. 000	0	21,09	Seksi Pengelolaan opini Publik
		2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permo hona n	2	17.024.5 00	0	0	0	0	0	0	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik
		2 16 02 2.01 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Reko mend asi	48	25.027.0 00	25	0	25	0	52 ,0 8	0	Seksi Pengelolaan opini Publik
		2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	Media	28	4.044.16 5.000	15	1.333.5 69.040	15	1.333.5 69.040	53 ,5 7	32,98	Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

					kriteria/juknis										
		2 16 02 2.01 0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	360 0	633.179. 000	900	171.69 2.000	900	171.69 2.000	25	27,12	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik
		2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang memiliki Dokumen Teknis (arsitektur, alur sistem, API) dan SOP layanan lengkap	Perse n	0,0 0	5.742.58 2.840	0,00	5.261. 868.71 3	0,00	5.261. 868.71 3	0, 00	91,63	Kabid Penyelengga raan E-Gov
				Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase layanan Publik berbasis digital yang terintegrasi	perse n	8,7 0								Kabid Penyelengga raan E-Gov
		2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah yang disusun secara terstruktur	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa yang di kelola	Sub Doma in	100	98.855.8 40	100	98.800 .000	100	98.800 .000	10 0	99,94	Kabid Penyelengga raan E-Gov
		2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Doku men	1	98.855.8 40	1	98.800. 000	1	98.800. 000	10 0	99,94	seksi Pengembang an Aplikasi

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Infrastruktur Digital yang Berkualitas dan Tangguh	Persentase Kemampuan Uptime infrastruktur teknologi (jaringan internet, pusat data, dan sistem cloud untuk mendukung aplikasi pemerintah.)	%	99,53	5.643.727.000	99,53	5.163.068.713	99,53	5.163.068.713	100	91,48	Kabid Penyelenggaraan E-Gov
				Meningkatnya kemudahan, Kecepatan mengakses Layanan dan informasi dari Pemerintah Daerah	Persentase platform online (Web dan Aplikasi Pemerintah Daerah) yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat tanpa batasan waktu (24 jam sehari, 7 hari seminggu)	%	100	11.314.769.000	99,53	10.326.137.426	99,53	10.326.137.426	100	91,26	Kabid Penyelenggaraan E-Gov
				Meningkatnya Literasi SPBE bagi Aparatur penyelenggara SPBE	Jumlah aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dasar dalam teknologi informasi dan dapat menggunakan sistem SPBE secara efektif.	aparatur	25	6.010.128.200	99,53	5.365.628.713	99,53	5.365.628.713	398	89,28	Kabid Penyelenggaraan E-Gov
				Meningkatnya Ketersediaan regulasi, standar, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital	Jumlah regulasi, standar, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital	Dok	2	5.643.727.000	99,53	5.163.068.713	99,53	5.163.068.713	4977	91,48	Kabid Penyelenggaraan E-Gov
				Meningkatnya Penguatan Audit Teknologi Digital Pemerintahan Digital	Nilai Kematangan Aspek Audit TIK	TK Kematangan	1	4.971.496.200	99,53	4.792.020.000	99,53	4.792.020.000	9953	96,39	Kabid Penyelenggaraan E-Gov

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 16 03 2.02 0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	672.230.800	0	371.048.713	0	371.048.713	0	55,20	Seksi Tata Kelola E-Gov
		2 16 03 2.02 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3	19.335.000	0	0	0	0	0	0	seksi Pengembangan Aplikasi
		2 16 03 2.02 0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	7.980.000	0	0	0	0	0	0	seksi Pengembangan Aplikasi
		2 16 03 2.02 0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	75	339.086.200	28	202.560.000	28	202.560.000	37,33	59,74	Seksi Tata Kelola E-Gov
		2 16 03 2.02 0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	47	4.605.095.000	46	4.589.460.000	46	4.589.460.000	97,87	99,66	seksi Infrastruktur TIK
	Meningkatnya Kematangan Domain Layanan SPBE				Indeks Kematangan Domain Layanan SPBE	Indeks	3,99		0		0		0		Kepala Dinas
		2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,2 5	187.144. 700	0	21.766 .375	0	21.766 .375	0	11,63	Kabid Standi
				Meningkatnya Kualitas Data	Nilai Kematangan Domain Kualitas Data	Indeks	2,0 8		0		0				Kabid Standi
		2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan terhadap Pedoman statistik Sektoral	Jumlah Data yang sesuai dengan Pedoman statistik Sektoral (Format Metadata)	Data	21	187.144. 700	0	21.766 .375	0	21.766 .375	0	11,63	Kabid Standi
				Terwujudnya Interoperabilita s dan Keterpaduan data Lintas instansi Pemerintah	Jumlah data yang telah sesuai dengan standar kode referensi dan standar pertukaran data.	Data	21		0		0		0		Kabid Standi
		2 20 02 2.01 0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	100	43.754.3 00	0	16.651. 500	0	16.651. 500	0	38,06	Seksi Pengelolaan Data
		2 20 02 2.01 0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Perse n	100	30.715.0 00	30	0	30	0	30	0	Seksi Pengelolaan Data
		2 20 02 2.01 0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Doku men	1	28.036.4 00	1	5.114.8 75	1	5.114.8 75	10 0	18,24	Seksi Penyelenggar aan Statistik
		2 20 02 2.01 0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Doku men	1	84.639.0 00	0	0	0	0	0	0	Seksi Penyelenggar aan Statistik

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

Meningkatnya Kematangan Domain Penerapan Manajemen				Indeks Kematangan Domain Penerapan Manajemen	Indeks	1		0		0		0		Kepala Dinas
	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Person	39,22	180.787.400	0	19.910.600	0	19.910.600	0	11,01	Kabid Standi
			Menurunkan risiko kebocoran informasi	Persentase insiden kebocoran informasi atau akses ilegal	Person	0,00								Kabid Standi
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Sistem informasi Pemerintah Daerah yang berisi Data sensitif (Data Pribadi Pribadi Pegawai, Data Perencanaan Daerah, Data Anggaran) yang telah menerapkan Enkripsi Data	SI	2	149.592.400	0	19.910.600	0	19.910.600	0	13,31	Seksi Penyelenggaraan Persandian
	2 21 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	18.676.000	1	5.490.000	1	5.490.000	100	29,40	Seksi Penyelenggaraan Persandian

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

		2 21 02 2.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	14.346.600	1	12.272.600	1	12.272.600	100	85,54	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	16.497.800	0	0	0	0	0	0	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	27	100.072.000	27	2.148.000	27	2.148.000	100	2,15	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Komunikasi Antar Instansi Pemerintah	Jumlah Saluran Komunikasi Perangkat Daerah (surat elektronik (email), komunikasi Data berbasis Jaringan, atau file sharing) yang telah menerapkan protokol dan prosedur yang aman dalam berkomunikasi	Saluran komunikasi	47	31.195.000	0	0	0	0	0	0	Seksi Penyelenggaraan Persandian
		2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kegiatan	4	31.195.000	1	0	1	0	25	0	Seksi Penyelenggaraan Persandian

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo 2025

					berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah											
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

1. Perubahan Indikator Kinerja

Perubahan indikator kinerja terdapat pada indikator program kegiatan karena menyesuaikan dengan cascading dan pokin terbaru yang didapat dari hasil evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Desk Lanjutan Pembahasan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hari Selasa s.d Sabtu 10 s.d 14 Juni 2025 di Yogyakarta.

2. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, diantaranya ada yang mengalami penambahan dan pergeseran anggaran.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

Secara keseluruhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 mengajukan perubahan dari pagu pergeseran sebesar **Rp 20.722.300.501,-** (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Satu Rupiah*) menjadi **Rp 21.030.679.690,-** (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan usulan penambahan sebesar **Rp 489.166.589,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) yang dirinci seperti halnya pada tabel 3.1. Sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Alasan dilakukan perubahan.

Secara umum alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator kinerja, dan jumlah kegiatan maupun perubahan dana/

pagu indikatif dikarenakan :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak efisiensi belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025.
2. Perubahan Indikator program kegiatan menyesuaikan cascading dan pokin terbaru yang telah ditetapkan dengan reuiu Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2025

SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA 2025						Bertambah / Berkurang	ALASAN PERUBAHAN
						Murni		Pergeseran		Perubahan			
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	Rp	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja				Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB		BB		BB			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN AN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.377.265.701		20.722.300.501		21.211.467.090	489.166.589	
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi informatika,Statistik dan Persandian	Indeks	89	9.768.895.861	89	9.560.798.561	82	10.213.552.650	652.754.089	
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	85.890.000	100	71.774.000	100	71.774.000	-	

2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	3	10.050.000	3	8.340.000	3	8.340.000	-	
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokume n	1	8.629.200	1	6.801.200	1	6.801.200	-	
2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokume n	1	7.379.000	1	5.959.000	1	5.959.000	-	
2 16 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokume n	1	6.778.800	1	6.094.800	1	6.094.800	-	
2 16 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokume n	1	7.323.000	1	6.560.000	1	6.560.000	-	

2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7.649.000	4	6.281.000	4	6.281.000	-	
2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	7.440.000	4	5.914.000	4	5.914.000	-	
2 16 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	3.736.000	1	2.736.000	1	2.736.000	-	
2 16 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	2.850.000	1	2.280.000	114	2.280.000	-	
2 16 01 2.01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	24.055.000	2	20.808.000	2	20.808.000	-	
2 16 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	persen	100	5.311.374.500	100	5.308.853.500	100	5.308.853.500	-	

2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	33	5.093.900.000	33	5.093.900.000	33	5.093.900.000	-	
2 16 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	200.968.000	1	200.826.000	1	200.826.000	-	
2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	11.036.900	1	8.941.900	1	8.941.900	-	
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Laporan	12	5.469.600	12	5.185.600	12	5.185.600	-	
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase tersusunnya dokumen dan laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	persen	100	5.615.000	100	4.247.000	100	4.247.000	-	
2 16 01 2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	5.615.000	7	4.247.000	7	4.247.000	-	

2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	persen	100	100.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	-	
2 16 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100.000.000	10	75.000.000	7	75.000.000	-	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	persen	100	818.772.500	100	653.830.200	100	1.148.896.200	495.066.000	
2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.992.000	1	9.992.000	5	9.992.000	-	
2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	347.498.000	15	347.498.000	5	692.384.000	344.886.000	- perlu penambahan sarana peralatan perangkat kerja, meja kursi, komputer, laptop dan tablet untuk penunjang kerja karena kekurangan meja kursi yang sudah mulai rusak dan perangkat laptop dan pc yg sudah lama dan mulai rusak '- Perlu penambahan peralatan untuk kegiatan live streaming
2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	29.928.500	4	26.672.000	4	26.672.000	-	

2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.840.000	1	14.265.200	5	14.265.200	-	
2 16 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.944.000	12	8.778.000	12	8.778.000	-	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	402.570.00 0	12	246.625.00 0	12	396.805.00 0	150.18 0.000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	persen	100	562.687.0 00	100	562.687.0 00	100	562.687.0 00	-	
2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	562.687.00 0	5	562.687.00 0	5	562.687.00 0	-	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggarany a jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang Pelayanan Umum Kantor	persen	100	2.320.076. 361	100	2.319.926. 361	100	2.439.894. 450	119.96 8.089	
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	-	

2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.999.361	12	190.999.361	12	310.967.450	119.968.089	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan pada tahun lalu (2024) terjadi kekurangan anggaran biaya pembayaran listrik sehingga di perlukan penambahan biaya pembayaran listrik untuk tahun 2025 agar kekurangan anggaran biaya tidak terulang kembali.
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.126.077.000	12	2.125.927.000	12	2.125.927.000	-	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	persen	100	564.480.500	100	564.480.500	100	602.200.500	37.720.000	
2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	42.750.000	1	42.750.000	1	42.750.000	-	
2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	17	330.600.000	17	330.600.000	28	368.320.000	37.720.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan jumlah unit aset R4 yang tersedia sebanyak 8 unit sehingga di perlukan tambahan biaya pemeliharaan

													R4 sebanyak 1 unit
	2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	66	41.178.500	66	41.178.500	66	41.178.500	-	
	2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	unit	1	149.952.00 0	1	149.952.00 0	1	149.952.00 0	-	
Meningkat nya Kematanga n Domain Tata Kelola SPBE				Indeks Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks			2,5 0		2,16			
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Indeks		5.224.202. 500		5.130.987. 000	0,00	4.887.399. 500	(243.58 7.500)	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%					77,50			

2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang termasuk Kategori Informatif	Persen		5.224.202.500		5.130.987.000	48,94	4.887.399.500	(243.587.500)	
		Menurunya Berita Negatif atau Hoaks Terkait Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan berita negatif atau hoaks yang beredar tentang pemerintah daerah di media sosial atau media massa	Persen					7			
		Meningkatnya Konsistensi Penyampaian Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan informasi sesuai standar dan panduan yang sama	Persen					100			
		Meningkatnya Responsivitas Pemerintah terhadap Isu Publik	Persentase Isu publik yang ditindaklanjuti dalam waktu tertentu	Persen					100			
2 16 02 2.01 0014	Relasi media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	4	14.964.500	4	11.880.000	4	11.880.000	-	
2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di	Komunitas	30	150.200.000	30	131.125.000	30	156.124.000	24.999.000	Adanya penyesuaian anggaran

			Dinas Kominfo									
2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	2	30.924.500	2	17.024.500	2	17.024.500	-	
2 16 02 2.01 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	48	39.406.500	48	25.028.500	48	25.027.000	(1.500)	Adanya penyesuaian anggaran
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	28	4.567.790. 000	28	4.567.790. 000	28	4.044.165. 000	(523.62 5.000)	- Perlu dilakukan penyesuaian nilai kontrak dan jumlah kerjasama dengan media TV, untuk 4 bulan terakhir. Dijadikan 8 bulan agar SSH awal tidak terubah lalu ditambah 4 bulan terakhir (mengusul SSH baru) - Perlu dilakukan penyesuaian nilai kontrak dan jumlah kerjasama dengan media Online, untuk 3 bulan terakhir. Dijadikan 9 bulan agar SSH awal tidak terubah lalu ditambah 3 bulan terakhir (mengusul SSH baru)

2 16 02 2.01 0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	360 0	420.917.00 0	360 0	378.139.00 0	3600	633.179.00 0	255.04 0.000	- Efisiensi anggaran- Perlu penambahan peralatan untuk kegiatan live streaming
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang memiliki Dokumen Teknis (arsitektur, alur sistem, API) dan SOP layanan lengkap	Persen		5.994.120. 640		5.742.582. 840	0,00	5.742.582. 840	-	
		Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase layanan Publik berbasis digital yang terintegrasi	persen					8,70			
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terstruktur dan Tersusunnya Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa yang di kelola	Sub Domain		98.855.84 0		98.855.84 0	100	98.855.84 0	-	
2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokume n	1	98.855.840	1	98.855.840	1	98.855.840	-	

2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Infrastruktur Digital yang Berkualitas dan Tangguh	Persentase Kemampuan Uptime infrastruktur teknologi (jaringan internet, pusat data, dan sistem cloud untuk mendukung aplikasi pemerintah.)	%		5.895.264.800		5.643.727.000	99,53	5.643.727.000	-	
		Meningkatnya kemudahan, Kecepatan mengakses Layanan dan informasi dari Pemerintah Daerah	Persentase platform online (Web dan Aplikasi Pemerintah Daerah) yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat tanpa batasan waktu (24 jam sehari, 7 hari seminggu)	%					100			
		Meningkatnya Literasi SPBE bagi Aparatur penyelenggara SPBE	Jumlah aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dasar dalam teknologi informasi dan dapat menggunakan sistem SPBE secara efektif.	aparatur					25			
		Meningkatnya Ketersediaan regulasi, standar, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital	Jumlah regulasi, standar, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital	Dok					2			
		Meningkatnya Penguatan Audit Teknologi Digital Pemerintahan Digital	Nilai Kematangan Aspek Audit TIK	TK Kematangan					1			

	2 16 03 2.02 0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	749.938.80 0	1	672.230.80 0	1	672.230.80 0	-	
	2 16 03 2.02 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3	63.702.000	3	19.335.000	3	19.335.000	-	
	2 16 03 2.02 0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	10.000.000	3	7.980.000	3	7.980.000	-	
	2 16 03 2.02 0023	Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	75	464.453.00 0	75	339.086.20 0	75	339.086.20 0	-	
	2 16 03 2.02 0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangk at Daerah	46	4.607.171. 000	46	4.605.095. 000	46	4.605.095. 000	-	
Meningkat nya Kematanga n Domain Layanan SPBE				Indeks Kematangan Domain Layanan SPBE	Indeks			3,9 9		3,99			
	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											

2 20 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		238.422.500		187.144.700	2,25	187.144.700	-	
		Meningkatnya Kualitas Data	Nilai Kematangan Domain Kualitas Data	Indeks					2,08			
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan terhadap Pedoman statistik sektoral	Jumlah Data yang sesuai dengan Pedoman statistik Sektoral (Format Metadata)	Data		238.422.500		187.144.700	21	187.144.700	-	
		Terwujudnya Interoperabilitas dan Keterpaduan data Lintas instansi Pemerintah	Jumlah data yang telah sesuai dengan standar kode referensi dan standar pertukaran data.	Data					21			
2 20 02 2.01 0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	100	61.478.500	100	43.754.300	100	43.754.300	-	
2 20 02 2.01 0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	100	38.474.000	100	30.715.000	100	30.715.000	-	
2 20 02 2.01 0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	35.000.000	1	28.036.400	1	28.036.400	-	
2 20 02 2.01 0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1	103.470.000	1	84.639.000	1	84.639.000	-	
Meningkatnya Kematangan Domain Penerapan			Indeks Kematangan Domain Penerapan Manajemen	Indeks			1		1			

Manajemen	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen		151.624.200		100.787.400	39,22	180.787.400	60.000.000	
			Menurunkan risiko kebocoran informasi	Persentase insiden kebocoran informasi atau akses ilegal	Persen								
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerapan Enkripsi pada Sistem Informasi maupun Platform Pemerintah Daerah yang berisi Data sensitif	Jumlah Sistem informasi Pemerintah Daerah yang berisi Data sensitif (Data Pribadi Pribadi Pegawai, Data Perencanaan Daerah, Data Anggaran) yang telah menerapkan Enkripsi Data	SI		99.084.400		69.592.400	4	149.592.400	80.000.000	
	2 21 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	38.800.000	1	18.676.000	1	18.676.000	-	
	2 21 02 2.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	16.149.600	1	14.346.600	1	14.346.600	-	

	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									
2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	19.134.800	1	16.497.800	1	16.497.800	-	
2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	27	25.000.000	27	20.072.000	27	100.072.000	80.000.000	Penambahan anggaran untuk lisensi firewall
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Komunikasi Antar Instansi Pemerintah	Jumlah Saluran Komunikasi Perangkat Daerah (surat elektronik (email), komunikasi Data berbasis Jaringan, atau file sharing) yang telah menerapkan protokol dan prosedur yang aman dalam berkomunikasi	Saluran komunikasi		52.539.800		31.195.000	47	31.195.000	-	
2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kegiatan	4	52.539.800	4	31.195.000	4	31.195.000	-	

				berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2025 kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar **Rp. 489.166.589,-** menjadi **Rp. 21.211.467.090,-** . Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan penambahan pada beberapa sub kegiatan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Perubahan anggaran Tahun 2025 program memiliki pagu Rp 9.560.798.561,- menjadi Rp 10.213.552.650,-.Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 1 Sub Kegiatan, memiliki Pagu Anggaran sebelum perubahan Rp 653.830.200,- menjadi Rp 1.148.896.200,- (bertambah sebesar Rp 495.066.000,-). Adapun Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , pagu murni Rp 347.498.000 ,- menjadi Rp 692.384.000,-.karena adanya rencana pembelian peralatan Studio dan peralatan pendukung untuk media center dan command center ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu sebelum perubahan Rp 2.319.926.361,- menjadi Rp 2.439.894.450,- Sub Kegiatan yang berubah yakni :
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu sebelum perubahan sebesar Rp 190.999.361,- menjadi Rp 310.967.450,- (bertambah sebesar Rp.119.968.089,-) karena terjadi kekurangan anggaran biaya pembayaran listrik sehingga di perlukan penambahan biaya pembayaran listrik untuk tahun 2025 agar kekurangan anggaran biaya tidak terulang kembali;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu sebelum perubahan Rp

564.480.500,- menjadi Rp 602.200.500,- Sub Kegiatan yang berubah yakni :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu sebelum perubahan sebesar Rp 330.600.000,- menjadi Rp 368.320.000,- (bertambah sebesar Rp.37.720.000,-) karena jumlah unit aset R4 yang tersedia sebanyak 8 unit sehingga di perlukan tambahan biaya.

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

Tahun 2025 pagu sebelum perubahan Program ini Rp 5.130.987.000,- menjadi Rp 4.887.399.500,- (Berkurang sebesar Rp 243.587.500,-) Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah sebagai berikut:

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pagu sebelum perubahan Rp 5.130.987.000,- menjadi Rp 4.887.399.500,- (Berkurang sebesar Rp 243.587.500,-). Sub Kegiatan di dalamnya yakni :
 - ❖ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, pagu sebelum perubahan Rp 131.125.000,- menjadi Rp 156.125.000,-
 - ❖ Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, pagu sebelum perubahan 25.028.500,- menjadi Rp 25.027.500,-
 - ❖ Pengelolaan Media Komunikasi Publik, pagu sebelum perubahan 4.567.790.000,- menjadi Rp 4.044.165.000,- (pagu berpindah ke sekretariat untuk belanja sarana dan prasarana)
 - ❖ Penyusunan Konten, pagu sebelum perubahan 378.139.000,- menjadi Rp 633.179.000,-

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tahun 2025 program ini memiliki pagu sebelum perubahan Rp 187.144.700.-

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp 187.144.700,- (perubahan belanja hanya terjadi di dalam sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan sub kegiatan pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar).

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Program ini memiliki pagu murni Rp 100.787.400,- berubah menjadi Rp. 180.787.400,- (bertambah sebesar Rp.80.000.000,-).

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu 65.592.400,- menjadi Rp.149.592.400,- (bertambah sebesar Rp.80.000.000,-). Sub Kegiatan di dalamnya yakni :
 - ❖ Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp 18.676.000,- (perubahan belanja hanya terjadi di dalam sub kegiatan)
 - ❖ Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pagu sebelum perubahan Rp 20.072.000,- menjadi Rp 100.072.000,- (bertambah sebesar Rp.80.000.000,-)
 - ❖ Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu sebelum perubahan Rp.31.195.000,- (perubahan belanja hanya terjadi di dalam sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

B. Telaahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kominfo yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK. Informasi TIK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah di rumuskan di perlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan di capai dengan di pertegas adanya arah kebijakan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional dan provinsi sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Tema Nasional yang diusung pada RKPD 2025 adalah: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** Tema tersebut dijabarkan kedalam 7 (Tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan major project.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan major project.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan major project.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan major project.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas yang melekat pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Tema Nasional yang diusung pada RKPD Prov. Kalsel 2024 adalah : “PENGUATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN” Tema tersebut di jabarkan melalui prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya saing
2. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
6. Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate.

TABEL 3.1 Hasil telaah Kebijakan dan Program Nasional

Program Prioritas Pembangunan		
Nasional	Provinsi	Kabupaten
(2)	(3)	(4)

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik	Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani
---	--	---

C. Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Banjar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusun Sasaran Strategis.

Adapun tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Digital		Indeks SPBE
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Kematangan Domain Tata Kelola SPBE
	Meningkatnya Kematangan Domain Layanan SPBE	Indeks Kematangan Domain Layanan SPBE
	Meningkatnya Kematangan Domain Penerapan Manajemen	Indeks Kematangan Domain Penerapan Manajemen

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

MISI	TUJUAN	SASARAN
Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.	Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Digital	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE
		Meningkatnya Kematangan Domain Layanan SPBE
		Meningkatnya Kematangan Domain Penerapan Manajemen

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2025 dalam tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi, Teknologi Informatika dan persandian dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ditentukan oleh dukungan yang maksimal dari seluruh karyawan dan karyawan serta kerjasama lintas sektoral (SKPD) di Kabupaten Banjar.

Tindak lanjut kedepan berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar akan melakukan penyusunan Peta Rencana SPBE serta penguatan pada Audit Teknologi Informasi Komunikasi khususnya infrastruktur dan Aplikasi sehingga layanan publik yang di berikan dapat lebih efektif dan optimal pemanfaatannya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar maka sasaran pembangunan di Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan persandian yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2025 tercatat secara jelas, sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan yang akan datang dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2021-2026 yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam kurun satu tahun.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat

(1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, serta indikator sub kegiatan yang menyesuaikan Kepmendagri nomor 050-5889 dan telah dituangkan di dalam Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Optimalisasi anggaran pada program – program prioritas maupun program pendukung guna mendukung kelancaran operasional.

Rencana kerja perubahan yang telah disusun diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan pencapaian visi, misi yang terkait Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yaitu Misi ke-1 yang berbunyi: *Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia* dan juga Misi ke-2 yang berbunyi *Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan*, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut adalah yang menjadi landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan DKUMPP Kabupaten Banjar 2025;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi DKUMPP Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 dan Capaian Renstra

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.1, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya.

Terjadi perubahan indikator dan satuan pada renstra perubahan 2021- 2026 sehingga sebagian realisasi kinerja tahun 2021 tidak dapat dikumulatikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perubahan indikator ini tidak mengurangi daya ungkit terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran dinas.

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II :

1. Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan indikator persentase rekomendasi izin dan pendaftaran usaha yang dikeluarkan, target 100%, realisasi 50%, capaian 50%.
 - b. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator persentase sarana distribusi perdagangan yang refresentatif, target 18,75%, realisasi 6,25%, capaian 6,25%.
 - c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator persentase koefisien variasi harga antar waktu, target 9%, realisasi 4,63%, capaian 51,44%
 - d. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan indikator persentase produk/komoditas daerah yang dipromosikan, target 100%, realisasi 0%, capaian 0%
 - e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan indikator IKKI, target 73%, realisasi 0%, capaian 0%
 - f. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, target 95,25%, realisasi 0%, capaian 0%

- g. Program pengelolaan system informasi industry nasional dengan indikator persentase tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini, target 95%, realisasi 0%, capaian 0%
 - h. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase pertumbuhan usaha mikro, target 31,9%, realisasi 0%, capaian 0%
 - i. Program pengembangan UMKM dengan indikator persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya, target 9,35%, realisasi 0%, capaian 0%
 - j. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator (1) persentase koperasi yang mematuhi aturan perundanganundangan, (2) persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan, target 19,63%, realisasi 0%, capaian 0%
 - k. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan indikator persentase KSP/USP sehat, target 13,79%, realisasi 0%, capaian 0%
 - l. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase SDM koperasi (pengawas dan pengurus) yang terlatih, target 17,29%, realisasi 0%, capaian 0%
 - m. Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator persentase koperasi yang meningkat volume usahanya, target 33,74%, realisasi 0%, capaian 0%
2. Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase tertib ukur, terget 18%, terealisasi sebesar 18,27% atau tercapai 101,5%.
3. Program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase tertib ukur, terget 18%, terealisasi sebesar 18,27% atau tercapai 101,5%.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra s/d Tahun 2025 Tw II

Kode					Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA PD (Renstra Perangkat Daerah) pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian kinerja Renstra Sampai dengan Renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yg dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/ Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD thn 2026)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 =(10+		
														TRI I		TRI II							
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					URUSAN PEMELIHARAAN PILIHAN																		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN DAN PENDAFTARAN USAHA YANG DIKELUARKAN (Persen)		100%	8.666.116	35%	3.916.000	100%	3.200.000	0%	0%	50%	895.800	50%	895.800	50%	27,99%	85%	4.818.000

3	30	02	201		Keg Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu (Persen)	100%	2.556.000	35%	3.916.000	100%	1.000.000	0%	0%	50%	463.800	50%	463.800	50%	46,38%	85%	4.37800
3	30	02	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan	4rek	2.556.000	1rek	3.916.000	2dok	500.000	0	0	1	231.900	1	231.900	50%	46,38%	2	4.14900

[illegible]

3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG REPRESENTATIVE	100%	4.575.665.968	36%	303.982.500	18,75%	844.729.000	0	243.959.000	6,25%	0	6,25%	243.959.000	6,25%	28,88%	42,25%	547.41.50
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/ dikembangkan	16unit	4.575.665.968	36%	303.982.500	18,75%	844.729.000	0	243.959.000	6,25%	0	6,25%	243.959.000	6,25%	28,88%	42,25%	547.41.50
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (unit)	16unit	4.550.165.968	-	301.366.000	3unit	843.292.000	0	243.959.000	1	0	1	243.959.000	33,33%	28.92%	-	Bedasarkan data tahun sebelumnya
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distrubusi perdagangan	5unit	25.500.000	-	2.616.500	1unit	1.500.000	0	0	0	0	0%	1.500.000	0	100%	-	Bedasarkan data tahun sebelumnya
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9%	366.920.105	5,34%	161.878.200	9%	67.743.400	6,14%	3.425.000	3,13%	23.700.000	4,63%	27.125.000	51,44%	40,04%	-	

3	30	04	201		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tndak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting Kab	100%	19.088.944	5,34%	161.878.200	12bln	1.650.000	3	0	3	500.000	6	500.000	50%	30,30%	-	Bedasarkan data tahun sebelumnya
3	30	04	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi KetersediaanBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang di tingkat agen dan pasar rakyat	20lap	19.088.944	-	161.878.200	4dok	1.650.000	1	0	1	500.000	2	500.000	50%	30,30%	-	Bedasarkan data tahun sebelumnya

3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data informasi harga dan stok	100%	339.881.161	-	21.480.000	16lap	65.103.400	5	0	5	26.625.000	10	26.625.000			-	Bea satu n den, an tahu n seb lu mn a
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 Kab/Kota	60 laporan	121.085.000,00	-	21.480.000	12	24.217.000	4	0	4	4.450.000	8	4.450.000			-	Bea satu n den, an tahu n seb lu mn u mny
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	60 laporan	5.861.702	-	Tidak dikerjakan di 2021	-	-	-								-	-
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten kota	12 laporan	212.934.459	-	Tidak dikerjakan di 2021	4	40.886.400	1	0	1	22.175.000	2	22.175.000			-	-

3	30	05	2.02		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi ijin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	100%	7.950.000	-	Tidak dikerjakan di 2021	100%	990.000	0	0	0	0	0	0			-	-
3	30	05	2.02	1	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12	7.950.000	-	Tidak dikerjakan di 2021	2	990.000	0	0	0	0	0	0			-	-

[illegible]

3	30	05	201	06	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	-5	-	-	-	-	-	-				-					0
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	21,22%	425.667.842	-	69.072.600	18%	102.883.025	0	0	18,27 %	23.658.200	18,27%	23.658.200	101,5 %	22,99 %	18,27%	92.70.80

[illegible]

3	3 1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas DKUMPP	80	68.921.9 64 .074	0	0	73	12.613 .3 56.87 8	0	1.172 .024.6 2 7	0	3.174 .180.8 93	0	4.346.2 0 5.520	0	0	0	12 8 3. 2 .4
3	3 1	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	454.514. 84 8	0%	0	100 %	78.877. 7 00	25	1.334. 000	50	2.510 . 000	75	3.844.0 0 0	75%	4,87%	75%	3. 4 .0
3	3 1	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	4	196.891.9 66	0%	0	4	36.083. 7 00	1	1.334. 000	3	2.510 . 000	4	3.844.0 0 0	100%	10,65 %	Tah un sebe lu mny a SKP D masi h terpi sa h	Ta u se e un n a SKP D m si ter is a
3	3 1	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Terlaksanany a Penyusunan dan Verifikasi	4	70.412.19 3	0%	0	4	13.000. 0 00	2	0	2	0	4	0	100%	0%	Tah un sebe lu mny a SKP D masi h terpi sa h	Ta u se e un n a SKP D m si ter sa

3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RKA/RKAP SKPD Tepat Waktu"	4	53.047.463	0%	0	4	9.794.000	1	0	1	0	2	0	50%	0%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
---	----	----	------	----	---	----------------------------	---	------------	----	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	----	--------------------------------------	--------------------------------------

																					a	
3	31	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikktisari Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	134.163.225	0%	-	6	20.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	Tahun sebenarnya SKPD masih terpisah	Tahun sebenarnya SKPD masih terpisah	
3	31	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	55.671.409.830	0%	-	12	8.749.466.965	3	868.812.023	3	1.837.211.810	6	2.701.226.033	50%	30,87%	Tahun sebenarnya SKPD masih terpisah	Tahun sebenarnya SKPD masih terpisah

3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	50	46.797.170.238	0%		47	8.687.188.665	47	868.812.023	0	1.832.414.010	47	2.696.428.233	100%	31,03	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
---	----	----	------	----	-----------------------------------	------------------------------------	----	----------------	----	--	----	---------------	----	-------------	---	---------------	----	---------------	------	-------	--------------------------------------	--------------------------------------

3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dok penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	93.120.000	0%	-	1	31.920.000	0	0	0	0	0	0%	0%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	156.103.893	0%		1	30.358.300	0	0	4.797.800	0	4.797.800	0%	14,81%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	518.624.400	0%	-	100%	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah

3	31	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksnanya bimbingan teknis	50	518.624.400	0%		5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah

3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	5.277.564.992	0%	-	12	955.784.953	3	83.687.493	3	371.083.399	6	454.770.892	50%	47,58%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	h te i a
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (paket)	4	176.354.909	0%		12	29.636.000	3	0	3	8.210.200	6	8.210.200	50%	27,70%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Ta u se e u n a SP D m si te i a

3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	517.455.561	0%	-	12	95.799.100	3	5.393.600	3	17.901.000	6	23.294.600	50%	24,31%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
---	----	----	------	----	--	--	---	-------------	----	---	----	------------	---	-----------	---	------------	---	------------	-----	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	343.025.174	0%	-	12	64.297.800	3	9.968.200	3	20.520.300	6	30.488.500	50%	46,87%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	12	402.568.235	0%	-	12	75.862.300	3	2.520.000	3	9.047.700	6	11.567.700	50%	15,24%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.838.161.111	0%	-	12 lap	690.189.753	3	65.805.693	3	315.404.199	6	381.209.892	50%	55,21%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah

3	31	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.232.851.541	0%	-	12	226.885.260	3	49.863.811	3	86.257.294	6	136.121.105	50%	60,17%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	2.226.460.000	0%	-	12	1.948.400.000	3	124.950.000	3	784.623.456	6	909.573.456	50%	46,67%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah

3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.270.538.462	0%	-	100%	606.736.000	25%	43.377.300	25%	97.292.734	50%	140.670.034	50%	23,18%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
---	----	----	------	--	---	---	------	---------------	----	---	------	-------------	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	-----	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

3	31	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	194.950.000	0%	-	1	38.990.000	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	7,69%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	13	2.124.278.661	0%	-	13	401.746.000	6	33.697.300	2	83.772.734	8	117.470.034	61,53%	29,23%	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah
3	31	01	209	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	12	180.000.000,00	-	-	16	25.000.000	4	9.680.000	4	6.725.000	8	16.405.000	50%	65,62	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah	Tahun sebelumnya SKPD masih terpisah

																						is al
3	31	01	209	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainny yang dipelihara/Rehabili tasi (unit)	1	771.309. 800	0%		1	141.000 .000	0	0	1	3.795.0 00	1	3.795.00 0	100%	2,69%	Tahu n sebel um nya SKPD masi h terpis ah	Ta u se e un n a SK D

																							m si ter is al
3	31				URUSAN PERINDUSTRIAN																		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (%)	92,75%	1.526.111.168	-	699.622.500	92.25%	421.761.500	0	0	0	153.538.600	0	153.538.600	0%	36,40%	0%		85.16.10
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pesentase IKM yang di bina/fasilitasi (%)	100%	1.526.111.168	-	699.622.500	4	421.761.500	0	0	1	153.538.600	1	153.538.600	25%	36,40%	Beda satu n deng an tahu n sebel u mnya		85.16.10
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dok hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	4dok	947.052.124	-	552.894.100	4	314.851.500	1	34.930.800	1	76.266.200	2	111.197.000	50%	35,31%	Beda satu n deng an tahu n sebel u mnya		664.091.100

3	31	02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1dok	357.639.778	0%	107.739.600	1	66.030.000	0	0	0	34.031.600	0	34.031.600	0%	51,53%	Beda satu n deng an tahu n sebel u mnya	14.77.20
---	----	----	-----	----	---	--	------	-------------	----	-------------	---	------------	---	---	---	------------	---	------------	----	--------	---	----------

3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	4	221.419.266	-	8.988.800	4	40.880.000	1	0	1	8.310.000	2	8.310.000			Beda satu n deng an tahu n sebel u mnya	
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	95%	257.612.339	-	1.419.300	95 %	10.636.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Beda satu n den ga n tahun sebe lu mnya a	1.49.300
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	95%	257.612.339	-	1.419.300	1	10.636.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Beda satu an deng a n tahu n sebel u mnya a	1.49.300

3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dok hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	2	4.603.874	-	1.419.300	2	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Beda satu an deng a n tahu n sebel u mny a	1.493
---	----	----	------	----	---	---	---	-----------	---	-----------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------

3	31	04	201	03	Sub keg Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah dok hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industridan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyampaian data ke SIINas	2	53.008.465	-	-	2	9.786.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	07			Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	159,64%	2.542.653.030	67,25%	100.518.500	31.93%	411.230.100	0	0	0	19.815.240	0	19.815.240	0%	4,81%	67,25%	12333.40
						1. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 2. 33,90	1. 37,2% 2. 33,90	2.542.653.030													Bed a satu an dengan tahun sebel u	

2	17	07	201	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	25000	238.184.000,00	100%	52.681.000,00	5000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	07	201	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (unit usaha)	3750	418.000.000,00	100%	22.831.500	550	80.000.000	0	0	100	850.000	100	850.000	18,18%	1,06%	Berbeda satu an dgn tahu n sebel u mny a	2381.50
2	17	07	201	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (unit usaha)	8200	526.000.000,00	100%	14.100.800	2000	146.230.100	0	0	300	0	300	0	15%	0%	Berbeda satu an dgn tahu n sebel u mny a	0

[illegible]

2	17	06	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya 2. Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan Produksi dan Pengolahan Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	1. 9,98 % 2. 2,00 % 3. 9,34 %	938.833. 939,00	100 %	108.032. 700	75	127.104. 100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.032.000
2	17	06	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	a. Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. 1300	938.833. 939,00	100 %	108.032. 700,00	325	127.104. 100	0	0	140	0	140	0	0	0	100.032.000

[illegible]

[illegible]

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundangan 24. Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	1. 98,16 % 91,38%	487.469.030,00	100 %	14.437.700	19.63%	90.000.000	0	0	0	21.799.800	0	21.799.800	0%	24,22%	Berbeda satu an dgn tahun sebelu mnya	3637.50
2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi 1. Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	1. 35 2. 123.	487.469.030,00	100 %	14.437.700	41	90.000.000	0	0	41	21.799.800	41	21.799.800	100 %	24,22%	Berbeda satu an dgn tahun sebelu mnya	3637.50
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	• Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan , kesehatan kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	88	224.000.000	100 %	4.254.500	41	40.000.000	329	0	41	21.799.800	41	21.799.800	100%	54,49%	Berbeda satu an dgn tahun sebelu mnya	2654.30

2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Sehat	34,48%	487.469.030,00	95,62 %	53.007.771,00	13.79%	90.000.000	0	0	0	2.953.400	0	2.953.400	0%	3,28%	Berb ed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	5561.11
2	17	04	2.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan • Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	64	487.469.030,00	100%	53.007.771,00	64	90.000.000	0	0	20	2.953.400	20	2.953.400	34,48%	3,28%	Berb ed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	5561.11
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (unit usaha)	58	170.700.000,00	0,00	0,00	58	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Berb ed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	5561.11

2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan (unit usaha)	6	316.769.030,00	100%	53.007.771,00	6	60.000.000	0	0	20	2.953.400	20	2.953.400	333%	4,92%	Berbeda satu an dgn tahun sebelu mnya	5561.11
---	----	----	------	----	--	---	---	----------------	------	---------------	---	------------	---	---	----	-----------	----	-----------	------	-------	---------------------------------------	---------

2	1705				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dab Pengurus) yang terlatih	86,64%	487.469.030,00	100 %	46.955.900,00	17.29%	207.197.800	0	0	0	11.200.000	0	11.200.000	0%	5,40%	100%	5855,90
2	1705	2.01			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	60	487.469.030,00	100 %	46.955.900,00	50	207.197.800	0	0	25	11.200.000	25	11.200.000	50%	5,40%	Berbed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	5855,90
2	1705	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota yang memahami tentang perkoperasian	60	487.469.030,00	100 %	46.955.900,00	1	207.197.800	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Berbed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	0
2	1706				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	46,01%	1.884.340.786,00	100 %	501.235.984,00	33.74%	397.900.400	0	0	0	9.239.600	0	9.239.600	0%	2,32%	100%	51475,84

2	1706	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	30	1.884.340.786,00	-	-	65	397.900.400	0	0	0	9.239.600	0	9.239.600	0%	2,32%	Berb ed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	-
2	1706	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70	1.884.340.786,00	100 %	501.235.984,00	71	397.900.400	0	0	30	9.239.600	30	9.239.600	42,25%	2,32%	Berb ed a satu an dgn tahu n sebel u mny a	-

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target sasaran kinerja serta kebijakan/tindakan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya:

- a. Masih banyaknya pelaku UM dan IKM dan yang belum mempunyai sertifikatHalal, P-IRT dan Keamanan;
- b. Pelaku UM dan IKM yang masih minim dalam menjalin kemitraan usaha dan permodalan dengan usaha besar;
- c. Belum optimalnya pelaku usaha mikro, industri dan koperasi dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah;
- d. Kurangnya penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi;
- e. Masih kurangnya jiwa kewirausahaan Pengurus;
- f. Masih rendahnya kemitraan usaha koperasi dengan badanusaha lainnya;
- g. Masih rendahnya fasilitasi pengembangan usaha koperasi
- h. Banyaknya PKL yang belum terdaftar secara formal baik menyangkut lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya dan Penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum

Untuk faktor – faktor penghambat dan pendorong pada realisasi sasaran kinerja sampai dengan triwulan ke-2 dapat dilihat pada uraian tabel yang diambil dari Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Banjar (SIMONDALEV).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	TW	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan Per Triwulan
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1.63	3.825	TW1	1	7.65	765.00	Keterangan : Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industry

						TW2	0.5	7.65	1,530.00	Keterangan : Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industry
						TW3	0.13	0	0.00	Keterangan : Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industry
						TW4	1.73	0	0.00	Keterangan : Faktor Penghambat : Faktor Pendorong :
2	Meningkatnya Akselerasi Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1.98	0.68	TW1	1	1.36	136.00	Keterangan : -Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : -faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : -Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industry
no	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	TW	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan Per Triwulan
						TW2	0.5	1.36	272.00	Keterangan : --Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : --faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : --Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor

						TW3	0	0	100.00	Keterangan : ---Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : ---faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : ---Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industri
						TW4	1.98	0	0.00	Keterangan : -Realisasi PDRB menunggu data pada BPS berupa buku 'Kabupaten Banjar Dalam Angka' release untuk mengetahui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan dari lembaga yang dianggap kredibel Faktor Penghambat : ---faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. -penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal Faktor Pendorong : ----Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industri
3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	36.94	68.46	TW1	10	34.23	342.30	Keterangan : Realisasi Koperasi berkualitas dilihat dari Koperasi yang melakukan RAT pada tahun sebelumnya Faktor Penghambat : Pengukuran realisasi kinerja koperasi yang berkualitas baru bisa dihitung pada triwulan 4 berdasarkan koperasi yang melaksanakan RAT, penilaian aset, dan volume usaha sampai dengan bulan Desember tahun berjalan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert
						TW2	10	34.23	342.30	Keterangan : Realisasi Koperasi berkualitas dilihat dari Koperasi yang melakukan RAT pada tahun sebelumnya Faktor Penghambat : Pengukuran realisasi kinerja koperasi yang berkualitas baru bisa dihitung pada triwulan 4 berdasarkan koperasi yang melaksanakan RAT, penilaian aset, dan volume usaha sampai dengan bulan Desember tahun berjalan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert
						TW3	0	0	100.00	Keterangan : Faktor Penghambat : Pengukuran realisasi kinerja koperasi yang berkualitas baru bisa dihitung pada triwulan 4 berdasarkan koperasi yang melaksanakan RAT, penilaian aset, dan volume usaha sampai dengan bulan Desember tahun berjalan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert
						TW4	36.94	0	0.00	Keterangan : Faktor Penghambat : Pengukuran realisasi kinerja koperasi yang berkualitas baru bisa dihitung pada triwulan 4 berdasarkan koperasi yang melaksanakan RAT, penilaian aset, dan volume usaha sampai dengan bulan Desember tahun berjalan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert
4	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	%	7.74	10.48	TW1	4	4.93	123.25	Keterangan : Faktor Penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah usaha mikro berpindah mengakibatkan terjangkauanya pelaksanaan pendataan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert
						TW2	5	5.55	111.00	Keterangan : Faktor Penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah usaha mikro berpindah mengakibatkan terjangkauanya pelaksanaan pendataan Faktor Pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertert

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan (Faktor Penghambat & Faktor Pendorong)
2	tersedianya sarana distribusi perdagangan yg representative	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Representative	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : untuk menghitung realisasi pasar yang representatif, baru bisa dilaksanakan setelah kegiatan revitalisasi pasar selesai dilaksanakan (1 pasar pada bulan april, dan 2 pasar pada bulan desember) Faktor pendorong :
			Triwulan 2	06.25	06.25	100	Faktor penghambat : - Untuk kegiatan Revitalisasi/Rehab/Pembangunan Pasar Sumber Baru Kec. Sungai Pinang telah selesai dilaksanakan - Utk kegiatan Revitalisasi/Rehab/pembangunan Pasar Sungai Lurus Kec. Sambung MakmurmMenunggu APBD Perubahan baru dilaksanakan, karena ada perubahan pada lokasi pelaksanaan - Utk kegiatan Pekerjaan Pembuatan Toilet, Siring dan Pengurugan Halaman Pasar Jambu Burung Kec. Beruntung Baru, setelah APBD Pergeseran disahkan kegiatan akan segera dilaksanakan, karena terjadi pergeseran pada redaksi kegiatan - Utk kegiatan pengadaan jasa appraisal dan study kelayakan untuk penyettaan modal, Kegiatan sedang dilaksanakan, saat ini pada tahap menunggu hasil kajian dari penyedia jasa - Utk kegiatan pendataan/ monitoring omzet dan fisik pasar rakyat Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan. Total pasar rakyat di Kabupaten Banjar ada 43, sedangkan telah termonitoring baru 11 pasar yang ada di 8 kecamatan. Pasar yang belum di data/ monitoring ada 32 pasar Faktor pendorong : Ketersediaan anggaran - Dukungan dari kepala daerah - Dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan - Tersedianya alat transportasi
3	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Tertib Ukur	Triwulan 1	00.08	00.08	100	Faktor penghambat : sebagian besar kegiatan pelayanan tera ulang dan pengawasan metrologi dilaksanakan pada triwulan 2, 3, dan 4 sehingga target dan realisasi tertib ukur

							triwulan 1 memang kecil
							Faktor pendorong :
			Triwulan 2	18	18.27	101,5	Faktor penghambat : Realisasi kinerja perhitungannya gabungan antara pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan akan terlihat pada akhir triwulan 4 Faktor pendorong :
4	Terwujudnya	Persentase	Triwulan	9	06.14	68,22	Faktor penghambat :

	stabilisasi harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	1				Faktor pendorong : pada triwulan 1 ini telah secara masif dilaksanakan sidak bapokting juga pasar murah untuk menjaga kenaikan harga dan ketersediaan stok sebagai tindak lanjut kasus migor langka, dan mengantisipasi tingginya permintaan bapokting jelang ramadhan dan idul fitri
			Triwulan 2	9	03.13	34,78	Faktor penghambat : -lokasi kegiatan monitoring yg berjarak jauh dari (satu) 1 tempat ke tempat lain -Banyaknya titik pantauan dan pengawasan kegiatan -Untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi lokasi pengawasan yang sulit di akses di beberapa tempat. Faktor pendorong : Adanya dukungan pemerintah daerah dan adanya sarana melaksanakan kegiatan - dukungan teknologi sebagai sarana penyedia informasi yg up to date
5	Tertatanya Toko modern, pasar rakyat, gudang dan waralaba	Persentase Rekomendasi Izin Dan Pendaftaran Usaha Yang Dikeluarkan	Triwulan 1	25	10	40	Faktor penghambat : Semua realisasi akan terlihat pada triwulan Iv yaitu total permohonan dibagi dengan total rekomendasi yang dikeluarkan Faktor pendorong : Seluruh permohonan ijin usaha yang masuk pada triwulan I telah di fasilitasi
			Triwulan 2	50	20	40	Faktor penghambat : Semua realisasi akan terlihat pada triwulan Iv yaitu total permohonan dibagi dengan total rekomendasi yang dikeluarkan Faktor pendorong : Seluruh permohonan ijin usaha yang masuk pada triwulan I telah di fasilitasi
6	Persentase Produk Daerah yang dipromosikan	persentase produk daerah yang di promosikan	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : sampai dengan triwulan 1 belum ada dilaksanakan pameran/expo Faktor pendorong : - Adanya sarana untuk melaksanakan kegiatan. - UMKM yang memiliki semangat untuk belajar dan mengembangkan produknya.

			Triwulan 2	0	100	100	Faktor penghambat : -Masih perlunya pengembangan dan promosi produk agar produk lebih diminati masyarakat. - Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan sementara minat dan semangat pelaku usaha tinggi. - perlunya meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta agar promosi produk dari pelaku usaha lebih efektif. Faktor pendorong : - Adanya sarana untuk melaksanakan kegiatan. - UMKM yang memiliki semangat untuk belajar dan mengembangkan produknya.
--	--	--	------------	---	-----	-----	--

7	Persentase Produk Unggulan yang dikembangkan	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dikembangkan	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : pengukuran realisasi kinerja berkembangnya produk unggulan daerah dilaksanakan pada bulan desember yang mana merupakan hasil dari kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor, peningkatan citra produk, promosi dan penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022
							Faktor pendorong : - Dukungan pemerintah daerah - kerjasama tim bidang yg saling berkoordinasi terkait program dan kegiatan - Tersedianya sarana transportasi untuk memudahkan akses mobilitas.
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : - kurangnya pemasaran secara online , karena bebrapa pelaku usaha yg kurang menguasai pemasaran secara online - terkendalanya produk yg rusak dalam pengiriman jika diperjualbelikan secara onlien - Perlunya pengembangan produk lebih lanjut dan kerjasama dengan berbagai pihak agar produk dari Kab Banjar dapat terrealisasi ekspor. - Faktor pendorong : Dukungan pemerintah daerah - kerjasama tim bidang yg saling berkoordinasi terkait program dan kegiatan - Tersedianya sarana transportasi untuk memudahkan akses mobilitas.
8	Meningkatnya Akselerasi Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Triwulan 1	1	01.36	136	Faktor penghambat : -faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. - penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal

							Faktor pendorong : -Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1 tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatkan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industri
--	--	--	--	--	--	--	--

	Tersedianya data informasi industri terbaru	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Triwulan 2	00.05	01.36	272	Faktor penghambat : --faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB pada sektor industri dan perdagangan dalam hal ekonomi antara lain. - penyesuaian selera pasar yang beragam -perubahan iklim yg cepat dan ekstrim yg menyebabkan gagal panen yg akhirnya menyebabkan kelangkaan produk -belum meratanya potensi daerah dan pembinaan/fasilitasi utk IKM dan pelaku usaha belum optimal
9			Triwulan 1	0	0	100	Faktor pendorong : -- Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Untuk Kab Banjar yang menjadi faktor pendorong pada sektor perdagangan dan industri dalam pelaksanaan 1 tahun kedepan antara lain. Sumber daya potensi daerah dalam hal komoditinya masih berlimpah, melahirkan beragamnya usaha, dan dukungan pemerintah daerah dalam hal pemasaran/promosi yg berpengaruh jg pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah sektor perdagangan & industri Faktor penghambat : kesulitan dalam menentukan lokasi pendataan karena dapat terjadi pengulangan data yang sama, data track record beberapa tahun berlalu yang masih belum konsisten sehingga tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan penentuan lokasi. keterbatasan dana sehingga membutuhkan efisiensi agar hasil/outcome yang dihasilkan bisa optimal Faktor pendorong : Dukungan teknologi informasi SIINas yang terintegrasi OSS dalam hal mengelola data industri dan pelaku usaha secara sistematis, kerjasama bidang industri tim pendataan yang saling bersinergi

			Triwulan 2	50	50	100	Faktor penghambat : -beberapa pelaku industri sulit dalam memberikan dan kurang akurat -beberapa lokasi pelaku industri sulit dijangkau -kurangnya personil yg melakukan monitoring dan pendataan sehingga tidak berjalan dengan maksimal kesulitan dalam menentukan lokasi pendataan karena dapat terjadi pengulangan data yang sama, data track record beberapa tahun berlalu yang masih belum konsisten sehingga tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan penentuan lokasi. keterbatasan dana sehingga membutuhkan efisiensi agar hasil/outcome yang dihasilkan bisa optimal
--	--	--	------------	----	----	-----	--

							Faktor pendorong : Dukungan teknologi informasi SIINas yang terintegrasi OSS dalam hal mengelola data industri dan pelaku usaha secara sistematis, kerjasama bidang industri tim pendataan yang saling bersinergi
10	Tercapainya sasaran pembangunan industri di Kab Banjar	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : Realisasi kinerja dilaksanakan pada akhir triwulan 4 berdasarkan hasil Perhitungan PDRB dan penggabungan data internal (unit usaha, tenaga kerja dan nilai omzet) Faktor pendorong :
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : Faktor pendorong :
14	terselenggaranya urusan penyusunan program, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan kinerja Intern IKKI	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : ada beberapa dokumen yang masih dalam proses penyusunan dikarenakan beberapa hal seperti adanya perubahan SOTK serta adanya transisi Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor pendorong : kerjasama tim yang baik, kesadaran dalam upaya meningkatkan kinerja dan kepatuhan intern
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : ada beberapa dokumen yang masih dalam proses penyusunan dikarenakan beberapa hal seperti adanya perubahan SOTK serta adanya transisi Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor pendorong : kerjasama tim yang baik, kesadaran dalam upaya meningkatkan kinerja dan kepatuhan intern
15	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja Intern IKKI	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : ada beberapa dokumen yang masih dalam proses penyusunan dikarenakan beberapa hal seperti adanya perubahan SOTK serta adanya transisi Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor pendorong : kerjasama tim yang baik, kesadaran dalam upaya meningkatkan kinerja dan kepatuhan intern
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : ada beberapa dokumen yang masih dalam proses penyusunan dikarenakan beberapa hal seperti adanya perubahan SOTK serta adanya transisi Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor pendorong : kerjasama tim yang baik, kesadaran dalam upaya meningkatkan kinerja dan kepatuhan intern

17	Meningkatnya koperasi yg mematuhi aturan perundang undangan	Persentase Koperasi yang mematuhi aturan perundang an	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah yang sulit dijangkau untuk ketempat koperasi dan keterbatasan sarana operasional transfortasi, Faktor pendorong : Dibantunya sdm PPKL yang ditempatkan provinsi untuk
----	---	---	------------	---	---	-----	---

							wilayar kabupaten banjar
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah yang sulit dijangkau untuk ketempat koperasi dan keterbatasan sarana operasional transfortasi, Faktor pendorong : Dibantunya sdm PPKL yang ditempatkan provinsi untuk wilayar kabupaten banjar
		Persentase KSP dan USP yang mematuhi aturan perundangan	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah yang sulit dijangkau untuk ketempat koperasi dan keterbatasan sarana operasional transfortasi, Faktor pendorong : Dibantunya sdm PPKL yang ditempatkan provinsi untuk wilayar kabupaten banjar
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah yang sulit dijangkau untuk ketempat koperasi dan keterbatasan sarana operasional transfortasi, Faktor pendorong : Dibantunya sdm PPKL yang ditempatkan provinsi untuk wilayar kabupaten banjar
18	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Triwulan 1	4	0,23125	123,25	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah usaha mikro berpindah mengakibatkan terjangkauanya pelaksanaan pendataan Faktor pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertgert
			Triwulan 2	5	05.55	111	Faktor penghambat : karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah usaha mikro berpindah mengakibatkan terjangkauanya pelaksanaan pendataan Faktor pendorong : Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga terlaksana sesuai dengan tertgert
19	omzet usaha	Persentase Jumlah	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : Realisasi kinerja dilaksanakan pada

	mikro yang meningkat	Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya					akhir triwulan 4
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor pendorong : Dukungan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan
20	Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro yang tumbuh	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Triwulan 1	0	0	100	Faktor penghambat : Realisasi kinerja dilaksanakan pada akhir triwulan 4 Faktor pendorong : Dukungan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan
			Triwulan 2	0	0	100	Faktor penghambat : Realisasi kinerja dilaksanakan pada akhir triwulan 4 Faktor pendorong : Dukungan dari kepala daerah

							Faktor pendorong : Dukungan dari kepala daerah
--	--	--	--	--	--	--	--

5. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Pemerintah terus mendorong dan menggelorakan semangat gotong royong dan meyakinkan bahwa bila berkoperasi bisa mensejahterakan;
- b. Mendata dan memfasilitasi pelaku UM yang belum memiliki sertifikat Halal, P-IRT dan keamanan;
- c. Pemerintah memberikan stimulus terhadap sektor usaha yang dijalankan oleh Koperasi (Hibah dana atau hibah barang);
- d. Memfasilitasi akses pasar terhadap produk usaha koperasi
- e. Mengoptimalkan berbagai kebijakan dari Pemerintah dan peningkatan akses permodalan untuk pelaku usaha mikro dna koperasi;
- f. Meningkatkan penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi untuk koperasi secaraberkelanjutan;
- g. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan sertifikasi produk batu permata dan batu mulia yaitu melalui strategi peningkatan daya saing industri kecil, sedangkan kebijakannya yaikni dengan peningkatan kemampuan teknologi industri di bidang batu permata dan batumulia, pengadaan alat laboaratorium uji sertifikasi LPSB, sosialisasi layanan sertifikasi LPSB dan partisipasi dalam promosi perdagangan tingkat nasional.
- h. Solusi untuk mengatasi permasalahan PKL yang dihadapi pemerintah Kabupaten Banjar, diantaranya agar segera menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan lebih optimal dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kakilima dan asongan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMPP Kabupaten Banjar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas DKUMPP Kabupaten Banjar kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing

- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DKUMPP Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMPP.

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi perubahan Indikator Kinerja sebelum dan sesudah, Jumlah program pada DKUMPP adalah 16 program, 27 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Untuk alasan dilakukannya perubahan sendiri pada sisi indikator sub kegiatan karena harus menyesuaikan dengan regulasi tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait Kinerja dan Indikator Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, sedangkan untuk anggaran terkait dengan optimalisasi anggaran pada program – program prioritas maupun program pendukung guna mendukung kelancaran operasional. Alasan dilakukannya perubahan ini juga terkait dengan penambahan pagu pada urusan industry sebesar Rp. 306.265.800 untuk mendukung fasilitasi dan promosi produk unggulan daerah melalui DEKRANASDA Kab. Banjar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilakukan perubahan renja dengan melakukan:

- a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
- b. Pergeseran
- c. an pada rekening belanja antar program

- d. Perubahan indikatanggaran pada rekening belanja antar kegiatan
- e. Pergeseran anggaror program/kegiatan /sub kegiatan

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	Persen	42.34	42.34	650,178,000	708,728,000	58,550,000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Rekomendasi Izin usaha simpan pinjam	Persen	84.48	84.48	25,792,800	25,792,800	-	
	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Persentase Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Persen	100	100			-	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Rekomendasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	unit	7	7	20,451,000	20,451,000	-	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit	7	7	20,451,000	20,451,000	-	
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	Jumlah Rekomendasi ijin pembukaan kantor cabang pembantu, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	unit	1	1	5,341,800	5,341,800	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	1	5,341,800	5,341,800	-	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang mematuhi aturan perundangan	persentase koperasi yang mematuhi aturan perundangan	Persen	58.9	58.9	49,932,000	104,432,000	54,500,000	
	persentase ksp dan usp yang mematuhi aturan perundangan	persentase ksp dan usp yang mematuhi aturan perundangan	Persen	60.34	60.34			-	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	koperasi	32	32	49,932,000	104,432,000	54,500,000	
	Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	Jumlah KSP USP yang diperiksa dan diawasi	koperasi	9	9			-	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	koperasi	41	41	49,932,000	104,432,000	54,500,000	Penambahan untuk mengakomodir 1. inovasi Si Sakti Manis untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan mempermudah media informasi untuk anggota koperasi. 2. akomodir kegiatan peningkatan kapasitas koperasi berprestasi (7 Koperasi)
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Sehat	Persentase KSP/ USP Sehat	Persen	29.31	29.31	85,949,700	89,999,700	4,050,000	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di Nilai Kesehatan	unit usaha	58	58	85,949,700	89,999,700	4,050,000	
	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	Jumlah KSP/USP Koperasi Menerima penghargaan	koperasi	6	6			-	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	58	58	25,492,000	29,542,000	4,050,000	Penambahan Uang Saku pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	koperasi	6	6	60,457,700	60,457,700	-	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	Persentase SDM Koperasi (Pengawas dan Pengurus) yang terlatih	persen	69.16	69.16	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan Perkoperasian	orang	60	60	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	110	110	358,514,000	354,014,000	(4,500,000)	Penyesuaian rincian belanja menyesuaikan dengan standar satuan harga terbaru, yang tidak terserap, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	persen	42.94	42.94	129,989,500	134,489,500	4,500,000	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	koperasi	30	30	129,989,500	134,489,500	4,500,000	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit usaha	70	70	129,989,500	134,489,500	4,500,000	Penyesuaian rincian belanja menyesuaikan dengan standar satuan harga terbaru, yang tidak terserap, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha	Persen	13.69	16.01	1,201,328,660	1,243,136,660	41,808,000	Penyesuaian target Persentase usaha mikro yang menjadi wirasusaha dari 13.69% menjadi 16.01 sesuai hasil evaluasi MenpanRB yang mana dengan TW 2 tahun 2025 target telah terealisasi sebesar 15.55% atau capaiannya 113.59%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	persen	95.79	95.79	962,850,760	986,158,760	23,308,000	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	persen	22.3	22.3	962,850,760	986,158,760	23,308,000	
	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	persen	31.23	31.23			-	
	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	persen	3.27	3.27			-	
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	persen	0.37	0.37			-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	persen	0.18	0.18			-	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	750	750	121,671,900	121,671,900	-	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	unit usaha	2000	2000	172,534,100	199,780,960	27,246,860	untuk fasilitasi sertifikasi halal self declare 100 unit
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	125	125	127,900,000	127,900,000	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	20	20	33,999,800	33,999,800	-	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	unit usaha	5000	5000	27,246,860	0	(27,246,860)	Updating PLKUKM tidak bisa dilaksanakantahun ini oleh DKUMPP karna harus kerjasama dengan BPS, dana dialihkan untuk mendukung fasilitasi sertifikasi halal
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	170	270	479,498,100	502,806,100	23,308,000	Penambahan untuk pelatihan DEA sharing dengan Kominfo Pusat dengan target 100 PUM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omzetnya	persen	28.05	28.05	238,477,900	256,977,900	18,500,000	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pemasaran produknya	persen	5.99	5.99	238,477,900	256,977,900	18,500,000	
	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan Produksi dan Pengolahan	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan Produksi dan Pengolahan	persen	0.96	0.96			-	
	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	Pesentase usaha mikro yang mendapatkan HAKI	persen	5.83	5.83			-	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit usaha	260	260	238,477,900	256,977,900	18,500,000	mengakomodir kegiatan konsultasi koordinasi dan studi banding mendukung penyusunan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	persen	1.72	1.72	2,570,710,946	2,590,124,946	19,414,000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izin Dan Pendaftaran Usaha Yang Dikeluarkan	Persentase Rekomendasi Izin Dan Pendaftaran Usaha Yang Dikeluarkan	persen	100	100	31,764,840	31,764,840	-	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	15,299,840	15,299,840	-	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	dokumen	3	3	15,299,840	15,299,840	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,310,000	3,960,000	(1,350,000)	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	5	5	5,310,000	3,960,000	(1,350,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,640,000	4,290,000	(1,350,000)	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	2	2	5,640,000	4,290,000	(1,350,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	5,515,000	8,215,000	2,700,000	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	dokumen	2	2	5,515,000	8,215,000	2,700,000	kegiatan pengawasan dan monitoring waralaba
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Representative	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Representative	persen	18.75	18.75	1,424,670,000	1,424,670,000	-	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/dikembangkan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan/dikembangkan	sarana	3	3	1,424,670,000	1,424,670,000	-	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	4	1,419,170,000	1,419,170,000	-	Penyesuaian biaya kajian pasar modern, sisanya dialihkan untuk pemeliharaan pasar tayibah ex kebakaran
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	4	5,500,000	5,500,000	-	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	persen	9	9	594,145,500	594,145,500	-	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan ketersediaan bapokting kabupaten	persen	100	100	1,359,500	4,159,500	2,800,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	1,359,500	4,159,500	2,800,000	penambahan untuk kegiatan sidak gejolak harga bapokting yang tahun ini menjadi concen dalam pengendalian inflasi

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
		Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting	ketersediaan data informasi harga dan stok bapokting	laporan	12	12	592,186,000	589,386,000	(2,800,000)	
	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting	Persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok bapokting	persen	100	100			-	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	5,200,000	5,200,000	-	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	12	12	1,150,000	1,150,000	-	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	585,836,000	583,036,000	(2,800,000)	Mengalihkan belanja yang tidak terserap
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	Persentase rekomendasi ijin agen penyalur pupuk bersubsidi yang dikeluarkan	persen	100	100	600,000	600,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	4	4	600,000	600,000	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dikembangkan	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dikembangkan	persen	100	100	279,426,000	291,426,000	12,000,000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah	Persentase penyelenggaraan promosi dagang bagi produk unggulan daerah	persen	100	100	279,426,000	291,426,000	12,000,000	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	pelaku usaha	7	7	80,000,000	80,000,000	-	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	10	10	103,426,000	103,426,000	-	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha	60	60	46,000,000	58,000,000	12,000,000	mengakomodir biaya kontribusi pelatihan ekspor bagi pelaku usaha
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	5	5	50,000,000	50,000,000	-	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	Persentase Tertib Ukur	persen	35	35	168,204,606	187,618,606	19,414,000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	35	35	168,204,606	187,618,606	19,414,000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	3320	3320	119,827,606	139,241,606	19,414,000	untuk pencaangan daerah tertib ukur yang ditargetkan dicapai pada tahun berikutnya

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	578	578	38,828,000	38,828,000	-	
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	unit	6	6	9,549,000	9,549,000	-	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Daerah Yang Dipromosikan	Persentase Produk Daerah Yang Dipromosikan	persen	100	100	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	persen	100	100	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5	5	72,500,000	60,500,000	(12,000,000)	mengalihkan belanja yang tidak terserap untuk kontribusi pelatihan expor bagi pelaku usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	2.07	2.07	1,883,923,600	2,570,863,600	686,940,000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	persen	92.49	92.49	1,775,652,500	2,462,592,500	686,940,000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang di bina/ fasilitasi	Persentase IKM yang di bina/ fasilitasi	persen	100	100	1,775,652,500	2,462,592,500	686,940,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	4	4	760,519,000	760,519,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1	1	66,918,000	66,918,000	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	4	4	948,215,500	1,635,155,500	686,940,000	peningkatan sarana dan fasilitas untuk fasilitasi Pemasaran UMKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Izin	Persentase IKM yang Memiliki Izin	persen	100	100	49,413,000	49,413,000	-	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepat waktu	Persentase Rekomendasi Izin yang dikeluarkan tepat waktu	persen	100	100	49,413,000	49,413,000	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	19,413,000	22,413,000	3,000,000	akomodir kegiatan koordinasi dan pengawasan perijinan usaha perindustrian

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen	4	4	30,000,000	27,000,000	(3,000,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan koordinasi dan pengawasan perijinan usaha perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (berdasarkan permendagri 18 2020)	persen	95	95	58,858,100	58,858,100	-	
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah di kab/kota	persen	100	100	58,858,100	58,858,100	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	2	2	2,198,000	2,198,000	-	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen	2	2	31,867,000	31,867,000	-	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	1	1	24,793,100	24,793,100	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	persen	76	76	12,501,819,625	12,192,012,625	(309,807,000)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	persen	100	100	60,000,000	60,000,000	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	20,000,000	16,038,000	(3,962,000)	Pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	4	10,184,000	7,789,000	(2,395,000)	Pengalihan belanja yang tidak terserap untuk akomodir kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4	14,000,000	20,357,000	6,357,000	optimalisasi kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6	6	15,816,000	15,816,000	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	7,333,249,706	6,983,249,706	(350,000,000)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	50	50	7,092,649,706	6,742,649,706	(350,000,000)	pengalihan belanja gaji dan tunjangan yang tidak terserap untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja OPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	210,600,000	210,600,000	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	30,000,000	30,000,000	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	125,000,000	125,000,000	-	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	10	125,000,000	125,000,000	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PersentaseTerlaksananya administrasi umum perangkat daerah	PersentaseTerlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	1,609,705,016	1,859,048,016	249,343,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	26,230,000	16,270,000	(9,960,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	692,495,380	805,353,380	112,858,000	pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain Mesin absensi, meja kursi kerja, dan lainnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	paket	12	12	69,440,000	79,400,000	9,960,000	penambahan belanja logistik kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	12	12	54,672,000	54,672,000	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	766,867,636	903,352,636	136,485,000	mengakomodir kebutuhan koordinasi dan konsultasi, serta harmonisasi pelaksanaan tugas baik dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	2,558,823,400	2,399,673,400	(159,150,000)	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			ANGGARAN		(+) BERTAMBAH/ (-) BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	389,089,400	389,089,400	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	13	13	2,169,734,000	2,010,584,000	(159,150,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	815,041,503	765,041,503	(50,000,000)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	38,990,000	38,990,000	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	13	436,401,503	436,401,503	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	870	870	65,650,000	65,650,000	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	274,000,000	224,000,000	(50,000,000)	pengalihan belanja yang tidak terserap
						19,415,713,903	20,079,558,227	663,844,324	

Adapun Rencana kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan				19.415.713.903,00	20.079.558.227,00			1.795.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.662.082.903,00	14.364.578.047,00			1.710.000.000,00
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.662.082.903,00	14.364.578.047,00			1.710.000.000,00
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) DKUMPP	78 Persen	78 %	12.018.988.503,00	12.406.266.997,00			1.710.000.000,00
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined	100 Persen	undefined undefined	107.646.000,00	107.646.000,00			150.000.000,00
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	34.223.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		25.000.000,00
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 1	000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.517.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	
	2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	5 Data	19.129.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi Berkualitas IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha IKU Perangkat Daerah 3: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan IKU Perangkat Daerah 4: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	100 Persen	100 % 1.76 % 18.33 % 2.11 % 45.05 % undefined undefined	7.494.120.000,00	7.494.120.000,00			250.000.000,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.215.400.000,00	7.215.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	248.720.000,00	208.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi Berkualitas IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha IKU Perangkat Daerah 3: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan IKU Perangkat Daerah 4: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Jumlah Perencana yang meningkat kompetensinya undefined	100 Persen	100 % 1.76 % 18.33 % 2.11 % 45.05 % undefined undefined	100.000.000,00	100.000.000,00			0,00	
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi Berkualitas IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha IKU Perangkat Daerah 3: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan IKU Perangkat Daerah 4: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Sarana dan Prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran undefined	100 Persen	100 % 1.76 % 18.33 % 2.11 % 45.05 % undefined undefined	1.126.065.500,00	1.126.065.500,00			35.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.854.500,00	10.854.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		35.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	19 Paket	198.082.000,00	343.430.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	2	1 7	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	69.896.000,00	84.896.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	1 7	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	57.233.000,00	57.233.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00		
	2	1 7	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	775.000.000,00	988.752.694,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00		
	2	1 7	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi Berkualitas IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah undefined	100 Persen	100 % 18.33 % 45.05 % undefined undefined	0,00	0,00			0,00	
	2	1 7	0 1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi BerkualitasIKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausahaIKU Perangkat Daerah 3: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor PerdaganganIKU Perangkat Daerah 4: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri PengolahanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 %1.76 %18.33 %2.11 %45.05 %	2.366.619.500,00	2.366.619.500,00			400.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	389.869.500,00	421.869.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		400.000.000,00
	2	1 7	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1.976.750.000,00	1.976.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	1 7	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1: Persentase Koperasi Berkualitas IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha IKU Perangkat Daerah 3: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan IKU Perangkat Daerah 4: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terlaksananya pemeloharaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur	100 Persen	100 % 1.76 % 18.33 % 2.11 % 45.05 %	824.537.503,00	824.537.503,00			875.000.000,00	
	2	1 7	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00	
	2	1 7	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	452.921.503,00	452.921.503,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00	
	2	1 7	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	258.866.000,00	318.866.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00
2	2	1 7	0 2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	undefined	94.83 Persen	undefined undefined	23.769.000,00	0,00			0,00
	2	1 7	0 2	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	undefined	7 Koperasi	undefined undefined	23.769.000,00	23.769.000,00			0,00
	2	1 7	0 2	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	00 Unit Usaha	23.769.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
3	2	1 7	0 3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat Persentase Koperasi Aktif	75.86 78.53 Persen Persen	undefined undefined % undefined	79.000.000,00	435.951.500,00			0,00
	2	1 7	0 3	2.0 1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang diawasi persentase koperasi yang didampingi	32 Koperasi 9 Koperasi	undefined %	79.000.000,00	79.000.000,00			0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 3	2.0 1	000 3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi								
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Unit Usaha	35 Unit Usaha	30.000.000,00	399.104.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	2	1 7	0 3	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	41 Unit Usaha	41 Unit Usaha	49.000.000,00	36.847.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
4	2	1 7	0 4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	undefined	29.31 Persen	undefined undefined	88.442.500,00	0,00			0,00
	2	1 7	0 4	2.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	undefined	58 Koperasi 6 Koperasi	undefined undefined	88.442.500,00	88.442.500,00			0,00
	2	1 7	0 4	2.0 1	000 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	28.875.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	2	1 7	0 4	2.0 1	000 3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan								
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	59.567.500,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
5	2	1 7	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sehat	69.16 Persen	undefined %	144.906.000,00	95.786.000,00			0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang memahami pengelolaan koperasi	60 Anggota Koperasi	undefined %	144.906.000,00	144.906.000,00			0,00
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	144.906.000,00	95.786.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
6	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahnya	42.94 Persen	undefined %	129.641.000,00	104.494.000,00			0,00
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang bermitra usaha persentase koperasi yang bertambah lini usahanya persentase koperasi yang mendapat akses pemasaran persentase koperasi yang mendapat akses permodalan	70 Unit Usaha	undefined %	129.641.000,00	129.641.000,00			0,00
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	16.311.500,00	11.425.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	97.018.000,00	80.639.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	16.311.500,00	12.430.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
7	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	127.71 Persen	undefined %	1.108.193.300,00	1.275.660.950,00			0,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pertumbuhan UM yang mendapat akses permodalan Persentase UM yang tergabung dalam kelompok inklusif Persentase Usaha Mikro bersertifikat Halal Persentase Usaha Mikro bersertifikat HKI Persentase Usaha Mikro bersertifikat PIRT Persentase Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha	0.49 Persen 0.67 Persen 29.7 Persen 32.49 Persen 9.22 Persen	undefined %	1.108.193.300,00	1.108.193.300,00			0,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	850 Unit Usaha	850 Unit Usaha	148.800.000,00	130.553.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2000 Unit Usaha	2000 Unit Usaha	175.122.300,00	157.829.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	130.041.000,00	118.415.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	28.894.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil									
							Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	41.367.000,00	33.442.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	5000 Unit Usaha	10000 Unit Usaha	401.650.000,00	616.809.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1 7	0 7	2.0 1	001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 Orang	120 Orang	176.213.000,00	189.716.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
8	2	1 7	0 8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya	37.41 Persen	undefined %	69.142.600,00	46.418.600,00			0,00
	2	1 7	0 8	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase UM yang mendapatkan akses pemasaran	1.44 Persen 7.98 Persen	undefined %	69.142.600,00	69.142.600,00			0,00
	2	1 7	0 8	2.0 1	000 6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	265 Unit Usaha	265 Unit Usaha	69.142.600,00	46.418.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.753.631.000,00	5.714.980.180,00			85.000.000,00
	3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.137.781.000,00	2.833.758.680,00			85.000.000,00
9	3	3 0	0 2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha perdagangan (Toko Swalayan, pusat perbelanjaan) yang memiliki ijin sesuai ketentuan	100 Persen	%	62.435.000,00	48.827.000,00			0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	3 0	0 2	2.0 1		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diawasi Persentase rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 % undefined %	36.535.000,00	36.535.000,00			0,00
	3	3 0	0 2	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	3 Dokumen	36.535.000,00	31.459.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	3 0	0 2	2.0 2		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase perijinan tanda daftar gudang yang diawasi Persentase rekomendasi tanda daftar gudang yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	100 % undefin ed %	13.900.000,00	13.900.000,00			0,00
	3	3 0	0 2	2.0 2	000 1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang								
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	5 Dokumen	13.900.000,00	10.922.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Perijinan STPW dalam negeri yang diawasi Persentase rekomendasi STPW dalam negeri yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	% 100 %	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00
	3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik								
							Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	3.223.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase rekomendasi STPW waralaba luar negeri dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	%	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00
	3	30	02	2.04	0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri								
							Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	4 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	3.223.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
10	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang dikelola (dimanfaatkan) dengan baik	18.75 Persen	%	1.906.202.000,00	1.718.497.000,00			0,00
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang sesuai standar	4 Sarana	%	1.906.202.000,00	1.906.202.000,00			0,00
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Targe	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	5 Unit	1.897.129.000,00	1.709.424.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	9.073.000,00	9.073.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
11	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase tindaklanjut atas ketidakstabilan harga dan stock bapakting	9 Persen	100 %	667.910.000,00	647.910.000,00			25.000.000,00
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan pemantauan harga dan pemantauan stok bapakting tepat waktu	100 Persen	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00			10.000.000,00
	3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000,00
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan pemantauan harga dan pemantauan stok bapakting tepat waktu Persentase operasi pasar tepat waktu	100 Persen	100 %	659.130.000,00	659.130.000,00			15.000.000,00
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	12 Laporan	2.980.000,00	2.980.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	646.150.000,00	626.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase agen dan pengecer pupuk bersubsidi yang diawasi	100 Persen	%	3.780.000,00	3.780.000,00			0,00
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	3.780.000,00	3.780.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
12	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha perdagangan yang	100 Persen	%	244.234.000,00	194.878.000,00			0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							mendapat akses pasar Luar Daerah							
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perdagangan berwawasan ekspor Persentase pelaku usaha perdagangan yang mendapat akses pasar luar daerah	100 Persen	%	244.234.000,00	244.234.000,00			0,00
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	60.450.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	120.000.000,00	118.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	50.000.000,00	48.575.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor								
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	5 Produk	13.784.000,00	8.063.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
13	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase tertib Ukur Daerah	20.41 Persen	%	197.000.000,00	187.788.680,00			60.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Targe	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Bersentase BDKT sesuai ketentuan Persentase alat UTTP bertanda tera sah	20.41 Persen	%	197.000.000,00	197.000.000,00			60.000.000,00
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3390 Unit	3390 Unit	147.000.000,00	146.546.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	608 Orang	608 Orang	40.000.000,00	33.442.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal								
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	7.799.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
14	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang mendapatkan akses pemasaran dalam daerah	100 Persen	%	60.000.000,00	35.858.000,00			0,00
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memasarkan produknya pada marketplace Persentase pelaku usaha perdagangan yang memasarkan produknya pada toko swalayan dan jasa perhotelan	100 Persen	% undefined %	60.000.000,00	60.000.000,00			0,00
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	5 UMKM	60.000.000,00	35.858.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.615.850.000,00	2.881.221.500,00			0,00
15	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM berstandarisasi Halal persentase IKM berstandarisasi P-IRT	92.62 Persen	undefined % undefined	2.529.780.000,00	2.832.279.000,00			0,00
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM mendapat fasilitasi pemasaran online dan offline Persentase IKM yang difasilitasi kemasan Persentase IKM yang difasilitasi Sertifikasi/standarisasi Persentase IKM yang meningkat kompetensinya	100 Persen	%	2.529.780.000,00	2.529.780.000,00			0,00
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	475.924.000,00	576.978.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	3 1	0 2	2.0 1	000 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	1.745.182.000,00	1.978.161.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	3	3 1	0 2	2.0 1	000 8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota									
							- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	60 Dokumen	60 Dokumen	308.674.000,00	277.139.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
16	3	3 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase IKM berlegalitas usaha	100 Persen	undefined %	38.149.000,00	22.699.000,00			0,00	
	3	3 1	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	IKU: Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Persentase perijinan industri yang diawasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan perijinan yang ditindaklanjuti persentase verifikasi ijin industri tepat waktu	100 Persen	3.14 % undefined %	38.149.000,00	38.149.000,00			0,00	
	3	3 1	0 3	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	4 Dokumen	20.414.000,00	11.765.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)									
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu	4 Dokumen	4 Dokumen	17.735.000,00	10.934.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
17	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang patuh melaporkan data industrinya di SiINAS	95 Persen	undefined %	47.921.000,00	26.243.500,00			0,00
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	IKU: Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Persentase IKM yang melaporkan data di SiINAS Persentase IKM yang terdaftar di SiINAS	95 Persen	3.14 % undefined %	47.921.000,00	47.921.000,00			0,00
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	4 Dokumen	4 Dokumen	4.552.000,00	1.659.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025				Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	13.059.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas								
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	18.369.000,00	11.525.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	J U M L A H									19.415.713.903,00	20.079.558.227,00			21.795.000.000,00

BAB V
PENUTU
P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025.

Martapura, 3 Juli 2025

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2025, dimana Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025. Besar harapan kami agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD). Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun ke 5 Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Tahun 2021-2026, Hasil Reviu Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

tahapan penyusunan Renja Perubahan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Dokumen Perubahan ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 4 Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berizin Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), Tanggal 3 Juli 2024;
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29), Tanggal 26 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan, tetapi harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sektor penanaman modal di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan berisikan alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang baru/tidak/belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan PTSP, yang meliputi penyusunan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, pengelolaan administrasi umum, pelaksanaan SPP dan SOP, serta pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Selain itu, adapun Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi dan misi Bupati Kabupaten Banjar terpilih periode 2021-2026.

Visi Kabupaten Banjar adalah *"Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis"*.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Banjar 2021-2026, maka ditetapkan misi untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif; dan
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat

yang tertib, aman dan demokratis.

Berdasarkan urusan dan wewenang yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkontribusi dalam mewujudkan Misi Kelima sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total anggaran yang dikelola untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 15.507.662.596,- (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Adapun rincian belanjanya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Belanja DPMPTSP Kab. Banjar Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 12.479.447.596
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 6.097.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.381.867.596
5.2	BELANJA MODAL	Rp 3.028.215.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 884.375.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 243.840.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.900.000.000
	JUMLAH BELANJA	Rp 15.507.662.596

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.472.270.948.625	368.067.737.156			940.545.200	19.513.000	2,07
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A				14.567.117.396	2.055.740.413	14,11
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	88				14.567.117.396	2.055.740.413	14,11
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	26	6	9	150,00	100.040.500	7.700.000	7,70
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	2	2	100,00	16.063.500	3.300.000	20,54
Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	2						
Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	2	1	1	100,00			
Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	2	1	1	100,00			
Tersusunnya Dokumen Renstra	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1						

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1				10.449.000	2.475.000	23,69
Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1						
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2				10.631.000		
Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	2						
Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	100,00	10.836.000		
Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	1	1	1	100,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2				8.652.000		
Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	2						
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1	3	300,00	11.493.500		
Tersusunnya Laporan LKJIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	1	1	1	100,00			

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan LKPJ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1	1	1	100,00			
Tersusunnya Laporan LPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	1	1	1	100,00			
Tersusunnya Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	3	1					
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	3	100,00	11.128.500	1.925.000	17,30
Tersusunnya Laporan SAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	1						
Tersusunnya Laporan IKKI Semester I dan Semester II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	2						
Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	12	3	3	100,00			
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1				10.330.000		
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun	1						
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1				10.457.000		
Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	1						
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100	25	25	100,00	6.236.800.000	1.359.916.284	21,80

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	36	100,00	6.036.500.000	1.347.406.284	22,32
Terkelolanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	36	36	36	100,00			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76	19	19	100,00	184.200.000	12.510.000	6,79
Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	76	19	19	100,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1				8.050.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1						
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2				8.050.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2						
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	24.650.000		

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1				8.050.000		
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1						
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				8.300.000		
Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1						
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				8.300.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1						
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	8	2	5	250,00	191.602.000	1.762.000	0,92
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		5		91.602.000	1.762.000	1,92
Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		5				
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	1			100.000.000		
Terkelolanya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Fasilitas Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	1					

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	25	25	100,00	1.218.759.000	159.261.657	13,07
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1				47.655.000		
Terlaksanannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun	1						
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1				54.882.000	19.915.000	36,29
Terlaksanannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	1						
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1				58.481.000	7.804.000	13,34
Terlaksanannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	1						
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1				29.950.000		
Terlaksanannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	1						
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2				46.800.000	1.550.000	3,31
Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	2						
Terlaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1				42.621.000		
Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	1						

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1				913.400.000	129.992.657	14,23
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	1						
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1				24.970.000		
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	1						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	3.415.319.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1				2.500.000.000		
Terkelolanya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	10			915.319.000		
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	40	10					
Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	25	25	100,00	2.359.433.896	475.795.009	20,17
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2				6.330.000		
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	2						

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3				347.006.280	49.376.358	14,23
Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	3						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3	100,00	2.006.097.616	426.418.651	21,26
Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	12	3	3	100,00			
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	1.020.513.000	51.305.463	5,03
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1				42.750.000	6.657.257	15,57
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	1						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	3	5	166,67	300.760.000	44.648.206	14,85
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	15	3	5	166,67			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3				591.813.000		

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	3						
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	30	20	66,67	85.190.000		
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	120	30	20	66,67			
Tersusunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	15				377.578.500	6.586.000	1,74
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	1				18.749.500	3.290.000	17,55
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1				18.749.500	3.290.000	17,55
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1						
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	2				358.829.000	3.296.000	0,92
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2				358.829.000	3.296.000	0,92

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2						
Meningkatnya Jumlah Investor Baru	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	13	3	3	100,00	268.068.300		
Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	89	79	79	100,00	268.068.300		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	2			239.028.000		
Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun	9	2					
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1				29.040.300		
Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	89,31	101,49	197.018.200	12.927.000	6,56
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	100	25	25	100,00	197.018.200	12.927.000	6,56
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26	6	19	316,67	49.279.000	4.050.000	8,22

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	7	1	5	500,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	6	1	4	400,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	13	2	10	500,00			
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	731	163	347	212,88	73.843.500	8.877.000	12,02

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	200	50	120	240,00			
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	350	80	120	150,00			
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	181	45	107	237,78			
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	37	8	9	112,50	14.802.200		
Terfasilitasinya Layanan Konsultasi Serta Laporan Layanan Konsultasi	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	37	8	9	112,50			

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1414	329	2033	617,93	59.093.500		
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	325	75	900	1.200,00			
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	725	180	929	516,11			
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	364	90	204	226,67			

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase LKPM	100	25	25	100,00	34.946.200		
Meningkatnya Pemahaman Para Investor Terhadap Peraturan Perundangan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	25	25	100,00	34.946.200		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	5	5	100,00			
Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	5	5	100,00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	20	20	100,00	20.601.200		
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	20	20	100,00			
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	20	20	100,00	14.345.000		

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	20	20	100,00			
Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	25	25	100,00	62.934.000		
Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	25	25	100,00	62.934.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1				62.934.000		
Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	1						

Tabel 2.3
Realisasi Rencana Aksi DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.472.270.948.625	368.067.737.156			940.545.200	19.513.000	2,07	Kepala Dinas			April - Desember
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A				14.567.117.396	2.055.740.413	14,11	Kepala Dinas			April - Desember
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	88				14.567.117.396	2.055.740.413	14,11	Sekretaris			April - Desember
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	26	6	9	150,00	100.040.500	7.700.000	7,70	Kasubbag Umum			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	2	2	100,00	16.063.500	3.300.000	20,54	Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	2							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	2	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	2	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Renstra	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1				10.449.000	2.475.000	23,69	Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2				10.631.000			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	2							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	100,00	10.836.000			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	1	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2				8.652.000			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	2							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1	3	300,00	11.493.500			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan LKJIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	1	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan LKPJ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan LPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	1	1	1	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	3	1		-				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	3	100,00	11.128.500	1.925.000	17,30	Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan SAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	1							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan IKKI Semester I dan Semester II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	2							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	12	3	3	100,00				Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1				10.330.000			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun	1							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1				10.457.000			Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	1							Kelompok Kerja Perencanaan			April - Desember
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100	25	25	100,00	6.236.800.000	1.359.916.284	21,80	Kasubbag Umum			April - Desember
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	36	100,00	6.036.500.000	1.347.406.284	22,32	Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Terkelolanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	36	36	36	100,00				Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76	19	19	100,00	184.200.000	12.510.000	6,79	Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	76	19	19	100,00				Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1				8.050.000			Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2				8.050.000			Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2							Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	24.650.000			Kasubbag Umum			April - Desember
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1				8.050.000			Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				8.300.000			Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1				8.300.000			Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Keuangan & Aset			April - Desember
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	8	2	5	250,00	191.602.000	1.762.000	0,92	Kasubbag Umum			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		5		91.602.000	1.762.000	1,92	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		5					Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	1			100.000.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Fasilitas Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	1						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	25	25	100,00	1.218.759.000	159.261.657	13,07	Kasubbag Umum			April - Desember
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1				47.655.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1				54.882.000	19.915.000	36,29	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1				58.481.000	7.804.000	13,34	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1				29.950.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2				46.800.000	1.550.000	3,31	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	2							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1				42.621.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1				913.400.000	129.992.657	14,23	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1				24.970.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	3.415.319.000			Kasubbag Umum			April - Desember
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1				2.500.000.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terkelolanya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	10			915.319.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	40	10						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	25	25	100,00	2.359.433.896	475.795.009	20,17	Kasubbag Umum			April - Desember
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2				6.330.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	2							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3				347.006.280	49.376.358	14,23	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	3							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3	100,00	2.006.097.616	426.418.651	21,26	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	12	3	3	100,00				Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	25	25	100,00	1.020.513.000	51.305.463	5,03	Kasubbag Umum			April - Desember
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1				42.750.000	6.657.257	15,57	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	1							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	3	5	166,67	300.760.000	44.648.206	14,85	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	15	3	5	166,67				Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3				591.813.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	3							Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	30	20	66,67	85.190.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	120	30	20	66,67				Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian			April - Desember
Tersusunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	15				377.578.500	6.586.000	1,74	Sekretaris			April - Desember
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	1				18.749.500	3.290.000	17,55	Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1				18.749.500	3.290.000	17,55	Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1							Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	2				358.829.000	3.296.000	0,92	Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2				358.829.000	3.296.000	0,92	Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2							Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Meningkatnya Jumlah Investor Baru	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	13	3	3	100,00	268.068.300			Sekretaris			April - Desember
Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	89	79	79	100,00	268.068.300			Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	2			239.028.000			Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun	9	2						Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1				29.040.300			Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1							Kelompok Kerja Penanaman Modal			April - Desember
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	89,31	101,49	197.018.200	12.927.000	6,56	Sekretaris			April - Desember
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	100	25	25	100,00	197.018.200	12.927.000	6,56	Kelompok Kerja Perizinan Tertentu, Perizinan Jasa Usaha dan Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26	6	19	316,67	49.279.000	4.050.000	8,22	Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	7	1	5	500,00				Kelompok Kerja Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	6	1	4	400,00				Kelompok Kerja Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	13	2	10	500,00				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu			April - Desember
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	731	163	347	212,88	73.843.500	8.877.000	12,02	Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	200	50	120	240,00				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	350	80	120	150,00				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air, Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	181	45	107	237,78				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu			April - Desember
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	37	8	9	112,50	14.802.200			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember
Terfasilitasinya Layanan Konsultasi Serta Laporan Layanan Konsultasi	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	37	8	9	112,50				Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1414	329	2033	617,93	59.093.500			Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	325	75	900	1.200,00				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	725	180	929	516,11				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	364	90	204	226,67				Kelompok Kerja Perizinan Tertentu			April - Desember
Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase LKPM	100	25	25	100,00	34.946.200			Sekretaris			April - Desember
Meningkatnya Pemahaman Para Investor Terhadap Peraturan Perundangan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	25	25	100,00	34.946.200			Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	5	5	100,00				Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	5	5	100,00				Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	20	20	100,00	20.601.200			Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	20	20	100,00				Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	20	20	100,00	14.345.000			Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	20	20	100,00				Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			April - Desember
Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	25	25	100,00	62.934.000			Sekretaris			April - Desember
Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	25	25	100,00	62.934.000			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1				62.934.000			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran			Penanggung Jawab	Analisis/Kendala	Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Target	Target Triwulan I	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	1							Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan			April - Desember

Berikut adalah penjelasan singkat terkait hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar:

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi. Program ini terealisasi sebesar 0% dari target 15% dengan persentase capaian 0%.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase LKPM. Program ini terealisasi sebesar 25% dari target 100% dengan persentase capaian 25%.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Data dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses. Program ini terealisasi sebesar 25% dari target 100% dengan persentase capaian 25%.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Program ini terealisasi sebesar 0 dari target 87 dengan persentase capaian 0%.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

- Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah Investor Baru. Program ini terealisasi sebesar 3 Investor dari target 3 Investor dengan persentase capaian 100%.

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Program ini terealisasi sebesar 89,31 dari target 88 dengan persentase capaian 101,49%.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah karena beberapa capaian kinerja berada di akhir Triwulan IV. Oleh karena itu sebagian besar outputnya dan penyelesaiannya berada di akhir tahun.
- Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah nihil.
- Adapun faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah karena dalam pelaksanaannya semua lini di lingkungan DPMPTSP memaksimalkan semua SDM dan pelayanan sehingga target bisa tercapai dengan cepat.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

- Implikasi yang timbul adalah secara umum akan menambah realisasi capaian hingga tahun terakhir Renstra. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan seperti capaian yang masih sangat minim dan belum mencapai target. Diharapkan nantinya pada Triwulan II sampai Triwulan IV bisa dimaksimalkan agar target tahun 2025 bisa tercapai serta target Renstra SKPD yang sudah diperjanjikan juga dapat dicapai dengan baik.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

- Memaksimalkan capaian target pada Triwulan III sampai Triwulan IV karena masih ada sebagian kegiatan yang memang hasil akhir capaiannya berada di Triwulan IV.
- Melaksanakan evaluasi berkala terkait dengan capaian kinerja disetiap Triwulan serta berkoordinasi terkait kendala dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil capaian kinerja.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	89	86,15	87	89,12	102,44	175,27	196,93

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	118	16	27	27	100,00		43	36,44
2	18	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	24	7	7	100,00		31	103,33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1	100,00		2	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	2	2	2	100,00		4	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	1	1	100,00		2	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	2	2	2	100,00		4	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47	6	6	6	100,00		12	25,53

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60		15	15	100,00		15	25,00
2	18	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1							
2	18	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	100	100	100	100	100,00		200	200,00
2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	36	36	36	36	100,00		72	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12							
2	18	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	380	76	76	76	100,00		152	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	2	2	2	100,00		4	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100,00		200	200,00
2 18 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00
2 18 01 2 03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	36	16	8	10	125,00		26	72,22
2 18 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	7	3	5	166,67		12	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	20	5	5	100,00		25	119,05
2 18 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100,00		200	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00		2	40,00
2	18	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00		2	40,00
2	18	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100,00		4	40,00
2 18 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00
2	18	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100,00		200	200,00
2	18	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200	249	144	144	100,00		393	196,50
2 18 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100,00		200	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	2	2	2	100,00		4	40,00
2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	3	3	3	100,00		6	40,00
2	18	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	12	12	100,00		24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100,00		200	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100,00		2	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	14	15	15	100,00		29	145,00
2	18	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100,00		6	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125	91	115	115	100,00		206	164,80
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	100	20	20	20	100,00		40	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 02 2 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	1	1	1	1	100,00		2	200,00
2 18 02 2 01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	1	1	100,00		2	200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi	2							
2	18	02	2	02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2							
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	60	13	13	13	100,00		26	43,33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	380	63	76	76	100,00		139	36,58
2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	37	9	9	9	100,00		18	48,65

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	03	2	01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1		1	1	100,00		1	100,00
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	86,07	87	89,01	102,31		175,08	198,26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 04 2 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	100	100	100	100	100,00		200	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 04 2 01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	102	25	20	50	250,00		75	73,53

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.713	958	658	1.541	234,19		2.499	92,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 04 2 01 0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	178	33	35	36	102,86		69	38,76

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	04	2	01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5.281	1.301	1.317	4.230	321,18		5.531	104,73	
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase LKPM	100	100	100	100	100,00		200	200,00	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	100	100	100	100	100,00		200	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 05 2 01 0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24	158	20	176	880,00		334	1391,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 05 2 01 0006	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90	150	70	90	128,57		240	266,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 05 2 01 0007	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90	150	70	90	128,57		240	266,67

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	100	100	100	100	100,00		200	200,00
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	100	75	100	100	100,00		175	175,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah S/D Tahun (N-2) 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Realisasi Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 18 06 2 01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	1	1	1	100,00		2	40,00

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan realisasi investasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi investasi.

Jumlah seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total anggaran yang dikelola untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 15.507.662.596,- (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Selengkapnya terkait dengan rencana kerja perubahan dan pendanaan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rincian Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Tahun 2025 Serta Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							15.243.734.587,00	15.507.662.596,00	15.273.804.990,00							7.521.629.285,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.243.734.587,00	15.507.662.596,00	15.273.804.990,00							7.521.629.285,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							15.243.734.587,00	15.507.662.596,00	15.273.804.990,00							7.521.629.285,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				88 Nilai/Skor	88 Nilai/Skor	14.303.189.387,00	14.567.117.396,00	14.386.021.530,00							6.498.953.085,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			26 Dokumen	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	100.040.500,00	100.040.500,00	100.040.500,00			-	-	-		19.686.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	16.063.500,00	16.063.500,00	19.483.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	10.449.000,00	10.449.000,00	8.700.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	10.631.000,00	10.631.000,00	6.790.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	10.836.000,00	10.836.000,00	6.967.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	8.652.000,00	8.652.000,00	7.453.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	11.493.500,00	11.493.500,00	11.493.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			19.686.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	11.128.500,00	11.128.500,00	11.128.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.330.000,00	10.330.000,00	7.425.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	10.457.000,00	10.457.000,00	7.662.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	5.761.128.485,00	6.236.800.000,00	6.378.640.000,00			-	-	-		198.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.560.828.485,00	6.036.500.000,00	6.178.700.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				76 Dokumen	76 Dokumen	184.200.000,00	184.200.000,00	183.840.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			189.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			9.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	24.650.000,00	24.650.000,00	24.650.000,00			-	-	-		18.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renatra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																			Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			9.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			9.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	-			8 Orang	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	191.602.000,00	191.602.000,00	191.602.000,00			-	-	-		95.602.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	91.602.000,00	91.602.000,00	91.602.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			95.602.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	62.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	1.430.502.506,00	1.218.759.000,00	1.218.759.000,00			-	-	-		1.537.502.506,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.655.000,00	47.655.000,00	47.655.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			52.655.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.882.000,00	54.882.000,00	50.596.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			58.882.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.481.000,00	58.481.000,00	44.795.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			62.481.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.950.000,00	29.950.000,00	48.865.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			33.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	46.800.000,00	46.800.000,00	28.200.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			50.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.621.000,00	42.621.000,00	40.877.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			46.621.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.125.143.506,00	913.400.000,00	644.427.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			1.205.143.506,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.970.000,00	24.970.000,00	20.680.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			26.970.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	3.415.319.000,00	3.415.319.000,00	3.415.319.000,00			-	3. Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar	-		1.015.319.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	3. Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	915.319.000,00	915.319.000,00	953.883.750,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			1.015.319.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentnase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	2.359.433.896,00	2.359.433.896,00	2.359.433.896,00			-	-	-		2.474.161.080,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			6.530.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	347.006.280,00	347.006.280,00	347.006.280,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			372.461.080,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.006.097.616,00	2.006.097.616,00	1.971.690.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			2.095.170.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	1.020.513.000,00	1.020.513.000,00	1.020.513.000,00			-	-	-		1.139.831.999,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			47.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Unit	15 Unit	300.760.000,00	300.760.000,00	300.760.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			316.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	591.813.000,00	591.813.000,00	544.101.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			595.421.999,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					120 Unit	120 Unit	85.190.000,00	85.190.000,00	149.410.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			179.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Fasilitasi Penanaman Modal yang Berkualitas					15 %	100 %	377.578.500,00	377.578.500,00	302.965.600,00							450.378.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Program Insentif Penanaman Modal	-			1 Dokumen	100 % 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	18.749.500,00	18.749.500,00	18.749.500,00			-	-	-		60.749.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	18.749.500,00	18.749.500,00	17.159.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			60.749.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase/Jumlah Peta Potensi Investasi yang Terupdate	-			2 Dokumen	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	358.829.000,00	358.829.000,00	358.829.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		389.629.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	358.829.000,00	358.829.000,00	285.806.100,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			389.629.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Investor Baru				13 Investor	100 Persen	268.068.300,00	268.068.300,00	263.069.400,00							279.068.300,00	
	2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Berkualitas	-			89 Investor	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai /Skor	268.068.300,00	268.068.300,00	268.068.300,00			-	-	-		279.068.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					9 Dokumen	9 Dokumen	239.028.000,00	239.028.000,00	235.679.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			245.028.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	29.040.300,00	29.040.300,00	27.389.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			34.040.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat				88 Nilai/Skor	88 Nilai/Skor	197.018.200,00	197.018.200,00	162.559.660,00							212.628.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Kelengkapan Unsur Pelayanan	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	197.018.200,00	197.018.200,00	197.018.200,00			-	-	-		212.628.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Dokumen	26 Dokumen	49.279.000,00	49.279.000,00	40.482.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			53.279.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				731 Pelaku Usaha	731 Pelaku Usaha	73.843.500,00	73.843.500,00	62.477.760,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			77.453.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				37 Pelaku Usaha	37 Pelaku Usaha	14.802.200,00	14.802.200,00	12.089.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			18.802.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1414 Kegiatan Usaha	1414 Kegiatan Usaha	59.093.500,00	59.093.500,00	47.510.300,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			63.093.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5	2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelaporan LKPM				100 %	80 Persen	34.946.200,00	34.946.200,00	98.639.200,00							80.601.200,00	
	2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Keakuratan Pelaku Usaha Dalam Pelaporan LKPM yang Tervalidasi BKPM Persentase Kelengkapan Pelaporan LKPM yang Sesuai Aturan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pelaporan LKPM yang Tepat Waktu	-			100 %	1472270948625 Rupiah 80 Persen A Nilai/Skor	34.946.200,00	34.946.200,00	34.946.200,00			-	-	-		80.601.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					22 Kegiatan Usaha.	22 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	34.310.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	20.601.200,00	20.601.200,00	52.899.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			30.601.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	14.345.000,00	14.345.000,00	11.430.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Serta Penanaman Modal				100 %	100 Persen	62.934.000,00	62.934.000,00	60.549.600,00							0,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1 : Nilai Realisasi Investasi Daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Data dan Informasi Perizinan Serta Penanaman Modal yang Terkelola	-			100 %	100 Persen 1472270948625 Rupiah A Nilai/Skor	62.934.000,00	62.934.000,00	62.934.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.934.000,00	62.934.000,00	60.549.600,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H												15.243.734.587,00	15.507.662.596,00	15.141.904.990,00							7.521.629.285,00	

Tabel 3.2
Rincian Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.472.270.948.625	1.472.270.948.625	Rupiah	940.545.200	798.957.960	887.783.460	88.825.500		Kepala Dinas
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	Predikat	14.567.117.396	14.020.619.896	14.386.021.530	365.401.634		Kepala Dinas
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88	88	Nilai	14.567.117.396	14.020.619.896	14.386.021.530	365.401.634	Penambahan untuk kegiatan makan minum rapat di perencanaan, adanya penambahan gaji untuk P3K dan PSO dari struktural ke fungsional, penambahan pejabat pengadaan, perubahan rincian belanja, penambahan perajadin untuk kegiatan APKASI dan Sekretariat	Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	26	100	Persen	100.040.500	81.404.900	87.102.900	5.698.000	Penambahan untuk kegiatan makan minum rapat. Realisasi dengan triwulan I sudah tinggi sekitar 50% sedangkan kegiatan yang berjalan masih banyak.	Kasubbag Umum

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	Dokumen	16.063.500	16.063.500	19.483.500	3.420.000	Penambahan untuk kegiatan makan minum rapat. Realisasi makan minum rapat sampai dengan triwulan I sudah tinggi sekitar 50% sedangkan kegiatan yang berjalan masih banyak.	Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Tersusunnya Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Murni dan Rencana Aksi Perubahan	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Tersusunnya Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	Jumlah Dokumen PK Murni dan PK Perubahan	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Renstra	Tersusunnya Dokumen Renstra	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	10.449.000	8.700.400	8.700.400			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Tersusunnya Dokumen RKA Murni	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	Jumlah Dokumen RKA Murni	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	Dokumen	10.631.000	6.790.000	6.790.000			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Tersusunnya Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Pergeseran dan RKA Perubahan	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Dokumen	10.836.000	6.967.000	6.967.000			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Tersusunnya Dokumen DPA Murni	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	Jumlah Dokumen DPA Murni	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	8.652.000	7.453.000	7.453.000			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Tersusunnya Dokumen Pergeseran DPA dan Perubahan DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen Pergeseran dan Perubahan DPA	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	Laporan	11.493.500	10.358.500	11.493.500	1.135.000	Penambahan untuk kegiatan makan minum rapat. Realisasi makan minum rapat sampai dengan triwulan I sudah tinggi sekitar 50% sedangkan kegiatan yang berjalan masih banyak.	Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan LKJIP	Tersusunnya Laporan LKJIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	Jumlah Laporan LKJIP yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan LKPJ	Tersusunnya Laporan LKPJ	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan LPPD	Tersusunnya Laporan LPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	Jumlah Laporan LPPD yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	3	3	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	15	Laporan	11.128.500	9.985.500	11.128.500	1.143.000	Penambahan untuk kegiatan makan minum rapat. Realisasi makan minum rapat sampai dengan triwulan I sudah tinggi sekitar 50% sedangkan kegiatan yang berjalan masih banyak.	Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan SAKIP	Tersusunnya Laporan SAKIP	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan IKKI Semester I dan Semester II	Tersusunnya Laporan IKKI Semester I dan Semester II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	Jumlah Laporan IKKI Semester I dan Semester II yang disusun	2	2	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	12	12	Laporan						Kelompok Kerja Perencanaan
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	Dokumen	10.330.000	7.425.000	7.425.000			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Perencanaan
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	Data	10.457.000	7.662.000	7.662.000			Kelompok Kerja Perencanaan
Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah	Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	1	1	Data						Kelompok Kerja Perencanaan

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Dan Tepat Mutu	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	Persen	6.236.800.000	6.225.518.500	6.378.640.000	153.121.500	Penambahan gaji untuk pegawai baru yang mengisi formasi P3K dan adanya PSO dari struktural ke fungsional, Penambahan pejabat pengadaan dari 1 menjadi 2 orang serta Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kasubag Umum
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	Orang/Bulan	6.036.500.000	6.036.500.000	6.178.700.000	142.200.000	Penambahan gaji untuk pegawai baru yang mengisi formasi P3K dan adanya PSO dari struktural ke fungsional	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Terkelolanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Terkelolanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	36	36	Orang/Bulan						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76	76	Dokumen	184.200.000	175.800.000	183.840.000	8.040.000	Penambahan pejabat pengadaan dari 1 menjadi 2 orang	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	76	76	Dokumen						Kelompok Kerja Keuangan & Aset

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	8.050.000	6.568.500	8.050.000	1.481.500	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	Laporan	8.050.000	6.650.000	8.050.000	1.400.000	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2	2	Laporan						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	100	100	Persen	24.650.000	20.364.000	24.650.000	4.286.000	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kasubag Umum
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen	8.050.000	6.608.000	8.050.000	1.442.000	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Laporan	8.300.000	6.752.000	8.300.000	1.548.000	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengkomodir kegiatan	Kelompok Kerja Keuangan & Aset

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Laporan	8.300.000	7.004.000	8.300.000	1.296.000	Penambahan untuk atk dan makan minum rapat untuk mengakomodir kegiatan	Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Keuangan & Aset
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Daerah yang Berkualitas	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan Dan Tepat Waktu	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	8	100	Persen	191.602.000	153.602.000	153.602.000			Kasubag Umum
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	Orang	91.602.000	91.602.000	91.602.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkelolanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	Orang						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Orang	100.000.000	62.000.000	62.000.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkelolanya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Fasilitas Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Fasilitas Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Orang						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	100	Persen	1.218.759.000	747.641.600	926.095.600	178.454.000	Perubahan rincian belanja untuk pembayaran iuran sampah bulanan dan mengganti ke sub kegiatan lain, Penambahan untuk biaya pemasangan stiker kaca ruangan kerja, Pengurangan karena beban biaya pembelian surat kabar sudah disediakan gratis serta Penambahan perijin terkait kegiatan APKASI dan Sekretariat	Kasubag Umum
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	47.655.000	47.655.000	47.655.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun	1	1	Paket						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	54.882.000	54.882.000	50.596.000	(4.286.000)	Perubahan rincian belanja untuk pembayaran iuran sampah bulanan dan mengganti ke sub kegiatan lain	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun	1	1	Paket						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	58.481.000	44.795.000	44.795.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disusun	1	1	Paket						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	29.950.000	28.615.000	48.865.000	20.250.000	Penambahan untuk biaya pemasangan stiker kaca ruangan kerja	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun	1	1	Paket						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	Dokumen	46.800.000	46.800.000	28.200.000	(18.600.000)	Pengurangan karena beban biaya pembelian surat kabar sudah disediakan gratis	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Laporan	42.621.000	40.877.000	40.877.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	913.400.000	463.337.600	644.427.600	181.090.000	Penambahan perjadiin terkait kegiatan APKASI dan Sekretariat	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	1	1	Laporan						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	Dokumen	24.970.000	20.680.000	20.680.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	Persen	3.415.319.000	3.415.319.000	3.453.883.750	38.564.750	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras pelayanan publik	Kasubag Umum
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkelolanya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	40	Unit	915.319.000	915.319.000	953.883.750	38.564.750	Penambahan untuk mengakomodir kebutuhan sarpras pelayanan publik	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	40	40	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	100	100	Persen	2.359.433.896	2.359.433.896	2.325.026.280	(34.407.616)	Pengurangan karena biaya outsourcing masih terdapat sisa belanja	Kasubag Umum
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Laporan	6.330.000	6.330.000	6.330.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	2	2	Laporan						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	Laporan	347.006.280	347.006.280	347.006.280			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun	3	3	Laporan						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	2.006.097.616	2.006.097.616	1.971.690.000	(34.407.616)	Pengurangan karena biaya outsourcing masih terdapat sisa belanja	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun	12	12	Laporan						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	100	100	Persen	1.020.513.000	1.017.336.000	1.037.021.000	19.685.000	Pengurangan karena masih ada sisa dari uang sewa plaza gambut dan Penambahan untuk mengakomodir perawatan videotron yang sudah habis masa garansinya dan sekarang mengalami kerusakan	Kasubag Umum

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	Unit	42.750.000	42.750.000	42.750.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dikelola	1	1	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	Unit	300.760.000	300.760.000	300.760.000			Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	15	15	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	591.813.000	588.636.000	544.101.000	(44.535.000)	Pengurangan karena masih ada sisa dari uang sewa plaza gambut	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola	3	3	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	120	Unit	85.190.000	85.190.000	149.410.000	64.220.000	Penambahan untuk mengakomodir perawatan videotron yang sudah habis masa garansinya dan sekarang mengalami kerusakan	Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola	120	120	Unit						Kelompok Kerja Umum & Kepegawaian
Terasunnya Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Iklim penanaman modal meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	Persentase fasilitasi penanaman modal yang berkualitas	15	100	Persen	377.578.500	302.965.600	302.965.600			Sekretaris
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Meningkatnya pengembangan program insentif penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	Persentase pelaksanaan program insentif penanaman modal	1	100	Persen	18.749.500	17.159.500	17.159.500			Kelompok Kerja Penanaman Modal
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	Dokumen	18.749.500	17.159.500	17.159.500			Kelompok Kerja Penanaman Modal

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Penanaman Modal
Peraturan Daerah Mengenai Kemudahan Berinvestasi	Meningkatnya peta potensi investasi yang berkualitas	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Perda Kemudahan Investasi	Persentase/Jumlah Peta Potensi Investasi yang Terupdate	2	100	Persen	358.829.000	285.806.100	285.806.100			Kelompok Kerja Penanaman Modal
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	2	Dokumen	358.829.000	285.806.100	285.806.100			Kelompok Kerja Penanaman Modal
Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	2	Dokumen						Kelompok Kerja Penanaman Modal
Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Minat investasi penanaman modal meningkat	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	Persentase jumlah investor baru	13	100	Persen	268.068.300	244.169.400	263.069.400	18.900.000	Penambahan untuk biaya dekorasi stand pameran promosi	Sekretaris
Potensi Kabupaten Banjar Dikenal oleh Para Investor	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal yang Efektif	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang Mengenal Kabupaten Banjar	Persentase kegiatan promosi penanaman modal yang berkualitas	89	100	Persen	268.068.300	244.169.400	263.069.400	18.900.000	Penambahan untuk biaya dekorasi stand pameran promosi	Kelompok Kerja Penanaman Modal
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	9	Dokumen	239.028.000	216.779.600	235.679.600	18.900.000	Penambahan untuk biaya dekorasi stand pameran promosi	Kelompok Kerja Penanaman Modal
Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang disusun	9	9	Dokumen						Kelompok Kerja Penanaman Modal
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1	Dokumen	29.040.300	27.389.800	27.389.800			Kelompok Kerja Penanaman Modal
Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Tersedianya Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Penanaman Modal

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan meningkat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	Nilai	197.018.200	161.254.160	162.559.660	1.305.500	Penambahan ATK untuk menunjang pelayanan publik	Sekretaris
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan	Meningkatnya kualitas unsur pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang Diterbitkan serta Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengaduan	Persentase kelengkapan unsur pelayanan	100	100	Persen	197.018.200	161.254.160	162.559.660	1.305.500	Penambahan ATK untuk menunjang pelayanan publik	Kelompok Kerja Perizinan Tertentu, Perizinan Jasa Usaha dan Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26	26	Dokumen	49.279.000	40.482.000	40.482.000			Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	7	7	Dokumen						Kelompok Kerja Perizinan Jasa Usaha
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	6	6	Dokumen						Kelompok Kerja Perizinan Jasa Usaha

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	13	13	Dokumen						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	731	731	Pelaku Usaha	73.843.500	61.172.260	62.477.760	1.305.500	Penambahan ATK untuk menunjang pelayanan publik	Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	200	200	Pelaku Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	350	350	Pelaku Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Terkelolanya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	181	181	Pelaku Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	37	37	Pelaku Usaha	14.802.200	12.089.600	12.089.600			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan
Terfasilitasinya Layanan Konsultasi Serta Laporan Layanan Konsultasi	Terfasilitasinya Layanan Konsultasi Serta Laporan Layanan Konsultasi	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	37	37	Pelaku Usaha						Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1414	1414	Kegiatan Usaha	59.093.500	47.510.300	47.510.300			Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kearsipan, Penelitian, dan Tenaga Kerja	325	325	Kegiatan Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata	725	725	Kegiatan Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu dan Perizinan Jasa Usaha
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan, Perindustrian, Perdagangan, Penelitian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Air Mineral, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	364	364	Kegiatan Usaha						Kelompok Kerja Perizinan Tertentu
Meningkatnya Kesadaran Perusahaan Dalam Pelaporan Penanaman Modal	Kualitas Pengendalian LKPM Meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase LKPM	Persentase peningkatan pelaporan LKPM	100	80	Persen	34.946.200	30.019.200	98.639.200	68.620.000	Penambahan anggaran untuk kegiatan rutin karena dari murni tidak dapat anggaran dan Penambahan anggaran untuk menambah kegiatan bintek penanaman modal 1 kali	Sekretaris

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Pemahaman Para Investor Terhadap Peraturan Perundangan LKPM	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Memahami Peraturan Perundangan LKPM	Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM yang tepat waktu	100	80	Persen	34.946.200	30.019.200	98.639.200	68.620.000	Penambahan anggaran untuk kegiatan rutin karena dari murni tidak dapat anggaran dan Penambahan anggaran untuk menambah kegiatan bimtek penanaman modal 1 kali	Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Meningkatnya keakuratan pelaporan LKPM			Persentase keakuratan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM yang tervalidasi BKPM		80	Persen						
	Meningkatnya kelengkapan pelaporan LKPM			Persentase kelengkapan pelaporan LKPM yang sesuai aturan		80	Persen						
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	22	Kegiatan Usaha			34.310.000	34.310.000	Penambahan anggaran untuk kegiatan rutin karena dari murni tidak dapat anggaran	Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22	22	Kegiatan Usaha						Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	80	Pelaku Usaha	20.601.200	18.589.000	52.899.000	34.310.000	Penambahan anggaran untuk menambah kegiatan bimtek penanaman modal 1 kali	Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Satuan	Anggaran			Bertambah/Berkurang	Alasan	Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Murni	Efisiensi	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	80	Pelaku Usaha						Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	80	Kegiatan Usaha	14.345.000	11.430.200	11.430.200			Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Berdasarkan Kegiatan Inspeksi Lapangan dan Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80	80	Kegiatan Usaha						Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Meningkatnya Kemudahan Dalam Mengakses Data dan Informasi Perizinan	Pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Sistem Perizinan Yang Mudah Diakses	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal	100	100	Persen	62.934.000	60.549.600	60.549.600			Sekretaris
Terintegrasinya Data dan Layanan Perizinan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan serta penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Perizinan Yang Terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan serta penanaman modal yang terkelola	100	100	Persen	62.934.000	60.549.600	60.549.600			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	Dokumen	62.934.000	60.549.600	60.549.600			Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan
Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disusun	1	1	Dokumen						Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Pengaduan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kab. Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2025 bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sub bagian umum dan pokja;
2. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar;
3. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar didalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD);
4. Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025 agar dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut DPMPTSP Kabupaten Banjar terhadap Renja Perubahan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Agar masing-masing sub bagian/bidang dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini.
2. Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Renja Perubahan Tahun 2025 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025.

Demikian Dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program,

kegiatan dan sub kegiatan di sisa pelaksanaan tahun 2025 ini. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pihak di internal DPMPTSP agar turut bersama-sama melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 ini dengan penuh tanggung jawab guna mendukung tercapainya target kinerja DPMPTSP Kabupaten Banjar.

Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Martapura, 14 Juli 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Banjar**

**H. YUDI ANDREA, S.STP., M.H
NIP. 19791231 199810 1 002**

19. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan

untuk penyesuaian Perencanaan Tahunan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2025-2030 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2024 didasari oleh:

1. Perlunya penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, serta indikator sub kegiatan.
2. Adanya pelaksanaan proyek prioritas, penyesuaian belanja serta perubahan aktivitas

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar yaitu “Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2045;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 19. Peraturan Bupati Banjar Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bajar Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26), tanggal 3 Juli 2024;
 21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.
 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 18) tanggal 9 Juli 2025.
 23. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalibang Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar ini disusun dengan maksud untuk melakukan perubahan belanja, menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja tersebut, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 kedalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian sekaligus sebagai sarana pengendalian pada Disbudporapar Kabupaten Banjar dalam sisa tahun pelaksanaan berjalan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2025 Disbudporapar Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar, keterkaitan antara perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025;
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- 2.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan I Tahun 2025

Untuk mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025 - 2029 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”**. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu :

- 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya;
- 2) Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan;
- 4) Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Maka sesuai urusan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Disbudporapar Kabupaten Banjar yaitu urusan kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan serta pariwisata. Disbudporapar Kabupaten Banjar secara khusus mendukung tercapainya misi ke 1 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya; pada tujuan yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter; pada sasaran yaitu meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan.

Disbudporapar Kabupaten Banjar juga mendukung tercapainya misi ke 2 yaitu memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan; dengan tujuan yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan; dengan sasaran yaitu meningkatnya produktivitas ekonomi.

Untuk mendukung tercapainya hal-hal tersebut di atas maka pada tahun 2025 Disbudporapar Kabupaten Banjar telah menetapkan 9 program, 25 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 50.315.224.900,- (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rincian Belanja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Uraian	Pagu
I	BELANJA DAERAH	
1	BELANJA OPERASI	Rp. 35.301.542.150
	Belanja Pegawai	Rp. 6.545.100.000
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.115.274.650
	Belanja Hibah	Rp. 8.641.167.500
2	BELANJA MODAL	Rp. 15.013.682.750
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.496.590.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 13.496.042.750
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 000.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 21.050.000
	JUMLAH BELANJA	Rp. 50.315.224.900

Sumber data : DPA Disbudporapar Kab.Banjar Tahun 2025

2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan target 40,6% sedangkan realisasinya mencapai 7,16%. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-I Tahun 2025.
2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan target 37%, sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.

3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan target 10% sedangkan realisasinya mencapai 3%, Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-I Tahun 2025.
4. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan target 90% sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.
5. Program Pembinaan Sejarah, dengan target 13,3% sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan target 100% sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan target 40% sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.
8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan target 17,3% sedangkan realisasinya belum ada karena ditargetkan pada akhir triwulan ke-IV atau akhir tahun 2025.
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target skor 78 sedangkan realisasinya belum ada. Artinya program ini belum memenuhi targetnya sampai Triwulan Ke-I Tahun 2025.

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan target akhir tahun atau akhir triwulan ke-IV sebesar 37% sedangkan untuk triwulan I tidak ditargetkan dan realisasinya pun masih belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
2. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, memiliki 2 (dua) dari 3 (tiga) indikator yang belum tercapai targetnya, yang pertama yaitu jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan

luar negeri yang dilaksanakan dengan target akhir tahun atau akhir triwulan ke-IV sebanyak 6 Kegiatan, untuk triwulan ke-I tidak ditargetkan, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

Kemudian indikator kedua yaitu jumlah pelatihan peningkatan sdm pariwisata dengan target 1 Kegiatan selama tahun 2025, untuk triwulan ke-I tidak ditargetkan, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

3. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yaitu persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai dengan target 40% selama tahun 2025, untuk triwulan ke-I tidak ditargetkan dan juga realisasinya pun tidak ada.
4. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, Persentase Usaha Pariwisata yang Dibina dan Diawasi dengan target 21,68% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
5. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator yaitu persentase budaya yang dikelola dalam sistem registrasi nasional warisan budaya tak benda dengan target 20% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
6. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan dengan target 1 kelompok untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
7. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator jumlah pelaku seni yang mengikuti event daerah dengan target 100 kelompok untuk tahun

2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

8. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal banjar dengan target 40 Orang untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
9. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, memiliki 2 (dua) indikator yaitu yang pertama jumlah data dukung yang didapatkan untuk mendukung penetapan warisan budaya banjar dengan target 2 data untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025. Selanjutnya indikator persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya dengan target 42,3% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
10. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, memiliki 2 (dua) indikator yaitu yang pertama jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan target 26 objek untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
Selanjutnya indikator persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya dengan target 42,3% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki indikator jumlah atlet pelajar yang dibina dan dikembangkan untuk mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi / nasional dengan target 110 orang realisasinya untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
12. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota, memiliki indikator persentase prasarana olahraga untuk memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional dengan target 16% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

13. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga memiliki indikator persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional dengan target 100% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025..
14. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator persentase organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten yang diberdayakan dan dikembangkan, dengan target 14,2% namun realisasinya belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
15. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100% untuk tahun 2025, tidak ada target pada triwulan ke-I, realisasinya pun belum ada pada triwulan Ke-I Tahun 2025..
16. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 100% untuk tahun 2025, target pada triwulan ke-I sebesar 25%, namun baru terealisasi sebesar 16,32% triwulan Ke-I Tahun 2025.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Belum ada.

=

II. Kegiatan

1. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100% untuk tahun 2025, pada triwulan ke-I ditargetkan sebesar 25%, realisasinya pun sebesar 25% pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 100% untuk tahun 2025, pada triwulan ke-I ditargetkan sebesar 25%, realisasinya pun sebesar 25% pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan target 44 kegiatan untuk tahun 2025, pada triwulan ke-I ditargetkan sebesar 8 kegiatan, realisasinya pun sebanyak 8 kegiatan pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

2.4 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.

I. Program

1. Belum ada

II. Kegiatan

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, memiliki 1 (satu) dari 3 (tiga) indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu Jumlah Pengunjung Media Promosi Pariwisata Melalui Web Dan Medsos dengan target sebanyak 120.000 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 37.000 orang, sedangkan realisasinya sebanyak 37.326 orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota, memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu persentase ketersediaan amenities dengan target sebanyak 52,63%, untuk triwulan ke-I tidak ditargetkan, sedangkan realisasinya sebanyak 8,58% orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

3. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota, memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu persentase ketersediaan amenities dengan target sebanyak 52,63%, untuk triwulan ke-I tidak ditargetkan, sedangkan realisasinya sebanyak 8,58% orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, memiliki indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kabupaten dengan target sebanyak 200 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 100 orang, sedangkan realisasinya sebanyak 155 orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
5. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, memiliki indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kualitasnya Melalui Pelatihan dengan target sebanyak 685 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 100 orang, sedangkan realisasinya sebanyak 130 orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu persentase laporan keuangan sesuai ketentuan dengan target sebanyak 100 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 25%, sedangkan realisasinya sebanyak 33,12% orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu persentase sarana dan prasarana terpelihara sesuai kebutuhan yang berkualitas dengan target sebanyak 100 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 25%, sedangkan realisasinya sebanyak 78,63% orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

8. Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki indikator yang realisasinya melebihi targetnya, yaitu persentase terpenuhinya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target sebanyak 100 orang, untuk triwulan ke-I ditargetkan sebanyak 25%, sedangkan realisasinya sebanyak 33,28% orang pada triwulan Ke-I Tahun 2025.

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

2.5.1 Faktor-Faktor Tidak Tercapai Target Kinerja

2.5.1.1 Program

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Faktor Internal:

Database tentang kondisi amentitas ditempat wisata masih dalam tahap survey kondisi.

Faktor Eksternal:

Lahan di destinasi terkait terbatas, sehingga ingin menambah amenitas itu terhambat. terutama di kawasan wisata religi. Dan pengelola wisata biasanya mengusulkan amenitas pendukung bukan amenitas utama (Toilet, Tempat Ibadah, Rambu, dan Pelatihan).

2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Faktor Internal:

adanya pergeseran anggaran sehingga di undur kegiatannya

Faktor Eksternal:

1. Perubahan teknologi dan tren pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif karena pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar baru.

2. Kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam bidang kreatif, kurangnya akses terhadap sumber daya manusia.

3. Program Pemasaran Pariwisata.

Faktor Internal:

1. Ada kegiatan yang lebih prioritas sehingga menunda pelaksanaan kegiatan.
2. Tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).

Faktor Eksternal:

1. Tidak tersedianya jaringan internet di destinasi wisata yang dipromosikan.
2. Internet di destinasi wisata hanya untuk provider tertentu saja atau Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam.
3. Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan.
4. Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.

4. Program Pengembangan Kebudayaan.

Faktor Internal:

Terkadang terdapat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan permintaan Warisan Budaya Tak Benda Nasional.

Faktor Eksternal:

Beberapa warisan budaya tak benda kabupaten tidak dapat menjadi warisan budaya tak benda nasional, karena tidak sesuai ketentuan yang nasional berikan.

5. Program Pembinaan Sejarah.

Faktor Internal:

Pada periode triwulan ke I ini belum ada topik sejarah yang disebarluaskan, karena kegiatan lawatan sejarah dilaksanakan pada TW III.

Faktor Eksternal:

Sampai saat ini, belum terdapat SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan, karena Kegiatan Lawatan Sejarah belum dilaksanakan.

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Faktor Internal:

Sulitnya staff kebudayaan dalam melengkapi kekurangan data terkait beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan.

Faktor Eksternal:

Terdapat beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan, namun mengalami beberapa masalah berupa kerusakan.

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Faktor Internal:

Berkurangnya anggaran pengiriman kontingen karena efesiensi sehingga akan menurunnya jumlah medali.

Faktor Eksternal:

Kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet Kabupaten Banjar.

8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Faktor Internal:

1. Sebagian anggaran kas untuk beberapa kegiatan baru tersedia bulan april (triwulan ke-II).

2. Sarana masih kurang, belum maksimal.

Faktor Eksternal:

1. Tempat kegiatan ada yang kurang memadai.

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Internal:

Banyaknya dokumen-dokumen/ laporan-laporan yang diperlukan untuk penilaian IKKI yang harus diperbarui oleh sub bagian perencanaan yang memerlukan waktu yang lama disebabkan banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus diikuti

oleh sub bagian perencanaan serta koordinasi dengan bidang-bidang juga terkadang terlambat karena beberapa bidang juga melaksanakan kegiatan.

Faktor Eksternal:

Adanya perubahan format beberapa dokumen / laporan yang diminta oleh Bappedalitbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Banjar sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya.

2.5.1.2 Kegiatan

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Faktor penghambat :

Internal:

Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.

Eksternal:

1. Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam.
2. Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.

2. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Faktor penghambat :

Internal:

Adanya pergeseran anggaran sehingga di undur kegiatannya.

Eksternal:

Kegiatan workshop ekonomi kreatif belum dapat dilaksanakan karena melihat situasi cuaca tidak mendukung.

3. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Penyesuaian dengan perubahan format dokumen laporan;
2. Menunggu SK Penempatan Pegawai Kontrak;
3. Melakukan survey penambahan pendata;
4. Masih menyesuaikan dengan sistem pencairan anggaran yang berubah.

Eksternal:

1. Penyesuaian Pajak yang terbaru aplikasi core tax untuk pencairan honor tenaga ahli Tourism Information Center (TIC).
2. Belum siapnya tempat pelaksanaan pelatihan.
3. Untuk jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi masih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber.

4. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Internal:

Pembuatan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan pada triwulan ke-IV.

Eksternal:

Pembuatan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan pada triwulan ke-IV.

5. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Internal:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan pendataan / menghimpun data usaha pariwisata..

Eksternal:

1. Kurangnya ketertarikan pelaku usaha pariwisata dalam mengikuti pembinaan SDM.
2. Luasnya pendataan pelaku usaha pariwisata karena tidak setiap kecamatan memiliki daya tarik wisata.
3. Aksesibilitas kurang memadai.

6. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Sulitnya memenuhi syarat sesuai ketentuan sistem registrasi nasional WBTB.
2. Terdapat keterlambatan penyusunan spj dan pencairan anggaran kegiatan.
3. dikarenakan GF Becatuk Dauh dilaksanakan di akhir Ramadhan.

Eksternal:

1. Beberapa Warisan Budaya Daerah Kabupaten Banjar memiliki kemiripan dan kesamaan dengan daerah lain.
2. Terdapat beberapa peserta pendaftar yang mempermainkan panitia, karena sebenarnya grup tersebut tidak ada (siluman).
3. Adanya peserta yang berlaku tidak sopan dan berupaya mengatur panitia.

7. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Anggaran yang cukup terbatas untuk membina kelompok kesenian, terutama untuk kesenian yang memiliki banyak anggota.

Eksternal:

Terdapatnya kelompok kesenian yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan.

8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten / Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

Belum terdapat sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang DIsediakan/Difasilitasi, dikarenakan hibah pada kegiatan ini masih dalam proses pengerjaan.

Eksternal:-

9. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Dokumen data dan informasi sejarah untuk di Triwulan ke- I ini belum dibuat, karena target dokumen akan dibuat di Triwulan ke- II.
2. Pada periode triwulan ke-I ini belum ada topik sejarah yang disebarluaskan, karena kegiatan lawatan sejarah dilaksanakan pada Triwulan ke- I.

Eksternal:

Sampai saat ini, belum terdapat SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan, karena Kegiatan Lawatan Sejarah belum dilaksanakan.

10. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

- 1.Sulitnya menemukan cagar budaya yang dapat memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diproses SK.
- 2.Terbatasnya anggaran terutama untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang menjadi bagian dari upaya melakukan pelestarian cagar budaya.

Eksternal:

1. Beberapa Objek yang diduga cagar budaya tidak dapat diproses SK, karena tidak memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan dan diproses SK.
2. Terdapatnya cagar budaya yang aksesnya sulit dan jauh, sehingga menjadi salah satu penghambat pelestarian cagar budaya.

11. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Terbatasnya anggaran terutama untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang menjadi bagian dari upaya melakukan pelestarian cagar budaya.

Eksternal:

1. Terdapatnya cagar budaya yang aksesnya sulit dan jauh, sehingga menjadi salah satu penghambat pelestarian cagar budaya.

12. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Faktor Penghambat:

Internal:

Anggaran pengiriman kontingen terkena dampak efisien sehingga mengurangi jumlah atlet yang dapat bertanding di POPDA.

Eksternal:

1. Sarana dan prasarana latihan atlet masih kurang, sehingga harus latihan di Kota Banjarbaru.
2. Terdapat cabor olahraga yang tidak memiliki perwakilan atlet untuk bertanding.

13. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor Penghambat:

Internal:

Masih kurangnya pemahaman terkait dengan proses pelaksanaan pekerjaan Renovasi Stadion Mini Barakat dan Pembangunan Indoor Volly.

Eksternal:

Kurangnya komunikasi dengan Pihak Konsultan Perencana Renovasi Stadion Mini Barakat dan Pembangunan Indoor Volly.

14. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Faktor Penghambat:

Internal:

Masih belum maksimalnya pelaksanaan monitoring, baik dari awal usulan Hibah sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Eksternal:

Masih kurangnya pemahaman sebagian dari organisasi penerima hibah, terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

15. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Masih dilakukannya Perbaikan RAB dari organisasi kepemudaan penerima hibah.

2. Masih dilakukannya Perbaikan NPHD.

Eksternal:

Masih ada perbaikan di bagian hukum setda Kabupaten Banjar terkait RAD Kepemudaan..

16. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Sulitnya para ASN menyesuaikan waktu untuk mengikuti bimtek karena berbenturan dengan jadwal-jadwal kegiatan bidang atau sub bagian masing-masing dimana ASN tersebut bekerja.

Eksternal:

1. Tidak semua ASN dapat mengikuti bimtek disebabkan tema atau topik yang diberikan oleh penyedia bimtek sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN tersebut.

17. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Faktor Penghambat:

Internal:

1. Kurangnya kesadaran pengguna melakukan perawatan.

Eksternal:

1. Sulitnya mencari penyedia kendaraan dan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Sulitnya mencari penyedia peralatan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.

2.5.2 Faktor-Faktor Terpenuhinya Target Kinerja

2.5.2.1 Kegiatan

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor.
2. Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Eksternal:

1. Banyak alternatif penyedia..
2. Adanya Kerja sama, referensi serta kaji tiru dengan instansi dan mitra.
3. Banyaknya jasa percetakan yang bisa menjadi referensi sebagai tempat pencetakan.
4. Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Perlu adanya listrik, air, dan telepon untuk kelancaran kinerja.
2. Perlu adanya tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan dalam SKPD Banyaknya alternatif penyedia ATK.

Eksternal:

1. Pelayanan penyedia memuaskan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Faktor Pendorong:

Internal:

Tersedianya Anggaran

Eksternal:

Adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program GERMAS yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat dengan melakukan kegiatan olahraga.

2.5.3 Faktor-Faktor Melebihi Target Kinerja

2.5.3.1 Kegiatan

1. **Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, pada indikator Jumlah Pengunjung Media Promosi Pariwisata Melalui Web Dan Medsos.**

Faktor Pendorong:

Internal:

Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten..

Eksternal:

Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi destinasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial..

2. **Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota, pada indikator persentase ketersediaan amenities.**

Faktor Pendorong:

Internal:

1. SDM memadai.
2. Dukungan melakukan koordinasi dan survey lokasi untuk kemantapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Eksternal:

Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa maupun pokdarwis di lokasi yang akan dibangun atau dibuatkan sarana prasarana pariwisata.

3. **Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota, pada indikator persentase ketersediaan amenities.**

Faktor Pendorong:

Internal:

1. SDM memadai

Eksternal:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan para pokdarwis.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Anggaran tersedia untuk melaksanakan kejuaraan daerah tingkat pelajar sebagai seleksi atlet POPDA dan kejuaraan daerah memperingati hari olahraga nasional.

Eksternal:

1. Terselenggaranya 4 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari Atletik, Taekwondo, Karate dan Gulat yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikutkan dalam POPDA 2025.

5. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan aset, sub bagian umpeg, serta sub bagian perencanaan terjalin dengan baik.

2. Koodinasi internal bidang kepemudaan terjalin baik.

Eksternal:

Peserta kegiatan sudah di jaring.

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang serta sub-sub bagian lain Disbudporapar. dan mitra-mitra sub bagian keuangan.

Eksternal:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan BPKPAD, serta mitra-mitra sub bagian keuangan lainnya.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas SDM pegawai untuk memelihara Barang Milik Daerah.
2. Adanya SDM Pegawai yang berkompeten dalam memelihara Barang Milik Daerah.

Eksternal:

1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan.

8. Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Faktor Pendorong:

Internal:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.

Eksternal:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.

2.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah salah satu penjabaran tahunan dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu dokumen Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Periode 2025-2030, sehingga capaian target Perubahan Renja Tahun 2025 ini tentu memiliki dampak terhadap pencapaian target di dokumen Renstra. Berdasarkan tabel 2.2 di bawah ini, dapat terlihat sejauhmana tingkat capaian target periode akhir pada dokumen Renstra untuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut ini adalah dampak yang timbul terhadap target capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan Pada dokumen Renstra Disbudporapar 2025- 2030.

- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan II, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen

Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2025 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

- Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan II, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra Disbudporapar untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

2.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dari uraian faktor pendorong dan penghambat tersebut maka ada beberapa upaya perbaikan yang diambil dalam rangka mendorong tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap capaian program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan berkala, guna mendukung tercapainya target kinerja yang diperjanjikan oleh masing-masing pengampu kinerja setiap akhir triwulan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal Disbudporapar Kabupaten Banjar melalui bimbingan teknis serta konsultasi ke satuan kerja perangkat daerah baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah.
3. Menyusun agenda kegiatan di seluruh unit kerja dengan memperhatikan batas waktu pengerjaan.
4. Menerapkan pembinaan atlet yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas daya saing atlet di semua cabang olahraga yang ditunjang dari segi sarana prasarana olahraga, development of achievement

sports education, pengiriman atlet mengikuti kejuaraan-kejuaraan olahraga dan pembinaan secara terus menerus.

5. Akan menambah beberapa titik destinasi wisata serta jumlah petugas pendata jumlah kunjungan wisatawan.
6. Melakukan persiapan untuk memastikan adanya pendata pada aksesibilitas tempat wisata.
7. Melakukan sinergitas dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan akses berupa jalan menuju lokasi wisata.
8. Melakukan penyelesaian desain dan pembuatan RAB Paket kegiatan yang berhubungan dengan destinasi wisata.
9. Melibatkan para duta pariwisata, vlogers, pokdarwis (kelompok sadar wisata), influencers, serta pemangku kepentingan lainnya guna mempromosikan dan memviralkan tempat-tempat pariwisata Kabupaten Banjar baik melalui sosial media yang mereka miliki maupun dengan pertemuan-pertemuan langsung secara tatap muka di berbagai kegiatan.
10. Memberikan pelatihan sebagai tour guide kepada para duta pariwisata agar nantinya dapat menuntun wisatawan lokal maupun mancanegara dalam berwisata.
11. Melaksanakan berbagai event perlombaan yang bertujuan sebagai penunjang peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Banjar sebagai contoh lomba foto atau video tempat destinasi wisata di Kabupaten Banjar.
12. Melaksanakan berbagai event ekonomi kreatif tidak hanya untuk skala daerah Kabupaten Banjar namun juga untuk skala Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat memperkenalkan berbagai produk ekonomi kreatif khas Kabupaten Banjar kepada masyarakat umum.
13. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.

14. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar.
15. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif.
16. Melakukan kerjasama dengan institusi/lembaga pendidikan yang memiliki atau mengkaji ilmiah tentang warisan budaya.
17. Menambah anggaran kegiatan untuk penelitian warisan budaya dari internal maupun eksternal.
18. Mencari dan menggali lagi informasi atau referensi dari lembaga atau individu terkait objek kebudayaan, mengundang pakar dan informan sebagai pemenuhan kebutuhan data.
19. Cagar Budaya yang memiliki potensi namun milik masyarakat akan dilakukan pendekatan secara persuasif dan win-win solution tanpa ada paksaan.
20. Memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya Pecinta Cagar Budaya untuk memberikan informasi atau laporan terkait warisan budaya.
21. Menganggarkan kegiatan survey di sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang kepemudaan.
22. Menganggarkan kegiatan untuk meningkatkan prestasi serta kualitas sumber daya manusia pemuda Kabupaten Banjar pada bidang kepemudaan.
23. Melakukan pemasangan iklan kegiatan-kegiatan bidang kepemudaan secara lebih intensif di media cetak ataupun elektronik, serta media lainnya seperti pemasangan baliho-baliho atau spanduk di jalan-jalan umum yang ramai dilewati masyarakat, atau tempat—tempat yang sering dikunjungi masyarakat hingga ke tempat-tempat yang biasanya jarang mendapatkan informasi-informasi bidang kepemudaan.
24. Ikut serta mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan gender,

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pada bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga, serta pariwisata.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan	Lama Tinggal	Hari	2	2	100,00	Rp. 7.923.861.300	Rp. 619.975.000	7,82	Tersedianya pelatihan pelayanan wisatawan dan CHSE (Cleaness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) untuk pelaku usaha pariwisata.	Tersedianya penginapan dan hotel untuk wisatawan.	Kuota pelatihan terbatas untuk pelaku usaha pariwisata.	Kurangnya minat dan kesadaran pelaku usaha pariwisata atas pentingnya pelatihan pelayanan wisatawan dan CHSE (Cleaness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability)
	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	316.225	1.261.631	398,97				Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan atraksi wisata, serta kerajinan tangan / souvenir ditempat-tempat wisata.	keinginan wisatawan/turis untuk menikmati makanan khas daerah dan oleh-oleh khas daerah.	kesulitan dalam mengumpulkan data pengeluaran yang riil dari pengunjung.	1.Ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya minat masyarakat lokal dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menghabiskan uang pada aktivitas wisata. 2.Mahalnya biaya transpotrtasi menuju lokasi destinasi wisata. 3.Penginapan-penginapan yang tersedia kurang representatif sehingga mengurangi minat wisatawan untuk menginap.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya Daya Tarik Wisata Dan Ekonomi Kreatif	Lama Tinggal	Hari	2	2	100,00	Rp. 7.923.861.300	Rp. 619.975.000	7,82	Tersedianya pelatihan pelayanan wisatawan dan CHSE (Cleaness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) untuk pelaku usaha pariwisata.	Tersedianya penginapan dan hotel untuk wisatawan.	Kuota pelatihan terbatas untuk pelaku usaha pariwisata.	Kurangnya minat dan kesadaran pelaku usaha pariwisata atas pentingnya pelatihan pelayanan wisatawan dan CHSE (Cleaness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability)
	Pengeluaran Wisatawan	Rp.	316.225	1.261.631	398,97				Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan atraksi wisata, serta kerajinan tangan / souvenir ditempat-tempat wisata.	keinginan wisatawan/tur is untuk menikmati makanan khas daerah dan oleh-oleh khas daerah.	kesulitan dalam mengumpulkan data pengeluaran yang riil dari pengunjung.	1.Ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya minat masyarakat lokal dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menghabiskan uang pada aktivitas wisata. 2.Mahalnya biaya transpotrtasi menuju lokasi destinasi wisata. 3.Penginapan-penginapan yang tersedia kurang representatif sehingga mengurangi minat wisatawan untuk menginap.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang Representati f (memiliki 3A)	Persen (%)	7,16	10,6	148,04	Rp. 2.937.061.500	Rp. 0	0,00	Database di Dinas masih tahap updating.	1.Pengelola Destinasi wisata ikut serta membangun amenitas dengan dana swadaya dan adanya support dari . bantuan swasta. 2.Para pengelola destinasi wisata berinisiatif mengikuti pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Diskominfo Kabupaten Banjar, serta pengelola Tahura. 3. Pihak Pengelola Tahura mendukung rencana pelaksanaan pembanguna n sarana dan prasarana di kawasa Tahura.	Database tentang kondisi amentitas ditempat wisata masih dalam tahap survey kondisi.	Lahan di destinasi terkait terbatas, sehingga ingin menambah amenitas itu terhambat. terutama di kawasan wisata religi. Dan pengelola wisata biasanya mengusulkan amenitas pendukung bukan amenitas utama (Toilet, Tempat Ibadah, Rambu, dan Pelatihan).

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Amenitas	Persen (%)	N/A	8,58	100,00	Rp. 468.212.500	Rp. 0	0,00	1. Adanya aplikasi Destia Borneo sehingga mempermudah pekerjaan penginputan pendataan pengunjung wisatawan. 2.SDM yang memadai.	1. Pendata-pendata baru yang direkrut cepat memahami sistem aplikasi Destia Borneo dan cara menginput pendataan kunjungan wisatawan. 2.Adanya koordinasi yang baik dengan yang para pengelola daya tarik wisata.	1. Penyesuaian dengan perubahan format dokumen laporan; 2. Menunggu SK Penempatan Pegawai Kontrak; 3. Melakukan survey penambahan pendata; 4.Masih menyesuaikan dengan sistem pencairan anggaran yang berubah.	1. Penyesuaian Pajak yang terbaru aplikasi core tax untuk pencairan honor tenaga ahli Tourism Information Center (TIC). 2. Belum siapnya tempat pelaksanaan pelatihan. 3. Untuk jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi masih di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber.
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 200.133.500	Rp. 0	0,00	Adanya aplikasi Destia Borneo sehingga mempermudah pekerjaan penginputan pendataan pengunjung wisatawan.	Pendata-pendata baru yang direkrut cepat memahami sistem aplikasi Destia Borneo dan cara menginput pendataan kunjungan wisatawan.	1. Penyesuaian dengan perubahan format dokumen laporan; 2. Menunggu SK Penempatan Pegawai Kontrak; 3. Melakukan survey penambahan pendata;	1. Belum siapnya tempat pelaksanaan pelatihan. 2. Untuk jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi masih di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah orang pengelola daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	Orang	40	40	100,00	Rp. 268.079.000	Rp. 0	0,00	SDM yang memadai	Adanya koordinasi yang baik dengan yang para pengelola daya tarik wisata	Masih menyesuaikan dengan sistem pencairan anggaran yang berubah.	1. Belum siapnya tempat pelaksanaan pelatihan. 2. Untuk jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi masih di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal narasumber.
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan amenitas	Persen (%)	N/A	8,58	100,00	Rp. 2.314.308.000	Rp. 0	0,00	1. SDM memadai. 2. Dukungan melakukan koordinasi dan survey lokasi untuk kemantapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa maupun pokdarwis di lokasi yang akan dibangun atau dibuatkan sarana prasarana pariwisata 2, Adanya koordinasi yang baik dengan para pokdarwis yang ingin diikuti pelatihan mengenai kewirausahaan	Perlu waktu dalam penyesuaian harga dengan melakukan survey harga satuan pekerjaan untuk mencek kenaikan atau penurunan harga material/bahan konstruksi.	Adanya beberapa titik lokasi obyek wisata yang akan di survey terkendala teknis dan aksesibilitas

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	Persen (%)	N/A		0,00				1. SDM memadai. 2. Dukungan melakukan koordinasi dan survey lokasi untuk kemantapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa maupun pokdarwis di lokasi yang akan dibangun atau dibuatkan sarana prasarana pariwisata	Perlu waktu dalam penyesuaian harga dengan melakukan survey harga satuan pekerjaan untuk mencek kenaikan atau penurunan harga material/bahan konstruksi.	Adanya beberapa titik lokasi obyek wisata yang akan di survey terkendala teknis dan aksebilitas
Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	0,00	Rp251.000.000	0	0,00	Koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Dinas untuk rencana pekerjaan berjalan baik.	Adanya koordinasi yang baik dengan SDM pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara.	Masih menyesuaikan dengan sistem E-Katalog baru.	1. Ada perubahan untuk lokasi kegiatan sosper, karena menyesuaikan dengan narasumber terkait. 2.Adanya kendala sistem LPSE.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.747.188.000	Rp. 0	0,00	1. SDM memadai. 2. Telah Menjadwalkan survey lapangan yang akan ada pekerjaan Sarpras di destinasi wisata Tahun 2025 dengan Kepala Bidang dan disetujui oleh Kepala Dinas.	Adanya koordinasi yang baik juga dengan pihak desa yang akan dibangun atau dibuatkan sarana prasarana destinasi wisata tersebut	Perlu melakukan survey harga satuan pekerjaan untuk mengecek kenaikan atau penurunan harga material/bahan konstruksi.	Ada beberapa titik lokasi obyek wisata yang akan di kunjungi terkena dampak banjir.
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat di Sekitar Objek Wisata yang Dibina	Orang	70	70	100,00	Rp. 316.120.000	Rp. 0	0,00	SDM memadai	Adanya koordinasi yang baik dengan para pokdarwis	Pembuatan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan pada triwulan ke-IV.	Pembuatan Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dilaksanakan pada triwulan ke-IV.
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase usaha pariwisata yang dibina dan diawasi	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 154.541.000	Rp. 0	0,00	1.Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pariwisata. 2.Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata. 3.Adanya database pelaku usaha pariwisata yang terupdate.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi perizinan secara online (OSS).	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan pendataan / menghimpun data usaha pariwisata.	1.Kurangnya ketertarikan pelaku usaha pariwisata dalam mengikuti pembinaan SDM. 2.Luasnya pendataan pelaku usaha pariwisata karena tidak setiap kecamatan memiliki daya tarik wisata. 3.Aksesibilitas kurang memadai.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	15	30	200,00	Rp. 154.541.000	Rp. 0	0,00	1.Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pariwisata. 2.Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata. 3.Adanya database pelaku usaha pariwisata yang terupdate.	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi perizinan secara online (OSS).	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melakukan pendataan / menghimpun data usaha pariwisata.	1.Kurangnya ketertarikan pelaku usaha pariwisata dalam mengikuti pembinaan SDM. 2.Luasnya pendataan pelaku usaha pariwisata karena tidak setiap kecamatan memiliki daya tarik wisata. 3.Aksesibilitas kurang memadai.
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	1.187.500	4.737.725	398,97	Rp. 4.328.954.000	Rp. 619.975.000	14,32	1.Tersedianya anggaran untuk pendataan baik Kunjungan Wisata maupun Pendata Pelaku Usaha Pariwisata. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam bidangnya.	1.Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi dan pendataan kunjungan wisata; 2.Penyebaran informasi melalui media sosial untuk promosi jangkauannya sangat luas ; 3.Adanya event haul Guru Sekumpul serta event-event yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten	1.Ada kegiatan yang lebih prioritas sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. 2.Tanggal kegiatan yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).	1.Tidak tersedianya jaringan internet di destinasi wisata yang dipromosikan. 2.Internet di destinasi wisata hanya untuk provider tertentu saja atau Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 3.Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan. 4.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
										Banjar hingga akhir Tahun 2025 4.Kekayaan Atraksi Alam dan potensi pariwisata yang cukup memadai; 5.Adanya amenitas di beberapa titik destinasi; 6.Adanya petugas pendata yang tersebar di titi-titik pendataan destinasi wisata;		menghambat pekerjaan.
	Persentase destinasi wisata yang telah dipasarkan	Persen (%)	3	4	133,33				1.Tersedianya anggaran untuk pendataan baik Kunjungan Wisata maupun Pendata Pelaku Usaha Pariwisata. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam bidangnya.	1.Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi dan pendataan kunjungan wisata; 2.Penyebaran informasi melalui media sosial untuk promosi jangkauannya sangat luas ; 3.Adanya event haul Guru Sekumpul serta event- event yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan	1.Ada kegiatan yang lebih prioritas sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. 2.Tanggal kegiatan yang bisa berubah sesuai dengan arahan pimpinan (reschedule dari pimpinan).	1.Tidak tersedianya jaringan internet di destinasi wisata yang dipromosikan. 2.Internet di destinasi wisata hanya untuk provider tertentu saja atau Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 3.Faktor alam yaitu hujan dan medan jalan yang kurang baik menghambat perjalanan dinas ke tempat dilaksanakannya kegiatan. 4.Akses internet

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
										Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar hingga akhir Tahun 2025 4.Kekayaan Atraksi Alam dan potensi pariwisata yang cukup memadai; 5.Adanya amenitas di beberapa titik destinasi; 6.Adanya petugas pendata yang tersebar di titi-titik pendataan destinasi wisata;		yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Orang	37.000	37.326	100,88	Rp. 4.328.954.000	Rp. 619.975.000	14,32	Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten.	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial.	1.Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.	1.Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 2.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	N/A	0,00				Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten.	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial.	1.Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.	1.Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 2.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.
	Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata	Kegiatan	N/A	N/A	0,00				Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten.	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial.	1.Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.	1.Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 2.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	N/A	0,00	Rp. 2.589.058.000	Rp. 0	0,00	Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten.	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi destinasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial.	1.Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.	1.Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 2.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Sosial, Media Cetak, Lomba- Lomba Foto dan Video, Sosialisasi dan Fasilitasi	Promosi	2	2	100,00	Rp. 1.739.896.000	Rp. 619.975.000	35,63	Konsistensi dalam melakukan postingan konten promosi serta admin media sosial yang kompeten.	Antusias atau minat masyarakat untuk ikut menyebarkan informasi destinasi wisatanya ke media sosial dari banyaknya kiriman konten-konten destinasi wisata dari followers media sosial.	1.Ada kegiatan kedinasan yang harus diprioritaskan.	1.Akses internet yang kurang stabil di destinasi wisata alam. 2.Akses internet yg dikelola kominfo sering gangguan, sehingga menghambat pekerjaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Produktif	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 657.845.800	Rp. 0	0,00	Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	1.Adanya dukungan kebijakan pemerintah sehingga terfasilitasiny a produk pelaku ekraf, adanya ketersediaan pasar dan permintaan konsumen terhadap produk dan layanan kreatif sehingga dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. 2.Kreatifitas dan inovasi kemampuan masyarakat menghasilkan ide-ide baru, meningkatnya keterampilan yang tinggi dan bakat berkualitas sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar.	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mengurus kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	1.Perubahan teknologi dan tren pasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif karena pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar baru. 2.Kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam bidang kreatif, kurangnya akses terhadap sumber daya manusia.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih atau Kompeten	Orang	N/A	N/A	0,00	Rp. 657.845.800	Rp. 0	0,00	Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	masyarakat yang mendukung adanya kegiatan.	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembanga n Ekonomi Kreatif yang mengurusi kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	adanya pergeseran anggaran sehingga di undur kegiatannya
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Orang	N/A	N/A	0,00				Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	masyarakat yang mendukung adanya kegiatan.	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembanga n Ekonomi Kreatif yang mengurusi kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	adanya pergeseran anggaran sehingga di undur kegiatannya

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dipromosika n	Jenis	N/A	N/A	0,00				Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	tingginya antusias para peserta dalam mengikuti kegiatan workshop Ekraf	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembanga n Ekonomi Kreatif yang mengurusi kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	kegiatan workshop ekonomi kreatif belum dapat dilaksanakan karena melihat situasi cuaca tidak mendukung
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran Yang Diikuti	Kali	N/A	N/A	0,00	Rp. 560.459.800	Rp. 0	0,00	Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	masyarakat yang mendukung adanya kegiatan	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mengurusi kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	adanya pergeseran anggaran sehingga di undur kegiatannya

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah workshop dan sosialisasi ekraf yang dilaksanakan	Kegiatan	N/A	N/A	0,00	Rp. 97.386.000		0,00	Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	masyarakat yang mendukung adanya kegiatan	seluruh staf pegawai di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mengurus kegiatan diterima menjadi PPPK di instansi lain sehingga kurang fokus dalam melakukan administrasi kegiatan	kegiatan workshop ekraf belum dapat dilaksanakan karena melihat situasi cuaca tidak mendukung
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Terlestarikan nya Cagar Budaya	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 3.222.213.200	Rp. 0	0,00	Tersedianya anggaran kegiatan	1.Terdapat peserta event penyisihan dan GF Becatuk Dauh; 2.Banyaknya pengunjung dan tamu yang berhadir menyaksikan penyisihan dan GF Becatuk Dauh; 3.Terdapat SKPD atau instansi lain yang bersedia bekejasama sebagai panitia untuk mendukung kelancaran kegiatan penyisihan dan Grand Final Becatuk Dauh	Terdapat keterlambatan penyusunan spj dan pencairan anggaran kegiatan, dikarenakan GF Becatuk Dauh dilaksanakan di akhir Ramadhan	1.Terdapat beberapa peserta pendaftar yang mempermainkan panitia, karena sebenarnya grup tersebut tidak ada (siluman). 2.Adanya peserta yang berlaku tidak sopan dan berupaya mengatur panitia.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya Banjar yang Terlestarikan	Persen (%)	16,67	26,67	159,99	Rp. 3.222.213.200	Rp. 0	0,00	Tersedianya anggaran kegiatan	1.Terdapat peserta event penyisihan dan GF Becatuk Dauh; 2.Banyaknya pengunjung dan tamu yang berhadir menyaksikan penyisihan dan GF Becatuk Dauh; 3.Terdapat SKPD atau instansi lain yang bersedia bekejasama sebagai panitia untuk mendukung kelancaran kegiatan penyisihan dan Grand Final Becatuk Dauh	Terdapat keterlambatan penyusunan spj dan pencairan anggaran kegiatan, dikarenakan GF Becatuk Dauh dilaksanakan di akhir Ramadhan	1.Terdapat beberapa peserta pendaftar yang mempermainkan panitia, karena sebenarnya grup tersebut tidak ada (siluman). 2.Adanya peserta yang berlaku tidak sopan dan berupaya mengatur panitia.
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku Seni Budaya yang Aktif	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 2.877.998.500	Rp. 0	0,00	Terdapatnya anggaran untuk memenuhi syarat pengajuan Warisan tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasiaonal.	Terdapat Warisan Budaya tak benda Daerah Kabupaten Banjar yang berpotensi menjadi warisan budaya tak benda nasioanal.	Terkadang terdapat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan permintaan Warisan Budaya Tak Benda Nasional.	Beberapa warisan budaya tak benda kabupaten tidak dapat menjadi warisan budaya tak benda nasioanal, karena tidak sesuai ketentuan yang nasional berikan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Budaya yang Dikelola Dalam Sistem Registrasi Nasional Warisan Budaya Tak Benda	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.300.801.500	Rp. 0	0,00	1.Terdapatnya anggaran untuk mengusulkan WBTB dalam upaya memasukkan WBTB Kabupaten ke dalam sistem regnas. 2.Terdapat panitia Bidang Kebudayaan	1.Terdapat budaya Kab. Banjar yang berpotensi untuk diusulkan kedalam sistem regnas. 2.Terdapat peserta event penyisihan dan GF Becatuk Dauh - Banyaknya pengunjung dan tamu yang berhadir menyaksikan penyisihan dan GF Becatuk Dauh. 3.Terdapat SKPD atau instansi lain yang bersedia bekejasama sebagai panitia untuk mendukung kelancaran kegiatan penyisihan dan Grand Final Becatuk Dauh.	1.Sulitnya memenuhi syarat sesuai ketetntuan sistem regnas WBTB. 2.Terdapat keterlambatan penyusunan spj dan pencairan anggaran kegiatan, dikarenakan GF Becatuk Dauh dilaksanakan di akhir Ramadhan	1.Beberapa Warisan Budaya Daerah Kabupaten Banjar memiliki kemiripan dan kesamaan dengan daerah lain. 2.Terdapat beberapa peserta pendaftar yang mempermainkan panitia, karena sebenarnya grup tersebut tidak ada (siluman). 3.Adanya peserta yang berlaku tidak sopan dan berupaya mengatur panitia.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.300.801.500	Rp. 0	0,00	1.Terdapat anggaran Kegiatan Grand Final Becatuk Dauh. 2.Terdapat Staff Bidang Kebudayaan yang membantu dan menjadi panitia pelaksanaan kegiatan Grand Final Becatuk Dauh.	1.Terdapat Peserta yang berkompetisi pada Grand Final Becatuk Dauh. 2.Terdapat Petugas Lapangan dari SKPD lain yang membantu kelnacaran jalannya Grand Final Becatuk Dauh. 3.Terdapat Pengunjung dan penonton yang meramaikan Kegiatan Grand Final Becatuk Dauh	Waktu pencairan SPJ GF Becatuk Dauh yang terbatas dan tertunda, karena bertepatan dengan libur hari raya idul fitri.	1.Waktu pelaksanaan yang terbatas, karena pelaksanaan Grand Final Becatuk Dauh dimulai sehabis shalat tarawih. 2.Terdapat beberapa peserta yang tidak sopan karena kecewa dengan kekalahan.
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang Mengikuti Event Daerah	Kelompok	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.390.447.000	Rp. 0	0,00	Terdapatnya Seksi Kesenian dan Bidang Kebudayaan yang membantu melakukan pembinaan kesenian	Terdapat kesenian maupun kelompok kesenian yang masih melakukan pelestarian sehingga dapat dilakukan pembinaan	Anggaran yang cukup terbatas untuk membina kelompok kesenian, terutama untuk kesenian yang memiliki banyak anggota	Terdapat kelompok kesenian yang sudah kurang aktif

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.300.801.500	Rp. 0	0,00	1.Terdapatnya Kasi dan Staff Seksi Kesenian yang berperan dalam Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 2.Terdapat data atau bahan yang mendukung dalam proses Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pel	Terdapat objek kesenian maupun yang masih dilakukan pelestarian	1.Periode bulan Maret ini belum ada kegiatan fisik yang dilaksanakan, dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal ROPK Kegiatan yang telah dibuat	Terkadang Keadaan alam yang kurang mendukung, karena lokasi pelaksanaan event kesenian di luar ruangan
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga Pranata Tradisional yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	N/A	0,00	Rp. 89.645.500	Rp. 0	0,00	1.Terdapat Kasi dan Staff Seksi Kesenian dalam Penyusunan KAK, ROPK, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan melaksanakan kegiatan atau target yang akan dicapai. 2.Terdapat data atau bahan yang mendukung dalam proses Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 3.Terdapatnya Anggaran Kegiatan.	Adanya antusiasme kelompok kesenian untuk dibina	1.Terdapat perbedaan pendapat saat Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 2.Penundaan Kegiatan Workshop Kesenian dari jadwal kegiatan yang telah dibuat, dikarenakan ada kegiatan event besar yang harus melibatkan Bidang Kebudayaan di bulan ini	Terdapat kelompok kesenian yang sudah kurang aktif

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pelaku Budaya Yang Memperoleh Manfaat Sarana Kebudayaan	Kelompok	N/A	N/A	0,00	Rp. 186.750.000	Rp. 0	0,00	1.Terdapat Kasi dan Staff Seksi Kesenian dalam Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 2.Terdapat anggaran kegiatan	Terdapat kelompok pelaku budaya yang menerima dan difasilitasi sarana dan prasarana lembaga adat	Belum terdapat sarana dan Prasaranan Lembaga Adat yang Disediakan/Dif asilitasi, dikarenakan hibah pada kegiatan ini masih dalam proses pengerjaan	Terdapat Banyaknya tahapan hibah
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Penerima Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / Difasilitasi	Organisasi	N/A		0,00	Rp. 186.750.000	Rp. 0	0,00		Adanya antusiasme dari organisasi/kelompok budaya penerima hibah sarana dan praasarana untuk melengkapi administrasi hibah	1.Terdapat Perbedaan pendapat saat Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 2.Proses hibah masih berjalan, sampai saat ini proses hibah masih dalam tahap menunggu penandatanganan NPHD.	Terdapat Banyaknya tahapan hibah
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Budaya Banjar yang Disebarluaskan	Persen (%)	N/A		0,00	Rp. 28.572.600	Rp. 0	0,00	Terdapat topik sejarah yang akan disebarluaskan.	Terdapat narasumber yang membantu untuk menyebarluaskan topik sejarah.	Pada periode triwulan ke I ini belum ada topik sejarah yang disebarluaskan , karena kegiatan lawatan sejarah dilaksanakan pada TW III	Sampai saat ini, belum terdapat SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan, karena Kegiatan Lawatan Sejarah belum dilaksanakan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Masyarakat yang Memahami Sejarah Lokal Banjar	Orang	N/A	N/A	0,00	Rp. 28.572.600	Rp. 0	0,00	Terdapat topik sejarah yang akan disebarluaskan.	1.Terdapat narasumber yang membantu untuk menyebarluaskan topik sejarah. 2.Terdapatnya warga masyarakat sebagai pihak yang nantinya dapat memahami sejarah lokal banjar. 3.Terdapat bahan untuk membuat dokumen data dan informasi sejarah.	1.Dokumen data dan informasi sejarah untuk di TW I ini belum dibuat, karena target dokumen akan dibuat di TW II. 2.Pada periode triwulan ke-I ini belum ada topik sejarah yang disebarluaskan , karena kegiatan lawatan sejarah dilaksanakan pada TW III	Sampai saat ini, belum terdapat SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan, karena Kegiatan Lawatan Sejarah belum dilaksanakan
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	N/A	N/A	0,00	Rp. 23.372.400	Rp. 0	0,00	Terdapat Kasi dan Staff Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan atau Penyusunan KAK, ROPK dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Adanya antusiasme dari masyarakat untuk diberdayakan	Terkadang update data dilakukan tidak sesuai dengan jadwal ROPK yang telah dibuat.	Data yang belum lengkap untuk dimasukkan atau diupdate pada web simdapokbud.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	N/A	N/A	0,00	Rp. 5.200.200	Rp. 0	0,00	Terdapat staff yang menjadi operator untuk melakukan update data simdapokbud.	Terdapat bahan berupa data yang siap diupdate pada web simdapokbud	Terkadang update data dilakukan tidak sesuai dengan jadwal ROPK yang telah dibuat.	Data yang belum lengkap untuk dimasukkan atau diupdate pada web simdapokbud.
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 315.642.100	Rp. 0	0,00	Terdapat anggaran untuk membayar honor jupeI dan petugas kebersihan yang membantu untuk merawat dan menjaga cagar budaya dalam upaya melestarikan cagar budaya.	Terdapat juru pemelihara (jupeI) dan petugas kebersihan yang membantu merawat dan menjaga cagar budaya sebagai salah satu upaya melestarikan cagar budaya.	Sulitnya staff kebudayaan dalam melengkapi kekurangan data terkait beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan	Terdapat beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan, namun mengalami beberapa masalah berupa kerusakan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	Persen (%)	N/A	N/A	0,00				Terdapat anggaran untuk membayar honor jupel dan petugas kebersihan yang membantu untuk merawat dan menjaga cagar budaya dalam upaya melestarikan cagar budaya.	Terdapat juru pemelihara (jupel) dan petugas kebersihan yang membantu merawat dan menjaga cagar budaya sebagai salah satu upaya melestarikan cagar budaya.	Sulitnya staff kebudayaan dalam melengkapi kekurangan data terkait beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan	Terdapat beberapa cagar budaya yang telah dilestarikan, namun mengalami beberapa masalah berupa kerusakan
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dukung Yang Didapatkan Untuk Mendukung Penetapan Warisan Budaya Banjar	Dokumen	N/A	N/A	0,00	Rp. 72.088.600	Rp. 0	0,00	Terdapat staff kebudayaan yang membatu mengurus cagar budaya yang memenuhi syarat untuk dapat diproses SK.	Terdapat cagar budaya yang telah ditetapkan dan siap untuk dapat di proses SK.	Sulitnya menemukan cagar budaya yang dapat memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diproses SK.	Beberapa Objek yang diduga cagar budaya tidak dapat diproses SK, karena tidak memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan dan diproses SK.
	Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapanny a Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	N/A	N/A	0,00				Terdapat anggaran untuk membayar honor jupel dan petugas kebersihan yang membantu untuk merawat dan menjaga cagar budaya dalam upaya melestarikan cagar budaya.	Terdapat juru pemelihara (jupel) dan petugas kebersihan yang membantu merawat dan menjaga cagar budaya sebagai salah satu upaya melestarikan cagar budaya.	Terbatasnya anggaran terutama untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang menjadi bagian dari upaya melakukan pelestarian cagar budaya	Terdapatnya cagar budaya yang aksesnya sulit dan jauh, sehingga menjadi salah satu penghambat pelestarian cagar budaya

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	N/A	N/A	0,00	Rp. 72.088.600	Rp. 0	0,00	Terdapat Seksi Kepurbakalaan Cagar Budaya dan Permuseuman yang melakukan inventarisir dan verifikasi terduga cagar budaya.	Terdapat objek diduga cagar budaya yang diinventarisir untuk nantinya akan diverifikasi menjadi objek cagar budaya.	Sulitnya Seksi Kepurbakalaan Cagar Budaya dan Permuseuman menemukan objek terduga cagar budaya yang dapat memenuhi syarat kuat untuk dijadikan cagar budaya saat proses inventarisir dan verifikasi.	Objek terduga cagar budaya yang diinventarisir mengalami banyak kerusakan dan tidak layak untuk dijadikan cagar budaya.
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapannya Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 243.553.500	Rp. 0	0,00	Terdapat anggaran untuk membayar honor jupel dan petugas kebersihan yang membantu untuk merawat dan menjaga cagar budaya dalam upaya melestarikan cagar budaya.	Terdapat juru pemelihara (jupel) dan petugas kebersihan yang membantu merawat dan menjaga cagar budaya sebagai salah satu upaya melestarikan cagar budaya.	Terbatasnya anggaran terutama untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang menjadi bagian dari upaya melakukan pelestarian cagar budaya	Terdapatnya cagar budaya yang aksesnya sulit dan jauh, sehingga menjadi salah satu penghambat pelestarian cagar budaya
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Objek	N/A	N/A	0,00				Terdapat anggaran untuk membayar honor jupel dan petugas kebersihan yang membantu untuk merawat dan menjaga cagar budaya dalam upaya melestarikan cagar budaya.	Terdapat juru pemelihara (jupel) dan petugas kebersihan yang membantu merawat dan menjaga cagar budaya sebagai salah satu upaya melestarikan cagar budaya.	Terbatasnya anggaran terutama untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang menjadi bagian dari upaya melakukan pelestarian cagar budaya	Terdapatnya cagar budaya yang aksesnya sulit dan jauh, sehingga menjadi salah satu penghambat pelestarian cagar budaya

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	25	25	100,00	Rp. 243.553.500	Rp. 0	0,00	Terdapat anggaran untuk dibayarkan sebagai honor kepada jupel dan petugas kebersihan cagar budaya.	1.Terdapat pegawai Bagian Hukum sekda yang membantu dalam pembuatan SK. 2.Terdapat Juru Pemelihara dan Petugas Kebersihan yang menyerahkan laporan.	Pertemuan rutin di TW I tidak dilakukan, salah satu alasannya karena SK yang belum selesai untuk dibagikan di TW I ini.	1.Terdapat Juru Pemelihara dan Petugas Kebersihan yang terlambat atau belum menyerahkan laporannya di bulan ini. 2.Pembuatan SK yang tentunya harus menunggu waktu lama.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.022.200.500	Rp. 0	0,00	1.Memperluas penyebaran informasi kepemudaan di sosial media dengan cara mengiklankan kepada rekan media. 2.Memperluas penyebaran informasi pelatihan wirausaha muda di sosial media dengan cara mengiklankan kepada rekan media.	Banyaknya pemuda Kabupaten Banjar yang kompeten dan siap bertanding di tingkat provinsi dan nasional.	Belum optimalnya penyebaran informasi melalui media tentang kegiatan kepemudaan.	1.Kurangnya minat pemuda untuk beberapa kegiatan kepemudaan. 2.Pendeknya waktu persiapan peserta sebelum berkompetisi di provinsi. 3.Faktor geografis Kabupaten Banjar yang luas sangat menyulitkan untuk para pemuda tersebut disebabkan jarak tempuh pemuda yang berasal dari daerah-daerah di pelosok-pelosok Kabupaten Banjar sangat jauh untuk mengikuti pelatihan kepemudaan serta kompetisi- kompetisi kepemudaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.530.045.500	Rp. 0		1.Memperluas penyebaran informasi kepemudaan di sosial media dengan cara mengiklankan kepada rekan media.	Banyaknya pemuda Kabupaten Banjar yang kompeten dan siap bertanding di tingkat provinsi dan nasional.	Belum optimalnya penyebaran informasi melalui media tentang kegiatan kepemudaan.	1.Kurangnya minat pemuda untuk beberapa kegiatan kepemudaan. 2.Pendeknya waktu persiapan peserta sebelum berkompetisi di provinsi. 3.Faktor geografis Kabupaten Banjar yang luas sangat menyulitkan untuk para pemuda tersebut disebabkan jarak tempuh pemuda yang berasal dari daerah-daerah di pelosok-pelosok Kabupaten Banjar sangat jauh untuk mengikuti pelatihan kepemudaan serta kompetisi-kompetisi kepemudaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali			0,00	Rp. 26.003.173.300	Rp. 0	0,00	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) dan Festival Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat Provinsi (FOPDA) serta PORPROV dan PEPARPROV tahun 2025 bisa mendapatkan banyak medali.	1.Berkurangny a anggaran pengiriman atlet karena efisiensi sehingga akan menurunnya jumlah medali. 2.Belum optimalnya pembinaan atlet untuk bersaing di tingkat Provinsi.	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet Kabupaten Banjar.
Meningkatnya Pemuda Dan Olahraga Yang Berprestasi	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Medali	N/A	1	100,00	Rp. 26.003.173.300	Rp. 0	0,00	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) dan Festival Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat Provinsi (FOPDA) serta PORPROV dan PEPARPROV tahun 2025 bisa mendapatkan banyak medali.	1.Berkurangny a anggaran pengiriman atlet karena efisiensi sehingga akan menurunnya jumlah medali. 2.Belum optimalnya pembinaan atlet untuk bersaing di tingkat Provinsi.	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet Kabupaten Banjar.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Jumlah Pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	Orang	5	7	140,00	Rp. 2.263.658.000	Rp. 0	0,00	Memperluas penyebaran informasi kepemudaan di sosial media dengan cara mengiklankan kepada rekan media.	Banyaknya pemuda Kabupaten Banjar yang kompeten dan siap bertanding di tingkat provinsi dan nasional.	Belum optimalnya penyebaran informasi melalui media tentang kegiatan kepemudaan.	1.Kurangnya minat pemuda untuk beberapa kegiatan kepemudaan. 2.Pendeknya waktu persiapan peserta sebelum berkompetisi di provinsi. 3.Faktor geografis Kabupaten Banjar yang luas sangat menyulitkan untuk para pemuda tersebut disebabkan jarak tempuh pemuda yang berasal dari daerah-daerah di pelosok-pelosok Kabupaten Banjar sangat jauh untuk mengikuti pelatihan kepemudaan serta kompetisi-kompetisi kepemudaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Persentase wirausaha Muda	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 288.588.000	Rp. 0	0,00	Memperluas penyebaran informasi pelatihan wirausaha muda di sosial media dengan cara mengiklankan kepada rekan media.	Banyaknya pemuda Kabupaten Banjar yang berminat untuk diberikan pelatihan menjadi wirausaha muda.	Padatnya kegiatan pelatihan-pelatihan bidang kepemudaan.	1.Banyaknya peminat pelatihan-pelatihan wirausaha muda yang usianya melebihi batas usia pemuda (16-30 tahun). 2.Faktor geografis Kabupaten Banjar yang luas sangat menyulitkan untuk para pemuda tersebut disebabkan jarak tempuh pemuda yang berasal dari daerah-daerah di pelosok-pelosok Kabupaten Banjar sangat jauh untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda..
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 26.003.173.300	Rp. 0	0,00	Tersedianya anggaran untuk Pembinaan olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi untuk latihan rutin maupun pemusatan latihan dalam menghadapi event tahunan seperti Kejuaraan Provinsi Daerah.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (POPDA) dan Festival Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat Provinsi (FOPDA) serta PORPROV	Berkurangnya anggaran pengiriman kontingen karena efesiensi sehingga akan menurunnya jumlah medali	kurangnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet Kabupaten Banjar

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
				N/A						dan PEPARPROV tahun 2025 bisa mendapatkan banyak medali.		
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Prasarana Olahraga Untuk Memfasilitasi Persiapan Atlet yang Akan Bertanding Tingkat Regional	Persen (%)	N/A		0,00	Rp. 12.913.235.300	Rp. 0	0,00	Tersedianya Anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Gelanggang Olahraga Indoor dan Renovasi Lapangan Sepak Bola Mini Barakat serta Pemeliharaan Gedung Dojo, Lapangan Sepak Takraw, Lapangan Bola Voli.	Pemeliharaan Gedung Dojo, Lapangan Sepak Takraw, Lapangan Bola Voli dengan sistem Pengadaan Langsung.	masih kurangnya pemahaman terkait dengan proses pelaksanaan pekerjaan Renovasi Stadion Mini Barakat dan Pembangunan Indoor Volly.	Kurangnya komunikasi dengan Pihak Konsultan Perencana Renovasi Stadion Mini Barakat dan Pembangunan Indoor Volly.
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten / Kota yang Memadai	Unit	N/A		0,00	Rp. 12.913.235.300	Rp. 0	0,00	Tersedianya Anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Gelanggang Olahraga Indoor dan Renovasi Lapangan Sepak Bola Mini Barakat serta Pemeliharaan Gedung Dojo, Lapangan Sepak Takraw, Lapangan Bola Voli.	Pemeliharaan Gedung Dojo, Lapangan Sepak Takraw, Lapangan Bola Voli dengan sistem Pengadaan Langsung.	Spesifikasi untuk Pemeliharaan Lapangan kurang sesuai yaitu pengecatan dan pemotongan rumput sedangkan untuk pemeliharaan lapangan sangat banyak.	Pihak Penyedia untuk Perbaikan/rehab Lapangan Sepak Bola susah dihubungi sehingga komunikasi antara penyedia dan pejabat pengadaan tidak berjalan dengan baik serta kelengkapan administrasi yang diminta oleh pejabat pengadaan tidak dipenuhi.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Orang	100	155	155,00	Rp. 620.479.500	Rp. 0	0,00	anggaran tersedia untuk melaksanakan kejuaraan daerah tingkat pelajar sebagai seleksi atlet POPDA dan kejuaraan daerah memperingati hari olahraga nasional.	Terselenggaranya 4 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari cabang olahraga Taekwondo, Karate dan Gulat yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikuti dalam POPDA 2024	anggaran yang tersedia hanya untuk 4 kejuaraan, sedangkan di tingkat provinsi pada tahun ganjil terdapat 11 cabang olahraga yang dipertandingkan.	Sarana dan Prasarana yang tidak tersedia sehingga harus menyewa lapangan seperti Bulutangkis dan Pencak Silat serta lapangan sepak bola yang kurang memadai.
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta Pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	100	155	155,00	Rp. 620.479.500	Rp. 0	0,00	anggaran tersedia.	Terselenggaranya 4 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. Terdiri dari cabang olahraga Taekwondo, Karate dan Gulat yang bertujuan menyeleksi dan mempersiapkan calon atlet pelajar yang akan di ikuti dalam POPDA 2025	anggaran yang tersedia hanya untuk 4 kejuaraan, sedangkan di tingkat provinsi pada tahun ganjil terdapat 11 cabang olahraga yang dipertandingkan.	minimnya peserta kejuaraan pada cabang olahraga taekwondo

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina dan Dikembangkan Untuk Mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	N/A	N/A	0,00	Rp. 4.212.889.000	Rp. 0	0,00	tersedianya anggaran untuk pemusatan latihan bagi atlet POPDA.	terlaksananya seleksi atlet yang akan mewakili Daerah. Atlet-atlet yang dipilih berpotensi memperoleh medali tingkat provinsi.	Anggaran pengiriman kontingen terkena dampak efisien sehingga mengurangi jumlah atlet yang dapat bertanding di POPDA	Sarana dan prasarana latihan atlet masih kurang, sehingga harus latihan di Kota Banjarbaru. Terdapat cabor olahraga yang tidak memiliki perwakilan atlet untuk bertanding
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	Orang	N/A	N/A	0,00	Rp. 4.212.889.000	Rp. 0	0,00	Anggaran tersedia.	Rangkaian hasil dari Kejuaraan Daerah dalam menyeleksi calon atlet POPDA Tahun 2025 telah terpenuhi dan telah memasuki tahap persiapan dan pembinaan yang selanjutnya menjadi Kontingen POPDA Kabupaten Banjar tahun 2024	Anggaran pembinaan hanya untuk 15 hari.	1.Tahap Pembinaan / Pemusatan Latihan atlet belum optimal dikarenakan waktu / hari belum maksimal dengan kata lain Pembinaan / Pemusatan latihan ± 30 Hari. 2. Adanya pembaharuan pada aplikasi keuangan, sehingga proses pencairan dan penginputan realisasi keuangan yang terlambat sehingga realisasi keuangan yang tercatat masih relatif kecil dan bahkan 0.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 7.299.247.500	Rp. 0	0,00	tersedianya anggaran dana hibah 4 organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi organisasi olahraga di Kabupaten Banjar.	Terstandarisasi organisasi keolahragaan pengurus hibah yang disetujui mendapatkan Dana Hibah berupa uang untuk memajukan olahraga di Kabupaten Banjar.	Masih belum maksimalnya pelaksanaan monitoring, baik dari awal usulan Hibah sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah	masih kurangnya pemahaman sebagian dari organisasi penerima hibah, terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Organisasi	N/A	N/A	0,00	Rp. 7.299.247.500	Rp. 0	0,00	tersedianya anggaran dana hibah 4 organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi organisasi olahraga di Kabupaten Banjar.	Terstandarisasi organisasi keolahragaan pengurus hibah yang disetujui mendapatkan Dana Hibah berupa uang untuk memajukan olahraga di Kabupaten Banjar.	Beberapa Organisasi Keolahragaan masih belum bisa mencairkan dana hibah karena masih proses pengumpulan administrasi.	masih adanya organisasi keolahragaan yang belum mengusulkan hibah dikarenakan belum lengkapnya administrasi pendukung dalam kriteria penerima hibah.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat yang Dilaksanakan	Kegiatan	8	8	100,00	Rp. 957.322.000	Rp. 0	0,00	anggaran tersedia.	adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program GERMAS yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat dengan melakukan kegiatan olahraga.	Masih kurang tenaga lapangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut	sering terjadinya benturan waktu yang bersamaan dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan organisasi lain di lokasi kegiatan.
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat	Kegiatan	8	8	100,00	Rp. 957.322.000	Rp. 0	0,00	anggaran tersedia.	adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program GERMAS yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku	Selama Bulan Ramadhan kegiatan Senam libur.	1. Faktor alam dan hari besar nasional/keagamaan. 2. Kendala dalam penerapan GERMAS adalah kesibukan pelaku olahraga dan kurangnya kesadaran individu terkait GERMAS.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
										masyarakat yang kurang sehat dengan melakukan kegiatan olahraga.		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 2.552.246.000	Rp. 0	0,00	1.Anggaran Kas Tersedia. 2.Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan aset, sub bagian umpeg, serta sub bagian perencanaan terjalin dengan baik. 3.Koodinasi internal bidang kepemudaan terjalin baik.	1.Ada permintaan pelatihan dari Desa untuk kegiatan Saran Dinda. 2.Peserta kegiatan sudah dijang.	1.Sebagian anggaran kas untuk beberapa kegiatan baru tersedia bulan april (triwulan ke-II). 2.Sarana masih kurang, belum maksimal	Tempat kegiatan ada yang kurang memadai.
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kualitasnya Melalui Pelatihan	orang	100	130	130,00	Rp. 1.022.200.500	Rp. 0	0,00	1.Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan aset, sub bagian umpeg, serta sub bagian perencanaan terjalin dengan baik. 2.Koodinasi internal bidang kepemudaan terjalin baik.	peserta kegiatan sudah dijang	1.Sebagian anggaran kas untuk beberapa kegiatan baru tersedia bulan april (triwulan ke-II). 2.Sarana masih kurang, belum maksimal bisa di gunakan.	Tempat kegiatan kurang maksimal.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Di Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	0,00	Rp. 63.700.000	Rp. 0	0,00	1.Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan. 2.anggaran sudah tersedia.	Adanya kerjasama yang baik dengan pihak organisasi kepemudaan Kabupaten Banjar.	Anggaran kasnya belum tersedia pada triwulan pertama.	perbaikan di bagian hukum.
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	N/A	0,00	Rp. 288.588.000	Rp. 0	0,00	1. Perencanaan Kegiatan yang Matang. Kegiatan telah dirancang dengan struktur acara yang sistematis, termasuk susunan MC, narasumber, materi, dan sesi tanya jawab. 2. Tim pelaksana mampu mengelola acara dengan baik di lokasi umum seperti atrium mall, termasuk dalam mengatur logistik, rundown, dan komunikasi dengan pihak eksternal.	1. Banyak peserta hadir dan aktif bertanya, menunjukkan adanya ketertarikan nyata terhadap dunia usaha dan kebutuhan akan pelatihan semacam ini. 2. Narasumber berasal dari kalangan praktisi yaitu konsultan media dan DPMTSP yang memberikan insight nyata dan langsung dari lapangan terkait digital marketing dan	1. Karena pelatihan dilakukan di atrium mall, waktu penggunaan panggung atau area kegiatan dibatasi, sehingga interaksi peserta dan narasumber tidak bisa maksimal. 2. Beberapa bagian kegiatan tidak terdokumentasi secara utuh (foto/video), sehingga menyulitkan penyusunan laporan atau	1. Suasana mall yang terbuka menyebabkan gangguan suara dari pengunjung umum atau tenant lain, yang kadang mengurangi kenyamanan peserta saat menyimak materi. 2. Beberapa peserta datang terlambat atau pulang sebelum acara selesai, sehingga tidak mengikuti semua sesi penting secara utuh.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
										legalitas usaha.	publikasi hasil kegiatan.	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Kepemudaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	3		100,00	Rp. 372.166.500	Rp. 0	0,00	1. Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki komitmen untuk mendukung masyarakat Banjat yang agamis. 2. tersedianya narasumber ahli yang bersedia berbagi ilmu dan keterampilan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.	1. Banyak wilayah yang masih belum mendapatkan pelatihan pemulasaran bagi pemuda. 2. Pemerintah kecamatan/de sa yang dituju menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk memfasilitasi pelatihan di wilayahnya.	1. Keterbatasan armada transportasi. Kendaraan yang terbatas menyulitkan mobilisasi perlengkapan pelatihan, narasumber, serta konsumsi ke lokasi-lokasi yang jauh. 2. Banyaknya jadwal kegiatan di Bidang Kepemudaan dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah panitia karena harus berbagi tugas di beberapa kegiatan.	1. Variasi kualitas dan ketersediaan fasilitas. Tiap kecamatan/desa memiliki sarana dan prasarana yang berbeda. Beberapa lokasi mungkin tidak memiliki aula tertutup, sistem suara, atau ruang praktik yang memadai. 2. Fluktuasi jumlah peserta. Walaupun koordinasi sudah dilakukan kepada instansi terkait, tidak menutup kemungkinan datangnya peserta melebihi kuota.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Yang Dikirim Ke Tingkat Provinsi, Nasional Dan Internasional	Orang	4	4	100,00	Rp. 297.746.000	Rp. 0	0,00	1. Koordinasi internal yang efisien sehingga tim pelaksana tetap dapat bergerak cepat untuk menindaklanjuti surat edaran dan menyesuaikan alur kegiatan dengan tenggat yang sempit. 2. Adanya sumber daya manusia yang siap memberikan bimbingan kepada peserta terkait persiapan ke tingkat Provinsi	1. Tersedianya jalur koordinasi langsung ke tingkat provinsi sebagai penguat keberlanjutan proses seleksi, termasuk dalam pengumpulan berkas. 2. Pemanfaatan media daring/WhatsApp untuk komunikasi cepat kepada peserta dan lintas instansi, memudahkan distribusi informasi seleksi.	1. Waktu penjangkaran yang hanya tersedia 10 hari sejak surat edaran diterima hingga pengiriman berkas ke provinsi, yang berdampak pada semua proses teknis. 2. Hanya 4 dari 8 peserta yang hadir dalam sesi pembinaan, membuat proses perbaikan materi tidak merata dan tidak semua peserta mendapat pendampingan yang sama.	1. Karena rentang waktu pendaftaran yang pendek mengakibatkan tidak semua wilayah/kecamatan dapat disosialisasikan secara optimal, yang berpotensi menghambat perluasan partisipasi. 2. Beberapa peserta belum memahami struktur proposal yang sesuai dengan kriteria provinsi.
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.530.045.500	Rp. 0	0,00	1. Anggaran Kas sudah tersedia. 2. dokumen kelengkapan sudah disiapkan.	Kooridinasi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berjalan baik.	1.masih dilakukannya Perbaikan RAB dari organisasi kepemudaan penerima hibah. 2.masih dilakukannya Perbaikan NPHD.	masih ada perbaikan di bagian hukum setda Kabupaten Banjar terkait RAD Kepemudaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	N/A	N/A	0,00	Rp. 1.484.935.000	Rp. 0		1.Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan. 2.Anggaran Kas sudah tersedia. 3.dokumen kelengkapan sudah disiapkan.	Adanya kerjasama yang baik dengan pihak organisasi kepramukaan Kabupaten Banjar.	Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan baru bagi pegawai bidang kepemudaan sehingga perlu dipelajari lagi kerangka acuan kerjanya.	1.Perbaikan RAB dari organisasi penerima hibah. 2.Perbaikan NPHD.
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi	Organisasi	N/A	N/A	0,00	Rp. 45.110.500	Rp. 0	0,00	Adanya pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi kegiatan.	Adanya kerjasama yang baik dengan pihak organisasi kepemudaan Kabupaten Banjar.	Anggaran kasnya belum tersedia pada triwulan pertama.	Adanya perubahan administrasi di bagian hukum.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai / Skor	N/A	N/A	0,00	Rp. 11.516.714.700	Rp. 1.767.991.066	15,35	1.Adanya SDM yang memadai dan kompeten. 2.Adanya koordinasi dan kerjasama internal dinas untuk mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan pada penilaian SAKIP	Adanya kordinasi yang baik dengan mitra kerja bidang ekonomi dan SDA Bappedalitba ng, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Banjar	1.Banyaknya dokumen- dokumen/ laporan- laporan yang diperlukan untuk penilaian SAKIP yang harus diperbarui oleh sub bagian perencanaan yang memerlukan waktu yang lama disebabkan banyaknya kegiatan- kegiatan yang harus diikuti oleh sub bagian perencanaan serta koordinasi dengan bidang-bidang juga terkadang terlambat karena beberapa bidang juga melaksanakan kegiatan. 2.Adanya perubahan pada pendelegasian tugas staf, sehingga pengumpulan data/dokumen agak terlambat.	Adanya perubahan format beberapa dokumen / laporan yang diminta oleh Bappedalitbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Banjar sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai IKKI Perangkat Daerah	Indeks	N/A	N/A	0,00	Rp. 11.516.714.700	Rp. 1.767.991.066	15,35	1.Adanya SDM yang memadai dan kompeten. 2.Adanya koordinasi dan kerjasama internal dinas untuk mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan pada penilaian IKKI	Adanya kordinasi yang baik dengan mitra kerja bidang ekonomi dan SDA Bappedalitba ng, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Banjar	1.Banyaknya dokumen- dokumen/ laporan- laporan yang diperlukan untuk penilaian IKKI yang harus diperbarui oleh sub bagian perencanaan yang memerlukan waktu yang lama disebabkan banyaknya kegiatan- kegiatan yang harus diikuti oleh sub bagian perencanaan serta koordinasi dengan bidang-bidang juga terkadang terlambat karena beberapa bidang juga melaksanakan kegiatan. 2.Adanya perubahan pada pendelegasian tugas staf, sehingga pengumpulan data/dokumen agak terlambat.	Adanya perubahan format beberapa dokumen / laporan yang diminta oleh Bappedalitbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Banjar sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan , Anggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen (%)	25	33,28	133,12	Rp. 60.123.700	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	1.Adanya perubahan staf di subbag perencanaan, sehingga terjadi tumpang tindih limpahan kerjaan yang membuat pekerjaan menjadi terlambat. 2.Data dukung yang kurang lengkap dari bidang terkait. 3.Data dukung yang berbeda- beda, inkonsisten. 4.Adanya data yang harus d disesuaikan terlebih dulu	1. Aplikasi SIPD yang sulit diakses, lamanya proses penandatanganan dokumen perencanaan (DPA), koneksi internet yang tidak stabil. 2.Tindaklanjut dari permintaan data dukung ke pihak /organisasi / instansi terkait lainnya yang direspon kurang cepat. 3. Koneksi internet Kominfo yang tidak stabil sehingga menghambat proses pengerjaan penginputan.
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggara n	Dokumen	3	3	100,00	Rp. 20.000.000	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	Adanya perubahan staf di subbag perencanaan, sehingga terjadi tumpang tindih limpahan kerjaan yang membuat pekerjaan menjadi terlambat.	1.Aplikasi SIPD yang sulit diakses. 2.Lamanya proses penandatanganan dokumen perencanaan (DPA). 3.koneksi internet yang tidak stabil.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerha	Laporan	3	3	100,00	Rp. 16.988.100	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	Adanya data yang harus d disesuaikan terlebih dulu.	Koneksi internet Kominfo yang tidak stabil, sehingga menghambat proses pengerjaan penginputan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas	Laporan	4	4	100,00	Rp. 6.691.600	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	Adanya data yang harus disesuaikan terlebih dulu.	Koneksi internet Kominfo yang tidak stabil, sehingga menghambat proses pengerjaan penginputan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 8.222.000	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	Adanya data yang harus disesuaikan terlebih dulu.	Kegiatan belum diminta dilaksanakan oleh Bappedalitbang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 8.222.000	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang terkait.	Adanya koordinasi yang baik dengan mitra/instansi lain.	Adanya data yang harus disesuaikan terlebih dulu.	Kegiatan belum diminta dilaksanakan oleh Bappedalitbang
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen (%)	25	33,12	132,48	Rp. 6.839.664.400	Rp. 1.425.341.066	20,84	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang serta sub-sub bagian lain Disbudporapar dan mitra-mitra sub bagian keuangan	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD.	1.Koneksi ke Aplikasi SIPD tidak lancar, jaringan internet yang kurang bagus. 2. Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen.	1.Peraturan Bupati mengenai Gaji dan Tunjangan. 2.Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan. 3.Aplikasi SIPD yang sering error. 4.Rekapitulasi yang di dapat tidak lengkap.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	44	40	90,91	Rp. 6.524.100.000	Rp. 1.425.341.066	21,85	Adanya Pegawai Keuangan yang Kompeten.	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD.	1.Koneksi ke Aplikasi SIPD tidak lancar. 2.Jaringan internet yang kurang bagus.	Peraturan Bupati mengenai Gaji dan Tunjangan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	Dokumen	3	3	100,00	Rp. 297.992.000	Rp. 0	0,00	Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang serta sub-sub bagian lain Disbudporapar dan mitra-mitra sub bagian keuangan	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD.	Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen.	1.Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan. 2.Jaringan internet yang tidak lancar. 3. Aplikasi SIPD yang sering error
	Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	3	3	100,00				Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang serta sub-sub bagian lain Disbudporapar dan mitra-mitra sub bagian keuangan	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD.	Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen.	1.Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan. 2.Jaringan internet yang tidak lancar. 3. Aplikasi SIPD yang sering error
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD (n-1) (audited)	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 17.572.400	Rp. 0	0,00	1.Jaringan internet mendukung. 2.Adanya pegawai keuangan yang kompeten	1.Koordinasi akhir dari Bidang Akuntansi BPKPAD. 2.Jaringan internet mendukung.	Jaringan internet yang tidak lancar.	1.Rekapitulasi yang di dapat tidak lengkap. 2.Adanya pembaharuan aplikasi keuangan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
	Jumlah dokumen/laporan realisasi keuangan triwulanan / semester / tahunan APBD	Laporan	1	1	100,00				Adanya koordinasi yang baik dengan bidang-bidang serta sub-sub bagian lain Disbudporapar dan mitra-mitra sub bagian keuangan	Adanya koordinasi yang baik dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan BPKPAD.	Data-data pendukung yang diminta masih belum lengkap, kesalahan dokumen.	1.Adanya sistem/aplikasi baru, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan penginputan dan pemrosesan pencairan. 2.Jaringan internet yang tidak lancar. 3. Aplikasi SIPD yang sering error
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Persen (%)	N/A	N/A	0,00	Rp. 100.000.000	Rp. 0	0,00	1.Tersedianya anggaran untuk bimtek. 2.Adanya pegawai yang bersemangat untuk mengikuti bimtek dalam upaya mengembangkan kompetensinya. 3.Kepala Dinas mendukung penuh Pelatihan dan.	Banyaknya penyedia jasa bimbingan teknis yang legal secara hukum dan berkompeten.	Sulitnya para ASN menyesuaikan waktu untuk mengikuti bimtek karena berbenturan dengan jadwal-jadwal kegiatan bidang atau sub bagian masing-masing dimana ASN tersebut bekerja.	Tidak semua ASN dapat mengikuti bimtek disebabkan tema atau topik yang diberikan oleh penyedia bimtek sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN tersebut.
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan rencana diklat	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 100.000.000	Rp. 0	0,00	1.Tersedianya anggaran untuk bimtek. 2.Adanya pegawai yang bersemangat untuk mengikuti bimtek dalam upaya mengembangkan kompetensinya. 3.Kepala Dinas mendukung penuh Pelatihan dan.	Banyaknya penyedia jasa bimbingan teknis yang legal secara hukum dan berkompeten.	Sulitnya para ASN menyesuaikan waktu untuk mengikuti bimtek karena berbenturan dengan jadwal-jadwal kegiatan bidang atau sub bagian masing-masing dimana ASN tersebut bekerja.	Tidak semua ASN dapat mengikuti bimtek disebabkan tema atau topik yang diberikan oleh penyedia bimtek sesuai dengan urusan pekerjaan yang diampu oleh ASN-ASN tersebut.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Persen (%)	25	25	100,00	Rp. 1.101.212.600	Rp. 0	0,00	1.Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.Banyak alternatif penyedia.. 2.Adanya Kerja sama, referensi serta kaji tiru dengan instansi dan mitra. 3.Banyaknya jasa percetakan yang bisa menjadi referensi sebagai tempat pencetakan. 4.Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan.	1.Sulitnya penyesuaian antara peralatan yang diperlukan dengan penyedia peralatan. 2.Banyaknya keperluan logistik, tetapi anggaran belum cukup tersedia. 3.Penyediaan bahan logistik dan alat kebersihan kantor yang masih layak dan tidak layak digunakan.	1.Banyaknya kebutuhan rapat dan undangan dari instansi dan mitra. 2.Penggunaan NPD online yang masih belum berjalan secara maksimal.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan paket penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi	Laporan	3	3	100,00	Rp. 44.730.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi penyediaan peralatan kantor.	Banyak alternatif penyedia, Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor	Banyaknya keperluan peralatan untuk mempermudah pekerjaan	Sulitnya mencari penyedia peralatan yang sesuai dengan kebutuhan..

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	3	3	100,00	Rp. 70.253.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyak alternatif penyedia,	1. Banyaknya keperluan logistik, tetapi anggaran belum cukup tersedia. 2. Penyesuaian bahan logistik dan alat kebersihan kantor yang masih layak dan tidak layak digunakan.	Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan.
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Paket	3	3	100,00	Rp. 20.249.600	Rp. 0	0,00	.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyaknya jasa percetakan yang bisa menjadi referensi sebagai tempat pencetakan	Banyaknya keperluan barang cetakan, tetapi anggaran belum cukup tersedia.	Pencarian jasa percetakan yang sesuai dengan kebutuhan.
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Laporan	3	3	100,00	Rp. 965.980.000	Rp. 0	0,00	Banyaknya minat pegawai yang ingin berkonsultasi dengan SKPD/Lembaga lain.	Kerja sama, referensi serta kaji tiru dengan instansi dan mitra	Anggaran terbatas bahkan diefisiensi lagi	1. Banyaknya kebutuhan rapat dan undangan dari instansi dan mitra. 2. Penggunaan NPD online yang masih belum berjalan secara maksimal.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen (%)	25	16,32	65,28	Rp. 1.024.948.000	Rp. 0	0,00	1.Sudah adanya perencanaan dan detail mengenai pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Banyaknya penyedia peralatan dan mesin lainnya yang bisa menjadi pilihan	Menunggu Pergeseran anggaran	Sulitnya mencari penyedia kendaraan dan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Unit Kendaraan Dinas jabatan, operasional atau jabatan	Laporan	N/A	N/A	0,00	Rp. 770.430.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi.	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan.	Menunggu pergeseran anggaran untuk melakukan pencarian penyedia kendaraan dan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan..	Sulitnya mencari penyedia kendaraan dan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebel, peralatan dan mesin kantor	Unit	16	16	100,00	Rp. 254.518.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya penyedia peralatan dan mesin lainnya yang bisa menjadi pilihan	Menunggu pergeseran anggaran untuk melakukan pencarian penyedia peralatan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan..	Sulitnya mencari penyedia peralatan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	Persen (%)	25	25	100,00	Rp. 1.728.866.500	Rp. 342.650.000	19,82	1.Perlu adanya listrik, air, dan telepon untuk kelancaran kinerja. 2.Perlu adanya tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan dalam	Pelayanan penyedia memuaskan	Pemakaian sumber daya yang berlebihan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan.	Terkadang terjadinya kenaikan harga Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari pihak penyedia / pemerintah.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
				3					SKPD Banyaknya alternatif penyedia ATK.			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa surat menyurat	Paket	3		100,00	Rp. 8.000.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi mengenai penyediaan jasa surat menyurat.	Mudahnya mencari penyedia jasa surat menyurat.	Banyaknya keperluan penggunaan materai untuk berbagai kelengkapan tetapi anggaran belum cukup tersedia.	Terkadang terjadinya kenaikan harga Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kali	3		100,00	Rp. 408.836.500	Rp. 0	0,00	Perlu adanya listrik, air, dan telepon untuk kelancaran kinerja.	Pelayanan penyedia memuaskan.	Pemakaian sumber daya yang berlebihan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan.	Terkadang terjadinya kenaikan harga Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari pihak penyedia / pemerintah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3	3	100,00	Rp. 1.312.030.000	Rp. 342.650.000	26,12	1.Pembayaran gaji sesuai dengan SK penempatan Penggunaan ATK yang berlebihan. 2.Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi.	Perlu adanya tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan dalam SKPD.	Adanya pegawai yang terkena pemutusan hak kerja atau yang mengundurkan diri	Anggaran daerah / negara terbatas untuk pengadaan pegawai non ASN.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Persen (%)	25	78,43	313,72	Rp. 661.899.500	Rp. 0	0,00	1.Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas SDM pegawai untuk memelihara Barang Milik Daerah. 2.Adanya SDM Pegawai yang berkompeten dalam memelihara Barang Milik Daerah.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan .	1.Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tugas Pegawai untuk memelihara barang Milik Daerah. 2.Kerusakan - kerusakan pada beberapa bagian bangunan karena termakan usia atau hal - hal lainnya; 3.Kurangnya kesadaran pemeliharaan;	1.Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dengan biaya pemeliharaan yang sesuai anggaran; 2.Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional , tetapi anggaran belum cukup tersedia; 3.Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tetapi anggaran belum cukup tersedia. 4.Terdapat gangguan pada sistem NPD online sehingga pencairan sedikit terhambat.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan, operasional atau jabatan	Unit	1	1	100,00	Rp. 42.750.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi.	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tetapi anggaran belum cukup tersedia.	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai dan kurangnya kesadaran pemeliharaan.

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Sampai Triwulan Ke-I											
	Kinerja					Anggaran			Faktor Pendorong Capaian		Faktor Penghambat Capaian	
	Indikator	Satuan	Target Kinerja Triwulan Ke- I	Realisasi Kinerja Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan Ke-I	Capaian (%)	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	22	22	100,00	Rp. 360.330.000	Rp. 0	0,00	Adanya SDM Pegawai yang kompeten dalam melakukan administrasi.	Tersedianya banyak jasa pemeliharaan	Banyaknya keperluan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai dan kurangnya kesadaran pemeliharaan.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit mebel, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Unit	62	9	14,52	Rp. 53.840.000	Rp. 0	0,00	Perlunya peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan	Kurangnya kesadaran pemeliharaan	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	1	100,00	Rp. 204.979.500	Rp. 0	0,00	Perlunya kenyamanan dan perbaikan gedung/ banguna kantor dan bangunan lainnya	Perbaikan gedung / bangunan kantor dan bangunan lainnya	Kerusakan - kerusakan pada beberapa bagian bangunan karena termakan usia atau hal - hal lainnya	Sulitnya mencari jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang sesuai

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disbudporapar dan Pencapaian Renstra Disbudporapar s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Nilai	80	Rp 51.858.656.597	83,01	Rp 9.031.938.998	78	Rp. 10.981.556.600	N/A	Rp 1.767.991.066			0	Rp. 1.767.991.066	0	16,10	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	Rp 188.397.750	100	Rp 32.003.500	100	Rp. 49.929.900	32,57	Rp -			32,57	Rp. 0	32,57	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	Rp 65.999.000	6	Rp 13.984.200	7	Rp. 18.774.000	3	Rp -			3	Rp. 0	42,86	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	15	Rp 84.940.500	3	Rp 11.603.600	3	Rp. 14.268.100	3	Rp -			3	Rp. 0	100,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas	Laporan	100	Rp 33.458.250	19	Rp 6.415.700	20	Rp. 6.691.000	4	Rp -			4	Rp. 0	20,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Laporan	2	Rp 2.000.000	N/A	Rp -	1	Rp. 4.803.800	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	Laporan	N/A	Rp 2.000.000	N/A	Rp -	1	Rp. 5.393.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	Rp 36.458.784.030		Rp 5.797.067.781	100	Rp. 6.831.581.200	33,28	Rp 1.425.341.066			33,28	Rp. 1.425.341.066	33,28	20,86	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang /Bulan	44	Rp 34.606.709.059	40	Rp 5.639.961.881	50	Rp. 6.524.100.000	40	Rp 1.425.341.066			40	Rp. 1.425.341.066	80,00	21,85	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	Dokumen	N/A		N/A		12		N/A				0		0		Disbud porapar Kab.Banjara
	Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	N/A	Rp 300.687.954	N/A	Rp 148.640.000	12	Rp. 292.892.800	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD (n-1) (audited)	Laporan	5		1		1		N/A				0		0		Disbud porapar Kab.Banjara
	Jumlah dokumen/laporan realisasi keuangan triwulanan / semester / tahunan APBD	Laporan	N/A	Rp 40.377.017	N/A	Rp 8.465.900	2	Rp. 14.588.400	3	Rp -			3	Rp. 0	150,00	0,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Persen (%)	100	Rp 337.466.000	160	Rp 45.213.395	100	Rp. 80.000.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan rencana diklat	Laporan	N/A	Rp 337.466.000	N/A	Rp 45.213.395	5	Rp. 80.000.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Persen (%)	100	Rp 4.071.510.160	100	Rp 1.065.085.100	100	Rp. 621.409.000	25	Rp -			25	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan paket penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi	Paket	60	Rp 311.904.300	12	Rp 29.363.000	12	Rp. 44.730.000	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	Rp 851.508.860	12	Rp 66.999.300	12	Rp. 60.965.000	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	Rp 188.364.000	12	Rp 11.847.800	12	Rp. 17.400.000	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Laporan	60	Rp 2.719.733.000	12	Rp 956.875.000	12	Rp. 498.314.000	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen (%)	100	Rp 90.062.000	100	Rp 81.765.000	100	Rp. 1.023.338.000	16,32	Rp -			16,32	Rp. 0	16,32	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Unit Kendaraan Dinas jabatan, operasional atau jabatan	Laporan	N/A	Rp -	N/A	Rp -	1	Rp. 768.820.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebel, peralatan dan mesin kantor	Unit	67	Rp 90.062.000	6	Rp 81.765.000	49	Rp. 254.518.000	16	Rp -			16	Rp. 0	32,65	0,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	Persen (%)	100	Rp 6.986.230.642	100	Rp 1.401.867.493	100	Rp. 1.728.866.500	25	Rp 342.650.000			25	Rp. 342.650.000	25,00	19,82	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa surat menyurat	Paket	N/A	Rp 82.500.000	12	Rp 6.000.000	12	Rp. 8.000.000	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kali	N/A	Rp 1.696.043.142	12	Rp 171.343.419	12	Rp. 408.836.500	3	Rp -			3	Rp. 0	25,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	Rp 5.207.687.500	12	Rp 1.224.524.074	12	Rp. 1.312.030.000	3	Rp 342.650.000			3	Rp. 342.650.000	25,00	26,12	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Persen (%)	100	Rp 2.914.201.479	100	Rp 608.936.729	100	Rp. 646.432.000	78,63	Rp -			78,63	Rp. 0	78,63	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan, operasional atau jabatan	Unit	1	Rp 401.920.000	1	Rp 38.952.371	1	Rp. 42.750.000	1				1	Rp. 0	100,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	12	Rp 1.494.111.256	21	Rp 261.714.358	22	Rp. 360.330.000	22				22	Rp. 0	100,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit mebel, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Unit	63	Rp 444.403.000	61	Rp 29.970.000	62	Rp. 53.840.000	9				9	Rp. 0	14,52	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah unit Pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	Rp 573.767.223	1	Rp 278.300.000	1	Rp. 189.512.000	1				1	Rp. 0	100,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
	Presentase pemuda yang berdaya saing	Persen (%)	35,5	Rp 7.417.716.575	155,6	Rp 1.911.894.096	17,3	Rp. 2.298.958.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kualitasnya Melalui Pelatihan	Orang	2840	Rp 5.553.566.575	425	Rp 223.924.996	685	Rp. 839.532.000	130	Rp -			130	Rp. 0	18,98	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Di Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	Rp 152.322.794	1	Rp 43.048.498	1	Rp. 46.814.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	Rp 690.326.370	N/A	Rp 137.828.000	5	Rp. 236.923.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Jumlah Pelatihan Kepemudaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	14	Rp 1.000.000.000	N/A	Rp 43.048.498	4	Rp. 304.406.500	3	Rp -			3	Rp. 0	75,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
	Jumlah Pemuda Pelopor Yang Dikirim Ke Tingkat Provinsi, Nasional Dan Internasional	Orang	10	Rp 400.000.000	580	Rp 43.048.498	15	Rp. 251.388.000	4	Rp -			4	Rp. 0	26,67	0,00	
	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Persen (%)	100	Rp 1.864.150.000	100	Rp 1.687.969.100	14,2	Rp. 1.459.426.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	4	Rp 760.000.000	N/A	Rp 1.687.969.100	2	Rp. 1.434.157.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota	Organisasi	50	Rp 140.000.000	N/A	Rp 1.687.969.100	4	Rp. 25.269.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	Persen (%)	42,5	Rp 23.404.100.412	54,72	Rp 6.493.223.035	40	Rp. 24.734.363.200	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional	Persen (%)	80	Rp 1.015.000.000	33,33	Rp 833.164.973	16	Rp. 12.877.431.300	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten / Kota yang Memadai	Unit	62	Rp 1.015.000.000	6	Rp 833.164.973	64	Rp. 12.877.431.300	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Orang	1000	Rp 1.233.475.116	207	Rp 183.083.500	500	Rp. 578.363.300	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta Pada Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Orang	1000	Rp 1.233.475.116	653	Rp 183.083.500	500	Rp. 578.363.300	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina dan Dikembangkan Untuk Mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	520	Rp 2.436.420.900	119	Rp 722.238.362	650	Rp. 3.191.063.200	155	Rp -			155	Rp. 0	23,85	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	Orang	620	Rp 2.436.420.900	207	Rp 722.238.362	650	Rp. 3.191.063.200	155	Rp -			155	Rp. 0	23,85	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standar Nasional	Persen (%)	N/A	Rp 17.625.000.000	N/A	Rp 4.322.835.000	100	Rp. 7.280.040.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Organisasi	26	Rp 17.625.000.000	6	Rp 4.322.835.000	4	Rp. 7.280.040.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	Rp 1.094.204.396	N/A	Rp 431.901.200	42	Rp. 807.465.400	8	Rp -			8	Rp. 0	19,05	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	N/A	Rp 1.094.204.396	N/A	Rp 431.901.200	42	Rp. 807.465.400	8	Rp -			8	Rp. 0	19,05	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelaku Seni Budaya yang Aktif	Persen (%)	88,89	Rp 1.968.984.908	N/A	Rp 1.731.766.126	90	Rp. 1.855.840.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Budaya yang Dikelola Dalam Sistem Registrasi Nasional Warisan Budaya Tak Benda	Persen (%)	88,89	Rp 54.109.062	55,55	Rp 245.509.000	20	Rp. 349.729.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan	Objek	8	Rp 54.109.062	1	Rp 245.509.000	1	Rp. 349.729.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang Mengikuti Event Daerah	Kelompok	N/A	Rp 1.860.712.620	N/A	Rp 1.471.257.126	100	Rp. 1.332.211.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	71	Rp 1.643.296.016	8	Rp 1.286.516.126	1	Rp. 1.276.316.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga Pranata Tradisional yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	Rp 217.416.604	N/A	Rp 184.741.000	1	Rp. 55.895.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pelaku Budaya yang Memperoleh Manfaat Sarana Kebudayaan	Kelompok	8	Rp 54.163.226	1	Rp 15.000.000	1	Rp. 173.900.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Penerima Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / Difasilitasi	Organisasi	N/A	Rp 54.163.226	N/A	Rp 15.000.000	1	Rp. 173.900.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Budaya Banjar yang Disebarluaskan	Persen (%)	100	Rp 143.084.618	60	Rp 27.745.800	13,3	Rp. 24.419.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Orang	200	Rp 143.084.618	40	Rp 27.745.800	40	Rp. 24.419.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	200	Rp 117.042.939	40	Rp 22.610.000	40	Rp. 19.510.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	6	Rp 26.041.679	1	Rp 5.135.800	1	Rp. 4.909.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR	Persentase Warisan Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	72,5	Rp 1.498.223.607	69,44	Rp 263.538.500	100	Rp. 310.868.100	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	Persen (%)	N/A		N/A		100		N/A				0		0		Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dukung Yang Didapatkan Untuk Mendukung Penetapan Warisan Budaya Banjar	Dokumen	N/A	Rp 360.997.899	N/A	Rp 54.482.500	2	Rp. 70.885.600	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
	Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapannya Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	72,5		69,44		42,3		N/A				0		0		

Urusan / bidang pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungan Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	17	Rp 360.997.899	1	Rp 54.482.500	16	Rp. 70.885.600	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapannya Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	72,5	Rp 1.137.225.708	69,44	Rp 209.056.000	42,3	Rp. 239.982.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen (%)	N/A		N/A		100		N/A				0		0		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	25	Rp 1.137.225.708	25	Rp 209.056.000	26	Rp. 239.982.500	25	Rp -			25	Rp. 0	96,15	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (memiliki 3A)	Persen (%)	58	Rp 1.725.928.516	54	Rp 1.859.482.950	40,6	Rp. 2.673.359.100	10,6	Rp -			10,6	Rp. 0	26,11	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Amenitas	Persen (%)	62,5	Rp 268.019.859	56,8	Rp 284.026.000	52,63	Rp. 435.871.500	8,58	Rp -			8,58	Rp. 0	16,30	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Laporan	2	Rp 150.360.000	N/A	Rp -	1	Rp. 196.627.500	0	Rp -			0	Rp. 0	0,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Orang	1200	Rp 73.344.531	555	Rp 284.026.000	400	Rp. 239.244.000	40	Rp -			40	Rp. 0	10,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan amenitas	Persen (%)	57,89		56,8		52,63		8,58				8,58		16,30		Disbud porapar Kab.Banjara
	Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai	Persen (%)	42	Rp 1.341.659.779	39	Rp 1.516.696.450	40	Rp. 2.099.467.600	0	Rp -			0	Rp. 0	0,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjara

Urusan / bidang pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dokumen	6	Rp 30.000.000	N/A	Rp -	2	Rp. 170.750.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	114	Rp 621.290.940	9	Rp 1.235.323.400	9	Rp. 1.729.924.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat di Sekitar Objek Wisata yang Dibina	Orang	10	Rp 96.991.741	N/A	Rp 281.373.050	285	Rp. 198.793.600	70	Rp -			70	Rp. 0	24,56	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase Usaha Pariwisata yang Dibina dan Diawasi	Persen (%)	100	Rp 83.248.878	700	Rp 58.760.500	21,68	Rp. 138.020.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		31	Rp 51.894.078	7	Rp 58.760.500	15	Rp. 138.020.000	30	Rp -			30	Rp. 0	200,00	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	5.000.000	Rp2.687.152.990	5.763.538	Rp 2.967.896.823	5.867.206	Rp.3.870.226.000	4.737.725	Rp.619.975.000			4.737.725	Rp.619.975.000	80,75	16,02	Disbud porapar Kab.Banjar
	Persentase Destinasi Wisata yang Telah Dipasarkan	Persen (%)	10		12		10		4				4		40,00		Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Orang	643.000	Rp2.687.152.990	99.701	Rp 2.967.896.823	120.000	Rp.3.870.226.000	37.326	Rp.619.975.000			37.326	Rp.619.975.000	31,11	16,02	Disbud porapar Kab.Banjar
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A		7		6		N/A				0		0		
	Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata	Kegiatan	N/A		N/A		1		N/A				0		0		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan	Kegiatan	18	Rp.1.166.074.783	7	Rp 2.232.821.927	6	Rp. 2.283.955.000	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Promosi Melalui Media Sosial, Media Cetak, Lomba- Lomba Foto dan Video, Sosialisasi dan Fasilitasi Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Produktif	Promosi	15	Rp 496.383.566	5	Rp 735.074.896	5	Rp. 1.586.271.000	2	Rp 619.975.000			2	Rp. 619.975.000	40,00	39,08	Disbud porapar Kab.Banjar
		Persen	649	Rp 430.031.638	N/A	Rp 444.735.600	37	Rp. 490.762.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih atau Kompeten	Orang	N/A	Rp 430.031.638	N/A	Rp 444.735.600	10	Rp. 490.762.500	N/A	Rp -			0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Pada Periode 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Orang	N/A		N/A		4		N/A				0		0		
	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan	Jenis	N/A		N/A		3		N/A				0		0		
Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran yang Diikuti	Kali	N/A	Rp 37.983.292	N/A	Rp 360.986.500	2	Rp. 400.397.300	N/A				0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Workshop dan Sosialisasi Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan	Kegiatan	N/A	Rp 369.096.550	N/A	Rp 83.749.100	6	Rp. 90.365.200	N/A				0	Rp. 0	0	0,00	Disbud porapar Kab.Banjar

Sumber data : Laporan Rekapitulasi Renja Sampai dengan Triwulan I

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini. Pada perubahan Renja 2025 ini, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Disbudporapar tetap, yaitu sebanyak 9 program 25 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab 3 ini.

3.2. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Disbudporapar Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 52.959.575.750,- (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**. Dengan sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar, dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 7 (Tujuh) kegiatan, 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan semula Rp. 11.516.714.700,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.10.981.157.600, selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya sebesar Rp. 11.773.529.600,-.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan 2 (Dua) kegiatan, 6 (Enam) sub kegiatan semula Rp. 2.552.246.000,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.2.298.958.000,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya sebesar Rp. 2.307.060.000,-.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan 5 (Lima) kegiatan, 5 (Lima) sub kegiatan, semula Rp. 26.003.173.300,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.24.734.363.200,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya sebesar Rp. 26.662.693.250,-.

- d. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan 3 (tiga) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan semula Rp. 1.975.014.900,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.1.855.841.900,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya sebesar Rp. 2.629.427.900,-.
- e. Program Pembinaan Sejarah, dengan 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 28.572.600,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.24.419.000,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya tetap sebesar Rp. 24.419.000,-.
- f. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 315.642.100,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.310.868.100,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya tetap sebesar Rp. 310.868.100,-.
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan 3 (tiga) kegiatan, 6 (enam) sub kegiatan semula Rp. 2.937.061.500,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.2.673.359.100,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya tetap sebesar Rp. 2.673.359.100,-.
- h. Program Pemasaran Pariwisata, dengan 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 4.328.954.000,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.3.870.226.000,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya sebesar Rp. 6.087.456.300,-.
- i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan semula Rp. 657.845.800,- kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.490.762.500,- selanjutnya setelah perubahan pagu indikatifnya tetap sebesar Rp. 490.762.500,-.

3.3. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator, perubahan target dan perubahan anggaran di semua level secara lengkap di jelaskan dan bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	"A"	Rp. 11.516.714.700	Rp. 10.981.157.600			Rp. 11.773.529.600	Rp. 792.372.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Indeks	78,00	Indeks	78,00	Rp. 11.516.714.700	Rp. 10.981.157.600			Rp. 11.773.529.600	Rp. 792.372.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhihinya laporan perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 60.123.700	Rp. 49.930.500			Rp. 49.930.500	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, DPA, DPAP, RKA, RKAP)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	7	Dokumen	7	Rp. 20.000.000	Rp. 18.774.000			Rp. 18.774.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	3	Laporan	3	Rp. 16.988.100	Rp. 14.268.100			Rp. 14.268.100	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas	Laporan	20	Laporan	20	Rp. 6.691.600	Rp. 6.691.600			Rp. 6.691.600	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	Dokumen	1	Laporan	1	Rp. 8.222.000	Rp. 4.803.800			Rp. 4.803.800	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	Data	1	Laporan	1	Rp. 8.222.000	Rp. 5.393.000			Rp. 5.393.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 6.839.664.400	Rp. 6.831.581.200			Rp. 6.831.581.200	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	44	Orang/Bulan	50	Rp. 6.524.100.000	Rp. 6.524.100.000			Rp. 6.524.100.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	Dokumen	56	Dokumen	12	Rp. 297.992.000	Rp. 292.892.800			Rp. 292.892.800	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan			Dokumen	12							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD (n-1) (audited)	Laporan	1	Laporan	1	Rp. 17.572.400	Rp. 14.588.400			Rp. 14.588.400	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Jumlah dokumen/laporan realisasi keuangan triwulanan/semester/tahunan APBD			Laporan	2							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 100.000.000	Rp. 80.000.000			Rp. 80.000.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah laporan rencana diklat	Orang	5	Laporan	5	Rp. 100.000.000	Rp. 80.000.000			Rp. 80.000.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Persen (%)	100	Persen (%)	100							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Jumlah laporan paket penyediaan peralatan kantor yang terpenuhi	Paket	12	Laporan	12	Rp. 44.730.000	Rp. 44.730.000			Rp. 44.730.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	12	Paket	12	Rp. 70.253.000	Rp. 60.965.000			Rp. 60.965.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Paket	12	Paket	12	Rp. 20.249.600	Rp. 17.000.400			Rp. 17.000.400	Rp. 0	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Laporan	12	Laporan	12	Rp. 965.980.000	Rp. 498.314.000			Rp. 498.314.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 1.024.948.000	Rp. 1.023.338.000			Rp. 1.492.148.000	Rp. 468.810.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Unit Kendaraan Dinas jabatan, operasional atau jabatan	Unit	1	Laporan	1							Penambahan belanja kendaraan dinas angkutan untuk mendukung kegiatan operasional.
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	Jumlah unit pengadaan mebel, peralatan dan mesin kantor	Unit	49	Unit	49						Rp. 126.810.000	Pergeseran dari beberapa sub kegiatan untuk pembelian laptop dan personal computer
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 1.728.866.500	Rp. 1.728.866.500			Rp. 1.736.866.500	Rp. 8.000.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa surat menyurat	Laporan	12	Paket	12							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	Kali	12						Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Laporan	12	Rp. 1.312.030.000	Rp. 1.312.030.000	Rp. 8.000.000		Rp. 1.320.030.000	Rp. 8.000.000	ada kenaikan gaji PTT tingkat SMA menjadi S1 sebanyak 2 orang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas	Persen (%)	100	Persen (%)	100	Rp. 661.899.500	Rp. 646.432.000			Rp. 961.994.000	Rp. 315.562.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Peliharaan dan di Bayarkan Pajaknya	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan, operasional atau jabatan	Unit	1	Unit	1	Rp. 42.750.000	Rp. 42.750.000			Rp. 42.750.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	22	Unit	22							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di Pelihara	Jumlah unit mebel, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Unit	62	Unit	62						Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	Jumlah unit Pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	Unit	1	Rp. 204.979.500	Rp. 189.512.000	Rp. 315.562.000		Rp. 505.074.000	Rp. 315.562.000	1.untuk pembuatan sekat 2.perbaikan plavon dan wc (lengkapi RKA)
Berkembangnya Seni Budaya Banjar dan Seni Budaya Religius yang Mencerminkan Karakter dan Kepribadian Luhur Masyarakat Banjar.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen (%)	77,78	Persen (%)	100	Rp. 2.319.229.600	Rp. 2.191.129.000			Rp. 2.964.715.000	Rp. 773.586.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Santri Dalam Memajukan Olahraga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter dan Mandiri		Prestasi Pemuda dan Santri dalam Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen (%)	261	Persen (%)	5	Rp. 2.263.658.000	Rp. 2.062.035.000			Rp. 2.070.137.000	Rp. 8.102.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Peningkatan prestasi olahraga			Medali	261	Rp. 26.003.173.300	Rp. 24.734.363.200			Rp. 26.662.693.250	Rp. 1.928.330.050	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
		Persentase wirausaha Muda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen (%)	0,05	Persen (%)	2,06	Rp. 288.588.000	Rp. 236.923.000			Rp. 236.923.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	Meningkatnya Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Medali	261	Medali	261	Rp. 26.003.173.300	Rp. 24.734.363.200			Rp. 26.662.693.250	Rp. 1.928.330.050	
		Jumlah Pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	Jumlah Pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional	Orang	120	Orang	120	Rp. 2.263.658.000	Rp. 2.062.035.000			Rp. 2.070.137.000	Rp. 8.102.000	
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase Wirausaha Muda	Persen (%)	0,05	Persen (%)	2,06	Rp. 288.588.000	Rp. 236.923.000			Rp. 236.923.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda yang berdaya saing	Presentase pemuda yang berdaya saing	Persen (%)	35	Persen (%)	17,3	Rp. 2.552.246.000	Rp. 2.298.958.000			Rp. 2.307.060.000	Rp. 8.102.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang di latih dalam kegiatan kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kualitasnya Melalui Pelatihan	Orang	425	Orang	685	Rp. 1.022.200.500	Rp. 839.532.000			Rp. 838.204.000	-Rp1.328.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Dokumen	1	Rp. 63.700.000	Rp. 46.814.500	Rp. 11.300.000		Rp. 58.114.500	Rp. 11.300.000	1. Untuk honorarium narasumber eselon I = Rp.6.000.000 2.Untuk Paket Meeting = Rp. 5.000.000 3. Biaya Fotocopy = Rp.100.000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Yang Dilaksanakan	Orang	300	Kegiatan	5	Rp. 288.588.000	Rp. 236.923.000			Rp. 236.923.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pelatihan Kepemudaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	6	Kegiatan	4	Rp. 372.166.500	Rp. 304.406.500	-Rp11.306.000		Rp. 293.100.500	-Rp11.306.000	Bidang Kepemudaan Masih Kekurangan Sarana untuk Mendukung Kinerja, maka diusulkan pergeseran internal untuk belanja modal aset berupa Meja Kerja, Kursi Kerja, Personal Computer, dan Printer. Anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota untuk belanja modal aset berupa Meja Kerja, Kursi Kerja, Personal Computer, dan Printer
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Yang Dikirim Ke Tingkat Provinsi, Nasional Dan Internasional	Orang	5	Orang	15	Rp. 297.746.000	Rp. 251.388.000	-Rp1.322.000		Rp. 250.066.000	-Rp1.322.000	Bidang Kepemudaan Masih Kekurangan Sarana untuk Mendukung Kinerja, maka diusulkan pergeseran internal untuk belanja modal aset berupa Meja Kerja, Kursi Kerja, Personal Computer, dan Printer. Anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota untuk belanja modal aset berupa Meja Kerja, Kursi Kerja, Personal Computer, dan Printer
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Persen (%)	100	Persen (%)	14,2	Rp. 1.530.045.500	Rp. 1.459.426.000	Rp. 9.430.000	Rp. 0	Rp. 1.468.856.000	Rp. 9.430.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	2	Organisasi	2	Rp. 1.484.935.000	Rp. 1.434.157.000	Rp. 9.430.000		Rp. 1.443.587.000	Rp. 9.430.000	penambahan untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan, sumpah pemuda, serta sosialisasi manajemen
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	25	Organisasi	4	Rp. 45.110.500	Rp. 25.269.000			Rp. 25.269.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
		Persentase atlet yang berdaya saing	Persentase atlet yang berdaya saing	Persen (%)	40	Persen (%)	40	Rp. 26.003.173.300	Rp. 24.734.363.200			Rp. 26.662.693.250	Rp. 1.928.330.050	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana olahraga yang memfasilitasi persiapan atlet yang akan bertanding tingkat regional	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai	Persen (%)	16	Persen (%)	16	Rp. 12.913.235.300	Rp. 12.877.431.300			Rp. 13.790.531.050	Rp. 913.099.750	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten / Kota yang Memadai	Unit	62	Unit	64	Rp. 12.913.235.300	Rp. 12.877.431.300	Rp. 111.800.000	Rp. 801.299.750	Rp. 13.790.531.050	Rp. 913.099.750	Rp.11.800.000 digunakan untuk : 1.Honorarium kelompok kerja pemilihan barang/jasa (konstruksi) renovasi Stadion Mini Barakat. 2.Honorarium kelompok kerja pemilihan barang/jasa (konstruksi) pembangunan Gor Volly Indoor. 3.Honorarium kelompok kerja pemilihan barang/jasa (pengawasan) renovasi Stadion Mini Barakat. 4.Honorarium kelompok kerja pemilihan barang/jasa (pengawasan) pembangunan Gor Volly Indoor. 5.Honorarium petugas tim teknis/tim pendukung renovasi Stadion Mini Barakat. 6.Honorarium petugas tim teknis/tim pendukung pembangunan Gor Volly Indoor. Rp.801.299.750 digunakan untuk perencanaan, pekerjaan fisik, serta pengawasan lapangan basket dan lapangan tenis.
		Jumlah Atlet Pelajar yang Meraih Medali Pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	Orang	200	Orang	500	Rp. 620.479.500	Rp. 578.363.300			Rp. 519.703.300	-Rp58.660.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta Pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	400	Orang	500	Rp. 620.479.500	Rp. 578.363.300	-Rp50.397.000		Rp. 519.703.300	-Rp58.660.000	Pengurangan Rp.50.397.000 digunakan untuk pembelian PC 3 Unit.

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang dibina untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina dan Dikembangkan Untuk Mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	100	Orang	650	Rp. 4.212.889.000	Rp. 3.191.063.200			Rp. 4.401.263.200	Rp. 1.210.200.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	Orang	200	Orang	650	Rp. 4.212.889.000	Rp. 3.191.063.200	Rp. 289.700.000	Rp. 920.500.000	Rp. 4.401.263.200	Rp. 1.210.200.000	Rp. 289.700.000 untuk bonus atlet peparnas 2024 serta Solna Internasional. Rp. 950.500.000 untuk uang saku atlet PORPROV dan bonus atlet POPDA.
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional	Organisasi	5	Persen (%)	100							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Jumlah Organisasi Olahraga yang Memperoleh Dana Hibah	Dokumen	1	Organisasi	4	Rp. 7.299.247.500	Rp. 7.280.040.000			Rp. 7.280.040.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	44	Kegiatan	42							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	13	Kegiatan	42	Rp. 957.322.000	Rp. 807.465.400	-Rp216.298.500	Rp. 80.000.000	Rp. 671.155.700	-Rp136.309.700	Penambahan Rp.80.000.000 untuk mengadakan Festival Olahraga Masyarakat
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Jumlah Apresiasi Budaya Banjar	Persentase Budaya Banjar yang Terlestarikan	Event	9	Persen (%)	66,6	Rp. 2.319.229.600	Rp. 2.191.129.000			Rp. 2.964.715.000	Rp. 773.586.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	Persentase Pelaku Seni Budaya yang Aktif	Persen (%)	77,78	Persen (%)	90	Rp. 1.975.014.900	Rp. 1.855.841.900			Rp. 2.629.427.900	Rp. 773.586.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Budaya yang Dikelola Dalam Sistem Registrasi Nasional Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Budaya yang Dikelola Dalam Sistem Registrasi Nasional Warisan Budaya Tak Benda	Persen (%)	77,78	Persen (%)	20	Rp. 397.817.900	Rp. 349.729.900			Rp. 800.415.900	Rp. 450.686.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Dilakukan Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	Objek	1	Rp. 397.817.900	Rp. 349.729.900	Rp. 242.686.000	Rp. 208.000.000	Rp. 800.415.900	Rp. 450.686.000	1. Penambahan Kegiatan Untuk Festival Kuliner Rp. 227.686.000 2. Perbaikan Bedug Rp.15.000.000 3. Karnaval Budaya Rp.208.000.000

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P- RKPD 2025		
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian yang dibina	Jumlah Pelaku Seni yang Mengikuti Event Daerah	Persen (%)	83,04	Kelompok	100	Rp. 1.390.447.000	Rp. 1.332.212.000			Rp. 1.655.112.000	Rp. 322.900.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	9	Objek	1	Rp. 1.300.801.500	Rp. 1.276.316.500	Rp. 685.300.000	-Rp408.000.000	Rp. 1.553.616.500	Rp. 277.300.000	1.Penambahan Uang Hadiah Kegiatan Hari Santri Sesuai Arahan Pimpinan Rp. 177.300.000. 2. Penambahan Tenda Sarnavil dan Floring uk 5x5 Keg. Hari Santri 50 Buah Rp. 75.000.000. 3. Penambahan Tenda Semi roders utk Tamu Undangan Keg. Hari Santri Rp. 25.000.000
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga Pranata Tradisional yang Dilaksanakan	Laporan	1	Kegiatan	1	Rp. 89.645.500	Rp. 55.895.500	Rp. 45.600.000		Rp. 101.495.500	Rp. 45.600.000	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	Jumlah kelompok pelaku budaya yang memperoleh manfaat sarana kebudayaan	Kelompok	2	Kelompok	1	Rp. 186.750.000	Rp. 173.900.000			Rp. 173.900.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang DIsediakan/Difasili tasi	Jumlah Penerima Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / Difasilitasi	Unit	10	Organisasi	1	Rp. 186.750.000	Rp. 173.900.000			Rp. 173.900.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Persentase topik sejarah yang informasinya akan disebarluaskan	Persentase Sejarah Budaya Banjar yang Disebarluaskan	Persen (%)	80	Persen (%)	13,3	Rp. 28.572.600	Rp. 24.419.000			Rp. 24.419.000	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar	Orang	40	Orang	40	Rp. 28.572.600	Rp. 24.419.000			Rp. 24.419.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	40	Orang	40	Rp. 23.372.400	Rp. 19.510.000			Rp. 19.510.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	1	Dokumen	1	Rp. 5.200.200	Rp. 4.909.000			Rp. 4.909.000	Rp. 0	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya benda yang telah ditetapkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya	Persentase Warisan Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya	Persen (%)	70	Persen (%)	100	Rp. 315.642.100	Rp. 310.868.100			Rp. 310.868.100	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik			Persen (%)	100							

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya	Jumlah Data Dukung Yang Didapatkan Untuk Mendukung Penetapan Warisan Budaya Banjar	Persen (%)	70	Dokumen	2	Rp. 72.088.600	Rp. 70.885.600			Rp. 70.885.600	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapannya Sebagai Cagar Budaya			Persen (%)	42,3							
Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	1	Objek	16	Rp. 72.088.600	Rp. 70.885.600			Rp. 70.885.600	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda Yang Diproses SK Penetapannya Sebagai Cagar Budaya	Objek	37	Persen (%)	42,3	Rp. 243.553.500	Rp. 239.982.500			Rp. 239.982.500	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan			Persen (%)	100							
Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Objek	25	Objek	26	Rp. 243.553.500	Rp. 239.982.500			Rp. 239.982.500	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Meningkatnya Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Lama Tinggal	Orang	4.750.000	Hari	2	Rp. 2.937.061.500	Rp. 2.673.359.100			Rp. 2.673.359.100	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Pengeluaran Wisatawan			Rupiah (Rp.)	1.264.000							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Lama Tinggal	Orang	2	Hari	2	Rp. 2.937.061.500	Rp. 2.673.359.100			Rp. 2.673.359.100	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
		Lama Kunjungan Wisatawan												Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
		Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah (Rp.)	1.264.900	Rupiah (Rp.)	1.264.000							Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (memiliki 3A)	Persen (%)	56	Persen (%)	40,6	Rp. 2.937.061.500	Rp. 2.673.359.100			Rp. 2.673.359.100	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P- RKPD 2025		
														terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang di berkembang	Persentase Ketersediaan Amenitas	Persen (%)	62,5	Persen (%)	52,63	Rp. 468.212.500	Rp. 435.871.500			Rp. 435.871.500	Rp. 0	Perubahan Target serta indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	Laporan	1	Rp. 200.133.500	Rp. 196.627.500			Rp. 196.627.500	Rp. 0	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	400	Orang	400	Rp. 268.079.000	Rp. 239.244.000			Rp. 239.244.000	Rp. 0	
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Amenitas	Persentase Ketersediaan Amenitas	Persen (%)	52,63	Persen (%)	52,63	Rp. 2.314.308.000	Rp. 2.099.467.600			Rp. 2.099.467.600	Rp. 0	Perubahan Target serta indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
		Persentase Destinasi Wisata dengan Aksesibilitas yang Memadai	Persentase Destinasi Wisata dengan Aksesibilitas yang Memadai	Persen (%)	40	Persen (%)	40							
Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	Dokumen	2	Rp. 251.000.000	Rp. 170.750.000			Rp. 170.750.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	9	Unit	9	Rp. 1.747.188.000	Rp. 1.729.924.000			Rp. 1.729.924.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat di Sekitar Objek Wisata yang Dibina	Laporan	1	Orang	285	Rp. 316.120.000	Rp. 198.793.600			Rp. 198.793.600	Rp. 0	Perubahan Target serta indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Persentase Usaha Pariwisata yang Dibina dan Diawasi	Persen (%)	100	Persen (%)	21,68	Rp. 154.541.000	Rp. 138.020.000			Rp. 138.020.000	Rp. 0	Perubahan Target serta indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten / kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	15	Usaha	15	Rp. 154.541.000	Rp. 138.020.000			Rp. 138.020.000	Rp. 0	
Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang Telah Dipasarkan	Jumlah Kunjungan Wisata	Persen (%)	10	Orang	5.867.206	Rp. 4.328.954.000	Rp. 3.870.226.000			Rp. 6.087.456.300	Rp. 2.217.230.300	Perubahan Target serta indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Persentase Destinasi Wisata yang Telah Dipasarkan			Persen (%)	10							

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan		Target				Anggaran					Bertambah atau Berkurang (-)	Alasan Perubahan / Pergeseran (Perubahan) Target atau Pagu Anggaran
		Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan	Satuan Target Sebelum Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Satuan Target Setelah Perubahan	Target Setelah Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Penambahan Tahap I	Penambahan Tahap II	Pagu Indikatif P-RKPD 2025		
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Jumlah pengunjung media promosi pariwisata melalui web dan medsos	Orang	120.000	Orang	120.000	Rp. 4.328.954.000	Rp. 3.870.226.000			Rp. 6.087.456.300	Rp. 2.217.230.300	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri yang Dilaksanakan			Kegiatan	6							
			Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata			Kegiatan	1							
Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan	Kegiatan	6	Kegiatan	6	Rp. 2.589.058.000	Rp. 2.283.955.000		Rp. 1.034.207.000	Rp. 3.318.162.000	Rp. 1.034.207.000	Penambahan untuk: -perjalanan dinas untuk menambah wawasan dutawisata sbnyk 30 org -Uang pembinaan perwakilan dutawisata ketingkat provinsi. -sewa lighting untuk kegiatan banjar bershalawat
Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Sosial, Media Cetak, Lomba-Lomba Foto dan Video, Sosialisasi dan Fasilitas	Promosi	5	Promosi	5	Rp. 1.739.896.000	Rp. 1.586.271.000	Rp. 1.183.023.500		Rp. 2.769.294.300	Rp. 1.183.023.300	Untuk keperluan Venue RTH dan Venue Dekranasda
Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Produktif	Persen (%)	10,8	Persen (%)	37	Rp. 657.845.800	Rp. 490.762.500			Rp. 490.762.500	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya di sektor ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih atau Kompeten	Orang	60	Orang	10	Rp. 657.845.800	Rp. 490.762.500			Rp. 490.762.500	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru			Orang	4							
			Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan			Jenis	3							
Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran Yang Diikuti	Laporan	3	Kali	2	Rp. 560.459.800	Rp. 400.397.300			Rp. 400.397.300	Rp. 0	Perubahan Target serta Indikator dan juga satuan disebabkan adanya Renstra, Pohon Kinerja, serta Perjanjian Kinerja terbaru sehingga perlu disesuaikan
Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah workshop dan sosialisasi ekraf yang dilaksanakan	Orang	60	Kegiatan	6	Rp. 97.386.000	Rp. 90.365.200			Rp. 90.365.200	Rp. 0	

Sumber data : Hasil Inputan Data Perubahan Renja 2024 Disbudporapar pada Aplikasi SIPD

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030. Selain itu Perubahan Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi badan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2025 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 Disbudporapar Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama lingkup internal Disbudporapar Kabupaten Banjar.
2. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya pencapaian target kinerja setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar.
3. Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dan berpedoman kepada Renstra Perubahan.
4. Perubahan Renja Disbudporapar Tahun 2025 dijadikan dasar pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disbudporapar Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Agar masing-masing bidang dan sub bagian pada sekretariat dapat segera menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti atas apa yang telah ditetapkan pada Perubahan Renja 2025 ini.
2. Segera melakukan perubahan terhadap dokumen turunan Perubahan Renja 2024 dan hal lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen Perubahan Renja 2025 Disbudporapar Kabupaten Banjar.
3. Segera melaksanakan kegiatan untuk pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renja Perubahan.

Demikian dokumen Perubahan Renja Disbudporapar Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun, sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di sisa tahun pelaksanaan tahun 2025 ini. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh pihak di internal Disbudporapar agar turut bersama-sama melaksanakan Perubahan Renja 2025 ini dengan penuh tanggung jawab guna mendukung tercapainya target kinerja Disbudporapar Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja Disbudporapar Tahun 2025 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Martapura, 03 Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Banjar



H. Irwan Jaya, ST., MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19740508 200003 1 004



LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. BANJAR
TAHUN 2025

Urusan / Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				N/A	2,06%	298.588.000,00	288.588.000,00	236.923.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				2,07%	345.163.185	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				N/A	5,00%	2.293.658.000,00	2.263.658.000,00	2.070.137.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				5,1%	2.293.658.000	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Peningkatan prestasi olahraga				261 Medali	23 Medali	23.102.118.300,00	26.003.173.300,00	26.662.693.250,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				23 Medali	3.408.100.396	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya Pemuda Dan Olahraga Yang Berprestasi	Jumlah Medali dari Prestasi Olahraaga				261 Medali	261 Medali	23.102.118.300,00	26.003.173.300,00	26.662.693.250,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				30 Medali	3.408.100.396	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Jumlah Pemuda yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional				120 Orang	120 Orang	2.293.658.000,00	2.263.658.000,00	2.070.137.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				120 Orang	2.293.658.000	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Persentase Wirausaha Muda				0,05%	2,06%	298.588.000,00	288.588.000,00	236.923.000,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				2,07%	345.163.185	Disbudporapar Kabupaten Banjar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualiter dan berkarakter	Terlestarikannya Cagar Budaya				100%	100%	1.980.014.900,00	1.975.014.900,00	2.629.427.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				100,00%	770.331.402	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase Budaya Banjar yang Terlestarikan				66%	66%	1.980.014.900,00	1.975.014.900,00	2.629.427.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				73,30%	770.331.402	Disbudporapar Kabupaten Banjar
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum						
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Lama Tinggal				2 Hari	2 Hari	7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				2 Hari	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Pengeluaran Wisatawan				Rp.1.264.900	Rp.1.264.000	7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				Rp.1.264.500	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
Meningkatnya Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	Lama Tinggal				2 Hari	2 Hari	7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				2 Hari	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar
	Pengeluaran Wisatawan				Rp.1.264.900	Rp.1.264.000	7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	Kabupaten Banjar	Dana Alokasi Umum				Rp.1.264.500	866.501.981	Disbudporapar Kabupaten Banjar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							46.412.948.392,00	50.315.224.900,00	52.959.575.750,00	6.546.627.358,00							16.662.598.521,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							39.365.882.092,00	42.391.363.600,00	43.707.997.850,00	4.342.115.758,00							15.796.096.540,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							37.041.652.492,00	40.072.134.000,00	40.743.282.850,00	3.701.630.358,00							15.025.765.138,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Din Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata				78,00	78,00	11.347.288.192,00	11.516.714.700,00	11.773.529.600,00	-1.331.758.318,00							10.015.529.874,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : Persentase budaya banjar yang terlaksanakan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 201 Medali 2 Hari A Nilai	60.123.700,00	60.123.700,00	49.930.500,00	-10.193.200,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		45.679.700,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.774.000,00	-1.226.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter				
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	16.988.100,00	16.988.100,00	14.268.100,00	-2.720.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			16.988.100,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi/ Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	6.691.600,00	6.691.600,00	6.691.600,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			6.691.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil/ Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral/ Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.222.000,00	8.222.000,00	4.803.800,00	-3.418.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	8.222.000,00	8.222.000,00	5.393.000,00	-2.829.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56 Dokumen	56 Dokumen	297.992.000,00	297.992.000,00	292.892.800,00	-5.099.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			79.180.306,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.572.400,00	17.572.400,00	14.588.400,00	-2.984.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			8.256.717,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : Persentase budaya banjar yang terlestarikan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase administrasi kepegawalan yang berkualitas				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 261 Medali 2 Hari A Nilai	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : Persentase budaya banjar yang terlestarikan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 261 Medali 2 Hari A Nilai	1.311.212.600,00	1.101.212.600,00	621.009.400,00	-690.203.200,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		1.010.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.730.000,00	44.730.000,00	44.730.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.253.000,00	70.253.000,00	60.965.000,00	-9.288.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			190.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.249.600,00	20.249.600,00	17.000.400,00	-3.249.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.175.980.000,00	965.980.000,00	498.314.000,00	-677.666.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJ OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : persentase budaya banjar yang terlestarikan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase Laporan Pengadaan Barang Milk Daerah				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 201 Medali 2 Hari A Nilai	1.024.948.000,00	1.024.948.000,00	1.492.148.000,00	467.200.000,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	770.430.000,00	770.430.000,00	1.110.820.000,00	340.390.000,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	49 Unit	254.518.000,00	254.518.000,00	381.328.000,00	126.810.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : Persentase budaya banjar yang terlestarikan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase jasa penunjang pelayanan umum yang berkualitas				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 201 Medali 2 Hari A Nilai	1.728.866.500,00	1.728.866.500,00	1.736.866.500,00	8.000.000,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		1.655.201.956,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			16.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	408.836.500,00	408.836.500,00	408.836.500,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			339.001.956,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.312.030.000,00	1.312.030.000,00	1.320.030.000,00	8.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			1.299.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah 1 : Predikat SAKIP perangkat daerah IKU Perangkat Daerah 2 : Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 3 : Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 4 : Persentase budaya banjar yang terlestarikan IKU Perangkat Daerah 5 : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga IKU Perangkat Daerah 6 : Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 7 : Persentase Wirausaha Muda Persentase Sarana dan Prasarana Terpelihara Sesuai Kebutuhan Yang Berkualitas				100 %	100 % 120 Orang 1264900 Rupiah (Rp.) 2,06 % 201 Medali 2 Hari A Nilai	661.899.500,00	661.899.500,00	961.994.000,00	300.094.500,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		682.537.703,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			79.980.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	360.330.000,00	360.330.000,00	360.330.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			335.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	53.840.000,00	53.840.000,00	53.840.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	204.979.500,00	204.979.500,00	505.074.000,00	300.094.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			157.557.703,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda				35 %	2,06 %	2.592.246.000,00	2.552.246.000,00	2.307.060.000,00	-990.111.132,00							1.602.134.868,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1: Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Wirausaha Muda Jumlah pemuda yang ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan				425 Orang	120 Orang 2,06 % 425 Orang	1.047.200.500,00	1.022.200.500,00	838.204.000,00	-208.996.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Pelajar dan Pemuda Kab Banjar		1.152.134.868,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	68.700.000,00	63.700.000,00	58.114.500,00	-10.585.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			106.971.683,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																			
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				300 Orang	300 Orang	298.588.000,00	288.588.000,00	236.923.000,00	-61.665.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			345.163.185,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				6 Kegiatan	6 Kegiatan	377.166.500,00	372.166.500,00	293.100.500,00	-84.066.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	302.746.000,00	297.746.000,00	250.066.000,00	-52.680.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1: Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional IKU Perangkat Daerah 2: Persentase Wirausaha Muda Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Diberdayakan dan Dikembangkan				100 %	100 % 120 Orang 2,06 %	1.545.045.500,00	1.530.045.500,00	1.468.856.000,00	-76.189.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Organisasi Kepemudaan		450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	1.494.935.000,00	1.484.935.000,00	1.443.587.000,00	-51.348.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				25 Orang	25 Orang	50.110.500,00	45.110.500,00	25.269.000,00	-24.841.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berdaya saing				40 %	40 %	23.102.118.300,00	26.003.173.300,00	26.662.693.250,00	-19.694.017.904,00							3.408.100.396,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai				16 %	16 % 261 Medali	12.923.235.300,00	12.913.235.300,00	13.790.531.050,00	867.295.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Pelajar dan Pemuda Kab Banjar		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				62 Unit	64 Unit	12.923.235.300,00	12.913.235.300,00	13.790.531.050,00	867.295.750,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga Jumlah Atlet yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten				200 Orang	261 Medali 500 Orang	620.479.500,00	620.479.500,00	519.703.300,00	-100.776.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Masyarakat Kab. Banjar		253.100.396,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keluktsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				400 Orang	500 Orang	620.479.500,00	620.479.500,00	519.703.300,00	-100.776.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			253.100.396,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina dan Dikembangkan Untuk Mengikuti Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi / Nasional Jumlah Medali Dari Prestasi Olahraga				100 Orang	261 Medali 650 Orang	1.301.834.000,00	4.212.889.000,00	4.401.263.200,00	3.099.429.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Masyarakat Kab. Banjar		485.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	200 Orang	1.301.834.000,00	4.212.889.000,00	4.401.263.200,00	3.099.429.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			485.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	IKU Perangkat Daerah : Jumlah Medali dari Prestasi/ Olahraga Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional				5 Organisasi	100 % 261 Medali	7.299.247.500,00	7.299.247.500,00	7.280.040.000,00	-19.207.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Organisasi Keolahragaan		2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	7.299.247.500,00	7.299.247.500,00	7.280.040.000,00	-19.207.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	IKU Perangkat Daerah : Jumlah Medali dari Prestasi/ Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga Masyarakat yang Dilaksanakan				44 Kali	261 Medali 42 Kali	957.322.000,00	957.322.000,00	671.155.700,00	-286.166.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Masyarakat Kab. Banjar		270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				13 Laporan	13 Laporan	957.322.000,00	957.322.000,00	671.155.700,00	-286.166.300,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.324.229.600,00	2.319.229.600,00	2.964.715.000,00	640.485.400,00							770.331.402,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni yang aktif				77,78 %	90 Persen	1.080.014.900,00	1.975.014.900,00	2.629.427.900,00	-1.554.738.558,00							425.276.342,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlestarikan Persentase budaya yang dikelola dalam sistem regnas WBTB				77,78 %	100 Persen 77,78 %	397.817.900,00	397.817.900,00	800.415.900,00	402.598.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		11.686.887,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	397.817.900,00	397.817.900,00	800.415.900,00	402.598.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			11.686.887,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlestarikan Jumlah pelaku seni yang mengikuti event daerah				83,04 %	100 Kelompok 100 Persen	1.390.447.000,00	1.390.447.000,00	1.655.112.000,00	264.665.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		401.890.869,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Peleindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	1.300.801.500,00	1.300.801.500,00	1.553.616.500,00	252.815.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			354.931.577,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	89.645.500,00	89.645.500,00	101.495.500,00	11.850.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			46.959.292,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlестarikan Persentase budaya yang dikelola dalam sistem regnias WBTB				2 Kelompok	100 Persen 77,78 Persen	191.750.000,00	186.750.000,00	173.900.000,00	-17.850.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		11.698.586,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				10 Unit	10 Unit	191.750.000,00	186.750.000,00	173.900.000,00	-17.850.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			11.698.586,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah budaya banjar yang disebarluaskan				80,00 %	80 Persen	28.572.600,00	28.572.600,00	24.419.000,00	2.331.905,00							30.904.505,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlестarikan Jumlah warga masyarakat yang memahami sejarah lokal Banjar				40 Orang	100 Persen 40 Orang	28.572.600,00	28.572.600,00	24.419.000,00	-4.153.600,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		30.904.505,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				40 Orang	40 Orang	23.372.400,00	23.372.400,00	19.510.000,00	-3.862.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			25.279.825,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.200,00	5.200.200,00	4.909.000,00	-291.200,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			5.624.680,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik				70,00 %	100 Persen	315.642.100,00	315.642.100,00	310.868.100,00	-1.491.545,00							314.150.555,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlестarikan Jumlah data dukung yang didapatkan untuk mendukung penetapan warisan budaya banjar				70 %	100 Persen 3	72.088.600,00	72.088.600,00	70.885.600,00	-1.203.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		77.971.073,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	72.088.600,00	72.088.600,00	70.885.600,00	-1.203.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			77.971.073,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Penelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah : Persentase budaya banjar yang terlестarikan Jumlah cagar budaya yang dilestarkan Persentase warisan budaya benda yang diproses SK penetapannya sebagai cagar budaya				37 Objek	100 Persen 37 Objek	243.553.500,00	243.553.500,00	239.982.500,00	-3.571.000,00			-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	-		236.179.482,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				24 Objek	25 Objek	243.553.500,00	243.553.500,00	239.982.500,00	-3.571.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			236.179.482,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	2.204.511.600,00							866.501.981,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							7.047.066.300,00	7.923.861.300,00	9.251.577.900,00	2.204.511.600,00							866.501.981,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (Memiliki 3A)				56 %	56 Persen	2.851.061.500,00	2.937.061.500,00	2.673.359.100,00	-2.653.464.522,00							197.596.978,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1: Lama Kunjungan Wisatawan IKU Perangkat Daerah 2: Pengeluaran Wisatawan Persentase Daya Tarik / Atraksi Wisata Yang berkembang				62,5 %	1264900 Rupiah (Rp.) 2 Hari 62,5 %	434.212.500,00	468.212.500,00	435.871.500,00	1.659.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	-		33.413.072,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.133.500,00	200.133.500,00	196.627.500,00	-3.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				400 Orang	400 Orang	234.079.000,00	268.079.000,00	239.244.000,00	5.165.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.413.072,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1: Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 2: Lama Kunjungan Wisatawan Persentase destinasi wisata dengan aksesibilitas yang memadai Persentase ketersediaan amenities				40 % 52,63 %	1264900 Rupiah (Rp.) 2 Hari 40 % 52,63 %	2.257.308.000,00	2.314.308.000,00	2.099.467.000,00	-157.840.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	Masyarakat dan Destinasi Wisata		146.203.180,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	251.000.000,00	170.750.000,00	-29.250.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				9 Unit	9 Unit	1.767.188.000,00	1.747.188.000,00	1.729.924.000,00	-37.264.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata			121.126.575,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	290.120.000,00	316.120.000,00	198.793.600,00	-91.326.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata			10.076.605,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	IKU Perangkat Daerah 1: Pengeluaran Wisatawan IKU Perangkat Daerah 2: Lama Kunjungan Wisatawan Persentase ketersediaan amenities				100 %	1264900 Rupiah (Rp.) 2 Hari 52,63 %	159.541.000,00	154.541.000,00	138.020.000,00	-21.521.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	-		17.980.726,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				15 Usaha	15 Usaha	159.541.000,00	154.541.000,00	138.020.000,00	-21.521.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata 1. Meningkatkan Ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata			17.980.726,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase destinasi wisata yang telah dipasarkan Jumlah Kunjungan Wisata				10 %	10 5867206 % Orang	3.463.159.000,00	4.328.954.000,00	6.087.456.300,00	-2.887.135.502,00							576.023.498,00	

[illegible]

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan baik. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja), digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2025, sebagai wujud untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan hingga terselesaikannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun sebagai acuan dan referensi untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dasar penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar adalah Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Undang-undang di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya peluang dan tantangan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan merupakan wahana belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Atas dasar itu, perpustakaan perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa tapi memprioritaskan daerah-daerah terpencil. Disisi lain tuntutan masyarakat dalam layanan informasi di era keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan dan sekaligus menjadi tanggung jawab pengelolaan kearsipan, sehingga pengembangan urusan kearsipan harus terus dilakukan untuk membuat pengelolaannya menjadi lebih baik.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Banjar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di masing-masing Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Isu-isu strategis tersebut kemudian disusun menjadi strategi pemecahan masalah yang menjadi konsep dan kerangka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. RENSTRA dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan di

bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah dan dokumen Perubahan RKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dikarenakan dokumen perubahan RKPD merupakan himpunan dari seluruh dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan RENJA K/L serta perubahan RENJA Provinsi/ Kabupaten/ Kota menandakan bahwa adanya perubahan arah kebijakan yang menjadi dasar analisis dalam melakukan reviu RENSTRA Perangkat Daerah demi menjaga keterkaitan kebijakan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah dengan instansi vertikal di atasnya. Menanggapi hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menyusun Perubahan RAPBD sebagai bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 - 2029 sekaligus perwujudan program Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dokumen ini berkedudukan sebagai perencanaan induk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan terukur. Perubahan dilakukan pada anggaran beberapa sub kegiatan, yang utamanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah

dipetakan sebelumnya. Kebutuhan yang dimaksud berupa belanja barang, jasa, dan belanja modal yang sebelumnya tidak teranggarkan. Penyesuaian terhadap target pun mesti dilakukan untuk menyikapi adanya perubahan anggaran tersebut guna menjaga keserasian antara target dan anggaran.

Dengan adanya beberapa kebijakan di atas, maka disusunlah dokumen Perubahan RENJA tahun 2025 ini.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025 mendasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;
20. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan anggaran dan indikator program dan kegiatan serta target sub kegiatan pada seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, serta Sekretariat yang sesuai dengan Rancangan Renstra 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Menjabarkan secara operasional tujuan, sasaran, dan program Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah serta penyebab dari adanya Perubahan Renja.
- 1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, total anggaran keseluruhan, perubahan indikator dan target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta alasannya, serta berisi tabel rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

BAB IV PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa:

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA). RENJA memuat penjabaran dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang mengakibatkan pencapaian dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal. Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut terus di monitoring dan di evaluasi agar dapat diukur progresnya. Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program perpustakaan dan kearsipan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan angka capaian pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang baik. Besaran pagu anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sebesar Rp.9.048.530.830 dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan mengalami perubahan jumlah pagu keseluruhan menjadi Rp.8.656.910.756 atau bertambah sebesar Rp.33.047.826.

Berdasarkan Rencana Kerja pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar mempunyai program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Utama

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Arsip dengan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

➤ Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

1. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

Tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerjanya pada triwulan I.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 89% dan realisasi kinerja sebesar 0%;

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 40 Orang dan realisasi sebesar 35 Orang;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 0 Paket;
- c. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 12 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- d. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 9 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- e. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit;
- f. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 31 Unit dan realisasi sebesar 27 Unit;
- g. Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat dengan indikator “Jumlah Lokus

Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 9 Lokus dan realisasi sebesar 6 Lokus;

- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 153.911 berkas dan realisasi sebesar 153.564 berkas;
- i. Sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator kinerja “Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis” tidak memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 42 Arsip dan realisasi sebesar 0 Arsip;

2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan arsip” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 19,37% dan realisasi sebesar 19,37%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 27,06% dan realisasi sebesar 27,06%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;

- f. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 6 Kegiatan dan realisasi sebesar 6 Kegiatan;
- g. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- h. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%;
- i. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%.

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I

- sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan bersihan Kantor” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan;
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit;
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan indikator kinerja “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 12 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit;
 - l. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 2 Layanan dan realisasi sebesar 2 Layanan;

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- **PROGRAM**

- ❖ Triwulan I

- a. Program Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja “Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk” memenuhi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 4,12% dan realisasi sebesar 10,2%.

- **KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja “Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan” melebihi target kinerjanya dengan target pada triwulan I sebesar 43% dan realisasi sebesar 10.310 Orang;

- **SUB KEGIATAN**

- ❖ Triwulan I

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja “Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 3 Orang dan realisasi sebesar 4 Orang;
 - b. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan indikator kinerja “Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 15.500 arsip dan realisasi sebesar 17.569 arsip;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN dengan indikator kinerja “Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 6 pengguna dan realisasi sebesar 31 pengguna;
 - d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota” melebihi target kinerjanya dengan target triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi sebesar 7 laporan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan :

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :

1. Adanya efisiensi anggaran yang mana sangat berpengaruh pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispersip;
 2. Adanya update pada sistem pengadaan barang menjadi versi 6 sehingga berdampak pada pengadaan belanja modal melalui e-katalog;
 3. Adanya mutasi beberapa pegawai yang membuat beberapa jabatan kosong;
 4. kurang SDM yang dimiliki sehingga menghambat pembuatan SPJ pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sedikit terhambat;
 5. Lambatnya perbaikan yang dilakukan oleh penyedia yang ditunjuk dalam melakukan pemeliharaan AC dikarenakan banyaknya antrian;
 6. kurangnya partisipasi pemustaka dalam memberikan saran dan masukan terkait bahan pustaka;
 7. Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dengan benar, sehingga daftar arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di Perangkat Daerah belum maksimal.
 8. SK Pembentukan Tim Pengelolaan Kearsipan Daerah belum final/ttd Bupati sehingga kegiatan pemeliharaan masih belum bisa dilakukan secara maksimal;
 9. arsip vital daerah tidak tersimpan dengan baik sehingga kesulitan dalam pencarian arsip dan tidak adanya tanggapan dari pencipta arsip terkait arsip kegiatan pimpinan daerah;
- b. Faktor penyebab terpenuhinya target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
1. Merupakan program/kegiatan/sub kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun;
 2. Adanya arahan dari pimpinan, komitmen dan kerjasama tim yang baik
 3. Adanya dukungan anggaran;
 4. Adanya strategi pelaksanaan yang sesuai.
- c. Faktor penyebab melebihi target indikator kinerja dari program/kegiatan/sub kegiatan :
1. Adanya bantuan instansi lain terkait data capaian kinerja;
 2. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki;
 3. Adanya komitmen yang kuat dari internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- a. Proses pengadaan barang tertunda membuat beberapa capaian kegiatan dan sub kegiatan tidak maksimal;
 - b. Pemeliharaan barang, kendaraan, maupun Gedung tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang seharusnya;
 - c. Target dari pembayaran realisasi gaji/tunjangan ASN tidak tercapai;

- d. Evaluasi terkait penetapan target dan anggaran sub kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat.
- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Melakukan koordinasi secara lebih intens terkait proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog;
 - b. Menyusun jadwal pemeliharaan baik berupa pemeliharaan kendaraan, barang, maupun Gedung kantor;
 - c. Melakukan penyesuaian target dan anggaran sesuai dengan kondisi riil yang terjadi, serta berdasarkan pemetaan terkait dampak yang dihasilkan terhadap capaian sub.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	80	32.275.769.420	81,24	15.244.108.644	78	6.975.160.130	0	1.615.391.971	0%	23%	78	16.859.500.61 5	97,50%	52%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	100%	74.345.961	98,50 %	23.825.500	100 %	25.309.000	27,06 %	3.552.000	27,06%	14%	27,06%	27.377.500	27,06%	37%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokume n	26.261.100	22 Doku men	7.770.500	11 Doku men	10.592.000	4 Dokum en	2.594.000	57%	24%	26 Dokumen	10.364.500	81,26%	39%
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	10 Dokume n	24.352.861	6 Doku men	8.843.000	2 Doku men	7.367.000	1 Dokum en	800.000	50%	11%	7 Dokumen	9.643.000	70%	40%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			
				I		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76 Laporan	23.732.000	66 Lapora n	7.212.000	22 Lapor an	7.350.000	4 Lapora n	158.000	18,18%	2%	70 Laporan	7.370.000	92,11%	31%
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22.789.031.662	100%	10.332.098.182	100 %	5.120.979.000	25%	1.302.631.969	28,49%	25%	25%	11.634.730.15 1	87,50%	51%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	22.336.194.989	35 Orang / Bulan	10.043.136.732	40 Oran g/ Bula n	4.979.600.000	35 orang/ bulan	1.276.631.969	87,50%	26%	35 orang/bul an	11.319.768.701	92,11%	51%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokume n	435.593.100	24 Doku men	272.360.000	12 Doku men	130.830.000	3 Dokum en	22.840.000	25%	17%	27 Dokumen	295.200.000	56,25%	68%
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	17.243.573	3 Lapora n	16.601.450	1 Lapor an	10.549.000	0 Lapora n	3.160.000	0,00%	30%	3 Laporan	19.761.450	60%	115%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)						
						I										
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	100%	367.183.350	100%	185.901.361	100 %	100.000.000	57,14 %	16.869.260	57,14%	17%	211%	202.770.621	211%	55%
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	367.183.350	70 Orang	185.901.361	7 Oran g	100.000.000	4 orang	16869260	57,14%	17%	74 Orang	202.770.621	211%	55%
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.938.713.746	100%	1.110.224.400	100 %	493.450.600	21,89 %	108.541.124	21,89%	22%	21,89%	1.218.765.524	21,89%	63%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	48.942.881	36 Paket	25.322.900	12 Paket	10.470.500	3 paket	3.906.000	33,33%	37%	40 Paket	29.228.900	66,67%	60%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	62.124.972	36 Paket	43.449.196	12 Paket	7.534.500	0 paket	0	0%	0%	36 Paket	43.449.196	60%	70%
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	338.616.195	36 Paket	157.357.680	12 Paket	74.276.000	4 paket	9.386.500	33,33%	13%	40 Paket	166.744.180	66,67%	49%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	189.119.698	36 Paket	89.159.755	12 Paket	34.999.600	4 paket	3.408.250	33,33%	10%	40 Paket	92.568.005	66,67%	49%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)						
						I										
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	1.299.910.000	33 Lapora n	794.934.869	11 Lapor an	366.170.000	3 Lapora n	91.840.374	18,18%	25%	36 Laporan	886.775.243	65,45%	68%
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.028.956.271	99%	1.070.239.750	100 %	121.714.000	0%	0	0%	0%	88,68%	1.070.239.750	88,68%	53%
Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	277.728.000	37 Unit	141.574.000	12 Unit	29.470.000	0 Unit	0	0%	0%	37 Unit	141.574.000	82,22%	51%
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	1.586.116.466	38 Unit	787.367.750	21 Unit	74.426.000	0 Unit	0	0%	0%	38 Unit	787.367.750	69%	50%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Ban gunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	59 Unit	165.111.805	66 Unit	141.298.000	9 Buah	17.818.000	0 Unit	0	0%	0%	66 Unit	141.298.000	111,86%	86%
pengelolaan kantor dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.553.030.365	100%	1.739.546.902	100 %	607.067.530	28%	128.902.540	28%	21%	28%	1.868.449.442	28%	53%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	826.102.625	36 Lapora n	322.064.147	12 Lapor an	177.527.530	3 Lapora n	23.095.140	25%	13%	39 Laporan	345.159.287	65%	42%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)						
						I										
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	2.726.927.740	39 Lapora n	1.417.482.755	13 Lapora n	429.540.000	4 Lapora n	105.807.400	30,77%	25%	43 Laporan	1.523.290.155	66%	56%
Penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD perangkat daerah berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.524.508.065	100%	782.272.549	100 %	506.640.000	22,82 %	54.895.078	22,82%	11%	22,82%	837.167.627	23%	55%
Tersedianya Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	176.992.900	1 Unit	136.216.850	1 Unit	42.750.000	1 Unit	5.700.000	25%	13%	1 Unit	141.916.850	100%	80%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	672.637.501	11 Unit	311.806.199	13 Unit	308.120.000	12 Unit	20.789.078	25%	7%	12 Unit	332.595.277	100%	49%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	181.031.000	64 Unit	85.820.450	64 Unit	44.220.000	27 Unit	3.641.000	42,19%	8%	27 Unit	89.461.450	42,19%	49%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			
								I								
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	493.846.664	2 Unit	248.429.050	2 Unit	111.550.000	1 Unit	24.765.000	50%	22%	2 Unit	273.194.050	50%	55%
Meningkatn ya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	16,77%	2.252.188.974	15,25 %	1.246.133.362	16,5 1%	1.658.911.700	10,2%	193.792.800	61,78%	12%	15,25%	1.439.926.162	90,94%	64%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	83		86,3		82,8 0%		0		0,00%		86,3		103,98%	
Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	144.500 Orang	1.191.680.860	110.8 68 Orang	639.797.762	28.9 50	410.469.500	10.310 Orang	23.871.500	10,75%	6%	121.178 Orang	663.669.262	84%	56%
Terlaksanan ya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	527.200.860	2 Layan an	265.522.000	2 Laya nan	198.330.000	2 Layana n	20.074.000	100%	10%	2 Layanan	285.596.000	100%	54%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.695 Eksempl ar	664.480.000	6.213 Eksem plar	374.275.762	2169 Ekse mpla r	212.139.500	324 Eksem plar	3.797.500	14,94%	2%	6.537 Eksempla r	378.073.262	61%	57%
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	65 Kegiata n	1.060.508.114	37 Kegiat an	606.335.600	17 Kegi atan	1.248.442.200	6	169.921.300	35,29%	14%	43 Kegiatan	776.256.900	66,15%	73%
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	64 Lokus	241.043.940	40 Lokus	171.849.900	51 Loku s	1.181.120.400	6 Lokus	153.453.000	11,76%	13%	46 Lokus	325.302.900	71,88%	135%
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	5 Perpusta kaan	254.512.997	4 Perpus takaan	131.785.800	1 Perp ustak aan	67.321.800	1 Perpust akaan	16.468.300	100%	24%	5 Perpustak aan	148.254.100	100%	58%
Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	100%	88.678.500	99,14 %	49.679.400	99.7 2%	18.128.500	0%	0	0%	0%	99,14%	49.679.400	99,14%	56%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)						
						I										
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Pengembangan Koleksi Etnis Nusantara	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	600 Eksemplar	88.678.500	636 Eksemplar	49.679.400	550 Eksemplar	18.128.500	0 Eksemplar	0	0%	0%	636 Eksemplar	49.679.400	106%	56%
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	80.000.000	486 Eksemplar	44.879.400	100 Eksemplar	16.250.000	0 Eksemplar	0	0%	0%	486 Eksemplar	44.879.400	97,20%	56%
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	500 Eksemplar	8.678.500	528 Eksemplar	4.800.000	100 Eksemplar	1.878.500	0 Eksemplar	0	0%	0%	528 Eksemplar	4.800.000	105,60%	55%
Pengelolaan Kearsipan SKPD Berkualitas	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	81	1.410.539.272	79	695.343.447	77,5	309.668.000	19,37%	20.855.350	0,25%	7%	79	716.198.797	97,53%	51%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	85,55		86,5		85.35		0%		0%		86,5		101,11%	
Pengelolaan Kearsipan Dinamis yang berkualitas	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis	100%	769.569.406	100%	369.678.940	100%	198.552.500	25%	18.261.000	25%	9%	25%	387.939.940	25%	50%
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	285.000 Berkas	423.076.809	257.519 Berkas	200.088.500	60.500 Berkas	77.358.000	17.569 Berkas	6.474.000	29,04%	8%	275.088 berkas	206.562.500	97%	49%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			
				I		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terkelolanya pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	163.091 Berkas	208.279.746	463.180 Berkas	106.535.440	158.891 Berkas	61.122.000	153.564 Berkas	11.787.000	96,65%	19%	616.744 berkas	118.322.440	378%	57%
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	240 Laporan	138.212.851	100 Laporan	63.055.000	48 Laporan	60.072.500	0 Laporan	0	0%	0%	100 laporan	63.055.000	41,67%	46%
Pengelolaan Kearsipan Statis yang berkualitas	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip statis	100%	98.216.889	100%	46.726.200	100%	24.333.000	25%	1.844.350	25%	8%	25%	48.570.550	25%	49%
Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	5 Arsip	16.360.200	2 Arsip	5.780.000	1 Arsip	7.299.000	0 Arsip	89.350	0%	1%	2 Arsip	5.869.350	40%	36%
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	640 Arsip	81.856.689	410 Arsip	40.946.200	175 Arsip	17.034.000	0 Arsip	1.755.000	0%	10%	410 Arsip	42.701.200	64%	52%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Berkualitas	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksana nya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	542.752.977	100%	278.938.307	100%	86.782.500	25%	750.000	25%	1%	25%	279.688.307	25%	52%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)						
						I				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ KotaMelalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	222 Pengguna	124.851.041	366 Pengguna	81.510.775	350 Pengguna	26.658.500	31 Pengguna	750.000	8,86%	3%	397 Pengguna	82.260.775	178,83%	66%
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	250 Laporan	417.901.936	157 Laporan	197.427.532	50 Laporan	60.124.000	7 Laporan	0	0,14%	0%	164 Laporan	197.427.532	65,60%	47%
Pengelolaan Kearsipan SKPD Berkualitas	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	86,7	487.341.704	84,67	115.618.050	86.20	86.662.500	0	0	0%	0%	84,67	115.618.050	98%	24%
Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Unit Kearsipan yang melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip	47 Unit Kearsipan	95.134.000	35 Unit Kearsipan	23.698.050	10 Unit Kearsipan	22.940.000	0 Unit Kearsipan	0	0%	0%	35 Unit Kearsipan	23.698.050	74,47%	25%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	12.500 Arsip	38.768.100	15.466 Arsip	9.650.000	2.500 Arsip	12.073.000	0 Arsip	0	0%	0%	15.466 Arsip	9.650.000	123,73%	25%
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	7.500 Berkas	56.365.900	23.289 Berkas	14.048.050	1.500 Berkas	10.867.000	0 Berkas	0	0%	0%	23.289 Berkas	14.048.050	310,52%	25%
Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah unit yang dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	5 Unit Kearsipan	27.324.910	2 Unit Kearsipan	3.347.000	1 Unit Kearsipan	7.019.000	0 Unit Kearsipan	0	0%	0%	2 Unit Kearsipan	3.347.000	40%	12%
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5.000 Arsip	27.324.910	782 Arsip	3.347.000	1.000 Arsip	7.019.000	0 Arsip	0	0%	0%	782 Arsip	3.347.000	15,64%	12%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
									I							
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6/7		9 = 5 + 7		10 = (9/4)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamat an Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan	15 unit Kearsipan	186.861.794	6 Unit Kearsipan	88.573.000	3 Unit Kearsipan	56.703.500	0 Unit Kearsipan	0		0%	6 Unit Kearsipan	88.573.000	40%	47%
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 Daftar	93.401.148	6 Daftar	62.085.000	3 Daftar	26.452.500	0 Daftar	0	0%	0%	6 Daftar	62.085.000	42,86%	66%
Terlaksananya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	9.800 Arsip	93.460.646	1179 Arsip	26.488.000	2.100 Arsip	30.251.000	0 Arsip	0	0%	0%	1179 Arsip	26.488.000	12,03%	28%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Kinerja dan Indikator pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00
	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70.5
		Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60.89
	Pengelolaan Kearsipan Daerah Berkualitas	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	80.42

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan Rancangan Akhir Rencana Startegis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Terwujudnya Keamanan Arsip Daerah		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	81,50
		Nilai Indeks Kearsipan	80,42
	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	76,56

	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	70,37
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar telah memuat secara merinci indikator dan target tiap tahunnya dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sejumlah 5 program dengan 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Perubahan dilakukan pada anggaran dan indikator program, kegiatan serta target yang dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar. Total anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang semula sebesar Rp9.048.530.830 berubah menjadi Rp8.736.980.130 dengan pengurangan anggaran sebesar Rp311.550.700 yang sumber pendanaan seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 terdapat banyak penyesuaian belanja yang dilakukan, hal ini terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Salah satu alasan terbesar pelaksanaan penyesuaian anggaran yaitu telah terpenuhinya kebutuhan dari belanja yang teranggarkan, serta guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran baik dalam hal realisasi maupun mengenai hasil dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar telah menerapkan pelaksanaan kegiatan berorientasi hasil yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi dasar dalam memutuskan adanya penyesuaian anggaran. Adapun penjelasan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
TUJUAN : Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Terwujudnya Keamanan Arsip Daerah	NA	- Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	60,89	81,50	8.009.216.236	8.700.726.130	691.509.894	Adanya Perubahan pada tujuan dan indikator tujuan serta adanya penambahan anggaran DAK pada bidang perpustakaan dan adanya beberapa pengurangan oleh tim TAPD dan efisiensi anggaran
		- Nilai Indeks Kearsipan	80,42	80,42				
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					8.009.216.236	8.700.726.130	691.509.894	
BIDANG URUSAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					7.612.885.736	8.421.439.630	808.553.894	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	6.884.524.536	6.907.762.130	23.237.594	Adanya Perubahan pada indikator sasaran serta adanya beberapa pengurangan dan penambahan anggaran oleh tim TAPD saat penetapan pagu APBD dan adanya efisiensi anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	78	85,25	6.884.524.536	6.907.762.130	23.237.594	Adanya Perubahan pada indikator program serta adanya beberapa pengurangan dan penambahan anggaran oleh tim TAPD saat penetapan pagu APBD dan adanya efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja SKPD Tersusun Dengan Baik	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	25.309.000	16.118.000	-9.191.000	Melakukan Penyelesaian target pada DPA dengan target pada pohon kinerja serta adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan efisiensi anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11 Dokumen	10.592.000	8.966.000	-1.626.000	Melakukan Penyelesaian target pada DPA dengan target pada pohon kinerja serta adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan efisiensi anggaran
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.367.000	3.157.000	-4.210.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	7.350.000	3.995.000	-3.355.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	4.996.303.406	5.133.023.000	136.719.594	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin dan Melakukan Penyelarasan target pada DPA dengan target pada pohon kinerjakekurangan pagu belanja pada rekening belanja dikarenakan belum teranggarkannya sampai 12 bulan serta adanya penambahan anggaran (dana DAK) pada bidang perpustakaan sehingga pada beban honorarium PPTK bidang perpustakaan menyesuaikan pagu yang diterima
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/Bul an	4.854.924.406	4.979.600.000	124.675.594	Adanya penambahan anggaran sesuai dengan gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	12 Dokumen	130.830.000	144.710.000	13.880.000	Adanya kekurangan pagu belanja pada rekening belanja dikarenakan belum teranggarkannya sampai 12 bulan serta adanya penambahan anggaran (dana DAK) pada bidang perpustakaan sehingga pada beban honorarium PPTK bidang perpustakaan menyesuaikan pagu yang diterima
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.549.000	8.713.000	-1.836.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100%	100%	100.000.000	80.000.000	-20.000.00	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	100.000.000	80.000.000	-20.000.00	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100%	100%	573.450.600	376.249.600	-197.201.000	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin dan adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.470.500	10.470.500	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.534.500	7.534.500	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	74.276.000	65.652.000	-8.624.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.999.600	30.697.600	-4.302.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	446.170.000	261.895.000	-184.275.000	Adanya pengurangan anggaran oleh tim TAPD sebesar Rp80.000.000 saat pengajuan RKPD dan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp192.572.500 serta melakukan pengajuan penambahan anggaran perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pendampingan penyusunan renstra dan SAKIP serta bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menunjang pencapaian target IKU dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Banjar sebesar Rp105.550.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	121.714.000	194.964.000	73.250.000	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin serta adanya penambahan belanja modal yang mana dirasa perlu dalam menunjang kegiatan dinas perpustakaan dan kearsipan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	29.470.000	29.470.000	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	21 Unit	74.426.000	106.742.000	32.316.000	1. Penambahan pengadaan DVR untuk keperluan pengawasan dan keamanan gedung perpustakaan. 2. UPS 1400VA tidak ada di pasaran sehingga dirubah menjadi UPS 1200VA dan adanya penambahan UPS dan stabilizer untuk keamanan server dan peralatan komputer dikarenakan stabilizer dan UPS di dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah tidak dapat digunakan. 3. Penambahan micropohone wireless untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan lomba lomba yang diadakan di aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Adanya penambahan pembelian PC All in one dikarenakan adanya penambahan pegawai (CPNS dan PPPK) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang belum memiliki PC.

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9 Unit	17.818.000	58.752.000	40.934.000	1. Penambahan pengadaan papan pengumuman karena Dispersip tidak memiliki papan pengumuman yang layak sesuai standar penilaian akreditasi oleh perpusnas. 2. Penambahan pembelian AC dan Kipas Angin Uap untuk melengkapi kekurangan sarpras di aula Dispersip dan gedung arsip 3. Mengganti tandon air yang sudah bocor/tidak layak pakai 4. Penambahan APAR karena jumlah APAR Dispersip belum mencukupi sesuai standar penilaian akreditasi oleh perpusnas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	607.067.530	600.767.530	-6.300.000	1. Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin 2. Sudah adanya tenaga arsip ASN pada dinas perpustakaan dan kearsipan 3. Perubahan anggaran dikarenakan adanya Pegawai Tidak Tetap yang lulus menjadi PPPK serta adanya perubahan pada jenjang Pendidikan pada salah satu pegawai Tidak Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang semula jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Strata Satu (S1) yang mana anggaran untuk pembayarannya ini

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
		Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100%	100%				diambil dari pembayaran jasa pegawai tidak tetap yang telah lulus menjadi PPPK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	177.527.530	177.527.530	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	429.540.000	423.240.000	-6.300.000	1. Sudah adanya tenaga arsip ASN pada dinas perpustakaan dan kearsipan 2. Perubahan anggaran dikarenakan adanya Pegawai Tidak Tetap yang lulus menjadi PPPK serta adanya perubahan pada jenjang Pendidikan pada salah satu pegawai Tidak Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang semula jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Strata Satu (S1) yang mana anggaran untuk pembayarannya ini diambil dari pembayaran jasa pegawai tidak tetap yang telah lulus menjadi PPPK

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	100%	100%	460.680.000	506.640.000	45.960.000	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan dengan indikator pokin dan Adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan standar satuan harga pada sipd RI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.750.000	42.750.000	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	262.160.000	308.120.000	45.960.000	Adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan standar satuan harga pada sipd RI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	64 Unit	44.220.000	44.220.000	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	111.550.000	111.550.000	0	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,5	76,56	728.361.200	1.513.677.500	785.316.300	Adanya Perubahan pada sasaran indikator sasaran serta adanya penambahan anggaran DAK pada bidang perpustakaan dan adanya beberapa pengurangan oleh tim saat penyusunan RKPD oleh tim TAPD dan adanya efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	Persentase Perpustakaan Sesuai Norma Standar Perpustakaan (SNP)	16,51%	2,85%	710.232.700	1.495.549.000	785.316.300	Adanya penambahan dana DAK oleh perpusnas, dan Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan serta target kegiatan dengan indikator dan target pokin serta terdapat beberapa penyesuaian anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Jumlah Pemustaka	37.086	38.586				
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	82,80%	0,37567				
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	Jumlah Pemustaka Baru/Terdaftar	28950 Orang	1.500 Orang	410.469.500	321.209.500	-89.260.000	Adanya penambahan dana DAK oleh perpusnas, dan Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan serta target kegiatan dengan indikator dan target pokin serta terdapat beberapa penyesuaian pada anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
		Persentase Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan yang Terlatih		64,87%				
		Persentase Perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)		53,20%				
		Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk		42,33%				

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	2 Layanan	198.330.000	109.070.000	-89.260.000	1. Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran 2. Kegiatan survey IPLM dan TGM dilaksanakan secara nasional oleh Perpustakaan Nasional sehingga tidak memerlukan lagi penganggaran untuk Survey IPLM dan TGM di Tingkat Kabupaten 3. Apresiasi terhadap pengunjung perpustakaan dan peminjam buku terbanyak
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2169 Eksempl ar	2169 Eksemplar	212.139.500	212.139.500	0	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Penduduk yang Memperoleh Promosi Perpustakaan	17 Kegiata n	2.120 Orang	299.763.200	1.174.339.500	874.576.300	Adanya penyesuaian antara indikator kegiatan serta target kegiatan dengan indikator dan target pokin serta terdapat beberapa penyesuaian anggaran pada kegiatan pelatihan komputer
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasa dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasa dan Masyarakat	51 Lokus	51 Lokus	232.441.400	1.145.423.000	912.981.600	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran, Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan menggunakan sumber dana DAK Non Fisik, dan satu kegiatan tidak bisa menggunakan 2 sumber dana namun kegiatan harus tetap berjalan sehingga nama kegiatan dirubah

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpusta kaan	1 Perpustaka an	67.321.800	28.916.500	-38.405.500	1. Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran 2. Mayoritas pengelola perpustakaan sudah memiliki keterampilan komputer dan mereka juga adalah sebagai tenaga pendidik 3. Untuk aplikasi inisilite dilatih saat pembinaan masing masing koordinators wilayah dan bimbingan teknis
Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Bahan Pustaka yang dilestarikan	Persentase koleksi nasional, naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dimiliki	99.72%	59,31%	18.128.500	18.128.500	0	Adanya penyesuaian pada indikator dan target program sesuai dengan pokok terbaru
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	550 Eksemplar	736 Eksemplar	18.128.500	18.128.500	0	Adanya penyesuaian pada indikator dan target program sesuai dengan pokok terbaru
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	16.250.000	16.250.000	0	
Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyilangan	Jumlah Koleksi Budaya Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyilangan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	1.878.500	1.878.500	0	

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
URUSAN BIDANG : Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					396.330.500	285.236.500	-111.094.000	
SASARAN STRATEGIS SETELAH PERUBAHAN : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	NA	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	NA	70,37	396.330.500	285.236.500	-111.094.000	Adanya Perubahan pada sasaran dan indikator sasaran serta adanya pengurangan anggaran akibat dampak efisiensi anggaran dan melakukan penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	77,50	77,50	309.668.000	198.701.500	-110.966.500	1. adanya pengurangan anggaran akibat dampak efisiensi anggaran serta melakukan penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan 2. penambahan anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan 3. penambahan anggaran pada pengawasan kearsipan yang mana sebelumnya 2 Orang x 5 Perangkat Daerah menjadi 1 Orang x 10 Perangkat Daerah. 4. adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Arsip Terjaga dan kegiatan Penyuluhan Arsip Statis 5. Pengurangan jumlah volume yang semula 15 orang x 4 kali menjadi 12 orang x 4 kali 6. Penambahan untuk kegiatan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta 7. Penambahan untuk kegiatan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Meeting dan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta.
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase SKPD yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Dengan Nilai B	NA	37%				

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola	100%	21%	198.552.500	152.452.500	-46.100.000	1. adanya pengurangan anggaran akibat dampak efisiensi anggaran dan melakukan penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan 2. terdapat penambahan anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan yang mana sebelumnya terdampak efisiensi anggaran sehingga dirasa perlu untuk menambahkan kembali anggaran pada kegiatan paket meeting kearsipan tersebut 3. adanya penambahan anggaran pada pengawasan kearsipan yang mana sebelumnya 2 Orang x 5 Perangkat Daerah menjadi 1 Orang x 10 Perangkat Daerah.
		Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Kearsipan Minimal 50%		52%				

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	60.500 Berkas	60.500 Berkas	77.358.000	45.558.000	-31.800.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan adanya Penambahan Jumlah Peserta untuk kegiatan paket meeting kearsipan yang mana sebelumnya terdampak efisiensi anggaran sehingga di perubahan ini kami mengajukan kembali usulan untuk kegiatan paket meeting kearsipan dengan peserta SKPD sebanyak 27, Kecamatan sebanyak 20 dan Kelurahan sebanyak 13 dengan total peserta 60 peserta dikali dengan 2 kali kegitan sehingga berjumla 120 orang/peserta dengan biaya Paket Meeting (Halfday) @ Rp. 175.000
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	158.891 Berkas	158.891 Berkas	61.122.000	46.822.000	-14.300.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	60.072.500	60.072.500	0	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan melakukan usulan penambahan anggaran pada sub kegiatan ini dengan Berdasarkan Rapat PKPKT Tahun 2025 oleh ANRI Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh seluruh SKPD. Mengingat SDM Kearsipan yang terbatas. Sehingga hanya mampu melakukan pengawasan sebanyak 10 SKPD ditahun ini. Pergeseran: 2 Orang x 5 Perangkat Daerah. Usul Perubahan: 1 Orang x 10 Perangkat Daerah.
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis	Persentase Arsip Statis yang Dikelola	100%	54%	24.333.000	8.533.500	-15.799.500	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Arsip Terjaga dan kegiatan Penyuluhan Arsip Statis
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	1 Arsip	7.299.000	649.500	-6.649.500	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Arsip Terjaga ditiadakan karena tidak semua pencipta arsip menciptakan dan memiliki arsip terjaga

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis	175 Arsip	175 Arsip	17.034.000	7.884.000	-9.150.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Arsip Statis ditiadakan karena belum terkelolanya dan teridentifikasinya arsip inaktif dengan baik pada pencipta arsip
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	15%	86.782.500	37.715.500	-49.067.000	1. Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran 2. Pengurangan jumlah volume yang semula 15 orang x 4 kali menjadi 12 orang x 4 kali karena adanya petugas yang mutasi dan purnatugas 3. Pengurangan jumlah volume yang semula 4 set menjadi set karena memaksimalkan penggunaan anggaran 4. Penambahan untuk kegiatan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta 5. Penambahan untuk kegiatan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Meeting dan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta. SKPD = 27 orang, Kecamatan = 20 x 2 orang, Kelurahan = 13 x 2 orang,

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
								Internal = 7 orang. 6. Honorarium Narasumber E-Arsip Terintegrasi (Narasumber Provinsi) Penambahan waktu semula 1 Orang x 1 Jam menjadi 2 Jam. 7. Honorarium Narasumber E-Arsip Terintegrasi (Narasumber Internal) Penambahan waktu semula 1 Orang x 1 Jam menjadi 2 Jam. 8. Honorarium Narasumber atau Pembahas Sosialisasi Kearsipan (Narasumber Internal) Penambahan waktu semula 0 Orang x 1 orang x 1 Jam, untuk ess.II 9. Dihapus, karena anggota sudah menjadi PPPK

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	54 Penggun a	350 Pengguna	26.658.500	14.848.500	-11.810.000	1. Pengurangan jumlah volume yang semula 15 orang x 4 kali menjadi 12 orang x 4 kali karena adanya petugas yang mutasi dan purnatugas 2. Pengurangan jumlah volume yang semula 4 set menjadi set karena memaksimalkan penggunaan anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	50 Laporan	50 Laporan	60.124.000	22.867.000	-37.257.000	1. Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran 2. Penambahan untuk kegiatan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta 3. Penambahan untuk kegiatan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Meeting dan Sosialisasi Kearsipan sebanyak 100 Peserta. SKPD = 27 orang, Kecamatan = 20 x 2 orang, Kelurahan = 13 x 2 orang, Internal = 7 orang. 4. Honorarium Narasumber E-Arsip Terintegrasi (Narasumber Provinsi) Penambahan waktu semula 1 Orang x 1 Jam menjadi 2 Jam. 5. Honorarium Narasumber E-Arsip Terintegrasi (Narasumber Internal) Penambahan waktu semula 1 Orang x 1 Jam menjadi 2 Jam. 6. Honorarium Narasumber atau Pembahas Sosialisasi Kearsipan (Narasumber Internal) Penambahan waktu semula 0 Orang x 1 orang x 1 Jam, untuk ess.II 7. Dihapus, karena anggota sudah menjadi PPPK

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persentase Arsip yang Terdigitalisasi	86.20	38%	86.662.500	80.585.000	-6.077.500	1. adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Kesiapsiagaan/Mitigasi Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang mana kegiatan ini dilakukan sekaligus pada saat Monev Kearsipan di Pencipta Arsip 2. Penambahan jumlah Silica Gel 3. penambahan Volume pengelolaan arsip dinamis Tingkat Kompleks 4. Penambahan Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Evakuasi Arsip Perangkat Daerah yang Dibubarkan
		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK		86,20%				
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penilaian dan Pemusnahan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan yang Dilakukan Pemusnahan Arsip Sesuai NSPK	10 Unit Kearsip an	10 Unit Kearsipan	22.940.000	17.990.000	-4.950.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	2.500 Arsip	2.500 Arsip	12.073.000	8.623.000	-3.450.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1.500 Berkas	1.500 Berkas	10.867.000	9.367.000	-1.500.000	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit yang dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	1 Unit Kearsipan	2 Kegiatan	7.019.000	369.500	-6.649.500	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Kesiapsiagaan/Mitigasi Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang mana kegiatan ini dilakukan sekaligus pada saat Monev Kearsipan di Pencipta Arsip
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1.000 Arsip	1.000 Arsip	7.019.000	369.500	-6.649.500	Adanya pengurangan anggaran akibat efisiensi anggaran dan adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Penyuluhan Kesiapsiagaan/Mitigasi Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang mana kegiatan ini dilakukan sekaligus pada saat Monev Kearsipan di Pencipta Arsip

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan	Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung/Dibubarkan	3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan	56.703.500	62.225.500	5.522.000	1. Penambahan jumlah Silica Gel yang sebelumnya 200 pcs ditambah menjadi 500 pcs karena ada penambahan Volume Arsip 2. penambahan Volume pengelolaan arsip dinamis Tingkat Kompleks yang sebelumnya 35 ML menjadi 40 ML berdasarkan perkiraan volume arsip yang ada 3. Penambahan Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Evakuasi Arsip Perangkat Daerah yang Digabungkan 12 Orang x 1 Kegiatan 4. Penambahan jumlah Silica Gel yang sebelumnya 250 pcs ditambah menjadi 500 pcs karena tempat penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar sehingga berpengaruh kepada kondisi arsip maka perlunya Pemeliharaan Berkala Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Penambahan Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Evakuasi Arsip Perangkat Daerah yang Dibubarkan 12 Orang x 1 Kegiatan

Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Keg iatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan
			RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	3 Daftar	26.452.500	31.086.500	4.634.000	1. Penambahan jumlah Silica Gel yang sebelumnya 200 pcs ditambah menjadi 500 pcs karena ada penambahan Volume Arsip 2. penambahan Volume pengelolaan arsip dinamis Tingkat Kompleks yang sebelumnya 35 ML menjadi 40 ML berdasarkan perkiraan volume arsip yang ada 3. Penambahan Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Evakuasi Arsip Perangkat Daerah yang Digabungkan 12 Orang x 1 Kegiatan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.100 Arsip	2.100 Arsip	30.251.000	31.139.000	888.000	1. Penambahan jumlah Silica Gel yang sebelumnya 250 pcs ditambah menjadi 500 pcs karena tempat penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar sehingga berpengaruh kepada kondisi arsip maka perlunya Pemeliharaan Berkala Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penambahan Kegiatan Makanan dan Minuman Rapat Evakuasi Arsip Perangkat Daerah yang Dibubarkan 12 Orang x 1 Kegiatan
TOTAL					8.009.216.236	8.700.726.130	691.509.894	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun berdasarkan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk Meningkatkan Tingkat Literasi dan Kegemaran membaca Masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan arsip. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif, dan dapat mempekecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasionalisasi organisasi.

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APB Kabupaten,
4. Perubahan Rencana Kerja OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas);
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Agar mencapai kondisi tersebut, maka perlunya rencana tindak lanjut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpustakaan dan kearsipan dalam rangka melaksanakan pelayanan. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, webinar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.
3. Mengoptimalkan dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat serta melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengelolaan kearsipan perangkat daerah serta pengawasan kearsipan perangkat daerah yang lebih intensif dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran tentang perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat pada Perubahan Rencana Kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang

professional dan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan khususnya dibidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Martapura, 16 Juni 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banjar

dr.H. TOFIK NORMAN HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200501 1 010

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan
perencanaan pembangunan daerah,

Tanggal : 16 Juni 2025

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan manusia
Dan Pemerintahan

FARA HAYANI, SP

NIP. 19720225 199903 2 008

RUSDIAN NOOR, SE

NIP. 198404042011011009

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.hut, M.Si

NIP. 19740923 200003 1 004

21. Dinas Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 tahun 2022 tentang Rankhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaen Banjar Tahun 2025 menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pertanian Kabupaen Banjar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan tahapan Tahun ke-4 pembangunan pertanian Kabupaten Banjar pada periode RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banjar memasuki tahun keempat periode RPJMD tahun 2022-2026. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020, maka RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2022- 2026 baru akan disusun pada awal tahun 2022.

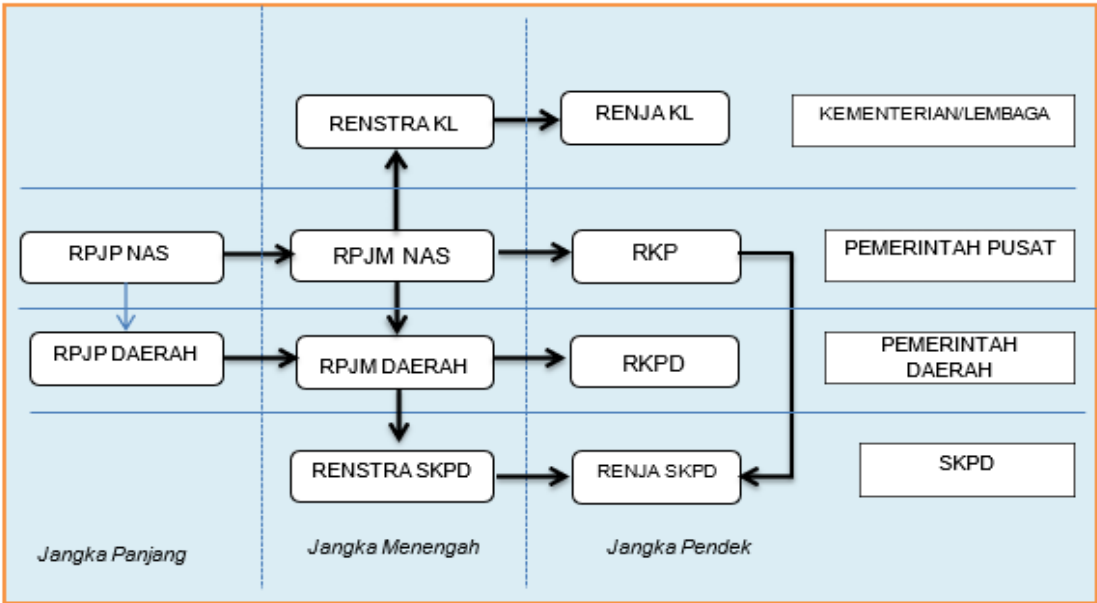
Dengan diterbitkannya Permendagri No. 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) yang disediakan oleh Kemendagri.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah

Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

- 1. Berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- 2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan didalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar didasarkan atas pertimbangan prioritas dan pagu indikatif.
- 3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan dan total kebutuhan dana.
- 4. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.



Gambar 1. Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perubahan Dinas Pertanian disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, reviu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan perubahan rencana kerja dari penjabaran rencana kerja tahunan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan dokumen perubahan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategik yang akan menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2025.

Tahapan penyusunan perubahan rencana kerja SKPD dimulai dari persiapan Perubahan Renja SKPD, penyusunan awal rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian akan dituangkan penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kemudian menjadi Perubahan Renja SKPD. Hasil perumusan akhir rancangan SKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Perubahan Renja SKPD menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD.

Perubahan Renja SKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sasaran umum kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025-2029 adalah **Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan pelestarian pangan**. Hal ini mencakup peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tukar petani, dan pengembangan pertanian modern yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementan akan fokus pada beberapa hal: (1) **Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian**, melalui program-program seperti optimalisasi lahan, perluasan areal tanam, peningkatan penggunaan teknologi modern, dan pengembangan varietas unggul; (2) **Penguatan ketahanan pangan**, dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat; (3) **Peningkatan nilai tukar petani**, dengan mendorong hilirisasi produk pertanian, pengembangan pemasaran yang efektif, dan meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi; (4) **Peningkatan daya saing produk pertanian**, melalui peningkatan kualitas produk, pengembangan produk bernilai tambah, dan perluasan akses pasar ekspor; dan (5) **Pembangunan pertanian berkelanjutan**, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 dan sesuai dengan urusan dan kewenangannya, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mempunyai peranan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”**, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang saat ini dilakukan perubahan yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Sebagai upaya mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melaksanakan 7 Program dengan 6 sasaran kinerja dan 9 indikator kinerja (sasaran program) yaitu :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; melalui indikator Persentase Kelompok Tani Yang Memanfaatkan Sarana Produksi Pertanian Sesuai Standar.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian; melalui indikator Persentase Kelompok Tani Yang Memanfaatkan Prasarana Produksi Pertanian Sesuai Standar.
3. Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian; melalui indikator:
 - a. Persentase Kerusakan Bencana Tanaman Pangan;
 - b. Persentase Kerusakan Bencana Tanaman Hortikultura;
 - c. Persentase Kerusakan Bencana Tanaman Perkebunan; dan
 - d. Persentase Angka Kematian Peternakan.
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian; melalui indikator Persentase Kelompok Tani Mandiri.
5. Meningkatnya Kualitas Produk Hasil Pertanian Pasca Panen; melalui indikator Jumlah Produk Hasil Pertanian Pasca Panen Yang Berkualitas (Sertifikasi, Pengemasan, dll).
6. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern; melalui indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Sanjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2025 ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar yang didalamnya tertuang tujuan, input, output, outcome dan manfaat yang akan dicapai pada tahun 2025 secara berjenjang, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2025 dimaksud, dapat menyesuaikan target indikator pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengaju pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Lebih lanjut tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja Perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja Perubahan sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan SKPD;
4. Sebagai Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025;
5. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pertanian tahun 2026 bagi Jajaran Birokrasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar;
6. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi pembangunan pertanian secara umum melalui tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
7. Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan pertanian; dan
8. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan perlu diperhatikan agar kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Adapun sistem penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
- 2.4. Penelaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan Pertanian sampai dengan tahun 2024 masih diprioritaskan pada upaya peningkatan produksi pertanian, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN tetap mengacu pada upaya tersebut.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menyusun dan merumuskan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
5. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dinas Pertanian;
dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat Daerah Kabupaten, Dinas Pertanian juga melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2025 melaksanakan 7 program, 25 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
- 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD; dan
- 11) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - 3) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;
 - 4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan;
 - 5) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang;

- 6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; dan
- 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; dan
 - 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan
 - 2) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B; dan
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya; dan
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
 - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; dan
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas.
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan
 - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
 - e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 4) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis; dan

- 5) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.
7. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - 4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian; dan
 - 5) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian s/d triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Banjar

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas Padi	Kw/Ha	36,5	0	0	0	36,5	0	0															54.026.465.141	8.780.733.161	34.294.490.399	44.721.441.130	54.026.465.141	8.759.430.997	20.666.661.205

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	80	0	0	0	80	0	0	3	27	01		PROGRAM PENJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	80	0	0	0	80	0	0	37.844.468.452	3.937.729.345	21.039.623.042	29.501.741.212	37.844.468.452	8.442.604.192	18.979.133.55

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															KOTA																
	Terkordinirnya penyusunan dokumen Perangat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan eval	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perseentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangka	%	100	25	50	75	100	25	50	81.763.782	5.270.000	54.044.482	78.343.782	81.763.782	10.279.500	27.892.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		uas i Perangkat Daerah sesuai ketentuan														t Daerah sesuai ketentuan															
	Terkordinirnya peny	Persentase dokum	%	100	0	0	100	100	0	0						Perseentase dokumen	%	100	0	0	100	100	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
	usulan dokumen SPIP	en SPIP sesuai ketentuan													SPIP sesuai ketentuan																
											3	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pera	Jumlah Dokumen Perencanaan Pera	Dokumen	3	3	3	3	0	2	10.641.603	1.850.000	10.641.603	10.641.603	10.641.603	3.250.000	6.610.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik							
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II								
														ngkat Daerah	ngkat Daerah																						
											3	2	7	0	1	2	0	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKD	Jumlah Dokumen RKA-SKD dan Laporan Hasil Koor	Dokumen	1	0	1	1	1	0	1	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik									
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII										
															dinas Penyusunan Dokumen RKA-SKP D																								
											3	2	7	0	1	2	0	0	0	0	1	3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Peru	Do ku me n	1	0	0	1	1	0	1	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
															DPA-SKPD																	
											3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1.715.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
															si Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
											3	27	01	2005	Koordinasi dan Peny	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	0	0	1	1	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
																umen Perubahan DPA-SKPD															
											3	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	15.874.879	3.420.000	9.034.879	12.454.879	15.874.879	0	3.360.000

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
											3	27	01	20007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	5	10	15	19	2	10	13.582.000	0	10.162.000	13.582.000	13.582.000	250.000	6.067.500
											3	27	01	20008	Penyenggaraan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	0	0	4.899.300	0	0	4.899.300	4.899.	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II	
															riksa Lingkup Perangkat Daerah																	
											3	2	7	0	1	2	0	1	0							0	7.366.000	7.366.000	7.366.000	7.366.000	6.779.500	6.779.500

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
											3	27	01	201	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rens tra PD dan Renj	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rens tra PD dan Renj	Dokumen	6	6	6	6	6	0	1	10.260.000	0	6.840.000	10.260.000	10.260.000	0	3.360.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															Renja PD	a PD yang disusun															
											3	2	7	0	1	2	0	1	3							1.140.000	0	0	1.140.000	0	0

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															s Pembangunan	onal melalui Koordinasi Teknis Pembangunan															
	Tersusunnya laporan	Persentase laporan	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	202	Administrasi Keuangan Pera	Persentase laporan keua	%	100	25	50	75	100	25	50	30.943.712.500	2.496.325.145	16.982.714.260	23.577.430.260	30.943.712.500	7.435.067.292	16.575.340.337

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II	
	keuangan Perangkat Daerah	keuangan sesuai ketentuan												ngkat Daerah	ngan sesuai ketentuan													.500				
											3	27	01	2.002	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/Bulan	3598	900	1800	2700	3598	1470	3421	30.744.700.000	2.416.406.645	16.866.361.760	23.409.467.760	30.744.700.000	7.420.777.292	16.528.966.837

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
															Tunjangan ASN																	
											3	27	01	202	0003	Pelaksanaan Penat ausa haan dan Peng ujian /Verifikasi Keua ngan	Juml ah Dok ume n Pena taus ahaa n dan Peng ujian /Veri	Do ku me n	1	0	0	0	1	0	0	181.012.500	78.918.500	115.352.500	149.962.500	181.012.500	13.290.000	45.373.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														SKPD	fikasi Keuangan SKPD																
											3	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
															SKPD																	
											3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKP	Laporan	18	4	9	1	1	4	9	8.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000	1.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
																an/S emes teran SKP D															
	Ters usunnya lapo ran peng elola n dan peng ama	Per sen tase lap ora n pen gelo laa n dan pen	%	10 0	2 5	5 0	7 5	1 0 0	2 5	5 0	3	2 7	0 1	2 . 0 3	Admi nistr asi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngka t	Perse ntas e lapo ran peng elola n dan peng amat an	%	10 0	2 5	5 0	7 5	1 0 0	2 5	5 0	8.000. 000	0	0	8.0 00. 000	8. 00 0. 00 0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	tan aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	ga mat an aset ses uai kete ntuan													Daerah	aset sesu ai kete ntuan															
											3	2	0	2	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan	Laporan	4	1	2	3	4	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas	%	100	25	50	75	100	25	50	78.0000.0000	78.0000.0000	78.0000.0000	78.0000.0000	0	54.640.0000	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
																Perundangan-Undangan															
	Lancarnya administrasi umum Perangkat	Persentase administrasi umum yang ber	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase administrasi umum yang berkualitas	%	100	25	50	75	100	25	50	923.487.900	183.394.900	618.689.900	883.487.900	923.487.900	176.811.53	381.169.696

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII			
	Daerah	kualitas																														
											3	2	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Paket	1	0	1	1	1	0	0	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	4.291.100	10.590.300

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															Kantor	jumlah Kantor yang Disediakan															
											3	2	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	10	3	7	1	1	1	1	209.192.500	19.735.000	209.192.500	209.192.500	209.192.500	6.447.500	21.105.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														Kantor	Kantor yang Dise diakan																
											3	2	0	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	3	0	0	3	3	0	0	118.798.000	0	0	118.798.000	118.798.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
															Dise diak an																	
											3	2	0	2	0	Peny ediaa n Bara ng Ceta kan dan Peng gand aan	Juml ah Pake t Bara ng Ceta kan dan Peng gand aan yang Dise	Pa ket	2	2	2	2	2	0	0	14.99 7.400	11. 159 .90 0	13. 997 .40 0	14. 997 .40 0	14 .9 97 .4 00	0	1.9 92. 000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
															diakan																	
											3	2	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kons	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	547.500.000	152.500.00	362.500.00	507.500.00	547.500.00	166.072.53	347.482.396

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
																ultas i SKPD															
	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan pengad aan Bar ang Mili k	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penu njang Urus an Peme	Perse ntas e lapor an peng adaan Bara ng Milik Daer ah	%	100	25	50	75	100	25	50	1.120.219.870	0	591.450.00	1.120.219.870	1.120.219.870	0	204.552.00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
		Daerah												rintah Daerah																		
											3	2	7	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	528.769.870	0	0	528.769.870	0	0			
														Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapa	Unit	21	0	2	1	2	1	2	1	0	0	528.769.870	0	0	528.769.870	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														Lapangan	ngan yang Dise diak an																	
											3	27	01	207	0005	Peng adaa n Mebe l	Juml ah Pake t Mebe l yang Dise diak an	Uni t	22	0	15	22	22	0	22	160.835.000	0	160.835.000	160.835.000	160.835.000	0	148.327.000
											3	27	01	207	0005	Peng adaa	Juml ah	Uni t	18	5	13	18	0	0	18	71.976.000	0	71.976	71.976	71.9	0	56.225

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
													07	06	n Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan											.000	.000	76.000		.000	
											3	27	01	2007	0009	Pengadaan Gedung	Jumlah Unit Gedung	Unit	1	0	1	1	1	0	0	358.639.000	0	358.639.000	358.639.000	35.863.9.	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													000		
	Lancarnya jasa penunja	Persentase jasa penunja	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	208	Penyediaan Jasa Penujangan	Persentase jasa penunjan	%	100	25	50	75	100	25	50	3.590.260.000	1.040.425.000	1.937.850.000	2.780.635.000	3.590.260.000	812.420.847	1.498.411.841

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
	ng pelayanan umum Perangkat Daerah	ang pelaksanaan umum yang berkualitas												Urusan Pemerintahan Daerah	g pelaksanaan umum yang berkualitas													000				
											3	27	01	2008	2002	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	12	3	6	9	12	3	6	456.200.000	114.000.00	255.400.00	361.400.00	456.200.00	47.886.167	102.076.361

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik			
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII				
															diakan																		
											3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	13	4	7	1	1	3	4	7	3.134.060.000	926.425.000	1.682.450.000	2.419.235.000	3.134.060.000	764.534.680	1.396.335.480

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
																Dise diak an															
	Terp elih aran ya sara na dan pras aran a sesu ai keb utu	Per sen tase sar ana dan pra sar ana yan g dip elih ara	%	100	25	50	75	100	25	50	3	27	01	209	Peme lihar aan Bara ng Milik Daer ah Penu njang Urus an Peme rinta	Perse ntas e sara na dan pras aran a yang dipel ihara sesu ai	%	100	25	50	75	100	25	50	1.099.024.400	134.314.300	776.874.400	975.624.400	1.099.024.400	8.025.400	237.127.681

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
	han Perangk Daerah	sesuai kebutuhan												han Daerah	kebutuhan																	
											3	27	01	209	20002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapa	Unit	19	7	11	15	19	1	10	685.500.000	1.278.400	422.750.000	585.500.000	685.500.000	1.278.400	208.000.181

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ngan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
											3	27	01	2.	00	Pemeliharaan	Jumlah Peral	Unit	40	13	21	29	40	5	15	150.000.000	44.250	90.600	126.60	150.00	6.747.000	29.127

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
													09	06	Peralatan dan Mesin Lainnya	atan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									.000	.000	0.000	0.000		.500		
											3	27	01	2009	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bang	Unit	6	3	6	6	6	0	0	263.524.400	88.785.900	263.524.400	263.524.400	263.524.400	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	
														Kantor dan Bangunan Lainnya	unit																	
5	Meningkatnya pemanfaatan	Persentase kelompok tani	%	4	0	0	0	4	0	0	3	2	7	0	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase kelompok tani	%	4	0	0	0	4	0	0	3.239.401.000	1.878.227	2.735.587.383	3.075.678.739	3.239.401.000	55.134.600	276.252.500

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		ndar																													
	Meningkatnya kualitas produk hasil pertanian pascapanen	Jumlah produk hasil pertanian pascapanen	Produk	3	0	0	0	3	0	0						Jumlah produk hasil pertanian pascapanen yang berkualitas	Produk	3	0	0	0	3	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	panen	gberkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll)														(sertifikasi, pengemasan, dll)															
	Meningkatnya	Persentase keten	%	4	0	0	0	4	0	0	3	2	0	2	Pengawasan Peng	Perseentase keter	%	4	0	0	0	4	0	0	2.846.151.000	1.842.989	2.526.329	2.777.819	2.846.15	50.924.600	236.664.410

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	ketersediaan sarana pertanian yang berkualitas	tersedian sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura													gunakan Sarana Pertanian	tersedian sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai standar										.102	.633	.364	1.000		

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		sesuai standar																													
		Persentase ketersediaan sarana produksi	%	4	0	0	0	4	0	0						Perse ntas e keter sediaan sarana produksi perkebun		%	4	0	0	0	4	0	0						

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		perkebunan sesuai standar														an sesuai standar															
	Meningkatnya ketepatan peny	Persentase kelompok tani yan	%	100	0	0	0	100	0	0						Perseentase kelompok tani yang	%	100	0	0	0	100	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	aluran sarana pertanian	g tersalurkan sarana pertanian tepat sasaran														tersalurkan sarana pertanian tepat sasaran															
		Persentase	%	100	0	0	0	100	0	0						Persentase	%	100	0	0	0	100	0	0							

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		aran																													
	Terlatihnya usaha pascapanen pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	Poktan	1	0	0	0	1	0	0						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	Poktan	1	0	0	0	1	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		tiha n																													
	Meningkatkan sarana pascapanen pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pascapanen	Poktan	1	0	0	0	1	0	0						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pascapanen	Poktan	1	0	0	0	1	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
		pasca panen pertanian													n pertanian																	
											3	27	02	201	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana	Laporan	3	0	1	2	3	0	0	1.824.944.000	1.674.776.000	1.778.009.000	1.814.202.000	1.824.944.000	20.072.100	73.009.410

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
																Lokasi															
											3	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2		376.880.000	40.045.802	326.777.533	374.428.764	376.880.000	6.413.000	40.370.000
															Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	0	0	0	1	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
											3	2	0	2	0	Perbanyakan Benih Bersementifikat Tana man Pang an Berb entuk Biji/	Juml ah beni h berse rtifik at tana man pang an berb entuk biji/ beni h	To n	1	0	0	0	1	0	0	100.000.000	36.951.700	64.409.700	95.811.900	100.000.000	4.680.000	12.630.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
														Benih	yang diper banyak																	
											3	2	7	0	2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perke	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	62.517.500	7.718.000	28.296.500	51.447.500	62.517.500	4.440.000	14.612.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														bunan	Perkebunan																	
											3	2	0	2	0	Perbaikan Benih Bersertifikat Hortikultura Berentuk Bata	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berentuk Bata	Batang	4000	1000	2000	3000	4000	675	2075	300.000.000	73.747.100	147.027.400	260.119.700	300.000	12.169.500	86.125.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															Batang	yang diperbanyak															
											3	2	0	2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tana	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapan	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	170.219.000	2.189.000	170.219.000	170.219.000	170.219.000	450.000	3.547.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
														man Pang an	en tana man pang an																	
											3	2	0	2	0	Peng awas an Peng guna an Sara na Pasc apan en Horti	Juml ah peng awas an peng guna an sara na pasc apan	La por an	1	0	0	0	1	0	0	11.59 0.500	7.5 61. 500	11. 590 .50 0	11. 590 .50 0	11 .5 90 .5 00	2.7 00. 000	6.3 71. 000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															kultura	enhortikultura															
	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian yang	Persentase ketersediaan sarana produksi per	%	4	0	0	0	4	0	0	3	27	02	202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tum	Perseentase ketersediaan sarana produksi perkebunan	%	4	0	0	0	4	0	0	231.440.000	1.921.000	74.058.000	127.609.500	231.440.000	0	3.530.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	berkualitas	kebiasaan sesuai standar													buhan, dan Mikro Organisme	sesuai standar															
	Meningkatnya aktepatan penyulur	Persentase kelompok tani yang	%	100	0	0	0	100	0	0					Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase kelompok tani yang tersa	%	100	0	0	0	100	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
	an sara na pert ania n	ters alur kan sar ana per keb una n tep at sas ara n													lurka n sara na perk ebun an tepat sas ar an																	
											3	27	02	2.	00	Penin gkata n	Juml ah Pelak	Do ku	2	0	0	0	2	0	0	105.330.500	1.671.000	68.963	84.212	105.33	0	2.125.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
													02	02	Kualitas SDG Hewan/Tanaman	sasaran Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	men										.500	.500	0.500		
											3	27	02	20003	Pemanfaatan SDG Hewa	Jumlah Pemanfaatan	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	126.109.500	250.000	5.094.500	43.397.000	126.109.	0	1.405.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															n/Ta nama n	SDG Hew an/T ana man													50 0		
	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase ketersediaan sarana produksi	%	4	0	0	0	4	0	0	3	2 7	0 2	2 .0 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan	%	4	0	0	0	4	0	0	161.8 10.00 0	29. 214 .12 5	108 .87 8.2 50	135 .71 9.3 75	16 1. 81 0. 00 0	3.9 10. 000	24. 042 .64 0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	yang berkualitas	peternakan sesuai standar													dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n sesuai standar															
	Meningkatnya ketepatan penyulur	Persentase kelompok tani yang	%	100	0	0	0	100	0	0					Persentase kelompok tani yang tersa		%	100	0	0	0	100	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II	
	an sara na pert ania n	ters alur kan sar ana pete rna kan tep at sas ara n													lurka n sara na peter naka n tepat sas ar an																	
											3	2	0	2	0	Peng awas an Mutu	Juml ah Peng awas	La por an	1	0	0	0	1	0	0	150.230.000	25.383.625	99.937.750	125.498.875	150.230.	1.650.000	20.652.640

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
											3	2	7	0	2	2	0	0	0	0	2											
																Pengawas an Peredaran Baha n Paka n/Paka n, Beni h/Bi bit Hijau an Paka n	Juml ah Pengawas an Baha n Paka n/Paka n, Beni h/Bi bit Hija uan Paka	La por an	1	0	0	0	1	0	0	11.58 0.000	3.8 30. 500	8.9 40. 500	10. 220 .50 0	11 .5 80 .0 00	2.2 60. 000	3.3 90. 000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														Ternak	n Ternak yang Beredar																
	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase ketersediaan sarana produk	%	4	0	0	0	4	0	0	3	27	02	205	Pengendalian Pengawasan Penyediaan dan	Persentase ketersediaan sarana produksi peter	%	4	0	0	0	4	0	0	45.713.50	4.751.000	26.321.500	34.530.500	45.713.500	300.000	12.015.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
	n yang berkualitas	si peternakan sesuai standar												Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	naka n sesuai standar																
	Meningkatnya ketepatan peny	Persentase kelompok taniyan	%	100	0	0	0	100	0	0					Perseentase kelompok tani yang	%	100	0	0	0	100	0	0								

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
	aluran sarana pertanian	g tersalurkan sarana peternakan tepat sasaran												Kabupaten/Kota	tersalurkan sarana peternakan tepat sasaran																	
											3	27	02	2.	00	Pengawasan	Jumlah Peng	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	45.713.50	4.751.000	26.321	34.530	45.713	300.000	12.015

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
													05	06	Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	awasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan											.500	.500	.500		.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW III	TW IV	TW I	TW II		
6	Meningkatnya pemanfaatan prasarana produksi pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi	%	4	0	0	0	4	0	0	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi	%	4	0	0	0	4	0	0	5.192.214.184	690.101.344	4.825.467.924	5.032.326.484	5.192.214.184	3.640.000	190.940.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
		duk si pert anian													perta nian																
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pertanian	Persentase kawasan pertanian pangan ber	%	16	0	0	0	16	0	0	3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Perse ntas e kawasan pertanian pangan berkelanjutan	%	16	0	0	0	16	0	0	633.760.600	111.931.660	430.176.840	537.456.400	633.760.600	3.400.000	24.383.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik			
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II				
	Pangan Berkelanjutan	kela njutan yang terkelola													yang terkelola																		
												3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pend	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	64.542.000	42.416.800	64.542.000	64.542.000	64.542.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														ukung Pertanian Lainnya	Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																
											3	27	03	2.0115	Pengelolaan Lahan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berk	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	569.218.600	69.514.860	365.634.840	472.914.400	569.218.600	3.640.000	24.383.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
														dan Lahan Cadaan Perta nian Perta nian Berk elanj utan /LCP 2B yang Dikel ola	Cada ngen Perta nian Pang an Berk elanj utan /LCP 2B yang Dikel ola																
	Meningkatny	Persentase	%	50	0	0	0	50	0	0	3	27	03	2.	Pembangunan	Perse ntas e	%	50	0	0	0	50	0	0	4.154.484.900	506.73	4.008.062	4.099.271	4.154.	0	141.21

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	a Tata Kelola Air	prasarana air yang terkelola												02		Prasarana Pertanian	prasarana air yang terkelola									1.000	.400	.400	484.900		4.000
	Meningkatnya Pengelolaan Prasar	Persentase prasarana pertanian	%	42	0	0	0	42	0	0						Perseentase prasarana pertanian lainn	%	42	0	0	0	42	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
	aspek Pertanian Lainnya	lainnya yang terkelola													yang terkelola																	
											3	27	03	202	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun ,	Unit	3	0	0	0	3	0	0	726.141.000	56.321.000	702.293.000	717.411.000	726.141.000	0	39.760.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII		
														aan Jalan Usaha Tani	Direhabilitasi dan Dipelihara																
											3	2	0	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	2	0	0	396.581.500	11.961.500	386.591.000	392.383.500	396.581.500	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															Pintu Air	dan Dipelihara															
											3	2	0	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung	Unit	3	0	0	0	3	0	0	1.566.030.400	114.747.000	1.531.960.400	1.549.779.400	1.566.030.400	0	96.230.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	gnya yang Dibangun , Direhabilitasi dan Dipelihara																
											3	2	0	2	Pembangunan, Rehabilitasi	Jumlah Prasarana Pertahanan,	Unit	2	0	0	0	2	0	0	702.652.000	67.864.000	679.063.000	691.130.000	702.652.000	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	nian Lainnya yang Dibangun , Direhabilitasi dan Dipelihara																
											3	27	03	200120	Rehabilitasi dan	Jumlah Jarigan	Unit	2	0	0	0	2	0	0	493.587.000	13.988.000	452.987.000	486.237.000	493.587.	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	irigasi usaha tani yang direhabilitasi												000					
											3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan	Jumlah Puskewan yang dibangun	Unit	1	0	0	0	1	0	0	269.493.000	241.849.500	255.168.000	262.330.500	269.493.000	0	5.224.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														lihar aan dan opera sionalisasi Pusk eswan	ngun , direh abilit asi dan dipel ihara serta bero pera si																
	Men ingkatny a Tata	Per sen tase pra sar	%	50	0	0	0	50	0	0	3	27	03	2 . 03	Peng elola an Wilay ah	Perse ntas e pras aran	%	50	0	0	0	50	0	0	403.9 68.68 4	71. 438 .68 4	387 .22 8.6 84	395 .59 8.6 84	40 3. 96 8.	0	25. 343 .50 0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
														/ Kota																		
											3	2	0	2	0	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/ Galur Tern	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumput/ Galur Tern	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	336.222.000	40.752.000	325.722.000	330.972.000	336.222.000	0	25.343.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII				
														Rumpun/ Galur Ternak	ak yang Diles tarik an dan Dima nfaat kan																
											3	2	7	0	3	2	0	0	0	0	3	2	0	0	67.746.684	30.686.684	61.506.684	64.626.684	67.746.684	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															Ternak dan Rumput/Galur Ternak	ber Bibit Ternak dan Rumput/Galur Ternak															
7	Menurunnya dampak keru	Persentase angka kemat	%	0,29	0	0	0	0,29	0	0	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN	Perseentase angka kematian	%	0,29	0	0	0	0,29	0	0	1.234.811.519	394.562.400	1.015.682.139	1.159.118.139	1.234.811.519	84.721.635	299.729.970

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	Menurunnya Penyakit Hewan Menular Zoonosis dan Non Zoo	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Zoonosis	%	0,29	0	0	0	0,29	0	0	3	27	04	201	Penjanaan Kesehata n Hewa n, Penu tupa n dan Pemb ukaa n Daer ah	Perse ntas e Penu runa n Penyakit Hew an Men ular Zoon osis dan Non	%	0,29	0	0	0	0,29	0	0	254.565.500	91.438.500	221.365.500	244.765.500	254.565.500	30.900.000	81.955.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
											3	2	0	2	0	Pemb erantan Penyakit Hewa n Men ular dan Zoon osis dala m 1 (satu) Daer ah	Juml ah wilayah atau kawa san yang men gala mi penu runa n kasu s peny	La por an	1	0	0	0	1	0	0	254.565.500	91.438.500	221.365.500	244.765.500	254.565.500	30.900.000	81.955.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	Meningkatkan keamanan produk peternakan	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh	%	78	0	0	0	78	0	0	3	27	04	202	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daer	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan	%	78	0	0	0	78	0	0	280.264.439	91.009.200	207.112.439	248.626.439	280.264.439	21.080.135	84.996.470

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII			
		dan Halal)												ah Kabupaten/Kot a	Halal)																	
											3	2	0	2	0	Pengawas an atas Penerapan Persy aratan Teknis untu	Juml ah pengawas an pene rapa n persy arata n tekni	La por an	1	0	0	0	1	0	0	280.264.439	91.009.200	207.112.439	248.626.439	280.264.439	21.080.135	84.996.470

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II
														a Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																	
	Meningkatnya pelayanan	Persentase peningkatan	%	100	0	0	0	100	0	0	3	27	04	203	Pengelolaan Pelayanan Jasa	Persentase peningkatan	%	100	0	0	0	100	0	0	400.600.500	131.193.500	362.170.500	397.600.500	400.600.500	4.061.000	64.972.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
											3270420001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	60	2046013192.857.000	17.157.000	192.857.000	192.857.000	192.857.000	0	0									
											3270420002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah Pelayanan Jasa Medik	Laporan	1550	38877611641550406822207.743.500	114.036.500	169.313.500	204.743.500	207.743.500	4.061.000	64.972.500									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
															Veteriner	Veteriner															
	Meningkatkan keamanan produk peternakan	Persentase produksi peternakan yang ASUH (Aman, Sehat,	%	78	0	0	0	78	0	0	3	27	04	204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh	%	78	0	0	0	78	0	0	224.381.180	55.371.200	171.834.200	201.526.200	224.381.180	24.768.500	57.725.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII		
		Utuh dan Halal)												at Veteriner	dan Halal)																
											3	2	0	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Prod	Laporan	2	0	0	0	2	0	0	197.563.480	41.511.500	155.124.500	174.708.500	197.563.480	20.420.500	47.186.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II			
															uk Hewan																	
												3	2	0	2	Pengawas an Unit Usaha a Produk Hewan	Juml ah unit usah a prod uk hewa n yang diaw asi terha dap	Uni t Us ah a	4	0	0	0	4	0	0	26.817.700	13.859.700	16.709.700	26.817.700	26.817.700	4.348.000	10.539.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II
															penerapan cara yang baik																
	Meningkatnya keamanan produk peternakan	Persentase produk peternakan yang ASUH	%	78	0	0	0	78	0	0	3	27	04	205	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman)	%	78	0	0	0	78	0	0	74.999	25.550	53.199	66.599	74.999	3.912	10.080

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		(Aman, Sehat, Utuh dan Halal)													afteraan Hewan	n, Sehat, Utuh dan Halal)															
											3	2	7	4	2	0	0	0	0	0	5	3			74.999.900	25.550.000	53.199.500	66.599.500	74.999.900	3.912.000	10.080.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII					
														Hewan pada Unit Usaha	terhadap penerapan kesejahteraan hewan																	
8	Menurunnya dampak keru	Persentase kerusa	%	5	0	0	0	5	0	0	3	2	7	0	5	PROGRAM PENGDALIAN	Perseentase kerusa	%	5	0	0	0	5	0	0	2.319.902.020	721.943.100	2.212.004.620	2.307.532.020	2.319.902.020	27.628.000	116.898.820

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	sasaran bencana pertanian	canataman pangan													DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN	anatanaman pangan															
		Persentase kerusakan benca tan	%	5	0	0	0	5	0	0						Perse ntas e keru sakan benca tana man	%	5	0	0	0	5	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		aman hortikultura														hortikultura															
		Persentase kerusakan bencana tanam	%	16	0	0	0	16	0	0						Persentase kerusakan bencana tanam perk	%	16	0	0	0	16	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		an perkebunan														ebunan															
	Meningkatnya Gerakan Pengendalian OPT	Rasio luas area pengendalian OPT	%	69	0	0	0	69	0	0	3	27	05	201	Pengendalian dan Penguangan Bencana Perta	Rasio luas area pengendalian OPT	%	69	0	0	0	69	0	0	2.319.902.020	721.943.100	2.212.004.620	2.307.532.020	2.319.902.020	27.628.000	116.898.820

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	Meningkatnya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Rasio luas area pengendalian dan penanggulangan ben	%	70	0	0	0	70	0	0					nian Kabupaten/Kot a	Rasio luas area pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Peru	%	70	0	0	0	70	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
		can a Dampak Perubahan Iklim														bahan Iklim															
	Menurunnya kebakaan	Rasio kebakaan lahan	%	26	0	0	0	26	0	0						Rasio kebakaan lahan	%	26	0	0	0	26	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII
	lahan pertanian	pertanian													pertanian																	
											3	27	05	2001	001	Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Jumlah Luas Serangan Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Ha	700	150	350	500	700	50	350	518.942.100	379.545.200	469.694.700	507.572.100	518.942.100	15.840.000	72.925.000

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
											3	27	05	201	0002	Penanangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikult	Ha	300	150	250	275	300	20	70	370.060.500	115.660.500	357.060.500	370.060.500	370.060.500	9.024.000	35.440.320

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															dan Perkebunan	ura, dan Perkebunan yang Ditangani															
											3	2	0	2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran	Jumlah Luasan Pencegahan, Pen	Ha	700	0	0	350	700	50	175	431.594.420	224.782.400	423.694.420	431.594.420	431.594.420	2.764.000	8.533.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														bunan	ura, dan Perkebunan																
											3	2	0	2	Penggunaan Bencana Non Alam yang Bersifat	Jumlah Wilayah Pengulangan Bencana Non Alam	Laporan	1	0	1	1	1	0	0	11.805.000	1.955.000	11.805.000	11.805.000	0		

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														Zoonosis	yang Bersifat Zoonosis																
											3	2	0	2	Pengulangan Pascabencana Alam Bidang Tana	Jumlah Pengulangan Pascabencana Alam Bida	Laporan	1	0	0	1	1	0	0	987.500.000	0	949.750.000	986.500.000	987.500.000	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII				
														man Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ng Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
9	Meningkatnya pem	Persentase usaha	%	24	0	0	0	24	0	0	3	27	06		PROGRAM PERIZINA	Perseentase usaha	%	24	0	0	0	24	0	0	266.771.500	50.822.000	143.216.000	223.156.000	266.771.	25.201.500	87.036.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII		TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII
	Meningkatnya fasilitas pembiayaan dan pengawasan izin usaha pertanian	Persentase usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura	%	10	0	0	0	10	0	0	3	27	06	201	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabu	Perseentase usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perk	%	10	0	0	0	10	0	0	124.122.000	26.210.000	63.748.000	101.718.000	124.122.000	16.960.000	45.185.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik			
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV
		gawasan																															
												3	2	0	2	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	Dokumen	6	0	0	0	6	0	0	16.576.000	0	6.709.000	8.719.000	16.576.000	0	3.500.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														Pertanian	Teknis Izin Usaha Pertanian																
											3	2	0	2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan stand	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina	Laporan	4	0	0	0	4	0	0	107.546.000	26.210.000	57.039.000	92.999.000	107.546.000	16.960.000	41.685.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															ar dan Izin Usaha Pertanian	dan diawasi															
	Meningkatnya fasilitas pembiayaan dan	Persentase usaha peternakan yang	%	40	0	0	0	40	0	0	3	27	06	2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit	Perseentase usaha peternakan yang men	%	40	0	0	0	40	0	0	61.503.500	6.522.000	35.695.500	56.467.500	61.503.500	4.051.000	16.558.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik			
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII	TWIV		TWI	TWII						
														Hewan, Rumah Poting Hewan																			
												3	27	06	2002	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha a	Jumlah Izin Usaha a Rumah Poting	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	61.503.500	6.522.000	35.695.500	56.467.500	61.503.500	4.051.000	16.558.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
														Rumah Poting Hewan	Hewan yang Diawasi																
	Meningkatnya fasilitas pembinaan dan peng	Persentase usaha pengecer obat hew	%	75	0	0	0	75	0	0	3	27	06	203	Izin Usaha Pengecer (Toko , Retail, Sub Distri	Perseentase usaha pengecer obat hewan dan	%	75	0	0	0	75	0	0	81.146.000	18.090.000	43.772.500	64.970.500	81.146.000	4.190.500	25.293.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW I	TW II	TW I	TW II		TW I	TW II	TW I	TW II		
	lainnya	ndan penguasaan																													
											3	2	0	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	46.824.000	8.104.000	23.901.500	31.698.500	46.824.000	1.769.500	12.893.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														a Pengecer Obat Hewan	Memenuhi Komitmen																
											3	2	0	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	34.322.000	9.986.000	19.871.000	33.272.000	34.322.000	2.421.000	12.399.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
															Obat Hewan	Diawasi															
10	Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase kelompok tani mandiri	%	6	0	0	0	6	0	0	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri	%	6	0	0	0	6	0	0	3.928.896.466	1.106.699.745	2.322.909.291	3.421.888.536	3.928.896.466	120.501.070	716.669.810
	Meningkatnya	Persentase	%	80	0	0	0	80	0	0	3	27	07	2.	Pelaksanaan	Persentase	%	80	0	0	0	80	0	0	3.928.896.466	1.106.699	2.322.909	3.421.888	3.928.896.466	120.501.070	716.669.810

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
	asarana penunjang penyediaan penyuluhan pertanian di BPP	BPP yang mendapatkan sarana penunjang pelayanan												01	Penyuluhan Pertanian	BPP yang mendapatkan sarana penunjang pelayanan penyuluhan										.745	.291	.536	896.466	1.070	9.810

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		yul uhan pertanian														pertanian															
	Meningkatnya kapasitas SDMP	Persentase SDMP yang meningkat	%	48	0	24	24	48	0	24						Perse ntas e SDM P yang meningkat kapa	%	48	0	24	24	48	0	24							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II									TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
		kapasitasnya														sitasnya															
	Meningkatnya kemampuan kelemahan penyuluhan dan pet	Persentase Kelemahan penyuluhan dan pet	%	45	0	0	0	45	0	0						Perseentase Kelemahan penyuluhan dan petani	%	45	0	0	0	45	0	0							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik														
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII															
	andan petani	anin mandiri													man diri																													
											3	2	7	0	7	2	0	0	1	0	0	0	1		Penin gkatan Kapa sitas Kele mbag aan Peny uluh an Pertan ian	Juml ah Kele mba gaan Peny uluh an Pertan ian di Keca mata	Uni t	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2.206.406.000	595.472.300	1.278.981.070	1.743.184.070	2.206.406.000	43.700.000	288.626.100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														di Kecamatan dan Desa	dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya																	
											3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembag	Jumlah Kelembagaan Peta ini di	Unit	130	0	0	0	130	0	0	589.106.266	128.564.845	413.287.341	561.244.266	589.106.266	8.781.820	256.418.960

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII	TWIII
														aan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya																	
											3	27	07	2.001	003	Penyediaan dan Pemasangan	Jumlah Sarana dan Peralatan	Unit	13	0	0	0	13	0	0	232.436.080	210.171.840	215.871.840	228.056.080	232.436.080	2.890.000	27.432.500

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik		
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII			
														nfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prasarana Penyuluhan Pertanian													080				
											3	27	07	201	006	Penyediaan dan Penin	Jumlah penyuluhan perta	Orang	60	0	30	60	60	0	40	282.759.760	13.752.000	209.710.280	271.215.760	282.759.	450.000	40.526.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		KODE				Sasaran Strategis/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				REALISASI KINERJA PERIODE		Anggaran	Anggaran Periodik				Realisasi Anggaran Periodik	
					TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII									TWI	TWII	TWI	TWII	TWI	TWII		TWIII	TWIV	TWI	TWII		
														gkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	nian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya													760			
											3	27	07	200019	Dise mini Informatik	Jumlah dise mini infor	Do kumen	10	0	5	10	0	0	0	618.188.360	158.738.760	205.058.760	618.188.360	618.188.360	64.679.250	103.666.250

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2025–2029 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025-2029.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”**. Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju: kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

Mandiri: kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

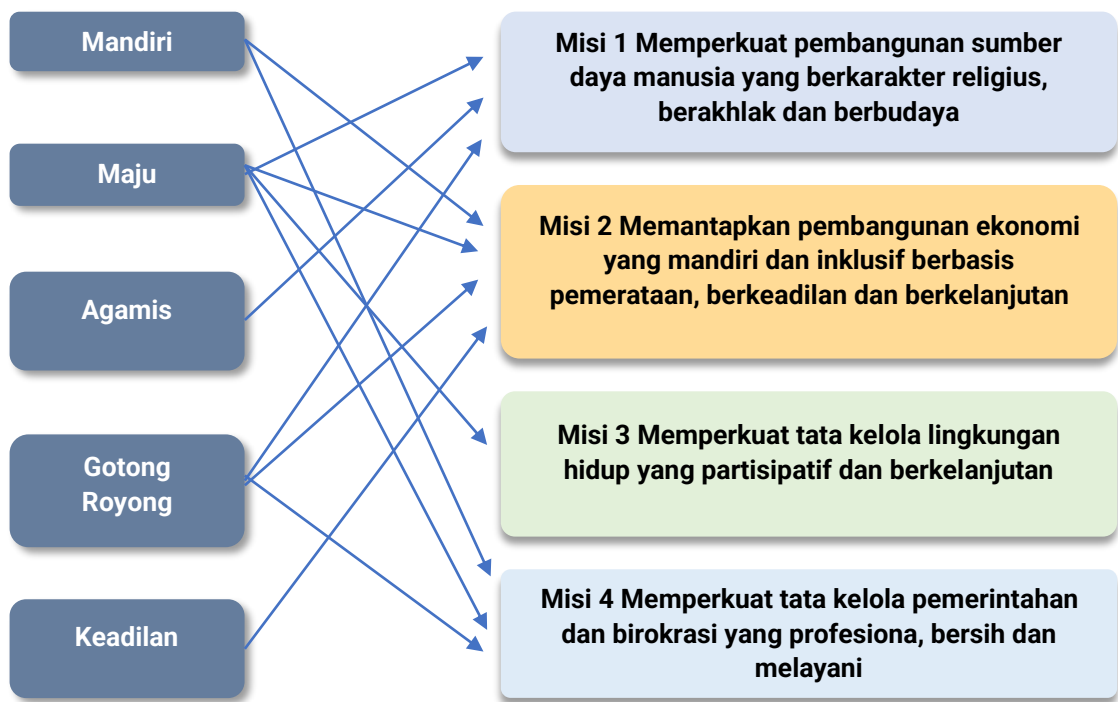
Agamis: kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar

Gotong Royong: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan: kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh

proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

Berbagai kata kunci dari visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan masing-masing misi yang ada. Hal ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara visi yang ingin diwujudkan dengan langkah-langkah atau misi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi. Berikut merupakan keterkaitan antara masing-masing kata kunci visi dengan misi-misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.



Gambar 2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mengampu urusan pemerintahan bidang pertanian. Berdasar urusan dan program yang diampu, maka Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mendukung pencapaian satu misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu: Misi 2 “**Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan**”.

Pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif dijalankan dengan memperhatikan tiga pilar ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian,

pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.

Pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator ekonomi makro, namun pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, lingkungan, dukungan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar dapat diwujudkan dengan 6 cara, yaitu: 1) melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur 2) melanjutkan dan memantapkan pemerataan pembangunan 3) Melanjutkan dan mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan 4) Melanjutkan dan memantapkan restrukturisasi ekonomi 5) Membangun ketahanan pangan daerah, dan 6) Membangun kembali keunggulan sektor pertanian dan perikanan.

Perwujudan 6 cara pendukung pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif juga sejalan dengan proyek prioritas strategis (*major project*) yaitu fondasi Banjar Bumi Intan (Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata Dan Pertanian) dan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi Program Hasil Terbaik dan Cepat yang dikawal langsung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga didukung dengan 6 dimensi pada misi kedua yaitu melalui dimensi infrastruktur dan kewilayahan, dimensi pembangunan desa, dimensi pembangunan perkotaan, dimensi pembangunan pertanian, dimensi pembangunan perikanan, dan dimensi lapangan pekerjaan.

Tujuan pembangunan untuk mendukung pada misi ke-2 Kepala Daerah Kabupaten Banjar, yaitu **Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, dengan sasaran **Meningkatnya produktivitas ekonomi** melalui: (a) PDRB Per Kapita; dan (b) Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%). Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menetapkan tujuan rencana strategis Dinas Pertanian, yaitu **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**, melalui indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Pertanian**. Pada tujuan Renstra Dinas Pertanian ini, didukung sasaran strategis Kepala Dinas Pertanian, yaitu:

1. Meningkatnya produksi pertanian unggulan daerah

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator:

- a. Persentase peningkatan produksi padi;
 - b. Persentase peningkatan produksi jeruk siam;
 - c. Persentase peningkatan produksi cabai
 - d. Persentase peningkatan produksi karet; dan
 - e. Persentase peningkatan produksi daging sapi.
2. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian, pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase komoditas unggulan olahan hasil pertanian.
 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2025 melaksanakan 7 program, 25 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;
 - 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD; dan
 - 11) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - 3) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;
 - 4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan;
 - 5) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang;
 - 6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; dan
 - 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; dan
 - 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan
 - 2) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian
- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;

- 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
 - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; dan
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas.
- c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan
 - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- a. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
- b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - 4) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis; dan
 - 5) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - b. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
7. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - 4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian; dan
 - 5) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan daerah	Produktivitas Padi	Kw/Ha	36,5	N/A
	Produktivitas Jeruk Siam	Kw/Pohon	0,70	N/A
	Produktivitas Cabai	Kw/Ha	32,50	N/A
	Produktivitas Karet	Kg/Ha	927	N/A
	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	%	3,82	N/A
Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Persentase Komoditas Unggulan Olahan Hasil Pertanian	%	100	N/A
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	N/A

Capaian pada masing-masing indkator yang menjadi tulak ukur pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian belum dapat diperhitungkan pada triwulan II dan semua target dari indikator tersebut hanya dapat ditargetkan pada akhir tahun kinerja atau pada triwulan IV, maka capaian kinerja triwulan II belum dapat dilaporkan. Hal ini karena:

1. Capaian produksi pertanian tidak dapat dilaporkan per triwulanan karena, hasil data capaian peningkatan produksi pertanian atau terkait produksi pertanian akan dapat dipublik setelah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi penetapan angka tetap produksi pertanian dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Sehingga capaian produksi ini akan mendapat angka sementara pada saat akhir tahun (triwulan 4) atau awal bulan pada tahun berikutnya;
2. Komoditas pertanian yang diperhitungkan produktivitas pertanian meliputi tanaman pangan (padi), hortikultura (jeruk siam dan cabai), perkebunan (karet) dan peningkatan produksi daging sapi;
3. Produk pertanian yang bersertifikat dikhususkan pada komoditas unggulan daerah; dan
4. Pelaksanaan sinkronisasi capaian produksi ini tergantung pelaksanaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Faktor penghambat:

1. Keterlambatan pengadaan saprodi dari pusat sehingga jadwal tanam terhambat/telat;
2. Terbatasnya pendanaan APBD;
3. Petani relatif masih menggunakan benih padi varietas lokal daripada benih unggul untuk usahatannya;
4. Kurangnya minat petani muda bekerja disektor pertanian;
5. Sebagian besar kelompok tani di Kabupaten Banjar belum berbadan hukum;
6. Penyuluh tidak sebanding dengan jumlah wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Banjar;
7. Kelompok tani di Kabupaten Banjar sebagian besar belum terintegrasi dan berbadan hukum dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, maka bantuan tersebut hanya bisa diberikan kepada kelompok tani yang

berbadan hukum. Akibatnya terwujudnya bantuan dari pemerintah daerah, provinsi pusat maupun kepada Poktan/gapoktan berpotensi menjadi terhambat/tidak terserap, tidak tepat sasaran dan akan menimbulkan permasalahan dengan hukum;

8. Adanya penyakit gugurnya daun pada usahatani karet mempengaruhi pertumbuhan pohon karet serta menurunkan produksi dan kualitas karet. Gejala serangan yang berbeda biasanya disebabkan oleh serangan OPT yang berbeda, sehingga diperlukan perlakuan yang relatif berbeda dalam pengendaliannya. Pengetahuan untuk membedakan gejala serangan penyakit gugur daun karet sangat penting dalam pengambilan keputusan cara pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pengendalian penyakit gugur daun karet berdasarkan alasan perlunya disebarluaskan agar petani karet lebih waspada dan segera menangani serta mengendalikan serangan penyakit ini dengan tepat dan mandiri;
9. Terbatasnya SDM Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
10. Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan jumlah wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Banjar

Faktor pendorong:

1. Mitigasi bencana akibat DPI;
2. Koordinasi dengan kementerian terkait kalender tanam;
3. Adanya bantuan sarana produksi melalui dana APBD prov dan APBN;
4. Melakukan sosialisasi penggunaan varietas unggul;
5. Melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
6. Koordinasi dengan penyuluh dan POPT;
7. Adanya sosialisasi pengendalian OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Kegiatan/kegiatan yang mendukung Proyek Strategis Penguatan Permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (KURMA MANIS);
9. Adanya pelatihan dan bimbingan kepada kelompok untuk meningkatkan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura melalui pelatihan dan sosialisasi kepada petani melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara komersil dan menerapkan teknologi terkini;
10. Peran penyuluhan sebagai media komunikasi terdepan dalam menyampaikan hasil-hasil inovasi sangat dibutuhkan dalam

peningkatan kapasitas petani. Sistem penyuluhan berupa komunikasi yang efektif akan memberikan dukungan yang kuat bagi petani untuk memperbaiki sistem usaha taninya yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil yang dicapai;

11. Meningkatnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi; (b) pusat gerakan pembangunan pertanian; (c) pusat pembelajaran; (d) pusat konsultasi agribisnis; dan (e) pusat pengembangan jejaringan kemitraan;
12. Adanya Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service (YESS) untuk Kabupaten Banjar. Program YESS dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. Melalui Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service (YESS), Kementerian Pertanian menciptakan wirausaha milenial yang tangguh dan berkualitas. Program ini ditujukan bagi para pemuda, khususnya di wilayah pedesaan, untuk mengembangkan perekonomian melalui kewirausahaan dan menambah peluang kerja. Empat kegiatan utama Program YESS, yaitu transisi pemuda pedesaan untuk bekerja, kewirausahaan pemuaa pedesaan, berinvestasi kepada pemuda pedesaan dan lingkungan yang mendukung pemuda pedesaan. Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) Adalah program kerjasama antara Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha muda dan tenaga kerja yang handal di sektor pertanian;
13. Adanya Program BATUMBANGTANI MANIS yang merupakan kegiatan pelatihan bagi petani muda yang nantinya diharapkan menghasilkan wirausahawan muda menghasilkan serta tenaga kerja yang membantu di bidang pertanian;
14. Tingginya minat seiring dengan kebutuhan pasar daging sapi baik untuk konsumsi;
15. Telah dibukanya kembali lalu lintas antar pulau sehingga banyak ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar;

16. Meredanya kejadian kasus PMK karena giatnya pelaksanaan vaksinasi PMK di lapangan;
17. Tersedianya dana dukung dari APBD II dalam hal pemberian vitamin dan pengobatan;
18. Tersedianya dana operasional SIKOMANDAN dari APBD II Provinsi untuk pelayanan Inseminasi Buatan/Kawin Suntik

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Kabupate Banjar pada tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 54.026.465.141 dengan rincian belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan ASN) Rp 30.744.7000.00 dan belanja langsung Rp 23.281.765.141 (yang terdiri dari belanja langsung utama Rp 16.181.996.689 dan belanja langsung pendukung Rp 7.099.768.452).

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertaian

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2022 (n-3)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2022 (n-3)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	
1	Persentase peningkatan produksi pertanian	$Q_{(\%) } = \frac{Q_{(n)} - Q_{(n-1)}}{Q_{(n-1)}} \times 100\%$ Q_(%) = persentase peningkatan produksi pertanian Q_(n) = jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) Q_(n-1) = jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) Jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen Komoditas produksi pertanian yang diperhitungkan adalah komoditas unggulan daerah, yaitu pangan (padi), hortikultura (jeruk, pisang, durian, cabe), perkebunan (karet) dan peternakan (ternak besar)	0,50	0,63	0,75	-	- 0,89	7,63	20,25*	-	
2	Produktivitas Padi	$Q_{(kw/ha)} = \frac{Q_{(n)}}{L_{(n)}}$ Q_(kw/ha) = produktivitas padi	-	-	-	36,5	-	-	-	36,5	

		$Q_{(n)}$ = jumlah produksi padi pada tahun berkenaan (n) $L_{(n)}$ = luas panen padi pada tahun berkenaan (n) Merupakan jumlah produksi padi pada tahun berkenaan (n) dibagi luas panen padi pada tahun berkenaan									
3	Produktivitas Jeruk Siam	$Q_{(kw/pohon)} = \frac{Q_{(n)}}{L_{(n)}}$ $Q_{(kw/pohon)}$ = produktivitas jeruk siam $Q_{(n)}$ = jumlah produksi jeruk siam pada tahun berkenaan (n) $L_{(n)}$ = luas panen jeruk siam pada tahun berkenaan (n) Merupakan jumlah produksi jeruk siam pada tahun berkenaan (n) dibagi luas panen jeruk siam pada tahun berkenaan	-	-	-	0,70	-	-	-	0,70	
4	Produktivitas Cabai	$Q_{(kw/ha)} = \frac{Q_{(n)}}{L_{(n)}}$ $Q_{(kw/ha)}$ = produktivitas cabai $Q_{(n)}$ = jumlah produksi cabai pada tahun berkenaan (n) $L_{(n)}$ = luas panen cabai pada tahun berkenaan (n) Merupakan jumlah produksi cabai pada tahun berkenaan (n) dibagi luas panen cabai pada tahun berkenaan	-	-	-	32,50	-	-	-	32,50	
5	Produktivitas Karet	$Q_{(kg/ha)} = \frac{Q_{(n)}}{L_{(n)}}$ $Q_{(kg/ha)}$ = produktivitas karet	-	-	-	927	-	-	-	927	

		$Q_{(n)}$ = jumlah produksi karet pada tahun berkenaan (n) $L_{(n)}$ = luas panen karet pada tahun berkenaan (n) Merupakan jumlah produksi karet pada tahun berkenaan (n) dibagi luas panen karet pada tahun berkenaan									
6	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	$Q_{(\%) } = \frac{Q_{(n)} - Q_{(n-1)}}{Q_{(n-1)}} \times 100\%$ $Q_{(\%)}$ = persentase peningkatan produksi daging sapi $Q_{(n)}$ = produksi daging sapi pada tahun berkenaan (n) $Q_{(n-1)}$ = produksi daging sapi pada tahun sebelumnya (n-1) Komoditas yang diperhitungkan ialah Daging Sapi. Perhitungan persentase peningkatan produksi daging sapi ialah jumlah daging yang dihasilkan dari pemotongan (RPH dan Hari Besar Keagamaan) dibagi dengan tahun sebelumnya dikali 100 persen	-	-	-	3,82	-	-	-	3,82	
7	Persentase Komoditas Unggulan Olahan Hasil Pertanian	$Q_{(\%) } = \frac{Q_{(n)}}{Q_{(t)}} \times 100\%$ $Q_{(\%)}$ = persentase komoditas unggulan olahan hasil pertanian $Q_{(n)}$ = jumlah komoditas yang diolah hasil pertaniannya tahun berkenaan $Q_{(t)}$ = jumlah target komoditas yang diolah pada tahun berkenaan	-	-	-	100	-	-	-	100	

		Merupakan jumlah komoditas yang dilolah hasil pertaniannya dibagi jumlah target komoditas yang diolah dikali 100 persen. Pasca panen dan pengolahan hasil komoditas unggulan pertanian daerah dari padi, cabe, jeruk, karet dan sapi									
8	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	$S = S_{(n)}$ $S_{(n)}$ = nilai predikat SAKIP perangkat daerah pada tahun berkenaan Nilai predikat SAKIP berdasarkan penilaian dari sub komponen evaluasi AKIP. Sub komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal) dinilai berdasarkan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dari setiap kriteria	-	-	-	A	-	-	-	A	

Keterangan:

*) Angka sementara dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Tugas Dinas Pertanian secara jelas telah diatur pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian pasal 22 dijelaskan bahwa Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Pertanian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia dari berbagai aspek dan kelemahan yang dapat menghambat proses pembangunan Dinas Pertanian selama tahun 2025-2029.

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

- 1 Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Pertanian;
- 2 Tersedianya Perda SOTK dan Uraian Tugas Dinas Pertanian;
- 3 Tersedianya UPTD Balai Benih, Mekanisasi Pertanian, UPTD Penyuluhan Pertanian dan UPTD Rumah Potong Hewan;
- 4 Tersedianya dukungan petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengamat Benih Tanaman (PBT); dan
- 5 Tersedianya dukungan dan kerjasama Aparatur Sipil Negara.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- 1 Rampingnya Struktur organisasi;
- 2 Ruang perkantoran kurang representatif dan kurangnya sarana prasarana pendukung (mobilisasi);
- 3 Kurangnya tenaga teknis lapangan seperti Mantri Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan;
- 4 Kurang akuratnya data base pertanian; dan
- 5 Kompetensi aparatur yang masih rendah.

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal ditujukan untuk mengetahui peluang yang tersedia dan kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang yang tersedia dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, yaitu:

1. Adanya lahan pertanian yang berpotensi untuk peningkatan IP (indek pertanian) atau tanam lebih dari satu kali dalam setahun;
2. Tersedianya lahan pertanian Kabupaten Banjar dengan tipe lahan yang beragam, diantaranya: irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, rawa lebak dan ladang/huma;
3. Tersedianya lembaga-lembaga penelitian/pengkajian pertanian, perguruan tinggi;
4. Peluang pasar untuk hasil olahan komoditas pertanian cukup luas;
5. Tersedianya akses informasi yang semakin terbuka;
6. Tersedianya dukunga pemerintah daerah, lembaga keuangan dalam pengembangan usaha agribisnis pertanian;
7. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan bagi petani; dan
8. Dukungan pusat dan provinsi atas pengembangan komoditas pertanian.

Adapun kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, yaitu:

1. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan daerah, dimana komoditas unggulan daerah ditetap oleh Dinas Pertanian Kabupaten tahun 2025-2029, yaitu padi, jeruk siam, cabai, karet, daging sapi.
2. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian.

2.4. Penelaahan terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Rancangan akhir perubahan RKPD Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuai terhadap kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 serta urusan pemeritahan yang diselenggarakan Dinas

Pertanian Kabupaten Banjar yakni **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”** dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter regilius, berakhlak dan berbudaya;
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan; dan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dominan pada misi kedua, yaitu **“Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan”**.

Pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif dijalankan dengan memperhatikan tiga pilar ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.

Pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator ekonomi makro, namun pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, lingkungan, dukungan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar dapat diwujudkan dengan 6 cara, yaitu: 1) melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur 2) melanjutkan dan memantapkan pemerataan pembangunan 3) Melanjutkan dan mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan 4) Melanjutkan dan memantapkan restrukturisasi ekonomi 5) Membangun

ketahanan pangan daerah, dan 6) Membangun kembali keunggulan sektor pertanian dan perikanan.

Perwujudan 6 cara pendukung pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif juga sejalan dengan proyek prioritas strategis (*major project*) yaitu fondasi Banjar Bumi Intan (Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata Dan Pertanian) dan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi Program Hasil Terbaik dan Cepat yang dikawal langsung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga didukung dengan 6 dimensi pada misi kedua yaitu melalui dimensi infrastruktur dan kewilayahan, dimensi pembangunan desa, dimensi pembangunan perkotaan, dimensi pembangunan pertanian, dimensi pembangunan perikanan, dan dimensi lapangan pekerjaan.

Tujuan pembangunan untuk mendukung pada misi ke-2 Kepala Daerah Kabupaten Banjar, yaitu **Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, dengan sasaran **Meningkatnya produktivitas ekonomi** melalui: (a) PDRB Per Kapita; dan (b) Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%). Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menetapkan tujuan rencana strategis Dinas Pertanian, yaitu **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**, melalui indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Pertanian**. Pada tujuan Renstra Dinas Pertanian ini, didukung sasaran strategis Kepala Dinas Pertanian, yaitu:

1. Meningkatkan produksi pertanian unggulan daerah
Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator:
 - a. Persentase peningkatan produksi padi;
 - b. Persentase peningkatan produksi jeruk siam;
 - c. Persentase peningkatan produksi cabai
 - d. Persentase peningkatan produksi karet; dan
 - e. Persentase peningkatan produksi daging sapi.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase komoditas unggulan olahan hasil pertanian.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Banjar

Dinas Pertanian					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					52.416.67 9.645	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					55.436.19 8.141	
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA	Ka b. Ba nja r	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indek s	76	38.628.40 5.074	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Ka b. Ba nja r	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indek s	83	38.930.26 8.452	
3	2	0	2.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka b. Ba nja r	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat	%	100	100.002.6 03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka b. Ba nja r	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Persentase	% %	100 100	81.763.78 2	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							waktu dan tepat mutu						dokumen SPIP sesuai ketentuan				
3	2	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.641.603	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.641.603	
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000	
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	4.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	5.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Perubahan DPA-SKPD						Perubahan DPA-SKPD				
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	16.465.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.874.879	
3	2	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	19	13.582.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	19	14.722.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						nja r	Perangkat Daerah					nja r	Perangkat Daerah				
3	2	0	2.	00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	8.424.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	4.899.300	
3	2	0	2.	00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	8.424.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Banjarnegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	0	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarn	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	20	7.366.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarn	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	20	7.366.000	
3	2	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD	Kab. Banjarn	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD	Dokumen	6	10.260.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Banjarn	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD	Dokumen	6	10.260.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					dan Renja PD		dan Renja PD yang disusun						dan Renja PD yang disusun				
3	2	0	2.	00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	1	6.840.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	1	0	
3	2	0	2.		Administrasi Keuangan	Kab. Banjarnegara	Tersusunnya dokumen keuangan	%	100	30.978.749.801	Administrasi Keuangan	Kab. Banjarnegara	Persentase laporan keuangan	%	100	31.397.492.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Perangkat Daerah	nja r	perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu				Perangkat Daerah	nja r	sesuai ketentuan				
3	2	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/ Bula n	359 8	30.745.39 0.801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	3598	30.938.80 0.000	
3	2	0	2.	00	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	1	215.359.0 00	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	1	440.692.5 00	
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Lapor an	1	10.000.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Ka b. Ba nj a r	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Lapor an	1	10.000.00 0	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Akhir Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Akhir Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	8.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase laporan pengelolaan dan pengamatan aset sesuai ketentuan	%	100	8.000.000	
3	2	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	8.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	8.000.000	
3	2	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	%	100	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas	%	100	78.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjarr	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjarr	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	78.000.000	
3	2	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjarr	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	%	100	1.750.528.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjarr	Persentase administrasi umum yang berkualitas	%	100	1.073.487.900	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Banjarr	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Paket	1	33.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Banjarr	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Paket	1	33.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan				
3	2	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	210.092.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	209.192.500	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	118.798.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	118.798.000	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.637.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.997.400	
3	2	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	1	1.368.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	1	697.500.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD				Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD				
3	2	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	%	100	1.120.219.870	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Persentase laporan pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	725.421.000	
3	2	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	21	528.769.870	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	492.610.000	
3	2	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	160.835.000	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	160.835.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						nja r						nja r					
3	2	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ba nja r	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	71.976.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ba nja r	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	71.976.000	
3	2	0	2.	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ba nja r	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	358.639.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ba nja r	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	
3	2	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ba nja r	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	%	100	3.471.880.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ba nja r	Persentase jasa penunjang pelaksanaan umum yang berkualitas	%	100	3.125.700.000	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi	Ka b. Ba	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	456.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Ka b. Ba	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	456.200.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					, Sumber Daya Air dan Listrik	nja r	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sumber Daya Air dan Listrik	nja r	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ka b. Ba nja r	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	13	3.015.680 .000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ka b. Ba nja r	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	13	2.669.500 .000	
3	2	0	2.	09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Ka b. Ba nja r	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	%	100	1.099.024 .400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Ka b. Ba nja r	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara sesuai kebutuhan	%	100	2.440.403 .270	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	685.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	685.500.000	
3	2	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	150.000.000	
3	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6	263.524.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6	1.604.903.270	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					Bangunan Lainnya		Dipelihara/ Direhabilitasi				Bangunan Lainnya		Dipelihara/ Direhabilitasi				
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAA N DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Ka b. Ba nja	Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Persentase pertumbuhan populasi ternak besar Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas	% % %	0.11 1.80 4.00	1.980.226 .900	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Ka b. Ba nja	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas	Komo ditas %	0 0 3 4	2.381.432 .500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
										(sertifikasi, pengemasan, dll) Persentase kelompok tani yang memanfaatka n sarana produksi pertanian sesuai standar							

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	01	Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian	Ka b. Ba nja	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pendampinga n penggunaan sarana pendukung pertanian	%	100	1.433.599 .900	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Ka b. Ba nja	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana tanaman pangan dan hortikultura tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standar	%	100 4	1.951.289 .000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
													Persentase ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai standar				
3	2	0	2.	00	Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Ka b. Ba nja	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Lapor an	3	314.999.9 00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Ka b. Ba nja	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Lapor an	3	896.944.0 00	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Teknologi dan Spesifik Lokasi		Teknologi dan Spesifik Lokasi				dan Spesifik Lokasi		Teknologi dan Spesifik Lokasi				
3	2	0	2.	00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	398.600.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	376.880.000	
3	2	0	2.	00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Banjara	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1	100.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Banjara	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1	100.000.000	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Penggunaan Sarana	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana	Laporan	1	100.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana	Laporan	1	71.337.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Pascapanen Perkebunan		pascapanen Perkebunan				Pascapanen Perkebunan		pascapanen Perkebunan				
3	2	0	2.	00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Banjara	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	4000	300.000.000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Banjara	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	4000	324.318.000	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	195.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	170.219.000	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan	1	25.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan	1	11.590.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					Hortikultur a												
3	2	0	2.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Ka b. Ba nja	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tana man	%	100	256.827.0 00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/K ota	Ka b. Ba nja	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standa Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tana man	%	4 100	222.620.0 00	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	129.800.00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	103.330.500	
3	2	0	2.	00	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjara	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	127.027.00	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Banjara	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	119.289.500	
3	2	0	2.	03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Kab. Banjara	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	%	100	207.200.00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjara	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit	%	100	161.810.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Kabupaten/Kota								ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				
3	2	0	2.	00	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	177.200.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	150.230.000	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	Laporan	1	30.000.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	Laporan	1	11.580.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Pakan Ternak		Pakan Ternak yang Beredar				Pakan Ternak		Pakan Ternak yang Beredar				
3	2	0	2.		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjara	Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan / ternak	%	100	82.600.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjara	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak	%	100	45.713.500	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Laporan	1	82.600.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Laporan	1	45.713.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Pakan/Pakan		HPT, Bahan Pakan/Pakan				Pakan/Pakan		HPT, Bahan Pakan/Pakan				
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Banjarnegara	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	% %	10 2	5.412.752.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Banjarnegara	Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian	% % %	0 0 4	4.439.084.184	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
													sesuai standar				
3	2	0	2.		Pengemban gan Prasarana Pertanian	Ka b. Ba nja	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta	Doku men	1	321.200.0 00	Pengembang an Prasarana Pertanian	Ka b. Ba nja	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam peta Persentase kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terkelola	%	16	683.760.6 00	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Banjara	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	71.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Banjara	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	64.542.000	
3	2	0	2.	00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Kab. Banjara	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	250.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Kab. Banjara	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	619.218.600	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota		n/LCP2B yang dikelola				Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota		n/LCP2B yang dikelola				
3	2	0	2.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjara	Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian	%	100	4.664.952.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Banjara	Persentase prasarana air yang dikelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelolar Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian	% %	42500	3.351.354.900	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Banjara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Banjara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit	0	0	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					an Embung Pertanian		dan Dipelihara				Embung Pertanian		dan Dipelihara				
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Banjara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	576.141.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Banjara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	1.178.571.000	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Banjara	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Banjara	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Banjara	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	424.494.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Banjara	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	396.581.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Banjara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	1.590.449.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Banjara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	354.385.400	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	709.191.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Banjara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	702.652.000	
3	2	0	2.	00	Rehabilitasi dan	Kab.	Jumlah Jaringan	Unit	2	506.587.000	Rehabilitasi dan	Kab.	Jumlah Jaringan	Unit	2	476.187.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Banjara	Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi				Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Banjara	Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi				
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Banjara	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	588.597.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Banjara	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	0	
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan	Kab. Banjara	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi	Unit	1	269.493.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan	Kab. Banjara	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi	Unit	1	242.978.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					an dan operasionalisasi Puskesmas		dan dipelihara serta beroperasi				operasionalisasi Puskesmas		dan dipelihara serta beroperasi				
3	2	0	2.	00	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Banjara	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Banjara	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	0	
3	2	0	2.		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah	Kab. Banjara	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah	Laporan	2	426.600.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah	Kab. Banjara	Persentase prasarana air yang terkelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelola Terlaksananya	% %	42 50 0	403.968.684	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota		a Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				
3	2	0	2.	00	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjara	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	350.000.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Banjara	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	336.222.000	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Wilayah Sumber	Kab.	Jumlah Pengawasan Wilayah	Laporan	1	76.600.000	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit	Kab.	Jumlah Pengawasan Wilayah	Laporan	1	67.746.684	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					Bibit Ternak dan Rumpun/G alur Ternak	Ba nja	Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Gal ur Ternak				Ternak dan Rumpun/Gal ur Ternak	Ba nja	Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Gal ur Ternak				
3	2	0			PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINE R	Ka b. Ba nja	Persentase jenis produk olahan yang dikembangka n Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar	% % %	20 78 0.30	1.250.032 .819	PROGRAM PENGENDAL IAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKA T VETERINER	Ka b. Ba nja	Persentase jenis produk olahan yang dikembangka n Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi Persentase angka kematian ternak	% % % %	0 0 0 0.29	1.234.811 .019	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Ka b. Ba nja	Persentase penurunan angka kematian ternak besar	%	0.30	254.997.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Ka b. Ba nja	Persentase penurunan angka kematian ternak besar Persentase penurunan penyakit hewan menular zoonosis dan non zoonosis	%	0.29	254.565.000	
3	2	0	2.	00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1	Ka b. Ba nja	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit	Lapor an	1	254.997.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	Ka b. Ba nja	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit	Lapor an	1	254.565.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(satu) Daerah Kabupaten/ Kota		hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				Kabupaten/Kota		hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				
3	2	0	2.		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjara	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU	Ekor Ekor	1550110000	281.764.439	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjara	Jumlah ternak besar yang dipotong di RPH Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPU Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Ekor Ekor %	0078	280.264.439	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	1	281.764.439	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Banjara	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	1	280.264.439	
3	2	0	2.	03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	Kab. Banjara	Jumlah hewan yang ditangani	Ekor	1550	405.855.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	Kab. Banjara	Jumlah hewan yang ditangani Persentase peningkatan	Ekor %	0100	400.600.500	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		pelayanan jasa medik veteriner				
3	2	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Banjara	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	60	192.857.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Banjara	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	60	192.857.000	
3	2	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Banjara	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1550	212.998.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Banjara	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1550	207.743.500	
3	2	0	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Kab. Banjara	Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan	Kegiatan %	378	232.416.480	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Banjara	Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan yang dilaksanakan	Kegiatan %	078	224.381.180	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Masyarakat Veteriner		Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)						Persentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)				
3	2	0	2.	00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	203.916.980	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Banjara	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	197.563.480	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Unit Usaha	Kab. Banjara	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi	Unit Usaha	4	28.499.500	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Banjara	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi	Unit Usaha	4	26.817.700	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Produk Hewan		terhadap penerpan cara yang baik						terhadap penerpan cara yang baik				
3	2	0	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kab. Banjara	Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	%	100	74.999.900	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kab. Banjara	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan	%	780	74.999.900	
3	2	0	2.	00	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan	Kab.	Jumlah unit usaha yang dibina	Unit	1	74.999.900	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan	Kab.	Jumlah unit usaha yang dibina	Unit	1	74.999.900	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					an Hewan pada Unit Usaha	Ba nja	terhadap penerapan kesejahteraan hewan				n Hewan pada Unit Usaha	Ba nja	terhadap penerapan kesejahteraan hewan				
3	2	0			PROGRAM PENGENDA LIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Ka b. Ba nja	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan	% %	6.40 5.00	2.055.800 .000	PROGRAM PENGENDAL IAN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN	Ka b. Ba nja	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan Persentase	% % % %	0 0 16 5 5	4.138.393 .020	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
													kerusakan bencana tanaman perkebunan Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura Persentase kerusakan bencana tanaman pangan				
3	2	0	2.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Kab. Banjara	Presentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	%	80	2.055.800 .000	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Kab. Banjara	Presentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian Rasio	% % %	0 26 69 70	4.138.393 .020	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
													kebakaran lahan pertanian Rasio luas area pengendalian dan penanggulang an bencana Dampak Perubahan Iklim Rasio luas area pengendalian OPT				
3	2	0	2.	00	Pengendalia n Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Ka b. Ba nja	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Ha	700	355.633.1 00	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Ka b. Ba nja	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Ha	2500	982.942.1 00	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				Hortikultura, dan Perkebunan		Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				
3	2	0	2.	00	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjara	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	300	203.560.500	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Banjara	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	300	370.060.500	
3	2	0	2.	00	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Kab. Banjara	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Ha	700	474.606.400	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	Kab. Banjara	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Ha	1700	903.094.420	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
3	2	0	2.	00	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Banjara	Jumlah Wilayah Penanggulang an Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	1	22.000.000	Penanggulan gan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Banjara	Jumlah Wilayah Penanggulang an Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	1	11.805.000	
3	2	0	2.	00	Penanggulan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultur	Kab. Banjara	Jumlah penanggulang an pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura	Laporan	1	1.000.000.000	Penanggulan gan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Banjara	Jumlah penanggulang an pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura	Laporan	1	1.870.491.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					a dan Perkebunan		dan perkebunan						dan perkebunan				
3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Banjara	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	15	334.456.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Banjara	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	24	300.579.700	
3	2	0	2.	01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjara	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	10	150.456.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjara	Persentase usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	146.311.700	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
													Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				
3	2	0	2.	00	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	6	20.000.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	6	22.773.100	
3	2	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan	Kab. Banjara	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	130.456.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan	Kab. Banjara	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	123.538.600	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					Izin Usaha Pertanian						Izin Usaha Pertanian						
3	2	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemelihara an Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pas ar Hewan, Rumah Potong Hewan	Ka b. Ba nja	Persentase Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Potong Hewan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	50	84.000.00 0	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Ka b. Ba nja	Persentase usaha peternakan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Persentase Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Potong Hewan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	40	73.122.00 0	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjara	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	0	0	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Banjara	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	0	0	
3	2	0	2.	00	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha	Kab. Banjara	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong	Laporan	1	84.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah	Kab. Banjara	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong	Laporan	1	73.122.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					Rumah Potong Hewan		Hewan yang Diawas				Potong Hewan		Hewan yang Diawas				
3	2	0	2.		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan	%	75	100.000.0 00	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Persentase usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan Persentase usaha usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapatkan pembinaan	%	75	81.146.00 0	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
													dan pengawasan				
3	2	0	2.	00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Lapor an	1	55.000.00 0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Lapor an	1	46.824.00 0	
3	2	0	2.	00	Pengawasa n Pelaksanaa n Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Lapor an	1	45.000.00 0	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Ka b. Ba nja	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Lapor an	1	34.322.00 0	
3	2	0			PROGRAM PENYULUH	Ka b.	Persentase kelompok	%	6.00	2.755.006 .852	PROGRAM PENYULUHA	Ka b.	Persentase kelompok	%	6.00	4.011.629 .266	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	
					AN PERTANIAN	Ba nja	tani yang mandiri				N PERTANIAN	Ba nja	tani yang mandiri				
3	2	0	2.		Pelaksanaa n Penyuluhan Pertanian	Ka b. Ba nja	Persentase Kelompok tani yang meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya	%	45.0 0	2.755.006 .852	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Ka b. Ba nja	Persentase BPP yang mendapatkan sarana penunjang penyelenggar aan penyuluhan pertanian Persentase Kelembagaan penyuluhan dan petani mandiri Persentase SDMP yang meningkat kapasitasnya Persentase Kelompok tani yang	% % % %	45 48 80 0	4.011.629 .266	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
													meningkat skor kemampuan kelas kelompok taninya				
3	2	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjara	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	720.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjara	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	1.125.800.000	
3	2	0	2.	00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjara	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	130	794.652.472	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Banjara	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	130	671.839.266	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	2	0	2.	00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	13	243.936.680	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	13	232.435.980	
3	2	0	2.	00	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kab. Banjara	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	120	310.577.200	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Kab. Banjara	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	60	1.363.365.660	
3	2	0	2.	00	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	20	685.840.500	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Banjara	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	10	618.188.360	

Adapun Rancangan akhir RKPD Perubahan Dinas Pertanian tahun 2025 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rancangan Akhir RKPD Perubahan Dinas Pertanian tahun 2025 Kabupaten Banjar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERTANIAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3	URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3.27	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANIAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				76 %	83 %	38.628.405. 074	38.553.743. 273	38.930.268. 452
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan				100 %	100 %	100.002.603	100.002.603	81.763.782

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah	evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Persentase dokumen SPIP sesuai ketentuan								
3.27.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokume n	3 Dokume n	10.641.603	10.641.603	10.641.603

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000	4.000.000	4.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000	4.000.000	4.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen DPA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				3 Laporan	3 Laporan	16.465.000	16.465.000	15.874.879

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
3.27.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	13.582.000	13.582.000	14.722.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata				1 Dokume n	1 Dokume n	8.424.000	8.424.000	4.899.300

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
3.27.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan				1 Data	0 Data	8.424.000	8.424.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0 010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Per									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan				20 Berita Acara	20 Berita Acara	7.366.000	7.366.000	7.366.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0 011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan				6 Dokume n	6 Dokume n	10.260.000	10.260.000	10.260.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Renja PD yang disusun								
3.27.01.2.01.0 013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pe									
		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat				1 Berita Acara	0 Berita Acara	6.840.000	6.840.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	30.978.749. 801	30.973.088. 000	31.397.492. 500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3598 Orang /bulan	3598 Orang /bulan	30.745.390. 801	30.744.700. 000	30.938.800. 000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	215.359.000	210.388.000	440.692.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
3.27.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan				18 Laporan	18 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD								
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan pengelolaan dan pengamatan aset sesuai ketentuan				100 %	100 %	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas				100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	78.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000	100.000.000	78.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang berkualitas				100 %	100 %	1.750.528.4 00	1.477.528.4 00	1.073.487.9 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi istrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	210.092.900	210.092.900	209.192.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	118.798.000	118.798.000	118.798.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.637.500	20.637.500	14.997.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.368.000.000	1.095.000.000	697.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	1.120.219.870	1.120.219.870	725.421.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21	1 Unit	528.769.870	528.769.870	492.610.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	160.835.000	160.835.000	160.835.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	71.976.000	71.976.000	71.976.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	358.639.000	358.639.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelaksanaan umum yang berkualitas				100 %	100 %	3.471.880.0 00	3.675.880.0 00	3.125.700.0 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	456.200.000	456.200.000	456.200.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	3.015.680.000	3.219.680.000	2.669.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.099.024.4 00	1.099.024.4 00	2.440.403.2 70

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	685.500.000	685.500.000	685.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	263.524.400	263.524.400	1.604.903.270

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll) Persentase kelompok tani yang				0.11% 1.80% 4.00%	0 0 3 Komodit as 4%	1.980.226.9 00	3.509.226.9 00	2.381.432.5 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		memanfaatkan sarana produksi pertanian sesuai standar								
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana tanaman pangan dan hortikultura tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standar Persentase ketersediaan				100 %	100% 4%	1.433.599.900	2.987.599.900	1.951.289.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai standar								
3.27.02.2.01.0 001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	314.999.900	1.899.999.9 00	896.944.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	398.600.000	392.600.000	376.880.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	1 Ton	100.000.000	100.000.000	100.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	90.000.000	71.337.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				4000 Batang	4000 Batang	300.000.000	300.000.000	324.318.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.0 014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	185.000.000	170.219.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.0 016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	20.000.000	11.590.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standa Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman				100 %	4% 100% 0	256.827.000	256.827.000	222.620.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02.002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokume n	2 Dokume n	129.800.000	129.800.000	103.330.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02.003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokume n	1 Dokume n	127.027.000	127.027.000	119.289.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				100 %	100% 0	207.200.000	192.200.000	161.810.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03.001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	177.200.000	167.200.000	150.230.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03.002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	25.000.000	11.580.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				100 %	100% 0	82.600.000	72.600.000	45.713.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.05.006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	82.600.000	72.600.000	45.713.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Persentase peningkatan pembangunan/ rehabilitasi prasarana pertanian Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian sesuai standar				2% 10%	0 0 4%	5.412.752.0 00	4.974.155.0 00	4.439.084.1 84
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam				1 Dokume n	0 Dokume n 16%	321.200.000	321.200.000	683.760.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		peta Persentase kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terkelola								
3.27.03.2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	71.200.000	71.200.000	64.542.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.01.0 015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertar									
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan				1 Dokume n	1 Dokume n	250.000.000	250.000.000	619.218.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola								
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana air yang terkelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelolar				100 %	42% 50% 0	4.664.952.0 00	4.226.355.0 00	3.351.354.9 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian								
3.27.03.2.02.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	4 Unit	576.141.000	726.141.000	1.178.571.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	2 Unit	424.494.000	424.494.000	396.581.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun,				3 Unit	1 Unit	1.590.449.000	1.590.449.000	354.385.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Direhabilitasi dan Dipelihara								
3.27.03.2.02.0 009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	709.191.000	709.191.000	702.652.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0 010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	506.587.000	506.587.000	476.187.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,				1 Unit	0 Unit	588.597.000	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		direhabilitasi dan dipelihara								
3.27.03.2.02.0 014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas									
		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	269.493.000	269.493.000	242.978.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana air yang terkelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelolar Terlaksananya				2 Laporan	42% 50% 0	426.600.000	426.600.000	403.968.684

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.03.2.03.001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	350.000.000	336.222.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.03.002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	76.600.000	76.600.000	67.746.684

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jenis produk olahan yang dikembangkan Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi				20% 0.30% 78%	0 0 0 0.29%	1.250.032.8 19	1.250.032.8 19	1.234.811.0 19

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase angka kematian ternak								
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penurunan angka kematian ternak besar Persentase penurunan penyakit hewan menular zoonosis dan non zoonosis				0.30 %	0 0.29%	254.997.000	254.997.000	254.565.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04.2.01.008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	254.997.000	254.997.000	254.565.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	1 laporan	281.764.439	281.764.439	280.264.439
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa	Jumlah hewan yang ditangani				1550 Ekor	0 Ekor 100%	405.855.000	405.855.000	400.600.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase peningkatan pelayanan jasa medik veteriner								
3.27.04.2.03.0 001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				60 Laporan	60 Laporan	192.857.000	192.857.000	192.857.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04.2.03.002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1550 Laporan	1550 Laporan	212.998.000	212.998.000	207.743.500

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	203.916.980	203.916.980	197.563.480
3.27.04.2.04.0 010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	28.499.500	28.499.500	26.817.700
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan	Persentase produk peternakan yang				100 %	78% 0	74.999.900	74.999.900	74.999.900

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan								
3.27.04.2.05.0 003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha									
		Jumlah unit usaha yang dibina				1 Unit	1 Unit	74.999.900	74.999.900	74.999.900

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terhadap penerapan kesejahteraan hewan								
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor				5.00% 6.40%	0 0 16%	2.055.800.0 00	2.225.800.0 00	4.138.393.0 20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GAN BENCANA PERTANIAN	tanaman pangan dan hortikultura Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan Persentase kerusakan bencana tanaman perkebunan Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura Persentase kerusakan bencana tanaman pangan					5% 5%			
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan	Presentase pelaksanaan kegiatan				80 %	0% 26%	2.055.800.0 00	2.225.800.0 00	4.138.393.0 20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Rasio kebakaran lahan pertanian Rasio luas area pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim Rasio luas area pengendalian OPT					69% 70%			
3.27.05.2.01.0 001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Luas Serangan Organisme				700 Ha	2500 Ha	355.633.100	550.633.100	982.942.100

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan								
3.27.05.2.01.0 002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim				300 Ha	300 Ha	203.560.500	188.560.500	370.060.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani								
3.27.05.2.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan				700 Ha	1700 Ha	474.606.400	469.606.400	903.094.420

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTAS RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
3.27.05.2.01.0 004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis									
		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam				1 laporan	1 laporan	22.000.000	22.000.000	11.805.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang Bersifat Zoonosis								
3.27.05.2.01.0 006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
		Jumlah penanggulangan pasca bencana				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.0 00	995.000.000	1.870.491.0 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan								
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				15%	24 %	334.456.000	331.856.000	300.579.700

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				6 Dokume n	6 Dokume n	20.000.000	20.000.000	22.773.100
3.27.06.2.01.005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTAS TAHUN OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				4 Laporan	4 Laporan	130.456.000	130.456.000	123.538.600
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi	Persentase usaha peternakan yang				50 %	40% 0	84.000.000	81.400.000	73.122.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0 Dokume n	0 Dokume n	0	0	0
3.27.06.2.02.0 005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawas				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000	81.400.000	73.122.000
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko,	Persentase usaha pengecer obat				75 %	75% 0	100.000.000	100.000.000	81.146.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan Persentase usaha usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan								
3.27.06.2.03.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	55.000.000	46.824.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hewan yang Memenuhi Komitmen								
3.27.06.2.03.002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	34.322.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hewan yang Diawasi								
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri				6.00%	6.00%	2.755.006.8 52	3.170.806.8 52	4.011.629.2 66

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	720.000.000	1.160.800.0 00	1.125.800.0 00
3.27.07.2.01.0 002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				130 Unit	130 Unit	794.652.472	774.652.472	671.839.266
3.27.07.2.01.0 003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				120 Orang	60 Orang	310.577.200	305.577.200	1.363.365.6 60
3.27.07.2.01.0 009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				20 Dokume n	10 Dokume n	685.840.500	685.840.500	618.188.360
J U M L A H								52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141

2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat melalui Musrenbang 2025 dilaksanakan dengan mekanisme RKPD online. Berbagai usulan masyarakat mulai dari tingkat desa diproses secara online dan diaring pada tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan tahapan penyelarasan tingkat kabupaten (Forum SKPD lingkup Dinas). Musrenbang Tahun 2025 terdapat perbaikan mekanisme, dimana pagu maksimal kecamatan pada setiap SKPD sudah ditentukan, sehingga pembahasan usulan akan lebih baik sesuai dengan usulan kecamatan dengan pagu yang umumnya sesuai dengan yang ditetapkan. Demikian pula dengan proses musrenbang, Kriteria Teknis dari SKPD sudah disosialisasikan pada awal proses Musrenbang, namun demikian masih banyak usulan masyarakat yang tidak mengacu pada kriteria teknis tersebut. Sehingga pada saat Musrenbang Kecamatan, dilakukan diskusi antara Tim Musrenbang Kabupaten (perwakilan SKPD) dengan delegasi desa agar sesuai dengan kriteria teknis. Penyelarasan akhir DSP Kecamatan dilakukan pada saat Forum SKPD dan pra Musrenbang. Selanjutnya usulan yang disetujui tersebut secara sistematis sudah merupakan bagian dari Renja SKPD hasil verifikasi yang merupakan hasil penggabungan kegiatan SKPD (*topdown*) dan usulan masyarakat hasil musrenbang (*bottom up*). Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Banjar

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Tidak adanya jalan tani membuat terhambatnya prosuksi tani	Aluh Aluh	Tanipah	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian panjang nya 500 meter	Aluh Aluh	Handil Bujur	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
3	Pembangunan DAM Parit	Untuk memudahkan kegiatan sehari-hari masyarakat dalam bertani maka diperlukan pembuatan parit sawah dengan volume 5 Hektar Pagu anggaran (Rp.500.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pengiiian jalan usaha tani dengan volume panjang 6000 m lebar 4 m, perkiraan anggaran 1.300.000.000	Aluh Aluh	Sungai Musang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	mayoritas masyarakat pekerjaan adalah petani khususnya petani padi, akan tetapi akses dalam melakukan usaha tersebut terkendala oleh jalan yang rusak dan sebagian belum ada	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil Muara	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	TIDAK ADA JALAN TANI DI DESA , MEMBUAT PETANI SANGAT SULIT KE TEMPAT	Aluh Aluh	Tanipah	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Mengingat luasnya wilayah dan pemukiman penduduk yang tersebar maka diperlukan akses jalan yang layak untuk memudahkan aktifitas masyarakat. Dengan luasnya wilayah maka diperlukan dana yang lebih banyak pula untuk membangun/merehabilitasi jalan yang ada. Dengan keterbatasan dana di desa kami mengusulkan untuk memohon bantuan sebagian Pembangunan/Rehabilitasi jalan titian dari pemerintah daerah di Lokasi RT 1 (dua titik lokasi) sepanjang 90 m dan 130 m	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		dengan perkiraan pagu total Rp210.000.00,-			
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan Jalan Usaha Tani, Panjang 5 km, perkiraan pagu Rp. 300.000.000	Aluh Aluh	Handil Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei-

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pertanian merupakan sektor yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar. Jalan usaha pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian. Oleh karena itu maka perlu dibangun JUT di RT 07 menuju persawahan warga dengan Panjang 1 km dengan pagu Rp1.000.000.000	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pengerukan tanah dan pengerasan badan jalan dengan batu bacekros untuk memudahkan pengangkutan hasil panen petani	Aluh Aluh	Labat Muara	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Untuk mempermudah aktivitas pertanian masyarakat maka perlu pembuatan siring dan pengisian badan jalan panjang 1,5 km lebar 2 m tinggi 15 cm. Pagu anggaran (Rp.500.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	belum ada jalan tani	Aluh Aluh	Bunipah	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Untuk melancarkan kegiatan pertanian masyarakat maka perlu pembangunan jalan usaha tani dengan volume p.2 m x 1.1000 m Pagu anggaran (Rp.500.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Pertanian volume 500 meter	Aluh Aluh	Tanipah	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei-
15	Gerakan penerapan sekolah lapang iklim	EMPAT KELAS TIDAK LAYAK	Aluh Aluh	Tanipah	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
16	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Untuk memudahkan kegiatan pertanian masyarakat maka perlu pengadaan mesin traktor 1 unit Pagu anggaran (Rp.100.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	Sasaran bantuan Pengadaan mesin traktor bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
17	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Kelompok tani belum punya mesin potong rumput	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil	Sasaran bantuan Pengadaan mesin potong rumput bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
18	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	sangat sulitnya pembelian pupuk non subsidi	Aluh Aluh	Podok	Sasaran bantuan Pengadaan pupuk non subsidi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
19	Pasar Murah	mahalnya harga kebutuhan dapur masyarakat	Aluh Aluh	Balimau	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor
20	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	KURANGNYA ALAT PERTANIAN	Aluh Aluh	Bunipah	Sasaran bantuan Pengadaan Alat Pertanian bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
21	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Desa pemurus merupakan desa pesisir laut dan banyak sawah di desa masih banyak kekurangan pekerjaan salah satu untuk mengurangi dan membuka lowongan kerja masyarakat harus bisa membuka usaha yakni dengan beternak telur itik dan mendapatkan penghasilan di desa pemurus masih kurang	Aluh Aluh	Pemurus	sasaran bantuan pengadaan itik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan	nya peternakan bebek dengan adanya permasalahan ini setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran di desa pemurus			memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
22	Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan	Masih banyaknya masyarakat dalam hal peternakan	Aluh Aluh	Simpang Warga	DITERIMA
23	Pemberian dan penyaluran bantuan pasca bencana pertanian	dalam 3 tahun terakhir ini desa handil bujur gagal panen	Aluh Aluh	Handil Bujur	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam Simluhtan 3. menyampaikan Proposal 4. Ada Kejadian bencana
24	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Para petani memerlukan alat spray untuk padi ,10 buah	Aluh Aluh	Bunipah	Sasaran bantuan Pengadaan alat spray bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
25	Bantuan sarana perlindungan	Para petani memerlukan alat spray untuk membebaskan	Aluh Aluh	Simpang Warga	Sasaran bantuan Pengadaan alat spray bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	tanaman pada hama yang bisa mengakibatkan gagal panen, 10 buah			tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
26	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Diperlukannya sebuah alat spray untuk tanaman agar terhindarnya dari serangan hama yang memungkinkan hasil panen buruk dan buruknya bisa gagalnya panen. volume 20 buah	Aluh Aluh	Balimau	Sasaran bantuan Pengadaan alat spray bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
27	Pelayanan Vaksinasi Hewan	Perlunya ada layanan vaksinasi hewan dikarenakan bebara peternak hewannya terkena penyakit	Aluh Aluh	Pemurus	Perlunya koordinasi dan sosialisasi antara peternakan dan petugas KESWAN Pada Dinas Pertanian ,supaya mendapatkan diagnosa penyakit atau vaksin apa yang harus diterapkan di wilayah tersebut.
28	Pelayanan Vaksinasi Hewan	Perlunya ada layanan vaksinasi hewan dikarenakan bebara peternak hewannya terkena penyakit	Aluh Aluh	Pemurus	Perlunya koordinasi dan sosialisasi antara peternakan dan petugas KESWAN Pada Dinas Pertanian ,supaya mendapatkan diagnosa penyakit atau vaksin apa yang harus diterapkan di wilayah tersebut.
29	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Petani gagal panen karena hama	Aluh Aluh	Simpang Warga Dalam	Sasaran bantuan Sarana produksi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
30	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan	sangat sulitnya pembelian pupuk.	Aluh Aluh	Handil Bujur	Sasaran bantuan Pengadaan Pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
31	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Untuk kelancaran kegiatan masyarakat dalam pertanian maka diperlukan pengadaan Bantuan obat hama dan pupuk bagi 3 kelompok tani dengan volume tanah 35 Hektar Pagu anggaran (Rp.500.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	Untuk Dam Parit, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi
32	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment	Perlunya pelatihan dan pembinaan bagi petani milenial didesa, volume 50 orang peserta dengan perkiraan anggaran 25.000.000	Aluh Aluh	Sungai Musang	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)				
33	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Bantuan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, dan obat-obatan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Volume 400 paket dengan anggaran 400.000.000	Aluh Aluh	Sungai Musang	Sasaran bantuan Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
34	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	Untuk meningkatkan tanaman kesehatan masyarakat maka diperlukan pengadaan bibit tanaman apotik hidup. Pagu anggaran (Rp.50.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	Sasaran bantuan Pengadaan bibit tanaman apotik hidup bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
35	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Ada beberapa masyarakat yg mengeluh tentang sulit nya pembelian pupuk di desa kuin kecil	Aluh Aluh	Kuin Kecil	Sasaran bantuan Pengadaan pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
36	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Beberapa tahun terakhir sering terjadi gagal panen padi. Hal ini berdampak buruk bagi sektor ekonomi masyarakat karena bertani padi merupakan	Aluh Aluh	Aluh Aluh Besar	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		mayoritas mata pencaharian warga desa. Gagalnya panen disebabkan faktor alam juga hama tikus yang menyerang persawahan. Bimbingan dari para ahli pertanian sangat diperlukan guna menemukan solusi yang tepat sehingga sektor pertanian dapat pulih kembali.			Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
37	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Untuk memudahkan kegiatan pertanian masyarakat maka diperlukan pengadaan alat semprotan elektrik dengan volume 60 unit. Pagu anggaran (Rp.60.000.000)	Aluh Aluh	Terapu	Sasaran bantuan Pengadaan alat semprotan elektrik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
38	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-	Petani sering dilanda musibah gagal panen yang diakibatkan oleh hama yang menyerang lahan pertanian di Desa Labat	Aluh Aluh	Labat Muara	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Menyampaikan Proposal 4. Ada rencana gerakan Pengendalian

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Muara, maka perlu bantuan obat-obatan dari Dinas Terkait			
39	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Kurangnya Sarana Alat Pemadam Kebakaran	Aluh Aluh	Bunipah	1. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Dinas Pertanian setiap tahun melaksanakan sosialisasi untuk KTPA 3. Menyampaikan Proposal
40	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Kurangnya Modal Para Petani Akibat Gagal Panen Selama 2 Tahun	Aluh Aluh	Bunipah	1. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Dinas Pertanian setiap tahun melaksanakan sosialisasi untuk KTPA 3. Menyampaikan Proposal
41	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Kurangnya pengetahuan kelompok tani	Aluh Aluh	Bunipah	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
42	Gerakan penerapan sekolah lapang iklim	Kurangnya pengetahuan warga terhadap pengaruh iklim	Aluh Aluh	Bunipah	Diterima, akan dilakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap warga / kelompok tani terhadap pengaruh iklim

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
43	Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan	belum adanya pembinaan secara maksimal terhadap pelaku usaha peternakan	Aluh Aluh	Bunipah	Diterima, akan dilakukan pembinaan
44	Pembinaan dan pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	kurangnya pengetahuan warga terhadap pembakaran lahan, sehingga sering terjadi warga membakar lahan	Aluh Aluh	Bunipah	1. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Dinas Pertanian setiap tahun melaksanakan sosialisasi untuk KTPA 3. Menyampaikan Proposal
45	Bantuan sarana produksi pertanian (Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen) Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	belum adanya kelompok ternak melinial	Aluh Aluh	Aluh Aluh Kecil	Sasaran bantuan Sarana Produksi bukan perorangan / RT / Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN-
46	Bantuan sarana produksi pertanian (Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	RMU di kelompok tani maju serentak sering rusak	Aluh Aluh	Bunipah	1. akan dilakukan pengecekan langsung ke lokasi RMU tsb 2. di cek kembali Bantuan RMU Tahun Berapa? Pembuatan Mesin Tahun Berapa? Perbaikan ke berapa? 3. Ajukan Proposal untuk Revitaliasasi Alat RMU

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				
47	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	Banyak petani belum berpengalaman dalam bidang pertanian maka dengan itu perlu Peningkatan pengetahuan dibidang pertanian. volume ada 10 orang	Aranio	Benua Riam	Perlu dijelaskan jenis pelatihannya dibidang pertaniannya apa?
48	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	SDM di desa artain masih rendah, pendidikan reltif rendah, belum ada pelatiham Pembuatan Obat Sadap Karet Kering. volume ada 5 orang	Aranio	Artain	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				
49	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah untuk Para Petani. di desa artain masih sangat minin. sedangkan petani sangat memerlukan itu	Aranio	Artain	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani.
50	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	dalam penggarapan lahan pertanian masih manual dengan menggunakan cangkul, hasilnya tidak maksimal, maka di perlukan Bantuan Alsintan dan Traktor , volume 2 Unit	Aranio	Bunglai	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
51	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Para petani di desa belangian masih belum berpengalaman dalam bidang pertanian, pengelolaan lahan, cara bertanama dll. dan perlunya (Pengadaan bibit dan pangan serta pupuk). volume ada 10 orang	Aranio	Belangian	Sasaran bantuan bibit pangan dan pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
52	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Seringnya terjadi kebakaran di hutan, hampir setiap tahun, sedangkan di desa rantau bujur belum memiliki alat pemadam kebakaran. maka dengan itu berlunya bantuan dari pemerintahan. Volume 1 paket	Aranio	Rantau Bujur	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
53	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program	Banyak petani belum berpengalaman dalam bidang pertanian maka dengan itu perlu Peningkatan pengetahuan dibidang pertanian. volume ada 20 orang	Aranio	Rantau Balai	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)				materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
54	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Para kelompok di desa Rantau balai masih belum berpengalaman dalam bidang peternakan, pembibitan/penggemukan, bahan makanan, , dll. dan perlunya (pelatihan dan bimbingan mengelola peternakan. volume ada 10 orang	Aranio	Rantau Balai	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
55	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Kurangnya Peralatan Pengolahan Lahan Pertanian	Aranio	Belangian	Sasaran bantuan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
56	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan menuju usaha pertanian yang jauh dan sulit dikeranakan belum adanya jalan yang layak di lewati, mengakibatkan belum maksimalnya produksi pertanian. Mempermudah petani membawa mengangkut hasil pertanian dan perkebunan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani.. Volume Jalan (2.000 x 3) m	Aranio	Bunglai	Jalan menuju usaha pertanian yang jauh dan sulit dikeranakan belum adanya jalan yang layak di lewati, mengakibatkan belum maksimalnya produksi pertanian. Mempermudah petani membawa mengangkut hasil pertanian dan perkebunan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani.. Volume Jalan (2.000 x 3) m
57	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani sekaligus Jalan ke Wisata Batu Balian, kondisi saat ini masih jalan setapak, dan kondasinya rusak, dalam pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan tidak bisa maksimal, mengalami kendala-kendala. agar dalam rangka meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perlunya peningkatan sarana/prasarana pada Jalan tersebut . Volume Jalan (3000 x 1) m.	Aranio	Pa'au	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
58	Pembangunan Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	untuk memaksimalkan hasil pertanian perlunya air yang cukup, sedangkan yang ada belum bisa di alirkan, maka diperlukan saluran irigasi atau pipa penyaluran air dengan panjang 300 m.	Aranio	Kala'an	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
59	Pembangunan Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	untuk memaksimalkan hasil pertanian perlunya air yang cukup, sedangkan yang ada belum bisa di alirkan, maka diperlukan saluran irigasi atau pipa penyaluran air dengan panjang 300 m.	Aranio	Kala'an	Untuk Pipa penyaluran air, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN
60	Pembangunan Jalan Usaha	Dalam pengangkutan hasil produksi pertanian sangat sulit, jalan masih setapak, jalan	Aranio	Kala'an	Untuk Pipa penyaluran air, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Tani/Jalan Produksi	tanah, becek dll, susah dalam mengangkutan pupuk ke lokasi, Untuk menghasilkan produksi secara maksimal diperlukan jalan yang nyaman untuk Mempermudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani. Volume (1.000 x 2) m			APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN
61	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Dalam pengangkutan hasil produksi pertanian sangat sulit, jalan masih setapak, jalan tanah, becek dll, susah dalam mengangkutan pupuk ke lokasi, Untuk menghasilkan produksi secara maksimal diperlukan jalan yang nyaman untuk Mempermudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani. Volume (1.000 x 2) m	Aranio	Kala'an	Dalam pengangkutan hasil produksi pertanian sangat sulit, jalan masih setapak, jalan tanah, becek dll, susah dalam mengangkutan pupuk ke lokasi, Untuk menghasilkan produksi secara maksimal diperlukan jalan yang nyaman untuk Mempermudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani. Volume (1.000 x 2) m
62	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani kondisi saat ini masih jalan setapak, dan kondasinya rusak, dalam pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan tidak bisa maksimal, mengalami kendala-kendala. agar dalam rangka meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perlunya	Aranio	Tiwingan	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		peningkatan sarana/prasarana pada Jalan tersebut . Volume Jalan (350 m)			Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
63	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	untuk Membantu masyarakat dalam pengelolaan perkebunan maka Pengadaan peralatan pengelolaan karet	Aranio	Benua Riam	Sasaran bantuan Pengadaan peralatan pengelolaan karet bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
64	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan,	Hasil petani produksi pertanian kurang, karena masih kekurangan sarana dan prasarana, baik untuk menyalurkan air dengan pipa	Aranio	Kala'an	Untuk Pipa penyaluran air, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	maupun dengan saluran tersier. panjang sakuran 300 m			diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN
65	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Peningkatan /Rehabilitasi /Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan panjang 3000 Meter , Lebar 2 Meter dan Tinggi 1,5 Meter. Pagu perkiraan Rp. 300.000.000.-	Astambul	Pasar Jati	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
66	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth	petani muda	Beruntung Baru	Babirik	Diterima, untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Enterpreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)				materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
67	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	petani milinial	Beruntung Baru	Babirik	Sasaran bantuan produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
68	Pembangunan Jalan Usaha	Peningkatan Jalan dengan panjang 1.258 m dan lebar 4 m x	Beruntung Baru	Muara Halayung	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Tani/Jalan Produksi	Tinggi 40 cm pagu perkiraan sebesar (Rp. 993.200.000)			koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei
69	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	kurang pendapatan masyarakat, perlu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, melalui Pengadaan Bibit Itik dan sebagainya volume 3000 ekor, pagu Rp. 300.000.000	Beruntung Baru	Jambu Burung	Sasaran bantuan pengadaan bibit bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
70	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Luasnya daerah pertanian di desa Rumpiang, dan perlunya alat panen padi yang modern, sehingga mempercepat memanin padi, dan mengurangi biaya yang besar waktu panen, karena alat panen yg didatangkan dari luar. Perkiraan biaya utk alat ALSINTAN COMBIEN SEKITAR Rp. 700.000.000 utk merek yanmar/kubota	Beruntung Baru	Rumpiang	Sasaran bantuan ALSINTAN COMBINE bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
71	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pengadaan alat pertanian seperti Komben, Hand Traktor dan Mesin Prontok Padi dengan perkiraan Pagu Anggaran Rp. 460.000.000,-	Beruntung Baru	Lawahan	Sasaran bantuan ALSINTAN seperti Combine, Hand Traktor dan Mesin Perontok Padi (Power Thresher) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
72	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Luasnya Daerah pertanian di Desa Rumpiang, sangat berharap sekali mendapatkan alsintan berupa HEND TRAKTOR untuk mempermudah para petani dalam pengulahan tanah persawahan sebelum mulainya masa tanan, dan dapat meringgankan biaya dan mempersingkat waktu dlm pengulahan tanah.	Beruntung Baru	Rumpiang	Sasaran bantuan ALSINTAN HAND TRAKTOR bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
73	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	pengadaan kombi 1 unit pagu perkiraan Rp. 500.000.000	Beruntung Baru	Babirik	Sasaran bantuan ALSINTAN COMBINE bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
74	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	pengadaan bibit unggul pertanian pagu perkiraan sebesar Rp 100.000.000	Beruntung Baru	Babirik	Sasaran bantuan pengadaan bibit bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
75	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Belum ada Pembuatan Jembatan JUT untuk memudahkan akses petani (Volume 4x6 m pagu perkiraan Rp.1000.000.000	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
76	Renovasi, Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan	Belum adanya fasilitas untuk sarana pelatihan berupa proyektor, laptop, kamera digital dan sound sistem (Volume 1 unit pagu perkiraan Rp.40.000.000)	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	Angkan dianggarkan pada tahun 2025 sesuai urgensi dan anggaran yang tersedia untuk Dinas Pertanian
77	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan	Belum ada pelatihan pengolahan pakan ternak kerbau untuk peternak kerbau desa Alalak Padang, Benua Anyar dan Makmur Karya (Volume 2 kali kegiatan pagu perkiraan Rp.31.000.000)	Cintapuri Darussalam	Cintapuri	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tenaga kerja di sektor pertanian)				
78	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Kurangnya sarana pertanian hand traktor dan combine desa tambak sirang laut kecamatan gambut	Gambut	Tambak Sirang Laut	sasaran bantuan hand Traktor roda 2 bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
79	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	untuk memberdayakan dan memajukan petani masyarakat	Gambut	Tambak Sirang Laut	sasaran bantuan Sarana produksi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
80	Pembangunan DAM Parit	Pagu Rp. 150.000.000 / volume panjang 20 meter	Karang Intan	Lok Tangga	bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi
81	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Rusaknya jalan usaha tani sepanjang 2 km mengakibatkan terkendalanya proses pertanian dan perkebunan masyarakat (Rp. 1.000.000.000)	Karang Intan	Padang Panjang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
82	Pembangunan Jalan Usaha	Rusaknya jalan usaha tani sehingga memperlambat proses	Karang Intan	Padang Panjang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Tani/Jalan Produksi	pertanian dan perkebunan masyarakat (Rp. 1.000.000.000)			koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
83	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pagu : Rp. 150.000.000 Volume : 1 Paket	Karang Intan	Sungai Alang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
84	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan usaha tani merupakan salah satu akses untuk menuju lahan pertanian, namun sampai saat ini masih banyak jalan usaha tani yang masih rusak atau tidak pernah diberikan pengerasan, sehingga perlu pembangunan jalan usaha tani dengan panjang 500 mtr lebar 2,5 meter dengan perkiraan pagu (Rp 125.000.000)	Karang Intan	Sungai Asam	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
85	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Karang Intan	Karang Intan	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
86	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan pertanian yang kurang memadai dapat menghambat distribusi hasil usaha tani dan menghambat perekonomian warga desa, maka diperlukan pembangunan jalan pertanian. Memerlukan anggaran sekitar Rp100.000.000 yang diusulkan kepada APBD Kabupaten.	Karang Intan	Pasar Lama	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
87	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	TIDAK CUKUPNYA APBDES UNTUK MENANGGUNG USULAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI	Karang Intan	Biih	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
88	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	memperluan pemukiman	Karang Intan	Mandiingin Timur	Perlunya penjelasan mengenai usulan yang dimaksud. Apakah ini mengenai Pemb. JUT atau Jalan Produksi. Jika ini untuk perluasan permukiman bukan wewenang dari Dinas Pertanian 1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
89	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Banyak petani yang mengeluh karena kondisi jalan yang licin dan becek	Karang Intan	Abirau	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
90	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	perlunya pembuatan pupuk kandang/Kompos volume 1 paket anggaran 50.000.000	Karang Intan	Balau	Petani/Kelompok Tani bisa mengajukan surat permohonan untuk dilatih tentang cara pembuatan pupuk kandang/kompos. Dinas akan fasilitasi untuk narasumber, sedangkan biaya lainnya diharapkan disediakan melalui dana desa

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
91	Pasar Murah	diperlukan pasar murah untuk masyarakat desa volume 1 paket anggaran 50.000.000	Karang Intan	Balau	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor
92	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	dibutuhkan pupuk bersubsidi untuk kelompok Tani volume 1 paket dengan anggaran 30.000.000	Karang Intan	Balau	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk pennebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani.
93	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pemberian Alat dan Mesin Pertanian 1 unit anggaran 28.000.000	Karang Intan	Balau	Sasaran bantuan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
94	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pemberian Pupuk organik dengan volume 1 paket anggaran 35.000.000	Karang Intan	Balau	Sasaran bantuan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
95	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Sering terjadinya karhutala (Rp. 100.000.000)	Karang Intan	Padang Panjang	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
96	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	sebagian kelompok tani belum memiliki alsintan, sehingga perlu bantuan berupa Hand traktor dan mesin perontok padi dengan perkiraan pagu (Rp 120.000.000)	Karang Intan	Sungai Asam	Sasaran bantuan Alsintan Hand Traktor bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
97	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Minim Nya Sarana Alsintan	Karang Intan	Sungai Besar	Sasaran bantuan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
98	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam,	1 Paket dengan Pagu Rp 50.000.000,-	Karang Intan	Panyambaran	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tabung pemadam api dan lainnya				
99	Sosialisasi dan pembinaan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman Perkebunan	1 Paket dengan Pagu Rp 50.000.000,-	Karang Intan	Panyambaran	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam simluhtan 3. Mengajukan Surat Permohonan
100	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Bantuan Alat Pemadam Kebakaran	Karang Intan	Karang Intan	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
101	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan	mayoritas masyarakat yang ada di desa pandak daun adalah pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan seperti menanam padi, menanam kembang dan lain sebagainya. oleh karenanya hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah kabuten/kota agar kiranya dapat membantu membimbing dan mensejahterakan para petani dan pekebun melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten banjar	Karang Intan	Pandak Daun	Diterima, untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tenaga kerja di sektor pertanian)				
102	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	di desa pandak daun terdapat sejumlah kelompok tani yang bisa di anggap kurang aktif, oleh karena itu agar kiranya pemerintah kanupaten/kota melalui dinas terkait dapat membimbing kelompok tani didesa pandak daun agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para anggota kelompok tani tersebut.	Karang Intan	Pandak Daun	Mengusulkan ke BPP agar mendapatkan pendampingan dari penyuluh untuk peningkatan kapasitas poktan (dapat diusulkan pada tahun 2024)
103	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	desa pandak daun belum mempunyai armada pemadam kebakaran, mengingat di setiap desa kiranya perlu mempunyai sarana prasarna terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran, maka dalam hal ini agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah setempat agar bisa memenuhi permintaan tersebut	Karang Intan	Pandak Daun	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
104	Pasar Murah	1000 Paket dengan Pagu Rp.70.000.000	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor
105	Sosialisasi dan pembinaan terhadap gangguan organisme pengganggu	PENINGKATAN WAWASAN PETANI DAN PEKEBUN DI DESA	Karang Intan	Biih	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok Tani Terdaftar dalam Simluhtan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tanaman Perkebunan				
106	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Banyak tanaman kebun masyarakat yang rusak karena kebakaran ditahun 2023	Karang Intan	Jingah Habang Hulu	Sasaran bantuan tanaman perkebunan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
107	Pemberian dan penyaluran bantuan pasca bencana pertanian	Tanaman masyarakat yang rusak karena kebakaran	Karang Intan	Jingah Habang Hulu	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam Simluhtan 3. menyampaikan Proposal 4. Ada Kejadian bencana
108	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Beberapa kelompok tani belum memiliki alat mesin perontok padi	Karang Intan	Sungai Landas	Sasaran bantuan Alsintan Perontok Padi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
109	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Pemanfaatan Pekarangan)	belum termanfaatkan lahan pekarangan dengan baik	Karang Intan	Mandiingin Timur	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
110	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	menumbuhkan minat pemuda dalam pengelolaan lahan pertanian	Karang Intan	Mandiingin Timur	Diterima, untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25
111	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi,	Adanya bibit yang unggul	Karang Intan	Abirau	Jenis bibit unggul yang diusulkan agar diperjelas. Sasaran bantuan bukan kepada perorangan / RT /Desa akan tetapi kepada kelompok tani dengan syarat sbb:

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
112	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Keterlambatan pertolongan pertama antisipasi Kebakaran Volume 1 Paket 15.000.000	Karang Intan	Balau	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
113	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	diperlukan Bibit Durian Unggul dengan volume 1 Paket 40.000.000	Karang Intan	Balau	Sasaran bantuan bibit durian unggul bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
114	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	diperlukannya Alsintan Traktor Pertanian dengan volume 1 Unit 15.000.000	Karang Intan	Balau	Sasaran bantuan Alsintan Traktor bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
115	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	perlunya bibit karet unggul volume 1 Paket dengan anggaran 50.000.000	Karang Intan	Balau	Sasaran bantuan bibit karet unggul bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb:

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Pternakan				
116	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Pternakan	1 Paket dengan pagu Rp 500.000.000,-	Karang Intan	Panyambaran	Sasaran bantuan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
117	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	1 Paket dengan Pagu Rp.50.000.000	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
118	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih,	Traktor Rotary Roda Dua	Kertak Hanyar	Manarap Baru	sasaran bantuan pengadaan alat dan mesin pertanian (TraktorR2, Traktor R4) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
119	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Traktor Rotary Roda Dua	Kertak Hanyar	Manarap Baru	sasaran bantuan pengadaan alat dan mesin pertanian (TraktorR2, Traktor R4) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
120	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Traktor Rotary Roda Dua	Kertak Hanyar	Manarap Baru	sasaran bantuan pengadaan alat dan mesin pertanian (TraktorR2, Traktor R4) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
121	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	pengadaan Traktor Rotary Roda Dua	Kertak Hanyar	Manarap Baru	asaran bantuan pengadaan alat dan mesin pertanian (TraktorR2, Traktor R4) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
122	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pengadaan Traktor Rotary Roda Empat	Kertak Hanyar	Manarap Baru	di tolak, petani dapat melakukan pinjam pakai pada UPTD mekanisasi alsintan di dinas pertanian kab banjar
123	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	pengadaan Traktor Rotary Roda Empat	Kertak Hanyar	Manarap Baru	di tolak, petani dapat melakukan pinjam pakai pada UPTD mekanisasi alsintan di dinas pertanian kab banjar
124	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	2m x 1500 m	Kertak Hanyar	Manarap Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei
125	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pengadaan itik 1000 ekor	Kertak Hanyar	Manarap Baru	asasan bantuan pengadaan itik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
126	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi,	pengadaan itik 1000 ekor	Kertak Hanyar	Manarap Baru	sasaran bantuan pengadaan itik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
127	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Traktor Rotary Roda Dua	Kertak Hanyar	Manarap Baru	asasan bantuan pengadaan alat dan mesin pertanian (TraktorR2, Traktor R4) bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
128	Pelayanan pemeriksaan	pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan Desa Murung Kenanga berjumlah 8 paket	Martapura	Murung Kenanga	Kegiatan Pelayanan pemeriksaan antemortem hari besar keagamaan setiap tahun dilaksanakan pada acara Hari Raya Kurban

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	antemortem hari besar keagamaan	kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000			atau Haul Guru Sekumpul, diharpkan untuk melaporkan ketersediaan Ternak Besar atau Sapi Terlebih Dahulu untuk dilakukan pemeriksaan awal sebelum disembelih (Ante Mortem) dan Pemeriksaan Sesudah di Sembelih (Post Mortem)
129	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Poktan belum memiliki SDM yang bisa ber inovasi	Martapura	Bincau	Mengusulkan ke BPP agar mendapatkan pendampingan dari penyuluh untuk peningkatan kapasitas poktan (dapat diusulkan pada tahun 2024)
130	Pasar Murah	JAUHNYA WARGA KEPASAR INDUK MARTAPURA	Martapura	Tungkaran	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor
131	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN	Martapura	Tungkaran	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
132	Sosialisasi dan pembinaan mengenai penanganan, pencegahan kebakaran lahan dan kebun ke perusahaan perkebunan dan	KURANGNYA PENGETAHUAN RELAWAN DALAM MENGATASI KEBAKARAN	Martapura	Tungkaran	1. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Dinas Pertanian setiap tahun melaksanakan sosialisasi untuk KTPA 3. Menyampaikan Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)				
133	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Bantuan Mesin/Alat Pemadam Kebakaran	Martapura	Jawa Laut	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
134	Bimbingan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kurangnya Pengetahuan di Bidang Kesehatan	Martapura	Jawa Laut	Untuk Kegiatan bimbingan teknis akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia di SKPD
135	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Dikarenakan Sulitnya nya akses air jadi apabila terjadi kebakaran harus mengambil sumber air yang agak jauh dari sungai jadi harus memerlukan selang damkar yang banyak agar lebih mudah mencapai titik api Diperlukan Sekitar 10 Roll dan perkiraan Biaya Sekitar Rp. 75.000.000	Martapura	Murung Keraton	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
136	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin	Dikarenakan sulitnya Mendapatkan air bersih maka Penyediaan Air sangat diperlukan dan membuat sumur bor dan mnggunakan Mesin	Martapura	Murung Keraton	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	pompa untuk menaikkan Air Bersihnya Perkiraan Biaya Sekitar Rp.6.000.000			
137	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Pemanfaatan Pekarangan)	Desa Tidak mempunyai Lahan	Martapura	Jawa Laut	Ditolak , Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
138	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	SUSAHNYA AKSES JALAN	Martapura	Tungkaran	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
139	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-	Banyak Rumput yang mengganggu pertumbuhan padi. Karena wilayah tunggul irang ini di rawa sehingga pada waktu akan menanam padi banyak	Martapura	Tunggul Irang	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	rumput atau gulma maka perlu di semprot dulu sehingga lahan tersebut bisa di tanami padi atau tanaman lainnya. Pemberian Benih padi yang bagus dengan musim tanam pendek supaya tidak terkena banjir .besaran anggaran Rp. 50.000.000			kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal
140	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Benih Padi yang sesuai dengan iklim di wilayah tunggul irang yang pada waktu tertentu akan banjir	Martapura	Tunggul Irang	sasaran bantuan pengadaan benih padi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
141	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Karena wilayah daerah tunggul irang kadang kala banjir sehingga petani akan mengalami dilema bertanam atau tidak. Supaya petani tanggap dengan situasi ini maka perlu diberi pelatihan tentang para petani mempunyai keahlian lebih dan	Martapura	Tunggul Irang	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		tidak hanya padi saja akan tetapi untuk tanaman lainnya			penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
142	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	PEMBUATAN JALAN TANI	Martapura	Pasayangan Barat	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
143	Pembangunan DAM Parit	tidak adanya dam parit atau embung desa	Martapura	Jawa Laut	Untuk Dam Parit, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi
144	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	JALAN YANG ADA SANGAT TIDAK LAYAK UNTUK DILEWATI BECEK DAN BERLUMPUR	Martapura	Bincau	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
145	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Tidak ada jalan untuk akses kepersawahan, dengan ukuran 500 X 3 Meter dengan pagu Rp. 500.000.000,00	Martapura Barat	Antasan Sutun	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
146	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	KONDISI JALAN BELUM ADA SIRING PERMANEN DAN APABILA HUJAN JALAN BECEK SEHINGGA SULIT UNTUK DIAKSES MASYARAKAT	Martapura Barat	Sei Raggas	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
147	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Seringnya Banjir dan Aktivitas Warga jadi Terganggu khususnya di bidang Pertanian	Martapura Barat	Sei Raggas Ulu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
148	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	1. tidak ada jalan tembus 2. jalan rusak 3. jalan menuju pertanian dan perkebunan sulit	Martapura Barat	Sei Batang Ilir	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
149	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan masih berupa tanah, saat hujan akan becek dan jika banjir akan tenggelam. Panjang 1.950 meter, lebar 3 meter dan tinggi 1 meter dengan pagu perkiraan Rp3.016.000.000	Martapura Barat	Sei Ranggas Hambuku	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
150	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan masih lembek, saat hujan becek dan saat banjir akan tenggelam. Rehabilitasi JUT Handil 6 dengan panjang 1.950 meter, Lebar 3 meter, dan tinggi	Martapura Barat	Sei Ranggas Hambuku	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		1 meter dengan pagu perkiraan 3.016.000			2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
151	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Bencana alam kekeringan lahan pertanian (Pengadaan mesin/pompa air pertanian 12 inch sebanyak 2 unit, pagu perkiraan sebesar Rp. 150.000.000,-)	Martapura Barat	Tangkas	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
152	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	Pengadaan Bibit Tanaman/Multi Kultura Masyarakat Petani, volume paket, pagu Rp. 30.000.000	Martapura Timur	Tambak Anyar Ulu	Sasaran bantuan Pengadaan bibit tanaman/multi kultura bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
153	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Pengadaan Pupuk bagi Kelompok Tani Masyarakat Petani, volume 200 kg, pagu Rp. 15.400.000	Martapura Timur	Tambak Anyar Ulu	Sasaran bantuan Pengadaan pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
154	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan	Bantuan Sarana dan pelatihan BPK PAKDAM, volume 1 paket, pagu Rp. 100.000.000	Martapura Timur	Pekauman Dalam	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya				
155	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Enterpreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	Pelatihan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan karena hasil pertanian belum maksimal, volume 1 paket kegiatan, pagu Rp. 50.000.000	Martapura Timur	Keramat Baru	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
156	Fasilitasi Usaha Pertanian (NIB) Petani Usaha Mikro	Pembangunan rumah bibit dan demplot kegiatan kelompok wanita tani/petani muda belum terakomodir karena kekurangan sarana dan prasarana, volume 5 x 10 m, pagu Rp. 50.000.000 (Prioritas Bidang Non Fisik)	Martapura Timur	Tambak Anyar	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
157	Pembinaan dan pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Pembangunan rumah Bibit Kegiatan Kelompok Wanita Tani/Petani Muda, volume 5x10	Martapura Timur	Dalam Pagar Ulu	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		M, pagu Rp. 50.000.000 (Prioritas Bidang Non Fisik)			syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
158	Pembinaan dan pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Pembangunan Rumah Bibit dan demplot untuk Kegiatan Kelompok wanita tani agar bisa terampil dan memanfaatkan lahan kosong, volume 5x10 Meter, pagu Rp.50.000.000 (Prioritas Bidang Non Fisik)	Martapura Timur	Tambak Anyar Ilir	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
159	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Satu unit Mesin Perontok Padi Kelompok Tani (Gapoktan) untuk Membantu Petani merontok Padi,dan menghemat biaya serta waktu bagi para petani, volume 1 unit, pagu Rp.9.000.000	Martapura Timur	Tambak Anyar Ilir	Sasaran bantuan Pengadaan Mesin Perontok Padi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
160	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan	Kegiatan Pengadaan Bibit Pertanian(Padi) & Alat pertanian, volume Bibit 1 Paket, pagu Rp. 70.000.000,-	Martapura Timur	Melayu Tengah	Sasaran bantuan Pengadaan Benih Padi dan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
161	Pembinaan dan pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Pembangunan rumah Bibit Kegiatan Kelompok Wanita Tani/Petani Muda, volume 5x10 M, pagu Rp. 50.000.000 (Prioritas 19)	Martapura Timur	Dalam Pagar Ulu	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
162	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani Samping Balai Desa Akar Baru karena jalan yang ada sudah rusak dan perlu pemasangan paving dan perluasan agar dapat dipergunakan untuk menuju akses ke-Polindes, volume Panjang : 120 Meter Lebear : Meter, pagu Rp. 100.000.000	Martapura Timur	Akar Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei-
163	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	siring beton dan peningkatan jalan usaha tani, volume Panjang = 1000 m siring kiri kanan, pagu Rp. 1.200.000.000	Martapura Timur	Keramat	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvei-
164	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Lanjutan Jalan Usaha Tani 1 dan 2 depan makam KH Salim Ma'ruf, volume 200 m, pagu Rp. 200.000.000	Martapura Timur	Pekauman Dalam	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
165	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembuatan Siring Jalan Usaha Tani Akses Para Petani Untuk Mengangkut Bibit Serta Hasil Pertanian Dan Sebagai Mobilitas Alat / Mesin Pertanian, volume 3.500 M, pagu Rp 2.400.000.000 (Prioritas Bidang Fisik)	Martapura Timur	Sei Kitano	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
166	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pelebaran jalan usaha tani karena belum adanya jalan pertanian yang memadai, volume 1000x5, pagu Rp. 500.000.000	Martapura Timur	Keramat Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
167	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Peningkatan jalan usaha tani dan jembatan desa, volume 2 Unit jembatan tani, pagu Rp. 150.000.000	Martapura Timur	Antasan Senior	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
168	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Peningkatan jalan usaha tani desa, volume panjang = 600 m lebar = 3 m, pagu Rp. 750.000.000	Martapura Timur	Antasan Senior	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
169	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan jalan/jembatan di area persawahan, volume 1 ls, pagu 200.000.000	Martapura Timur	Melayu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
170	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian, volume Panjang = 600 m lebar atas = 2.5 m lebar bawah = 3 m tinggi = 2 m, pagu Rp. 1.700.000.000, (Prioritas 18)	Martapura Timur	Keramat	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
171	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan Jalan Usaha tani pertanian, volume Panjang = 600 m lebar atas = 2.5 m lebar bawah = 3 m tinggi = 2 m, pagu Rp. 1.700.000.000, (Prioritas Bidang Fisik)	Martapura Timur	Keramat	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
172	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	kebakaran menjadi bencana yang luar biasa pada tahun lalu yang merugikan sebagian besar warga pematang danau. sebagai pencegahan kami memerlukan alat pemadam yang mempuni. anggaran yang diperlukan kurang lebih Rp 110.000.000	Mataraman	Pematang Danau	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
173	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	i Desa Pematang Danau telah dibentuk Tim Satgas Penanggulangan Bencana, akan tetapi untuk peralatan belum ada. Sehingga Tim Satgas masih menggunakan alat seadanya ketika terjadi musibah, contohnya musibah kebakaran satgas menggunakan Tank Semprot rumput sementara wilayah pemukiman warga jauh dari sumber air dan medan yang sulit dilalui oleh kendaraan (mobil) dan hanya bisa dengan sepeda motor. dengan pagu anggaran (Rp.200.000.000)	Mataraman	Pematang Danau	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
174	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	1. Jalan lingkungan Pedesaan yang belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan sama sekali 2. Kurang lancarnya mobilitas warga masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai seorang petani dalam mengakses wilayah perkebunan / perladangan khususnya persawahan 3. Jalan Usaha Tani yang sudah ada masih rawan penggerusan oleh curah hujan yang tinggi 4. Terbatasnya biaya dana desa untuk pembangunan ini	Mataraman	Takuti	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
175	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	1. Meningkatkan drainase jalan di Desa Takuti, RT 001 terbus RT 002 untuk mengurangi genangan air dan memastikan kelancaran lalu lintas. 2. Mencegah kerusakan jalan akibat air yang menggenang. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan.	Mataraman	Takuti	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
176	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	akses jalan usaha tani yang sekarang sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dikarenakan tertutup oleh air dan rumput liar yang lebat. perlu adanya pembangunan untuk menanggulangi akses keluar masuk para petani, terutama pada saat musim penghujan. diperkirakan dana yang diperlukan yaitu Rp 150.000.000	Mataraman	Pematang Danau	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
177	Pembangunan Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	Untuk menangani penanggulan air di musim kemarau bagi kesejahteraan para petani di Rt 001 Rp118.450.000	Mataraman	Bawahan Seberang	Untuk Pipa penyaluran air, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN
178	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jalan yang rusak ketika musim hujan	Mataraman	Bawahan Selan	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
179	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Di Desa mataraman Khusus nya di RT 004 akses menuju sawah sangat lah tidak layak untuk dijalani oleh warga setempat khusus nya bagi petani...dan apabila musim panen maka petani kesulitan untuk membawa padi hasil panennya...maka dari itu kami dari pemerintahan desa mataraman mengusulkan pembuatan jalan usaha tani	Mataraman	Mataraman	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		berupa semen cor yang panjangnya 500 meter dan lebar 2 meter dengan kisaran harga Rp. 550.000.000,00			Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
180	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pentingnya manfaat Jalan Usaha Tani sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi petani. (Panjang 700 Meter Lebar 1 Meter, Perkiraan Pagu Rp. 250.000.000)	Mataraman	Simpang Tiga	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey-
181	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jalan yang ada di Desa Bawahan Pasar yang menyambungkan ke Desa Surian, masalah dalam keadan yang kurang baik, jalan apabila hujan menjadi becek dan licin menyebabkan pengguna	Mataraman	Bawahan Pasar	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		jalan lebih berhati-hati dalam melewati jalan tersebut, dan di gunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panennya, keadaan jalan ini panjang sekitar sekitar 800-1000 meter dengan lebar jalan 3 meter, untuk pembuatan jalan ini dengan anggaran Rp. 500.000.000,-			2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
182	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Diperlukan Bantuan Sarana Produksi Pertanian berupa Benih, Pupuk Non Subsidi dan Obat-obatan dengan perkiraan pagu Rp. 50.000.000	Mataraman	Simpang Tiga	DI TOLAK Alokasi pupuk bersubsidi akan di alokasikan pada tahun 2025 keseluruh kelompok tani melalui dana APBN melalui mekanisme penyusunan RDKK (rencana Definitif kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi. untuk bantuan pupuk non subsidi (komoditas padi) di usulkan pada kegiatan reguler tanaman pangan (paket benih dan pupuk) dari dana APBN (mekanisme pengusulan dana APBN melalui Penyuluh pertanian)
183	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth	berbagai dampak positif yang bisa diperoleh dari perkembangan teknologi, belum berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang ada, sehingga peningkatan sumber daya manusia merupakan hal	Mataraman	Baru	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Enterpreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	yang sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produktifitas terutama dibidang pertanian. sasaran pemuda usia 18-35 tahun sebanyak 50 org dengan pagu Rp 10.000.000			penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
184	Sosialisasi dan pembinaan mengenai penanganan, pencegahan kebakaran lahan dan kebun ke perusahaan perkebunan dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi akibat reaksi alam maupun human error. Sejauh ini, kebakaran yang terjadi pencetus terbanyak justru akibat kelalaian dan ketidak tahuan manusia. Pengetahuan mengenai Penyebab kebakaran, cara pencegahan agar tidak timbul api yang lebih besar saat terlihat tanda-tanda kebakaran, dan cara penanganan yang tepat perlu dimiliki oleh masyarakat umum sebagai wujud kepedulian terhadap kerawanan bencana kebakaran. Sasaran 50 orang dengan pagu Rp 20.000.000	Mataraman	Baru	1. mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Menyampaikan Proposal
185	Pasar Murah	Belum Adanya pasar murah di desa mataraman dengan kisaran pembelinya berjumlah 150 orang dengan total biaya Rp. 12.000.000,00	Mataraman	Mataraman	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
186	Pasar Murah	Perlu adanya bantuan pasar murah di Desa untuk menstabilkan harga di warung dan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan harga sembako yang terjangkau (Rp. 24.000.000,- dengan kuota 300 orang)	Mataraman	Gunung Ulin	Kegiatan Pasar Murah akan menyesuaikan dana alokasi yang tersedia dan menyesuaikan dengan SKPD Terkait sebagai leading Sektor
187	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Kurang nya Pupuk menyebabkan hasil pertanian tidak maksimal kami memerlukan 150 Zak Pupuk Urea untuk Petani di Desa Surian dengan perkiraan biaya Rp. 25.000.000,-	Mataraman	Surian	DI TOLAK Alokasi pupuk bersubsidi akan di alokasikan pada tahun 2025 keseluruhan kelompok tani melalui dana APBN melalui mekanisme penyusunan RDKK (rencana Definitif kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi. untuk bantuan pupuk non subsidi (komoditas padi) di usulkan pada kegiatan reguler tanaman pangan (paket benih dan pupuk) dari dana APBN (mekanisme pengusulan dana APBN melalui Penyuluh pertanian)
188	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Bantuan Pupuk Pertanian untuk kelompok tani di wilayah Sungai Jati dengan perkiraan biaya Rp 30.000.000	Mataraman	Sungai Jati	DI TOLAK Alokasi pupuk bersubsidi akan di alokasikan pada tahun 2025 keseluruhan kelompok tani melalui dana APBN melalui mekanisme penyusunan RDKK (rencana Definitif kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi. untuk bantuan pupuk non subsidi (komoditas padi) di usulkan pada kegiatan reguler tanaman pangan (paket benih dan pupuk) dari dana APBN (mekanisme pengusulan dana APBN melalui Penyuluh pertanian)

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
189	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	Sehubungan dengan keperluan masyarakat dalam ketahanan pangan maka dengan ini kami meohon untuk mengadakan Pelatihan pertanian dengan perkiraan pagu anggaran (Rp.25.000.000)	Mataraman	Pasiraman	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
190	Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan	Sehubungan dengan keperluan masyarakat dalam ketahanan pangan maka dengan ini kami meohon untuk mengadakan Pelatihan Peternakan dengan pagu anggaran sebesar (Rp.40.000.000)	Mataraman	Pasiraman	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
191	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	Permintaan Bibit Buah-buahan untuk Masyarakat dengan perkiraan biaya sebesar Rp 30.000.000	Mataraman	Sungai Jati	DI TOLAK jenis bibit tidak spesifik, penerima harus petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di simluhtan, dan usulan dalam bentuk kawasan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				
192	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Telah terjadi kebakaran di beberapa lahan pada tahun 2023 lalu, untuk itu perlu di realisasikan bantuan 1 unit mesin pemadam, 50 meter selang, 1 Buah Fire Jet Nozzle Sprayer, 10 Meter Selang Penghisap dan 4 Stel Seragam Safety dengan perkiraan pagu Rp. 22.800.000	Mataraman	Simpang Tiga	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
193	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Pemanfaatan Pekarangan)	Perlunya Bantuan dan Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Khususnya Dinas Pertanian dalam Bidang Pertanian Kelompok Wanita Tani di Desa Gunung Ulin dengan Anggaran Rp. 20.000.000,- dengan Luas Lahan 1 Ha	Mataraman	Gunung Ulin	DITERIMA DENGAN CATATAN usulan kegiatan P2l Diterima dengan catatan desa gunung ulin tahun 2025 masuk dalam SK bupati intervensi lokus desa stunting kabupaten banjar 2025
194	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan	belum ada bantuan pupuk untuk kelompok tani	Paramasan	Remo	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani. Sasaran bantuan pupuk ATAU ALSINTAN bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb:

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
195	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	belum punya mesin pompa air	Paramasan	Remo	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkumham 4. Menyampaikan proposal
196	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	belummada bantuan alat dan obat obatan perkebunan	Paramasan	Paramasan Atas	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkumham 4. Menyampaikan proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
197	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	belum ada bantuan	Paramasan	Paramasan Atas	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkumham 4. Menyampaikan proposal
198	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	belum ada bantuan ternak sapi	Paramasan	Paramasan Bawah	Sasaran bantuan ternak sapi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
199	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	belum ada jalan usaha tani	Paramasan	Paramasan Bawah	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m
200	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Untuk meningkatkan produksi Sapi dan perbaikan ekonomi masyarakat diperlukan bantuan bibit ternak Sapi 20 ekor dengan perkiraan pagu anggaran Rp. 340.000.000,-	Pengaron	Mangkauk	Sasaran bantuan bibit ternak sapi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
201	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Petani ini licin dan kecil	Pengaron	Lumpangi	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
202	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Diperlukan pembuatan JUT di Teluk Gudang dengan ukuran 2000 m x 2,5 m dengan perkiraan pagu anggaran Rp. 720.000.000,-	Pengaron	Lumpangi	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
203	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Upaya pemecahan masalah ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. memaksimalkan lahan yang ada didesa dan pekarangan rumah dan ingin meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat. Dengan Kisaran dana Rp. 50.000.000	Pengaron	Benteng	-
204	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Diperlukan bantuan bibit ternak puyuh 1 paket pagu perkiraan sebesar Rp.80.000.000,-	Pengaron	Penyiuran	Sasaran bantuan bibit ternak puyuh bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
205	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Diperlukan bantuan untuk pengembangan ternak sapi berupa bibit ternak 25 ekor dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,-	Pengaron	Penyiuran	Sasaran bantuan bibit ternak sapi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
206	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Kelompok tani belum memiliki alat produksi pertanian yang efisien dan modern salah satunya tracktor	Pengaron	Kertak Empat	Sasaran bantuan Alsintan Tracktor bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
207	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Diperlukan untuk pengembangan perkebunan kopi, bibit kopi 1 paket dengan perkiraan pagu anggaran Rp.75.000.000,-	Pengaron	Penyiuran	Sasaran bantuan bibit perkebunan kopi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
208	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Diperlukan untuk pengembangan ternak itik berupa bibit dan kandang 1 paket kegiatan dengan perkiraan pagu anggaran Rp.100.000.000,-	Pengaron	Penyiuran	Sasaran bantuan bibit ternak itik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
209	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Bibit ternak bebek hanya sedikit	Pengaron	Kertak Empat	sasaran bantuan pengadaan itik bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di kemenkumham 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama poktan/gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
210	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permohonan penanganan pengendalian hewan liar sebab terjadinya serangan binatang liar (Babi dan monyet) terhadap tanaman budi daya pertanian di desa sudah berdampak secara luas sehingga merugikan petani dan terancamnya gagal panen (Usulan BPP)	Sambung Makmur	Pasar Baru	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
211	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permohonan penanganan pengendalian hewan liar sebab terjadinya serangan binatang liar (Babi dan monyet) terhadap tanaman budi daya pertanian di desa sudah berdampak secara luas sehingga merugikan petani dan terancamnya gagal panen (Usulan BPP)	Sambung Makmur	Sungai Lurus	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
212	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permohonan penanganan pengendalian hewan liar sebab terjadinya serangan binatang liar (Babi dan monyet) terhadap tanaman budi daya pertanian di desa sudah berdampak secara luas sehingga merugikan petani dan terancamnya gagal panen (Usulan BPP)	Sambung Makmur	Gunung Batu	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
213	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permohonan penanganan pengendalian hewan liar sebab terjadinya serangan binatang liar (Babi dan monyet) terhadap tanaman budi daya pertanian di desa sudah berdampak secara luas sehingga merugikan petani dan terancamnya gagal panen (Usulan BPP)	Sambung Makmur	Batu Tanam	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
214	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI	Permohoan program yess, karena banyak pemuda yang memiliki potensi tapi mereka belum maksimal dalam menggali potensi yang mereka miliki	Sambung Makmur	Gunung Batu	Diterima, untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbingan menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)				dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
215	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Pemanfaatan Pekarangan)	permohonan pekarangan pangan lestari, belum adanya hal ini yang mumpuni, tahun 2023 kita memohon tapi syaratnya harus lokus stunting, sedangkan desa gunung batu tidak stunting	Sambung Makmur	Gunung Batu	Ditolak, Karena kegiatan P2L harus menyediakan lahan demplot min 400 m2 dan lahan untuk rumah bibit 20 m2. dan juga syarat kegiatan P2L desa harus masuk dalam SK bupati lokus intervensi stunting
216	Sosialisasi dan pembinaan mengenai penanganan, pencegahan kebakaran lahan dan kebun ke perusahaan perkebunan dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	permintaan pelatihan tanggap bencana kebakaran hutan didesa, desa sungai lurus adalah desa yang dikelilingi oleh hutan yang rawan kebakaran, oleh karena itu perlu pelatihan tanggap bencana kebakaran hutan	Sambung Makmur	Sungai Lurus	1. mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Menyampaikan Proposal
217	Bantuan sarana produksi pertanian (Benih, pupuk non subsidi,	belum ada peralatan pertanian Hortikultura	Sambung Makmur	Pasar Baru	Sasaran bantuan peralatan pertanian hortikultura bukan perorangan / RT / Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
218	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Permohonan BIMTEK Penyuluhan Tanaman Pangan bagi Masyarakat dengan Perkiraan Anggaran Rp. 20.000.000	Sambung Makmur	Madurejo	Masyarakat atau Poktan atau Gapoktan membuat proposal mengenai BIMTEK Penyuluhan Tanaman Pangan untuk mengajukan ke Dinas Pertanian, bisa juga dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja.
219	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Permohonan Bimtek dan Penyuluhan tanaman Pangan bagi masyarakat, untuk meningkatkan produksi pangan bagi warga sambung makmur	Sambung Makmur	Madurejo	Masyarakat atau Poktan atau Gapoktan membuat proposal mengenai BIMTEK Penyuluhan Tanaman Pangan untuk mengajukan ke Dinas Pertanian, bisa juga dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa)

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
		dengan perkiraan Anggaran 20.000.000			untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja.
220	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Permohonan Bimtek Penyuluhan Tanaman Sayur,Holtikultura dan Tanaman Perkebunan, bagi masyarakat untuk menunjang peningkatan Produksi Tanaman Sayur dan Tanaman Perkebunan dengan Perkiraan Anggaran 20.000.000	Sambung Makmur	Madurejo	Masyarakat atau Poktan atau Gapoktan membuat proposal mengenai BIMTEK Penyuluhan Tanaman Sayur,Holtikultura dan Tanaman Perkebunan untuk mengajukan ke Dinas Pertanian, bisa juga dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja.
221	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Permohonan Bantuan Bibit/benih tanaman pangan,holtikultura,perkebunan. dan Permohonan Bantuan Pupuk serta obat-obatan pertanian, dengan perkiraan anggaran 100.000.000 (usulan BPP)	Sambung Makmur	Madurejo	Dinas Pertanian hanya menfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani. Sasaran bantuan bibit/benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bantuan pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
222	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permohonan penanganan pengendalian hewan liar sebab terjadinya serangan binatang liar (Babi dan monyet) terhadap tanaman budi daya pertanian di desa sudah berdampak secara luas sehingga merugikan petani dan terancamnya gagal panen	Sambung Makmur	Baliangin	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
223	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	produksi hasil pertanian kurang maksimal karena akses jalan tidak mamadai dengan kurang lebih 350 m	Sambung Makmur	Batu Tanam	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
224	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	permohonan jalan usaha tani, masih sulit nya beberapa warga dalam membawa hasil panen mereka ke jalan utama	Sambung Makmur	Gunung Batu	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
225	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam,	Permohonan seperangkat alat pemadam, permasalahan desa belum memiliki sarana tersebut, dan sarana tersebut sangat dibutuhkan ketika musim kemarau	Sambung Makmur	Gunung Batu	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	tabung pemadam api dan lainnya				
226	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Permohonan sarana perlindungan untuk kebun desa dari ketahanan pangan dan kebun warga. Banyaknya hama yang tidak bisa ditangani langsung oleh petani, tanpa adanya bantuan sarana dari kabupaten sebagai pendukungnya	Sambung Makmur	Gunung Batu	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
227	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	saat kemarau kesulitan air untuk menyirami tanaman yang dibudidayakan oleh petani	Sambung Makmur	Pasar Baru	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
228	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Permohonan pelatihan untuk gapoktan, poktan dan kelompok tani wanita, karena masih belum maksimalnya para petani dalam mengelola dan mengembangkan konsep pertaniannya	Sambung Makmur	Gunung Batu	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
229	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih,	Pipanisasi irigasi tetes dan sistem pengairan tanaman dengan sistem sprinkle, Saat	Sambung Makmur	Pasar Baru	Untuk Pipa penyaluran air, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	kemarau air sulit dijangkau, memerlukan tenaga kerja ekstra untuk melakukan penyiraman tanaman repah-rempah dan tanaman pangan yang mereka budidayakan			APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN
230	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Masih terdapat Jalan Usaha Tani(JUT) yang kondisinya tidak layak di lewati	Simpang Empat	Sungai Raya	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
231	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan,	Tidak Adanya Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Saat Ini	Simpang Empat	Sungai Raya	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				
232	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	SERING TERJADI PENYAKIT HAMA PADA TANAMAN/TUMBUHAN	Simpang Empat	Sungai Langsat	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Menyampaikan Proposal 4. Ada rencana gerakan Pengendalian
233	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian	Simpang Empat	Sungai Baru	Sasaran bantuan sarana produksi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
234	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakan Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Guna memberikan pertolongan segera kepada warga yang terkena musibah kebakaran baik rumah, pekarangan dan kebun. Maka kami mengusulkan sarana pemadam kebakaran untuk di wilayah Kecamatan Sungai Pinang	Sungai Pinang	Pakutik	1. mempunyai lahan pertanian 2. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 3. Menyampaikan Proposal
235	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	agar dapat membantuk meningkatkan produktivitas perkebunan warga dan meningkatkan kesejahteraan petani, kami mengharapka adanya pengadaan pupuk bersubsidi menjangkau ke wilayah kami	Sungai Pinang	Kahelaan	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani.
236	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura,	Bantuan pupuk bersubsidi guna meningkatkan hasil produktivitas petani di wilayah kami	Sungai Pinang	Kupang Rejo	Dinas Pertanian hanya memfasilitasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan dan penginputan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah swadaya petani.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Perkebunan dan Peternakan				
237	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	Pembinaan dan Pelatihan untuk Kelompok Tani di wilayah kami	Sungai Pinang	Kupang Rejo	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja
238	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	pangadaan paving blok untuk jalan produksi tani sejauh 20 KM	Sungai Pinang	Kupang Rejo	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey. Tambahan : untuk juknis pemb. JUT/Jalan produksi ialah spek teknisnya lebar jalan 1,5 m dengan panjang 400 m

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
239	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Semakin menurunnya produksi Hasil Pertanian Dalam Beberapa Tahun Terakhir sehingga perlu nya penanganan yang Maksimal	Sungai Tabuk	Gudang Hiran	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 3. Menyampaikan Proposal 4. Ada rencana gerakan Penanganan
240	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Perlunya Alsintan untuk pengolahan lahan pertanian agar tanah menjadi mudah untuk di fungsi kan. Kurangnya Alsintan yang ada di Desa Gudang Hiran tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang ada di Desa	Sungai Tabuk	Gudang Hiran	Sasaran bantuan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
241	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca	Tidak adanya alat Traktor untuk membajak sawah dan mesin perontok bagi kelompok tani	Sungai Tabuk	Lok Buntar	Sasaran bantuan Alsintan Traktor dan Mesin Perontok bukan untuk perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan				KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
242	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Tidak adanya bantuan Bibit Jeruk untuk kelompok tani karena terbatasnya biaya	Sungai Tabuk	Lok Buntar	Sasaran bantuan bibit jeruk bukan untuk perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
243	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Terbatasnya biaya kelompok tani untuk Pembibitan Tanaman Padi Unggul	Sungai Tabuk	Lok Buntar	Sasaran bantuan benih padi unggul bukan untuk perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
244	Pemberian dan penyaluran bantuan pasca bencana pertanian	Sering terjadi banjir dan Musim kemarau	Sungai Tabuk	Sungai Bangkal	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam Simluhtan 3. menyampaikan Proposal 4. Ada Kejadian bencana
245	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Enterpreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan	peningkatan kapasitas petani didesa	Sungai Tabuk	Sungai Pinang	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)				
246	Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan berupa obat-obatan	tidak adanya fasilitas bantuan sarana perlingkungan tanaman pangan kultikultura,dll.terlebih lagi wilayah desa pembantanan berada didataran rendah yg tiap tahun tergenang banjir,sehingga mengakibatkan tanaman mati dan gagal panen.	Sungai Tabuk	Pembantanan	Sasaran bantuan sarana perlingkungan tanaman pangan kultikultura,dll bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
247	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Poktan	tidak adanya penyuplai pupuk bersubsidi	Sungai Tabuk	Pembantanan	Dianjurkan masyarakat menggunakan anggaran Desa (20% dari anggaran desa) untuk kegiatan pelatihan dan Dinas Pertanian menyediakan narasumber mengenai pelatihan, kemudian poktan diharapkan mengusulkan ke Dinas atau mengajukan pelatihan ke Balai Penyuluhan Pertanian dengan syarat pihak penyuluh/BPP hanya memfasilitasi narasumber pelatihannya saja

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
248	Gerakan Pengendalian Serangan Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura	Perlu Bantuan Obat Hama.	Sungai Tabuk	Pembantanan	Sasaran bantuan Obat Hama bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
249	Bantuan sarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura berupa obat-obatan, alat penyemprotan (sprayer), emposan.	Banyaknya lahan pertanian dan JUT desa yang perlu obat-obatan dan pupuk	Sungai Tabuk	Keliling Benteng Ilir	Sasaran bantuan obat-obatan dan pupuk bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
250	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Masih kurangnya sarana pertanian	Sungai Tabuk	Tajau Landung	Sasaran bantuansarana pertanian bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
251	Sosialisasi dan pembinaan mengenai penanganan, pencegahan kebakaran lahan dan kebun ke perusahaan perkebunan dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Belum tersedianya Kelompok Tani yang sadar akan kebakaran Hutan	Sungai Tabuk	Tajau Landung	1. Mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) 2. Dinas Pertanian setiap tahun melaksanakan sosialisasi untuk KTPA 3. Menyampaikan Proposal
252	Bantuan Sarana pencegahan dan	Desa pematang panjang sering terjadi kebakaran tiap	Sungai Tabuk	Pematang Panjang	Sasaran bantuan Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	tahun,kerna banyak lahan gambut.			lainnya bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
253	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Permasalahan yang di terjadi di setiap tahun yaitu adanya kebakaran yang sangat besar dan terjadi sepanjang hari di sungai tabuk	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	1. Tergabung dalam kelompok tani 2. Kelompok tani terdaftar dalam simluhtan 3. Poktan Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkumham 4. Menyampaikan proposal
254	Pembangunan Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	Perlunya perbaikan jaringan irigasi untuk mengairi sawah pertanian, karena kondisi irigasi yang ada saat ini tidak berfungsi dengan baik sehingga air yang dialirkan tidak sampai ke persawahan.	Sungai Tabuk	Gudang Hirang	Untuk jaringan irigasi tersier, diperlukan titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa dilakukan survey lanjutan. Untuk dana APBD poktan harus berbadan hukum, dan apabila belum berbadan hukum akan diusulkan melalui dana APBD 1 Provinsi atau APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
255	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	dikarenakan jalan tersebut bukan kewenangan desa untuk memperbaikinya	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
256	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Obat obatan sangat diperlukan	Sungai Tabuk	Lok Buntar	Sasaran bantuan obat-obatan bukan untuk perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
257	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani yang ada masih rendah dan belum ada Peningkatan Penyirtuan(Base course Dan Sirtu)	Sungai Tabuk	Sungai Bangkal	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
258	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	JALAN USAHA TANI MASIH TERGENANG AIR DAN BECEK	Sungai Tabuk	Sungai Pinang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
259	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	JALAN USAHA TANI BECEK DAN BERAIR	Sungai Tabuk	Sungai Pinang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
260	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	KONDISI JALAN BECEK DAN BERAIR	Sungai Tabuk	Sungai Pinang	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
261	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Terkendalanya pengangkutan gabah karena tidak adanya jln usaha tani.	Sungai Tabuk	Pembantanan	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
262	Pembangunan Jalan Usaha	1. Pembangunan Jembatan Usaha Tani 2. Siring Jalan Usaha Tani	Sungai Tabuk	Pemakuan	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
	Tani/Jalan Produksi				koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
263	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	sangat rusak dan tidak bisa dikerjakan oleh desa dikarenakan jalan tersebut bukan kewenangan Desa	Sungai Tabuk	Sungai Tabuk Kota	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
264	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Mohon dibangun jalan usaha tani agar para petani lebih mudah untuk pergi kesawah dan untuk meningkatkan hasil pertanian. Adapun untuk pembangunan jalan usaha tani ini yaitu dengan ukuran panjang 600 meter dengan lebar 1,5 meter dengan anggaran 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)	Tatah Makmur	Pandan Sari	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
265	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Karena keadaan tanah yang labil sehingga sulit nya dalam pengangkutan hasil panen maka itu perlu pembuatan jalan usaha tani	Tatah Makmur	Taibah Raya	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
266	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Belum Memiliki Jalan Usaha Tani Panjang 350 m dan lebar 2 m dengan perkiraan biaya sekitar Rp 35.000.000,-	Tatah Makmur	Mekar Sari	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
267	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) dengan ukuran 2 x 750 meter dengan perkiraan biaya 75.000.000	Tatah Makmur	Pemangkih Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
268	Bantuan Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan berupa obat-obatan	Banyaknya Hama tanaman sekitar maka Poktan memerlukan Insektisida dan Herbisida sebanyak 50 botol dengan perkiraan biaya Rp 5.000.000,-	Tatah Makmur	Mekar Sari	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
269	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Gapoktan Harapan Makmur Memerlukan Perontok Padi sebanyak 4 unit dengan perkiraan pagu Rp 40.000.000	Tatah Makmur	Tampang Awang	Sasaran bantuan Pengadaan Perontok Padi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
270	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan usaha tani dengan ukuran 2 m x 350 m dengan perkiraan biaya 35.000.000	Tatah Makmur	Taibah Raya	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah dusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey
271	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Wilayah desa thaibah raya memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk menunjang produktivitas terutama dalam hal pengolahan tanah diperlukan alsintan berupa hand traktor bagi kelompok tani yaitu poktan ingin maju, poktan sekawan dan poktan maju tani dibawah koordinator gapoktan harapan bersama.	Tatah Makmur	Taibah Raya	Sasaran bantuan Alsintan bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
272	Bantuan Sarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Mesin Pompa, selang, sprayer, pemadam, tabung pemadam api dan lainnya	Kurangnya sarana prasarana tanggap darurat bencana seperti mesin portable dan pakaian relawan dalam menanggulagi bencana menyulitkan para relawan bertindak dalam penanganan bencana kebakaran, volume 1 paket , prakiraan biaya Rp. 100.000.000,-	Telaga Bauntung	Telaga Baru	1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam simluhtan 4. Menyampaikan Permohonan / Proposal
273	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	para pelaku peternak desa rampah tidak banyak memiliki peternakan sapi Pagu 700.000.000 Prioritas 9	Telaga Bauntung	Rampah	Sasaran bantuan peternakan sapi unggul bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
274	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Sehubungan Budidaya rumput pakan sapi sangat melimpah dan di gencarkan di Desa namun belum di manfaatkan secara maksimal maka kami berharap mendapat bantuan sapi unggul , sasaran 1 kelompok, prakiraan biaya Rp. 50.000.000,-	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Sasaran bantuan peternakan sapi unggul bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
275	Bantuan sarana produksi pertanian(Benih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Petani kesulitan dalam proses panen padi, di perluakan bantuan mesin perontok padi sebanyak 2 bh, prakiraan biaya Rp. 20.000.000,- sasaran kel.tani harapan bahagia dan kel.tani makmur jaya	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Sasaran bantuan Alsintan berupa perontok padi bukan perorangan / RT /Desa akan tetapi kelompok tani dengan syarat sbb: 1. Tergabung dalam kelompok Tani 2. Kelompok Tani terdaftar dalam SIMLUHTAN 3. Poktan berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM 4. Menyampaikan Proposal disertai polygon Usulan harus di lengkapi dengan nama kelompok tani . Apabila usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria tersebut maka usulan secara otomatis DI TOLAK SOLUSI : silakan masukan proposal tertulis usulan tsb atas nama Poktan/Gapoktan untuk

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					di rekapitulasi dan nantinya akan di teruskan usulannya ke APBD prov dan APBN
276	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Petani (BETUMBANG TANI MANIS) Program Kegiatan Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) (pelatihan dan bimbing menjadi wirausahawan dan tenaga kerja di sektor pertanian)	Kurangnya dukungan modal usaha untuk petani milineal seperti usaha peternakan sapi, kambing, itik , ayam , dan hortikultura, sekaligus minimnya SDM petani milineal berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi , Volume 20 org prakiraan biaya Rp. 500.000.000,-	Telaga Bauntung	Telaga Baru	Diterima , untuk tahun 2025 masing-masing BPP akan mendapat alokasi kegiatan 2 (dua) kelas pelatihan dengan peserta 25 orang per kelas kegiatan. Yess dengan anggaran Pusat akan berakhir di tahun 2025, kegiatan akan dialihkan ke Batumbang Tani Manis dengan materi pelatihan mengenai minat, keperluan dan potensi masing-masing Kecamatan.
277	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Jalan Usaha Tani Rusak , Becek, Banyak rumput, dan Menanjak di usulkan Pembangunan Jalan BDK di Desa Telaga Baru RT.01-02 P=1500 m , Lebar = 2,5 m Prakiraan Biaya Rp. 150.000.000,-	Telaga Bauntung	Telaga Baru	1. Sebagai informasi JUT yang di prioritaskan JUT yang masuk dalam kawasan RTRW, maka kami perlu titik koordinat (karena titik koordinat bagian dari usulan ke provinsi), agar tidak melanggar Perda RTRW no 4 Tahun 2021. 2. Poktan yang akan di beri bantuan diharapkan sudah berbadan hukum 3. menurut kasi Lahan dan Irigasi dari Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, JUT yang ada di daerah diusulkan ke provinsi Kalsel lewat usulan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kesimpulannya : Usulan akan kami check kembali terkait titik

NO	USULAN	MASALAH	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI SKPD
					koordinat dan usulan poktan akan diarahkan ke dinas pertanian provinsi kalimantan selatan, dan minta titik koordinat dan nomer yang bisa dihubungi agar bisa disurvey

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas, yang kemudian menjadi masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pokok-pokok pikiran tahun 2025 Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pokok-pokok pikiran tahun 2025 Kabupaten Banjar

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
1	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	penyiringan jalan pertanian	Desa Bunipah Kec. Aluh- aluh, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta Status Tanah yang Clean and Clear	-	0
2	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat- obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultur a, Perkebunan dan Petrernakan	bantuan bibit jeruk	desa sungai tandipah sungai tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke Dinas Pertanian dengan syarat yang harus dilengkapi oleh Poktan berupa SK Poktan berbadan hukum, kemudian foto- foto lokasi serta proposal dan tahapan ini sebenarnya masuk nanti di tahapan verifikasi hibah	25000	pohon

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
3	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultur a, Perkebunan dan Peternakan	bantuan bibit jeruk	Desa paku alam sungai tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan dengan syarat kriteria oleh Dinas Pertanian, seperti SK Badan Hukum Poktan, foto lokasi dan proposal serta dalam tahapan verifikasi hibah	15000	pohon
4	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultur a, Perkebunan dan Peternakan	bantuan bibit jeruk	Sungai bakung kec. sungai tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan dengan syarat yang harus dilengkapi oleh Poktan berupa SK Badan Hukum, foto lokasi yang detail, proposal dan sebenarnya usulan ini nanti akan masuk di tahapan verifikasi hibah.	15000	pohon
5	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jalan usaha tani	Desa Sungai batang ilir martapur a barat, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan ketentuan yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta Status Tanah yang Clean and Clear	-	0

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
6	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	siring beton jalan usaha tani (200.000.00 0)	Desa kampung keramat martapur a timur, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan ketentuan yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta Status Tanah yang Clean and Clear	-	0
7	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	pengaspalan jalan usaha tani	Desa Tajau Landung Rt. 04 , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan ketentuan RC yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta Status Tanah yang Clean and Clear	-	0
8	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Pemasangan paving blok jalan usaha tani	Desa sungai pinang lama RT.03 Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan, mohon kelengkapan SK Badan Hukum Poktan, foto- foto lokasi dan Proposal, serta Lahan Yang Clean and Clear	-	0
9	Pembangun an Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jalan usaha tani	Desa lok baintan sungai tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan ketentuan yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta	-	0

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
				Status Tanah yang Clean and Clear		
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jembatan usaha tani	desa lokbaintan sungai tabuk, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke Dinas Pertanian dengan syarat RC yang telah ditentukan yaitu harus ada SK Poktan berbadan hukum, foto dan proposal	-	0
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	jalan tani rusak	Desa Pingaran Ulu Kec. astambul , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan dengan ketentuan Poktan yang harus dilengkapi berupa SK Poktan Berbadan Hukum, Foto lokasi kegiatan dan proposal yang harus diupload	500	meter
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	Perbaikan jalan usaha tani (handil)	Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi, Proposal, serta Status Tanah yang Clean and Clear	-	0
13	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra	hibah ternak bebek	Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk , Kab. Banjar	Usulan diproses ke SKPD, dengan catatan harus disesuaikan dengan RC (SK Poktan Berbadan Hukum, Foto,	-	0

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
	dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan			Proposal) dan masuk pada tahapan verifikasi hibah		
14	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	permintaan bibit tanaman jeruk dan cabe	Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto Lokasi dan Proposal serta usulan ini nanti akan masuk di tahapan verifikasi Hibah	-	0
15	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	bantuan pupuk dan alat pertanian	Desa Sungai Tandipah /sei lenge RT.03, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Dokumentasi Foto dan Proposal	-	0
16	Bantuan sarana produksi pertanian(B enih, pupuk non subsidi, obat-obatan, alsintan pra	Permintaan Pupuk Berkebun, Permintaan Bibit Petani, Buah Buahan dan Perkebunan, Obat Hama	Desa Ati'im Kecamatan Pengaron , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto	-	0

N O	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	REKOMENDAS I MITRA	VOLU ME	SATU AN
	dan pasca panen)Tana man Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Hewan, Obat Haman Binatang/U nggas		dan Proposal serta usulan ini nanti akan masuk di tahapan verifikasi Hibah		
1 7	Fasilitasi Usaha Pertanian (NIB) Petani Usaha Mikro	Bantuan Tosa	Desa Tambak Danau Kec. Astambul , Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum meskipun adanya ketidaksinkron an antara kamus usulan dengan permasalahan.	-	0
1 8	Pembangun an Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	Bantuan Sumur bor pertanian untuk petani	Kecamata n Karang Intan, Kab. Banjar	Usulan dapat diteruskan ke SKPD terkait dengan kriteria yang telah ditentukan berupa SK Poktan Badan Hukum, Foto dan Proposal serta usulan ini nanti akan masuk di tahapan verifikasi Hibah	-	0
1 9	Pembangun an Irigasi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura)	Bantuan Sumur bor pertanian untuk petani	Kecamata n Martapur a, Kab. Banjar	Usulan diproses ke SKPD, dengan catatan harus disesuaikan dengan RC (SK Poktan Berbadan Hukum, Foto, Proposal) dan masuk pada tahapan verifikasi hibah	-	0

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERTANIAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Arah Kebijakan Nasional dalam rangka mengatasi isu-isu Global, Nasional dan Lokal

Isu Global	Isu Nasional	Isu Lokal
• Pasokan Pangan dan Energi • Pembatalan Mobilitas • Investasi	• Defisit APBN dan Investasi • Rantai Nilai • Daya Beli	• Bencana • Pemantapan Pemulohan Ekonomi • Daya Beli • Pengangguran • Pemerataan

Untuk menjawab isu-isu tersebut, maka ditetapkan 7 Prioritas Nasional Sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dengan program prioritas:

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan

- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan Berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan dengan major project Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta

- Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara INDONESIA (WNI) di luar negeri.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan. Secara kewilayahan disusun arah kebijakan pengembangan wilayah untuk Kalimantan sebagai berikut:

- Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi
- Memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional
- Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia
- Mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan Bagian Utara

Strategi pengembangan wilayah Kalimantan. Strategi pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan wilayah di Kalimantan melalui strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

a. Strategi pertumbuhan

- Membangun IKN dan infrastruktur pendukungnya.
- Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis.
- Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu sawit, karet, dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok.

- Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya.
- Mengembangkan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani.
- Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusatdaerah regional Wilayah Kalimantan.
- Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

b. Strategi pemerataan

- Memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan Trans Kalimantan.
- Mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal.
- Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara.
- Mempercepat penuntasan SPM, terutama di wilayah 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa melalui Penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja.
- Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan ketangguhan terhadap ancaman bencana, serta mempertahankan pelestarian.

3.2 Telaahan terhadap Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi Isu Strategis sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup

Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana (banjir dan kebakaran hutan lahan).

b. Infrastruktur

Belum mantapnya infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi (termasuk energi dan konektivitas)

c. Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia

d. Ekonomi

Belum terdiversifikasinya sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi struktur ekonomi daerah (pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan, dan pelaku UMKM)

e. Tata Kelola Pemerintahan

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan *Food Estate* Kalimantan Selatan memiliki peluang besar menjadi gerbang *food estate* di Kalteng dan ibu kota negara di Kaltim (jalur logistik dan konektivitas).

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah:

**“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU”.

Tema tersebut di jabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata, dengan sub prioritas, yakni:
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan sub prioritas:
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c. Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender Dan Inklusif
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - h. Pengembangan Budaya Daerah
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, dengan sub prioritas:
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, dengan sub prioritas:
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
 - d. Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - f. Pengembangan Satu Data Kalsel

5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana, dengan sub prioritas:

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S). Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*). *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia. OPD agar memprioritaskan program dan kegiatan mendukung pencapaian SDG's. 17 Tujuan SDG's adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajarseumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.3 Telaahan terhadap Arah Kebijakan Kabupaten Banjar Tahun 2025

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat lokal, serta dalam upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut:

2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi yang inklusif yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai secara optimal.
 - Ekonomi sektor industri pengolahan yang fluktuatif dan belum tumbuh dan berkembang optimal.
 - Pertumbuhan investasi yang belum optimal.
 - Sektor pariwisata belum tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dan destinasi wisata yang dikembangkan.
 - Produksi dan produktivitas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan) belum dikembangkan dengan optimal berdasarkan pada potensi yang tersedia.
 - Penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas.

- Kondisi perekonomian global yang memiliki kecenderungan pada terjadinya krisis ekonomi global.
 - Krisis pangan dan energi yang mengancam seiring dengan terjadinya bencana dan kondisi ekonomi global.
 - Kondisi perekonomian yang kurang stabil berdampak pada kecenderungan terjadinya Inflasi yang tinggi.
 - Clusterisasi produk unggulan daerah belum berjalan dengan baik.
- b. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu didorong dengan optimal.
- Cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih rendah.
 - Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan angka RLS masih belum optimal.
 - Kecenderungan terjadinya risiko Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) yang masih cukup tinggi.
 - Kecenderungan terjadinya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta prevalensi stunting yang masih cukup tinggi
 - Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak masih belum terselenggara secara optimal.
- c. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur layanan dasar yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan belum terpenuhi secara optimal.
- Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.
 - Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.
 - Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
 - Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistic dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/ komunitas.

- Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan.
 - Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik dan bersih belum dilaksanakan secara optimal.
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang melayani, baik secara digital maupun non digital belum optimal dilaksanakan.
 - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara intensifikasi maupun diversifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
 - Penyelenggaraan informasi dan statistik melalui manajemen satu data belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - Penyelenggaraan pemerintahan, berbasis kinerja dan manajemen resiko yang belum terinternalisasi secara optimal.
 - Peningkatan koordinasi di tingkat kecamatan dan di tingkat desa masih perlu dioptimalkan dalam upaya mendukung percepatan pencapaian target indikator, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang menjadi lokus kegiatan.
- e. Penguatan karakter agamis, dan kehidupan masyarakat yang demokratis masih perlu didorong dan ditingkatkan.
- Penguatan karakter religius masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan event keagamaan dan event budaya.
 - Kesadaran demokratis masyarakat yang masih rendah, khususnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 - Kecenderungan meningkatnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjau dari angka kriminalitas yang cukup tinggi.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

a. PRIORITAS 1

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang mampu mendorong pada pertumbuhan ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sub prioritas:

- a. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan.
 - b. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional.
 - c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital.
 - d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan.
 - e. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
 - f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal.
 - g. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal.
 - h. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
- b. PRIORITAS 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui.
- 3) Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak.
- 4) Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

- 5) Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan.
- 6) Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau.
- 7) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c. PRIORITAS 3

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.
- 5) Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

d. PRIORITAS 4

Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi, dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan.
- 3) Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik.
- 4) Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK.

- 5) Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif.
- 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

e. PRIORITAS 5

Penguatan Karakter Agamis Dan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dengan sub prioritas:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis.
- 2) Pembentukan pemuda berkarakter.
- 3) Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- 5) Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

MISI	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan		
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan daerah
			Meningkatnya nilai tambah produk pertanian

Adapun target kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3. Target kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan daerah	Produktivitas Padi	Kw/Ha	36,5
	Produktivitas Jeruk Siam	Kw/ Pohon	0,70
	Produktivitas Cabai	Kw/Ha	32,50
	Produktivitas Karet	Kg/Ha	927
	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	%	3,82
Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Persentase Komoditas Ungguan Olahan Hasil Pertanian	%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kabupaten Banjar, provinsi maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan SKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawankaryawati Dinas Pertanian Kabupaten Banjar serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar pada tahun 2025 melaksanakan 7 program, 25 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;
 - 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD; dan
 - 11) Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - 3) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;
 - 4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan;
 - 5) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang;
 - 6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; dan
 - 7) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupate/Kota
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil; dan
 - 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak.
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan

- 2) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; dan
 - 5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; dan
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan.
- c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan
 - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan; dan

- 2) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 3) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 4) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis; dan
 - 5) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.
7. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;

- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- 4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian;
dan
- 5) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Adapun rumusan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERTANIAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3	URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3.27	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANIAN							52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				76 %	83 %	38.628.405. 074	38.553.743. 273	38.930.268. 452
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan				100 %	100 %	100.002.603	100.002.603	81.763.782

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah	evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Persentase dokumen SPIP sesuai ketentuan								
3.27.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokume n	3 Dokume n	10.641.603	10.641.603	10.641.603

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000	4.000.000	4.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	4.000.000	4.000.000	4.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen DPA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000	5.000.000	5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD								
3.27.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				3 Laporan	3 Laporan	16.465.000	16.465.000	15.874.879

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
3.27.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	13.582.000	13.582.000	14.722.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata				1 Dokume n	1 Dokume n	8.424.000	8.424.000	4.899.300

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
3.27.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan				1 Data	0 Data	8.424.000	8.424.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0 010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Per									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan				20 Berita Acara	20 Berita Acara	7.366.000	7.366.000	7.366.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0 011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan				6 Dokume n	6 Dokume n	10.260.000	10.260.000	10.260.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Renja PD yang disusun								
3.27.01.2.01.0 013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pe									
		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat				1 Berita Acara	0 Berita Acara	6.840.000	6.840.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	30.978.749. 801	30.973.088. 000	31.397.492. 500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTAS RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3598 Orang /bulan	3598 Orang /bulan	30.745.390. 801	30.744.700. 000	30.938.800. 000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	215.359.000	210.388.000	440.692.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
3.27.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan				18 Laporan	18 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD								
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan pengelolaan dan pengamatan aset sesuai ketentuan				100 %	100 %	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang berkualitas				100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	78.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000	100.000.000	78.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang berkualitas				100 %	100 %	1.750.528.4 00	1.477.528.4 00	1.073.487.9 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi istrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	210.092.900	210.092.900	209.192.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	118.798.000	118.798.000	118.798.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.637.500	20.637.500	14.997.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.368.000.000	1.095.000.000	697.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	1.120.219.8 70	1.120.219.8 70	725.421.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21	1 Unit	528.769.870	528.769.870	492.610.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	160.835.000	160.835.000	160.835.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	71.976.000	71.976.000	71.976.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	358.639.000	358.639.000	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelaksanaan umum yang berkualitas				100 %	100 %	3.471.880.0 00	3.675.880.0 00	3.125.700.0 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	456.200.000	456.200.000	456.200.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	3.015.680.000	3.219.680.000	2.669.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara sesuai kebutuhan				100 %	100 %	1.099.024.4 00	1.099.024.4 00	2.440.403.2 70

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	685.500.000	685.500.000	685.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	263.524.400	263.524.400	1.604.903.270

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang didukung sarana pertanian yang berkualitas Persentase pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll) Persentase kelompok tani yang				0.11% 1.80% 4.00%	0 0 3 Komodit as 4%	1.980.226.9 00	3.509.226.9 00	2.381.432.5 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		memanfaatkan sarana produksi pertanian sesuai standar								
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana tanaman pangan dan hortikultura tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standar Persentase ketersediaan				100 %	100% 4%	1.433.599.900	2.987.599.900	1.951.289.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai standar								
3.27.02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	314.999.900	1.899.999.900	896.944.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	398.600.000	392.600.000	376.880.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	1 Ton	100.000.000	100.000.000	100.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	90.000.000	71.337.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				4000 Batang	4000 Batang	300.000.000	300.000.000	324.318.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.0 014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	185.000.000	170.219.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.01.0 016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	20.000.000	11.590.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase kelompok tani yang tersalurkan sarana perkebunan tepat sasaran Persentase ketersediaan sarana produksi perkebunan sesuai standa Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman				100 %	4% 100% 0	256.827.000	256.827.000	222.620.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02.002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokume n	2 Dokume n	129.800.000	129.800.000	103.330.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.02.003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokume n	1 Dokume n	127.027.000	127.027.000	119.289.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				100 %	100% 0	207.200.000	192.200.000	161.810.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03.001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	177.200.000	167.200.000	150.230.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.03.002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	25.000.000	11.580.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan sarana produksi peternakan sesuai standar Persentase pelaksanaan pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ternak				100 %	100% 0	82.600.000	72.600.000	45.713.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.02.2.05.006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	82.600.000	72.600.000	45.713.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Persentase peningkatan pembangunan/ rehabilitasi prasarana pertanian Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian sesuai standar				2% 10%	0 0 4%	5.412.752.0 00	4.974.155.0 00	4.439.084.1 84
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam				1 Dokume n	0 Dokume n 16%	321.200.000	321.200.000	683.760.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		peta Persentase kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang terkelola								
3.27.03.2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	71.200.000	71.200.000	64.542.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.01.0 015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertar									
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan				1 Dokume n	1 Dokume n	250.000.000	250.000.000	619.218.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola								
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana air yang terkelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelolar				100 %	42% 50% 0	4.664.952.0 00	4.226.355.0 00	3.351.354.9 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pembangunan prasarana pertanian								
3.27.03.2.02.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	4 Unit	576.141.000	726.141.000	1.178.571.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	2 Unit	424.494.000	424.494.000	396.581.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun,				3 Unit	1 Unit	1.590.449.000	1.590.449.000	354.385.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Direhabilitasi dan Dipelihara								
3.27.03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	709.191.000	709.191.000	702.652.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	506.587.000	506.587.000	476.187.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0 012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun,				1 Unit	0 Unit	588.597.000	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		direhabilitasi dan dipelihara								
3.27.03.2.02.0 014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas									
		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	269.493.000	269.493.000	242.978.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana air yang terkelola Persentase prasaran pertanian lainnya yang terkelolar Terlaksananya				2 Laporan	42% 50% 0	426.600.000	426.600.000	403.968.684

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.03.2.03.001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	350.000.000	336.222.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.03.002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	76.600.000	76.600.000	67.746.684

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jenis produk olahan yang dikembangkan Persentase menurunnya angka mortalitas ternak besar Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi				20% 0.30% 78%	0 0 0.29%	1.250.032.8 19	1.250.032.8 19	1.234.811.0 19

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase angka kematian ternak								
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penurunan angka kematian ternak besar Persentase penurunan penyakit hewan menular zoonosis dan non zoonosis				0.30 %	0 0.29%	254.997.000	254.997.000	254.565.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04.2.01.008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	254.997.000	254.997.000	254.565.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	1 laporan	281.764.439	281.764.439	280.264.439
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa	Jumlah hewan yang ditangani				1550 Ekor	0 Ekor 100%	405.855.000	405.855.000	400.600.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase peningkatan pelayanan jasa medik veteriner								
3.27.04.2.03.001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				60 Laporan	60 Laporan	192.857.000	192.857.000	192.857.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTAS RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.04.2.03.002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1550 Laporan	1550 Laporan	212.998.000	212.998.000	207.743.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	203.916.980	203.916.980	197.563.480
3.27.04.2.04.0 010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	28.499.500	28.499.500	26.817.700
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan	Persentase produk peternakan yang				100 %	78% 0	74.999.900	74.999.900	74.999.900

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Persentase tertibnya administrasi kegiatan Rumah Potong Hewan dan Unggas serta Perbibitan								
3.27.04.2.05.0 003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha									
		Jumlah unit usaha yang dibina				1 Unit	1 Unit	74.999.900	74.999.900	74.999.900

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTAS RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terhadap penerapan kesejahteraan hewan								
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana sub sektor				5.00% 6.40%	0 0 16%	2.055.800.0 00	2.225.800.0 00	4.138.393.0 20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GAN BENCANA PERTANIAN	tanaman pangan dan hortikultura Persentase kinerja pengendalian dan penanggulan bencana sub sektor perkebunan Persentase kerusakan bencana tanaman perkebunan Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura Persentase kerusakan bencana tanaman pangan					5% 5%			
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan	Presentase pelaksanaan kegiatan				80 %	0% 26%	2.055.800.0 00	2.225.800.0 00	4.138.393.0 20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTA RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Rasio kebakaran lahan pertanian Rasio luas area pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim Rasio luas area pengendalian OPT					69% 70%			
3.27.05.2.01.0 001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Luas Serangan Organisme				700 Ha	2500 Ha	355.633.100	550.633.100	982.942.100

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan								
3.27.05.2.01.0 002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim				300 Ha	300 Ha	203.560.500	188.560.500	370.060.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani								
3.27.05.2.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan				700 Ha	1700 Ha	474.606.400	469.606.400	903.094.420

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
3.27.05.2.01.0 004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis									
		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam				1 laporan	1 laporan	22.000.000	22.000.000	11.805.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang Bersifat Zoonosis								
3.27.05.2.01.0 006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
		Jumlah penanggulangan pasca bencana				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.0 00	995.000.000	1.870.491.0 00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan								
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				15%	24 %	334.456.000	331.856.000	300.579.700

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan				10 %	10% 0	150.456.000	150.456.000	146.311.700
3.27.06.2.01.002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				6 Dokume n	6 Dokume n	20.000.000	20.000.000	22.773.100
3.27.06.2.01.0 005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				4 Laporan	4 Laporan	130.456.000	130.456.000	123.538.600
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi	Persentase usaha peternakan yang				50 %	40% 0	84.000.000	81.400.000	73.122.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0 Dokume n	0 Dokume n	0	0	0
3.27.06.2.02.005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawas				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000	81.400.000	73.122.000
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko,	Persentase usaha pengecer obat				75 %	75% 0	100.000.000	100.000.000	81.146.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapat pembinaan dan pengawasan Persentase usaha usaha pengecer obat hewan dan bahan pertanian lainnya yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan								
3.27.06.2.03.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	55.000.000	46.824.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hewan yang Memenuhi Komitmen								
3.27.06.2.03.0 002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	34.322.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hewan yang Diawasi								
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mandiri				6.00%	6.00%	2.755.006.852	3.170.806.852	4.011.629.266

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	720.000.000	1.160.800.0 00	1.125.800.0 00
3.27.07.2.01.0 002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				130 Unit	130 Unit	794.652.472	774.652.472	671.839.266
3.27.07.2.01.0 003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				120 Orang	60 Orang	310.577.200	305.577.200	1.363.365.6 60
3.27.07.2.01.0 009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA D				
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				20 Dokume n	10 Dokume n	685.840.500	685.840.500	618.188.360
J U M L A H								52.416.679. 645	54.015.620. 844	55.436.198. 141

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar bersama dengan DPRD, seyogianya memperhatikan konsistensi antara Renja Perubahan Tahun 2025 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang Tahun 2025 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas Pertanian berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Bappelitbang Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun 2025 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan. Berpedoman pada penjelasan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2025 ini mengajukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dengan alasan antara lain :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 000.7.2.4/284/PPE/Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025.
2. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang tanggal 7 Mei 2025 perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025.
3. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/141/PPE-Bappedalitbang tanggal 24 Mei 2025 perihal Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, maka dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD

Kabupaten Banjar Tahun 2025 dan Project strategis RPJMD;

3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025;
4. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah (Musrenbang)
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 24);

27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 36);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah untuk memantapkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana setelah dilakukannya penyesuaian sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- b. Sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan perubahan Renja K/L dan perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berkenaan sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dilampirkan juga Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d triwulan I tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, meliputi :

1. Perubahan Indikator Kinerja.
2. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

4. Alasan dilakukan perubahan.

Dilampirkan juga tabel sebagaimana hasil laporan Renja Perubahan pada aplikasi SIPD

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap SKPD yang bersangkutan.

Lampiran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DAN CAPAIAN RENSTRA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan rencana strategis untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Banjar

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada Sasaran RKPD :

Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD Kab Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
																										I	II	III
1	2	3	4	5		6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = (13 / 5) * 100%		15		
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	persen	11.114.450.374	100	Persen	56.399.980.800	25	178.023.500							25	178.023.500						Asisten I/ Bagian Pemerintahan/Bagian Kesra/Bagian Hukum	
			Nilai LPPD	3,2005	831.204.873	3,15	Nilai	409.776.150	3,175	Nilai	568.073.800	-	-							0							Asisten I/ Bagian Pemerintahan	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	14.147.369.035	100	persen	11.114.450.374	100	Persen	55.517.251.100	25	23.271.968.118							41,92	23.271.968.118						Asisten I/ Bagian Pemerintahan/Bagian Kesra/Bagian Hukum
			Nilai LPPD	3,2005	831.204.873	3,15	Nilai	409.776.150	3,175	Nilai	122.888.00	-	-														Asisten I/ Bagian Pemerintahan	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitas, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	831.204.873	100	Persen	60.845.000	100	Persen	351.796.787	25	128.223.500							36,45	178.023.500						Bagian Pemerintahan	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100		100	Persen	159.521.150	100	Persen		25	10.343.500							9,70	10.343.500						Bagian Pemerintahan	

	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100		100	Persen	158.846.000	100	Persen	106.587.500	25	10.343.500						9,70	10.343.500				Bagian Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	83.510.200	4	Dokumen	60.845.000	4	Dokumen	122.888.000	1	10.092.000						12,08	10.092.000				Bagian Pemerintahan/ Subbag Administrasi Pemerintah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	574.298.368	4	Dokumen	159.521.150	4	Dokumen	106.587.500	1	10.343.500						9,70	10.343.500				Bagian Pemerintahan/ Subbag Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	176.872.211	5	Dokumen	158.846.000	5	Dokumen	275.381.000 127.635.087	4	107.788.000						66,66	107.788.000				Bagian Pemerintahan/ Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100	12.631.961.035	100	Persen	6.064.499.400	100	Persen	53.684.418.000	25	22.842.471.418						42,55	22.842.471.418				Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100		100	Persen	1.998.360.000	100	Persen	4.734.810.000	25	836.520.000						17,62	836.520.000				Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100		100	Persen	2.754.509.620	100	Persen	6.559.383.500	25	3.081.279.900						46,98	3.081.279.900				Bagian Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	8.000.000.000	8	Dokumen	6.064.499.400	9	Dokumen	42.896.974.000	4	18.924.671.518						44,63	18.924.671.518				Bagian Kesejahteraan Rakyat/ Subbag Bina Mental dan Spritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi Kesehatan,, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	4	1.531.961.035	3	Dokumen	1.998.360.000	4	Dokumen	4.734.810.000	1	836.520.000						17,67	836.520.000				Bagian Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Sosial

		Facilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	37.420.639	100	Persen	30.564.000	100	Persen	73.424.100	0	13.443.200							18,31	13.443.200					Bagian Pemerintahan
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	37.420.639	1	Dokumen	30.564.000	1	Dokumen	73.424.100	0	13.443.200							18,31	13.443.200					Bagian Pemerintahan/ Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
2	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544 1.500.025.900	100	Persen	567.275.360	100	Persen	434.415.934	25	101.640.000							6,78	101.640.000					Asisten II/ Bagian Administrasi Pembangunan / Bagian Perekonomian dan SDA
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	76,65	Indeks	347.876.744	60	Indeks	228.348.000	0	211.922.300							0	211.922.300					Bagian PBJ
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100	1.764.663.544	100	Persen	567.275.360	100	Persen	434.415.934	25	31.667.000							25	31.667.000					Asisten II/ Bagian Administrasi Pembangunan / Bagian Perekonomian dan SDA
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81	2.000.000.000	76,65	Indeks	347.876.744	60	Indeks	228.348.000	0	211.922.300							0	211.922.300					Bagian PBJ
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Facilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	100	800.000.000	100	Persen	456.859.160	100	Persen	647.874.300	25	9.975.000							1,54	9.975.000					Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	13	550.000.000	12	Dokumen	328.318.960	20	Dokumen	417.778.700	3	4.480.000							1,34	4.480.000					Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag BUMD dan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	250.000.000	4	Laporan	128.540.200	4	Laporan	230.095.600	1	5.495.000							2,68	5.495.000					Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Perekonomian

		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	100	864.663.544	100	Persen	75.044.200	100	Persen	102.606.200	25	8.544.000						10,64	8.544.000					Bagian Pembangunan
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	476.199.544	4	Dokumen	42.079.500	4	Dokumen	46.352.500	1	4.200.000						12,35	4.200.000					Bagian Pembangunan/ Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	134.784.000	4	Laporan	20.905.100	4	Laporan	39.139.700	1	3.784.000						11,63	3.784.000					Bagian Pembangunan/ Subbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengelolaan dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	253.680.000	2	Laporan	12.059.600	2	Laporan	17.141.000	0	560.000						4,08	560.000					Bagian Pembangunan/ Subbag Pengendalian Program
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	100	2.000.000.000	76,65	Persen	347.876.744	60	Persen	1.152.920.100	66,67	73.192.000						8,74	73.192.000					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	400.000.000	5	Dokumen	19.443.250	5	Dokumen	228.348.000	1	42.433.000						20,33	42.433.000					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.000.000.000	5	Dokumen	206.160.094	5	Dokumen	429.018.100	0	0						0	0					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	105	600.000.000	73	orang	122.273.400	95	orang	495.554.000	7	30.759.000						13,59	30.759.000					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitas kebijakan SDA	100	100.000.000	100	Persen	35.372.000	100	Persen	54.978.000	25	9.929.000							22,37	9.929.000					Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	45.000.000	2	Dokumen	10.733.000	2	Dokumen	21.068.000	0	0							0						Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Sumber Daya Alam
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96	55.000.000	94	Dokumen	24.639.000	92	Dokumen	33.910.000	0	9.929.000							36,01	9.929.000					Bagian Perekonomian dan SDA/ Subbag Sumber Daya Alam
3	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100	56.547.849.814	100	Persen	115.378.900	100	Persen	104.999.800	25	28.700.000							25	28.700.000					Asisten III/Bagian Organisasi/Bagian Umum/Bagian Prokopim/Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		82	498.726.802	81,05	nilai	17.570.432.619	78	nilai	20.057.836.841	0	2.972.879.120							0	2.972.879.120					Asisten III / Bagian Perencanaan dan Keuangan
		IKM Sekretariat Daerah Kab.Banjor		90	35.592.097.664	84	Indeks	25.529.968.560	86	Indeks	32.594.951.392	0	7.010.575.724							0	7.010.575.724					Asisten III/Bagian Umum/Bagian Prokopim
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100	56.547.849.814	100	Persen	115.378.900	100	Persen	54.069.040.682	25	8.457.329.237							25	8.457.329.237					Asisten III/Bagian Organisasi/Bagian Umum/Bagian Prokopim/Bagian

																									Perencanaan dan Keuangan
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	42.100.000	81,05	nilai	17.570.432.619	76	nilai	20.057.836.841	0	2.972.879.120						0	2.972.879.120						Asisten III / Bagian Perencanaan dan Keuangan
		IKM Sekretariat Daerah Kab.Banjar	90	35.592.097.664	84		25.529.968.560	86	Indeks	32.594.951.392		7.010.575.724						0							Asisten III/Bagian Umum/Bagi an Prokopim
	Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	1,3	1.791.148.754	1,3	Skor /nilai	440.181.050	1,3	Skor/n ilai	1.128.768.100	0	91.298.200						8,09	91.298.200						Bagian Organisasi
		Persentase pengelolaan tatalaksana	100		82,49	Persen		100	Persen		0							0							Bagian Organisasi
		Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100		100	Persen		100	Persen		0							0							Bagian Organisasi
		Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100		0	Persen		100	Persen		0							0							Bagian Organisasi
		Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100		87,23	Persen		100	Persen		14							14							Bagian Organisasi
	Pengelolaan Kelembagaa n dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelebagaan dan Analisis Jabatan	9	204.102.860	4	Dokum en	215.530.000	2	Dokum en	159.283.800	0	18.953.500						15,56	18.953.500						Bagian Organisasi/ Subbag Kelembagaa n dan Analisa Jabatan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6		6	Lapor an		5	Lapora n		0		42.623.000					12,60		42.623.000					Bagian Organisasi/ Subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7		7	Doku men		7	Dokume n		1		21.337.300					9,42		21.337.300					Bagian Organisasi / Subbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-		1	Dokume n		0		4.205.000					6,94		4.205.000					Bagian Organisasi/ Subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100	498.726.802	79,87	Persen	115.378.900	82	Persen	128.153.900	0	10.920.000							8,52	10.920.000					Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Bagian yang berkinerja baik	100		100	Persen		100	Persen		25								25						Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100		100	Persen		100	Persen		25								25						Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Nilai Sakip Setda	82,5		100	Nilai		100	Nilai		25								25						Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	334.942.802	12	Dokumen	54.345.800	12	Dokumen	41.785.000	4	3.640.000							9,06	3.640.000					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	121.684.000	3	Laporan	20.701.400	3	Laporan	28.495.400	0	0							0	0					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Pelaporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	42.100.000	28	Laporan	40.331.700	28	Laporan	66.155.700	4	7.280.000							23,99	4.179.400					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Pelaporan
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	1	Laporan	8.821.500	0	0							0,00	0					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Pelaporan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1	Laporan	11.670.000,0	0	0							0,00	0					rencanaan dan Keuangan/ Subbag Perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	20.810.806.250	100	persen	16.933.560.256	100	persen	20.566.905.500	25	4.522.764.317							25	4.522.764.317					Bagian Perencanaan dan Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	20.663.606.250	117	orang/bulan	16.528.476.156	117	orang/bulan	19.599.400.000	121	4.512.864.317							23,03	4.512.864.317					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	4.798.600	1	Laporan	0	0	0													Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	147.200.000	12	Dokumen	405.084.100	12	Dokumen	921.709.500	3	4.860.000							0,53	4.860.000					Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100	644.572.400	100	Persen	48.995.287	100	Persen	177.654.500	25	8.966.901							25	8.966.901					Bagian Umum
	Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100		100	Persen	69.710.800	100	Persen	82.029.500	25	33.774.000							25	33.774.000					Bagian Hukum
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	144.572.400	320	orang	69.710.800	440	orang	82.029.500	-	-							-						Bagian Hukum/ Subbag Dokumentasi dan Informasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	500.000.000	15	orang	48.995.287	80	orang	95.625.000	1	8.966.901							9,38	8.966.901					Bagian Umum/ Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100	6.306.649.161	100	Persen	4.794.429.670	100	Persen	6.730.077.000	25	702.015.955							10,43	702.015.955					Bagian Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	54.663.390	1	Paket	48.044.000	6	Paket	49.694.000	1	7.620.200							15,33	7.620.200					Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Paket			Paket	200.82 3.000	0	0							0	0					Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Paket			Paket	27.540. 000	0	0							0	0					Bagian Hukum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	718.165 .061	8	Paket	1.327 .095. 000	8	Paket	2.858.9 20.000	1	1.981.0 00							1	1.981.000					Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	33.820. 710	4	Laporan	28.66 0.000	4	Laporan	45.600. 000	1	0							0	0					Bagian Umum/ Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	5.500.0 00.000	2	Laporan	3.390 .630. 670	12	Laporan	3.547.5 000.00 0	3	692.414 .755							3	692.414.75 5					Bagian Umum/ Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	10 0	6.413.7 03.105	10 0	Persen	5.657 .211. 000	100	Persen	4.865.2 49.000	25	0							0	0					Bagian Umum
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	2.338.9 43.763	4	Unit	2.421 .500. 000	2	Unit	2.150.0 00.000	0	0							0	0					Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	3.750.0 00.000	8	Unit	2.602 .531. 000	4	Unit	585.85 0.000	0	0							0	0					
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	-	-	-	-	-	4	Unit	700.00 0.000	0	0							0	0					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	324.759 .342	4	Paket	633.1 80.00 0	8	Paket	1.429.3 99.000	0	0							1	0					Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	100	7.803.542.604	100	Persen	4.816.927.191	100	Persen	6.293.212.000	25	1.389.069.345							22,22	1.389.069.345					Bagian Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	150.000.000	12	laporan	36.250.000	2	laporan	95.000.000	0	25.090.000							31,36	25.090.000					Bagian Umum/ Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.908.196.668	12	Laporan	1.296.871.071	12	Laporan	1.372.767.000	3	341.494.565							24,88	341.494.565					Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	333.778.198	2	Laporan	254.540.000	4	Laporan	657.895.000	1	25.170.000							3,830	25.170.000					Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.411.567.738	12	Laporan	3.229.266.120	13	Laporan	4.167.550.000	3	997.314.780							24,07	997.314.780					Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100	5.041.170.087	100	Persen	5.439.460.394	100	Persen	6.943.933.442	25	671.589.703							9,77	671.589.703					Bagian Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	1.130.578.020	21	Unit	784.092.695	13	Unit	521.760.000	4	94.023.369							18,02	94.023.369					Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	2.578.507.036	109	Unit	1.509.542.098	129	Unit	2.331.710.000	25	351.629.689							15,08	351.629.689				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	80.525.500	16	Unit	63.198.750	16	Unit	73.205.000	4	11.135.000							15,21	11.135.000				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	169.103.550	7	Unit	2.184.864.783	6	Unit	3.034.492.942	1	41.930.670							1,42	41.930.670				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	2.332.710.000	0	0							0	0				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	571.731.050	6	Unit	453.014.764	6	Unit	3.034.492.942	2	123.231.375							25,69	123.231.375				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	250	510.724.931	250	Unit	444.747.304	250	Unit	452.680.000	50	49.639.600							10,97	49.639.600				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	275.000.000	100	Persen	101.510.000	100	Persen	1.100.403.840	25	378.647.375							34,41	378.647.375				Bagian Umum
	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	149.294.277	100	Persen	149.941.759	100	Persen	135.600.000	25	740.000							25	740.000				Bagian Umum
	Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	144.945.900	100	Persen	168.161.469	100	Persen	175.000.000	25	35.657.191							25	35.657.191				Bagian Perencanaan dan Keuangan

	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	600.000.000	100	Persen	600.000.000	100	Persen	600.000.000	25	150.000.000						25	150.000.000				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	275.000.000	2	orang/bulan	168.161.469	24	orang/bulan	189.803.840	6	47.491.587						25,02	47.491.587				Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Subbag Keuangan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	149.294.277	9	Paket	101.510.000	9	Paket	135.600.000	9	135.198.000						99,70	135.198.000				Bagian Umum/ Subbag Perlengkapan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	144.945.900	7	orang	149.941.759	6	orang	175.000.000	1	45.957.788						26,26	45.957.788				Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	600.000.000	2	orang/bulan	600.000.000	24	orang/bulan	600.000.000	6	150.000.000						25,00	150.000.000				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Subbag Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100	3.041.178.858	100	Persen	673.406.334	100	Persen	3.023.246.000	25	460.152.855						16,48	460.152.855				Bagian Umum
	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	100	581.950.702	100	Persen	358.657.923	100	Persen	595.127.000	25	87.731.403						14,74	87.731.403				
	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	100	974.366.925	100	Persen	993.912.463	100	Persen	957.523.000	25	202.235.348						21,12	202.235.348				
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	974.366.925	7	Paket	673.406.334	7	Paket	957.523.000	4	202.235.348						22,51	202.235.348				Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	581.950.702	6	Paket	358.657.923	6	Paket	595.127.000	3	87.731.403							16,13	87.731.403				Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	3.041.178.858	17	Paket	993.912.463	17	Paket	1.470.596.000	8	170.186.104							12,61	170.186.104				Bagian Umum/ Subbag Rumah Tangga
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	100	540.264.613	100	Persen	1.607.211.736	100	Persen	292.974.000	25	4.500.000							1,54	4.500.000				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	100	667.562.105	100	Persen	97.397.703	100	Persen	686.524.200	25	28.180.100							7,82	28.180.100				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	100	2.552.842.827	100	Persen	121.196.300	100	Persen	2.092.742.200	25	187.824.553							9,99	187.824.553				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	2.552.842.827	12	Laporan	1.607.211.736	12	Laporan	2.092.742.200	3	187.824.553							9,99	187.824.553				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	667.562.105	12	Laporan	97.397.703	12	Laporan	686.524.200	3	28.180.100							4,27	28.180.100				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	540.264.613	12	Laporan	121.196.300	12	Laporan	292.974.000	3	4.500.000							1,61	4.500.000				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
112.427.400.082										15,74	31.830.937.355							29,46	31.830.937.355				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)										16,27	31.830.937.355												
Predikat kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)										23,89	720.024.221												
Predikat kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah												
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)										28,85	238.888.661												
Predikat kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah												

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 pada tabel di atas, dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Bagian Pemerintahan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;

- Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemerintahan dengan target 4 dokumen pada triwulan I terealisasi 1 dokumen dengan capaian 12,8%.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan target 4 dokumen pada triwulan I terealisasi 1 dokumen dengan capaian 9,70%.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial capaiannya 17,67% dengan realisasinya 1 dokumen dari target 4 dokumen.

3. Bagian Hukum pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah capaiannya 19,56% dengan realisasinya 258 dokumen dari target 700 dokumen.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum capaiannya 22,30% dengan realisasinya 1 kasus dari target 28 kasus.
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum capaiannya 18,69% dengan realisasi 216 dokumen dari target 650 dokumen.

4. Bagian Pemerintahan pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri capaiannya 18,31% dengan realisasinya 0 dokumen dari target 2 dokumen.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada triwulan I realisasi dokumen yang selesai 0 dokumen dari target 5 dokumen sehingga capaiannya 0%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa capaiannya 20,33% dengan realisasi 1 dokumen dari target 5 dokumen.
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada triwulan I realisasi 7 orang dari target 95 orang sehingga capaiannya 13,59%.
2. Bagian Perekonomian dan SDA Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada triwulan I realisasi dokumen yang selesai 2 dokumen dari target 20 dokumen sehingga capaiannya hanya 1,34%.
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian realisasinya 1 laporan dari target 4 laporan jadi capaiannya 2,68%.
3. Bagian Administrasi Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan pada triwulan I realisasi dokumen yang selesai 1 laporan dari target 4 laporan sehingga capaiannya 12,35%.

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan realisasinya 1 dokumen dari target 4 dokumen sehingga capaiannya 11,63%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada triwulan I realisasinya 0 laporan dari target 2 laporan sehingga capaiannya 4,08%.
4. Bagian Perekonomian dan SDA Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada triwulan I realisasi dokumen yang selesai 0 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaiannya 0%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Bagian Umum pada :

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada triwulan I ini terealisasi 0 orang dari target 800 orang sehingga capaiannya 0%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada triwulan I ini terealisasi 2 orang dari target 80 orang sehingga capaiannya 9,38%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada triwulan I ini terealisasi 0 paket dari target 1 paket sehingga capaiannya 15,33%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada triwulan I ini terealisasi 0 paket dari target 3 paket sehingga capaiannya 0%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada triwulan I ini terealisasi 1 dokumen dari target 4 dokumen persentase capaiannya 0%.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada triwulan I ini terealisasi 1 paket dari target 6 paket sehingga capaiannya 0,07%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada triwulan I ini terealisasi 1 laporan dari target 4 laporan dengan persentase capaiannya 0%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan pada triwulan I ini dari target 2 unit, namun belum ada terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diampu oleh Bagian Umum pada triwulan I ini dari target 4 unit, namun belum ada terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Alat Besar pada triwulan I ini dari target 1 unit, namun belum ada terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja jumlah paket mebel yang diampu oleh Bagian Umum pada triwulan I juga belum ada terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0% dari target 8 paket yang direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada triwulan

ada 3 laporan terealisasi sehingga capaiannya menjadi 24,88% dari target 12 laporan yang direncanakan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada triwulan I belum ada terealisasi sehingga capaiannya menjadi 3,84% dari target 4 laporan yang direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada triwulan ada 3 laporan terealisasi sehingga capaiannya menjadi 24,07% dari target 13 laporan yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan indikator kinerja jumlah laporan Jumlah unit Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya pada triwulan I ada 4 unit terealisasi sehingga capaiannya menjadi 18,02% dari target 13 unit yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada triwulan ada 1 unit terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0% dari target 7 unit yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara pada triwulan ada 4 unit terealisasi sehingga capaiannya menjadi 15,21% dari target 16 unit yang direncanakan.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada triwulan ada 1 unit terealisasi sehingga capaiannya menjadi 0% dari target 7 unit yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada triwulan ada 50 unit terealisasi sehingga capaiannya menjadi 10,97% dari target 250 unit yang direncanakan.
- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan pada triwulan I ada 4 paket terealisasi sehingga capaiannya menjadi 22,51 % dari target 7 paket yang direncanakan.
- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada triwulan I ada 3 paket terealisasi sehingga capaiannya menjadi 16,13 % dari target 6 paket yang direncanakan
- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan pada triwulan I ada 8 paket terealisasi sehingga

capaiannya menjadi 12,61 % dari target 17 paket yang direncanakan.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada triwulan I ini terealisasi 4 dokumen dari target 12 dokumen sehingga capaiannya menjadi 9,06%.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 3 laporan tetapi sampai triwulan I belum ada realisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan pada triwulan I ini terealisasi 4 dokumen dari target 12 dokumen sehingga capaiannya menjadi 23,99%.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah dengan target 1 dokumen tetapi sampai triwulan I belum ada realisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Kegiatan Perencanaan, Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah dari target 70 data tetapi sampai triwulan I belum ada realisasi sehingga capaiannya menjadi 0%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diampu oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan pada triwulan I ini terealisasi 121 orang/bulan dari target 117 orang/bulan sehingga capaiannya 23,03% Disebabkan adanya ASN yang memasuki masa pensiun.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

pada triwulan I ini terealisasi 0 laporan dari target 1 laporan sehingga capaiannya 0%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 dokumen dari target 12 laporan sehingga capaiannya 0,53%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 dokumen dari target 12 laporan sehingga capaiannya 8,85%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada triwulan I ini terealisasi 0 laporan dari target 2 laporan sehingga capaiannya 0%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada triwulan I ini terealisasi 1 laporan dari target 4 laporan sehingga capaiannya 0%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada triwulan I ini terealisasi 1 dokumen dari target 4 dokumen sehingga capaiannya 12,73%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 dokumen dari target 12 dokumen sehingga capaiannya hanya 0,53%. Disebabkan terkendala adanya keterlambatan ditandatanganinya SK KPA dan PPTK.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada triwulan I ini terealisasi 0 laporan dari target 2 laporan sehingga capaiannya hanya 24,28%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 laporan dari target 12 laporan sehingga capaiannya hanya 8,85%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 laporan dari target 12 laporan sehingga capaiannya hanya 8,85%.

3. Bagian Organisasi

- Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 5 dokumen tetapi sampai triwulan I baru 1 dokumen yang selesai terealisasi sehingga capaiannya hanya 6,32%.
- Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan target 1 Dokumen tetapi sampai triwulan I belum ada realisasi dokumen yang selesai sehingga capaiannya hanya 6,94%.
- Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan target 2 Dokumen tetapi sampai triwulan I belum ada realisasi dokumen yang selesai sehingga capaiannya hanya 15,56%.
- Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang diampu oleh Bagian Organisasi dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata

Laksana yang terealisasi sebanyak 0 laporan dari target 5 laporan sehingga capaiannya cuma 12,60%.

- Kegiatan Penataan Organisasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan target 7 dokumen tetapi sampai dengan triwulan I belum ada dokumen yang teralisasi sehingga capaian kinerjanya cuma 9,42%

4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan yang diampu oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Laporan fasilitasi keprotokolan dari Target 12 laporan sampai dengan triwulan I ada sebanyak 3 laporan yang terealisasi sehingga capaian kinerjanya adalah 9,99%.
- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dari Target 12 laporan sampai dengan triwulan I ada sebanyak 3 laporan yang terealisasi sehingga capaian kinerjanya adalah 4,27%.
- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dari Target 12 laporan, dan sampai dengan triwulan I ini ada terealisasi sebanyak 3 laporan sehingga capaian kinerjanya adalah 1,61%.

2. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi

Daerah yang diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan target 5 dokumen sampai triwulan I sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 4 dokumen sehingga capaiannya menjadi 66,66%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan target 9 dokumen sampai triwulan sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 4 dokumen sehingga capaiannya menjadi 44,63%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan target 4 dokumen sampai triwulan sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 1 dokumen sehingga capaiannya menjadi 47,10%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 92 dokumen pada tri wulan I sudah terealisasi sehingga capaiannya menjadi 36,01%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 laporan dari target 12 laporan, telah

mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 45,81%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diampu oleh Bagian Umum pada triwulan I ini telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 31,36% dari 2 laporan yang ditargetkan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada triwulan I ini terealisasi 1 unit dari target 7 unit, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 25,69%.
4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada triwulan I ini terealisasi 6 orang/bulan dari 24 orang/bulan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 25,02%.
5. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada triwulan I ini terealisasi 9 paket dari target 9 paket yang direncanakan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 99,70%.
6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan

indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada triwulan I ini terealisasi 1 orang dari target 6 orang yang direncanakan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 26,26%.

7. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada triwulan I ini terealisasi 6 Oarang/Bulan dari 24 Oarang/Bulan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 25,00%.

3. Realisasi Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diampu oleh Bagian Pemerintahan dengan target 5 dokumen sampai triwulan I sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 4 dokumen sehingga capaiannya menjadi 66,66%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan target 9 dokumen sampai triwulan sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 4 dokumen sehingga capaiannya menjadi 44,63%.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan target 4 dokumen

sampai triwulan sudah terealisasi sesuai rencana yaitu sebanyak 1 dokumen sehingga capaiannya menjadi 47,10%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan :

1. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan target 92 dokumen pada tri wulan I sudah terealisasi sehingga capaiannya menjadi 36,01%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai ketentuan

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada triwulan I ini terealisasi 3 laporan dari target 12 laporan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 45,81%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diampu oleh Bagian Umum pada triwulan I ini telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 31,36% dari 2 laporan yang ditargetkan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada triwulan I ini terealisasi 1 unit dari target 7 unit, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 25,69%.
4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan

Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada triwulan I ini terealisasi 6 orang/bulan dari 24 orang/bulan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 25,02%

5. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada triwulan I ini terealisasi 9 paket dari target 9 paket yang direncanakan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 99,70%.

6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diampu oleh Bagian Umum dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada triwulan I ini terealisasi 1 orang dari target 6 orang yang direncanakan, telah mencapai target yang direncanakan sehingga capaiannya 26,26%.

7. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dengan indikator kinerja jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH yang disediakan dengan capaian kinerja pada tri wulan I adalah 71,43% terealisasi sebanyak 5 paket dari target 7 paket.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya pergeseran anggaran atau rencana anggaran kas, tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan per triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang antara

lain disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan kemudian untuk sasaran karena indikator dalam bentuk persentase, maka realisasi belum maksimal dikarenakan cukup banyak realisasi yang direncanakan, direalisasikannya pada triwulan IV, sehingga pada capaian triwulan I ini untuk sasaran masih belum sesuai target.

- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terpenuhinya target kinerja dikarenakan dilakukannya evaluasi per bulan terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja sehingga jika kekurangan capaian di bulan ini bisa dikejar di bulan berikutnya.
 - c. Program, kegiatan, dan sub kegiatan melebihi target kinerja dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
 - c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan anggaran belanja yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan indikator kinerja;
- b. Memangkas dan memaksimalkan anggaran belanja yang tersedia dan lebih memprioritaskan belanja yang dianggap mendesak;
- c. Memfokuskan belanja dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD dan RPJMD;
- d. Memperhatikan isu strategis pada urusan yang diampu pada tahun 2026;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan rencana aksi per triwulan baik pencapaian kinerja maupun serapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana salah satu implementasinya adalah pemberian reward dan punishment kepada pengampu kinerja yang mencapai/tidak mencapai target
- f. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang sudah dipetakan sebagai risiko strategis dan risiko operasional yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja
- g. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik di internal maupun eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

2.2 PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 71 (Tujuh Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Jika melihat capaian realisasi program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2025 s.d triwulan I, pada level sub kegiatan sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih pencapaiannya masih di bawah target.

Pencapaian dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dijabarkan di atas namun di sisi lain juga terdapat faktor penyebab/penghambat yang juga telah dijabarkan di atas. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bagian di

lingkup Sekretariat Daerah. Terhadap kinerja yang belum bisa tercapai akan dilakukan analisa dan tindak lanjut agar pada akhir tahun periode Renstra bisa terpenuhi.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun berakhirnya renstra mengalami perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta perubahan indikator dan target disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang hukum, pemerintahan, kesejahteraan sosial, pembangunan, perekonomian, layanan pengadaan, hubungan kemasyarakatan, organisasi, serta umum;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
- 3) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD;
- 4) Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Perubahan Target Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun berakhirnya renstra disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dalam penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi dan karena adanya penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

Tujuan dan sasaran Renja 2025 (sebelum perubahan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100%
		Nilai LPPD	3,15 Nilai
	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100%
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	80 Nilai

Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	70 Nilai/skor

Pada perubahan Renja terdapat perubahan tujuan, sasaran dan indikator pada tahun 2025 ini, dikarenakan ada penyesuaian dengan pohon kinerja dan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini.

Tujuan dan sasaran Renja 2025 (sesudah perubahan) sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	79,46
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja EPPD	Tinggi
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi General	Nilai Reformasi Birokrasi General	69,42 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	9,94 Nilai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,75 Nilai
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui BUMD	Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD pada PAD	5 %

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	86,70 Nilai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

3.2. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini, ada perubahan terhadap jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (Tiga) Program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah;
 5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan;
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pengadaan Mebel;
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 4. Pengadaan Alat Besar;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan & Perijinan Alat Besar;
 8. Pemeliharaan Mebel;
- g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

h) Fasilitas Kerumah Tangga Sekretariat Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;

i) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

Sub Kegiatan :

1. Fasilitas Keprotokolan;
2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan;
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan;

j) Penataan Organisasi;

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana;
5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

k) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;

2). Program Perekonomian dan Pembangunan;

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;

b) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;

c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ;

d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;

3). Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Kegiatan :

a). Administrasi Tata Pemerintahan;

Sub Kegiatan :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan;
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ;

b). Fasilitasi Kerjasama Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;

c). Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait

- Kesejahteraan Masyarakat;
- d). Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 2. Fasilitasi Bantuan Hukum;
 3. Pendokumentasian Produk Hukum & Pengelolaan Informasi Hukum;

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Belanja Langsung yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Banjar adalah sebesar **Rp.112.427.400.082,00,-** (Seratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah). Dana/pagu pergeseran adalah sebesar **Rp.108.063.265.742,00.** Dan pendanaan perubahan APBD Kabupaten Banjar adalah sebesar **Rp.116.198.611.393** (Seratus Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Tiga Ribus Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan Lama	Indikator Kinerja Program (Outcome) , Kegiatan (Output) dan Sub kegiatan Baru	Target		Pagu (Rp)			Alasan Perubahan
									Renja 2025 (APBD)	Perubahan Renja 2025 (perubaha n RKPD)	Renja 2025 (APBD)	Perubahan Renja 2025 (perubahan RKPD)	Jumlah Perubahan n (+/-)	
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			100 %	100 %	112.427.400.082	116.198.611.393	3.771.211.311	
						SEKRETARIAT DAERAH					112.427.400.082	116.198.611.393	3.771.211.311	
							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi kegiatan layanan masyarakat bidang kesra	100% 3,175	100% 3,175	56.399.980.800	55.597.765.199	802.215.601	
							Nilai LPPD	Status Kinerja EPPD	Tinggi	Tinggi				
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					56.399.980.800	55.597.765.199	802.215.601	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan					546.085.000	352.996.787	193.088.213	
							Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik	100 %	100 %				
							Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		100 %	100 %				
							Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan		100 %	100 %	546.085.000	352.996.787	193.088.213	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Fasilitasi administrasi pemerintahan	4 Dok	4 Dok	122.888.000	84.710.200	-38.177.800,00	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi administrasi kewilayahan	4 Dok	4 Dok	147.816.000	106.587.500	-41.228.500	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya fasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Otonomi daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penerapan SPM yang sesuai pedoman, Jumlah Dokumen LPPD yang sesuai pedoman	5 Dok	5 Dok	275.381.000	161.699.087	-113.681.913	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

							Jumlah Dokumen LKPj yang sesuai pedoman						
4	01	02	2.04	0001		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Otonomi daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	2 Dok	2 Dok	107.232.700	95.488.500	-11.744.200,0	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					54.203.757.500	53.684.418.000	-519.339.500	
						Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	Persentase Fasilitas kegiatan layanan masyarakat bidang kesra	100 %	100 %				
						Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
						Persentase fasilitasi dan koordinas di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Fasilitas Kegiatan Bina Mental Spiritual Tepat Sasaran	8 Dok	8 Dok	42.896.974.000	42.407.003.000	-489.971.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Laporan Verifikasi dan Pemantauan pada Kebijakan Kesejahteraan Sosial	3 Dok	3 Dok	4.747.400.000	4.734.810.000	-12.590.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Laporan Verifikasi dan Pemantauan pada Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	4 Dok	4 Dok	6.559.383.500	6.542.605.000	-16.778.500	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					1.542.905.400	1.464.861.912	-78.043.688,00	
							Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Ketepatan waktu pengisian instrumen IKK	100 %	100 %				
							Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah inisiatif pemerintah daerah	100 %	100 %				
							Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang meningkatkan kompetensinya	100 %	100 %				
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Pendampingan Pengukuran Kualitas Kebijakan	700 Dok	700 Dok	339.659.600	326.750.000	-12.909.600,00	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum terkait bantuan hukum	12 Kasus	12 Kasus	649.551.800	611.570.400	-37.981.400,00	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Daftar Produk Hukum Daerah yang dievaluasi	Jumlah produk hukum dan informasi pengelolaan hukum yang didokumentasikan	650 Dok	650 Dok	553.694.200	526.541.512	-27.152.688,00	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah					107.232.700	95.488.500		
							Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %				

	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kerjasama daerah	1 Dok	1 Dok	107.232.700	95.488.500	-11.744.200,00	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%				
							Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	81/ Indeks	81/ Indeks				
	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.958.378.600	1.481.935.200	476.443.400	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					647.874.300	546.401.300	101.473.000	
							Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian.	Persentase BUMD yang sehat	100 %	100 %				
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang mendapat Opini Wajar/WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	20 Dok	20 Dok	417.778.700	316.466.300	101.312.400	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Agenda Pengendalian Inflasi yang dijalankan, Jumlah Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	4 Lap	4 Lap	230.095.600	229.935.000	160.600	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					102.606.200	99.476.600	3.129.600	
							Persentase keberhasilan Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Pembangunan Yang ditindaklanjuti	100 %	100 %				
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 Dok	4 Dok	46.325.500	34.016.000	-12.309.500	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pembangunan	4 Lap	4 Lap	39.139.700	51.723.100	12.583.400	Penambahan Anggaran pada Makanan Minuman Rapat untuk Koordinasi dengan SKPD terkait Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembangunan di

														Kabupaten Banjar
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah yang tepat waktu	2 Lap	2 Lap	17.141.000	13.737.500	-3.403.500	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.152.920.100	791.671.500	361.248.500	
							Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Level Kematangan UKPBJ	80 %	Level 3 (proaktif)				
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Layanan Barang/Jasa Pemerintah	5 Dok	5 Dok	228.348.000	225.164.800	-3.183.200	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Fasilitasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Dok	5 Dok	429.018.100	294.188.100	-134.830.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan sebagian pagu digeser ke Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Domain Kematangan UKPBJ	95 Org	95 Org	495.544.000	272.318.600	-223.225.400	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan sebagian pagu digeser ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					54.978.000	44.385.800	10.592.200	
							Persentase Fasilitasi Kebijakan SDA	Persentase kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %				

	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Kebijakan SDA yang ditindaklanjuti	2 Dok	2 Dok	21.068.000	16.811.800	10.256.200	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan sebagian pagu digeser ke Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Kebijakan SDA yang ditindaklanjuti	92 Dok	92 Dok	33.910.000	27.574.000	6.336.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan sebagian pagu digeser ke Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum							Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	100 %				
							Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		89,66 Nilai	89,76 Nilai				
	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					54.069.040.682	59.118.910.994	5.049.870.312	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					128.153.900	131.254.900	3.101.000	
							Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %				
							Persentase Bagian yang berkinerja baik		100 %	100 %				
							Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel		100 %	100 %				
							Nilai SAKIP Setda		77,5 Nilai	77,5 Nilai				
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terinput sesuai ketentuan	13 Dok	13 Dok	41.785.000	51.041.500	9.256.000	Penambahan Anggaran karena kekurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat diakibatkan Intensitas Kegiatan Rapat dan Desk pembahasan

														POKIN Setda diawal tahun yang cukup banyak menyerap anggaran
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	28.495.400	23.245.600	5.249.800	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	28 Lap	28 Lap	37.382.000	38.890.800	1.508.800	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat	
4	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Lap	Lap	8.821.500	8.333.000	488.500	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	
4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Satistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Satistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dok	Dok	11.670.000	9.744.000	1.926.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.566.905.500	20.549.471.800	-17.449.300		
						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %					
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	117 Org	117 Org	19.599.400.000	19.599.400.000	0	-	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	12 Dok	12 Dok	921.709.500	912.426.500	9.283.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	
4	01	01	2.02	0005		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporann Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	2 Laporan	2 Laporan	16.750.000	13.839.200	2.910.800	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	
4	01	01	2.02	0005		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	22.816.000	18.991.900	3.824.100	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun	

						Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semester/ Tahunan APBD						2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4	01	01	2.02	0008		Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/ Semester/ Tahunan APBD	1 Laporan	1 Laporan	6.230.000	4.798.600	1.431.400	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					177.654.500	154.558.500	23.096.000	
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100 %	100 %				
						Persentase jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan		100 %	100 %				
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		9 Paket	9 Paket	135.600.000	135.600.000	-	-
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian Sesuai Ketentuan	800 Orang	800 Orang	82.029.500	58.933.500	23.096.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Rencana Diklat, Jumlah Dokumen IPA	80 Org	80 Org	95.625.000	95.625.000	-	-
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.730.077.000	5.740.471.000	-989.606.000,00	
						Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	Persentase Layanan Umum yang terlaksana	100 %	100 %				
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	1 Paket	49.694.000	49.694.000	-	-
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	2.858.920.000	2.870.990.000	12.070.000	Penambahan Anggaran karena adanya tambahan kebutuhan pada Kantor Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di

														Jakarta guna menunjang fasilitas kepada Pimpinan (Tangga dan Mesin Air) serta pembelian kursi hidrolik
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah data kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	3 paket	200.823.000	200.823.000	-	-
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baca	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 Dok	4 Dok	27.540.000	22.290.000	-5.250.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	45.600.000,	35.340.000	-10.260.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Terfasilitasi	12 Lap	12 Lap	3.547.500.000	2.561.334.000	-986.166.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.865.249.000	9.732.249.000	4.867.000.000	
							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Administrasi Pengelolaan BMD	100 %	100 %				
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan	2 Unit	2 Unit	2.150.000.000	6.950.000.000	4.800.000.000	Penambahan Anggaran untuk Pembelian mobil dinas untuk para Asisten dan Staf Ahli dikarenakan mobil dinas yang terdahulu sudah melebihi masa guna produktif.
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan	0 Unit	0 Unit	585.850.000	585.850.000	-	-

	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel Peralatan dan Mesin Kantor	8 Paket	8 Paket	1.429.399.000,	1.496.399.000	67.000.000	Penambahan Anggaran untuk Kebutuhan fasilitas perlengkapan berupa meja rapat dan kursi kerja untuk ruang kerja Bupati Banjar
	4	01	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			700.000.000	700.000.000	-	-
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.293.212.000,	6.417.213.112	124.001.112	
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan		Persentase Layanan Umum yang terlaksana	100 %	100 %				
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan	2 Lap	2 Lap	95.000.000	79.999.800	15.000.200	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	1.372.767.000	1.532.768.312	160.001.312	Penambahan Anggaran karena beban pembayaran telepon yang mengalami kenaikan, serta kenaikan beban pembayaran listrik dari Gedung Iqro dan Guest House Sultan Sulaiman yang semakin ramai digunakan
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Kantor dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 Lap	4 Lap	657.895.000	656.895.000	-1.000.000.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap	4.167.550.000	4.148.550.000	-19.000.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dan Penyesuaian Anggaran pada insentif pelaksana di kantor perwakilan penghubung kabupaten

														banjar di Jakarta
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.943.933.442	7.753.541.642	809.608.200		
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %					
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	521.760.000	521.760.000	-	-
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Jabatan yang dipelihara	129 Unit	129 Unit	2.331.710.000	2.442.150.000	110.440.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan BBM bagi kendaraan operasional karena adanya tambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 Unit	18 Unit	73.205.000	73.205.000	-	-
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor Yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	3.034.492.942	3.733.661.142	699.168.200	Penambahan Anggaran untuk perbaikan/ rehabilitasi pada bangunan rumah dinas dan Kantor Perwakilan Penghubung dikarenakan usia bangunan.
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	479.755.500	479.755.500	-	-
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Kantor dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	300 Unit	300 Unit	452.680.000	452.680.000	-	-
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.100.403.840	1.175.403.840	75.000.000		

						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi		100 %	100 %				
						Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan		100 %	100 %				
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	24 Org	24 Org	189.803.840	189.803.840	0	-
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 paket	135.600.000	135.600.000	0	-
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	175.000.000	250.000.000	75.000.000	Kebutuhan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan yang meningkat
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/ WKDH yang dibayarkan Dana Penunjang Operasional KDH/ WKDH	24 Orang	24 Orang	600.000.000	600.000.000	0	-
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.023.246.000	2.987.931.000	-35.315.000	
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan		100 %	100 %				
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	957.523.000	1.028.315.000	70.792.000	Penambahan Anggaran karena Meningkatnya kegiatan pimpinan yang memerlukan fasilitasi dalam makan minum kegiatan jamuan tamu

	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	595.127.000	543.919.000	-51.208.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	1.470.596.000	1.415.697.000	-54.899.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.13	4	Penataan Organisasi					1.128.768.100	884.596.100	-244.172.000	
							Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik		1,3 Skor/ Nilai	1,3 Skor/ Nilai				
							Persentase pengelolaan tatalaksana		100 %	100 %				
							Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik		100 %	100 %				
							Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik		100 %	100 %				
							Persentase PD SAKIP bernilai Baik		100 %	100 %				
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen ANJAB, ABK, dan Peta Jabatan	2 Dok	2 Dok	159.283.800	144.283.700	-15.000.100	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah dengan PSO	5 Lap	5 Lap	445.510.500	382.002.500	-63.508.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik	7 Dok	7 Dok	346.949.800	239.815.500	-107.134.300	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah dengan PSO	1 Dok	1 Dok	81.164.000	79.028.000	-2.136.000	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam

														Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah Penanggung Jawab Sasaran Strategis yang Menyampaikan Data dan Informasi Kinerja yang Update	1 Dok	1 Dok	95.860.000	39.466.400	-56.393.600	Pengurangan Anggaran dilaksanakan karena ada kegiatan workshop / asistensi yang dihapus dengan pertimbangan agak sulit dilaksanakan diakhir tahun, karena ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas akan dilaksanakan juga diakhir tahun
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					3.072.240.400	3.693.653.700	488.413.300	
						Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan			100 %	100 %				
						Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan			100 %	100 %				
						Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan			100 %	100 %				
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan sesuai standar	12 Lap	12 Lap	2.092.742.200	2.623.308.600	530.566.400	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah KDH/ WKDH/ Isteri/ Ajudan/ Pendamping) serta Pakaian Adat Daerah untuk Hari Jadi
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Lap	12 Lap	686.542.200	656.122.500	-30.401.700	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Dokumentasi kegiatan Bupati/ wabup dan pejabat pemkab	12 Lap	12 Lap	292.974.000	281.222.600	-11.751.400	Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar kebutuhan dana/pagu indikatif yang diberikan bersumber dari dana APBD perubahan adalah sebesar Rp.116.198.611.393,00, dengan Pagu awal Renja 2025 sebesar Rp.112.427.400.082,00, ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp.3.771.211.311,00.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada pengurangan pagu, dari pagu awal sebesar Rp.54.118.910.994,00 menjadi Rp.58.472.182.994,00, pada APBD perubahan ada penambahan pagu sebesar Rp.5.049.870.312,00.
3. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terjadi pengurangan pagu, dari pagu awal sebesar Rp.56.399.980.800,00 menjadi Rp.55.597.765.199,00, ada pengurangan pagu APBD perubahan sebesar Rp.802.215.601,00.
4. Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terjadi pengurangan pagu, dari pagu awal sebesar Rp.1.958.378.600,00 menjadi Rp.1.481.935.200,00, pada APBD perubahan ada pengurangan pagu sebesar Rp.476.443.400,00.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini antara lain :

1. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang tanggal 7 Mei 2025 perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025;
2. Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/141/PPE-Bappedalitbang tanggal 24 Mei 2025 perihal Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor

- 000.7.2.4/284/PPE/ Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 perihal Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025;
4. Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan;
 5. Mengalami Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
 6. Ada Penambahan Anggaran pada beberapa Bagian yaitu diantaranya :
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan penambahan anggaran karena kekurangan belanja makan minum rapat untuk operasional kegiatan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembangunan di Kabupaten Banjar;
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan pada beberapa Sub Kegiatan yaitu pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah penambahan anggaran karena kekurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat diakibatkan Intensitas Kegiatan Rapat dan Desk pembahasan POKIN Setda diawal tahun yang cukup banyak menyerap anggaran, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD penambahan anggaran karena adanya Penambahan Belanja Makan Minum Rapat, dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah juga penambahan anggaran karena adanya Penambahan Belanja Makan Minum Rapat;
 - c. Bagian Umum pada beberapa Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penambahan anggaran karena adanya tambahan kebutuhan

pada Kantor Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta guna menunjang fasilitasi kepada Pimpinan (Tangga dan Mesin Air) serta pembelian kursi hidrolik;

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan penambahan anggaran karena Pembelian mobil dinas untuk para Asisten dan Staf Ahli dikarenakan mobil dinas yang terdahulu sudah melebihi masa guna produktif;
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel penambahan anggaran karena Kebutuhan fasilitasi perlengkapan berupa meja rapat dan kursi kerja untuk ruang kerja Bupati Banjar;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penambahan anggaran karena beban pembayaran telepon yang mengalami kenaikan, serta kenaikan beban pembayaran listrik dari Gedung Iqro dan Guest House Sultan Sulaiman yang semakin ramai digunakan;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan penambahan anggaran karena untuk biaya pemeliharaan dan BBM bagi kendaraan operasional karena adanya tambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya penambahan anggaran karena adanya perbaikan/ rehabilitasi pada bangunan rumah dinas dan Kantor Perwakilan Penghubung dikarenakan usia bangunan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah penambahan anggaran karena Kebutuhan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan yang meningkat;
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah penambahan anggaran karena eningkatnya kegiatan pimpinan yang memerlukan fasilitasi dalam makan minum kegiatan jamuan tamu;

- d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah KDH/ WKDH/ Isteri/ Ajudan/ Pendamping) serta Pakaian Adat Daerah untuk Hari Jadi Kabupaten Banjar Tahun 2025.
7. Ada Pengurangan Anggaran pada Bagian Organisasi di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah karena ada kegiatan workshop/ asistensi yang dihapus dengan pertimbangan agak sulit dilaksanakan diakhir tahun, karena ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas akan dilaksanakan juga diakhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 yang disusun oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul saat ini. Rencana kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 ini memberikan gambaran mengenai program kegiatan, sasaran, indikator kinerja, target, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Dalam Renja Perubahan tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan, sebagai berikut :

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
 1. Dilakukannya coaching clinic LPPD dan SPM dengan narasumber Kementerian Dalam Negeri.

2. Melakukan Asistensi penyusunan LPPD untuk seluruh Urusan Pemerintahan dengan mengundang Subbag Perencanaan beserta seluruh Bidang Terkait dari Perangkat Daerah.
3. Sebagian besar Perangkat Daerah sudah menyesuaikan Program Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga mempermudah Pengumpulan Data dan Penyajian Data Dukung.
4. Penggunaan Aplikasi Srikandi Dalam Menyampaikan Data Dukung LPPD.
5. Perangkat Daerah menyampaikan Data Dukung Tepat Waktu.
6. Koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD dan Tim Pereviu LPPD (APIP) Kabupaten Banjar.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membantu publikasi.
8. Adanya Instruksi Bupati Banjar untuk melakukan percepatan pengadaan barang/jasa.
9. Pembentukan Tim Pendamping untuk percepatan pengadaan barang/jasa.
10. Pembentukan Tim Pendamping untuk penilaian kinerja penyedia.
11. Tercapainya target kinerja pada sub kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan karena koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banjar, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai eksekutor dalam kelembagaan dan analisis jabatan.
12. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan narahubung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Sasaran fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dengan indikator Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana seluruhnya telah terpenuhi dan tercapai dengan baik hal menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh bagian organisasi dengan support semua perangkat daerah telah berhasil maksimal dalam pencapaian kinerja.

14. Adanya aturan dan ketentuan yang jelas dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana menjadi faktor utama keberhasilan, sehingga pelaksanaan pencapaian kinerja terukur dengan baik dan ada panduan yang nyata melalui aturan untuk pelaksanaan kegiatan secara baik, dan telah ditindaklanjuti dengan membuat pedoman tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
 15. Koordinasi rutin berjalan dengan baik adanya komitmen dan kerjasama antar perangkat daerah.
 16. Perencanaan yang tepat dan terukur, sangat mendukung kelancaran dan kualitas kinerja, selain itu juga dukungan Sumberdaya manusia yang memadai dan anggaran yang mencukupi tak bisa dipungkiri sangat berperan penting untuk kelancaran jalannya program kerja dan menghasilkan kinerja yang baik.
 17. Adanya monitoring dan evaluasi yang berkala dan konsisten juga sangat penting dan tak bisa diabaikan.
 18. Sinergi antar-perangkat daerah, serta mitra pembangunan lainnya menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan program yang bersifat lintas sektor. Koordinasi yang baik dapat mencegah tumpang tindih kegiatan dan memperkuat hasil yang berkelanjutan.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja;
 1. Beberapa Perangkat Daerah ada yang belum mengakomodir Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam menjalankan Program dan Kegiatan sehingga tidak dapat diperoleh data untuk beberapa IKK dalam LPPD.
 2. Kesulitan memperoleh data lintas sektor untuk peningkatan capaian kinerja tertentu.
 3. Tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan Bimbingan Teknis LPPD untuk seluruh Perangkat Daerah.

4. Terjadi perbedaan persepsi antara Tim Penyusun LPPD dan Perangkat Daerah untuk memahami IKK, khususnya IKK yang tidak detail definisi operasionalnya pada Pedoman Umum Penyusunan LPPD.
5. Kepatuhan OPD-OPD dalam pemanfaatan SPSE untuk e-Purchasing belum optimal terutama PPK dalam menginput kontrak dan penilaian kinerja penyedia.
6. Tidak diinputnya Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung ke dalam non e-Tendering/e-Purchasing pada SPSE oleh PPK.
7. Tidak adanya Tim Pendukung untuk PPK dalam pengadaan barang/jasa.
8. Kurangnya jumlah JF Pengelola PBJ karena rendahnya minat ASN Kabupaten Banjar untuk berkarier menjadi JF Pengelola PBJ.
9. Kedisiplinan PPK dalam pencatatan kontrak masih kurang.
10. Masih belum maksimalnya internalisasi penerapan reformasi birokrasi dan SAKIP kepada perangkat daerah dan jajarannya secara menyeluruh.
11. Pemahaman pemberi layanan dan penerima layanan yang masih kurang sehingga masih terdapat tanggapan yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
12. Adanya perubahan nomenklatur ditengah penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan sehingga membuat waktu penyusunan menjadi terhambat.
13. Ada beberapa data jabatan pada dokumen analisa jabatan yang belum sesuai dan masih harus diperbaiki sebelum disampaikan ke Kementerian PAN RB terkait penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan.
14. Belum dipahaminya peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah atau masyarakat sehingga masih ada

permasalahan terkait pembangunan yang bersifat lintas terkait tidak melibatkan Bagian Administrasi Pembangunan.

15. Masih terdapat perbedaan pemahaman kedudukan dan peran Bagian Administrasi Pembangunan dengan peran lain di perangkat lain terkait tugas dan fungsi Bagian Administrasi pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
16. Belum terpenuhinya perangkat atau alat yang dapat mempermudah Bagian Administrasi Pembangunan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kebutuhan data dilakukan secara manual sehingga tidak effesiensi dalam pemanfaatan waktu dan memungkinkan untuk terjadi pengambilan data yang salah.
17. Belum didukung dengan Sumber daya manusia yang bisa memahami dan menginterpretasikan peran Bagian Administrasi Pembangunan dan mampu secara mandiri untuk melaksanakan tugas /instruksi dengan baik.
18. Kondisi tertentu yang memerlukan koordinasi cepat terkendala kesibukan antar perangkat daerah, sehingga perlu penyesuaian waktu dan kondisi agar koordinasi dapat berjalan dengan baik.
19. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja.
20. Meskipun secara umum SDM cukup kompeten, namun masih terdapat kesenjangan kapasitas di beberapa unit kerja. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi, manajemen program, serta kemampuan analisis turut memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga masih kurang memadainya sarana prasarana penunjang yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan. Diperlukan adanya dukungan pelatihan, pengembangan kapasitas, serta sistem pengelolaan kinerja pegawai untuk memperkuat efektivitas kinerja.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar bagian-bagian;
- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
- Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar) ;
- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Sebagai salah satu upaya perbaikan nilai SAKIP, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2026, kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2026, serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang disusun ini, merupakan dokumen perencanaan yang mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen review renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2025, disusun dengan mengacu pada sasaran dan

prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 melaksanakan 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan.

Demikian Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan.

Semoga Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Martapura, 8 Juni 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328199503100



SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 188.4/ 015 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas yang terarah, terukur dan tepat waktu, perlu menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
 23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64);
 25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 16);
 26. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor xx);

27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/522/PPE-Bappedalitbang, Tanggal 10 Juni 2024, Tentang Pedoman Penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Pra-RKA PD) pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;

2. Ketua

- a. mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;

3. Sekretaris

- a. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- c. merumuskan kegiatan prioritas Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- d. melakukan koordinasi internal Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- e. menghimpun data, usulan program kegiatan dan usulan anggaran dari masing-masing bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;

4. Anggota :

- a. menyampaikan data, usulan program kegiatan dan usulan anggaran;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disiapkan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- c. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Maret 2024

The official stamp is circular with a purple ink. It features the coat of arms of Kabupaten Banjar in the center. The text around the coat of arms reads "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 188.4/ /KUM/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
 KERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANJAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
9	Kepala Bagian Umum	Anggota
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANJAR,

 MOKHAMAD HILMAN



BUPATI BANJAR

Martapura, 7 Mei 2025

Nomor : 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Pagu Indikatif SKPD
RKPD Perubahan 2025

Kepada Yth. Kepala SKPD
se- Kabupaten Banjar

di - Tempat

Dalam rangka merumuskan rancangan akhir RKPD Perubahan Tahun 2025 dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakn, TAPD telah menyusun pagu indikatif SKPD menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan agenda penting lainnya di tahun 2025.

Berkenaan hal tersebut maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Pagu indikatif SKPD sudah diinput pada SIPD-RI
2. Seluruh SKPD diminta melakukan penyesuaian pagu sub kegiatan Renja dengan pagu indikatif di SIPD-RI berdasarkan pagu yang telah ditetapkan TAPD (sebagaimana lampiran surat)
3. Jadwal penginputan rincian sub kegiatan dilakukan sampai dengan tanggal 26 Mei 2025, apabila tidak melakukan perbaikan di SIPD-RI sampai batas waktu tersebut maka akan diambil alih TAPD.
4. Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Rankhir Perubahan Renja dan pagu indikatif disampaikan kepada Bidang Bappelitbang Mitra SKPD masing-masing paling lambat tanggal 5 Juni 2025, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati secara kolektif.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI BANJAR



S.I.Kom

MANIS

H. SAIDI MANSYUR,



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Jend. A. Yani No. 2 Martapura Telp/Fax (0511) 4721064/ 4721538 Kalsel 70611
Website: www.banjarkab.go.id E-Mail: banjar@banjarkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I SURAT

Nomor : 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang

Tanggal : 7 Mei 2025

PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025

Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan	Pagu APBD Pergeseran 2025	Penambahan/ Pengurangan	Pagu Indikatif P-RKPD 2025	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.159.760	10.881.740	51.041.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.164.800	8.550.000	36.714.800	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	912.442.100	-4.600	912.437.500	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	338.267.500	43.735.000	382.002.500	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	121.816.400	22.467.400	144.283.800	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	226.433.100	13.395.000	239.828.100	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.548.000	18.480.000	79.028.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.155.700	-26.684.700	39.471.000	
Fasilitasi Keprotokolan	1.880.927.400	25.381.200	1.906.308.600	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	279.414.000	1.808.600	281.222.600	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	659.888.200	-3.765.700	656.122.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.858.920.000	12.070.000	2.870.990.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	22.290.000	0	22.290.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.511.552.000	-55.470.000	1.456.082.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000	0	2.150.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.850.000	0	585.850.000	
Pengadaan Mebel	1.429.399.000	67.000.000	1.496.399.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.372.767.000	160.001.312	1.532.768.312	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.142.550.000	6.000.000	4.148.550.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	2.331.710.000	110.440.000	2.442.150.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.961.971.142	771.690.000	3.733.661.142	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.350.041.000	65.656.000	1.415.697.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	898.315.000	130.000.000	1.028.315.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	32.550.100	19.176.000	51.726.100	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	34.016.000	0	34.016.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	208.691.800	16.473.000	225.164.800	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	402.188.100	-108.000.000	294.188.100	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	232.318.600	0	232.318.600	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	205.007.000	-55.072.000	149.935.000	

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	333.154.000	-196.687.700	136.466.300	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.811.800	0	16.811.800	
Penataan Administrasi Pemerintahan	83.510.200	1.200.000	84.710.200	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	106.587.500	0	106.587.500	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	161.699.087	0	161.699.087	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	73.333.800	22.155.000	95.488.800	
Fasilitasi Bantuan Hukum	623.286.800	-11.716.300	611.570.500	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	257.784.000	68.966.000	326.750.000	
TOTAL	29.000.520.889	1.138.125.252	30.138.646.141	



BUPATI BANJAR

Martapura, 24 Mei 2025

Nomor : 000.7.2.4/ 471 /PPE-Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif
SKPD RKPD Perubahan 2025

Kepada Yth.
Kepala SKPD
se- Kabupaten Banjar
di - Tempat

Sehubungan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025, dan memperhatikan perkembangan alokasi pendanaan serta hasil pembahasan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama ini kami sampaikan Penetapan Pagu Indikatif tambahan bagi perangkat daerah terlampir.

Pagu Indikatif ini merupakan penyesuaian dan penambahan dari Pagu Indikatif sebagaimana telah disampaikan melalui surat sebelumnya Nomor 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang tanggal 7 Mei 2025, perihal Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan Tahun 2025. Penambahan pagu ini mempertimbangkan:

1. Perkiraan kemampuan keuangan daerah terkini
 2. Prioritas pembangunan daerah
 3. Penyesuaian terhadap usulan program/kegiatan strategis
 4. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi
- Berkenaan hal tersebut, maka disampaikan hal-hal berikut:
1. Menjadikan pagu indikatif ini sebagai acuan dalam penyempurnaan rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
 2. Melakukan penyesuaian target kinerja dan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan
 3. Pagu indikatif sudah diinput pada SIPD-RI
 4. Jadwal penginputan rincian sub kegiatan dilakukan sampai dengan tanggal **28 Mei 2025**, apabila tidak melakukan perbaikan di SIPD-RI sampai batas waktu tersebut maka akan diambil alih TAPD.
 5. Menyampaikan Renja hasil penyesuaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bappedalitbang

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Jend. A. Yani No. 2 Martapura Telp/Fax (0511) 4721064/ 4721538 Kalsel 70611
Website: www.banjarkab.go.id E-Mail: banjar@banjarkab.go.id

LAMPIRAN I SURAT

Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang
Tanggal : 24 Mei 2025

PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025
Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan	Pagu APBD Pergeseran 2025	Penambahan/ Pengurangan	Penambahan/ Pengurangan Tahap II	Pagu Indikatif P- RKPD 2025	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.159.760	10.881.740		51.041.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.340.800	8.550.000		38.890.800	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	912.442.100	-4.600		912.437.500	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	338.267.500	43.735.000		382.002.500	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	121.816.400	22.467.400		144.283.800	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	226.433.100	13.395.000		239.828.100	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.548.000	18.480.000		79.028.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.155.700	-26.684.700		39.471.000	
Fasilitasi Keprotokolan	1.880.927.400	25.381.200	717.000.000	2.623.308.600	Penambahan Perjalanan Dinas Luar Daerah KDH/WKDH/Isteri/Ajudan/Pendamping
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	279.414.000	1.808.600		281.222.600	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	659.888.200	-3.765.700		656.122.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.858.920.000	12.070.000		2.870.990.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	22.290.000	0		22.290.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.511.552.000	-55.470.000	1.105.252.000	2.561.334.000	Tambahan Perjadin dari akumulasi usulan seluruh Bagian
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000	0	3.000.000.000	5.150.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.850.000	0		585.850.000	
Pengadaan Mebel	1.429.399.000	67.000.000		1.496.399.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.372.767.000	160.001.312		1.532.768.312	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.142.550.000	6.000.000		4.148.550.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.331.710.000	110.440.000		2.442.150.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.961.971.142	771.690.000		3.733.661.142	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.350.041.000	65.656.000		1.415.697.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	898.315.000	130.000.000		1.028.315.000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.000.000		75.000.000	250.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	32.550.100	19.176.000		51.726.100	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	34.016.000	0		34.016.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	208.691.800	16.473.000		225.164.800	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	402.188.100	-108.000.000		294.188.100	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	232.318.600	0	40.000.000	272.318.600	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	205.007.000	-55.072.000	80.000.000	229.935.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	333.154.000	-196.687.700		136.466.300	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.811.800	0		16.811.800	
Penataan Administrasi Pemerintahan	83.510.200	1.200.000		84.710.200	

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	106.587.500	0		106.587.500	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	161.699.087	0		161.699.087	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	73.333.800	22.155.000		95.488.800	
Fasilitasi Bantuan Hukum	623.286.800	-11.716.300		611.570.500	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	257.784.000	68.966.000		326.750.000	
TOTAL	29.177.696.889	1.138.125.252	5.017.252.000	35.333.074.141	

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

Telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan
Perencanaan Pembangunan Daerah,

Tanggal : 8 Juni 2025

Koordinator,
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Sub Koordinator,
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

FARA HAYANI, SP
NIP. 197202251999032008

RUSDIAN NOOR, SE
NIP. 198404042011011009

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut, M.Si
NIP. 1974092 2000031004

23. Sekretariat DPRD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2025 menyesuaikan dengan Perubahan RKPD/Renja SKPD dan Perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2025, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Penyesuaian Renja SKPD bertujuan untuk menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal dan responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Dan Perubahan APBD bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko;
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan rencana kegiatan baik itu perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah:

- a. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga terwujudnya sinergitas dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025;
- b. Sebagai *instrument* akuntabilitas di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan laporan kinerjanya.
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Dewan yang mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan

Berisi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I tahun 2025. Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar triwulan I tahun 2025, antara lain:

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Perubahan indikator kinerja

2. Jumlah program dan jumlah kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
4. Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berjalan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar melaksanakan satu urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang serta 2 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 91,790,941,934,-

Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar. Sedangkan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025 performa dari masing-masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar masih berjalan (sampai dengan triwulan I). Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*).

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar melakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025, pokok-pokok materi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I dapat diuraikan dalam table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 s/d Bulan Maret
SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Targ et	Realis asi	Dev iasi	Target (RP)	Targe t (%)	Realisasi (RP)	Realisa si (%)	Deviasi				
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.947.352.634	25,55	19,75	5,80	34.075.521.916	38,75	16.159.456.541	18,37	20,38				
1.1	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.891.700	8,46	8,46	0,00	5.685.250	15,00	0	0,00	15,00				
1.1.1	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.741.900	14,10	14,10	0,00	5.685.250	25,00	0	0,00	25,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN PERENCANAAN	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 16 Dokumen dari 32 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - LKjIP tahun 2025 - LKPJ Tahun 2025 - DPA Murni 2025 - RFK ub. Januari - RFK ub. Februari - RFK ub. Maret - Laporan Triwulan - RKA - Rencana aksi - Cascading Faktor Penghambat: - terkendalanya deadline pengumpulan dokumen/laporan secara bersamaan

															Faktor Pendukung: - Koordinasi intern yang baik
1.1.2	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.349.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN PERENCANAAN	1. Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - penginputan walidata disistem Faktor Penghambat: - kurang optimalnya bahan yang diinput Faktor Pendukung: - pengumpulan data tepat waktu
1.1.3	4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN PERENCANAAN	1. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Data dari 1 Data	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan data setiap bidang Faktor Penghambat: jaringan pada sistem kurang lancar Faktor Pendukung: koordinasi dengan mitra berjalan lancar
1.2	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.965.235.100	32,48	32,44	0,04	1.994.287.848	28,63	1.240.725.020	17,81	10,82				
1.2.1	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.730.800.000	32,86	32,86	0,00	1.939.807.848	28,82	1.193.565.020	17,73	11,09	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN : 34 Orang/bulan dari 34 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Dokumen Pencairan Gaji berupa SPP dan SPM ub. maret - Dokumen Pencairan TPP berupa SPP dan SPM ub. maret - THR ASN ub. maret

															Faktor Penghambat: - sistem jaringan Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran pada DPA Sekretariat DPRD
1.2.2	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217.920.000	20,58	20,58	0,00	54.480.000	25,00	47.160.000	p	3,36	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - proses verifikasi SPJ ub. maret - verifikasi pengujian dokumen SPM dan SPP - Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Faktor Penghambat: - dokumen yang kurang tepat waktu Faktor Pendukung: - kerjasama tim yang baik
1.2.3	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.307.500	40,75	0,00	40,75	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - pengimputan data keuangan - laporan keuangan yang diaudit oleh BPK RI - Data dan Informasi Keuangan baik Capaian Keuangan, Aset, Data Laporan Ekuitas, dan Laporan Operasional lainnya - Penyusunan laporan keuangan 2025 akan dilakukan pada akhir tahun

															Faktor Penghambat: - laporan akan dilakukan akhir tahun Faktor Pendukung: - terlaksananya penyusunan hingga akhir tahun
1.2.4	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.207.600	27,93	27,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD : 4 Laporan dari 18 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - laporan keuangan ub. januari - laporan keuangan ub.februari - menyiapkan laporan berita acara penutupan kas bulanan ub. maret 2025 Faktor Penghambat: - Belum ada Jadwal rekon Faktor Pendukung: -tersedianya SDM & anggaran -laporan tersedianya pada aplikasi SIPD RI
1.3	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000	21,95	13,93	8,02	330.000.000	100,00	36.778.224	11,14	88,86				
1.3.1	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	330.000.000	21,95	13,93	8,02	330.000.000	100,00	36.778.224	11,14	88,86	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : Orang dari 12 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Faktor Penghambat: Menunggu Disposisi Sekretaris Dewan Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran kegiatan Bimbingan Teknis

1.4	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.979.832.202	29,74	15,84	13,90	5.546.102.202	69,50	1.264.441.027	15,85	53,65				
1.4.1	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	198.746.200	56,25	0,00	56,25	198.746.200	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	1. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan perekapan untuk belanja komponen listrik Faktor Penghambat: belum ada permintaan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Faktor Pendukung: Terlaksananya koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.4.2	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.806.497.002	35,00	0,00	35,00	2.806.497.002	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	1. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : 0 Paket dari 13 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dengan Pihak Ketiga Terkait Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Penghambat: Ketersediaan waktu penyedia atau pihak ketiga dalam Koordinasi Untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Faktor Pendukung: Telah dilaksanakannya Survey Barang Untuk Menentukan Spesifikasi
1.4.3	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	444.346.000	36,25	0,96	35,29	430.346.000	96,85	4.245.000	0,96	95,89	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW	1. Jumlah paket bahan logistik kantor	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

													AIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	yang disediakan : 2 Paket dari 7 Paket	- Pengadaan barang bahan-bahan logistik dan pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabotan kantor - belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor : benda pos (materai) - belanja bahan : isi tabung gas Faktor Penghambat: Pengadaan barang bahan-bahan logistik, bahan pembersih dan pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabotan kantor Menyesuaikan dengan permintaan yang bersangkutan Faktor Pendukung: - Pengadaan barang bahan-bahan logistik, bahan pembersih dan pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabotan kantor - terlaksananya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor : benda pos (materai) - terlaksananya belanja bahan : isi tabung gas
1.4.4	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.668.000	21,95	22,05	-0,10	30.513.000	43,80	15.361.344	22,05	21,75	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN TATA USAHA DAN	1. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya kegiatan Cetak Map Terlaksananya kegiatan Fotokopi/Penggandaan

													KEPEGAW AIAN		Faktor Penghambat: Menunggu Tagihan dari pihak ketiga Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran kegiatan Cetak Map Tersedianya anggaran Fotokopi/Penggandaan
1.4. 5	4.02.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.575.000	0,00	0,00	0,0 0	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupa ten Banjar	BAGIAN PERSIDAN GAN DAN PERUNDAN G- UNDANGA N - SUB BAGIAN PERUNDAN G- UNDANGA N, DOKUMEN TASI DAN PERPUSTA KAAN	1. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan : Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat internal subbag perundang-undangan rencana pengadaan buku berdasarkan RAK Faktor Penghambat: anggaran tersedia ditriwulan II Faktor Pendukung: dana tersedia pada DPA sekretariat dprd
1.4. 6	4.02.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.420.000.00 0	24,9 5	28,16	- 3,2 1	2.080.000.00 0	47,06	1.244.834.68 3	28,16	18,90	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKO L	1. Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Untuk Bulan Maret kegiatan dengan cara menghubungi Anggota Dewan atau Ketua Komisi Untuk Tujuan Perjadin, menghubungi bagian protokol membuat surat tujuan perjadin, menghubungi kontak tujuan dan mengirim surat, apabila surat sudah diterima dilaporkan ke bagian protokol untuk pembuatan Surat Tugas dan SPPD.

															3. pejabat tidak berada ditempat untuk membuat nota dinas dan keperluan lainnya. 4. format belum tetap untuk sistem SPJ yang digunakan Faktor Pendukung: -Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian tahapan -ketersediannya anggaran
1.5	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.873.008.000	0,00	0,00	0,00	2.873.008.000	100,00	0	0,00	100,00				
1.5.1	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.873.008.000	0,00	0,00	0,00	2.873.008.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	1. Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: melakukan perekapan pengadaan kendaraan dinas Faktor Penghambat: Belum terlaksananya pembelian kendaraan dinas operasional atau lapangan karena belum ada permintaan untuk pengadaan unit kendaraan Faktor Pendukung: tersedianya anggaran
1.6	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.710.339.446	25,82	21,10	4,72	1.142.251.946	42,14	611.365.581	22,56	19,58				
1.6.1	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	455.389.446	45,00	16,91	28,09	455.389.446	100,00	77.022.578	16,91	83,09	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW	1. Jumlah Laporan Penyediaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

													AIAN - SUB BAGIAN PERLENGK APAN DAN RUMAH TANGGA	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 12 Laporan	Pelaksanaan Pembayaran Menyesuaikan Dengan Tagihan Faktor Penghambat: Pembayaran menyesuaikan Beban pemakaian air dan listrik Faktor Pendukung: Tagihan diterima sebelum tenggat waktu
1.6. 2	4.02.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.254.950.00 0	21,9 5	21,95	0,0 0	686.862.500	30,46	534.343.003	23,70	6,76	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN - SUB BAGIAN PERLENGK APAN DAN RUMAH TANGGA	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 111 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Belanja Jasa Tenaga Ahli - Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Belanja Jasa Tenaga Supir - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Belanja Kebersihan Faktor Penghambat: Menunggu kelengkapan SPJ dari pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Faktor Pendukung: - Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan - Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Administrasi

															- Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Ahli - Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Supir - Terlaksananya Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Terlaksananya Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Terlaksananya Belanja Kebersihan
1.7	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.254.930.600	35,00	6,65	28,35	3.254.930.600	100,00	309.164.684	9,50	90,50				
1.7.1	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.120.000	35,00	21,59	13,41	266.120.000	100,00	57.468.000	21,59	78,41	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 6 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Terealisasiya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan -Tersedianya BBM Untuk Kendaraan Dinas Jabatan Faktor Penghambat: Jenis Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tidak menentu Faktor Pendukung: Penyampaian Data terstruktur dan akurat Pemeliharaan cepat

1.7. 2	4.02.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.680.000	35,0 0	23,75	11, 25		0,00	92.805.600	0,00	0,00	Kabupa ten Banjar		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 9 Unit dari 26 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Terealisasinya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -Tersedianya BBM Untuk Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Faktor Penghambat: Jenis Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional tidak menentu Faktor Pendukung: Penyampaian Data Pemeliharaan cepat
1.7. 3	4.02.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.340.000	35,0 0	3,85	31, 15	226.340.000	100,0 0	8.720.000	3,85	96,15	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN - SUB BAGIAN PERLENGK APAN DAN RUMAH TANGGA	1. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara : 3 Unit dari 282 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Faktor Penghambat: Ketersediaan waktu penyedia atau pihak ketiga dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Faktor Pendukung: Kendala yang terjadi untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bisa ditangani
1.7. 4	4.02.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	2.762.470.60 0	35,0 0	5,44	29, 56	2.762.470.60 0	100,0 0	150.171.084	5,44	94,56	Kabupa ten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW	1. Jumlah Sarana dan Prasarana	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											AIAN - SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit dari 1 Unit	Koordinasi ke Pihak Ketiga Terkait Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Faktor Penghambat: Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak menentu Faktor Pendukung: Ketersediaan waktu penyedia atau pihak ketiga dalam Koordinasi Untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1.8	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.114.280.000	25,00	1,41	23,59	254.020.000	22,80	15.697.800	1,41	21,39				
1.8.1	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.114.280.000	25,00	1,41	23,59	254.020.000	22,80	15.697.800	1,41	21,39	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1. Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: untuk bulan Maret pada kegiatan jamuan tamu, kegiatan yang dilakukan 1. menerima surat Kunjungan kerja dari daerah lain. 2. memberitahukan kepada pimpinan / Anggota DPRD 3. Koordinasi dengan pihak terkait 4. menyiapkan ruang pertemuan untuk tamu 5. menyiapkan makan minum untuk tamu. 6. menyiapkan bahan pertemuan.

															7. pembuatan SPJ makan minum untuk tamu. Faktor Penghambat: - Kegiatan masih belum dilaksanakan - dana masih belum tersedia di awal tahun Faktor Pendukung: - SDM mencukupi - kerjasama yang baik di sub bidang
1.9	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.081.752.586	24,95	24,95	0,00	7.456.437.820	24,79	7.195.666.824	23,92	0,87				
1.9.1	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.981.767.586	24,95	24,95	0,00	7.456.437.820	25,73	7.195.666.824	24,83	0,90	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD : 45 Orang/bulan dari 45 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembuatan Dokumen Pencairan Pembayaran Gaji & tunjangan DPRD berupa SPP dan SPM ub. april 2025 - THR ub.maret Faktor Penghambat: - sistem jaringan Faktor Pendukung: - adanya dukungan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah - Adanya koordinasi yang baik antar bagian
1.9.2	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	874.985.000	24,97	24,97	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - tahapan akan dilaksanakan pada bulan april

													USAHAAN KEUANGAN	: 0 Paket dari 1 Paket	- Persiapan pelaksanaan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Faktor Penghambat: - pelaksanaan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD pada triwulan II sesuai dengan RAK pada bulan April Faktor Pendukung: - Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
1.9.3	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	225.000.000	24,94	24,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN KEUANGAN - SUB BAGIAN VERIFIKASI PENATA USAHAAN KEUANGAN	1. Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up : 0 Orang dari 45 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Proses penjadwalan pelaksanaan MCU tahun 2025 Faktor Penghambat: - padatnya kegiatan anggota DPRD Faktor Pendukung: - tersedianya anggaran
1.1	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	32.600.083.000	24,95	16,83	8,12	11.218.798.250	34,41	5.485.617.381	16,83	17,58				
1.10.1	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	32.600.083.000	24,95	16,83	8,12	11.218.798.250	34,41	5.485.617.38p1	16,83	17,58	Kabupaten Banjar	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

														AIAN - SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	Koordinasi dan Konsultasi DPRD : 3 Laporan dari 12 Laporan	untuk tahapan pekerjaan pada bulan Maret pertama berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah DPRD dan Atau Telaahan , Membuat Surat kunjungan Kerja DPRD / Disposisi Pimpinan , Membuat SPT dan SPPD, Memintakan Tanda Tangan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD, Mendistribusikan SPT dan SPPD ke pada Pelaksana Perjadin, Melaksanakan pembukuan realisasi penggunaan anggaran Setelah Selesai pelaksanaan perjadin . Faktor Penghambat: - jadwal kegiatan di DPRD yang sering berubah, pejabat yang berwenang tidak ada ditempat, penolakan dari tempat tujuan kunjungan sehingga berubah tujuan dan anggaran yang tidak proporsional, serta sistem pengadministrasian di sekretariat yang masih belum baku - regulasi terkait perjalanan dinas yang di edarkan masih belum banyak memahami - banyak variasi dari format SPJ untuk Perjalanan Dinas anggota DPRD Faktor Pendukung:
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

															adanya anggaran yang tersedia, sumber daya manusia, fasilitas penunjang kegiatan, adanya komitmen dalam menjalankan visi dan misi DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.050.637.500	27,70	27,04	0,66	927.062.500	30,39	356.995.000	11,70	18,69				
2.1	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	250.000.000	6,00	0,00	6,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
2.1.1	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	402.271.800	24,00	24,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN PERUNDANGAN, DOKUMEN TASI DAN PERPUSTAKAAN	1. Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah : Dokumen dari 18 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. mengumpulkan bahan kliping 2. membuat usulan rapat bapemperda bulan Maret 2025 3. rapat koordinasi sub bagian perundang-undangan Faktor Penghambat: 1. rapat tidak memenuhi kuorum 2. padatnya kegiatan anggota dprd Faktor Pendukung: kegiatan rapat sudah terjadwal
2.1.2	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	250.000.000	6,00	0,00	6,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN PERUNDANGAN, DOKUMEN TASI DAN PERPUSTAKAAN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang difasilitasi : Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belum ada permintaan pembuatan Naskah Akademik dari DPRD Faktor Penghambat: belum ada permintaan Faktor Pendukung:

													N, DOKUMEN TASI DAN PERPUSTA KAAN		dana tersedia pada DPA sekretariat dprd
2.2	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.531.512.500	30,11	30,11	0,00	846.937.500	33,46	293.995.000	11,61	21,85				
2.2.1	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.650.000	88,00	88,00	0,00	4.650.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDAN GAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN PERSIDAN GAN	1. Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginputan data pokir hasil kegiatan reses ke SIPD-RI 2. revisi rekap data pokir Faktor Penghambat: terlambatnya pengumpulan administrasi reses Faktor Pendukung: - dana tersedia pada DPA sekretariat dprd - terhimpunnya pokir dari hasil kegiatan reses
2.2.2	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.526.862.500	30,00	30,00	0,00	842.287.500	33,33	293.995.000	11,63	21,70	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDAN GAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN PERSIDAN GAN	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rekap laporan reses 2. rekap spj reses Faktor Penghambat: padatnya kegiatan anggota dprd Faktor Pendukung: adanya rapat badan musyawarah menentukan jadwal kegiatan reses DPRD
2.3	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	269.125.000	25,18	23,34	1,84	80.125.000	29,77	63.000.000	23,41	6,36				

2.3.1	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.400.000	22,20	0,00	22,20	15.400.000	100,00	0		100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN RISALAH DAN PELAPORAN SEKRETARIAT	1. Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD : Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - fasilitasi rapat AKD - fasilitasi rapat paripurna - membuat rekap tahapan pembahasan raperda - membuat dan rekap daftar hadir rapat - mengetik dan mengedit risalah paripurna Faktor Penghambat: - Kegagalan kegiatan Rapat-Rapat DPRD disebabkan karena tidak terpenuhinya kehadiran Anggota DPRD yang memenuhi Quorum -Terjadinya perubahan jadwal kegiatan DPRD yang sudah disusun semula sehingga menyebabkan kegiatan rapat-rapat DPRD tertunda. Faktor Pendukung: - Kegiatan Rapat alat kelengkapan Dewan dan Sidang / Rapat Paripurna terlaksana sesuai dengan Jadwal. - Keberhasilan kegiatan Rapat-Rapat DPRD tergantung daripada kehadiran Anggota yaitu terpenuhinya Quorum.
2.3.2	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.725.000	88,00	0,00	88,00	1.725.000	100,00	0	0,00	100,00	Kabupaten Banjar	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN - SUB BAGIAN UNDANGA	1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembahasan perubahan jadwal kegiatan bulan Maret 2025

													N - SUB BAGIAN PERSIDAN GAN	Dokumen dari 1 Dokumen	2. penyusunan jadwal kegiatan bulan April 2025 Faktor Penghambat: penentuan tanggal kegiatan dprd Faktor Pendukung: adanya rapat badan musyawarah
2.3. 3	4.02.02.2. 08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	252.000.000	24,9 3	24,93	0,0 0	63.000.000	25,00	63.000.000	25,00	0,00	Kabupa ten Banjar	BAGIAN KEUANGA N - SUB BAGIAN VERIFIKAS I PENATA USAHAAN KEUANGA N	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPR : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Dokumen Pencairan Operasional Pimpinan DPRD berupa SPP dan SPM - pembayaran Dana Operasional pimpinan ub. februari - pembayaran Dana Operasional pimpinan ub. Maret Faktor Penghambat: - Padatnya jadwal kegiatan pimpinan Faktor Pendukung: - tersedianya anggaran hingga akhir tahun
Jumlah			90.997.990.1 34	25,6 2	19,99		35.002.584.4 16	38,47	16.516.451.5 41	18,15					

2.2 Program / kegiatan / sub kegiatan / yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, target kinerja pada triwulan I adalah 40,75% sedangkan realisasinya 0%.
- 2) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, target kinerja pada triwulan I adalah 21,95% sedangkan realisasinya 13,93%.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target kinerja pada triwulan I adalah 56,25% sedangkan realisasinya 0%.
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja pada triwulan I adalah 35% sedangkan realisasinya 0%.
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja pada triwulan I adalah 36,25% sedangkan realisasinya 0,96%.
- 6) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja pada triwulan I adalah 45% sedangkan realisasinya 16,91%.
- 7) Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja pada triwulan I adalah 35% sedangkan realisasinya 21,59%.
- 8) Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, target kinerja pada triwulan I adalah 35% sedangkan realisasinya 23,75%.
- 9) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target kinerja pada triwulan I adalah 35% sedangkan realisasinya 3,85%.
- 10) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, target kinerja pada triwulan I adalah 35% sedangkan realisasinya 5,44%.
- 11) Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, target kinerja pada triwulan I adalah 25% sedangkan realisasinya 1,41%.
- 12) Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,95% sedangkan realisasinya 16,83%.
- 13) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, target kinerja pada triwulan I adalah 6,00% sedangkan realisasinya 0%.
- 14) Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 22,20% sedangkan realisasinya 0%.
- 15) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, target kinerja pada triwulan I adalah 88,00% sedangkan realisasinya 21,59%.

2.3 Program / kegiatan / sub kegiatan / yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja pada triwulan I adalah 14,10% dan realisasinya 14,10%.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja pada triwulan I adalah 32,86% dan realisasinya 32,86%.
- 3) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target kinerja pada triwulan I adalah 20,58% dan realisasinya 20,58%.
- 4) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, target kinerja pada triwulan I adalah 27,93% dan realisasinya 27,93%.
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja pada triwulan I adalah 21,95% dan realisasinya 21,95%.
- 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,95% dan realisasinya 24,95%.
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,97% dan realisasinya 24,97%.
- 8) Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,94% dan realisasinya 24,94%.
- 9) Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, target kinerja pada triwulan I adalah 24% dan realisasinya 24%.
- 10) Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 88,00% dan realisasinya 88,00%.
- 11) Sub kegiatan Pelaksanaan Reses, target kinerja pada triwulan I adalah 30,00% dan realisasinya 30,00%.
- 12) Sub kegiatan fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,93% dan realisasinya 24,93%.

2.4 Program / kegiatan / sub kegiatan / yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja pada triwulan I adalah 21,95% dan realisasinya 22,05%.
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja pada triwulan I adalah 24,95% dan realisasinya 28,16%.

2.5 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan yang direncanakan

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain, belum adanya permintaan sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan, selain itu beberapa aplikasi pendukung perencanaan dan penganggarann (SIPD, SIMONDALEV dan LPSE) mengalami gangguan pada awal tahun, kemudian beberapa sub kegiatan sedang dalam tahap persiapan atau belum masuk jadwal pelaksanaan pada Triwulan I sehingga indikator capaian belum dapat diukur, dan sub kegiatan seperti penyediaan alat

kantor, jasa cetak, maupun komponen instalasi listrik terhambat karena barang yang tersedia di penyedia tidak sesuai spesifikasi DPA, belum masuk e-katalog, atau harganya melebihi pagu;

- 2) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihinya target kinerja antara lain, pelaksanaan kegiatan sudah memiliki perencanaan yang baik dalam penyusunan rencana kerja sehingga indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terealisasi sesuai atau bahkan melebihi target.

2.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar berdampak positif terhadap peningkatan dalam kualitas fasilitasi terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD.

Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan strategis dan pelaksanaan kegiatan lainnya.

2.7 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua bagian sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaporan yang sifatnya turunan akan tetap selaras dalam menetapkan target indikator pada masing-masing kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Seiring dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengalami penyesuaian yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Perubahan arah kebijakan tersebut mengharuskan setiap perangkat daerah melakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang sebelumnya digunakan.

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melakukan perubahan indikator demi menjaga keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan visi, misi dan arah kebijakan kepala daerah. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD sebelum dan sesudah perubahan:

Tabel 3.1

Indikator Sekretariat DPRD sebelum perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Terwujudnya Birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif		Indeks Kepuasan Masyarakat	87
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	86

Tabel 3.2

Indikator Sekretariat DPRD setelah perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,95
	Meningkatnya Fasilitasi dan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	88
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran, serta ada penambahan sasaran karena adanya penyesuaian dengan pohon kinerja dan rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

3.2 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada perubahan rencana kerja tahun 2025 ini tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah ataupun berkurang.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif 2 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 semula adalah sebesar **Rp 91,790,941,934 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** setelah perubahan berubah menjadi **Rp 91.580.724.014 (Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah)** yaitu berkurang sebesar **Rp 210.217.920 (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)** dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten.

Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menjaga keselarasan dengan RPJMD serta memperkuat kontribusi Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun rincian kebutuhan dana berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp 3.452.909.300,-. Setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp 3.341.779.900,-, mengalami pengurangan sebesar Rp 111.129.400,-.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp 88.338.032.634,-. Setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp 88.238.944.114,-, mengalami pengurangan sebesar Rp 99.088.520,-.

3.4 Alasan dilakukan Perubahan

Alasan dilakukannya perubahan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Urusan Wajib Pelayan an Dasar	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	4					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	4	02				Sekretariat DPRD				91.790.941.934	91.580.724.014	-210.217.920		
	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas dan Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	Persentase pelayanan fasilitasi tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang sesuai dengan standar pelayanan	100	100	3.452.909.300	3.341.779.900	-111.129.400	Efisiensi
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	Persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	100	100	652.271.800	541.142.400	-111.129.400	Efisiensi
	4	02	02	2.01	02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	20 dok	18 dok	402.271.800	341.142.400	-61.129.400	Efisiensi
	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dok	4 dok	250.000.000	200.000.000	-50.000.000	Efisiensi
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Persentase fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	100	100	2.531.512.500	2.531.512.500	-	
	4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dok	1 dok	4.650.000	4.650.000	-	
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dok	1 dok	2.526.862.500	2.526.862.500	-	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	100	100	269.125.000	269.125.000	-	
	4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 lap	3 lap	15.400.000	15.400.000	-	
	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 dok	1 dok	1.725.000	1.725.000	-	
	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dok	12 dok	252.000.000	252.000.000	-	
Urusan Wajib	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN

Pelayan an Dasar							Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Nilai IKKI Perangkat Daerah	77	76	88.338.032.634	88.238.944.114	-99.088.520	Efisiensi
								Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB				
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	37.891.700	28.808.180	-9.083.520	Efisiensi
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 dok	33 dok	22.741.900	21.316.900	-1.425.000	Efisiensi
	4	02	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	1 dok	4.349.800	3.543.280	-806.520	Efisiensi
	4	02	01	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 data	1 data	10.800.000	3.948.000	-6.852.000	Efisiensi
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Persentase jumlah sub kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	100	6.965.235.100	6.963.792.100	-1.443.000	Efisiensi
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 org/bl n	67 org/bln	6.730.800.000	6.730.800.000	-	
	4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	217.920.000	217.920.000	-	
	4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	6.307.500	5.908.500	-399.000	Efisiensi
	4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	18 lap	18 lap	10.207.600	9.163.600	-1.044.000	Efisiensi

Urusan Wajib Pelayan an Dasar	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan n (+/-)	

	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100	100	330.000.000	264.000.000	-66.000.000	Efisiensi
	4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 org	26 org	330.000.000	264.000.000	-66.000.000	Efisiensi
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100	100	7.979.832.202	7.993.399.202	13.567.000	Untuk Pembelian P.C dan Laptop dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya
	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 paket	1 paket	198.746.200	198.746.200	-	
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 paket	13 paket	2.806.497.002	2.861.308.002	54.811.000	Untuk Pembelian P.C dan Laptop dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya
	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	444.346.000	385.102.000	-59.244.000	Efisiensi
	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	3 paket	69.668.000	87.668.000	18.000.000	Recofusing
	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	3 dok	40.575.000	40.575.000	-	
	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	4.420.000.000	4.420.000.000	-	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah	100	100	2.873.008.000	2.873.008.000	-	

	4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	4 unit	2.873.008.000	2.873.008.000	-	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum yang berkualitas	Persentase jasa penunjang pelayanan umum yang berkualitas	100	100	2.710.339.446	2.870.339.446	160.000.000	untuk belanja jasa konsultasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik (Appraisal)
	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	455.389.446	455.389.446	-	
	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	111 lap	2.254.950.000	2.414.950.000	160.000.000	untuk belanja jasa konsultasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik (Appraisal)
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	Persentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terpelihara	100	100	3.645.610.600	3.568.810.600	-76.800.000	Efisiensi
	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	266.120.000	245.790.000	-20.330.000	Efisiensi
	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit	390.680.000	347.420.000	-43.260.000	Efisiensi
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		TARGET		PAGU			ALASAN PERUBAHAN
							Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan n (+/-)	
	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	282 unit	282 unit	226.340.000	226.340.000	-	
	4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	2.762.470.600	2.749.260.600	-13.210.000	Efisiensi

	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	Persentase fasilitasi bimtek/ workshop/ kunker/ konsultasi yang diikuti anggota DPRD	100	100	1.114.280.000	1.088.506.000	-25.774.000	Efisiensi
	4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	12 lap	12 lap	1.114.280.000	1.088.506.000	-25.774.000	Efisiensi
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	100	100	30.081.752.586	29.988.197.586	-93.555.000	Efisiensi
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	45 org/b ln	45 org/bln	28.981.767.586	28.981.767.586	-	
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 paket	2 paket	874.985.000	781.430.000	-93.555.000	Efisiensi
	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlahorang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlahorang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	45 org	45 org	225.000.000	225.000.000	-	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100	100	32.600.083.000	32.600.083.000	-	
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 lap	12 lap	32.600.083.000	32.600.083.000	-	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan Perubahan Renja maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar telah memperhatikan prioritas sub kegiatan mana saja yang dilakukan perubahan.
2. Dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar secara umum ada pengurangan anggaran secara signifikan, yang mana perubahan anggaran tersebut tidak mengakibatkan terkendalanya pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya pada Renja 2025.
3. Perubahan Renja disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024-2026.
4. Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun 2025.
5. Jika nanti pada pelaksanaan Perubahan Renja 2025 ini terdapat kekurangan anggaran maka Pengguna Anggaran dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya kebutuhan anggaran tersebut dan kemungkinan untuk dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya (tahun 2026).

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Renja 2025 ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Renja ini disusun sebagai:
 - Perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

- Dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025.
 - Dasar pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025.
2. Saat Perubahan Renja ini dijabarkan ke dalam RKA Perubahan, maka perlu dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA Perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta capaian programnya.
 3. Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan digunakan untuk mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintahan maupun luar pemerintahan

4.3 Rencana tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Agar segenap bidang segera melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat tidak ada pengurangan anggaran pada bidang teknis.
2. Menyegerakan semua pengadaan barang/jasa setelah DPPA disahkan untuk menunjang pencapaian target.
3. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian terkait pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan

Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko, seluruh proses perubahan Renja ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan *register risiko* perencanaan. Register ini akan memuat identifikasi potensi risiko strategis, seperti belum optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang profesional. Dengan demikian, *register risiko* akan menjadi alat bantu dalam merumuskan langkah mitigasi dan pengendalian, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Demikian Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 disusun. Kami menyadari bahwa Perubahan Renja yang

kami susun ini belum sepenuhnya sempurna, maka kami mohon saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik kepada Anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Martapura, 16 Juni 2025

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten
Banjar

Rakhmat Dhany, S.IP., M.AP, MIDS

19741005 199311 1 001

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KATA PENGANTAR

Dengan tulus, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis yang berkembang di tengah tahun anggaran berjalan, sekaligus sebagai respons terhadap perubahan arah pembangunan daerah pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Di dalamnya tercermin pemutakhiran terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan prioritas yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Tahun 2025–2029. Proses penyusunan dilakukan secara kolaboratif melalui koordinasi lintas bidang, asistensi perencanaan, serta evaluasi kinerja hingga Triwulan I yang menjadi dasar utama penyesuaian substansi dokumen.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, masukan, maupun dukungan teknis dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Perubahan Renja ini dapat menjadi acuan yang strategis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, besar harapan kami agar dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang semakin baik di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah di tengah tahun anggaran berjalan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah tetap relevan dan responsif terhadap arah kebijakan serta kebutuhan riil masyarakat, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh melalui pendekatan partisipatif.

Landasan hukum penyusunan perubahan ini merujuk pada ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila terdapat kondisi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

- Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, serta perubahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- Kebutuhan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun sebelumnya;
- Keadaan darurat atau luar biasa;
- Pergeseran pagu antar SKPD, penghapusan atau penambahan kegiatan baru, serta perubahan target kinerja, lokasi, dan kelompok sasaran.

Salah satu perubahan strategis yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 adalah adanya pergantian kepala daerah melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2024. Perubahan kepemimpinan ini menandai dimulainya siklus pembangunan jangka menengah baru, ditandai dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 sebagai dokumen arah pembangunan daerah lima tahunan. Selaras dengan hal tersebut, Bappedalitbang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran teknokratik dan operasional dari visi-misi kepala daerah terpilih.

Sebagai konsekuensi dari penyusunan Renstra baru, terdapat perubahan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis Bappedalitbang yang harus segera disesuaikan dalam dokumen tahunan, yaitu Renja Tahun 2025. Perubahan ini dimaksudkan agar seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Bappedalitbang dapat secara langsung mendukung pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta memperkuat sinergi antara perencanaan teknokratis dan visi politik pembangunan daerah.

Selain mempertimbangkan perubahan kebijakan strategis, penyusunan Perubahan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, yang menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kinerja dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penyesuaian tersebut juga selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, yang memuat prioritas pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan jangka menengah baru.

Dengan demikian, Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 disusun sebagai dokumen yang adaptif terhadap dinamika kebijakan strategis, serta sebagai bentuk penajaman arah pelaksanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi hasil, dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjar lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko;
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025;
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah terhadap dinamika kebijakan dan kondisi aktual pembangunan yang terjadi di tahun berjalan. Dokumen ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappedalitbang untuk sisa tahun anggaran 2025, agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, serta mendukung capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sesuai RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan kembali arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis Bappedalitbang berdasarkan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025–2029 yang disusun untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Mengakomodasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga Triwulan I, yang menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi capaian kinerja;

3. Menyesuaikan target kinerja dan alokasi anggaran perangkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaksanaan anggaran, perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, serta sumber pendanaan yang tersedia di tahun berjalan;
4. Mewujudkan konsistensi dan kesinambungan perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029;
5. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, melalui penajaman fokus kegiatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis kinerja.

1.4 Sistematik Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Banjar akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini akan menguraikan tentang kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Bappedalitbang) sampai dengan triwulan I yang mengacu pada APBD tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar masih mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, dikarenakan RPJMD periode 2025–2029 yang baru sedang dalam proses penyusunan pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2025, termasuk tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya, masih didasarkan pada misi dan arah kebijakan lama.

Bappedalitbang Mengampu dua urusan pemerintahan, yakni urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan urusan tersebut, Bappedalitbang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Misi Keempat RPJMD Kabupaten Banjar, yakni: "Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif. Pencapaian misi ini diukur melalui indikator-indikator kinerja yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama Bappedalitbang yang menjadi tolok ukur pelayanan publik dalam lingkup perencanaan dan litbang pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 target 80 dengan definisi operasional: penilaian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang diukur melalui 4 (empat) aspek penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Bappedalitbang, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan definisi operasional: Penerapan Hasil Penelitian dan Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banjar oleh seluruh stakeholders dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar dan pihak lainnya, guna mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 2. 1 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Terseleng-Garanya Reformasi Dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Sakip Kabupaten Banjar	78.16	-
2		Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	-
3			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100%	-

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Dengan masih digunakannya kerangka misi, tujuan, dan sasaran lama pada Triwulan I, evaluasi capaian kinerja Bappedalitbang selama periode tersebut tetap mengacu pada sistematika dan tolok ukur yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode sebelumnya. Hal ini bersifat transisional sampai dengan ditetapkannya dokumen RPJMD 2025–2029 dan Renstra Bappedalitbang 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi pedoman utama pelaksanaan kinerja perangkat daerah hingga tahun 2029.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Bappedalitbang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar masih mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, karena dokumen RPJMD periode 2025–2029 belum ditetapkan secara formal. Hal ini merupakan kondisi transisional yang lazim terjadi pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di mana tahapan penyesuaian arah kebijakan pembangunan masih dalam proses perumusan.

Dalam mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021 - 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang**

Maju, Mandiri dan Agamis”. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
- 2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasisi kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah.
- 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
- 5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Maka sesuai urusan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Bappedalitbang Kabupaten Banjar yaitu urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan, serta sesuai tugas dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten Banjar secara khusus mendukung tercapainya misi ke 4 yaitu **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif**. Dengan tujuan pada Perubahan Kedua Renstra yaitu Terselenggaranya Reformasi Dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja dengan sasaran Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas yang diukur melalui 2 indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Untuk mendukung tercapainya hal-hal tersebut di atas maka pada tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Banjar telah menetapkan 4 program, 16 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total pagu dana murni sebesar **Rp. 18.726.750.785,-** (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rincian Belanja Bappedalitbang Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU MURNI
1	2	3
I	BELANJA DAERAH	Rp. 18.726.750.785

1	BELANJA OPERASI	Rp. 17.979.589.785
1.1	Belanja Pegawai	Rp. 7.262.200.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.717.389.785
2	BELANJA MODAL	Rp. 747.161.000
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 547.161.000
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 200.000.000
	JUMLAH BELANJAR	Rp. 18.726.750.785

Sumber : DPA Bappedalitbang Tahun 2025

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, selengkapnya bisa dilihat tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 3 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.659.879.35 6					
BIDANG URUSAN PERENCANAAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN (IKKI) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	97	0	0	0	Rp 10.814.655.78 5	Rp 3.006.004.60 6	Rp 1.993.234.84 3	66,31	Memenuhi Kriteria	
Perencanaan, Panganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran , Pelaporan dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	0	0	0	Rp 60.899.500	Rp 12.362.000	Rp 10.629.000	85,98	Memenuhi Kriteria	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	0	0	0	Rp 8.983.000	Rp 2.471.000	Rp 2.441.000	98,79	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Pengumpulan Data Renstra yang cukup sulit karena Penyesuaian kinerja 2. Terkendalanya beberapa aplikasi perencanaan diawal tahun yang belum siap

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											3. Belum optimalnya data yang didapat dari bidang/sub bidang terkait Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dari Tim Penyusun 2. Tersedianya data untuk penyusunan dokumen 3. Sarana dan prasarana yang mendukung
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	Rp 2.406.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Terkendalanya beberapa aplikasi perencanaan diawal tahun yang belum siap 2. Waktu pelaksanaan Rapat yang tidak sesuai jadwal karena kesibukan dari masing-masing unit kerja di awal tahun Faktor Pendukung: 1. Tersedianya Bahan/Materi untuk penyusunan dokumen 2. Koordinasi yang baik dalam Tim Penyusun dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	0	Rp 2.728.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											faktor penghambat ini sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini.
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	0	0	0	Rp 2.861.000	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat pada sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Sama halnya dengan faktor penghambat yang belum teridentifikasi , faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	0	Rp 3.021.500	Rp -	Rp -	0,0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat pada sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Sama halnya dengan faktor penghambat yang belum teridentifikasi , faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	100	Rp 3.619.000	Rp 3.619.000	Rp 3.004.000	83,01	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Beberapa Data LPPD yang belum rilis menghambat penyusunan LPPD 2. Belum terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan kinerja perangkat daerah Faktor Pendukung: 1. Data Penyusan LKPJ dan LKjIP yang cukup lengkap mempermudah penyusunan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											dokumen 2. Kerjasama yang baik diinternal sub bagian perencanaan maupun semua unit kerja lingkup Bappedalitbang, sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar 3. Laporan kinerja perangkat daerah tahun lalu dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah tahun berjalan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	3	3	100	Rp 29.669.000	Rp 6.272.000	Rp 5.184.000	82,65	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Waktu pelaksanaan Rapat Evaluasi yang tidak sesuai jadwal karena kesibukan dari masing-masing unit kerja di awal tahun 2. Data yang diperlukan terlambat diterima sehingga menghambat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah Faktor Pendukung: 1. Tersedianya data tahun n-1 untuk bahan evaluasi 2. Koordinasi antar unit kerja diinternal

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Bappedalitbang yang terjalin baik, sehingga memudahkan penjadwalan ulang jadwal rapat evaluasi 3. Kerjasama yang baik diinternal sub bagian perencanaan maupun semua unit kerja lingkup Bappedalitbang, sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah	1	0	0	0	Rp 3.082.000	Rp -	Rp -	0,0		Faktor Penghambat: Karena tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat ini sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat pada sub kegiatan ini
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorale Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorale Daerah yang Telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	141	0	0	0	Rp 4.530.000	Rp -	Rp -	0,0		Faktor Penghambat: Pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini, maka belum teridentifikasi faktor penghambat pada sub kegiatan ini

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Faktor Pendukung: Sama halnya dengan faktor penghambat yang belum teridentifikasi , faktor pendorong untuk sub kegiatan ini di bulan inipun belum bisa diidentifikasi karena sub kegiatan maupun tahapan pelaksanaan sub kegiatan ini belum dilaksanakan pada bulan ini
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	25	25	100	Rp 7.513.341.100	Rp 2.091.310.368	Rp 1.559.757.592	74,58	Memenuhi Kriteria	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	126	126	100	Rp 7.247.200.000	Rp 2.018.281.868	Rp 1.528.999.092	75,58	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Penyesuaian operator dengan aplikasi SIPD versi terbaru dan Menunggu Pengumpulan Rekap Absen atas Pemotongan dari TPP Faktor Pendukung: Telah dilakukan bimtek untuk aplikasi SIPD untuk pencairan Gaji dan TPP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	5	5	100	Rp 251.106.300	Rp 65.090.500	Rp 25.470.500	39,13	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Penyesuaian dalam Penggunaan Aplikasi SIPD versi baru dan Penggunaan Fitur Baru di SIPD Faktor Pendukung: Sumber Daya Manusia yang baik

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											sehingga Penatausahaan dan Pelaksanaan verifikasi keuangan dapat berjalan dengan baik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	100	Rp 7.298.800	Rp 5.184.000	Rp 5.164.000	99,61	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Belum terdeteksi lagi faktor penghambat atas sub kegiatan ini Faktor Pendukung: Data Keuangan Sudah Diarsipkan dengan Baik sehingga bisa selalu dipergunakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	4	4	100	Rp 7.736.000	Rp 2.754.000	Rp 124.000	4,50	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Penyesuaian dengan penggunaan Aplikasi penginputan keuangan SIPD RI Faktor Pendukung: Pelaksana dan bendahara sudah dilakukan Bimbingan Teknis atas Penggunaan Aplikasi
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	25	25	100	Rp 6.315.900	Rp 2.676.500	Rp 2.676.500	100	Memenuhi Kriteria	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	4	1	1	100	Rp 6.315.900	Rp 2.676.500	Rp 2.676.500	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Pelaporan untuk Inventaris masih manual untuk Triwulan I dan masih tahap penyusunan RKBMD pada awal akhir akan di finalkan Faktor Pendukung: Data BMD dan Koordinasi dengan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											BPKAD yang intens dan baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Peragkat Daerah yang Medapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	0	0	Rp 108.000.000	Rp 30.000.000	Rp -	0	Memenuhi Kriteria	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	0	0	0	Rp 108.000.000	Rp 30.000.000	Rp -	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Tidak ada undangan atau pun panggilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan internal bappedalitbang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	100	0	0	0	Rp 253.395.600	Rp 127.390.738	Rp 124.695.538	97,88	Memenuhi Kriteria	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1	1	100	Rp 11.990.000	Rp 3.496.000	Rp 3.496.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Barang yang ada dipenyedia belum semua sama yang ada di DPA Faktor Pendukung: Koordinasi yang terjalin dengan pihak ketiga
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	1	1	100	Rp 11.989.500	Rp 3.106.000	Rp 3.106.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Barang yang ada di penyedia belum semua sama di DPA Faktor Pendukung: Koordinasi yang terjalin baik dengan pihak penyedia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	1	1	100	Rp 15.289.500	Rp 4.910.00	Rp 4.910.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Barang yang ada di penyedia belum

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											semua sama di DPA Faktor Pendukung: Koordinasi yang terjalin baik dengan pihak penyedi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	1	100	Rp 15.259.600	Rp 5.457.600	Rp 1.268.400	23,24	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Realisasi yang ada hanya ATK Faktor Pendukung: Koordinasi yang terjalin baik dengan pihak penyedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	3	100	Rp 198.867.000	Rp 110.421.138	Rp 111.915.138	100,35	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Undangan rapat yang dijadwalkan diwaktu yang bersamaan sehingga salah satu nya tidak dapat dihadiri. Rapat dadakan atau tidak terencana menyebabkan tidak dapat melakukan pemesanan melalui e catalog Faktor Pendukung: Komitmen pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk meningkatkan pencapaian target kinerja dan produktivitas ASN, sudah terjalin hubungan yang baik dan kerja sama dengan pihak ke 3.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100	0	0	0	Rp 580.516.000	Rp 7.950.000	Rp 7.950.000	100	Memenuhi Kriteria	
Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	49	0	0	0	Rp 548.521.000	Rp -	Rp -	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kebutuhan barang tidak sesuai dengan barang- barang yang ada di DPA harga barang yang dapat naik bisa melebihi harga DPA tidak semua barang di DPA terdaftar di ecatalog Faktor Pendukung: Dukungan pimpinan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin di bappedalitbang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	100	Rp 31.995.000	Rp 7.950.000	Rp 7.950.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Keadaan gudang tidak terpantau Faktor Pendukung: Sewa gudang yang berlangsung beberapa tahun dan sudah terjalin hubungan dengan baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100	0	0	0	Rp 1.256.738.685	Rp 327.627.500	Rp 327.627.500	100	Memenuhi Kriteria	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	3	3	100	Rp 3.632.500	Rp 2.012.500	Rp 2.012.500	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Surat yang datang bersifat segera secara mendadak di hari H Faktor Pendukung:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Srikandi yang memudahkan peroses penandatanganan surat menyurat kemajuan teknologi yang mengakibatkan terjadi kemudahan dalam surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	3	100	Rp 189.997.185	Rp 52.270.000	Rp 52.270.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Terkadang lupa mematikan elektronik seperti ac, lampu, komputer dan lainnya Faktor Pendukung: - Pembayaran yang tepat waktu kepada pihak penyedia - Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3	100	Rp 1.063.109.000	Rp 273.345.000	Rp 273.345.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Pencairan untuk Media Online di lakukan di Maret (ub. Januari dan februari) sehingga realisasi keuangan belum maksimal Faktor Pendukung: - Kinerja pelayanan dari setiap individu sangat maksimal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100	0	0	0	Rp 1.035.449.000	Rp 406.687.500	Rp 406.687.500	100	Memenuhi Kriteria	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	1	1	100	Rp 42.750.000	Rp 10.687.500	Rp 10.687.500	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										Faktor Pendukung: Terjaganya realisasi yang baik dengan pihak penyedia Kewajiban pemegang barang dalam memelihara barang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	0	0	0	Rp 484.100.000	Rp 118.500.000	Rp 118.500.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak terprediksi Faktor Pendukung: Didukung adanya hubungan baik dengan penyedia Kewajiban pemegang barang dalam memelihara barang
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	100	Rp 391.725.000	Rp 250.000.000	250.000.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Belum ada realisasi dibulan ini Faktor Pendukung: Adanya hubungan baik dengan penyedia
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	101	101	100	Rp 116.874.000	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	100	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Kerusakan yang tidak bisa diprediksi Faktor Pendukung: Komitmen dan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU	100	0	0	0	Rp 2.960.511.100	Rp 571.738.200	Rp 388.755.898	68	Memenuhi Kriteria	
	PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	100	0	0	0						
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu	100	0	0	0	Rp 2.305.780.800	Rp 475.520.500	Rp 320.886.398	67,48	Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	2	100	Rp 63.725.000	Rp 63.725.000	Rp 59.844.000	93,91	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dipercepat, sehingga perlu koordinasi ekstra Faktor Pendukung: Komitmen dari panitia penyelenggaraan dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	1	1	100	Rp 52.159.000	Rp 23.759.000	Rp 22.920.000	96,47	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Waktu pelaksanaan yang singkat karena banyaknya agenda lain yang juga harus dilaksanakan Kendala sinkronisasi dengan RPJMD karena penyusunannya yang disusun simultan Masih ada SKPD yang belum siap terkait data perencanaan aktivitas sub kegiatan Faktor Pendukung: Dukungan bidang dalam pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	1	1	100	Rp 288.276.000	Rp 168.015.500	Rp 41.690.000	24,81	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Perubahan pengisi acara yang mendadak Faktor Pendukung: Dukungan dan motivasi yang kuat dari panitia penyelenggara dan pimpinan untuk

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											menyukseskan kegiatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	0	0	0	Rp 1.901.620.000	Rp 220.021.000	Rp 196.432.398	89,28	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Inmendagri yang mengatur Pedoman penyusunan RPJMD belum keluar RKPD disusun simultan dengan RPJMD Faktor Pendukung: Koordinasi yang intens dengan tim ahli

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan	100	0	0	0	Rp 450.829.000	Rp 54.258.000	Rp 30.046.000	55,38	Memenuhi Kriteria	
	Persentase SKPD Yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah	100	93,64	93,64	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	0	0	0	Rp 24.721.000	Rp 7.579.000	Rp 1.611.000	21,26	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. jadwal kegiatan berbarengan dengan kegiatan lain 2. terkendalanya penyelesaian SPJ eksternal: 1. Kendala pada Aplikasi LPSE untuk level Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen dan E- Kalatalog Penyedia yang sering gangguan/error 2. Kendala pada Penyedia yang stock barang habis Faktor Pendukung: Internal: 1. tersedianya sarana dan prasarana 2. adanya dukungan dari atasan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	384	384	384	100	Rp 291.570.000	Rp 40.262.000	Rp 27.628.000	68,62	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. jadwal kegiatan bidang yang padat (berbarengan) Eksternal: 1. ada revisi DLK dari beberapa dinas Faktor Pendukung: Internal: 1. komitmen pimpinan dan kerjasama bidang yang baik Eksternal: 1. Aplikasi Si Elok bisa berjalan dengan lancar
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	1	100	Rp 134.538.000	Rp 6.417.000	Rp 807.000	12,58	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: 1. sudah membuat SPJ untuk bulan Februari namun akan terealisasi pada bulan Maret Eksternal: 1. Koordinasi dengan pihak penyedia belum berjalan dengan baik Faktor Pendukung: Internal: 1. komitmen pimpinan dan kerjasama bidang yang baik
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%	100	0	0	0	Rp 203.901.300	Rp 41.959.700	Rp 37.823.500	90,14	Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik	100	0	0	0						
Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	9	3	3	100	Rp 203.901.300	Rp 41.959.700	Rp 37.823.500	81,50	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Aplikasi simondalev yang baru, masih terdapat bug pada aplikasi - Anggaran kas tidak tersuntikkan secara keseluruhan, misalnya dinas pendidikan ada 40 sub kegiatan yang tertinggal Faktor Pendukung: - Telah melaksanakan desk bersama SKPD dibantu dengan bidang mitra - Operator rata-rata sudah berpengalaman dalam membuat ropk fisika berkoordinasi dengan pengembang melalui zoom
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	79	0	0	0	Rp 1.390.359.100	Rp 176.546.000	Rp 143.882.830	90,26	Memenuhi Kriteria	
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	79	0	0	0					Memenuhi Kriteria	
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	78	0	0	0					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang	100	0	0	0	Rp 922.433.500	Rp 88.228.300	Rp 79.631.500	81,99	Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	0	0	0	Rp 68.609.000	Rp 24.463.700	Rp 20.057.700	81,99	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal pelaksanaan aktivitas dalam sub kegiatan ini bersamaan dengan aktivitas sub kegiatan lainnya, baik yang ada di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan di bidang lainnya yang saling berhubungan erat dan memberi kontribusi terhadap satu sama lainnya serta dengan tugas tambahan lainnya seperti menghadiri rapat baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi, menghadiri rapat melalui zoom meeting serta melaksanakan tugas lainnya. 2. Penyampaian bahan, data dan informasi perencanaan bidang pemerintahan dan pemerintahan kecamatan sebagai bahan penyusunan Ranwal RKPD tidak tepat waktu, sehingga dalam penyusunan tidak optimal

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											dikarenakan data yang belum tersedia/tidak update. 3. Adanya masa transisi (perpindahan) sistem/aplikasi penatausahaan keuangan yang mengakibatkan kendala dalam proses pencairan anggaran sehingga proses pencairan dana mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan terjadi deviasi yang tinggi pada awal triwulan I. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pemerintahan dan Pemerintahan Kecamatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	29	0	0	0	Rp 72.429.000	Rp 19.480.700	Rp 18.285.700	93,87	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Jadwal pelaksanaan aktivitas dalam sub kegiatan ini bersamaan dengan aktivitas sub kegiatan lainnya, baik yang ada di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia maupun dengan lintas sub kegiatan di bidang lainnya yang saling berhubungan erat dan memberi kontribusi terhadap satu sama lainnya. 2. Penyampaian bahan, data dan informasi perencanaan bidang pemerintahan dan pemerintahan kecamatan sebagai bahan penyusunan Ranwal Renja tidak tepat waktu, sehingga dalam penyusunan tidak optimal dikarenakan data yang belum tersedia/tidak update. 3. Ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan yang belum ada pada awal Januari 2025 karena adanya masa transisi (perpindahan) sistem/aplikasi penatausahaan
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	87	0	0	0					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											keuangan yang mengakibatkan kendala dalam proses pencairan anggaran sehingga proses pencairan dana belum bisa dilakukan pada awal triwulan sehingga mengakibatkan terjadi deviasi yang tinggi. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29	29	29	100	Rp 44.515.500	Rp 7.489.900	Rp 7.043.900	94,05	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Penyampaian data dan informasi monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan tidak tepat waktu dan beberapa data belum tersedia. 2. Penginputan data organisasi, besaran pagu anggaran per sub kegiatan, indikator
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	4	1	1	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											program/kegiatan/sub kegiatan dan komponen lainnya mitra sub bidang Pemerintahan pada E-Monev Simondalev belum dilaksanakan dikarenakan belum tersedianya system/aplikasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pada awal tahun sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan. 3. Adanya masa transisi (perpindahan) sistem/aplikasi penatausahaan keuangan yang mengakibatkan kendala dalam proses pencairan anggaran sehingga proses pencairan dana belum bisa dilakukan pada awal triwulan (bulan januari) sehingga mengakibatkan terjadi deviasi yang tinggi. Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia.
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7	0	0	0	Rp 423.516.200	Rp 14.869.000	Rp 12.655.600	85,11	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Jadwal Kegiatan yang sering bersamaan mengakibatkan pembagian tugas masih belum maksimal khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dan provinsi sehingga koordinasi yang mendalam dengan SKPD belum dapat maksimal Faktor Pendukung: - Tersedianya sarana dan prasarana yang masih mencukupi, antara lain : komputer, printer, ATK dan lainnya. - Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	0	0	100	Rp 22.437.000	Rp 8.823.000	Rp 8.586.600	97,32	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - Cuti Lebaran membuat koordinasi secara tatap muka berkurang; - Masa transisi perpindahan renstra 2021-2026 menjadi rentsra 2026-2030. - Adanya perubahan Kepmen sehingga perlu penyesuaian terhadap sub kegiatan yang berubah pada SKPD Mitra Pembangunan Manusia Faktor Pendukung: - Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi , antara lain : komputer, printer, ATK dan lainnya. - Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan Manusia
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	0	0	0					Memenuhi Kriteria	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	6	100	Rp 290.926.800	Rp 13.102.000	Rp 13.002.000	99,24	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan memepetkan waktu dan terhalang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumahl Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	1	1	100					Memenuhi Kriteria	cuti lebaran. 2. SKPD masih ada yang belum menyelesaikan inputan pada E-Sakip padahal sudah seringkali dilakukan pemantauan Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi , antara lain : komputer, printer, ATK dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra Pembangunan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	0	0	0	Rp 213.083.800	Rp 45.033.900	Rp 35.512.500	78,86	Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	0	0	0	Rp 102.165.000	Rp 9.559.400	Rp 7.254.000	75,88	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: o Jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain Eksternal: o Masih ditemui dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											dalam Permendagri 86 Tahun 2017. - o Renstranya belum selesai - o Padatnya jadwal pekerjaan SKPD mitra Ekonomi - o Perbaikan Dok perencanaan oleh SKPD Mitra sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi kertas kerja tidak tepat waktu Faktor Pendukung: Internal: - o koordinasi yang baik dan Kerjasama Tim yang baik pada subbid Ekonomi Eksternal: - o Respon yang baik dari SKPD Mitra dalam hal penyusunan ranwal renja serta koordinasi yang sudah terjadwal dengan baik
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	0	0	0	Rp 17.308.000	Rp 4.372.500	Rp 3.992.500	91,31	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal: - o Jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain Eksternal: - o Masih ditemui dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017.
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	0	0	0					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											- o Renstranya belum selesai - o Padatnya jadwal pekerjaan SKPD mitra Ekonomi - o Perbaikan Dok perencanaan oleh SKPD Mitra sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi kertas kerja tidak tepat waktu Faktor Pendukung: Internal: - o koordinasi yang baik dan Kerjasama Tim yang baik pada subbid Ekonomi Eksternal: - o Respon yang baik dari SKPD Mitra dalam hal penyusunan ranwal renja serta koordinasi yang sudah terjadwal dengan baik
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	4	100	Rp 21.729.000	Rp 6.920.000	Rp 5.619.000	81,20	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: - o Aplikasi Simondalev masih dalam maintenance - o SDM perencana di subbid ekonomi belum optimal Eksternal - o Aplikasi Simondalev masih dalam maintenance - o SKPD Mitra belum mengisi secara lengkap Capaian Kinerja sasaran SKPD, Capaian
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	1	1	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											program, Capaian kegiatan pada aplikasi simondalev o Faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian kinerja belum di input secara lengkap oleh SKPD Mitra sub bidang Ekonomi o Kerja sama Tim yang belum optimal pada internal SKPD Mitra Faktor Pendukung: Internal: o Sarana prasarana yang tersedia dengan lengkap o Kerja sama Tim yang baik pada Subbid ekonomi o Komitmen pimpinan Eksternal o Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD Mitra sehingga pelaksanaan kegiatan dapat selesai sesuai timeline yang telah ditetapkan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	0	0	0	Rp 40.098.600	Rp 13.805.000	Rp 12.415.000	89,93	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : 1. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan 2. Padatnya jadwal kegiatan Faktor Pendukung: Eksternal : 1. Adanya Bimtek penyusunan RPJMD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											2. Adanya petunjuk teknis dalam bentuk Instruksi Mendagri tentang penyusunan RPJMD Internal : 1. Dukungan atasan dan rekan kerja 2. Dukungan peralatan kantor yang memadai
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pmebangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	0	0	0	Rp 13.573.600	Rp 4.324.000	Rp 3.144.000	72,71	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Internal : 1. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan 2. Padatnya jadwal kegiatan perencanaan Faktor Pendukung: Internal : 1. Adanya orientasi penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2. Adanya petunjuk teknis Eksternal : 1. Dukungan atasan dan rekan kerja 2. Dukungan peralatan kantor yang memadai
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	0	0	0					Memenuhi Kriteria	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2	2	2	100	Rp 18.209.600	Rp 6.053.000	Rp 3.088.000	51,02	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Eksternal : Penyampaian data dan informasi monitoring dan evaluasi perencanaan Sub bidang SDA tidak tepat waktu dan beberapa data belum tersedia Faktor Pendukung:
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	1	1	100					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											Internal : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, antara lain: komputer, printer, ATK, dan lainnya. 2. Kerjasama yang baik intern bidang SDA Eksternal : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD mitra SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	0	0	100	Rp 254.841.800	Rp 43.283.800	Rp 28.738.830	66,40	Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	0	0	0	Rp 89.054.200	Rp 12.323.000	Rp 7.291.615	59,17	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Faktor Eksternal 1. Perbedaan prioritas antara SKPD Mitra dalam pembangunan infrastruktur 2. perbedaan standar yang digunakan antarinstansi terkait dalam pembangunan infrastruktur Faktor Internal 1.Kurangnya data dan informasi yang akurat 2.Tuntutan waktu yang ketat dapat menghambat koordinasi menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											dokumen perencanaan dengan tepat waktu Faktor Pendukung: Internal : 1. tersedianya sarpras yang memadai 2. kerjasama tim yang solid Eksternal : SKPD Mitra yang kompeten, profesional dan koordinatif
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	0	0	0	Rp 17.258.800	Rp 3.078.000	Rp 2.400.000	77,97	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: eksternal 1.tidak lanjut asistensi SKPD belum optimal 2.KAK belum dibuat untuk tahun 2025 3.perlu diadakan penajaman Renja Intenal 1.Jadwal untuk kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain 2.perbedaan prioritas antara perangkat daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pihak Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9	0	0	0					Memenuhi Kriteria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangka t Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	3	100	Rp 20.605.000	Rp 3.307.000	Rp 2.000.000	60,40	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Eksternal 1.masih adanya data dalam proses 2.Operator pada bidang SKPD Mitra masih belum sepenuhnya memahami penginputan di aplikasi Simondalev Internal - adanya tugas tambahan diluar tugas utama Faktor Pendukung: eksternal 1.kerjasama mitra yang baik 2. jaringan komunikasi yang baik internal - SDM internal yang kompeten, profesional dan koordinatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	1	1	100					Memenuhi Kriteria	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	0	0	0	Rp 94.406.600	Rp 18.890.000	Rp 11.927.215	63,14	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: Faktor Eksternal 1. Perbedaan prioritas antara SKPD Mitra dalam pembangunan kewilayahan 2. perbedaan standar yang digunakan antarinstansi terkait dalam pembangunan kewilayahan Faktor Internal

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											1.Kurangnya data dan informasi yang akurat 2.Tuntutan waktu yang ketat dapat menghambat koordinasi menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan dokumen perencanaan dengan tepat waktu Faktor Pendukung: Internal : 1. tersedianya sarpras yang memadai 2. kerjasama tim yang solid Eksternal : SKPD Mitra yang kompeten, profesional dan koordinatif
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	0	0	0	Rp 17.079.600	Rp 2.907.000	Rp 2.600.000	89,44	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: eksternal 1.tidak lanjut asistensi SKPD belum optimal 2.KAK belum dibuat untuk tahun 2025 3.perlu diadakan penajaman Renja Intenal 1.Jadwal untuk kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain 2.perbedaan prioritas antara perangkat daerah dapat menyebabkan
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9	0	0	0					Memenuhi Kriteria	

[illegible]

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI	100	0	0	0	Rp 1.383.061.700	Rp 2.325.000	Rp 2.300.000	98,92	Memenuhi Kriteria	
	PERSENTASE INOVASI YANG DITERAPKAN	100	0	0	0					Memenuhi Kriteria	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	100	0	0	0	0	0	0	0	Memenuhi Kriteria	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	0	0	0	0	0	0	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Adanya Isu terkait Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian direncanakan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran Penelitian 2. Terdapat SDM pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	0	0	0	0	0	0	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Adanya Isu terkait Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian direncanakan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran Penelitian 2. Terdapat SDM pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	2	0	0	0	0	0	0	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Adanya Isu terkait Efisiensi anggaran

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman										sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian direncanakan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran Penelitian 2. Terdapat SDM pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2	0	0	0	0	0	0	0	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat : 1. Adanya Isu terkait Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian direncanakan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya Faktor Pendukung: 1. Tersedianya anggaran Penelitian 2. Terdapat SDM pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah	100	0	0	0	Rp 368.979.500	Rp 2.325.000	Rp 2.300.000	99	Memenuhi Kriteria	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	0	0	0	Rp 368.979.500	Rp 2.325.000	Rp 2.300.000	99	Memenuhi Kriteria	Faktor Penghambat: 1. Adanya Isu terkait Efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian direncanakan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya 2. Proses ROPK Keuangan pada Simondalev tertunda

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output	Targe t	Target Sd Triwulan I Tahun 2025			Pagu Anggaran 2025	Anggaran Sd Triwulan I Tahun 2025			Keteranga n Kriteria	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
			Targe t	Realisas i	Capaia n		Target	Realisasi	Capaia n		
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8	9	10 = (9/8)	10	11
											karena kesulitan integrasi pada SIPD terhadap Simondalev 3. Beberapa pekerjaan yang harusnya menggunakan aplikasi terpaksa di lakukan secara manual Faktor Pendukung: 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai 2. Dukungan dari Atasan 3. Koordinasi yang baik dengan Inovator Daerah

Sumber: Laporan SIMONDALEV, Bappedalitbang, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

2.2.1 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator yaitu Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0%, dikarenakan untuk penilaian IKKI akan ada di triwulan 3.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran , Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan

triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 9) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan indikator Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 25% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% dari target triwulan I.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, hasil capaian

sampai dengan triwulan I sebesar 100% dari target triwulanan.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 25% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.**

- 1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.**

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terfasilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.**

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai

dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 2 indikator yang pertama yaitu Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu dan Indikator yang kedua yaitu Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada

triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan indikator Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dua indikator yaitu yang pertama Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan dan Indikator yang kedua yaitu Persentase SKPD Yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah, hasil capaian

dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator dengan dua indikator yaitu yang pertama Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80% dan Indikator yang kedua yaitu Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik, hasil capaian kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan, hasil capaian sampai dengan

triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator dengan tiga indikator yaitu yang pertama Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Indikator yang kedua yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA dan Indikator yang ketiga yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan, hasil capaian dari ketiga indikator sampai dengan triwulan I masing-masing sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.**
 - a. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dengan indikator Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.**
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD),
 - 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar

0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Indikator yang kedua yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yaitu telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 5) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I. Indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, hasil capaian sampai dengan triwulan I

sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan indikator dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dan indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam) dengan indikator Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan

Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 5) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA dan yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA dan indikator yang kedua yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan dengan indikator Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur,

hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan indikator yang kedua yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 5) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan yang kedua yaitu Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan

triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan dua indikator yang pertama yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dan indikator yang kedua yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 100% yang mana telah mencapai target kinerja pada triwulan I.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan dua indikator yang pertama yaitu Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti dan Indikator yang kedua yaitu Persentase Inovasi yang Diterapkan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru.

- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

- 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.
- 4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah, hasil capaian sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan akan tercapai pada triwulan selanjutnya namun akan ada perubahan indikator menyesuaikan renstra terbaru

- 1) Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, hasil capaian dari kedua indikator sampai dengan triwulan I sebesar 0% belum mencapai target kinerja sampai dengan triwulan I dan akan tercapai pada saat kegiatan triwulan selanjutnya.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banjar pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan banyak target yang belum tercapai, khususnya pada indikator kinerja program dan kegiatan yang bernilai nol persen. Beberapa faktor utama penyebab kondisi ini antara lain:

1. RPJMD 2025–2029 belum ditetapkan pada awal tahun anggaran, sehingga seluruh program dan kegiatan masih mengacu pada RPJMD 2021–2026 yang sudah tidak relevan secara strategis;
2. Penyusunan Renstra 2025–2029 oleh masing-masing bidang/sub bidang masih berlangsung secara paralel dengan pelaksanaan Renja, sehingga indikator yang digunakan belum terverifikasi kesesuaiannya dengan sasaran strategis perangkat daerah;
3. Keterlambatan penyampaian bahan dan informasi perencanaan oleh perangkat daerah mitra menjadi penghambat utama dalam penyusunan dan pencapaian indikator program
4. Beberapa aplikasi pendukung perencanaan dan penganggaran, seperti SIPD versi terbaru, Simondalev, dan LPSE, mengalami gangguan pada awal tahun;
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan sering kali bertabrakan dengan kegiatan lain, baik internal lintas sub bidang maupun eksternal dengan agenda kabupaten atau provinsi;
6. Beberapa bidang (seperti Perekonomian, SDA, dan Statistik) mengalami kekurangan perencana teknis atau staf pendukung dalam menyusun dan menjalankan program;
7. Banyak sub kegiatan berada dalam tahap persiapan atau belum masuk jadwal pelaksanaan pada Triwulan I, sehingga indikator capaian belum dapat diukur;
8. Beberapa sub kegiatan memiliki ketergantungan lintas sub bidang, sehingga jika kegiatan sebelumnya tertunda, maka kegiatan berikutnya otomatis tertunda pula;
9. Beberapa sub kegiatan seperti penyediaan alat kantor, jasa cetak, maupun komponen instalasi listrik terhambat karena barang yang tersedia di penyedia tidak sesuai spesifikasi DPA, belum masuk e-katalog, atau harganya melebihi pagu;

10. Sejumlah sub kegiatan tidak berjalan karena adanya masa transisi sistem administrasi keuangan, misalnya perpindahan ke SIPD RI versi baru, keterlambatan kas daerah, atau belum adanya petunjuk teknis implementatif.

2.2.3 Implikasi Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Tahun 2025 yang merujuk pada arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025–2029 membawa implikasi langsung terhadap pencapaian target program yang sebelumnya dirumuskan dalam Renstra.

Adanya terjadi perubahan indikator pada level program dan kegiatan sebagai konsekuensi dari berlakunya Renstra terbaru. Indikator-indikator lama yang masih digunakan pada Triwulan I telah banyak yang tercapai, namun tidak lagi sepenuhnya relevan dengan arah strategis baru. Oleh karena itu, beberapa indikator kinerja mengalami reformulasi untuk menyesuaikan dengan kerangka logis, tujuan, dan sasaran Renstra 2025–2029. Hal ini berpengaruh pada pemetaan ulang terhadap capaian kinerja yang semula dirancang dalam Renstra sebelumnya.

Dan diperlukan penyesuaian target antara dokumen Renja dan Renstra. Target tahunan yang semula dirancang berdasarkan kerangka RPJMD 2021–2026 harus diselaraskan ulang dengan target-target Renstra yang baru. Perubahan ini mencakup alokasi sumber daya, penjadwalan pelaksanaan kegiatan, dan prioritas pendanaan, yang berpotensi mempengaruhi perhitungan capaian kumulatif Renstra hingga tahun 2029. Penyesuaian ini penting dilakukan agar indikator dalam Renja tetap relevan sebagai tolok ukur kontribusi tahunan terhadap target jangka menengah.

Dengan demikian, perubahan indikator dan penyesuaian target merupakan bagian dari proses transisi menuju pelaksanaan Renstra baru yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung pada penyelarasan kebijakan teknokratis perangkat daerah.

2.2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025, telah diidentifikasi sejumlah faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya capaian target kinerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang tepat sebagai langkah korektif dan strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut serta mencegah terulangnya kendala serupa di masa mendatang. Adapun kebijakan dan tindakan yang dimaksud, dijabarkan sebagai berikut:

1. Percepatan Penetapan dan Sosialisasi RPJMD 2025–2029

Mengingat dokumen RPJMD belum ditetapkan pada awal tahun anggaran, perlu dilakukan percepatan penetapan serta sosialisasi RPJMD agar seluruh perangkat daerah memiliki acuan strategis yang terkini. Dalam masa transisi, dapat disusun pedoman teknis sementara (interim guideline) berdasarkan draft RPJMD untuk menjaga arah pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

2. Sinkronisasi Jadwal Penyusunan Renstra dan Renja

Proses penyusunan Renstra oleh bidang/sub bidang yang berjalan paralel dengan pelaksanaan Renja menyebabkan ketidaksesuaian indikator. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi jadwal penyusunan dokumen agar indikator dan sasaran dapat diverifikasi sejak awal. Sebagai langkah cepat, dapat dilakukan review internal terhadap draft Renstra untuk menyelaraskan indikator yang digunakan dalam Renja.

3. Penguatan Mekanisme Koordinasi Data Lintas SKPD

Mengatasi keterlambatan bahan dari SKPD mitra, perlu ditetapkan tenggat waktu penyampaian data melalui surat edaran resmi Kepala Bappedalitbang. Koordinasi perlu diperkuat melalui penjadwalan bersama, serta mempertimbangkan insentif atau sanksi administratif bagi SKPD yang tidak disiplin dalam pemenuhan data.

4. Stabilisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Perencanaan

Untuk mengatasi gangguan teknis pada aplikasi seperti SIPD, Simondalev, dan LPSE, dibutuhkan pembentukan tim respons

teknis internal. Selain itu, perlu diadakan pelatihan berkelanjutan bagi operator dan pejabat teknis guna mempercepat adaptasi terhadap versi terbaru dari aplikasi.

5. Penyusunan Jadwal Kegiatan Terpadu dan Fleksibel

Dalam menghindari tumpang tindih jadwal kegiatan, penting disusun *master schedule* kegiatan tahunan per bidang yang terintegrasi secara lintas sub bidang dan dengan agenda eksternal lainnya.

6. Penguatan Kapasitas SDM Perencana Teknis

Bidang-bidang yang kekurangan SDM teknis perlu mendapatkan dukungan tambahan melalui pemanfaatan tenaga teknis dari bidang lain secara rotasi sementara. Kebutuhan perencanaan tambahan juga perlu diusulkan dalam formasi ASN. Di samping itu, pelatihan teknis singkat (*on the job training*) dapat mempercepat penguatan kapasitas.

7. Reformulasi Jadwal Eksekusi Sub Kegiatan

Banyak sub kegiatan belum dilaksanakan di Triwulan I karena jadwal yang terlalu terkonsentrasi di pertengahan atau akhir tahun. Untuk itu, perlu dibuat *timeline triwulan* untuk setiap sub kegiatan, sehingga pelaksanaan lebih merata dan evaluasi bisa dilakukan secara bertahap.

8. Pemetaan Keterkaitan Sub Kegiatan Antar Sub Bidang

Mengingat adanya ketergantungan pelaksanaan antar sub kegiatan, perlu dilakukan pemetaan relasi kerja melalui metode *critical path* internal. Hal ini disertai dengan penunjukan penanggung jawab koordinasi lintas bidang untuk memastikan tahapan kegiatan berjalan tanpa saling menunggu secara tidak produktif.

9. Optimalisasi Sistem dan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Untuk mencegah terhambatnya pengadaan karena barang tidak sesuai spesifikasi atau belum tersedia di e-katalog, dilakukan revisi spesifikasi teknis pada DPA berdasarkan kondisi pasar terkini. Perlu juga diajukan permintaan penambahan produk ke e-katalog lokal sejak awal tahun, serta menjalin komunikasi intensif dengan penyedia untuk memastikan ketersediaan barang.

10. Penguatan Manajemen Transisi Administrasi Keuangan

Dalam menghadapi perpindahan sistem keuangan dan aplikasi baru, perlu disiapkan waktu transisi minimal satu bulan sejak awal tahun untuk penyesuaian sistem. Diperlukan pula pendampingan khusus oleh bidang keuangan dan penyusunan SOP internal agar pelaksana kegiatan tetap memiliki panduan kerja meskipun terjadi keterlambatan teknis atau kas.

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

Tabel 2. 4 Isu Strategis Bappedalitbang

N O	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAN GAN PD	PERMASALA HAN PD	ISU KLHS YANG RELEVA N DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	Perencana an Pembangu nan Daerah Yang Belum Optimal	Masih lemahn ya sistem pendata an capaian TPB	Tata Kelola Keuang an Global	Tata kelola dan akuntabil itas pemerinta h	Tata kelola pemerinta han daerah yang belum optimal	Meningkat nya Akuntabili tas Kinerja Perencana an Pembangu nan Daerah

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Isu strategis ini muncul sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal yang menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Akuntabilitas kinerja perencanaan bukan semata persoalan administratif, melainkan cerminan dari seberapa jauh perencanaan mampu menjadi alat kendali pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap dinamika, dan berorientasi pada hasil.

Secara internal, akuntabilitas terganggu oleh lemahnya sistem data capaian pembangunan, terutama terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, dari sisi eksternal, tata kelola keuangan global dan tuntutan nasional terhadap transparansi dan kinerja birokrasi publik semakin menekan perlunya perangkat daerah untuk memiliki sistem perencanaan yang akuntabel. Pada tingkat regional, rendahnya mutu pelayanan publik dan lemahnya koordinasi lintas sektor memperlihatkan bahwa perencanaan belum mampu mengorkestrasi pelaksanaan pembangunan yang kohesif dan efisien.

Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas perencanaan harus diarahkan pada pembenahan ekosistem perencanaan secara menyeluruh: mulai dari ketersediaan dan pemutakhiran data, penguatan kapasitas SDM perencana, sistem pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja, hingga integrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Tanpa upaya ini, perencanaan akan kehilangan fungsinya sebagai pengarah pembangunan dan tidak mampu menjawab ekspektasi publik maupun dinamika kebijakan global.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

3.1 Pemutakhiran Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang

Seiring dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengalami penyesuaian yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Perubahan arah kebijakan tersebut mengharuskan setiap perangkat daerah melakukan pemutakhiran terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang sebelumnya digunakan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan, menyesuaikan tujuan dan sasarannya agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Pemutakhiran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara langsung capaian prioritas pembangunan daerah, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran Bappedalitbang pada tahun 2025:

Tabel 3. 1 Pemutakhiran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PREDIKAT SAKIP DAERAH	BB
2		MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS	NILAI SAKIP KABUPATEN KOMPONEN PERENCANAAN	23.89
3			NILAI SAKIP KABUPATEN KOMPONEN PENGUKURAN	22.53
4			PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	80
5		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH	A

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Tujuan strategis Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas. Fokus utamanya adalah peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah, yang diukur melalui target mempertahankan predikat SAKIP BB selama 2025. Strategi ini menekankan perbaikan berkelanjutan dengan penguatan sistem manajemen kinerja, dokumentasi, pelaporan, serta integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. SAKIP menjadi instrumen strategis untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah.

Sasaran strategis Bappedalitbang pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas tata kelola melalui perencanaan yang lebih baik dan akuntabilitas tinggi. Sasaran pertama menitikberatkan pada perbaikan mutu perencanaan daerah dengan indikator kualitas komponen perencanaan, pengukuran kinerja SAKIP, dan persentase capaian sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Sasaran kedua berfokus pada penguatan akuntabilitas internal dengan target peningkatan predikat SAKIP Bappedalitbang mendapat predikat A, menunjukkan ambisi untuk menjadi pelopor akuntabilitas publik dalam pemerintahan daerah, sejalan dengan arah reformasi birokrasi.

3.2 Pemutakhiran Kinerja dan Target Bappedalitbang

Pemutakhiran kinerja dan target Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, serta hasil pemutakhiran tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah yang baru, maka indikator kinerja, baik pada level outcome maupun output, perlu disesuaikan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, terukur, dan berorientasi hasil.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus pembangunan yang mengharuskan setiap perangkat daerah, termasuk Bappedalitbang, melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Pemutakhiran kinerja tidak hanya menyangkut perubahan rumusan indikator, tetapi juga target capaian yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan pembangunan saat ini, guna

memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Selengkapnya terkait perubahan-perubahan yang terjadi bisa dilihat secara lengkap pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab ini.

3.3 Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Terdapat perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang dilaksanakan, yakni sebanyak 4 Program 16 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan yang awalnya 60 Sub Kegiatan hal ini disebabkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang tersaji pada Bab 3 ini.

3.4 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja yang telah disesuaikan berdasarkan pemutakhiran tujuan dan sasaran perangkat daerah, kebutuhan dana pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun secara lebih terukur dan realistis. Penyusunan pagu indikatif ini mempertimbangkan alokasi kemampuan riil fiskal daerah, prioritas pembangunan sesuai RPJMD yang telah diperbarui, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan sebelumnya. Kebutuhan pendanaan juga mengakomodasi program strategis daerah dan menjamin kesinambungan output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, struktur pembiayaan pada Renja Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknokratis, tetapi juga responsif terhadap dinamika kebijakan dan isu aktual pembangunan daerah.

Total kebutuhan dana atau pagu indikatif Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam Renja Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp17.233.309.985,-** (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah disesuaikan berdasarkan dinamika kebijakan dan kebutuhan aktual pembangunan daerah.

Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menjaga keselarasan dengan RPJMD hasil pemutakhiran, serta memperkuat kontribusi Bappedalitbang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun rincian kebutuhan dana berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri atas 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 11.305.575.985,-. Setelah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp. 21.262.400,-, anggaran menjadi Rp. 11.284.313.585,-.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Meliputi 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan anggaran awal Rp. 3.607.887.100,-. Setelah mengalami pengurangan sebesar Rp. .416.596.000,-, total anggaran menjadi Rp. 3.191.291.100,-.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdiri atas 3 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dengan pagu awal Rp. 1.638.002.700,-. Setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp. 229.347.600,-, pagu menjadi Rp. 1.408.655.100,-.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meliputi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 2.175.285.000,-. Setelah dikurangi sebesar Rp. 826.234.800,-, total menjadi Rp. 1.349.050.200,-.

Penyesuaian anggaran ini mencerminkan strategi belanja yang lebih selektif, efisien, dan berbasis kinerja, yang difokuskan pada pencapaian target pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi, dan inovasi pembangunan di Kabupaten Banjar.

3.5 Alasan dilakukan Perubahan

Alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator, perubahan target dan perubahan anggaran di semua level secara lengkap di jelaskan dan bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3. 2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappedalitbang Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp18.726.750.785,00		Rp17.233.309.985,00		-Rp1.493.440.800,00	
URUSAN PERENCANAAN				Rp5.245.889.800,00		Rp4.599.946.200,00		-Rp645.943.600,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU	Persentase Keselarasan Perencanaan	100	Rp3.607.887.100,00	100	Rp3.191.291.100,00	-Rp416.596.000,00	
			Persentase Keselarasan kebijakan prioritas nasional provinsi dan kabupaten			100			
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	PERSENTASE PERENCANAAN DAERAH YANG SELARAS	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Strategis	100		100			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Meningkatnya Partisipasi Stakeholders dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Hasil Musrenbang Kabupaten diakomodir dalam RKPD	100	Rp2.793.653.800,00	10	Rp2.519.780.800,00	-Rp273.873.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten / kota	Ditetapkannya a Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Rp2.308.374.800,00	3	Rp2.115.620.800,00	-Rp192.754.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Analisis Data secara Berkala dan Terintegrasi	Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Dimutakhirkan	Persentase Data Pembangunan Daerah Yang Terbaru	100	Rp583.099.000,00	100	Rp450.829.000,00	-Rp132.270.000,00	
		Persentase SKPD Yang Memanfaatkan Data Pembangunan Daerah	Persentase Sektoral yang memanfaatkan Data Pembangunan Daerah			100			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Rp90.958.000,00	1	Rp24.726.000,00	-Rp66.232.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	384	Rp353.085.000,00	384	Rp294.990.000,00	-Rp58.095.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Rp139.056.000,00	1	Rp131.113.000,00	-Rp7.943.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
Kinerja SKPD Sesuai Dengan Perencanaan	Meningkatnya Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD diatas 80%	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100	Rp231.134.300,00	100	Rp220.681.300,00	-Rp10.453.000,00	
		Persentase SKPD dengan Nilai Evaluasi Kinerja Baik		100					
Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	Rp231.134.300,00	9	Rp220.681.300,00	-Rp10.453.000,00	efisiensi belanja pemerintah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80	Rp1.053.434.000,00	100	Rp922.433.500,00	-Rp131.000.500,00	
			Persentase Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target			100			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Daerah	80	Rp250.143.000,00	100	Rp249.379.800,00	-Rp763.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target			100			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Infrastruktur Dan Kewilayahan	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Daerah	80	Rp334.425.700,00	100	Rp236.841.800,00	-Rp97.583.900,00	
			Persentase Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target			100			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sektor Pemerintahan yang Berkualitas	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan Sesuai Ketentuan	100	Rp230.340.000,00	100%	Rp185.553.500,00	-Rp44.786.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Pemerintahan		Persentase Rekomendasi sektor Pemerintahan yang ditindaklanjuti			100%			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Pemerintahan Kecamatan Sesuai Ketentuan			100%			
	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Pemerintahan Kecamatan		Persentase Rekomendasi Sektor Pemerintahan Kecamatan yang ditindaklanjuti			100%			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sektor Pembangunan Manusia yang Berkualitas		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Pembangunan Manusia Sesuai Ketentuan		Rp823.094.000,00	100%	Rp736.880.000,00	-Rp86.214.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Pembangunan Manusia		Persentase Rekomendasi Sektor Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti			100%			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)									
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Rp83.840.000,00	3	Rp68.609.000,00	-Rp15.231.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	87	Rp90.740.000,00	87	Rp72.429.000,00	-Rp18.311.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	7	Rp471.938.000	7	Rp423.516.200	-Rp48.421.800	efisiensi belanja pemerintah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18	Rp29.784.000	18	Rp22.437.000	-Rp7.347.000	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6		6			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya a Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembagunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Rp321.372.000	7	Rp290.926.800	-Rp30.445.200	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6		6			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)									
Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian Dan SDA Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi yang Berkualitas	Presentase Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Ekonomi Sesuai Ketentuan	100	Rp163.390.000,00	100%	Rp141.198.000,00	-Rp22.192.000,00	
	Meningkatnya Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Sektor Ekonomi		Persentase Rekomendasi Sektor Ekonomi yang ditindaklanjuti			100%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektor Sumber Daya Alam yang Berkualitas		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Sumber Daya Alam Sesuai Ketentuan		Rp86.753.000,00	100%	Rp108.181.800,00	Rp21.428.800,00	
	Meningkatnya Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Sektor Sumber Daya Alam		Persentase Rekomendasi Sektor Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti			100%			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)									
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	3	Rp112.690.000,00	3	Rp102.161.000,00	-Rp10.529.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	Rp21.379.000,00	12	Rp17.308.000,00	-Rp4.071.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4		4			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Rp29.321.000,00	4	Rp21.729.000,00	-Rp7.592.000,00	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4		4			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	3	Rp47.743.000,00	3	Rp40.098.600,00	-Rp7.644.400,00	efisiensi belanja pemerintah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pmembangan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pmembangan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	6	Rp16.560.000,00	6	Rp13.573.600,00	-Rp2.986.400,00	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2		2			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKU RANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAH AN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Rp22.450.000,00	4	Rp54.509.600,00	Rp32.059.600,00	Penambahan Belanja Untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Program YESS
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2		2			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan									
Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur yang Berkualitas	Presentase program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Infrastruktur Sesuai Ketentuan	100%	Rp170.791.500,00	100%	Rp108.918.000,00	-Rp61.873.500,00	
	Meningkatnya Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Sektor Infrastruktur		Persentase Rekomendasi Sektor Infrastruktur yang Ditindaklanjuti			100%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektor Kewilayahan yang Berkualitas		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Kewilayahan sesuai Ketentuan		Rp163.634.200,00	100%	Rp127.923.800,00	-Rp35.710.400,00	
	Meningkatnya Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Sektor Kewilayahan		Persentase Rekomendasi Sektor Kewilayahan yang Ditindaklanjuti			100%			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)									
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	Rp123.354.700,00	3	Rp71.054.200,00	-Rp52.300.500,00	efisiensi belanja pemerintah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9	Rp21.902.800,00	9	Rp17.258.800,00	-Rp4.644.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3		3			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Rp25.534.000,00	4	Rp20.605.000,00	-Rp4.929.000,00	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3		3			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya a Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Rp21.227.600,00	4	Rp16.437.600,00	-Rp4.790.000,00	efisiensi belanja pemerintah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3		3			
URUSAN PENELITIAN				Rp2.175.285.000,00		Rp1.349.050.200,00		-Rp826.234.800,00	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Tindaklanjutan Hasil Riset dalam Perencanaan	Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	100	Rp1.692.650.000,00	100	Rp914.082.200,00	-Rp778.567.800,00	
	Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang diterapkan	Indeks Inovasi Daerah	100	Rp482.635.000,00	57.80	Rp434.968.000,00	-Rp47.667.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Dibutuhkan	Terfasilitasi ya Riset sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	Persentase Riset yang tersusun sesuai dengan kebutuhan	100	Rp0,00	100	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	Rp0,00	1	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Penambahan Penelitian Baru
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									
Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Dibutuhkan	Terfasilitasi ya Riset sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Sesuai Kebutuhan	Persentase Riset yang tersusun sesuai dengan kebutuhan	100	Rp1.692.650.000,00	100	Rp854.082.200,00	-Rp838.567.800,00	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Rp622.271.200,00	1	Rp109.303.000,00	-Rp512.968.200,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	Rp168.270.000,00	0	Rp0,00	-Rp168.270.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	Rp733.838.800,00	2	Rp744.779.200,00	Rp10.940.400,00	penyesuaian belanja
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian									
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	1	Rp168.270.000,00	0	Rp0,00	-Rp168.270.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
Berkembangnya Inovasi Daerah Yang Sesuai Kriteria	Meningkatnya Inovasi Daerah Sesuai Kriteria	Persentase Pelaksanaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Memenuhi Kriteria	100	Rp482.635.000,00	25	Rp434.968.000,00	-Rp47.667.000,00	
	Meningkatnya Inovasi di Sektor Pelayanan Dasar		Persentase Inovasi Daerah di Sektor Pelayanan Dasar	100		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Rp482.635.000,00	1	Rp434.968.000,00	-Rp47.667.000,00	efisiensi belanja pemerintah
URUSAN PENUNJANG				Rp11.305.575.985,00		Rp11.284.313.585,00		-Rp21.262.400,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
TERSELENGGARANYA URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	97	Rp11.305.575.985,00	97	Rp11.284.313.585,00	-Rp21.262.400,00	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	Rp74.812.500,00	100	Rp60.899.500,00	-Rp13.913.000,00	
	Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP		Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan			100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp8.983.000,00	3	Rp8.983.000,00	Rp0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp2.635.500,00	2	Rp2.406.000,00	-Rp229.500,00	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD									
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD DAN Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD DAN Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Rp2.948.000,00	2	Rp2.728.000,00	-Rp220.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD									
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Rp3.118.500,00	2	Rp2.861.000,00	-Rp257.500,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	Rp3.228.500,00	2	Rp3.021.500,00	-Rp207.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Rp4.064.000,00	3	Rp3.619.000,00	-Rp445.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Rp34.685.000,00	17	Rp29.669.000,00	-Rp5.016.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggarakan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Rp4.350.000,00	1	Rp3.082.000,00	-Rp1.268.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	141	Rp10.800.000,00	141	Rp4.530.000,00	-Rp6.270.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	Rp7.522.080.800,00	100	Rp7.513.341.100,00	-Rp8.739.700,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	Rp7.247.200.000,00	546	Rp7.247.200.000,00	Rp0,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	Rp256.240.800,00	50	Rp251.106.300,00	-Rp5.134.500,00	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp8.880.000,00	1	Rp7.298.800,00	-Rp1.581.200,00	efisiensi belanja pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Rp9.760.000,00	18	Rp7.736.000,00	-Rp2.024.000,00	efisiensi belanja pemerintah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Semesteran SKPD	Semesteran SKPD								
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	Rp7.139.900,00	100	Rp6.315.900,00	-Rp824.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	4	Rp7.139.900,00	4	Rp6.315.900,00	-Rp824.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	Rp135.000.000,00	100	Rp108.000.000,00	-Rp27.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Rp135.000.000,00	12	Rp108.000.000,00	-Rp27.000.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersfasilitasi	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	Rp680.040.600,00	100	Rp653.395.600,00	-Rp26.645.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor									
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Rp11.990.000,00	4	Rp11.990.000,00	Rp0,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Rp11.989.500,00	4	Rp11.989.500,00	Rp0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Rp17.997.500,00	4	Rp15.289.500,00	-Rp2.708.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Rp18.863.600,00	4	Rp15.259.600,00	-Rp3.604.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp619.200.000,00	12	Rp598.867.000,00	-Rp20.333.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Rp583.336.000,00	100	Rp725.966.000,00	Rp142.630.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya									
Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	67	Rp551.341.000,00	49	Rp701.066.000,00	Rp149.725.000,00	Penambahan unit untuk pegawai baru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp31.995.000,00	1	Rp24.900.000,00	-Rp7.095.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	Rp1.265.297.185,00	100	Rp1.253.993.485,00	-Rp11.303.700,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	Rp4.000.000,00	12	Rp3.632.500,00	-Rp367.500,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp189.997.185,00	12	Rp185.227.185,00	-Rp4.770.000,00	efisiensi belanja pemerintah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp1.071.300.000,00	12	Rp1.065.133.800,00	-Rp6.166.200,00	efisiensi belanja pemerintah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	Rp1.037.869.000,00	100	Rp962.402.000,00	-Rp75.467.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp42.750.000,00	1	Rp42.750.000,00	Rp0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUPUT		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	BERTAMBAH/BERKU RANG	ALASAN
SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAH AN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya a Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sasaran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sasaran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	Rp116.874.000,00	101	Rp120.050.000,00	Rp3.176.000,00	Penambah an Honor untuk Pengawas Pembangu nan

Sumber : Laporan SIPD RI Bappedalitbang tahun 2025, (2025)

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tercatat adanya penurunan anggaran pada beberapa sub kegiatan. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya efisiensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp192.754.000, dari semula Rp2.308.374.800 menjadi Rp2.115.620.800. Penurunan sekitar 8,35%. Selain itu, sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp66.232.000, dari Rp90.958.000 menjadi Rp24.726.000, atau sekitar 72,85%. Sub kegiatan lainnya, yaitu Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, mengalami pengurangan sebesar Rp58.095.000, dari Rp353.085.000 menjadi Rp294.990.000, atau sekitar 16,46%.

Selanjutnya, dalam Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, beberapa sub kegiatan di berbagai bidang juga mengalami perubahan anggaran. Di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami pengurangan sebesar Rp48.421.800 atau sekitar 10,26%, dari Rp471.938.000 menjadi Rp423.516.200. Sedangkan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, justru terjadi peningkatan anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, yang naik Rp32.059.600, dari Rp22.450.000 menjadi Rp54.509.600. Sementara itu, di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) mengalami penurunan anggaran sebesar Rp52.300.500 atau 42,40%, dari Rp123.354.700 menjadi Rp71.054.200.

Program Penelitian dan Pengembangan, tercatat dua sub kegiatan yang mengalami penurunan anggaran paling signifikan. Pertama, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengalami pengurangan sebesar Rp838.567.800 atau sekitar 49,53%, dari Rp1.692.650.000 menjadi Rp854.082.200. Kedua, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan juga mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp512.968.200, dari Rp622.271.200 menjadi

Rp109.303.000. Kedua penurunan ini menandakan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan.

Sementara itu, dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terjadi beberapa perubahan anggaran yang cukup signifikan. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya mengalami peningkatan anggaran tertinggi sebesar Rp149.725.000 atau 27,16% dari Rp551.341.000 menjadi Rp701.066.000 yang mencerminkan upaya penguatan sarana pendukung operasional. Disusul oleh sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang juga naik Rp142.630.000 atau 24,45% dari anggawan awal Rp583.336.000 menjadi Rp725.966.000. Sebaliknya, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak serta Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan justru mengalami penurunan cukup besar sebesar Rp77.123.000, dari Rp484.100.000 menjadi hanya Rp46.977.000.

Sub kegiatan yang mengalami perubahan paling tinggi secara nominal adalah "Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan", dengan penurunan anggaran sebesar Rp838.567.800, dari sebelumnya Rp1.692.650.000 menjadi Rp854.082.200. Secara keseluruhan, perubahan anggaran pada masing-masing program dan sub kegiatan ini dikarenakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Banjar merupakan bentuk respons strategis terhadap dinamika pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah, terutama akibat bergantinya kepala daerah hasil Pilkada 2024. Proses ini juga memperhitungkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I, di mana sebagian besar sub kegiatan belum terealisasi karena faktor transisional dan teknis. Selain menyesuaikan arah baru RPJMD 2025–2029, perubahan ini juga merupakan respons terhadap kebijakan nasional, termasuk dorongan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dengan demikian, Perubahan Renja menjadi dokumen adaptif, transformatif, dan strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja hasil perubahan ini harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi internal, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan seperti SIPD dan Simondalev menjadi aspek penting dalam memastikan pencapaian kinerja. Kaidah pelaksanaan juga menekankan pentingnya kesesuaian antara nomenklatur, indikator kinerja, dan penggunaan anggaran yang diarahkan sesuai dengan perubahan struktur RPJMD dan Renstra.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari dokumen ini, Bappedalitbang akan memastikan bahwa seluruh isi perubahan Renja diselaraskan dengan perubahan RKPD serta diinternalisasi dalam DPA-SKPD. Rencana tindak lanjut mencakup peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan aplikasi perencanaan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi fungsi walidata pembangunan daerah. Selain itu, asistensi teknis terhadap SKPD mitra akan terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas dokumen dan ketepatan perencanaan program dan kegiatan. Peran aktif seluruh unit

kerja dan mitra perencanaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renja secara akurat, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko, seluruh proses perubahan Renja ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan *register risiko* perencanaan. Register ini akan memuat identifikasi potensi risiko strategis, seperti ketidaksesuaian antara rencana dan penganggaran, keterbatasan kapasitas pelaksana, serta kendala integrasi data dan informasi perencanaan. Dengan demikian, *register risiko* akan menjadi alat bantu dalam merumuskan langkah mitigasi dan pengendalian, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Martapura, 18 Juni 2025
Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Banjar

Nashrullah Shadiq, S.Hut., M.Si.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19740923 200003 1 004

LAMPIRAN

<https://bit.ly/LampiranPerubahanRenja2025Bappedalitbang>



25. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja Perubahan ini hingga selesai.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BPKPAD sampai dengan triwulan II.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Adanya Perubahan Pohon Kinerja terbaru yang akan menjadi acuan penyusunan Renstra periode 2025-2030 sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan.
- 2) Adanya pelaksanaan proyek prioritas, Penyesuaian Belanja dan Perubahan Aktivitas.
- 3) Surat dari Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/285/PPE/ Bappedalitbang tanggal 27 Maret 2025 Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4) Penyesuaian target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- 5) Melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di SKPD.

Berkaitan kebijakan perubahan RKPD tahun 2025, agar dalam perumusan perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memperhatikan hal berikut :

1. Efisiensi belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah;
2. Fokus pada pencapaian target indikator kinerja pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dan Project strategis RPJMD;
3. Memastikan berfungsinya dan manfaat kegiatan pembangunan serta peningkatan layanan kepada masyarakat telah direncanakan pada RKPD 2025;
4. Menambahkan belanja sebagai akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa;

5. Serapan Belanja SKPD menjadi pertimbangan penambahan anggaran; Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsive. Selain itu, Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan

pembangunan sektor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERINGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besari rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaaanya
- Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa RENJA Perubahan 2024 – BPKPAD

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKPAD Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan, baik dari aspek realisasi fisik maupun keuangan, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan ke depan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I masih berada pada tahap awal, yang didominasi oleh proses administrasi, persiapan pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Dari total 84 sub kegiatan telah memulai pelaksanaan, dengan capaian rata-rata fisik sebesar 40 %.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 memiliki 3 (Tiga) program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulanan 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5	1	%	31	3100	Kepala Badan
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	1	%	95	9500	Kepala Badan
2	Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK	WTP	80	Predikat	50	62,5	Kepala Badan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	-	Predikat	-	-	Kepala Badan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	-	%	87,02	116,03	Kepala Badan
4.	Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD	Persentase penerapan Perda APBD	92,58	-	%	-	-	Kepala Bidang Anggaran
	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	88,88	-	%	-	-	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100	-	%	-	-	Kepala Bidang Perbendaharaan
5.	Penyusunan Penganggaran daerah Sesuai jadwal	Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Anggaran
	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	25	%	25	100	Kepala Bidang Anggaran
6.	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
7.	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran

8.	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
9.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	0	Dokumen	-	-	Kepala sub bidang perencanaan anggaran
10.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	0	Dokumen	-	-	Kasubbid Penyusunan Anggaran
11.	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	0	Dokumen	-	-	Kasubbid Penyusunan Anggaran
12.	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	0	Dokumen	-	-	Plt. Kasubbid Analisis Kebijakan Anggaran
13.	Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
14.	Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
15.	Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100	25	%	-	-	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Dan Pembiayaan
16.	Tersedianya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	100	25	%	-	-	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Dan Pembiayaan
17.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	25	%	-	-	Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan
18.	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	25	%	-	-	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

19.	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah
20.	Tersalurannya Belanja Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah
21.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
22.	Tercapainya Penyerapan APBD	Persentase Penyerapan APBD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran
23.	Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai	Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai
24.	Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai
25.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset	88,88	25	%	25	100	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
26.	Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten	Persentase Realisasi Penerimaan atas pemanfaatan BMD	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
27.	Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
28.	Tersedianya rencana kebutuhan BMD (RKBMD) Tepat Waktu	Persentase waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan BMD
29.	Tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Persentase Pengguna barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan

								Penghapusan BMD
30.	Terealisasinya Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	Persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
31.	Terealisasinya Tindak Lanjut BMD Rusak Berat	persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat	70	0	%	-	-	Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
32.	Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase bidang tanah yang besertifikat	70	0	%	-	-	Bidang Pengamanan Dan Penghapusan BMD
33.	Terealisasinya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	70	0	%	-	-	
34.	Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100		%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
35.	Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Data dan Informasi rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100		%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
36.	Terpenuhinya tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	85		%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
37.	Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah	Laporan BMD Semester I dan II Perangkat Daerah tepat waktu	100		%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
38.	Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai tindak lanjut BMD Kontruksi Dalam Pengerjaan	100		%	-	-	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD
39.	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	1	%	1	100	Kepala Pengendalian Dan Pengembangan Pendapatan Daerah
40.	Meningkatnya realisasi pajak daerah	Persentase Realisasi pajak daerah	5	1	%	34,2	34,2	Kepala Pengendalian

								Dan Pengembangan Pendapatan Daerah
41.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi	100	25	%	25	100	Kepala Pengendalian Dan Pengembangan Pendapatan Daerah
42.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil Pelaporan Perangkat Daerah terkait	100	15	%	24,18	161,2	Kepala Pengendalian Dan Pengembangan Pendapatan Daerah
43.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah	4	1	Dokumen	1	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
44.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah	13	3	Laporan	3	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
45.	Terlaksananya Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah	4	1	Laporan	1	100	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
46.	Terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah	Persentase Wajib Pajak yang di periksa	100	1	%			Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan
47.	Meningkatnya Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak	Persentase Peningkatan dari hasil pelaporan Kepatuhan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak	100		%			
48.	Meningkatnya wajib pajak Yang dilaksanakan uji petik	Persentase Wajib Pajak yang dilaksanakan pengawasan dan uji petik	100		%			
49.	Meningkatnya pengawasan retribusi daerah	Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait	100	15	%	22,18	147,87	
50.	Meningkatnya Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah	100		%			Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan
51.	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	Persentase keberatan pajak daerah yang terselesaikan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Penagihan Pemeriksaan Dan Keberatan

52.	Tersedianya data pelaporan retribusi daerah	Jumlah pelaporan data retribusi daerah	4	1	Dokumen	1	1	Plt. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi
53.	Tersedianya laporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait	Jumlah pelaporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait	16	4	Dokumen	4	4	Plt. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi
54.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5	1	%	1.95	195	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
55.	Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti	100	100	%	100	100	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan
56.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah yang terlayani	100	100	%	100	100	
57.	Meningkatnya Akses Pembayaran Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital	11	11	Layanan	100	100	
58.	Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Membayar	Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar	100	25	%	25	100	
59.	Meningkatnya Potensi wajib Pajak Daerah Yang Terdata	Persentase Potensi Wajib Pajak Daerah (7 jenis) Yang Terdata	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Dan Validasi Objek Pendapatan
60.	Terpeliharanya Basis Data Pajak Daerah	Persentase Basis Data Pajak Daerah Yang Terupdate	100	25	%	25	100	
61.	Meningkatnya updating basis Data pajak daerah	Persentase Updating data Pajak Daerah	100	25	%	25	100	
62.	Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah	Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah	100	100	%	100	100	Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penetapan Objek Pendapatan
63.	Terlaksananya Penilaian PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang dinilai	8300	1500	WP	1712	114	Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penetapan Objek Pendapatan
64.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80	-	%	-	-	Sekretaris
65.	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Perencanaan

66.	Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100	-	%	-	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan
67.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	36	%	31	86	Kepala Sub Bagian Keuangan
68.	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	8	%	8	100	Kepala Sub Bagian Keuangan
69.	Tersusunnya Laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
70.	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
71.	Lancarnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
72.	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg Kepala Sub Bagian Umpeg
73.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg
74.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	25	%	25	100	Kepala Sub Bagian Umpeg

Berikut penjelasan Tabel 2.1 Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I

1. Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 1 % dan realisasi sebesar 31 % dengan capaian 3.100%.
 - A. Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 1 % dan realisasi sebesar 95 % dengan capaian 9.500%.
2. Sasaran Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel dengan Indikator Opini BPK dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada triwulan II.
3. A. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada triwulan III.
 - B. Sasaraan Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada triwulan III.
4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan (Perda) APBD dengan Indikator Persentase penerapan Perda APBD dengan target pada triwulan I sebesar 100 % dan realisasi sebesar 0 % dikarenakan target tersebut ada pada triwulan III.
5. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu dengan Indikator Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan dengan Indikator Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
7. A. Sasaran Kinerja Penyusunan Penganggaran daerah Sesuai jadwal dengan Indikator Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah Sesuai Jadwal dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
 - B. Sasaran Kinerja Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 8 Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 9 Sasaran Kinerja Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS dengan Indikator Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 10 Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan Indikator Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 11 Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 12 Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 13 Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 14 Sasaran Kinerja terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan Indikator Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 15 Sasaran Kinerja Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Indikator Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 16 Sasaran Kinerja Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 17 Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan dengan Indikator Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 18 Sasaran Kinerja Tersedianya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan dengan Indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi

Belanja dan Pembiayaan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 19 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 20 Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan Indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 21 Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan Indikator Persentase Penyerapan APBD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 22 Sasaran Kinerja Tersalurnya Belanja Daerah dengan Indikator Persentase Penyaluran Belanja Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 23 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan baik dengan indikator Persentase laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah yang berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 24 Sasaran Kinerja Tercapainya Penyerapan APBD dengan indikator Persentase Penyerapan APBD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 25 Sasaran Kinerja Terimplementasinya Penatausahaan Belanja Pegawai dengan indikator Persentase Penatausahaan Belanja Pegawai dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 26 Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyetoran Pihak Ketiga dengan indikator Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 27 Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berkualitas dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 28 Sasaran Kinerja Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan atas pemanfaatan BMD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 29 Sasaran Kinerja Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan dengan indikator Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 30 Sasaran Kinerja Tersedianya rencana kebutuhan BMD (RKBMD) Tepat Waktu dengan indikator Persentase waktu penetapan rencana kebutuhan

BMD (RKBMD) dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 31 Sasaran Kinerja Tertibnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian dengan indikator Persentase Pengguna barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 32 Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindaklanjuti pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan indikator Persentase Tindaklanjuti pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 33 Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak Lanjut BMD Rusak Berat dengan indikator persentase Tindak lanjut BMD Rusak Berat dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 34 Sasaran Kinerja Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD dengan indikator Persentase bidang tanah yang besertifikat dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 35 Sasaran Kinerja Terealisasinya nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan indikator persentase nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 36 Sasaran Kinerja Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Persentase Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 37 Sasaran Kinerja Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan indikator Jumlah Data dan Informasi rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 38 Sasaran Kinerja Terpenuhinya tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan indikator Persentase tindak lanjut Keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 39 Sasaran Kinerja Tersusunnya laporan Semester I dan II Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah dengan indikator Laporan BMD Semester I dan II Perangkat Daerah tepat waktu dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 40 Sasaran Kinerja Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan indikator Nilai tindak lanjut BMD Kontruksi Dalam

Pengerjaan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 41 Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 42 Sasaran Kinerja Meningkatnya realisasi dengan indikator Persentase Realisasi pajak daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 43 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan indikator Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Regulasi dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 44 Sasaran Kinerja Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil Pelaporan Perangkat Daerah terkait dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 45 Sasaran Kinerja sasaran kinerja Terlaksananya Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 46 Sasaran Kinerja Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 47 Sasaran Kinerja Terlaksananya Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pembinaan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Laporan Perangkat Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 48 Sasaran Kinerja terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang di periksa dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 49 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan, Pengawasan Wajib Pajak dengan indikator Persentase Peningkatan dari hasil pelaporan Kepatuhan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Pajak dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 50 Sasaran Kinerja Meningkatnya wajib pajak Yang dilaksanakan uji petik dengan indikator Persentase Wajib Pajak yang dilaksanakan pengawasan dan uji petik dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 51 Sasaran Kinerja Meningkatnya pengawasan retribusi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan retribusi daerah dari hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 52 Sasaran Kinerja Meningkatnya Realisasi dengan indikator Persentase Realisasi Penagihan wajib Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 53 Sasaran Kinerja terselesaikannya keberatan pajak daerah dengan indikator Persentase keberatan pajak daerah yang terselesaikan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 54 Sasaran Kinerja Tersedianya data pelaporan retribusi daerah dengan indikator Jumlah pelaporan data retribusi daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 55 Sasaran Kinerja Tersedianya laporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan indikator Jumlah pelaporan Retribusi Daerah dari hasil pelaporan Perangkat Daerah Terkait dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 56 Meningkatnya Pajak Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 57 Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Yang Ditindaklanjuti dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 58 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan indikator Persentase Pajak Daerah yang terlayani dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 59 Sasaran Kinerja Meningkatnya Akses Pembayaran Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator Jumlah Kanal Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 60 Sasaran Kinerja Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan indikator Persentase Wajib Pajak Daerah Yang Membayar dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 61 Sasaran Kinerja Meningkatnya Potensi wajib Pajak Daerah Yang Terdata dengan indikator Persentase Potensi Wajib Pajak Daerah (7 jenis) Yang Terdata dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 62 Sasaran Kinerja Terpeliharanya Basis Data Pajak Daerah dengan indikator Persentase Basis Data Yang Terupdate dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 63 Sasaran Kinerja Meningkatnya updating basis Data pajak daerah dengan indikator Persentase Updating data Pajak Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 64 Sasaran Kinerja Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah dengan indikator Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

- 65 Sasaran Kinerja Terlaksananya Penilaian PBB P2 dengan indikator Jumlah Objek Pajak yang dinilai dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 66 Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 67 Sasaran Kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 68 Sasaran Kinerja Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP dengan indikator Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 69 Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 70 Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 71 Sasaran Kinerja Tersusunnya Laporan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 72 Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 73 Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 74 Sasaran Kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.
- 75 Sasaran Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %
- 76 Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai

Kebutuhan yang berkualitas dengan target pada triwulan I sebesar 0 % dan realisasi sebesar 0 %.

Tabel 2. 2 Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 s/d Bulan Maret

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan				Keterangan	Faktor Penghambat dan Pendukung
				Target (RP)	Ta rge t (%)	Realisas i (RP)	Real isas i (%)		
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	68.074.604.655	21.261.314.025	31,23	9.652.093.433	14,18		
1.1	5.02.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.768.300	22.718.000	27,45	10.742.000	12,98		
1.1.1	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.726.500	11.572.500	69,19	8.451.500	50,53	Memen uhi target	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat intern SIRUP 2. Rapat Penyusunan Ranwal Renja 2026 3. Penyusunan RKT 4. Penyusunan PK Murni 5. Renstra Murni 6. Penyusunan rencana aksi 7. Tabel Keselarasan Faktor Penghambat : Adanya Kinerja baru menyesuaikan POKIN dan Menyandingk an pada sub kegiatan Faktor Pendukung: Kerja Sama Tim Koordinasi dengan pemangku sub kegiatan pada sub bidang Dukungan Atasan

1.1.2	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.522.800	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Internal tentang persiapan Penginputan Renstra di aplikasi SIPD RI 2. Penginputan Renstra di aplikasi SIPD RI 3. Rapat penetapan pagu per subkegiatan tahun 2025 4. Menindak lanjuti surat edaran Pergeseran Efisiensi Perjalanan Dinas, Paket Meeting, Makan Minum, Alat Tulis Kantor dan Kertas dan Cover Faktor Penghambat : Penyesuaian dengan anggaran yang sudah direalisasikan Penyesuaian Antara Pagu Murni dengan Realisasi Faktor Pendukung: Aplikasi SIPD RI Kerja Sama Tim Data Realisasi keuangan dari sub bagian keuangan
1.1.3	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.365.700	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. proses kegiatan belum dilaksanakan Faktor Penghambat : Kegiatan dilaksanakan triwulan II Faktor Pendukung: Adanya Dukungan Dari atasan
1.1.4	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.678.400	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

									1. Belum ada proses kegiatan
									Faktor Penghambat :
									kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
									Faktor Pendukung:
									Adanya dukungan dari atasan
1.1.1.5	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.146.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Belum ada proses kegiatan
									Faktor Penghambat :
									- penyusunan pergeseran 1
									- pergeseran arus kas
									Faktor Pendukung:
									- Adanya usulan yang sering berubah-ubah dari usulan yang sudah diusulkan sebelumnya
1.1.1.6	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.891.100	2.835.000	16,78	0	0,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									- Penyusunan LKPJ
									- Penyusunan LPPD
									ada tambahan rincian kegiatan yaitu
									1. penyusunan laporan IKKI yaitu pengisian LKE IKKI dan penginputan data dukung pada tahun 2024
									2. Melaksanakan Rapat ZI Asistensi Inspektorat
									- Menyempurnaan dan Finalisasi LKjip
									Faktor Penghambat :
									- Format isian berubah sehingga

[illegible]

									Aplikasi Simondalev
1. 1. 9	5.02.01. 2.01.000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.639.000	1.995.000	75,60	0	0,00	1. Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. masih belum arahan dari pihak terkait
									Faktor Penghambat :
									1. masih belum arahan dari pihak terkait
									Faktor Pendukung:
									Dukungan dari atasan
									Aplikasi Simondalev
1. 2	5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.429.344.461	18.989.873.881	30,91	8.685.561.099	14,14		
1. 2. 1	5.02.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.681.559.661	18.803.319.480	30,99	8.524.325.699	14,05	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 60 Orang/bulan dari 78 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									PERSIAPAN : Membuat daftar gaji dan Tunjangan berdasarkan data dan informasi yang telah dianalisa,
									PELAKSANAAN : membuat SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan Mar 25 ASN.
									PELAPORAN : Tersedianya SPJ Gaji ub Mar 25
									Faktor Penghambat :
									Tidak adanya Faktor Penghambat di bulan Maret ini, untuk realisasi nya lebih sedikit dari target karena anggaran P3K dari jan sd Mar belum terealisasi
									Faktor Pendukung:
									Ketersediaan Anggaran yang mencukupi dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pencairan sangat baik dan sarana

									prasarana yang baik dalam mendukung kelancarannya
1. 2. 2	5.02.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	714.526.400	182.185.001	25,50	156.866.000	21,95	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									PERSIAPAN: Menerima Kelengkapan awal (Nota dinas, NPD dan lampiran Nomor Rekening Penerima) Dari Bidang-Bidang dan secretariat untuk Permohonan Pengajuan pencairan pagu belanja Kegiatan.
									PELAKSANAAN : 1 Pembayaran Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan sd ub Maret 25, 2. Menganalisa dan memverifikasi data Penerimaan Harian yang dilaporkan dari Bank dengan rekap Penerimaan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan dan Memeriksa dan meverifikasi kelengkapan SPJ rampung dan mencocokkan dengan data yang ada pada buku kas Pengeluaran ub Jan sd Mar 25.
									PELAPORAN : SPJ an Lengkap Hasil Verifikasi Per Bulan dan Tersedianya Laporan bulanan Verifikasi sampai ub Mar 25 Faktor Penghambat :

									Proses untuk pencairan menggunakan E-katalog masih belum bisa dilaksanakan , untuk kegiatan Pencairan ATK dll masih tanpa e-katalog Faktor Pendukung: Adanya Bendahara yang Profesional dan Bertanggung jawab, Adanya DPA dan Anggaran kas (RAK) sebagai dasar Bendahara untuk melaksanakan tugas dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
1. 2. 3	5.02.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.888.200		0	0,00	0	0,00	Kegiatan dilaksanakan d TW 4 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PERSIAPAN : Menerima dan Mengumpulkan Laporan SPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dan Rekonsiliasi data kegiatan Belanja dan data Pendapatan dengan Bidang bidang terkait. PELAKSANAAN: Penyusunan Lap Keuangan Un Audited PELAPORAN : Tersedianya draf laporan Keuangan Un Audited Faktor Penghambat : Masih terdapat Bug di Aplikasi Langkar untuk Penyusunan Lap Keuangan sehingga masih di carikan Solusi oleh

									Bidang Akuntansi
									Faktor Pendukung:
									adanya dukungan penuh dari Bidang Akuntansi untuk proses percepatan Penyusunan Laporan Keuangan
									Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									PERSIAPAN: Menerima dan Mengumpulkan Laporan SPJ Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
									PELAKSANAAN : Perbaikan data Kegiatan Belanja dan data Pendapatan sesuai dengan hasil rekon dan Meneliti dan Memeriksa SPJ dari bendahara Pengeluaran dan Penerimaan untuk Proses Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
									PELAPORAN : Tersedianya Laporan Bulanan sd Maret dan lap Triwulan 1 Tahun 2025
									Faktor Penghambat :
									Tidak adanya Faktor Penghambat di bulan Maret ini
									Faktor Pendukung:
									Adanya kerjasama yang baik antara Bendahara dan Pembantu Bendahara untuk melakukan
1. 2. 4	5.02.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.370.200	4.369.400	30,41	4.369.400	30,41	Ssuai kreteria	

									input data secara rutin
1.3	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.799.500	0	0,00	0	0,00		
1.3.1	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.740.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PERSIAPAN: Pengumpulan data RKBMD dari Bidang-bidang dan sekretariat. PELAKSANAAN: Menganalisa dan meneliti daftar RKBMD SKPD dari bidang-bidang dan sekretariat dan Penyusunan Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD. PELAPORAN : Tersedianya draft RKBMD Faktor Penghambat : Sebagian Dokumen dokumen yang masuk kadang banyak yang kurang lengkap sehingga menghambat proses menganalisa dan meneliti untuk di rekapitulasi jadi 1 Dokumen Faktor Pendukung: ada format yang sudah tersedia untuk menyusun oleh Bidang Aset sehingga memudahkan dalam penyusunan nya Dan SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai
1.3.2	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	13.705.400	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		Daerah pada SKPD							PERSIAPAN: Meneliti dan memverifikasi Kelengkapan Belanja Barang dan Jasa. PELAKSANAAN : Menerima dan Mengumpulkan Laporan berita acara dan Berkas Belanja Barang dan Jasa dan Rencana Belanja Modal untuk di data. PELAPORAN : tersedianya data BMD sampai Bulan Maret 2025 dan draft data untuk Rekonsiliasi TW 1 Faktor Penghambat : Masih belum ada Faktor Penghambat Faktor Pendukung: Format yang sudah tersedia untuk rekonsiliasi sudah tersedia oleh bidang
1.3.3	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.354.100	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: PERSIAPAN: Mendata Barang yang ada di SKPD dan Menerima Kelengkapan Belanja Barang dan Jasa dari bidang-bidang dan sekretariat. PELAKSANAAN: Mendata dan mengklasifikasi barang yang sudah tidak layak pakai atau habis masa manfaatnya lagi untuk barang milik SKPD dan Membuat BAST dan Inventarisasi Barang SKPD. dan menyusun data BMD

									tahun Sebelumnya untuk di jadikan Laporan Tahunan. PELAPORAN: Tersedianya Draft Laporan Penatausaha an BMD
									Faktor Penghambat :
									Masih belum ada Faktor Penghambat
									Faktor Pendukung:
									Tersedianya Fasilitas yang memadai
1.4	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.712.000	213.556.750	99,00	0	0,00		
1.4.1	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	135.712.000	133.556.750	98,41	0	0,00		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Melakukan Monitoring bagi pegawai ASN dan PTT
									Faktor Penghambat :
									Disiplin Kerja
									Faktor Pendukung:
									Dukungan Atasan dan ketersediaan dana
1.4.2	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	80.000.000	100,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Konfirmasi kelengkapan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pada pegawai yang bersangkutan
									Faktor Penghambat :
									Adanya usulan yang sering berubah-ubah dari usulan yang sudah diusulkan sebelumnya
									Faktor Pendukung:
									Adanya dukungan dari atasan
1.5	5.02.01.2.06	Administrasi Umum	925.763.800	701.602.292	75,79	233.817.068	25,26		

		Perangkat Daerah							
1.5.1	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.629.500	18.629.500	65,07	5.132.500	17,93	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Melakukan konfirmasi kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
									Pengadadaan pembelian komponen instalasi listrik
									Faktor Penghambat :
									Harga komponen instalasi listrik yang meningkat yang tidak terprediksi sebelumnya dan ketersediaan barang yang tidak terpenuhi
									Faktor Pendukung:
									Dukungan atasan dan tersedianya dana
1.5.2	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.023.000	33.194.788	59,25	11.507.000	20,54	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Membuat telaahan persetujuan dan melakukan pembelian setelah di setujui berupa pembelian ATK, belanja bahan komputer, dan belanja kertas
									Faktor Penghambat :
									Harga alat tulis kantor yang meningkat serta ketersediaan barang yang tidak terprediksi sebelumnya
									Faktor Pendukung:
									Tersediannya anggaran kas untuk Sub Kegiatan tersebut
1.5.3	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan	102.393.500	7.092.964	6,93	6.982.000	6,82	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang

		Logistik Kantor							sudah dilakukan:
									Belanja alat-alat kebersihan
									Faktor Penghambat :
									Harga dan ketersediaan barang yang tidak dapat diprediksi
									Faktor Pendukung:
									Tersedianya anggaran kas
1. 5. 4	5.02.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.383.800	26.438.040	37, 56	0	0,00	Belum pencairan keuangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Melakukan konfirmasi Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
									ListvPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan seperti cetak banner, spanduk, cetak map dan formulir serta fotocopy yang akan dibutuhkan
									Faktor Penghambat :
									Memperlukan waktu untuk mencetak beberapa barang yang diperlukan pada penyedia
									Faktor Pendukung:
									kerjasama yang baik pada pihak intern dan ekstern
1. 5. 5	5.02.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	668.334.000	616.247.000	92, 21	210.195.568	31,4 5	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang di laksanakan sesuai prosedur yang berlaku ke wilayah dalam Martapura dan luar daerah
									Faktor Penghambat :
									Penginputan data perjalanan

									dinas memakan waktu pada sistem
									Faktor Pendukung:
									Tersedianya anggaran kas untuk Sub Kegiatan tersebut
1. 6	5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.801.4 21.000	79.953. 000	4,4 4	0	0,0 0		
1. 6. 1	5.02.01. 2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	528.745. 000	0	0,0 0	0	0,00	Belum pencairan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: kegiatan belum dilaksanakan Faktor Penghambat : ada kendala pada upgrade aplikasi E-Catalogue V6 Ketersediaan Barang Yang Memerlukan Waktu dan Stock Barang Faktor Pendukung: Ketersediaan nya anggaran untuk sub kegiatan, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern, Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, dan kegiatan/ pengadaan barang/ jasa.
1. 6. 2	5.02.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel	99.652.0 00	73.653.0 00	73, 91	0	0,00	Belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan konfirmasi kebutuhan Mebel Faktor Penghambat : ada kendala pada upgrade

									aplikasi E-Catalogue V6
									Ketersediaan Barang Yang Memerlukan Waktu dan Stock Barang
									Faktor Pendukung:
									Ketersediaan nya anggaran untuk sub kegiatan, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern, Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, dan kegiatan/ pengadaan barang/ jasa.
1. 6. 3	5.02.01. 2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.173.02 4.000	6.300.00 0	0,5 4	0	0,00	Belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									kegiatan belum dilaksanakan
									Melakukan konfirmasi kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
									Faktor Penghambat :
									1. Harga barang yang seiring waktu berubah dan meningkat yang belum terprediksi sebelumnya
									2. Waktu yang dibutuhkan pada penginputan E-katalog memakan waktu lebih lama karena terdapat penawaran pada penyedia
									3. Pesanan barang memerlukan waktu untuk

									barang tersedia tepat waktu
									Faktor Pendukung:
									Ketersediaan nya anggaran untuk sub kegiatan, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern maupun pihak ekstern, Dukungan dan sinkronisasi yang baik dengan program-program pimpinan, Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan dengan pihak pelaksana, dan kegiatan/ pengadaan barang/ jasa.
1.7	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.958.995.594	721.002.602	36,80	531.175.902	27,11		
1.7.1	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.825.594	110.055.093	29,21	91.288.594	24,23	Sesuai kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran rekening Listrik, Telepon, dan Air Faktor Penghambat : pembayaran harus menunggu terbitnya tagihan Faktor Pendukung: Dana tersedia, proses pembayaran mudah
1.7.2	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.582.170.000	610.947.509	38,61	439.887.308	27,80	Sesuai kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Tenaga Administrasi, iuran jaminan kesehatan Non ASN, jaminan kecelakaan kerja Non ASN Faktor Penghambat :

									Adanya Tenaga administrasi yang berhenti perubahan masa kerja yang mengakibatkan berubah juga angka pembayaran Jaringan terkadang putus saat melakukan input pembayaran gaji di bagian bendaharawan pengeluaran Faktor Pendukung: Ketersediaan nya anggaran untuk sub kegiatan, Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak intern ataupun pihak ekstern
1.8	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.800.000	532.607.500	32,86	190.797.364	11,77		
1.8.1	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	9.747.500	25,00	2.213.297	5,68	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan konfirmasi Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK), bahan bakar minyak,dan pemeliharaan suku cadang pada kendaraan roda 2, roda 4, dan double gardan 2024 Faktor Penghambat : Antri yang panjang dalam pengerjaan service 2. Meningkatkan harga onderdil

									kendaraan roda empat secara tiba
									Faktor Pendukung:
									Ketersediaan nya anggaran
1. 8. 2	5.02.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	724.000. 000	227.400. 000	31, 41	123.669. 067	17,0 8	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK), bahan bakar minyak,dan pemeliharaan suku cadang pada kendaraan roda 2, roda 4, dan double gardan
									Faktor Penghambat :
									1. Antri yang panjang dalam pengerjaan service
									2. Meningkatnya harga onderdil kendaraan roda empat secara tiba
									Faktor Pendukung:
									Dukungan Atasan dan ketersediaan dana
1. 8. 3	5.02.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.558. 000	38.038.0 00	33, 50	13.775.0 00	12,1 3	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga
									Faktor Penghambat :
									Menunggu konfirmasi dari teknisi mesin yang membutuhkan waktu
									Faktor Pendukung:
									1. Teknisi yang berpengalaman dalam pengerjaan service AC maupun perbaikan komputer
									2. Tersedianya anggaran kas
1. 8. 4	5.02.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	579.513. 000	200.002. 000	34, 51	0	0,00	Belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

		Bangunan Lainnya							kegiatan belum dilaksanakan Faktor Penghambat : kegiatan belum dilaksanakan Faktor Pendukung: ketersediaan anggaran
1. 8. 5	5.02.01. 2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.059.000	45.000.000	39,11	45.000.000	39,11	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: sewa gudang Faktor Penghambat : lokasi gudang yang agak jauh Faktor Pendukung: ketersediaan anggaran
1. 8. 6	5.02.01. 2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.680.000	12.420.000	25,00	6.140.000	12,36	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Printer Faktor Penghambat : Meningkatnya harga pemeliharaan yang tidak diperkirakan sebelumnya ada sebagian spare part yang sulit dicarikan penggantinya Faktor Pendukung: adanya ketersediaan anggaran
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	246.031.696.800	233.751.984.000	95,01	102.312.300.124	41,59		
2.1	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.396.855.600	227.884.500	16,31	3.578.000	0,26		
2.1.1	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.849.400	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Masih belum ada kegiatan 2. Mengumpulkan Bahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Faktor Penghambat :

[illegible]

									Belum Tahapan Kegiatan Penyusunan Perda dan Perbup Penjabaran APBD
									Faktor Pendukung:
									dukungan dari atasan Tim Penyusunan APBD
2.1.5	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.254.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan blm dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Membuat Sk Tim Penyusunan Perubahan APBD
									2. Mengumpulkan materi Peraturan perundang undangan yang mendukung penyusunan P-APBD
									Faktor Penghambat :
									Belum Masuk Tahapan Kegiatan
									Faktor Pendukung:
									dukungan dari atasan Tim Penyusunan Perubahan APBD
2.1.6	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	47.822.000	3.578.000	7,48	3.578.000	7,48	Sesuai kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									- Pembelian ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
									- Pembelian Kertas Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
									- Penyusunan SK Tim Penyusunan Regulasi
									- Mengumpulkan materi peraturan perundangan yang

									mendukung Penyusunan dokumen Regulasi pendukung Penyusunan APBD - Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka menghimpun masukan terhadap draf Regulasi - Melaksanak an Rapat TAPD Faktor Penghambat : Faktor Pendukung: - Tersedianya Dana - Sumber Daya Manusia yang Kompeten - Perencanaan yang matang - Sarana dan Prasarana yang memadai - Dukungan dari pihak terkait - Partisipasi Aktif - Motivasi dan Komitmen - Manajemen Resiko yang Efektif
2.1.7	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	265.354.500	38.846.500	14,64	0	0,00	Kegiata n blm dilaksana kan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembelian ATK Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - Pembelian Kertas Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Mengumpul kan Bahan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Koordinasi dan Penyusunan RKA

									Pergeseran Pertama Tahun Anggaran 2025 Faktor Penghambat : Faktor Pendukung: - Tersedianya Dana - Sumber Daya Manuasia yang Kompeten - Perencanaan yang matang - Sarana dan Prasarana yang memadai - Dukungan dari pihak terkait - Partisipasi Aktif - Motivasi dan Komitmen - Manajemen Resiko yang Efektif
2.2	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	223.844.785.200	223.239.420.200	99,73	101.908.478.924	45,53		
2.2.1	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.039.500	24.348.500	64,01	15.978.500	42,01	Sesuai kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan data dalam pelaksanaan penerbitan anggaran kas dan SPD dari SKPD 2. Penginputan data rencana anggaran kas dan SPD 3. Koordinasi dan pencocokan data dengan SKPD terkait anggaran kas dan SPD 4. Verifikasi dan final rencana anggaran kas (RAK) dan SPD di aplikasi 5. Membuat rekap SPD yang telah terbit 6. Membuat tanda terima SPD yang telah terbit Faktor Penghambat :

									1. Adanya 2 aplikasi yang dipakai dalam sistem informasi peemerintah daerah yaitu SIPD RI dan SIPD Langkar, sehingga terkadang terjadi selisih entry di antara 2 aplikasi tersebut 2. Jaringan yang sering timbul tenggelam dijam kerja, sehingga petugas harus menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja Faktor Pendukung: 1. Intensifnya petugas berkoordinasi dengan Kemendagri dan BPKP, serta pihak terkait, sehingga terjadi selieih datau kesalahan bisa segera diatasi 2. Antusiasnya SKPD (Bendahara SKPD, Operator SKPD) dalam mengikuti desk input yang dilaksanakan olah BPKPAD
2.2.2	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	222.932.045.000	222.921.078.000	100,00	101.849.683.924	45,69	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Entry Pagu Dana Desa sesuai PMK 2. Surat permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Penginputan di aplikasi Omspan yang sesuai dengan permintaan nama desa yang melakukan pencairan

									4. Mencetak Surat Pengantar dan rekap nama desa dan seterusnya ditandatangani oleh Kepala BPKPAD yang sesuai dengan nama desa yang mengajukan pencairan 5. Memproses pdf dan seterusnya di upload ke aplikasi Omspan 6. Proses KPPN untuk selanjutnya dicairkan ke rekening desa 7. Merekap Dana yang telah tersalurkan Faktor Penghambat : Aplikasi Omspan terkadang down, sehingga tagging data sedikit terhambat Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Subbid Pengendalian Anggaran, DPMD, dan KPPN
2.2.3	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.561.500	7.512.000	17,24	22.656.500	52,01	Melebihi target	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Merincikan potongan SSBP dari SP2D agar Bank Kalsel dapat mentransfernya ke pihak ketiga Faktor Penghambat : Adanya perbedaan data potongan antara SP2D dan rekening titipan sementara di Bank Kalsel Faktor Pendukung: -Kemudahan akses ke SIMGAJI Web Base dalam

									1. Bendahara SKPD
									2. Kasubbag Keuangan SKPD
									3. Operator
2. 2. 5	5.02.02. 2.02.001 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	743.274. 700	198.617. 200	26, 72	7.840.00 0	1,05	SPJ yang diajukan belum semua dibayarkan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Membuat tema/topik sosialisasi/bimtek berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
									2. Menentukan jadwal/waktu pelaksanaan
									3. Membuat surat undangan peserta dan narasumber
									4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek sebagai upaya pembinaan penatausahaan
									5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
									Faktor Penghambat :
									1. Jaringan yang sering timbul tenggelam sehingga menghambat proses pelaksanaan
									2. Aplikasi yang ering down pada jam kerja sehingga petugas (operator) harus mengerjakan diluar jam kerja
									Faktor Pendukung:
									1. Bendahara SKPD
									2. Kasubbag Keuangan SKPD
									3. Dan Operator SKPD masing-masing
2. 3	5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	649.557 .800	221.889 .100	34, 16	42.992. 000	6,6 2		

		Keuangan Daerah							
2.3.1	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	17.776.400	7.135.400	40,14	840	4,73	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan 2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dilaksanakannya rekonsiliasi rekening koran dengan data Penerimaan Faktor Penghambat : Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Faktor Pendukung: SKPD yang kooperatif sehingga data yang diberikan lengkap dan akurat
2.3.2	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	26.387.000	11.284.000	42,76	0	0,00	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan 2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dilaksanakannya pada triwulan 2 Faktor Penghambat : Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Faktor Pendukung: SKPD yang kooperatif sehingga data yang diberikan lengkap dan akurat
2.3.3	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	28.798.600	756	2,63	0	0,00	Belum ada pencairan keuangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengecekan data realisasi pendapatan dan belanja perbulan Faktor Penghambat : Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi Faktor Pendukung: SKPD yang kooperatif sehingga data yang diberikan lengkap dan akurat

2.3.4	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	88.336.800	85.502.000	96,79	33.072.000	37,44	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Melaksanakan Rapat Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, Pendampingan Calk LK SKPD, Pendampingan Reviu LK Inspektorat Faktor Penghambat : - Beberapa SKPD masih belum memahami penginputan calk sehingga proses koreksi harus bolak balik dan reviu inspektorat menjadi terhambat Faktor Pendukung: Seluruh SKPD Dilingkungan Pemkab Banjar dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan ' Komitmen bersama Percepatan Laporan Keuangan ' Koordinasi yang baik antara bidang aset dan akuntansi dan bidang lainnya
2.3.5	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	49.393.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 'Dilaksanakan setelah penyusunan Laporan Keuangan Audited Pemerintah Daerah kab Banjar Faktor Penghambat :

		tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							Menyesuaikan dengan surat edaran dari Kemedagri Ri terkait Penyusunan Raperda dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
									Faktor Pendukung:
									Adanya aplikasi yang mendukung penyajian data penyusunan Raperda dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2.3.6	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	16.371.200	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									'Dilaksanakan pada triwulan 2
									Faktor Penghambat :
									Kurang kooperatifnya yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil temuan
									Faktor Pendukung:
									Koordinasi antar sektor yang baik
2.3.7	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	80.020.200	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									'Dilaksanakan pada triwulan 2
									Faktor Penghambat :
									Data-data yang kurang lengkap
									Faktor Pendukung:
									Koordinasi antar sektor yang baik
2.3.8	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	51.938.400	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									'Akan dilaksanakan pada triwulan ke 3
									Faktor Penghambat :
									Adanya perubahan regulasi dan belum ada peningkatan kompetensi

									Tersediannya aplikasi yang memudahkan dalam penarikan data untuk penyusunan statistik keuangan
2.4	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	50,00	349.950.000	1,75		
2.4.1	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000	10.000.000.000	50,00	349.950.000	1,75	Pencairan ini tergantung permintaan dari SKPD terkait	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Membuat check list kelengkapan berkas yang wajib dipenuhi oleh SKPD Pemohon
									2. Mengecek kelengkapan data pengajuan dari SKPD yang memohon dana dari anggaran Belanja Tidak Terduga
									3. Rapat Internal pembahasan pencairan Dana bersama SKPD terkait
									4. Memproses pengajuan pencairan dana dari BPKPAD
									5. Memproses pengajuan nota dinas, nota pencairan dana, lampiran rekening dan SK tentang penetapan BTT
									6. Merekap Dana yang telah tersalurkan
									Faktor Penghambat :
									1. Tidak ada permohonan pencairan dana mendesak dari SKPD
									2. Proses pencairan harus sampai dengan TU Nihil baru bisa melanjutkan

									ke pencairan berikutnya
									Faktor Pendukung:
									Koordinasi yang baik antara petugas (Subbid Pengendalian Anggaran) dan SKPD terkait atau pemohon
2.5	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	140.498.200	62.790.200	44,69	7.301.200	5,20		
									Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									- Proses pencairan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai serta penerbitan SKPP.
									- Melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah diinput untuk memastikan keakuratan sebelum penerbitan SP2D.
									Faktor Penghambat :
									-Masih terdapat revisi data dari SKPD yang memerlukan proses validasi tambahan sebelum pencairan.
									-Adanya keterlambatan dalam penerimaan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penerbitan SP2D dan SKPP.
									Faktor Pendukung:
									-Peningkatan ketepatan data setelah dilakukan verifikasi ulang,
2.5.1	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	140.498.200	62.790.200	44,69	7.301.200	5,20	SPJ yang di ajukan belum di cairkan	

									sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencairan.
									-Koordinasi lebih baik dengan SKPD untuk memastikan kelengkapan data sebelum proses pencairan.
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	989.317.500	108.434.000	10,96	46.700.000	4,72		
3.1	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	989.317.500	108.434.000	10,96	46.700.000	4,72		
3.1.1	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	300.570.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan dan triwulan III	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli Faktor Penghambat : Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli Faktor Pendukung: Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli
3.1.2	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.440.000	9.440.000	14,43	0	0,00	Kegiatan dilaksanakan dan triwulan III	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat internal Faktor Penghambat : Identifikasi Masalah Faktor Pendukung: dukungan dari atasan ketersediaan SDM
3.1.3	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.085.000	14.085.000	100,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Internal 2. Surat Edaran Ke SKPD agar melakukan penyusunan RKBMD Faktor Penghambat : SKPD yang belum memahami alur perencanaan RKBMD, Pengurus Barang Yang

									selalu Berganti-ganti dan Koordinasi Internal SKPD kurang baik Faktor Pendukung: Pembuatan Ranwal untuk persiapan RKA berjalan dengan lancar dan SKPD memahami alur serta perencanaan yang dibuat dalam rangka penyusunan RKBMD Tahun 2026
3.1.4	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.075.500	0	0,00	0	0,00	Kegiatan dilaksanakan di bulan juli	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli Faktor Penghambat : Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli Faktor Pendukung: Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli
3.1.5	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	242.833.000	15.750.000	6,49	15.750.000	6,49	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Usulan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Faktor Penghambat : 1. Sebagian SKPD terlambat dalam penyampaian Laporan BMD; 2. Pengurus Barang kurang cermat dan teliti dalam pengumpulan data terkait penambahan dan pengurangan BMD;

									3. Sebagian SKPD merealisasikan Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan pada Triwulan IV. 4. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang. 5. Tidak semua Pengurus Barang memahami mekanisme Pelaporan BMD. Faktor Pendukung: 1. Penyampaian Laporan BMD SKPD tepat waktu; 2. Pengurus Barang melaporkan dengan cermat dan teliti semua data terkait penambahan dan pengurangan BMD; 3. Belanja Modal atau Belanja Lain berupa aset direalisasikan oleh semua SKPD lebih awal (tidak menumpuk realisasinya di Triwulan IV). 4. Koordinasi internal yang baik antara Pengurus Barang, Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang.
3.1.6	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	13.854.000	0	0,00	0	0,00	Kegiatan Belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum

									Faktor Penghambat :
									Belum
									Faktor Pendukung:
									Belum
3.1.7	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	131.167.500	4.187.500	3,19	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Rapat Internal
									Faktor Penghambat :
									Belum
									Faktor Pendukung:
									Belum
3.1.8	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	27.094.000	27.094.000	100,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Dalam Proses Penilaian Akper
									Faktor Penghambat :
									SDM yang kurang
									Faktor Pendukung:
									SDM Memenuhi dan Anggafran Kas yang mencukupi untuk mengcover kegiatan
3.1.9	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtan ganan, Pemusnahan , dan Penghapusan Barang Milik Daerah	22.509.500	7.175.000	31,88	1.400.000	6,22	SPj yang d ajukan blm di cairkan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Rapat Koordinasi
									Faktor Penghambat :
									1. Tenaga SDM yang kurang;
									2. Belum tersedianya gudang pengelola guna mengamankan bmd yang sudah tidak digunakan oleh skpd pengguna;
									Faktor Pendukung:
									1. tersedianya anggaran guna mendukung terlaksananya kegiatan;
									2. sarana dan prasarana kantor untuk cek Lokasi tersedia.

3. 1. 10	5.02.03. 2.01.001 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.872.500	30.702.500	31,37	29.550.000	30,19	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Rapat Internal
									2. Rekonsiliasi BMD Triwulan IV TA. 2024
									Faktor Penghambat :
									1. Pengurus Barang yang berganti-ganti,
									2. Koordinasi internal yang masih lemah antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang.
									3. Pengurus Barang tidak membawa data dan dokumen pendukung yang lengkap saat rekon.
									4. Pengurus Barang tidak melakukan Rekonsiliasi BMD sesuai jadwal.
									Faktor Pendukung:
									1. Pengurus Barang mamahami mekanisme Rekonsiliasi BMD dengan baik.
									2. Koordinasi internal yang baik antara Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan
									SKPD dan pejabat/bidang terkait pengadaan barang.
									3. Pengurus Barang membawa data dan dokumen pendukung yang lengkap saat rekon.
									4. Pengurus Barang melakukan Rekonsiliasi BMD sesuai jadwal.
3. 1. 11	5.02.03. 2.01.001 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	46.816.500	0	0,00	0	0,00	Kegiatan belum	Tahapan pekerjaan (fisik) yang

		Daerah Pemerintah Kabupaten/K ota						dilaksana kan	sudah dilakukan:
									Rapat Internal
									Faktor Penghambat :
									Belum
									Faktor Pendukung:
									Belum
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATA N DAERAH	4.211.5 76.160	554.287 .000	13, 16	434.058 .144	10, 31		
4. 1 1	5.02.04. 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.211.5 76.160	554.287 .000	13, 16	434.058 .144	10, 31		
4. 1. 1	5.02.04. 2.01.000 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	15.280.0 00	5.389.50 0	35, 27	3.953.50 0	25,8 7	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Terlaksananya rencana kerja penyusunan target PAD
									Faktor Penghambat :
									data PAD masih terus bergerak
									Faktor Pendukung:
									tersedianya bahan penyusunan target PAD
4. 1. 2	5.02.04. 2.01.000 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.308.0 00	4.707.00 0	12, 62	3.837.00 0	10,2 8	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Terlaksananya rencana kerja penyusunan raperda PDRD
									Faktor Penghambat :
									'Dokumen masih dalam tahapan harmonisasi dengan bagian hukum terhadap aturan yang lebih tinggi
									Faktor Pendukung:
									'Terlaksananya koordinasi antar bidang dan tim yang baik
4. 1. 3	5.02.04. 2.01.000 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	280.559. 000	46.702.5 00	16, 65	6.065.00 0	2,16	Pengajuan SPJ baru satu sosialisasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									- Terlaksananya rencana kerja kegiatan

									Sosialisasi PDRD
									- Terlaksana kegiatan sosialisasi pajak daerah dan peraturan perundang-undangan
									Faktor Penghambat :
									beberapa wp masih kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi
									Faktor Pendukung:
									Terlaksana kegiatan Sosialisasi dengan baik
4.1.4	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	233.026.000	5.580.000	2,39	5.580.000	2,39	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									makan minum aktivitas lapangan
									Pengadaan Kopun Undian Gebyar Sadar Pajak
									Faktor Penghambat :
									penyesuaian anggaran
									Faktor Pendukung:
									Koordinasi yang baik,, antar penyedia, petugas lapangan
4.1.5	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.549.072.760	239.461.000	9,39	239.461.000	9,39	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Razia Bersama dan Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB
									2. Rapat Koordinasi terkait Pembentukan Tim Optimalisasi Pendataan Pajak Daerah
									3. Pembahasan bersama draf PKS antara BPKPAD Kabupaten Banjar dengan PT. Pos Indonesia (PERSERO)

									4. Rapat Evaluasi Kegiatan Pemutakhira n/Pembuata n Peta Bidang PBB- P2 Tahun 2025
									Faktor Penghambat :
									1. Basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menggunaka n data yang lama (Data dari KPP- Pratama/seb elum peralihan) sehingga data yang ada masih blm akurat;
									2. Keterbatasan nya waktu dan jumlah SDM dari BPKPAD dalam hal Pemutakhira n data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
									3. Aplikasi E- Katalog versi 6 belum bisa digunakan sehingga belum bisa memproses kegiatan pengadaan
									Faktor Pendukung:
									1. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan/D esa terkait pemutakhira n Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah terjalin baik sehingga mempermud ah dalam pelaksanaan kegiatan;

									2. Adanya basis data yang digunakan sebagai bahan dalam melakukan pembaharuan data Objek Pajak dan Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
									3. Dukungan dana meliputi aplikasi-aplikasi yang dipakai dalam rangka efektivitas kegiatan
4.1.6	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30.714.500	27.978.500	91,09	15.950.000	51,93	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
									Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer
									Faktor Penghambat :
									penyesuaian aplikasi baru pajak daerah
									Faktor Pendukung:
4.1.7	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	59.139.500	41.008.000	69,34	41.008.000	69,34	Memenuhi kriteria	aplikasi SmartGov
									Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									1. Entry data daftar baru dan mutasi PBB P2
									2. Penetapan data daftar baru dan mutasi PBB P2
									3. Cetak SPPT PBB
									4. Verifikasi lapangan untuk penilaian
									Faktor Penghambat :
									1. Masih belum ada harga referensi untuk wilayah

[illegible]

									1. Terbatasnya personil pemeriksa validasi HKPD dan; 2. Adanya beberapa perubahan pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usaha sehingga masih tercatat sebagai Wajib Pajak lama. Faktor Pendukung: 1. Kegiatan rekonsiliasi per minggu membantu dalam meningkatkan validitas data WP yang dihimpun dari aplikasi penerimaan pendapatan dan objek pajak; 2. Peluncuran inovasi pendaftaran dan pelaporan omset bagi WP secara online guna mengatasi keterbatasan personil.
4.1.9	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	112.033.900	36.262.000	32,37	36.262.000	32,37	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penerimaan berkas NPWPD & NPWRD 2. Penerbitan NPWPD & NPWRD 3. Verifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 4. Konsultasi pajak daerah 5. Audiensi dengan DPD APERSI Kalimantan Selatan Faktor Penghambat : Keterbatasan personil dalam menyelesaikan proses pelayanan Pajak Daerah sehingga proses pelayanan Pajak Daerah

									tidak sesuai waktu yang ditentukan
									Faktor Pendukung:
									1. Telah terintegrasi ya aplikasi pada penerimaan pendapatan dari 9 Objek Pajak;
									2. Aplikasi SmartGov untuk penerimaan sektor pajak PBB-P2 dan BPHTB.
4.1.10	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	47.733.000	26.661.000	55,85	2.320.000	4,86	SPj yang di ajukan belum dicairkan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Mengoreksi data pelaporan pajak daerah yang telah di input oleh SKPD pengelola pendapatan dan aplikasi dengan laporan penerimaan dari Bank Memverifikas i data pelaporan pajak daerah yang telah di input oleh SKPD pengelola pendapatan dan aplikasi dengan laporan penerimaan dari Bank Faktor Penghambat : 'adanya kendala diaplikasi baru (smartgov) Faktor Pendukung: koordinasi dengan admin aplikasi smartgov
4.1.11	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	607.315.000	61.175.000	10,07	34.903.000	5,75	Memen uhi kreteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 'tahap pendistribusi an SPPT PBB Faktor Penghambat :

									WP sulit ditemui, alamat WP tidak ditemukan, WP pindah tempat tanpa pemberitahuan dan kurang kesadaran diri WP untuk membayar pajak Faktor Pendukung: "Aplikasi (SIMPATDA, SIMPAD, PBBM Kab/Banjar, Sismiop, MonBPHTB), OTM online, transaction monitoring dan Bima PHR) Smartgov
4.1.12	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6.069.000	6.069.000	100,00	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan karena tergantung pengajuan dari WP	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Pengumpulan Data ada 1 keberatan pajak yang erdapat dari 1 dokumen Faktor Penghambat : Wp tidak lengkap dalam melampirkan berkas permohonan keberatan Faktor Pendukung: 'surat keberatan dari wajib pajak
4.1.13	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	157.777.500	31.161.000	19,75	27.801.144	17,62	Memenuhi kriteria	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Pengumpulan Data 69 Wpdari PBB, 116 WP dari pajak reklame,197 WP dari pajak restoran dan pajak hotel, 4 WP dari pajak air tanah, 15 WP dari pajak MBLB, dalam pemeriksaan dan pengawasan yang terdapat dari

									1 dokumen utk 1 triwulan
									Faktor Penghambat :
									Wp tidak memberikan data yang valid
									Faktor Pendukung:
									"Aplikasi (SIMPATDA, SIMPAD, PBBM Kab/Banjar, Sismiop, MonBPHTB), OTM online, transaction monitoring dan Bima PHR) Smartgov
4.1.14	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	21.375.000	5.215.000	24,40	0	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
									Terlaksananya penghimpunan data dan bahan evaluasi PDRD
									Tersusunnya rencana kegiatan rekonsiliasi pengelolaan PDRD
									Faktor Penghambat :
									'kegiatan dilaksanakan pada triwulan 1
									Faktor Pendukung:
									'terlaksanya koordinasi dengan baik
Jumlah			319.307.195.115	255.676.019.025	80,07	112.445.151.701	35,22		

A.Program Utama

a. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS PP
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
-

3. **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

4. **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang

Keuangan Daerah

b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. **Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah

- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari ke-4 (empat) program dan 15 kegiatan yang terdiri dari 15 Sub kegiatan pendukung dan 84 Sub kegiatan utama, target kinerja hasil/keluaran yang dicapai sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) mencapai untuk Realisasi Keuangan sebesar 35,22 % dan Realisasi Fisik mencapai 40%. Uraian lebih lengkap mengenai capaian target kinerja program/kegiatan disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I (Bulan Maret) tahun 2025, terdapat catatan penting antara lain:

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Hambatannya Penyusunan RKA Murni tahun 2025 karena penyusunan masih pada tahan Rankhir renja dan pagu masih belum ditetapkan.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Hambatan Pelaksanaannya di triwulan 3, akan tetapi penyusunan renja perubahan sudah dilaksanakan dengan mengusulkan pagu perubahan/ masih pada tahap penyusunan RKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Hambatan Pelaksanaannya di triwulan 3, akan tetapi penyusunan renja perubahan sudah dilaksanakan dengan mengusulkan pagu perubahan.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Hambatan pelaksanaan kegiatan di triwulan IV

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Hambatan pada sub kegiatan ini karena laporan keuangan terlaksana pada bulan Desember, sebagai bahan untuk pelaporan yaitu dengan adanya pelaporan tiap bulan dan rekonsialisasi dengan akuntansi dan asset.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

B. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan mebel
- b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

C. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator indikator : Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu.
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Hambatan pada Sub Kegiatan Ini Karena Masih Menunggu Arahan Dari Pihak Tertentu.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Hambatan pada Sub Kegiatan Ini Karena Masih Menunggu Arahan Dari Pihak Tertentu.

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Hambatan pada Sub Kegiatan Ini Adalah Efesiensi anggaran berbarengan dengan Pergeseran Anggaran.
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Hambatan pada Sub Kegiatan Ini Karena Belum Tahapan Kegiatan Penyusunan Perda dan Perbup Penjabaran APBD
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Indikator : Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Faktor Penghambat: Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi.
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Faktor Penghambat: Beberapa SKPD masih belum memahami penginputan calk sehingga proses koreksi harus bolak balik dan reviu inspektorat menjadi terhambat
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Faktor Penghambat: Menyesuaikan dengan surat edaran dari Kemedagri Ri terkait Penyusunan Raperda dan Pertasnggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Faktor Penghambat: Kurang kooperatifnya yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil temuan
 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Faktor Penghambat: Data-data yang kurang lengkap

- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Faktor Penghambat: Adanya perubahan regulasi dan belum ada peningkatan kompetensi

- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, -LO dan Beban.

Faktor Penghambat:

- Belum tersedianya laporan neraca, LO dan LPE

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat:

- Dilaksanakan setelah penyusunan laporan keuangan Audited

- Menyesuaikan dengan surat edaran dari kemendagri RI terkait penyusunan Raperda dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

D. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengelolaan Barang Milik

Indikator kegiatan : Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan.

- Penyusunan Standar Harga

Target Triwulan II masih dalam tahap proses penyusunan, untuk tersusunnya dokumen pada Triwulan III, tidak mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Respon SKPD Menanggapi Usulan Penyusunan Standar Harga
- SDM tidak memahami tugasnya dan SKPD terlambat mengusulkan ke BPKPAD
- Terbatasnya mobilisasi
- Kegiatan dijadwalkan pada Bulan Juli

- Penilaian Barang Milik Daerah

Target Triwulan II tidak mencapai target

Faktor penghambat :

- Belum ada Usulan Penilaian BMD dari

E. Pengelolaan Pendapatan Program Daerah

b. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kegiatan :

- Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah
- Persentase peningkatan wajib pajak daerah yang patuh

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

pajak tidak mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- data PAD masih terus bergerak
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Faktor penghambat :

- Basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menggunakan data yang lama (Data dari KPP-Pratama/sebelum peralihan) sehingga data yang ada masih blm akurat;
- Keterbatasannya waktu dan jumlah SDM dari BPKPAD dalam hal Pemutakhiran data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- data PAD masih terus bergerak

2. Program /Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran
- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan logistic Kantor
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator indikator : Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana sfer Lainnya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

b) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

3. Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dengan indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target 5 % dengan realisasi sebesar 31% Dan Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dengan target 5 % sebesar 95%. Perhitungan capaian Pajak adalah sebesar 620 % realisasi Triwulan 1 diperoleh dari formulasi sebagai berikut:

Realisasi Tahun N - Realisasi Tahun N1/ Realiasasi Tahun N1 X 100 % (Pajak)

30.850.440.028 – 23.506.772.992/ 23.506.772.992 X 100% = 31 %

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mana target adalah 5 % realisasi 31 %, Perhitungan di ambil dari realisasi bulan Maret 2025 dengan pembanding bulan maret 2024.

Perhitungan persentase realisasi Triwulan diperoleh dari formulasi: RETRIBUSI

Realisasi Tahun N - Realisasi Tahun N1/ Realiasasi Tahun N1 X 100 %

1.523.586.748 – 778.767.600/778.767.600 X 100% = 96 %

Perhitungan di ambil dari realisasi bulan Maret 2025 dengan pembanding bulan maret 2024. Faktor pendukung pencapaian tersebut karena pembayaran Retribusi IMTA Disnakertran sudh mencapai target.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan

- **Program/Kegiatan Yang Tercapai Disebabkan Oleh :**
 - Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
 - Dana tersedia dengan anggaran kas kegiatan
 - Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
 - Perencanaan yang matang dan tim yang terampil dan kolaboratif
- **Program/Kegiatan Yang Tidak Tercapai Disebabkan Oleh :**
 - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II,III dan IV
 - Dana tidak tersedia dengan anggaran kas kegiatan anggaran kas di triwulan III dan IV
 - Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
 - Faktor kendala teknis dan faktor internal lainnya
 - Untuk Belanja modal tidak terlaksana karena perubahan belanja pada system e pourceshing versi 5 ke e pourceshing versi 6, pada triwulan 1 masih pada tahapan proses pembuatan akun pejabat pengadaan dan PPK serta sosialisasi tata cara penggunaan e pourceshing versi 6 dari bagian PBJ Setda Banjar

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian program renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu perubahan kebijakan fiscal dan moneter yang mendukung pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan asset, perubahan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, Kerjasama yang baik antara BPKPAD dengan instansi lain dapat mempercepat realisasi program dan meningkatkan efektivitas pengelolaan,

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan I, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2025 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan I, yang disebabkan perhitungan dari

target-target tersebut berada di triwulan II, III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra BPKPAD Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra BPKPAD untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
- Menyampaikan informasi melalui media sosial atau website mengenai rekrutmen peserta pelatihan
- Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya dan tetap berkesinambungan dalam menetapkan target indikator capaian kinerja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun anggaran Perubahan 2025 , yang telah disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I , prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Rencana kerja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis daerah dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan strategis, telah dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan selama ini. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan pada beberapa indikator agar lebih relevan, terukur, dan selaras dengan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Terselenggaranya Reformasi dalam system penganggaran	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD)	97,08
Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 %

Perubahan indikator kinerja ini mencakup aspek formulasi, tolok ukur, serta metode pengukuran. Beberapa indikator sebelumnya dirasa terlalu umum dan sulit diukur secara kuantitatif, sehingga dilakukan penyesuaian agar lebih spesifik, dapat dicapai, relevan, dan terukur waktu (SMART). Selain itu, terdapat juga penambahan indikator baru yang mencerminkan fokus strategis terbaru organisasi serta penghapusan indikator yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih.

Dengan perubahan ini, diharapkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat, serta memberikan dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Berikut perubahan Indikator kinerja pada level program dan kegiatan yaitu yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran kegiatanProgram/Kegiatan	Target
Meningkatnya kemandirian Fiskal		Rasio PAD terhadap PDRB	1,31%

	Meningkatnya Pajak dan Retribusi daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5%
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		IPKD	83,95 %
	Meningkatnya Tata kelola keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini BPK	WTP
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Kualitas Pelayanan		Nilai SAKIP Perangkat daerah	A
		IKM	75%

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
- Program dan kegiatan dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap arah kebijakan, kebutuhan aktual di lapangan, serta ketersediaan sumber daya yang ada.

Adapun Jumlah program adalah tiga (3) program utama dan satu (1) program Penunjang, Jumlah kegiatan utama 54 dan kegiatan penunjang 54.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun Anggaran Perubahan 2025 diperkirakan sebesar Rp **319.290.503.315**. Besaran ini mencerminkan estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan serta prioritas pembangunan daerah.
- Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah :

Tabel 3. 3 Pagu Indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaannya

No.	Sumber Dana	Pagu Indikatif
1.	DAU	Rp. 91.214.487.161

2.	PAD	Rp. 8.050.629.554
3.	Dana Desa	Rp. 222.918.228.000

3. Alasan dilakukan perubahan

Perubahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi perubahan ini antara lain:

- a. Adanya Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, beberapa kegiatan mengalami penyesuaian target dan output, yang berdampak pada rasionalisasi kebutuhan anggaran
- c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
- d. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan
- e. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program
- f. Perubahan target program/kegiatan /sub kegiatan
- g. Penambahan pagu untuk Sub kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Rasio koordinasi dan Konsultasi SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah
 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tabel 3. 4 Rekap Pagu Perubahan 2025 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan										
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Kinerja	Indikator Outcome/output	Renja Murni VS Renja Perubahan 2025						Alasan
				Renja Murni	Renja Perubahan	Pagu Murni	Pagu Efisiensi	Pagu Perubahan	Berta mbah / Berkur ang	
				Target	Target					
(1)	(2)		(3)							(15)
1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan						321.20 6.121. 455	319.131. 364.553	319.131.3 64.553		
	Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Meningkatnya Nilai Opini BPK	Nilai Opini BPK	100	100	247.00 4.322. 500	242.523. 730.492	242.523.7 30.492	(4.480. 592.00 8)	
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Peningkatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	5	5	2.774. 419.16 0	2.800.47 3.160	2.800.473 .160	26.054 .000	
		Meningkatnya Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	5	5	1.437. 157.00 0	1.960.05 6.000	1.960.056 .000	522.89 9.000	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	34.037.302.328	35.923.552.451	35.923.552.451	1.886.250.123	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	75	34.037.302.328	35.923.552.451	35.923.552.451	1.886.250.123	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penerapan Perda APBD sesuai standar	100%	100%	974.261.000	921.651.000	921.651.000	(52.610.000)	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	11	11	211.319.800	201.802.300	201.802.300	(9.517.500)	
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40	40	211.319.800	201.802.300	201.802.300	(9.517.500)	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Penerapan Penganggaran daerah	Persentase Penerapan Penganggaran daerah yang tertib	100%	100%	422.639.600	403.604.600	403.604.600	-19.035.000	
		Meningkatnya Penerapan Penganggaran Daerah sesuai Mandatory Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penerapan Anggaran Daerah yang baik	100%	100%	974.261.000	921.651.000	921.651.000	-52.610.000	

5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	43.894.400	43.849.400	43.849.400	- 45.000	Efisiensi
5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	37.563.200	21.563.200	21.563.200	- 16.000.000	Efisiensi
5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	2	75.827.500	78.221.500	78.221.500	2.394.000	Untuk rapat koordinasi antar SKPD maupun konsultasi dengan pihak terkait guna menghasilkan verifikasi sesuai regulasi terbaru
5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	859.185.000	819.585.000	819.585.000	- 39.600.000	Efisiensi
5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	67.254.000	51.254.000	51.254.000	- 16.000.000	Efisiensi
5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	2	47.822.000	50.812.000	50.812.000	2.990.000	Untuk fasilitasi rapat, forum konsultasi public dan koordinasi dengan lintas skpd

5.02.02.2.0 1.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	2	265.35 4.500	259.970.5 00	259.970.5 00	- 5.384.0 00	Efisiensi
5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Perangkat Daerah Yang Taah Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	223.83 7.459.2 00	228.975.5 65.992	228.975.5 65.992	5.138.1 06.792	
5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya penyetoran pihak ketiga	Persentase penyetoran pihak ketiga tepat waktu	100%	100%	36.235. 500	36.235.50 0	36.235.50 0	-	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah dengan baik	Persentase Laporan Pertanggungjawaban penatausahaan perangkat daerah yang berkualitas	100%	100%	222.97 0.084.5 00	228.108.2 13.292	228.108.2 13.292	5.138.1 28.792	
		Tersalur nya belanja daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	100%	100%	831.13 9.200	831.117.2 00	831.117.2 00	- 22.000	
5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	88	88	38.039. 500	38.039.50 0	38.039.50 0	-	-
5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60	60	222.93 2.045.0 00	228.070.1 73.792	228.070.1 73.792	5.138.1 28.792	Adanya perubahan regulasi serta kebijakan transfer ke daerah mengharusk an daerah menambah kapasitas

		Dana Transfer Lainnya								anggaran agar sesuai ketentuan
5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	36 Laporan	36.235.500	36.235.500	36.235.500	-	-
5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47	47	87.864.500	102.057.500	102.057.500	14.193.000	Perubahan antar kode rekening
5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	47	743.274.700	729.059.700	729.059.700	-14.215.000	Efisiensi
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100%	100%	640.147.000	673.778.200	673.778.200	33.631.200	
5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan Perangkat daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	170.126.900	180.000.100	180.000.100	9.873.200	

		Meningkatnya Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	Persentase Pengetahuan Penyusun Laporan Keuangan	100%	100%	165.346.300	167.122.300	167.122.300	1.776.000	
		Terwujudnya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	80.020.200	102.182.200	102.182.200	22.162.000	
		Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan	100%	100%	73.949.800	73.949.800	73.949.800	-	
		Tercapainya Pelaksanaan Akuntansi Belanja dan pembiayaan	Persentase Capaian Peaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan	100%	100%	150.703.800	150.523.800	150.523.800	-180.000	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	12	17.776.400	17.776.400	17.776.400	-	-
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	26.387.000	26.387.000	26.387.000	-	-
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	28.978.600	28.798.600	28.798.600	-180.000	Efisiensi

5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	88.336.800	88.336.800	88.336.800	-	-
5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	39.802.200	39.802.200	39.802.200	-	-
5.02.02.2.0 3.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	1	16.371.200	16.371.200	16.371.200	-	-
5.02.02.2.0 3.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	80.020.200	102.182.200	102.182.200	22.162.000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.02.2.0 3.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	51.938.400	51.938.400	51.938.400	-	-

5.02.02.2.0 3.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	1	1	165.34 6.300	167.122.3 00	167.122.3 00	1.776.0 00	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.02.2.0 3.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dbina	27	27	29.851. 700	39.724.90 0	39.724.90 0	9.873.2 00	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.02.2.0 3.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	95.338. 200	95.338.20 0	95.338.20 0	-	-
5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya penyerapan APBD	Persentase penyerapan APBD	20	20	20.000. 000.00 0	10.000.00 0.000	10.000.00 0.000	- 10.000. 000.00 0	
5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	20	20	20.000. 000.00 0	10.000.00 0.000	10.000.00 0.000	- 10.000. 000.00 0	Efisiensi
5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersalurnya Penyetoran Pihak Ketiga	Persentase Penyetoran pada Pihak Ketiga Tepat Waktu	100%	100%	140.49 8.200	130.165.2 00	130.165.2 00	- 10.333. 000	
5.02.02.2.0 5.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3.734	3.734	140.49 8.200	130.165.2 00	130.165.2 00	- 10.333. 000	Efisiensi

p
e
n
u
n
j
a
n
g

		Daerah Bidang Keuangan Daerah								
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	11%	11%	97.872. 500	117.252.5 00	117.252.5 00	19.380. 000	
			Indeks Pengelolaan Aset	89%	89%	891.44 5.000	1.301.713 .000	1.301.713. 000	410.26 8.000	
5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terealisasinya penerimaan atas pemanfaatan BMD pada Kabupaten	Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	100%	100%	27.094. 000	306.894.0 00	306.894.0 00	279.80 0.000	
		Tersedianya dokumen regulasi pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase dokumen regulasi pengelolaan BMD yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	393.08 5.500	439.609.5 00	439.609.5 00	46.524. 000	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) tepat waktu	Persentase waktu penetapan rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%	100%	14.085. 000	36.485.00 0	36.485.00 0	22.400. 000	
		Terealisasinya Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtangan an, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	persentase Tindaklanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD	70%	70%	22.509. 500	23.272.50 0	23.272.50 0	763.00 0	
		Tersedianya sertifikat dokumen kepemilikan BMD	Persentase sertifikat dokumen kepemilikan BMD berupa tanah	70%	70%	131.16 7.500	108.667.5 00	108.667.5 00	- 22.500. 000	

		Menurunnya materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase materialitas temuan BPK atas LKPD terkait BMD	100%	100%	97.872.500	117.252.500	117.252.500	19.380.000	
		Menurunnya jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	Persentase jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD	100%	100%	13.854.000	13.854.000	13.854.000	-	
		Terpenuhinya tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	Persentase tindak lanjut keseluruhan rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD	85%	85%	46.816.500	46.816.500	46.816.500	-	
		Terealisasinya Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	Persentase tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan	100%	100%	242.833.000	326.114.000	326.114.000	83.281.000	
5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	300.570.000	300.570.000	300.570.000	-	-
5.02.03.2.0 1.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	65.440.000	111.964.000	111.964.000	46.524.000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	14.085.000	36.485.000	36.485.000	22.400.000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	27.075.500	27.075.500	27.075.500	-	-

5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6	6	242.83 3.000	326.114.0 00	326.114.0 00	83.281. 000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	13.854. 000	13.854.00 0	13.854.00 0	-	-
5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	2	131.16 7.500	108.667.5 00	108.667.5 00	- 22.500. 000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	2	27.094. 000	306.894.0 00	306.894.0 00	279.80 0.000	Kegiatan penilaian BMD yang melibatkan bagian kejaksaan terkait dengan honor tim
5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	4	22.509. 500	23.272.50 0	23.272.50 0	763.00 0	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	2	97.872. 500	117.252.5 00	117.252.5 00	19.380. 000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.03.2.0 1.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94	94	46.816. 500	46.816.50 0	46.816.50 0	-	-

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5%	5%	2.774.419.160	2.800.473.160	2.800.473.160	26.054.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya potensi wajib pajak daerah yang terdata	Persentase potensi wajib pajak daerah (9 jenis) yang terdata	100%	100%	2.549.072.760	2.455.572.760	2.455.572.760	-93.500.000	
		Terlaksananya penilaian PBB P2	Persentase objek pajak yang dinilai	100%	100%	59.139.500	110.189.500	110.189.500	51.050.000	
		Meningkatnya ketetapan wajib pajak daerah	Persentase Peningkatan ketetapan wajib pajak daerah	100%	100%	54.173.000	59.787.000	59.787.000	5.614.000	
		Meningkatnya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	112.033.900	174.923.900	174.923.900	62.890.000	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	12	12	2.549.072.760	2.455.572.760	2.455.572.760	-93.500.000	Opsen pajak, untuk pembangunan counter pembayaran pajak di Sungai tabuk
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4	4	59.139.500	110.189.500	110.189.500	51.050.000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8.300	8.300	54.173.000	59.787.000	59.787.000	5.614.000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan

5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3	3	112.03 3.900	174.923.9 00	174.923.9 00	62.890. 000	Perubahan antar rekening untuk di sesuaikan
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	5%	5%	1.437.1 57.000	1.960.056 .000	1.960.056. 000	522.89 9.000	
5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah	100%	100%	15.280. 000	15.280.00 0	15.280.00 0	-	
		Terlaksananya penyusunan dokumen peraturan perundang- undangan pajak daerah	Persentase penyusunan dokumen peraturan daerah dan kebijakan pajak daerah	100%	100%	37.308. 000	55.168.00 0	55.168.00 0	17.860. 000	
		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan pajak daerah	Persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pajak daerah	100%	100%	280.55 9.000	428.559.0 00	428.559.0 00	148.00 0.000	
		Terlaksana nya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	100%	233.02 6.000	264.871.0 00	264.871.0 00	31.845. 000	
		Terlaksana nya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	100%	30.714. 500	30.714.50 0	30.714.50 0	-	
		Terlaksana nya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%	100%	47.733. 000	47.733.00 0	47.733.00 0	-	

		Meningkatnya realisasi penagihan wajib pajak daerah	Persentase realisasi penagihan wajib pajak daerah	100%	100%	607.315.000	904.315.000	904.315.000	297.000.000	
		Meningkatnya penyelesaian kebertan pajak daerah	Persentase keberatan pajak daerah yang di tindaklanjuti	100%	100%	6.069.000	6.069.000	6.069.000	-	
		Terselesaikannya Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa	100%	100%	157.777.500	181.832.500	181.832.500	24.055.000	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	21.375.000	25.514.000	25.514.000	4.139.000	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	15.280.000	15.280.000	15.280.000	-	-
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	37.308.000	55.168.000	55.168.000	17.860.000	Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan pajak daerah, kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah memegang peranan yang sangat penting. Proses-proses ini

[illegible]

										dari nyaman dalam berdiskusi serta membuat keputusan. Oleh karena itu, penambahan kegiatan makan dan minum dalam rapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga kenyamanan peserta, terutama dalam rapat dengan durasi yang panjang. Penyediaan konsumsi ini bertujuan untuk memastikan agar peserta tetap memiliki energi, fokus, dan konsentrasi tinggi dalam memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan yang akan diterapkan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Di sisi lain, proses penyusunan kebijakan pajak daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Untuk itu, penting adanya upaya untuk mendistribusikan informasi mengenai peraturan-peraturan ini kepada semua pihak terkait, baik melalui pertemuan langsung maupun publikasi yang lebih luas. Penambahan belanja cetak buku peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan langkah strategis untuk
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

										daerah diharapkan dapat mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah yang lebih baik dan terarah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta berkontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah yang optimal.
5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	12	280.559.000	428.559.000	428.559.000	148.000.000	pagu di kurangi kotak transparan bahan acrylic untuk di geser ke sub kegiatan 02 dan 14

5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	10	233.02 6.000	264.871.0 00	264.871.0 00	31.845. 000	1. Ada penambahan bingkai foto pigura untuk pajak restoran 2. Kupon undian berhadiah dan sovenir jam dinding 3. Penambahan makan minum aktivitas lapangan MBLB 4. Kotak akrilik undian kupon berhadiah
5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	4	30.714. 500	30.714.50 0	30.714.50 0	-	-
5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	11	47.733. 000	47.733.00 0	47.733.00 0	-	-
5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	10	607.31 5.000	904.315.0 00	904.315.0 00	297.00 0.000	Penambahan Cetak SPPT PBB, SPPT PBB KECAMATA DAN SPPT DESA/KELURAHAN
5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	4	6.069.0 00	6.069.000	6.069.000	-	-

5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	157.77 7.500	181.832.5 00	181.832.5 00	24.055. 000	Penambahan Upah Jaga pos kontrol pajak MBLB dan BPJS Kesehatan Jaga pos kontrol pajak MBLB
5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	21.375. 000	25.514.00 0	25.514.00 0	4.139.0 00	Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pajak daerah serta retribusi daerah, dibutuhkan sebuah suasana yang kondusif dan efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Monitoring dan evaluasi yang baik memerlukan konsentrasi dan perhatian yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, baik itu petugas pajak, pejabat daerah, maupun pihak terkait lainnya. Salah satu

										cara untuk menciptakan suasana yang mendukung adalah dengan memastikan bahwa peserta rapat atau pertemuan memiliki kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat daerah	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perncaanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Persentase Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	78%	78%	68.074.604.655	71.847.104.901	71.847.104.901	3.772.500.246	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	71.891.400	87.538.900	87.538.900	15.647.500	
		Terkoordinir Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	100%	100%	10.876.900	13.233.500	13.233.500	2.356.600	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	16.726.500	19.800.000	19.800.000	3.073.500	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang

										kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	8.522.8 00	10.216.80 0	10.216.80 0	1.694.0 00	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	6.365.7 00	8.258.200	8.258.200	1.892.5 00	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	8.678.4 00	9.394.500	9.394.500	716.10 0	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	8.146.0 00	11.264.20 0	11.264.20 0	3.118.2 00	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	16.891. 100	22.044.30 0	22.044.30 0	5.153.2 00	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	19	10.876.900	13.233.500	13.233.500	2.356.600	Kebutuhan Administrasi Untuk menunjang kegiatan di Perencanaan
5.02.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	3.921.900	3.921.900	3.921.900	-	-
5.02.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Data Statistik Sektoral Daerah	1	1	2.639.000	2.639.000	2.639.000	-	-
5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	61.429.344.461	62.479.334.607	62.479.334.607	1.049.990.146	
5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	78	60.681.559.661	61.731.550.007	61.731.550.007	1.049.990.346	Menyesuaikan dengan kondisi jumlah ASN dan PPPK
5.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	714.526.400	714.526.200	714.526.200	- 200	Menggeser pagu dalam satu sub kegiatan karena berkurang nya personil TIM Penanggung jawab pengelola keuangan sehingga pagu

										rekening tersebut dialihkan ke barang dan jasa untuk proses dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	18.888.200	18.888.200	18.888.200	-	-
5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18	18	14.370.200	14.370.200	14.370.200	-	-
5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan	100%	100%	39.799.500	39.799.500	39.799.500	-	-
5.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	6.740.000	6.740.000	6.740.000	-	-

5.02.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	13.705.400	13.705.400	13.705.400	-	-
5.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	19.354.100	19.354.100	19.354.100	-	-
5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas	100%	100%	215.712.000	215.711.000	215.711.000	-1.000	
5.02.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	135.712.000	135.711.000	135.711.000	-1.000	Efisiensi
5.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-
5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Barang Umum Pada Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	100%	925.763.800	1.526.857.800	1.526.857.800	601.094.000	
5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	28.629.500	28.629.500	28.629.500	-	-
5.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	56.023.000	56.023.000	56.023.000	-	-

5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	102.39 3.500	98.517.50 0	98.517.50 0	- 3.876.0 00	di alihkan Makan dan Minum karena salah dalam penginputan di sub kegiatan ini dan di alihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	70.383. 800	70.383.80 0	70.383.80 0	-	-
5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	668.33 4.000	1.273.304 .000	1.273.304. 000	604.97 0.000	Menambah dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makan dan Snack
5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1.801.4 21.000	3.758.834 .000	3.758.834. 000	1.957.4 13.000	
5.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	6	528.74 5.000	1.927.825 .000	1.927.825. 000	1.399.0 80.000	penggantian mobil diperlukan karena kondisi kendaraan yang saat ini digunakan sudah tidak

										lagi optimal. usia kendaraan yang cukup lama menyebabka n sering terjadi kerusakan sehingga menghambat kelancaran operasional dan meningkatka n biaya perawatan. selain itu, kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi menuntut kendaraan dengan performa lebih baik, hemat bahan bakar, serta aman digunakan. dengan adanya penggantian mobil, diharapkan efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas dapat lebih terjamin.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	20	99.652.000	169.388.000	169.388.000	69.736.000	Ada Penambahan Belanja Modal Kursi dan Meja untuk dari pagu subbid belanja pegawai
5.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	67	67	1.173.024.000	1.661.621.000	1.661.621.000	488.597.000	Ada Penambahan Belanja Modal dari Bidang untuk menunjang kegiatan
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	100%	100%	1.958.995.594	1.929.995.594	1.929.995.594	-29.000.000	
5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	376.825.594	376.825.594	376.825.594	-	-
5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	1.582.170.000	1.553.170.000	1.553.170.000	-29.000.000	Pengurangan ini karena ada pengurangan belanja expo dan penyesuaian gaji PTT
5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	1.620.800.000	1.795.800.000	1.795.800.000	175.000.000	

5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	38.990.000	38.990.000	38.990.000	-	-
5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60	724.000.000	724.000.000	724.000.000	-	-
5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	145	113.558.000	113.558.000	113.558.000	-	-
5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	579.513.000	754.513.000	754.513.000	175.000.000	Rehab Gedung A lantai 1 dan 2
5.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	625	625	115.059.000	115.059.000	115.059.000	-	-
5.02.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	72	49.680.000	49.680.000	49.680.000	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, terjadi penurunan anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Dari empat program yang dilaksanakan oleh BPKPAD, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja paling ditekankan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas 5 kegiatan dan 25 subkegiatan.

Sementara itu, tiga program lainnya tidak mengalami banyak penambahan pagu akibat efisiensi, melainkan hanya terdapat pergeseran alokasi dalam subkegiatan.

Secara keseluruhan, pagu anggaran BPKPAD pada RKPD Murni sebesar Rp321.206.121.455, setelah dilakukan perubahan menjadi Rp319.131.364.553. Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran sebesar Rp2.074.756.902.

Penyesuaian ini sebagai bentuk komitmen BPKPAD dalam mendukung kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja secara terarah dan proporsional, tanpa mengurangi efektivitas pencapaian target kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika

pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi dari pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pendapatan Daerah. Setiap perubahan harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, baik dari sisi capaian kinerja maupun efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan Renja tidak boleh menyimpang dari arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar, untuk menjamin keselarasan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, seluruh rancangan perubahan juga harus mempertimbangkan hasil pengawasan, baik dari BPK, BPKP, maupun Inspektorat sendiri, serta memasukkan mitigasi terhadap risiko-risiko strategis yang telah diidentifikasi.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2025 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 BPKPAD Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh rencana kerja perubahan tersebut.
2. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk mengarahkan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan.
3. Penentuan Prioritas: Menentukan prioritas perubahan yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Perencanaan Taktis: Rinci langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan
5. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan perubahan yang akurat dan efektif.
6. lokasi Sumber Daya: Menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan.
7. Kaidah transparansi dan akuntabilitas, di mana seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan perubahan Renja harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
8. Perencanaan harus berbasis pada pendekatan kinerja yaitu berfokus pada capaian indikator dan manfaat kegiatan, bukan hanya pada realisasi anggaran.
9. Perubahan Renja wajib mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017, serta aturan teknis lainnya.

Kaidah berikutnya adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dapat terhindar dari kesalahan, penyimpangan, dan *fraud*. Terakhir, perlu ditekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah serta pelibatan aktif Inspektorat dalam proses reviu agar seluruh perubahan terkontrol secara internal sebelum ditetapkan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut BPKPAD Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Evaluasi situasi saat ini di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, identifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi.
1. Tujuan dan Sasaran: menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta sasaran yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan waktu-batas (SMART) untuk perubahan yang diinginkan.
2. Strategi Perubahan: Merencanakan strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang akan melibatkan perubahan struktural, program pelatihan, peningkatan layanan, atau langkah-langkah lainnya.
2. Kegiatan dan Rencana Aksi: Membuat rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
3. Monitoring dan Evaluasi: menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan keberhasilan rencana kerja. Serta mengatur sistem untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara berkala.
4. Anggaran: Menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

4.4 Analisis Risiko Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar mengidentifikasi sejumlah risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Risiko-risiko tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Meskipun seiring berjalannya waktu, besar kemungkinan akan ditemukan risiko-risiko strategis baru sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi, kondisi sosial kultural masyarakat, budaya dan faktor-faktor lainnya.

Berikut adalah uraian terhadap risiko – risiko strategis dimaksud:

1. Penentuan pagu anggaran belum mencerminkan money follow function Analisis risiko sebagai berikut :
 - Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Fungsi
 - Klasifikasi Program Prioritas Daerah
 - Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
 - Peningkatan Kapasitas TAPD dan SKPD

- Monitoring dan Evaluasi Alokasi Pagu Berdasarkan Kinerja
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Mitigasi terhadap ketidaksesuaian pagu dengan prinsip Money Follow Function harus menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan penganggaran berbasis fungsi dan kinerja, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja, tetapi juga menjamin capaian pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

2. Peningkatan manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan . penganggaran. Pelaksanaan. Pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan. Analisis risiko sebagai berikut :

- Data Perencanaan Tidak Akurat atau Tidak Terkini
- Penganggaran Tidak Berdasarkan Informasi Kinerja dan Output
- Kesenjangan Informasi dalam Pengendalian dan Monitoring
- Evaluasi Kinerja Tidak Didukung oleh Data yang Valid dan Terintegrasi
- Keamanan dan Keterpaduan Sistem Informasi Lemah

Peningkatan manajemen data dan informasi bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga membangun sistem yang terintegrasi, aman, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Dengan mitigasi risiko yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi berbasis bukti dan terarah untuk hasil yang maksimal.

3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Analisis Risiko sebagai berikut :

- Pelatihan akuntansi berbasis akrual secara berkelanjutan
- Penjadwalan dan pembagian tugas yang jelas
- Penerapan SOP dan checklist laporan keuangan
- Sistem knowledge management dan kaderisasi staf
- Pelatihan aplikasi keuangan (SIMD, SIPD dsb)

4. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Identifikasi Risiko adalah Risiko administrasi (data tidak akurat, pencatatan ganda, dll), Risiko hukum (status kepemilikan tidak jelas, sengketa aset), Risiko operasional (pemeliharaan tidak memadai, kehilangan/kerusakan barang), Risiko keuangan (aset tidak menghasilkan manfaat ekonomis) dan Risiko reputasi (temuan BPK, sorotan publik/media).

Penilaian Risiko. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko, Menyusun rencana aksi mitigasi, Penertiban aset melalui inventarisasi ulang, Digitalisasi manajemen BMD, Peningkatan kompetensi SDM pengelola aset dan Penguatan pengawasan dan audit internal. Pemantauan dan Evaluasi Monitoring berkala terhadap efektivitas mitigasi dan Penyesuaian kebijakan atau SOP sesuai dinamika di lapangan.

5. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti. PBB P2 dan perijinan investasi

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Objek: Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan untuk usaha Pertumbuhan perumahan & apartemen, Pusat perbelanjaan dan kawasan industri, Lahan idle yang berpotensi dioptimalkan nilai jual objek pajaknya (NJOP), Sumber daya potensial Pemetaan NJOP yang belum diperbarui, Pengembang besar yang memiliki banyak lahan belum dimanfaatkan dan Properti tidak terdaftar yang belum dikenai pajak.

Strategi mitigasi risiko

1. Untuk PBB-P2

- Digitalisasi dan pemutakhiran basis data aset (gunakan GIS, drone, atau fotogrametri).
- Pemutakhiran NJOP secara berkala berdasarkan nilai pasar aktual.
- Audit properti besar (real estate audit) bekerja sama dengan BPN dan developer.
- Sinkronisasi data antar dinas (BPKAD, Bapenda, DPMPTSP, Dinas PU).
- Kampanye pemecahan PBB oleh developer saat rumah diserahterimakan.

2. Untuk Perizinan Investasi

- Penguatan sistem perizinan online (OSS, SIMBG) untuk transparansi dan akuntabilitas.
- One-door investment service yang mengintegrasikan pengawasan dan pendataan properti baru.
- Reward untuk investor taat pajak (misalnya melalui pemrosesan cepat izin)
- Audit kepatuhan izin dan retribusi secara periodik
- Sosialisasi dan asistensi pengembang kecil agar patuh izin dan pajak.

6. Peningkatan penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Identifikasi Objek Potensial Inventarisasi objek bernilai tinggi secara sistematis

Gunakan data dari: BPHTB (nilai transaksi jual beli), Dinas Perizinan (izin lokasi, IMB, SLF), Kantor Pertanahan (sertifikat HGB, SHM) dan Laporan investasi DPMPTSP

2. Penilaian Berbasis Pasar

Terapkan metode perbandingan data pasar dan/atau pendapatan (income approach) khususnya untuk properti komersial. Gunakan teknologi GIS dan sistem informasi geospasial (Peta Blok PBB)

3. Integrasi Pajak dengan Perizinan dan Investasi. Jadikan data penilaian PBB sebagai basis penilaian retribusi dan izin pemanfaatan ruang. Tautkan data NJOP dengan Penilaian Nilai Lahan untuk izin pemanfaatan dan Rencana pengembangan kawasan industri atau perumahan

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Audit penilaian dan pengenaan PBB secara sampling, Penegakan hukum atas manipulasi data atau penghindaran pajak dan Sanksi administrasi untuk keterlambatan pelaporan nilai transaksi

7. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

1. Registrasi Objek/Subjek Pajak
Input melalui aplikasi online (SmartGov dan SI Intan Dara atau mobile app)
2. Penetapan dan Penagihan
Otomatisasi SKPD dan STPD berdasarkan data sistem dan Notifikasi digital via email, SMS, atau aplikasi
3. Pembayaran
Terhubung ke kanal pembayaran resmi: QRIS, e-wallet, bank mitra, dan Referensi tagihan dengan kode bayar unik
4. Validasi dan Penerimaan
Validasi real-time melalui Smartgov ke sistem bank dan Updating sistem penerimaan daerah otomatis
5. Pelaporan dan Monitoring
Dashboard online untuk pemantauan PAD harian dan Laporan agregat untuk manajemen dan akuntabilitas

Perubahan Rencana Kerja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan kegiatan yang real dilaksanakan berkesesuaian dengan pencapaian target RPJMD. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2025 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Martapura, 20 Juni 2025

Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Kabupaten Banjar,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19660104 198602 1 004

LAMPIRAN

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan
perencanaan pembangunan daerah,

Tanggal : 20 Juni 2025

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan manusia
Dan Pemerintahan

FARA HAYANI, SP
NIP. 19720225 199903 2 008

RUSDIAN NOOR, SE
NIP. 198404042011011009

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.hut, M.Si
NIP. 19740923 200003 1 004

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu Urusan penunjang pemerintahan khususnya pada bidang kepegawaian sekaligus penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja sebelumnya, yang didasarkan pada dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam melaksanakan program-program kerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai masukan, saran, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Kerja Pemerintah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program/ kegiatan SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENSTRA SKPD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Perubahan RENJA SKPD dilakukan sebagai bentuk Penyesuaian terhadap Realisasi Pendapatan dan Belanja: Selama tahun anggaran berjalan, realisasi pendapatan dan belanja dapat berbeda dari yang direncanakan. Penyesuaian ini diperlukan agar anggaran lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual.

Perubahan Renja SKPD bertujuan untuk menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga

organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal dan responsif terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) , rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). Disamping itu Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat tahun 2025.

Dari uraian arti strategis mengenai Renja di atas, maka disusun Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang secara substansial merupakan terjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilaksanakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sebagai Bagian terintegrasi dari Pemerintah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) ini dalam sebuah Rencana Kerja, Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Perubahan Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Perubahan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan

tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA SKPD serta sebagai proses penyusunan APBD.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 , Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian target serta anggaran guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagai dasar BKPSDM selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai tugas dan fungsi.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan Rencana

Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang , Rencana Pembangunan Jangka Menengah , Dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5);
- 20) Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
- 21) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat ;
- 22) Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 23) Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kab.Banjar selama kurun waktu satu tahun (2025).
- (2) Menyediakan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di BKPSDM, Pemerintah , DPRD dan masyarakat Kabupaten Banjar dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.
- (3) sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi program,kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2025 Badan Kepegawaian Kabupaten Banjar ini, secara berurutan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan antara lain meliputi :

- Perubahan Indikator Kinerja
- Jumlah Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Total kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan Penutup Tentang Perubahan Renja BKPSDM

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah- kaidah Pelaksanaan

- Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaram Yang Direncanakan

1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN dengan target 1 dokumen dan realisasi nihil serta capaian nihil.

2. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 4 laporan dan realisasi 2 laporan serta capaian nihil

3. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 4 dokumen dan realisasi 0 dokumen serta capaian 0%

4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target 10 Laporan dan realisasi sebanyak 0 laporan serta capaian 0%

5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani dengan target 10 dokumen dan realisasi sebanyak 0 dokumen serta capaian 0%

2.2. Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaram Yang Direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program ini adalah indeks kepatuhan dan kinerja intern dengan target 78 indeks Adapun realisasi pada triwulan II masih nihil dikarenakan periode penilaian mandiri dan penjaminan kualitas akan dilaksanakan pada triwulan IV.

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan dengan target 100% dan realisasi pada triwulan II sebesar 50% serta capaian sebesar 50%

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Terpenuhiya fasilitas kebutuhan perkantoran dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini Persentase Terpeliharanya barang milik daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

9. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase Terpeliharanya barang milik daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 25 % serta capaian 25%

10 Mutasi dan Promosi ASN

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase pelayanan Administrasi bidang mutasi dan promosi tepat waktu dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

11 Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan target 100% dan realisasi sebesar 50% serta capaian 50%

12 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase Pengembangan Kompetensi ASN Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan tepat waktu dengan target 100% dan realisasi sebesar 50 % serta capaian 50%

13 Pengembangan Kompetensi Teknis

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase Pengembangan Kompetensi ASN Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis dengan target 100% dan realisasi sebesar 50% serta capaian 50%

14 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator kegiatan ini Indikator kegiatan ini Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Persentase jumlah rata-rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional dengan target 100% dan realisasi sebesar 50% serta capaian 50%

15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi sebanyak 3 dokumen serta capaian sebesar 100%

16 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD . realisasi kinerja sub kegiatan ini belum teralisasi karena penjadwalan pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada triwulan III dan IV

17 Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Dengan target 2 dokumen realisasi dokumen kinerja pada sub kegiatan ini belum terealisasi karena pelaksanaan penyusunan RKA dilaksanakan pada triwulan III

18 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dengan target 2 dokumen realisasi kinerja 2 dokumen serta capaian 100%

19 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD realisasi kinerja pada sub kegiatan ini belum terealisasi karena pelaksanaan penyusunan DPPA dilaksanakan pada triwulan III

20 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 3 laporan dan realisasi 3 laporan serta capaian 100%

21 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 17 dokumen dan realisasi 8 dokumen serta capaian 23.5%

22 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah :dengan target 1 dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III

23 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah: dengan target 1 dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III

24 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 dokumen dan realisasi sebanyak 6 dokumen serta capaian sebesar 50%

25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi sebanyak 1 Laporan serta capaian sebesar 100%

26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 18 Laporan dan realisasi sebanyak 9 Laporan serta capaian sebesar 50%

27 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 Laporan dan realisasi sebanyak 2 Laporan serta capaian sebesar 50 %

28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan realisasi kinerja ini dilaksanakan pada triwulan III

29 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dengan target 75 orang dan realisasi masih belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada triwulan III

30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 12 paket dan realisasi 6 paket serta capaian sebesar 50 %

31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 12 Paket dengan realisasi 6 Paket serta capaian 50%

32 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 12 Paket dengan realisasi 6 Paket serta capaian 50%

33 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket dengan realisasi 5 Paket serta capaian 50%

34 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 4 laporan dan realisasi sebanyak 2 laporan serta capaian sebesar 50%

35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 4 laporan dan realisasi sebanyak 2 laporan serta capaian sebesar 50%

36 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi 6 laporan serta capaian 50%

37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi 6 laporan serta capaian 50%

38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit serta capaian 100%

39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 11 Unit dan realisasi 5 unit serta capaian sebesar 45.45%

40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 163 unit dan realisasi sebanyak 84 unit serta capaian sebesar 44.7%

41 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 10 unit dan realisasi 5 unit serta capaian 50%

42 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan target 14 unit dan realisasi sebanyak 7 unit serta capaian 50%

43 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1 dokumen . realisasi kinerja sub kegiatan ini belum dapat direalisasikan karena proses penyusunan dokumen rencana kebutuhan masih dalam tahap persiapan .

44 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Indikatpor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen serta capaian 100%

45 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target 250 dokumen dan realisasi sebanyak 44 dokumen serta capaian 17.6%

46 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi dengan target 1 lembaga . Realisasi kinerja sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III

47 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN dengan target 1 dokumen . realisasi kinerja sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III berkenaaan dengan proses perumusan regulasi terkait pengelolaan data kepegawaian.

48 Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan target 4 dokumen dan realisasi 2 dokumen serta capaian sebesar 50%

49 Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dengan target 4 dokumen dan realisasi 2 dokumen serta capaian sebesar 25%

50 Pengelolaan Assessment Center

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center dengan target 1 dokumen . realisasi kinerja sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III bertepatan dengan pelaksanaan pengukuran kompetensi pegawai

51 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan target 3 dokumen . realisasi kinerja sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III aktivitas yang dilaksanakan seperti penyertaan uji kompetensi fungsional

52 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan target 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen serta capaian 100%

53 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir dengan target 150 orang dan realisasi sebanyak 61 orang serta capaian sebesar 40.6%

54 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 4 dokumen dan realisasi 1 dokumen serta capaian 50 %

55 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan dengan target 270 orang. Realisasi kinerja sub kgiatan

ini akan dilaksanakan pada triwulan IV bertepatan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian SLKS bagi pegawai

- 56 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 3 dokumen dan realisasi 1 dokumen serta capaian sebesar 33.3%

- 57 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun dengan target 1 dokumen . Realisasi kinerja sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III berkenaan dengan periode penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi

58 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dengan target 5 dokumen dan realisasi 4 dokumen serta capaian sebesar 80%

59 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 4 laporan. Realisasi kinerja sub kegiatan ini terkait pelaksanaan pelatihan dasar CPNS , Orientasi PPPK , Pelatihan Kepemimpinan yang akan dilaksanakan pada triwulan III

60 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama dengan target 2 dokumen . Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang pelaksanaannya akan disusun pada triwulan IV

2.3. Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja program ini adalah Indek Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi dengan target sebesar 16.25 realisasi sebesar 27.6 serta capaian sebesar 169.8%

2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan target 116 orang dan realisasi sebanyak 179 orang serta capaian 154.3%

2.4. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan jadwal yang sudah disusun

1. Belum selarasnya indikator kinerja pada pohon kinerja , cascading kinerja , dan Renstra PD dengan RKA/DPA SKPD pada SIPD
2. Terlambatnya penetapan sasaran strategis PD sebagai target capaian pada periode rencana strategis 2025-2029
3. Belum optimalnya partisipasi bidang terkait perumusan sasaran kinerja strategis dan operasional perangkat daerah
4. Perbedaan persepsi terkait indikator kinerja kunci rasio jabatan fungsional bersertifikat diluar guru dan tenaga Kesehatan
5. Jadwal monitoring dan evaluasi kinerja yang sering berubah karena terbentur agenda lain
6. Dinamisnya perubahan data statistic pegawai

7. Kekurangan alokasi anggaran pada rekening belanja tunjangan fungsional umum PPPK
8. Perubahan keputusan terkait pejabat pengadaan barang./jasa sehingga perlu penyesuaian
9. Koreksi laporan keuangan dari bidang akuntansi BPKPAD Kabupaten Banjar
10. Kesalahan pada penginputan rekening belanja pada SIPD Penatausahaan keuangan
11. Perubahan pemegang BMD tanpa memberi konfirmasi kepada pengelola BMD
12. Belum tersusunnya jadwal pelatihan teknis pegawai lingkup BKPSDM
13. Terbatasnya spesifikasi barang yang tercantum pada DPA dengan standar harga yang ditetapkan
14. Alokasi anggaran untuk tagihan internet tidak dapat di realisasikan karena dukungan jaringan internet telah difasilitasi oleh DKISP Kabupaten Banjar
15. Perubahan Status kepegawaian tenaga non ASN yang lulus menjadi PPPK
16. Terdapat beberapa sparepart AC yang belum tersedia pada penyedia
17. Sering terjadi korsleting Listrik karena kelebihan beban daya yang digunakan
18. Usulan rincian formasi jabatan teknis belum terinventarisir
19. Berkas usulan pensiun pegawai masih terdapat kekeliruan
20. Syarat pencairan hibah tahap pertama belum dilengkapi sehingga belum dapat dilakukan pencairan
21. Masih terdapat kesalahpahaman ASN dalam memahami MFA
22. Masih terdapat disparitas data per jenis jabatan

23. Data PNS tugas belajar belum diperbarui
24. Masih terdapat PNS jabatan fungsional yang belum memahami tentang konversi angka kredit
25. Belum dapat dilakukan pengisian pada jabatan kosong dengan penempatan jabatan definitif karena perlu persetujuan Kemendagri terkait pelantikan pejabat struktural apabila kepala daerah belum memasuki 6 bulan pada masa jabatannya
26. Pencantuman Gelar pada Perubahan system periodik yang baru, pengusulan bisa dilakukan Setiap Saat, namun di system ternyata belum siap
27. Pengguna Metode CAT pada ujian dinas dan UPKP masih belum dapat dipahami dengan baik oleh peserta
28. Data hasil assessment belum terkompilasi dengan baik
29. Permohonan usulan uji kompetensi jabatan fungsional dalam rangka perpindahan jabatan belum dapat dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari instansi Pembina jabatan fungsional
30. Pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka terhambat karena terbenturnya jadwal dengan agenda lain
31. Penggunaan system I- Mut dalam manajemen jabatan fungsional masih tergolong baru sehingga perlu penyesuaian
32. Pelaksanaan penilaian kinerja belum dilaksanakan secara holistic dan objektif karena dianggap sebagai formalitas penunjang administrasi kenaikan pangkat/jabatan.
33. Belum terkelolanya data calon penerima SLKS dengan klasifikasi yang diperlukan
34. Masih terdapat ASN yang belum memahami jenis- jenis cuti pegawai

35. Belum selesainya proses bimbingan konsultasi perceraian pada kantor urusan agama tapiu permohonan izin perceraian sudah diajukan
36. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilakukan sebagai upaya memnuhi kewajiban terkait 20 JP tetapi tidak dilakukan Analisa kebutuihan jabatan per jenis jabatan
37. Pengelolaan data realisasi penghembangan kompetensi belum terkompilasi dan terinventarisir dengan baik
38. Usulan pengembangan kompetensi teknis dari perangkat daerah tidak terinci sesuai standar kompetensinya
39. Dokumen kerjasama terkait pelatihan kepemimpinan belum meregulasi secara baik terkait rincian pendaaan
40. Belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional teknis diluar guru dan tenaga Kesehatan

2.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Perubahan target dalam perubahan rencana kerja dilakukan sebagai upaya percepatan atau akselerasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program rencana strategis. Langkah ini diambil guna menyesuaikan arah kebijakan dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan selaras dengan dinamika kebutuhan serta perkembangan yang terjadi, sehingga target yang telah direncanakan dalam dokumen strategis dapat tercapai secara optimal.

Implikasi terhadap target capaian program Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) erat kaitannya dengan kualitas tata kelola manajemen aparatur, pengembangan

kompetensi, serta kinerja pelayanan kepegawaian. Apabila target Renstra BKPSDM tercapai sesuai perencanaan, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur telah berjalan efektif, baik dari aspek rekrutmen, mutasi, promosi, hingga pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Capaian tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan profesionalisme ASN, mendukung reformasi birokrasi, serta memperkuat pencapaian indikator kinerja daerah terkait kualitas pelayanan publik. Selain itu, keberhasilan ini akan memudahkan BKPSDM dalam mempertahankan atau meningkatkan dukungan anggaran, memperbaiki skor SAKIP, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Namun, apabila target capaian program tidak terpenuhi, implikasinya dapat menghambat terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan kompeten. Keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan program strategis, seperti diklat, uji kompetensi, atau pengisian jabatan fungsional/struktural, dapat menurunkan kualitas pelayanan SKPD lainnya karena ASN tidak mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas yang optimal. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan temuan dalam evaluasi kinerja oleh KemenPAN-RB maupun Inspektorat, memicu perlunya revisi strategi dan target pada periode selanjutnya, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Dari perspektif publik, kegagalan ini dapat memengaruhi persepsi negatif terhadap manajemen SDM aparatur dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.

2.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penginputan indikator kinerja utama pada SIPD
2. Rapat koordinasi penetapan sasaran startegis renstra 2025-2029
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait penyusunan rencana strategis dengan melibatkan semua pihak terkait
4. Koordinasi intensif sebagai upaya penyamaan persepsi terkait indikator kinerja kunci rasio jabatan fungsional bersertifikat diluar guru dan tenaga Kesehatan
5. Penjadwalan kegiatan monitoring dilakukan setelah berkoordinasi dengan sub bagian umum kepegawaian guna menghindari terbenturnya jadwal
6. Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala
7. Melakukan usulan penggunaan rekening belanja lain guna menutupi kekurangan alokasi belanja tunjangan fungsional umum PPPK
8. Meminta surat Keputusan terbaru terkait perubahan penunjukkan pejabat pengadaan barang/jasa
9. Koordinasi dengan intensif untuk melakukan revisi terhadap kesalahan pada laporan keuangan
10. Melakukan verifikasi berjenjang sebelum dilakukan penginputan transaksi belanja pada SIPD
11. Membuat Pakta Integritas untuk ditandatangani seluruh pemegang BMD agar penggunaan BMD dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel
12. Melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan teknis
13. Melaksanakan survei barang pada penyedia lain

14. Menyusun usulan perubahan anggaran alokasi tagihan internet ke belanja lain yang lebih krusial
15. Pendataan Kembali untuk memperbarui data non ASN setelah perubahan status non ASN menjadi PPPK
16. Melakukan pembelian pada penyedia lain
17. Menyusun usulan penambahan daya Listrik dengan rencana anggaran biaya yang representatif
18. Menyusun rincian formasi teknis secara terinventarisir sesuai klasifikasi keperluannya
19. Meminta pengusul pensiun untuk memperbaiki berkas usulan pensiunnya
20. Berkoordinasi secara intensif dengan Sekretariat Dewan Pembina KORPRI untuk melengkapi berkas pencairan tahap pertama hibah
21. Melaksanakan sosialisasi terkait MFA
22. Melakukan koreksi terhadap disparitas data yang ditemukan
23. Berkoordinasi dengan PNS Tugas belajar guna memperbarui data kepegawaiannya
24. Melakukan penyebaran informasi melalui media social terkait konversi angka kredit
25. Berkoordinasi dengan kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina kepegawaian untuk memohon persetujuan Kemendagri terkait pengisian jabatan kosong dengan jabatan definitif
26. Melakukan koordinasi terkait masalah pada saat pengusulan pencantuman gelar
27. Melaksanakan pembekalan terkait metode CAT sebelum pelaksanaan ujian dinas dan UPKP
28. Melakukan rekonsiliasi data hasil Asesment

29. Melakukan koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional terkait permohonan usulan uji kompetensi jabatan fungsional
30. Melaksanakan sosialisasi secara Daring
31. Mempelajari pedoman I-mut
32. Melaksanakan dialog kinerja agar penilaian dapat diimplementasikan secara objektif dan holistic
33. Melakukan penghimpunan dan verifikasi data penerima SLKS
34. Melakukan penyampaian informasi terkait jenis-jenis cuti ASN melalui media sosial resmi perangkat daerah
35. Melaksanakan koordinasi dengan kantor urusan agama terkait guna penyelesaian proses bimbingan sebagai prasyarat izin perceraian
36. Menyusun rencana pengembangan kompetensi secara baik dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan
37. Menunjukkan PIC terkait pengelolaan data realisasi pengembangan kompetensi
38. Melaksanakan verifikasi secara detail terkait usulan pengembangan kompetensi teknis
39. Melakukan revisi atau addendum terkait MOU pelatihan guna mengatur rencana pendanaan secara lebih transparan
40. Melaksanakan FGD dengan menghadirkan seluruh JF teknis

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	Indeks	78	12.552.907.269	0	2.650.600.107
2	5.03.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>72.687.000</i>	<i>33,33</i>	<i>7.342.847.208</i>
3	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	11.000.000	3	0
4	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	8.200.000	0	0
5	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	6.951.000	0	0
6	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9.000.000		0

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
7	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	2	8.950.000	0	0
8	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	8.436.000	3	2.044.000
9	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	5.000.000	8	1.985.500
10	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	4.350.000	0	1.842.000
11	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	10.800.000	0	600000
12	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	7.504.360.000	50	3.668.187.854
13	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	7.290.000.000	53	3.574.226.354

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
14	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	204.360.000	6	88.990.000
15	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000	1	4.245.500
16	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000	9	726.000
17	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	10.000.000	25	4.436.000
18	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	10.000.000	1	4.436.000
19	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persen	100	117.272.000	25	
20	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	100.000.000	0	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
21	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	17.272.000	0	
22	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran	Persen	100	2.030.550.000	50	899.006.440
23	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	62.018.500	6	27.691.325
24	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	850.694.500	6	578.816.925
25	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.079.000	6	12.473.444
26	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	47.980.000	6	12.781.500
27	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	25.650.000	2	1.680.000
28	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.010.128.000	2	265.563.246
29	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	1.269.066.000	25	414.015.632

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
30	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	640.016.000	3	125.491.364
31	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	629.050.000	3	288.524.268
32	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang milik daerah	Persen	100	1.548.972.269	50	502.603.121
33	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	42.750.000	1	11.900.000
34	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	257.040.000	4	29.303.200
35	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	163	116.090.000	73	17.665.000
36	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	1.017.152.269	5	430.439.452

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
37	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	115.940.000	3	13.295.469
38	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi	Persen	100	4.370.164.600		432.221.099
			Persentase data ASN yang berkualitas	Persen	100			
			Persentase tahapan pengadaan ASN yang terlaksana sesuai ketentuan	Persen	100			
			IP ASN dimensi Kinerja	Indeks	24		24,24	
			IP ASN Dimensi Disiplin	Indeks	5		5	
			Persentase ASN yang dikembangkan Karirnya	Persen	25		16,39	
39	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi	Persen	100	1.141.532.600		204.340.449
			Persentase SK Pemberhentian Tepat waktu	Persen	100		50	
			Persentase data ASN yang berkualitas	Persen	100		50	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
40	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	18.747.200		5.865.195
41	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	550.899.800		170.913.408
42	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	250	9.271.300	44	4.386.010
43	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	300.000.000		
44	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	10.000.000		
45	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3	201.614.300		9.192.139
46	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	51.000.000	2	13.983.697

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
47	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar Daerah	Dokumen	4	1.174.998.300	2	100.633.500
			Persentase penerbitan SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	Persen	100		100	
			Persentase JPT , Administrator dan Pengawas Yang Terisi	Persen	100			
			Persentase Suksesor yang terpetakan sesuai ketentuan	Persen	100			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	orang	350			
48	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4	200.746.000		34.449.000
49	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1.000	283.502.300		47.230.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
50	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	690.750.000	1	18.954.500
51	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	Persen	100	1.648.905.900	50	84.980.960
52	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	190	145.642.900	23	15.520.500
53	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	712.576.000		3.261.970
54	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	3	480.739.000		560.000
55	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	4	88.000.000	0	23.786.500
56	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	350	221.948.000	61	41.851.990
57	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	IP ASN Dimensi Kinerja	Indeks	20	404.727.800	24,24	42.266.190
			IP ASN Dimensi Disiplin	Indeks	5		5	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
58	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	59.100.700		13.561.690
59	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	239.093.100		9.629.500
60	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	270	58.505.000		9.621.500
61	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	27.264.700		3.895.500
62	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10	10.491.800		2.747.000
63	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	10	10.272.500		2.811.000
64	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IP ASN Dimensi Kompetensi	28	31	7.288.442.800		1.322.443.705
			IP ASN dimensi Kualifikasi	Indeks	18			
65	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase PNS Memenuhi kewajiban 20 JP	Persen	15	1.648.888.400		545.514.160

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
66	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	116	1.583.258.400	179	539.434.930
67	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	3	65.630.000	1	6.079.230
68	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga	Dokumen	4	5.639.554.400		776.929.545
			Persentase PNS Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	80	80			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
			<i>Persentase Pejabat fungsional (Non guru dan Nakes) yang sudah mengikuti pelatihan fungsional</i>	<i>Persen</i>	5			
69	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	1	49.428.000		
70	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	5	207.403.000	1	3.084.000
71	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4	4.627.401.000		769.702.990

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II	
1	2	3	4		5		6	
					K	Rp	K	Rp
72	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	2	755.322.400		4.142.555

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II BKPSDM

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja dan Indikator pada tujuan dan sasaran pada rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Berkembangnya Profesional ASN		Indeks Profesionalitas ASN	69
	Berkembangnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	69
	Meningkatnya Administrasi Layanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	89

Sumber : Renstra 2022-2026

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan rancangan akhir rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 sesuai pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	0,42
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	0,42
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah	Predikat SAKIP PD	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87

Sumber :Renstra 2025-2029

Rencana kerja Perubahan (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Pada tahun 2025 BKPSDM akan

melaksanakan **3 program 13 kegiatan serta 55 Sub kegiatan** .

Dengan total pagu dana sebesar **Rp. 21.736.291.448,-**

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari adanya masa transisi antara dua periode perencanaan strategis yang berbeda, yaitu dari Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2022–2026 menuju Rencana Strategis yang baru untuk periode Tahun 2025–2029.

Periode transisi ini menuntut adanya penyelarasan kembali terhadap sasaran, program, dan indikator kinerja yang digunakan, agar tetap relevan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkini. Selain itu, perubahan indikator kinerja juga mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan organisasi serta perkembangan regulasi yang mengatur tata kelola manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.

Dengan demikian, perubahan terhadap indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Anggaran 2025 ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh target dan capaian kinerja yang direncanakan selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang baru, serta mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap tantangan ke depan.

3.2. Jumlah Program ,Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini

Jumlah Program Pada Perubahan Renja 2025 adalah sebanyak 3 Program,13 Kegiatan dan 55 sub kegiatan ,Tahun Anggaran 2024 ini. Nama program/kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.3 Program /Kegiatan/Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025
	BKPSDM	Rp 21.736.291.448
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 12.605.778.328
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 72.687.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 8.200.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.951.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 9.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 8.950.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.436.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Rp 4.350.000
9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Rp 10.800.000
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 7.512.520.000
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.290.000.000
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 212.520.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.000.000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 10.000.000
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 117.272.000
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan	Rp 17.272.000
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 1.963.618.000
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 62.018.500
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.079.687.500
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 34.079.000
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 47.980.000
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 25.650.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 714.203.000
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1.150.329.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 532.979.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 617.350.000
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1.779.352.328
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 42.750.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 257.040.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 116.090.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.198.892.328
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 164.580.000
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 4.013.627.120
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 825.527.100
29	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp 16.562.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 320.481.000
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 8.929.300
32	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 300.000.000
33	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp 9.145.000
34	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 129.676.800
35	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 40.733.000
9	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 880.300.500
36	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 138.517.000
37	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 160.018.500
38	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 581.765.000
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 1.960.327.620
39	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp 96.588.900
40	Pengelolaan Assessment Center	Rp 745.673.500
41	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 819.499.000
42	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Rp 78.510.000
43	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 220.056.220
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 347.471.900
44	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 39.386.500
45	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 229.450.100
46	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 42.046.000
47	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 19.451.500
48	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 8.841.800
49	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp 8.296.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 5.116.886.000
12	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 1.576.346.400
50	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.529.358.400
51	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 46.988.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 3.540.539.600
52	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rp 37.050.000
53	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Rp 171.575.000
54	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 2.581.933.600
55	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 749.981.000

Sumber : BKPSDM, 2025

3.3. Total Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **21.736.291.448 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)**. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan Dilakukan Perubahan

Adapun alasan terkait perubahan anggaran BKPSDM tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Penambahan alokasi anggaran diperuntukkan untuk honorarium pejabat pengadaan barang/jasa

2. Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Administrator , Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK
3. Guna Mengakomodir keperluan Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT serta Seleksi CASN
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran melihat dari realisasi tahun berjalan sebagai upaya meningkatkan serapan anggaran
5. Penyesuaian dilakukan karena terdapat pegawai tidak tetap yang status kepegawainnya berubah menjadi PPPK sehingga dapat dilakukan pengurangan sesuai keperluan
6. Penyediaan lahan parkir yang lebih representatif , dan Revitalisasi ruang kerja
7. Penambahan anggaran makan minum peserta pelaksanaan Assessment
8. Penambahan alokasi anggaran untuk uji kompetensi jabatan fungsional sebagai dukungan percepatan penyederhanaan struktur organisasi melalui metode perpindahan jabatan
9. Fasilitasi Pelantikan PPPK Tahap II
- 10 Pengurangan Peserta Orientasi PPPK, Latsar CPNS, serta tidak dilaksanakannya pelatihan administrator

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2025

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	69	0,42		21.736.291.488		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indekes Kepatuhan dan Kinerja Intern	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	78	78	11.587.901.000	12.605.778.328	1.017.877.328	
3	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	72.687.000	72.687.000	-	
			Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan		100				

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	11.000.000	11.000.000	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	8.200.000	8.200.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	6.951.000	6.951.000	-	
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	9.000.000	9.000.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	8.950.000	8.950.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	8.436.000	8.436.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	17	5.000.000	5.000.000	-	
11	Penyelenggaraan Wali Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	4.350.000	4.350.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
12	Pelaksanaan Pengumpulan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	2	10.800.000	10.800.000	-	
13	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Nilai hasil penjaminan kualitas IKKI pada Sub Komponen Keandalan Laporan Keuangan	100	8	6.624.371.73 1	7.512.520.00 0	888.148.26 9	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	60	6.410.011.731	7.290.000.000	879.988.269	
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	204.360.000	212.520.000	8.160.000	Penambahan alokasi anggaran diperuntukkan untuk honorarium pejabat pengadaan barang/jasa

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000	5.000.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	5.000.000	5.000.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
18	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	100	10.000.000	10.000.000	-	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	10.000.000	10.000.000	-	
20	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	100	117.272.000	117.272.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	75	100.000.000	100.000.000	-	
22	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75	75	17.272.000	17.272.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
23	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya fasilitas kebutuhan perkantoran	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	100	1.945.532.000	1.963.618.000	18.086.000	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	62.018.500	62.018.500	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	850.694.500	1.079.687.500	228.993.000	Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Administrator, Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK)
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	34.079.000	34.079.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	47.980.000	47.980.000	-	
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	25.650.000	25.650.000	-	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	925.110.000	714.203.000	- 210.907.000	Guna Mengakomodir keperluan Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT serta Seleksi CASN

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
30	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi-nya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	100	1.269.066.00 0	1.150.329.00 0	- 118.737.00 0	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	640.016.000	532.979.000	- 107.037.00 0	Efisiensi Penggunaan Anggaran melihat dari realisasi tahun berjalan sebagai upaya meningkatkan serapan anggaran

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	629.050.000	617.350.000	- 11.700.000	Penyesuaian dilakukan karena terdapat pegawai tidak tetap yang status kepegawaian berubah menjadi PPPK sehingga dapat dilakukan pengurangan sesuai keperluan
33	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	100	1.548.972.26 9	1.779.352.32 8	230.380.05 9	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42.750.000	42.750.000	-	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	257.040.000	257.040.000	-	Mobil layanan kepegawaian serta motor dinas untuk pejabat pengawas

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163	163	116.090.000	116.090.000	-	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	1.017.152.269	1.198.892.328	181.740.059	Penyediaan lahan parkir yang lebih representatif

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	14	115.940.000	164.580.000	48.640.000	
39	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi	52,75	95,00	4.970.182.600	4.013.627.120	- 956.555.480	
			Persentase ASN yang berkualitas		95,00				

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase tahapan pengadaan ASN yang terlaksana sesuai ketentuan		100,00				
			IP ASN dimensi Kinerja		24,25				
			IP ASN Dimensi Disiplin		5,00				
			Persentase ASN yang dikembangkan Karirnya		25,00				
40	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi	100	100	1.141.532.60 0	825.527.100	- 316.005.50 0	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase SK Pemberhentian Tepat waktu		100				
			Persentase ASN yang berkualitas		100				
41	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	18.747.200	16.562.000	- 2.185.200	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
42	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	550.899.800	320.481.000	- 230.418.800	Pengurangi alokasi belanja dikarenakan rekrutmen CASN difasilitasi oleh BKN
43	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250	250	9.271.300	8.929.300	- 342.000	
44	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	300.000.000	300.000.000	-	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
45	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan dan Informasi ASN	1	1	10.000.000	9.145.000	- 855.000	
46	Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kepegawaian	3	3	201.614.300	129.676.800	- 71.937.500	
47	Evaluasi , Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi , Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi , Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	51.000.000	40.733.000	- 10.267.000	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
48	Mutasi dan Promosi ASN	Peresentase pelayanan Administrasi bidang mutasi dan promosi tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar Daerah	100		1.174.998.300	880.300.500	- 294.697.800	
			Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu		100				
			Persentase JPT , Administrator dan Pengawas Yang Terisi		100				

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase Suksesor yang terpetakan sesuai ketentuan		100				
			Persentase ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		100				

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi- atan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegi- atan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegi- atan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keter- angan
				Renja 2025	Perubah- an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
49	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	4	200.746.000	138.517.000	- 62.229.000	
50	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	1000	283.502.300	160.018.500	- 123.483.80 0	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
51	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	4	690.750.000	581.765.000	- 108.985.000	
52	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	100	100	2.448.923.900	1.960.327.620	- 488.596.280	
53	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	190	190	145.642.900	96.588.900	- 49.054.000	
54	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	712.576.000	745.673.500	33.097.500	Penambahan anggaran makan minum peserta pelaksanaan Assessment

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
55	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3	3	1.280.757.000	819.499.000	- 461.258.000	Penambahan alokasi anggaran untuk uji kompetensi jabatan fungsional sebagai dukungan percepatan penyederhanaan struktur organisasi melalui metode perpindahan jabatan

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
56	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2	2	88.000.000	78.510.000	- 9.490.000	
57	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	150	150	221.948.000	220.056.220	- 1.891.780	Fasilitasi Pelantikan PPPK Tahap II

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
58	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penyelesaian pelayanan kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan tepat waktu	IP ASN dimensi Kinerja	100	24	204.727.800	347.471.900	142.744.10 0	
			IP ASN Dimensi Disiplin		5				
59	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	59.100.700	39.386.500	- 19.714.200	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
60	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	4	39.093.100	229.450.100	190.357.000	
61	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	270	270	58.505.000	42.046.000	- 16.459.000	
62	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250	250	27.264.700	19.451.500	- 7.813.200	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
63	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	10	10.491.800	8.841.800	- 1.650.000	
64	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	10	10.272.500	8.296.000	- 1.976.500	
65	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	16.25	31	6.624.302.80 0	5.116.886.00 0	- 1.507.416.8 00	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			IP ASN Dimensi Kualifikasi		19				
66	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase terselenggaranya Pengembangan kompetensi teknis	Persentase PNS Memenuhi kewajiban 20 JP	100	90	1.348.888.40 0	1.576.346.40 0	227.458.00 0	
67	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	116	116	1.283.258.40 0	1.529.358.40 0	246.100.00 0	Penambahan untuk alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kompetensi teknis

68	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3	3	65.630.000	46.988.000	- 18.642.000	Penambahan Alokasi Anggaran Monev pasca Pelatihan
69	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan kompetensi manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen kerjasama antar lembaga	100	4	5.275.414.40 0	3.540.539.60 0	- 1.734.874.8 00	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase PNS Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial		20				
			Persentase Pejabat fungsional (Non guru dan Nakes) yang sudah mengikuti pelatihan fungsional		5				

70	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	1	49.428.000	37.050.000	- 12.378.000	
71	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	5	207.403.000	171.575.000	- 35.828.000	

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan an Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
72	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	4	4.263.261.000	2.581.933.600	- 1.681.327.400	Pengurangan Peserta Orientasi PPPK, Latsar CPNS, serta tidak dilaksanakannya pelatihan administrator

No	Tujuan/sasaran/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
73	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2	2	755.322.400	749.981.000	- 5.341.400	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Revisi Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Dalam hal anggaran tidak mencukupi maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat pelaksanaan sebagai target kinerja Renja dapat dicapai. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar selama Tahun 2025 dan sebagai pengukur

rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta pelayan masyarakat yang terbaik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, peraturan-peraturan baru atau adanya kebutuhan, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku

➤ **Kaidah – Kaidah pelaksanaan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Daerah dan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. maka unsur-unsur organisasi. mulai dari Sekretariat. Bidang-bidang dan seluruh pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
- 2) Menjaga konsistensi antara dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar. Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
- 3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2025. maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025

dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berkenaan. dan sebagai pedoman/acuan melanjutkan tugas yang belum terselesaikan maupun belum terlaksana sampai akhir Tahun 2024 untuk dapat mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan. serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun mendatang.

Martapura, 20 Juni 2025

Kepala Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dr. Hj. Erny Wahdini, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.197112151999032008

27. Inspektorat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan izin-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025, dimana Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Perubahan Renja tahun 2025 banyak anggaran perlu disesuaikan antara lain pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan Perubahan regulasi atas kebijakan yang ada. Dalam penetapan program mulai dari Renja Murni dan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dipengaruhi hal-hal diantaranya adalah :

- 1) Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, pada pasal 162 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA/PPAS.
- 3) Penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Perubahan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar untuk sisa tahun anggaran 2025 dan adanya perubahan kebijakan, prioritas, atau kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja yang sudah ada.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan capaian prioritas renstra. Serta untuk memantapkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun dengan kuantitas tolak ukur yang berbeda dari penetapan pada Renja sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi

1. Perubahan Indikator Kinerja
2. Jumlah Program dan Kegiatan
3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
4. Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN LALU

2.1 Analisis Gambaran Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian Peraturan Bupati tersebut dicabut seiring telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah tersebut mempunyai Tipe A.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Inspektur, Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengkoordinir Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.

2.2 Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Itda; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 40 (empat puluh) sub kegiatan. 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan penjabaran sebagai berikut

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar s/d Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan	
						I		II							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9	10	11	
		INSPEKTORAT DAERAH				18.965.201.761,00		995.514.633,00		6.829.499.468,00		7.825.014.101,00			
	Meningkatnya Kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKKI Inspektorat Daerah	93,93	Indeks	15.929.322.261,00	N/A	590.146.673,00	N/A	6.105.063.258,00	N/A	6.095.209.931,00	N/A		
	Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP		Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,15	Indeks		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	9.922.000,00	33	1.216.980,00	62	3.671.940,00	62	4.888.920.00		62	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dokumen	3.955.000,00	6	1.216.980,00	9	1.887.980,00	9	3.104.960.00			69
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Laporan	4.142.000,00	5	0	13	1.789.960,00	13	1.783.960.00			57
	Terselenggaranya Walidata Pendukung		Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	2	Dokumen	1.825.000,00	0	0	1	0	1	0			50

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan	
								I		II							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3			4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Statistik Sektorat Daerah				Wali Data Pendukung Statistik Sektorat Daerah												
	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100	Persen	10.317.785.000,00	26	291.540.112,00	52	5.061.236.339,00	52	5.144.426.841		52	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang/ Bulan	10.122.900.000,00	46	260.590.112,00	53	4.969.244.939,00	53	5.111.101.811			104
	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	187.752.000,00	3	30.950.000,00	6	0	6	30.950.000,00			50
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.413.000,00	1	0	0	0	1	0			100
	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	14	Laporan	3.720.000,00	3	0	7	0	7	0			50

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan	
									I		II							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3			4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD													
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	Persen	5.768.000,00	29	0	58	616.000,00	58	616.000,00		58	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	1.979.000,00	0	0	0	408.000,00	1	408.000,00			100
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.789.000,00	1	0	0	208.000,00	3	208.000,00			75
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	Persen	842.266.000,00	25	140.988.351,00	50	426.879.853,00	50	567.868.207,00		50	
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	9.066.000,00	3	0	4	3.834.400,00	3	3.834.400,00			80
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42	Orang	833.200.000,00	15	140.988.354,00	30	423.045.453,00	30	564.033.807,00			64

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
								I		II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Terselenggaranya Kegiatan Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	Persen	682.147.000,00	25	83.224.401,00	50	159.495.858,00	50	242.720.259,00		50	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	23.522.500,00	3	1.955.000,00	6	5.106.500,00	6	7.061.500,00			50
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket	13.251.000,00	3	365.400,00	6	3.005.600,00	6	3.371.000,00			50
	Tersedianya bahan logistik kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	124.705.500,00	3	2.078.500,00	6	10.655.000,00	6	12.733.500,00			50
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	114.227.000,00	3	3.445.400,00	6	10.111.401,00	6	13.556.807,00			50
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	11.025.000,00	6	2.850.000,00	12	5.025.000,00	12	7.875.000,00			50
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.500.000,00	3	799.900,00	6	5.481.900,00	6	6.281.800,00			50
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	369.916.000,00	0	71.730.201,00	6	120.110.457,00	6	191.840.658,00			50

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
								I		II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	2.720.467.000,00	0	0	30	340.687.100,00	30	340.687.100,00		30	
	Tersedianya Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	118	Paket	303.177.000,00	0	0	0	0	0	0			0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	unit	1.270.754.000,00	0	0	13	327.738.600,00	13	327.738.600,00			24
	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.146.536.000,00	0	0	0	12.948.500,00	0	12.948.500,00			0
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100	Persen	505.737.261,00	25	52.219.451,00	50	112.855.982,00	50	165.075.433,00		50	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	22.800.000,00	3	600.000,00	6	3.800.000,00	6	4.400.000,00			50
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	135.368.861,00	3	22.282.642,00	6	54.527.991,00	6	76.810.633,00			50
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	347.568.400,00	3	29.336.809,00	6	54.527.991,00	6	83.864.800,00			50
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai	100	Persen	845.250.000,00	25	20.957.375,00	50	91.611.586,00	50	112.568.961,00		50	

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
								I		II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	dengan kebutuhan			dengan rencana kebutuhan												
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	42.750.000,00	1	3.427.875,00	1	33.937.539,00	1	37.365.414,00			100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	377.570.000,00	3	14.959.000,00	6	33.937.539,00	6	48.896.539,00			50
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	10.000.000,00	0	0	1	5.841.500,00	1	5.841.500,00			20
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	unit	89.930.000,00	21	2.006.500,00	42	8.947.504,00	42	10.954.004,00			49
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	325.000.000,00	3	564.000,00	5	8.947.504,00	5	9.511.504,00			63
	Meningkatnya penilaian risiko pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai	75	Persen	954.766.000,00	N/A	182.741.800,00	N/A	296.424.900,00	N/A	479.166.700,00	N/A		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
							I		II						
							K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3		4	5		6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Meningkatnya kualitas pengawasan APIP (Rekom GRC)			Persentase Pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola (Governance, Risk, and Compliance = GRC)	50	Persen		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Meningkatnya Kualitas TLHP APIP dan Tindak Lanjut			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang telah sesuai	85	Persen		N/A		N/A		N/A			
	Meningkatnya Kualitas TLHP BPK RI dan Tindak Lanjut			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai	80	Persen		N/A		N/A		N/A			
	meningkatkan sistem manajemen risiko perangkat daerah	Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	100	Persen	831.666.666,00		150.712.200,00		250.700.500,00		401.412.700,00			
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pengawasan		Persentase pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan sesuai standar	100	Persen										
	Meningkatnya Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90	Persen										
	Meningkatnya Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi		Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI yang	85	Persen										

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
							I		II						
							K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3		4	5		6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Pemeriksaan BPK RI			ditindaklanjuti											
	Tata kelola keuangan desa yang akuntabel			Nilai Desa Berintegritas pada Desa yang Didampingi	70	Persen		25		50		50		50	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	104	Laporan	255.604.000,00	7	41.488.400,00	23	100.789.100,00	23	142.277.500,00		22
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	174	Laporan	180.998.000,00	9	36.379.000,00	12	40.864.000,00	12	77.243.000,00		7
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	10	Laporan	72.649.000,00	1	9.750.000,00	7	28.125.000,00	7	37.875.000,00		70
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	5	Laporan	28.675.000,00	1	12.150.000,00	2	12.150.000,00	2	24.300.000,00		100
	Terlaksananya Pengawasan Desa		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	24	Laporan	206.730.000,00	10	50.944.800,00	10	51.377.600,00	10	102.322.400,00		42
	Temuan yang di tindaklanjuti sesuai ketentuan		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	6	Dokumen	87.010.000,00	1	0	3	17.394.800,00	3	17.394.800,00		50

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
								I		II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3		4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Meningkatkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu secara efektif		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PDDT yang ditindaklanjuti sesuai dengan Prosedur.	100	persen	123.100.000,00	100	32.029.600,00	100	45.724.400,00	100	77.754.000,00		100	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	Laporan	123.100.000,00	16	32.029.600,00	37	45.724.400,00	37	77.754.000,00			123
	Meningkatnya peran dan layanan apip dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC (Governance, Risk, and Compliance)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Komponen GRC (Governance, Risk, and Compliance) yang terasistensi	100	Persen	2.081.113.500,00	25	222.626.160,00	50	428.011.310,00	50	650.637.470,00	50		
	Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi			Persentase Pemenuhan Dokumen Monitoring dan Pencegahan Korupsi	100	Persen		25		50		50		50	50	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Pendampingan		Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	3,36	level	2.081.113.500,00	3,36	222.626.160,00	3,36	428.011.310,00	3,36	650.637.470,00		3,36	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	Perangkat Daerah	237.850.000,00	47	5.150.000,00	47	32.990.000,00	47	37.140.000,00			100
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi	27	Perangkat Daerah	69.603.000,00	27	12.400.000,00	27	23.523.050,00	27	35.923.050,00			100

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) program	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan TW II Tahun 2025 (%) sub kegiatan
									I		II						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3			4	5			6		7		8 = 6 + 7		9	10	11
	Reformasi Birokrasi				dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	34	Kegiatan	1.434.160.000,00	3	193.630.000,00	10	339.309.600,00	10	532.939.600,00			23
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat daerah	339.500.500,00	47	11.446.160,00	47	32.188.660,00	47	43.634.820,00			100

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025)

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam urusan Pengawasan dan Pendampingan Pemerintah Daerah sudah di jalankan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

2.3 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat beberapa program / kegiatan belum optimal dalam pelaksanaanya dengan persentase capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Yang
Tidak Memenuhi Target Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah	Nilai IKKI Inspektorat Daerah	N/A	Indeks	N/A	N/A
	Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	N/A	Indeks	N/A	N/A
2	Meningkatnya penilaian risiko	Persentase perangkat daerah yang	N/A	Indeks	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
	pengawasan	melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai				
3	Meningkatnya kualitas pengawasan APIP dan tindaklanjut	Persentase pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola <i>Governance, risk, and compliance</i> (GRC)	N/A	Persen	N/A	N/A
		Persentase temuan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	N/A	Persen	N/A	N/A
4	Meningkatnya peran dan layanan APIP dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC	Persentase Komponen GRC yang terasistensi	N/A	Persen	N/A	N/A
		Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi	N/A	Persen	N/A	N/A
5	Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan NSPK yang berlaku	Persentase pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan sesuai standar	N/A	Persen	N/A	N/A
6	Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	43,36	Persen	24,68	56,92
7	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37	Laporan	18	48,65
8	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19	Laporan	11	57,89
9	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7	Laporan	4	57,14
10	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	Orang	20	71,43
11	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Paket	0	0
12	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	22	73,33
13	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	0
14	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	0	0
15	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	43	Unit	20	46,51

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
	Peralatan dan Mesin Lainnya	dipelihara				
16	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	8	Unit	3	37.5

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025)

2.4 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program / kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat beberapa program / kegiatan telah sesuai target pelaksanaannya dengan persentase capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang
telah memenuhi target kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya peran dan layanan apip dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC	Persentase Komponen GRC yang terasistensi	100	Persen	100	100
	Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi	Persentase Pemenuhan Dokumen MCP KPK	100	Persen	100	100
2	Tata kelola keuangan desa yang akuntabel	Nilai Desa Berintegritas pada Desa yang Didampingi	50	Persen	50	100
3	Meningkatnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu secara efektif	Persentase PDTT yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100	Persen	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Pendampingan	Indeks Persepsi Kualitas layanan APIP	100	Persen	100	100
5	Perencanaan,	Dokumen	62	Persen	62	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu				
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	52	Persen	52	100
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	58	Persen	58	100
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	50	Persen	50	100
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	50	Persen	50	100
10	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	50	Persen	50	100
11	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	50	Persen	50	100
12	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	5	Laporan	5	100
13	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	Dokumen	3	100
14	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	Perangkat Daerah	47	100
15	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	11	Perangkat Daerah	11	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
		Reformasi Birokrasi				
16	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Kegiatan	3	100
17	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat Daerah	47	100
18	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100
19	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Laporan	13	100
20	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	100
21	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	100
22	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
23	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	7	Laporan	7	100
24	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	100
25	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	3	100
26	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	3	Dokumen	3	100

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
	pegawai	Pegawai				
27	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	6	100
28	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	3	100
29	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	6	100
30	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	6	100
31	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	6	100
32	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	100
33	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	6	100
34	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6	Laporan	6	100
35	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	Laporan	6	100
36	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	Laporan	6	100
37	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100
38	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	100

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025)

2.5 Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, terdapat program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang
telah melebihi target kinerja

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulanan	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ditindaklanjuti pengaduan masyarakat secara efektif	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti sesuai SOP	50	Persen	60	120
2	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	13	Laporan	16	123
3	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15	Laporan	26	174
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	Orang	53	104

(Sumber : Laporan Hasil Pencapaian Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025)

2.6 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Faktor utama penyebab untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah :

1. Perencanaan yang matang
2. Ketersediaan sumber daya
3. Kepemimpinan dan komitmen organisasi

4. Koordinasi dan sinergi antar Irban / Sekretariat / Sub Bagian.
5. Monitoring dan evaluasi yang konsisten
6. Inovasi dan efesiensi proses
7. Partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan

Disamping itu sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

2.7 Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

1. Program Yang Tidak Mencapai Target

Pada Level Program tahun anggaran 2025 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2025 terdapat program yang belum mencapai target secara fisik yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk program penyelenggaraan pengawasan memiliki indikator baru pada Renstra periode 2025-2029. Sedangkan program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk hal ini disebabkan penilaian akan dilakukan di Triwulan IV berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target

Pada level kegiatan tahun anggaran 2025 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2025 yang belum ada realisasi capaian kinerjanya adalah pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal karena adanya perubahan indikator pada Renstra 2025 – 2029.

3. Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target

Pada level sub kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena adanya perubahan target kegiatan mengikuti indikator pohon kinerja yang baru dan pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh berubah nya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena adanya perubahan target kegiatan mengikuti indikator pohon kinerja yang baru dan pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh berubah nya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

Reviu Laporan Kinerja belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena adanya perubahan target kegiatan mengikuti indikator pohon kinerja yang baru dan pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh berubah nya Program Kerja Pengawasan Tahunan dan banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan belum mencapai target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena jadwal/ kalender diklat dari pusdiklat BPKP dan kesesuaian dengan rencana pengembangan kompetensi yang sudah dijadwalkan.

Pengadaan Mebel disebabkan adanya keterlambatan proses pengadaan yang menggunakan e-catalog dikarenakan masih terkendala mencari harga yang sesuai

dengan pagu anggaran dan adanya beberapa perubahan perencanaan pengadaan peralatan mesin sehingga proses pelaksanaan pengadaan ditunda sampai APBD Perubahan ditetapkan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya disebabkan adanya keterlambatan proses pengadaan yang menggunakan e-catalog dikarenakan masih terkendala mencari harga yang sesuai dengan pagu anggaran dan adanya beberapa perubahan perencanaan pengadaan peralatan mesin sehingga proses pelaksanaan pengadaan ditunda sampai APBD Perubahan ditetapkan

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dikarenakan batalnya pekerjaan bangunan gedung dan pembangunan musholla sehingga target tidak dapat ditetapkan.

Pemeliharaan Mebel belum mencapai target perencanaan penganggaran pada sampai dengan triwulan II tahun berjalan dikarenakan jadwal pemeliharaan mebel direncanakan pada triwulan III tahun 2025.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum tercapainya target dikarenakan peralatan dan mesin masih dalam kondisi yang baik dan tergolong masih baru sehingga belum memerlukan perbaikan/ pemeliharaan.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya belum mencapai target perencanaan penganggaran pada sampai dengan triwulan II tahun berjalan dikarenakan jadwal pemeliharaan gedung direncanakan pada triwulan III tahun 2025.

2.8 Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target

1. Program Yang Mencapai Target

Pada Level Program tahun anggaran 2025 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2025 terdapat program yang telah melebihi target secara fisik yaitu Program Pendampingan dan Asistensi disebabkan oleh adanya peningkatan nilai Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP Tahun 2025 berdasarkan hasil Survei dari Kuesioner yang di sebarakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Banjar.

2. Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (100,00%), dan Pendampingan dan Asistensi (100,00%) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (62,00%), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (52,00%), Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (58,00%), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (50,00), Administrasi Umum Perangkat Daerah (50,00%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (50,00%), Pemeliharaan Barang Milik Daerah (50,00%)

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan persentase capaian sebesar 100,00 %. Capaian Tersebut dapat diperoleh .disebabkan sudah banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk dan di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan Pendampingan dan asistensi dengan persentase capaian sebesar 100,00 %. Capaian Tersebut dapat diperoleh .disebabkan sudah dilaksanakannya pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko (RR). Dimana sasaran dari kegiatan pendampingan dan asistensi ini adalah seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar atau 47 Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 62,00 %. disebabkan karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 52,00%. dikarenakan sudah merupakan tugas bagian keuangan dan aset sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 58,00%. kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang menjadi target pada Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam menginventaris kebutuhan BMD, kegiatan ini bersifat rutin.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang bersifat rutin sehingga tidak ditemukan masalah yang berarti dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang bersifat rutin dalam pelaksanaannya. Sehingga capaian kinerja dapat diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang bersifat rutin dalam pelaksanaannya. Sehingga capaian kinerja dapat diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Merupakan capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun.

3. Sub Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Sub kegiatan yang telah mencapai target di antaranya:

Reviu Laporan Kinerja dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakan sesuai jadwal.

Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP Pemeriksaan APIP dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK pada Triwulan II sudah dilaksanakan dan tidak ditemukan kendala berarti.

Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakan kegiatan Asistensi dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada SKPD lingkup Kabupaten Banjar.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan persentase capaian sebesar

100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakan kegiatan pendampingan RB pada SKPD lingkup Kabupaten Banjar.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakan beberapa kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu sosialisasi dan pendidikan anti korupsi ada sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Banjar.

Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Hasil SPI tahun 2024 dan Pelaksanaan SPI Tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 70,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 57,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena dokumen yang disusun merupakan

dokumen rutinitas yang sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral

Daerah dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena dokumen yang disusun merupakan dokumen rutinitas yang dilaksanakan setiap triwulan dan sudah menjadi tugas bagian perencanaan untuk penyusunan dokumen tersebut.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah merupakan tugas rutin bagian keuangan dan aset sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah di susunnya laporan keuangan perangkat daerah dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah di susunnya laporan keuangan perangkat daerah dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah di susunnya laporan keuangan perangkat daerah dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2025 dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah disusunnya Laporan Rekonsiliasi BMD sampai dengan Triwulan II dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan persentase capaian sebesar 60,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai per triwulan sesuai target yang ditentukan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah

merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyediakan komponen kelistrikan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyediakan keperluan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan kantor, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyediakan logistik untuk menunjang kegiatan kantor, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam menyediakan dan memfasilitasi kegiatan kantor, dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menyediakan bahan bacaan seperti koran dan

majalah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti.

Fasilitas Kunjungan Tamu dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sesuai waktu dan perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan tamu yang berkunjung, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan sumber daya listrik, air, dan komunikasi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan sudah merupakan tugas rutin Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala yang berarti

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terlaksananya pemeliharaan dan dibayarkan pajaknya kendaraan dinas jabatan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan persentase capaian sebesar 50,00%. Capaian kinerja yang diperoleh sudah memenuhi target perencanaan penganggaran pada awal tahun karena sudah terlaksananya pemeliharaan dan dibayarkan pajaknya kendaraan dinas operasional.

2.9 Faktor Penyebab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target

1. Kegiatan Yang Melebihi Target

Pada level kegiatan tahun anggaran 2025 sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2025 yang melebihi realisasi capaian kinerjanya adalah pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan capaian 60% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 50% dikarenakan banyaknya pengaduan yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II ini.

2. Sub Kegiatan Yang Melebihi Target

Pada level sub kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah melebihi target yaitu:

Pengawasan Desa Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan adanya pengawasan desa reguler berbarengan dengan pendampingan desa berintegritas sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan penganggaran pada awal tahun dikarenakan banyaknya pengaduan yang ditindaklanjuti dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Capaian kinerja yang diperoleh melebihi perencanaan di awal tahun dikarenakan penambahan ASN yang berjumlah 7 orang dengan rincian 2 Orang CPNS dan 5 Orang PPPK

2.10 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran.
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
4. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

2.11 Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Kebijakan yang perlu diambil untuk memenuhi target capaian Perubahan Renstra adalah:

1. Melakukan revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan, sekaligus melakukan revisi target sehubungan dengan realokasi anggaran untuk mengoptimalkan program / kegiatan diluar program kerja pengawasan.
2. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang sudah dipetakan sebagai risiko strategis dan risiko operasional yang berhubungan

langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja dan selalu menjaga koordinasi dan komunikasi internal.

2.12 Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 40 (empat puluh) sub kegiatan. 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Jika melihat capaian realisasi program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2025 s.d triwulan II, pada level sub kegiatan sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang masih pencapaiannya masih di bawah target.

Pencapaian dari hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dijabarkan di atas namun di sisi lain juga terdapat faktor penyebab/penghambat yang juga telah dijabarkan di atas. Terhadap kinerja yang belum bisa tercapai akan dilakukan analisa dan tindak lanjut agar pada akhir tahun periode Renstra bisa terpenuhi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 melakukan perubahan target indikator kinerja karenamengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 maka ada beberapa perubahan target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi Rencana Strategis sebelumnya . Perubahan Indikator Kinerja dan sasaran serta target terjadi pada semua Program, Kegiatan dan dan beberapa Sub Kegiatan yang mangacu pada rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.

Kinerja dan indikator pada tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renja 2025 (Sebelum Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Terselenggaranya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,48
	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Indeks Integritas	80,00
		Kapabilitas APIP	Level 3,35

Terdapat perubahan pada tujuan dan sasaran beserta indikator pada tahun 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap pohon kinerja dan rancangan akhir rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai pada table 3.1.1 berikut :

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Berintegritas		Indeks Integritas	80
	Meningkatnya tata Kelola pengawasan intern	- Nilai SPIP - Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,20 3,000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Banjar	- Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Evaluasi - Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat SAKIP minimal kategori	14,53% 40%

		“Memuaskan”	
	Meningkatnya efektivitas tata Kelola pencegahan korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,050
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat A
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,11

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Pada APBD Perubahan Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan dengan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Sedangkan 1 (satu) Program Penunjang Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 tidak ada penambahan maupun pengurangan pada Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan.

3.3 Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mengalami penurunan sebesar Rp2.589.551.300,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari pagu setelah APBD Murni 2025 yaitu sebesar Rp20.543.892.861,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu rupiah) pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp17.954.341.561,00 (tujuh belas miliar

sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

3.4 Alasan dilakukan Perubahan

Dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar mengajukan usulan perubahan atas usulan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar TA.2025 dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja (Renja) dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, beberapa kegiatan mengalami penyesuaian target dan output, yang berdampak pada rasionalisasi kebutuhan anggaran.
3. Kegiatan yang bersifat prioritas dan mendukung pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kinerja tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan yang dapat ditunda atau digabung dialihkan untuk efisiensi anggaran.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan dan fasilitas kantor.

Tabel 3. 3
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSPEKTORAT DAERAH				20.543.892.861,00		17.954.341.561,00		(2.589.551.300,00)	
	UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAH				20.543.892.861,00		17.954.341.561,00		(2.589.551.300,00)	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				20.543.892.861,00		17.954.341.561,00		(2.589.551.300,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Inspektorat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan dan kinerja intren perangkat daerah	Penilaian Mandiri indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektorat	Nilai IKKI Inspektorat Daerah	100%	16.519.767.861,00	93,93	14.904.092.061,00	(1.615.675.800)	Efisiensi Belanja Pemerintah
		Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP		Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP			3,15			
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	16.420.000,00	100%	9.922.000,00	(6.498.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daerah yang berkualitas	daerah yang berkualitas	Daerah tepat waktu dan tepat mutu	Daerah tepat waktu dan tepat mutu						
6.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	5.950.000,00	13 Dokumen	3.955.000,00	(1.995.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	6.650.000,00	23 Laporan	4.142.000,00	(2.508.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.01.00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	3.820.000,00	2 Dokumen	1.825.000,00	(1.995.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penatausahaa n keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Pelaksanaan Penatausahaa n keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan tepat mutu Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan tepat mutu Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	10.372.508.000,00	100%	10.325.945.000,00	(46.563.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	10.122.900.000,00	51 Orang/ bulan	10.122.900.000,00	-	
6.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
	Terlaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya a Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	236.490.000,00	12 Dokumen	195.912.000,00	(40.578.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.890.000,00	1 Laporan	3.413.000,00	(3.477.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.228.000,00	14 Laporan	3.720.000,00	(2.508.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100%	11.468.000,00	100%	5.768.000,00	(5.700.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.979.000,00	(3.021.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.03.00.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya a Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6.468.000,00	4 Laporan	3.789.000,00	(2.679.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	1.047.299.000,00	100%	822.566.000,00	(224.733.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya a monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	14.099.000,00	5 Dokumen	9.066.000,00	(5.033.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.05.00.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49 orang	1.033.200.000,00	51 Orang	813.500.000,00	(219.700.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Terselenggaranya kegiatan kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	999.638.600,00	100%	659.297.000,00	(340.341.600,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.522.500,00	12 Paket	23.522.500,00	-	
6.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13.251.000,00	12 Paket	13.251.000,00	-	
6.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Tersedianya bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.020.500,00	12 Paket	124.705.500,00	(32.315.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	129.228.600,00	12 Paket	114.227.000,00	(15.001.600,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	11.025.000,00	24 Dokumen	11.025.000,00	-	
6.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.500.000,00	-	
6.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	640.091.000,00	12 Laporan	347.066.000,00	(293.025.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	2.720.467.000,00	100%	1.729.634.000,00	(990.833.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
	Tersedianya Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58 Unit	303.177.000,00	118 Unit	351.771.000,00	48.594.000,00	Penambahan Unit Mebel
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 unit	1.270.754.000,00	90 Unit	1.364.863.000,00	94.109.000,00	Penambahan Peralatan Kantor
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.146.536.000,00	1 Unit	13.000.000,00	(1.133.536.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	506.737.261,00	100%	505.730.061,00	(1.007.200,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.800.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Menyurat	Menyurat								
6.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.368.861,00	12 Laporan	135.368.861,00	-	
6.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	348.568.400,00	12 Laporan	347.561.200,00	(1.007.200,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100%	845.230.000,00	100%	845.230.000,00	-	
6.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.750.000,00	1 Unit	42.750.000,00	-	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan								
6.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya a pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	377.570.000,00	12 unit	377.570.000,00	-	
6.01.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel									
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000,00	5 Unit	10.000.000,00	-	
6.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	89.930.000,00	85 Unit	89.930.000,00	-	
6.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	324.980.000,00	8 Unit	324.980.000,00	-	
6.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
	Meningkatnya Tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal	Terwujudnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang Baik	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai	76 Indeks	1.554.112.000,00	75%	969.136.000,00	(584.976.000)	Efisiensi Belanja Pemerintah
		Meningkatnya kualitas pengawasan APIP (Rekom GRC)		Persentase Pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola (Governance, Risk, and Compliance = GRC)			50%			
		Meningkatnya Kualitas TLHP APIP		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang telah sesuai			85%			
		Meningkatnya Kualitas TLRHP BPK RI		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai			80%			

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
	>Pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan NSPK yang berlaku >Tata kelola keuangan desa yang akuntabel	Meningkatnya sistem manajemen risiko perangkat daerah	Persentase Desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	76 Indeks	1.356.012.000,00	100%	811.036.000,00	(544.976.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pengawasan	Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah	Persentase pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan sesuai standar	76 Indeks		100%			
		Meningkatnya Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	76 Indeks		90%			
		Meningkatnya Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI	Persentase Peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	100%		85%			
		Tata kelola keuangan desa yang akuntabel		Nilai Desa Berintegritas pada Desa yang Didampingi			70%			
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya a Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	417.320.000,00	104 Laporan	252.124.000,00	(165.196.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.01.00 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya a Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	221.400.000,00	174 Laporan	185.998.000,00	(35.402.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.01.00 03	Reviu Laporan Kinerja									
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya a Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan	137.624.000,00	10 Laporan	72.649.000,00	(64.975.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.01.00 04	Reviu Laporan Keuangan									
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya a Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	44.546.000,00	2 Laporan	31.525.000,00	(13.021.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.01.00 07	Pengawasan Desa									
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Terlaksananya a Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	320.312.000,00	24 Laporan	201.730.000,00	(118.582.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.01.00 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	214.810.000,00	6 Dokumen	67.010.000,00	(147.800.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
	Ditindaklanjuti nya pengaduan masyarakat secara efektif	Meningkatnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu secara efektif	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	Persentase PDTT yang dilaksanakan sesuai dengan Prosedur	100%	198.100.000,00	100%	158.100.000,00	(40.000.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.02.2.02.00 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya a Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	198.100.000,00	30 Laporan	158.100.000,00	(40.000.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Efektivitas Peran APIP	Meningkatnya peran dan layanan apip dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC (Governance, Risk, and Compliance)	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	Persentase Komponen Governance, Risk, dan Compliance (GRC) yang terasistensi;	4,3 Indeks	2.470.013.000,00	100%	2.081.113.500,00	(584.976.000)	Efisiensi Belanja Pemerintah
		Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi		Persentase Pemenuhan Dokumen Monitoring dan Pencegahan Korupsi			100%			
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi									
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Hasil Pendampingan	Level kapabilitas APIP	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	100%	2.470.013.000,00	3,36 Indeks	2.081.113.500,00	(388.899.500,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terlaksananya Pendampingan , Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 Perangkat Daerah	359.200.000,00	47 Perangkat Daerah	237.850.000,00	(121.350.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	ALASAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya a Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	110.003.000,00	27 Perangkat Daerah	69.603.000,00	(40.400.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.03.2.02.00 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya a Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	1.521.560.000,00	34 Kegiatan	1.434.160.000,00	(87.400.000,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah
6.01.03.2.02.00 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya a Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47 Perangkat Daerah	479.250.000,00	47 Perangkat Daerah	339.500.500,00	(139.749.500,00)	Efisiensi Belanja Pemerintah

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.1, hampir seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan mengalami penurunan anggaran sebagai bentuk penerapan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pagu anggaran pada RKPD murni pada Inspektorat Daerah sebesar Rp20.543.832.861,00 setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp17.954.341.561,00 mengalami penurunan sebesar 12,6%

Pada Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mengalami penurunan anggaran sebesar 9.78% dari Rp16.519.767.861,00 menjadi Rp.14.904.092.061,00 hal ini juga terjadi pada semua Sub Kegiatan pada Program Tersebut kecuali pada 2 Sub Kegiatan mengalami kenaikan pagu, yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami kenaikan sebesar 16,03% dari Rp303.177.000,00 menjadi Rp351.771.000,00 dan Pengadaan Peralatan Mesin mengalami kenaikann pagu sebesar 7.41% dari Rp1.270.754.000,00 menjadi Rp1.364.863.000,00 hal ini terjadi karena akan diadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor, seperti Kursi Kerja, Meja Kerja, Kamera Conference, dan Scanner.

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan juga terjadi penurunan anggaran sebesar 38% dari Rp1.554.112.000,00 menjadi Rp969.136.000,00. Penurunan anggaran terjadi pada semua Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program tersebut.

Selanjutnya Pada Program Pendampingan dan Asistensi juga terjadi penurunan anggaran sebesar 23,68% dari Rp2.470.013.000,00 menjadi Rp2.081.113.500,00. Penurunan anggaran terjadi pada semua Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi dari pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan. Setiap perubahan harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, baik dari sisi capaian kinerja maupun efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan Renja tidak boleh menyimpang dari arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar, untuk menjamin keselarasan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, seluruh rancangan perubahan juga harus mempertimbangkan hasil pengawasan, baik dari BPK, BPKP, maupun Inspektorat sendiri, serta memasukkan mitigasi terhadap risiko-risiko strategis yang telah diidentifikasi.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar hasil perubahan ini dilandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal, diperlukan penguatan koordinasi internal antar unit kerja, pemanfaatan secara maksimal atas sumber daya yang tersedia, serta penerapan teknologi melalui sistem informasi perencanaan, seperti SIPD dan Simondalev, sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan juga harus memperhatikan konsistensi dan kesesuaian antara nomenklatur, indikator kinerja, serta penggunaan anggaran, agar tetap selaras dengan struktur RPJMD yang telah diperbarui, maupun dengan dokumen Renstra periode 2025-2029 Inspektorat Daerah.

Perubahan Renja, harus mengikuti sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Kaidah transparansi dan akuntabilitas, di mana seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan perubahan Renja harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
2. Perencanaan harus berbasis pada pendekatan kinerja yaitu berfokus pada capaian indikator dan manfaat kegiatan, bukan hanya pada realisasi anggaran.
3. Perubahan Renja wajib mematuhi regulasi perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017, serta aturan teknis lainnya.

Kaidah berikutnya adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dapat terhindar dari kesalahan, penyimpangan, dan *fraud*. Terakhir, perlu ditekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah serta pelibatan aktif Inspektorat dalam proses reviu agar seluruh perubahan terkontrol secara internal sebelum ditetapkan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari dokumen renja Perubahan ini, anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan. Serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Monev) terhadap pelaksanaan Renja yang telah diubah, untuk memastikan pencapaian *output* dan *outcome* yang telah direncanakan.

Inspektorat juga akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang relevan, baik dari audit internal maupun eksternal. Terakhir, dilakukan pemetaan dan penilaian risiko terhadap kegiatan yang baru dimasukkan, untuk disusun rencana mitigasinya secara proaktif.

Martapura, 20 Juni 2025
INSPEKTUR DAERAH

MOHAMMAD RIZA DAULY, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771018 200312 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi **mengamanatkan** penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai

dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.2. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.022.088.715,00 (Delapan Milyar Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Kertak Hanyar tetap melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 8.249.503.715,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	421,25	238	91	91,57	100,63%	0	0	#DIV/0!	329,57	78,24%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	500	300	100	100	100%	27,95	27,95	100%	427,95	85,59%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58	25	13	13	100%	3	3	100%	41	70,69%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	100,00%
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	100,00%
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	100,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	100,00%
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81	46	21	21	100%	3	3	100%	70	86,42%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500	300	100	100	100%	27,94	27,94	100%	427,94	85,59%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158	93	31	31	100%	32	32	100%	156	98,73%
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	36	12	12	100%	3	3	100%	51	85,00%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	3	1	1	100%	1	1	100%	5	100,00%
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang	500	300	100	100	100%	0	0	#DIV/0!	400	80,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun										
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	12	12	12	100%	0	0	#DIV/0!	24	100,00%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	300	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
7	1	1	2.05		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#VALUE!
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	300	100	100	100%	30,02	30,02	100%	430,02	86,00%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	8	1	1	100%	1	1	100%	10	62,50%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59	50	1	1	100%	1	1	100%	52	88,14%
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21	18	1	1	100%	1	1	100%	20	95,24%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	10	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	10	90,91%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	9	1	1	100%	1	1	100%	11	100,00%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	12	4	4	100%	1	1	100%	17	85,00%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	500	300	100	100	100%	100	94	94%	494	98,80%
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#VALUE!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	9	3	3	100%	5	5	100%	17	73,91%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	300	100	100	100%	32,94	32,94	100%	432,94	86,59%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	11	1	1	100%	0	0	#DIV/0!	12	100,00%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36	12	12	100%	3	3	100%	51	85,00%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65	39	13	13	100%	4	4	100%	56	86,15%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	500	300	100	100	100%	23,26	21,8	94%	421,8	84,36%
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	6	3	3	100%	3	3	100%	12	80,00%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59	24	15	15	100%	3	3	100%	42	71,19%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	3	1	1	100%	1	1	100%	5	100,00%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	500	300	100	100	100%	26,67	26,67	100%	426,67	85,33%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	500	300	100	100	100%	26,67	26,67	100%	426,67	85,33%
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	12	4	4	100%	1	1	100%	17	85,00%
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	500	300	100	100	100%	28,8	28,8	100%	428,8	85,76%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	500	300	100	100	100%	28,8	28,8	100%	428,8	85,76%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26	6	6	6	100%	10	10	100%	22	84,62%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21	9	6	6	100%	2	2	100%	17	80,95%
7	1	3	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	500	300	100	100	100%	23,15	22,25	96%	422,25	84,45%
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2	100%	2	100,00%
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2	100%	2	100,00%
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2	100%	2	100,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manarap Lama)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	6	2	2	#DIV/0!	1	1	100%	9	90,00%
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	6	2	2	#DIV/0!	1	1	100%	9	90,00%
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mandar Sari)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	6	2	2	#DIV/0!	1	1	100%	9	90,00%
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	6	2	2	#DIV/0!	1	1	100%	9	90,00%
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kertak Hanyar I)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	6	2	2	100%	1	1	100%	9	90,00%
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	6	2	2	100%	1	1	100%	9	90,00%
7	1	3	2.02	1	Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	0	0	0	100%	1	1	100%	1	25,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
					Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%	1	25,00%
					Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%	1	25,00%
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	500	300	100	100	100,00%	21,16	21,16	100%	421,16	84,23%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	500	300	100	100	100%	37,2	37,2	100%	437,2	87,44%
7	1	4	2.01	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	1	1	1	100%	1	1	100,00%	1	100,00%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	1	1	1	100%	0	0	0,00%	0	0,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	3	0	0,00%	0,00%	0
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	0	1	1	100%	0	0	0,00%	0	0,00%
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	500	300	100	100	100,00%	16,9	16,9	100%	416,9	83,38%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	500	300	100	100	100%	16,9	16,9	100%	416,9	83,38%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	390	150	50	50	100%	70	70	100%	270	69,23%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15	9	3	3	100%	1	1	100%	13	86,67%
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	0	0	0	#DIV/0!	3	3	100%	3	12,50%
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	500	300	100	100	100,00%	21,71	21,71	100%	421,71	84,34%
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500	300	100	100	100%	21,71	21,71	100%	421,71	84,34%
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	45,00%
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	1	1	1	100%	0	0	#DIV/0!	2	40,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%))	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%))
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	1	1	1	100%	0	0	#DIV/0!	2	40,00%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Fasilitas Kunjungan Tamu,
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Sub Kegiatan 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan 1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak ada Program/kegiatan/Sub kegiatan yang melebihi target kinerja

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2025:

- Keterbatasan SDM dengan intensitas kegiatan yang padat
- Kendali mandiri belum sepenuhnya berjalan
- Gangguan aplikasi
- Penyesuaian dengan perubahan sistem perpajakan (coretax)

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Evaluasi secara berkala
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana Kecamatan Kertak Hanyar optimis dapat mencapai target yang sudah direncanakan.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2025 SD Triwulan I (Januari- Maret)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni) Rp	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	RK	Rp.
	Urusan : Unsur Kewilayahan								
	Bidang Urusan : Kecamatan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	92	Indeks	5.294.216.725,00	NA	1.710.262.181	NA	1.254.588.253
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	14.662.000	27,95	3.631.500	27,95	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.174.500	3	2.215.000	3	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6.487.500	3	1.416.500	3	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	4.339.802.000	27,94		27,94	829.384.335
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/ bulan	4.229.300.000	33	1.103.294.081	33	800.974.335
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	106.920.000	3	26.730.000	3	26.730.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	3.582.000	1	3.582.000	1	1.680.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	24.000.000	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	orang	24.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran	100	Persen	134.187.925	30,02	63.786.900	30,02	35.410.030
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.264.500	1	241.000	1	741.000



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni) Rp	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	RK	Rp.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	24.099.500	1	5.538.900		5.189.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	6.319.925	1	1.258.000		1.258.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	7.980.000	1	1.995.000		1.232.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	92.524.000	1	54.254.000		26.989.530
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	403.296.000	100	403.296.000	94	323.400.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	403.296.000	4	403.296.000		323.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	290.716.800	32,94	87.765.700	32,94	54.673.888
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24.066.800	3	8.315.700	3	6.750.520
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	266.650.000	4	79.450.000	4	47.923.368
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	87.552.000	23,26	18.176.000	21,80	11.720.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	54.190.000	2	15.536.000	2	10.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	Unit	9.830.000	10	2.640.000	10	1.420.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	23.532.000	0	0	0	0



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni) Rp	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	RK	Rp.
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100	Persen	59.589.000	26,67	12.957.000	26,67	4.007.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Persen	59.589.000	26,67	4.007.000	26,67	4.007.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	59.589.000	1	4.007.000	1	4.007.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	Persen	94.269.000	28,80	24.393.000	28,80	23.144.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	Persen	94.269.000	28,80	24.393.000	28,80	23.144.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga Kemasya- rakatan	12.713.000	10	12.713.000	10	12.504.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	81.556.000	2	11.680.000	2	10.640.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100	Persen	3.584.185.940	24,88	475.480.630	18,67	238.126.849
	Kelurahan Manarap Lama		100	Persen	2.145.816.990	23,15	165.353.800	12,25	95.002.644
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Manarap Lama)	2	Lembaga Kemasya- rakatan	5.750.000	0	0	0	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Manarap Lama)	2	Unit	200.000.000	1	7.560.800	1	0



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni) Rp	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan		TK	Rp.	RK	Rp.
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	3	Pokmas/ Ormas	542.558.040	1	157.275.000	1	95.002.644
	Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama)	1	Laporan	2.040.000	1	510.000	1	400.000
KELURAHAN KERTAK HANYAR I			100	persen	711.224.200	26,19	143.151.280	24,36	95.779.355
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	1	Lembaga Kemasya- rakatan	5.950.000	1	0	1	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kertak Hanyar I)	2	Unit	200.000.000	1	8.037.800	1	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	2	Pokmas/ Ormas	478.174.200	1	134.543.480	1	95.779.355
	Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I)	6	Laporan	4.560.000	1	570.000	1	0
Kelurahan Mandar Sari			100	Persen	727.144.750	25,29	166.975.550	19,39	47.344.850
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandar Sari)	2	Lembaga Kemasya- rakatan	1.710.000	1	1.710.000	1	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Mandar Sari)	2	Unit	200.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari)	4	Pokmas/ Ormas	501.158.750	1	164.296.550	1	47.344.850
	Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari)	4	Laporan	3.876.000	1	969.000	1	0



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni)	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan	Rp	TK	Rp.	RK	Rp.
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	Persen	12.151.000	21,16	2.400.000	21,16	2.400.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	Persen	6.451.000	25	2.400.000	21,16	2.400.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4.051.000	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana	100	Persen	5.700.000	0	0	0	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	5.700.000	0	0	0	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	Persen	233.206.000	16,90	36.410.000	16,90	35.780.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	233.206.000	16,90	36.410.000	16,90	35.780.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	120	Orang	65.420.000	40	3.570.000	40	3.360.000

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025 (Murni)	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Vol	Satuan	Rp	TK	Rp.	RK	Rp.
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	138.506.000	1	25.520.000	1	25.160.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	29.280.000	3	7.320.000	3	7.260.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	23.940.000	21,71	5.130.000	21,71	5.040.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	100	23.940.000	21,71	5.130.000	21,71	5.040.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	20.520.000	3	5.130.000	3	5.040.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.710.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1.710.000	0	0	0	0

Sumber:

- - Laporan Evaluasi Renja Triwulan I Kab. Banjar 2025



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 8.249.503.715,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Berupa penambahan belanja taplak meja. Taplak meja yang ada saat ini kondisinya sudah sangat usang dan bukan pembelian atau pengadaan tetapi merupakan hadiah menang lomba di Kabupaten pada tahun 2004 silam. Taplak meja diperlukan untuk menunjang estetika sebuah acara. Mengingat intensitas

acara-acara dan kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Kertak Hanyar cukup banyak dan intens

- *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Berupa penambahan belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah. Usulan ini disampaikan mengingat banyaknya undangan, acara, kegiatan di Kabupaten serta kegiatan-kegiatan monitoring dan pembinaan ke desa-desa sehingga memerlukan ketersediaan anggaran yang mencukupi agar kegiatan maupun undangan-undangan bisa diikuti dan terlaksana dengan baik.

b. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pengurangan belanja pada jasa tenaga administrasi dan iuran asuransinya. Selanjutnya anggaran digeser ke sub kegiatan lain sesuai urgensinya.

c. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penambahan anggaran, yaitu :

- Honorarium pejabat pengadaan yang tidak teranggarkan di APBD Murni.
- Pengadaan Kursi plastik dikarenakan kursi plastik yang ada saat ini sudah lama pembelian tahun 2008 kondisinya sudah banyak rusak sementara kegiatan dan aktifitas kantor sangat tinggi intensitasnya dan sering tidak mencukupi.
- Pengadaan Proyektor. Keberadaan proyektor sangat diperlukan karena banyaknya aktifitas rapat dan kegiatan-kegiatan di kecamatan kertak Hanyar yang perlu dipresentasikan. Proyektor yang ada sudah tidak berfungsi dengan baik karena sudah cukup lama yaitu pengadaan tahun 2017. Proyektor sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan atau ke desa jika ada kegiatan rapat, monev atau sosialisasi.
- Pengadaan Tablet/Ipad untuk menunjang aktifitas Camat Kertak Hanyar. Karena keterbatasan sarana komputer dan laptop, sampai saat ini Camat tidak memiliki laptop ataupun sejenis tablet untuk menunjang aktifitas kerja Camat khususnya pada saat mengikuti kegiatan di lapangan dan rapat-rapat di Kabupaten.
- Pengadaan TV untuk di aula sebagai penunjang kegiatan rapat-rapat di Kecamatan Kertak Hanyar
- Pengadaan kendaraan roda 2 untuk menunjang kelancaran kegiatan di lapangan, mengingat Kertak Hanyar memiliki 10 desa dan 3 kelurahan dengan kondisi

jalan yang kecil dan gang sempit tidak bisa dilewati oleh mobil sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi kendala karena sering mengalami keterlambatan. Kendaraan operasional yang ada saat ini kondisinya sudah tidak layak pakai lagi merupakan pembelian tahun antara tahun, 2004 – 2007. Sudah lama diusulkan untuk dihapuskan namun belum diproses oleh Bagian Aset.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*, berupa penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan rehab kantor yaitu Penataan Halaman Kantor untuk estetika dan ikon kecamatan. berupa tulisan akrilik, pemasangan kanopi selasar, pengecatan pagar dan jembatan, penataan taman halaman kantor dan kebun PKK. Penataan ini dilakukan mengingat posisi kantor Kecamatan Kertak Hanyar yang berada di pinggir jalan jalur utama dan strategis yang menghubungkan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarmasin sehingga keberadaan Kantor yang indah dan nyaman akan mempresentasikan kondisi dan menjadi identitas daerah.
- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas* berupa penambahan anggaran untuk biaya operasional mobil dinas camat dan sekretaris camat mengingat mobilitas camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayah kerja masing-masing.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya* berupa penambahan anggaran, yaitu :

- Honorarium pejabat pengadaan yang tidak teranggarkan di APBD Murni.
- Pengadaan Kursi plastik dikarenakan kursi plastik yang ada saat ini sudah lama pembelian tahun 2008 kondisinya sudah banyak rusak sementara kegiatan dan aktifitas kantor sangat tinggi intensitasnya dan sering tidak mencukupi.
- Pengadaan Proyektor. Keberadaan proyektor sangat diperlukan karena banyaknya aktifitas rapat dan kegiatan-kegiatan di kecamatan kertak Hanyar yang perlu dipresentasikan. Proyektor yang ada sudah tidak berfungsi dengan

baik karena sudah cukup lama yaitu pengadaan tahun 2017. Proyektor sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan atau ke desa jika ada kegiatan rapat, monev atau sosialisasi.

- Pengadaan Tablet/Ipad untuk menunjang aktifitas Camat Kertak Hanyar. Karena keterbatasan sarana komputer dan laptop, sampai saat ini Camat tidak memiliki laptop ataupun sejenis tablet untuk menunjang aktifitas kerja Camat khususnya pada saat mengikuti kegiatan di lapangan dan rapat-rapat di Kabupaten.
- Pengadaan TV untuk di aula sebagai penunjang kegiatan rapat-rapat di Kecamatan Kertak Hanyar
- Pengadaan kendaraan roda 2 untuk menunjang kelancaran kegiatan di lapangan, mengingat Kertak Hanyar memiliki 10 desa dan 3 kelurahan dengan kondisi jalan yang kecil dan gang sempit tidak bisa dilewati oleh mobil sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi kendala karena sering mengalami keterlambatan. Kendaraan operasional yang ada saat ini kondisinya sudah tidak layak pakai lagi merupakan pembelian tahun antara tahun, 2004 – 2007. Sudah lama diusulkan untuk dihapuskan namun belum diproses oleh Bagian Aset.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** pada *sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* berupa pengurangan volume beberapa belanja kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** pada Sub Kegiatan *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* berupa pengurangan pada belanja kegiatan evaluasi perkembangan desa secara online, kegiatan PKK Kecamatan dan Stand pameran serta penambahan anggaran untuk kegiatan Evaluasi APBDes 10 Desa di Kecamatan Kertak Hanyar
- b. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** pada sub kegiatan :
 - b.1. *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mandar Sari)*
 - penyesuaian penempatan kode rekening belanja yaitu Belanja Modal Alat Pendingin yang sebelumnya berada pada Belanja Barang dan Jasa dialihkan ke kode rekening belanja modal.
 - Pengurangan Belanja Jasa tenaga administrasi Karena 1 Orang Lulus PPPK
 - Penambahan Biaya Pemeliharaan Laptop, Karena adanya penambahan Pembelian Laptop
 - Berdasarkan Realiasi dan Kegiatan Tahun Sebelumnya, maka perkiraan dana tidak mencukupi, sehingga perlu penambahan dana.
 - Karena Halaman Kantor tidak memungkinkan untuk kegiatan di halaman kantor, sudah rusak, banyak becek, sehingga dilakukan perbaikan atau pemeliharaan paving blok kembali.
 - b.2. *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kertak Hanyar I)*
 - penambahan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena Anggaran pemeliharaan saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas dan peralatan dapat berfungsi dengan optimal dan meningkatkan kualitas layanan.
 - Perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Belanja Modal Komputer, perubahan ini memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan pada masyarakat.
 -
 - b.3 *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manarap Lama)*
 - Pengurangan belanja Cetak/Fotocopy karena kelebihan penganggaran

- Pengurangan dari Belanja Honorarium tenaga Administrasi yang lulus P3K
- Penambahan anggaran perjalanan dinas
- Belanja Pemeliharaan pada pergeseran I dialihkan ke Belanja Honorarium KPA karena honor KPA tidak teranggarkan sebelumnya, sementara belanja tersebut tetap menjadi prioritas. Pada saat perubahan anggaran, Kelurahan Manarap Lama mengusulkan kembali penambahan anggaran untuk Belanja Pemeliharaan dikembalikan sesuai pagu murni guna mendukung kelancaran Pelayanan di Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada *Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* berupa :

- Penambahan sewa tenda untuk Acara HUT RI. Sewa tenda ini sifatnya urgen karena pelaksanaan HUT tahun ini dilaksanakan tidak lagi di Yayasan Mitra Kasih tetapi di halaman SMK 1 di lapangan terbuka sehingga memerlukan tenda untuk kegiatan tersebut.

Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	81	8.022.088.715	8.249.503.135	227.414.420	Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	91,60 Nilai	91,60 Nilai	5.385.216.725,00	5.538.336.645,02	153.119.920,02	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	14.662.000,00	14.662.000,00	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8.174.500,00	8.174.500,00	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6.487.500,00	6.487.500,00	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	4.339.802.000,00	4.339.802.000,00	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	4.229.300.000,00	4.229.300.000,00	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	106.920.000,00	106.920.000,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.582.000,00	3.582.000,00	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	Pengurangan-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	219.187.925,00	188.687.925,00	(30.500.000,00)	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.264.500,00	3.264.500,00	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	24.099.500,00	24.099.500,00	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.319.925,00	6.319.925,00	-	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	7.980.000,00	7.980.000,00	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	177.524.000,00	147.024.000,00	(30.500.000,00)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	403.296.000,00	453.822.000,00	50.526.000,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	403.296.000,00	453.822.000,00	50.526.000,00	Penambahan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional, Pengadaan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									Proyektor & Screen Layar Proyektor dan honorarium pejabat pengadaan yang tidak teranggarkan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	290.716.800,00	295.830.720,00	5.113.920,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.066.800,00	29.180.720,00	5.113.920,00	Penambahan anggaran karena adanya tunggakan/tagihan bulan Desember 2024-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	266.650.000,00	266.650.000,00	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	87.552.000,00	221.532.000,02	133.980.000,02	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit	54.190.000,00	101.910.000,0	47.720.000,02	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	9.830.000,00	9.830.000,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	23.532.000,00	109.792.000,00	86.260.000,00	Penambahan untuk pembuatan ikon kecamatan-
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	92 Nilai	8.022.088.715	8.249.503.135	227.414.420	Penambahan Anggaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	59.589.000,00	40.816.000,00	(18.773.000,00)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	59.589.000,00	40.816.000,00	(18.773.000,00)	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		3 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	59.589.000,00	40.816.000,00	(18.773.000,00)	Pengurangan anggaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	94.269.000,00	89.468.000,00	(4.801.000,00)	Pengurangan anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	94.269.000,00	89.468.000,00	(4.801.000,00)	Pengurangan anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		1 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.713.000,00	12.713.000,00	-	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	81.556.000,00	76.755.000,00	(4.801.000,00)	Pengurangan anggaran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	12.151.000,00	12.151.000,00		-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	6.451.000,00	6.451.000,00		-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		1 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00		-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.051.000,00	4.051.000,00		-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	5.700.000,00	5.700.000,00		-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		1 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00		-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	233.206.000,00	242.875.500,00	9.669.500,00	Penambahan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	233.206.000,00	242.875.500,00	9.669.500,00	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		1 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	120 Orang	120 Orang	65.420.000,00	75.089.500,00	9.669.500,00	Penambahan anggaran untuk sewa tenda HUT RI yang tidak teranggarkan di Murni

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia-						
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	138.506.000,00	138.506.000,00	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.280.000,00	29.280.000,00	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	23.940.000,00	23.940.000,00		-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	23.940.000,00	23.940.000,00		-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		1 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	20.520.000,00	20.520.000,00		-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000,00	1.710.000,00		-
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000,00	1.710.000,00		-
KELURAHAN MANARAP LAMA									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	2.213.716.990	2.301.915.990	88.199.000	Penambahan Anggaran
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	775.348.040,00	805.881.040,00	30.533.000,00	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		3 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	567.558.040,00	598.091.040,00	30.533.000,00	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
KELURAHAN KERTAK HANYAR I									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase				Penambahan Anggaran
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	711.224.200,00	734.581.200,00	23.357.000,00	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		3 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.990.000,00	5.990.000,00	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	500.674.200,00	524.031.200,00	23.357.000,00	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	4.560.000,00	4.560.000,00	-	
KELURAHAN MANDAR SARI									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase				Penambahan Anggaran
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	727.144.750,00	761.453.750,00	34.309.000,00	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		3 Jenis Pelayanan				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.710.000,00	1.710.000,00	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	521.558.750,00	555.867.750,00	34.309.000,00	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	3.876.000,00	3.876.000,00	-	-

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Perubahan Renja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Kertak Hanyar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkanya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kertak Hanyar, 2025
Camat Kertak Hanyar,

Gt. M. Noviar Hidayat, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19851107 200412 1 002

29. Kecamatan Astambul

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Astambul Tahun 2025 ini :

1. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang tentang Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan Tahun 2025.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang tentang Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 48);
 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 64);
 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.
2. Untuk menyesuaikan pagu indikatif sesuai Surat Edaran Bupati Banjar dengan nomor 000.7.2.4/410/PPE-Bappedalitbang dan 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Astambul tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Astambul agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi targetkinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.389.290.191,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*)

Pada saat perubahan Kecamatan Astambul melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 4.342.090.191,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*)

Hasil Evaluaasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 Hingga Triwulan I dan Capaian Renstra

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJADAN KEGIATAN TAHUN LALU 2024			TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	Urusan : Unsur Kewilayahan											
7.01	Bidang Urusan : Kecamatan											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)	76	70	74	69,73	0,94	76	0	0	139,73	1,84
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	1,00	100	14,82	0,15	214,82	2,15

7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	17	17	17	1	17	4	0,24	38,00	2,24
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	1	17	17	1	17	4	0,24	22,00	1,29
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	15	15	15	1	15	15	1	45,00	15
7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1	0	0	0	2,00	1
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	2	2	1	1	0	0	4,00	2
7.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	2	2	1	1	0	0	4,00	4

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	1	1	1	1	1	1	1	3	45
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
7.01.01.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	9	0,75	9	9	1	30	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	5	5	1	1	1	1	6,00	5

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2	0	0	0	0	2,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	1	1	1	1	9,00	4
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1	1	1	1	25,00	12
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1	1	1	1	25,00	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	5	5	5	1	1	1	1	11,00	7

7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	6	6	1	1	1	1	13,00	6
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	1	1	1	1	5,00	2
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	1	25	25	1	225,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	8	8	8	1	1	1	1	17,00	8
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	6	6	6	1	1	1	1	13,00	6

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	1	25	25	1	225,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00
7.01.03.2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	6	6	1	1	1	1	13,00	6
7.01.03.2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	1	1	1	1	7,00	3
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	100	100	100	1	25	25	1	225,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00

		Umum di Kecamatan										
7.01.04.2.01.0 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	6	6	1	1	1	1	13,00	6
7.01.04.2.01.0 002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	3	3	3	3	1	1	1	1	7,00	3
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00

7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	3,00	1
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	1	25	25	1	225,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	1	100	0	0	200,00	2,00

7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	100	100	100	1	100	100	1	300,00	100
7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	12	12	1	3	3	1	27,00	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	1	25	25	1	225,00	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	1	100	0,00	0,00	200,00	2,00
7.01.06.2.01.0 001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	3,00	1
7.01.06.2.01.0 002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	1	1	1	1	0	0	2,00	1
7.01.06.2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	0	0	0	0	0	0	0	-	2
7.01.06.2.01.0 005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	2	2	2	1	2	0	0	4,00	2
7.01.06.2.01.0 007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	1	1	1	1	1	1	0	0	2,00	1

		Permasyarakatan Desa										
7.01.06.2.01.0 008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengang katan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	12	12	12	1	3	3	1	27,00	1
7.01.06.2.01.0 012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	0	0	0	0	0	0	0	-	2
7.01.06.2.01.0 015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	1	1	1	1	0	0	2,00	1
7.01.06.2.01.0 016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	0	0	0	0	0	0	0	-	12
7.01.06.2.01.0 017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6	0	0	0	0	0	0	0	-	12

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Astambul Tahun 2025

2.1.1 Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang TIDAK MEMENUHI

TARGET kinerja hasil /keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Kunjungan Tamu
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MAASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pndayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

2.1.4 Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkendala dikarenakan banyaknya agenda di Kecamatan dengan keadaan jumlah ASN di Kecamatan yang terbatas sehingga kegiatan Bimtek tertunda serta beberapa ASN sudah mengikuti Bimtek tanpa setoran yang dilaksanakan oleh SKPD Mitra.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkendala dikarenakan padatnya jadwal kegiatan di Kecamatan.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Astambul.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN ASTAMBUL TAHUN 2024 S/D TRIWULAN I

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp.	RK	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH				4.389.290.191		1.117.944.527		870.563.490
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)	76	Nilai	2.648.712.391	76	1.008.030.727	0	828.257.490
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	Persen	8.014.000	39,64	3.177.000	14,82	1.187.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Persentase	4.974.000	6	2.569.000		-

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Diokumen	3.040.000	6	608.000		1.187.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persentase	1.803.720.000	27,25 5	491.605.000	24,25	437.386.661
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang	1.742.400.000	15	476.275.000	15	422.056.661
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Diokumen	61.320.000	1	15.330.000	0	15.330.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	Persentase	33.128.000	48,10 7	15.937.000	2,26	750.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Diokumen	3.128.000	1	937.000		750.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	30.000.000	3	15.000.000	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	1	Persentase	109.115.000	19,14 8	20.893.100	7,97	8.699.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	558.000	1	279.000		-

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.153.500	1	800.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.460.500	1	2.524.500		614.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.448.000	0	1.289.600		1.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.495.000	3	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	Laporan	80.000.000	3	16.000.000	-	7.085.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persentase	382.478.000	97,21 9	371.843.000	84,5 5	323.400.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	382.478.000	1	371.843.000	1	323.400.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	Persentase	197.191.764	29,13 4	57.450.000	23,6 4	46.624.329
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.000.000	1	500.000	1	-

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24.221.764	3	5.940.000	3	3.624.329
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	171.970.000	3	51.010.000	3	43.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	Persentase	115.065.627	40,95 5	47.125.627	8,87	10.210.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	62.600.000	0	15.000.000	-	9.360.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	15.340.000	2	2.000.000	1	850.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unnit	37.125.627	0	30.125.627	0	-
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	2	Persentase	1.492.853.000	0,33	4.914.800	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				22.241.000	22,10	4.914.800	-	-

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	Diokumen	22.241.000		4.914.800	2	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				1.470.612.000	0,00	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	1.470.612.000	0	-	0	-
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persentase	77.321.000	100	77.321.000	30	10.238.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29	Persentase	77.321.000	100	77.321.000	30	10.238.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyar akatan	21.708.000	3	21.708.000	3	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	55.613.000	1	55.613.000	1	10.238.000

04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Persentase	58.735.800	21,54 4	12.654.000	12,2 3	7.182.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persentase	56.274.000	22,48 6	12.654.000	12,7 6	7.182.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	49.936.000	2	12.301.000	1	7.182.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	3	Laporan	6.338.000	1	353.000	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	2.461.800	0	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	2.461.800	0	-	0	-

05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persentase	86.065.000	10,04	8.640.000	23,5 7	20.286.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persentase	86.065.000	10,04	8.640.000	23,5 7	20.286.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	51.930.000	25	605.000	25	13.186.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Jumlah	34.135.000	3	8.035.000	3	7.100.000
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persentase	25.603.000	15,81	6.384.000	8,98	4.600.000

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persentase	25.603.000	15,81	6.384.000	9	4.600.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	2.337.000	1	-	1	2.300.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	2.337.000	1	-	1	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen	4.047.000	0	4.047.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	Dokumen	2.337.000	0	-	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.736.000	0	-	0	-
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	Dokumen	2.337.000	1	2.337.000	1	2.300.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	Dokumen	2.337.000	0	-	0	-

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	3.461.000	0	-	0	-
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	Dokumen	2.337.000	0	-	0	-
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6	Laporan	2.337.000	0	-	0	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Astambul Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, tidak ada perubahan indikator kinerja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Namun, ada perubahan pada target indikator kinerja dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan item belanja.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 4.342.090.191 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

3.4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

3.4.1.1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang – Undangan karena :

- Di kurangi anggarannya karena adanya Efisiensi Anggaran;

3.4.1.2 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena :

- Di kurangi anggarannya karena adanya Efisiensi Anggaran

3.4.1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
dikarenakan :
 - Di kurangi anggarannya karena adanya Efisiensi Anggaran

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		TARGET	PAGU			ALASAN PERUBAHAN / KETERANGAN
				RENJA 2026	PERUB AHAN RENJA 2026	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PENAMBAHAN (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH					4.389.290.1 91	4.342.090.1 91	47.200.000	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)	74	74	2.648.712.3 91	2.601.512.3 91	47.200.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	8.014.000	8.014.000	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	17	4.974.000	4.974.000	-	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	17	3.040.000	3.040.000	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	1.803.720.000	1.803.720.000	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	15	1.742.400.000	1.742.400.000	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	61.320.000	61.320.000	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	4	4	33.128.000	27.128.000	6.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	3.128.000	3.128.000	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	30.000.000	24.000.000	6.000.000	Efesiensi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	1	1	109.115.000	69.115.000	40.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	558.000	558.000	-	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.153.500	4.153.500	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	13.460.500	13.460.500	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.448.000	6.448.000	-	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4.495.000	4.495.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9	80.000.000	40.000.000	40.000.000	Efisiensi Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	382.478.000	381.278.000	1.200.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	382.478.000	381.278.000	1.200.000	Efisiensi Anggaran
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2			-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	100	197.191.764	197.191.764	-	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	1.000.000	1.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	12	12	24.221.764	24.221.764	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	171.970.000	171.970.000	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	100	115.065.627	115.065.627	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	62.600.000	62.600.000	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	15.340.000	15.340.000	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	37.125.627	37.125.627	-	

02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	2	2	1.492.853.00 0	1.492.853.00 0	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan					22.241.000	22.241.000	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	8	22.241.000	22.241.000	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					1.470.612.00 0	1.470.612.00 0	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	6	1.470.612.00 0	1.470.612.00 0	-	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	77.321.000	77.321.000	-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29	29	77.321.000	77.321.000	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	21.708.000	21.708.000	-	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	55.613.000	55.613.000	-	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	100	58.735.800	58.735.800	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	56.274.000	56.274.000	-	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	49.936.000	49.936.000	-	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	3	3	6.338.000	6.338.000	-	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	2.461.800	2.461.800	-	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	2.461.800	2.461.800	-	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			86.065.000	86.065.000	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi			86.065.000	86.065.000	-	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100	100	51.930.000	51.930.000	-	

		Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia						
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	34.135.000	34.135.000	-	
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4	4	25.603.000	25.603.000	-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	25.603.000	25.603.000	-	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	2.337.000	2.337.000	-	

	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	2.337.000	2.337.000	-	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2	4.047.000	4.047.000	-	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	2	2.337.000	2.337.000	-	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	1.736.000	1.736.000	-	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	12	2.337.000	2.337.000	-	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	12	2.337.000	2.337.000	-	
	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	3.461.000	3.461.000	-	

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	12	2.337.000	2.337.000	-	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6	6	2.337.000	2.337.000	-	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Astambul di SIPD Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Astambul Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Astambul secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
 2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Astambul, 30 Juni 2025

Camat Astambul



AHMAD FAUZI, S.Sos., M.M.

Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19680123 199803 1 007

30. Kecamatan Gambut

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 ini :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan

penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai

dengan triwulan I tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Gambut Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Tahun anggaran 2025 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.113.938.340,- (*Tujuh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp 5.505.172.000,- (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 896.551.920,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 712.214.420,- (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pada saat perubahan Kecamatan Gambut melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 7.283.080.340,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.814.616.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 738.900.920,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 729.563.420,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 hingga triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	01				Bidang Urusan: Kecamatan											
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	74.00	76	88.07	115.88	-	-	NA	162.07	197.65
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	NA	16	16	100.00	1	1	100	17	43
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	NA	1	1	100.00	NA	NA	NA	1	20
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100.00	NA	NA	NA	2	40
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9	NA	3	3	100.00	NA	NA	NA	3	33
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	20	5	5	100.00	1	1	100	26	137

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	12	1	1	100.00	2	2	100	15	188
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	6	5	5	100.00	-	-	NA	11	79
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	NA	2	2	100.00	1	1	100	3	50
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	4	5	5	100.00	1	1	100	10	50
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	20	20	20	100.00	NA	NA	NA	40	85
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	12	10	10	100.00	-	-	NA	22	122
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	12	1	1	100.00	3	3	100	16	100
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100.00	3	3	100	27	45
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	NA	12	12	100.00	-	-	NA	12	80
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	3	2	2	100.00	5	2	40	10	53
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39	12	12	12	100.00	3	3	100	27	69
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40	12	12	12	100.00	3	3	100	27	68
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	12	12	12	100.00	3	3	100	27	54
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17	8	5	5	100.00	NA	NA	NA	NA	NA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	10	10	10	100.00	5	1	20	25	35
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	3	3	3	100.00	-	-	-	0	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26	4	6	6	100.00	2	2	100	12	46
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	4	3	3	100.00	3	3	100	10	77
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23	12	12	12	100.00	-	-	NA	24	104
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
Kelurahan Gambut																
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	1	1	1	100.00	-	-	-	0	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
Kelurahan Gambut Barat																
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31	2	2	2	100.00	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	NA	NA	NA	NA	25	25	100	25	25
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31	NA	2	2	100.00	3	3	100	5	16
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	1	1	1	100.00	1	1	100	3	50
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	NA	100	100	100.00	25	25	100	125	125
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	NA	1	1	100.00	-	-	NA	1	17
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1301	350	300	300	100.00	-	-	NA	650	50
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	1	1	1	100.00	NA	NA	NA	2	67
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	12	1	1	100.00	NA	NA	NA	13	650
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17	1	1	1	100.00	1	1	100	3	18
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	1	1	1	100.00	-	-	-	2	40
7	01	06	2.01	0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	19	1	1	1	100.00	-	-	-	2	11

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan										

2.1.1 Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang TIDAK MEMENUHI

TARGET kinerja hasil /keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

2.1.4 Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Pada sub Pengadaan Mebel terkendala dikarenakan spesifikasi mebel yang ada di toko / rekanan tidak sesuai standar harga sehingga masih dalam tahap koordinasi dengan barang.
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terkendala dikarenakan spesifikasi mebel yang ada di toko / rekanan tidak sesuai standar harga sehingga masih dalam tahap koordinasi dengan barang.
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terkendala dikarenakan belum jadwal pelaksanaan pemeliharaan barang.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Gambut.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum

mencapai target

- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 s/d Triwulan I

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7,113,938,340		1,897,424,751		1,439,290,252
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	79	Nilai	5,098,585,000	-	1,544,287,742	-	1,389,112,052
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang tersusun	100	Persen	13,245,000	25	3,383,000	25	1,350,000
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5,380,000	1	1,480,000	1	500,000
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	3,785,000	2	863,000	2	500,000
	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	4,080,000	3	1,040,000	3	350,000
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	3,853,220,000	25	981,427,742	25	929,987,423

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	3,770,300,000	0	961,162,742	0	910,677,823
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	81,920,000	3	19,840,000	3	18,974,600
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1,000,000	0	425,000	0	335,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan BMD tepat waktu	100	Persen	23,000,000	25	5,650,000	25	5,439,600
	a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	23,000,000	3	5,650,000	3	5,439,600
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	19,080,000	25	1,115,000	25	1,099,000
	a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9	Dokumen	4,080,000	3	1,115,000	3	1,099,000
	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	15,000,000	0	-	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Perundang-Undangan								
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	100	Persen	204,417,000	25	72,789,000	25	49,079,200
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2,455,000	0	710,000	0	628,000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	34,141,000	0	21,136,000	0	15,766,500
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	7,521,000	0	6,031,000	0	1,850,000
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	9,700,000	0	2,425,000	0	790,000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	5,000,000	3	1,310,000	3	490,000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	132,200,000	3	37,340,000	3	29,554,700
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	13,400,000	0	3,837,000	0	-
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	394,226,000	75	365,539,000	50	327,083,325

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	6,000,000	1	6,000,000	0	-
	b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	388,226,000	5	359,539,000	2	327,083,325
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100	Persen	214,457,000	25	61,422,000	25	52,309,004
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	56,262,000	0	14,112,000	0	5,456,140
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153,195,000	3	46,310,000	1	45,852,864
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	376,940,000	25	52,962,000	25	22,764,500
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	68,440,000	0	18,996,000	0	9,043,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	13,240,000	5	4,670,000	3	2,600,000
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	295,260,000	0	29,296,000	0	11,121,500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	100	Persen	171,026,000	25	39,770,500	25	30,565,000
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	171,026,000	25	39,770,500	25	30,565,000
	a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	171,026,000	2	39,770,500	1	30,565,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	1,694,398,340	25	303,389,509	25	10,710,200
	3. Kegiatan Koordinasi 1 Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	20,886,000	25	11,352,000	25	10,710,200
	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	11,352,000	3	11,352,000	3	10,560,200
	b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	9,534,000	0	-	0	150,000
	3. Kegiatan Pemberdayaan 2 Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100	Persen	1,608,766,340	25	286,793,009	25	96,216,971
	(Kelurahan Gambut)				896,551,920		148,651,250		49,297,585
	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,152,000	0	-	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	199,999,920	0	-	0	-
	c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas	611,400,000	0	141,411,250	0	49,297,585
	d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	75,000,000	0	7,240,000	0	-
	(Kelurahan Gambut Barat)				712,214,420		138,141,759		46,919,386
	e Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	5,645,000	0	-	0	-
	f Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	199,999,920	0	-	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas	497,589,500	0	134,721,759	0	46,919,386
	h Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	8,980,000	-	3,420,000	-	-
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	64,746,000	25	5,244,500	25	5,244,500
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun a Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	Keluarga	64,746,000	0	5,244,500	0	5,244,500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	29,880,000	25	5,940,000	25	5,930,000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	26,820,000	25	5,940,000	25	5,930,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN		T K	Rp	R K	Rp
	a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	12	Laporan	23,760,000	3	5,940,000	3	5,930,000
	b Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3,060,000	0	-	0	-
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	3,060,000	0	-	0	-
	a Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3,060,000	0	-	0	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	91,900,000	0	-	0	0

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN		T K	Rp	R K	Rp
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	91,900,000	0	-	0	0
	a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	91,900,000	0	-	0	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	28,149,000	25	4,037,000	25	2,973,000
	6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan	100	Persen	28,149,000	25	4,037,000	25	2,973,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUME	SATUAN		T K	Rp	R K	Rp
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	a Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	4,037,000	1	4,037,000	1	2,973,000
	b Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	c Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	8,074,000	0	-	0	-
	d Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	e Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	f Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	1	Laporan	3,927,000	0	-	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN I		TRIWULAN I	
			VOLUM E	SATUAN	DPA	T K	Rp	R K	Rp
	Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan							

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Gambut Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program dan kegiatan karena adanya Perubahan Pohon Kinerja Kecamatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 16 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 7.283.080.340,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.814.616.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 738.900.920,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 729.563.420,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

3.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

perubahan anggaran dilakukan karena :

- Kurangnya anggaran Gaji Pokok PPPK;
- Kurangnya anggaran Tunjangan Keluarga, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK;
- Kurangnya anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK; dan
- Kirangnya anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

1.2 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan belanja kursi lipat/susun untuk menunjang kegiatan rapat di Kantor Kecamatan.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adanya penambahan anggaran karena adanya penambahan anggaran untuk Expo Banjar, perjalanan dinas biasa dan dalam kota.

1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya penyesuaian harga realisasi belanja
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan beberapa item belanja seperti :
 - Kursi di ruang pelayanan demi menunjang kegiatan pelayanan di Kecamatan;
 - Lemari es di ruang pelayanan demi menunjang kegiatan pelayanan di Kecamatan;
 - A.C Split di ruang pelayanan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam menerima layanan di Kecamatan; dan
 - Kursi Kerja untuk menunjang kenyamanan pegawai dalam bekerja.

1.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penambahan anggaran dilakukan karena Adanya

penambahan ruang baru sehingga diperlukan penambahan daya listrik.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Perubahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan anggaran BBM untuk mobil Camat serta penambahan anggaran untuk pemeliharaan Mobil Operasional Kecamatan.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penambahan Anggaran dilakukan karena untuk pembuatan Neon Box (I Love Gambut) sebagai ikon Kabupaten Gambut

3.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
Adanya pengurangan anggaran untuk jumlah kafilah yang mengikuti MTQ Kabupaten dan anggaran dialihkan ke belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

3.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Adanya penambahan anggaran belanja untuk Evaluasi dan Monitoring APBDes

1.2 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan

- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
adanya penambahan anggaran untuk belanja Sepeda Motor di kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat
- Sub kegiatan Evaluasi Kelurahan adanya perubahan rincian belanja di Kelurahan Gambut.

3.1.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adanya penambahan anggaran untuk :

- Belanja jasa penyelenggara acara seperti : Komandan upacara, paduan suara, pelatih paduan suara, dan petugas dokumentasi.

3.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Adanya pengurangan karena kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa dilaksanakan pada Tahun 2026.

Tabel 3 1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN GAMBUT							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7.01	KECAMATAN							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)				79 Nilai	79 Nilai	5.247.867.172,00	5.098.585.000,00	5.231.353.000,00	3.677.000,00							5.251.544.172,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 %	100 Persen	13.245.000,00	13.245.000,00	13.245.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		16.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 %	100 %	4.319.502.172,00	3.853.220.000,00	3.849.180.000,00	-470.322.172,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		4.529.082.172,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	4.236.582.172,00	3.770.300.000,00	3.770.300.000,00	-466.282.172,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.436.582.172,00	KECAMATAN GAMBUT

	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	81.920.000,00	81.920.000,00	77.880.000,00	-4.040.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah				100 %	100 %	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		27.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100 %	100 %	19.080.000,00	19.080.000,00	16.080.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		28.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			22.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran				100 %	100 %	229.417.000,00	204.417.000,00	206.641.000,00	-22.776.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		237.450.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.455.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.450.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	34.141.000,00	34.141.000,00	34.365.000,00	224.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	7.521.000,00	7.521.000,00	7.521.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	157.200.000,00	132.200.000,00	134.200.000,00	-23.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</i>				100 %	100 %	52.226.000,00	394.226.000,00	394.090.000,00	341.864.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		51.850.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	5.864.000,00	-136.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	17 Unit	46.226.000,00	388.226.000,00	388.226.000,00	342.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			45.850.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	214.457.000,00	214.457.000,00	254.457.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		217.162.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	56.262.000,00	56.262.000,00	96.262.000,00	40.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			56.262.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.195.000,00	153.195.000,00	153.195.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			155.400.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara				100 %	100 %	376.940.000,00	376.940.000,00	474.660.000,00	97.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		144.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	9 Unit	68.440.000,00	68.440.000,00	116.160.000,00	47.720.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			<i>Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	13.240.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			16.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	295.260.000,00	295.260.000,00	345.260.000,00	50.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			53.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan				100 %	100 %	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-21.026.000,00							150.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update Persentase Jenis Media Pengaduan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				100 %	100 %	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				6 Laporan	6 Laporan	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-10.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana				100 %	100 %	1.676.398.340,00	1.694.398.340,00	1.741.096.340,00	-115.398.340,00							1.561.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				100 %	100 %	20.886.000,00	20.886.000,00	32.886.000,00	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		26.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				3 Lembaga Kemasyar a katan	3 Lembaga Kemasyar a katan	11.352.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	9.534.000,00	9.534.000,00	21.534.000,00	12.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				100 %	100 %	64.746.000,00	64.746.000,00	64.746.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		70.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

45

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan					300 Orang	300 Orang	91.900.000,00	91.900.000,00	99.650.000,00	7.750.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik					100 %	100 %	28.149.000,00	28.149.000,00	20.075.000,00	1.851.000,00							30.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100 %	100 %	28.149.000,00	28.149.000,00	20.075.000,00	-8.074.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	0 Dokumen	8.074.000,00	8.074.000,00	0,00	-8.074.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.250.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																			

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.750.000,00	KECAMATAN GAMBUT
			KELURAHAN GAMBUT						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7		UNSUR KEWILAYAHAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7.01		KECAMATAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
1.	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana			100 %	100 %	1.676.398.340,00	1.694.398.340,00	1.741.096.340,00	-115.398.340,00							1.561.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.590.766.340,00	1.608.766.340,00	1.643.464.340,00	52.698.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		1.465.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyar a katan	1 Lembaga Kemasyar a katan	10.152.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	199.999.920,00	199.999.920,00	200.000.000,00	80,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	602.400.000,00	611.400.000,00	619.773.920,00	17.373.920,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	83.975.000,00	8.975.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
			KELURAHAN GAMBUT BARAT						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7		UNSUR KEWILAYAHAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
	7.01		KECAMATAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00	
1.	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana			100 %	100 %	1.676.398.340,00	1.694.398.340,00	1.741.096.340,00	-115.398.340,00							1.561.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.590.766.340,00	1.608.766.340,00	1.643.464.340,00	52.698.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		1.465.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Sumber Data : Inputan Perubahan Renja Kecamatan Gambut di SIPD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagipemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan

pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Gambut secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambut, 19 Juni 2025

Camat Gambut

AHMAD FAUZAN, S.STP., M.Si.

Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

31. Kecamatan Karang Intan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 23. Peraturan Bupati Banjar Nomor **XX** tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
 25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 26)
 26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Karang Intan tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
BAB II	EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
	1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **3.720.219.266,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**, dan pada saat perubahan Kecamatan Karang Intan bertambah dikarenakan adanya penambahan belanja Bahan Bakar Minyak untuk Mobil Dinas Camat, belanja pemeliharaan untuk mobil dinas Sekretaris Kecamatan, penambahan pagu Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota, penambahan pagu untuk biaya sewa stand UMKM serta pagu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi APBDes, dengan total Pagu Perubahan sebesar **Rp 3.789.439.266,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 dan capaian rensta Kecamatan Karang Intan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan	78	78,16	76	87,62	115	88	0	0	87,62	115
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	76	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69	22	15	15	100	2	0	0	37	53,62
7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah										
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	31	17	17	100	16	16	100	64	1
7	1	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124	4	40	40	100	10	0	0	44	35,48
7	1	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2	1	1	100	1	0	0	3	60
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	75	100	100	100	0	0	0	100	100
7	1	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	4	4	100	0	0	0	7	46,67
7	1	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kepegawaian yang terpenuhi										
7	1	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	2	2	2	100	0	0	0	4	50
7	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	1	1	1	100	0	0	0	2	50
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	8	1	1	100	0	0	0	9	81,81
7	1	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	23	1	1	100	0	0	0	24	92,3
7	1	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	12	1	1	100	0	0	0	13	86,67
7	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	13	1	1	100	0	0	0	14	87,5
7	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	3	1	1	100	0	0	0	4	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	4	12	12	100	3	3	100	19	47,5
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	18	NA	NA	NA	NA	1	1	100	1	5.55
7	1	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	1	100	4	80
7	1	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	NA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	1	100	0	0	0	3	60
7	1	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40	4	1	1	100	3	0	0	5	12,5
7	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38	2	12	12	100	3	3	100	17	44,73

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	16	8	8	100	2	2	100	26	65
7	1	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	8	11	11	100	3	0	0	19	46,31
7	1	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	4	2	2	100	2	0	0	6	50
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	2	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	16	14	1	1	100	0	0	0	15	93,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25	8	6	6	100	1	0	0	14	56
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	130	52	26	26	100	6	6	100	84	64,61
7	1	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17	5	4	4	100	0	0	0	9	52,94

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	4	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9	2	3	3	100	0	0	0	5	55,56
7	1	4	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	2	1	1	100	0	0	0	3	60
7	1	4	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	4	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	5	2	1	1	100	0	0	0	3	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	100	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	5	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	600	240	120	120	100	0	0	0	360	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	6	2	2	100	0	0	0	8	66,67
7	1	5	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1	1	1	100	0	0	0	2	50
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	80	80	25	25	100	80	80
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	80	80	25	25	100	80	80
7	1	6	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	3	1	1	100	0	0	0	4	66,67
7	1	6	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	3	1	0	0	1	1	100	4	66,67
7	1	6	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	5	2	1	1	100	0	0	0	3	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa										
7	1	6	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100
7	1	6	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	3	2	2	100	0	0	0	5	83,33
7	1	6	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengelasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	2	1	1	100	0	0	0	3	60

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I. Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan I ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain :

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan serta masih belum optimalnya penyusunan pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara;
- Terkendala pada aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa;
- Penyesuaian dengan sistem perpajakan (coretax);

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Tidak terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja di triwulan I TA. 2025

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana banyak sub kegiatan yang memenuhi target yang ditentukan,

hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Karang Intan.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai target yang diinginkan;
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target dengan catatan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran dibuat secara tepat;
- c. Adanya koordinasi baik di internal kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan sehingga target kinerja dapat diperoleh secara maksimal dan optimal.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KARANG INTAN TAHUN 2025 SD TRIWULAN I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	88	Nilai	3.270.415.966	-	1.172.181.283	-	932.778.556
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	9.242.800	26%	2.283.200	17%	1.872.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	7.110.000	2	1.750.000	0	1.600.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	2.132.800	4	533.200	4	272.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.168.780.000	47%	557.420.083	28%	514.403.667
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	16	Orang/Bulan	2.098.500.000	16	539.250.083	16	497.033.667
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40	Dokumen	69.480.000	10	17.370.000	0	17.370.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	800.000	1	800.000	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	20.180.000	0%	-	0%	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	180.000	-	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.000.000	-	0	0	0

Commented [L1]: Cek yg bertanda kuning, apakah sudah sesuai

Commented [AA2R1]: sudah

Commented [L3R1]: cek kembali untuk subkeg Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	157.837.000	18%	32.081.000	18%	17.167.530
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	4.394.000	-	1.125.000	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	2.973.000	-	1.018.000	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	6.018.000	-	1.548.000	0	220.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	16.373.000	-	4.215.000	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	4.570.000	-	1.350.000	0	712.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	123.509.000	3	22.825.000	3	16.235.530
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	499.808.000	3%	422.807.000	3%	323.400.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	17	Unit	29.001.000	-	0	-	0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	16	Unit	422.807.000	1	422.807.000	1	323.400.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	48.000.000	-	0	-	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	238.059.166	24%	69.060.000	12%	61.910.974
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.400.000	-	600.000	0	400.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	34.999.166	3	8.850.000	0	3.137.814
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	200.660.000,00	3	59.610.000	3	58.373.160
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	176.509.000	28%	88.530.000	8%	14.024.385
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	106.160.000	2	26.100.000	2	13.474.385
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	10.349.000	3	2.430.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2	Unit	60.000.000	2	60.000.000	0	550.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	52.449.500	25%	11.854.500	25%	6.832.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	persen	1.577.500	25%	582.500	25%	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	1.577.500	-	582.500	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Sub Kegiatan	Persen	50.872.000	25%	11.272.000	25%	6.832.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	50.872.000	1	11.272.000	0	6.832.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		DPA	TK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan								
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	78.169.000	25%	18.606.000		13.470.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	78.169.000	75%	18.606.000	81%	13.470.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	LembagaKemasyarakatan	13.718.000	6	13.718.000	6	13.470.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Laporan	64.451.000	-	4.888.000	-	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Persen	48.828.000	-	-		-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	41.051.000	-	-		-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	2	Laporan	34.634.000	-	0	-	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	6.417.000	-	0	-	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	7.777.000	-	-		-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi/SinergiDengan PerangatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	7.777.000	-	0	-	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	209.539.000	-	31.783.000		23.070.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	209.539.000	5%	31.783.000	5%	23.070.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	Orang	34.725.000	-	0	-	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	147.862.000	-	31.783.000	-	23.070.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	26.952.000	-	7.044.000	-	4.424.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	60.817.800	9%	14.135.800		13.597.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	60.817.800	20%	14.135.800	20%	13.597.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	17.185.000	-	0	-	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	4.216.800	1	4.216.800	1	3.706.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	15.187.000	-	5.462.000	-	5.450.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	8.049.000	-	0	-	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	16.180.000	-	4.457.000	-	4.441.000

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Karang Intan Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Karang Intan Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya di antaranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 14 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah **Rp 3.789.439.266,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan karena penambahan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak mobil operasional Camat dan anggaran pemeliharaan untuk mobil operasional Sekretaris Kecamatan;
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada sub

kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami penambahan anggaran untuk jasa sewa tenda/stand UMKM dan anggaran untuk kegiatan monitoring evaluasi APBDes.

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berdasarkan Gotong Royong dan Berkeadilan”***..

Perubahan Renja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Intan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Karang Intan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Karang Intan, 20 Juni 2025
Camat Karang Intan

Drs. Pusaro Riyanto, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19710204 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN KARANG INTAN

Alamat : Jln. Melati No.01 Kecamatan Karang Intan Kab. Banjar Kode Pos 70661
Website : <https://keckarangintan.banjarkab.go.id> email :
kec.karangintan@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 029 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

CAMAT KARANG INTAN

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Karang Intan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
 13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARANG INTAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Intan
pada tanggal : 01 Juni 2025

CAMAT KARANG INTAN,

\$(ttd)

Drs. Pusaro Riyanto, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19710204 199002 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Karang Intan
Nomor : 029 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset

CAMAT KARANG INTAN,

Drs. Pusaro Riyanto, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19710204 199002 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Karang Intan
Nomor : 029 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025 KECAMATAN KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025; b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025; c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Bappedalitbang Kabupaten Banjar sebagai mitra kerja.
2	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025; b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025; c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025.
3	Anggota	a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025 tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Karang Intan; b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025; c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Intan; d. Melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025; e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025;

	f. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Karang Intan Tahun 2025; g. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja Perubahan pada bidangnya masing- masing; h. Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing; i. Menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen RKPD Tahun 2025.
--	---

CAMAT KARANG INTAN,

\$(ttd)

Drs. Pusaro Riyanto, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19710204 199002 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dengan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar tanggal 27 Maret 2025 Nomor : 000.7.2.4/285/PPE/Bappedalitbang, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);

23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor **XX** tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun

dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan 7 Kelurahan yang diampunya melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.968.128.830,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh **Rupiah**).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 yaitu:

Commented [L1]: menggunakan pagu APBD Murni 2025

Commented [W!2R1]: Sudah sesuai dengan pagu murni 2025 (kec dan 7 kel)

Commented [L3R1]: di rekap kami dan sipd ri pagu APBD murni 2025 kec dan 7 kel 17.968.128.830

Commented [W!4R1]: iya, kami salah. Maaf yaaa

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7												
7	1											
7	1	1										
7	1	1										
7	1	1	2.01									
7	1	1	2.01	1								
7	1	1	2.01	2								
7	1	1	2.01	3								
7	1	1	2.01	4								
7	1	1	2.01	5								

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan																																																					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																																				
1					2					3					4					5					6					7					8=(7/6)					9					10					11					12=(5+7+10)					13=(12/4)				
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87	24	21	21	100%	6	4	66.66%	46	0.52%																																																
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	65.52	65.52	100%	265.52	2.65%																																																
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	84	84	84	100%	84	84	100%	239	2.84%																																																
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122	2	41	41	100%	9	8	88.88%	50	0.40%																																																
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%																																																
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	225	2.25%																																																
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	2	4	4	100%	1	0	0	5	0.35%																																																
7	1	1	2.03	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	7	2	1	1	100%	1	0	0	2	0.5%																																																
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100	100	100	100	100%	33.33	22.22	67%	222.22	2.22																																																
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	2	1	1	100%	1	0	0%	2	0.28%																																																

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	2	1	1	100%	2	0	0%	3	0.21%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	33.33	24.24	73%	224.24	2.24%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	3	1	1	100%	0	0	0%	3	0.37%
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	2	1	1	100%	1	0	0%	2	0.28%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	2	1	1	100%	1	1	100%	3	0.33%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	2	1	1	100%	1	0	0%	2	0.28%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	2	1	1	100%	1	0	0%	2	0.4%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	2	3	3	100%	1	0	0%	4	0,5%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100%	80	20	25%	220	2.2%
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	0%	1	1	100%	1	0.25%
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	7	1	1	100%	21	21	100%		

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W!9R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W!6R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W!7R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Commented [L11]: Sub keg pengadaan mebel?

Commented [W!12R11]: Sudah ditambahkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/ d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	4	3	3	100%	13	2	15,38%	7	0.53%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	41.25	41.25
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	2	2	100%	0	0	0%	5	0.41%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100%	1	1	100%	3	0.6%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	62.5	43.75	70%	243.75	2.43%
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	14	7	7	100%	9	1	11,11%	15	0.38%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	97	6	3	3	100%	44	0	0%	6	0.06%
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20	8	4	4	100%	1	1	100%	9	0.45%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan standar Pelayanan	100	100	100	100	100%	35	15	43%	215	21.15%

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Commented [L13]: Cek kembali kegiatan dan sub kegiatan apakah ada yg tertinggal

Commented [W14R13]: Tidak ada yang tertinggal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)				
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusana Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	225	2.25%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	15	5	5	100%	0	1	20%	8	0.30%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	50	0	0	200	2
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	5	NA	NA	NA	0	0	0%	5	0.83%
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	275	2.75%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	275	2.75%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	12	6	6	100%	6	6	100%	18	0.6%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	6	3	3	100%	1	0	0%	6	0.37%

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Commented [L15]: Cek kembali di tahun 2024

Commented [W116R15]: Tidak ada subkeg ini pada 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	0	0	0%	200	2%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	0	1	0%	200	2%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	NA	4	4	100%	0	0	0%		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	3	1	1	100%	1	1	100%	3	0.42%
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	0	0	0%	200	2%
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7	4	1	1	100%	1	0	0%	2	0.28%
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	3.51	1.75	49.86%	201.75	2.02%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	100	100	100	100	100%	3.52	1.75	49.72%	28.52	2.02%

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/ d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Penugasan Kepala Daerah										
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	660	240	120	120	100%	0	0	0%	50	0.36%
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	4	2	2	100%	2	1	50%	4	0.4%
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1	1	1	100%	1	0	0%	2	0.5%
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Dea yang Baik	100	80	100	100	100%	0	0	0%	180	1.8%
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	80	100	100	100%	0	0	0%	180	1.8%

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/ d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	1	1	1	0	0	0	0%	2	1%
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	2	1	1	100%	0	0	0%	2	0.4%

Sumber Data : Kecamatan Martapura

Commented [L8]: sumber isian data?

Commented [W19R8]: Sudah diperbaiki

Commented [L5]: realisasi dari tahun 2022 (awal periode renstra lama/2021-2026) sampai dengan 2023

Commented [W16R5]: Sudah di Perbaiki

Commented [W17R5]:

Commented [L10]: Untuk program dan kegiatan tidak perlu dihitung dengan rumus, krn menggunakan target per tahun 2025

Commented [L17]: Cek kembali apakah ada sub keg ini?

Commented [W18R17]: Subkegiatan ini ada di renstra tp tidak ada di 2024 dan 2025

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah, Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Commented [L19]: cek kembali yg diberi tanda apakah sudah sesuai dengan tabel "Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Martapura Tahun 2025 s.d Triwulan I"

Commented [W!20R19]: Sudah disesuaikan

Commented [L21R19]: Beberapa sub keg masih ada yg belum sesuai, cek kembali tabel dan sesuaikan lg dengan narasi

Commented [W!22R19]: Sudah disesuaikan lagi

Urusan Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Pada Peraturan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

2.1.2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik di Kantor.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pengadaan Mebel.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan sebagai
berikut:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Sub
Kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan
sebagai berikut:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan
sebagai berikut:

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025 :

Commented [L23]: cek kembali yg diberi tanda apakah sudah sesuai dengan tabel "Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Martapura Tahun 2025 s.d Triwulan I"

Commented [W!24R23]: Sudah disesuaikan

- Kegiatan terhambat akibat tidak pastinya jadwal kegiatan bimbingan teknis yang sifatnya situasional.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum terlaksana karena adanya perubahan aplikasi penyediaan jasa dan barang sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari aplikasi tersebut dan akan dijadwalkan kembali pada triwulan berikutnya.

Faktor - faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan.
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi/tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Perencanaan kegiatan yang baik dan pelaksanaan kegiatan lebih awal dari jadwal yang ditentukan, karena menyesuaikan jadwal kegiatan dari kabupaten.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana beberapa sub kegiatan masih belum mencapai target, hal ini berimplikasi negatif terhadap capaian

Commented [L25]: Sesuaikan, sbkmnya belum ada

Commented [W!26R25]: Sudah diselesaikan

program Renstra Kecamatan Martapura.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Martapura Tahun 2025 s/d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	78	Nilai	10.832.493.670	33.36	3.453.177.498	31.89	2.668.158.732
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	11.900.000	37	2.970.000	28	2.960.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	5.763.000	7	2.400.000	6	2.400.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Lap	6.137.000	6	570.000	4	560.000

Commented [L27]: Cek kembali kolom yg kosong apakah sudah benar, dan sesuaikan dengan narasi subbab diatas dan utk target & realisasi kinerja bersumber di?

Commented [W!28R27]: Sudah benar, target dan realisasi kinerja bersumber dari e money bulan maret

Commented [L29R27]: Apakah target dan realisasi kinerja yg di monev berbeda dengan yg di sakip (triwulan 1)

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	9.549.669.000	75	2.722.578.578	73	2.158.743.357
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang	9.379.400.000	84	2.679.828.578	84	2.115.993.357
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41	Dok	169.200.000	9	42.750.000	8	42.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Lap	1.069.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	8.694.500	25	1.751.000	0	2.451.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	2.083.500	1	513.000	0	448.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	6.611.000	1	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	26.753.000	50	20.578.000	0	1.080.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu							
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	6.753.000	1	1.080.000	0	1.080.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2	Orang	20.000.000	2	20.000.000	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	180.776.500	18	58.252.250	4	23.780.060
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4	Paket	7.250.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.086.000	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	7.109.000	1	4.067.500	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	36.096.500	1	9.186.000	1	9.114.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	11.475.000	1	2.868.750	1	1.461.060

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Lap	13.600.000	1	3.340.000	1	2.240.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Lap	103.160.000	1	38.790.000	1	10.965.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	486.899.670	100	486.899.670	70	365.401.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	Unit	26.901.000	21	26.901.000	21	26.901.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	13	Unit	459.998.670	13	459.998.670	2	338.500.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Mesin Lainnya yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	435.025.000	13	123.046.000	13	108.948.241
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Lap	2.000.000	0	1.000.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	66.455.000	0	11.841.000	0	9.191.481
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	4	Lap	366.570.000	1	110.205.000	1	99.756.760

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	37.838.000	95	37.838.000	4	6.798.074
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	Unit	78.680.000	9	19.670.000	1	5.898.074
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	44	Unit	30.120.000	44	7.530.000	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	23.976.000	1	10.638.000	1	900.000
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	45.194.000	0	0	20	3.284.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	100	Persen	45.194.000	0	0	20	3.284.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	45.194.000	0	0	1	3.284.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	137.294.000	70	51.044.000	61	37.073.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	137.294.000	70	51.044.000	61	37.073.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemba ga Kema syaraka tan	36.598.000	6	36.598.000	6	28.849.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	100.696.000	1	14.446.000	0	8.224.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	4.831.257.800		1.935.573.574		1.033.383..646
	Kelurahan Sungai Paring				994.011.100		505.535.150		244.233.550
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembag a Kemasy arakata n	3.417.000	0	0	0	0
	Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	4	Unit	200.000.000	4	200.000.000	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	786.514.100	0	304.855.150	0	243.553.550
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	4.080.000	1	680.000	1	680.000
	Kelurahan Murung Keraton				754.708.000		169.288.300		78.834.564
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.478.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	300.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	447.830.000	0	168.438.300	0	78.162.564
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	3.400.000	1	850.000	1	672.000
	Kelurahan Jawa				710.045.000		122.740.500		91.067.400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.488.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	502.477.000	0	121.624.500	0	91.067.400
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	4.080.000	1	1.116.000	0	0
	Kelurahan Keraton				1.369.113.000		317.415.799		213.847.550
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6	Lembag a Kemasy	8.486.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		arakata n					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	1.131.909.000	0	308.430.599	0	213.847.550
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	28.718.000	1	8.985.200	0	0
	Kelurahan Sekumpul				932.262.000		388.184.500		176.308.290

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	11.220.000	0	0	0	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	717.508.000	0	387.301.000		176.308.290
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	3.534.000	1	883.500		0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Kelurahan Tanjung Rema Darat				890.916.160		195.970.300		105.146.892
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.153.200	0	0	0	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	338.530.860	0	4.170.000	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	546.068.900	0	191.079.500	0	105.146.892

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	2.163.200	1	720.800	0	0
	Kelurahan Pasayangan				852.703.000		236.439.025		123.945.400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembag a Kemasy arakata n	6.133.000	0	0	0	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1	Unit	200.000.000	0	29.587.000	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1	Pokmas	643.306.000	0	206.036.025	0	123.145.400

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Masyarakat di Kelurahan							
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	3.264.000	1	816.000	1	800.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	Persen	53.532.000	75	12.770.000	13	9.420.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	52.829.000	50	12.770.000	25	9.420.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	2	Lap	40.059.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Vertikal di wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Lap	12.770.000	1	12.770.000	1	9.420.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	Persen	18.980.000	100	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Lap	18.980.000	0	0	0	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	100	Persen	205.214.000	33	25.559.000	17	22.574.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	205.214.000	33	25.559.000	17	22.574.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia	120	Orang	57.820.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dok	102.880.000	1	14.324.000	1	12.764.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dok	44.514.000	1	11.235.000	0	9.810.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	38.432.000	0	2.818.000	0	2.686.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	38.432.000	0	2.818.000	0	2.686.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	1	Dok	20.002.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	6.108.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dok	10.513.000	0	2.818.000	0	2.686.000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan	1	Dok	1.809.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	dan Penegasan Batas Desa	Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							

Sumber Data : Kecamatan Martapura

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.2. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Martapura Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.3. Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Berubah

Tidak ada perubahan target indikator sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 5 Program 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2025 ini. Nama program/kegiatan dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.4. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura dengan tujuh kelurahan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar Rp. 18.109.225.970,- (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.5. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran dan perubahan terget yaitu :

1. Adanya penambahan kendaraan dinas operasional roda empat sedang biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat hanya dianggarkan 1 unit, sehingga memerlukan tambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat.
2. Luas dan banyaknya kelurahan dan desa yang melingkupi Kecamatan Martapura sehingga semakin meningkatkan mobilitas dalam melakukan monitoring dan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu belanja perjalanan dinas yang telah dianggarkan tidak memenuhi kebutuhan yang ada.
3. Adanya tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Kecamatan Martapura memerlukan biaya operasional dan anggaran dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring desa di wilayah Kecamatan Martapura.
4. Akan diadakannya kegiatan EXPO tahunan yang Pemerintah Kecamatan diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan tujuan memasarkan produk UMKM sehingga memerlukan dana untuk sewa stand dan dekorasi EXPO.
5. Adanya beberapa penyesuaian dalam perencanaan dan belanja dengan kondisi *real time* saat pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	90 Indeks	7.141.833.160	7.210.678.300	68.845.140	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Predikat SAKIP	85 Nilai	A	9.789.414.665	10.869.459.670	1.080.045.005	Penambahan Anggaran
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan		100	7.141.833.160	7.210.678.300	68.845.140	Penambahan Anggaran
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	78 Nilai	78 Nilai	9.789.414.665	10.869.459.670	1.080.045.005	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai	100 Persentase	100 Persentase	11.900.000	11.900.000	0	-

Commented [L30]: Cek kembali jumlah perkegiatan dan program

Commented [W131R30]: Sudah disesuaikan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			ketentuan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	5.763.000	5.763.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	6.137.000	6.137.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	8.850.490.995	9.549.669.000	699.178.005	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	8.680.221.995	9.379.400.000	699.178.005	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	41 Dokumen	169.200.000	169.200.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1.069.000	1.069.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	8.694.500	7.440.500	(1.254.000)	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.083.500	5.674.500	3.591.000	Menyesuaikan jumlah kegiatan dan peserta kegiatan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.611.000	1.766.000	(4.845.000)	Menyesuaikan jumlah kegiatan dan peserta kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	26.753.000	22.753.000	(4.000.000)	-
	Monitoring,	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.753.000	6.753.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	1 Orang	20.000.000	16.000.000	(4.000.000)	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	205.776.500	175.276.500	(30.500.000)	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.250.000	7.250.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.086.000	2.086.000	0	-
	Penyediaan	Jumlah Paket	Jumlah Paket	4 Paket	4 Paket	7.109.000	7.109.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	36.096.500	36.096.500	0	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.475.000	11.475.000	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	4 Laporan	4 Laporan	13.600.000	13.600.000	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	128.160.000	97.660.000	(30.500.000)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	117.998.670	486.899.670	368.901.000	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	0	26.901.000	26.901.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	117.998.670	459.998.670	342.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	435.025.000	435.025.000	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	66.455.000	66.455.000	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	366.570.000	366.570.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	132.776.000	180.496.000	47.720.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	78.680.000	126.400.000	47.720.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	30.120.000	30.120.000	0	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	23.976.000	23.976.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	45.194.000	34.574.000	(10.620.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	45.194.000	34.574.000	(10.620.000)	Pengurangan Anggaran
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	45.194.000	34.574.000	(10.620.000)	Pengurangan belanja honorarium narasumber, pembahas, moderator. pembawa acara dan panitia

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	6.781.184.160	6.863.499.300	82.315.140	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	137.294.000	168.294.000	31.000.000	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	36.598.000	0	(36.598.000)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100.696.000	139.196.000	38.500.000	Penambahan sesuai telaahan forum camat
	PROGRAM	Persentase	Persentase	100	100	71.809.000	71.809.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	Persentase				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	52.829.000	52.829.000	0	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	40.059.000	40.059.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	1 Laporan	1 Laporan	12.770.000	12.770.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	18.980.000	18.980.000	0	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	18.980.000	18.980.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	205.214.000	202.364.000	(2.850.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	205.214.000	202.364.000	(2.850.000)	Pengurangan Anggaran
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	120 Orang	120 Orang	57.820.000	54.970.000	(2.850.000)	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia-						
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	102.880.000	102.880.000	0	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44.514.000	44.514.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	38.432.000	38.432.000	0	-
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	38.432.000	38.432.000	0	-
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	20.002.000	20.002.000	0	-
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.108.000	6.108.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Pendayagunaan Aset Desa	Pendayagunaan Aset Desa						
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.513.000	10.513.000	0	-
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.809.000	1.809.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	6.643.890.160	6.724.303.300	80.413.140	Penambahan Anggaran
KELURAHAN SUNGAI PARING									
	Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Terlaksananya	Persentase Terlaksananya	100 Persentase	100 Persentase	985.011.100	1.008.860.100	23.849.000	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.417.000	3.417.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	777.514.100	801.363.100	23.849.000	Perubahan didalam dari insentif puskesmas ke belanja tagihan air, tagihan wifi dan pengadaan CCTV
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	4.080.000	4.080.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	KELURAHAN MURUNG KERATON								
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	742.708.000	795.068.000	52.360.000	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.478.000	3.478.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	300.000.000	300.000.000	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	435.830.000	488.190.000	52.360.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	3.400.000	3.400.000	0	
KELURAHAN JAWA									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	744.894.000	744.894.000	0	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.488.000	3.488.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	537.326.000	537.326.000	0	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	4.080.000	4.080.000	0	-
KELURAHAN KERATON									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	1.386.462.000	1.386.462.000	0	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	8.486.000	8.486.000	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	1.149.258.000	1.149.258.000	0	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	28.718.000	28.718.000	0	-
KELURAHAN SEKUMPUL									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	1.061.475.900	1.045.680.900	(15.795.000)	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	11.220.000	11.220.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	846.721.900	830.926.900	(15.795.000)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4 Laporan	3.534.000	3.534.000	0	-
KELURAHAN TANJUNG REMA DARAT									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	877.636.160	863.276.300	(14.359.860)	Pengurangan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	4.153.200	4.153.200	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	338.530.860	280.322.000	(58.208.860)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	532.068.900	575.917.900	43.849.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	2.883.200	2.883.200	0	-
KELURAHAN PASAYANGAN									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	845.703.000	880.062.000	34.359.000	Penambahan Anggaran
	Peningkatan	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	6 Lembaga	6.133.000	6.133.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyara katan	Kemasyara katan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	636.306.000	670.665.000	34.359.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	3.264.000	3.264.000	0	-

Sumber Data : Kecamatan Martapura

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antarpenceranaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2025, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
3. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumendokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar);
4. Perubahan RENJA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2025, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2025 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2025.

2. Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional bagi bagian-bagian di lingkup Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.
3. Renja Perubahan 2025 yang disusun ini juga diharapkan dapat ditutup dengan capaian kinerja yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Martapura, 20 Juni 2025
Camat Martapura

FAHRIAN RAHMAN, S.STP.MAP
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19790422 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA**

Jl. Sekumpul Ujung No. 1 Martapura Kode Pos 70619 Email: martapura.kecamatan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA
NOMOR : Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
2025 PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA**

CAMAT MARTAPURA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam keputusan Camat Martapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA.

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Martapura sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Martapura Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

Camat Martapura,

FAHRIAN RAHMAN, S.STP.MAP
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19790422 199711 1 001

Lampiran Keputusan Camat Martapura
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA.**

No	Jabatan di Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Staf Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	2 Orang
5.	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	2 Orang

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Camat Martapura,

FAHRIAN RAHMAN, S.STP.MAP
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19790422 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA**

Jl. Sekumpul Ujung No. 1 Martapura Kode Pos 70619 Email: martapura.kecamatan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA
NOMOR : Tahun 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA**

CAMAT MARTAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Martapura Kabupaten Banjar tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Kecamatan Martapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA KABUPATEN BANJAR
MENETAPKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TAHUN 2025.**

- KEDUA

:

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Martapura menjadi pedoman Pemerintah Kecamatan Martapura dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 2025

Camat Martapura,

FAHRIAN RAHMAN, S.STP.MAP

Pembina Tk. I / IV/b

NIP. 19790422 199711 1 001

33. Kecamatan Aranio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Aranio Tahun 2025 ini :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Aranio tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aranio agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan

Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Aranio Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.047.681.207,- (Tiga Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Aranio melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 3.132.942.207,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Aranio hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	83	74.18	76	79	103,95	NA	NA	NA	79	95%
7	1	1	2		Perencanaan, Penggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggaraan dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100%	45.16%	41.94%	93%	48%	48%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	12	10	10	100%	7	6	86%	28	58.33%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	0	0	0	0%	1	1	100%	1	50%
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2	0	0	0	0%	1	1	100%	1	50%
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00%
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	22	12	12	100%	5	5	100%	39	44.32%
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	65.52	65.52	100%	46.15	38.46%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	14	16	15	94%	15	15	100%	15	23.44%
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	48	12	12	12	100%	3	3	100%	27	56.25%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	1	1	1	100%	1	1	100%	3	60%
7	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	25	25	100%	80	80%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	1	4	4	100%	1	1	100%	6	66.67%
7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	33.33	22.22	67%	50	50%
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	3	2	67%	4	80%
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	2	0	0	0%	0	0	0%	2	40%
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	33.33	24.24	73%	29.37	29.37%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	3	4	4	100%	1	0	0%	7	46.67%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	6	6	100%	1	1	100%	10	200%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	0	0	0	0	0%	1	0	0%	0	0.00%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	2	12	12	100%	3	2	67%	16	40%	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	3	3	3	100%	1	1	100%	7	58.33%	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	1	1	1	100%	1	1	100%	3	60%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	45%	
7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100%	80	20	25%	58.97	58.97%	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	0	0	0%	1	1	100%	1	33.33%	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	20	8	8	100%	3	0	0%	28	77.78%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	41.25	41.25%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	12	100%	3	3	100%	27	56.25%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	45%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	13	13	13	100%	3	3	100%	29	55.77%
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	62.5	43.75	70%	46.85	46.85
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	11	12	12	100%	12	12	100%	35	72.92%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48	12	10	10	100%	5	1	20%	23	47.92%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	3	3	3	100%	3	1	33%	7	46.67%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	35	15	43%	43.75	43.75
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	43.75	43.75
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	12	12	12	100%	3	3	100%	27	56.25%
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	50	0	0	50	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	2	4	4	100%	4	0	0%	6	60%
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	75	75%
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	75	75%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48	12	12	12	100%	12	12	100%	36	75%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	1	5	5	100%	1	0	0%	6	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17%
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	0	0	0%	25	25%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%
7	1	4	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	0	0	0%	33.33	33.33%
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	1	3	3	100%	0	0	0%	4	66.67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	3.51	1.75	49.86%	28.52	28.52%
7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	3.51	1.75	49.72%	28.52	28.52%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	50	90	90	100%	0	0	0%	140	70%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	3	2	2	100%	1	1	100%	6	75%
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	12	12	12	100%	3	1	33%	25	37.5%
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	80	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17%
7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	80	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17%
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	0	1	1	100%	0	0	0%	1	25%
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50%

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Aranio. Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Kec Aranio Kab. Banjar 2025

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sampai triwulan I yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari 7 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 6 dokumen dengan capaian 86%
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dari 3 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 2 dokumen dengan capaian 67%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dari 1 paket yang ditargetkan pada triwulan I belum dapat terealisasi atau capaiannya 0%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dari 1 paket yang ditargetkan pada triwulan I belum dapat terealisasi atau capaiannya 0%
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari 3 paket yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 2 dokumen dengan capaian 67%
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari 3 paket yang ditargetkan pada triwulan I belum dapat terealisasi atau capaiannya 0%
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya, dari 5 unit yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 1 unit dengan capaian 20%

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari 3 unit yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 1 unit dengan capaian 33%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dari 4 laporan yang ditargetkan pada triwulan I belum dapat terealisasi atau capaiannya 0%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari 1 laporan yang ditargetkan pada triwulan I belum dapat terealisasi atau capaiannya 0%

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dari 3 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 1 dokumen dengan capaian 33%

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Adapun Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sampai triwulan I yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dari 1 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dari 0 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dari 1 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dari 0 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari 5 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I hanya terealisasi 5 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari 15 orang yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 15 orang dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari 3 dokumen yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD. dari 1 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dari 1 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari 0 orang yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 orang dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari 1 paket yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 paket orang dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari 1 paket yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 paket orang dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dari 1 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari 1 buah yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 buah dengan capaian 100%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari 3 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan dari 1 unit yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 unit orang dengan capaian 100%

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari 3 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari 3 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari 3 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari 3 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dari 12 lembaga yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 12 lembaga dengan capaian 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dari 1 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari 0 laporan yang

ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari 0 laporan yang ditargetkan pada triwulan I terealisasi 0 laporan dengan capaian 100%

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Sampai dengan Triwulan I tidak ada Program/kegiatan/Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025 yaitu :

1. Hasil IKKI masih dalam proses penilaian, dikarenakan IKKI Kecamatan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada semester ke-3 (tiga) tahun berjalan maka nilai capaian IKKI belum bisa disajikan pada Laporan Kinerja Triwulan I ini.
2. Sering terjadi gangguan pada jaringan internet dikantor kecamatan
3. Server SIPD kemendagri sering error yang menyebabkan terjadi keterlambatan pelaksanaan proses penatausahaan keuangan
4. Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.
5. Kurang mendukungnya sarana seperti tidak ada komputer, laptop yang sudah tidak layak pakai.
6. Adanya perubahan jadwal rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD oleh bidang asset
7. Belum ada usulan permintaan bimtek
8. Belum dilaksanakannya kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dikarenakan jadwal kegiatan dilaksanakan pada awal triwulan ketiga
9. Kecamatan Aranio belum memiliki Pejabat Pengadaan Barang dan belum teranggarkan honorarium Pejabat Pengadaan yang menyebabkan tertundanya realisasi pengadaan barang pada Kecamatan Aranio.
10. Keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat.
11. Menunggu informasi pelaksanaan penyelenggara/mencari hari agar jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain
12. Tidak semua aparat desa disiplin dalam kesepakatan pengumpulan laporan pelaksanaan Peningkatan Efektivitas

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal penyelesaian laporan.

13. Kurangnya akses terhadap layanan keamanan dan perlindungan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh masyarakat kecamatan.
14. Minimnya SDM yang dimiliki Kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan layanan keamanan dan perlindungan masyarakat.
15. Minimnya kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dapat menghambat pelaksanaan yang efektif.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi/tercapainya target kinerja program/kegiatan

Adapun faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah yaitu :

1. Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
2. Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
4. Adanya koordinasi dengan pemerintahan desa terkait pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
5. Adanya kerjasama yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya seperti lembaga sosial dan lembaga pendidikan dapat memperkuat upaya dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat
6. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal seperti aparat keamanan (TNI/POLRI), pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya seperti lembaga sosial dan lembaga pendidikan.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang

dibutuhkan untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Aranio.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target.
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Aranio s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
							VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7					Urusan : Unsur Kewilayahan								
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan								
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	NA	Indeks	2.784.650.007	NA	1,072,436,801	NA	886,924,715
7	1	1	2.01		Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD	100	Persen	8.222.000	45.16	2,379,400	41.94	1,313,500
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2,541,000	7	1,543,800	6	993,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	541,000	1	-	1	-
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	541,000	0	-	0	-
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	639,000	1	320,500	1	320,500
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	639,000	0	-	0	-
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	3,321,000	5	515,100	5	-
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.984.343.700	65.52	535,376,408	65.52	484,491,366
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang/Bul an	1,919,200,000	15	518,642,908	15	467,557,866

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	63,160,000	3	15,740,000	3	15,540,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	Laporan	1,983,700	1	1,393,500	1	1,393,500
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	999,900	25	999,900	25	-
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	999,900	1	999,900	1	-
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	24.420.000	33.33	1,424,000	22.22	1,424,000
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	Dokumen	4,420,000	3	1,424,000	2	1,424,000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20,000,000	0	-	0	-
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	117.726.500	33.33	56,013,500	24.24	23,405,530
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	1,976,000	1	740,500	0	-
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1,999,000	1	791,500	1	791,500
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	4,538,000	1	4,538,000	0	-
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	6,640,000	3	2,982,500	2	1,797,500

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN		TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	1,646,000	1	1,646,000	1	762,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	2,750,000	1	1,040,000	1	-
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	98.177.500	3	44,275,000	3	20,054,530
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	379,946,000	80	379,946,000	20	312,200,000
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	342,000,000	1	342,000,000	1	312,200,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	37,946,000	3	37,946,000	0	-
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	126,381,907	25	37,451,593	25	32,326,619
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2,500,000	3	700,000	3	300,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	13,341,907	3	3,341,593	3	1,226,619
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	110,540,000	3	33,410,000	3	30,800,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	142,610,000	62.5	58,846,000	43.75	31,763,700
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	109,160,000	12	30,186,000	12	23,338,700

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17	Unit	11,250,000	5	6,460,000	1	225,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	22,200,000	3	22,200,000	1	8,200,000
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	32,930,000	35	3,174,000	15	-
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1,832,000	25	-	25	-
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1,832,000	3	-	3	-
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	31,098,000	50	3,174,000	0	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8	Laporan	31,098,000	4	3,174,000	0	-
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	69,722,200	81.25	17,200,000	75	10,534,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	69,722,200	81.25	17,200,000	75	10,534,000

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN		TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga Kemasya- katan	10,534,000	12	10,534,000	12	10,534,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	59,188,200	1	6,666,000	0	-
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	9,260,000	0	-	0	-
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	4,846,000	0	-	0	-
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4,846,000	0	-	0	-
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	4,414,000	0	-	0	-
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	4,414,000	0	-	0	-
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	126,500,000	3.51	23,469,000	1.75	23,469,000

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	126,500,000	3.51	23,469,000	1.75	23,469,000
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	31,095,000	0	-	0	-
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	64,432,000	1	16,168,000	1	16,168,000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	30,973,000	3	7,301,000	1	7,301,000
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	Persen	24,619,000	0	-	0	-
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	24,619,000	0	-	0	-
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	3,934,600	0	-	0	-

Kode					URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
										TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							VOLUME	SATUAN		TK	Rp	RK	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	11	12
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3,934,600	0	-	0	-
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	3,934,600	0	-	0	-
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	3,934,600	0	-	0	-
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	3,934,600	0	-	0	-
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	4,946,000	0	-	0	-

Sumber Data : simondalev dan Laporan Kinerja TW 1 Kecamatan Aranio 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Aranio Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini tidak ada program, kegiatan dan subkegiatan yang berubah semuanya tetap sama, ada 6 Program 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Adapun nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. 3.132.942.207,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) atau ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 85,261,000,- (2.72%) dari pagu murni 2025 sebesar Rp. 3.047.681.207,-. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Adapun beberapa alasan dilakukannya perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Aranio Tahun Anggaran 2025 ini antara lain :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dari alasan dilakukan perubahan diatas maka ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, adanya penambahan pagu anggaran Rp. 2.040.000,- dikarena belum teranggarkan honor pejabat pengadaan pada kecamatan Aranio.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, adanya penambahan pagu anggaran Rp. 1.480.000,- alasan penambahan dikarenakan banyaknya kondisi lampu penerangan kantor kecamatan yang sudah rusak/harus diganti, dari jumlah yang lampu yang teranggarkan 12 buah masih ada 13 titik lampu yang yang belum terpasan dan kondisinya tidak layak pakai/rusak.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, adanya penambahan anggaran Rp. 9.376.000,- alasan penambahan adanya pengadaan pompa air dikarenakan mesin yg dimiliki rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi yang mengakibatkan kantor kecamatan tidak ada sumber air serta belanja dekorasi untuk memeriahkan hari jadi dan HUT RI berupa bendera, umbul umbul dan lampu hias.
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, adanya penambahan anggaran Rp. 39.500.000,- berupa perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti undangan dan kegiatan sekretariat Kecamatan dan kegiatan PKK.
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adanya penambahan anggaran Rp. 9.621.000,- alasan perubahan adalah untuk pengadaan alat I unit scanner, hal ini diperlukan sekali dalam upaya

mempermudah perjaan dalam pengalihan data atau alih media data ke elektronik.

- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, adanya penambahan anggaran Rp. 8.000.000,- alasan perubahan adalah untuk kegiatan EXPO Tahunan serta memfasilitasi kunjungan ke desa dan mendukung operasional kegiatan yang menggunakan sarana transportasi air/angkutan air
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, adanya penambahan anggaran Rp. 47.720.000,- alasan perubahan adalah karena saat ini kecamatan memiliki 2 (dua) unit Mobil Operasional, sedangkan untuk Biaya Pemeliharaannya hanya untuk 1 (satu) unit saja.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, adanya penambahan anggaran Rp. 11.524.000,- alasan dilakukan perubahan untuk kegiatan perbaikan admintrasi desa melalui pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk penyusunan APBDes pada 12 desa.

Untuk keterangan lebih jelas terkait uraian diatas dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,54	4,54	2,880,350,127	3,132,942,207	252,592,080	8.06%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	87 Nilai	263,031,200	274,555,200	11,524,000	4.20%	
Meningkatnya kinerja Penyelenggara aan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	82 Nilai	82 Nilai					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP Kecamatan	78/B	78/B	2,617,318,927	2,858,387,007	241,068,080	8.43%	
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN				2,880,350,127	3,132,942,207	252,592,080	8.06%	
KECAMATAN				2,880,350,127	3,132,942,207	252,592,080	8.06%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	78 Nilai	78 Nilai	2,617,318,927	2,858,387,007	241,068,080	8.43%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 persen	100 Persen	8,222,000	8,222,000	0	0.00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	10 Dokumen	2,541,000	2,541,000	0	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	541,000	541,000	0	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	541,000	541,000	0	0.00%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	639,000	639,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	639,000	639,000	0	0.00%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	20 Laporan	3,321,000	3,321,000	0	0.00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	2,137,012,620	1,986,383,700	150,628,920	-7.58%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan	2,071,868,920	1,919,200,000	-152,668,920	-7.95%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	63,160,000	65,200,000	2,040,000	3.13%	belum teranggarkan honor pejabat pengadaan pada kecamatan Aranio
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,983,700	1,983,700	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	999,900	999,900	0	0.00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	999,900	999,900	0	0.00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	24,420,000	20,420,000	-4,000,000	- 19.59%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4,420,000	4,420,000	0	0.00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	20,000,000	16,000,000	-4,000,000	- 25.00%	pelaksanaan efisiensi

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	139,726,500	128,082,500	-11,644,000	-9.09%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1,976,000	3,456,000	1,480,000	42.82%	banyaknya kondisi lampu penerangan kantor kecamatan yang sudah rusak/harus diganti, dari jumlah yang teranggarkan 12 buah masih ada 13 titik lampu yang yang belum terpasan dan kondisinya tidak layak pakai/rusak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1,999,000	1,999,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10 Paket	4,538,000	13,914,000	9,376,000	67.39%	adanya pengadaan pompa air dikarenakan mesin yg dimiliki rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi yang mengakibatkan kantor kecamatan tidak ada sumber air serta belanja dekorasi untuk memeriahkan hari jadi dan hut RI berupa bendera, umbul umbul dan lampu hias
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	12 Paket	6,640,000	6,640,000	0	0.00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1,646,000	1,646,000	0	0.00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2,750,000	2,750,000	0	0.00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120,177,500	97,677,500	-22,500,000	- 23.03%	pelaksanaan efisiensi

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	37,946,000	389,567,000	351,621,000	90.26%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	342,000,000	342,000,000	100.00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	37,946,000	47,567,000	9,621,000	20.23%	untuk pengadaan alat I unit scanner, hal ini diperlukan sekali dalam upaya mempermudah perjaan dalam pengalihan data atau alih media data ke elektronik.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	126,381,907	134,381,907	8,000,000	5.95%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	2,500,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,341,907	13,341,907	0	0.00%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	110,540,000	118,540,000	8,000,000	6.75%	untuk kegiatan EXPO Tahunan serta memfasilitasi kunjungan ke desa dan mendukung operasional kegiatan yang menggunakan sarana transportasi air/angkutan air
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	142,610,000	190,330,000	47,720,000	25.07%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	12 Unit	109,160,000	156,880,000	47,720,000	30.42%	karena saat ini kecamatan memiliki 2 (dua) unit Mobil Operasional, sedangkan untuk Biaya Pemeliharaannya hanya untuk 1 (satu) unit saja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	13 Unit	11,250,000	11,250,000	0	0.00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	22,200,000	22,200,000	0	0.00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 Persen	100 Persen	32,930,000	32,930,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	1,832,000	1,832,000	0	0.00%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1,832,000	1,832,000	0	0.00%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	31,098,000	31,098,000	0	0.00%	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8 Laporan	31,098,000	31,098,000	0	0.00%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	69,722,200	81,246,200	11,524,000	14.18%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 Persen	69,722,200	81,246,200	11,524,000	14.18%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasya- katan	12 Lembaga Kemasya- katan	10,534,000	10,534,000	0	0.00%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	59,188,200	70,712,200	11,524,000	16.30%	kegiatan perbaikan admintrasi desa melalui pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk penyusunan APBDes pada 12 desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	9,260,000	9,260,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	4,846,000	4,846,000	0	0.00%	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4,846,000	4,846,000	0	0.00%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	2 Laporan	100 Persen	4,414,000	4,414,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4 Laporan	4,414,000	4,414,000	0	0.00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	126,500,000	126,500,000	0	0.00%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	126,500,000	126,500,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	31,095,000	31,095,000	0	0.00%	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	64,432,000	64,432,000	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	30,973,000	30,973,000	0	0.00%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persen	100 Persen	24,619,000	24,619,000	0	0.00%	
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	24,619,000	24,619,000	0	0.00%	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3,934,600	3,934,600	0	0.00%	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu				Alasan Perubahan/ Keterangan
		Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	%	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3,934,600	3,934,600	0	0.00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3,934,600	3,934,600	0	0.00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3,934,600	3,934,600	0	0.00%	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3,934,600	3,934,600	0	0.00%	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,946,000	4,946,000	0	0.00%	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Aranio Pada Aplikasi SIPD RI Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Aranio Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aranio. Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Aranio. secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN :

- SK pembentukan tim
- Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan SIPD RI RKPD

34. Kecamatan Sungai Tabuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
3. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/410/PPE-Bapelitbang tentang Penetapan Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melaksanakan 7 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.102.596.333,00,- (Lima Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Sungai Tabuk melaksanakan 7 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp5.244.435.833,00 (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat juta Empat ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus tiga Puluh Tiga Rupiah)

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	88,31	81,24	76	92,29	1,21	0	0	0	78	88%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45	12	13	13	100%	5	5	100%	30	0,67
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46	20	21	21	100%	6	6	100%	47	1,02
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	834	18	273	273	100%	84	84	100%	375	0,45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	12	12	12	100%	3	3	100%	27	1,13
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	1	1	1	100%	1	1	100%	3	0,60
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	1	4	4	100%	1	1	100%	6	2,00
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	1	100%	3	0,60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13	3	3	3	100%	3	0	0%	6	0,46
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	3	4	4	100%	1	0	0%	7	0,29
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35	1	4	4	100%	1	1	100%	6	0,17
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	1	4	4	100%	1	1	100%	6	0,08
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	1	1	1	100%	1	1	100%	3	0,27
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	388	1	1	1	100%	3	1	33%	3	0,01

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	0,45
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	0	0	0%	2	2,00
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	3	8	8	100%	0	0	0%	11	0,55
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	20	8	8	100%	3	0	0%	28	2,80
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1	1	1	100%	1	0	0%	2	1,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	0,45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100%	3	3	100%	27	0,45
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	100%	3	3	100%	27	1,13
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	11	11	11	100%	4	4	100%	26	0,87
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26	12	10	10	100%	5	0	0%	22	0,85
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%	3	3,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1	5	5	100%	0	0	0%	6	0,60
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105	21	21	21	100%	21	21	100%	63	0,60
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	5	5	5	100%	0	0	0%	10	1,00
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,12
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,22
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,13
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	612	200	200	200	100%	0	0	0%	400	0,65
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	3	3	3	100%	1	1	100%	7	0,44
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	1	4	4	100%	1	1	100%	6	3,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	1%
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	65	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,03
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,03
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	65	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,03
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	65	1	1	1	100%	0	0	0%	2	0,03

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Kistrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
- Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan 87 sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu arahan Camat
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK dan persetujuan PPTK
- Pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena pengadaan menggunakan proses e-katalog versi 6 dan masih dalam proses sosialisasi dan Kecamatan Sungai Tabuk belum mendaftarkan Akun PA dan Bendahara di e-naproc
- Pada Sub kegiatan Pengadaan Mebel Lainnya karena pengadaan menggunakan proses e-katalog versi 6 dan Kecamatan Sungai Tabuk belum mendaftarkan Akun PA dan Bendahara di e-naproc

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi/ tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang

ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sungai Tabuk

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan
- d. Adanya upaya yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, setiap ASN harus memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI TABUK TAHUN 2025 S.D TRIWULAN I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		DPA	TK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5.244.435.833		1.633.874.143		831.207.208
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78	Indeks	3.786.546.333	0	1.344.421.393	0	793.215.208
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	31.670.000	25	13.781.000	25	6.134.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	16.470.000	8	8.131.000,00	3	3.288.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	15.200.000	6	5.650.000,00	3	2.846.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	2.697.546.000	25	837.451.393	25	674.348.936
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	247	Orang/Bulan	2.633.900.000	84	822.661.393	84	659.558.936
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	59.160.000	3	14.790.000	3	14.790.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	2	Laporan	4.486.000	2		0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerahyang Tersusun	100	Persen	16.000.000	25	3.750.000	25	3.750.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1.000.000	1		0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	15.000.000	3	3.750.000	3	3.750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	27.400.000	25	830.000	25	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	3.400.000	1	830.000	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	24.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	167.190.000	25	54.421.000	25	24.453.530
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	5.790.000	1	1.930.000	1	1.800.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	3.740.000	0	1.084.000	0	664.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	27.500.000	1	9.298.000	1	5.700.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	5.000.000	1	1.300.000	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8.160.000	3	2.109.000	3	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	117.000.000	3	38.700.000	3	16.289.530
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	457.009.000	25	342.000.000	25	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	342.000.000		342.000.000	1	342.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11	Unit	24.816.000	1	-	0	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9	Unit	90.193.000	0	-	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	248.389.203	25	70.968.000	25	61.975.097
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000	3	1.030.000	3	970.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	54.559.203	3	13.668.000	3	7.225.097
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	189.830.000	3	56.270.000	3	53.780.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	141.342.130	25	21.220.000	25	22.553.145
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	96.840.000	4	17.850.000	1	14.276.145
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	26	Unit	17.060.000	6	3.370.000	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	27.442.130	0	-	0	8.277.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	51.010.000	25	16.884.000	25	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	42.370.000	0	16.884.000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	8.640.000	25	0	25	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	8.640.000	0	0	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	124.680.000	100	24.524.000	25	20.292.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	124.680.000	25	24.524.000	25	20.292.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	Kelembagaan Kemasyarakatan	20.400.000	21	20.400.000	21	20.292.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	104.280.000	0	4.124.000	0	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	14.975.000	25	-	25	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	9.315.000	25	-	25	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	5.885.000	0	-	0	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	2	Laporan	3.430.000	0	-	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	5.660.000	25	0	25	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	5.660.000	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	265.255.500	25	26.882.500	25	17.700.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	265.255.500	25	26.882.500	2	17.700.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	87.332.500	0	1.995.000	0	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dokumen	137.123.000	1	13.742.500	1	13.800.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	40.800.000	3	11.145.000	1	3.900.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	31.866.000	25	4.275.000	25	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	31.866.000	25	4.275.000	25	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	4.080.000	0	-	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	4.080.000	0	-	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	19.626.000	3	4.275.000	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	4.080.000	0	-	0	0
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	970.103.000	25	216.887.250	25	-
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	970.103.000	25	216.887.250	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Pokmas/Ormas	200.000.000	1	-	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	767.147.200	0	216.887.250	0	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	2.955.800	0	-	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya di antaranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sungai Tabuk. Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah **Rp. 5.244.435.833**, (Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena adanya pendampingan Penyusunan Renstra di Jogjakarta dan Asistensi Penyusunan AKIP di Jakarta serta melaksanakan koordinasi serta mendampingi kegiatan TP PKK Kabupaten (Sesuai dengan Telaahan Staf Ketua Forum Camat)
2. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional karena anggaran tidak mencukupi (hanya sampai bulan Oktober) mengingat mobilitas Camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayah kerja dan Penambahan operasional mobil Sekretaris Camat
3. Adanya Penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk kegiatan APDES dan partisipasi kegiatan Expo (Sesuai dengan Telaahan Staf Ketua Forum Camat)

4. Adanya Penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Penambahan Pagu Anggaran Untuk Kegiatan MTQ yaitu berupa uang saku Kafilah sebanyak 60 orang, honor official sebanyak 10 orang, belanja makan dan minum untuk pemantapan peserta MTQ dan teknikal meeting serta kelengkapan lainnya yang tidak teranggarkan di DPA Murni
5. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bertambah pagu anggaran untuk pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 2 dan perjalanan Dinas.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	87 Indeks	5.102.596.333	5.244.435.833	141.839.500	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	78 Nilai	BB	3.766.846.333	3.786.546.333	19.700.000	Pengurangan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78 Nilai	78 Nilai	3.766.846.333	3.786.546.333	19.700.000	Pengurangan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	31.670.000	31.670.000	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	16.470.000	16.470.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	15.200.000	15.200.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	2.682.246.000	2.697.546.000	15.300.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	247 Orang/ Bulan	2.618.600.000	2.633.900.000	15.300.000	Penambahan Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sesuai edaran BPKPAD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	59.160.000	59.160.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.486.000	4.486.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	16.000.000	16.000.000	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	33.400.000	27.400.000	-6.000.000	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000	3.400.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	30.000.000	24.000.000	-6.000.000	Pengutangan Anggaran Bimtek karena Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	185.190.000	167.190.000	-18.000.000	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.790.000	5.790.000	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.740.000	3.740.000	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	27.500.000	27.500.000	0	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8.160.000	8.160.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000	117.000.000	-18.000.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	457.009.000	457.009.000	0	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	342.000.000	342.000.000	0	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	24.816.000	24.816.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	90.193.000	90.193.000	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	248.389.203	248.389.203	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.559.203	54.559.203	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	189.830.000	189.830.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	112.942.130	141.342.130	28.400.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	68.440.000	96.840.000	28.400.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	17.060.000	17.060.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.442.130	27.442.130	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	51.010.000	51.010.000	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	42.370.000	42.370.000	0	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	42.370.000	42.370.000	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persentase	100 Persentase	8.640.000	8.640.000	0	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	8.640.000	8.640.000	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	99.680.000	124.680.000	25.000.000	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	99.680.000	124.680.000	25.000.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	20.400.000	20.400.000	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	79.280.000	104.280.000	25.000.000	Penambahan Anggaran dari subkegiatan lain dan penambahan sesuai telaahan forum camat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	14.975.000	14.975.000	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	9.315.000	9.315.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.885.000	5.885.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3.430.000	3.430.000	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	5.660.000	5.660.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	5.660.000	5.660.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	192.965.000	265.255.500	72.290.500	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	192.965.000	265.255.500	72.290.500	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia-	200 Orang	200 Orang	87.332.500	87.332.500	0	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	64.832.500	137.123.000	72.290.500	Penambahan Pagu Anggaran Untuk Kegiatan MTQ yaitu berupa uang saku Kafilah sebanyak 60 orang, honor official sebanyak 10 orang, belanja makan dan minum untuk pemantapan peserta MTQ dan teknikal meeting serta kelengkapan lainnya yang tidak teranggarkan di DPA Murni (Karena

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									kesalahan Sum di Excel)-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	40.800.000	40.800.000	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	31.866.000	31.866.000	0	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	31.866.000	31.866.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000	4.080.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000	4.080.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	19.626.000	19.626.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000	4.080.000	0	-
KELURAHAN SUNGAI LULUT									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	945.254.000	970.103.000	24.849.000	Penambahan Anggaran
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persentase	100 Persentase	945.254.000	970.103.000	24.849.000	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.955.800	2.955.800	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelruahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	2 pokmas/ Ormas Unit	2 pokmas/ Ormas Unit	200.000.000	200.000.000	0	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ Ormas Pokmas / Ormas	3 pokmas/ Ormas Pokmas / Ormas	742.298.200	767.147.200	24.849.000	Penambahan Anggaran Kendaraan Dinas Operasional

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kec. Sungai Tabuk Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sungai Tabuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Sungai Tabuk, 20 Juni 2025

Camat Sungai Tabuk

H. TALU-IQURRAHMAN, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19670813 199404 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Satuan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (SRKPD) serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi;

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana program dan Kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh Tahun 2025 ini :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa perubahan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Aluh Aluh dan juga ada perubahan sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur adanya indikator kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian seluruh indikator di level sub

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE/Bapelitbang tentang Penetapan Pagu Indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 48);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 64);
17. Peraturan Bupati Banjar tanggal 27 Maret 2025 Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perbuahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor .

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Untuk menyesuaikan pagu indikatif sesuai Surat Edaran Bupati Banjar dengan nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aluh Aluh agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.778.945.450,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah*) Pada saat perubahan Kecamatan Aluh Aluh melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.218.787.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Tujuh Ribu Rupiah*) Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan

(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Aluh Aluh sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada

triwulan I tahun 2025 :

- Pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karena sedang berjalan/proses realisasinya dan kendala tersebut belum terkumpulnya laporan [ertanggung jawaban dari rekanan.
- Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN teralisasi sampai 52 saja target 182 orang/bulan sampai bulan April (Triwulan I), Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab.
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab.
- Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pegawai terkendala dikarenakan adanya saat ini masih dilakukan tahapan penyusunan laporan kegiatan.
- Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realiasi mencapai 3 dari 12 yang ditargetkan karena sedang berproses atau belum terlaksananya sub kegiatan pada Triwulan I.
- Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel teralisasi 54%, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi 81% keuangan fisiknya.
- Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab.
- Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dikarenakan belum mencapai maksimal pelaksanaan sub kegiatan di Triwulan 1 maka akan dilaksanakan di Triwulan Berikutnya.

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung dokumen dari rekanan penanggung jawab.
- Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, belum memenuhi target yang ditargetkan karena belum adanya kegiatan yang dilaksanakan
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab karena belum terlaksanakan.
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab karena sedang masih proses dan dilanjutkan atau dilaksanakan di Triwulan Berikutnya.
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai

Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia , Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab karena sedang masih proses dan dilanjutkan atau dilaksanakan di Triwulan Berikutnya.

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa kendala belum terkumpulnya/belum siapnya data pendukung laporan dari rekanan penanggung jawab karena sedang masih proses dan dilanjutkan atau dilaksanakan di Triwulan Berikutnya.

2.1.2. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program /kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Aluh Aluh.

2.1.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN ALUH ALUH TAHUN 2025 S/D TRIWULAN I

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
							TRIWULAN I				TRIWULAN I			
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp			RK	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8			11	12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh	80	Persen	3.218.935.650,00	78	3.218.935.650,00				762.877.679		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	19.636.000,00	78	19.636.000,00			0	0		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5.003.000,00	1	5.003.000,00			1	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.360.000,00	1	2.360.000,00			1	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.360.000,00	1	2.360.000,00			0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.360.000,00	1	2.360.000,00			1	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Laporan	2.360.000,00	1	2.360.000,00			0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.833.000,00	0	2.833.000,00			0	0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2	Laporan	2.360.000,00	2	2.360.000,00			0	0		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025		TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
										TRIWULAN I				TRIWULAN I			
										TK	Rp			RK	Rp		
1	2			3	4	5	6	7	8					11	12		
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.919.244.000,00	78	1.919.244.000,00						362.301.195,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	Orang/Bulan	1.854.300.000,00	182	1.854.300.000,00					52	355.630.695,00		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	48.080.000,00	4	48.080.000,00					1	6.670.500,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2.460.000,00	1	2.460.000,00					0	0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	14.404.000,00	18	14.404.000,00					1	0		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	16.495.000,00	100	16.495.000,00					0	0		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	14.480.000,00	1	14.480.000,00					0	0		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	2.015.000,00	4	2.015.000,00					0	0		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	45.360.000,00	100	45.360.000,00					0	0		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	1	Dokumen	15.360.000,00	1	15.360.000,00					0	0		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
								TRIWULAN I				TRIWULAN I			
					VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp			RK	Rp		
1	2			3	4	5	6	7	8			11	12		
				dan Penilaian Kinerja Pegawai											
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	30.000.000,00	2	30.0000,00			0	0		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	245.227.900,00	100	245.227.900,00				34.408.030,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7.392.000,00	3	7.392.000,00			3	0		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	41.133.000,00	1	41.133.000,00			0	16.682.000,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	17.479.000,00	1	14.479.000,00			0	4.079.000,00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.025.400,00	1	5.025.400,00			0	462.500,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	174.198.500,00	12	134.912.500,0			3	13.184.530,00		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	541.562.000,00	100	455.659.000,00				323.400.000,00		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	49.600.000,00	10	49.600.000,00			0	0		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	491.962.000,00	14	491.962.000,00			0	323.400.000,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	215.151.000,00		215.151.000,00				26.737.454,00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	20.000.500,00		20.000.500,00			3	2.337.454,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	20.000.500	12	20.000.500			3	2.337.454,00		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
							TRIWULAN I				TRIWULAN I			
				VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp			RK	Rp		
1	2			4	5	6	7	8			11	12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	175.150.000,00	12	175.150.000,00			24.400.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	100	persen	261.852.000,00	100	261.852.000,00			16.031.000,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	83.560.000,00	7	83.560.000,0000			16.031.000,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	26.800.000,00	25	26.800.000,00		0	0		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	105.899.750,00	0	105.899.750,00		0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh	100	Persen	126.601.000	82	115.362.000,00			14.250.000,00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	23.400.000,00	100	23.400.000,00		0	0		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	laporan	5.675.000,00	1	5.675.000,00		0	0		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	17.725.000,00	6	17.725.000,00		0	0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	persen	5.640.000	100	5.640.000		0	0		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025		TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
										TRIWULAN I				TRIWULAN I			
										TK	Rp			RK	Rp		
1	2			3	4	5	6	7	8					11	12		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	5.640.000,00	1	5.640.000,00					0	0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	86.322.000,00	100	86.322.000,00					0	0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	86.322.000,00	0	86.322.000,00					0	14.250.000,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	174.193.800,00	100	174.193.800,00					0	28.791.600,00		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	persen	131.963.800,00	100	131.963.800,00					0	28.791.600,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19	Lembaga Kemasyarakatan	51.348.800,00	19	51.348.800,00	0				0	28.791.600,00		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19	laporan	80.615.000,00	19	80.615.000,00						0		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	persen	42.230.000,00	100	42.230.000,00						0		
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	keluarga	20.215.000,00	50	20.215.000,00						0		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	100	Persen	52.440.000,00	100	52.440.000,00						0		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
							TRIWULAN I				TRIWULAN I			
				VOLUME	SATUAN		TK	Rp			RK	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8			11	12		
			masyarakat di kecamatan Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas											
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	persen	31.192.000,00	100	31.192.000,00				0		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	31.192.000,00	1	31.192.000,00				0		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	6.000.000,00	1	6.000.000,00				0		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	persen	21.248.000,00	100	21.248.000,00				0		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	21.248.000,00	1	21.248.000,00				0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Angka stabilitas keamanan lokal	100	Persen	188.323.800,00	100	188.323.800,00			0	2.280.000,00		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	persen	188.323.800,00	100	188.323.800,00			0	2.280.000,00		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
								TRIWULAN I				TRIWULAN I			
					VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp				RK	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8			11	12		
			Pembinaan Wawasan Bangsa dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Bangsa dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	orang	100.228.000,00	50	100.228.000,00				0		
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	21.248.000,00	2	21.248.000,00				0		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	45.599.800,00	1	45.599.800,00			0	2.280.000,00		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	23.690.200,00	100	23.690.200,00				0		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	persen	23.690.200,00	100	23.690.200,00				0		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	6.227.800,00	1	6.227.800,00				0		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	6.228.300,00	1	6.228.300,00				0		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas	1	Dokumen	6.006.100,00	1	6.006.100,00				0		

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN			
								TRIWULAN I				TRIWULAN I			
					VOLUME	SATUAN	DPA	TK	Rp			RK	Rp		
1	2			3	4	5	6	7	8			11	12		
				Kepala Desa dan Perangkat Desa											
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	5.228.000,00	1	5.228.000,00				0		

Sumber data : Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Aluh Aluh Tahun 2025 (SIMONDALEV)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, tidak ada perubahan indikator kinerja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Namun, ada perubahan pada target indikator kinerja dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan item belanja.

4.1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

4.2. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.218.787,000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). dengan rincian anggaran **Kecamatan Aluh Aluh**. Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

4.3. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,
 - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena kekurangan gaji dan TPP ASN di skpd kecamatan Aluh Aluh karna adanya mutasi masuk PNS per Oktober 2024 sebab Hukdis, Kenaikan gaji PNS 8%., kekurangan Belanja PPH saat Gaji dan TPP THR serta antisipasi Kenaikan gaji Berkala 2025

- 1.2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan Pengadaan Kend R2 sebanyak 3 buah 2 buah penambahan anggaran sesuai TS terlampir dan 1 buah Pergeseran untuk PNS jarak ke kantor + 45 km TS terlampir dan pergeseran pembelian Laptop high
- 1.3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena Penambahan Anggaran sesuai Telaahaan staf Pemeliharaan R4 mobil seckam dan BBM R4 camat dan pergeseran BBM speedboat.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena Pergeseran anggaran kekurangan service ac kantor dan service genset.
- 1.4 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena pergeseran anggaran perjadi dalam dan luar daerah banyak sppd asn yang tidak terbayar karna anggaran tidak mencukupi.
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilakukan perubahan karena penambahan anggaran monev APBDes dan Operasional Expo pameran sesuai TS.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dilakukan perubahan pagu perubahan di tiadakan menjadi Nol anggaran.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan perubahan dikarenakan Pergeseran anggaran Penambahan Operasional Kegiatan Upacara HUT RI di Kecamatan

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Pra kiran Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Aluh Aluh													-	4.156.985.700,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN													-	4.156.985.700,00			
	7	01				KECAMATAN													-	4.156.985.700,00			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				100% 85 Nilai		3.778.945.450	3.778.945.450	3.218.935.659						-	3.609.500.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100 Persen	100 Persen	19.636.000,00	19.636.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reformasi Politik, Hukum ,dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			20.600.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.003.000,00	5.003.000,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reformasi Politik, Hukum ,dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			5.100.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

																	cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital					
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.360.000,00	2.360.000,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			2.500.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.360.000,00	2.360.000,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			2.500.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.360.000,00	2.360.000,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital					KECAMAT AN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.833.000,00	2.833.000,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital				3.000.000,00	KECAMAT AN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.360.000,00	2.360.000,00,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital				2.600.000,00	KECAMAT AN ALUH-ALUH

																	erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital					
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.480.000,00	14.480.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntab el dan Kolabora tif Berbasis Digital			15.000.000,00	KECAMAT AN ALUH ALUH
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 laporan	4 laporan	2.015.000,00	2.015.000,00		Kab. Banjar , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntab el dan Kolabora tif Berbasis Digital			2.500.000,00	KECAMAT AN ALUH ALUH
	7	01	01	2.05		Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	39.360.000,00	39.360.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha			55.000.000,00	KECAMAT AN ALUH- ALUH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	dan Pe nyelud upan							
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	187.727.909, 00	187.727.9 09,00			PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital	Eleme n Masya rakat, Intern al Kecam atan		280.000.0 00,00	KECAMAT AN ALUH- ALUH	
	7	0 1	0 1	2.0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	7.392.000,00	7.392.000 ,00			Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital			4.500.000 ,00	KECAMAT AN ALUH ALUH
	7	0 1	0 1	2.0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.479.000,0 0	17.479.00 0,00			Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang			41.133.00 0,00	KECAMAT AN ALUH ALUH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Konsultasi SKPD										Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian	n Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital					
	7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
							Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah				100 Persen	100 Persen	541.562.000,000	541.562.000,000		Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			349.567.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah paket mabel yang disediakan				5 Unit	5 Unit	49.600.000	49.600.000		Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			50.125.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	491.962.000	491.962.000	505.862.000,00	Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum ,dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				149.956.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
							Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	215.151.000,00	215.151.000,00				Mempertuak Reformasi Politik, Hukum ,dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan dan Element Masyarakat			252.001.500,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.500	20.000.500	8.668.500,00	Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum ,dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi dan Pe	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				22.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

																	cegahan dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Kelompok Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit	7 Unit	83.560.000,00	83.560.000,00	135.280.000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertu Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertu Pencegahan dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			106.160.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	26.800.000,00	26.800.000,00	40.572,000,00	Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertu Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertu Pencegahan dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			25.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				2 Unit	2 Unit	105.899.750,00	105.899.750,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital			300.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
							Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana				100 %	100 Persen	115.362.000,00	115.362.000,00									146.803.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100%	100 persen	23.400.000,00	23.400.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			30.171.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				1 Laporan	1 Laporan	5.675.000,00	5.675.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat			9.668.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

							Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkoba, Judi dan Pe nyelud upan	Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolabora tif Berbasis Digital					
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokume n	17.725.000,00	17.725.000,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkoba, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningkatan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaborat if Berbasis Digital			20.503.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	02	2.02		Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	
							Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100 persen	100 persen	5.640.000,00	5.640.000,00		Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkoba, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningkatan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolabora tif Berbasis Digital			6.632.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	02	2.04	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1 laporan	5.640.000,00	5.640.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuakan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				6.632.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100 %	100 Persen	174.193.800,00	174.193.800,00	198.193.800,00								187.584.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		
							Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				100 Persen	100 Persen	131.963.800,00	131.963.800,00		Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuakan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan dan Element Masyarakat		138.402.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					19 Lembaga Masyarakat	19 Lembaga Masyarakat	51.348.800,00	51.348.800,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuakan Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuakan Pencegahan dan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang			65.000.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

							dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntab el dan Kolabora tif Berbasis Digital						
	7	01	03	2.06.11		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	20.215.000	20.215.000			Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntab el dan Kolabora tif Berbasis Digital				25.000.000,00	KECAMAT AN ALUH-ALUH
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan				100 %	100 Persen	58.440.000,00	58.440.000,00	27.248.000,00								66.267.000,00	KECAMAT AN ALUH-ALUH
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	37.192.000,00	37.192.000,00	6.000.000,00	Kab. Banjar , Aluh Aluh Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital	Intern al Kecam atan dan Eleme n Masya rakat			45.000.000,00	KECAMAT AN ALUH-ALUH

																	Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	Akuntab el dan Kolabora tif Berbasis Digital					
	7	0 1	0 4	2.0 2	0 0 0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	21.248.000,0 0	21.248.00 0,00		Kab. Banjar , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital	Intern al Kecam atan dan Eleme n Masya rakat		21.267.00 0,00	KECAMAT AN ALUH- ALUH
5	7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
							Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 Persen	188,323.800, 00	188,323.8 00,00	204.321.800	Kab. Banjar , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital			224.193.0 00,00	KECAMAT AN ALUH- ALUH
	7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	188.323.800, 00	188.323.8 00,00	204.321800	Kab. Banjar , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik			224.193.0 00,00	KECAMAT AN ALUH- ALUH

																cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital						
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	100.228.000,00	100.228.000,00	110.203,000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan dan Element Masyarakat		136.547.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	21.248.000,00	21.248.000,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan dan Element Masyarakat		21.330.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	05	2.01	00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

					07																		
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	21.248.000,00	21.248.000,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital			21.756.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.599.800,00	45.599.800,00		Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan dan Elemen Masyarakat		44.560.000,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
							Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 Persen	23.690,200,00	23.690,200,00								36.410.200,00	KECAMATAN ALUH-ALUH
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
							Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	23.690.200,00	23.690.200,00		Kab. Banjar, Aluh Aluh Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuak Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertuak	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			36.410.200,00	KECAMATAN ALUH-ALUH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	1 Dokume n	6.006.100,00	6.006.100 ,00		Kab. Banjar , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital			6.270.300, 00	KECAMAT AN ALUH- ALUH
	7	0 1	0 6	2.0 1	0 0 0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawar atan Desa					1 Dokumen	1 Dokume n	5.228.000,00	5.228.000 ,00		Kab. Banjar , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Reform asi Politik, Hukum ,dan Birokra si, serta Memp erkuat Pen cegaha n dan Pembe rantasa n Korupsi , Narkob a, Judi dan Pe nyelud upan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintaha n Yang Fokus Pada Pelayana n Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabe l dan Kolaborat if Berbasis Digital			4.758.000, 00	KECAMAT AN ALUH- ALUH
	J U M L A H													3.778.945.450, 00	3.778.945 .450,00	3.218.787.000							3.721.44 5.450	

Sumber data: dari SIMONDALEV dan Kartu Kendali Gabungan pada Kecamatan Aluh Aluh di SIPD Tahun 2025 (Perubahan Inputan Renja)

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aluh Aluh Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Aluh Aluh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
 2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.
- c. Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Aluh Aluh , April 2025
Camat Aluh Aluh



Aditya Yudi Dharma, SSTP
Pembina / IV a

NIP.19860313 200412 1 001

36. Kecamatan Mataraman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/528/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
 25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
 26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
 27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
 28. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Mataraman tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.464.909.548,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Mataraman tetap melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 3.572.298.093 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delpan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Mataraman hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	77	85,61	75	89,28	119,04	25	25	100%	76	98,70%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggraha, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggrahan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52	20	13	13	100%	2	2	100%	35	67,31%
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38	NA	17	17	100%	5	5	100%	22	57,90%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28	27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27	96,4285714
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	11	14	14	100%	14	14	100%	14	93,3333333
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	91	NA	40	40	100%	10	10	100%	50	54,94%

7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	NA	12	12	100%	3	2	66,67%	14	38,89%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	NA	12	12	100%	3	3	100%	15	41,67%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	NA	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	NA	NA	NA	NA	2	0	0%	0	0%
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	NA	42	42	100%	8	8	100%	50	263,16%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24	100%
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	NA	1	1	100%	1	0	0%	1	33,33%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		24	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	NA	3	3	100%	3	3	100%	6	37,50%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24	100%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	NA	3	3	100%	3	3	100%	6	37,50%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang	Persentase	100	200	100	100	100%	25	25	100%	325	325%

						Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD Penunjang Urutan Perangkat Daerah										
7	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	14	7	7	100%	5	5	100%	26	63,41%
7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	100%
7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	6	8	8	100%	9	1	11,11%	15	50%
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12	0	1	1	100%	0	0	0%	1	8,33%
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	1	100%	0	0	0%	1	33,33%
7	1	2				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	2	2.04			Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11	11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11	100%
7	1	2	2.04	3		Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	NA	6	6	100%	1	1	100%	7	43,75%
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%

					dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	NA	4	4	100%	1	0	0%	4	40%	
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	100%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	1280	640	320	320	100%	0	0	0%	960	75%	

					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	0	0	0	0%	1	1	100%	1	100%	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		8	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	100%	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20	NA	12	12	100%	3	3	100%	15	75%	
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100%	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	0	0	0	0%	1	1	100%	1	50%	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		21	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	100%	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	NA	1	1	100%	1	1	100%	2	50%	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		15	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	100%	
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	3	NA	1	1	100%	0	0	0%	1	33,33%	

[illegible]

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Untuk realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan I, **tidak ada**, realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran terpenuhi sesuai target yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dikarenakan keterlambatan data-dat dari unit kerja tidak terkumpul tepat waktu, sistem tidak terintegrasi dan kendala pada aplikasi keuangan daerah, perubahan regulasi, belum tersedianya UP
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dikarenakan belum tersedianya UP, jadwal pelaksanaan kegiatan mengikuti RAK
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dikarenakan belum tersedianya UP, jadwal pelaksanaan kegiatan mengikuti RAK
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dikarenakan belum tersedianya UP, proses pembelian menyesuaikan RAK

- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan RAK
- Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dikarenakan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan RAK

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Dll

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Mataraman.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Memonitoring pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tiap- tiap pemangku kegiatan hingga sub kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Mataraman Tahun 2025 s.d. Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					3.408.909.548				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	76	Nilai	2.910.876.048				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	14.379.200	25	5.540.000	25	1.923.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6.847.200	2	3.228.000	2	893.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	7.532.000	5	2.312.000	5	1.030.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.915.599.000	25	49.0876.000	25	476.383.324
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji, Tunjangan ASN	168	Orang/Bulan	1.840.600.000	42	469.532.000	42	465.932.624
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45	Dokumen	71.543.000	10	17.888.000	10	10.450.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan	1	Laporan	3.456.000	1	3.456.000	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Keuangan Akhir							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	24.000.000	25	0	25	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	24.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	104.632.400	25	44.250.625	25	23.728.377
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.985.000	1	1.898.500	1	173.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	10.819.000	1	2.318.000	1	1.012.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	22.278.500	1	6.013.625	1	1.698.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	6.839.900	1	3.419.500	1	560.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6.477.000	3	1.530.000	2	420.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	54.233.000	3	29.071.000	3	19.863.577
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	428.615.000	25	428.615.000	25	397.324.442

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	Unit	8.895.000	2	8.895.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	419.720.000	8	419.720.000	8	397.324.442
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	252.833.448	25	63.005.000	25	54.030.654
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000	1	500.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	24.908.448	3	8.700.000	3	5.654.904
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	22.6825.000	3	53.805.000	3	48.375.750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	170.817.000	25	31.077.000	25	12.206.775
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	68.440.000	5	17.280.000	5	11.906.775
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	36	Unit	42.377.000	9	13.797.000	1	300.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60.000.000	0	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	38.751.500	25	10.788.500	25	2.090.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	38.751.500	25	10.788.500	25	2.090.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	38.751.500	1	10.788.500	1	2.090.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	118.052.000	25	30.270.000	25	20.455.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	11.8052.000	25	30.270.000	25	20.455.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kelembagaan Kemasyarakatan	31.247.000	6	18.137.000	6	14.080.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4	Laporan	86.805.000	1	12.133.000	1	6.375.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	44.417.000	25	855.000	25	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	44.417.000	25	855.000	25	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	4	Laporan	28.457.000	0	0	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	15.960.000	1	855.000	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	197.608.000	25	37.461.000	25	23.100.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	197. 608.000	25	37.461.000	25	23.100.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	320	Orang	61.200.000	0	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dokumen	106.696.000	1	29.709.000	1	17.500.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	29.712.000	3	7.752.000	3	5.600.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	99.205.000	25	32.571.500	25	14.890.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	99.205.000	25	32.571.500	25	14.890.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	9.830.000	1	4.273.500	1	5.570.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	78.660.000	1	23.119.000	1	9.320.000
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	10.715.000	0	5.179.000	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Mataraman Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Mataraman Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak Ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.572.298.093 (Tiga Milyar Lima Ratus tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh tiga Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perubahan rincian belanja karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
2. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dikarenakan untuk optimalisasi honor pengelola arsip yang dibayar per semester saja sebagai salah satu kelengkapan

dokumen pendukung untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)

3. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, perubahan rincian belanja karena adanya Efisiensi anggaran kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan.
4. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dikarenakan Efisiensi anggaran sub kegiatan yang lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
5. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dikarenakan untuk optimalisasi serapan anggaran, selain itu mendukung kelancaran dan efisiensi pekerjaan di kantor Peralatan dan mesin membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cepat dan tepat, Peralatan dan mesin kantor yang memadai memungkinkan kegiatan operasional seperti administrasi, komunikasi, dan pengolahan data berjalan lancar.
6. Adanya Penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dikarenakan beban tagihan listrik yang bertambah karena ada penambahan tarif listrik.
7. Perubahan pada sub kegiatan Pengadaan Mebel hanya perubahan untuk koefisien dan volume serta harga barang tanpa merubah jumlah pagu anggaran pada sub kegiatan hal ini disebabkan karena disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang yang ada di pasar.
8. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Berdasarkan Telaahan Staf Forum Camat, ditambahkan Pemeliharaan Dinas Camat berupa Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000 dan penambahan 1 unit kendaraan dinas Camat sehingga perlu adanya penambahan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 37.720.000 dan permintaan penambahan untuk pemeliharaan khusus Rp. 80.000.000 yang disebabkan adanya insiden Kecelakaan Mobil Operasional yang di Pegang Oleh Sekretaris Camat pada tanggal 25 Maret 2025 di Kecamatan Astambul.
9. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa, Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan yang disebabkan karena kesalahan penganggaran.

10. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dikarenakan Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran serta untuk mengakomodir penambahan sewa stand pameran berdasarkan TS Forum Camat, yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan Berdasarkan TS Forum Camat, ditambahkan kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi APBDes sebesar Rp. 3.420.000
11. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dikarenakan Pengurangan dilakukan pada Volume/kooefisien Kegiatan untuk optimalisasi serapan anggaran.
12. Adanya Perubahan Pagu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NA	4,54	3.408.284.164	3.572.298.093	164.013.929	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	93	498.033.500	480.056.500	-17.977.000	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	82	98,76				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	73,5	2.910.250.664	3.092.241.593	181.990.929	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman	76 Indeks	76 Indeks	2.910.250.664	3.092.241.593	181.990.929	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	14.379.200	14.379.200	0	Perubahan indikator
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6.847.200	6.847.200	0	

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	7.532.000	7.532.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persen	100 Persen	2.175.973.616	1.965.799.000	-210.174.616	Perubahan indikator dan Perubahan anggaran karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.100.974.616	1.893.800.000	-207.174.616	Perubahan anggaran karena adanya kebutuhan untuk menganggarkan kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	71.543.000	68.543.000	-3.000.000	Perubahan anggaran dikarenakan untuk optimalisasi honor pengelola arsip yang dibayar per semester saja sebagai salah satu kelengkapan dokumen pendukung untuk pembayaran Tunjangan

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									Penghasilan Pegawai (TPP)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.456.000	3.456.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	30.000.000	24.000.000	-6.000.000	Perubahan indikator dan Perubahan anggaran karena adanya Efisiensi anggaran kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	3 Orang	30.000.000	24.000.000	-6.000.000	Perubahan anggaran karena adanya Efisiensi anggaran kegiatan tersebut, maka dibuatlah perencanaan perubahan sesuai kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	179.632.400	154.132.400	-25.500.000	Perubahan indikator dan Perubahan anggaran dikarenakan Efisiensi

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									anggaran sub kegiatan yang lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	3.985.000	3.985.000	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	10.819.000	10.819.000	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	22.278.500	22.278.500	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	6.839.900	6.839.900	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.477.000	6.477.000	0	

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	129.233.000	103.733.000	-25.500.000	Perubahan anggaran dikarenakan Efisisensi anggaran sub kegiatan yang lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	86.615.000	496.860.000	410.245.000	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran dikarenakan penyesuaian SSH yang baru
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	8.895.000	8.834.000	-61.000	Perubahan anggaran dikarenakan penyesuaian SSH yang baru
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	77.720.000	488.026.000	410.306.000	Perubahan anggaran dikarenakan untuk optimalisasi serapan anggaran, selain itu mendukung kelancaran dan efisiensi pekerjaan di kantor Peralatan dan mesin membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cepat dan tepat, Peralatan dan mesin kantor yang

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									memadai memungkinkan kegiatan operasional seperti administrasi, komunikasi, dan pengolahan data berjalan lancar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	252.833.448	256.253.993	3.420.545	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan	1.100.000	1.100.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2 Laporan	24.908.448	28.328.993	3.420.545	Perubahan anggaran dikarenakan beban tagihan listrik yang bertambah karena ada penambahan tarif listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	226.825.000	226.825.000	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	170.817.000	180.817.000	10.000.000,	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran Berdasarkan Telaahan Staf Forum Camat, ditambahkan

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									Pemeliharaan Dinas Camat berupa Bahan Bakar sebesar Rp. 10.000.000 dan penambahan 1 unit kendaraan dinas Camat sehingga perlu adanya penambahan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 37.720.000 dan permintaan penambahan untuk pemeliharaan khusus Rp. 80.000.000 yang disebabkan adanya insiden Kecelakaan Mobil Operasional yang di Pegang Oleh Sekretaris Camat pada tanggal 25 Maret 2025 di Kecamatan Astambul
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	68.440.000	78.440.000	10.000.000	Perubahan anggaran Berdasarkan Telaahan Staf Forum Camat, ditambahkan Pemeliharaan Dinas Camat berupa Bahan

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									Bakar sebesar Rp. 10.000.000 dan penambahan 1 unit kendaraan dinas Camat sehingga perlu adanya penambahan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 37.720.000 dan permintaan penambahan untuk pemeliharaan khusus Rp. 80.000.000 yang disebabkan adanya insiden Kecelakaan Mobil Operasional yang di Pegang Oleh Sekretaris Camat pada tanggal 25 Maret 2025 di Kecamatan Astambul
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	36 Unit	42.377.000	42.377.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	60.000.000	0	

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	100 Persen	100 Persen	38.751.500	38.751.500	0	Perubahan indicator
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	38.751.500	38.751.500	0	Perubahan indicator
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	38.751.500	38.751.500	0	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	118.052.000	111.190.000	-6.862.000	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 Persen	100 Persen	118.052.000	111.190.000	-6.862.000	Perubahan anggaran Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan yang disebabkan karena kesalahan

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									penganggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	31.247.000	15.965.000	-15.282.000	Perubahan anggaran Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan yang disebabkan karena kesalahan penganggaran
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4 Laporan	86.805.000	95.225.000	8.420.000	Perubahan anggaran Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran serta untuk mengakomodir penambahan sewa stand pameran berdasarkan TS Forum Camat, yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan Berdasarkan TS Forum Camat, ditambahkan kegiatan dalam rangka monitoring

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									dan evaluasi APBDes sebesar Rp. 3.420.000
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	44.417.000	41.852.000	-2.565.000	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran dikarenakan Pengurangan dilakukan pada Volume/koeffisien Kegiatan untuk optimalisasi serapan anggaran
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	44.417.000	41.852.000	-2.565.000	Perubahan indicator dan Perubahan anggaran dikarenakan Pengurangan dilakukan pada Volume/koeffisien Kegiatan untuk optimalisasi serapan anggaran

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4 Laporan	28.457.000	28.457.000	0	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4 Laporan	15.960.000	13.395.000	-2.565.000	Perubahan anggaran dikarenakan Pengurangan dilakukan pada Volume/koeffisien Kegiatan untuk optimalisasi serapan anggaran
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana	100 Persen	100 Persen	197.608.000	197.608.000	0	Perubahan indicator
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	197.608.000	197.608.000	0	Perubahan indicator

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	320 Orang	320 Orang	61.200.000	61.200.000	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	29.712.000	29.712.000	0	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	4 Dokumen	106.696.000	106.696.000	0	

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	100 Persen	99.205.000	90.655.000	-8.550.000	Perubahan indikator dan Perubahan anggaran dikarenakan Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	99.205.000	90.655.000	-8.550.000	Perubahan anggaran dikarenakan Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	9.830.000	9.830.000	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	4 Dokumen	78.660.000	70.110.000	-8.550.000	Perubahan anggaran dikarenakan Untuk optimalisasi serapan anggaran kegiatan perlu dilakukan pergeseran

No.	Tujuan/sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan sebelum perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/sub kegiatan setelah perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	10.715.000	10.715.000	0	
JUMLAH						3.408.284.164	3.572.298.093	662.047.429	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Mataraman Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan***”.

Perubahan Renja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mataraman Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Mataraman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mataraman, 20 Juni 2025
Camat Mataraman

HERYANTO, SSTP. MA
Pembina
NIP. 19830119 200312 1
001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANJAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN 2023	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok Sasaran	PRAKIRAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	K	R	P				NASIONAL	DAERAH					
																					2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN MATARAMAN								3.408.284.164,00	3.464.909.548,00	3.572.298.093,00	164.013.929,00							3.470.799.765,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.408.284.164,00	3.464.909.548,00	3.572.298.093,00	164.013.929,00							3.470.799.765,00		
	7.01	KECAMATAN							3.408.284.164,00	3.464.909.548,00	3.572.298.093,00	164.013.929,00							3.470.799.765,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepatuhan dan Kinerja				76 Nilai	76 Nilai	2.910.250.664,00	2.966.876.048,00	3.092.241.593,00	62.515.601,00							2.972.766.265,00		

		PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Intern (IKI) Kecamatan Mataraman																	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	14.379.200 ,00	14.379.200 ,00	14.379.200 ,00	0,00			Memper- uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper- uat pencegahan dan pembera- ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud- upan.	4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan 4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan	ASN Kecamatan		14.379.200 ,00	KECA MATA N MATA RAMA N
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokum- en	6 Dokum- en	6.847.200, 00	6.847.200, 00	6.847.200, 00	0,00	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Desa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memper- uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper- uat pencegahan dan pembera- ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud- upan.	4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan 4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan			6.847.200, 00	KECA MATA N MATA RAMA N
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Lapora- n	17 Lapora- n	7.532.000, 00	7.532.000, 00	7.532.000, 00	0,00	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Desa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memper- uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper- uat pencegahan dan pembera- ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud-	4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan 4. Optimali- sasi Tata Kelola Pemerint- ahan			7.532.000, 00	KECA MATA N MATA RAMA N

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 persen	100 persen	2.175.973.616,00	1.915.599.000,00	1.965.799.000,00	-210.174.616,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan		2.176.319.216,00	KECA MATAN MATARAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Oran g yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Oran g/b ulan	14 Oran g/b ulan	2.100.974.616,00	1.840.600.000,00	1.893.800.000,00	-207.174.616,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Des a	DAN A BAGI HASI L (DBH) DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.100.974.616,00	KECA MATAN MATARAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokum en	45 Dokum en	71.543.000,00	71.543.000,00	68.543.000,00	-3.000.000,00	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Des a	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			71.543.000,00	KECA MATAN MATARAMAN

															penyeludupan.					
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Desa	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.801.600,00	KECA MATAN MATARAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi				100 persen	100 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan		30.000.000,00	KECA MATAN MATARAMAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Banjar, Mataraman, Semua Kel/Desa	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECA MATAN MATARAMAN
	7.01.01.2.0	Ad	Persentase				100	100	179.632.40	154.632.40	154.132.40	-25.500.000,00			Memperk	4.	ASN		184.999.84	KECA

	6	mini stra si Um um Per ang kat Dae rah	Terfasilitasinya Penyelenggara an Penunjang Adminisitrasi Umum Perkantoran				persen	persen	0.00	0.00	0.00				uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Optimali sasi Tata Kelola Pemerint ahan 4. Optimali sasi Tata Kelola Pemerint ahan	Lingkup Kecamata ndan Masyarak at Kecamata n		0.00	MATA N MATA RAMA N
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	3.985.000,00	3.985.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	10.819.000,00	10.819.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	22.278.500,00	22.278.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4 Paket	6.839.900,00	6.839.900,00	

	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.477.000,00	6.477.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	129.233.000,00	104.233.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</i>				100 persen	100 %	86.615.000,00	428.615.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	8.895.000,00	8.895.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 unit 0	13 unit 0	77.720.000,00	419.720.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>				100 persen	100 %	252.833.448,00	252.833.448,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	2 Laporan	24.908.448,00	24.908.448,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	12 Laporan	226.825.000,00	226.825.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKU Perangkat Daerah : Nilai Evaluasi Kecamatan Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</i>				100 persen	100 % 100 persen 82 Nilai	170.817.000,00	170.817.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	68.440.000,00	68.440.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	36 Unit	42.377.000,00	42.377.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 unit Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan				100 persen	100 persen	38.751.500,00	38.751.500,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Pelayanan Yang Mudah Di akses Persentasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat Persentasi Pelayanan yang Sesuai dengan Standar Pelayan Persentasi Pengaduan yang di tindak lanjuti</i>				100 persen	100 persen	38.751.500,00	38.751.500,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				5 Laporan	5 Laporan	38.751.500,00	38.751.500,00	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				-	100 persen	118.052.000,00	118.052.000,00	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				-	100 persen	118.052.000,00	118.052.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasya- katan	31.247.000,00	31.247.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	4 Laporan	86.805.000,00	86.805.000,00	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	44.417.000,00	44.417.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 % 100 persen	44.417.000,00	44.417.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4 Laporan	28.457.000,00	28.457.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	4 Laporan	15.960.000,00	15.960.000,00	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	197.608.000,00	197.608.000,00	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Presentasi fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 persen	100 Laporan 100 persen	197.608.000,00	197.608.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				320 Orang	320 Orang	61.200.000,00	61.200.000,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	4 Dokumen	106.696.000,00	106.696.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen 0	12 Dokumen 0	29.712.000,00	29.712.000,00	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik				100 persen	100 persen	99.205.000,00	99.205.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</i>				100 persen	100 persen	99.205.000,00	99.205.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	9.830.000,00	9.830.000,00	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	78.660.000,00	78.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	C				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	10.715.000,00	10.715.000,00	
	J U M L A H								3.408.284.164,00	3.464.909.548,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MATARAMAN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 58,800 Mataraman Kode Pos 70672

Surel: kec.mataraman@banjarkab.go.id Laman: <https://kecmataraman.banjarkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 025.a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

CAMAT MATARAMAN

- Menimbang :
- a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mataraman Kabupaten Banjar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
 13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Intan
pada tanggal : 01 Juni 2025

CAMAT MATARAMAN,

HERYANTO, SSTP, MA

Pembina Tk.I

NIP. 19830119 200312 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Mataraman
 Nomor : 025.a Tahun 2025
 Tanggal : 01 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset

CAMAT MATARAMAN,

HERYANTO, SSTP, MA
Pembina Tk.I
NIP. 19830119 200312 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Mataraman
Nomor : 025.a Tahun 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN

**TAHUN 2025 KECAMATAN MATARAMAN
KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025; c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Bappedalitbang Kabupaten Banjar sebagai mitra kerja.
2	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025.

3	Anggota	a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025 tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Mataraman; b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mataraman; d. Melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025; e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; f. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mataraman Tahun 2025; g. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja Perubahan pada bidangnya masing- masing; h. Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan atas hasil telaahan, koreksi dan masukkan bidangnya masing-masing; i. Menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen RKPD Tahun 2025.
---	---------	--

CAMAT MATARAMAN,

HERYANTO, SSTP, MA

Pembina Tk.I

NIP. 19830119 200312 1 001

37. Kecamatan Simpang Empat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 Triwulan I dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Simpang Empat dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja; dan
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013

- Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor **XX** tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengkomodir

perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.383.910.700,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Simpang Empat melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp3.274.400.700,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sampai Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA, TERDIRI DARI:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERDIRI DARI:

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terdiri dari:

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERDIRI DARI:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERDIRI DARI:

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TERDIRI DARI:
- 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA TERDIRI DARI:
- 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan I ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada Triwulan I tahun 2025:

- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu informasi dari Perangkat Daerah teknis terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis.
- Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kendala teknis pada aplikasi pengadaan barang dan jasa versi 6

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Adanya petunjuk, arahan serta komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
- koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Simpang Empat.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 HINGGA TRIWULAN I DAN CAPAIAN RENSTRA 2021-2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	95	93,93	76	90.84	119.53	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2		Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100%	30.43	30.43	100%	76.81	77%
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22	12	6	6	100%	1	1	100%	19	86.36
7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	2	2	2	100%	0	0	0%	4	66.67
7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	2	100%	0	0	0%	4	66.67
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	2	2	2	100%	1	1	100%	5	83.33
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6	2	2	2	100%	0	0	0%	4	66.67

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
													Tahun 2025			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	8	1	1	100%	1	1	100%	10	90.91
7	1	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53	4	17	17	100%	4	4	100%	25	47.17
7	1	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	28.21	28.21	100%	76.07	76%
7	1	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	487	25	154	154	94%	44	44	100%	223	45.79
7	1	1	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106	8	18	18	100%	10	10	100%	36	33.96
7	1	1	2	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	2	1	1	100%	1	1	100%	4	80.00
7	1	1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	40	40	100%	80.00	80%
7	1	1	2	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18	6	4	4	100%	1	1	100%	11	61.11
7	1	1	2	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	1	100%	4	80.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	75.00	75%
7	1	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	2	1	1	100%	1	1	100%	4	80.00
7	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	3	1	1	0%	0	0	0%	4	18.18
7	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	27.03	21.62	80%	73.87	74%
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	6	4	4	100%	1	0	0%	10	55.56
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100%	1	1	100%	9	56.25
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32	20	4	4	0%	1	1	100%	25	78.13
7	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58	46	4	4	100%	1	1	100%	51	87.93
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	4	4	4	100%	1	1	100%	9	56.25
7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66	54	4	4	100%	1	1	100%	59	89.39

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	12	12	100%	3	3	100%	39	65.00
7	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	0	0	0%	1	0	0%	0	0.00
7	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100%	11	11	100%	70.33	70%
7	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00
7	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	0	0	0	0%	1	1	100%	1	16.67
7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0.00
7	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	3	3	3	100%	0	0	0%	6	17.65
7	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	75.00	75%
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49	13	12	12	100%	3	3	100%	28	57.14
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49	13	12	12	100%	3	3	100%	28	57.14
7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53	14	13	13	100%	4	4	100%	31	58.49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	70%	75.00	75%
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	9	8	8	100%	0	0	0%	17	80.95
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	10	0	0	0%	2	2	100%	12	40.00
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	61	17	14	14	100%	5	5	100%	36	59.02
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	8	1	1	100%	1	1	100%	10	76.92
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	43%	75.00	75%
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	75.00	75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62	21	17	17	100%	3	3	100%	41	66.13
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	25	25	0	75.00	75%
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20	8	4	4	100%	1	1	0%	13	65.00
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	81.25	81.25	92%	93.75	94%
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	81.25	81.25	92%	93.75	94%
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	44	14	12	12	100%	12	12	100%	38	86.36
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19	7	4	4	100%	1	1	0%	12	63.16

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026						Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023						Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan																	
																														Tahun 2025			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																		
																														Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)														
1						2						3						4						5						6			7			8=(7/6)			9			10			11			12=(5+7+10)			13=(12/4)		
7	1	4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan						100						100						100			100			100%			0			0			0%			66.67			67%		
7	1	4	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan						100						100						100			100			100%			0			0			0%			66.67			67%		
7	1	4	2	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5						2						1			1			100%			0			0			0%			3			60.00		
7	1	4	2	2		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5						2						1			1			100%			0			0			0%			3			60.00		
7	1	4	2			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi						100						100						100			100			100%			0			0			0%			66.67			67%		
7	1	4	2	1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5						2						1			1			100%			0			0			0%			3			60.00		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	5	5	49.86%	68.33	68%
7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	5	5	49.72%	68.33	68%
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	801	201	200	200	100%	0	0	0%	401	50.06
7	1	5	2	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	11	6	3	3	100%	1	1	100%	10	90.91
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	80	100	100	100%	0	0	0%	66.67	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	80	100	100	100%	20	20	0%	66.67	67%
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	4	2	2	100%	0	0	0%	6	75.00
7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	2	1	1	100%	0	0	0%	3	60.00
7	1	6	2	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15	7	6	6	100%	0	0	0%	13	86.67
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	0	0	0%	1	1	100%	2	200.00
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	7	1	1	100%	0	0	0%	8	80.00
7	1	6	2	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6	3	1	1	100%	0	0	0%	4	66.67

Sumber data : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Triwulan I Tahun 2025

TABEL 2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SIMPANG EMPAT TAHUN 2025 S.D. TRIWULAN I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah (IKKI)	94	Nilai	2.891.607.500	-	1,309,094,800	-	893,514,715
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	persen	20.478.000	30%	5,810,000	26%	3,180,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.360.000	1	570,000	1	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	1.630.000	-	0	-	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
			Volume	Satuan		TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
1	2	3	4	5	6	TK	Rp	RK	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.630.000	-	570000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.522.000	1	-	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.256.000	-	0		0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.960.000	1	2,960,000	1	2,680,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	9.120.000	4	1,710,000	4	500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	1.735.190.400	28%	478,822,000	28%	430,944,126
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154	Orang/Bulan	1.671.300.000	44	461,700,000	44	413,962,126

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40	Dokumen	62.098.400	10	15,330,000	10	15,330,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.792.000	1	1,792,000	1	1,652,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	4.235.800	40%	1,391,800	40%	1,286,800
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	2.844.000	1	-	1	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.391.800	1	1,391,800	1	1,286,800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	28.560.000	25%	2,736,000	25%	1,792,000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	4.560.000	1	2,736,000	1	1,792,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	24.000.000	-	-	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrase Umum Perkantoran	100	Persen	272.231.500	27%	181,546,000	22%	54,099,100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	8.253.000	1	1,425,000	-	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	67.800.000	1	53,161,500	1	4,102,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	17.099.500	1	15,074,500	1	675,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.375.500	1	1,021,500	1	1,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4.960.000	1	1,240,000	1	515,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	4.560.000	1	1,140,000	1	1,000,000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	162.000.000	3	105,000,000	3	46,806,600
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	6.183.500	1	3,483,500	-	900,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	403.848.000	11%	403,168,000	11%	323,400,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	-	-	-		-
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	342.000.000	1	342,000,000	1	323,400,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	15.096.000		15,096,000	-	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	46.752.000		46,072,000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	147.251.800	25%	50,919,000	25%	40,717,769
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000	3	600,000	3	600,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	13.751.800	3	10,494,000	3	2,070,998

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	132.300.000	4	39,825,000	4	38,046,771
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	279.812.000	25%	184,702,000	25%	38,094,920
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	-	-	-		-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	116.160.000	2	29,100,000	2	11,013,920
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	13.800.000	5	4,060,000	5	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	149.852.000	1	151,542,000	1	27,081,000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	173.130.000	25%	34,507,000	25%	21,952,000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	persen	16.964.000	25%	2,736,000	25%	1,792,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	laporan	16.964.000	3	2,736,000	3	1,792,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Sub Kegiatan	Persen	156.166.000	25%	31,771,000	25%	20,160,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	156.166.000	1	31,771,000	1	20,160,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	100	Persen	105.745.000	81%	58,510,000	81%	14,983,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	105.745.000	81%	58,510,000	81%	14,983,000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	LembagaKemasyarakatan	17.844.000	12	17,844,000	12	14,075,000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	87.901.000	1	40,666,000	1	908,000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana	100	Persen	19.150.000	-	-		-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	12.500.000	-	-		-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	5.850.000	-	-	-	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	6.650.000	-	0	-	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	6.650.000	-	-		-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		DPA	TK	Rp	RK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi/SinergiDengan PerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturanPerundang- Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	6.650.000	-	0	-	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100	Persen	110.754.000	5%	3,900,000	5%	3,900,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	110.754.000	5%	3,900,000	5%	3,900,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	87.899.000	-	0	-	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	22.855.000	1	3,900,000	1	3,900,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana	100	Persen	49.914.000	20%	6,060,000	20%	4,930,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	49.914.000	20%	6,060,000	20%	4,930,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	5.850.000	-	0	-	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	6.650.000	-	0	-	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	26.370.000	1	6,060,000	1	4,930,000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Dokumen	-		0	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	4.394.000	-	0	-	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	6.650.000	-	-	-	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan pohon kinerja terbaru serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp3.274.400.700,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
2. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
3. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
4. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sehingga perlu

perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.

5. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
6. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
7. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
8. Penambahan anggaran sesuai dengan permohonan forum Camat pada sub kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
9. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya perlu menggeser anggaran pejabat pengadaan ke sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin.
10. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
11. Penambahan anggaran sesuai dengan permohonan dari Forum Camat sehingga perlu melakukan perubahan anggaran pada Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan menambahkan anggaran untuk aktivitas expo/bazar dan pelaksanaan evaluasi ABPDes untuk setiap desa.
12. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
13. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
14. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
15. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.

16. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
17. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.
18. Untuk optimalisasi kegiatan dan serapan anggaran Pada Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa sehingga perlu perubahan anggaran dengan melakukan pergeseran antar sub kegiatan.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANJAR TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SIMPANG EMPAT								3.138.735.272,00	3.383.910.700,00	3.350.300.500,00	211.565.228,00						1.454.766.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.138.735.272,00	3.383.910.700,00	3.350.300.500,00	211.565.228,00							1.454.766.600,00	
	7.01	KECAMATAN							3.138.735.272,00	3.383.910.700,00	3.350.300.500,00	211.565.228,00							1.454.766.600,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				79 Nilai	94 Indeks	2.645.792.272,00	2.890.967.700,00	2.891.607.500,00	-1.191.025.672,00							1.454.766.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	26.982.000,00	26.982.000,00	20.478.000,00	-6.504.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		15.493.800,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	2.360.000,00	-1.140.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.770.000,00	2.770.000,00	1.630.000,00	-1.140.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.770.000,00	2.770.000,00	1.630.000,00	-1.140.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.064.000,00	3.064.000,00	1.522.000,00	-1.542.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.798.000,00	2.798.000,00	1.256.000,00	-1.542.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			928.800,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.365.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	16 Laporan	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.200.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 Persen	100 Persen	1.787.014.972,00	1.735.190.400,00	1.735.190.400,00	-51.824.572,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		55.929.600,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	154 Orang/bulan	1.723.124.572,00	1.671.300.000,00	1.671.300.000,00	-51.824.572,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	40 Dokumen	62.098.400,00	62.098.400,00	62.098.400,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			50.448.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.481.600,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terseleenggara				100 Persen	100 Persen	4.235.800,00	4.235.800,00	4.235.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.466.400,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.844.000,00	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			619.200,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.391.800,00	1.391.800,00	1.391.800,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			847.200,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	40.944.000,00	40.944.000,00	28.560.000,00	-12.384.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		183.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.944.000,00	10.944.000,00	4.560.000,00	-6.384.000,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	8 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran				100 Persen	100 Persen	335.231.500,00	290.231.500,00	272.231.500,00	-63.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		268.179.120,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	8.253.000,00	8.253.000,00	8.253.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.907.200,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	67.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			42.060.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	17.099.500,00	17.099.500,00	17.099.500,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.758.160,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	1.375.500,00	1.375.500,00	1.375.500,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.661.760,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.752.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	180.000.000,00	162.000.000,00	-63.000.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.183.500,00	6.183.500,00	6.183.500,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.440.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100 Persen	100 Persen	61.168.000,00	403.168.000,00	403.848.000,00	342.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		324.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	0,00	342.000.000,00	342.000.000,00	342.000.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			126.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.096.000,00	15.096.000,00	15.096.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	46.072.000,00	46.072.000,00	46.752.000,00	680.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			174.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	156.434.000,00	156.434.000,00	147.251.800,00	-9.182.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		182.737.680,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.440.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
--	-------------------	---	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	22.934.000,00	22.934.000,00	13.751.800,00	-9.182.200,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.697.680,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13 Laporan	132.300.000,00	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			156.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	233.782.000,00	233.782.000,00	279.812.000,00	46.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		423.360.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			48.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	68.440.000,00	68.440.000,00	116.160.000,00	47.720.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			45.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	151.542.000,00	151.542.000,00	149.852.000,00	-1.690.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			311.760.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan				100 Persen	100 Persen	180.350.000,00	180.350.000,00	173.130.000,00	-180.350.000,00							0,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	24.184.000,00	24.184.000,00	16.964.000,00	-7.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.184.000,00	24.184.000,00	16.964.000,00	-7.220.000,00	Kab. Banjar, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	156.166.000,00	156.166.000,00	156.166.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	156.166.000,00	156.166.000,00	156.166.000,00	0,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	118.245.000,00	118.245.000,00	105.745.000,00	-118.245.000,00								0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	118.245.000,00	118.245.000,00	105.745.000,00	-12.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	17.844.000,00	17.844.000,00	17.844.000,00	0,00	Kab. Banjar, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	100.401.000,00	100.401.000,00	87.901.000,00	-12.500.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	26.350.000,00	26.350.000,00	19.150.000,00	-26.350.000,00								0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	17.300.000,00	17.300.000,00	12.500.000,00	-4.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.050.000,00	9.050.000,00	5.850.000,00	-3.200.000,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	8.250.000,00	8.250.000,00	6.650.000,00	-1.600.000,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	9.050.000,00	9.050.000,00	6.650.000,00	-2.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	9.050.000,00	9.050.000,00	6.650.000,00	-2.400.000,00	Kab. Banjar, Simbang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	110.754.000,00	110.754.000,00	110.754.000,00	-110.754.000,00								0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	110.754.000,00	110.754.000,00	110.754.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	87.899.000,00	87.899.000,00	87.899.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	22.855.000,00	22.855.000,00	22.855.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik				100 Persen	100 Persen	57.244.000,00	57.244.000,00	49.914.000,00	-57.244.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	100 Persen 100 Persen 1 Layanan 100 Persen	57.244.000,00	57.244.000,00	49.914.000,00	-7.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	5.850.000,00	-1.600.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	6.650.000,00	-800.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	28.900.000,00	28.900.000,00	26.370.000,00	-2.530.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.194.000,00	5.194.000,00	4.394.000,00	-800.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	8.250.000,00	6.650.000,00	-1.600.000,00	Kab. Banjar, Sim pang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		J U M L A H							3.138.735.272,00	3.383.910.700,00	3.350.300.500,00	613.128.163.158,28							1.454.766.600,00	

Sumber data: Penetapan Perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Simpang Empat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Martapura, 10 Juni 2025
Camat Simpang Empat

Drs. Jurji Zaidan, M.Si
Pembina Tk I / IVb
NIP 196904071990101001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;](#)
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 17. [Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 \(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11\);](#)

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Pengaron tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Pengaron Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar melaksanakan 16 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.581.600.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Pengaron melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 3.611.232.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Pengaron hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio	75,00	74.18	72,96	87,02	103,95	NA	NA	NA	79	95%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100%	59,93	59,93	100%	24.31	24.31
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	12	13	13	100%	4	4	100%	29	2,23
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	6	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	22	21	21	100%	4	4	100%	47	11,75
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	22	21	21	100%	6	6	100%	49	8,16
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	65.52	65.52	100%	46.15	46.15
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	16	13	94%	16	14	100%	41	2,92
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	48	12	12	100%	3	3	100%	63	5,25
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	4	1	1	100%	3	3	100%	8	8,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	100%
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4	24	1	1	100%	1	1	100%	26	6,50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Barang Milik Daerah pada SKPD										
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	50	50
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	36	1	1	100%	1	0	0%	37	9,25
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	30	10	6	100%	0	0	0%	36	3,6
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	29.37	29.37
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8	4	4	100%	1	0	0%	12	12
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	12	5	5	100%	1	1	0%	17	3,4
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	24	8	8	100%	2	2	100%	34	4,25
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	24	12	12	100%	0	0	0	36	9

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	36	2	2	100%	1	1	100%	39	3,25
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	58.97	58.97
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	112	20	11	11	100%	1	1	100%	32	2,90
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	41.25	41.25
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	48	12	12	100%	3	3	100%	63	5,25
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	2	2	100%	1	1	100%	15	7,50
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	13	39	13	13	100%	3	3	100%	55	4,23

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Umum Kantor yang Disediakan										
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	46.85	46.85
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	44	6	6	100%	2	2	100%	52	3,46
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	48	15	15	100%	5	1	20%	64	4,26
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	12	3	3	100%	3	1	33%	16	5,33
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	100%	43.75	43.75
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	43.75	43.75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	12	13	13	100%	3	3	100%	21	43.75
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	50	0	0	50	50
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	2	4	4	100%	4	0	0%	5	50
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	75	75
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	81.25	75	92%	75	75
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48	12	12	12	100%	12	12	100%	36	75
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	1	5	5	100%	1	0	0%	3	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	0	0	0%	25	25
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	1	1	1	100%	0	0	0%	1	25
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	0	0	0%	33.33	33.33
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	1	1	1	100%	0	0	0%	2	33.33
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	3.51	1.75	49.86%	28.52	28.52

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	100	100	100	100%	3.52	1.75	49.72%	28.52	28.52
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	200	200	200	100%	0	0	0%	50	25
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	3	2	2	100%	1	1	100%	5	62.5
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	12	12	12	100%	3	1	33%	18	37.5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	80	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	80	100	100	100%	0	0	0%	29.17	29.17
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%	2	50
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	1	4	4	100%	0	0	0%	1	25
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	1	0	0	0	0	0	0%	2	50
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	1	0	0	0%	0	0	0%	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	1	25

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Intansi Vertikal
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyaratan Desa.
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

ii. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I. Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Pengaron sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indkator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan dilaksanakan pada Triwulan III di awal Bulan JULI.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal yaitu karena kegiatan MTQ dilaksanakan bulan September.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu karena masih Menunggu JUKNIS dari Kabupaten.
- Kurangnya SDM dan Sarana Penunjang Kegiatan

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya Anggaran
- Koordinasi yang baik antar Pihak yang terkait

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Pengaron

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					3.246.750.600				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78	Nilai	3.246.750.600				
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	34.008.900				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	11.999.900	6	7.153.000	6	3.686.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	Laporan	8.995.000	2	6.720.000	2	3.916.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	13.014.000	-	6.507.000	-	763.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.981.660.000				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	17	Orang/Bulan	1.913.500.000	-	575.682.088	-	328.764.256
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	53.160.000	-	13.290.000	-	13.290.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	15.000.000	-	300.000	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	21.000.300				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	12.000.300	1	100.000	1	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	9.000.000	-	3.000.000	0	3.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	50.700.000				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	5.700.000	1	480.000	1	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	45.000.000	-	-	-	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	179.720.500				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	12.000.000	-	731.000	-	518.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	348.000	-	3.000.000	-	2.924.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	11.406.500	-	587.000	-	585.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	0	1	1.350.000	1	1.350.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	-	664.800	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	-	800.000	-	800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	155.966.000	-	32.000.000	-	9.079.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	546.976.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	Unit	23.424.000	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	523.552.000	1	9.685.000	1	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	197.140.900				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.000.000	-	600.000	-	300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	Laporan	11.120.900	-	9.874.998	-	6.990.704

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	184.020.000	3	43.635.000	3	42.589.020
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	235.544.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	95.920.000	2	10.400.000	2	3.067.922
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	10	Unit	49.640.000	3	1.200.000	3	330.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	89.984.000	-	-	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	35.702.000				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	14.880.000				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	laporan	14.880.000	3	-	3	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	20.822.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	51.775.000				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	51.775.000				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Kelembagaan Kemasyarakatan	10.490.000	4	9.250.000	4	9.237.400
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Laporan	41.285.000	-	1.957.800	-	1.027.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	25.966.800				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	11.023.800				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	5.296.000	-	-	-	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	5.727.800	-	-	-	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	Persen	14.943.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	14.943.000	1	3.000.000	1	3.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	191.405.600				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	191.405.600				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	81.833.000	-	-	-	-
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	109.572.600	1	54.147.300	1	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	30.000.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	30.000.000				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20	Dokumen	0	20	2.250.000	20	2.250.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dokumen	0	20	-	20	-
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dokumen	15.000.000	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	0	-	1.500.000	-	1.500.000
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	15.000.000	-	2.000.000	-	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Pengaron Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.611.232.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perubahan rincian belanja karena menambah anggaran untuk PPh21 pada gaji dan tunjangan ASN;
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan karena penambahan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
3. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami penurunan anggaran karena pengurangan upah tenaga kontrak yang telah lulus sebagai PPPK;

4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak mobil operasional Camat dan anggaran pemeliharaan untuk mobil operasional Sekretaris Kecamatan;
5. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami penambahan anggaran untuk jasa sewa tenda/stand UMKM dan anggaran untuk kegiatan monitoring evaluasi APBDes;

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Indeks	79 Indeks	3.581.600.000	3.611.232.000	255.631.140	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	85 Nilai	80.50 (A)	3.246.750.600	3.259.382.600	90.966.000	Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	78 Nilai	78 Nilai	3.246.750.600	3.259.382.600	90.966.000	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	34.008.900	34.008.900	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	11.999.900	11.999.900	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	8.995.000	8.995.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	13.014.000	13.014.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.981.660.000	1.981.660.000	0	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	1.913.500.000	1.913.500.000	0	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	53.160.000	53.160.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	21.000.300	21.000.300	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.300	7.000.300	(5.000.300)	Karena Efisiensi Anggaran
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	50.700.000	50.700.000	0	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000	5.700.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	36.000.000	(9.000.000)	Karena Efisiensi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	179.720.500	179.720.500	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000	12.000.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	348.000	348.000	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	11.406.500	11.406.500	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	155.966.000	172.598.000	44.500.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	546.976.000	546.976.000	0	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	23.424.000	23.424.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	20 Unit	523.552.000	523.552.000	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	197.140.900	197.140.900	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	11.120.900	11.120.900	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	184.020.000	184.020.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	235.544.000	235.544.000	0	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	95.920.000	105.920.000	10.000.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	49.640.000	49.640.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	89.984.000	89.984.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	35.702.000	35.702.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	14.880.000	14.880.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	14.880.000	14.880.000	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Pelayanan yang Mudah di akses Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang Mudah di akses Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.822.000	20.822.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	51.775.000	68.775.000	17.000.000	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	51.775.000	68.775.000	17.000.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.490.000	10.490.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	41.285.000	58.285.000	17.000.000	Penambahan Anggaran dari subkegiatan lain dan penambahan sesuai telaahan forum camat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	25.966.800	25.966.800	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	11.023.800	11.023.800	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.296.000	5.296.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5.727.800	5.727.800	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	14.943.000	14.943.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	14.943.000	14.943.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	191.405.600	191.405.600		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	191.405.600	191.405.600		
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia-	200 Orang	200 Orang	81.833.000	81.833.000		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	5 Dokumen	109.572.600	109.572.600	0	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000	30.000.000	0	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000	30.000.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelayanan yang mudah di akses, Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	-
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0	0	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Pengaron Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan***”.

Perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Pengaron secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaron, 20 Juni 2025
Plt. Camat Pengaron,

H. Sukir, S.Sos, M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 196706201986111001

LAMPIRAN

SK pembentukan tim

Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (cetak SIPD RI)

39. Kecamatan Sungai Pinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan di tengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025 triwulan I dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dengan penyesuaian belanja.

2. Surat Edaran Bupati Banjar tanggal 27 Maret 2025 Nomor : 000.7.2.4/285/PPE/Bappedalitbang, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan rencana kerja, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.840.430.160,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribuan Seratus Enam Puluh Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 yaitu:

2.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN;
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA;
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.2 Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai

berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Mebel
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM;

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA;

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025 :

- Kegiatan terhambat akibat tidak pastinya jadwal kegiatan bimbingan teknis yang sifatnya situasional.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum terlaksana karena adanya perubahan aplikasi penyediaan jasa dan barang sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari aplikasi tersebut dan akan dijadwalkan kembali pada triwulan berikutnya.

Faktor - faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan.
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I,

dimana beberapa sub kegiatan masih belum mencapai target, hal ini berimplikasi negatif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang.

2.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025 SD TRIWULAN I

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volum e	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	Nilai	2.531.238.060,00	NA	913.528.588	NA	728.753.812
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persentase	8.207.000,00	16,67	1.775.000	33,33	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	1.107.000,00	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.000.000,00	0	1.250.000	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.100.000,00	1	525.000	1	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	1.644.960.000,00	75	418.497.967	66,67	338.519.332
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Orang/bulan	1.594.600.000,00	18	405.307.967	18	329.859.332
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	49.560.000,00	3	12.390.000	3	8.260.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	800.000,00	1	800.000	0	400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persentase	12.350.000,00	62,5	3.087.500	50	1.500.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	350.000,00	1	87.500	0	0

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	12.000.000,00	1	3.000.000	1	1.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persentase	20.770.000,00	25	5.000.000	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	770.000,00	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	20.000.000,00	1	5.000.000	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	56.293.800,00	74,1 7	18.924.500	16,6 7	5.776.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	739.500,00	1	739.500	0	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.305.000,00	1	787.000	0	787.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.500.000,00	1	1.860.000	0	1.860.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.760.300,00	1	940.200	0	1.009.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	5.489.000,00	2	1.097.800	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	42.500.000,00	3	13.500.000	3	2.120.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Persentase	427.512.000,00	25	375.090.000	33,3 4	316.646.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	17.888.000,00	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	409.624.000,00	3	375.090.000	2	316.646.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase	223.671.260,00	75	61.319.621	33,3 3	49.512.480
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.750.000,00	1	500.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	52.786.260,00	3	13.196.565	3	3.512.480

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	169.135.000,00	1	47.623.056	0	46.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persentase	137.474.000,00	50	29.834.000	44,44	16.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	83.800.000,00	9	20.520.000	9	13.410.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	19.930.000,00	9	9.314.000	3	3.390.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	33.744.000,00	0	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	persentase	42.648.800,00	62,5	8.179.850	50	760.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	20.302.800,00	25	2.660.850	100	760.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	20.302.800,00	1	2.660.850	1	760.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persentase	22.346.000,00	100	5.519.000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	22.346.000,00	1	5.519.000	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persentase	60.796.000,00	75	21.410.167	50	12.680.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persentase	60.796.000,00	75	21.410.167	50	12.680.000

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21	Lembaga Kemasyarakatan	7.932.000,00	21	7.932.000	21	7.779.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	52.864.000,00	1	13.478.167	0	4.901.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Persentase	24.957.000,00	25	11.535.500	12,5	70.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persentase	20.196.500,00	50	11.535.500	25	70.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	11.535.500,00	2	11.535.500	1	70.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	8.661.000,00	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	4.760.500,00	0	0	0	0
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	4.760.500,00	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	persen	153.069.900,00	50	20.094.900	0	1.200.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persentase	153.069.900,00	50	20.094.900	0	1.200.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	40	Orang	58.064.000,00	0	0	0	0

	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	95.005.900,00	1	20.094.900	0	1.200.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	100	persen	27.720.400,00	40	7.427.000	0	198.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persentase	27.720.400,00	40	7.427.000	0	198.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1.991.000,00	1	1.991.000	0	198.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1.847.700,00	0	0	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	2.308.000,00	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	19.800.000,00	1	5.436.000	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1.773.700,00	0	0	0	0

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, Kecamatan Sungai Pinang melakukan penyesuaian/perubahan pada indikator kinerja pada sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Berubah

Tidak ada perubahan target indikator sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 1 Program 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang berubah pada tahun anggaran 2025 ini. Nama program/kegiatan dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1

.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah sebesar Rp2.840.430.160,- (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran dan perubahan terget yaitu :

1. Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan pada indikator kinerja sub kegiatan.
2. Adanya penambahan kendaraan dinas operasional roda empat sedang biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat hanya dianggarkan 1 unit, sehingga memerlukan tambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat.

3. Luas dan banyaknya desa yang melingkupi Kecamatan Sungai Pinang sehingga semakin meningkatkan mobilitas dalam melakukan monitoring dan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu belanja perjalanan dinas yang telah dianggarkan tidak memenuhi kebutuhan yang ada.
4. Adanya tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Kecamatan Sungai Pinang memerlukan biaya operasional dan anggaran dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring desa di wilayah Kecamatan Sungai Pinang.
5. Akan diadakannya kegiatan EXPO tahunan yang Pemerintah Kecamatan diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan tujuan memasarkan produk UMKM sehingga memerlukan dana untuk sewa stand dan dekorasi EXPO.
6. Adanya beberapa penyesuaian dalam perencanaan dan belanja dengan kondisi *real time* saat pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	85 Indeks	87 Indeks				Penambahan Anggaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Predikat SAKIP PERANGKAT DAERAH	85 Nilai	B				Penambahan Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah</i>	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	78 Nilai	78 Nilai	2.478.354.188,00	2.531.238.060,00	52.883.872,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100% Persentase	100 % B Predikat	8.207.000,00	8.207.000,00	0,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100% Persentase	100 % B Predikat	1.861.576.128,00	1.644.960.000,00	- 216.616.128,00	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.811.216.128,00	1.594.600.000,00	- 216.616.128,00	Pengurangan Anggaran
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	49.560.000,00	49.560.000,00	0,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	0,00	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Laporan Pengelolaan dan	100% Persentase	100 % B Predikat	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	

			Pengamanan Aset Barang Milik Daerah						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	350.000,00	0,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100% Persentase	100 % B Predikat	25.770.000,00	20.770.000,00	-5.000.000,00	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	770.000,00	770.000,00	0,00	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Penyelenggaraan Adminsitasi Umum Perkantoran	100% Persentase	100 % B Predikat	123.793.800,00	56.293.800,00	-67.500.000,00	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	739.500,00	739.500,00	0,00	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.300,00	2.760.300,00	0,00	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	5.489.000,00	5.489.000,00	0,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	42.500.000,00	-67.500.000,00	Pengurangan Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100% Persentase	100 % B Predikat	85.512.000,00	427.512.000,00	342.000.000,00	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	17.888.000,00	17.888.000,00	0,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	67.624.000,00	409.624.000,00	342.000.000,00	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan

									Kendaraan Dinas Operasional
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100% Persentase	100 % B Predikat	223.671.260,00	223.671.260,00	0,00	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.786.260,00	52.786.260,00	0,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	169.135.000,00	169.135.000,00	0,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah</i>	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100% Persentase	100 % B Predikat	137.474.000,00	137.474.000,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	83.800.000,00	83.800.000,00	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	33.744.000,00	33.744.000,00	0,00	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana IKM Kecamatan Sungai Pinang</i>	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 100 100% 84,00 Persen Persentas e %	100 %	42.648.800,00	42.648.800,00	1.203.200,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100% Persentase	100 % 87 Indeks	20.302.800,00	20.302.800,00	0,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.302.800,00	20.302.800,00	0,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100% Persentase	100 % 87 Indeks	22.346.000,00	22.346.000,00	0,00	

			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	22.346.000,00	22.346.000,00	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</i>	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 100% 100 % NA Persen	100 %	60.796.000,00	60.796.000,00	92.500,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Peresntase Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% Persentase	100 % 87 Indeks	60.796.000,00	60.796.000,00	0,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakata n	21 Lembaga Kemasyarakata n	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	52.864.000,00	52.864.000,00	0,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan</i>	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 100% 100 % NA Persen	100 %	24.957.000,00	24.957.000,00	75.460,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100% Persentase	100 % 87 Indeks	20.196.500,00	20.196.500,00	0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	11.535.500,00	11.535.500,00	0,00	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	8.661.000,00	8.661.000,00	0,00	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 % 87 Indeks	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Angka stabilitas keamanan lokal Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	0 100 100% % % NA	100 %	153.069.900,00	153.069.900,00	1.064.600,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100% Persentase	100 % 87 Indeks	153.069.900,00	153.069.900,00	0,00	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	40 Orang	58.064.000,00	58.064.000,00	0,00	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	95.005.900,00	95.005.900,00	0,00	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 100% % NA	100 %	27.720.400,00	27.720.400,00	161.300,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% Persentase	100 % 87 Indeks	27.720.400,00	27.720.400,00	0,00	-

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.847.700,00	1.847.700,00	0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.773.700,00	1.773.700,00	0,00	

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan***”.

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Perubahan RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik dan juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan atas kinerja tahunan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025, adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
3. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumendokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Banjar dan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar) ;
4. Perubahan RENJA Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan antara lain perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2025, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum APBD 2025 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2025.
2. Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional bagi bagian-bagian di lingkup Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan

sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

3. Renja Perubahan 2025 yang disusun ini juga diharapkan dapat ditutup dengan capaian kinerja yang memuaskan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.



Sungai Pinang, 09 Mei 2025
CAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE
Pembina, IV/a

NIP. 19690217 198903 1
003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu

dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empatbelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran **Rp 3.700.910.519,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)**. Pagu tersebut berikurang lagi Setelah melakukan Effisiensi atas Kebijakan Pusat dan pagunya menjadi **Rp 3.632.290.519,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)** dan pada saat perubahan Kecamatan Beruntung Baru tetap melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empatbelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **Rp 3.757.586.845,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)**.Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Beruntung Baru hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
												Tahun 2025				
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=Target 2025	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	01				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	01	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	85	74	82	82,08	100,10%	NA	NA	NA	82	96%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	34,38%	31,25%	90,91%	100,00%	100%
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59	13	15	15	100,00%	7	7	100,00%	15	25%
	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	75	20	17	17	100,00%	4	3	75,00%	17	23%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	14	14	14	100,00%	14	14	100,00%	14	15%
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85	2	39	39	100,00%	9	9	100,00%	39	46%
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	20%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%

7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	2	4	4	100,00%	1	1	100,00%	4	31%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100,00%	40,00%	33,00%	82,50%	100%	100%
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	2	33%
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13	NA	3	3	100,00%	2	2	100,00%	3	23%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	22,73%	19,00%	83,60%	100%	100%
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	4	6	6	100,00%	NA	NA	NA	2	9%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8	1	4	4	100,00%	1	1	100,00%	4	50%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19	2	4	4	100,00%	1	1	100,00%	4	21%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	4	12	12	100,00%	3	3	100,00%	12	43%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100%	90%	90,00%	8,33%	8,33%	100,00%	100%	100%
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	NA	NA	NA	NA	1	1	100,00%	1	33%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	7	NA	3	3	100,00%	NA	NA	NA	2	29%
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	12	7	6	85,71%	NA	NA	NA	8	42%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	29	3	12	12	100,00%	3	3	100,00%	12	41%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28	1	12	12	100,00%	3	3	100,00%	12	43%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	23,21%	23,21%	100,00%	100%	100%
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	8	8	8	100,00%	9	9	100,00%	9	21%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32	8	11	11	100,00%	3	3	100,00%	12	38%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	20%
7	01	02			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100,00%	NA	NA	NA	100%	100%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	NA	NA	NA	100%	100%
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	5	7	7	100,00%	NA	NA	NA	8	31%
7	01	03			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	100%	100%
7	01	03	2.01		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	100%	100%

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	6	6	6	100,00%	6	6	100,00%	6	20%
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	5	4	4	100,00%	NA	NA	NA	5	28%
7	01	04			KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	20,00%	25,00%	100,00%	100%	100%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	0	3	3	100,00%	1	1	100,00%	3	38%
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	25%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	NA	NA	NA	100%	100%
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	20%
7	01	05			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100%	100%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100%	100%
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	410	75	90	90	100,00%	NA	NA	NA	150	37%
7	01	05	2.01	0002	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15	3	3	3	100,00%	1	1	100,00%	3	20%
7	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	25%
7	01	06			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100%	100%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	100%
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%	2	25%
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	2	2	2	100,00%	NA	NA	NA	1	14%

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	2	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	25%
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	0	1	1	100,00%	NA	NA	NA	1	33%
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	2	2	2	100,00%	1	1	100,00%	3	30%
7	01	06	2.01		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	1	1	1	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Pada subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada subkegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan pada subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat pada subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada subkegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada subkegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Sampai dengan triwulan I ini tidak ada target kinerja yang melebihi hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyaknya kegiatan dilaksanakan pada tw 2, 3 dan 4, karenan itu realisasi di tw 1 NA

- Pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah karena masih dalam proses penandatanganan DPA masih belum selesai. Sehingga anggaran penggandaan dan jilid belum bisa dilaksanakan
- Pada subkegiatan Evaluasi Penyusunan Dokumen Daerah Pembuatan Laporan kinerja tw 1 masih menunggu pohon kinerja dan PK yang sudah fix Pada subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD karena masih dalam proses perbaikan, karena setelah selai dilakukan penarikan beban penyusutan angka di sipd menjadi surplus. Sehingga anggaran penggandaan dan jilid belum bisa dilaksanakan
- Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD anggaran belum terealisasi karena lampiran laporan BMD TA 2024 masih menunggu Kertas Kerja Rekon yang belum Fix

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Beruntung Baru

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target

c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN MURNI TAHUN 2025	ANGGARAN SETELAH EFFISIENSI TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
			Volume	Satuan	DPA	DPA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
							TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3.700.910.519	3.632.290.519		1.040.511.791		909.757.261
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	82	Nilai	3.343.511.819	3.274.891.819	NA	971.188.991	NA	847.924.661
2	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Presentase	7.020.000	7.020.000	34,38%	2.349.000	31,25%	1.600.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	4.340.000	4.340.000	7	1.549.000	7	800.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	17	Laporan	2.680.000	2.680.000	4	800.000	3	800.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Presentase	1.960.680.000	1.960.680.000	25,00%	508.466.310	25,00%	467.069.868
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang	1.896.800.000	1.896.800.000	14	491.916.310	14	451.239.868
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39	Dokumen	63.160.000	63.160.000	9	15.830.000	9	15.830.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	720.000	720.000	1	720.000	1	0
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Presentase	452.000	452.000	25,00%	216.600	25,00%	0
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	452.000	452.000	1	216.600	1	0
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Presentase	32.040.000	26.040.000	40,00%	15.000.000	33,00%	375.000
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2.040.000	2.040.000	NA	NA	NA	NA
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3	orang	30.000.000	24.000.000	2	15.000.000	3	375.000
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Presentase	144.966.300	84.966.300	22,73%	40.316.950	19,00%	12.248.005
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	4.967.000	4.967.000	NA	NA	NA	NA
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	paket	11.999.500	11.999.500	1	4.567.000	1	4.783.000
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	1.499.800	1.499.800	1	374.950	1	240.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	126.500.000	66.500.000	3	35.375.000	3	7.225.000
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Presentase	474.657.000	473.447.000	8,33%	342.000.000	33,00%	323.400.000

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		342.000.000	342.000.000	1	342.000.000	1	323.400.000
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	2	paket	12.237.000	12.237.000	NA	NA	NA	NA
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	paket	120.420.000	119.210.000	NA	NA	NA	NA
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Presentase	143.760.518	143.760.518	25,00%	42.420.131	25,00%	30.359.688
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.000.518	10.000.518	3	2.500.131	3	102.750
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	133.760.000	133.760.000	3	39.920.000	3	30.256.938
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Presentase	579.936.001	578.526.001	23,21%	20.420.000	42,00%	12.872.100
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	101.040.000	101.040.000	9	18.390.000	8	12.623.100
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	unit	8.930.000	8.930.000	3	2.030.000	3	249.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	469.966.001	468.556.001	NA	NA	NA	NA
29	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Presentase	49.803.000	49.803.000	NA	12.786.000	NA	8.540.000
30	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Presentase	49.803.000	49.803.000	NA	12.786.000	NA	8.540.000
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	49.803.000	49.803.000	NA	12.786.000	NA	8.540.000
32	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Presentase	83.753.300	83.753.300	16,67%	20.001.800	16,67%	19.318.000
33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Presentase	83.753.300	83.753.300	16,67%	20.001.800	16,67%	19.318.000
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	LKM	21.877.800	21.877.800	6	15.877.800	6	15.613.000
35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	61.875.500	61.875.500	NA	4.124.000	NA	3.705.000
36	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	Presentase	24.122.000	24.122.000	20,00%	7.401.600	25,00%	7.401.600
37	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Presentase	20.191.000	20.191.000	25,00%	7.401.600	25,00%	7.401.600
38	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	16.260.000	16.260.000	1	7.401.600	1	7.401.600
39	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3.931.000	3.931.000	NA	NA	NA	NA
40	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Presentase	3.931.000	3.931.000	NA	NA	NA	NA

41	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3.931.000	3.931.000	NA	NA	NA	NA
42	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Presentase	179.428.400	179.428.400	20,00%	24.598.400	20,00%	23.908.000
43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Presentase	179.428.400	179.428.400	20,00%	24.598.400	20,00%	23.908.000
44	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	orang	35.772.000	35.772.000	NA	NA	NA	NA
45	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Laporan	105.461.000	105.461.000	1	17.444.000	1	16.910.000
46	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	38.195.400	38.195.400	NA	7.154.400	NA	6.998.000
47	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Presentase	20.292.000	20.292.000	25,00%	4.535.000	25,00%	2.665.000
48	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Presentase	20.292.000	20.292.000	25,00%	4.535.000	25,00%	2.665.000
49	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	Dokumen	4.767.000	4.767.000	1	2.765.000	25	2.665.000
50	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	3.017.000	3.017.000	NA	NA	NA	NA
51	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	3.017.000	3.017.000	NA	NA	NA	NA
52	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	2.217.000	2.217.000	NA	NA	NA	NA
53	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	Dokumen	7.274.000	7.274.000	1	1.770.000	1	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja dan Simondalev Beruntung Baru. Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, mengacu pada INMEN No. 2 Tahun 2025

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah **Rp 3.757.586.845,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).**Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada kekurangan anggaran pada kode rekening PPH21 PPPK
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor , melakukan pergeseran belanja materai ke sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan PKK, Monev, Musdes, dan Kegiatan yang menunjang lainnya

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah subkegiatan Pengadaan Mebel terdapat pengurangan anggaran yaitu pengurangan belanja lemari arsip kayu yang digeser ke sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat pergeseran belanja materai ke sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena adanya Pengurangan anggaran pembayaran Air dan Pengurangan di pembayaran listrik (karena KWH meter akan diganti, sedang token masih banyak, dari PLN menyarankan untuk menghabiskan token yang ada, sehingga tidak terdapat pengisian token)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena adanya PTT yang Resign maka dilakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena adanya penambahan belanja BBM Mobil Dinas Operasional sebesar Rp. 10.000.000,- dan penyesuaian target serta besaran paggu pemeliharaan yang menyesuaikan dengan Perpres no. 33 tahun 2020
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat pergeseran belanja materai ke sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena adanya penambahan perhitungan biaya rehabilitasi gedung aula Kecamatan Beruntung Baru berdasarkan hitungan konsultan.
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa karena adanya pengurangan anggaran uang saku dan selanjutnya di geser ke subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena adanya pengurangan kegiatan seperti POKJAKNAL yang sudah tidak relevan lagi dan tambahan anggaran untuk Banjar EXPO serta kegiatan Pembinaan BUMDES dan UMKM di desa
13. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan penambahan anggaran

dikarenakan banyaknya kegiatan dan honorarium yang tidak tercover di dalam DPA Murni

14. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa melakukan penambahan anggaran 1 juta perdesa untuk mone dan evaluasi APBDes sesuai dengan yang tertuang di dalam telaahaan staf camat

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	82 Nilai	3.700.910.519	3.757.586.845	56.676.326	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	A	A				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung baru	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	82 Nilai	82 Nilai	3.343.511.819	3.366.035.145	22.523.326	Penambahan Anggaran
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	7.020.000	7.020.000	0	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	4.340.000	4.340.000	0	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	2.680.000	2.680.000	0	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.960.680.000	1.960.680.000	0	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	1.896.800.000	1.896.800.000	0	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	63.160.000	63.160.000	0	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	720.000	720.000	0	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	452.000	452.000	0	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	452.000	452.000	0	
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	32.040.000	26.040.000	-6.000.000	
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000	2.040.000	0	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	3 Orang	30.000.000	24.000.000	-6.000.000	Melakukan Penyesuaian anggaran terhadap effisiensi dari pusat
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	144.966.300	130.766.300	- 14.200.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.967.000	1.267.000	-3.700.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.999.500	11.999.500	0	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.499.800	1.499.800	0	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	126.500.000	116.000.000	- 10.500.000	Melakukan Penyesuaian anggaran terhadap effisiensi dari pusat

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	474.657.000	458.210.000	- 16.447.000	
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	342.000.000	342.000.000	0	
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	12.237.000	9.180.000	-3.057.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	120.420.000	107.030.000	- 13.390.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	143.760.518	134.760.518	-9.000.000	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.518	1.000.518	-9.000.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain karena token listrik masih banyak, dan akan dilakukan pergantian kwh meter, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengisi token listrik
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	133.760.000	133.760.000	0	
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	579.936.001	648.106.327	68.170.326	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	101.040.000	111.041.295	10.001.295	Melakukan Penambahan Anggaran sesuai dengan telahaan Staf Camat

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	8.930.000	8.120.000	-810.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	469.966.001	528.945.032	58.979.031	Melakukan Penyesuaian Anggaran sesuai dengan perhitungan yang didapat dari konsultan
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	49.803.000	49.803.000	0	
33	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	49.803.000	49.803.000	0	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	49.803.000	49.803.000	0	
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	83.753.300	92.429.300	8.676.000	
36	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	83.753.300	92.429.300	8.676.000	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.877.800	15.877.800	-6.000.000	Melakukan Pergeseran pada sub kegiatan lain
38	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	61.875.500	76.551.500	14.676.000	Melakukan Penambahan Anggaran dari sub kegiatan lain dan penambahan sisanya sesuai dengan telahaan Staf Camat
39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	24.122.000	24.122.000	0	
40	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	20.191.000	20.191.000	0	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	16.260.000	16.260.000	0	
42	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3.931.000	3.931.000	0	
43	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	3.931.000	3.931.000	0	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
44	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	3.931.000	3.931.000	0	
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	179.428.400	192.828.400	13.400.000	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
46	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	179.428.400	192.828.400	13.400.000	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
47	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang	150 Orang	35.772.000	49.172.000	13.400.000	melakukan penambahan anggaran dari pergeseran sub kegiatan lain, karena anggaran yang ada tidak cukup
48	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	105.461.000	105.461.000	0	
49	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.195.400	38.195.400	0	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	20.292.000	32.369.000	12.077.000	
51	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	20.292.000	32.369.000	12.077.000	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
52	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4.767.000	16.844.000	12.077.000	Melakukan Penambahan Anggaran sesuai dengan telahaan Staf Camat
53	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.017.000	3.017.000	0	
54	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.017.000	3.017.000	0	
55	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.217.000	2.217.000	0	
56	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	7.274.000	7.274.000	0	

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Beruntung Baru secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;

2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Martapura, 20 Juni 2025
amat Beruntung Baru

Wahidin Noor, MMPd
Pembina
NIP: 197108151995061002

LAMPIRAN

1. SK pembentukan tim Renja Perubahan 2025
<https://drive.google.com/file/d/1ld22HnSM1YWKK4SD3sQSE-6lytiITvm/view?usp=sharing>
2. Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (cetak SIPD RI)
https://drive.google.com/file/d/1YC-11scZXk8AOK2TyOMqilm_tel03ABI/view?usp=drive_link

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)”)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor XX tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
28. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.
29. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk Menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD Murni tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 3.617.076.000,-** (*Tiga milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah*) karena adanya Effisiensi anggaran pada tahun 2025 Pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 3.553.576.000,-** (*Tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) dan pada saat perubahan Kecamatan Martapura Barat melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 48 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **Rp 3.772.780.000,-** (*Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel : 2. 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7	Urusan : Unsur Kewilayahan												
7. 1	Bidang Urusan : Kecamatan												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	85	86	86,02	100,02	87,66	NA	NA	87,66	86,02
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Predikat SAKIP	82 / A	78,45 / BB	-	81,07 / A	-	82/ A	NA	NA	82/ A	81,07 / A
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	96,73	84,82	77	92,50	120,13	93,89	NA	NA	93,89	92,50
7. 1. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	88	85,79	76	86,43	113,72	87	NA	NA	87	86,43
7. 1. 1. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	48,26	48,26	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 1. 2. 01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41	19	6	6	100	1	1	100	26	63,41
7. 1. 1. 2. 01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	2	2	100	1	1	100	4	80,00
7. 1. 1. 2. 01. 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	7	1	2	2	100	2	2	100	5	71,43
7. 1. 1. 2. 01. 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	1	2	2	100	0	0	0	3	42,86
7. 1. 1. 2. 01. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	28	3	12	12	100	1	1	100	16	57,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
7. 1. 1. 2. 01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	4	4	4	100	5	5	100	13	44,83
7. 1. 1. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	28,96	28,96	100	100	100
7. 1. 1. 2. 02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	28	15	15	100	15	15	100	15	15
7. 1. 1. 2. 02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	20	5	4	4	100	10	10	100	19	95,00
7. 1. 1. 2. 02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	4	2	1	1	100	1	1	100	4	100,00

Commented [L1]: Cek kembali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
7. 1. 1. 2. 02. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	0	4	4	100	4	4	100	8	66,67
7. 1. 1. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	30,4	30,4	100	100	100
7. 1. 1. 2.03. 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	8	4	4	100	1	1	100	13	92,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	100	100	100	100	19,18	19,18	100	100	100
7. 1. 1. 2.05. 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41	2	4	4	100	3	3	100	9	21,95
7. 1. 1. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13	1	1	1	100	0	0	100	2	15,38
7. 1. 1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	100	100	100	100	31,02	31,02	100	100	100
7. 1. 1. 2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	21	10	4	4	100	1	1	100	15	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
			Bangunan Kantor yang Disediakan										
7. 1. 1. 2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	33	4	4	100	1	1	100	38	97,44
7. 1. 1. 2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23	14	4	4	100	1	1	100	19	82,61
7. 1. 1. 2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17	26	4	4	100	1	1	100	31	182,35
7. 1. 1. 2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19	5	4	4	100	1	1	100	10	52,63
7. 1. 1. 2.06. 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	98	51	12	12	100	3	3	100	66	67,35
7. 1. 1. 2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	12	12	100	3	3	100	39	65,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100	76,63	76,63	100	100	100
7.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. 1. 1. 2.07. 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103	1	10	10	100	0	0	100	11	10,68
7. 1. 1. 2.07. 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	7	12	12	100	3	3	100	22	55,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0	0	0	100	0	0,00
7. 1. 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	25,43	25,43	100	100	100
7. 1. 1.2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	24	12	0	0	0	3	3	100	15	62,50
7. 1. 1.2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	3	3	100	39	65,00
7. 1. 1.2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59	22	12	12	100	4	4	100	38	64,41
7. 1. 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100	26,95	26,95	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 1. 2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	0	6	6	100	2	2	100	8	50,00
7. 1. 1. 2.09. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	16	0	0	0	6	6	100	22	95,65
7. 1. 1. 2.09. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	4	9	9	100	1	1	100	14	63,64
7. 1. 1. 2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	3	1	1	100	0	0	100	4	66,67
7. 1. 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai	100	100	100	100	100	21,88	21,88	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
			dengan standar pelayanan										
7. 1. 2. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100	44	44	100	100	100
7. 1. 2. 2.01. 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28	2	0	0	0	13	13	100	15	53,57
7. 1. 2. 2.01. 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41	2	13	13	100	13	13	100	28	68,29
7. 1. 2. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Terselenggranya Urusan	Persentase Fasilitasi	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana										
7. 1. 2. 2.02. 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	46	40	0	0	0	0	0	100	40	86,96
7. 1. 2. 2.02. 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30	2	0	0	0	13	13	100	15	50,00
7. 1. 2. 2.02. 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62	10	13	13	100	13	13	100	36	58,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 2. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100	24	24	100	100	100
7. 1. 2. 2.04. 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13	10	13	13	100	13	13	100	36	276,92
7. 1. 3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100	100	100	30,97	30,97	100	100	100
7. 1. 3. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	100	100	100	100	46,45	46,45	100	100	100
7. 1. 3. 2.01. 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	58	19	13	13	100	13	13	100	45	77,59

Commented [L2]: Cek kembali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 3. 2.01. 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	14	13	13	100	13	13	100	40	100,00
7. 1. 3. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
7. 1. 3. 2.03. 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	43	4	13	13	100	0	0	100	17	39,53
7. 1. 3. 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
7. 1. 3. 2.06. 3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	24	1	3	3	100	0	0	100	4	16,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 3. 2.06. 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	<i>Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	11	1	3	3	100	0	0	100	4	36,36
7. 1. 4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
7. 1. 4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
7. 1. 4. 2.01. 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35	3	5	5	100	0	0	100	8	22,86
7. 1. 4. 2.01. 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	29	2	1	1	100	0	0	100	3	10,34

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
		<i>Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
7. 1. 4. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		<i>Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
7. 1. 4. 2.02. 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		<i>Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	32	4	3	3	100	0	0	100	7	21,88
7. 1. 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan</i>	100	100	100	100	100	6,25	6,25	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Peringkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
		urusan pemerintahan umum	umum yang terlaksana										
7. 1. 5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	6,25	6,25	100	100	100
7. 1. 5. 2.01. 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	545	51	150	150	100	0	0	100	201	36,88

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
		<i>Kesatuan Republik Indonesia</i>	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7. 1. 5. 2.01. 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29	0	12	12	100	3	3	100	15	51,72
7. 1. 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100	100	100	43,3	43,3	100	100	100
7. 1. 6. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	43,3	43,3	100	100	100
7. 1. 6. 2.01. 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40	13	13	13	100	13	13	100	39	97,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 6. 2.01. 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42	1	13	13	100	13	13	100	27	64,29
7. 1. 6. 2.01. 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	52	1	13	13	100	13	13	100	27	51,92
7. 1. 6. 2.01. 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	39	2	0	0	0	0	0	100	2	5,13
7. 1. 6. 2.01. 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	40	1	13	13	100	13	13	100	27	67,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program Kegiatan, sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4*100)
7. 1. 6. 2.01. 15	Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	52	12	13	13	100	0	0	100	0	0,00
7. 1. 6. 2.01. 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	52	13	13	13	100	13	13	100	13	25,00

Sumber Data : Laporan Hasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan 2025

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, secara keseluruhan sudah dapat atau memenuhi target kinerjanya. Sehingga tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I Tahun 2025.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 dokumen sudah tercapai 1 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 dokumen sudah tercapai 1 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja triwulan I yaitu 2 dokumen sudah tercapai 2 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 dokumen sudah tercapai 0 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 laporan sudah tercapai 1 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target triwulan I yaitu 5 Laporan sudah tercapai 5 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja triwulan I yaitu 15 orang/bulan sudah tercapai 15 orang / bulan dan tingkat realisasi 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 10 dokumen sudah tercapai 10 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 laporan sudah tercapai 1 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 4 laporan sudah tercapai 4 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 laporan sudah tercapai 0 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Administrasi kepegawaian Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 dokumen sudah tercapai 3 dokumen dan realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 orang sudah tercapai 0 orang dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 paket sudah tercapai 1 paket dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 paket sudah tercapai 1 paket dan tingkat realisasi 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 paket sudah tercapai 1 paket dan tingkat realisasi 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 paket sudah tercapai 1 paket dan tingkat realisasi 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 paket sudah tercapai 1 paket dan tingkat realisasi 100%.
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 laporan sudah tercapai 3 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 laporan sudah tercapai 3 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 paket sudah tercapai 0 paket dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 unit sudah tercapai 3 unit dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 unit sudah tercapai 0 unit dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 laporan sudah tercapai 3 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 laporan sudah tercapai 3 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja triwulan I yaitu 4 laporan sudah tercapai 4 laporan dan tingkat realisasi 100%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 2 unit sudah tercapai 2 unit dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja triwulan I yaitu 6 unit sudah tercapai 6 unit dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. dengan target kinerja triwulan I yaitu 1 unit sudah tercapai 1 unit dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 unit sudah tercapai 0 unit dan tingkat realisasi 100%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUBLIK

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 dokumen sudah tercapai 13 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 dokumen sudah tercapai 0 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan target

kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 lembaga kemasyarakatan sudah tercapai 13 lembaga kemasyarakatan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 keluarga sudah tercapai 0 keluarga dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 keluarga sudah tercapai 0 keluarga dan tingkat realisasi 100%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 laporan sudah tercapai 0 laporan dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 laporan sudah tercapai 0 laporan dan tingkat realisasi 100%.
- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 laporan sudah tercapai 0 laporan dan tingkat realisasi 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 orang sudah tercapai 0 orang dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target kinerja triwulan I yaitu 3 dokumen sudah tercapai 3 dokumen dan tingkat realisasi 100%.

**6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan yaitu:
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 dokumen sudah tercapai 13 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 dokumen sudah tercapai 13 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 dokumen sudah tercapai 13 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
- Kurang satu subkeg
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 dokumen sudah tercapai 13 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
- Sub kegiatan Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan target kinerja triwulan I yaitu 0 dokumen sudah tercapai 0 dokumen dan tingkat realisasi 100%.
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan target kinerja triwulan I yaitu 13 laporan sudah tercapai 13 laporan dan tingkat realisasi 100%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Untuk realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan I, **tidak ada**, realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran terpenuhi sesuai target yang direncanakan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi dengan Indikator Utama Kecamatan Martapura Barat yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan Predikat Sakip sampai dengan Triwulan I ini masih belum bisa disampaikan mengingat pelaksanaan penilaian indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada triwulan IV.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- a. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan ada menggunakan jasa narasumber / pembicara, kegiatan terhambat/ tertunda karena menyesuaikan jadwal dan kesediaan dari narasumber .
- b. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang penempatan rencana pelaksanaan nya pada triwulan II, III dan IV
- c. Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan , Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum bisa di laksanakan karena harus menyesuaikan dengan kesediaan pagu belanja dan kesediaan Jasa Narasumber
- d. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga belum bisa dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan ini telah dijadwal kan pada setiap bulan agustus pada setiap tahunnya.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya Anggaran dan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu:

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Memonitoring pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tiap- tiap pemangku kegiatan hingga sub kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Commented [L3]: Cek kembali yg bertanda kuning

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLU ME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK 7	Rp. 8	RK 11	Rp. 12
1	2		3	4	5	6				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	NILAI	Rp 3.553.576.000	34,61	Rp 1.136.831.231	34,61	Rp 1.096.228.502
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Predikat SAKIP	82 / A	PREDIKAT					
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	93,89	Nilai					
I	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	87/ BB	Indeks	Rp 3.133.437.000	NA	Rp 1.059.997.231	NA	Rp 1.019.394.502
1.1	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	Rp 46.000.000	48,26	Rp 17.521.500	48,26	Rp 17.521.500
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 10.000.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp 7.000.000	1	Rp 6.643.000	1	Rp 6.643.000
1.1.3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2	Dokumen	Rp 7.000.000	2	Rp 7.000.000	2	Rp 7.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
1.1. 4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 6.000.000	0	Rp -	0	Rp -
1.1. 5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	Rp 8.000.000	1	Rp 875.000	1	Rp 875.000
1.1. 6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	Rp 8.000.000	5	Rp 1.500.000	5	Rp 1.500.000
1.2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	Persen	Rp 1.958.180.000	28,96	Rp 565.768.729	28,96	Rp 525.768.000
1.2. 1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang/ Bulan	Rp 1.884.700.000	15	Rp 545.065.729	15	Rp 505.065.000
1.2. 2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	37	Dokumen	Rp 63.480.000	10	Rp 15.870.000	10	Rp 15.870.000
1.2. 3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	Rp 5.000.000	1	Rp 3.638.000	1	Rp 3.638.000

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLU ME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	Rp 5.000.000	4	Rp 1.195.000	4	Rp 1.195.000
1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	Rp 6.181.000	30,40	Rp 943.000	30,40	Rp 943.000
1.3.1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Rp 618.100	1	Rp 943.000	1	Rp 943.000
1.4	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	Rp 36.100.000	19,42	Rp 1.510.000	19,42	Rp 1.510.000
1.4.1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Laporan	Rp 6.100.000	3	Rp 1.510.000	3	Rp 1.510.000
1.4.2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	3	Orang	Rp 30.000.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	
			Peraturan Perundang-Undangan							
1.5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrase Umum Perkantoran	100	Persen	Rp 164.100.000	32,39	Rp 43.727.000	32,39	Rp 43.725.000
1.5. 1	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 4.000.000	1	Rp 1.030.000	1	Rp 1.030.000
1.5. 2	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 5.000.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000
1.5. 3	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	Rp 5.000.000	1	Rp 1.320.000	1	Rp 1.320.000
1.5. 4	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 22.000.000	1	Rp 5.602.000	1	Rp 5.600.000
1.5. 5	<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	Rp 8.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000
1.5. 6	<i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 5.100.000	3	Rp 1.275.000	3	Rp 1.275.000
1.5. 7	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp 115.000.000	3	Rp 31.000.000	3	Rp 31.000.000
1.6	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai	100	Persen	Rp 492.000.000	76,63	Rp 358.347.000	76,63	Rp 358.347.000

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dengan Rencana Kebutuhan							
1.6. 1	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.6. 2	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.6. 3	<i>Tersedianya Mebel</i>	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63	Unit	Rp 88.000.000	0	Rp -	0	Rp -
1.6. 4	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Rp 377.000.000	3	Rp 358.347.000	3	Rp 358.347.000
1.6. 5	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Rp 27.000.000	0	Rp -	0	Rp -
1.7	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Rp 226.000.000	25,43	Rp 51.530.002	25,43	Rp 51.530.002
1.7. 1	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Rp 14.000.000	3	Rp 2.900.002	3	Rp 2.900.002
1.7. 2.	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 35.000.000	3	Rp 9.390.000	3	Rp 9.390.000

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
1.7. 3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	Rp 177.000.000	3	Rp 39.240.000	3	Rp 39.240.000
1.8	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	Rp 268.376.000	26,95	Rp 20.650.000	26,95	Rp 20.050.000
1.8. 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	Rp 65.000.000	2	Rp 13.600.000	2	Rp 13.000.000
1.8. 2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	Rp 25.376.000	6	Rp 6.250.000	6	Rp 6.250.000
1.8. 3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 8.000.000	1	Rp 800.000	1	Rp 800.000
1.8. 4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	Rp 170.000.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100	Persen	Rp 170.000.000	21,88	Rp 29.376.000	21,88	Rp 29.376.000
2.1	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	Rp 30.000.000	44	Rp 10.000.000	44	Rp 10.000.000
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13	Laporan	Rp 10.000.000	13	Rp -	13	Rp -
2.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	Laporan	Rp 20.000.000	13	Rp 10.000.000	13	Rp 10.000.000
2.2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Persen	Rp 40.000.000	0	Rp -	0	Rp -
2.2.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan	Perencanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLU ME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
	Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
2.2. 2	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	Rp 15.000.000	13	Rp -	13	Rp -
2.2. 3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	Rp 10.000.000	13	Rp -	13	Rp -
2.3	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	Rp 100.000.000	24	Rp 19.376.000	24	Rp 19.376.000
2.3. 1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13	Laporan	Rp 19.376.000	13	Rp 19.376.000	13	Rp 19.376.000
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	Persen	Rp 98.724.000	30,97	Rp 25.948.000	30,97	Rp 25.948.000
3.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	Rp 65.816.000	46,45	Rp 25.948.000	46,45	Rp 25.948.000
3.1. 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	13	Lembaga Kemasyaraka tan	Rp 22.308.000	13	Rp 22.308.000	13	Rp 22.308.000

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
3.1.2	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	Rp 43.508.000	13	Rp 3.640.000	13	Rp 3.640.000
3.1	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Persen	Rp 8.954.000	100	Rp -	100	Rp -
3.1.1	Evaluasi Kelurahan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	Lembaga Kemasyaraktan	Rp 8.954.000	0	Rp -	0	Rp -
3.2	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	Rp 23.954.000	100	Rp -	100	Rp -
3.2.1	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13	Keluarga	Rp 8.954.000	0	Rp -	0	Rp -
3.2.2	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	13	Keluarga	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -
4	Meningkatnya upaya penyelenggaraan	PROGRAM KOORDINASI	Persentase gangguan keamanan dan	100	Persen	Rp 28.000.000	100	Rp -	100	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ketentraman dan ketertiban umum	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban yang ditindaklanjuti							
4.1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	Rp 18.000.000	100	Rp -	100	Rp -
4.1.1	<i>Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	Rp 15.000.000	0	Rp -	0	Rp -
4.1.2	<i>Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13	Laporan	Rp 3.000.000	0	Rp -	0	Rp -
4.2	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	Rp 10.000.000	100	Rp -	100	Rp -
4.2.1	<i>Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	13	Laporan	Rp 10.000.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
		Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia							
5	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	Persen	Rp 80.020.000	6,25	Rp 3.000.000	6,25	Rp 3.000.000
5.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	Rp 80.020.000	6,25	Rp 3.000.000	6,25	Rp 3.000.000
5.1.1	<i>Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	orang	Rp 60.020.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLU ME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
5.1. 2	<i>Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	Rp 20.000.000	3	Rp 3.000.000	3	Rp 3.000.000
6	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	Rp 43.395.000	43,30	Rp 18.510.000	43,30	Rp 18.510.000
6.1	<i>Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	Rp 43.395.000	43,30	Rp 18.510.000	43,30	Rp 18.510.000
6.1. 1	<i>Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	13	Rp 5.000.000	13	Rp 5.000.000
6.1. 2	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	13	Rp -	13	Rp -
6.1. 3	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	13	Rp 5.000.000	13	Rp 5.000.000
6.1. 4	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN	
				VOLU ME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I	
							TK	Rp.	RK	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	11	12
6.1. 5	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13	Dokumen	Rp 6.000.000	13	Rp 6.000.000	13	Rp 6.000.000
6.1. 6	<i>Terlaksananya Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13	Dokumen	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -
6.1. 7	<i>Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13	Laporan	Rp 12.395.000	13	Rp 2.510.000	13	Rp 2.510.000

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak Ada perubahan untuk jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 18 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar setelah APBD perubahan adalah Rp **3.772.780.000,-** (*Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan :
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD perubahan penambahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pergeseran pagu.
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan perubahan pengurangan pagu karena adanya kebijakan Effesiesni anggaran.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perubahan pengurangan pagu karena adanya kebijakan Effesiesni anggaran.
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya perubahan penambahan pagu anggaran karena adanya penambahan jumlah unit.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD perubahan pengurangan pagu karena adanya pergeseran pagu.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terjadi perubahan pengurangan pagu karena adanya pergeseran pagu.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terjadi perubahan penambahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pergeseran pagu.
2. Pada Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan sub kegiatan :
- Sub kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan terjadi perubahan pengurangan pagu karena adanya pergeseran pagu.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan terjadi perubahan pengurangan pagu karena adanya pergeseran pagu.
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sub kegiatan :
- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terjadi perubahan penambahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pergeseran pagu untuk belanja Dekorasi Expo tahun 2025
 - Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga terjadi perubahan pengurangan pagu karena adanya pergeseran pagu ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin lainnya
4. Pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Pagu anggaran **Bertambah** diluar anggaran belanja APBD Murni.

- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pagu anggaran **Bertambah** diluar anggaran belanja APBD Murni.
5. Pada Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan yaitu :
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Sebagian Pagu **pergeseran dan ada juga penambahan** pagu belanja
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pagu **bergeser** ke sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya pagu **Bertambah** karena menyesuaikan usulan dari Forum Camat tidak bisa melaksanakan dan di alihkan

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

N O	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	TARGET		PAGU			Alasan Perubahan/ Keterangan
				RENJA 2025 (SIPD RKPD 2025	PERUBAHAN RENJA 2025 (PENETAPAN APBDP SESUAI SIPD)	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	JUMLAH PERUBAHAN (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	87,66	Rp 3.403.485.872	Rp 3.772.780.000	Rp 369.294.128	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Predikat Sakip	Predikat Sakip	85 (Nilai)	A (82)				
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	93,89	93,89				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82 (Indeks)	87 (Indeks)	Rp 2.983.346.872	Rp 3.291.828.000	Rp 308.481.128	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 46.000.000	Rp 52.404.000	Rp 6.404.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

			daerah sesuai ketentuan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	Rp 7.000.000	Rp 13.404.000	Rp 6.404.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 (Laporan)	5 (Laporan)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp -	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Laporan)	17 (Laporan)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp -	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 2.056.589.872	Rp 1.996.780.000	-Rp 59.809.872	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 (Orang/ bulan)	15 (Orang/ bulan)	Rp 1.983.109.872	Rp 1.923.300.000	-Rp 59.809.872	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an danPengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4 (Dokumen)	37 (Dokumen)	Rp 63.480.000	Rp 63.480.000	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 (Laporan)	1 (Laporan)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	4 (Laporan)	18 (Laporan)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik	Persentase Laporan Pengelolaan dan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 6.181.000	Rp 6.181.000	Rp -	

		Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Aset Barang Milik Daerah						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 (Laporan)	4 (Laporan)	Rp 6.181.000	Rp 6.181.000	Rp -	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 36.100.000	Rp 30.100.000	-Rp 6.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu efisiensi
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 (Dokumen)	12 (Dokumen)	Rp 6.100.000	Rp 6.100.000	Rp -	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 (Orang)	2 (Orang)	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	-Rp 6.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu efisiensi

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasi nya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 194.100.000	Rp 151.100.000	-Rp 43.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu efisiense	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 (Paket)	4 (Paket)	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp -		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 (Paket)	4 (Paket)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 (Paket)	4 (Paket)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 (Paket)	4 (Paket)	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000	Rp -		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 (Paket)	4 (Paket)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp -		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 (Laporan)	12 (Laporan)	Rp 5.100.000	Rp 5.100.000	Rp -	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 (Laporan)	12 (Laporan)	Rp 145.000.000	Rp 102.000.000	-Rp 43.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu efisiensi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 150.000.000	Rp 550.057.000	Rp 400.057.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 (Unit)	63 (Unit)	Rp 88.000.000	Rp 88.000.000	Rp -	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 (Unit)	7 (Unit)	Rp 35.000.000	Rp 435.057.000	Rp 400.057.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 (Unit)	2 (Unit)	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp -	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 226.000.000	Rp 212.000.000	-Rp 14.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 (Laporan)	0 (Laporan)	Rp 14.000.000	Rp -	-Rp 14.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp -	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 177.000.000	Rp 177.000.000	Rp -	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 268.376.000	Rp 293.206.000	Rp 24.830.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 (Unit)	1 (Unit)	Rp 65.000.000	Rp 47.720.000	-Rp 17.280.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 (Unit)	7 (Unit)	Rp 25.376.000	Rp 73.336.000	Rp 47.960.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 (Unit)	3 (Unit)	Rp 8.000.000	Rp 2.150.000	-Rp 5.850.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 (Unit)	7 (Unit)	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000	Rp -	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 170.000.000	Rp 146.630.000	-Rp 23.370.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp -	
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses						
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanju ti						

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp -	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 30.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu

			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti						
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	13 (dokumen)	0 (dokumen)	Rp 15.000.000	Rp -	-Rp 15.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13 (Laporan)	0 (Laporan)	Rp 15.000.000	Rp -	-Rp 15.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 100.000.000	Rp 106.630.000	Rp 6.630.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 100.000.000	Rp 106.630.000	Rp 6.630.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 98.724.000	Rp 158.724.000	Rp 60.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 65.816.000	Rp 140.816.000	Rp 75.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
			Persentase Pelayanan yangsesuai dengan Standar Pelayanan						
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanju ti						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 (LK)	13 (LK)	Rp 22.308.000	Rp 22.308.000	Rp -	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 43.508.000	Rp 118.508.000	Rp 75.000.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaa n Lembaga	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 8.954.000	Rp 8.954.000	Rp -	

		Tingkat Kecamatan	Kemasyarakan Tingkat Kecamatan						
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti						
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Diselenggarakan	13 (LK)	13 (LK)	Rp 8.954.000	Rp 8.954.000	Rp -	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 23.954.000	Rp 8.954.000	-Rp 15.000.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						

			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti						
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13 (Keluarga)	13 (Keluarga)	Rp 8.954.000	Rp 8.954.000	Rp -	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	13 (Keluarga)	13 (Keluarga)	Rp 15.000.000	Rp -	-Rp 15.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 28.000.000	Rp 39.623.000	Rp 11.623.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 18.000.000	Rp 21.740.000	Rp 3.740.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

			Ketertiban Umum							
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan							
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 15.000.000	Rp 18.740.000	Rp 3.740.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -		

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 10.000.000	Rp 17.883.000	Rp 7.883.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 10.000.000	Rp 17.883.000	Rp 7.883.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintah n umum yang terlaksana	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 80.020.000	Rp 80.020.000	Rp	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintah n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanju ti	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 80.200.000	Rp 80.020.000	Rp	-

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 (ORANG)	150 (ORANG)	Rp 60.200.000	Rp 60.200.000	Rp -		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 (Dokumen)	12 (Dokumen)	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp -		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 43.395.000	Rp 55.955.000	Rp 12.560.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 (Persen)	100 (Persen)	Rp 43.395.000	Rp 55.955.000	Rp 12.560.000	Adanya perubahan indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029 dan Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 5.000.000	Rp 9.902.000	Rp 4.902.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 5.000.000	Rp -	-Rp 5.000.000	Adanya perubahan anggaran karena pengurangan pagu
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -	

	Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13 (dokumen)	13 (dokumen)	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 (Laporan)	13 (Laporan)	Rp 12.395.000	Rp 25.053.000	Rp 12.658.000	Adanya perubahan anggaran karena penambahan pagu

Sumber data: SIPD RI- Perubahan Renja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu

“ Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong Dan Keadilan “

Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Barat Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Martapura Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjut nya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Martapura, 20 Juni 2025
Camat Martapura Barat

H. AHMAD RABANI, AKS, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19690115 199002 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BANJAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN MARTAPURA BARAT							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.635.520.000,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.635.520.000,00		
	7.01	KECAMATAN							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.635.520.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKRI)				78 Indeks	87 Indeks	2.983.346.872,00	3.196.937.000,00	3.291.828.000,00	1.185.163.128,00							4.168.500.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pembuat Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	46.000.000,00	46.000.000,00	52.404.000,00	6.404.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan PTT Kecamatan Martapura Barat		48.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	13.404.000,00	6.404.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	17 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 Persen	100 Persen	2.056.589.872,00	1.956.180.000,00	1.996.780.000,00	59.809.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan PTT Kecamatan Martapura Barat		2.575.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/ Bulan Chan gbulan	15 Orang/ Bulan Chan gbulan	1.983.109.872,00	1.884.700.000,00	1.923.300.000,00	59.809.872,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	37 Dokumen	63.480.000,00	63.480.000,00	63.480.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENGELOMPOK JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025									RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 02 0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengawasan Aset Barang Milik Daerah			100 persen 100 Persen	100 Persen	6.181.000,00	6.181.000,00	6.181.000,00		0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASRI dan PTT Kecamatan Martapura Barat		5.500.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 03 0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	6.181.000,00	6.181.000,00	6.181.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 05			Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah sesuai Ketetapan dan tepat Waktu			100 Persen	100 Persen	36.100.000,00	36.100.000,00	30.100.000,00		-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASRI dan PTT Kecamatan Martapura Barat		43.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 05 0005			Monitoring, Evaluasi, dan Pemilisan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pemilisan Kinerja Pegawai			4 Dokumen Dokumen	12 Dokumen	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 05 0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00		-6.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tuntaslitasnya Penyediaan/urusan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran			100 % 100 Persen	100 Persen	184.100.000,00	184.100.000,00	151.100.000,00		-43.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASRI dan PTT Kecamatan Martapura Barat		205.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06 0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 Paket Paket	4 Paket Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06 0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket Paket	4 Paket Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06 0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal				4 Paket Paket	4 Paket Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06 0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4 Paket Paket	4 Paket Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
7 01 01 2 06 0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENBRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiriman yang Disediakan</i>				4 Paket Paket	4 Paket Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	145.000.000,00	115.000.000,00	102.000.000,00	-43.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</i>				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	492.000.000,00	560.057.000,00	400.057.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASH dan PTT Kecamatan Martapura Barat		780.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Sri Manggala	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			420.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7	NON URUSAN							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan																			
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
	7.01	KECAMATAN							3.403.486.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit Unit	4 Unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Sri Manggala	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil																			
			<i>Jumlah Paket Mobil yang Disediakan</i>				63 Unit Unit	63 Unit Unit	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit Unit	7 Unit	35.000.000,00	377.000.000,00	435.057.000,00	400.057.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	2 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>				100 Persen	100 Persen	226.000.000,00	226.000.000,00	212.000.000,00	-14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASH dan PTT Kecamatan Martapura Barat		224.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan Laporan	0 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)					NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	177.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			180.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terteliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan				100 Porsen	100 Porsen	268.376.000,00	268.376.000,00	293.206.000,00	24.830.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASRI dan PTT Kecamatan Martapura Barat		288.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pororangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pororangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				2 Unit Unit	1 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	47.720.000,00	-17.280.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				5 Unit Unit	7 Unit	25.376.000,00	25.376.000,00	73.336.000,00	47.960.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit Unit	3 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	2.150.000,00	-5.850.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				4 Unit Unit	7 Unit Unit	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
7		NON URUSAN							3.403.485.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.403.485.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.403.485.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
7.01		KECAMATAN							3.403.485.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	369.294.128,00							4.636.620.000,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan				85 %	100 Porsen	170.000.000,00	170.000.000,00	146.630.000,00	8.000.000,00							178.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang Mulaan diukur Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Porsen	100 Porsen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan ASRI PTT, Infero Kecamatan Martapura Barat		35.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Martapura Barat, Sel Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pengertian Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen Dokumen	13 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan ASN, PTT Intern Kecamatan Martapura Barat		33.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				13 Dokumen Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 %	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	106.630.000,00	6.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan ASN, PTT Intern Kecamatan Martapura Barat		110.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tertakut dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	106.630.000,00	6.630.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi				85 Nilai	100 Persen	98.724.000,00	98.724.000,00	158.724.000,00	4.276.000,00							103.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase dan Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	65.816.000,00	65.816.000,00	140.816.000,00	75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat dan ASN, PTT Intern Kecamatan Martapura Barat		68.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	22.308.000,00	22.308.000,00	22.308.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			23.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	43.508.000,00	43.508.000,00	118.508.000,00	75.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase dan Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat dan Intern Kecamatan		9.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diorganisir				13 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2026				RKPD PERUBAHAN 2026	NASIONAL				DAERAH	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pembudayaan dan Keselamatan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan Fasilitas Pembudayaan dan Keselamatan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				-	100 Persen 100 Persen	23.954.000,00	23.954.000,00	8.954.000,00	-15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Menyarakat dan ASH, PTT, Intern Kecamatan Martapura Barat		26.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					13 Keluarga Keluarga	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT	
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					13 Keluarga Keluarga	0 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		17.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 85 Persen Nilai	100 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	39.623.000,00	-7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			21.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	18.000.000,00	21.740.000,00	3.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Menyarakat dan ASH, PTT, Intern Kecamatan Martapura Barat	21.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	18.740.000,00	3.740.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penetapan dan Peningkatan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penetapan dan Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				-	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	17.883.000,00	7.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Menyarakat dan ASH, PTT, Intern Kecamatan Martapura Barat	0,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					13 Laporan Laporan	13 Laporan Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	17.883.000,00	7.883.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		0,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100 78,84,70 85 Persen Nilai Nilai	100 Persen	80.020.000,00	80.020.000,00	80.020.000,00	40.000.000,00						120.020.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen 100 Persen	80.020.000,00	80.020.000,00	80.020.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Menyarakat dan ASH, PTT, Intern Kecamatan Martapura Barat	120.020.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Penguatan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Penguatan Ketahanan Nasional					150 Orang	150 Orang	60.020.000,00	60.020.000,00	60.020.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		60.020.000,00	KECAMATAH MARTAPURA BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa				100 75 84,70 85 Persen Nilai Nilai	100 Persen	43.395.000,00	43.395.000,00	55.955.000,00	1.605.000,00							45.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang dibundakakumul				100 persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	43.395.000,00	43.395.000,00	55.955.000,00	12.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan ASH - PTT Intern Kecamatan Martapura Barat		45.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	9.902.000,00	4.902.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 dokumen Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0007	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0015	Facilitasi Penataan, Pemeliharaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemeliharaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				13 Laporan	13 Laporan	12.395.000,00	12.395.000,00	25.053.000,00	12.658.000,00	Kab. Banjar, Martapura Barat, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
			J U M L A H						3.403.485.872,00	3.617.076.000,00	3.772.780.000,00	613.128.163.158,28							4.635.620.000,00	

42. Kecamatan Sambung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamantkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5).
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26)

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.413.103.991,- (*Tiga milyar empat ratus tiga belas juta seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) dan pada saat perubahan Kecamatan Sambung Makmur melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 3.298.571.998,- (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar sampai triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada Sub kegiatan :

 1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada sub kegiatan :
 1. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pada sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, ada sub kegiatan :
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada sub kegiatan :
 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

2. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA, TERDIRI DARI:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERDIRI DARI:
 - 2.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERDIRI DARI:
 - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERDIRI DARI:
 - 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA TERDIRI DARI:
 - 5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan dan ada pada triwulan IV.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan II tahun 2025:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah disebabkan belum dilaksanakannya penjilidan dokumen, sedangkan laporannya sudah selesai dan sudah diverifikasi oleh Bidang Akuntansi.
2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai faktor penghambatnya disebabkan oleh keterlambatan peng-SPJ-an, sedangkan kegiatan sudah dilaksanakan.
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan faktor penghambatnya disebabkan kurangnya anggaran kas pada triwulan II, sedangkan SPJ dan belengkapannya sudah selesai.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya faktor penghambatnya adalah belum masuknya jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin.
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya faktor penghambatnya adalah sub kegiatan ini masuk dalam kategori anggaran perubahan, yang akan dilaksanakan pada triwulan III.
6. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan faktor penghambatnya adalah menunggu tindak lanjut dan jadwal kegiatan dari kabupaten (Dinas Sosial), sebagai induk dari kegiatan TKSK dan Poskesos.

7. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, faktor penghambatnya disebabkan belum masuknya jadwal kegiatan, kegiatan dilaksanakan di triwulan III.
8. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, faktor pengahambatnya adalah belum masuknya jadwal kegiatan, kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV.
9. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, faktor pengahambatnya adalah belum masuknya jadwal kegiatan, kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV.
10. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, faktor pengahambatnya adalah belum masuknya jadwal kegiatan, kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV.
11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, faktor pengahambatnya adalah belum masuknya jadwal kegiatan, kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV.
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, faktor penyebabnya adalah
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, faktor penghambatnya adalah sub kegiatan ini masuk dalam rencana perubahan anggaran.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.

- Adanya petunjuk, arahan serta komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
- koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Sambung Makmur.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR TAHUN 2025 SD TRIWULAN II

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN			
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	TK	Rp	RK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78	Nilai	3.120.969.650	-	943.410.577	-	880.649.560	-	836.066.76 4	-	460.842.699
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	8.172.000	50%	4.065.500	50%	4.106.500	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	5.246.000	4	2.627.500	4	2.618.500	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2.926.000	1	1.438.000	1	1.488.000	1	-	2	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.732.971.000	36%	470.302.466	25%	469.651.416	21%	449.258.56 3	18%	343.756.555
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	1.671.000.000	15	454.321.466	15	454.321.416	15	433.928.563	15	328.426.555

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	61.320.000	3	15.330.000	3	15.330.000	3	15.330.000	3	15.330.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	651.000	1	651.000	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	9.000.000	25%	2.250.000	25%	2.250.000	25%	2.250.000	25%	2.250.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	9.000.000	3	2.250.000	3	2.250.000	3	2.250.000	3	2.250.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	29.503.600	33%	9.875.500	33%	9.762.100	31%	9.000.000	2%	866.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	5.503.600	1	1.875.500	1	1.762.100	1	1.000.000	1	866.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	24.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	148.222.000	16%	24.710.000	50%	74.289.800	18%	25.510.400	16%	23.710.400

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	30.622.000	1	7.655.500	1	7.655.500	1	7.655.500	1	7.655.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Paket	3.800.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.800.000	1	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	6.800.000	1	1.680.000	1	1.760.000	1	1.680.000	1	1.680.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	107.000.000	3	14.375.300	3	63.874.300	3	14.374.900	3	14.374.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	653.712.000	58%	465.657.400	38%	260.857.000	-	-	4%	27.198.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	Unit	653.712.000	3	365.657.400	2	260.857.000	-	-	1	27.198.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	106.910.993	28	30.877.758	24	25.477.745	24	25.277.745	24	25.277.745
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	19.511.993	3	4.878.002	3	4.877.997	3	4.877.997	3	4.877.997
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	87.399.000	3	25.999.756	3	20.599.748	3	20.399.748	3	20.399.748

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	432.478.057	8%	35.672.003	8%	34.251.999	75%	324.770.056	9%	37.783.999
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	126.400.000	2	29.872.003	2	29.871.999	3	29.871.999	2	36.783.999
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	15	Unit	15.275.500	5	5.800.000	4	4.380.000	4	4.095.500	2	1.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	290.802.557	-	-	-	-	2	290.802.557	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	159.530.930	31%	48.306.400	21%	33.058.500	45%	71.357.530	4%	6.808.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	16.720.000	48%	7.962.000	2%	400.000	48%	7.958.000	2%	400.000

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	laporan	16.720.000	-	7.962.000	1	400.000	-	7.958.000	1	400.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	142.810.930	28%	40.344.400	23%	32.658.500	44%	63.399.530	4%	6.408.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	142.810.930	2	40.344.400	1	32.658.500	2	63.399.530	1	6.408.500
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	102.212.000	25%	26.518.375	18%	19.755.625	39%	39.490.025	16%	16.447.975
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	102.212.000	25%	26.518.375	18%	19.755.625	39%	39.490.025	16%	16.447.975
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga/Kemasyarakatan	8.639.000	6	8.639.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4	Laporan	93.573.000	1	17.879.375	1	19.755.625	1	39.490.025	1	16.447.975

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	84.732.500	21%	17.846.500	21%	17.846.500	28%	23.946.500	30%	25.084.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	80.628.000	16%	17.846.500	45%	17.846.500	23%	23.946.500	15%	20.988.500
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	18	Laporan	71.386.000	4	17.846.500	6	17.846.500	4	17.846.500	4	17.846.500
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	9.242.000	-	-	-	-	1	6.100.000	-	3.142.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	4.095.500	-	-	-	-	-	-	100 %	4.095.500

	Koordinasi/SinergiDengan PerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidang PenegakanPeraturanPerundang-Undangan dan/atauKepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	4.095.500	-	-	-	-	-	-	1	4.095.500
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	124.522.000	-	-	-	-	85%	106.046.000	15%	18.476.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	124.522.000	-	-	-	-	85%	106.046.000	15%	18.476.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	Orang	106.046.000	-	-	-	-	100	106.046.000	-	-
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1.360.000	-	-	-	-	-	-	1	1.360.000
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	17.116.000	-	-	-	-	-	-	1	17.116.000

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	36.292.000	53%	19.310.000	36%	13.066.000	3%	1.100.000	8%	2,816.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	36.292.000	53%	19.310.000	36%	13.066.000	3%	1.100.000	8%	2,816.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	8.500.000	-	2.934.000	1	1.650.000	-	1.100.000	1	2.816.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1	Dokumen	8.256.000	1	8.256.000						
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	11.416.000			1	11.416.000				
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	6.080.000	1	6.080.000						
	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	1	Dokumen	2.040.000	1	2.040.000						

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	Dokumen	0								
--	---	---	---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Triwulan II (s.d bulan April) Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan SAMBUNG MAKMUR Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.611.233.000,- (Tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dalam rangka karena ada penambahan mobil dinas camat baru, sehingga mobil dinas yang lama di pakai sekcam, sehingga beban biaya operasional makin bertambah.

2. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan karena semua kecamatan mengadakan event Expo UMKM.
3. Penyesuaian pagu anggaran pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan administrasi di Kecamatan Sambung Makmur .
4. Penambahan pagu pada Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam rangka mengakomodir kegiatan Pokjantal Posyandu dan Kegiatan PKK untuk optimalisasi peran kader posyandu desa dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Sambung Makmur.
5. Penambahan pagu pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam rangka mengakomodir belanja bahan bakar minyak.
6. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik dalam rangka mengkoordinir belanja untuk kegiatan Pakibra.
7. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam percepatan rehabilitasi pagar rumah dinas dan bata pres untuk halaman kantor
8. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
9. Penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk memaksimalkan peningkatan wawasan kepada seluruh ASN di Kecamatan Sambung Makmur.
10. Penyesuaian pagu anggaran pada Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR KAB. BANJAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7.01	KECAMATAN							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)				77 Nilai	93 Indeks	2.621.621.663,00	2.940.895.961,00	3.120.969.660,00	1.171.128.039,00							3.792.649.702,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengegangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 %	100 %	8.172.000,00	8.172.000,00	8.172.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN		8.172.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	8 Dokumen	5.246.000,00	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.246.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	5 Laporan	2.926.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.926.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 %	100 Persen	1.646.616.702,00	1.653.991.000,00	1.732.971.000,00	86.354.298,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sambung Makmur		1.607.016.702,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.568.125.702,00	1.565.500.000,00	1.671.000.000,00	112.874.298,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.568.125.702,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	12 Dokumen	0,00	67.840.000,00	61.320.000,00	61.320.000,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			48.240.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7	NON URUSAN							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7.01	KECAMATAN							3.093.729.693,00	3.413.103.991,00	3.628.250.080,00	534.520.387,00							4.278.413.702,00		
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			651.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengarsipan Aset Barang Milik Daerah				100 %	100 Persen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sambung Makmur		9.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kopogawean Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kopegawean Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100 %	100 Person	35.503.600,00	35.503.600,00	29.503.600,00	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		85.434.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	5.503.600,00	5.503.600,00	5.503.600,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.434.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terealisasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Pemerintahan				100 %	100 Person	186.222.000,00	156.222.000,00	148.222.000,00	-38.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Sambung Makmur		185.222.500,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	30.622.000,00	30.622.000,00	30.622.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.622.500,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.800.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.800.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	115.000.000,00	107.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			144.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100 %	100 Person	339.339.000,00	681.339.000,00	653.712.000,00	314.373.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Kecamatan Sambung Makmur		1.006.092.500,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			480.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			40.000.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana				100 %	100 Persen	77.737.600,00	77.737.600,00	102.212.000,00	9.000.400,00							86.738.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 %	100 Persen	77.737.600,00	77.737.600,00	102.212.000,00	24.474.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASH Kecamatan Sambung Makmur dan Masyarakat		86.738.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berepartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	8.639.000,00	8.639.000,00	8.639.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelt/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.639.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	69.098.600,00	69.098.600,00	93.573.000,00	24.474.400,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelt/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			69.099.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kesaman dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 %	100 Persen	91.923.500,00	91.923.500,00	84.723.500,00	1.504.000,00							93.427.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelinggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelinggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 %	100 Persen 100 Persen	87.828.000,00	87.828.000,00	80.628.000,00	-7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASH Kecamatan Sambung Makmur dan Masyarakat		89.332.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	18 Laporan	78.586.000,00	78.586.000,00	71.386.000,00	-7.200.000,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelt/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.090.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	9.242.000,00	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	Kab. Banjar, Sambung Makmur, Semua Kelt/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.242.000,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kabupa Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kabupa Daerah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				undefined	100 Persen	4.095.500,00	4.095.500,00	4.095.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASH Kecamatan Sambung Makmur dan Masyarakat		4.095.500,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis***”.

Perubahan Renja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambung Makmur Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Sambung Makmur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sambung Makmur, 2025

Camat Sambung Makmur

YUANA KARTA ABIDIN, SSTP

Pembina Tk I

NIP. 19830610 200112 1 001

43. Kecamatan Martapura Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Martapura Timur untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Perubahan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Martapura Timur sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Demikian Perubahan Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Martapura Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur didasarkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Martapura Timur 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Martapura Timur serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”, maka Kecamatan Martapura Timur mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Martapura Timur berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Rencana kerja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Kecamatan Martapura Timur dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Martapura Timur dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26)
- 15.

Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur ini adalah untuk menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian belanja berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan, dan melakukan perubahan pada sub kegiatan dan antar sub kegiatan di kecamatan Martapura Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2025 ini adalah :

- a. Menyiapkan dokumen perubahan perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Martapura Timur dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan Laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan.
 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Martapura Timur sampai dengan triwulan I Tahun berkenaan/berjalan.
 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I pada APBD tahun 2025 Pokok-Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain: Realisasi program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Martapura Timur
 Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi: Perubahan Indikator Kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indukatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan.
- BAB IV. Penutup
 Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN MARTAPURA TIMUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang mengampu Urusan Kecamatan melaksanakan 6 (enam) program, 15 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **3,862,627,000,- (Tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah)** dan pada saat perubahan kecamatan Martapura Timur berkurang pagu anggaran untuk menyesuaikan terhadap realisasi belanja; selama tahun berjalan, realisasi belanja dapat berbeda dari yang di rencanakan. Penyesuaian ini di perlukan agar anggaran lebih realistis dan sesuai kondisi aktual. Untuk Pagu anggaran 2025 perubahan kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **3.773.867.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Martapura Timur

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capain kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan
 - 1. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
 - 2. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari satu sub kegiatan
 - 1. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
 - 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan
 - 1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4. Penyediaan bahan logistic kantor
 - 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6. Fasilitasi kunjungan tamu
 - 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Surat menyurat
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, terdiri dari satu sub kegiatan yakni peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan.
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari satu sub kegiatan yakni pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari dua sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa
 - 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari dua sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Sinergitas dengan kepolisian republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
 - 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat.
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari satu sub kegiatan yakni koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari dua sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia.

2. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 3. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
 4. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
 6. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Martapura Timur tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 2.790.843.366,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)** atau sebesar **85.43%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3.291.177.652,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).**

Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun **2024** sebesar 85.43% dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur tahun 2024 realisasi capaian 74.99 lebih rendah dari target yang ditetapkan 77.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- i) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi 100% dari target 100%
- j) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan realisasi 100% dari target 100%
- k) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi 100% dari target 100%
- l) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
- m) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
- n) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
- o) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
- p) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
- q) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%

- r) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
 - s) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
- Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
- a. Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
 - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
 - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai computer
 - Sarana dan prasarana yang belum sehingga berdampak ketercapaian kinerja.
 - b. Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
 - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
 - Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
 - Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Martapura Timur, yaitu:
- Dengan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Sehingga berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat

- Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
- Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
- Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
- Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
- Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Martapura Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Martapura Timur, namun demikian untuk Indikator dari kegiatan yang sekarang menjadi indikator pada sub kegiatan masih tetap sama. Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Martapura Timur melaksanakan enam Program 15 Kegiatan 46 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD
 - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terdiri dari:
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari:
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 6.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 6.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 6.1.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - 6.1.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD
 - 6.1.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Total pagu dana untuk melaksanakan enam Program 15 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Martapura Timur adalah sebesar **Rp. 3.773.867.000,- (Tiga Milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar ini disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi oleh perangkat Pemerintah Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar pada tahun berjalan atau tahun-tahun yang akan datang.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan

dengan masing-masing indikator, guna mendukung pencapaian misi Bupati yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Total anggaran untuk 6 Program, 15. Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan adalah sebesar 3.773.867.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.225.637.817 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 85,43%.

Sedangkan untuk Tahun 2025 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar 3.773.867.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan I (satu) adalah sebesar Rp. 806.547.896 (Delapan Ratus Enam juta lima) atau sebesar 25,03%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2024 untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tahun 2025 triwulan ke I (satu) sebagai berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MARTAPURA TAHUN 2025 SD TRIWULAN I

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	79	Nilai	3.331.245.100		1.225.637.817		806.547.896
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	Persen	8.257.000	25	1.513.600	25	943.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	2.981.000	4	769.600	4	199.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dok	744.000	0	0	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	744.000	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	744.000	1	744.000	1	744.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	744.000	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	Lap	1.150.000	0	0	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Lap	1.150.000	0	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	Persen	1.933.435.000	30.02	494.652.117	30.02	391.756.322
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang	1.868.500.000	17	477.957.117	17	380.421.322
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	64.320.000	9	16.080.000	9	10.720.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	Lap	615.000	1	615.000	1	615.000

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Kuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	Persen	300.000		1.751.000		0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	200.000	1	49.700	1	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	100.000	0	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	Persen	30.700.000	0	0	4.04	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dok	700.000	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3	Orang	30.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	171.361.100	33.37	143.205.100	33.37	17.246.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.000.000	1	1.244.000	1	1.244.000

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	18.714.100	1	5.830.600	1	5.830.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2.794.000	1	1.178.500	1	1.178.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.500.000	1	1.385.000	1	1.385.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1.065.000	0	286.000	0	286.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Lap	1.950.000	1	476.000	1	476.000

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Lap	138.338.000	3	132.805.000,	3	6.846.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	759.056.000	100	496.671.000	71,66	323.400.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	342.000.000	1	342.000.000	1	323.400.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	Unit	114.476.000	14	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	Unit	202.580.000	9	154.671.000	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	100.000.000	2	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	256.190.000	30,81	74.215.000	30,58	59.572.426
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Lap	1.500.000	1	380.000	1	380.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	47.000.000	3	11.900.000	3	4.951.897
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12	Lap	207.690.000	3	61.935.000	3	54.240.529

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	171.946.000	30,09	13.630.000	30,09	13.629.448
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	Unit	42.840.000	2	10.710.000	2	10.709.448
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	11.150.000	1	2.920.000	1	2.920.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	Unit	117.956.000	2	0	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dipelihara/ Direhabilitasi							
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	183.462.600	25	37.931.300	25	28.484.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	183.462.600	25	37.931.300	25	28.484.000
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	20.497.200	1	5.124.300	1	4.643.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	9	Lap	162.965.400	2	32.807.000	2	23.841.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	55.796.000	25	55.796.000	25	18.877.500

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Masyarakat di Kecamatan							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	55.796.000	39.49	55.796.000	39.49	18.877.500
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4	Lemba ga Kema syaraka tan	18.877.500	4	18.877.500	4	18.877.500

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan di Desa							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Lap	36.918.500	2	36.918.500	0	0
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	Persen	51.451.300	0	4.931.200	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	41.979.600	0	195.200	0	0
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Lap	35.747.600	0	195.200	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Lap	6.232.000	0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan	100	Persen	9.471.700	0	4.736.000	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi							
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Lap	9.471.700	0	4.736.000	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	100	Persen	108.220.000	25	10.140.000	25	6.200.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	108.220.000	25	10.140.000	25	6.200.000
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450	Orang	61.360.000	0	0	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	46.860.000	1	10.140.000	1	6.200.000

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	Persen	38.432.000	7.45	2.818.000	7.45	2.686.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	29.712.400	25	13.756.400	25	13.711.400
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	Persen					
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayan	100	Persen					
	Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20	Dok	3.930.600	0	0	0	0

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dok	9.290.000	10	4.830.000	10	4.785.000
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dok	4.691.800	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dok	5.900.000	1	3.026.400	1	3.026.400
	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dok	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000

NO .	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	TK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Penegasan Batas Desa							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, Kecamatan Martapura Timur melakukan penyesuaian/perubahan pada indikator kinerja pada sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Berubah

Tidak ada perubahan target indikator sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 5 Program 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang berubah pada tahun anggaran 2025 ini. Nama program/kegiatan dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1

.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Martapura Timur setelah perubahan adalah sebesar 3.765.027.000,- (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran dan perubahan terget yaitu :

1. Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan pada indikator kinerja sub kegiatan.
2. Adanya penambahan kendaraan dinas operasional roda empat sedang biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat hanya dianggarkan 1 unit, sehingga memerlukan tambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat.
3. Luas dan banyaknya kelurahan dan desa yang melingkupi Kecamatan Martapura sehingga semakin meningkatkan mobilitas dalam

melakukan monitoring dan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu belanja perjalanan dinas yang telah dianggarkan tidak memenuhi kebutuhan yang ada.

4. Adanya tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Kecamatan Martapura memerlukan biaya operasional dan anggaran dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring desa di wilayah Kecamatan Martapura.
5. Akan diadakannya kegiatan EXPO tahunan yang Pemerintah Kecamatan diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan tujuan memasarkan produk UMKM sehingga memerlukan dana untuk sewa stand dan dekorasi EXPO.
6. Adanya beberapa penyesuaian dalam perencanaan dan belanja dengan kondisi *real time* saat pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	87 Indeks	3.773.867.000	3.862.627.000	88.760.000	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	80 Nilai	80.50 (A)				Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	79 Nilai	79 Nilai	3.331.245.100	3.405.565.100	74.320.000	Penambahan dan pengurangan Anggaran
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi	100 Persentas e	100 Persentase	8.257.000	8.257.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Perangkat Daerah	dan Evaluasi SKPD	Perangkat daerah sesuai ketentuan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7 Dokumen	2.981.000	2.981.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	744.000	744.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	744.000	744.000	0	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Perubahan RKA- SKPD						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	744.000	744.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	744.000	744.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	1.150.000	1.150.000	0	

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Kinerja dan Ikhtisar realisasi	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.150.000	1.150.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentas e	100 Persentase	1.933.435.000	1.981.535.000	48.100.000	Penambahan Anggaranf
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ Bulan	17 Orang/ Bulan	1.868.500.000	1.916.600.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	64.320.000	64.320.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	615.000	615.000	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	300.000	3.00.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000	200.000	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100.000	100.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentas e	100 Persentase	30.700.000	24.700.000	6.000.000	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000	700.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	3 Orang	30.000.000	24.000.000	6.000.000	Pengurangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentase	171.361.100	186.861.100	15.500.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.000.000	3.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.714.100	18.714.100	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.794.000	2.794.000	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5.500.000	5.500.000	0	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.065.000	1.065.000	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	1.950.000	1.950.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	138.338.000	122.838.000	15.500.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/ PPE- Bappedalitban g Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentas e	100 Persentase	759.056.000	759.056.000	0	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	342.000.000	342.000.000	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	114..476.000	114..476.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	202.580.000	202.580.000	0	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	256.190.000	256.190.000	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	1.500.000	1.500.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	12 Laporan	47.000.000	47.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan	dan Listrik yang Disediakan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	207.690.000	207.690.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentas e	100 Persentase	171.946.000	219.666.000	47.720.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	42.840.000	90.560.000	47.720.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	11.150.000	11.150.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	117.956.000	117.956.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	183.462.600	183.462.600	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentas e	100 Persentase	183.462.600	183.462.600	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.497.200	20.497.200		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9 Laporan	9 Laporan	162.965.400	162.965.400		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	55.796.000	80.796.000	25.000.000	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentas e	100 Persentase	55.796.000	80.796.000	25.000.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	4 Lembaga Kemasyar akatan	4 Lembaga Kemasyara katan	18.877.500	18.877.500		

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	36.918.500	61.918.500	25.000.000	Penambahan Anggaran dari subkegiatan lain dan penambahan sesuai telaahan forum camat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	41.979.600	41.879.600	100.000	Pengurangan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	41.979.600	41.879.600	100.000	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	2 Laporan	2 Laporan	35.747.600	35.647.600	100.000	Pengurangan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	6.232.000	6.232.000	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terasilitasi	100 Persentas e	100 Persentase	9.471.700	9.471.700	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	2 Laporan	9.471.700	9.471.700	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentas e	100 Persentase	108.220.000	108.320.000	(100.000)	Penambahan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentas e	100 Persentase	108.220.000	108.320.000	(100.000)	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	450 Orang	450 Orang	61.360.000	61.460.000	100.000	Penamabahan dari trantib

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu- blik Indonesia-						
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	46.860.000	36.300.000	10.560.000	Pengurangan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentas e	100 Persentase	41.088.800	41.088.800	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentas e	100 Persentase	41.088.800	41.088.800	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	3.930.600	3.930.600	0	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	9.290.000	9.290.000	0	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	4.691.800	4.691.800	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	17.276.400	17.276.400	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000	5.900.000	0	

=



Pencana Kerja (RENJA) Kecamatan Martapura Timur Tahun 2025

Sumber: Renja SIPD- ri Kecamatan Martapura Timur 2024

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang berisi program/ kegiatan/ subkegiatan beserta indikator dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Martapura Timur dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2025.

Renja Kecamatan Martapura Timur ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2025.

Dalam hal ini ketersediaan anggaran sangat diperlukan prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja, sasaran, indikator sasaran pada Renstra 2021- 2026 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Martapura Timur untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Martapura Timur Tahun 2025 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk seluruh pihak yang terlibat.

Martapura Timur, April 2025

CAMAT Martapura Timur,



GUSLAN, S. AP

NIP. 19670821 198902 1 002



LAMPIRAN



HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : Juli 2024

Kabid Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Kasubbid Pemerintahan
kecamatan

FARA HAYANI, S.P.
NIP. 197202251999032008

NURYAMI, S.E., M.M.
NIP. 197506061995032004

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut., M.Si
NIP. 197409232000031004



**Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Banjar
Program dan Kegiatan Kecamatan Martapura Timur
Tahun 2025 (table ny pakai yg sdh input di aplikasi sipd ri)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Paramasan tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain

meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Paramasan Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar melaksanakan Enam program, Lima Belas kegiatan dan Tiga Puluh Delapan sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp **2.549.162.000,00,-** (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu) dan pada saat perubahan Kecamatan Paramasan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar **Rp. 2.570.554.000,00** (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Paramasan hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan	82	70,8	80	71,86	89,83	0	0	0	142,66	173,98
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58	6	13	13	100	13	6	46,15	25	43,10
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91	2	22	22	100	22	6	27,27	30	32,97
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	15	9	9	100	9	8	88,89	32	61,54
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	1	1	1	100	2	0	0	2	25,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	1	1	1	100	1	0	0	2	40,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	1	1	1	100	4	1	25	3	25,00
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100	0	0	0	200	200,00
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100	1	0	0	2	40,00
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23	15	1	1	100	6	0	0	16	69,57
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	12	1	1	100	1	1	100	14	87,50
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	12	1	1	100	1	1	100	14	87,50
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	12	1	1	100	1	1	100	14	87,50
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	0	1	1	100	1	1	100	2	40,00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	12	1	1	100	1	1	100	14	87,50
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	3	1	1	100	1	1	100	5	71,43
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100	50	0	0	200	200,00
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	0	10	10	100	2	0	0	10	50,00
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	2	13	13	100	7	0	0	15	53,57

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	1	1	100	1	1	100	3	60,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	12	1	1	100	1	1	100	14	87,50
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	12	1	1	100	1	1	100	14	100,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	7	4	4	100	4	2	50	13	50,00
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33	4	12	12	100	9	4	44	20	60,61
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	2	1	1	100	4	0	0	3	25,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	50	0	0	200	200,00
7	1	2	2.02	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	0	2	2	100	2	0	0	2	33,33
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100	25	25	100	225	225,00
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	1	3	3	100	1	0	0	4	40,00
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100	50	50	100	250	250,00
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	50	50	100	250	250,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	74	50	6	6	100	6	6	100	62	83,78
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	4	3	3	100	3	0	0	7	46,67
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100	25	0	0	200	200,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	0	0	0	200	200,00
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	4	3	3	100	2	0	0	7	53,85

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	1	1	1	100	1	0	0	2	40,00
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	0	0	200	200,00
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	2	1	1	100	1	0	0	3	50,00
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	20	20	100	220	220,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100	20	20	100	220	220,00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	480	100	100	100	100	100	0	0	200	41,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	2	1	1	100	1	0	0	3	37,50
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15	12	1	1	100	1	1	100	14	93,33
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	15	15	100	215	215,00
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	15	15	100	215	215,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	0	4	4	100	4	0	0	4	30,77
7	1	6	2.01	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	2	4	4	100	4	2	50	8	53,33
7	1	6	2.01	5		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	1	1	1	100	1	0	0	2	40,00
7	1	6	2.01	6		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00
7	1	6	2.01	6		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	1	1	1	100	1	0	0	2	40,00
7	1	6	2.01	15		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8	3	1	1	100	1	0	0	4	50,00

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel serta Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan serta Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, pada Sub Kegiatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Paramasan sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025 :

- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD karena kegiatan memang dilaksanakan pada triwulan IV.
- Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai karena penilaian kinerja dilaksanakan pada triwulan II.

- Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan karena belum ada undangan atau pun panggilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis.
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel karena pengadaan memang akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena petugas belum sepenuhnya mengerti dalam pengoperasian pembelian lewat e-purchasing.
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan karena keuangan masih dalam proses pengajuan GU dan masih menunggu Narasumber dari Kabupaten.
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena keuangan masih dalam proses pengajuan GU dan bersamaan dengan bulan Ramadhan.
- Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II.
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia karena keuangan masih dalam proses pengajuan GU dan bersamaan dengan bulan Ramadhan.
- Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pelaksanaan HUT RI serta Hari jadi Kabupaten Banjar pada bulan Agustus.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal karena Safari Ramadhan untuk Kecamatan Paramasan ditiadakan.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena masih menunggu JUKNIS dari Kabupaten.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa karena kegiatan akan

dilaksanakan pada triwulan III sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun

- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan.
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya anggaran.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Melaksanakan rincian aktivitas sesuai dengan rencana anggaran kas dan mengupayakan serta segera merealisasikan rincian aktivitas yang tertunda.
- d. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan.
- e. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan Paramasan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Paramasan Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					2.549.162.000		700.829.130		428.858.841
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan	80	Indeks	2.261.591.900	0	656.161.030	0	417.138.841
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	9.599.900	25	5.624.600	25	840.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	5.210.000	13	3.756.000	6	420.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Laporan	4.389.900	22	1.868.600	6	420.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.662.110.000	25	471.911.430	25	360.767.391
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	9	Orang/Bulan	1.597.300.000	9	456.371.430	8	354.587.391
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	62.160.000	2	15.540.000	0	6.180.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	2.650.000	1	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	2.836.000	25	784.000	25	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	2.836.000	4	784.000	1	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	31.682.000	0	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.682.000	1	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	30.000.000	6	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	116.004.000	25	42.848.000	25	10.909.530
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	5.000.000	1	5.000.000	1	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	3.500.000	1	2.792.000	1	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	5.000.000	1	1.241.000	1	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	6.500.000	1	3.754.000	1	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	6.004.000	1	2.061.000	1	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	90.000.000	1	28.000.000	1	10.909.530

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	86.210.000	50	76.295.000	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	Unit	9.915.000	2	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	Unit	76.295.000	7	76.295.000	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	111.020.000	25	34.055.000	25	23.141.920
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.500.000	1	1.000.000	1	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	6.120.000	1	1.530.000	1	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	102.400.000	1	31.525.000	1	23.141.920
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	242.130.000	25	24.643.000	25	21.480.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	85.680.000	4	21.418.000	2	18.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	9	Unit	6.450.000	9	3.225.000	4	2.880.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	150.000.000	4	0	0	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	37.640.100	25	10.962.100	25	595.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	persen	9.036.100	50	3.779.100	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	9.036.100	2	3.779.100	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	28.604.000	25	7.183.000	25	595.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	28.604.000	1	7.183.000	0	595.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	57.050.000	50	16.480.000	50	7.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	57.050.000	50	16.480.000	50	7.000.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kelembagaan Kemasyarakatan	11.970.000	6	11.970.000	6	7.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	45.080.000	3	4.510.000	0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	27.247.000	25	6.857.000	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	22.061.000	0	1.671.000	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	2	Laporan	17.675.000	2	1.671.000	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	4.386.000	1	-	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	5.186.000	100	5.186.000	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dllaksanakan	1	Laporan	5.186.000	1	5.186.000	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	121.963.000	20	6.796.000	20	2.275.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	121.963.000	20	6.796.000	20	2.275.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	36.652.000	100	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	59.015.000	1	0	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	26.296.000	1	6.796.000	1	2.275.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	Persen	43.670.000	15	3.573.000	15	1.850.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	43.670.000	15	3.573.000	15	1.850.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	8.353.000	4	0	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	6.537.000	4	3.573.000	2	1.850.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	8.692.000	1	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	2.850.000	1	0	0	0

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	3.089.000	1	0	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	14.149.000	1	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Paramasan Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Paramasan Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya di antaranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada Enam program, Lima Belas kegiatan dan Tiga Puluh Delapan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. **2.570.554.000,00** (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan di Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD karena adanya perubahan didalam terkait penyesuaian Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan karena adanya efisiensi anggaran.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami penambahan

anggaran karena sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena untuk mengakomodir kegiatan asistensi penyusunan dokumen renstra tahun 2025-2029, Dokumen SAKIP, Kegiatan Bunda Paud dan Kegiatan PKK.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena mengalami penambahan anggaran sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena mengingat mobilitas Camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayah kerja masing-masing dengan kondisi medan yang sulit dan jauh dari kabupaten.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya karena untuk menganggarkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan karena adanya Pengurangan Anggaran dari makan minum rapat Pra Rembuk Stunting, Sewa Kursi serta ATK.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa karena adanya pengurangan anggaran dari makan minum rapat pada kegiatan Pra musrenbang dan Musrenbang Kecamatan.
10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami pengurangan anggaran karena sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.
11. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mengalami pengurangan anggaran karena sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.

12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya Penambahan anggaran pada makan minum jamuan tamu, penambahan honorarium pelatih paskibaraka untuk hari latihan, penambahan anggaran untuk honorarium petugas upacara HUT RI.
13. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal mengalami penambahan anggaran karena sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.
14. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa karena adanya Pengurangan belanja honorarium narasumber internal.
15. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena tidak ada Pemilihan Kepala Desa Untuk Tahun 2025 di Wilayah Kecamatan Paramasan.
16. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengalami pengurangan anggaran karena sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87 Indeks	87 Indeks	287.570.100	254.028.100	(33.542.000)	Pengurangan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Predikat SAKIP	81 Nilai	81 (A)	2.261.591.900	2.316.525.900	54.934.000	Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	80 Indeks	81 Indeks	2.261.591.900	2.316.525.900	54.934.000	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	9.599.900	9.599.900	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	5.210.000	5.210.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan	4.389.900	4.389.900	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.662.110.000	1.661.270.000	(840.000)	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	1.597.300.000	1.597.300.000	0	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	62.160.000	61.320.000	(840.000)	Perubahan didalam penyesuaian Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.650.000	2.650.000	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	2.836.000	2.836.000	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.836.000	2.836.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	31.682.000	25.682.000	(6.000.000)	Pengurangan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1.682.000	1.682.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang	6 Orang	30.000.000	24.000.000	(6.000.000)	Efisiensi anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	116.004.000	138.946.000	22.942.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	18.349.000	14.849.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.500.000	7.696.000	1.196.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.004.000	8.401.000	2.397.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	94.500.000	4.500.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	86.210.000	86.914.000	704.000	Penambahan Anggaran
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	9.915.000	9.915.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	7 Unit	76.295.000	76.999.000	704.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	111.020.000	111.020.000	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.120.000	6.120.000	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.400.000	102.400.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	242.130.000	280.258.000	38.128.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 Unit	85.680.000	95.680.000	10.000.000	Penambahan Anggaran karena mengingat mobilitas camat yang sangat tinggi untuk berkoordinasi dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayah kerja masing masing dengan kondisi medan yang sulit dan jauh dari kabupaten

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9 Unit	6.450.000	6.450.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	150.000.000	178.128.000	28.128.000	Penambahan anggaran untuk konsultan perencanaan dan pengawasan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	37.640.100	34.020.100	(3.620.000)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	9.036.100	9.036.100	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	9.036.100	9.036.100	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persentase	100 Persentase	28.604.000	24.984.000	(3.620.000)	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3 Laporan	28.604.000	24.984.000	(3.620.000)	Pengurangan Anggaran dari makan minum rapat Pra Rembuk Stunting, Sewa Kursi serta ATK
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	57.050.000	46.812.000	(10.238.000)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	57.050.000	46.812.000	(10.238.000)	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.970.000	7.980.000	(3.990.000)	Pengurangan anggaran makan minum
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	45.080.000	38.832.000	(6.248.000)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	27.247.000	21.487.000	(5.760.000)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	22.061.000	16.301.000	(5.760.000)	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2 Laporan	17.675.000	11.915.000	(5.760.000)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.386.000	4.386.000	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	5.186.000	5.186.000	0	1
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	5.186.000	5.186.000	0	-
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	121.963.000	125.838.000	3.875.000	Penambahan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	121.963.000	125.838.000	3.875.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	36.652.000	40.402.000	3.750.000	Penambahan anggaran pada makan minum jamuan tamu, penambahan honorarium pelatih paskibaraka untuk hari latihan, penambahan anggaran untuk honorarium petugas upacara
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	59.015.000	59.140.000	125.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.296.000	26.296.000	0	-
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	43.670.000	25.871.000	(17.799.000)	Pengurangan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	43.670.000	25.871.000	(17.799.000)	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	2 Dokumen	8.353.000	7.953.000	(400.000)	Pengurangan belanja honorarium narasumber internal
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	6.537.000	6.137.000	(400.000)	Pengurangan belanja honorarium narasumber internal
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	8.692.000	8.692.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	2.850.000	0	(2.850.000)	Tidak ada Pemilihan Kepala Desa Untuk Tahun 2025 di Wilayah Kecamatan Paramasan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan (ambil rentra lama ambil table 2.1)	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.089.000	3.089.000	0	-
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	14.149.000	0	(14.149.000)	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PPE- Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025

Sumber data : Inputan Perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Paramasan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paramasan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Paramasan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paramasan, 20 Juni 2025

Camat Paramasan



H. MUHAMMAD FARID, S.KM

Pembina/IV.a

NIP. 19670821 199102 1 002

LAMPIRAN

1. SK Pembentukan Tim
2. Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (Renja SIPD RI)



**KEPUTUSAN CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR
NOMOR :06B TAHUN 2025**

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

**CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Paramasan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Paramasan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Perubahan Pemerintah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun Renja Perubahan Pemerintah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paramasan
Pada Tanggal : 1 April 2025

CAMAT PARAMASAN,

H. MUHAMMAD FARID, S.KM

Pembina/IV.a
NIP. 19670821 199102 1 002

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Camat	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT PARAMASAN,



H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina/IV.a
NIP. 19670821 199102 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARAMASAN KAB. BANJAR TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PARAMASAN							2.630.658.279,00	2.549.162.000,00	2.570.554.000,00	-60.104.279,00							2.694.736.279,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.630.658.279,00	2.549.162.000,00	2.570.554.000,00	-60.104.279,00							2.694.736.279,00	
	7.01	KECAMATAN							2.630.658.279,00	2.549.162.000,00	2.570.554.000,00	-60.104.279,00							2.694.736.279,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern				80 Indeks	81 Indeks	2.343.088.179,00	2.261.591.900,00	2.316.525.900,00	31.998.100,00							2.375.086.279,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 %	9.599.900,00	9.599.900,00	9.599.900,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		11.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	4.389.900,00	4.389.900,00	4.389.900,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 Persen	100 %	1.718.606.279,00	1.662.110.000,00	1.661.270.000,00	-57.336.279,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		1.718.956.279,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bul an	9 Orang/bul an	1.653.796.279,00	1.597.300.000,00	1.597.300.000,00	-56.496.279,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.653.796.279,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	62.160.000,00	62.160.000,00	61.320.000,00	-840.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			62.160.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah				100 Persen	100 %	2.836.000,00	2.836.000,00	2.836.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		3.800.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.836.000,00	2.836.000,00	2.836.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.800.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100 Persen	81 Nilai	31.682.000,00	31.682.000,00	25.682.000,00	-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		32.350.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.350.000,00	KECAMATAN PARAMASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	6 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang AdminsitrasI Umum Perkantoran				100 Persen	100 %	141.004.000,00	116.004.000,00	138.946.000,00	-2.058.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		147.600.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.300.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	18.349.000,00	14.849.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.800.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.300.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	7.696.000,00	1.196.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.800.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.004.000,00	6.004.000,00	8.401.000,00	2.397.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.400.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	90.000.000,00	94.500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100 Persen	100 %	86.210.000,00	86.210.000,00	86.914.000,00	704.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		103.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	9.915.000,00	9.915.000,00	9.915.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	76.295.000,00	76.295.000,00	76.999.000,00	704.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 %	111.020.000,00	111.020.000,00	111.020.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		115.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			106.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara				100 Persen	100 %	242.130.000,00	242.130.000,00	280.258.000,00	38.128.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan		242.380.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	4 Unit	85.680.000,00	85.680.000,00	95.680.000,00	10.000.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			85.680.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9 Unit	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.700.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	178.128.000,00	28.128.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan				100 Persen	100 Persen	37.640.100,00	37.640.100,00	34.020.100,00	3.859.900,00							41.500.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 %	9.036.100,00	9.036.100,00	9.036.100,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		11.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	3 Dokumen	9.036.100,00	9.036.100,00	9.036.100,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			11.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 %	28.604.000,00	28.604.000,00	24.984.000,00	-3.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	3 Laporan	28.604.000,00	28.604.000,00	24.984.000,00	-3.620.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	57.050.000,00	57.050.000,00	46.812.000,00	5.950.000,00							63.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 % 100 %	57.050.000,00	57.050.000,00	46.812.000,00	-10.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		63.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	11.970.000,00	11.970.000,00	7.980.000,00	-3.990.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	45.080.000,00	45.080.000,00	38.832.000,00	-6.248.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			49.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	27.247.000,00	27.247.000,00	21.487.000,00	3.653.000,00							30.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 %	22.061.000,00	22.061.000,00	16.301.000,00	-5.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	2 Laporan	17.675.000,00	17.675.000,00	11.915.000,00	-5.760.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 %	5.186.000,00	5.186.000,00	5.186.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		5.900.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.186.000,00	5.186.000,00	5.186.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.900.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	121.963.000,00	121.963.000,00	125.838.000,00	13.537.000,00							135.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 %	121.963.000,00	121.963.000,00	125.838.000,00	3.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		135.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	36.652.000,00	36.652.000,00	40.402.000,00	3.750.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	59.015.000,00	59.015.000,00	59.140.000,00	125.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.296.000,00	26.296.000,00	26.296.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrtasi desa yang baik				100 Persen	100 Persen	43.670.000,00	43.670.000,00	25.871.000,00	5.080.000,00							48.750.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 %	43.670.000,00	43.670.000,00	25.871.000,00	-17.799.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Intern Kecamatan		48.750.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	2 Dokumen	8.353.000,00	8.353.000,00	7.953.000,00	-400.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.100.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	6.537.000,00	6.537.000,00	6.137.000,00	-400.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.692.000,00	8.692.000,00	8.692.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.089.000,00	3.089.000,00	3.089.000,00	0,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.650.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	14.149.000,00	14.149.000,00	0,00	-14.149.000,00	Kab. Banjar, Paramasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN PARAMASAN	
		J U M L A H							2.630.658.279,00	2.549.162.000,00	2.570.554.000,00	-60.104.279,00							2.694.736.279,00		

45. Kecamatan Tatah Makmur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Tanggal 30 Mei 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.216.441.141,- (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Tatah Makmur mengalami pengurangan pagu dana kegiatan dan akan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 3.203.238.141,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Tatah Makmur hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	80	95,81	76	82,21	106,76	78	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	25	25
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64	19	15	15	100%	9	7	77,77%	41	64%
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	NA	NA	0%	NA	NA	0%	1	100%
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	NA	NA	0%	NA	NA	0%	1	100%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokuman DPA-SKPD	1	1	NA	NA	0%	NA	NA	0%	1	100%
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	NA	NA	0%	NA	NA	0%	1	100%
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57	20	17	17	100%	5	4	80%	41	71,92%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	28	14	11	78,57%	13	11	84,61%	50	73,52%
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	4	2	2	100%	0	0	100%	6	60%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	2	1	1	100%	1	1	100%	4	80%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	1	1	100%	0	0	100%	3	60%
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	100%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	2	1	1	100%	0	0	100%	3	60%
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27	5	6	6	100%	0	0	100%	11	40,74%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	10	4	4	100%	1	1	100%	15	68,18%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	2	4	4	100%	1	1	100%	7	50%
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34	14	7	7	0%	2	1	50%	22	64,70%
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56	44	4	4	100%	1	1	100%	49	87,50%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	6	4	4	100%	1	1	100%	11	55%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1	1	1	100%	0	0	100%	2	50%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	8	1	1	100%	1	1	100%	10	50%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	2	4	4	100%	1	1	100%	7	50%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	3	3	100%	6	1	16,66%	9	45%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	2	1	1	100%	0	0	100%	3	60%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100%	3	3	100%	39	65%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	14	7	7	100%	7	7	100%	28	80%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	14	7	7	100%	7	7	100%	28	80%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	6	3	3	100%	3	3	100%	12	80%
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1	100%	0	0	100%	2	50%
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	2	3	3	100%	0	0	100%	5	71,42%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	12	6	6	100%	0	0	100%	18	90%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32	8	4	4	100%	2	2	100%	14	43,75%
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65	26	13	13	100%	13	13	100%	52	80%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	6	3	3	100%	1	1	100%	10	66,66%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	2	1	1	100%	0	0	100%	3	60%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	2	1	1	100%	0	0	0%	3	60%
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	4	2	2	100%	0	0	0%	6	60%
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	500	200	100	100	100%	0	0	0%	300	60%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
					Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	6	3	3	100%	1	1	100%	10	100%
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	100%	3	3	33%	3	100%
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	NA	NA
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	1	1	1	100%	1	1	100%	3	75%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	2	1	1	100%	1	0	0%	3	60%
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	100%
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	2	1	1	100%	0	0	100%	3	21,42%
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	100%
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	4	2	2	100%	0	0	100%	6	60%
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	1	1	1	100%	0	0	100%	2	50%
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	1	1	1	100%	0	0	100%	2	50%

de					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d TW I Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8	3	3	3	100%	0	0	100%	6	75%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Rekonsiliasi, dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada Sub kegiatan Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pada Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Intansi Vertikal
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub

Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Tidak ada Program/Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan triwulan I.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kecamatan Tatah Makmur sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada Triwulan IV dan Indikator Nilai/Predikat SAKIP Kecamatan Tatah Makmur sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat penilaian dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada Triwulan III.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan masih kurang optimalnya penyusunan jadwal kegiatan.
- Ada beberapa Penyusunan Dokumen yang menunggu jadwal dan Pendampingan dari Instansi terkait
- Aplikasi SIPD-RI Penatausahaan masih dalam pengembangan sehingga sering terjadi eror dan kendala.
- Kurang SDM dalam penyusunan dokumen BMD sehingga laporan menjadi terlambat
- Menunggu Informasi Pelaksanaan Penyelenggaraan/Mencari hari agar jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain
- Sosialisasi yang tidak berjalan oleh Perangkat Daerah Pengampu usulan

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Tidak ada Program/Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan triwulan I.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Tatah Makmur.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara atasan dan bawahan
- b. Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan
- c. Menerapkan etika dan integritas dalam menjalankan tugas
- d. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.2 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TATAH MAKMUR TAHUN 2025 SD TRIWULAN 1

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN TRIWULAN	
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 1	
			Volu me	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3.216.441.141				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78	Nilai	2.866.123.041				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	persen	18.045.000	25	5.600.000	25	4.220.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	8.200.000	9	3.080.000	7	1.940.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	9.845.000	5	2.520.000	4	2.280.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.838.630.000	25	508.761.000	25	302.572.188
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji, Tunjangan ASN	13	Orang/Bulan	1.793.400.000	13	494.891.000	11	293.952.188
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	39.240.000	0	12.410.000	0	7.820.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	5.990.000	1	1.460.000	1	800.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	2.000.000	25	0	25	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	2.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	36.840.000	25	0	25	0
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan	1	Dokumen	6.840.000	0	1.140.000	0	0

		Penilaian Kinerja Pegawai							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang	30.000.000	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	194.674.000	25	42.656.875	25	12.189.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	5.500.000	1	2.750.000	1	350.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	26.602.000	1	379.000	1	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7	Paket	2.000.000	2	491.250	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	15.500.000	1	4.073.000	1	1.389.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	2.500.000	1	1.320.625	1	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	8.892.000	0	2.223.000	0	0

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	133.680.000	1	31.420.000	1	10.450.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	401.329.000	25	391.643.000	25	335.236.730
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	Unit	9.894.000	1	208.000	1	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	Unit	391.435.000	6	391.435.000	1	335.236.730
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	215.925.041	25	63.426.258	25	40.984.319
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	0	1.200.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	21.925.041	3	5.481.258	3	2.617.659
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	Laporan	189.000.000	7	56.475.000	7	38.366.660
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	158.680.000	25	27.056.998	25	9.536.197

	Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	78.680.000	7	19.669.998	7	5.721.197
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	3	Unit	30.000.000	3	7.387.000	3	3.815.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	0	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	34.427.800	25	11.768.800	25	3.090.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100	persen	10.408.800	25	2.803.800	25	1.095.000

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	10.408.800	0	2.803.800	0	1.095.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	24.019.000	25	8.965.000	25	1.995.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	Laporan	24.019.000	2	8.965.000	2	1.995.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	56.481.600	25	35.593.600	25	13.802.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	56.481.600	25	35.593.600	25	13.802.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	13	Kelembagaan Kemasyarakatan	12.459.600	13	12.459.600	13	11.922.000

	Perencanaan Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	3	Laporan	44.022.000	1	23.134.000	1	1.880.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	26.763.700	25	0	25	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	11.281.000	25	0	25	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	5.868.000	0	0	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	1	Laporan	5.413.000	0	0	0	0

	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	15.482.700	25	0	25	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dllaksanakan	2	Laporan	15.482.700	0	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	214.265.000	25	39.595.000	25	4.314.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	214.265.000	25	39.595.000	25	4.314.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	27.845.000	0	0	0	0
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dokumen	147.696.000	1	29.500.000	1	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	38.724.000	3	10.095.000	3	4.314.000

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	18.380.000	25	3.914.000	25	1.565.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	18.380.000	25	3.914.000	25	1.565.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1.565.000	1	1.565.000	1	1.565.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	2.349.000	1	2.349.000	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	3.461.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Terfasilitasi	2	Dokumen	3.506.000	0	0	0	0

	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	2.328.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	3.461.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1.710.000	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diantaranya adalah perubahan pada indikator kinerja sasaran camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Adanya perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2024 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.203.238.141,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Karena adanya penambahan pegawai dan kekurangan dalam penganggaran pada rekening belanja tersebut.
2. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Karena anggaran yang tersedia hanya untuk delapan bulan saja.
3. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Karena anggaran digunakan untuk instalasi listrik dikantor sementara yang digunakan.

4. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tempat terbatas untuk menaruh alat penyimpanan.
5. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Karena banyak kegiatan yang dilakukan di luar kantor.
6. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tempat terbatas untuk menaruh peralatan Mebel.
7. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Karena pembelian sudah dilakukan di bawah anggaran yang tersedia.
8. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Karena adanya Pekerjaan inputan diluar jam kerja maka perlu Pos belanja internet tambahan.
9. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Karena anggaran dipergunakan untuk jasa angkut dari kantor lama kecamatan ke kantor sementara kecamatan.
10. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena Adanya penambahan anggaran untuk BBM Mobil Camat dikarenakan mobilitas Camat yang sangat tinggi dan Penambahan belanja pemeliharaan Mobil Operasional.
11. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Karena akan adanya biaya pembongkaran Aset karena adanya Rehab total.

12. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan rehab kecil.
13. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karena adanya penambahan waktu dan jumlah kegiatan kami tidak teranggarkan (Rapat Koordinasi KKS).
14. Adanya Perubahan Pagu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karena Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan evaluasi dan monitoring APBDes
15. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena ini kegiatan rutin dan anggaran yang tersedia sangat minim.
16. Adanya Perubahan Pagu pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Karena estimasi keperluan untuk Jasa Penyelenggaraan Acara berkurang.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	87 Indeks	3.216.441.141	3.203.238.141	212.554.851	Pengurangan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	87,60 Nilai	BB (Predikat)	2.866.123.041	2.837.145.041	105.614.608	Pengurangan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur	78 Nilai	78 Nilai	2.866.123.041	2.837.145.041	105.614.608	Pengurangan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	18.045.000	18.045.000	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	8.200.000	8.200.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	9.845.000	9.845.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.838.630.000	1.854.470.000	15.840.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ Bulan	13 Orang/ Bulan	1.793.400.000	1.793.400.000	0	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	39.240.000	55.080.000	15.840.000	Karena anggaran yang tersedia hanya untuk delapan bulan saja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.990.000	5.990.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	2.000.000	2.000.000	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	36.840.000	30.840.000	-6.000.000	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000	6.840.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	30.000.000	24.000.000	-6.000.000	Efisiensi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	194.674.000	164.073.000	-30.601.000	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.500.000	9.500.000	4.000.000	Penambahan alat listrik untuk keperluan kantor sementara
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.602.000	2.501.000	-24.101.000	Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tempat terbatas untuk menaruh alat penyimpanan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	2.000.000	2.000.000	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.500.000	15.500.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.892.000	8.892.000	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	133.680.000	123.180.000	-10.500.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	401.329.000	382.069.000	-19.260.000	Pengurangan Anggaran
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	9.894.000	0	-9.894.000	Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tempat terbatas untuk menaruh peralatan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	391.435.000	382.069.000	-9.366.000	Karena adanya Hibah dari instansi lain
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	215.925.041	208.785.041	-7.140.000	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.925.041	21.025.041	-900.000	Adanya Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	12 Laporan	189.000.000	182.760.000	-6.240.000	Karena ada Bangunan gedung yang bisa ditempati tanpa harus membayar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	158.680.000	176.863.000	18.183.000	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9 Unit	78.680.000	121.280.000	42.600.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	30.000.000	35.583.000	5.583.000	Karena akan adanya biaya pembongkaran Aset kerena adanya Rehab total
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	30.000.000	0	-30.000.000	Karena kami akan melakukan Rehab total Bangunan kantor sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan rehab kecil
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	84,5 Persentase	100 Persentase	34.427.800	37.277.800	1.377.112	Penambahan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	10.408.800	13.258.800	2.850.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.408.800	13.258.800	2.850.000	Karena adanya penambahan waktu dan jumlah kegiatan kami tidak teranggarkan (Rapat Koordinasi KKS)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persentase	100 Persentase	24.019.000	24.019.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	24.019.000	24.019.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	56.481.600	74.481.600	18.000.000	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	56.481.600	74.481.600	18.000.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	12.459.600	12.459.600	0	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	44.022.000	62.022.000	18.000.000	Penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan evaluasi dan monitoring APBDes
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	26.763.700	26.763.700	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	11.281.000	11.281.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.868.000	5.868.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5.413.000	5.413.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	15.482.700	15.482.700	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	15.482.700	15.482.700	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	214.265.000	209.190.000	-5.075.000	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	214.265.000	209.190.000	-5.075.000	Pengurangan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	100 Orang	100 Orang	27.845.000	39.270.000	11.425.000	Karena ini kegiatan rutin

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						dan anggaran yang tersedia sangat minim
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	147.696.000	131.196.000	-16.500.000	Karena estimasi keperluan untuk Jasa Penyelenggaraan Acara berkurang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	38.724.000	38.724.000	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	18.380.000	18.380.000	0	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	18.380.000	18.380.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.565.000	1.565.000	0	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.349.000	2.349.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.461.000	3.461.000	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	3.506.000	3.506.000	0	-
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.328.000	2.328.000	0	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.461.000	3.461.000	0	-
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000	1.710.000	0	-

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Tatah Makmur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ditetapkan di Tatah Makmur
pada tanggal 20 Juni 2025

CAMAT TATAH MAKMUR



H. WAHYUDI RAHMAT, SE
Pembina/IVa

NIP. 19730215 199803 1 008

LAMPIRAN

SK pembentukan tim

Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (cetak SIPD RI)

46. Kecamatan Telaga Bauntung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2025 triwulan I dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi berserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Telaga Bauntung dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 nomor 32);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 36);

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Lembaran Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Kabupaten Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.846.394.756,- (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Telaga Bauntung mendapatkan tambahan dan pengurangan sebesar Rp. 119.983.550,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 2.966.378.306,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bautung Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen belum dilaksanakan, dengan pagu anggaran belanja sub kegiatan sebesar Rp. 937.000,-. Untuk Realisasi Fisik 15 % dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 2 dokumen belum dilaksanakan, dengan pagu anggaran belanja sub kegiatan sebesar Rp. 664.000,-. Untuk Realisasi Fisik 2% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 3.420.000 dan target 1 Dokumen belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran Rp. 24.000.000 dan target 6 Orang belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 5.196.500 dan target 1 Paket belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp. 15.716.000 dan target 1Paket belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 19.044.500 dan target 1 Paket belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp. 5.700.000 dan target 1 Laporan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp. 7.334.000 dengan target kinerja 2 unit. Sesuai dokumen kendali pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan II/ bulan April. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
 - Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu belanja sebesar Rp. 249.979.450 dan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 2.500.000 dengan target kinerja 1 Laporan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 28,50% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
 - Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu belanja sebesar Rp. 249.979.450 dan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 12.136.000 dengan target kinerja 3 Unit belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 5% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 62.583.800,- dengan target kinerja 7 Laporan dan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 23% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 6.089.800,- dengan target kinerja sebesar 1 Laporan belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 43.830.000,- dengan target kinerja sebanyak 120 Orang, sub Kegiatan ini belum terlaksana. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 39.441.000,- dengan target kinerja Dokumen, sub Kegiatan ini belum terlaksana. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 10.000.000 dengan target kinerja 13 laporan . Kegiatan belum terlaksana Sesuai dokumen kendali pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III/ bulan juli 2025. Untuk Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.200.000,- dengan target kinerja 1 dokumen sub Kegiatan ini belum terlaksana. Untuk Realisasi Fisik 3% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.280.000,- dengan target kinerja 1 dokumen, sub Kegiatan ini belum dilaksanakan. Untuk Realisasi Fisik 5% dan Realisasi Keuangan sub kegiatan ini masih 0 %.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Untuk realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan II, tidak ada, realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran terpenuhi sesuai target yang direncanakan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi dengan Indikator Utama Kecamatan Telaga Bauntung yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat Sakip sampai dengan Triwulan I ini masih belum bisa disampaikan mengingat pelaksanaan penilaian indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada triwulan IV.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan.
- Beberapa program kegiatan tidak terlaksana karena pergantian dan kekosongan pejabat yang mengampu.
- Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan instansi terkait dan pihak penyedia.
- Beberapa kegiatan dan sub kegiatan ada menggunakan jasa narasumber / pembicara, kegiatan terhambat/ tertunda karena menyesuaikan jadwal dan kesediaan dari narasumber .
- Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang penempatan rencana pelaksanaan nya pada triwulan II, III dan IV
- Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan , Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum bisa di laksanakan karena harus menyesuaikan dengan kesediaan pagu belanja dan kesediaan Jasa Narasumber
- Pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga belum bisa dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan ini telah dijadwal kan pada setiap bulan agustus pada setiap tahunnya.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- dll

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Telaga Bauntung.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.
- d. Melakukan evaluasi capaian kinerja dengan cara mengadakan rapat internal di kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG TAHUN 2025 SD TRIWULAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ IDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN				REALISASI KINERJA & REALISASI ANGGARAN			
				VOLUME	SATUAN	DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
							TK	Rp.	TK	Rp.	RK	RP	RK	RP
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	NILAI	Rp 2.846.394.756								
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	82	NILAI									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Predikat SAKIP	B	PREDIKAT									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	Indeks	Rp 2.563.400.656	NA	Rp 946.983.800	NA	NA	NA	Rp 743.312.353	NA	NA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	Rp 12.096.000	39,08 Persen	Rp 2.966.000	NA	NA	39,08 Persen	Rp 1.456.000	NA	NA
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	Rp 2.054.000	6 Dokumen	NA	NA	NA	6 Dokumen	NA	NA	NA
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 975.000	1 Dokumen	NA	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	NA

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Dokumen	Rp 975.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	Rp 664.000	1 Dokumen	NA	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	NA
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp 664.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 1.247.000	1 Dokumen	Rp 1.247.000	NA	NA	1 Dokumen	Rp 1.247.000	NA	NA
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Rp 5.555.000	1 Laporan	Rp 1.055.000	NA	NA	1 Laporan	Rp 741.000	NA	NA
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 1.518.299.000	30,19 Persen	Rp 416.193.000	NA	NA	30,19 Persen	Rp 357.694.148	NA	NA
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/ Bulan	Rp 1.464.500.000	14 Orang/ Bulan	Rp 401.634.000	NA	NA	14 Orang/ Bulan	Rp 344.044.148	NA	NA
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Rp 52.320.000	3 Dokumen	Rp 13.080.000	NA	NA	3 Dokumen	Rp 13.080.000	NA	NA
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 1.479.000	1 Laporan	Rp 1.479.000	NA	NA	1 Laporan	Rp 570.000	NA	NA

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	Rp 12.396.000	32,97 Persen	Rp 3.223.000	NA	NA	32,47 Persen	Rp 2.965.000	NA	NA
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Rp 3.396.000	1 Laporan	Rp 973.000	NA	NA	1 Laporan	Rp 715.000	NA	NA
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rp 9.000.000	0	Rp 2.250.000	NA	NA	0	Rp 2.250.000	NA	NA
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	Rp 27.420.000	39,18 Persen	Rp 10.855.000	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Laporan	Rp 3.420.000	0	Rp 855.000	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	Rp 24.000.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 118.787.000	36,03 Persen	Rp -	NA	NA	25,90 Persen	Rp -	NA	NA
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 5.196.500	0	Rp 1.596.500	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	Rp 15.716.000	0	Rp 4.266.500	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 19.044.500	0	Rp 5.344.500	NA	NA	0	Rp -	NA	NA

1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 2.870.000	0	Rp 958.000	NA	NA	0	Rp 740.649	NA	NA
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 5.700.000	0	Rp 950.000	NA	NA	0	Rp 0	NA	NA
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp 70.260.000	3 Laporan	Rp 34.565.000	NA	NA	3 Laporan	Rp 15.479.530	NA	NA
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	Rp 659.643.450	65,89 Persen	Rp 409.664.000	NA	NA	34,29 Persen	Rp 323.400.000	NA	NA
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	Rp 7.334.000	0	Rp 7.334.000	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	Rp 402.330.000	1 Unit	Rp 402.330.000	NA	NA	1 Unit	Rp 323.400.000	NA	NA
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Rp -	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	Rp 104.691.206	29,97 Persen	Rp 30.297.800	NA	NA	29,97 Persen	Rp 24.208.750	NA	NA
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1	Laporan	Rp 2.500.000	0	Rp 625.000	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 18.451.206	3 Laporan	Rp 4.612.800	NA	NA	3 Laporan	Rp 2.208.750	NA	NA
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	Rp 83.740.000	3 Laporan	Rp 25.060.000	NA	NA	3 Laporan	Rp 22.000.000	NA	NA

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 110.068.000	33,47 Persen	Rp 26.104.500	NA	NA	33,47 Persen	Rp 17.368.276	NA	NA
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	Rp 83.800.000	10 Unit	Rp 21.440.000	NA	NA	10 Unit	Rp 16.467.276	NA	NA
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	Rp 14.132.000	2 Unit	Rp 4.664.500	NA	NA	2 Unit	Rp 901.000	NA	NA
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	Rp 8.000.000	27.00 Persen	Rp 800.000	NA	NA	1 Unit	Rp 800.000	NA	NA
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	Rp 12.136.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	Rp 44.999.300	54,12 Persen	Rp 19.237.500	NA	NA	54,12 Persen	Rp 17.637.500	NA	NA
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Persen	Rp 27.899.300	26,00 Persen	Rp 2.137.500	NA	NA	26,00 Persen	Rp 2.137.500	NA	NA
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	Rp 27.899.300	1 Laporan	Rp 2.137.500	NA	NA	1 Laporan	Rp 2.137.500	NA	NA
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	Rp 17.100.000	100,00 Persen	Rp 17.100.000	NA	NA	100,00 Persen	Rp 15.500.000	NA	NA

2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	Rp 17.100.000	1 Laporan	Rp 17.100.000 -	NA	NA	1 Laporan	Rp 15.500.000	NA	NA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	Rp 75.693.800	36,34 Persen	Rp 15.492.500	NA	NA	36,34 Persen	Rp 13.110.000	NA	NA
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	Rp 75.693.800	36,34 Persen	Rp 15.492.500	NA	NA	36,34 Persen	Rp 13.110.000	NA	NA
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	Rp 13.110.000	6 LK	Rp 13.110.000	NA	NA	6 LK	Rp 13.110.000	NA	NA
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	Rp 62.583.800	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana	100	Persen	Rp 23.870.000	17,32 Persen	Rp 4.112.000	NA	NA	17,32 Persen	Rp 3.150.000	NA	NA
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	Persen	Rp 19.872.000	20,81 Persen	Rp 4.112.000	NA	NA	20,81 Persen	Rp 3.150.000	NA	NA
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	Rp 13.782.200	1 Laporan	Rp 4.112.000	NA	NA	1 Laporan	Rp 3.150.000	NA	NA

4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	Rp 6.089.800	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana	100	Persen	Rp 3.998.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	Rp 3.998.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100	Persen	Rp 116.071.000	7,98 Persen	Rp 8.275.000	NA	NA	7,98 Persen	Rp 6.650.000	NA	NA
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100	Persen	Rp 116.071.000	7,98 Persen	Rp 8.275.000	NA	NA	7,98 Persen	Rp 6.650.000	NA	NA
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	orang	Rp 43.830.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA

5.1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	umlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Dokumen	Rp 39.441.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Laporan	Rp 32.800.000	3 Laporan	Rp 8.275.000	NA	NA	3 Laporan	Rp 6.650.000	NA	NA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana	100	Persen	Rp 22.360.000	27,72 Persen	Rp 5.160.000	NA	NA	27,72 Persen	Rp 4.400.000	NA	NA
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/kelurahan yang terlaksana	100	Persen	Rp 22.360.000	27,72 Persen	Rp 5.160.000	NA	NA	27,72 Persen	Rp 4.400.000	NA	NA
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Rp 5.760.000	1 Dokumen	Rp 2.880.000	NA	NA	1 Dokumen	Rp 2.200.000	NA	NA
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	Rp 5.200.000	0	Rp -	NA	NA	0	Rp -	NA	NA
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dokumen	Rp 9.120.000	1 Dokumen	Rp 2.280.000	NA	NA	1 Dokumen	Rp 2.200.000	NA	NA
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	Rp 2.280.000	0	Rp -	NA	NA	1 Dokumen	Rp -	NA	NA

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur adanya indikator Kinerja di level sub kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 2.966.378.306,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD karena kekurangan pagu untuk kordinasi kegiatan tersebut.
2. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alasanya karena masih adanya kebutuhan peralatan rumah tangga yang di perlukan.
3. Adanya Perubahan Pagu dan Penyesuaian Rekening Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor, alasanya karena masih adanya kebutuhan logistik kantor yang di perlukan
4. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alasanya karena masih adanya kebutuhan logistik kantor yang di perlukan .
5. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, alasanya karena kekurangan anggaran
6. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alasanya karena masih adanya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk kegiatan PKK .

7. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alasannya karena adanya pengadaan papan nama SKPD
8. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alasannya kelebihan pagu sehingga dana di alihkan ke sub kegiatan yang masih kurang.
9. Adanya Perubahan Pagu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena lokasi kecamatan yang jauh dengan kabupaten dengan medan yang sulit sehingga memerlukan biaya pemeliharaan lebih banyak dibanding dengan SKPD yang aksesnya lebih dekat dan mudah di tempuh dari kabupaten.

Tabel 3.1 :
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG								3.043.267.539,00	2.912.394.756,00	2.966.378.306,00	-76.889.233,00						3.410.420.834,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.043.267.539,00	2.912.394.756,00	2.966.378.306,00	-76.889.233,00							3.410.420.834,00	
	7.01	KECAMATAN							3.043.267.539,00	2.912.394.756,00	2.966.378.306,00	-76.889.233,00							3.410.420.834,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern				78 Nilai	78 Indeks	2.760.273.439,00	2.629.400.656,00	2.678.384.206,00	367.152.360,00							3.127.425.799,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 % B Predikat	12.096.000,00	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Kecamatan Telaga Bauntung		12.752.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.054.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.054.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			975.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	937.000,00	937.000,00	937.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			937.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	664.000,00	664.000,00	664.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			992.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	664.000,00	664.000,00	664.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			992.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	53.160.000,00	52.320.000,00	55.040.000,00	1.880.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			53.160.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.479.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.479.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah				100 Persen	100 % B Predikat	12.396.000,00	12.396.000,00	12.396.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Telaga Bauntung		12.396.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.396.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.000.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu				100 Persen	100 % B Predikat	33.420.000,00	33.420.000,00	27.420.000,00	-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Kecamatan Telaga Bauntung		53.420.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	

	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.420.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	6 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Terfasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran</i>				100 Person	100 % B Predikat	193.323.000,00	178.787.000,00	118.787.000,00	-74.536.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Telaga Bauntung		195.558.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.858.000,00	5.196.500,00	5.196.500,00	2.338.500,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.260.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.654.000,00	15.716.000,00	15.716.000,00	11.062.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.208.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	11.981.000,00	19.044.500,00	19.044.500,00	7.063.500,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	- -			12.990.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.140.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.700.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	165.260.000,00	130.260.000,00	70.260.000,00	-95.000.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			165.260.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100 Persen	100 % B Predikat	317.643.450,00	659.643.450,00	652.714.000,00	335.070.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Kecamatan Telaga Bauntung		661.886.560,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	

	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	249.979.450,00	249.979.450,00	243.050.000,00	-6.929.450,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			590.000.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU Perangkat Daerah : Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 % B Predikat	104.691.206,00	104.691.206,00	99.364.206,00	-5.327.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Kecamatan Telaga Bauntung		104.691.456,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.500.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.451.206,00	18.451.206,00	13.124.206,00	-5.327.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.451.456,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				14 Unit	10 Unit	104.264.000,00	83.800.000,00	131.520.000,00	27.256.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			104.280.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	14.132.000,00	14.132.000,00	14.132.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			14.134.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	12.136.000,00	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	- -			12.136.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	1 Laporan	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.100.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana				100 Persen	100 %	75.693.800,00	75.693.800,00	75.693.800,00	200,00							75.694.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				100 Persen	100 % 87 Indeks	75.693.800,00	75.693.800,00	75.693.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung		75.694.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertlra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	13.782.200,00	13.782.200,00	13.782.200,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.782.535,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	6.089.800,00	6.089.800,00	6.089.800,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.090.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 Persen	100 % 87 Indeks	3.998.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung		3.998.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	3.998.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.998.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100 Persen	100 %	116.071.000,00	116.071.000,00	121.071.000,00	0,00							116.071.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 % 87 Indeks	116.071.000,00	116.071.000,00	121.071.000,00	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung		116.071.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	43.830.000,00	43.830.000,00	43.830.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			43.830.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	39.441.000,00	39.441.000,00	44.441.000,00	5.000.000,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			39.441.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			32.800.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik				100 Persen	100 %	22.360.000,00	22.360.000,00	22.360.000,00	0,00							22.360.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IKU Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 % 87 Indeks	22.360.000,00	22.360.000,00	22.360.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN dan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung		22.360.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.760.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.200.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.120.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	Kab. Banjar, Telaga Bauntung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.280.000,00	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	
	J U M L A H								3.043.267.539,00	2.912.394.756,00	2.966.378.306,00	-76.889.233,00							3.410.420.834,00		

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”***.

Perubahan Renja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Telaga Bauntung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Telaga Bauntung, 30 April 2025
Plh. Camat Telaga Bauntung,

Dr. Haris Utomo, S.STP, M.Si
NIP.19851109 200412 1 002

47. Kecamatan Cintapuri Darussalam

BAB I

PENDAHULUAN

4.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu

dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.

2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/ PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan

belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar melaksanakan enam program, empat belas kegiatan dan tiga puluh dua sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.785.650.055,00,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar melaksanakan enam program, empat belas kegiatan dan tiga puluh tiga sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 2,926,257,055.00,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam	80	57,97	76	69,45	91,38	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	100	100%	34,38	34,38	100%	66,94	66,94%
7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	18	14	14	100%	6	6	100%	38	79,17%
7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	0	0	0%	0	0	0%	3	100%
7	1	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	3	0	0	0%	0	0	0%	3	100%
7	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	0	0	0%	0	0	0%	2	100%
7	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	0	0	0%	0	0	0%	2	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun	8	8	0	0	0%	0	0	0%	8	100%
7	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	6	14	14	100%	5	5	100%	25	45,45%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	31,37	28,76	91,68%	58,02	58,02%
7	1	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196	42	14	14	100%	40	36	90%	92	46,94%
7	1	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	36	12	12	100%	3	3	100%	51	85%
7	1	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6	3	1	1	100%	1	1	100%	5	83,33%
7	1	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	0	0	0	0%	4	4	100%	4	11.11%
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	25,00	0,00	0%	65,22	65,22%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	0	0	0	0%	1	0	0%	0	0%
7	1	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	12	12	100%	0	0	0%	15	100%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	40,00	0,00	0%	16,67	16,67%
7	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	0	2	2	100%	2	0	0%	2	16,67%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25,00	12,50	50%	75,64	75,64%
7	1	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	6	4	4	100%	1	0	0%	10	55,56%
7	1	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42	30	4	4	100%	1	0	0%	34	80,95%
7	1	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87	75	4	4	100%	1	0	0%	79	90,80%
7	1	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21	9	4	3	75%	1	0	0%	12	57,14%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	36	12	12	100%	3	2	66,67%	50	69,44%
7	1	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	36	12	12	100%	3	3	100%	51	70,83%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	88,24	0,00	0%	40,63	40,63%
7	1	1	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	9	0	0	0	0%	9	0	0%	0	0%
7	1	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	3	10	10	100%	8	0	0%	13	56,52%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	27,03	13,51	57,38%	68,92	68,92%
7	1	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	36	12	12	100%	3	0	0%	48	66,67%
7	1	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	36	12	12	100%	3	1	33,33%	49	68,06%
7	1	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78	13	13	13	100%	4	4	100%	56	71,79%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100	100	100	100	100%	35,29	17,65	50,01%	29,35	29,35%
7	1	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	27	9	9	100%	3	3	100%	39	69,64%
7	1	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48	9	3	3	100%	3	0	0%	12	25%
7	1	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	3	1	1	100%	0	0	0%	4	66,67%
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	100	100	95,00	95%	25	15	60,00%	47,56	47,56%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terpenuhi	100	100	100	100	100%	12,50	0,00	0%	44,44	44,44%
7	1	2	2.02	0003	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	36	8	8	8	100%	1	0	0%	16	44,44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	91,67	91,67%	33,33	16,67	50,02%	50,00	50%
7	1	2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	46	10	12	11	91,67%	4	2	16,67%	23	50%
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	27,78	11,11	39,99%	48,43	48,43%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	27,78	11,11	39,99%	48,43	48,43%
7	1	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	6	2	2	100%	2	2	100%	10	83,88%
7	1	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41	10	7	7	100%	3	0	0%	17	41,46%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25,00	0,00	0%	47,83	47,83%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	25,00	0,00	0%	47,83	47,83%
7	1	4	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	2	4	4	100%	1	0	0%	8	40%
7	1	4	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	4	1	1	100%	0	0	0%	5	65,50%
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	1,14	0,57	50%	59,29	59,29%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	1,14	0,57	50%	59,29	59,29%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	910	340	200	200	100%	0	0	0%	540	59,34%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
					Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	2.01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	13	8	3	3	100%	1	1	100%	12	92,31%
7	1	5	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	0	0	0	100%	1	0	0%	0	0%
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	100	100	92,31	92,31%	23,08	0	0%	50,00	50%
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	92,31	92,31%	23,08	0	0%	50,00	50%
7	1	6	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	3	1	1	100%	0	0	0%	4	66,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48	12	12	11	91,57%	3	0	0%	23	47,92%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD karna pekerjaan yang berbenturan mengakibatkan kegiatan belum bisa dilaksanakan.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Tidak ada undangan atau pun panggilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis.

- Pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Menyesuaikan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu menyesuaikan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu menyesuaikan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu menyesuaikan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu Belum pahamnya petugas dalam pengoprasian pembelian lewat e-purchasing.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu menyesuaikan kebutuhan.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu yaitu pemadaman listrik dengan durasi lama.
- Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu berkurangnya PTT karna lulus PPPK dan tidak dibayarkannya BPJS.
- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu menyesuaikan kebutuhan dan tempat jasa pemeliharaan yang jauh.
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Karna Bencana Alam Banjir dan Bulan Ramadhan.
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan karna Bencana Alam Banjir dan Bulan Ramadhan.
- Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bencana Alam Banjir dan Bulan Ramadhan.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan karna Jadwal Kegiatan yang Bersamaan, Kurang Informasi dan Bencana Alam Banjir.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa karna Jadwal Kegiatan yang Bersamaan, Kurang Informasi dan Bencana Alam Banjir.

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan.
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar.

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan		TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					2.785.650.055		1.074.485.492		727.764.569
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78	Indeks	2.435.414.055	NA	1.000.147.202	NA	692.168.569
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	5.600.000	52.83	2.288.000	52.83	0.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	3.500.000	6	1.800.000	6	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	2.100.000	5	488.000	5	0.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.041.486.839	29,29	456.439.018	29,29	309.282.465
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	140	Orang/Bulan	2.006.986.839	40	441.401.518	36	295.482.465
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	55.200.000	3	13.800.000	3	13.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	780.000	1	780.000	1	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	16	Laporan	4.160.000	3	457.500	3	0.00

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	4.060.000	28,50	605.000	2,50	0.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4.060.000	1	605.000	0	0.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	25.000.000	47,00	10.000.000	3,00	0.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	25.000.000	2	10.000.000	0	0.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasi nya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	Persen	135.263.900	43,74	51.233.750	35,88	11.929.530
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	11.929.530	1	538.500	0	0.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	3.525.000	1	881.250	0	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	6.250.500	1	2.080.500	0	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	4.499.400	-1	1.874.750	0	0.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8.835.000	3	2.208.750	2	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	110.000.000	3	43.650.000	3	11.929.530

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terasilitasi	100	Persen	408.771.000	98.67	400.871.000	98,07	323.400.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9	Unit	21.613.000	9	021.613.000	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	387.158.000	4	379.258.000	1	323.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terasilitasi	100	Persen	155.299.155	31.72	45.752.886	18.52	32.411.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.650.000	3	550.000	0	300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12.479.155	3	3.122.886	1	711.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13	Laporan	141.170.000	4	42.080.000	4	31.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100	Persen	96.380.000	35.54	32.957.548	30.90	15.145.574
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	83.800.000	2	28.440.048	3	15.145.574
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	18	Unit	83.800.000	3	4.517.500	3	0.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	Persen	73.170.000	27.44	15.434.640	18.31	6.584.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terpenuhi	100	Persen	29.768.000	24.90	4.042.000	2.46	0.00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	Laporan	29.768.000	1	4.042.000	0	0.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	Persen	43.402.000	29.18	11.392.640	29.18	6.584.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	43.402.000	4	11.392.640	2	6.584.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	76.786.000	30.68	22.191.250	17.54	11.572.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	76.786.000	30.68	22.191.250	17.54	11.572.000
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Kelembagaan Kemasyarakatan	12.774.000	2	12.774.000	2	11.572.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16	Laporan	64.012.000	3	9.417.250	0	0.00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	100	Persen	23.479.200	23.15	4.460.400	2.20	0.00

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang Terfasilitasi	100	Persen	23.479.200	23.15	4.460.400	2.20	0.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	3	Laporan	20.704.400	1	4.460.400	0	0.00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	0.00	0	0.00	0	0.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	100	Persen	134.762.000	20.91	22.110.000	18.34	17.440.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	134.762.000	20.91	22.110.000	18.34	17.440.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	170	Orang	30.756.000	0	0.00	0	0.00
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	74.184.000	1	14.206.000	1	13.540.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	29.822.000	1	7.904.000	0	3.900.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	Persen	42.038.800	24.91	10.142.000	11.97	0.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	42.038.800	24.91	10.142.000	11.97	0.00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	3.474.800	0	0.00	0	0.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	38.564.000	3	10.142.000	0	0.00

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya diataranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada Enam Program Empat Belas Kegiatan dan Tiga Puluh Tiga Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

4.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp. 2.926.257.055.00,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

4.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karna ada perbaikan target.

- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karna ada perbaikan target.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Karna perbaikan target.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor karna penambahan pagu untuk penambahan daya listrik di kecamatan.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karna penambahan pagu untuk mengakomodir kegiatan asistensi penyusunan dokumen renstra tahun 2025-2029, Dokumen SAKIP, Kegiatan Bunda Paud dan Kegiatan PKK.
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Karna penambahan pagu untuk pengadaan ac untuk ruangan yang belum tersedia dan aula baru.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adanya penambahan pagu untuk oprasional mobil dinas baru.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adanya penambahan pagu untuk perbaikan ruangan pelayanan.
2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Karna perbaikan target dan pagu di pindah ke kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat di sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. adanya perubahan pagu karna penambahan.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87 Indeks	87 Indeks	350,236,000	7.239.766.300	255.631.140	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Predikat SAKIP	80	BB	2.375.414.055	10.869.459.670	90.966.000	Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan Cintapuri Darussalam	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	78 Indeks	78 Indeks	2.375.414.055	10.869.459.670	90.966.000	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	5.600.000	5.600.000	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	3.500.000	3.500.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	2.100.000	2.100.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.605.040.000	1.605.040.000	0	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	140 Orang/ Bulan	1.544.900.000	1.544.900.000	0	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	41 Dokumen	55.200.000	55.200.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	780.000	780.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18 Laporan	18 Laporan	4.160.000	4.160.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	4.060.000	4.060.000	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.060.000	4.060.000	0	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	Efisiensi
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	4 Orang	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	160.263.900,00	150.115.900,00	(10.148.000)	Efisiensi dan Penambahan Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.154.000	22.506.000	20.352.000	Pembahan daya dan instalasi listrik kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.525.000	3.525.000	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.250.500	6.250.500	0	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.499.400	4.499.400	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8.835.000	8.835.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	104,500,000	(30.500.000)	Efisiensi dan Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	408.771.000	419.479.000	10.708.000	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	21.613.000	21.613.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	387.158.000	397.866.000	10.708.000	Penambahan untuk keperluan aula baru dan ruangan yang belum tersedia ac
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terfasilitasi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	155.299.155	155.299.155	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.650.000	1.650.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.479.155	12.479.155	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	141.170.000	141.170.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	96.380.000	194.100.000	97.720.000	Penambahan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	83.800.000	131.520.000	47.720.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	12.580.000	12.580.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0	50.000.000	50.000.000	Penambahan untuk perbaikan ruang pelayanan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	73,170,000	73,170,000	6.232.000	Pergeseran Anggaran
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terpenuhi	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	29.768.000	26.671.000	(3.097.000)	Pergeseran Anggaran
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	5 Laporan	29.768.000	26.671.000	(3.097.000)	dipindah ke subkegiatan lain
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	43.402.000	46.499.000	3.097.000	Penambahan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	43.402.000	46.499.000	3.097.000	Penambahan Anggaran dari subkegiatan lain
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	76.786.000	88.113.000	11.327.000	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	76.786.000	88.113.000	11.327.000	Penambahan Anggaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12.774.000	12.774.000	0	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	16 Laporan	64.012.000	75.339.000	11.327.000	Penambahan sesuai telaahan forum camat
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	23.479.200	23.479.200	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	23.479.200	23.479.200	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses						
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	20.704.400	20.704.400	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	2.774.800	2.774.800	0	-
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100 Persentase	100 Persentase	134.762.000	134.762.000	0	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	134.762.000	134.762.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti						
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses						
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan						
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	170 Orang	170 Orang	30.756.000	30.756.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia						
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	74.184.000	74.184.000	0	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	16 Dokumen	29.822.000	29.822.000	0	-
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	42.038.800	53.038.800	11.000.000	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	42.038.800	53.038.800	11.000.000	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti						
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses						
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.474.800	3.474.800	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	13 Dokumen	38.564.000	49.564.000	11.000.000	Penambahan sesuai telaahan forum camat

Sumber data: Inputan Perubahan Renja Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

LAMPIRAN

SK pembentukan tim

Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan (cetak SIPD RI)